

PERISTIWA CUMBOK DI ACEH

KRONOLOGI PERISTIWA CUMBOK:

- 1 Oktober 1945 Rakyat Aceh menghidupkan kembali radio dan mengetahui bahwasannya Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah diucapkan di Jakarta oleh Soekarno-Hatta.
- Akhir 1945 Ada berita yang menyatakan bahwa Kekaisaran Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan seluruh daerah jajahan yang diperoleh di dalam peperangan Asia Timur Raya segera akan dimiliki kembali oleh pemerintah yang berdaulat sebelumnya.
- Desember 1945 Peristiwa pembasmian pengkhianat tanah air karena yang melancarkan serangan pertama adalah pihak *uleebalang*, mereka merasa lebih kuat dan gerakan rakyat hanya bersifat reaktif belaka terhadap aksi mereka.
- 22 Oktober 1945 Konferensi *uleebalang* di Beureuoneen yang diadakan di rumah Teuku Umar Keumangan, seorang *uleebalang* yang tertua dan sudah masyhur kejahatannya menjadi sebagai preadviseur telah memberikan anjuran-anjuran kepada konperensi harus mempertahankan kekuasaannya dengan memakai cara-cara seperti yang telah dipakai waktu melawan Kerajaan Aceh yang dahulu dan membentuk tentara sendiri. Membentuk Markas *uleebalang* di Pidie.
- 25 Desember 1945 Markas *uleebalang* memulai tentaranya untuk menduduki dan menguasai kota Sigli, suatu kota yang penting dan dengan menguasainya mereka dapat memutuskan jalan per-hubungan antara seluruh organisasi perjuangan kemerdekaan di seluruh Aceh. Di tengah malam buta tentara liar mereka mulai masuk kota Sigli dan terus menduduki tempat-tempat strategis. Rakyat umum dan pemuda dilarang masuk kota. Tiada lama kemudian di luar kota rakyat yang ditahan tidak boleh masuk kota sudah beribu-ribu jumlahnya. Ketika itu kaum *uleebalang* sedang berusaha keras supaya tentara Jepang yang pada saat itu masih di dalam kota Sigli untuk segera menyerahkan senjatanya kepada mereka.

- 10 Desember 1945 Markas *uleebalang* mengadakan rapatnya di Lhungputu, menghasilkan keputusan untuk menangkap dan membunuh pemimpin-pemimpin pemuda dan organisasi perjuangan lain-nya dan tindakan-tindakan ini harus sudah selesai dijalankan pada tanggal 25 Desember 1945. setelah rapat selesai tentara mereka mengadakan manuver besar-besaran dengan memper-gunakan tembakan-tembakan karabijn, mitrailleur dan mortir yang menjadi sasaran mereka adalah rumah-rumah dan perkampungan rakyat. Machtsvertoon ini telah menimbulkan penderitaan yang tiada terhingga bagi rakyat.
- 22 Desember 1945 Terbentuknya Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) dengan kedudukan sementara di Garut. Keputusan ini disambut oleh seluruh rakyat dengan perasaan lega. Markas Besar Rakyat Umum mendapat bantuan moril dan materil yang sebesar-besarnya dari seluruh rakyat Aceh. Seluruh polosok Aceh dengan dengan berbagai cara datang untuk memberikan bantuan sukarela kepada Markas Besarnya.
- November 1945 Sejumlah besar penduduk kota Sigli yang menjadi pengikut *uleebalang* lengkap bersenjata pedang, rencong, dan beberapa pucuk bedil memasuki kota Sigli dan mengambil tempat di rumah Guncho Sigli dan di rumah *uleebalang* Sigli. Mereka mengadakan persiapan dengan menempatkan pengawal-pengawal di tempat-tempat strategis dan mengadakan pengawasan ketat atas lalu-lintas. Bukan sedikit jumlah pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan. Setiap orang yang dicurigai memihak kepada kelompok ulama, diperiksa dan ditahan.
- 8 January 1946 Sjamaun Gaharu atas nama Markas Umum Daerah Aceh dan T.P.P. Muhammad Ali atas nama Pemerintah Daerah Aceh mengeluarkan maklumat yang berbunyi: Golongan yang berpusat di Cumbok, Lammeulo dan tempat-tempat lain yang memegang senjata dan mengadakan perlawanannya kepada rakyat umum, mereka itu adalah pengkhianat dan musuh Negara Republik Indonesia. Diperingatkan kepada orang-orang yang sudah terpengaruh, terperosok, dan terperdaya oleh golongan pengkhianat itu supaya dengan segera menghindarkan diri dari golongan pengkhianat itu. Kalau tidak mereka itu akan dihukum dan menerima ganjaran menurut kesalahannya.
- 8 January 1946 Kolonel Sjamaun Gaharu atas nama Markas Umum Daerah Aceh dan T.P.P. Mohd. Ali atas nama Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh mengeluarkan ultimatum yang berbunyi: kepada golongan yang berpusat di Lammeulo dan tempat-tempat lain yang

- memegang senjata dan mengadakan perlawanan terhadap rakyat umum, supaya menyerah dan menghentikan perlawanannya, mulai hari kamis tanggal 10 January 1946. Kalau tidak mau menyerah dan menghentikan perlawanannya, maka mereka itu akan ditundukkan dengan kekerasan.
- 13 January 1946 Markas Cumbok dapat direbut, sisa-sisa pasukan dan pemimpin mereka sebagian melarikan diri ke gunung-gunung. Pada periode akhir 1945 – 1946 inilah terjadinya perang saudara di Kabupaten Pidie yang dikenal dengan Perang Cumbok yang berakhir dengan kekalahan pihak *uleebalang*.
- 16 January 1946 Tertangkapnya Teuku Daud Tjumbok, seorang pimpinan Markas *uleebalang* Cumbok yang melarikan ke gunung setelah peristiwa kegagalan mereka mempertahankan Markas Cumbok.
- 16 January 1946 Markas Besar Rakyat Umum mengeluarkan maklumat yang berbunyi: Pertempuran sudah selesai, karena kaum *uleebalang* yang dianggap pengkhianat tanah air sudah di-sapu bersih. Famili-Famili pengkhianat dan orang-orang kampung yang tidak berdosa tidak akan diganggu, rakyat yang baik mesti tinggal di tempatnya masing-masing. Barang siapa yang masih bersifat khianat dan melawan terhadap rakyat akan dijatuhkan hukuman mati. Dilarang keras merampok, menyembunyikan atau menggelapkan senjata api untuk kepentingan sendiri. Senjata api tersebut segera diserahkan kepada kantor Markas Besar Rakyat Umum.
- 17 January 1946 Markas Besar Rakyat Umum mengeluarkan maklumat penjelasan antara lain dikemukakan bahwa: sekarang dengan han-cur leburnya perjuangan dan perlawanan pengkhianat-pengkhianat dengan tertangkapnya kepala pengkhianat itu, mudah-mudahan rahmatlah bagi rakyat umum di Lam Meulo, Meureudu, Sigli dan sekitarnya dalam Negara Republik Indonesia yang juga melingkupi seluruh Aceh.
- 24 Juni 1946 Residen Aceh dengan resmi membentuk suatu Majelis Penim-bang yang mempunyai hak kehakiman yang berpusat di kota Sigli.
- 24 Juni 1946 T.T. Mohd. Daoedsjah stas nama Residen Aceh mengeluarkan Peraturan Tentang Menguasai atau memiliki Harta Benda Peninggalan Pengkhianat-Pengkhianat (Uleebalang Tjumbok) N.R.I. Daerah Aceh.
- 1 September 1947 Tgk. Muhammad Daud Beureueh diangkat sebagai Gubernur Militer Daerah Aceh, Kabupaten Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Jenderal Mayor.
- Agustus 1948 Munculnya Gerakan Sajid Ali c.s.
- 20 Agustus 1948 Dikeluarkan Maklumat Gubernur Sumatera Utara tentang Gerakan Sajid Ali c.s.

- 6 September 1948 Mr. S.M. Amin atas nama Gubernur Sumatera Utara
menge-luarkan maklumat, sebagai penegasan sikap
pemerintah ter-hadap *Cumbok Affair*.
- 3 November 1948 Pemerintah mengambil tindakan terhadap gerakan Said
Ali c.s.



BAB 1 **Pendahuluan**

Prang Cumbok: **Sebuah Revolusi Sosial di Aceh**

REVOLUSI Sosial yang terjadi di Aceh pada tahun 1946 adalah sebuah episode sejarah yang kelam, suatu awal sejarah konflik di Tanah Rencong yang penuh pergolakan ini. Revolusi sosial yang di Aceh sendiri sendiri sebagai “*Prang Cumbok*” adalah konflik berdarah antara kalangan *uleebalang* dengan ulama dalam mensikapi proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sejarah Aceh, setidaknya yang terlihat dari kasus “*Prang Cumbok*” sebagaimana akan dibahas dalam bab-bab buku ini, menghasilkan kategori kemanusiaan dalam periode pergolakan: di satu pihak ada pahlawan, di pihak lainnya terdapat pengkhianat. Sementara musuh dalam persepsi sosial-politik Aceh tetaplah *kaphe* (kafir) Belanda.¹ Ketika Belanda sudah bisa menguasai keseluruhan Aceh pada tahun 1904, Belanda mengambil salah-satu dari kelompok sosial politik Aceh untuk menjadi *counterpart* dalam menjalankan pasifikasi Aceh. Dan, yang kebetulan terpilih dalam opsi Belanda adalah kaum *uleebalang*. Maka, secara populer masyarakat Aceh dengan spontan memandang kaum *uleebalang* sebagai ‘pengkhianat’ dalam kategori sosial-politik mereka.

Hubungan *uleebalang* dengan Pemerintah Hindia Belanda merupakan suatu hubungan istimewa. Belanda memberikan dana kompensasi kepada para *uleebalang* di Aceh Besar.² Sebelumnya, Belanda juga memberikan imbalan hadiah kepada orang-orang yang sanggup menyerahkan pemuka (pejuang Aceh) hidup atau mati.³ Cumbok adalah sebuah wilayah yang mendapat perhatian khusus pihak Belanda.⁴ *Prang Cumbok* sudah menjadi bagian sejarah Aceh yang sudah ditulis oleh banyak orang.⁵ Banyak orang-orang

¹ Padahal, sesungguhnya banyak kaum *uleebalang* yang juga berjuang mati-matian memerangi Belanda (dan juga kemudian Jepang) bahu-membahu bersama kalangan ulama selama empat kali perang Aceh. Lihat Paul van't Veer, *Perang Aceh*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1985).

² Lihat indeks dokumen “Kab. Geheim 13 April 1888, Q5, ARAS” dalam M. Isa Sulaiman (et.al), *Belanda dan Aceh: Sebuah Bibliografi Sejarah*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan NAD, 2003), hlm. 17.

³ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴ Seorang Controleur Belanda, Spiering M, membuat sebuah catatan khusus tentang Cumbok (*Nota Betreffende het Lanschap Tjoembok* tertanggal 11 April 1937. Dokumen ini berisikan monografi (semacam catatan potensi wilayah atau desa atau kecamatan) Cumbok. *Ibid.*, hlm. 44.

⁵ Catatan bibliografis tentang Prang Cumbok misalnya Ismail Muhammad, *Kisah Prang Tjumbok* (1946); Tgk. Yahya Baden, *Prang Tjumbok* (1958); Sjejk Min Jeureulla, “Pengkhianat Bangsa”, *Poestaka Rakyat* 10 Mei 1946); Abdullah Arief Atjeh, *Riwayat Tjoembok*, dalam *Semangat Atjeh*, No. 5, (Kutaradja: Semangat Merdeka, 1946). Kisah ini kemudian menjadi semacam hikayat bagi masyarakat, yang menceritakan peperangan yang berlangsung antara golongan pemuda revolusioner dengan kaum *uleebalang* di Pidie sejak awal Desember 1945 hingga pertengahan Januari 1946. Lihat M. Isa Sulaiman (et.al), *Ibid.*, hlm. 62-63.

Aceh pun mengingat sejarah kelam itu dengan saling menyalahkan. Padahal, kesalahan semuanya haruslah dialamatkan kepada penjajah (Belanda dan Jepang) yang sudah menghancurkan tatanan sosial Aceh yang dulunya stabil dan tak pernah saling memerangi sesama bangsa Aceh.

Pecalah perang saudara di Aceh beberapa bulan sesudah Jepang menyerah. *Uleebalang* diserang ulama dan para pengikutnya-di seluruh Aceh. Menjelaskan pergolakan ini semata-mata dari segi pertentangan antara adat dan agama atau antara kaki tangan Belanda dan penganjur kemerdekaan Indonesia terlalu mudah. Dalam hal yang terdahulu terlalu tajam ditarik perbedaan antara adat dan agama, yang sesungguhnya keduanya dibayangkan sebagai Muslim dalam suatu masyarakat yang semua anggotanya mengaku menjadi Muslim. Suatu penggolongan dari kedua pihak yang berlawanan ke dalam suatu kelompok penganut bentuk Islam yang lebih murni dan lebih ketat serta suatu kelompok orang yang memiliki gagasan-gagasan yang lebih bid'ah sifatnya mungkin lebih kena tetapi masih tidak seluruhnya tepat. Demikian juga perbedaan antara pembela dan penentang perjuangan Republik, walaupun ada gunanya, tidaklah menjelaskan segala-galanya. Dalam konflik tersebut, motif ekonomi dan politik meskipun demikian memainkan bagian utama, dan sesungguhnya malahan lebih penting ketimbang motif keagamaan. Sesungguhnya ini sama sekali bukan konflik keagamaan, tetapi konflik politik dan sosial semata-mata.⁶

Bagaimanapun, melalui revolusi sosial kaum ulama secara pasti berhasil melenyapkan peranan sosial, politik, dan ekonomi kaum *uleebalang*. Dalam waktu dua bulan, yaitu Desember 1945 dan Januari 1946, kaum *uleebalang* benar-benar disingkirkan, sedangkan yang selamat diharuskan melepaskan hak-hak turun-temurun dan harta miliknya disita. Dalam waktu hampir tiga bulan kemudian semua *uleebalang* yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan sipil dan militer Republik Indonesia di Aceh dipaksa mengundurkan diri.

Jabatan-jabatan yang kosong karena ditinggalkan kaum *uleebalang* sebagian besar direbut kaum ulama, khususnya pemimpin-pemimpin PUSA. Barangkali demikian pula yang terjadi dengan tanah dan milik-milik lain kaum *uleebalang*. Jelas pemimpin-pemimpin Islamlah nyatanya, dan bukan rakyat banyak yang mendapat manfaat dari harta benda *uleebalang*. Tanah milik mereka dan hak-hak istimewa mereka dibagi antara para ulama yang berjaya ... suatu kelas adat feodal runtuh, kelas ulama menggantikannya.⁷

Dalam meninjau kembali, “revolusi sosial di Aceh tahun 1945”—demikian biasanya peristiwa itu disebut—sering dijadikan alasan dengan melukiskannya sebagai hukuman yang dikenakan pada para pengkhianat terhadap Republik Indonesia. Tetapi, ini hanya sebagian benar, karena mencap semua *uleebalang* sebagai lawan perjuangan kemerdekaan Indonesia tentu saja adalah pemutarbalikan kenyataan. Sesungguhnya, Belanda-lah yang telah mengakibatkan semua konflik bangsa Aceh hingga masa

⁶ B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (The Hague: Martunus Nijhoff, Verhandelingen KITLV, 1971) hlm. 70,3.

⁷ C. van Dijk, *Op.cit.*, hlm. 278.

kemerdekaan.⁸

Pada bulan-bulan pertama sesudah pernyataan kemerdekaan banyak *uleebalang* secara aktif menyokong Republik. Karena Pemerintah Republik, seperti juga Pemerintah Jepang dan Pemerintah Belanda sebelumnya, di Aceh mengharapkan *uleebalang* yang lebih berpendidikan dan lebih berpengalaman untuk mewakilinya, sesungguhnya, kaum *uleebalang*, mempunyai peranan penting pada tahap-tahap perjuangan kemerdekaan di sini. Gubernur Sumatera Republik yang pertama adalah Teuku Mohammad Hasan, yang mewakili Sumatera dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Residen Aceh yang pertama adalah Teuku Nya' Arif bekas pemimpin Organisasi F, yang kemudian digantikan, mula-mula secara tidak resmi dan pada Januari 1946 dengan resmi, oleh Teuku Mohammad Daudsjah. Wakil Residen Aceh di samping itu, pada bulan-bulan mula itu, adalah Teuku Panglima Polim Muhammad Ali, sedangkan Komite Nasional Aceh diketuai Tuanku Mahmud, anggota keluarga Sultan.

Akibat dari jabatan penting yang diduduki *uleebalang* dalam Pemerintahan Republik—yang masih belum sempurna—, langkah-langkah pertama untuk pembentukan Tentara Republik di Aceh juga mereka yang melakukannya. Kira-kira satu minggu sesudah proklamasi kemerdekaan, yang baru diketahui di Aceh pada 20 Agustus, Nya' Arif sebagai residen Aceh, mengundang perwira-perwira Gyugun, korps sukarelawan Indonesia yang dibentuk pada zaman pendudukan Jepang untuk membicarakan pembentukan Tentara Republik di sini. Kemudian, pada 27 Agustus terbentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Menurut komandan API yang pertama, Sjammaun Gaharu, sengaja dipilih kata pemuda. Jepang, yang bertanggung jawab untuk ketertiban umum, tidak akan mungkin mengizinkan pembentukan tentara. Kemudian, begitu keadaan jadi lebih menguntungkan, nama organisasi ini dapat diubah dari Angkatan Pemuda Indonesia menjadi Angkatan Perang Indonesia.⁹ Pada saat pembentukannya, markas besar API mengumumkan, API adalah merupakan "batu pertama Tentara Republik Indonesia" di Aceh. Dalam pengumuman yang sama rakyat Aceh diminta membentuk satuan-satuan bantuan guna membantu API dalam perjuangannya.¹⁰ Pada Desember 1945 API dengan resmi mengubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat, nama Tentara Republik ketika itu. Masih di bawah pimpinan Sjammaun Gaharu ia kemudian menjadi Divisi V Komando Sumatera.¹¹

Sementara itu badan-badan bersenjata lain juga terbentuk. Tetapi karena

⁸ Lihat Marlina M. Dahlan, *Keterlibatan Belanda dalam Menciptakan Konflik Antara Ulama dengan Uleebalang di Aceh (1874-1942)*, Skripsi Sarjana, (Banda Aceh: Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry, 2001).

⁹ Sjammaun Gaharu, "Perebutan Kekuasaan dari Tangan Djepang", dalam *Modal Revolusi 1945*, (Banda Aceh, 1960), hlm. 31.

¹⁰ JarahDam-I, *Dua Windhu Kodam I/Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, 1972), hlm. 83-84.

¹¹ Sekitar waktu yang sama Pemerintah Pusat mengangkat A. K. Gani menjadi koordinator Tentara Republik di Sumatera. Gani membentuk Markas Besar Umum di pulau itu dengan menugasi Suhardjo Harjowardojo. Sebagai kepala staf untuk Sumatera diangkat Mohammad Nur. Lihat A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, vol. 2, (Jakarta Seruling Masa, 1958) hlm. 110.

API mewakili Tentara Republik yang resmi, satuan-satuan bersenjata yang lain ini bergerak terlepas dari padanya, dan menjadi lasykar Aceh. Dua lasykar yang terpenting adalah *Mujahidin* (Pejuang di Jalan Allah) dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI).

Mujahidin dibentuk ulama-ulama Islam terkemuka sekitar waktu mereka menyatakan perjuangan melawan Belanda adalah perjuangan jihad. Komandannya yang teramat penting adalah Amir Husin al Mujahid, yaitu Amir Husin, Pejuang di Jalan Allah. Dia pula yang memimpin Pemuda PUSA sebelum Perang. Jelas Mujahidin organisasi PUSA dan ulama.

Warna politik dan sosial BPI lebih sulit menentukannya. Barisan Pemuda Indonesia adalah nama yang diberikan 6 November pada Ikatan Pemuda Indonesia (IPI), yang didirikan sebelumnya di Banda Aceh. Dalam suatu keterangan tentang lahirnya, pemimpin BPI A. Hasjmy menulis: "Pemuda dari Gyugun, Heiho, dan Tokubetsu Keisatsutai (Pasukan Polisi Khusus) membentuk API yang lain-lain membentuk IPI (Ikatan Pemuda Indonesia), yang kemudian menjadi BPI (Barisan Pemuda Indonesia), PRI (Pemuda Republik Indonesia), dan akhirnya Pesindo dengan Kesatria Divisi Rencongnya".¹² Tetapi Hasjmy tidak memperinci siapa" yang lain-lain itu. Keterangan tentang latar belakang para anggota BPI dalam sumber-sumber lain menunjuk dua arah yang berbeda. Laporan Belanda semasa itu, yang ditulis gubernur Sumatera ketika itu, kalangan *Uleebalang* merupakan 75% dari anggota PRI.¹³ Di samping API, juga terdapat Barisan Pemuda Indonesia, terutama sebagai hasil usaha orang PUSA.¹⁴ Dugaan bahwa BPI mungkin adalah organisasi PUSA diperkuat latar belakang pribadi komandannya, A. Hasjmy, yang sebelum Perang menjadi pemimpin Pemuda PUSA di Aceh Besar. Juga pemimpin-pemimpin BPI yang lain asalnya dari kalangan ulama Islam. Wakil-wakil kebawatannya umpamanya adalah: di Aceh Besar Tengku Abdul Jalil Amin, di Pidie Hasan Aly, di Aceh Utara Tengku Abdul Gani, di Aceh Timur Tengku Usman Peureula, dan di Aceh Barat Tengku Hasan Hanafiah, dan Tengku Muhammad Abduh.¹⁵ Akhirnya, pertemuan BPI yang pertama-tama sekali, pada waktu itu masih bernama IPI, dihadiri Amir Husin al-Mudjahid, antara lain.

Pesindo Aceh hanya namanya saja sama dengan kelompok Pesindo di bagian-bagian lain di Sumatera dan di Jawa, BPI atau PRI mengikuti saja ketika diputuskan di Jawa untuk mengubah nama organisasi itu menjadi Pesindo, tetapi tidak ketika Pesindo di tempat lain menempuh jalan kiri. Sebenarnya, pada pertengahan 1947 ia melepaskan diri dari organisasi induknya.¹⁶ Masih juga dinyatakan sekarang Pesindo Aceh terdiri dari

¹² Ali Hasjmy, *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agressi Belanda*, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1977), hlm. 56.

¹³ *Ibid.*, hlm. 51-59.

¹⁴ Nasution barangkali mencampurkan Barisan Pemuda Indonesia dengan Pemuda Republik Indonesia. Lihat A.H. Nasution, *tentara Nasional Indonesia*, vol. 1, (Jakarta Seruling Masa, 1956), hlm. 79.

¹⁵ Sumatera Utara, *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 30-31.

¹⁶ Perbedaan-perbedaan yang serupa timbul antara pengurus Pesindo dan cabang-cabang lokalnya di Sumatera Timur. Di sini pada awal 1947 Pesindo Pematangsiantar bentrok dengan pimpinan Pesindo Sumatera. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, vol. 1

golongan Muslim, sedangkan di daerah-daerah lain dipengaruhi Komunis.

Sumber senjata yang pokok bagi API, BPI, dan Mujahidin dan yang lain-lain adalah Jepang. Senjata diperoleh dengan berbagai cara dari mereka. Dalam beberapa hal orang Jepang secara perorangan dibujuk untuk menyerahkan senjatanya. Dalam hal-hal lain pejabat-pejabat sipil dan militer Jepang yang penting dikirim surat oleh sebuah organisasi yang menamakan dirinya Nicoi (kependekan dari Nihilis Commu-nisme Indonesia), tetapi yang sebenarnya merupakan bagian dari API. Mereka memperingatkan orang-orang itu bahwa, berdasarkan tindak-tanduk mereka di masa lampau, keamanan mereka tidak lagi terjamin kecuali pada perjalanan menuju dan pulang dari kerja. Kemudian hubungan telepon dengan rumah mereka diputuskan. Akhirnya, kelompok-kelompok pemuda akan mendatangi mereka meminta senjata mereka —tuntutan yang biasanya tidak bisa ditolak tanpa ada balasan.

Dalam hal-hal yang lain pula kelompok-kelompok kecil serdadu Jepang dipaksa menyerahkan senjatanya dengan cara yang hampir sama. Para pengikut API diperintahkan ke kota-kota kecil dan kota-kota besar ke tempat kediaman orang dan prajurit Jepang dalam kelompok-kelompok besar dengan membawa segala macam senjata —seperti tombak dan pedang— mengancam Jepang. Demi keselamatan nyawanya, orang Jepang pun memohonkan ampun kepada kelompok API, yang menjawab bahwa mereka tidak akan diapa-apakan, tetapi sebaliknya akan dilindungi dan diberi makan bila tuntutan mereka memberikan senjata dipenuhi. Dalam beberapa kejadian senjata harus direbut dengan paksa dari Jepang, sehingga terjadi perkelahian berhadapan-hadapan.¹⁷ Cara melucuti Jepang merupakan sebab langsung terjadinya konflik bersenjata antara golongan ulama dan *uleebalang*. Pertengkaran mengenai senjata yang telah direbut dari Jepang di Sigli pada akhir 1945 menimbulkan serangkaian peristiwa yang akhirnya mengakibatkan kejatuhan *uleebalang*.

Cerita-cerita tentang apa yang terjadi di Sigli saling bertentangan. Menurut sejumlah penerbitan Indonesia per-tempuran mulai sesudah satuan-satuan Tentara Republik Aceh dan lasykar berusaha melucuti sekelompok *uleebalang*, yang pada gilirannya telah memperoleh senjata dengan merebutnya dari Jepang. Versi ini dikemukakan dalam sebuah buku yang diterbitkan Pemerintah Daerah Aceh, berjudul Revolusi Desember '45 di Aceh atau Pembasmian pengkhianat Tanah Air.¹⁸ Menurut buku itu, sejumlah *uleebalang* tak lama sesudah Jepang menyerah, mulai mempersiapkan kembalinya Belanda dengan maksud memper-kukuh kedudukan mereka pribadi. Mereka membentuk organisasi politik mereka sendiri, Pembangunan Indonesia, dan tentaranya sendiri, Barisan Penjaga Keamanan.¹⁹ Komandannya adalah Teuku Daud Tjumbok, dari Desa Cumbok,

(Bandung: Disjarah AD dan Angkasa, 1977) hlm. 377-380.

¹⁷ Jarah Dam-I, *Dua Windhu Kodam I/Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, 1972), hlm 88-102.

¹⁸ Buku ini dikutip secara luas dalam Sumatera Utara, *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953).

¹⁹ Menurut laporan, Barisan Penjaga Keamanan ini terbagi dalam tiga bagian: Barisan Cap Bintang, tugasnya adalah untuk "melenyapkan mereka yang tidak mau tunduk kepada

dekat kota kecil Lammeulo, kira-kira 10 mil dari Sigli. Namanya juga disebut sebagai nama orang yang—melalui perantara seorang bekas serdadu KNIL, Sukarni, bersama dengan seorang Indonesia lain, yang bernama Ibrahim Pane—menghubungi bekas perwira distrik Belanda Van Swiet di Medan.²⁰

Sebaliknya, SM Amin yang ketika itu menjadi wakil gubernur dan ketika masa pemberontakan *Darul Islam* menjadi gubernur Sumatera Utara, "tidak terdapat fakta atau keadaan untuk membenarkan" tuduhan bahwa golongan *uleebalang* adalah pengkhianat.²¹ Ia menyebut, orang-orang yang bersimpati dengan tujuan kaum ulama Islam dan membela tindakan yang mereka lakukan terhadap golongan *uleebalang* biasanya suka menyebut adanya sepucuk surat dari golongan *uleebalang* di Pidie kepada Belanda di Medan minta bantuan kepada mereka. Surat ini kata orang tertangkap prajurit-prajurit Pesindo (BPI) yang memeriksa penumpang-penumpang kereta api di Bireun. Menurut keterangan yang sama, orang-orang yang membawa surat itu berusaha memusnahkannya dengan menyobekinya. Tetapi prajurit-prajurit Pesindo sempat mengetahui isinya dengan menyusun sobekan-sobekan itu kembali. Namun, mereka yang mengemukakan peristiwa itu hanyalah mengetahuinya dari omongan orang, dan tidak pernah melihat surat itu. Selanjutnya mungkin saja cerita tentang hubungan Daud Tjumbok dengan Belanda belakangan dibuat.

Pertempuran di dan sekitar Sigli mulai sebagai salah satu dari banyak contoh dalam sejarah Republik Indonesia mengenai kelompok-kelompok bersenjata bersaing yang saling berusaha memaksakan kekuasaannya dalam suatu daerah tertentu. Dalam tahap yang paling awal yang menjadi saingan pokok adalah Barisan Penjaga Keamanan dan kelompok BPI/Pesindo, yang terlibat dalam pertempuran kecil-kecilan sekitar Lammeulo, benteng Daud Tjumbok. Satuan-satuan Tentara Republik tidak turut serta dalam pertempuran ini, tak ada prajurit Republik yang ditempatkan dekat Lammeulo, karena pimpinan Tentara sadar sepenuhnya akan kekuatan Barisan Penjaga Keamanan dan khawatir kalah sekiranya terjadi bentrokan bersenjata.²² Terjadi pertempuran hebat sesudah Barisan Penjaga Keamanan meninggalkan Lammeulo maju menuju Sigli dengan tujuan merebut senjata dari Jepang—walaupun musuh-musuh mereka menuduh mereka mempunyai alasan yang lain pula; karena menguasai Sigli berarti menguasai semua jalan raya di Aceh Utara dan kepastian adanya pangkalan mendarat bagi pasukan penyerbu Belanda²³— dan terus menduduki posisi-posisi strategis dalam kota.

kekuatannya yang unggul". Barisan Cap Saud yang bertugas "merampas harta benda orang-orang yang menjadi anggota gerakan kemerdekaan guna membiayai barisan", dan Barisan Cap Tombak, yang bertugas "menangkap para cendekiawan untuk dipenjarakan atau ditembak mati, dan menculik gadis-gadis" yang menjadi anggota gerakan kemerdekaan. Lihat *Revolusi Desember '45 di Atjeh atau Pembasmian Pengkhianat Tanah Air*, (Kutaradja: Pemerintah RI Daerah Atjeh, t.t.), hlm. 17.

²⁰ Sumatera Utara, *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 64.

²¹ S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 13.

²² *Revolusi Desember '45 di Atjeh atau Pembasmian Pengkhianat Tanah Air*, (Kutaradja: Pemerintah RI Daerah Atjeh, t.t.), hlm. 17-18.

²³ *Ibid.*, hlm. 19-23.

Kelompok-kelompok bersenjata lainnya, termasuk satuan-satuan Tentara Republik, tidak dapat membiarkan adanya suatu tentara saingan, apalagi tentara yang dengan memper-oleh senjata Jepang menjadi terlalu lengkap persenjataannya. Mereka sendiri pun mengepung Sigli dalam upaya melucuti Barisan Penjaga Keamanan. Akibatnya, pasukan Jepang di Sigli menghadapi dua pasukan yang saling bertentangan, masing-masing mendesak mereka menyerahkan senjata mereka. Di dalam kota sendiri golongan *uleebalang* yang mendesak mereka. Satuan-satuan Tentara Republik dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya yang berkubu sekitar Sigli seluruhnya berusaha membujuk Jepang untuk menyerahkan senjata mereka kepada wakil-wakil Pemerintah Republik di Aceh ketimbang kepada *uleebalang* serta mengancam kalau tidak, mereka akan menyerang Sigli. Kelompok-kelompok bersenjata lainnya ini, seperti juga pada kesempatan-kesempatan lain bila mereka ingin merebut senjata-senjata Jepang, memerintahkan para anggotanya secara massa ke Sigli. Di sini mereka merupakan ancaman baik bagi Jepang maupun bagi *uleebalang*.

Untuk mencegah senjata Jepang jatuh ke dalam tangan *uleebalang*, akhirnya rakyat datang dalam jumlah ratusan ribu dan, karena mereka tidak bisa memasuki kota, mengepungnya dari segala jurusan, sehingga kemudian tentara *uleebalang* yang menduduki kota tampaknya jadi terkurung oleh ratusan ribu rakyat dan pada akhirnya tidak berani meninggalkan kota.²⁴ Ketika pihak *uleebalang* berusaha menerobos lingkaran pengepungan, dengan menem-baki musuh dengan karaben serta senapan mesin, pecahlah pertempuran. Beberapa waktu kemudian diserukan gencatan senjata. Maka Tentara Republik memperkenankan Barisan Penjaga Keamanan mundur ke Lammeulo dengan syarat mereka menyerahkan semua senjata yang mereka ambil dari Jepang kepadanya. Barisan Penjaga Keamanan meninggalkan Sigli, tetapi tanpa menyerahkan senjata mereka. Menurut keterangan dalam "Revolusi Desember",²⁵ sebenarnya mereka mundur ke Lammeulo membunuh dan merampok sepanjang perjalanan. Setibanya di sana mereka mulai menyerang anggota-anggota kelompok-kelompok bersenjata lainnya, khususnya BPVPesindo, dan mereka berusaha menduduki desa-desa sekitarnya.

Dalam pada itu Markas Besar Rakyat Umum didirikan kelompok-kelompok bersenjata lainnya pada 22 Desember 1945. Lalu markas besar ini mengkoordinasi operasi-operasi Tentara Republik, BPI/Pesindo, dan Mujahidin antara lain. Sejumlah partai politik, seperti PNI, PKI, dan PSI juga turut serta. Markas Besar Rakyat inilah yang dalam pernyataan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh, pertama-tama menyatakan golongan *uleebalang* pengkhianat Republik Indonesia, dan pada 8 Januari 1946. mengeluarkan ultimatum yang ditandatangani Teuku Panglima Polim Muhammad Ali dalam kedudukannya sebagai wakil residen Aceh dan Sjammaun Gaharu sebagai ketua Markas Besar Rakyat, menuntut agar para *uleebalang* di Lammeulo menyerah sebelum tengah hari 10 Januari. Ketika jangka waktu ini lewat, Lammeulo diserang dan tiga hari kemudian diduduki,

²⁴ Penulis-penulis "Revolusi Desember" melukiskan keadaan demikian. *Ibid.*, hlm. 20-21.

²⁵ *Revolusi Desember '45 di Atjeh atau Pembasmian Pengkhianat Tanah Air*, (Kutaradja: Pemerintah RI Daerah Atjeh, t.t.), hlm. 21-22.

dengan demikian mengakhiri permusuhan yang berlangsung dua puluh dua hari. Daud Tjumbok lari, tetapi beberapa hari kemudian tertangkap dan dibunuh. Untuk memperingati pertempuran ini, Lammeulo diberi nama Kota Bakti.

Pertempuran sekitar Lammeulo merupakan tanda awal pengejaran *uleebalang* di seluruh Aceh. Banyak mereka yang terbunuh dan yang lain-lain dipenjarakan atau masuk dalam tahanan perlindungan. Namun, pejabat-pejabat tampuk Pemerintah Daerah dan Tentara Republik Aceh—yang untuk sementara waktu mendukung aksi-aksi terhadap *uleebalang* di Lammeulo—pada waktu itu tidak dibebastugaskan. Pemerintah Republik Pusat, yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi di Aceh, sesungguhnya bahkan memperkuat kedudukan mereka. Karena pada Januari Teuku Nya' Arif lalu diangkat pada staf markas besar Tentara Republik di Sumatera dengan pangkat mayor jenderal dan bersamaan dengan itu menjadi "organisor dan koordinator" Tentara Republik di Aceh. Selanjutnya kedudukan Sjammaun Gaharu dikonsolidasikan sebagai panglima Divisi V (Aceh) dengan menjadikannya kepala pertahanan untuk Aceh.

Teuku Nya' Arif dan Sjammaun Gaharu ternyata tidak ditakdirkan lama memegang jabatan ini. Pada Maret 1946 jabatan-jabatan ini direbut Amir Husin al Mujahid dan Mujahidannya. Kup Amir Husin al Mujahid didahului dan digerakkan pemberontakan *uleebalang* sekitar Lhokseumawe di Aceh Utara dan sekitar Langsa di Aceh Timur Februari. Sesudah pemberontakan-pemberontakan ini ditumpas sebagian besar *uleebalang*—yang sejauh ini luput dari maut atau penjara ditahan.²⁶

Tak lama sesudah ini satuan-satuan Mujahidin—kira-kira seribu orang semuanya—berbaris menuju Banda Aceh, hendak menghadap markas besar Tentara Republik Divisi Aceh. Amir Husin al Mujahid merasa, masih terlalu banyak anggota elite tradisional dalam pemerintahan, dan dimu-lainyagerakan untuk membasmi habis mereka di tempat kediamannya, Idi, tempat ia membentuk Tentara Perjuangan Rakyat.²⁷ Mulai hanya dengan beberapa orang, tentara ini kian bertambah ketika berbaris sepanjang pantai menuju Banda Aceh. Menurut "insider" (SM Amin), tentara ini membunuh atau menangkap tiap orang yang ditemukan dalam perjalanan mereka, yang diduga tergolong elite tradisional.

Negara-negara kebangsaan, seperti halnya dengan Indo-nesia, umumnya mudah menjurus pada ketimpangan-ke-timpangan serius akibat ikatan-ikatan primordial. Ikatan primordial yang dimaksudkan, seperti yang dijelaskan oleh Geertz, adalah perasaan yang lahir dari yang cukup berada dalam kehidupan sosial sebagian besar dari hubungan langsung dan hubungan keluarga, tapi juga meliputi keanggotaan dari lingkungan keagamaan tertentu, bahasa tertentu, atau dialek tertentu serta kebiasaan-kebiasaan sosial tertentu yang kesemuanya memiliki kekuatan yang meyakinkan.

Beberapa waktu lalu, Presiden Soeharto berkali-kali menyampaikan ungkapan keprihatinannya atas munculnya kecenderungan beberapa

²⁶ Revolusi, *Ibid.*, 30-31.

²⁷ Insider (S.M. Amin), *Atjeh Sepintas Lalu*, (Jakarta: Archapada, 1950), hlm. 20.

kelompok tertentu yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Kelompok primordial yang berkepentingan dalam delik ideologis adalah kelompok agama. Kalau kelompok primordial etnis atau kedaerahan mempertajam adanya konflik karena secara geografis negara kebangsaan tidak bersambungan, maka kelompok primordial agama bisa melewati batas geografis ini.

Tujuan pembangunan politik yang semula adalah untuk: menciptakan adanya integrasi, mengarah kepada integrasi semu yang lebih mirip agregasi. Bukannya ber-usaha menghilangkan perbedaan, dan tetap potensial untuk konflik politik.

Apalagi sulitlah dipisahkan antara kelompok primordial dan kelompok politik, yang apabila sempat muncul ke permukaan sebagai konflik (baik fisik maupun non-fisik), tidak mudah untuk diselesaikan. Sulit dicari jalan keluarnya, sulit diharap adanya konsensus dari suasana seperti ini. Belum lagi terdapat akumulasi kekecewaan dikalangan rakyat di negara ini, seperti; kecemburuan sosial, kurangnya jaminan negara atas keselamatan masyarakat yang diliputi rasa takut akan kriminalitas yang berkembang, ketidakpuasan ekonomi dari kasus-kasus unjuk rasa buruh, ketidakpuasan psikologis atas persoalan politik di tingkat elite yang diselesaikan peme-rintah dengan setengah hati, dan lain-lain. Inilah tantangan yang harus kita hadapi sebagai bangsa, yang ingin mempertahankan persatuan dan kesatuan.²⁸ ***



²⁸ Al Chaidar, "Primordialisme dan Negara-Negara Kebangsaan", *Kompas*, 07 Mei 1994, hlm. 4.

Bab 2

ACEH DI BAWAH KEKUASAAN BELANDA: KEDUDUKAN ULEEBALANG DALAM STRUKTUR POLITIK KOLONIAL

Asal Mula Golongan Uleebalang

Uleebalang berasal dari bekas raja-raja yang menguasai kerajaan-kerajaan kecil sebelum terbentuknya konfederasi Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-XVI.²⁹ Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1514, pada awalnya daerah kekuasaannya hanya meliputi Aceh Besar dan Daya. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Mughayat Syah. Ia memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Pidie pada tahun 1521, menyusul pada tahun 1524, Pasai, Aru, Perlak, Tamiang, dan Lamuri. Hingga menjadi sebuah Konfederasi Kerajaan Aceh Darussalam.³⁰ Terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam kita dihadapkan dengan beberapa versi, tetapi pada bab ini penulis hanya ingin mengungkapkan *Bustanus Salatin* yang menyebutkan Sultan Mughayat Syah sebagai raja atau Sultan Aceh yang pertama. Ia mendirikan Kesultanan Aceh dengan tujuan untuk melanjutkan dan mengganti beberapa kerajaan Islam sebelumnya, seperti Pasai, kemudian Malaka yang jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, dan mempersatukan dua kerajaan kecil, Mahkota Alam dan Darul Kamal, pusat pemerintahan adalah Bandar Aceh Darussalam, yang disebut juga Kuta Raja.³¹

²⁹ Lihat Abdul Hadi Arifin, *Malikussaleh*, (Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press, 2005).

³⁰ Fadhlullah Jamil M.A, "Kerajaan Aceh Darussalam dan Hubungannya Dengan Semenanjung Melayu", dalam Ali Hasjmi, (ed.), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: Al-Maarif, 1981), hlm. 231-232.

³¹ Lihat Siti Hawa Saleh, (ed.), *Bustanus as-Salatin*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992).

Pada tahun 1521 Kerajaan Aceh diserang oleh armada Portugis yang dipimpin oleh De Britto, tetapi dikalahkan oleh Sultan Mughayat Syah. Sembilan tahun kemudian sultan Aceh itu pun wafat pada 5 Agustus 1530. Sepeninggalnya, kerajaan diperintah oleh putranya, Sultan Shalahuddin, yang bersikap lunak dan memberi peluang kepada misionaris Portugis untuk bekerja di tengah orang-orang Batak di daerah pantai timur Sumatera. Ia juga dipandang kurang memper-hatikan urusan pemerintahan. Pada akhirnya kedudukan Sultan Shalahuddin sebagai raja diganti oleh saudaranya, Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Qahhar.³² Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar (1537 M), Kerajaan Aceh Raya Darussalam telah membuka kedutaannya di luar negeri, antara lain: India, Parsi, Turki, dan Tiongkok. Khususnya dengan Sultan Salim II yang memerintah Kekhalifahan Turki Utsmaniah, kekhalifahan itu telah mengirim 400 orang ahli pembuat meriam ke Aceh yang ditempatkan di Kampung Pande, Aceh Besar. Ia pun mendatangkan ulama-ulama dari India dan Persia untuk mengajarkan ajaran Islam, mendirikan pusat Islam di Ulakan, dan membawa Islam ke Minangkabau dan Indra Pura. Sultan Al-Qahhar wafat pada tanggal 28 September 1571.³³

Selanjutnya Kesultanan Aceh dilanda kemelut yang berlarut-larut dengan adanya perebutan kekuasaan. Pernah terjadi hanya dalam tiga bulan terjadi pelantikan dan pember-hentian tiga orang sultan. Bahkan Sultan Zainul Abidin, mati terbunuh pada tanggal 5 Oktober 1579. Kerajaan Aceh menjadi stabil kembali setelah tampuk kekuasaan dipegang oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Sayid al-Mukammal (1589-1604) yang lebih dikenal dengan Sayid al-Mukammal, setelah ia wafat selanjutnya kepemimpinan Kerajaan Aceh diteruskan oleh keturunannya yaitu Sultan Riayat Syah. Kehidupan pun terus berlangsung sampai Aceh mengalami masa kejayaan dan kemakmuran pada masa Sultan Iskandar Muda.³⁴

Sultan Iskandar Muda (1607-1636), sebagaimana diungkap dalam Kitab *Bustanu-salatin*, dinobatkan pada awal April 1607.³⁵ Maskapai Perancis pada tahun 1619 pernah datang ke Kerajaan Aceh Raya Darussalam, 3 buah kapal Perancis yang dipimpin oleh Agustin de Blaulieu, kapal yang dibawa antara lain: *De Motmorency*, yang beratnya 450 ton memuat serta 126 awak, 22 meriam, *De Esperance*, 400 ton, 117 awak, 26 meriam, *De Hermi Toge*, 75 ton, 50 awak, 26 meriam. De Blaulieu datang ke Kerajaan Aceh Raya Darussalam dalam misi dagang dan disambut pihak Aceh dengan baik. Setelah Blaulieu membayar cukai 80 *piaster* baru dibolehkan turun dan membayar sewa tempat menginap 50 *piaster*, setelah itu baru ia menghadap Sultan Iskandar Muda dan menyerahkan surat dari Raja Perancis, beserta surat itu ia menyerahkan bingkisan yang berharga sangat tinggi, yaitu 1 *steel* pakaian militer pangkat tinggi lengkap dengan senjata buatan Jerman, 6 pucuk

³² Wan Hussein Azmi, "Islam di Aceh Masuk dan Berkembangnya Hingga Abad XVI", dalam Ali Hasjmi, (ed.), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: Al-Maarif, 1981), hlm. 214.

³³ Fadhlullah Jamil M.A, "Kerajaan Aceh Darussalam dan Hubungannya Dengan Semenanjung Melayu", *Op.cit.*, hlm. 232-236.

³⁴ *Ensiklopedi Islam*, 1-5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).

³⁵ Lihat Siti Hawa Saleh, (ed.), *Bustanus as-Salatin*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992).

senapan, pistol, pedang dan lain-lain.³⁶

Pada masa diperintah oleh Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam diperintah dengan sangat ketat. Para bangsawan kerajaan dikontrol dengan keras oleh Iskandar Muda. Mereka diharuskan ikut jaga malam di istana setiap tiga hari sekali tanpa membawa senjata. Setelah semua terkendali, Iskandar Muda memegang kendali terhadap produksi beras. Di masanya, Kerajaan Aceh Darussalam meng-ekspor beras keluar wilayah. Ia memperketat pajak kelautan bagi kapal-kapal asing, mengatur kembali pajak perdagangan (saat itu banyak pedagang Inggris dan Belanda berada di Aceh), bahkan juga mengenai harta untuk kapal karam. Untuk militer, Iskandar Muda membangun angkatan perang yang sang kuat. Beaulieu mencatat jumlah pasukan darat Aceh sekitar 40 ribu orang. Untuk armada laut, diperkirakan Aceh memiliki 100-200 kapal, diantaranya kapal selebar 30 meter dengan awal 600-800 orang yang dilengkapi tiga meriam. Ia juga mempekerjakan seorang Belanda sebagai penasihat militer yang mengenalkan teknik perang bangsa Belanda dan Perancis. Benteng Deli dijebol. Beberapa kerajaan di-taklukkan seperti Kerajaan Johor (1613), Kerajaan Pahang (1618), Kerajaan Kedah (1619), serta Kerajaan Tuah (1620). Iskandar Muda wafat pada 27 Desember 1636.³⁷ Setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kemerosotan demi kemerosotan yang menghasilkan bencana politik yang menyedihkan.

Perang Aceh 1873-1913

Penjajahan kolonial Belanda adalah suatu bencana politik bagi agama (Islam) di Aceh. Sejak tahun 1879 hingga 1913, Belanda melancarkan perang habis-habisan di Aceh yang kemudian dikenal dengan Perang Aceh-Belanda. Sejarah Aceh adalah rangkaian kisah tentang heroisme. Ungkapan ini terlihat nyata, umpamanya dengan membaca pahatan tulisan di atas prasasti batu yang terpacak di samping kanan halaman Masjid Raya Banda Aceh. Bunyinya: "Mayor J.H.R. Kohler tewas dalam memimpin penyerangan terhadap Masjid Raya Baiturrahman, 14 April 1873." Kedatangan Jenderal Kohler yang didukung oleh pernyataan resmi Kerajaan Belanda, yang dengan resmi menyatakan perang kepada Kerajaan Aceh Darussalam pada tanggal 26 Maret 1873, dan kemudian pada 5 April 1873 Angkatan Perang Belanda dibawah pimpinan Jenderal Kohler menyerang kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam dengan 3.800 serdadu yang dilengkapi dengan perlengkapan perang yang sangat modern pada masa itu. Sekalipun kondisi perlengkapan perang yang tidak seimbang, tetapi penyerangan Kohler ternyata hanya berumur 9 hari dalam menggempur bangsa Aceh, kekalahan itu amat telak di mana sang jenderal Belanda sebagai panglima perang terkapar oleh kesigapan bangsa Aceh yang memang berpengalaman juga dalam hal peperangan, sebagaimana Iskandar Muda menghancurkan Portugis. Angkatan Perang Belanda yang mendarat di Pantai Ulee Lheue, setelah 18 hari pertempuran berlangsung, serdadu-serdadu Belanda kocar-kacir meninggalkan medan

³⁶ Lihat Denys Lombard, *Kerajaan Aceh, Jaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, (terj.), (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

³⁷ Lihat Denys Lombard, *Kerajaan Aceh, Jaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, (terj.), *ibid.*

perang pada hari-hari di awal peperangan. Di pihak Belanda, Letnan Kolonel Van Tiel tewas, mendahului Jenderal Kohler yang kemudian menyusul tewas terkapar dengan dada kirinya tertembus peluru di Masjid Baiturrahman.³⁸

Kenangan tragis atas kematian Kohler yang terkapar di bawah pohon *Glumpang* itu masih lekat kuat dalam benak orang Aceh sampai kini. Bahkan, beberapa bagian pokok pohon yang oleh orang awam di sana disebut *Pohon Kohler* (Kohler Boom)—pohon aslinya ditebang tahun 1936 hingga sekarang utuh tersimpan di museum Aceh. Kohler mati sia-sia. Sosoknya oleh orang Aceh hanya dikenang sebagai jen-deral gila perang dan tukang jagal manusia. Keberwiraan orang Aceh dalam bertempur memang sulit terbantahkan. Sejarah Perang Aceh. menorehkan catatan bahwa selain me-makan korban penduduk Aceh hingga 70 ribu orang, sekitar 37.500 orang Belanda beserta empat jenderalanya pun ikut tewas.³⁹

Kegagalan Belanda dalam mengagresi Aceh yang dipimpin Jenderal Kohler, semakin dijadikan titik tolak untuk mela-kukan tindakan perlawanan peperangan lebih lanjut, hingga kemudian Belanda mempersiapkan 7.000 tentaranya yang juga ditopang dengan informan “mata-mata” yang direkrut Belanda yang berasal dari bangsa Cina, India, Arab, dan juga Hindia-Belanda sendiri. Dan gelombang agresi kedua ini, Angkatan Perang Belanda mendarat di Kuala Gieging pada 11 Desember 1873, di bawah pimpinan Jenderal Van Swieten, seorang panglima perang yang cukup senior yang memiliki cukup banyak pengalaman perang, di antaranya ia telah ikut serta dalam perang Dipenogoro di Jawa dan juga perang melawan Napoleon Bonaparte di Eropa. Sebelas hari kemudian setelah pendaratan dan penyerangan, kemudian Belanda pada tanggal 22 Desember 1873 telah bermarkas di Penayang (sebelah timur kali Aceh). Kemudian, dari markas di Penayang itulah Van Swieten berkirim surat kepada Sultan Aceh Mahmud Syah II untuk mengada-kan perjanjian dan pengakuan bahwa Aceh berada dalam kekuasaan Belanda. Sultan Mahmud Syah II, dengan dibantu oleh Panglima Perang Tuanku Bangta Muda menolak permintaan Belanda tersebut, dan kemudian terjadi perlawanan yang sangat hebat, dan Belanda berhasil menguasai Masjid Baiturrahman juga berhasil menguasai istana, dan sultan menyingkir ke luar kota hingga pada 26 Januari 1874, beliau wafat di Desa Pagar Air, karena serangan kolera.⁴⁰

Setelah wafatnya Sultan Mahmud Syah II, kemudian dengan melalui mekanisme musyawarah para pembesar Ne-gara Kerajaan Aceh Raya Darussalam dan para ulama di Masjid Indra Puri, diangkatlah Tuanku Muhammad Daud se-bagai sultan, dengan gelar Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah II. Karena beliau masih muda, kemudian untuk men-jalankan roda pemerintahan yang kala itu perang sedang ber-kecamuk dan Istana telah dikuasai Belanda, Sultan dibantu sepenuhnya oleh Panglima Tuanku Hasyim Bangta Muda. Dan kesemuanya setelah membenahi tatanan pemerintahan dan tatanan militer sepeninggal Sultan Mahmud Syah II, melalui mekanisme

³⁸ Lihat Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial*, (terj.), (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985).

³⁹ B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (Amsterdam: De Nederlandsche, Book , 's-Gravenhage, 1970).

⁴⁰ S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soerongan, 1956).

syura juga, mereka bertekad untuk melanjutkan perjuangan. Dan pada beberapa waktu kemudian, berkumpul juga untuk bermusyawarah sejumlah 500 orang para ulama dan pembesar negeri Aceh Raya Darussalam, dan dari per-musyawaratan itu diputuskan bahwa Aceh dalam keadaan perang suci, menghadapi kafir Belanda yang memang punya semangat perang dengan motivasi menebus kekalahan perang salib dan penguasaan wilayah-wilayah Islam. Dari permu-syawaratan tersebut kemudian menetapkan dan meng-ikrarkan wajib *perang sabil*.⁴¹

Perang Sabil, yang lazim dalam istilah Islam adalah *jihād fi sabilillah*, yakni suatu perjuangan untuk menegakkan dan mempertahankan kemurnian Islam dari aksi kelanjutan perang salib yang dikobarkan di Eropa pada awal abad ke-11, yang berorientasi kepada banyaknya korban itu jelas mem-buat Belanda putus asa. Catatan-catatan buku peninggalan komandan perang Belanda di Aceh juga menunjukkan betapa mereka memuji ketangguhan tentara Aceh. Bahkan, mereka juga menuliskan bahwa keliatan tempur musuhnya itu setaraf dengan pasukan Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte. Pang Nanggroe, ulama besar yang oleh orang Aceh dihormati seba-gai orang keramat dan kebal senjata, oleh pasukan Marsose yang tergabung dalam Brigade Mosselman sangat dikenal sebagai ahli penyamaran dan jebakan. Dan, dalam catatan komandan brigade ini tampak jelas kepiawaian pejuang Aceh tak kalah canggih dengan kecerdikan gerilyawan Vietkong ketika melawan tentara Amerika Serikat di akhir dekade 60-an lalu.

Bukti lain liatnya orang Aceh dapat pula ditenggarai dari penggalan surat 'sangat rahasia' Gubernur Jendral Aceh, C. Deykerhoff, No. 559/K tertanggal 17 Juli 1893. Surat yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia itu menceritakan pengalaman pribadinya sesudah dua puluh tahun bertugas di Aceh. C. Deykerhoff menulis begini:

"Jika kita sangat kuat dan berhadapan dengan lawan yang mahir menggunakan taktik, mempunyai basis dan garis operasi, mempunyai tempat-tempat perbekalan yang berhubungan dengan tempat-tempat strategis seperti pasukan kita, maka hal ini tidaklah sukar. Tapi jika kita harus dihadapkan kepada penduduk bersenjata yang menghadapi kita secara gerilya sejati, menghilang tanpa meninggalkan bekas jika digempur, inilah suatu pekerjaan yang mahasukar."

Melihat keruwetan tersebut pemerintah Kolonial Belanda kemudian mem-tuskan segera menyelundupkan pakar sosiologi keagamaan, Christian Snouck Hurgronje. Snouck adalah seorang antropolog yang brilian. Ia bukan penghancur Islam, namun dengan ilmu antropologinya ia mampu mem-persembahkan kemenangan bagi Kerajaan Belanda terhadap Aceh. Ia juga melarang *missie* dan *zending* penyebaran agama Kristen dan Katholik di Aceh. Dia menentang keras kristenisasi. Namun, hasil awal dari rekomendasinya memang cukup efektif. Nasihat tokoh sedikit banyak menghasilkan persepsi baru bagi kebijakan pemerintah kolonial dalam 'men-jinakkan' orang Aceh. Pemanfaatan keahlian Snouck Hur-gronje itu memang efektif. Sekitar empat tahun kemudian tensi gejolak perlawanan rakyat menurun. Dan, keadaan aman ini sangat masuk akal, utamanya ketika tokoh perla-wanan Aceh,

⁴¹ Lihat Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Waspada, 1981)

Teuku Umar, bersedia berdamai atau bekerja sama secara sementara dengan pemerintah Belanda.

Namun, beberapa waktu kemudian, keadaan itu malah menjadi sebaliknya. Perlawanan rakyat meletus kembali dan bertambah ganas. Teuku Umar berbalik arah. Belanda kerepotan. Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun mendapat surat teguran dari pihak pemerintahan Kerajaan Belanda karena Aceh tetap tidak bisa ditundukkan. Mengamankan Aceh, begitulah isi ringkas surat Ratu Belanda yang ditujukan kepada pihak Gubernur Hindia Belanda di Batavia. Perintah itu segera ditindaklanjuti. Dan, di dalam inspeksinya ke Aceh, sang Gubernur Jenderal mendapati rumah penjara para pembe-rontak ternyata telah tidak berpenghuni. Dan, ketika ditanya ke mana perginya para penghuni, pihak gubernur mengatakan mereka telah lama dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Itu dilakukan menurut saran Dr. Snouck Hurgronje untuk memasukkan para tahanan ke rumah sakit jiwa yang dibangun khusus. Tampaknya Hurgronje pun frustrasi sehingga menganggap orang-orang Aceh sakit jiwa karena tidak takut mati.

Sikap berani mati yang tumbuh selama perang melawan *kaphe* (kafir) Belanda itulah yang sampai kini terpatri kuat di dalam benak rakyat Aceh. Mati membela nilai agama dan melawan kebatilan bagi mereka berarti syahid. Dan, landasan keagamaan yang paling populer di dalam melakukan perlawanan adalah al-Qur'an surat IV, ayat 76: "Lantaran itu hendaklah mereka yang menjual akhirat dengan penghidupan dunia, berperang pada jalan Allah, karena barangsiapa berperang pada jalan Allah lalu terbunuh atau menang, maka Kami akan beri kepadanya ganjaran yang besar."

Kobaran semangat *jihād fī sabīlillāh* akan semakin jelas bila merujuk pada hikayat perang yang biasa didendangkan rakyat Aceh. Dan, beberapa bait isi Hikayat tersebut di antaranya adalah seruan untuk bangkit dan pergi berperang melawan orang-orang kafir Belanda. Dan, bila enggan berperang maka Allah sudah menyediakan azab yang sangat pedih. Berikut salah satu cuplikan bait yang sangat penting dalam *Hikayat Perang Sabi*:

"*Wahe teungku wajeub tapateh, 'azeueb si deh hana ngon sa. Bek teungku e lalee that, 'ibadah wahe syeedara. Beurangri 'amai he ya sahabat, nyang leubeuh that tajak ngada. Lagee jinoe peureulee in, 'amaduddin bak agama. Meunan (neu) kheun Saidilmursalin, tayakin geutanyoe nyang na. Aljihadu wajibun 'alaikum, that muphom wahe syeedara. Phon cahdat ngon seumayang, teulhee tamuprang ngon Holanda*".

Dalam bahasa Indonesia berarti:

"Wahai teungku, janganlah lalai lagi, kerjakanlah kewa-jiban-kewajiban agama, wahai saudara. Dari semua amalan, wahai sahabat, yang terutama ialah berperang. Kini adalah *fardhu 'ain*, salah satu tiang agama. Demikianlah fatwa Saidilmursalin, marilah kita semua menyakininya. Jihad itu wajib bagi kita, pahamiilah baik-baik, wahai sahabat. Yang pertama syahadat, kemudian sembahyang, yang ketiga memerangi Belanda.

Episode dramatik tentang pemahaman akan nilai syahid dapat terlihat dari buku kumpulan catatan pensiunan Kolonel Marsose, H.C. Zentgraaff.⁴²

⁴² Lihat Ali Hasyimi, *Perang Aceh*, (Jakarta: Beuna, 1983).

Kemudian, pada suatu hari seorang kepala pasukan Belanda, Schmidt, ingin menangkap seorang pemuka pejuang Aceh, Teungku Chik Ma'at di Tiro. Orang ini menurut Schmidt harus ditangkap karena tetap melawan walau seluruh keluarga dan pengikut pamannya, Teungku Chik di Tiro, sudah tewas atau tertangkap. Mengetahui hal itu, maka atas saran beberapa orang setempat, Schmidt harus minta pertolongan dari janda Teungku Ulee Tutue. Mengetahui saran itu Schmidt gundah, sebab sekitar lima bulan silam, justru pasukannya yang membu-nuh suaminya. Namun keraguan ini berhasil dihilangkan setelah mendengar nasihat seorang teungku di Teupin Raya. Katanya, "Wanita itu tak mungkin berhati jahat kepada Tuan. Bahwa suaminya telah gugur dalam peperangan suci adalah keuntungan besar dari Allah baginya." Dan setelah dipanggil, janda itu menyetujui permintaan Schmidt agar meminta anaknya keluar dari hutan atau menyerah. "Saya akan mencoba," katanya kepada Schmidt. Beberapa hari lamanya ia pun keluar masuk hutan mencari anaknya.

Beberapa waktu kemudian sang janda kembali menemui Schmidt. Di depan perwira pasukan Belanda itu dia dengan tenang dan satria berkata bahwa pesannya sudah disampaikan, tapi anaknya tetap tak mau menyerah kepada Belanda. Janda itu hanya berkata: "*Hana jalan, tuan. Jih harok keu syahid lagee kuji*" (Tak ada jalan tuan. Ia menginginkan syahid seperti ayahnya!).

"Kalau begitu ia akan menyusahkan dirinya sendiri," kata Schmidt yang segera dijawab wanita itu, "*Teukeudi Allah ...*" (Takdir Allah!). Setelah itu Schmidt kemudian menyampaikan rasa hormatnya dengan mengucapkan terima kasih dan memberinya uang. Tapi, lagi-lagi wanita ini menolak. Sebaliknya, ia hanya mengatakan bahwa apa yang dikerja-kannya semata-mata menolong menyampaikan pesan saja. Dia menegaskan pula bahwa dirinya sama sekali tidak menyangsikan segala akibat yang akan timbul dari jawaban anaknya. Kepahlawanan itulah, yang hingga kini masih tampak kuat pada masyarakat Aceh, diwarisi secara turun-temurun baik oleh kalangan *uleebalang* maupun kalangan *teungku* (ulama). Namun, dengan strategi *divide et impera* (pecah belah dan kuasai) memilih salah satu golongan untuk menjadi *counterpart* dalam mengelola Aceh. Dan, golongan yang dipilih Belanda adalah golongan *uleebalang*. Dengan demikian, penjajahan Belanda atas Aceh telah menanamkan benih konflik dalam masyarakat Aceh yang eksistensinya kemudian menjadi permanen.

Penjajahan Kolonial Belanda

Pada 1914, Aceh mengalami kekalahan definitif terhadap Belanda dan mulai saat itulah kristenisasi mulai dilancarkan dan gagal. Namun, banyak pihak salah melihat Snouck Hurgronje dan mengkaitkannya dengan kristenisasi di Indo-nesia. Untuk kasus Aceh, meskipun data dan fakta sejarah telah jelas seperti tersebut di atas, namun di Indonesia sendiri pernah terjadi semacam kegoncangan di kalangan umat Islam yang banyak memperhatikan seluk-beluk nasib umat. Pada tahun 1985 Prof. Dr. H.M. Rasjidi yang dikenal sangat vokal terhadap pemikiran Barat walaupun beliau alumni Barat, dan vokal pula dalam hal kristenisasi, namun justru beliau jelas-jelas menge-

mukakan bahwa Christian Snouck Hurgronje itu teman umat Islam Indonesia. Beliau menyalahkan Muslimin pada umumnya yang menganggap Snouck itu musuh, karena menurut beliau, Muslimin pada umumnya tidak membaca karya-karya orientalisme. Menurut H.M. Rasjidi yang dituangkan H. Subagijo A.N. dalam biografi H.M. Rasjidi: “Tiap kali Rasjidi mengamati kepribadian Massignon, tiap kali pula dia teringat tokoh di negaranya sendiri, Christian Snouck Hurgronje, seorang orientalis besar pada zamannya. Oleh kebanyakan orang di Indonesia, Snouck Hurgronje dianggap sebagai kaki tangan kaum imperialis, alat kaum penjajah, sehingga segala ulah dan sikapnya dinilai sangat menguntungkan kolonialis Belanda semata. Namun bagi Rasjidi, figur Snouck Hurgronje justru merupakan teman umat Islam Indonesia. Penilaian keliru terhadap Snouck itu, menurut Rasjidi disebabkan karena pada umumnya orang belum pernah membaca buku-buku karya orientalis tadi secara lengkap dan teliti. Sebagai cendekiawan yang sudah membaca seluruh karya Snouck Hurgronje secara tuntas, Rasjidi sampai pada kesimpulan, bahwa doktor tersebut pada hakekatnya adalah teman umat Islam Indonesia. Snouck, di kalangan orang Belanda sendiri dikenal sebagai seorang yang anti *zending* dan anti *missi*. Snouck pernah berpolemik dengan anggota parlemen Belanda yang menaruh simpati pada gereja. Ujar sang anggota parlemen, “Kami ini tidak mengkristenkan orang Islam. Yang kami kristenkan adalah orang-orang Jawa yang tidak bersembahyang, Yang tidak membaca Qur’an, yang hanya bisa mengucapkan syahadat pada waktu akan nikah saja.” Ucapan itu ditanggapi Snouck dengan tegas jelas: “Kalau Anda sudah tahu bahwa orang Jawa mengaku Islam, itu sudah cukup. Bahwa mereka tidak mendirikan shalat, tidak paham bahasa Arab, itu sama sekali tidak mengu-rangi sifat keislamannya. Anda sendiri yang mengaku umat Kristen, apakah semua juga pernah membaca Injil? Dan juga pergi ke gereja dengan teratur? Dan bila di dalam Injil disebutkan: ‘Bila diminta bajunya, hendaknya Anda kasihkan jubahnya’, apakah Anda pernah memberi jubah yang diminta orang lain?” Demikian antara lain polemik antara Dr. Snouck Hurgronje dengan anggota parlemen Belanda yang membawakan suara kaum gerejani. Apa yang dikemukakan Dr. H.M. Rasjidi itu tidak bisa dijadikan landasan bahwa Snouck Hurgronje tidak menginginkan umat Islam Indonesia jadi Kristen. Justru maksud dan tujuannya hampir sama dengan missionaris, hanya saja cara mengkristenkannya itu bukan lewat kristenisasi model missionaris, namun lewat budaya, agar umat Islam tergiring tanpa terasa. Kalau model mission-aris, menurut pandangan Snouck, justru akan terjadi reaksi dari umat Islam, hingga apa yang dituju, yaitu pengkristenan itu sendiri tidak akan tercapai. Cara yang ditempuh Snouck itu bisa dibuktikan dengan apa yang ditulis oleh para peneliti sebagai berikut. Deliar Noer menulis: “Asosiasi sebagai kebijaksanaan yang diperjuangkan ilmuwan Belanda Christian Snouck Hurgronje, mendapat tempat hanya pada beberapa gelintir orang Belanda dan Indonesia saja terutama mereka yang berafiliasi dengan perkum-pulan *Nederlandsch Indische Vrijzinningen Bond* (Kesatuan Kaum Liberal Hindia Belanda).” Lanjut Deliar, yang dipersalahkan oleh Snouck Hurgronje ialah bagaimana menghadapi soal Islam.⁴³ Hal ini mudah dipahami

⁴³ Walaupun begitu, demikian Snouck Hurgronje, orang Islam di Indonesia lebih memperhatikan persoalan Islam sebagai agama dalam pengertian yang sempit (seperti perkawinan, hubungan keluarga, peraturan berkenaan dengan waris) sedangkan aspek politik

karena Islam telah memperlihatkan semangat perjuangannya di Indonesia dalam bentuk pemberontakan dan perlawanan terhadap penetrasi Belanda di berbagai wilayah negeri ini. Snouck Hurgronje mengamati bahwa walaupun Islam di Indonesia banyak tertutup oleh lapisan kepercayaan lain, seperti kepercayaan animisme dan Hindu, orang-orang Islam di negeri ini pada waktu itu menganggap agama mereka sebagai alat pengikat yang kuat yang membedakan mereka dari orang-orang yang bukan Islam yang mereka anggap sebagai “orang asing”. Snouck Hurgronje menasehatkan pemerintah Belanda agar memberikan perhatian yang sangat kepada pendidikan dan pengajaran orang Islam Indonesia tanpa menghubungkannya dengan persoalan pengkristenan. Cara ini, katanya, akan memajukan mereka dari sistem Islam. Cara ini akan membuat orang pribumi untuk menerima kebudayaan Belanda, yaitu kebudayaan Barat, dan menumbuhkan pula pengertian yang lebih baik di antara mereka terhadap orang-orang Belanda. Katanya lagi, adalah dia dalam asosiasi penduduk pribumi dengan kebudayaan kita (Belanda) terletak pemecahan persoalan Islam.⁴⁴ Cara ini akan menghapuskan perbedaan yang dijumpai dalam aspek politik dan sosial karena kepercayaan agama (yang berbeda). Hurgronje menambahkan lagi bahwa asosiasi itu akan menghilangkan cita-cita pan-Islam dari segala kekuatannya. Secara tak langsung cara tersebut akan bermanfaat bagi penyebaran agama Kristen sendiri, katanya lagi, sebab pelaksanaan politik asosiasi itu akhirnya akan memudahkan pekerjaan *missi*, oleh sebab *missi* akan dapat lebih menumbuhkan pengertian pada kalangan penduduk pribumi yang telah kena asosiasi itu terhadap mereka. Tetapi, *Politik Etis* tidaklah sesabar kaum militer dalam hal pengkristenan. Politik Etis tidak mengendurkan kegiatan missionaris agar memberi jalan bagi proses asosiasi seperti yang disarankan ilmuwan Belanda tersebut. Dalam hubungan ini pernyataan Kerajaan Belanda dalam tahun 1901 yang memperkenalkan *Politik Etis* itu merupakan suatu bukti nyata. Sebagai bangsa Kristen, Belanda mempunyai kewajiban untuk memperbaiki keadaan orang-orang Kristen pribumi di daerah kepulauan Nusantara, memberikan bantuan lebih banyak kepada kegiatan *missi* Kristen, dan memberikan penerangan kepada segenap petugas bahwa Belanda mempunyai kewajiban moral terhadap penduduk wilayah itu. Jadi persoalannya jelas, bukan karena Snouck tak membolehkan pengkristenan umat Islam di Indonesia, namun hanya beda cara antara Snouck dengan pemerintahan penjajah Belanda. Sedangkan missionaris pun didatangkan secara resmi oleh pemerintahan Belanda, ditambah pula dana yang jauh sangat berlipat-lipat dibanding terhadap Islam. Bisa disimak data berikut:

Tabel 1
Subsidi dalam tahun (jumlah dalam gulden)

Agama	Tahun			
	1936	1937	1938	1939
Protestan	686.100	683.200	696.100	844.000
Katholik	286.500	290.700	296.400	335.700
Islam	7.500	7.500	7,500	7.600

dan sosial dari agama Islam kurang mendapat perhatian.

⁴⁴ Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (terj.), (Jakarta: LP3ES, 1996).

Sumber: *Staatsblad* 1936: No. 355 hlm. 25, 26; 1937: No. 410, hlm. 25, 26; 1938: No. 511, hlm. 27,28; 1939: No. 593, hlm. 32, sebagaimana dikutip dari Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (terj.), (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 39.

Setelah tergambar bahwa pengkristenan Indonesia oleh Belanda itu memang disengaja oleh penjajah Belanda, dan sebenarnya didukung pula oleh penasihat ahlinya, yaitu Snouck Hurgronje, hanya saja beda cara, maka sikap Snouck itu akan tampak lebih jelas lagi dalam data dan kemudian pernyataan Snouck Hurgronje sendiri. Berikut ini data seja-rahnya. Orientasi Snouck Hurgronje tampak jelas dalam bantahannya yang keras kepada Menteri Belanda, Lohman, dalam surat yang ditulisnya kepada menteri pada 19 Desember 1913. Surat-surat kabar memuat penjelasan menteri bahwa Snouck Hurgronje mendukung semboyan “Hindia Belanda (Nusantara) untuk pengikut-pengikut Muhammad (orang-orang Islam)”. Snouck Hurgronje menulis: “Saya amat bergembira sekiranya tanggung jawab kesalahpahaman ini terletak pada para redaktur surat kabar. Jika demikian, masalahnya menjadi mudah. Akan tetapi, jika yang terjadi ternyata para redaktur membuat tulisan itu berdasarkan ucapan Anda, maka saya bertanya kepada Anda dengan penuh sopan. Anda mesti memberitahukan saya, yang mana dari tulisan-tulisan saya yang tidak sedikit membahas Islam di Hindia Belanda yang membuat Anda salah paham tersebut? Barangkali Anda tidak tahu bahwa saya tanpa kepentingan pribadi, telah memberikan andil dalam pengkaderan para missionaris di Rotterdam. Karena ceramah-ceramah saya tentang Belanda dan Islam, saya menerima surat-surat penghargaan yang dikirim kepada saya secara langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Direktur Missi Kristenisasi, dan missionaris Adriani, dan dari Albert Kruyt, mantan Konsul di Jeddah. Mereka semua sudah menjalin hubungan persahabatan dengan saya sejak 25 tahun yang lalu. Karena itu, saya berhak menuntut agar jangan menilai kecuai pada apa yang saya katakan atau yang saya tulis sendiri. Yang saya inginkan, agar mereka yang tidak menguasai persoalan hendaklah berdiam diri dan tidak berbicara tentang saya, dan tentang pekerjaan saya dalam pertemuan-pertemuan orang banyak.”

Dari perasaan superioritas itulah, Snouck Hurgronje menyerang syariat, karena seperti para orientalis lain pada masanya, dia percaya bahwa kebudayaan Eropa tidak mungkin memberantas orang-orang Muslim, kecuai jika mereka melepaskan diri dari agama reaksioner. Karena itu, dia tidak bersemangat atas pengiriman missi pekabaran Injil. Pada waktu yang sama, dia tidak memberi perintah untuk melarang pengiriman missi ke Hindia Belanda, kecuai jika mayoritas penduduknya menganut Islam, mereka diperintahkan menja-lankan muslihat dan bujuk rayu. Di samping itu, dia pun menggalakkan pembukaan sekolah-sekolah missi dengan harapan agar penganut Islam secara berangsur beralih ke agama Kristen. Orientalis secara garis besar ada tiga kategori: (a) mengabdikan kepentingan penjajah, (b) menjalankan missi Kristen/ Katholik, (c) berupaya obyektif, tetapi ini sangat langka dan bahkan dimusuhi oleh dua kelompok lainnya. Orientalis tradisional adalah yang mengabdikan kepada penjajah dan kepentingan missi. Sehingga bila ada orientalis yang mau obyektif maka dipengaruhi bahkan dimusuhi oleh para orientalis tradisional itu.

Christian Snouck Hurgronje adalah orientalis Belanda terkemuka akhir abad 19 dan abad 20 (w. 1936) yang menjadi penasihat khusus kolonial Belanda urusan (Islam) di Hindia Belanda. Untuk kepentingan kolonial Belanda itu Snouck menyamar sebagai orang Islam atau bahkan mungkin sekali menjadi Muslim sejati dan masuk ke Mekkah selama 6,5 bulan dengan nama tsani Abdul Gaffar. Atas bantuan Raden Abu Bakar, bangsawan Indonesia di Jeddah, maka Snouck bisa menemui syaikh-syaikh di Mekkah bahkan ulama tertinggi, Ahmad bin Zaini Dahlan. Atas bantuan Raden Abu Bakar itu Snouck mendapatkan rekomendasi dari Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Mekkah, untuk berhubungan dengan ulama-ulama di Jawa (Indonesia). Kepentingan itu tampaknya gayung bersambut, karena Mufti Mekkah Ahmad bin Zaini Dahlan adalah orang yang paling keras menentang Wahabi bahkan memfatwakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab pendiri paham Wahabi sebagai Musailamah al-Kaddzab baru, karena sama-sama dari Yamamah. Pengaruh Wahabi jangan sampai tumbuh di Jawa, maka rekomendasi untuk Snouck pun diberikan oleh Mufti Ahmad Zaini Dahlan demi memper-lancar hubungannya dengan para ulama di Indonesia.

Kelihaian Snouck di Aceh pun tak kurang menguntungkan bagi Belanda. Dengan adanya Snouck bisa mendekati Habib Abdurrahman Ad-Dhahir yang menginginkan jadi sultan di Aceh. Snouck mampu mengorek rahasia-rahasia dari habib itu tentang ulama dan umat Islam Aceh. Setelah Snouck mendapatkan rahasia akurat dari Habib Abdurrahman, maka Snouck mengusulkan kepada pemerintah Belanda bahwa tidak ada jalan lain kecuali menghancurkan para ulama Aceh. Meskipun sebegitu tegasnya untuk menghancurkan ulama dan Muslimin Aceh, namun Snouck tidak setuju kalau kris-tenisasi di Indonesia itu memakai cara-cara yang dilakukan missionaris selama ini. Snouck menyarankan agar kristenisasi dilakukan secara pendekatan dan sosialisasi budaya Eropa/ Belanda. Dengan cara pendekatan budaya itu menurut Snouck, umat Islam Indonesia tidak bereaksi, dan bahkan nantinya mereka masuk Kristen dengan sendirinya. Ide dan cara yang diusulkan Snouck itu ditentang oleh pihak missio-naris yang memang ditugaskan secara resmi oleh Kerajaan Belanda ke Indonesia, sehingga terjadi polemik antara Snouck dengan anggota parlemen, dan bahkan Menteri Belanda, Lohman menuduh Snouck sebagai orang yang menghalangi kristenisasi di Indonesia.⁴⁵ Beruntung bagi Aceh karena Belanda tidak berani memulai kristenisasi atas golongan *uleebalang* yang sudah menjadi *counterpart*-nya di Aceh dalam upaya pasifikasi Aceh. Seandainya proses *missie* dan *zending* ini dilakukan Belanda, maka tak akan terbayangkan bagai-mana parahnya konflik di Aceh akan terjadi.***



⁴⁵ Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (terj.), (Jakarta: LP3ES, 1996).

Bab 3

POSISI POLITIK KAUM *Uleebalang* ACEH PENDUDUKAN JEPANG

MASA

UNTUK memahami akar konflik antara *uleebalang* dan ulama di Aceh, kita harus melihat sejarah Aceh pada masa pendudukan kolonial Jepang di mana benih-benih konflik sudah mulai mekar. Kendatipun pada masa Kolonial Belanda antara kaum *uleebalang* dan kaum ulama terjadi pembauran dan persatuan yang kuat, namun sudah ada juga benih-benih konflik yang mulai bersemi kala itu. Namun, karena pemberian hak-hak istimewa terhadap kaum *uleebalang*, maka semakin memperuncing benih-benih konflik yang sudah bersemi tersebut.

Meskipun Belanda sudah dapat menguasai keseluruhan Aceh —dan meskipun Aceh tidak mengakui kekalahan definitif ini— sebenarnya secara politik pada 24 Juli 1904, Belanda menaklukkan Alas, Aceh Tengah, yang menandai penguasaan perang teritorial atas seluruh Aceh. Walaupun demikian peperangan gerilya terus berlangsung hingga 1913, dan sebenarnya dalam skala yang lebih kecil terus berlangsung hingga 1942.⁴⁶ Pada tahun 1942, orang-orang Aceh sendiri yang mengundang Jepang untuk mengusir Belanda. Orang-orang Aceh sangat mahir dalam memainkan kekuatan-kekuatan politik di luar Aceh yang ada untuk mengusir pemain-pemain politik yang telah merajalela dengan kekejaman dan kebengisannya dalam menjalankan pemerintahan. Walaupun ada peran agen Aceh dalam mengundang kehadiran Jepang di Sumatera, namun pada akhirnya rakyat Aceh berjuang menghadapi Jepang.

Kendatipun harus diakui bahwa Pemerintahan Belanda di Aceh sangat kejam, banyak rakyat Aceh yang dibunuh dan dianiaya, namun —bagi rakyat Aceh— Jepang merupakan “anjing liar gila” yang menggigit pemilik kebun tanpa ampun. Jepang telah melebarkan sayapnya, bala tentaranya sudah ada di Singapoera, yang dikepalai oleh Panglima Fujiwara Kikan. Singapura di ubah namanya oleh Jepang menjadi *Syohanto*.

Untuk menghindarkan kekejaman Belanda di Aceh, Pengurus Besar PUSA mengirim dua orang utusannya ke Singapoera menjemput Bala Tentara Jepang datang ke Aceh, yaitu: (1) Sayeed Aboe Bakar dari Aceh Besar; (2) Tgk. Abdoel Hamid (Ajah Hamid) di Aceh Utara. Kedua orang utusan PUSA diterima baik oleh Jepang, sambil bertanya dimana jalan mendarat ke Aceh. Oleh kedua utusan PUSA menunjukkan jalan mendarat ke Aceh, yaitu: (1) di Koeala Boegak Peureulak; (2) di Ujong Raya (Oelee Kareueng) Tambu; (3) di Krung Raya, Aceh Besar.

⁴⁶ Belanda menginjak negeri Aceh dan berkuasa sejak tanggal 4 April 1873 sampai dengan tanggal 13 Maret 1942, lamanya 28 tahun 11 bulan 9 hari, tetapi tidak pernah aman, karena beberapa tempat di Aceh terjadi pertempuran secara kecil-kecilan.

Panglima Tentara Jepang menganjurkan kepada kedua utusan POESA itu bahwa ketika menyambut kedatangan Bala Tentara Jepang, oleh orang Aceh harus memasang letter F diatas kain merah disematkan pada lengan baju sebelah kiri. Ali Hasjmy menamakan *letter F* itu dengan "Fadjar". Dengan sebab Jepang masuk ke Aceh pada tanggal 13 Maret 1942, Belanda yang berada di Aceh patah semangatnya. Assistent Resident di Sigli dan Controleur di Seulimum di bunuh oleh rakyat di masing-masing tempat itu. Di persilangan jalan dari Beureunoen ke Lam Meulo terjadi pertempuran Belanda dengan Jepang. Belanda lari terbirit-birit. Bagi orang Aceh, ide memasukkan Jepang untuk mengusir Belanda adalah ide orisinal dan berakar dalam paradigma kultural cara berpikir orang-orang Aceh: *Geupeulet bui ngon asee* (mengusir babi dengan menggunakan anjing).

Untuk menguatkan pertahanannya Jepang membuat dua buah lapangan terbang: (1) di Blang Peutek Gaki Seulawah; (2) di Tamboe Aceh Utara. Untuk mengerjakan lapangan terbang itu Jepang memakai tenaga rakyat Aceh, sedang Belanda ketika membuat membuat Jalan Kereta Api dan Jalan Raja (B.O.W.) dipakai tenaga Tionghua, tidak berani Belanda memakai tenaga rakyat Aceh, karena rakyat Aceh bermusuhan dengan Belanda. Orang yang berkerja di Lapangan Terbang Blang Peutek banyak menjadi korban karena diserang penyakit malaria.

POESA menjemput Jepang datang ke Aceh untuk mengusir Belanda yang disangka sangat kejam, tetapi kenyataannya Jepang lebih kejam lagi dari Belanda. Karena Jepang sudah berkuasa di Aceh, susunan pemerintahan berubah menurut yang ditetapkan oleh Jepang sendiri. *Landschap* di masa Belanda diubah menjadi *sun*, kepala pemerintahan disebut *suncho*. *Onderafdeeling* atau Kewedanan diubah menjadi *gun*, kepala pemerintahan disebut *guncho*. *Afdeeling* diubah menjadi *bun*, kepala pemerintahan di sebut *buncho* dan *Resident*-nya disebut *cokang*. Perubahan administrasi pemerintahan Jepang ini hanyalah perubahan nama saja, namun jabatan-jabatan yang dulunya sudah diberikan oleh Belanda kepada para ulebalang sebagai *zelfbestuurder* tetap dipakai Jepang untuk menjalankan pemerintahan kolonialnya. Kaum ulama tetap saja kembali terpinggirkan.

Krisis politik pada masa Perang Dunia II membawa dampak hampir ke seluruh penjuru dunia, termasuk Asia Tenggara. Tidak terkecuali di Aceh, krisis politik berwujud pada pertarungan ideologis, antara paham-paham sosialisme nasional (fasisme kebangsaan), nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler. Pada tingkat dunia, pertarungan ideologi mencapai klimaksnya dalam suatu konfrontasi bersenjata. Adalah negara Jerman dengan ideologi fasismenya telah mengadakan kesepakatan yang cukup penting dengan sekutunya Italia dan Jepang menggalang satu kekuatan untuk menggempur kekuatan kapitalisme dan sosialisme. Mereka bergerak hampir bersamaan dan memporakporandakan banyak negeri di muka bumi, termasuk Aceh. Dan itu pertanda bahwa mereka-mereka yang dalam kehidupannya telah tercekoki sekulerisme yang jauh dari ajaran *Ilahi* hanya ingin menciptakan kerusakan saja. Itulah isyarat Allah yang digambarkan lewat firmanNya: "*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan-tangan jahil*".

Serangan invasi Jerman yang bergelombang dan besar-besaran terhadap tiga negara di daratan Eropa, yaitu Belanda, Belgia dan Prancis tidak dapat dibendung, sehingga membuat tiga negara Eropa itu dibuat takluk dalam waktu yang amat singkat. Belanda sendiri dikalahkan pada hari pertama penyerangan. Perintah penyerbuan yang langsung di bawah komando Adolf Hitler pada 10 Mei 1940 bukan hanya membuat Belanda takluk, bahkan Ratu Belanda pun terpaksa mengungsi ke Inggris dini hari pada hari itu juga. Ibarat dalam berdagang: Belanda sudah gulung tikar, habis ludes tidak bisa menikmati lagi indahnyanya hidup menjajah bangsa lain.

Pada akhirnya pemerintahan kolonial Belanda merasakan menjadi negara yang terjajah. Kejadian kekalahan itu sendiri sempat diketahui melalui radio dan sebagian lainnya melalui berita surat kabar. Kekalahan Belanda membuat pasukan Kerajaan Belanda yang ditempatkan di Aceh kehilangan semangat. Pasca pendudukan Aceh yang tidak pernah dirasakan Belanda, bangsa *kaphe* (kafir) ini harus merasakan bagaimana derita menjadi bangsa terjajah. Allah telah memberikan balasan bagi bangsa Belanda dengan keterjajahannya dan menjalani siksaan sebagaimana ia dulunya menyiksa bangsa Aceh. Apalagi negara yang menjajahnya (Jerman) sudah terkenal amat kejam. Dan itu adalah balasan yang setimpal bagi bangsa Belanda sebab dengan keangkuhan dan kecongkakannya, mereka telah banyak membuat penderitaan dan kesengsaraan di negeri jajahannya.

Negara Jepang ikut terlibat dalam perang dunia kedua ini. Diawali dengan sebuah penyerangan tiba-tiba membombardir Pelabuhan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii. Bagaikan genderang perang, pemboman yang dilakukan oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941 tersebut menandai rencana besar petualangan militerisme Jepang. Asia Selatan, termasuk Asia Tenggara, yang disebut *Nan Yo*, menjadi sasaran tentara Jepang. Di kawasan inilah Jepang mulai menyusun kekuatan dengan mengirim sebanyak mungkin pasukan. Wilayah peperangan bertambah luas ketika menjelang Februari 1942, tentara ke-25 Jepang telah bermarkas di Singapura (*Syonanto*). Kebiasaan bangsa Asia pun segera dimulai setelah Jepang memasuki Asia Tenggara.

Walaupun Belanda sudah tidak berdaya akibat invasi Jerman ke negerinya, namun Belanda masih berniat ingin mengadakan perlawanan. Lewat duta besarnya di Tokyo, Pemerintah Kerajaan Belanda membuat pengumuman yang berisi pernyataan perang kepada Jepang. Pada saat mengumumkan berita itu, pemerintah Kerajaan Belanda berada di pengasingan, Inggris. Pernyataan perang yang disampaikan pada 8 Desember 1941 tersebut tidak hanya mencakup Pemerintah Belanda dan negerinya tetapi sekaligus melibatkan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Setelah itu, pemerintah Belanda menginstruksikan para perwira yang berada di daerah koloninya untuk mempersiapkan diri. Khusus di Aceh, kesibukan pasukan Belanda meningkat tinggi, mereka mengangkut semua perlengkapan dan logistik ke Takengon, ke Rimba Gayo dan Blang Kejeren di bawah Komando Kolonel Gosenson. Sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi, seluruh perbekalan militer Belanda ditempatkan di sebuah perkebunan teh Redelong. Perkebunan tersebut

berada di wilayah Aceh Tengah, tak jauh dari Takengon. Hutan menjadi tempat persembunyian bagi banyak pejuang. Tentara Belanda pun, memanfaatkan hutan sebagai tempat pelarian. Semua senjata dan amunisi dan logistik perang dipindahkan ke hutan. Karena pemindahan tersebut pasukan Belanda tampak sangat sibuk dari Kutaraja ke Takengon. Begitu pun di dalam bidang pemerintahan sipil, kesibukan pemerintah Belanda juga sangat tampak. Kesibukan pemerintah sipil yang dipimpin oleh Residen Belanda terjadi sejak awal tahun sampai awal Maret 1942.

Jepang memasuki daratan Aceh melalui Malaya, sekarang Malaysia, dengan menyebut dirinya "*saudara tua*". Dengan sebutan ini, Jepang berhasil menipu rakyat dan tokoh-tokoh pergerakan Aceh dengan memanfaatkan sentimen sesama bangsa Asia, sesama bangsa Timur. Strategi meyakinkan tokoh pemuda Aceh di Malaya sangat tepat sehingga tanpa curiga, kehadiran Jepang diterima dengan tangan terbuka. Apalagi para pemuda membentuk suatu jaringan rahasia, Gerakan "F" Kikan, yang berbasis pada organisasi POESA (Persatuan Oelama Seluruh Atjeh). Di Aceh terkenal adanya adagium yang menyebutkan: "*Yang Peutamong Beulanda Panglima Tibang, Yang Peutamong Jepang Pemuda Poesa.*" Bahkan kedatangan Jepang awalnya menjadi harapan kebahagiaan rakyat yang bisa menghormati agama Islam.

Tepat dua hari setelah Jepang mendarat di Malaya, 11 Januari 1942, berdiri Himpunan Anak Sumatra di Kuala Lumpur di bawah pimpinan Said Abu Bakar. Ia menyebut dirinya sebagai utusan atau delegasi dari *Persatoean Oelama Seleroeh Atjeh* (POESA). Dengan keberhasilan Jepang yang sangat heroik menaklukkan beberapa bagian wilayah Rusia dalam awal Perang Dunia II, anak-anak Aceh begitu terkesimanya. Melalui buku *Perang Rusja-Jepun*, para pemuda Aceh yang revolusioner dan ingin mengakhiri penjajahan Belanda di Aceh memandang Jepang sebagai kekuatan penolong. Padahal, penolong satu-satunya hanya Allah SWT. Hanya *nashrullah* sajalah yang layak diharapkan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Jenderal Fujiwara Iwaichi, Komandan Barisan F, menulis dalam bukunya *Fujiwara Kikan, Japanese Army Intelligence Operations in South East Asia during World War II*: "dengan menduduki bagian pusat Malaya, sebagian dari Selat Malaka berada di bawah pengawasan Jepang. Latihan para pemuda Sumatera di bawah pimpinan Said Abu Bakar telah rampung dan semangat mereka meninggi. Anak muda itu semua berusia 40 tahun dan Usman Basyah 18 tahun. Mereka memandang Masubuchi dan Letnan Makayima dengan rasa kagum dan hormat terhadap kebaikan dan ketulusan keduanya, seolah-olah kedua orang itu ayah dan abang mereka."

Rencana yang akan dilakukan kemudian dibahas Fujiwara bersama Said Abu Bakar dan Hasbi. Fujiwara antara lain mengatakan bahwa Jepang sebagai "*saudara tua*" ingin menjalin hubungan dengan para pemimpin POESA, untuk bersama-sama menghadapi Belanda dan kaki tangannya. Rakyat Aceh dikenal sebagai *muslimin* yang sangat taat dan siap berkelahi dalam tiap pertempuran serta terkenal benci kepada Belanda dan tidak gentar demi agama Allah. Apapun jika diatasnamakan Islam, akan berhasil di Aceh.

Dengan perbekalan lengkap, Said Abu Bakar memimpin rombongan pertama yang berangkat melalui Kuala Selangor. Rombongan yang berangkat

pada 16 Januari 1942 tersebut terbawa sampai ke Pulau Sembilan di daerah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Sebagai pimpinan rombongan, ia ditangkap dan ditahan Polisi di Medan. Namun ia kemudian dilepaskan setelah memperoleh jaminan dari Tuanku Mahmud, mantan anggota *Volksraad* atau Dewan Rakyat dari Aceh.

Dari Aceh diputuskan mengirim Ahmad Abdullah dan Teuku Zainal Abidin Samalanga dengan tugas menghubungi Said Abu Bakar di Medan. Teuku Zainal Abidin inilah yang sesungguhnya berkeinginan kuat mengusir Belanda dengan memasukkan Jepang sebagai kekuatan eksternal bagi Aceh. Maka, bukan hanya “pemuda Pusa” saja yang berperan dalam masuknya Jepang ke Aceh. Said Abu Bakar, secara rahasia, menceritakan kepada Teuku Zainal Abidin bahwa ia bersama sejumlah teman diutus oleh Fujiwara (kepala Intelijen Jepang) untuk mendirikan gerakan perlawanan terhadap tentara Belanda melalui pendaratan bala tentara Jepang.

Said Abu Bakar bersama teman-teman lainnya akhirnya melanjutkan perjalanan ke Aceh menemui Teungku Muhammad Daud Beureueh. Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah tokoh kharismatik Aceh, yang mendirikan POESA, memberikan dorongan semangat bagi para pemuda untuk mewujudkan niatnya. Namun, tanpa disadari, ternyata ajaran *Tenno Heika* telah merasuki *aqidah* mereka. Rombongan pertama diikuti rombongan berikutnya yang berangkat dari Malaya, pada tanggal 25 Januari 1942 dan mendarat di Pelabuhan Teluk Nibung, dipimpin oleh Nyak Neh. Sebelum berangkat, Nyak Neh berseru dengan penuh semangat: “*Tenno Heika Banzai*”

Seluruh utusan dari Aceh yang berjumlah 20 orang naik kapal perang Jepang bersama Pasukan Pengawal Kekaisaran di bawah pimpinan Mayor Jenderal Sawamura. Pasukan Pengawal itu sendiri berjumlah tak kurang dari 20.000 orang. Di antara utusan dari Aceh tampak Teuku Ali Basyah, *uleebalang* Langsa dan Masabuchi.

Kehadiran Jepang tersebut ternyata mampu membangkitkan semangat para pemuda dan rakyat Aceh. Api kebangsaan yang dikobarkan oleh Jepang walau pada awalnya dimaksudkan untuk menghantam Belanda, tidaklah sia-sia. Maka, perjuangan *jihad* rakyat Aceh yang mula-mula bersumberkan pada jalan Allah, sedikit demi sedikit mulai berseger ke arah *ashobiyah*, suatu paham nasionalisme sosialis yang muncul karena lebih didorong untuk memerdekakan Aceh dari Belanda ketimbang mencari surga Allah. Dan sayangnya, apa yang diberikan Jepang seperti latihan-latihan kemiliteran kepada para pemuda Aceh kelak jadi bekal dalam membentuk tanggul pertahanan kemerdekaan Indonesia.

Rekrutmen anak-anak muda Aceh, sebenarnya hanyalah untuk memenuhi hasrat kolonialis Jepang yang berkeinginan menguasai dunia. *Dai Nippon* yang terlibat dalam Perang Asia Timur Raya memerlukan tenaga-tenaga bantuan. Maka dibentuklah *Heiho* guna memenuhi keperluan pasukan dalam pertempuran-pertempuran di seberang lautan. Padahal perang yang dilakukan Jepang tidak ada sangkut paut apapun dengan kepentingan Aceh untuk memiliki wilayah *de facto* sendiri. Di samping itu, Jepang juga menjaring pemuda-pemuda untuk membantu administrasi pemerintahan pendudukannya dalam mempertahankan teritorial. Mereka itu dilatih dan

diangkat menjadi Polisi Istimewa, *Tokubetsu Kaisatsutay*. Begitupun para pemuda Aceh dilatih Jepang dalam Pertahanan Bahari, *Kai Gun*. pelatihan ini dimaksudkan untuk menjaga pantai-pantai di daerah Aceh. Di mana pantai dan laut memiliki arti penting dalam strategi pertahanan perang Jepang. Dari lautlah terobosan masuk ke suatu wilayah dilakukan. Dan untuk menambah pasukan sukarela, Jepang pun melatih para pemuda ke dalam *Gyu Gun*. Di mana dalam setiap latihannya ditanamkan jiwa militerisme Jepang. Mulailah terjadi suatu transformasi ideologis di mana kekaburan para pemuda Aceh tentang Islam mulai terjadi ketika Jepang memaksakan mereka ikut dalam latihan-latihan militer.

Pembentukan *Heiho*, *Tokubetsu Kaisatsutay*, *Kai Gun* dan juga *Gyu Gun* berlangsung sampai tahun 1943. Para pemuda di Aceh banyak yang mendaftarkan diri mereka dan masuk menjadi anggota pertahanan buatan Jepang tersebut. Mereka pada umumnya memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari ilmu kemiliteran dengan disiplin Jepang yang dibekali *Nippon Seisin* (semangat Jepang). Pada akhirnya, doktrin ideologis militer Jepang lebih memuakkan ketimbang paksaan fisik yang mereka lakukan tidak hanya terhadap para pemuda, tapi juga terhadap rakyat; ibu-ibu, anak-anak, dan perempuan.

Harapan rakyat Aceh terhadap Jepang yang semula bersemi mulai sirna. Para pemuda mulai sadar akan niat Jepang sesungguhnya. Rakyat Aceh tertipu dengan taktik dan strategi yang seakan-akan menolong mereka. Bahkan kemudian Jepang muncul sebagai kekuatan yang tiranik, merampas dan memperkosa hak-hak asasi rakyat. Tidak ada lagi harapan rakyat Aceh bahwa Jepang akan menjadi pembela rakyat dan pelindung agama Islam. Karena banyak adat kebiasaan Jepang yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam dan adat istiadat Aceh.

Sikap Jepang yang tidak manusiawi dan sewenang-wenang itu pelan-pelan melahirkan kemuakan di mata rakyat Aceh. Lama-kelamaan kebencian pun menggantung dan dendam kesumat tiada terbendung. Sejak itu timbul pepatah "*tapeu crok bui jiteuka asee*", artinya: kita kejar babi (Belanda), datang anjing; keduanya sama-sama haramnya.

Perang Rakyat Aceh dengan Jepang

Setelah merasakan pahit getirnya sistem kolonialisme Belanda di Aceh di mana banyak menghabiskan nyawa para *syuhada* yang tetap memberikan perlawanan dalam bentuk peperangan yang sangat panjang. Banyak rakyat Aceh yang mendambakan datangnya saat-saat di mana mereka bisa merasakan kembali sebagai bangsa yang berdaulat. Perasaan untuk memiliki kekuasaan dan wilayah kedaulatan sendiri semakin kuat setelah rakyat melihat sendiri kebiadaban dan tekanan yang telah diberikan oleh pihak luar. Kolonialisme yang membawa dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi kebudayaan telah menyebabkan banyak rakyat yang menjadi bodoh, melarat, dan sengsara. Daftar panjang korban perang di Aceh begitu memilukan.

Karena itulah dapat dipahami bila pada awalnya rakyat Aceh mengharapkan terjadinya perubahan keadaan dan memperoleh perbaikan nasib mereka dengan datangnya tentara *Tenno Heika*. Mereka berkerumun di pinggir-pinggir jalan, mengibarkan bendera Sang Merah Putih dan bendera “*Hinomaru*” atau “Matahari Terbit” sambil meneriakkan yel-yel: “*Banza!*”

Namun rasa optimisme rakyat Aceh itu tidak berlangsung lama. Sebab tidak lama kemudian tentara Jenderal Toyo itu menunjukkan wataknya yang bengis dan kejam. Rakyat Aceh sebagai pemeluk teguh ajaran Islam, tidak dapat menerima tingkah laku tentara Jepang yang hobinya mabuk-mabukan, berzina, menghamburkan makian dan tindakan kasar serta memperlakukan wanita secara biadab.

Pertentangan ideologis lainnya pun muncul karena agama *Shinto* yang dianut oleh orang Jepang memperbolehkan memakan babi. Padahal makanan tersebut diharamkan oleh agama Islam yang dianut oleh rakyat Aceh. Di samping itu, serdadu Jepang juga terbiasa hanya menggunakan cawat sambil berjalan-jalan. Tentu saja sikap barbar ini sangat bertentangan dengan adat istiadat Aceh. Semakin manusia beradab, semakin tertutup tubuhnya, bukan semakin terbuka seperti peradaban masa batu.

Belum lagi upacara menunduk ke arah matahari terbit dengan cara membungkuk yang disebut upacara *Seikeire*, telah demikian mendidihkan kegeraman rakyat Aceh terhadap Jepang. Berbagai adat kebiasaan orang-orang Jepang dan upacara yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Begitu juga perlakuan tentara fasis Jepang yang memiliki “*Kempete!*” terkenal sangat kejam. Mereka sangat ditakuti rakyat. Betapa tidak, setiap orang yang dianggap kurang loyal kepada *Dai Nippon* atau merugikan kepentingan mereka, pasti mengalami penganiayaan atau penyiksaan polisi militer Jepang itu secara sadis dan kejam sekali. Untuk sedikit menggambarkan kekejaman militerisme Jepang, penyiksaan terhadap orang Aceh dilakukan dengan cara memenggal kepala atau menguliti tubuh korban secara perlahan-lahan. Militer yang tidak profesional di mana-mana selalu bertindak melewati batas seperti ini dengan memberikan *shock therapy* bagi rakyat untuk melumpuhkan semangat perlawanan mereka.

Kedatangan Jepang ke Aceh setali tiga uang dengan Belanda. Mereka

datang hanya untuk menjajah negeri Aceh. Dan hanya menjadikan Negara Aceh sebagai lahan pendukung pasukannya pada Perang Dunia II. Banyaknya kebutuhan untuk peperangan, sehingga mengharuskan dibangunnya berbagai fasilitas. Dalam pembangunannya itu Jepang melakukan kegiatannya secara tradisional dengan cara mengerahkan tenaga kerja rakyat (*romusha*) dengan memanfaatkan bahan-bahan yang telah tersedia di negeri Aceh. Hal ini merupakan beban berat yang harus ditanggung oleh rakyat Aceh, bukan hanya dari segi tenaga tapi juga nyawa. Ribuan nyawa rakyat Aceh melayang dalam keadaan sakit dan kelaparan di tengah lokasi *romusha* yang ganas.

Kebiasaan Jepang ini bukan hanya sekedar hukuman atas tindak “subversi” rakyat Aceh semata-mata, namun telah menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh rakyat Aceh. Berkorban nyawa dengan mempersembahkannya secara gratis kepada pihak adalah kewajiban telah benar-benar menjadi Jepang sebagai bangsa yang paling *anti human*. Pada saat-saat seperti inilah semua rakyat Aceh meyakini bahwa Jepang adalah penjajah yang harus dilawan. Rakyat Aceh telah diperlakukan seperti sapi perah, harus menjalani kerja paksa dalam kondisi lapar dan sakit.

Perlakuan Jepang yang semena-mena itu nampak terlihat ketika diadakan proyek pembuatan jalan raya sepanjang 150 km di tengah rimba Gayo, antara Rikit Ghaib dan Ise-Ise, di mana proyek itu harus dilaksanakan dalam tempo hanya enam bulan, di mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 1944. Maka tidak heran bila banyak yang menjadi korban dari kekejaman Jepang ini. Demikian juga proyek raksasa basis yang dilaksanakan di Gunung Setan, antara Kuta Cane dan Blang Kejeran sejauh lebih dari 70 kilometer.

Alhasil, pengadaan fasilitas yang harus diselesaikan melalui kerja paksa telah banyak menghasilkan berbagai sarana bagi Jepang seperti infrastruktur di Tambo (Aceh Utara), di Trumon (Aceh Selatan), dan di Blang Peutek (Pidie) dan beberapa daerah di Aceh Timur. Di sisi lain, kehidupan rakyat Aceh semakin sengsara karena semakin banyak korban bergelimpangan. Dan untuk meluluskan usaha-usahanya itu, pihak militer Jepang telah mempergunakan para Camat yang ketika itu dikenal dengan nama *Suncho*. Inilah yang membuat hati rakyat Aceh marah, dan pada akhirnya semangat anti kolonialisme mulai merebak kembali. Rakyat Aceh mengadakan perlawanan kembali dengan Jepang.

Sejak awalnya politik keagamaan Jepang hanya terbatas pada bidang yang umumnya saja, “Kepercayaan agama dan adat-istiadat penduduk pribumi harus dihormati sejauh mungkin dan campur tangan dalam hal-hal ini harus dihindari. Perbedaan yang menyolok ini mencerminkan politik yang sepenuhnya bersifat kolonial dan eksploitasi yang sejak semula telah dipertimbangkan untuk Sumatera dan Malaya.

Realitas sejarah bangsa Aceh dengan tradisi spirit Islamnya dalam mendobrak belenggu penjajahan Belanda sama sekali tidak menjadi pertimbangan untuk mendefinisi ulang tentang kebijakan yang harus ditempuhnya dalam mengantisipasi rawannya daerah Aceh, mereka hanya bersikap menunggu saja. Dan ketika semangat keagamaan rakyat Aceh telah bangkit yang kemudian ditunjukkan dengan gagah berani sehingga

menimbulkan kerugian pihak Jepang, barulah kejadian itu ditanggapi secara serius oleh Jepang. Keterkejutan Jepang sama halnya yang pernah dialami oleh Jenderal Belanda, van Swieten, ketika dia mengetahui bahwa rakyat Aceh adalah satu bangsa yang tidak boleh dianggap remeh. Dan Jepang merasa kaget mendapatkan dirinya dalam suatu konfrontasi berdarah yang dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin agama Islam di Aceh, yang enam bulan lalu telah menggerakkan suatu pemberontakan yang menguntungkan mereka.

Telah hadir pada waktu itu seorang ulama muda yang berpandangan modern, Teungku Abdul Jalil Cot Plieng, pemimpin Dayah agama yang terkenal di Cot Plieng, Bayu dekat Lhokseumawe, yang memberikan reaksinya menentang penguasa Jepang masuk ke Aceh. Kata orang, dia telah menciptakan pemeo yang populer di Aceh, bahwa gerakan “F” telah “mengusir anjing dan memasukkan babi” (*tapeu crok bui jiteuka asee*). Dia juga menyamakan Jepang dengan *Yajuj* dan *Majuj*, setan-setan yang merusak keyakinan kesucian mati *syahid* seperti yang tertulis dalam *Hikayat Prang Sabi*. Dengan meningkatnya perhatian Jepang atas dirinya, sejak bulan Agustus 1942, Teungku Abdul Jalil mempersiapkan dirinya untuk mati syahid dengan menyepikan diri, berpuasa dan *khalwat*, dan membangkitkan semangat keikhlasan menjalankan perintah agama. Prinsipnya: “Melawan bukan sia-sia. Menyerahlah yang sia-sia. Menyerah belum tentu syahid. Tetapi melawan sudah terang syahid”.

Sebelum Teungku Abdul Jalil menggerakkan *jihad* untuk melawan tentara kafir Jepang, terlebih dahulu beliau masuk kampung keluar kampung berdakwah mengobarkan semangat anti fasisme. Di samping berdakwah kepada rakyat Aceh, beliau juga mendatangi para ulama-ulama terkenal seperti Teungku Chik Di Meunasah Kumbang, Teungku Di Blang Kabu dan yang lainnya berharap untuk bersama-sama memimpin laskar rakyat Aceh melawan tentara Jepang. Dan untuk mempersiapkan peperangan, Teungku Abdul Jalil membuat garis front perang di daerah Cot Plieng sebagai daerah basis perjuangannya, selanjutnya beliau menginstruksikan kepada para pengikutnya untuk tidak keluar dari daerah perang yang telah dibuatnya. Beliau sampai memberikan sebuah fatwa untuk para pasukannya bila keluar dari arena pertempuran itu, maka matinya bukanlah syahid.

Setelah sejumlah usaha untuk mencegah mengalami kegagalan, disusul dengan seruan-seruan serta ultimatum yang juga tidak diindahkan, maka akhirnya pada tanggal 10 November 1942 Jepang mulai melancarkan serangannya. Tiga hari kemudian, masjid dan sekolah di Cot Plieng telah menjadi abu. Dalam pertempuran itu Teungku Abdul Jalil dan seratus empat pengikutnya syahid dalam hujan tembakan senapan mesin dan ledakan mortir Jepang, sedangkan dari pihak Jepang terhitung tujuh puluh dua serdadunya yang mati kena tebasan parang *cikok* dan klewang serta tusukan rencong Aceh. Masubuchi secepatnya menyebarluaskan surat-surat selebaran mengkambinghitamkan Abdul Jalil, mencapnya sebagai setan, orang gila, tetapi yang dilakukan Masubuchi hanyalah sia-sia. Aceh mendapatkan lagi seorang syuhada dan pahlawan; Aceh kembali dapat menatap muka penguasa kafir ini dengan mata yang penuh memancarkan api keyakinan yang sama sewaktu menghadapi Belanda dulunya.

Dalam kasus Teungku Abdul Jalil ini bila dipandang secara antropologis terlihat bahwa rakyat Aceh sangat terpengaruh oleh karakteristik ajaran Islam, bila mereka sudah melihat kemungkaran di hadapan matanya, maka mereka mulai bergerak menuju front perang dengan semangat yang terkandung dalam ajaran Islam yaitu “ubahlah kemungkaran itu dengan tangan, bila tidak sanggup ubahlah dengan lisan atau bila tidak sanggup juga, ubahlah dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman”. Dan orang-orang Aceh bukanlah *Muslim* nominal atau abangan yang lemah imannya, maka setiap ada kezaliman, mereka selalu siap rela menyabung nyawa dengan siapa pun. Prinsip menegakkan nilai-nilai kebenaran sangat dijunjung tinggi, kebenaran bagi mereka adalah sesuatu yang amat luhur dan suci, maka menjadi wajiblah untuk mempertahankan dan membelanya. Dan kemungkaran bagi mereka adalah sesuatu yang bathil, maka wajib pula bagi mereka bertindak untuk melenyapkan kebathilan. Bahkan bila mereka tidak mampu berbuat atau menjadi korban sekalipun, namun bibit-bibit permusuhan itu telah ditularkannya lewat generasi penerus mereka. Tidak ada kompromi dengan musuh, semuanya harus *dipeucrok* (diusir) dari bumi Aceh yang suci.

Pemberontakan Bayu telah memaksa Jepang bertindak hati-hati, dan memaksa mereka untuk melayani Islam secara serius. Ternyata Jepang baru menyadari bahwa rakyat Aceh tidak kalah dalam semangat *bushido* yang mereka miliki, dan pada akhirnya mereka berpikir kembali bagaimana untuk menjinakkan hati rakyat Aceh yang sedang kalap itu. Hampir semua tokoh-tokoh Aceh yang mereka percayai telah diminta laporannya tentang sebab-sebab pembangkangan Teungku Abdul Jalil, sedangkan dari Medan *Chokan* Nakashima mengirim Xarim M.S. dan Hamka. Suatu kebijaksanaan yang lebih aktif untuk mempergunakan Islam secara berangsur-angsur telah dikembangkan. Sebagai ciri dari politik pecah belah Jepang adalah *divide of rule*, yaitu politik penjinakan ala Jepang dengan cara mengundang para tokoh-tokoh lokal untuk diajak kerjasama guna mengatasi berbagai perlawanan rakyat Aceh. Dan tindakan itu adalah jalan keluar terbaik yang ditempuh oleh pihak militer Jepang, setelah mereka mengadakan studi kasus pada pengalaman kolonial Belanda dahulu.

Puncak dari kebijakan dalam menyukseskan tujuan propaganda Jepang adalah diadakannya Konferensi Islam di Singapura pada tanggal 5-6 April 1943. Upaya ini untuk menjinakkan radikalisme umat Islam di Aceh. Untuk itu pihak Jepang telah mengeluarkan biaya dalam jumlah yang sangat banyak dan pelayanan kelas satu bagi pesertanya, mereka mengharapkan bahwa konferensi yang diselenggarakan itu memiliki daya tarik tersendiri untuk mengelabui para tokoh Aceh yang diundang. Konferensi itu ternyata seluruhnya telah diatur menurut skenario *Sendenhan*. Bahkan suatu pancingan yang sederhana untuk menyisipkan pada “Ikrar Ulama” kata-kata, “dan kami percaya akan janji *Dai Nippon*, hendak menolong agama Islam” pada penutup konferensi. Namun dari pihak tokoh Aceh menolak usulan tersebut, mereka menolak lantaran slogan politik Jepang itu sebagai slogan politik yang sangat berbahaya. Bagaimana mungkin para tokoh Aceh itu mau menerimanya, bagi mereka Jepang tidak lain adalah musuh yang harus dilawan. Mereka menjadikan pertemuan itu sebagai siasat untuk menunggu saat yang tepat

mengadakan perlawanan sesungguhnya, perang totaliter sebagaimana yang pernah mereka perbuat terhadap Belanda ketika masih bercokol di Aceh.

Ketika perealisasi hasil konferensi tidak dapat berjalan dengan baik, maka pihak Jepang membuat langkah lain guna meredam gejolak sosial yang sedang terjadi di Aceh dengan memanfaatkan peran ulamanya. Jepang kemudian membentuk beberapa wadah seperti: Majelis Agama Islam untuk Kemakmuran Asia Timur Raya (MAIBKATRA) yang didirikan pada tanggal 10 Maret 1943. Organisasi ini dipimpin oleh Tuanku Abdul Azis. Lembaga agama adalah lembaga yang paling tepat untuk menjinakkan keberingasan rakyat Aceh setelah trauma sejarah dilalui. Di samping itu dibentuk pula Badan Kebaktian Penduduk Aceh (BKPA) untuk “membina” Asia yang diketuai sendiri oleh *Shucokan* (Residen), sebagai kaki tangan rezim fasis Jepang. Organisasi ini dimaksudkan untuk mendorong rakyat Aceh supaya berbakti kepada Jepang.

Pemaksaan kehendak dari pihak Jepang ini bagi rakyat Aceh merupakan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Sesuai dengan watak rezim fasis, organisasi yang dibentuk nanti tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan “*saudara tua*”. Dan nyatalah bahwa dibentuknya wadah MAIBKRATA itu untuk menggiring para alim ulama Aceh agar mendukung pemerintah Jepang dan memenuhi permintaannya terutama untuk keperluan angkatan perangnya. Ketika titik kesabaran sudah hilang dari rakyat Aceh, maka yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana cara mereka melakukan pembalasan atas kekurang ajaran Jepang yang telah banyak menyengsarakan mereka, bukan saja kesengsaraan *bathiniyah* yaitu susahnya mereka dalam beribadah kepada Allah juga kesengsaraan *lahiriyah* sebagai manusia. Kehadiran Jepang sebagai “*saudara tua*” telah memperlakukan banyak rakyat Aceh seperti binatang yang kapan saja bisa dibantai. Nilai kemanusiaan tidak ada harga dimata pemerintah Jepang, mereka buang jauh-jauh hal tersebut yang kemudian diganti dengan nilai kebinatangan. Maka amarah yang tersumbat dari rakyat Aceh selama tiga tahun setengah diperlihatkan ketika diketahui bahwa Jepang kalah dalam Perang Dunia II.

Perebutan Senjata Jepang oleh Rakyat Aceh

Masa penjajahan rezim fasis Jepang ke Indonesia selama 3,5 tahun memberi dua fenomena yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi, penjajah Jepang membuat rakyat menderita. Tapi, di sisi lain Jepang berjasa telah mengajari pemuda Indonesia tentang ilmu militer dan ilmu perang, yang kelak di kemudian hari sangat dirasakan manfaatnya. Dengan berbekal kemahiran dan ilmu militer Jepang inilah rakyat menghadapi kedatangan Belanda setelah diketahui bahwa bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945.

Jepang, selama menduduki Nusantara, mendatangkan sejumlah besar perlengkapan perang dan senjata ke Indonesia. Untuk daerah Sumatra, Aceh menjadi tempat penyimpanan persenjataan terbesar dan terlengkap. Dalam benak pikiran para pejuang dan pemuda Aceh serta sejumlah perwira mantan

Giyu Gun lainnya, kecanggihan dan kelengkapan senjata yang dimiliki Jepang di Aceh sangat menggoda untuk direbut. Orang-orang Aceh adalah bangsa yang sangat mahir dalam menyusun siasat, merebut, menyergap serta mengintai musuh.

Saat kekuatan rakyat sudah terkonsentrasikan, maka rakyat Aceh yang dimotori oleh para pemudanya melakukan tindakan-tindakan perebutan peralatan militer Jepang. Selain dalam API (Angkatan Pemuda Indonesia), TKR (Tentara Keamanan Rakyat), TRI (Tentara Republik Indonesia) dan kekuatan rakyat yang tergabung dalam beberapa organisasi kelasykaran rakyat merebut senjata Jepang tanpa kesulitan yang berarti. Namun semua ini belumlah cukup karena Jepang benar-benar protektif terhadap hak miliknya. Untuk mempersenjatai rakyat yang bersatu dalam berbagai organisasi tersebut, tentu persenjataan Jepang sangat besar manfaatnya. Tentara tanpa senjata ibarat pistol tanpa amunisi.

Sehari setelah Jepang bertekuk lutut kepada Sekutu, para komandan tentara Jepang segera membubarkan kesatuan-kesatuan yang pernah dilatih dan dididiknya dalam ketentaraan *Gyu Gun*, *Heiho*, dan *Tokubetsu*. Bersamaan dengan itu seluruh persenjataan yang tadinya dipegang oleh putra Aceh langsung ditarik, dikumpulkan dan disimpan dalam gudang. Putra-putra Aceh disuruh pulang kampung dengan tangan kosong tanpa senjata sama sekali. Begitulah cara Jepang melakukan pengamanan terhadap persenjataan mereka sesuai kesepakatan perjanjian dengan Sekutu.

Ada satu fenomena yang menarik, yaitu para pejuang dan pemuda Aceh tampak berlomba-lomba menyerahkan diri atau berebut ingin diberi tugas oleh pimpinan untuk merebut senjata di asrama atau gudangnya sekalipun. Mereka tidak ingkar dan tidak gentar. Bagi mereka hanya ada satu tekad yaitu mengusir tentara kafir Jepang dari bumi Aceh, karena kedatangan mereka telah banyak menyengsarakan rakyat Aceh. Kemudian langkah itu didukung pula oleh banyak pemimpin perjuangan rakyat, mereka menyatakan sepakat untuk merebut senjata milik Jepang. Strategi untuk merampas senjata Jepang diserahkan kepada Teuku Hamid Azwar. Ia memilih falsafah “menebang pohon kayu besar, tebas dulu cabang dan rantingnya, kemudian baru batangnya”.

Di bawah petunjuk dan koordinasi Teuku Hamid Azwar, selaku Kepala Staf, kedelapan Wakil Markas Daerah API/TKR bersama-sama dengan laskar Pejuang lainnya di Aceh mulai melakukan perampasan senjata Jepang. Aksi itu diawali di Seulimeun yang dipimpin langsung oleh Syamaun Gaharu sebagai Komandan API/TKR Divisi V Komandemen Sumatra, kemudian merembet ke Markas Jepang lainnya. API/TKR bersama laskar Pejuang dan Barisan Rakyat melakukan perampasan senjata Jepang sampai ke seluruh pelosok wilayah daerah Aceh.

Berdasarkan hasil pantauan informan yang pernah bergabung dalam latihan kemiliteran Jepang bahwa senjata-senjata Jepang terpecah di berbagai tangan kelompok yang berbeda. Ada senjata perorangan, yang dipakai oleh pribadi-pribadi serdadu Jepang karena fungsinya menjaga diri. Ada senjata yang dikuasai oleh pemerintah sipil (*Gunseibu*). Termasuk senjata-senjata yang dipakai oleh polisi, alat pemerintah atau kedinasan lainnya, yang

kebanyakan berasal dari senjata rampasan milik Belanda. Ada pula senjata serdadu Jepang, yang masih utuh di gudang senjata atau di asrama militer.

Perbekalan senjata milik Jepang bukan sekadar itu saja, namun masih memiliki berupa *arsenal* yang terletak di kompleks lapangan terbang Lhok Nga dan lapangan terbang Blang Bintang di Aceh. Di sana banyak tertimbun senjata dan tumpukan meusiu serta lengkap dengan meriam berbagai ukuran.

Dan semenjak itu, serentak di daerah Aceh diadakan penyerbuan-penyerbuan ke tangsi tentara Jepang untuk merebut senjata. Perebutan senjata ini diawali di Seulimeum. Pada tanggal 26 November 1945, dini hari di Seulimeum sudah kelihatan ramai. Setelah menunaikan sholat subuh, rakyat tidak kembali lagi ke rumahnya tetapi langsung bergerombol di sekitar asrama militer Jepang, mondar-mandir mengelilingi asrama.

Sebelumnya ada instruksi dari pimpinan Wakil Markas Daerah API, rakyat memang belum diperkenalkan melakukan aksi. Mereka hanya boleh lalu-lalang berkelompok, sengaja untuk menarik perhatian. Strategi “perang urat syaraf” sengaja dilancarkan untuk menggoyahkan mental dan semangat serdadu Jepang yang sudah kalah perang. Dan banyak dari mereka yang telah melakukan *harakiri*.

Langkah yang diambil oleh Jepang untuk mengatasi keadaan adalah dengan mengadakan perundingan. Dalam perundingan itu dicapai kesepakatan bahwa Jepang akan menyerahkan 120 senjata karaben, 3 buah meriam gunung dan 3 gudang amunisi. Sedangkan untuk Jepang mendapat imbalan berupa jaminan keamanan dan perbekalan sampai mereka meninggalkan Aceh pada tanggal 3 Desember 1945.

Perebutan senjata berikutnya terjadi di Lhok Nga, Aceh Besar. Perebutan senjata di Lhok Nga terjadi pada tanggal 11 Desember 1945, dalam perebutan itu sempat terjadi pertempuran. Bertindak sebagai komando pertempuran adalah oleh Nyak Neh dan Pawang Leman. Tangsi Angkatan Laut Jepang yang terletak di tepi sungai Krueng Raba diserbu oleh pemuda dan rakyat dari jurusan Leupung di bawah pimpinan Cut Lem Rahman. Sementara itu Teungku Ahmad Adam dan Teuku Manyak memimpin massa dari arah Lampu'uk-Lam Lhom menyerbu tangsi Angkatan Udara Jepang yang terletak di lapangan terbang.

Pertempuran seru ini sempat membuat Jepang pontang-panting dan perundingan pun akhirnya berlangsung. Gencatan senjata di medan tempur segera dipatuhi. Perundingan antara Jepang yang diwakili *Chokan S. Iino* dengan Residen Teuku Njak Arief dicapai kesepakatan bahwa Jepang menyerahkan pangkalan Lhok Nga lengkap dengan persenjataan yang ada di sana, termasuk meriam-meriam, kepada pihak pejuang. Sedang tentara Jepang sendiri dalam tempo lima hari akan mengosongkan tempat itu dan mereka berpindah ke pangkalan Blang Bintang.

Dan banyak lagi tempat-tempat di daerah Aceh yang menjadi sasaran pejuang dalam merebut senjata seperti di Gelanggang Labu, Juli (Bireun, Aceh Utara), di Langsa (Aceh Timur), di Bakongan (Aceh Selatan), di Meulaboh (Aceh Barat) dan di Sigli (Kabupaten Pidie). Pada akhirnya, sejarah memper-

lihatkan bahwa kekuatan domestik (kekuatan rakyat Aceh sendiri) jauh lebih kuat dibanding dengan kekuatan apapun di luarnya dalam mengusir penjajah.

Perlawanan terhadap PUSA

Perseteraan atau konflik antara uleebalang dan ulama sesungguhnya bukan hanya meledak pada tahun 1946. Pada tahun 1948 dan tahun-tahun menjelang meletusnya pemberontakan DI/TII pun sudah terjadi peristiwa Sayid Ali Al Sagaf. Peristiwa Said Ali Cs adalah lanjutan konflik antara kaum ulama dan *uleebalang* yang belum hilang. Penyebabnya adalah masalah penguasaan harta *uleebalang* pasca peristiwa Cumbok. Bahkan sekiranya pun pembagian harta milik *uleebalang* berlaku secara adil dan Majelis-majelis Pertimbangan bekerja seperti semestinya, perlawanan masih tidak dapat terelakkan. Kecaman ditujukan tidak hanya karena kaum ulama merebut harta milik *uleebalang*, melainkan juga bertambah masuknya anggota-anggota PUSA yang terkemuka dalam pemerintahan militer dan sipil. Banyak pamong yang baru ini dinyatakan tidak cakap; penilaian yang bukan tidak benar tetapi agak keras. Masalah-masalah yang dihadapi pamong-pamong praja baru yang tidak berpengalaman ini berlipat ganda dan rumit. Peralihan dari negara jajahan ke negara merdeka bagaimanapun bukanlah peralihan yang mudah. Suatu aparat pemerintah yang baru harus dibangun dari awal mula. Dan lebih celaka lagi, terdapat blokade Belanda yang cepat mengakibatkan keadaan ekonomi yang merosot dan inflasi yang membubung.

Ketidakpuasan—baik terhadap keadaan ekonomi yang berlaku maupun dugaan perebutan kekuasaan yang dilakukan pemimpin-pemimpin PUSA—meletus pada awal 1948. Pada tahun itu perlawanan terhadap Pemerintah Daerah Aceh, yang sejak Agustus tahun lalu dipimpin Daud Beureueh sebagai gubernur militer, mencapai puncak. Tuduhan-tuduhan adanya korupsi besar-besaran—perdagangan gelap, pembunuhan lawan-lawan politik, diabaikannya perintah Pemerintah Pusat dan penyelewengan pendapatan dari ladang-ladang minyak dan perkebunan—ditujukan terhadap mereka yang baru-baru ini memperoleh kursi dalam Pemerintahan.Daerah.

Pihak oposisi dipimpin Sajid Ali Alsaqaf dan Waki Harun. Kedua pemimpin ini pada Maret dan April 1948 mengirimkan surat kepada gubernur Sumatera dan mendesak agar diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu Pemerintah Daerah Aceh. Beberapa bulan kemudian, Agustus 1948, dalam rangka kunjungan Soekarno ke daerah ini, mereka berusaha menyelenggarakan demonstrasi. Tetapi upaya ini digagalkan pihak penguasa.

Pada bulan-bulan yang berselang kecaman terhadap pejabat-pejabat Pemerintah telah menjadi demikian besar sehingga Amin, ketika itu gubernur Sumatera, merasa sendiri perlu mengumumkan bahwa "Keinginan sebagian rakyat daerah untuk perbaikan pemerintah daerah dengan menggantikan para pejabat yang sekarang bertepatan dengan hasrat yang sudah sejak lama dikandung Pemerintah" "Tetapi", Amin melanjutkan, "Pemerintah sekali-kali tidak dapat menyetujui keinginan yang hendak melaksanakan perubahan dengan serta-merta, atas tuduhan-tuduhan yang tidak dapat atau belum

nyata berdasar atas alasan-alasan yang tepat dan terbukti kebenarannya".⁴⁷

Pada awal Agustus Sajid Ali Alsaqaf dan rekan-rekannya ditangkap dan dituntut karena memfitnah para pejabat senior Pemerintah Daerah. Beberapa hari kemudian, sesudah mereka dibebaskan, mereka melaksanakan upaya pertama melakukan kudeta. Maksud ini mereka nyatakan dalam sebuah surat kepada Pemerintah Daerah di Banda Aceh dengan memaklumkan berlakunya "Revolusi yang ditujukan terhadap orang-orang yang tak punya prinsip, karena Pemerintah sendiri nyatanya tidak menyingkirkan mereka".⁴⁸ Malam berikutnya orang banyak berkumpul di Lam Baro untuk menerima perintah yang menyuruh mereka menuju Banda Aceh untuk menangkap sejumlah pejabat. Sebelum rencana ini dapat dilaksanakan, Pemerintah Daerah yang telah diberitahu hal ini mengirimkan Tjek Mat Rachmani dan Tengku Hasballah Indrapuri ke Lam Baro untuk menenteramkan mereka yang mungkin memberontak dan mencegah mereka meneruskan maksudnya.

Pada 4 Nopember Sajid Ali Alsaqaf dan Waki Harun melakukan upaya yang kedua untuk merebut kekuasaan. Mereka berusaha memanfaatkan hadirnya pada hari itu hampir semua pejabat pemerintah senior Aceh di Banda Aceh guna membahas persoalan-persoalan pemerintah dengan menangkapi mereka sekaligus. Tetapi lagi-lagi Pemerintah telah diberitahu adanya rencana ini sebelumnya, dan ditangkaplah komplotan ini. Mereka dilepaskan dan untuk sementara dibuang dari Aceh pada November 1949, menjelang penyerahan resmi kedaulatan.⁴⁹

Usaha kup Sajid Ali Alsaqaf dan Waki Harun dinyatakan sebagai perbuatan *uleebalang* maupun perbuatan para ulama yang tidak puas karena merasa dirintangi untuk berkuasa. melukiskannya sebagai "upaya terbaik dari banyak upaya yang dilakukan *uleebalang* untuk merebut kekuasaan kembali".⁵⁰ sebaliknya, berdasarkan keterangan Pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat pada 1953, menulis: "Ulama-ulama yang tidak puas membentuk organisasi gelap di bawah pimpinan Said Ali ... untuk menguasai PUSA".⁵¹ Namun, suatu penjelasan lain dikemukakan Teuku Jusuf Muda Dalam (Yusuf Muda Dalam) bahwa upaya ini merupakan masalah intern PUSA dan menggambarkan pengelompokan dalam organisasi itu.⁵² Tetapi tak satu pun dari penafsiran ini tampaknya benar-benar tepat. Walaupun Sajid Ali Alsaqaf, dalam konfrontasinya dengan para penguasa daerah membela para *uleebalang* yang dipenjarakan, ini tidaklah berarti bahwa ia memimpin suatu gerakan *uleebalang*. Mungkin benar, seperti juga yang lain-lain bahwa ia lebih percaya pada bakat memerintah para *uleebalang*. Sebaliknya, alim ulama Islam merupakan mayoritas dalam pimpinan organisasi ini.***

⁴⁷ Sumatera Utara, *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 202.

⁴⁸ Insider (S.M. Amin), *Atjeh Sepintas Lalu*, (Jakarta: Fa Archapada, 1950), hlm. 83.

⁴⁹ Sumatera Utara, *op.cit.*, hlm. 202-209;

⁵⁰ S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 15.

⁵¹ JarahDam-I, *Dua Windhu Kodam I/Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, 1972), hlm. 92.

⁵² Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureu'eh*, Jilid I, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan RI, t.t.), hlm. 292.

Bab 4

ACEH MASA KEMERDEKAAN

TANGGAL 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta memprokla-mirkan Indonesia Merdeka. Jepang harus kembali ke negeri-nya dengan tangan kosong, tidak membawa pulang senjata, karena seluruh senjatanya ditinggalkan untuk orang Aceh, menjadi pertahanan Aceh dari dijajah Belanda kembali, karena Belanda pada waktu itu sudah berada di Medan, mem-bonceng pada Sekutu. Kekuasaan yang dulu diberikan oleh Belanda kepada Uleebalang-Uleebalang telah membangkitkan kenangan kaum uleebalang untuk “menjemput” kembali me-reka ke tanah Aceh. Bagi sebagian kalangan *uleebalang*, Belanda adalah penguasa yang akan terus berkuasa dan akan terus juga menempatkan kaum *uleebalang* sebagai *zelf-bestuurder*.

Pada penghujung tahun 1945, tidak lama setelah prokla-masi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, masyarakat Aceh masih harus menghadapi sebuah problema besar yang ditandai dengan meletusnya sebuah perang saudara antara kelompok *uleebalang*⁵³ dengan kelompok ulama. Konflik berdarah ini lebih dikenal dalam sejarah Aceh dengan nama Perang Cumbok atau Peristiwa Cumbok. Nama Cumbok itu sendiri diambil dari nama sebuah tempat yang dijadikan sebagai markas besar kelompok *uleebalang* yang sekarang terletak dalam wilayah Kecamatan Lam Meulo, (sekarang Kota Bakti), Kabupaten Pidie. Sering juga dinamakan dengan revolusi sosial.

Peristiwa Prang Cumbok ini sendiri sebenarnya sebuah kekesalan kecil

⁵³*Uleebalang* pada awalnya merupakan penguasa-penguasa daerah yang otonom. Sebelum terbentuknya Kerajaan Aceh, mereka adalah penguasa di daerahnya masing-masing secara bebas dan merdeka, misalnya penguasa pelabuhan, raja-raja kecil dan lainnya. Mereka bertindak sebagai penguasa merdeka ke dalam maupun ke luar. Gelar mereka bermacam-macam, ada yang menamakan diri dengan Sultan, Syahbandar, Meurah dan lain-lain sebagainya. Sesudah ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh, daerah itu disamakan statusnya dengan *naggroe* dan kepala-kepalanya mereka disebut dengan *uleebalang*. Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh Dalam Tahun 1520-1675*, (Monara, Medan, t.t.), hal. 89.

karena para penguasa tradisional ini meng-alami *post-power syndrom* setelah Belanda dan Jepang tidak memegang kendali pemerintahan dan kekuasaan di Aceh. Kekuasaan yang diberikan oleh Belanda kepada Uleebalang-Uleebalang berakhir pada bulan September 1945. Oleh sebab itu maka Teukoe Oemar, Uleebalang Keumangan, memanggil Uleebalang-Uleebalang dalam daerah Pidie untuk datang ke Beureunuen karena akan diadakan suatu permusyawaratan dengan Uleebalang-Uleebalang tersebut. Pada kesempatan itu, Teukoe Oemar Keumangan bertanya pada Uleebalang-Ulee-balang: “Celana Uleebalang-Uleebalang sudah diturunkan oleh POESA, apa ada malu? Kalau ada malu bagaimana cara mengatasinya?” Semua diam. Kata Teukoe Oemar Keumangan, “tak ada jalan lain hanya untuk perang. Maukah Uleebalang-Uleebalang berperang?” Akhirnya, semua menjawab “Mau”.⁵⁴ Inilah awal petaka itu terjadi.

Dengan sebab itu maka Teukoe Oemar Keumangan mengangkat: (1) T. Daod Tjoembok menjadi Panglima Perang; (2) T. Laksamana Oemar Andjong diangkat menjadi Kepala Perlengkapan, menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan perang. Sesudah Teukoe Oemar Keumangan mengangkat T. Doed Djoembok menjadi Panglima Perang, maka Teukoe Doed Djoembok membentuk 3 pasukan tentaranya: (1) Pasukan Tjap Saoh; (2) Pasukan Tjap Toembak; (3) Pasukan Tjap Peudeueng.⁵⁵ Kepada tiap-tiap pasukan itu ditentukan tugas masing-masing. Ketika pasukan itu menjalankan tugasnya masing-masing, maka terjadilah perlawanan dari rakyat karena tidak sanggup manahan ancaman-ancaman dari pasukan itu.

Peperangan Uleebalang dengan rakyat yang terjadi pada penghabisan tahun 1945 berakhir pada tanggal 9 Januari 1946, dinamai Revolusi Sosial. Yang dimaksud dengan rakyat sesungguhnya adalah kaum ulama. Perang yang secara singkat dapat digambarkan merupakan serangan kaum uleebalang terhadap kaum ulama yang kemudian dibalas dengan serangan dari “Pemerintah RI Daerah Atjeh” yang sebenarnya mewakili kaum ulama dan rakyat umum. Di kalangan masya-rakat, sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu telah pernah dijanjikan oleh anak-anak kecil yang main kuda kepang di waktu malam dengan lantunan lagu-lagu sosial (*folksong*) yang riang:

*Denden poela pisang, Bambang poela pade
Teukoe Tjoembok laga perang, UleeBalang habeh matee.*⁵⁶

Bagi yang melihatnya dalam perspektif sosiologis menama-kannya sebagai sebuah revolusi sosial, karena peristiwa itu terjadi akibat perbedaan sosial, tingkat sosial. Sementara itu, ada juga yang cenderung menamakannya dengan revolusi politik, karena peristiwa itu untuk menjatuhkan kekuasaan politik *uleebalang*.⁵⁷

Sebelum sampai pada pembahasan klimak konflik ulee-balang dengan ulama, tidak salah kiranya pada kesempatan ini menoleh sekilas pada fungsi dan kedudukan serta hubung-an antar kelompok elit masyarakat Aceh pada

⁵⁴ Amelz, *Riwajat Singkat Atjeh Bangoen Sesoadah Tidoue Njenjak Beberapa Poeloeh Tahoen Jang Laloe*, (Naskah ketik, Pidie, t.t.), hlm. 6.

⁵⁵ Amelz, *Ibid.*, hlm. 7.

⁵⁶ Amelz, *Ibid.*, hlm. 9.

⁵⁷ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992), hal. 96

masa lalu, yaitu sultan, *uleebalang* dan ulama. Dalam sejarah, terutama pada masa-masa Kerajaan Aceh sedang menuju puncak tangganya, ketiga kelompok ini telah menampakkan keterpaduan dan keharmonisan dalam membangun sebuah ke-utuhan dan kejayaan Aceh. Sultan, *uleebalang* dan ulama telah menjadi tiga pilar utama masyarakat Aceh yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sultan merupakan pilar penting yang menempati posisi pertama sebagai kepala pemerintahan yang menguasai seluruh wilayah Aceh. Selain itu, sultan juga menjadi salah satu pilar utama yang mendukung kehidupan adat dan bersama-sama dengan *uleebalang* menjadi simbol keberadaan dan peranan adat. Sultan mendapat gelar kehormatan dari masyarakat dengan panggilan “*Poteu*” dan keturunannya digelar dengan “*Tuanku*”⁵⁸. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, adat dan agama menjadi dua unsur yang dominan dan memegang peranan penting untuk mengendalikan tatanan kehidupan dalam proses inter-aksi baik bersifat vertikal maupun horizontal.⁵⁹

Dalam kerajaan-kerajaan di Indonesia dan Malaya pada zaman dulu, jabatan *hulubalang* (di Aceh lebih populer dengan sebutan *uleebalang*) merupakan nama pangkat dalam jabatan ketentaraan raja atau sultan. Tetapi *uleebalang* di Aceh, di samping mengemban tugas dalam jabatan ketentaraan, juga disertai tugas untuk mengepalai negeri atau “*nanggroe*” (setingkat kecamatan). *Uleebalang* merupakan bawahan sultan dan pengangkatannya didasarkan pada garis keturunan, sultan tidak banyak melakukan intervensi dalam hal ini, karena sistem pergantian *uleebalang* di suatu daerah sudah mentradisi dilakukan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan. Sultan hanya memberikan surat pengesahan saja melalui surat putusan sultan (*sarakata*) berstempel kerajaan yang dikenal dengan nama “*cap sikureueng*” (*cap sembilan*).⁶⁰ *Cap sikureueng* merupakan lambang dari kekuasaan Sultan Aceh. *Uleebalang* yang mendapat hak-hak istimewa dan tugas-tugas istimewa dari sultan dinamakan dengan “*Uleebalang Poteu*”⁶¹ Gelar kebangsawan yang disandang oleh *uleebalang* dan keturunannya adalah “*Teuku*” yang digunakan untuk gelar bangsawan pria, sedangkan untuk wanita memperoleh gelar “*Cut*”, “*Cut Nyak*” atau “*Pocut*”. *Uleebalang* sebagai kepala pemerintahan yang sedang berkuasa di daerah otonom menggunakan gelar kebangsawanan *Teuku Chik*” atau “*Ampon Chik*” atau “*Teuku Ampon*”.⁶²

Tugas penting *uleebalang* di antaranya adalah memimpin pemerintah “*nanggroe*”, menjalankan perintah-perintah sultan yang tercantum dalam *sarakata*, instruksi-instruksi, adat dan hukum, menyediakan prajurit-prajurit bila dibutuhkan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di samping dibantu oleh *imum mukim* dan *keuchik*, juga oleh seorang hakim pengadilan

⁵⁸ A.K. Jacobi, *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998), hal. 297

⁵⁹ Eric Eugene Morris, “Aceh : Social Revolution and The Islamic Vision”, dalam Audrey R. Kahin (ed.), *Regional Dynamic of the Indonesian Revolution: Unity from Diversity*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985), hal. 90

⁶⁰ A.K. Jacobi, *loc.cit*

⁶¹ Zakaria Ahmad, *op.cit.*, hal. 89.

⁶² C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, Deel I, (E.J. Brill, Leiden, 1893), hal. 75.

yang disebut *qadhi* serta seorang panglima perang yang diberi gelar “pang” di belakang namanya. Pang-lima perang ini bertugas memimpin penduduk “nanggroe” yang dipersiapkan untuk menjadi prajurit.⁶³ Selain itu, dibantu juga oleh seorang wakil, kerani (semacam kepala kantor), petugas keamanan (polisi), pesuruh untuk menyampaikan perintah kepada *Imum Mukim* dan *kadhi*. Di tempat tinggalnya juga terdapat seorang *banta* (saudara atau familinya) yang membantu kelancaran urusan pemerintahan.⁶⁴

Dilihat dari struktur politik sultan menempati posisi teratas dan sebagai pusat dari segala kekuasaan. Kedudukan *uleebalang* adalah sebagai bawahan sultan dan bertugas menjalankan pemerintahan di daerah kekuasaannya. Ulama merupakan pemimpin tidak resmi secara struktural, namun secara tradisional mereka memiliki legitimasi yang kuat dan sebagai panutan masyarakat. Kepemimpinannya didasarkan pada kemampuan dan kelebihan yang dimiliki baik ilmu pengetahuan agama, kesaktian, perilaku, sifat kepribadian maupun faktor keturunannya.⁶⁵

Dalam perspektif masyarakat Aceh, pendefinisian ulama (dipanggil Teungku) lebih cenderung ditinjau dari aspek keagamaan secara ideal sebagai *warisatul ambiya* (pewaris para Nabi), sehingga selain menguasai ilmu agama, sikap dan perilakunya juga menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam pengertian ini, ulama ditempatkan pada hierarki sosial yang tinggi dalam masyarakat Muslim.⁶⁶

Dari sudut sosiologis, pengertian di atas memberi peluang bagi ulama untuk menempati posisi penting, ia menjadi pusat dalam hubungan antara sesama penganut agama di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, ulama lebih sering tampil sebagai figur yang menentukan berbagai persoalan umat baik yang berhubungan dengan masalah pemerintahan (politik), sosial dan kultural, maupun pendidikan. Menurut Saletore, masyarakat Muslim memberikan kedudukan yang tinggi kepada ulama, berkat pengetahuan keagamaan mereka.⁶⁷ Bagi kalangan masyarakat biasa, para ulama dipandang sebagai sosok yang mampu mengundang keberkahan. Kondisi ini mudah dipahami sebab suatu kelompok masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai agama, ulama sangat dekat dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dalam struktur politik tradisional, kehidupan masyarakat Aceh selain berada di bawah kekuasaan *uleebalang* juga tidak terlepas dari pengaruh ulama.

Selain berfungsi sebagai simbol keberadaan adat, sultan juga dianggap sebagai pimpinan pemerintahan dan kerajaan. Ia dapat mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat penting kerajaan, demikian pula kekuasaannya terhadap para *uleebalang*. Melalui *Sarakata* (surat pengesahan)

⁶³ *Ibid.*, hal. 97

⁶⁴ Besschrijving van Het Zelfbestured Landschap Bagok en Boengeng, J.G. Van Exel, Afdeeling ooskust van Atjeh, Atjeh en Onderhoorigheden, Arsip Nasional, Atjeh Serie 6, No. Reel Film II, 1935, hal.

⁶⁵ Ja'cuba Karepesina, *Mitos, Kewibawaan, dan Perilaku Budaya*, (Jakarta, PT Pustaka Grafika Kita, 1988), hal. 53

⁶⁶ Saletore, “Ulama”, dalam Sartono Kartodirdo (ed.), *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta, LP3ES, 1983), hal. 129.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 129

sultan dapat mengangkat seseorang menjadi *uleebalang* di suatu daerah dan dapat pula memberhentikannya dengan mencabut *Sara-kata* tersebut.⁶⁸

Kekuasaan sultan yang dapat mengangkat dan memberhentikan para pejabat kerajaan dan *uleebalang* tidak berlaku bagi para ulama, karena kedudukan mereka di luar struktur pemerintahan, kecuali *Qadhi Malikul ‘Adil* (Ketua Mahkamah Agung, pemegang kekuasaan hukum) yang memang ditunjuk oleh sultan. Kedudukan para ulama yang bersifat non-struktural ini memungkinkan mereka untuk lebih berperan sebagai mediator antara penguasa dengan masyarakat.⁶⁹

Ketiga kelompok elit tradisional ini memiliki hubungan mutualitas. Bagi para ulama, keberadaan sultan menjadi pelindung bagi diri dan kepentingan mereka dalam menja-lankan misinya untuk menegakkan nilai, norma dan aturan keagamaan. Selain itu, mereka juga memerlukan sultan untuk menjamin kebebasan mereka dalam usaha menyebarkan ajaran Islam tanpa dibatasi oleh wilayah-wilayah kekuasaan *uleebalang*. Oleh karena itu, perlindungan dan pengakuan dari sultan terhadap keberadaan mereka dalam masyarakat menjadi tameng bagi ulama dalam menjalankan misinya. Di samping itu, mereka dapat mengharapkan kerjasama dari para *uleebalang* yang menguasai wilayah-wilayah tempat mereka menjalankan misinya.

Bagi ulama, keberadaan *uleebalang* mungkin dapat diibaratkan sebagai “mitra kerja”, dan dapat saling memberi dukungan. Kedudukan ulama dan *uleebalang* dalam masya-rakat menempati posisi yang setingkat, namun strukturnya berbeda.. Pihak yang satu berperan sebagai pimpinan agama (elite religius), sedangkan pihak sebagai pemimpin pemerin-tahan (elite kekuasaan)

Bagi *uleebalang*, sultan merupakan sumber kekuasaannya. Kekuasaan *uleebalang* dapat berlangsung karena adanya pe-ngakuan dan pengesahan dari sultan. Demikian pula halnya dengan ulama, sultan menjadi pelindung bagi diri dan kepentingannya dan kebebasan dalam usaha menyebarkan-luaskan ajaran Islam tanpa dibatasi oleh wilayah kekuasaan tertentu. Saling ketergantungan antara ketiga pemimpin masyarakat ini telah berlangsung sejak empat abad yang lalu.

Sebelum munculnya para imperialisme Belanda, kehi-dupan ketiga elemen masyarakat tersebut berjalan sangat harmonis. Satu sama lain bersatu dan saling mengisi serta saling menghormati.⁷⁰ Tercatat dalam sejarah- terutama pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah yang memper-satukan Kerajaan Aceh Meukuta Alam dengan Kerajaan Darul Kamal menjadi Kerajaan Aceh Darussalam di akhir abad ke-15 M- hubungan antara kerajaan dan penguasa dengan kaum cerdik pandai, terutama para ulama, sangat harmonis. Tidak hanya di kalangan atas saja keserasian ini terjalin, tetapi berlaku di seluruh jajaran kerajaan sampai ke daerah-daerah taklukannya. Para cendikiawan dan ulama mendapat kedu-dukan terhormat

⁶⁸ James T. Siegel, *The Rope of God*, (Berkeley, University of California Press, 1978), hal. 37

⁶⁹ J. Kreemer, *Atjeh : Algemeen Samenvattend Overzicht van Land en Volk van Atjeh en Onderhoorigheden*, (Leiden, N.V. Boekhandel en Drukkerij Voorheen E.J. Brill, 1923), hal. 269-270

⁷⁰ A.K. Jakobi, *op.cit.*, hal. 40

dalam masyarakat, baik sebagai penasehat terpercaya maupun sebagai pimpinan lembaga pendidikan dan pengadilan.

Jalinan hubungan kerjasama antara ulama dan umara juga tampak terlihat nyata untuk pertama sekali ketika Sultan Mansyur Syah naik tahta. Ia membuka kesempatan luas datangnya guru-guru dan ulama luar negeri. Di masa pemerintahan-tiba dari Makkah Syekh Abul Kahhar bin Syekh Ibnu Hajar, pengarang kitab Syaiful Qath'i yang berisikan ajaran dogmatis dan mistis. Di samping itu, ia juga meng-ajarkan ilmu fiqh.⁷¹

Sultan Iskandar Muda telah melibatkan kedua komponen masyarakat ini ikut serta dalam mengatur roda pemerintahan. Sultan ini mengangkat ulama sebagai penasehatnya dalam menciptakan dan menjalankan tata pemerintahan. Dalam sejarah kesultanan Aceh, terdapat sejumlah nama ulama yang menjadi penasehat sultan. Misalnya, Syamsuddin As-Sumatrani sebagai penasehat Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Nuruddin Ar-Raniry sebagai penasehat Iskandar Tsani (1636-1641) dan Syiah Kuala sebagai penasehat Shafiatuddin (1641-1675) dan Jalaluddin Atharusani sebagai penasehat Johan Syah (1735-1760).⁷²

Selain sebagai penasehat sultan, ulama juga dipercayakan untuk memimpin dan mengurus lembaga-lembaga hukum (pengadilan). Terdapat gelar kehormatan bagi para pemimpin lembaga hukum di pusat pemerintahan. *Qadhi Rabbul Jalil*, merupakan lembaga hukum yang menangani masalah-masalah pidana dan perdata. Sementara *Qadhi Malikul Adil* merupakan lembaga peradilan raja, yang fungsinya dapat disamakan dengan Mahkamah Agung.⁷³

Badan atau lembaga legislatif yang turut mendampingi sultan dalam melaksanakan tugasnya pada masa Sultan Iskandar Muda dikenal dengan nama "*Balairung*" yang anggota-anggotanya terdiri dari 4 orang *uleebalang* terbesar di Aceh Besar. *Balai Gadeng* yang anggotanya terdiri dari 22 orang ulama besar di Aceh.⁷⁴ Pengadilan dalam pemerintah Kerajaan Aceh diatur sesuai dengan tingkatannya, dari gam-pong, mukim, naggroe dan di tingkat pusat. Masing-masing memiliki badan pengadilan tersendiri. Di tingkat pusat kerajaan dipangku oleh *Qadhi Malikul Adil* yang dibantu oleh 4 orang mufti yang menetapkan hukum-hukum agama. Dalam perkara-perkara yang besar anggotanya ditambah para pembesar dan ulama-ulama terkemuka yang menjadi anggota *Bale Gadeng*.⁷⁵

Buah dari hasil kerjasama antar ketiga kelompok itu adalah lahirnya sebuah perundang-undangan Kerajaan Aceh yang memuat hukum dan adat yang bersendikan Islam, yang menjadi pedoman bagi pengadilan untuk memutuskan berbagai perkara Hukum dalam perundang-perundangan Kerajaan Aceh adalah syariat Islam dengan memakai pedoman Al-Quran,

⁷¹ A. Hasjmy, "Kerjasama Ulama-Umara Salah Satu Ciri Khas Aceh", *Sinar Darussalam*, Edisi 168/169, (Banda Aceh, t.t.), hal. 147.

⁷² Ali Hasjmy, *Sumbangan Kesusastraan Aceh Dalam Pembinaan Kesusastraan Indonesia*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1977), hal. 29-34.

⁷³ J. Kreemer, *op.cit.*, hal.61

⁷⁴ Zakaria Ahmad, *op.cit.*, hal. 92

⁷⁵ Hurgronje, *op.cit.*, hal. 98

Hadits ijmak dan qiyas. Adat ialah semua peraturan yang tidak tertulis yang merupakan adat kebiasaan yang turun-turun temurun di mana tiap rakyat mematuhi. Termasuk dalam hal ini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh sultan, yang disebut sarakata. Pada masa Sultan Iskandar Muda sebahagin adat dan sarakata-sarakata dihim-pun dalam sebuah buku himpunan undang-undang yang dinamakan dengan *Adat Meukuta Alam*.⁷⁶

Hubungan kerjasama ulama-umara dalam Kerajaan Aceh Darussalam terpecar dari dalam sebuah untaian *hadih maja* yang berbunyi : *adat bak poteu Meureuhom, hukom bak Syiah Kuala, kanun bak Putro Phang, resam bak Laksamana, hukom ngon adat, hanjeuet cre bre lagee zat ngon sifeuet*.⁷⁷ (Hukum adat di tangan raja, hukum agama di tangan ulama, membuat undang-undang hak Putri Pahang, urusan perang di tangan Laksamana, hukum agama dan adat, tidak boleh terpisah, seperti zat dengan sifat)

Maksudnya adalah kekuasaan eksekutif atau kekuasaan politik berada di tangan sultan. Kekuasaan yudikatif berada di tangan ulama yang menjadi *Qadhi Malikul Adil* (Ketua Mahkamah Agung). Makna lain dari *hadih maja* adalah mencerminkan struktur kekuasaan yang mana hubungan ulama-umara berjalan seirama baik dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Gampong dipimpin oleh dwitunggal (ulama-umara) yaitu *keuchik* dan *imum meunasah* yang dibantu oleh *Tuha Peut*. Mukim dipimpin oleh dwitunggal (imum dan Qadhi Mukim). Nanggroe juga dipimpin oleh dwitunggal (*uleebalang* dan *Qadhi Naggroe*), *Sagoe* dipimpin oleh dwitunggal (*Panglima Sagoe* dan *Qadhi Rabbul Jalil*). Kerajaan juga dipimpin oleh dwitunggal, yaitu *Sultan Malikul Adil* dan *Qadhi Malikul Adil*.⁷⁸

Keberadaan dan peranan serta kerja sama antara ketiga pilar masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Aceh sampai akhir abad ke-19 masih tetap terstruktur sebagaimana masa sebelumnya, yaitu kelompok yang terdiri dari sultan beserta keluarganya, *uleebalang*, ulama dan rakyat biasa.⁷⁹ Namunpun demikian, terutama ketika Kerajaan Aceh Darussalam mulai melemah, kekuasaan *uleebalang* semakin bertambah besar. Banyak urusan peme-rintahan dalam bidang-bidang tertentu diserahkan kepada *uleebalang* sehingga *Naggroe* dengan kepalanya *uleebalang* sudah merupakan sebuah daerah otonom yang luas. Sering pula *uleebalang* bertindak sebagai penguasa daerah yang merdeka, sehingga kekuasaan sultan hanya tinggal formalitas saja. Tapi keadaan yang serupa ini terjadi sesudah abad ke-17, yaitu pada saat Kerajaan Aceh dalam keadaan yang sudah lemah.⁸⁰

Selain mendapat otonomi untuk mengurus daerahnya, peran *uleebalang* secara tidak langsung juga ikut menen-tukan dalam proses pemilihan seorang sultan. Hal ini ditem-puh melalui pembentukan persekutuan *Sagi*. Kemudian mere-ka memilih salah seorang di antara mereka yang paling cakap dan berpengaruh untuk memimpin persekutuan *Sagi*. Pemim-pin ini disebut

⁷⁶ Ahmad, *op.cit.*, hal. 94

⁷⁷ Hurgronje, *loc.cit.*

⁷⁸ A. Hasjmy, *op.cit.*, hal. 148

⁷⁹ James Siegel, *Op.cit.*, hal. 10

⁸⁰ Zakaria Ahmad, *op.cit.*, hal., 90

Panglima Sagi. Melalui Panglima Sagi inilah mereka dapat memilih dan menjatuhkan seorang sultan.⁸¹ Pesersekutuan Sagi semacam itu hanya terdapat di daerah-daerah sagi dalam wilayah kekuasaan sultan, sedangkan dalam wilayah Aceh inti (*Lhee Sagoe*), masing-masing daerah sagi berdiri sendiri. Dalam pemerintah Kesultanan Aceh, daerah terbagi dalam dua bagian, yaitu wilayah Aceh Inti (Aceh Besar), dan wilayah kekuasaan Sultan. Sejak pemerintahan Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678) wilayah Aceh Inti dibagi lagi dalam tiga sagi. Tiap-tiap sagi terdiri atas sejumlah mukim. Berdasarkan jumlah mukim yang disatukan terdapat Sagi XXII Mukim, Sagi XXV Mukim dan Sagi XVI Mukim. Pimpinan *Sagi* di wilayah ini disebut *uleebalang* sekaligus merangkap sebagai Panglima Sagi.⁸²

Lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Kira-kira demikianlah makna peralihan sejarah dari kolonial Belanda ke Orde Lama dalam pandangan orang-orang Aceh. Semenjak munculnya konsep baru negara kebangsaan (*nation state*) pada masa awal pasca kolonialisme, banyak pesimisme yang berkembang di kalangan para pengamat negara-negara yang baru lahir tersebut. Pesimisme mereka terutama para ilmuwan politik dan antropolog, didasarkan pada kenyataan bahwa negara kebangsaan dibangun hanya atas satu semangat, yaitu semangat untuk merdeka dari penjajah (bangsa-bangsa maju/Barat). Semangat ini diasumsikan tidak mampu bertahan lama untuk menopang tetap tegaknya negara bangsa tersebut karena proses kemajuan zaman akan menggerogoti semangat tersebut.

Dalam era Perang Dingin, yang merupakan masa *political blocking* yang dialami negara kebangsaan setelah lepas dari kolonialisme, banyak tawaran menggiurkan dari kubu liberal dengan "program pembangunan" yang dikenal dengan istilah modernisasi telah mempengaruhi kesadaran masyarakat dan rakyat di negara baru yang terdiri dari banyak lapisan horizontal dan vertikal. Tawaran yang sempat mempengaruhi kesadaran rakyat ini pada akhirnya berakibat semangat persatuan (*raison d'etre*) yang dulu menjadi sendi dasar pembentuk negara kebangsaan tersebut menjadi pudar. Ini konsekuensi dari anggota masyarakat negara kebangsaan yang sadar bahwa pembangunan (modernisasi) merupakan pembaharuan sosial dan kemajuan material yang amat diinginkan serta diperjuangkan dengan kuat.

Semangat mengejar ketertinggalan telah membuat banyak pemimpin negara kebangsaan alpa mengingatkan masyarakat bahwa semua tujuan yang diinginkan dan diperjuangkan itu sangat tergantung dari kemampuan mereka bersatu dalam masyarakat politik yang lebih besar, bebas, dan lebih kuat. Kini setelah negara-negara kebangsaan berumur sekitar setengah abad, semangat persatuan yang memudar itu semakin kentara dimakan oleh kepentingan dan perbedaan yang tak lagi terjembatani. Kepentingan dan perbedaan itu bisa diekspresikan oleh denyut politik rakyat yang makin memperoleh kesadaran lain dalam melihat realitas. Di mana-mana terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi, aksi mogok buruh yang meningkat, bangkitnya romantisme demonstrasi yang digelar ekonomi dan kecemburuan sosial, keberanian rakyat kecil (*lumpen political group*) menentang alat-alat kekuasaan negara yang

⁸¹ Edwin M. Loeb, *Sumatra Its History and People*, (Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1972), hal. 225-226. Mengenai Susunan pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam secara lengkap terdapat dalam K.F.H. Van Langen, *Susunan Pemerintahan Semasa Kesultanan*, (Alih Bahasa: Aboe Bakar), (Pusat Informasi dan Dokumentasi Aceh, Banda Aceh, 2002).

⁸² Snouck Hurgronje, *op.cit.*, hal. 4

dianggap mewakili kepentingan pihak-pihak tertentu yang lebih diuntungkan ketimbang rakyat, dan mata rantai separatisme kedaerahan yang sering muncul secara tidak terduga dan konstan.

Denyut politik ini merupakan eksekusi dari kegagalan tujuan politik masyarakat untuk membangun masyarakat politik yang bebas, kuat, dan besar yang secara langsung memper-kuat sendi-sendi tradisi politik yang demokratis. Negara kebangsaan, menurut Clifford Geertz,⁸³ dibangun atas persamaan nasib. Sedangkan bangsa adalah sekelompok besar orang yang punya keinginan untuk bersatu karena punya banyak persamaan sejarah. Sebuah bangsa di dalamnya terdiri dari berbagai macam kelompok primordial (etnis, ras, dan agama) dengan budayanya masing-masing. Kenyataan ini memperkuat persepsi bangsa yang memiliki kesetiaan primordial (*primordial sentiments*) untuk menghadapi kelompok lain di luar bangsa tersebut yang disebut sebagai *common enemy* (bangsa-bangsa penjajah). Namun ketika menjadi negara baru, musuh bersama yang dulunya dihadapi dengan semangat patriotisme yang tinggi kini menghilang dan mulai secara perlahan-lahan mengumpul-pulkan perbedaan di antara sesama bangsa. Negara kebangsaan yang baru lahir dari sisa-sisa kerangka pemerintahan kolonial, diletakkan di atas suatu jaringan halus penuh rasa cinta campur permusuhan dan bagaimanapun harus mengubahnya menjadi satu bagian dari politik modern. Penempatan kesadaran politik modern di atas masyarakat yang sebagian besar belum menjalani proses modernisasi memang cenderung membangkitkan gairah politik yang secara bersamaan masyarakat juga masih mendasarkan diri pada ikatan-ikatan primordial —pengakuan terhadap kewenangan yang sah masih lebih besar di arahkan pada kesukuan, daerah, sekte dan sebagainya — daripada terhadap pusat kekuasaan yang berkembang cepat dan tak terpisahkan dari masyarakat. Proses penciptaan politik perebutkan dan men-ciptakan kekuatan baru mengerikan dan yang harus dihadapi. Konflik-konflik baru muncul bersamaan dengan berkembangnya masyarakat yang didorong oleh semangat pem-bangunan untuk mengisi kemerdekaan. Konflik yang semula bersumber dari perbedaan persepsi yang terdapat dalam masing-masing kelompok primordial mengarah pada kristalisasi perbedaan persepsi secara politis yang jika intensitasnya tinggi berakibat terjadinya disintegrasi atau pada derajat tertentu adalah ketidakstabilan politik yang semakin parah.

Sumber ketidakstabilan politik di negara-negara berkembang —yang *notabene* dengan negara kebangsaan adalah kesetiaan-kesetiaan primordial yang digunakan sebagai gerakan politik. Seperti yang disinyalir oleh Menhankam Edi Sudrajat bahwa perbedaan-perbedaan etnis dan pandangan yang sempit akan ajaran agama dapat menjerumuskan orang ke dalam rendahnya perasaan kebangsaan. Kelompok primordial adalah kelompok dasar setiap budaya yang tidak mungkin untuk dihilangkan. Intensitas dan nilai rasanya bisa direduksi hingga ke tingkat yang paling rendah, namun sama sekali tidak bisa dihilangkan. Ini sudah merupakan "hukum alam" dalam ilmu sosial. Dalam perjalanan sejarah bangsa kita di Indonesia, ketika bangsa ini hendak mencapai titik kulminasi terlepas dari penjajahan, semua kelompok primordial bergabung dalam satu perjuangan dengan menepis banyak perbedaan di antara mereka. Akan tetapi, setelah kulminasi itu terlewatkan, mulailah bangsa ini memper-soalkan alokasi kekuasaan yang tidak merata. Geertz menye-butkan adanya salah satu pola umum yang menandai timpangnya alokasi kekuasaan ini ialah adanya suatu

⁸³ Lihat Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process Ecological Changes in Indonesia*, (Berkeley: University of California Press, 1963).

kelompok dominan dan kelompok sentral —seringkali dalam arti geografis di samping dalam arti politis— yang berhadapan dengan beberapa kelompok menengah yang agak menentang seperti fenomena Jawa lawan luar-Jawa. Realitas ini lebih dari sekadar klise-klise sosiologis yang banyak diulas oleh banyak pengamat.***

Bab 5

AKAR KONFLIK *ULEEBALANG* - ULAMA

KONFLIK antara *uleebalang* dengan ulama sudah mulai tampak seiring dengan terjadinya perubahan politik dalam Kerajaan Aceh. Ketika kekuasaan Kerajaan Aceh sedang jaya, terutama pada masa Sultan Iskandar Muda, keharmonisan kedua golongan tersebut terpelihara dengan baik. Masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh *Kanun Meukuta Alam*. Akan tetapi pada masa-masa sesudahnya, keadaan politik di pusat kerajaan mulai melemah yang disebabkan oleh, salah satu faktor, terjadinya konflik di kalangan elit kerajaan dalam memperebutkan kekuasaan.

Perebutan kekuasaan yang diikuti oleh bentrokan di tingkat elit kerajaan telah mempengaruhi kondisi pemerintahan di daerah, hubungan pusat-daerah mulai renggang, wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Aceh, seperti di wilayah pesisir Sumatera, mulai melepaskan diri dengan pusat. Keadaan inipun muncul di *nanggroe-nanggroe* yang diperintahi oleh *uleebalang*. Para *uleebalang*, sekalipun tidak lagi setia kepada kekuasaan pusat, tetapi mereka telah memanfaatkan kelemahan ini untuk mengurangi kepatuhannya kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Mereka telah berani mengambil kebijakan sendiri dalam memerintah, seperti dalam perdagangan. Mereka mulai berdagang dengan luar negeri melalui pelabuhan yang ada di tempatnya masing-masing tanpa mengindahkan ketentuan sultan yang bahwa perdagangan dengan luar negeri adalah hak monopoli pemerintah di Kutaraja. *Wase*, atau upeti sudah jarang dise-rahkan kepada sultan. Hal ini telah membuat para pedagang asing tidak lagi berhubungan dengan pusat kerajaan, melainkan cukup hanya pada *uleebalang* di mana mereka melakukan transaksi dagang.⁸⁴

⁸⁴ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh Dalam Pergolakan Aceh*, (Media Dakwah, Jakarta, 2001), hal. 95.

Boleh dikatakan bahwa merekalah yang mengontrol barang-barang yang masuk ke Aceh maupun barang-barang yang keluar, bukan lagi pemerintah pusat di Kutaraja. Sektor pajak cukai ini merupakan sumber pendapatan *uleebalang* yang terbesar yang mereka ambil dari barang-barang masuk dan keluar. Oleh karena merekalah yang mengontrol lalu-lintas barang melalui jalan-jalan di daerah yang mereka kuasai. Sultan tidak berdaya mengontrol tindakan-tindakan *ulee-balang*.⁸⁵ Pada masa-masa seperti ini kekuasaan *uleebalang* bertambah besar, sehingga kekuasaan *uleebalang* itu sangat besar. Banyak urusan pemerintah dalam bidang tertentu diserahkan kekuasaan sepenuhnya kepada *uleebalang*, sehingga *nanggroe* dengan kepala-nya *uleebalang* sudah merupa-kan daerah otonom yang luas.⁸⁶

Sumber pendapatan lain adalah yang diperoleh *uleebalang* adalah lewat lembaga pengadilan, seperti dalam hal takal, nikah, rujuk, ditanganinya sendiri. Lembaga ini sepenuhnya dikuasai oleh *uleebalang*, sekalipun ia dibantu oleh seorang *Qadhi*, namun dalam memutuskan sesuatu perkara banyak intervensi pihak *uleebalang*. Akibatnya, muncullah ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Perkara-perkara atau perselisihan yang tidak terselesaikan di kam-pung dibawa ke pengadilan *uleebalang* dan diperiksa. Mereka dapat memaksa orang membayar denda, merampas harta kekayaannya atau mengenakan hukuman atau siksaan terha-dapnya. Semua ini memberi keuntungan finansial bagi *uleebalang*. Dalam perkara warisan *uleebalang* memotong 10% dari jumlah harta warisan untuk dirinya sebagai "*hak phrae*"⁸⁷ termasuk penguasaan tanah atas mereka yang kalah dalam perkara.⁸⁸ Penyelewengan zakat yang tadinya di bawah pengawasan ulama untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, tata laksana pengadilan dan agama dipusatkan dalam tangan *uleebalang* maka sedikit sekali kemungkinan untuk timbul gugatan.⁸⁹ Banyaknya sumber-sumber pendapatan yang mereka kuasai, baik melalui bea cukai, pajak tanah, peminjaman modal usaha kepada petani lada dan lain-lain.⁹⁰ telah menyebabkan golongan *uleebalang* menjadi tuan-tuan tanah yang semakin hari semakin kaya. Kekayaan yang mereka peroleh justru mengakibatkan munculnya perubahan dalam pola hidup para *uleebalang*. Mereka banyak yang tergelincir dalam kehidupan boros, berfoya-foya dan malah sampai kepada perjudian lewat sabung ayam.

Pihak ulama melihat tindakan seperti itu sebagai suatu perbuatan mungkar yang mesti diluruskan. Mereka merasa berkewajiban untuk memerangi perbuatan-perbuatan yang menyalahi ketentuan agama. Dari sinilah munculnya dakwah-dakwah para ulama dengan menyeru umat kembali ke jalan

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 85.

⁸⁶ Zakaria Ahmad, *Op.cit.*, hal. 403.

⁸⁷ Snouck Hurgronje, *Op.cit.*, hal. 434.

⁸⁸ Anthony Reid, *The Blood of the People : Revolution and the End of Traditional Rule in Notherm Sumatra*, (Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1979), hal. 13-14.

⁸⁹ Paul Van 't Veer, *Perang Aceh Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*, Terjemahan : Grafitipers, (PT Grafiti Pers, Jakarta, 1979), hal. 231.

⁹⁰ Siegel telah mengupas panjang lebar tentang sumber-sumber pendapatan *uleebalang*, Lihat James T. Siegel, *Op.cit.*, hal. 16 – 26.

Allah. Seruan tersebut juga diarahkan kepada kaum *uleebalang* dan mengajak mereka agar meninggalkan perbuatan tersebut, serta memperbaiki lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah ternoda dengan ketimpangan-ketimpangan. Gerakan-gerakan dakwah para ulama ini mendapat dukungan sebahagian besar rakyat dan mereka menambah rasa simpati mereka kepada para ulama.⁹¹

Sebaliknya, kaum *uleebalang* yang menjadi sasaran dakwah para ulama menganggapnya sebagai usaha pihak ulama untuk meruntuhkan wibawa mereka, untuk merubuhkan kedudukan *uleebalang* dan merebut kekuasaan dari tangan mereka. Di sinilah letak pokok pangkal pertentangan antara kedua golongan tersebut.⁹²

Beberapa penulis mengomentari perihal kegelisahan pihak *uleebalang* dalam menanggapi gerakan perbaikan ulama. Siegel mengatakan bahwa pihak ulama tidak berkeinginan untuk menggantikan kedudukan *uleebalang*. Tidak pernah pula menginginkan sumber-sumber pendapatan *uleebalang* jatuh ke tangan mereka. Snouck juga mendukung pendapat ini dengan mengatakan bahwa “ulama mengatakan bahwa pada hakikatnya saya tidak pernah menginginkan satu inci pun dari tanah mereka. Akan tetapi yang saya inginkan adalah supaya mereka tunduk kepada hukum-hukum Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa tujuan ulama dengan gerakan perbaikan mereka sama sekali tidak berbahaya bagi *uleebalang*.”⁹³ Dan tidak pula gerakan mereka melemahkan kedudukan mereka oleh karena sumber utama pendapatan mereka adalah pajak dan pajak ini tidak dikehendaki oleh ulama supaya jatuh ke dalam tangan mereka.⁹⁴

Sebab lain yang memicu pertentangan *uleebalang* dengan ulama terletak pada persoalan perjuangan melawan imperialisme Belanda pada saat pecahnya Aceh melawan Belanda pada tahun 1873. Pada awalnya, segenap komponen masyarakat Aceh memiliki persepsi yang sama terhadap Belanda, yaitu sebagai musuh. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat secara bersama-sama mengangkat senjata mempertahankan kedaulatan Aceh, tidak terkecuali pasukan kerajaan, pasukan yang dikoordinir oleh *uleebalang* dan ulama. Semuanya bahu-membahu berjuang mati-matian melawan penjajahan. Hasilnya adalah pasukan Belanda gagal total menguasai Aceh dan bahkan Jenderal Kohler yang memimpin serangan ini tewas diterjang timah panas para pejuang Aceh.⁹⁵ Pasukan Belanda terpukul mundur dan menderita kekalahan dengan korban 45 orang tewas (termasuk 8 orang perwira) dan 405 orang cedera (di antaranya 8 orang perwira). Tiga hari setelah Kohler tiada, Belanda berbenah mengundurkan diri ke arah pantai. Setelah mendapat izin tanggal 23 April 1873 dari Pemerintah Hindia Belanda di Batavia, maka pada tanggal 29 April angkatan perang Belanda meninggalkan Aceh dalam kecamuk duka.⁹⁶

⁹¹ Paul Van 't Veer, *Loc.cit.*

⁹² M. Nur ElIbrahimi, *Op.cit.*, hal. 100.

⁹³ James T.Siegel, *Op.cit.*, hal. 49

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 50

⁹⁵ T. Ibrahim Alfian, (ed.), *Perang Kolonial Belanda di Aceh*, (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 1997), hal. 26-27

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 38

Agresi Belanda yang kedua terjadi pada bulan Desember 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Van Swieten. Dalam serangan ini pasukan Van Swieten mampu memukul mundur pasukan Aceh dan berhasil pula menguasai *Dalam* (istana sultan) pada tanggal 24 Januari 1874. Dalam serangan ini kekompakan pemimpin perjuangan mulai tampak retak. Beberapa *uleebalang* terkemuka membantu pihak musuh dengan memberikan informasi-informasi penting tentang bagaimana cara-cara menundukkan *Dalam*, seperti yang dilakukan oleh Teuku Nek Meuraxa. Paul Van't Veer mengatakan bahwa setelah pasukan mendarat, memang ada beberapa pemuka rakyat yang rendah kedudukannya di daerah pantai datang menyerah. Di antara mereka itu ialah daerah Meuraxa bernama Teuku Nek. Informasi-informasi yang diberikan ini memudahkan pihak Belanda menguasai *Dalam*.⁹⁷

Pihak Belanda merasa bahwa dengan berhasil dikuasai *Dalam* berarti seluruh kekuasaan Aceh telah tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda. Namun yang terjadi sebaliknya, sekalipun *Dalam* telah berhasil dikuasai perjuangan tetapi perjuangan tetap berlanjut. Pengalaman yang diperoleh atas daerah di luar Aceh sebelumnya tidak berlaku di Aceh. Di-kuasainya pusat pemerintahan, tidak mengakibatkan masyarakat Aceh menyerah. Perjuangan terus berlanjut di bawah pimpinan para *uleebalang* dan ulama. Bahkan di perjuangan tersebut menyebar ke berbagai pelosok daerah Aceh.

Setelah berhasil menduduki istana sultan pada tanggal 31 Januari 1874, Van Swieten menyatakan bahwa : "Kerajaan Aceh sudah takluk dan Belanda menggantikan kedudukan Kerajaan Aceh serta menempatkan wilayah Aceh Besar menjadi milik Pemerintah Hindia Belanda".⁹⁸ Keberhasilan Belanda menduduki *Dalam* tidak terlalu berpengaruh bagi perjuangan rakyat Aceh. Menguasai *Dalam* tidak berarti Aceh sudah takluk, melainkan perlawanan rakyat terus saja berlangsung. Penembakan-penembakan dan sergapan-sergapan atas perkemahan Belanda tetap terjadi siang malam. Kondisi ini berbeda sama sekali dengan pola tradisional.⁹⁹

Cara-cara perlawanan dengan senjata yang dilakukan oleh Belanda ternyata tidak membuat perjuangan rakyat Aceh menjadi surut. Belanda mulai menyusun strategi baru untuk dapat mematahkan perlawanan tersebut. Salah satunya adalah menundukkan *uleebalang* yang membangkang dan para pemimpin pemberontak lainnya. Belanda mulai melakukan pendekatan persuasif (membujuk agar menghentikan perlawanan). Lebih dari itu, Belanda juga menjanjikan harapan dan imbalan kepada mereka yang menyerahkan diri secara sukarela, apalagi mau bekerjasama. Janji Belanda kepada para pemberontak yang menyerahkan diri adalah pengampunan dari hukuman,

⁹⁷ Atas nasehat Teuku Nek dilakukan pengepungan, lubang-lubang perlindungan digali dan meriam-meriam besar penyasar benteng disiapkan. Demikian pula dengan sekoci-sekoci bermeriam kecil turut melakukan penembakan. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 1874 diberikan komando untuk menyerbu, namun ternyata musuh pada malam itu telah berangkat. Pasukan Belanda menemukan *Dalam* dikelilingi tembok serta bangunan besar dan kecil yang telah reot-reot dan tidak menyerupai "istana". Tanpa pertempuran suatu apapun istana ini jatuh ke dalam tangan pasukan Belanda. Lihat Paul Van't Veer, *Op.cit.*, hal. 74.

⁹⁸ Teuku Ibrahim Alfian (ed.), *Op.cit.*, hal. 39.

⁹⁹ Teuku Ibrahim Alfian, "Banda Aceh Sebagai Pusat Awal Perang di Jalan Allah", dalam *Kota Banda Aceh Hampir 1000 Tahun*, (Banda Aceh : Pemerintah Kotamadya Tingkat II Banda Aceh, 1988), hlm. 35.

dan khusus kepada para pemimpin pemberontak diberikan sejumlah uang dan dipertahankan kedudukannya sebagai *uleebalang* (bila sebelumnya menjabat sebagai *uleebalang*) serta akan diangkat menjadi pejabat (pegawai) pemerintah.¹⁰⁰

Untuk menundukkan *uleebalang* Belanda melakukan blokade jalur distribusi ekonomi, yang tentunya dilakukan setelah Van Swieten mengeluarkan Maklumat yang meminta agar para *uleebalang* segera menghentikan permusuhan dan mengakui kekuasaan Belanda. Akan tetapi maklumat ini kurang mendapat tanggapan dari pihak *uleebalang*, maka sejumlah pelabuhan di daerah yang sebelumnya digunakan sebagai pusat perdagangan barang ekspor ditutup secara paksa. Tindakan ini dilakukan berkali-kali sebagai sarana untuk mendorong *uleebalang* agar menyerah.¹⁰¹

Seruan dan tindakan Belanda ini pada akhirnya membawa hasil. Sebagian *uleebalang* telah mengakui dan menyatakan tunduk kepada kekuasaan Belanda. melalui penandatanganan *Korte Verklaring* (Perjanjian Pendek). Dari 100 lebih *ulèebalang*, 82 daripadanya telah menandatangani perjanjian ini. Isinya berbunyi :1) bahwa negeri yang dikepalai oleh *ulèebalang* itu merupakan bagian dari Hindia Belanda dan berada di bawah kekuasaan Nederland; *ulèebalang* tetap setia pada Ratu Belanda dan pada wakilnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 2) Tidak mengadakan hubungan dengan negara-negara asing, 3) Tunduk pada perintah Gubernur Aceh. Isi perjanjian ini tertuang dalam Putusan Majelis Rendah Belanda tahun sidang 1900-1, 169 No. 25, 27, dan No. 47.

Seluruh daerah kekuasaan dibagi dalam dua wilayah administrasi. Pertama, disebut *Gouvernement Gebied* (daerah gubernemen) yang diperintah secara langsung oleh Pemerintah Belanda. Kedua, disebut dengan *zelfbestuurgebied* atau *swapraja* (kenegerian) yang diperintah secara tidak langsung, tetapi melalui para *ulèebalang* setempat,¹⁰² yang telah menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Hindia Belanda¹⁰³ Kedua daerah ini dalam struktur Pemerintahan Hindia Belanda disebut *Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden* (Gubernemen Atjeh dan Daerah Taklukannya).¹⁰⁴

Sekalipun perjuangan para *uleebalang* berakhir dengan pernyataan tunduk kepada Belanda, namun sejarah Aceh juga mencatat begitu besar perjuangan para *uleebalang* dalam mempertahankan kedaulatan Aceh. Peran *uleebalang* dalam masa-masa awal pendudukan Belanda membuat mereka

¹⁰⁰ T. Ibrahim Alfian, *Perang Di Jalan Allah : Perang Aceh : 1873-1912*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 79.

¹⁰¹ C. Lekkerkerker, *Land en Volk van Sumatera*, (N.V. Boekhandel en Drukkerij Voorheen E.J. Brill, Leiden, 1916), hal. 334.

¹⁰² Pemerintah langsung dilaksanakan di wilayah-wilayah yang kemudian dikenal sebagai Kabupaten Aceh Besar, Kewedanaan Singkil dan sebahagian besar kota-kota di daerah pesisir, yaitu Sigli, Bireuen, Lhök Seumawe, Lhök Sukôn, Idi, Langsa, Kuala Simpang, Calang, Meulaboh dan Tapak Tuan. Sejumlah 93 *Nanggroe* (negeri) yang berada di luar tempat-tempat tersebut berada di bawah pimpinan *ulèebalang*. Lihat J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*, (Hollandia Drukkerij NV. Baarn, 1939), hlm. 276-278.

¹⁰³ Lihat Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), hlm. 192.

¹⁰⁴ Rusdi Sufi, *Gerakan Nasionalisme di Aceh 1900-1942*, (Banda Aceh : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998), hlm. 1.

amat kerepotan menghadapi perjuangan masyarakat Aceh. *Uleebalang* juga turut memimpin perjuangan mengusir penjajahan Belanda. Sistem Sagi yang dipimpin oleh *uleebalang* justru menjadi salah satu sebab mengapa Belanda sulit menundukkan Aceh. Dalam sistem pertahanan Aceh terhadap suatu basis kekuasaan yang dikenal sebagai *Daerah Lhee Sagoe* (Daerah Tiga Segi). Daerah ini merupakan daerah khusus di luar kekuasaan sultan dan dipimpin oleh masing-masing *Panglima Sagoe* secara otonom. Mereka memiliki pasukan perang tersendiri di bawah komando langsung *Panglima Sagoe*.¹⁰⁵

Uleebalang pun sebenarnya cukup besar perannya dalam menggagalkan serangan Belanda. Pasukan Aceh ada yang bertempur dalam kumpulan kecil yang terpisah-pisah dan ada yang bergabung dalam pasukan besar yang dipimpin oleh para *uleebalang*. Salah seorang pemimpin pasukan Aceh adalah Teuku Imum Lueng Bata, seorang pejuang yang menjadi lawan Belanda yang cukup tangguh.¹⁰⁶ Namunpun demikian, penyerahan pihak *uleebalang* kepada Belanda telah menimbulkan reaksi keras dari pihak ulama yang tetap berpegang tegus pada perjuangan. Mereka menganggap bahwa pihak *uleebalang* telah menyeleweng dari cita-cita perjuangan. Inilah sebabnya konflik lama antara keduanya men-cuat kembali dan tumbuh menjadi lebih tajam. Keadaan ini telah mendorong pihak ulama (seperti Teungku chik Di Tiro) mengambil alih pimpinan perjuangan yang tadinya dipegang oleh *uleebalang*. Dengan demikian, api peperangan berkobar kembali. Semangat rakyat yang telah menurun kini bangkit kembali sehingga peperangan dapat diperpanjang hampir 15 tahun lagi.¹⁰⁷

Pada masa kolonialis Belanda, Belanda mempertahankan tatanan pemerintahan adat di Aceh dengan tetap menyebut *uleebalang* sebagai kepala pemerintahan atau pemangku adat di daerahnya. Pada masa ini diberi kedaulatan oleh Belanda sebagai *Zelfbestuurder* (Kepala Pemerintahan Daerah Sendiri yang Otonom).¹⁰⁸

Berbeda dengan kebijakan Belanda, Jepang justru berpihak kepada para ulama dalam menguatkan kekuasaannya di Aceh. Kebanyakan ulama pun lebih senang berkompromi dengan pihak Jepang. Oleh karena itu, pada masa Jepang jabatan-jabatan penting yang semasa Belanda dipegang oleh *uleebalang*, pada masa Jepang diserahkan kepada para ulama, terutama anggota-anggota PUSA, sebuah perkumpulan ulama seluruh Aceh yang didirikan pada tahun 1938 atas inisiatif seorang ulama besar dari Peusangan, Teungku Abdurrahman Matang Geulumpang Dua. Lembaga kehakiman yang sudah mentradisi dipegang oleh *uleebalang* dicabut dan diserahkan kepada pengelolaan ulama yang hakim-hakimnya diambil dari ulama-ulama PUSA. Hal seperti ini merupakan suatu politik Jepang untuk tetap mempertahankan konflik ulama dengan *uleebalang*.^{109***}

¹⁰⁵ Edwin M. Loeb, *Op.cit.*, hal. 225.

¹⁰⁶ T. Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh..... Op.cit.*, hal 86

¹⁰⁷ M. Nur El Ibrahimy, *Op.cit.*, hal. 103

¹⁰⁸ A.K. Jacobi, *Op.cit.*, hal. 298

¹⁰⁹ A.J. Piekaar, *Aceh dan Peperangan Dengan Jepang*, (Alih Bahasa: Aboebakar), (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 1977), hal. 5.

Bab 6

PECAHNYA PERISTIWA CUMBOK

MUNCULNYA konflik berdarah antara kedua golongan pe-muka masyarakat Aceh *uleebalang*-ulama terkait erat dengan pertentangan-pertentangan lama¹¹⁰ yang kemudian dipertajam oleh kebijakan-kebijakan imperialisme Belanda dan Jepang. Belanda berpihak kepada *uleebalang* dan mengangkatnya sebagai penguasa-penguasa daerah. Jepang justru berpihak kepada para ulama dalam menguatkan kekuasaannya di Aceh. Kebanyakan ulama pun lebih senang berkompromi dengan pihak Jepang, sekalipun pada masa-masa selanjutnya ulama juga tidak dapat menahan amarahnya terhadap kekejaman Jepang. Oleh karena itu, pada masa Jepang jabatan-jabatan penting yang semasa Belanda dipegang oleh *uleebalang*, pada masa Jepang diserahkan kepada para ulama, terutama anggota-anggota PUSA, sebuah perkumpulan ulama seluruh Aceh yang didirikan pada tahun 1938 atas inisiatif seorang ulama besar dari Peusangan, Teungku Abdurrahman Matang Geulumpang Dua. Lembaga kehakiman Mahkamah Agama, seperti urusan nikah, faraidh, zakat fitrah, waqaf dan lain-lain) yang sudah mentradisi dipegang oleh *uleebalang* dicabut dan diserahkan kepada ulama yang hakim-hakimnya diambil dari ulama-ulama PUSA. Hal seperti ini merupakan suatu politik Jepang untuk tetap mempertahankan konflik ulama dengan *uleebalang*. Keikutsertaan ulama dalam pemerintahan merupakan politik keseimbangan pemerintah pendudukan Jepang. Tetapi, ia juga

¹¹⁰ Ada konflik yang disebabkan oleh pembentukan lembaga *mukim* yang awalnya sebagai lembaga keagamaan belaka yang dipimpin oleh ulama (*imuem mukim*). Iskandar Muda mengikutsertakan *mukim* dalam urusan pemerintahan, dengan tugas mempersiapkan tenaga tempur dan penarikan pajak. Tugas-tugas ini tumpang tindih dengan tugas ulama sehingga sering menimbulkan ketegangan antara ulama dengan *uleebalang*, seperti kasus seorang *imeum mukim* dalam wilayah Mukim V Reubee pada tahun 1870 yang mana *imeum mukim* tersebut dapat dikalahkan oleh *uleebalang*. Dalam *Prang Pageu*, perang untuk memperluas batas daerah antara sesama *uleebalang*, kadang-kadang *imuem mukim* tidak mau membantu *uleebalang*-nya sendiri, namun lebih senang membantu musuh *uleebalang*-nya sendiri. Hal ini menyebabkan *uleebalang* mengangkat *imuem mukim* dari keluarganya sendiri. Alfian, *op.cit.*, hal. 47-48

memperuncing rivalitas antara ulama dengan *uleebalang*.

Sekalipun konflik *uleebalang* dengan ulama telah lama muncul, periode kesultanan, periode penjajahan Belanda dan Jepang, namun tidaklah berwujud dalam sebuah konflik ter-buka dalam kancah peperangan. Konflik berdarah justru ter-jadi di alam kemerdekaan.¹¹¹ Diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945) telah menimbulkan reaksi yang berbeda di kalangan kelompok yang bertikai tersebut. Pihak ulama yang tergabung dalam PUSA dan didukung oleh kalangan muda bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berbagai organisasi yang untuk mencapai tujuan tersebut didirikan, seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang dikomandani oleh Sjamaun Gaharu, dan T.A. Hamid Azwar sebagai Kepala Staf. Organisasi kemudian ber-ubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan pada tanggal 25 Januari 1946 berubah lagi menjadi Tentara Kese-lamatan Rakyat.¹¹²

Setelah menerima berita proklamasi, para pemuda di berbagai kota di Aceh mulai menaikkan bendera merah putih di halaman perkantoran, sebagaimana halnya di Kutaraja. Selain di Kabupaten Pidie, pengibaran bendera merah putih hampir tidak mengalami sesuatu rintangan dari pemerintah setempat. Di Langsa, para pemuda dapat mengendalikan si-tuasi revolusioner dengan baik dan bendera Indonesia dapat mereka kibarkan pada tanggal 1 Oktober dalam sebuah upa-cara yang juga dihadiri oleh Gunco Teuku Chik Muhammad Daud Syah. Akan tetapi, sebuah insiden kecil terjadi di Lhok Sukon, sebuah kota kecil di Kabupaten Aceh Utara, ketika seorang Kepala Polisi setempat, orang Aceh, menolak menaik-kan bendera Indonesia. Ia percaya bahwa pasukan Cina akan segera tiba, oleh karena itu ia bergabung dengan masyarakat Cina untuk menaikkan bendera Cina.¹¹³

Di Kabupaten Pidie, bendera Indonesia dikibarkan di Sigli, ibukota kabupaten, dan di kota-kota kecil lainnya serta di kampung-kampung. Begitu pula selebaran tentang kemer-dekaan Indonesia disebarkan di mana-mana. Namun sema-ngat proklamasi yang begitu menggelora di kalangan para pemuda itu tidak mendapat sambutan yang baik dari Gunco Teuku Tjut Hasan. Gunco Hasan melarang para pemuda ketika mereka berusaha menaikkan bendera merah putih di halaman kantornya. Larangan ini kemudian dilaporkan oleh pimpinan Pesindo ke Kutaraja, sehingga menyebabkan Resi-den Teuku Nya' Arif bereaksi dengan cepat. Residen mengirimkan telegram kepada sang Gunco yang isinya meminta agar bendera

¹¹¹ Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terlambat diterima di Aceh. Jepang sengaja menyembunyikan dan menghalangi berita tersebut dengan menyita radio milik masyarakat dan mengawasi stasion-stasion siaran radio milik pribumi. Secara resmi baru diketahui setelah kembalinya Mr. T.M. Hasan dan Dr. M. Amir (utusan Sumatera dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dari Jakarta tanggal 29 Agustus 1945. Sejak itulah tersebar luas ke Sumatera, termasuk ke Aceh. Lihat Muhammad Ibrahim, dkk. *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1991), hal. 209-210

¹¹² Para Pelaku Sejarah, *Kisah Perjuangan Mempertahankan Daerah Modal Republik Indonesia Dari Serangan Belanda*, (Penerbit Beuna, Banda Aceh, 1990), hal. 155 ; Tgk. A.K. Jakobi, *op.cit.*, hal. 133

¹¹³ Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekah Perjuangan Kemerdekaan dan Perjuangan Politik di Aceh 1945-1949*, (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1999), hal. 144.

ini dikibarkan di semua kantor peme-rintah. Tetapi Teuku Tjut Hasan tetap berpegang teguh pada prinsipnya sendiri. Di Lam Meulo, *uleebalang* Combok, Teuku Bentara Muhammad Daud, melarang para pemuda menye-barkan selebaran tentang proklamasi kemerdekaan di dae-rahnya. Ia bahkan menurunkan bendera Indonesia yang diki-barkan di depan kantor pemerintahan setempat.¹¹⁴

Melihat gelora proklamasi yang semakin hari semakin menggejala, pemuka-pemuka *uleebalang*¹¹⁵ yang ada di Kabu-paten Pidie menyelenggarakan pertemuan untuk membahas masa depan mereka, mengkonsolidasikan kekuatan dan memperkuat solidaritas para elit *uleebalang*. Pertemuan terse-but berlangsung pada tanggal 22 Oktober 1945 di rumah be-kas *uleebalang* IX Mukim Keumangan, Teuku Umar, di Beureunuen. Dalam pertemuan tersebut Teuku Umar menya-takan bahwa Indonesia tidak mungkin bisa merdeka, karena tentara NICA telah mendarat di Medan dan Sabang.¹¹⁶ Pendapat ini diterima oleh para *uleebalang* lainnya, sehingga rapat itu memutuskan bahwa semua *uleebalang* harus memper-tahankan kekuasaan dan hak-hak kebangsawanan mereka.¹¹⁷ Di antara *uleebalang* yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Teuku Panglima Polem Muhammad Ali, Teuku Muhammad Daud Syah, Teuku Chik Samalanga dan Teuku Chik Peusangan. Beberapa pemuka *uleebalang* lain yang diha-rapkan hadir ternyata tidak menghadirinya adalah Teuku Bintara Pineueng (ayah Mr. Teuku Muhammad Hasan Gubernur Sumatera).¹¹⁸ Rapat ini telah melahirkan dua kepu-tusan penting,

1. Membentuk suatu organisasi yang tugasnya mempertahankan kedudukan *uleebalang*, bernama Markas Besar *Uleebalang*, berpusat di Lam Meulo.
2. Untuk dapat bertindak secara efektif dibentuk pula suatu barisan dengan persenjataan lengkap yang dinamakan dengan Barisan Penjaga Keamanan (BPK).

Dalam waktu singkat saja BPK ini telah terbentuk dan telah pula mempunyai persenjataan yang cukup sempurna, malahan lebih sempurna daripada persenjataan Tentara Pemerintah Ssendiri, TKR. Kesempurnaan persenjataan ini adalah akibat dari mengalirnya bantuan keuangan dan sokongan-sokongan lain dari pihak sebahagian besar golongan *uleebalang* di seluruh Aceh, di samping senjata yang diperoleh dari Jepang.¹¹⁹ Persenjataan Cumbok lebih kuat karena mereka memperolehnya dari Jepang di Lam Meulo, malahan ada senjata berat, yaitu meriam, sedangkan pihak PUSA tidak

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Tidak semua *uleebalang* sejalan dengan *uleebalang* Pidie. Mereka berpendapat bahwa posisi mereka tidak akan terjamin dalam suatu negara Indonesia Sementara itu, bagi *uleebalang* lain menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia bagaimanapun akan memberikan dampak yang sama terhadap kekuasaan mereka, sehingga mereka tidak mau mendukung gerakan yang dicetuskan oleh *uleebalang* Pidie. Lihat *Ibid.*, hal. 145.

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 144

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ Tim Penyusun, *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1984), hal. 234.

¹¹⁹ Mr. S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Soeroengan, Djakarta, t.t.), hal. 132.

mempunyai senjata yang cukup, tetapi lebih banyak massa di belakangnya. Senjata-senjata itu terdiri atas 100 pucuk senjata termasuk meriam dan mortir. Barisan ini dibentuk dari bekas anggota KNIL dan dilatih untuk mempergunakan senjata oleh Jepang.¹²⁰

Pimpinan tertinggi BPK dipercayakan pada *uleebalang* Cumbok, Teuku Muhammad Daud Cumbok¹²¹, karena jasa-jasanya yang berhasil menguasai sejumlah besar senjata dari pasukan Jepang di Lam Meulo. Akan tetapi, kegiatan militer BPK diserahkan kepada adiknya, Teuku Mahmud. Untuk mengefektifkan kerja BPK, Teuku Mahmud membagi pasukannya dalam tiga kelompok yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, yaitu Pasukan Cap Bintang, Pasukan Cap Sauh dan Pasukan Cap Tombak. Pasukan Cap Bintang diserahi tanggung jawab untuk memerangi orang-orang yang menantang kekuasaan *uleebalang*. Pasukan Cap Sauh diberi wewenang untuk mencari dana bagi pembiayaan gerakan *uleebalang*, yaitu dengan jalan merampas harta benda milik orang-orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pasukan Cap Tombak bertugas menculik orang-orang yang tidak disukai oleh *uleebalang*.¹²²

Berbagai pendapat telah muncul seputar tidak turut sertanya pihak *uleebalang* Pidie untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Barangkali kekhawatiran bahwa kemerdekaan Indonesia akan membuka kesempatan bagi para ulama dan rakyat untuk membalas dendam terhadap kaum *uleebalang* telah menjadi suatu faktor yang membuat *uleebalang-uleebalang* di Kabupaten Pidie menantang kemerdekaan Indonesia itu. Di Kabupaten tersebut Perang Aceh merupakan sumber dendam kaum ulama terhadap para *uleebalang*. Para ulama menaruh rasa dendam yang sangat mendalam terhadap golongan *uleebalang* karena mereka merasa pihak yang terakhir ini telah memihak kepada Belanda. Mereka merasa bahwa *uleebalang-uleebalang* itu justru bekerjasama dengan Belanda sewaktu para ulama sedang memusatkan perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda dan memimpin perang gerilya di Pidie setelah jatuhnya Kutaraja.¹²³

Uleebalang Pidie juga takut akan pembalasan rakyat, karena dalam banyak hal sistem *uleebalang* di sana memang cenderung bersifat menindas rakyat. Di kabupaten-kabupaten lain di pantai timur Aceh, sistem *uleebalang* kuang sekali sifat penindasannya, sekalipun *uleebalang* tetap bersikap absolut, sehingga para *uleebalang* di sana pada umumnya dapat menenangkan hati rakyat dengan pendekatan-pendekatan mereka. Umpamanya, Teuku Chik Peusangan berke-beratan kalau rakyat menyapanya dengan sapaan “teuku” ataupun “ampon chik” dan menghendaki agar mereka menyapanya dengan “teungku”, yang dalam hal ini berarti “saudara”.¹²⁴ Oleh karena itulah banyak *uleebalang* di kabupaten-kabupaten di luar Pidie tidak begitu takut kehilangan kekuasaan. Dalam hal ini mereka yakin bahwa rakyat

¹²⁰ Anthony Reid, *The Blood of the People*, *op.cit.*, hal. 196.

¹²¹ Daud Combok seorang yang tegas dan berwatak keras. M. Nur El Ibrahimy pernah bertemu di kediamannya pada tahun 1938. Menurut pengamatannya, Daud Combok seorang yang tegas dan pantang menyerah. Lihat M. Nur EL-Ibrahimy, *op.cit.*, hal. 121.

¹²² *Ibid.*, hal. 114, dan Nazaruddin, *op.cit.*, hal. 144.

¹²³ *Ibid.*, hal. 145.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 146.

tidak akan melakukan sesuatu tindakan yang merugikan. Dengan demikian mereka tidak merasakan perlunya bergabung ke dalam organisasi yang eksklusif seperti Per-himpunan Indonesia itu.¹²⁵

Pendapat lain yang cukup santer namun sukar untuk dibuktikan adalah bahwa *uleebalang* masih tetap pro-Belanda dan masih menginginkan mereka kembali berkuasa di Aceh. Lebih jauh *uleebalang* dianggap telah membentuk sebuah komite (*Comite van Ontvangst*) untuk menyambut kembali kedatangannya di Aceh. Mr. S.M. Amin, salah seorang pemimpin perjuangan selama Revolusi Kemerdekaan di Aceh, me-nyangsikan kebenaran adanya kontak tersebut.¹²⁶ Nazaruddin Syamsuddin juga meragukan berita issue tersebut. Komite itu tidak pernah ada dalam kenyataan. Kemungkinan sekali berita tentang panitia penyambutan ini telah dengan sengaja dihembus-hembuskan oleh unsur-unsur anti Belanda dalam kelompok ulama dan *uleebalang* dalam rangka usaha mereka untuk menghidupkan semtimen anti-Belanda di kalangan rakyat. Ketakutan akan Belanda barangkali telah membuat kelompok anti-Belanda ini berusaha mencegah kembalinya Belanda dengan jalan menciptakan suatu suasana yang sesuai untuk itu. Dalam rangka inilah unsur-unsur ulee-balang didramatisasi sebagai kelompok yang akan menarik keuntungan bilamana Belanda datang kembali ke Aceh. Dengan cara demikian, diharapkan timbul kembali ingatan rakyat akan dendam terhadap kaum *uleebalang* yang pro-Belanda.¹²⁷

Tiga hari setelah rapat Beureunuen, para pimpinan *uleebalang* mulai menyusun strategi untuk memperkuat dan menguasai di kawasan Cumbok. Para pemuda Pesindo yang masih aktif ditugaskan untuk mengawal kantor-kantor pemerintahan di Lam Meulo. Tentara *uleebalang* diperintah-kan untuk menangkap anggota PRI (Pemuda Republik Indonesia) yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga Kantor Pos dan Kantor Telepon di Lam Meulo Akibatnya, benturan-benturan kecil mulai terjadi antara para pemuda dan pasukan BPK. Pada tanggal 8 November, BPK mengambil alih kantor PRI di Lammeulo, dan sejak itu pula tidak ada pemimpin pemuda ataupun republik yang diizinkan memasuki kota itu.¹²⁸ Tindakan ini telah mengundang perhatian pihak Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai. Ketua Komite Nasional Daerah, Tuanku Mahmud, dikirim ke Lam Meulo, namun tidak mendapat sambutan yang baik dari pihak Markas *Uleebalang*, bahkan utusan tersebut diperlakukan dengan

¹²⁵ Untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kaum *uleebalang* di seluruh Aceh, rapat menyetujui pandangan Teuku Tjut Hasan yang menyarankan dibentuknya organisasi Penghimpun Indonesia. Disepakati bahwa organisasi ini dipimpin oleh Teuku Ahmad Danu dengan markas yang berkedudukan di Kutaraja dalam hubungan inilah, Teuku Tjut Hasan antara lain menghubungi Teuku Chik Peusangan dan Gunco Langsa, Teuku Daud Syah. Akan tetapi kedua bangsawan ini menolak untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Organisasi ini tidak begitu berkembang, karena ada bebrapa *uleebalang* yang tidak menyetujuinya, seperti Teuku Chik Muhammad Johan Alamsyah, *Uleebalang* Peusangan, Teuku Muhammad Daudsyah, *uleebalang* Idi Rayeuk yang telah diangkat menjadi Wedana Langsa. Lihat Nazarudin Syamsuddin, *The Course of The National In Aceh, 1945-1949, Thesis*, (Monash University, 1974), hal. 122.

¹²⁶ Amin, *op.cit.*, hal. 152-156.

¹²⁷ Syamsuddin, *op.cit.*, hal. 79.

¹²⁸ Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh, *Revolusi Desember '45*, (Kutaraja: (t.t.), hal. 16. Lihat juga Tim Penyusun, *Sejarah Perjuangan*, hal. 236.

tidak wajar.¹²⁹

Setelah wilayah Lam Meulo berhasil dikuasai sepenuhnya, Markas *Uleebalang* berencana menduduki kota Sigli. Tanggal 25 November 1945, sekitar jam 12 malam, BPK memasuki kota itu. Tujuan utama adalah untuk memperoleh senjata dari tentara Jepang yang pada waktu itu masih menduduki kota tersebut. Sementara itu, barisan rakyat di bawah komando pemuda, terutama dari PRI dan sejumlah pimpinan TKR seperti Sjammaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar, juga tiba di kota Sigli untuk merundingkan penyerahan senjata Jepang di sana. Perundingan yang dilakukan oleh perwira TKR ini menarik perhatian pihak *uleebalang*, terutama setelah hasil pembicaraan dengan penguasa Jepang itu dibocorkan oleh perwira TKR sendiri, dalam hal ini Letnan Teuku Abdullah dan Letnan Bakhtiar. Agaknya kedua perwira ini mence-ritakan kepada salah seorang saudara Teuku Abdullah yang berpihak kepada *uleebalang* bahwa Jepang tidak mau menyerahkan senjata kepada TKR.¹³⁰ Akibatnya, BKP menyebarkan pasukannya ke Sigli dan menguasai tempat-tempat strategis di kota itu pada akhir November. Banyak orang yang dianggap sebagai pendukung kaum ulama di kota itu ditangkap, sementara orang-orang dari luar kota tidak diperbolehkan memasuki kota.¹³¹

Dengan menguasai kota, pihak *uleebalang* berusaha mengawasi senjata-senjata Jepang yang masih ada di kota itu agar tidak jatuh kepada lawan-lawan mereka. Dipihak lain, begitu menyadari bahwa Sigli telah dikuasai oleh BPK, maka puluhan ribu orang yang berpihak kepada golongan ulama dari kampung-kampung di sekitar Sigli mulai bergerak untuk mengepung kota itu. Mereka mengepung kota dengan maksud untuk mencegah pihak Jepang menyerahkan gudang senjata kepada BPK, sebab bila hal itu terjadi maka kekuatan kaum *uleebalang* akan semakin tak tertandingi.

Sjamaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar tidak dapat menguasai keadaan. Oleh karena itu, mereka terpaksa meminta Residen Teuku Nya' Arif agar turun tangan guna mencegah terjadinya pertempuran antara kedua belah pihak. Reaksi Kutaraja atas permintaan ini tidaklah seperti yang diharapkan TKR, karena Residen hanya mengirimkan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Ali Panglima Polim. Lagi pula, tugas delegasi itu bukan untuk meleraikan pertikaian antara rakyat dengan *uleebalang* itu secara lang-sung, malainkan hanya berunding dengan pihak Jepang. Agaknya pemerintah daerah Kutaraja berpendapat bahwa puncak atau pangkal persoalan dalam konflik yang terjadi di Sigli itu adalah senjata Jepang. Karena itu Residen hanya menugaskan Teuku Muhammad Ali Panglima Polim agar melanjutkan perundingan dengan pihak Jepang mengenai pengalihan gudang senjata yang ada di Sigli. Perundingan yang berlangsung pada tanggal 3 Desember itu dipimpin oleh Teuku Muhammad Ali. Untuk menghindari pertumpahan darah, Teuku Muhammad Ali mendesak penguasa Jepang supaya tidak menyerahkan senjata kepada salah satu pihak yang sedang bertikai itu. Didesaknya agar Jepang hanya menyerahkan senjata

¹²⁹ Tim Penyusun, *Op.cit.*, hal. 236

¹³⁰ Hasil Wawancara Nazaruddin Syamsuddin dengan Syamaun Gaharu, dalam buku *Revolusi... op.cit.*, hal. 147.

¹³¹ Insider, *Atjeh Sepintas Lalu*, (Jakarta, Archapada, 1950), hal. 8.

kepada TKR sebagai tentara resmi pemerintah Indonesia. Teuku Muhammad Ali Panglima Polim mengikutsertakan waki-wakil rakyat dan *uleebalang* dalam perundingan dengan Jepang. Maksudnya tak lain agar pihak rakyat dan *uleebalang* menyaksikan secara langsung perundingan tersebut dan mengetahui dengan pasti pokok persoalan yang dirundingkan. Dengan demikian, Teuku Muhammad Ali berharap bahwa mereka tidak akan saling mencurigai lagi. Akan tetapi Teuku Muhammad Ali gagal mencapai target, sekalipun dalam perundingan itu pihak Jepang telah menyatakan kesediannya untuk menyerahkan senjata hanya kepada pihak pemerintah. Tuntutan ini ditolak, Jepang menegaskan bahwa mereka hanya bersedia menyerahkan senjata kepada rakyat, suatu penegasan yang menunjukkan bahwa Jepang ingin mengeruhkan suasana dan Jepang dapat mempertahankan senjata yang ada di tangannya sampai datang perintah lebih lanjut meninggalkan kota tersebut.¹³²

Sementara perundingan sedang berlangsung antara pihak pemerintah dengan penguasa Jepang,¹³³ tepatnya ketika nas-kah perjanjian penyerahan senjata sedang ditandatangani, rakyat yang semula mengepung Sigli mulai bergerak selang-kah demi selangkah memasuki kota. Gerakan ini menyulitkan TKR, karena semakin dekat rakyat ke pusat kota, maka semakin terbuka pula kemungkinan terjadinya pertempuran secara frontal dengan pasukan BPK yang bertahan di dalam kota. Dan dalam usahanya untuk mengendalikan gerak maju massa rakyat itu, Syamaun Gaharu memberikan beberapa tembakan peringatan.¹³⁴

Akan tetapi, tembakan peringatan itu justru mengundang bencana. Tembakan itu telah menimbulkan salah pengertian pada kedua belah pihak yang saat itu sudah berada pada posisi saling berhadapan. Pasukan BPK mengira tembakan-tembakan itu diletuskan oleh pihak ulama. Oleh sebab itu mereka segera membalasnya dengan menembakkan senjata ke arah lawan yang semakin mendekat. Di lain pihak, kaum ulama menilai tembakan peringatan yang dilepaskan Sjamaun Gaharu sebagai aba-aba bagi pasukan BPK untuk mulai menembaki kaum ulama, sehingga menyebabkan perwira TKR ini melarikan diri dari tempat kejadian. Peristiwa ini menyebabkan ditangkapnya Sjamaun Gaharu atas tuduhan telah berkomplot dengan pihak *uleebalang*, namun ia dilepaskan tidak lama kemudian.

Akibat kesalah pahaman tersebut kota Sigli mulai bersimbah darah, kedua golongan terlibat dalam pertempuran sengit dan satu demi satu korban berjatuhan. Puncak per-tempuran yang menyebabkan banyak jatuh korban itu berlangsung sejak tanggal 4-6 Desember 1945. Para pemimpin rakyat, Pemerintah Daerah dan TKR di bawah pimpinan Kolonel Sjamaun Gaharu dan Mayor Teuku A. Hamid Azwar berusaha keras menghentikan pertempuran. Atas usaha para pemimpin itu, akhirnya pada tanggal 6 Desember pertempuran dapat dihentikan. Kedua belah pihak diminta untuk

¹³² Tim Penyusun, *op.cit.*, hal. 238.

¹³³ Isi surat perjanjian tersebut dapat dilihat dalam Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, *Sumbangsih Aceh Bagi Republik*, Penyunting : Teuku Mohammad Isa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 37.

¹³⁴ Hasil Wawancara Nazaruddin Syamsuddin dengan Syamaun Gaharu, Kutaraja, 5 Juli 1973 dalam Buku *Revolusi di Serambi Mekkah*, *Loc.cit.*

mengosongkan kota Sigli dan kembali ke tempat masing-masing, sedangkan senjata yang telah diserahkan oleh Jepang kepada Tentara Markas *Uleebalang* (BPK) harus diserahkan kembali kepada tentara resmi yang sah, yaitu TKR untuk dibawa ke Kutaraja. Untuk seterusnya, kota Sigli berada di bawah penjagaan TKR dan Polisi; dan apabila terjadi kembali kekacauan, kedua belah pihak harus bertanggung jawab.¹³⁵ Himbauan ini menemukan dapat sambutan yang baik dari kedua belah pihak, kedua belah pihak setuju untuk menarik mundur kekuatan masing-masing ke luar kota. Selain itu, pihak *uleebalang* juga setuju untuk menyerahkan senjata-senjata yang telah mereka terima dari Jepang kepada TKR.

Kepatuhan dan ketaatan terhadap persetujuan bersama itu tidak berlangsung lama. Pertempuran masih saja terjadi di luar kota dan Markas *Uleebalang* ternyata tidak mengem-balikan seluruh senjata yang diperoleh dari Jepang kepada TKR. Kemudian, tanggal 10 Desember Markas *Uleebalang* untuk kedua kalinya mengadakan pertemuan di kediaman Teuku Laksamana Umar, *Uleebalang* Nyong, di Lueng Putu. Pertemuan itu telah memperuncing kembali suasana yang berarti tidak menghiraukan lagi ketentuan yang telah disepa-kati bersama di kota Sigli. Mereka setuju agar Markas Ulee-balang bertindak lebih tegas lagi untuk menangkapi dan kalau perlu membunuh para pemimpin yang menentang gerakan mereka, dan diharapkan akhir Desember 1945 rencana ini sudah dapat dilaksanakan.¹³⁶

Keputusan Lueng Putu telah mengakibatkan tentara Markas *Uleebalang* segera bertindak lebih tegas. Mereka mulai melepaskan tembakan-tembakan terhadap kampung-kampung yang diperkirakan sebagai tempat pemusatan kekuatan musuh mereka. Disusul pula dengan aksi pembakaran gedung-gedung yang diperhitungkan akan dipergunakan sebagai basis pertahanan atau tempat pertemuan pemuda-pemuda dan pemimpin-pemimpin lawannya itu. Dengan senjata-senjata berat yang dimiliki, tanggal 16 Desember 1945 BPK menembaki kampung-kampung di sekitar Lueng Putu dan Metareum yang selama ini menjadi pemusatan para pemuda dan rakyat terutama dari organisasi PRI. Tanggal 20 Desember 1945 mereka membakar gedung sekolah agama di Titeue serta kantor kehakiman di beberapa tempat.¹³⁷

Melihat tidakan Markas *Uleebalang* yang semakin meningkat itu, pada tanggal 21 Desember Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pimpinan TKR, membentuk Markas Besar Rakyat Umum, yang terdiri atas TKI, Polisi, barisan-barisan perjuangan rakyat, organisasi-organisasi massa lain-nya untuk melawan tindakan *uleebalang*.¹³⁸ Organisasi ini ternyata mendapat sambutan dari rakyat. Di mana-mana, di seluruh daerah Pidie didirikan barisan-barisan perjuangan yang tunduk di bawah komando MBRU itu. Akibatnya, Markas *Uleebalang* lebih meningkatkan lagi serangan-serangannya, tanggal 30-31 Desember tembakan-tembakan mereka kembali diarahkan ke Metareuem, Kampong Langga, Ilot dan Lala, sehingga kampung-kampung tersebut dan kampung sekitarnya mengalami kerusakan berat.¹³⁹

¹³⁵ Mr. S.M. Amin, *Loc.cit.*.

¹³⁶ Pemerintah Republik Indonesia *Aceh*, *op.cit.* hal. 21-22.

¹³⁷ Nazaruddin Syamsuddin, *op.cit.*, hal. 130.

¹³⁸ Muhammad Ibrahim, *dkk.*, *op.cit.*, hal. 214.

¹³⁹ *Ibid.*

Markas Besar Rakyat Umum mengawali gerakannya dengan mengeluarkan sebuah Maklumat yang ditujukan kepada seluruh kaum Muslimin. Isinya antara lain agar jangan membakar rumah dan mengambil harta orang, tawanan yang ditangkap harus diperlakukan dengan baik. Suatu seruan yang secara psikologis menarik simpati rakyat, tetapi sebelumnya dilupakan oleh Markas *Uleebalang* walaupun mungkin saja, seperti umumnya dalam suatu pertempuran, isi Maklumat tidak akan terlaksana sepenuhnya. Sementara itu kekacauan tidak saja terjadi di wilayah-wilayah Lam Meulo, Beureunuen dan Lueng Putu, tetapi meluas hampir di seluruh daerah Pidie, sejak dari Meureudu perbatasan Aceh Utara sampai ke daerah *uleebalang* XII Mukim Pidie pada perbatasan Aceh Besar.¹⁴⁰

Dengan mengandalkan kekuatan persenjataan yang cukup tangguh menyebabkan Markas *Uleebalang* Cumbok sama sekali tidak memperdulikan ultimatum dari Pemerintah Daerah Aceh tersebut, akan tetapi pertempuran terus berlangsung, terutama di Lam Meulo, Meureudu, Lungputu, Beureu'eh, Keumala dan seluruh Kabupaten Pidie. Namun pasukan Pemerintah Daerah Aceh yang dibantu oleh lasykar dan barisan-barisan rakyat, Mujahidin, PESINDO, bahkan pasukan-pasukan dari Seulimeum dan Banda Aceh terus memberikan support perjuangan untuk dapat mengalahkan pasukan Markas *Uleebalang* Cumbok. Bantuan-bantuan pasukan ini muncul secara spontan mengingat telah banyaknya korban berjatuh dari pihak rakyat yang tidak bersalah. Pasukan gabungan ini lebih memfokuskan diri ke daerah Lam Meulo, sebab pimpinan pasukan Markas Ulee-balang, T. Muhammad Daud Cumbok berada di tempat ini.

Dengan bertambah meluasnya "perang saudara" di wilayah Pidie itu Pemerintah Daerah di Kutaraja semakin khawatir akan bahaya yang sedang mengancam, terutama dalam kaitan dengan kekuatan perjuangan yang pada waktu itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi kemungkinan tentara NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda, yang memang sebagai-mana disebutkan di muka telah merencanakan melancarkan penyerbuan ke daerah Aceh. Karena itu, tanggal 6 Januari 1946 Markas Umum Perjuangan dan Pertahanan Rakyat Daerah Aceh (badan yang mengkoordinir kegiatan militer di daerah Aceh, didirikan dalam bulan Desember 1945). Mengadakan sidangnya yang pertama untuk membahas situasi di Pidie. Dalam sidangnya yang kedua tanggal 8 Januari hadir tokoh-tokoh yang berperan dalam memberi pendapat dan laporan, yaitu Ketua Markas Umum (Sjamaun Gaharu, dari TKR), Teungku Muhammad Daud Beureueh dari Mujahidin, Ali Hasjmy dari Pesindo (keduanya dalam sidang pertama tidak hadir), Ismail Yacob (salah seorang tokoh PUSA) tetapi di sini mewakili PNI) serta Husin Yusuf dan Teuku Muhammad Syah, yang keduanya mewakili TKR.¹⁴¹ Setelah sidang selesai dan setelah adanya desakan dari Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh, pada tanggal 8 Januari itu juga Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh (disingkat Markas Umum Daerah Aceh) mengeluarkan maklumat dan ultimatum yang ditujukan kepada Markas *Uleebalang* di Lam Meulo. Kedua pernyataan ini ditandatangani oleh Wakil Residen Aceh Teuku Panglima Polem Mohammad Ali dan Sjamaun

¹⁴⁰ Tim Penyusun, *op.cit.*, hal. 240.

¹⁴¹ Nazaruddin Syamsuddin, *op.cit.*, hal. 141-143.

Gaharu, selaku Ketua Markas Umum Daerah Aceh.

Sidang ini bertujuan untuk melakukan usaha genjatan senjata bagi pihak-pihak yang berseteru. Sidang ini dihadiri oleh tokoh-tokoh TKR, antara lain Syamaun Gaharu ketua Markas Umum Daerah Aceh; Husin Yusuf serta T. Muhammad Syah, Ismail Yacub mewakili PNI; Ali Hasjmy dari PESINDO dan Tengku Muhammad Daud Beureu'eh dari Mujahidin tidak dapat hadir.¹⁴²

Dalam maklumat tersebut Pemerintah Daerah dan Markas Umum Daerah Aceh menyatakan antara lain, setelah diadakan penyelidikan secara mendalam, bahwa mereka yang mengadakan perlawanan di daerah Cumbok, Lam Meulo dan tempat-tempat lain dalam wilayah Pidie adalah "musuh Negara Republik Indonesia". Dan diperingatkan bagi orang-orang yang telah terpengaruh agar menghindari diri dari mereka, kalau tidak mereka juga akan dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahannya. Sedangkan ultimatum yang mengiringi maklumat itu isinya memerintahkan mereka (yang telah dinyatakan sebagai musuh Negara Republik Indonesia) agar mulai hari Kamis tanggal 10 Januari 1946, jam 12 siang menghentikan perlawanan dan menyerah, kalau tidak mereka akan ditundukkan dengan kekerasan.¹⁴³

Dalam situasi genting seperti itu, di mana satu sama lain ingin mengakhiri dan memenangkan pertempuran, ber-macam-macam strategi dapat saja dilakukan. Kemampuan adu senjata merupakan suatu hal penting, namun di sisi lain adu kepintaran untuk menarik simpati massa, juga merupakan suatu strategi perang. Mr. S.M. Amin menyatakan bahwa tuduhan "pengkhianatan dan musuh Negara Republik Indonesia" dapat dianggap sebagai suatu strategi perjuangan.¹⁴⁴ Dengan pengeluaran Maklumat dan Ultimatum dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan pihak PUSA yang semua liar, telah menjadi legal.¹⁴⁵

Ultimatum yang dikeluarkan pemerintah tidak diindahkan sama sekali oleh pihak Markas *Uleebalang*. Aksi-aksi mereka bahkan semakin meningkat. Daerah-daerah yang cukup parah dilanda oleh aksi perlawanan mereka, selain di Lam Meulo, juga Keumala, Beureunuen, Lueng Putu, Pante Raja, Trieng Gadeng, Meureudu dan lain-lain. Ada dua faktor yang cukup menentukan, sehingga Markas *Uleebalang* menolak untuk menyerah. Pertama, perhitungan mengenai kemampuan mereka untuk bertempur sampai mencapai kemenangan, mengingat persenjataan yang mereka miliki jauh lebih kuat, bila dibandingkan dengan TKR, apalagi dengan senjata yang dimiliki barisan rakyat di bawah koordinasi MBRU. Kedua, hukuman yang dijatuhkan kepada mereka justru oleh pemerintah sendiri, melalui maklumatnya itu sebagai pengkhianatan dan musuh negara, bahkan dipertegas lagi oleh kelompok lawannya, sebagai kaki tangan NICA, pengkhianatan bangsa dan agama. Tampaknya terlampau berat dirasakan mereka dan besar sekali konsekwensinya. Mereka memperkirakan, setelah menyerah akhirnya juga mereka setidak-tidaknya para pemimpin mereka

¹⁴² Nazaruddin Syamsuddin, *The Course of The National Revolution in Aceh, 1945-1949*, Tesis, Monach University, 1974, hal. 125.

¹⁴³ Mr. S.M. Amin, *op.cit.*, hal. 13 ; Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, *Loc.cit.*

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 13.

¹⁴⁵ *Ibid.*

akan dihadapkan ke “pengadilan revolusi” sesuai dengan suasana pada waktu itu; karena itu mereka bertekad lebih baik meneruskan perlawanan dan mati di medan pertempuran.¹⁴⁶

Setelah batas waktu yang ditentukan berlalu, maka TKR dengan didukung oleh barisan rakyat yang berada di bawah komando MBRU mulai bertindak. Satu demi satu kota-kota, seperti Meureudu, Lueng Putu, Beureunuen dan lain-lain, dalam waktu yang relatif singkat berhasil dibersihkan dari para pengikut Markas *Uleebalang*. Serangan ke Lueng Putu (7 Januari) dilakukan dari tiga jurusan, dari jurusan selatan dipimpin oleh Nyak Hasan, dibantu oleh Teungku Ahmad Abdullah, T.H. Husein, T.H. Zainal Abidin dan Peutua Mak-lumat Ali. Dari jurusan timur (menyusur jalan kereta api) dilancarkan oleh pasukan Raja Uma, Muhammad Tahir dan Said Umar. Dari jurusan timur (menyusur jalan raya) dilancarkan dibawah pimpinan A. Gani Mutiara, Syamaun dan Nyak Ishak/Daud Hasan. Suara tembakan kedua belah pihak memekak telinga. Tembakan muncul dari berbagai arah, bahkan ada yang dilepas dari atas pohon, sehingga menyulitkan untuk mendekati benteng Lueng Putu. Akhirnya, benteng Lueng Putu dibakar dan sasaran dapat ditundukkan. Laksamana Umar tewas dalam pertempuran tersebut dan oleh pengikutnya dibawa ke Teupin Raya untuk dimakamkan di sana.¹⁴⁷

Kemudian seluruh kekuatan diarahkan ke Lam Meulo, Pusat Markas *Uleebalang*. Dengan didukung oleh satuan-satuan tambahan yang khusus didatangkan dari Kutaraja akhirnya pada tanggal 13 Januari 1946 Barisan Rakyat dan TKR melakukan serangan umum dan berhasil merebut kota kedudukan *uleebalang* tersebut, meskipun selama ini tentara mereka, BPK, mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Untuk menundukkan pusat *uleebalang*, serangan dilakukan dari arah barat (Gle Gapui) yang pasukannya berasal dari Garot dan Seulimuem di bawah pimpinan Hasan Ali, dibantu oleh Hasan Saleh, Hasballah Daud dan T. Ubit. Senjata inti adalah sebuah meriam Howitzer yang didatangkan dari Kutaraja. Dari selatan (Titeue) serangan dilakukan oleh barisan rakyat dari Tangse dan Padang Tiji di bawah pimpinan Ayah Daud Tangse dan Muhammad Juned Afandi. Arah timur dari jurusan Pulo Dreien (Bireuen) di bawah pimpinan Nyak Hasan bersama-sama dengan T. H. Zainal Abidin, H. Tahir, Muhammad Tahir Geureugok, Said Umar dan Teungku Hasan Matang Geulumpang Dua. Arah utara dari jurusan Mali, melalui jalur kereta api/jalan raya Beureunuen –Lam Meulo dibawah pimpinan Nyak Ishak /Daud Hasan di sayap kiri. Sedangkan sayap kanan terdiri atas pasukan Polisi Istimewa yang didatangkan dari Kutaraja dan TKR dari Sigli di bawah pimpinan Inspektur Abdurrahman. Pada tanggal 13 Januari 1946 semua pasukan maju secara serentak.¹⁴⁸

Setelah dikepung beberapa hari oleh pasukan gabungan Pemerintah Daerah Aceh dengan dibantu oleh lasykar rakyat, maka pada tanggal 13 Januari 1946 Markas *Uleebalang* Cumbok di Lam Meulo berhasil direbut, akan tetapi pimpinan mereka T. Muhammad Daud Cumbok beserta

¹⁴⁶ Tim Penyusun, hal. 242.

¹⁴⁷ M. Nur El-Ibrahimi, *op.cit.*, hal. 129.

¹⁴⁸ *Ibid.*

pasukan pengikutnya berhasil lolos melarikan diri ke hutan belantara, menguasai perbukitan antara Pidie dan Kutaraja. Tujuan mereka pada saat itu adalah menuju Sabang,¹⁴⁹ namun tidak berhasil karena pada akhirnya pada tanggal 16 Januari 1946 setelah melalui pertempuran-pertempuran kecil mereka berhasil ditangkap di kaki Gunung Seulawah.¹⁵⁰ Mereka dibawa ke Sigli dan kemudian dipindahkan ke Kantor Cabang pusat Markas *Uleebalang* di Garut. Dan dari Garut mereka dievakuasi ke Sanggeue untuk diadili.¹⁵¹

Untuk memberitahukan kepada segenap lapisan masyarakat bahwa gerakan Markas *Uleebalang* telah berhasil dipatahkan pada tanggal 17 Januari 1946 sekali lagi Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) mengeluarkan sebuah maklumat, pada dasarnya isi maklumat yang diberi nama "Maklumat Penjelasan", merupakan kelengkapan penjelasan dari maklumat yang terdahulu.¹⁵² Isinya termasuk himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap tenang. Ditegaskan lagi, bahwa merampas dan menggelapkan harga pihak lawan dilarang keras, sedang senjata-senjata yang dirampas dari mereka harus diserahkan kembali kepada Markas Besar Rakyat Umum.¹⁵³

Dengan demikian, peristiwa Cumbok yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan itu, secara fisik telah dapat dipatahkan. Namun ini tidak berarti berbagai akibat yang ditimbulkannya, seperti masalah harta peninggalan Markas *Uleebalang*, perlindungan terhadap famili atau keluarga yang ditinggalkan dan lain-lain dengan sendirinya telah terselesaikan pula. Bahkan lanjutan "perang saudara" itu segera nampak kembali, meskipun tidak sehebat yang pertama. Rupanya penyakit yang dijangkitkan sebagaimana disebutkan Tuanku Mahmud oleh suntikan "serum" buatan Belanda dan Jepang, (tentu dengan ramuan yang berbeda) yakni "penyakit pecah belah" masih saja berjangkit dalam kalangan masyarakat Aceh dan tidak sembuh bersamaan dengan berakhirnya peristiwa Cumbok itu.

Cukup banyak pemimpin masyarakat yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut baik dipihak BPK maupun TKR, termasuk juga rakyat biasa yang tidak berdosa. Beberapa *uleebalang* tokoh yang meninggal di antaranya:

1. Teuku Muhammad Daud	<i>uleebalang</i>	Lam Meulo
2. Teuku Laksaman Umar	<i>uleebalang</i>	Ndjoong
3. Teuku Pocut Umar Keumangan	ayah kandung	<i>Uleebalang</i> Keumangan
4. Teuku Muda Dalam	<i>uleebalang</i>	Bambi dan Unoe
5. Teuku Muhammad Ali	<i>uleebalang</i>	Samaindra
6. Teuku Muhammad Ali	<i>uleebalang</i>	Ie Leubeu
7. Teuku Abdul Hamid	<i>uleebalang</i>	Gigieng
8. Teuku Cut Hasan dari kel.	<i>uleebalang</i>	Meuraxa
9. Teuku Radja Said	<i>uleebalang</i>	Cunda

¹⁴⁹ Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 204.

¹⁵⁰ S.M. Amin, *Kenang-kenangan dari Masa Lampau, Pradya Paramita*, Jakarta, 1978, hal. 138.

¹⁵¹ Lihat lampiran : Nama-nama dari Uleebalang korban Peang Cumbok.

¹⁵² Merupakan.S.M. Amin, *op.cit.*, hal. 139-142

¹⁵³ Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh, *op.cit.*, hal. 28-29

10. Teuku Banta Ahmad dari kel.	<i>uleebalang</i>	Glumpang Payong
11. Teuku Husein	<i>uleebalang</i>	Simpang Ulim
12. Teuku Pakeh Sulaiman	<i>uleebalang</i>	Pidie, Kalee, Laweung
13. Teuku Muhammad	<i>uleebalang</i>	Keumangan
14. Teuku Hasan	<i>uleebalang</i>	Keumala
15. Teuku Chik Meureudu	<i>uleebalang</i>	Meureudu
16. Teuku Sulung	<i>uleebalang</i>	Meureudu. ^{154***}



¹⁵⁴ Mr. S.M. Amin, *Sekitar....op.cit.*, hal. 254.

Bab 7

PERAN KOMUNIS DALAM MEMICU PERISTIWA CUMBOK

KONFLIK ulama dengan *uleebalang* yang mencapai puncaknya pada peristiwa Cumbok ternyata tidak hanya disebabkan imperialisme Belanda dan Jepang, namun ada pihak lain yang berperan di belakang layar yang sangat antusias memanaskan suhu konflik tersebut, yaitu kaum komunis. Mereka memanfaatkan kekurangharmonisan hubungan antara kedua kelompok besar di Aceh bagaimana caranya berujung pada perang saudara. Tokoh-tokoh komunis yang aktif mengambil bagian dalam peristiwa ini adalah Nathar Zainud-din dan Xarim M.S. Keduanya merupakan tokoh komunis kaliber internasional yang memiliki peran yang cukup besar ketika terjadi Peristiwa Sigli.

Abdul Xarim M.S. atau lebih dikenal dengan Xarim M.S. adalah seorang tokoh utama golongan kiri di Medan. Ia menjadi pemimpin FDR (Front Demokrasi Rakyat), yaitu sebuah organisasi yang dibentuk oleh Tan Malaka. Tidak diketahui dengan pasti mengapa ia mengganti huruf “K” pada Karim dengan “X”. Namun ada spekulasi di Aceh kemudian bahwa dengan penggantian itu, serta dengan penghilangan huruf “i” dan penukaran tempat huruf “a” dengan huruf “r”, maka namanya akan terbaca “Marx” bila dibaca dari belakang.¹⁵⁵

Keduanya juga termasuk tokoh-tokoh inti dalam organisasi Markas Agung. sebuah organisasi tingkat Sumatera yang memicu timbulnya “Revolusi Sosial” di Aceh dan Sumatera Timur karena berbagai hasutan yang dilancarkan. Susunan pengurus Markas Agung tingkat Sumatera adalah sebagai berikut:

Ketua : Sarwono Sastro Sutarjo
(Kemudian menjadi Ketua PESINDO Sumatera)

¹⁵⁵ Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekkah*, hlm. 202.

Timur)
Sekretaris : Zainal Baharuddin

Tokoh-tokoh pembantu:

1. Nathar Zainuddin
2. Xarim MS.
3. Merupakan Luat Siregar
4. M. Yunus Nasution
5. M. Saleh Umar
6. M. Yacob Siregar
(Mereka adalah tokoh-tokoh PKI)¹⁵⁶

Menjelang meletusnya peristiwa Cumbok, ketika pasukan *uleebalang* dan ulama berada di ambang pertempuran, Nathar Zainuddin, seorang gembong komunis eks Digulis, terlihat aktif sekali mondar mandir menghubungi pihak *ulee-balang* dan pihak PUSA.¹⁵⁷ Kepada golongan PUSA mereka berpesan untuk berhati-hati terhadap golongan *uleebalang*, karena mereka merencanakan akan membunuh orang-orang PUSA. Hal yang sama juga disampaikan kepada golongan *uleebalang* dengan mengatakan agar berhati-hati terhadap golongan PUSA karena mereka berencana akan membunuh *uleebalang* beserta keluarga.¹⁵⁸ Teuku Muhammad Ali Panglima Polim dan Teuku Djohan Meuraksa yang tiba di Sigli pada tanggal 4 Desember pukul 02.00 dinihari, keheranan melihat kesibukan Nathar Zainuddin yang terkenal sebagai tokoh Partai Komunis Indonesia tingkat internasional. Ia pernah dibuang ke Boven Digul oleh Belanda.¹⁵⁹

Said Ali, dalam tulisannya di majalah *PETA* edisi Desember 1989 mengungkapkan bahwa pada akhir Februari 1946, TPR memasuki Kutaraja dengan berbagai cara. Mereka menggunakan kereta api dan puluhan truk. Anggota mereka tidak bisa dikenali, campur baur antara orang-orang yang bersenjata dengan yang tidak, yang memakai pakaian seragam dengan yang berpakaian seadanya. Tampak bersama mereka tokoh PKI, Thaeb Adamy, sedangkan tokoh PKI kaliber internasional, Nathar Zainuddin, memasuki Kutaraja pada tanggal 2 Maret 1946 dengan menggunakan mobil khusus dan bari-san-barisan pendukung mereka, menyusup ikut bergabung dengan TPR.¹⁶⁰

Teuku Muhammad Ali Panglima Polim yang meninggalkan kota Sigli setelah tragedi berdarah di sana mengatakan: Setibanya di Kutaraja, saya laporkan kejadian-kejadian tersebut kepada T. Nyak Arief, dan urusan itu saya serahkan kepada beliau dan saya katakan bahwa hal itu belum selesai dan tentu ada ekornya. Rupanya beliau telah mendengar kabar bahwa Gubernur Sumatera sedang mengadakan perjalanan dengan kereta api dari Medan menuju Kutaraja bersama Jenderal Sohardjo, Panglima Sumatera. Ikut serta pula Residen Diperbantukan pada Gubernur Sumatera, saudara

¹⁵⁶ A.K. Yakubi, *op.cit.*, hal. 321-322.

¹⁵⁷ Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, *op.cit.*, hal. 35.

¹⁵⁸ A.K. Jakobi, *loc.cit.*

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 306.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 327.

Karim M.X, gembong Komunis Ex Digulis, asal Minangkabau yang ipar tokoh PKI Nathar Zainuddin.¹⁶¹

Setibanya Gubernur Sumatera, Teuku Moehammad Hasan, di Sigli dalam rangka kunjungan resminya yang pertama ke Aceh pada tanggal 9 Desember, ia disertai oleh dua orang asisten, yaitu Teuku Djohan Meuraksa dan Abdul Karim M.S. Tokoh-tokoh PUSA setempat melaporkan bahwa Teuku Muhammad Daud Cumbok adalah anti Republik dan telah melakukan tindakan-tindakan yang kejam di wilayah kekua-saannya. Oleh karena itu, mereka mendesak Gubernur untuk mengambil tindakan tegas.¹⁶² Untuk mendukung tuduhan bahwa pihak *uleebalang* bersikap anti-Republik, Abdul Xarim, M.S. melaporkan kepada Gubernur Hasan bahwa Teuku Muhammad Daud telah menolak mengucapkan “merdeka”, dan ketika diminta untuk berbuat demikian, ia malah menye-but “merdiki”.¹⁶³ Biar bagaimanapun laporan tentang penghi-naan semacam ini terhadap Republik tentu mempengaruhi sikap Gubernur Hasan yang memang amat nasionalistis.

Unsur-unsur kiri agaknya telah memainkan peranan yang penting dalam mempertajam rasa permusuhan di antara kedua kelompok yang bertikai di Aceh itu. Anti feodalisme barangkali merupakan faktor yang telah mendorong orang-orang kiri untuk melibatkan diri dalam konflik tersebut. Rupanya Abdul Xarim, M.S. sangat khawatir menyaksikan bagaimana berhasilnya Gubernur Mohammad Hasan men-dinginkan suhu konflik yang sedang memanas pada saat itu. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kelompok ulama menjadi puas, setidak-tidaknya pada waktu itu, karena Gubernur telah memenuhi harapan mereka dengan memberhentikan Teuku Tjut Hasan dari jabatan bupati, sementara Teuku Nyak Arief tidak lagi aktif sebagai Residen. Di lain pihak kaum *uleebalang* juga cukup puas, sebab Gubernur Hasan telah menjamin keamanan mereka dengan jalan mengirimkan satu unit polisi yang cukup kuat.¹⁶⁴

Kenyataan ini menggelisahkan Xarim M.S, dan untuk mencapai tujuan kaum kiri, yaitu menghapus feodalisme, ia tidak dapat membiarkan suhu konflik menjadi dingin. Oleh karena itu, sewaktu Teuku Mohammad Hasan kembali ke Medan, Xarim M.S. tetap tinggal di Sigli untuk sementara waktu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di Sigli lebih kurang sama dengan apa yang dikerjakan sebelumnya oleh tokoh kiri lainnya, Nathar Zainuddin, yang sangat sibuk mengintrik kelompok-kelompok ulama dan *uleebalang* untuk memperebutkan senjata Jepang.¹⁶⁵ Namun Xarim M.S. segera kembali ke Medan ketika suasana di Sigli kembali memanas, sekalipun hal ini tidak berarti bahwa kegiatan-kegiatan pun berhenti. Jauh dari dihentikan, peranan intrik-intrik Xarim M.S. diteruskan oleh Djohan Ahmad. Apa yang dilakukan oleh Djohan Ahmad adalah menghubungi kedua belah kubu dan melakukan intrik dengan menceritakan kepada masing-masing pihak mengenai rencana dan kegiatan lawan-lawan mereka. Ia memberitahukan kepada pihak ulama tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak *uleebalang* dalam usaha

¹⁶¹ Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, *op.cit.*, hal. 39.

¹⁶² Hasil Wawancara Nazaruddin Syamsuddin dalam bukunya *Revolusi.. Op.cit.*, 151.

¹⁶³ Insider, *op.cit.*, hal. 11-12.

¹⁶⁴ Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi ... op.cit.*, 157.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal, 159.

untuk memperkuat diri. Dikatakannya, golongan *uleebalang* masih terus saja memperoleh senjata dari pasukan Jepang, di samping terus melatih tentaranya. Sementara itu, kepada pihak *uleebalang* ia menyerahkan salinan dari sejumlah telegram yang telah dikirimkan oleh pemimpin Pe-sindo setempat dalam rangka mencari bantuan untuk me-numpas kaum *uleebalang*.¹⁶⁶

Tampaknya tidak begitu sulit bagi Djohan Ahmad untuk menjalankan peranannya dalam situasi yang kalut dan tegang itu. Apa yang diperlukan dalam keadaan yang demikian adalah kepercayaan dari kedua belah pihak, di samping tentu-nya keahlian untuk memanipulasi situasi serta sedikit keberanian. Dalam hal ini sama sekali tidak sukar bagi Djohan Ahmad untuk mempengaruhi para pemuda Pesindo yang ber-orientasi kepada kaum ulama, sebab ia memang cukup dikenal di kalangan ulama Aceh. Di masa penjajahan Belanda, Djohan Ahmad memang sangat populer sebagai wartawan yang anti feodalisme. Sikap yang demikian tentu saja merupakan modal utama baginya dalam usaha untuk mendekatkan kaum ulama.¹⁶⁷

Dengan reputasi masa lampau yang demikian *notoriuos*, sudah pasti sangat sulit bagi Djohan Ahmad untuk mempe-ngaruhi kaum bangsawan. Namun hal ini dapat diatasinya dengan mengandalkan rekomendasi dari Xarim M.S. yang merupakan salah seorang asisten Gubernur Sumatera. Tidak begitu jelas, apakah karena peranan Xarim M.S. ataukah karena keahliannya sendiri, yang jelas Djohan Ahmad berhasil mendekati pihak *uleebalang* dan bahkan memperoleh kepercayaan mereka. Dalam hal yang terakhir ini boleh dikatakan Djohan Ahmad malah sangat berhasil, sampai-sampai para pemuda percaya bahwa ia telah berpihak kepada kaum *uleebalang*. Karena itulah ia kemudian dibunuh oleh para pemuda Pesindo. Rupanya para pemuda tersebut telah berhasil mem-bongkar rahasia peranan muka dua yang dijalankan Djohan Ahmad.¹⁶⁸ Djohan Ahmad adalah salah satu contoh korban PKI dalam bentuk yang lain; mengadu-domba kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang ada dalam masyarakat sesungguhnya sangat berbahaya. Ia telah menjalankan fungsi negatifnya se-bagai penghantar arus antara tegangan negatif dan tegangan positif, dan dalam hubungan arus pendek, ia sendiri akan terbakar hangus.

Pada tanggal 23 Desember 1945, Djohan Ahmad menyam-paikan kepada pihak *uleebalang* salinan telegram yang dikirimkan oleh pimpinan Pesindo di Sigli kepada Residen Aceh dan Xarim M.S., yang terakhir ini selaku Asisten Residen Gubernur Sumatera. Di dalam telegram tersebut Pesindo melaporkan tentang “kekejaman, teror dan perampokan” yang dilakukan oleh pasukan *uleebalang* di sebuah kampung pada tanggal 18 Desember 1945. Sebuah telegram lain yang dikirim oleh seorang penduduk kepada Komandan Polisi di Kutaraja, tentang pembunuhan atas saudaranya, seorang anggota Polisi, juga disampaikan oleh Djohan Ahmad kepada pihak *uleebalang*.¹⁶⁹

Informasi dan intrik-intrik lain yang dilakukan oleh Djohan Ahmad tidak

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 159.

¹⁶⁹ *Ibid.*, 161.

mustahil menjadi faktor yang mendorong pihak *uleebalang* untuk beraksi lebih jauh pada tanggal 25 Desember 1945. Pada tanggal tersebut mereka melakukan penculikan secara besar-besaran sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya dalam rapat di Lueng Putu. Kemudian Djohan Ahmad memberitahukan informasi ini kepada pimpinan Pesindo. Kepada Hasan Aly, Ketua Pesindo cabang Sigli, Djohan Ahmad mengatakan “Kalau mau mengambil sesuatu tindakan, maka tindakan itu harus dilakukan sebelum tanggal 25 Desember. Kalau tidak, maka tidak akan ada gunanya lagi.”¹⁷⁰

Para pemimpin Pesindo setempat mempercayai begitu saja kata-kata Djohan Ahmad, dan mereka sama sekali tidak menyadari peranan ganda yang dimainkannya. Latar belakang Djohan Ahmad sebagai wartawan yang dikenal sangat anti feodalisme itu telah menjadi tabir asap tebal yang menyelubungi segala tindak tanduknya. Sikap anti feodalnya telah dianggap sebagai perilaku yang berpihak kepada ulama. Tidak pernah terpikirkan oleh mereka bahwa sikap Djohan Ahmad yang anti feodal itu dapat saja dilahirkan oleh orientasi-orientasi lain selain pro-ulama. Dalam orientasi seperti itu, bisa saja ia mengadu domba kedua belah pihak demi mencapai tujuan-tujuan politiknya sendiri yang anti feodalisme.¹⁷¹ PKI memang memiliki karakter membonceng atau menunggangi kelompok-kelompok yang saling berseberangan dan kemudian dengan licik mengadu domba kelompok-kelompok tersebut agar salah satu atau keduanya mengalami kerugian moral dan material yang besar. Selain itu, dengan konflik fisik yang sudah pernah terjadi, kedua kelompok —meskipun bisa saja saling memaafkan— akan sulit melupakan masa lalu yang kelam. Masalalu atau historisisme dalam konsep ideologi komunis, adalah hal penting dalam pemenuhan materialisme historis bagi bangkitnya komunis di masa-masa yang akan datang.***



¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

Bab 8

GERAKAN TENTARA PERJUANGAN RAKYAT

TENTARA Perjuangan Rakyat (TPR) merupakan sebuah barisan kelasykaran yang militan. Inti dari barisan ini adalah Pemuda PUSA di bawah pimpinan Teungku Amir Husin Al Mujahid. Setelah berita proklamasi kemerdekaan diterima oleh masyarakat, semangat Pemuda PUSA untuk mempertahankan-hankannya semakin bergelora dalam dada anggota-anggo-tanya. Bersama-sama dengan TKR ikut serta berjuang untuk mengambil alih senjata Jepang. Di induk organisasinya, Idi Rayeuk, Teungku Amir Husin Al Mujahid telah menggalang organisasi ini menjadi sebuah badan kelasykaran rakyat yang kemudian diberi nama dengan TPR yang pada bulan Februari 1946 namanya diganti dengan Barisan Berani Mati Divisi Teungku Chik Paya Bakong.¹⁷²

Keterlibatan TPR dalam gerakan membasmi uleebalang combok didorong oleh adanya rasa tidak puas mereka, terutama Teungku Amir Husin Al Mujahid, atas cara-cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Markas Besar Rakyat Umum terhadap penyelesaian Cumbok. Menurut penilaian mereka, perebutan Markas Uleebalang di Lam Meulo dan penghancuran kekuatannya di berbagai tempat dalam wilayah Pidie oleh TKR dan MBRU (mereka sendiri tidak ikut) tidak sempurna. Mereka berpendapat masih ada para pengikut Markas Uleebalang yang tetap duduk dalam badan-badan pemerintah, tidak saja di Pidie bahkan di seluruh daerah Aceh. Karena itu, mereka berkesimpulan bahwa revolusi sosial belum selesai dan masih perlu dilanjutkan untuk menyingkirkan tokoh-tokoh yang menurut anggapan mereka “berba-haya” bagi keutuhan dan kelanjutan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh.¹⁷³

Langkah awal yang dilakukan untuk memulai rencana itu adalah Teungku Amir Husin Al Mujahid mengadakan hubungan dengan Mayor Husin Yusuf, Ajudan Staf Umum Divisi V TRI (TKR diganti nama menjadi TRI

¹⁷² Tim Penyusun, *op.cit.*, hal. 245.

¹⁷³ Insider, *op.cit.*, hal. 20.

sejak awal Januari 1946), yang pada waktu itu atas izin Komandan Divisi, Kolonel Sjamaun Gaharu, berada di Bireuen. Dalam pertemuan itu telah dibahas berbagai persoalan yang menyangkut dengan rencana yang akan digerakkan itu.¹⁷⁴ Kedua Tokoh ini sependapat mengenai perlunya dilanjutkan revolusi sosial tahap kedua di daerah Aceh; dan ternyata apa yang direncanakan itu tidak pernah dilaporkan oleh Husin Yusuf kepada atasannya di Kutaraja.¹⁷⁵

Setelah rencana mereka matang dan lasyarnya diperkuat pada awal Februari itu juga mereka mulai melancarkan gerakannya. Sasaran pertama adalah wilayah Aceh Timur sendiri. Di daerah ini, terutama di Idi, Langsa dan Kuala Simpang (daerah Tamiang) telah menangkap sejumlah orang-orang yang dicurigai dan dianggap sebagai lawan mereka (malah ada yang dibunuh). Salah seorang yang dibunuh adalah Teuku Raja Pidie, Asisten Residen (Bupati) Aceh Timur.¹⁷⁶ Teuku Abdullah Paloh, Keujruen Karang ditangkap, Teuku Ali Basyah ditangkap dan dicopot jabatannya sebagai Wedana Langsa. Mengenai Teuku Abdullah Paloh, atas ke-baikannya Teuku Mohammad Amin, salah seorang Tokoh pimpin-an PUSA, berhasil diselamatkan. Ia dibebaskan dan dipindah-kan ke Kutaraja. Sedangkan Teuku Ali Basyah bersama dengan tahanan lain yang selamat, lepas dari maut, kemudian dibawa ke Takengon. Sebagai Wedana Langsa yang baru, mereka menunjuk Abdullah Hussain (pada waktu itu Kepala Polisi Langsa) dan untuk Asisten Residen Aceh Timur ditunjuk Teuku Mohammad Daud Syah yang pada waktu itu telah ditarik ke kantor Residen Aceh Kutaraja.¹⁷⁷

Dalam perjalanannya dari satu daerah ke daerah lain, Teungku Amir Husin Al Mujahid merekrut pemuda untuk mendukung gerakan di daerah-daerah yang dilaluinya. Untuk itu, ia mengumumkan bahwa pasukannya akan berangkat menuju Sabang untuk memerangi Belanda yang masih bercokol di sana. Gerakan ke sana adalah atas permintaan Teuku Nyak Arif.¹⁷⁸ Dalam perekrutan anggota, Teungku Amir Husin Al Mujahid tidak memandang latar belakang sosial ataupun politik mereka dan tidak membuat suatu aturan-aturan khusus yang menjadi batas-batas tindakan mereka. Sepertinya, ia membiarkan pasukannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, seperti membunuh dan merampas harta benda. Sekali seseorang terkena cap "sisa-sisa uleebalang", sulit bagi yang bersangkutan untuk bisa meloloskan diri dari tuduhan TPR.¹⁷⁹ Dengan cara seperti ini, di setiap daerah yang disinggahi, selalu mendapat tambahan pasukan, sehingga menjadi sebuah badan kelasykaran yang

¹⁷⁴ Tim Penyusun, *op.cit.*, hal. 246.

¹⁷⁵ Nazaruddin Syamsuddin mengatakan bahwa alasan Husen Yusuf menyetujui ajakan TPR karena selama ini ia merasa kesal dan kecewa terhadap pengorganisasian TRI dibawah Teuku Nyak Arif. Ia hanya didudukkan pada posisi yang kurang penting dalam jajaran militer tersebut, yaitu sebagai Kepala Sekretariat. Sedangkan kepada Teuku Hamid Azwar diberikan jabatan yang lebih tinggi darinya. Gelagat yang ini dibaca oleh Teungku Amir Husin Al Mujahid sehingga ia sangat yakin Husen Yusuf akan menjadi mitranya. Lihat Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi...Op.cit.*, hal.180

¹⁷⁶ Syamaun Gaharu, "Revolusi Sosial di Awal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Aceh", *Harian Waspada*, 9 Januari 1985.

¹⁷⁷ Tim Penyusun, *op.cit.* hal. 247.

¹⁷⁸ Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, *op.cit.*, hal. 48.

¹⁷⁹ Nazaruddin Syamsuddin, *op.cit.* hal. 182.

besar dan kuat.

Setelah wilayah Aceh Timur berhasil “dibersihkan” dari apa yang disebutkan anasir-anasir anti Republik, maka TPR bergerak menuju ke Aceh Utara. Di sini mereka mendapat perlawanan yang tangguh dari barisan Teuku Ibrahim, suatu gerakan yang muncul beriringan dengan lahirnya TPR. Teuku Ibrahim adalah anak uleebalang Cunda dan keponakan Teuku Raja Bujang, uleebalang Nisam, salah seorang pejuang kemerdekaan yang pernah dibuang ke Boven Digul (Irian Barat) oleh Pemerintah Kolonial Belanda.¹⁸⁰ Sebagai keponakan seorang pejuang yang karismatik, ia dicintai oleh rakyat di Aceh Utara dan menyebut dirinya sebagai “Penglina Agung”. TPR merasa kewalahan mengalahkan barisan Teuku Ibrahim Panglima Agung, sehingga Teungku Amir Husin Al Mujahid meminta kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk mengi-rimkan pasukan tambahan ke sana. Ia mengatakan bahwa dirinya akan ditangkap oleh Teuku Raja Pidie atas bantuan Panglima Agung Pasukan ini tiba tiba di Aceh Utara di bawah pimpinan Ayah Daud Tangse, seorang tokoh pemuda yang cukup aktif dalam penaklukan uleebalang dalam peristiwa Cumbok.¹⁸¹ Atas bantuan Daud Tangse, Teungku Amir Husin Al Mujahid berhasil menangkap Teuku Ibrahim dan melucuti pasukannya di Idi Cut, ketika Panglima Agung itu sedang menggerakkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Jepang (atas permintaan Teuku Raja Pidie) yang kembali memasuki Aceh Timur.¹⁸² Dengan keberhasilan ini, lempang-lah jalan Teungku Amir Husin Al Mujahid mewujudkan tujuannya. Turut menjadi korban dalam pertempuran di daerah Aceh Utara adalah Teuku Raja Sabi (pada waktu itu uleebalang Keureutou), seorang pejuang kemerdekaan yang telah menghabiskan sebahagian usia mudanya bergerilya di gunung-gunung (sampai tahun 1919). Ia mengikuti jejak orang tuanya Cut Nyak Meutia, menentang penjajahan Belanda. Setelah proklamasi itu juga tidak tinggal diam, giat menyusun kekuatan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang memang selalu menjadi cita-citanya.¹⁸³

Setelah daerah Pidie ditaklukkan, gerakan Teungku Amir Husin Al Mujahid menuju Kutaraja. Hasan Saleh melihat Banyak sekali kendaraan yang penuh pasukan rakyat bersenjata menuju Kutaraja. Pasukan ini beristirahat di Pesantren Teungku Abdul Wahab Seulimuem (tanggal 27 Februari).¹⁸⁴ Jumlah pasukan mencapai 40 truk, dibandingkan hanya 7 truk waktu ia berangkat dari Idi. Melalui Husin Yusuf, al Mujahid mengirim surat kepada TRI yang isinya bahwa pasukannya akan memasuki Kutaraja pada hari berikutnya menuntut agar Jenderal Mayor Teuku Nyak Arif, Kolonel Sjamaun Gaharu dan Mayor Hamid Azwar mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menambahkan bahwa TRI tidak memiliki kemampuan dan tidak refresentatif, dalam arti bah-wa perwira yang berorientasi kepada ulama

¹⁸⁰ Tim Penyusun, *op.cit.*, hal. 247.

¹⁸¹ Nazaruddin Syamsuddin, *op.cit.*, hal. 182.

¹⁸² Versi lain mengatakan bahwa Teuku Ibrahim Cunda merasa dendam kepada orang-orang PUSA, karena pamannya Kepala Luhak Pidie, T. Chik Muhammad Said, ikut terbunuh para peristiwa Cumbok. Ia bekerjasama dengan kepala Luhak Aceh Timur, Teuku Raja Pidie untuk membalaskan dendamnya kepada PUSA Perse-kongkolan ini tercium oleh al-Mujahid. Lihat Hasan Saleh, hal. 102

¹⁸³ Tim Penyusun, *op.cit.*, hal. 247.

¹⁸⁴ Hasan Saleh, *op.cit.*, hal 104.

tidak diikuti-sertakan dalam struktur kepemimpinan TKR.¹⁸⁵

Keesokan harinya, ketiga hendak melanjutkan perjalanan ke Kutaraja, tiba-tiba muncul utusan-utusan Teuku Nyak Arif, seperti Tuanku Mahmud, Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, Said Abu Bakar, dan Pak Mansyur. Tuanku Mahmud menanyakan maksud kedatangan al-Mujahid ke Kutaraja dengan pasukan besar itu. Ia menjawab: untuk membebaskan rakyat Aceh dari kaum feodal dan mendemokratisasikan pemerintahan Aceh, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sebagai ganti dari raja, oleh raja dan untuk raja. Saya akan mengembalikan Aceh kepada rakyat, sebagai pemilik aslinya. Ia juga menandakan bahwa mereka bukan saja kurang bahkan tidak percaya pada pemerintah Aceh sekarang. Meskipun pemerintah Aceh sekarang diangkat oleh Pemerintah di Jakarta, tetapi dalam hal ini Pemerintah Pusat telah keliru. Karena itu, kalau mereka bertahan, al-Mujahid menandakan bahwa lebih baik mengeluarkan satu timba darah sekarang daripada mengeluarkan air mata dan darah sedanau di kemudian hari.¹⁸⁶ Para pemimpin di Jakarta tidak tau bagaimana pandangan dan tingkah laku kaum feodal di Aceh, baik terhadap rakyat maupun republik. Apabila mereka tetap pada puncak kekuasaan, siapakah yang sanggup menjamin bahwa mereka tidak akan kembali kepada tabiat yang semula?

Bujukan-bujukan delegasi Kutaraja sama sekali tidak menyebabkan al-Mujahid mengurungkan niatnya. Tanggal 1 Maret 1946 pasukan TPR dengan kekuatan 50 truk tiba di Kutaraja dari Idi, di samping yang datang dengan kereta api. Kedatangan pasukan yang dipimpin oleh Teungku Amir Husin Al Mujahid sangat mengejutkan para pemimpin dan warga di Kutaraja sehingga menimbulkan suasana tegang. Setelah Kutaraja dikuasai, al-Mujahid mengeluarkan dekrit atas nama rakyat agar rezim uleebalang yang menduduki posisi dalam pemerintahan menyerahkan pangkat dan jabatannya kepada rakyat. Ia juga memerintahkan Residen Teuku Nyak Arif, Komandan Markas Umum Daerah Sjamaun Gaharu dan pejabat teras yang kebanyakan dari kalangan uleebalang menghadapnya di Aceh Hotel. Dalam pertemuan itu hadir sejumlah perwira al-Mujahid yang didampingi oleh dua orang tokoh PUSA, M. Nur El Ibrahimy dan Abdul Gani Usman (Ayah Gani). Pihak pemerintah diwakili oleh Sjamaun Gaharu dan Hamid Azwar, pihak pemerintah daerah diwakili oleh Teuku Muhammad Ali. Dalam sidang singkat, al-Mujahid menyanggah, "rakyat tidak melihat adanya iktikad baik dari para penguasa Aceh sekarang ini untuk menentang penjajahan Belanda. Buktinya, acuh tak acuh dalam penumpasan gerakan Cumbok di Lam Meulo Meulo. Karena itu, atas nama rakyat, saya minta tuan-tuan mengundurkan diri, turun dari tahta sekarang juga."¹⁸⁷ Syamaun Gaharu menolak tuntutan tersebut sebelum ia meminta pertimbangan Teuku Nyak Arif selaku Anggota Staf Umum Komandemen Sumatera. Usai pertemuan, wakil pemerintah tersebut menyampaikan hasilnya kepada Teuku Nyak Arif di kediamannya. Sjamaun Gaharu mendesak agar Teuku Nyak Arif tidak tunduk pada tekanan TPR dan TRI siap bertempur sampai mati di bawah pimpinan Mayor Teuku

¹⁸⁵ Hasil wawancara Nazaruddin dengan Teungku Amir Husin Al Mujahid, lihat Buku *Revolusi... op.cit.*, hal 185.

¹⁸⁶ Hasan Saleh, *op.cit.*, hal.103.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hal. 105.

Muhammad Syah. Namun saran tersebut tidak diterima oleh Teuku Nyak Arif. Ia justru memenuhi tuntutan al-Mujahid dengan pertimbangan tidak ingin lagi melihat pertumpahan darah dengan melibatkan rakyat yang tidak berdosa.¹⁸⁸ Keputusannya disampaikan kepada al-Mujahid melalui Husin Yusuf dan ia meminta al-Mujahid untuk menghadiri serah terima jabatan Komando Divisi V di markas divisi.¹⁸⁹ Dalam upacara yang sederhana, Sjamaun Gaharu dan Hamid Azwar melepaskan tanda pangkat mereka dan menyerahkan kepada al-Mujahid. Dua hari kemudian, keputusan rapat pimpinan TPR tanggal 2 Maret, membebaskan Teuku Nyak Arif dari kedudukannya sebagai koordinator TRI Divisi V dan menetapkan al-Mujahid sebagai pengganti Teuku Nyak Arif (Staf Umum TRI Komandemen Sumatera di Aceh) dengan pangkat Jenderal Mayor. Husin Yusuf menggantikan Sjamaun Gaharu sebagai Komandan Divisi V merangkap sebagai Kepala Pertahanan Daerah Aceh dan pangkatnya dinaikkan menjadi Kolonel, sebelumnya Mayor. Teuku Hamid Azwar digantikan oleh Mayor Bachtiar sebagai Kepala Staf Divisi V. Tangan kanan al-Mujahid sendiri, Mayor Nurdin Sufi, diangkat menjadi Wakil Komandan Divisi merangkap sebagai Wakil Kepala Pertahanan Aceh dan pangkatnya dinaikkan menjadi Kolonel. Semua pergantian ini oleh TPR dipandang sebagai “atas pilihan rakyat sendiri” yang diwakili oleh TPR.¹⁹⁰ TPR juga mencopot Teuku Husin Trumon (Asisten Residen Aceh Besar) dan menggantikannya dengan Zaini Bakri (tokoh Pemuda PUSA). Dengan pergantian-pergantian tersebut, al-Mujahid berhasil mengamankan jabatan-jabatan penting di tangan pemimpin PUSA,¹⁹¹ sekaligus telah dapat menguasai kekuatan militer Aceh.

Seminggu setelah serah terima, Teuku Daud Syah memanggil 24 orang tokoh penting untuk “diamankan” sementara sampai keadaan benar-benar pulih. Hadir memenuhi panggilan tersebut Sjamaun Gaharu, Hamid Azwar, Sayid Ali, Teungku Hasbi Ash-Shiddiqy, Teungku Syekh Ibrahim, Teuku Husin Trumon, Teuku Lambait, Teuku Ali Basyah Peukan Bada, Teuku Usman Krueng Raya, Teuku Yusuf (adik Teuku Nyak Arif) Teuku Teungoh Hanafiah, Teuku Sulaiman Aziz dan M. Gousmia serta para pemuka uleebalang lainnya Ternyata oleh pemerintah mereka dianggap sebagai tahanan politik dan dikumpulkan di Pendopo yang kemudian diasingkan ke Takengon dan daerah-daerah lain.¹⁹² Teuku Nyak Arif sendiri diasingkan ke Takengon dan pada tanggal 4 Mei 1946 pimpinan rakyat yang telah menghabiskan usianya untuk perjuangan Kemerdekaan tanah airnya meninggal dunia di sana. Tidak kurang dari 100 orang yang ditahan di Takengon oleh al-Mujahid, di antaranya 60 orang bekas uleebalang dan selebihnya nasionalis dari kelompok non-PUSA. Mereka disebar di beberapa tempat berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang pernah dilakukan. Yang

¹⁸⁸Kekuatan TPR, menurut hasil wawancara dengan Husin Yusuf oleh tim peneliti tahun 1996, hanya berkisar 1000 orang yang tidak terlatih. Jika saja Teuku Nyak Arif memerintahkan untuk menumpas TPR, dalam waktu 15 menit pasukan TPR lumpuh, karena pasukan TRI pada saat itu cukup tangguh, terdiri dari personil terlatih dan dilengkapi dengan senjata modern yang berhasil dikumpulkan dari tentara Jepang dan termasuk terkuat di Sumatera pada waktu itu. Lihat A.K. Jakobi, *op.cit.* hal. 329.

¹⁸⁹Nazaruddin Syamsuddin, *op.cit.*, hal. 188.

¹⁹⁰*Ibid.*, hal. 189; lihat juga Tim Penyusun, *op.cit.*, hal. 249.

¹⁹¹*Ibid.*, hal. 249.

¹⁹²Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, *op.cit.*, hal. 51.

sangat berdosa ditahan di Sadong, sebuah kampung di atas perbukitan di luar kota Takengon. Rumah penjara Takengon diperuntukkan bagi mereka yang kurang bahaya. Penginapan Suka Jaya diperuntukkan bagi mereka yang dianggap kurang bahaya dari penghuni rumah penjara.¹⁹³ Uleebalang dan keluarganya yang berhasil di tawan di daerah-daerah lain juga banyak yang diasingkan di Garot, dan Tangse. Masyarakat di sini mengira tawanan tersebut adalah anti Republik, namun lama kelamaan mereka mengetahui bahwa penahanan ini merupakan tindakan dari al-Mujahid. Inilah yang menyebabkan tokoh-tokoh di Tangse, bekerjasama dengan tokoh-tokoh penting Gigieng terdorong untuk melakukan pembalasan terhadap al-Mujahid.

Dari Kutaraja TPR kemudian melanjutkan gerakannya ke Aceh Barat dan Aceh Selatan. Banyak juga tahanan yang berhasil dibawa ke pendopo hasil operasinya di daerah pantai barat tersebut. Dua orang diantaranya diculik dan hilang entah ke mana, yaitu Teuku Raja Itam Patik dan Teuku Iskandar Manggeng. Demikian pula Teuku Geumpa dan Teuku Manyak Arif diculik dari tahanan Polisi di kantin dan hilang. Selebihnya diasingkan ke Sadong, Takengon.¹⁹⁴

Tindakan-tindakan Teungku Amir Husin Al Mujahid bersama dengan TPR-nya telah menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat Aceh, termasuk dalam kalangan militer sendiri yang menganggapnya tidak wajar terhadap para pemimpin yang selama ini dinilai oleh rakyat besar jasanya dalam membina Negara Republik Indonesia di daerah Aceh. Rasa tidak senang itu semakin meluas, setelah Teungku Amir Husin Al Mujahid kemudian menjadi orang terkemuka dalam militer dan berkuasa di Aceh. Dari kalangan militer timbul sebuah kelompok yang merencanakan untuk menjatuhkan Teungku Amir Husin Al Mujahid dari kedudukannya. Pada akhir April 1946 kelompok ini berhasil menculik Teungku Amir Husin Al Mujahid di tempat penginapannya di Hotel Aceh, Kutaraja.

Sewaktu Teungku Amir Husin Al Mujahid sedang beristirahat dalam kamarnya di Hotel Aceh, tiba-tiba ia disergap suatu rombongan dari Tangse yang dipimpin oleh Syekh Daud Tangse. Ia segera dibawa dengan kendaraan ke Sigli untuk dibunuh dan dilemparkan ke laut di Gigieng. Ketika para penculik sedang beristirahat di Seulimeum, al-Mujahid meloncat dari mobil dan melarikan diri ke arah Kampong Keunalou. Para penculik mengejarnya sambil melepaskan tembakan sampai ia tertangkap kembali. Entah bagaimana caranya, berita penculikan Al-Mujahid yang sedang dibawa ke Sigli didengar oleh Bupati Pidie, Teungku A.Wahab Seulimeum dan Komandan Batalionnya Hasballah Haji. Mereka menghadang kendaraan penculik di Padang Tiji. Bupati dan Wakil Bupati sendiri, yaitu Teungku Hasan Aly, berdiri menghadang di jalanan. Melihat kedua tokoh yang disegani itu, para penculik kemudian membebaskan al-Mujahid.¹⁹⁵

Versi lain mengatakan al-Mujahid sempat dibawa ke Sigli dan diserahkan kepada Teungku Abdul Wahab Seulimeum, seorang tokoh Markas Besar

¹⁹³ Nazaruddin Syamsuddin, *op.cit.*, , hal. 190 ; A.K. Jakobi, *op.cit.*, hal. 332.

¹⁹⁴ Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, *Loc.cit.*, hal. 52.

¹⁹⁵ Hasan Saleh, *op.cit.*, hal. 110-111.

Rakyat Umum yang pada waktu itu telah ditunjuk sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Pidie (sebagai bupati definitif, baru ditetapkan pada bulan Agustus 1946, setelah datang ketetapan surat Gubernur Sumatera. Para penculiknya merencanakan untuk mempertemukannya dengan Sjamaun Gaharu di Sigli dan dalam pertemuan itu ia akan diminta untuk memberi penjelasan serta sekaligus mempertanggungjawabkan semua tindakannya selama ini. Berkat usaha para pengikutnya, di sana Teungku Amir Husin al Mujahid berhasil dibebaskan dan selamat dari bahaya yang mengancamnya, sehingga ia dapat kembali menduduki jabatan semula.¹⁹⁶

Penculikan itu didorong oleh tindakan al-Mujahid itu sendiri yang menurut kelompok penculik karena terlalu mendominasi jabatan penting kepada orang Idi setelah rezim uleebalang tumbang. Syekh Daud Tangse bersama lima tokoh dari Gigieng (Teungku Adam Telaga Tujuh dan Teungku Abbas Supak) di rumah Daud Beureueh berkata kepada Hasan Saleh bahwa “Orang-orang Idi telah menjajah kita” Yang dimak-sudkan antara lain al-Mujahid sendiri, Letkol Nurdin Sufi, Komandan Polisi-Tentara Abubakar Majid, Kapten Abdul Manaf.¹⁹⁷

Kebencian kepada al-Mujahid juga dipicu oleh tindakan-nya menduduki kantor telepon, melarang kendaraan menuju Aceh Besar. Hal ini menimbulkan kemarahan penguasa tunggal kota Sigli, Sab Cut. Ia sempat menodongkan senjata kepada al-Mujahid, namun dileraikan oleh Nurdin Sufi dan Ayah Gani. Kemarahan orang Gigieng diperparah dengan terbunuhnya Sab Cut dan T. Daud. Sab Cut bermaksud pergi ke Langsa, namun teman-teman al-Mujahid yang berada di Sigli mengkhawatirkan keselamatan al-Mujahid yang pada waktu itu berada di kampungnya. Mereka menelpon Bupati Aceh Utara, Teungku Sulaiman Daud. Kendaraan Sab Cut dihadang di Cunda dan diperintahkan kembali ke Sigli atau ke Lhok Seumawe. Sab Cut memilih ke Lhok Seumawe dan langsung menuju ke kediaman Bupati. Bujukan para pengawal Bupati agar keluar dari tempat itu karena Bupati tidak tidak dihiraukan oleh Sub Cut. Ia marah dan menembakkan beberapa butir peluru ke rumah kediaman pengawal. Para pengawal lalu membalasnya dan mengenai Sub Cut dan T. Daud hingga keduanya tewas.¹⁹⁸

Dengan berakhirnya peristiwa penculikan Teungku Amir Husin Al Mujahid berakhir pulalah revolusi sosial yang telah banyak menelan lorban jiwa, harga dan tenaga justru di saat sedang bergelornya Revolusi Kemerdekaan Indonesia.***



¹⁹⁶ Tim Penyusun, hal. *op.cit.*, 250.

¹⁹⁷ Hasan Saleh, *Loc.cit.*

¹⁹⁸ Hasan Saleh, hal. 113.

Bab 9

PEMULIHAN SITUASI

SEKALIPUN peristiwa Cumbok telah berakhir, namun ti-dak berarti keamanan bagi masyarakat terjamin. Revolusi tersebut telah mewariskan kegelisahan di tengah-tengah ma-syarakat, terutama di daerah pergolakan. Sejumlah kasus pelanggaran hukum, seperti pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh anti republik, belum diproses di peng-adilan, tindakan-tindakan balas dendam, penganiayaan, pe-rampasan harta uleebalang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya menjadi suatu perma-salahan yang harus segera ditanggulangi. Belum lagi masalah kepemimpinan dan status daerah-daerah yang sebelumnya diperintahi para uleebalang tidak mustahil menumbuhkan konflik baru.

Pemerintah Daerah telah mengambil beberapa kebijakan yang diharapkan dapat menormalkan keadaan di tengah-tengah kegelisahan masyarakat. Kebijaksanaan pertama ada-lah mengadakan Sidang Istimewa Komite Nasional Daerah bertempat di Pendopo Gubernurn Kutaraja. Setelah mende-ngar laporan, khususnya dari Teungku Muhammad Daud Beureueh mengenai situasi revolusi sosial di Pidie dan orang-orang yang telah berhasil ditangkap, sidang menerima usul yang diajukan Mr. S.M.Amin selaku Kepala Kehakiman Derah Aceh, agar orang-orang yang ditangkap itu dibawa ke Kutaraja untuk diperiksa dan diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, sidang juga menyetujui agar Hasan Ali, salah seorang tokoh PUSA dari Sigli yang sejak awal pergolakan ikut berusaha menghindari pertumpahan darah ditunjuk sebagai jaksa pe-nuntut.¹⁹⁹ Untuk merealisir keputusan sidang istimewa Komite Nasional Daerah, Pemerintah Daerah mengeluarkan instruksi pelaksanaan. Dalam kenyataannya instruksi tersebut tidak sepenuhnya ditaati, masih saja terjadi penculikan dan pembu-nuhan, seperti yang dialami oleh Teuku Tjek Ateuk dan Teuku Dulah Seulimeum, dua

¹⁹⁹Tim Penyusun, *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*, (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1984), hal. 251.

uleebalang Aceh Besar yang kubu-rannya sampai sekarang tidak diketahui.²⁰⁰

Kedua, penentuan kepemimpinan dan status daerah-daerah uleebalang yang diperintahi secara turun temurun dan dianggap sebagai sumber perang saudara itu dihapuskan dan diganti dengan “Negeri”. Untuk memimpin Pemerintahan Negeri dibentuk Dewan Pemerintahan Negeri (Bestur Komisi) yang anggotanya terdiri dari 5 orang dan salah seorang di antara mereka dipilih sebagai Kepala Negeri.²⁰¹

Terkait dengan perubahan status daerah uleebalang, Teuku Muhammad Aali Panglima Polim, selaku Panglima Sagi XXII Mukim, Aceh Besar telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan Pada tanggal 14 Februari 1946 dalam suatu rapat di Lam Meulo Sie, yang dihadiri oleh para uleebalang dalam wilayah Sagi XXII Mukim, dicetuskan sebuah resolusi, yang isinya :

- a. Bahwa hak toeroen temoeroen jang mendjadi kebia-saan sedjak berabad-abad bagi Oeleebalang oentoek memerintah negeri pada dewasa ini tidak tjotjok lagi dengan keadaan masa.
- b. Bahwa kami Oeleebalang adalah warga negara Repoe-blik Indonesia dan menghormati kedaulatan rakjat
- c. Bahwa oentoek mentjiptakan soeasana pemerintahan dengan sempoerna kami memoetoeskan :
 1. Memohon kepada soepaja rakjat di dalam XXII Moekim diberi hak menentoekan Kepala dan Ke-pala-Kepala sebahawannja.
 2. Hendaknja kepada sekalian Oeleebalang (terma-soek Panglima Sagi) jang sekarang, diizinkan oleh Pemerintah oentoek meletakkan djabatannja ma-sing-masing, soepaja dapat peloeang kepada rakjat oentoek memilih kepalanja.²⁰²

Resolusi yang ditanda tangani oleh para *uleebalang* dalam wilayah XXII Mukim itu disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Gubernur Sumatera, Residen Aceh dan kepada seganap rakyat Indonesia dengan perantaraan media massa. Prakarsa Teuku Panglima Polem itu besar artinya bagi pemerintah, terutama dalam memperlancar pengalihan status daerah uleebalang menjadi daerah kenegerian (kemudian ke-camatan), yang berarti ikut meredakan kegelisahan masya-rakat, khususnya di Aceh Besar.

Kebijaksanaan ketiga adalah menentukan langkah dalam mengatasi penguasaan harta peninggalan pihak uleebalang. Agar persoalan ini tidak berlarut-larut , pada tanggal 24 Juni 1946, Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1/1946, yakni Peraturan Tentang Menguasai atau Memiliki Harta Benda Peninggalan Uleebalang-Uleebalang Daerah Aceh.²⁰³ Peraturan yang ditandatangani bersama oleh Residen Aceh (Teuku Muhammad Daud Syah) dan Wakil Ketua Badan Pekerja DPRD Aceh itu, dalam pasal 5 dicantumkan

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, *Sumbangsih Aceh Bagi Republik*, Penyunting Mohamad Isa, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996), hal. 50.

²⁰³ Salinan lengkap lihat Mr.S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Penerbit Seroeng, t.t.), hal. 256-259.

bahwa Majelis yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah harta benda peninggalan uleebalang serta akibat-akibat revolusi sosial di daerah Aceh terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua dan beberapa Anggotanya dipilih dari wakil pemerintah, wakil pejabat agama dan wakil dari golongan rakyat umum yang berkedudukan dalam kabupaten yang bersangkutan. Khusus untuk Kabupaten Pidie, yang merupakan sentral pergolakan sosial itu, pada bulan Juli 1946 dibentuk Majelis Penimbang dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua I	: Teungku Abdul Wahab Seulimeum (Bupati Pidie)
Ketua II	: Muhammad Husen
Ketua III	: Teungku Haji Mustafa Ali
Ketua IV	: Kasan Ali
Ketua V	: Teuku Muhammad Amin
Ketua VI	: Teungku Itam Peureulak
Panitra umum	: Nyak Umar. ²⁰⁴

Dalam pasal 4 Majelis Penimbang mempunyai hak dan ke-kuasaan:

1. Menetapkan, mengumpulkan dan menguasai segala harta benda peninggalan, menerima dan menjelaskan segala rupa pengaduan rakyat atau badan yang berhak yang bersangkutan dengan harta benda peninggalan peninggalan yang bersangkutan itu.
2. Supaya dari segala harta benda peninggalan yang bersangkutan tersebut:
 - a. dikembalikan kepada masing-masing yang berhak segala harta benda baru maupun lama yang diram-pas, dimiliki dengan tidak hak atau dibeli dengan dibayar harganya oleh yang bersangkutan
 - b. Dijual kembali kepada masing-masing berhak, segala harta benda yang sudah dibelinya dengan paksa atau dengan jalan tidak sah oleh yang bersangkutan itu.
 - c. Dipertebus kembali kepada masing-masing yang ber-hak, segala harta benda yang mereka telah perga-daikan kepada yang bersangkutan itu.
 - d. Dilunasi atau diganti segala rupa utang piutang yang bersangkutan tersebut pada badan atau pada ba-rangsiapa yang ada bersangkutan.
 - e. Diserahkan kembali kepada badan-badan yang ber-hak, segala harta benda Baitalmal dan wakaf-wakaf yang telah dimiliki oleh yang bersangkutan itu.
 - f. Dibayar atau diganti segala rupa kerugian yang dide-rita rakyat berhubung dengan pembakaran dan ter-bakar, perampokan dan terampok, kerusakan dan sebagainya, seterusnya segala sesuatu kerugian sebagai akibat perlawanan rakyat pada pertempuran membasmi yang bersangkutan tersebut.
 - g. Dibayar atau diganti segala harta benda milik N.R.I yang telah menjadi musnah, rusak dan sebagainya, karena perjuangan yang dimaksud fasal 4 b/g 2 ayat f di atas, baik harta yang berada pada

²⁰⁴H.T.M. Amin, *Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh*, (Banda Aceh, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh & Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Aceh, 1976), hal. 7.

pihak yang bersangkutan sendiri maupun yang berada pada golongan rakyat umum.

3. Supaya sisa-sisa benda peninggalan masing-masing yang bersangkutan tersebut, yakni setelah dilakukan sebagai-mana yang dimaksud fasal 4 bahagian 2 di atas diperail kepada ahli warisnya, jika menurut rukun Islam me-mang hak dan patut dilakukan sebagai itu.
4. Menyelenggarakan penghidupan sekalian janda dan anak-anak yang ditinggalkan masing-masing yang ber-sangkutan itu, kepada ahli warisnya, belum lagi dapat diselesaikan.²⁰⁵

Usaha-usaha pemilikan harta benda peninggalan golongan uleebalang ini telah menjadi rebutan dan sengketa antara ahli waris dengan rakyat umum. Rakyat menuntut kembali pe-ngembalian harta benda mereka yang telah dirampas atau dibeli secara tidak sah oleh golongan uleebalang di masa lalu. Dalam penuntutan ini, bahkan telah ada di antara mereka yang bertindak sendiri dengan memberi tanda pembatasan, dan ada pula yang terus menggarap tanah pertanian yang dianggap milik mereka.²⁰⁶

Sehubungan dengan masalah ini, Pemerintah Daerah Aceh telah bekerjasama dengan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Daerah Aceh pada tanggal 24 Juni 1946, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946 membentuk sebuah badan khusus, yang disebut Majelis Penimbang. Majelis Penimbang ini terdiri dari enam orang ketua, masing-masing yaitu : Ketua I Teungku Abdul Wahab Seulimeum, yang pada waktu itu sudah diangkat menjadi Bupati Pidie. Ketua II M. Husin, merangkap Wedana Sigli. Ketua III Teungku Haji Mustafa, merangkap sebagai Ketua Jawatan Agama Luhak Pidie. Ketua IV Teungku Haji Hasan Ali, merangkap Kepala Kejaksaan Daerah Aceh. Ketua V Teuku Haji Amin, merangkap Bupati Urusan Pemerintahan dan Keamanan. Ketua VI Teungku Itam Pereulak, dan Panitera diangkat Teungku Nyak Umar.²⁰⁷ Tugas dan tanggung jawab utama dari Majelis Penimbang ini adalah (1) Mengumpulkan dan menguasai harta benda yang telah dikuasai oleh rakyat; (2) Menyita harta benda uleebalang yang menjadi gugatan rakyat yang terlibat dalam Perang Cumbok; (3) Menyelesaikan sengketa dari gugatan-gugatan sesuai dengan hukum yang berlaku; (4) Membiayai famili dan saudara *uleebalang* yang harta bendanya habis dikuasai atau diambil oleh rakyat dan rakyat yang rumah-rumahnya dibakar serta hartanya dirampok pada saat terjadinya Perang Cumbok; (5) Menjual, menyerahkan kembali harta benda uleebalang yang telah disita; (6) Menyelesaikan pergantian rumah-rumah yang dibakar oleh tentara Cumbok dan membayar harta benda rakyat yang dirampas; dan ke (7) Setelah semua selesai, sisanya dari harta benda tersebut akan dikembalikan kepada ahli waris *uleebalang* masing-masing.²⁰⁸ Pembentukan Majelis Penimbang ini menimbulkan reaksi yang keras dari pihak keluarga golongan *uleebalang*.²⁰⁹

²⁰⁵ Mr. S.M. Amin *op.cit.*, hal., 257-258.

²⁰⁶ M. Nur El Ibrahimy, *op.cit.*, hal. 94-95.

²⁰⁷ H.T.M. Amin, *Loc.cit.*

²⁰⁸ *Ibid.*, hal. 8.

²⁰⁹ M. Nur El Ibrahimy, *Op. cit.*, hal. 91.

Setelah pembentukan Majelis Penimbang, mulailah mereka bekerja dengan tugas-tugas :

1. Mengumpulkan harta benda yang bergerak yang selama sebelum terbentuknya markas-markas kenegerian itu tidak tertentu.
2. Mendaftarkan harta benda tetap seperti kebun, sawah dan lain-lain
3. Mengumpulkan dan mendaftarkan hasil kebun dan hasil sawah dan lain-lain
4. Memisahkan harta benda uleebalang sendiri dan harta benda ahli waris yang tidak bersangkutan.²¹⁰

Dalam kenyataannya, kerja Majelis Penimbang ini tidak banyak membuahkan hasil. Hal ini disebabkan karena perang mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan makin memuncak (agresi Belanda I dan II). Sangat sulit untuk menetapkan pe-milik harta benda yang ditinggalkan pihak uleebalang berhubung telah banyak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab selama terjadi revolusi sosial. Hambatan lain adalah tidak cukup dana yang tersedia akibat inflasi yang tidak terkendali pada waktu itu.²¹¹

Sebab lain adalah sulitnya mengumpulkan harta benda uleebalang terutama harta benda yang bergerak yang sulit dilacak. Di samping itu, sebelum peraturan ini dicetuskan banyak harga peninggalan uleebalang yang diambil oleh rak-yat karena mereka merasa berhak atasnya, lebih-lebih lagi mereka yang menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa Cumbok. Sekalipun ada yang berhasil disadarkan dan dikembalikan, namun tidak sedikit pula yang tidak kembali. Lebih-lebih lagi ada harta yang telah dijual kepada pihak lain atau telah beberapa kali berganti tangan.²¹²

Pihak keluarga uleebalang merasa tidak adil dalam persoalan pengaturan harta peninggalan tersebut. Nada “aneh” “ganjil” dan “berat sebelah” sering ditujukan kepada Majelis Penimbang., apalagi mereka adalah anggota-anggota PUSA. M. Nur El Ibrahimy mengakui rumitnya persoalan ini. Ia mengatakan : harus diingat pula bahwa kedudukan harta peninggalan uleebalang itupun merupakan suatu yang harus diurus dalam suasana ganjil yang sedang meliputinya. Justru karena itulah dibuat suatu peraturan yang dipandang ganjil dari segi hukum untuk dapat mengurus hal-hal yang ganjil dalam suasana yang ganjil pula.²¹³ Bisa saja setiap kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah Aceh adalah atas dasar keputusan bersama dengan golongan PUSA, sehingga hasil keputusan cenderung berwajah PUSA.

Sehubungan dengan adanya gangguan dan penganiayaan terhadap famili atau yang dituduh sebagai sisa-sisa pengikut Markas Uleebalang Cumbok, dalam rangka menjamin kesela-matan mereka, Pemerintah Daerah Aceh juga mengeluarkan sebuah ketetapan, yaitu: Ketetapan Residen Aceh Nomor 59/NRI, tertanggal 13 Agustus 1946.²¹⁴ Dalam ketetapan tersebut disebutkan tempat tinggal khusus bagi mereka dan selama di sana kepada mereka

²¹⁰ *Ibid.*, hal.. 177.

²¹¹ Tim Penyusun, *op.cit.*, hal. 253.

²¹² M. Nur El Ibrahimy, *op.cit.*, hal. 177.

²¹³ *Ibid*, hal. 174.

²¹⁴ Lihat SM. Amin, *Op. cit.* hal. 147-151.

diberikan jidup (jatah hidup) sebanyak Rp 100,- setiap bulan ditambah dengan bantuan beras seperti yang didapatkan oleh pegawai negeri pada waktu itu. Adapun tempat yang dimaksud sebagai tempat tinggal mereka adalah di Takengon dan sekitarnya. Di sana mereka ditempatkan di tiga lokasi yang terpisah, yaitu di Desa Sadong sebagai tempat bagi Teuku Nyak Arief dan beberapa pengikutnya, dan di Penginapan Suka Jaya serta di Penjara Takengon.²¹⁵ Dan di antara mereka yang dinyatakan ditahan, tetapi tidak sempat dibawa ke Takengon berhubung telah keluar dari daerah Aceh, seperti Syamaun Gaharu, T. Hamid Azwar, dan tokoh-tokoh meliter yang sebelumnya aktif berusaha untuk mengakhiri Perang Cumbok di daerah Pidie khususnya dan di Aceh umumnya, secara bertahap mulai dibebaskan, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Badan Penyidik Keadaan Orang-orang Tahanan Rakyat, suatu badan yang dibentuk Pemerintah Daerah Aceh pada bulan April 1947 dengan anggota-anggotanya terdiri dari Teuku Muahmmad Amin mewakili Pemerintah, Teungku Abdur-rahman dari Masyumi dan Teungku Ishak Amin dari Pesin-do.²¹⁶ Namun baru pada pertengahan tahun 1949 semua ta-hanan Perang Cumbok dapat dibebaskan.

Dengan usaha-usaha yang ditempuh Pemerintah Daerah Aceh, sebagaimana yang telah diuraika di atas, diharapkan Perang Cumbok sebagai perang saudara yang telah berlang-sung lama itu tidak akan terulang kemabli di masa menda-tang. Dengan demikian seluruh tenaga daoat diarahkan sepe-nuhnya bagi perjuangan menghadapi aggressor kolonial Belanda yang pada waktu itu semakin giat berusaha untuk menduduki Indonesia kembali.***



²¹⁵ Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekah Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*, (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998), hal. 161-162.

²¹⁶ Mr. S.M. Amin, *Op. cit.*, hal. 146-147.

BAB 10

DAMPAK DAN PENGARUH PERISTIWA *PRANG CUMBOK*

PERISTIWA-peristiwa kererasan yang terjadi antara golongan elite uleebalang dan elite ulama di Aceh dalam Perang Cumbok telah memberikan pengaruh dan dampak terhadap tetapan kehidupan masyarakat Aceh, antara lain; *Pertama* berubahnya struktur pemerintahan dan bergesernya peran di dalam badan-badan pemerintahan di Aceh; *Kedua* bergeser peran dan kepemilikan ekonomi. *Ketiga* masyarakat hidup dalam ketakutan yang mendalam. Dan *Keempat* terjadinya keterlambatan dan ketertinggalan pembangunan di daerah Aceh dalam berbagai sektor dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Dampak *pertama* yang sangat terasa adalah berubahnya struktur, peran dan sistem pemerintahan, terutama untuk atau di daerah-daerah yang dikuasai dan menjadi basis golongan uleebalang, karena diketahui bahwa sejak Kemerdekaan Republik Indonesia telah terjadi suatu perubahan yang prinsipil dalam sistem pemerintahan dari masa-masa sebelumnya. Pada masa penjajahan Belanda daerah-daerah yang berpemerintahan sendiri atau daerah-daerah yang diperintah langsung oleh penjajah, pemerintahah dijalankan secara perorangan oleh golongan uleebalang dengan jabatan turun temurun melalui kebijakan secara perorangan tanpa terikat pada suatu badan hukum.²¹⁷ Peristiwa Kemerdekaan Indonesia telah memberi suatu langkah baru pada sistem pemerintahan di Aceh, menuju ke arah demokrasi, meskipun belum dapat dijalankan sepenuhnya.

²¹⁷ SM Amin, *ibid.*, .hal. 27.

Status Daerah Aceh masih sebagai daerah Keresidenan otonom yang berpusat pada Propinsi Sumatera yang berkedudukan di Pematang Siantar. Hubungan yang terjadi dengan Pemerintahan Pusat hanyalah pada masalah pengangkatan pejabat-pejabat yang berada di pusat-pusat Pemerintahan Aceh, sedangkan peraturan-peraturan dan pemerintahannya dijalankan sesuatu dengan ketetapan Pemerintahan Daerah Aceh. Bentuk pemerintahan Keresidenan Aceh pada awal Kemerdekaan Indonesia sebagai berikut : (1) Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh; (2) Residen sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Keresidenan; dan (3) Badan eksekutif yang terdiri dari lima orang.²¹⁸

Pada tanggal 29 September 1945 Gubernur Sumatera Teuku Muhammad Hasan menetapkan Tuanku Mahmud sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh dan Teuku Nyak Arief sebagai Residen Aceh yang pertama, di dibantu oleh T.M.A. Panglima Polem sebagai wakil.²¹⁹ Sedangkan anggota Badan Eksekutif yang pertama, terdiri dari Ng. Suratno dalam bidang pendidikan, Sutikno Padmo Sumarto, urusan pengadilan, T.M. Amin urusan pemerintahan umum dan keamanan, Ali Hasjmy urusan sosial dan Almelz untuk urusan penerangan.²²⁰ Anggota Badan Eksekutif ini dipilih dari anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh dan diketuai langsung oleh Residen Aceh. Badan ini bersidang sedikitnya seminggu sekali, tujuannya untuk memonitoring pelaksanaan pemerintahan di Daerah Aceh.

Pada pertengahan Januari 1946 Residen Aceh Teuku Nyak Arif diganti oleh Teuku Muhammad Daud-Syah. Ia adalah seorang dari sebahagian kecil uleebalang yang terlepas dari pertentangan dengan golongan ulama. Sebelum menjadi Residen Aceh, ia adalah Asisten Residen Aceh Timur. Pada masa penjajahan Belanda, ia sebagai *Zelfbestuur* Idi, dan pada masa Pendudukan Jepang, ia sebagai *Gunco* Idi.²²¹ Demikian juga dengan Tuanku Mahmud telah digantikan oleh Mr. S.M. Amin. Susunan Badan Eksekutif yang baru ini terdiri dari Ketua dipegang oleh Residen Aceh Teuku Muhammad Daud-Syah; Wakil Ketua Mr. S.M. Amin; Sekretaris Kamarusid, dengan anggota-anggota lainnya Sutikno, Ali Hasjmy, H.M Zainuddin, R. Isnun, dan Muhammad Hanafiah.²²²

Peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi antara golongan uleebalang dan golongan ulama di Aceh dalam Perang Cumbok telah memberikan pengaruh dan dampak terhadap sistem dan struktur serta peran pelaksana pemerintahan, terutama untuk daerah-daerah yang dikuasai oleh golongan uleebalang. Pola-pola kepemimpinan tradisinal yang biasanya berada di tangan uleebalang yang terkesan otoriter, diubah menjadi Kecamatan, Kenegerian dan Kabupaten. Wilayah Kecamatan dan Kenegerian pada masa sebelum kemerdekaan merupakan daerah-daerah uleebalang. Di daerah Kecamatan dibentuk satu badan pemerintahan yang bernama *Bestuur* Komisi. Keanggotaan badan ini terdiri dari lima orang yang dipilih oleh dan dari pimpinan rakyat, alim ulama, cerdik pandai dan disahkan oleh residen

²¹⁸ H.T.M. Amin, *Op.cit.* hal. 3

²¹⁹ S.M. Amin, *Op. cit.*, hal. 28

²²⁰ H.T.M. Amin, *Op. cit.*, hal. 4

²²¹ Insider, *Op. cit.*, hal. 36.

²²² S.M. Amin, *Op. cit.*, hal. 38.

Aceh. Dan dari lima orang yang dipilih, salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua yang bertanggung jawab selaku kepala Kenegerian, sedangkan empat orang lainnya menjabat kedudukannya dalam urusan pendidikan, sosial, agama dan urusan pertanian.²²³ Anggota Bestur Komisi ini tunduk kepada Bupati setempat dan segala keputusan penting yang diambil adalah atas dasar musyawarah besama.

Daerah teritorial terkecil adalah *gampong* atau yang dipimpin oleh *geuchik*. Pemilikan *geuchik* dilakukan secara musyawarah di meunasah masing-masing dengan masa jabatan selama empat tahun. Seorang *geuchik* dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali masa pemilihan. Jabatan lain yang mendampingi *geuchik* di *gampong* adalah *tuha peut*, yaitu empat orang anggota musyawarah kepala *gampong* yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai dan orang tua-tua yang telah berpengalaman dan lembaga ini disahkan oleh Bupati. *Tuha peut* merupakan penasehat *geuchik* dan rakyat.

Di samping *tuha peut*, jabatan lainnya yang terdapat dalam sebuah *gampong* adalah teungku meunasah (pengurus meunasah). Ia diangkat dan dipilih oleh *geuchik* dan *tuha peut* yang biasanya diambil dari orang-orang yang mengerti hukum Islam, terutama fardhu kifayah. Baik *tuha peut* maupun teungku meunasah kedua-duanya tunduk kepada *geuchik*.²²⁴ Dalam setiap musyawarah ketiga unsur ini –*geuchik*, *tuha peut* dan teungku meunasah- selalu secara bersama-sama di bawah pimpinan *geuchik*.

Dampak dan pengaruh *kedua* dari peristiwa Perang Cumbok ini adalah bergesernya peran dominasi ekonomi model *feodal* yang selama ini dipegang oleh golongan uleebalang kini bergeser kepada sistem ekonomi yang merakyat. Oleh karena itu kekalahan golongan uleebalang dalam Perang Cumbok tersebut menimbulkan masalah baru bagi Pemerintah Daerah Aceh, terutama mengenai harta benda peninggalan dari golongan uleebalang yang telah tewas atau tertangkap dalam Perang Cumbok.

Dampak lainnya, sebagai dampak *ketiga* yang sangat kentara terlihat adalah masyarakat hidup dalam ketakutan yang mendalam, karena terjadinya aksi saling balas dendam yang berkepanjangan antara kedua golongan yang terlibat pertikaian, yaitu golongan ulama di satu pihak dan golongan uleebalang di pihak yang lain. Hal ini sangat memungkinkan terjadi, apalagi ditambah dengan cara pandang Pemerintah Daerah Aceh yang diangap memihak terhadap salah satu kelompok.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Aceh sejak berakhirnya Perang Cumbok kelihatannya belum berhasil membuka jalan damai antara kedua golongan yang bertikai, selama Pemerintah Daerah Aceh masih bersikap memihak kepada salah satu golongan. Ketertiban dan keamanan belum terwujud sepenuhnya, keresahan-keresahan dan kegelisan serta ancaman-ancaman kesematan hidup masih sering terjadi, terutama tertuju pada golongan uleebalang yang kemungkinan akan terjadi pembasmian besar-besaran, sehingga rakyat umumnya mencekam dalam *trauma* ketakutan dan kegelisahan yang mendalam.

²²³ H.T.M. Amin, *Susunan Pemerintahan Republik Indonesia di Aceh*, (Kanwil Depdikbud Aceh, Banda Aceh, 1976), hal. 6.

²²⁴ *I b i d.*, hal. 7.

Untuk menjaga keselamatan golongan uleebalang dan orang-orang lain yang terancam jiwanya, Pemerintah Daerah Aceh mengeluarkan Ketetapan Nomor 59/NRI, tertanggal 13 Agustus 1946. Ketetapan yang ditanda tangani oleh Residen Aceh ini diputuskan bahwa untuk sementara waktu mereka yang terancam jiwanya tersebut harus diamankan ke tempat-tempat yang telah disediakan.²²⁵ Terdapat 62 orang yang ter-kena pengasingan ini yang sebahagian besarnya adalah dari golongan uleebalang, dan pada umumnya mereka dari unsur pegawai negeri, bupati, wedana, anggota ketentaraan dan lain-lain. ²²⁶ Dalam ketetapan tersebut juga juga disebutkan tempat tinggal khusus bagi mereka dan selama di sana kepada mereka diberikan jatah hidup sebanyak Rp. 100,- per bulan dan ditambah dengan bantuan beras sama seperti yang diperoleh pegawai negeri pada waktu itu. Mereka umumnya diamankan di Takengon, pada tiga lokasi yang terpisah, yaitu di desa Sadong, penginapan Suka Jaya dan di Penjara Takengon.²²⁷

Sampai akhir tahun 1946 penyelesaian Perang Cumbok belum terselesaikan secara keseluruhan. Secara politik, keru-suhan-kerusakan masih terus berlangsung yang bersifat balas dendam sebagai akibat ketidakpuasan setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Aceh, sehingga menimbulkan dampak yang berkepanjangan dalam kehidupan sosial masyarakat di daerah Aceh ini.

Kehidupan masyarakat tercekam dalam kegundahan dan kegelisahan yang membawa implikasi kepada *trauma* berke-panjangan yang cukup lama, sehingga membawa dampak selanjutnya terhadap berbagai proses pembangunan, baik pembangunan fisik material maupun pembangunan psikis spriritual. Dan ini merupakan dampak *keempat* dari akibat Perang Cumbok itu sendiri. Keterlambatan proses pem-bangunan di Aceh sangat terasa sekali kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, padahal diketahui bahwa daerah Aceh memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup menggembirakan; seperti gas, minyak bumi, semen, batu bara, di samping kekayaan alam yang lain; hutan yang sangat banyak memiliki potensi hayati; demikian juga di laut, dan lain sebagainya.



²²⁵ S.M. Amin, *Op.cit.*,hal. 144-145.

²²⁶ *Ibid*, hal. 146.

²²⁷ Nazaruddin Symsuddin, *Op. cit.*, hal. 161-162.

Bab 11

KESIMPULAN

SETELAH mengetahui latar belakang Perang Cumbok, pecahnya Perang Cumbok, peran orang ketiga sebagai pemicu terjadinya Perang Cumbok, penyelesaian Perang Cumbok dan dampak yang Perang Cumbok, terutama mempengaruhi terhadap struktur pemerintahan di Daerah Aceh dan bergesernya peran elit penguasa dari golongan *uleebalang* ke golongan ulama serta terhambatnya berbagai pembangunan, baik pembangunan fisik material maupun psikis spiritual, maka dapatlah disebutkan bahwa faktor utama terjadinya Perang Cumbok adalah persoalan perebutan kekuasaan politik di Daerah Aceh, karena adanya keinginan yang berlebihan dari salah satu pihak, yaitu golongan *uleebalang* untuk mempertahankan kedudukan yang telah diterima dan dipegang berabad-abad lamanya, sedangkan dari pihak lain, dalam hal ini adalah golongan ulama ingin mengubahnya dengan pola-pola lain yang sesuai dengan keinginan kelompoknya.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah peran orang ketiga, yaitu penjajah kolonial Belanda yang dengan sengaja menciptakan politik adu domba, yang lebih akrab dikenal dengan *divide et empera* antara golongan atau kelompok elite dalam masyarakat agar mereka lebih mudah mempertahankan eksistensi koloninya di Indonesia pada umumnya dan Aceh khususnya. Di samping Belanda, Jepang juga memiliki peran tersendiri dalam upaya ini, dengan mendukung ulama untuk terus melawan golongan *uleebalang*. Hal ini dapat dilihat dengan diangkatnya pejabat-pejabatnya dari kalangan ulama dan memecat para pejabat dari golongan *uleebalang* yang sudah diperoleh secara turun temurun dari tangan Belanda. Dan tidak kalah pentingnya adalah peran lainnya, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka juga telah melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada pertentangan golongan *uleebalang* dan ulama itu semakin meruncing.

Dalam masyarakat Aceh terdapat dua kekuatan sosial yang saling berlawanan, baik pandangan maupun kedudukannya dalam masyarakat Aceh. Kedua golongan tersebut adalah *uleebalang* sebagai kelas penguasa dan golongan ulama yang memiliki nilai tersendiri dalam masyarakat, sebagai golongan yang sangat dihormati oleh masyarakat, karena kemampuan pengetahuan agama Islam yang kuat dan mendalam pada diri mereka. Perbedaan posisi dan sikap serta pandangan masyarakat terhadap mereka ini telah melahirkan pertentangan-pertentangan dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi di Aceh, terutama pasca kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Pihak *uleebalang* sebagai penguasa yang sejak masa penjajahan kolonial Belanda tetap ingin mempertahankan kekuasaan dan kedudukannya seperti sebelumnya sangat jelas tampak pada sikap apatis yang mereka nampakkan

pada saat menerima berita kemerdekaan Republik Indonesia. Hubungan baik yang mereka jalin selama masa-masa sebelumnyanya dengan penjajah kolonial Belanda adalah sebagai jalan pertama agar kedudukan mereka sebagai penguasa dan kepala-kepala pemerintahan daerah di Aceh tetap bertahan. Perbuatan golongan *uleebalang* ini menimbulkan pertentangan dalam kalangan golongan ulama, kerana ini dianggap sebagai suatu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan agama Islam. Keinginan dari golongan ulama agar para *uleebalang* juga mengikuti jejak mereka untuk terus berjuang melawan penjajah kolonial Belanda tidak mencapai target. Kedua golongan ini akhirnya terpisah oleh kepentingan masing-masing. Akan tetapi demi rakyat, agama serta tanah daerah Aceh golongan ulama terus berjuang, sedangkan golongan *uleebalang* demi mempertahankan kedudukan, mereka tetap bersikap damai dan bekerja sama dengan para penjajah kolonial Belanda.

Pada mulanya tanda-tanda keinginan dari golongan ulama untuk memukul golongan *uleebalang* karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak nampak jelas, tetapi dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai kemudian oleh golongan ulama, kesempatan ke arah ini semakin terbuka. Perkembangan pertama dirasakan dengan munculnya PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939 sebagai organisasi ulama terbesar di Aceh. PUSA pada awal pembentukannya menyatakan diri sebagai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, lama kelamaan berubah ke lapangan politik praktis, terutama setelah Jepang mendarat di Aceh pada awal tahun 1942.

Keinginan golongan ulama untuk menjatuhkan wibawa golongan *uleebalang* telah dilakukan jauh sebelum Jepang mendarat di Aceh, melalui utusan-utusan mereka yang dikirim untuk menemui Jepang di Pulau Penang. Tindak tanduk dan prilaku keseluruhan dari golongan *uleebalang* selama menjadi penguasa di daerah Aceh ikut menjadi bahan pembicaraan dan dikemukakan bahwa di antara kelompok *uleebalang* terdapat banyak yang tidak disenangi oleh rakyat, karena kekejaman-kekejaman mereka telah memberi bekas yang mendalam di lubuk hati dan sulit dilupakan oleh masyarakat sehingga menjadi dendam-dendam yang tersembunyi. Tepatlah kiranya bila kemajuan-kemajuan yang dicapai golongan ulama sebagai golongan yang paling dekat dengan masyarakat, menjadi dambaan, sekaligus harapan baik masyarakat untuk memukul golongan *uleebalang*.

Jasa-jasa baik PUSA, organisasi golongan ulama terhadap Jepang, terutama pada saat pertama mereka mendarat di Aceh, menjadikan golongan ini sebagai kepercayaan Jepang, sehingga kedudukan-kedudukan penting yang dijabat golongan *uleebalang* pada masa penjajahan kolonial Belanda bergeser kepada golongan ulama. Keadaan seperti ini terus diusahakan oleh golongan ulama untuk tetap bias bertahan sampai masa Kemerdekaan Indonesia. Peranan golongan ulama ini semakin nyata dalam keaktifan mempertahankan kemerdekaan dan turut serta mengambil bagian dalam front-front pertahanan yang mereka bentuk sendiri mendampingi pertahanan Pemerintah Daerah Aceh dengan ideologi Perang Sabil yang dicetuskan kembali bersama teretusnya Maklumat Ulama Seluruh Aceh terhadap semua elemen perongrong kemerdekaan Indonesia di Aceh.

Kemajuan golongan ulama dianggap suatu hal yang sangat membahayakan eksistensi keberadaan golongan uleebalang, sehingga mereka bermaksud untuk mempertahankan kedudukan mereka dalam negara Republik Indonesia dengan berbagai cara, termasuk cara kekerasan. Untuk memperkuat maksud ini mereka membentuk barisan-barisan kekuatan dengan persenjataan yang lengkap hasil rampasan dari tentara Jepang. Insiden-insiden kecil pun mulai terjadi untuk mempresur dan menunjukkan kekuatan diri dan melemahkan kekuatan lawan. Akhirnya, ketegangan-ketegangan antara kedua golongan ini mencapai klimaksnya pada tanggal 4 Desember 1945, terutama dimulai pada saat dan dalam perebutan senjata dari tentara Jepang di Sigli.

Kecurigaan-kecurigaan yang telah terpupuk lama telah menimbulkan salah penafsiran terhadap isyarat yang diberikan oleh Ketua MD API/TKR, Syamaun Gaharu dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak sebelum bentrok senjata itu terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa persiapan-persiapan dari kedua golongan tersebut telah cukup matang melalui gelombang-gelombang yang cukup panjang dan terencana, hanya tinggal menunggu saat-saat yang tepat untuk meledak. Pada akhirnya, karena tidak terkendalinya persaingan-persaingan tersebut akibat tidak terbukanya kesempatan untuk mengatakan kontak dialog antara kedua golongan ini, telah mengubah suasana persaingan ke dalam kancah bentrok senjata yang sangat fatal. Dalam bentrok senjata yang berke-panjangan tersebut, prasangka yang telah muncul dibuat semakin bermakna melalui berbagai *issu* untuk menjatuhkan lawan, di samping untuk menarik simpati dan memperbesar jumlah pengikut. Sasaran *issu* lebih banyak tertuju kepada golongan uleebalang sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan mereka pada masa lalu

Keikut sertaan Pemeintah Daerah Aceh meresmikan titel “pengkhianat” kepada golongan uleebalang melalui Maklumat Pemerintah telah sekian lemahnya posisi mereka. Maklumat ini kemudian disusul oleh “Ultimatum” yang semakin mengancam eksistensi dan keberadaan golongan uleebalang d satu pihak, tetapi menambah semangat bagi golongan ulama di phak lain untuk ikut terus bersama Pemerintah Daerah Aceh memperkecil peran golongan uleebalang.

Berakhirnya Perang Cumbok setelah dilakukan adalah sebagai pertanda berakhirnya kekuasaan politik di Aceh pada tangan golongan uleebalang dan secara otomatis kekuasaan politik tersebut beralih ke tangan ulama, sebagai kelompok dianggap menang dalam pertarungan tersebut. Oleh karena itu setelah konflik Perang Cumbok selesai hampir seluruh jabatan Pemerintahan di Aceh dipegang oleh golongan ulama, seperti gubernur, bupati, wedana, camat dan lain-lain.

Perang Cumbok telah banyak meninggalkan warisan negatif kepada kita, hilangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial, terutama dari golongan *uleebalang*, keterlambatan dan kelambanan dalam proses pembangunan dalam segala bidang, baik pembangunan fisik, mental, politik dan pembangunan bidang sosial budaya lainnya. Dan pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat yang tidak berdosa.***



Epilog

PERAN ULAMA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI ACEH

ULAMA ACEH DAN PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF SEJARAH Ulama pada Masa Kesultanan

KETIKA Iskandar Muda memerintah kerajaan Islam di Aceh Darussalam (1607-636), dia memilih Syekh Shamsuddin Al-Sumatrani²²⁸ sebagai penasehatnya dan sebagai mufti (disebut Syekh al-Islam) beranggung jawab dalam urusan keagamaan.²²⁹ Meski pun demikian, al-Sumatrani tidak hanya sebagai penasehat agama, tetapi juga dilibatkan dalam urusan politik. Al-Sumatrani juga pernah mengabdikan pada Sultan Ali Mughayat Syah (1589-1611)²³⁰, raja sebelum Iskandar Muda. James Lancaster, utusan khusus dari Inggris ke Aceh pada tahun 1602, menggambarkan dalam catatan perjalanannya bahwa ada seorang bangsawan "Chief Bishop", yang diperkirakan orang tersebut adalah al-Sumatrani, yang terlibat dalam perundingan perjanjian perdamaian dan persahabatan antara Inggris dan Aceh.²³¹

Ulama lain di Aceh, Nuruddin al-Raniri²³², dipilih sebagai Qadhi al-Malik al-Adil dan mufti Muaddam pada periode Sulthan Iskandar Tsani dan beberapa tahun berikutnya, yaitu pada masa Tajul alam Safi'atuddin.²³³ Al-Raniri digambarkan sebagai seorang yang hebat. Dia pada dasarnya seorang sufi, teolog dan faqih, tetapi dia juga pengarang, penasehat dan politikus. Pada masa Iskandar Tsani, ia memainkan peran penting dalam bidang ekonomi, politik disamping bertanggung jawab dalam urusan keagamaan.²³⁴

²²⁸ Nama Lengkapnya Syamsuddi Ibn Ali Abdillah Al-Sumatrani, lahir di Pasai (kab. Aceh Utara sekarang), karena itu kadang-kadang juga ia disebut Syamsuddin Pasai, A. Hasjmy menjelaskan bahwa Syamsuddin As-Sumatrani adalah murid ulama Besar Hamzah Fansury.

²²⁹Teuku Iskandar, *De Hikayat Atjeh* (S-gravenhage: N.V. De Nederlandshe Boek-en Steendrukkerij V. H. L. Smits,1959), hal.137,153,168.

²³⁰ H. Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Waspda., 1981), hal. 323.

²³¹James Lancaster, *The Voyage of f Sir James Lnancarter to Brazil and the East Indies*, Sir William Foster (ed.) (London: The Hakluyt Society, 1940), hal. 96

²³² Nama Lengkapnya Nuruddin Ibn Ali Hasanji Ibn Muhammad Hamid Ar-Raniri. Ia seorang sarjana agama, ulama dan sejarawan. Dia berasal dari Ramir, India. Dia datang ke Aceh pada 31 Mei 1637, menetap dalam lingkungan kerajaan Aceh sampai dia menjadi mufti.

²³³ Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia Dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry*, (Jakarta: C.V Rajawali,1983), hal. 39.

²³⁴Azyumardi Azra, " The Transmission of Islamic Reform to Indonesia Net Work of Middle Eastern and Malay Indonesia Ulama" in the Seventeenth and Eighteenth Centuries", (Ph, D. Disertasi, Columbia University, New York, 1992), hlm. 351.

Syekh Abdul Rauf al-Singkili²³⁵ ditetapkan sebagai Mufti dan Qadhi Malik al-Adhil di kerajaan Islam Aceh selama periode empat orang ratu (1641-1699) memimpin kerajaan.²³⁶ Sulthanah yang memilih dia menjadi mufti adalah Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675), isteri dan pengganti Iskandar Tsani dan merupakan ratu pertama di kerajaan Aceh Darussalam. Sulthanah berikutnya adalah Nurul Alam Naqiyyatuddin, hanya memimpin kerajaan 3 tahun, mangkat pada tanggal 23 Januari 1678. Dia digantikan oleh Sulthanah yang lain, anak sendiri, Inayah Syah Zakiyyatuddin. Sulthanah ini memimpin lebih kurang 10 tahun. Setelah mangkat tahun 1688, dia digantikan oleh Keumalatsyah sebagai sulthanah yang keempat dan sulthanah terakhir yang memimpin Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Setelah memimpin selama 10 tahun Keumalatsyah diturunkan pada tahun 1699.

Setidak-tidaknya ada dua kasus yang melibatkan al-Singkili sebagai ulama dalam hal menyelesaikan situasi konflik internal dalam kerajaan Islam Aceh Darussalam. *Pertama*, mengenai konflik aliran agama. Ketika Nuruddin al-Raniri menjadi kadhi di kerajaan Islam Aceh Darussalam, dia menfatwakan bahwa aliran Wahdatul Wujud yang diajarkan oleh Hamzah al-Fansuri dan kemudian dilanjutkan oleh Syamsuddin al-Sumatrani adalah sesat. Karena itu ajaran ini dilarang dan pengikutnya yang tidak mau taubat dibunuh. Ketika itu pula kitab-kitab karangan Hamzah al-Fansuri di bakar di depan Mesjid Baiturrahman.²³⁷ Sikap dan pendirian Nuruddin ar-Raniry ini telah mengakibatkan timbulnya konflik antar masyarakat Aceh yang berbeda aliran sufi. Konflik ini termasuk berat karena tidak hanya pada tingkat saling curiga dan saling benci tetapi juga sudah sampai pada tingkat pembunuhan.

Kepulangan As-Singkili ke Aceh dari menuntut ilmu selama 19 tahun di jazirah Arab telah mampu meghembus angin damai selanjutnya. Al-Singkili berada di Aceh ketika kerajaan Islam Aceh Darussalam telah berada di bawah Ratu Safiatuddin. Mendengar ada ulama yang baru pulang dari negeri Arab, sulthanah meminta orang kepercayaan untuk menanyakan persoalan konflik tersebut. Dengan sangat bijaksana al-Singkili menjawab, dia sebenarnya tidak banyak tahu dengan ilmu tersebut, tetapi dia dapat bertanya kepada gurunya yang lebih ahli yaitu Syeikh Ibrahim al-Qurani. Setelah mendapat surat balasan, al-Singkili memberi jawaban, bahwa umat Islam dilarang mengkafirkan orang lain karena akibatnya bila orang lain tidak kafir maka orang tersebut sendiri akan menjadi kafir.²³⁸

Kedua, Al-Singkili memainkan peranan penting, ketika adanya delegasi yang diutus oleh Syarif Mekkah ke Aceh, pada masa Sulthanah Zakiyyat al-Din. Kedatangan rombongan ini digunakan oleh orang Aceh untuk mempersoalkan masalah kebolehan wanita sebagai pemimpin menurut

²³⁵ Nama Lengkapnya Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri. As-Singkili lahir sekitar tahun 1620 di kota Singkil, Aceh. Selain belajar di Aceh, As-Singkili pernah belajar selama 19 tahun di wilayah Jazirah Arab, seperti Makkah, Madinah, Yaman dan lain-lain.

²³⁶A. Hasjmy, *59 Aceh Merdeka Dibawah Pemerintah Ratu* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.32-40.

²³⁷ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 167.

²³⁸ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1995), hal.196.

hukum Islam.²³⁹ Perdebatan ini sudah sangat lama terjadi dikalangan orang Aceh. Dalam hal ini, al-Singkili tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai masalah tersebut. Dalam penulisan kitab fiqihnya *Mir'ah al-Tullab*, dia tidak membahas itu secara langsung. Ketika membahas tentang syarat-syarat untuk menjadi hakim (yang di dalamnya juga ada pengertian penguasa) al-Singkili nampaknya dengan sengaja tidak mencantumkan syarat laki-laki. Karena itu tidak muncul konflik terbuka.

Kemampuan dan otoritas keulamaannya nampaknya diakui semua masyarakat. Ini selain terlihat kemampuannya mendamaikan beberapa persoalan yang telah menimbulkan konflik dalam masyarakat, Al-Singkili sempat bekerja selama 50 tahun di kerajaan Islam Aceh Darussalam dibawah kepemimpinan rajanya yang wanita. Karena itu namanya telah menjadi simbol otoritas ulama Aceh, sebagaimana sering disebut dalam pepatah Aceh: "Adat bak Poteumeurohom, Hukom bak Syiah Kuala" (Adat urusan raja, agama urusan Ulama). Dan suatu kenyataan lain setelah al-Singkili meninggal, sulthanah yang terakhir dimakzulkan, berdasarkan fatwa dari ketua mufti Makkah, yang memutuskan bahwasanya syari'at tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin kerajaan Islam.²⁴⁰

Sejak saat kerajaan Islam di Aceh didirikan, setiap raja yang memimpin kerajaan pasti didampingi oleh ulama sebagai Qadli Malik al-Adil. Suatu kenyataan yang mungkin berbeda dari daerah lain adalah tidak hanya raja yang menempatkan ulama sebagai Qadhi Malik al-Adil untuk menasehatinya, tetapi setiap negeri dan kepala kampung juga dibantu oleh ulama lokal. Ketika masa Sultan Iskandar Muda, pemerintah sipil dibagi kepada tiga teritorial. Tingkat pertama, paling rendah, adalah *gampong* (kampung), dipimpin oleh pemimpin *gampong*, *keuchik* sebagai pemimpin urusan duniawi dan Tgk. Imeum Meunasah sebagai pemimpin Agama. Tingkat kedua, diatas *gampong* yaitu *mukim* yang terdiri dari beberapa *gampong*. Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim dan Oadli Mukim. Tingkat ketiga adalah tingkat yang paling tinggi yaitu *Nanggroe* (negeri) yang dipimpin oleh Ulee balang dan Qadli Nanggroe.²⁴¹

Masa Perang Belanda dan Jepang

Paruh kedua abad ke 19, sejarah mencatat bahwa kolonialisme dan periode imperialisme modern mulai tumbuh. Bahkan pada periode ini, terlihat persaingan kolonial dengan perebutan ekspansi wilayah yang dianggap memiliki keuntungan secara ekonomi dengan sistem kapitalisme modern, dibawah perlindungan politik. Aceh adalah salah satu daerah yang dianggap memiliki sumber ekonomi yang menguntungkan dalam wilayah Asia

²³⁹ C. Snouck Hurgronje, "Een Mekkaansh Gezantschap Naar Atjeh in 1683", *BKI* 65, (1991), hal144.

²⁴⁰ Husein Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh: Suatu Pembahasan Tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-Bahan Yang Terdapat Dalam Karya Melayu*, Teuku Hamid (terj.) (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1983), hal. 60.

²⁴¹ A.Mukti Ali, *An Introdyction to Government of Aceh'sr Sultanate* (Yogyakarta: Nida,1970), hlm.12. Rusdi Sufi, "Sulthan Iskandar Muda" *Dari Sini Ia Bersemi* (Banda Aceh: Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-12,1981), h1m.71.

Tenggara. Karena itu betapapun sulitnya Belanda tetap melakukan agresinya ke Aceh, yang ketika itu masih merupakan sebuah negara merdeka yang terletak paling ujung pulau Sumatra.

Dalam rangka usaha perluasan penjajahan, pemerintah Belanda mengutus beberapa delegasi pada akhir Agustus 1872 untuk memaksa masyarakat Aceh mengakui kedaulatan Belanda terhadap wilayah mereka.²⁴² Paksaan itu tidak dapat diterima oleh pemimpin dan masyarakat Aceh,²⁴³ akibatnya, Belanda menyatakan perang dan menyerang Aceh pada bulan April 1873. Penyerangan pertama Belanda dapat dikalahkan oleh rakyat Aceh.²⁴⁴ Pada tahun 1874 Belanda menyerang kembali Aceh yang kedua kali dengan kekuatan yang lebih dahsyat.²⁴⁵ Dalam peperangan ke dua ini Belanda dapat menduduki istana Raja, namun tidak berarti perang telah berakhir. Kendati pun banyak pemimpin, termasuk sejumlah ulama telah gugur, Aceh tidak pernah dapat ditundukan karena itu perang terus berlangsung. Van Veer berpendapat bahwa perang orang Aceh melawan Belanda malah sampai tahun 1942, yaitu sampai Jepang masuk ke Aceh.

Ketika kekuatan sultan tidak sanggup memimpin perlawanan, dan para *uleebalang* tidak mampu untuk menyatukan aksi perlawanan rakyat lagi, ulama muncul dari dayah untuk memimpin peperangan melawan penjajah yang kafir itu. Pada waktu itu, ulama mengumumkan: "ini merupakan tugas kita untuk bersatu melaksanakan jihad".²⁴⁶ Berdasarkan hal ini, para ulama menjadi salah satu instrumen yang membawa konflik tersebut menjadi sebuah perang suci. Melalui penyebaran ideologi *Prang Sabi* (Perang Sabil),²⁴⁷ ulama mengajak rakyat untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk berperang melawan musuh yang sangat berbahaya bukan hanya demi keselamatan negara tapi juga demi eksistensi agama.

Ulama menggunakan kekuatan dengan menjadikan perang itu sebagai salah satu aspek ibadah yang dianjurkan Islam yaitu jihad pada jalan Allah dengan perang suci. Dalam Islam di dapati ajaran bahwa mereka yang memerangi Islam adalah *kafir harbi* karena itu, mereka menyebut Belanda sebagai *kafir harbi*.²⁴⁸ Sedangkan wilayah yang diduduki penjajah Belanda

²⁴² Antony Reid, *The Contest for North Sumatra: Aceh. The Netherlands and Britain 1858-1898* (Kuala Lumpur: Oxford University Press. 1969), h1m.58.

²⁴³ Ismail Ya'kub, *Tgk. Tjhik Di Tiro* (Jakarta: Bulan Bintang.1952), h1m.13.

²⁴⁴ Pada waktu itu, Belanda tidak hanya dikalahkan oleh rakyat Aceh, tetapi mereka juga kehilangan seorang Jenderal yang bernama Kohler.

²⁴⁵ Belanda datang dengan 60 kapal, 206 pasukan meriam, 22 mortir, 389 perwira militer, 7888 prajurit, 32 dokter militer, 3565 buruh laki-laki, 243 buruh perempuan, 4 komandan bagi 75 kavaleri, bahkan juga beberapa teknisi, trolley truck, perahu boat dan perahu dayung. mereka juga membawa pastor, guru dalam dan beberapa juru bicara yang dapat berbicara dalam bahasa Aceh. Serangan ini dipimpin oleh Jenderal Van Swieten sebagai komando dan beberapa pawiira tinggi lainnya. Lihat Paul Van't Veer, *Perang Belanda di Aceh*, Aboebakar (terj)(Banda Aceh: Depdikbud, Daerah Istimewa Aceh, 1977), hlm.65-76.

²⁴⁶ C. Snouck Hurgronje, *The Acehness*, A.W.S. O'Sullivan (terj.) (Leiden: E.J. Brill,1906), Vol.I, h1m.177.

²⁴⁷ Ibrahim Alfian, *Perang & Jalan Allah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h1m.151

²⁴⁸ E. Gobe dan Adrianse, *Nasihat-Nasihat C. S. Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Sukarsi (terj) (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 111. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Tgk. Kuta Karang, seorang penasehat Tgk. Muhammad Saman dan pengikutnya Pernyataan ini disosisialisasikan dengan selebaran tentang politik keagamaan

dikatakan *darul harbi*. Menurut ulama, perang melawan Belanda merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Untuk berperang melawan Belanda disebut dengan jihad *fisabilillah*. Siapapun yang gugur dalam pertempuran adalah syahid dan akan masuk surga. Lebih dari itu, adalah diperbolehkan untuk mengambil harta secara paksa yang dimiliki oleh *kafir harbi*, harta tersebut akan menjadi *ghanimah* (rampasan perang).²⁴⁹ Sangat mungkin strategi ini telah menambah keinginan rakyat untuk berperang karena di dasarnya pada perintah Allah SWT dan Hadist Nabi. Demikianlah ulama telah tampil mengatasi masalah pelik yang dihadapi oleh rakyat Aceh ketika itu. Karena pasukan Belanda juga pasukan yang kuat, peperangan tersebut berlangsung lama sekali sampai mendekati enam puluh tahun.

Karena perang mengusir penjajahan memakan waktu yang begitu lama, strategi perangpun berubah-ubah. Di awalnya lebih banyak menggunakan senjata tetapi dengan perubahan zaman, ulama Aceh juga merubah strateginya dengan menggunakan organisasi massa atau organisasi politik dan bahkan juga melalui peningkatan kualitas pendidikan. Berdirinya organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) merupakan hasil perkembangan kesadaran dikalangan masyarakat Aceh, terutama golongan ulama, karena kondisi mereka dibawah penjajah Belanda dengan bermacam intimidasi.

Faktor lain yang menyebabkan berdirinya PUSA adalah ketidakmampuan ulama untuk bekerja sama, terutama dalam bidang penyatuan kurikulum dan sistem pendidikan di Aceh ketika itu. Melalui organisasi ini, mereka ingin mengatur kembali dan menstandarisasikan kurikulum dan sistem seluruh madrasah yang telah dibangun di Aceh.²⁵⁰ Namun demikian, yang paling penting adalah ulama ingin memperbaharui ajaran Islam dan mempertahankan agama Islam dari segala jenis penyimpangan.²⁵¹

Dalam rangka mengusir penjajah Belanda, ulama juga kemudian berkesimpulan menggunakan kekuatan Jepang saja. Untuk mencapai tujuan ini, PUSA dan ulama-ulama Aceh memutuskan untuk mengirim tiga ulama yang representatif untuk bekerja sama dengan lima kelompok orang Jepang yang dinamakan *Fujiwarakikan* di Penang, Malaya (sekarang Malaysia) yang bertujuan berusaha mengusir penjajah Belanda dalam wilayah Aceh.²⁵² Melalui kerja sama ini, rakyat Aceh berharap dapat mengusir Belanda dari daerahnya.²⁵³ Kendati pun kekacauan ini dahului *kollepnnya* Belanda di Aceh tetapi sesungguhnya Belanda telah dapat dirobuhkan dengan dua

yang ditulis oleh Tgk. Kuta Karang, dalam bahasa Arab yang berjudul Tadzkirot alRakidin. Dalam kajian ini, saya menggunakan terjemahan terhadap beberapa selebaran ini yang dicetak dalam buku E.Gobee dan Adrianse, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sukarsi dengan judul *Nasihat-Nasihat C.S Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1898-1936*, diterbitkan oleh INIS pada 1991.

²⁴⁹ Ghanimah maksudnya adalah harta yang diperoleh dalam peperangan dari daerah kafir yang ditaklukkan, bisa berupa senjata, kuda atau semua barang yang dapat dipungut.

²⁵⁰ Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dari persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), 1940, hlm.3, (naskah ketikan).

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² Nur el-Ibrahimi, *Tgk. Muhammad Daud Beureueh*, (Jakarta: Gunung Agung, 1990), hlm. 32.

²⁵³ A.J. Piekar, *Atjeh en de Orloog met Japan* ('S-Gravenhege: W. Van Hoeve, 1949), h1m.305

pemberontakan yang berskala besar sejak bulan awal tahun 1942.

Pemberontakan pertama di daerah Seulimeum, Aceh Besar,²⁵⁴ dimulai pada pertengahan bulan Februari 1942, pemberontak ini baru reda setelah beberapa minggu, tapi berkobar lagi beberapa hari setelah Jepang mendarat. Pemberontakan Seulimeum sangat jelas digerakkan atas kerja sama antara ulama terkemuka seperti Tgk. Abdul Wahab Seulimeum dan Tgk. Hasballah Indrapuri, Pemuda PUSA, A. Hasjmy dan Tgk. Ahmad Abdullah serta beberapa *uleebalang* yang diantara mereka yang menonjol adalah Teuku Muhammad Ali Panglima Polem.²⁵⁵ Pada awal Maret 1942 pemberontakan besar kedua terjadi di daerah Calang, Aceh Barat. Akhirnya, kekuasaan Belanda berakhir secara tiba-tiba dan secara dramatis dengan adanya invasi Jepang yang mendarat di Kepulauan Indonesia.

Sebenarnya, masa kekuasaan Jepang berjalan hanya tiga setengah tahun. Tujuan utama kerja sama yang dibentuk oleh ulama dengan Jepang tersebut adalah untuk mengusir Belanda dan Aceh agar mereka dapat melaksanakan ajaran agama secara kaffah tanpa pembatasan-pembatasan dari orang-orang yang membenci Islam. Pada awalnya orang Jepang berjanji kepada ulama Aceh bahwa syariat Islam dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.²⁵⁶ Karena itulah rakyat Aceh, bersedia menerima pendudukan Jepang meski pun mereka bukanlah yang diharapkan. Selain Jepang dapat mengusir Belanda dan berjanji pada ulama akan membenarkan untuk diterapkan ajaran Islam secara kaffah. Keuntungan lain adalah Jepang tidak mendirikan sekolah mereka sendiri sehingga memungkinkan ulama mendidik anaknya dengan lembaga pendidikannya sendiri. Demikian juga Jepang tidak mengawasi lembaga pendidikan dayah seperti Belanda yang membatasi kurikulum dayah dan madrasah.

Ada keuntungan yang tidak sengaja telah dipetik oleh ulama Aceh dari kehadiran Jepang yaitu kesempatan yang diberikan ada rakyat Aceh untuk mengikuti latihan militer. Kesempatan dipergunakan oleh ulama Aceh yang dengan para pemudanya nasuki *Giyu Gun* agar belajar ilmu kemiliteran dari perwira Jepang. Karena itu anggota *Giyu Gun* yang lebih kurang sampai 10 prajurit mayoritasnya adalah pemuda PUSA.²⁵⁷ Keberhasilan ini terlihat di tahun 1945 ketika para prajurit yang terdidik mengusir Jepang kemudian mempertahankan wilayah Aceh dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Aceh.

Ulama Aceh tidak pernah membayangkan bahwa disuatu waktu Jepang akan menjajah Aceh. Oleh karena itu, ketika mereka menyadari bahwa mereka diperlakukan sebagai anak jajahan, misalnya, Jepang menyuruh rakyat untuk membungkuk sebagai penghormatan (*keirei*) - rakyat Aceh memberontak lagi. Akhirnya terjadi dua pemberontakan yang dipimpin oleh ulama dalam menghadapi Jepang. Pemberontakan pertama, Perang Bayu, Aceh Utara dipimpin oleh ulama dayah yang bernama Tgk. Abdul Jalil.²⁵⁸ Dia

²⁵⁴ Kadang disebut sebagai Nama Aceh.

²⁵⁵ Morrice, *Islam and Politics*, hlm.98.

²⁵⁶ S.M. *Sejenak Meninjau Aceh*, hlm. 64.

²⁵⁷ Morrice, *Islam and Politics*, hlm. 112.

²⁵⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *"The Role Of Ulama' During the JapanOccupation of Indonesia*

sebenarnya telah curiga sejak awal Jepang mendarat di Aceh. Karena menyadari perlakuan Jepang dapat merusak keyakinan orang Islam dia mengadakan pemberontakan bersama muridnya di dayah. Pemberontakan kedua adalah di Pandrah, sekarang masuk kabupaten Bireun. Walau pun pemberontakan ini di pimpin oleh pemimpin lokal tapi itu terjadi berasal dari sebuah fatwa seorang ulama yang juga dikenal bernama Tgk. Abdul Jalil yang menyatakan bahwa Jepang telah memperlakukan rakyat Aceh sebagai anak jajahan dan sekaligus menghina agama Islam dengan perlakuannya yang bertentangan dengan ajaran Islam.²⁵⁹

Ulama Masa Perang Mempertahankan Kemerdekaan

Berita tentang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus menyebabkan dinaikkan bendera Merah putih di beberapa tempat sejak September 1945. Para pemimpin di Aceh, - yang kebanyakan ulama, - masih curiga kepada Belanda yang akan membahayakan proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia, dan memprediksikan mereka akan menjajah Indonesia kembali. Belanda mulai melakukan agresi militer, dan pada September 1945 telah berada di Medan.²⁶⁰ Angkatan perang Inggris menduduki Pulau Weh dan pelabuhan Sabang pada 7 September.²⁶¹

Sehubungan dengan situasi seperti itu, beberapa ulama melakukan pertemuan yang memutuskan untuk menjaga proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu, menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut "deklarasi seluruh ulama Aceh" yang ditanda tangani oleh empat ulama terkenal, yaitu: Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. Ja'far Shiddiq dan Tgk. Hasan Krueng Kale. Deklarasi ini telah mendorong rakyat untuk bersatu mendukung "Pemimpin Besar Soekarno" dalam perlawanan terhadap Belanda yang ingin kembali ke Indonesia, karena Belanda diyakini akan menghancurkan kemurnian agama dan juga menindas serta melecehkan kehormatan dan merintangai kemakmuran rakyat Indonesia. Keempat ulama tersebut berpendapat bahwa berjuang untuk kemerdekaan adalah tugas suci, karena itu perjuangan ini dapat disebut sebagai Perang Sabil.²⁶²

Berita tentang pertempuran pada 10 November 1945 di Surabaya (Jawa Timur) telah menggerakkan ulama Aceh untuk mengumpulkan rakyat dan memberi tahu mereka bahwa ini merupakan saat yang tepat untuk berjihad (perang suci). Pada 17 November, beberapa ulama berkumpul di Mesjid Baiturrahman dan membentuk angkatan perang Islam yang dinamakan laskar Mujahidin, untuk mengikuti perang suci. Laskar ini di pimpin oleh Tgk. Daud Beureueh, salah seorang ulama yang menandatangani deklarasi ulama. Organisasi pasukan militer ini dalam waktu yang singkat telah membangun laskar di beberapa wilayah. Selanjutnya laskar Mujahidin

1942-1945. "M.A. tesis, McGill University, Montreal 1975, hlm. 112-117; Reid, *The Blood of The People*, hlm. 113

²⁵⁹ *Ibid*, hlm. 132.

²⁶⁰ Anthony Reid, *The Blood of the People*, hlm. 151-152.

²⁶¹ *Ibid*, hlm. 187.

²⁶² Osman Rabily, *Documenta Historica* (Djakarta: Bulan Bintang, 1953), hal. 57-58. Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, *Atjeh Modal Evolusi 45* (Kutaradja: t.p.,1960), hlm. 61.

berubah namanya menjadi Divisi Tgk. Chik Di Tiro dan di Aceh Timur diberi nama Divisi Tgk. Chik Paya Bakong. Divisi Tgk. Chik Di Tiro dipimpin oleh, Tgk. M. Daud Beureueh dan Tgk. Chik Paya Bakong dipimpin oleh Tgk. Amir Husein Mujahid.²⁶³

Didorong oleh semangat perang suci (jihad), rakyat Aceh berjuang dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka yakin bahwa melalui *jihad fisabilillah* mereka akan menang, karena jika mereka gugur akan masuk surga dan jika mereka selamat maka negara mereka akan bebas dari pendudukan Belanda. Melihat rakyat Aceh mempertahankan daerahnya dengan penuh semangat, Belanda tidak jadi masuk ke Aceh walaupun Belanda telah mendirikan markas-markasnya di Medan seperti juga yang telah dilakukan Angkatan Perang Inggris di Sabang. Agresi pertama Belanda pada 21 Juli 1947 gagal masuk ke Aceh.

Untuk menghargai besarnya peranan ulama di Aceh, pemerintah pusat menetapkan Tgk. Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo,²⁶⁴ bersama dengan pembantu-pembantunya dari kalangan ulama seperti Tgk. Abdul Wahab Seulimeum.

Agresi Belanda yang kedua dilakukan pada 19 Desember 1945. Belanda dapat menduduki ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, dan menangkap presiden (Soekarno), wakil presiden (Mohd. Hatta) dan beberapa menteri. Daerah yang tidak diduduki oleh Belanda hanya daerah Aceh. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintah membentuk pemerintahan darurat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara, yang memerintah dari hutan Sumatra Barat,²⁶⁵ dan kemudian di Aceh.²⁶⁶ Prawiranegara menghadapi masalah serius dalam pemerintah darurat. Salah satu masalah yang paling krusial adalah sumber dana untuk membangun pemerintah. Dia kemudian meminta Aceh, karena hanya daerah tersebut yang dapat membantu. Ulama Aceh bersama pemimpin lainnya, mengajak rakyat dengan landasan agama memberikan harta mereka sebagai bantuan. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan menjalankan pemerintahan di dalam dan di luar negeri dan termasuk pembelian dua pesawat.²⁶⁷ Sebagai ungkapan terima kasih atas bantuan rakyat Aceh, pemerintah pusat menamakan pesawat tersebut "Seulawah"²⁶⁸ yaitu nama sebuah gunung di Aceh.

Dari peristiwa tersebut, jelas bahwa melalui usaha Tgk. Daud Beureueh dan ulama lain yang menegaskan bahwa Islam merupakan dasar perjuangan nasional, Aceh mampu mempertahankan diri dari pendudukan Belanda

²⁶³ Jarahdam I, *Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda* (Banda Aceh: Kodam I Iskandar Muda, 1972), hlm. 1-8

²⁶⁴ Lihat Kementrian Penerangan, "Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Utara". (Jakarta: 1953) hlm. 144. N azaruddin Syamsuddin, *The Republican Revolt: A Study of The Acehnese Rebellion*, (Singapura: ISAS, 1985), ha127. El-Ibrahimi, *Tgk. Muhammad Daud Beureueh*, hlm. 43.

²⁶⁵ Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawira Negara Lebih Takut Kepada Allah: Sebuah Biografi*, (Jakarta: Inti Dayu Press, 1966), hlm. 113-119.

²⁶⁶ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergejolak*, (Jakarta: Grafiti Press, 1992) hlm. 114.

²⁶⁷ Syamaun Gaharu, "Membangun Manusia Yang Utuh dan Intergralitas dalam Sarief Harries, *Aceh: Wawasan Nasional dan Terobosan Pembangunan* (Banda Aceh: 1991), hlm. 67.

²⁶⁸ Gerald Dick, "The Story of Garuda Indonesia," *Garuda* (Juli 1993), hlm, 44.

kembali. Hal ini merupakan persoalan mendasar bagi pemimpin republik untuk mampu memperlihatkan pada dunia bahwa Republik Indonesia masih bisa di lihat di Aceh meskipun kenyataannya daerah lain, termasuk ibu kota republik telah direbut oleh Belanda.

Ulama pada masa peristiwa DI TII

Perbedaan pendapat yang serius antara pemimpin Aceh dan pemerintah pusat Indonesia tentang pembangunan Aceh mengakibatkan rakyat melakukan pemberontakan pada tahun 1953, menentang pemerintah pusat. Rakyat Aceh mengharapkan didaerahnya menjadi salah satu propinsi yang mendapat perlakuan yang istimewa. Alasan atas keinginan tersebut, pertama, bahwa rakyat Aceh sudah lama terlibat perang untuk mempertahankan negerinya dari Belanda. Karena hampir seratus tahun tidak ada pembangunan yang dapat dilakukan, ekonomi dan pendidikan tidak dapat dikembangkan. Rakyat Aceh juga ingin memiliki pemimpin mereka, hanya putra daerah yang dapat memahami keutuhan rakyat dan mengerti watak rakyat Aceh yang agak berbeda, khususnya aspek agama dan budaya, dibandingkan dengan penduduk Indonesia lainnya. Pemerintah pusat mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal tersebut. Aceh disatukan dengan Sumatera Utara untuk dijadikan suatu propinsi. Pada 1950, Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri sementara, bisa memahami atas keinginan masyarakat Aceh tentang status khusus tersebut, namun keinginan ini ditolak oleh pemerintah pusat tatkala kebijakan nasional ditegaskan kembali oleh Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.

Tanpa menghakimi siapa yang salah, bisa dikatakan bahwa pemberontakan ini melibatkan mayoritas rakyat Aceh karena dipimpin oleh sejumlah ulama yang sangat dihormati.²⁶⁹ Pemerintah pusat tidak dapat menahan pemberontakan tersebut, yang berlangsung selama sembilan tahun, dari 1953 sampai 1962. Pemberontakan tersebut berakhir setelah pemerintah pusat menerima status daerah Istimewa Aceh. Rakyat Aceh diberi hak otonomi, yaitu dalam bidang keagamaan, adat dan pendidikan.²⁷⁰ Untuk perdamaian itu juga melibatkan sejumlah ulama, baik ulama dipihak DI TII mau pun ulama dalam NKRI.

Peristiwa Gestapu PKI

Ulama juga terus melanjutkan memberi nasehat pada pemerintah di tingkat seterusnya, seperti di kecamatan, kabupaten, dan provinsi dengan berdirinya Majelis Ulama sebagai penasehat pemerintah tentang persoalan agama. Lembaga keulamaan ini didirikan pertama sekali di Aceh pada tahun 1965 dan kemudian menjadi model bagi pemerintah pusat Indonesia dan

²⁶⁹ Syamsuddin, *The Republican Revolt*, hlm. 7; Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, hlm. 346.

²⁷⁰ Lihar Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. I/Missi/1959; M.C. Reclefs, *A History of Modern Indonesia: C. 1300 to Present*, (Bloomington: Indiana University Press), hlm. 253; Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, hlm. 157-165.

provinsi lainnya.²⁷¹ Ulama mendapat posisi yang penting karena rakyat Aceh relatif taat terhadap agama Islam. Rakyat Aceh mempunyai tradisi yang sangat kuat keterikatan kepada ulama, tidak hanya dalam hal agama, tetapi juga masalah-masalah sosial-politik. Biasanya orang kampung tidak mempunyai pendidikan tinggi, tidak punya kemampuan untuk menguasai masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah tersebut dan cenderung mengikuti pendapat ulama dalam berbagai macam persoalan kehidupan, termasuk politik. Bagi mereka mengikuti pendapat ulama akan lebih terjamin keselamatan dunia akhirat, karena ulama dianggap sebagai orang yang jujur dan tulus. Oleh karena itu, pemerintah selalu meminta dukungan ulama dalam program dan akitivitas politiknya.

Satu contoh dari dukungan ulama berhubungan dengan Gerakan 30 September 1965 oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menyebabkan pembantaian sejumlah perwira militer. Diramalkan bila Partai Komunis menguasai Indonesia, Islam akan terancam, namun pemerintah belum mempunyai kekuatan untuk menanggulangi hal tersebut. Panglima Komando Daerah Militer di Aceh, Ishak Juarsa, kemudian meminta pendapat umum.²⁷² Ulama Aceh kemudian bermusyawarah dan mengeluarkan fatwa bahwa aliran itu disebut kafir.²⁷³ Mendapat dukungan Fatwa ini, militer bersama pemuda muslim, melancarkan aksi anti komunis. Aksi anti komunis ini dimulai di Aceh bahkan sebelum ditetapkan di Jawa.²⁷⁴

KONFLIK ACEH MASA ORDE BARU DAN REFORMASI

Awal Mula Konflik dan Perkembangannya

Gerakan Aceh Merdeka mulai diumumkan pada tanggal 4 Desember 1976, oleh sekelompok intelektual Aceh. Ketika itu proklamasi negara Aceh oleh kelompok GAM ini dilakukan secara diam-diam. Meskipun ada teks proklamasi, akan tetapi tidak ada pembacaannya secara terbuka di depan publik. Daerah yang diproklamasi diberi nama baru yaitu Negara Aceh Sumatra. Presiden (wali) dari negara ini adalah Muhammad Hasan Tiro, seorang cucu dari pahlawan perang Aceh yang sangat terkenal, Teungku Chik Di Tiro.²⁷⁵

Nama Hasan Tiro memang terkenal di Aceh terutama sekali bagi mantan DI TII Aceh. Tetapi begitu dia dikenal di kalangan masyarakat di Aceh, dia telah bertempat tinggal di New York. Menurut keterangan temannya Tgk Ilyas Ismail yang sempat menjadi Imam besar di mesjid negara Manila, Philipinan, Hasan Ditiro, telah mulai tinggal di New York semenjak awal 1950-an. Dia

²⁷¹ Alfian, "Arus Nilai baru Masyarakat Aceh Dalam Konsep Pembangunan Berwawasan Nusantara," dalam Syarief Harris (ed.), *Aceh: Wawasan Nasional dan Terobosan Pembangunan*, (Banda Aceh: Pemda Aceh, 1991), hlm. 19.

²⁷² Ismuha, "Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah," hlm. 97

²⁷³ Tgk. Abdullah Ujong Rimba, "Prasaran Pada Musyawarah Alim Ulama se-Daerah Istimewa Aceh, tgl. 17-18, Desember, 1965.

²⁷⁴ Hamish McDonald, *Suharto's Indonesia* (Honolulu: The University Press of Hawaii, 1981), hal. 63.

²⁷⁵ Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramadia, 1989), hlm. 70.

bekerja pada kantor perwakilan Indonesia sampai dengan tahun 1954 ketika dia secara terbuka menggabungkan diri dengan gerakan Darul Islam yang dicetuskan di Aceh setahun sebelumnya. Karena itu dia melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan kemudian menjadi “duta besar” Darul Islam untuk PBB. Memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum, tetapi ada juga mengatakan dia ahli dalam bidang ekonomi. Dia juga memiliki sebuah perusahaan konsultasi yang konon kabarnya mempunyai hubungan baik dengan negara-negara di Timur Tengah.

Suatu kunjungan singkat yang dilakukan Hasan Tiro ke Aceh Sumatra Utara pada awal 1976 agaknya telah merupakan titik awal dari kelahiran GAM di Aceh. Hasan Tiro menemui berapa orang ulama tua dan muda, terutama mereka-mereka yang pernah melibatkan diri dalam gerakan Darul Islam pada masa silam. Di Sumatra Utara dia bahkan berhasil meyakinkan beberapa intelektual Aceh yang berdiam di Medan untuk mendukung usahanya.

Dengan hubungan yang begitu terbatas, sebenarnya Hasan Tiro tidaklah dapat berbuat banyak, selain dari pada menerima kesediaan beberapa simpatisan untuk ikut menggerakkan Aceh Merdeka itu. Hubungan yang terbatas hanya pada beberapa intelektual dan tokoh agama di Aceh itu saja, sebenarnya merupakan suatu indikasi bahwa gerakan Hasan Tiro itu pada awalnya masih berada dalam tahap persiapan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa biarpun Hasan Tiro telah menetapkan tanggal tertentu bagi proklamasi kemerdekaan Negara Aceh, pernyataan itu tidak dikeluarkannya pada tahun 1976.

Namun demikian, kegiatan Hasan Tiro dan para pengikutnya baik di Aceh mau pun Sumatera Utara terus berlangsung secara diam-diam. Akan tetapi kemudian terjadi perubahan cepat ketika suatu perkembangan membuat Hasan Tiro dan para pengikutnya terpaksa mengumumkan kehadiran gerakan mereka. Perubahan itu disebabkan oleh bocornya rahasia mereka ke tangan penguasa di Jakarta yang dengan segera mengambil tindakan tegas. Pemerintah agaknya telah mengetahui rencana gerakan Aceh Merdeka dari seorang pengusaha Aceh yang menjadi salah satu anggota partai di Medan. Pengusaha ini sebenarnya tidak terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka atau sekurang-kurangnya dia bukanlah seorang tokoh yang ikut merencanakan gerakan tersebut. Dan ia membocorkan rencana tersebut bukan pula dengan sengaja. Pengusaha tersebut ditahan sehubungan dengan keterlibatannya di dalam pemalsuan formulir pemilihan umum tahun 1977. Di dalam salah satu interogasi yang dilakukan oleh penguasa terhadapnya, ia menyinggung tentang kegiatan beberapa orang intelektual Aceh yang berdomisili di Medan.

Dengan bocornya rahasia gerakan mereka kepada pemerintah, maka mau tidak mau para perencana gerakan Aceh Merdeka terpaksa membuka diri. Mereka tampaknya tidak mempunyai pilihan lain selain dari pada mengumumkan gerakan mereka, karena menyadari bahwa bagaimanapun juga pemerintah tentu akan mengenakan sanksi terhadap kegiatan-kegiatan gelap mereka. Karena itulah, begitu mengetahui bahwa rencana mereka telah dibocorkan, maka teks proklamasi berdirinya "Negara Aceh, Sumatera" pun

disebarkan. Seiring dengan itu, seluruh pemimpin gerakan yang ada di Sumatera Utara kembali ke Aceh dan masuk ke hutan pada pertengahan tahun 1977 itu. Dan ini menandai awal dari meletusnya pemberontakan yang sesungguhnya.

Pemimpin-pemimpin Gerakan Aceh Merdeka ketika itu banyak yang tidak populer dan bahkan umumnya tidak dikenal oleh rakyat. Kebanyakan tokoh utama Gerakan Aceh Merdeka terdiri dari intelektual muda yang berdiam di luar Aceh, sehingga praktis tidak mempunyai komunikasi dengan masyarakat. Kenyataan ini tidak memungkinkan mereka untuk menyebarkan atau memompakan gagasan Aceh Merdeka ke tengah-tengah masyarakat secara cukup merata. Memang tidak disangkal bahwa diantara tokoh-tokoh Aceh Merdeka terdapat ulama-ulama yang pernah terlibat dalam gerakan Darul Islam, seperti Teungku Ilyas Leube, akan tetapi karena gagasan Aceh Merdeka tidak pernah dikaitkan dengan sentimen keagamaan, maka pengaruh mereka inipun tidak optimal.

Ada beberapa bentuk afiliasi pengikut dengan Gerakan Aceh Merdeka, baik yang berasal dari Kabupaten Pidie mau pun dari luar kabupaten tersebut. Salah satu bentuk yang menonjol adalah hubungan kekeluargaan dengan tokoh utama, baik keluarga dekat mau pun keluarga jauh. Selain itu, ada juga intelektual muda setempat, terutama mahasiswa, yang terpengaruh oleh gagasan Aceh Merdeka, meskipun mereka tidak mempunyai sangkutan keluarga dengan para tokoh gerakan tersebut. Para intelektual muda ini tampaknya telah mendukung Gerakan Aceh Merdeka karena kekecewaan mereka terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada di Aceh ketika itu.

Kendati pun di awal gerakan ini sulit digerakkan karena masyarakat ketika itu agak lumayan dalam bidang pendapatan ditambah sistem keamanan Indonesia yang sangat prima ada beberapa hal gerakan ini kemudian disambut oleh masyarakat. *Pertama*, usaha-usaha untuk menyebarkan agama Kristen di Aceh, yang dilakukan oleh missionaris-missionaris dari Sumatera Utara pada tahun 1966-1968 telah mengakibatkan kemarahan masyarakat dan terjadinya kampanye anti Kristen. Sebagian masyarakat Aceh yang berpuncak pada pembakaran sebuah gereja di kabupaten Aceh Barat. Sebagai akibat ini pula terjadinya kampanye anti Aceh di Sumatera Utara. Salah satu isu yang dilancarkan oleh surat kabar Medan, yang dipelopori oleh Sinar Harapan, adalah bahwa orang Aceh sedang mempersiapkan sebuah pemberontakan lain melawan Jakarta. Apa yang menimbulkan kemarahan masyarakat Aceh dalam hal ini adalah sikap penguasa di Aceh dan Jakarta yang tidak membantah isu tersebut meski pun mereka tahu bahwa isu tersebut tidak benar.²⁷⁶

Kedua, Aceh juga merasa tidak puas akan kenyataan bahwa Jakarta kurang berminat untuk mengembangkan daerah Aceh, sehingga daerah tersebut dinilai sebagai berjuang sendiri dalam pembangunan. Misalnya pemerintah tidak memperbaiki jalan yang rusak apalagi membangun jalan yang baru, akibatnya komunikasi di Aceh semakin parah. *Ketiga*, yang lebih mengecewakan lagi rakyat Aceh adalah keputusan pemerintah untuk

²⁷⁶ *Ibid*, hlm. 82.

membangun jalan kelas satu yang menghubungkan sumur gas baru di Aceh Utara dengan Medan pada tahun 1976. Pada hal hubungan kabupaten itu dengan Banda Aceh, ibukota Provinsi, tidak pernah diperhatikan. Hal ini dipandang oleh masyarakat Aceh seakan-akan pemerintah hanya berminat pada proyek LNG di Aceh Utara itu saja.²⁷⁷ Memang ketika itu jalan raya adalah merupakan parameter pembangunan ekonomi bagi masyarakat Aceh.

Keempat, adalah pembangunan proyek LNG di Aceh Utara juga telah menjadi suatu pemicu lain ketidakpuasan rakyat Aceh. Mungkin sedikit berbau kesukuan misalnya masyarakat Aceh merasa dikhianati oleh Sumatera Utara. Isu penting berkembang bahwa Sumatera Utara secara licik telah mampu meyakinkan Jakarta bahwa Aceh bukan merupakan tempat aman untuk seperti kilang LNG. Karena itu, ada berita, Aceh hanya menyediakan sumur gas saja nanti akan disuling ke Sumatera Utara dan disanalah kilang produksi dibangun. Menurut keterangan Gubernur Muzakkir Walad, dia sendiri pernah menghadap Jenderal Yusuf sebagai orang kepercayaan Presiden Suharto ketika itu. Beliau mengatakan kepada Jenderal Yusuf - walau pun dengan kelakar, karena kawan akrab - tapi dengan nada mengancam "kalau kilang pengolahan LNG tidak di bangun di Aceh, tangan inilah yang akan menghancurkannya nanti. Lihatlah nanti bukan hanya Hasan Tiro, Hasan Ali dan Hasan Saleh yang akan muncul tapi juga sejumlah Hasan-Hasan lain akan muncul untuk memberontak lagi."²⁷⁸

Kelima, daerah Aceh yang telah dicapai menjadi daerah istimewa dalam bidang agama, adat dan pendidikan melalui perjuangan berat, penuh pengorbanan tidak hanya harta benda bahkan nyawa sejumlah tokoh dan pemimpin masyarakat, ternyata telah terkebirikan dengan kebijaksanaan Orde Baru. Masyarakat Aceh sangat menginginkan agar agama diberi tempat yang teratas dari kepedulian pemerintah, demikian juga adat diharapkan semuanya harus hidup bersendikan agama sedangkan pendidikan diinginkan ada perhatian khusus sehingga masyarakat di Aceh dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain. Dengan kebijaksanaan pemerintah orde baru mengeluarkan undang-undang no 5 tahun 1974, semua keinginan tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Kekecewaan ini awalnya memang sangat dirasakan oleh masyarakat Aceh yang rata-rata memiliki semangat hidup beragama.

Bagaimana pun sepi respon rakyat mengenai gerakan ini pemerintah tidak akan mau menerima resiko besar. Kendati pun sebenarnya kegiatan Aceh Merdeka ketika itu belum mengarah pada tindakan merusak termasuk belum ada tembak menembak kecuali menembak dua orang asing yang ada di Lhokseumawe - yang sebagian berpendapat sebagai mencari perhatian dunia, tetapi pemerintah sudah mulai mengirim pasukan operasi untuk membantu militer yang telah ada di Aceh.²⁷⁹ Disamping itu diadakannya operasi bakti untuk mencegah menyebarnya pengaruh Aceh merdeka di kalangan penduduk setempat dengan mengajak tokoh-tokoh yang berpengaruh setempat. Di sisi lain juga pemerintah berusaha menepis

²⁷⁷ *Ibid*, hlm. 83.

²⁷⁸ Keterangan Gubernur Muzakkir Walad pada tahun 1977 di depan Mahasiswa IAIN ketika mengadakan dialog dengan Gubernur di Pendopo

²⁷⁹ Tempo, 15 Juli 1978.

tuduhan bahwa Jakarta mengabaikan Aceh, dengan memberi perhatian khusus membangun sesuatu yang dianggap vital oleh masyarakat Aceh seperti jalan-jalan baru dan juga stasiun Televisi.

Tokoh-tokoh yang terlibatpun kebanyakan dapat ditangkap dan diadili dan kemudian di penjarakan. Sebagian yang dianggap tidak cukup bukti dilepaskan, kendati pun harus menginap di penjara minimal setahun. Sebagian diantara pengikutnya juga ada yang turun dari gunung untuk menyerahkan diri ke republik. Di awal tahun 1980-an hampir tidak terdengar lagi gerakan tersebut, kecuali tuduhan-tuduhan pejabat tertentu terhadap seseorang atau sekelompok orang yang berseberangan dengan partai penguasa ketika itu. Ditambah dengan strategi yang dipilih oleh Hasan Tiro tidak bergerak berdasarkan agama untuk menyesuaikan dengan bantuan asing mengakibatkan gerakan ini gagal menarik dukungan rakyat setempat.²⁸⁰

Meredupnya gerakan ini baik karena tekanan-tekanan militer mau pun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Aceh Merdeka tidak berarti gerakan ini telah habis. Seperti tulisan Hasan Tiro sendiri di "Unfinish Memory" bahwa dia telah berusaha menanam bibit untuk perjuangan kemerdekaan rakyat Aceh, diharapkan akan terus tumbuh di pupuk oleh generasi selanjutnya. Ternyata Hasan Tiro sendiri juga terus menyirami bibit ini yang pada tahun 1979 dia sendiri pindah ke Swedia dan kemudian menjadikan markas GAM di sana sampai sekarang. Pada tahun 1986 Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) yaitu sayap militernya gerakan Aceh Merdeka telah mendapat bantuan latihan militer dari Libya.²⁸¹

Awal tahun 1989 angkatan yang mendapat latihan di Libya ini mulai lagi memasuki Aceh dan melakukan aksi-aksi penyerangan terhadap pos-pos ABRI (sekarang TNI dan POLRI). Aksi-aksi ini kemudian menyebabkan pemerintah pusat memberlakukan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang dalam sandi ABRI disebut *Operasi Jaring Merah*. Di masa-masa ini situasi masyarakat memang sangat mencekam, karena masyarakat secara umum tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan tidak tahu siapa mereka. Mereka tidak mengenal mana GAM dan dalam waktu tertentu juga mereka tidak tahu yang mana tentara. Hal yang paling sering terjadi adalah mereka menemukan mayat tergeletak dalam jurang atau dipinggir jalan.

Situasi ini sebenarnya juga telah diusahakan untuk mengatasinya oleh ulama. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah sipil dan juga dengan pimpinan-pimpinan ABRI. Pertemuan tersebut adakalanya dengan inisiatif ulama sendiri adakalanya dengan undangan dari pemerintah atau pimpinan ABRI sendiri. Banyak saran-saran yang diberikan baik kepada pemerintah sipil mau pun kepada ABRI. Misalnya mereka meminta kalau ada yang dianggap bersalah hendaknya ditangkap dan diadili, kalau ada yang menyerahkan diri hendaknya diampuni dan kalau pun mereka terbunuh hendaknya diperlakukan secara Islami, serahkan pada keluarganya, tidak dengan membuang mayat di jalan.

Ulama juga datang ke pedalaman-pedalaman di mana masyarakat tinggal,

²⁸⁰ Syamsuddin, *Intergrasi...* hal. 85

²⁸¹ Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka : Jihad Rakyat Aceh Mmujudkan Negara Islam* (Jakarta: Madani Press, 1999), hal. 182-83

setidak-tidaknya memberi semangat hidup pada mereka, jangan selalu hidup dalam ketakutan dan depresi. Mereka datang ke *menasah-menasah* memberikan ceramah agama, selain program untuk memberi semangat hidup kepada masyarakat juga menghimbau agar mereka tekun beribadah serta berdoa kepada Allah agar dijauhi dari bala. Ulama juga pernah membuat pertemuan-peremuan untuk membahas masalah tersebut dengan menganalisa masalah dan mencari solusinya yang keputusan-keputusannya disebarakan paling tidak kepada anggota organisasi ulama tersebut.

Berbagai kekacauan telah muncul pada masa ini yang sulit dipastikan pelakunya apakah aparat keamanan RI atau AGAM atau kelompok-kelompok lain yang ingin memancing di air keruh atau mencari keuntungan material. Tetapi sejumlah orang kemudian ditangkap oleh aparat negara RI (ABRI) sebagiannya di tempatkan di penjara, sebagiannya ditempatkan ditempat tertentu. Secara sayup-sayup berkembang khabar bahwa telah terjadi penganiayaan-penganiayaan terhadap sejumlah orang yang dituduh terlibat GAM. Namun ketika itu satu orang pun tidak berani membuka mulut kepada pers sekalipun,- untuk menceritakan yang hal sebenarnya.

Mungkin karena kerasnya himpitan dari team keamanan RI yang (1989-1998) mendesak gerombolan AGAM waktu itu, diberitakan sejumlah AGAM menghindar dengan pindah ke luar negeri. Malah tidak hanya yang benar-benar terlibat dalam gerakan tersebut yang terpaksa mengungsi tetapi juga sebagian masyarakat kadang-kadang juga harus mengungsi karena ada tuduhan keterlibatan mereka, yang hanya tersebut mereka menjual barang dagangannya kepada yang terlibat GAM. Kendati pun gerakan-gerakan dari AGAM hampir tak terdengar lagi mungkin mereka telah keluar Aceh atau bersembunyi, di daerah-daerah tertentu operasi jaring merah ini terus berlangsung dan juga semakin keras.

Sebenarnya dari sebagian perlakuan-perlakuan aparat keamanan telah menimbulkan kebencian masyarakat. Sebagai akibatnya, walaupun mereka tidak lari masuk menjadi AGAM, sebagian mereka benar-benar membenci tidak hanya ABRI tetapi juga penanggungjawab operasi ini yaitu pemerintah pusat. Hal ini sangat dirasakan pada sebagian orang yang keluarganya menjadi perlakuan ABRI yang sudah tidak lagi berkeprikemanusiaan. Berita-berita tidak menyenangkan ini diketahui melalui cerita orang-orang yang saudaranya terkena aniaya. Atau melalui orang-orang yang diwajibkan jaga malam terutama sekali ditempat-tempat yang dijadikan rumah tahanan, seperti Rumoh Gedong. Malah warga sekitar tempat tersebut tanpa sengaja melihatnya atau mendengar jeritan kesakitan akibat penganiayaan.

Situasi yang semacam ini ditambah lagi dengan beberapa kebijaksanaan pemerintah yang dirasa merugikan dan bahkan dirasa sebagai menipu orang Aceh semakin menambah dalamnya kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pusat. Beberapa hal tersebut misalnya, dicabutnya pelabuhan bebas Sabang, dilikuidasinya KODAM I Iskandar Muda. Demikian juga ketika pabrik semen di Lho'Nga diresmikan tidak diberikan nama semen Lho' Nga seperti di tempat-tempat lain, misalnya semen Padang, semen Gresik dll. Malah tidak hanya itu yang tidak pernah terjadi ditempat-tempat lain, pengepakan semen dilakukan di Medan. Betapa pun rendahnya pengetahuan ekonomi seseorang

akan tahu, jika pengepakan itu dilakukan di Aceh pasti akan menambah kesempatan kerja kepada putra daerah.

Perasaan tertipu²⁸² ini semakin berkembang dan dirasakan secara luas ketika kadang-kadang dalam seminar tampil tokoh-tokoh tua yang menjelaskan sejarah bagaimana Sukarno memperlakukan Aceh dimasa jayanya. Ketika dia datang ke Aceh mengajak pemimpin Aceh untuk mempertahankan kemerdekaan, pemimpin-pemimpin di Aceh yang sebagian besar ulama menyanggupinya jika Sukarno nanti mau memperlakukan syari'at Islam di Aceh. Sukarno berjanji dengan bersumpah di depan Tgk Muhammad Daud Bereueh akan memberlakukan syari'at Islam tidak hanya di Aceh bahkan kalau perlu di seluruh Indonesia. Tetapi tidak lama setelah itu Sukarno mungkir bahkan sebaliknya memperlakukan pemimpin-pemimpin Aceh yang telah berjasa itu secara tidak terhormat. Demikian juga setelah dicapai kesepakatan damai antara DI-TII dengan RI dengan penerimaan usulan DI-TII agar Aceh dijadikan daerah istimewa dalam bidang agama, adat dan pendidikan, kemudian dihancurkan oleh Orde Baru, adalah merupakan cerita penipuan lainnya yang menambah luka hati anak muda di Aceh.²⁸³

Perasaan kecewa dan semakin memilukan setelah munculnya gerakan reformasi secara nasional di Indonesia. Tuntutan pencabutan DOM di Aceh pun semakin keras, sehingga pada tanggal 8 Agustus 1998, Jenderal TNI Wiranto sebagai Pangab mengumumkan pencabutan DOM.²⁸⁴ Semua ABRI yang bukan organik akan ditarik ke satuan masing-masing. Setelah pencabutan DOM secara resmi pasukan non organik di Aceh ditarik secara bertahap. Setelah itu kendati pun kekacauan-kekacauan masih terjadi di Aceh baik terjadi secara insidental maupun karena rekayasa tetapi masyarakat di Aceh semakin berani secara terbuka berbicara mengenai penderitaan masyarakat di masa DOM. Masyarakat bahkan sudah berani memprotes pemerintah terutama sekali terhadap ABRI atas tingkah laku mereka pada masa DOM. Misalnya pada tanggal 10 Agustus seorang anggota DPR pusat yang berasal dari Aceh memprotes Menkopolkam Faisal Tanjung karena pernyataannya yang menyatakan bahwa peristiwa pembantaian di Aceh tidak terkait dengan masalah HAM.²⁸⁵

Setelah itu tim pencari fakta tentang korban DOM pun semakin berani mencari data ke Aceh. Lebih-lebih lagi ketika Komnas HAM sudah berani turun ke lapangan untuk melihat langsung mengenai korban DOM ini yang

²⁸² Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Islam Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm.

²⁸³ Perasaan ini misalnya dapat kita baca dari pernyataan saudara Muhammad Nazar sebagai salah seorang tokoh muda (Ketua Sira) dalam masa reformasi di Aceh. Pada sebuah wawancara dengan wartawan Ar-raniry Post dia mengatakan "Bangsa Aceh Tidak Bisa Ditipu Lagi". Lihat Wahyu Saputra, "Bangsa Aceh Tidak Bisa Ditipu Lagi", *Ar-Raniry-Post*, Edisi 39/1 / Thn, 2001, hal. 6.

²⁸⁴ Ram/Bas, "Dom dicabut: Pangab Minta maaf Kepada MasyarakatAceh" *Serambi Indonesia*, (8 Agustus 1998), hal. 1; Kepastian pernyataan penting ini disampaikan Pangab Jenderal TNI Wiranto dalam pertemuan di Pendopo Bupati Aceh Utara dan di hadapan ribuan jama'ah shalat jum'at di mesjid Baiturrahman Lhoekseumawe.

²⁸⁵ Fik, "Aceh Takkan Dendam: pasukan tambahan 4000 personil, Faisal Tanjung di Protes" *Serambi Indonesia* (10 Agustus 1998).

dipimpin Baharudin Lopa, terbukalah sejumlah tindakan diluar prikemanusiaan yang di lakukan oleh ABRI di masa diberlakukannya Operasi Militer di Aceh. Baharudin Lopa menemukan sejumlah kuburan massal di Aceh yang diyakini sebagai korban pembunuhan oleh militer dimasa operasi Jaring Merah. Bahkan ada masyarakat yang mengaku pernah ditanam hidup-hidup tetapi kemudian dia bisa bangun dan menyembunyikan diri baru setelah masa pencabutan DOM dia mengaku diberlakukan seperti itu. Sejumlah keluarga juga melapor kepada Komnas HAM bahwa keluarganya pernah di culik oleh aparat yang mereka tidak mengetahui dimana keluarganya itu berada sampai sekarang. Banyak juga yang melapor kepada Komnas HAM bahwa mereka sesungguhnya tidak terlibat dengan GAM, namun tentara ketika itu meminta tebusan uang yang jika mereka dapat menyediakan uang maka la akan bebas.²⁸⁶ TPF juga menemukan korban perkosaan sebagai korban DOM di Aceh.²⁸⁷

Demikianlah temuan-temuan baik oleh tim Pencari Fakta maupun oleh Komnas HAM dalam sejumlah perlakuan tidak berprikemanusiaan oleh ABRI ketika itu yang telah membuat pilunya hati masyarakat Aceh, bahkan mungkin juga orang-orang di luar Aceh sendiri. Berita siksaan-siksaan seperti ini semakin mempertawar lagi kecintaan masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat. Bahkan mungkin mereka telah membenci pemerintahnya sendiri. Di kalangan pemimpin-pemimpin di Aceh baik di kalangan muda mau pun di kalangan generasi tua sudah sering menyebutkan kepada pemerintah Indonesia dengan peribahasa *air susu di balas dengan air tuba*.

Pada saat penarikan pasukan sejalan dengan dicabutnya DOM di Aceh nampaknya ada pihak-pihak yang membuat bermacam rekayasa untuk memperlihatkan Aceh terus kacau yang memerlukan penanganan kembali oleh aparat keamanan. Kekacauan-kekacauan itu yang dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi mengatas namakan siswa, tetapi masyarakat yang sudah dapat melihat kegagalan-kegagalan, seperti yang ditulis oleh Serambi Indonesia pada tanggal 26 September 1998.²⁸⁸ Sebenarnya banyak sekali kerusakan-kerusakan yang telah dapat dibaca atau bahkan ditemukan oleh masyarakat sebagai unsur rekayasa. Sekali peristiwa, mahasiswa menangkap seorang penggerak perusuh di Aceh Utara dan diyakini aparat, dan kemudian diserahkan kepada polisi. Tetapi kemudian polisi menyangkan di televisi bahwa mereka bukan aparat tetapi orang biasa.

Kadang-kadang memang ditemukan aparat melakukan tindakan sewenang-wenang, hanya karena terkejut lalu menembak apa saja yang ada di sekelilingnya, baik itu orang bahkan juga binatang-binatang. Kadang-kadang hanya iseng saja lalu mereka korbankan manusia yang tak berdosa.²⁸⁹ Penderitaan seperti ini hampir dirasa oleh seluruh penduduk Aceh. Sebagian-

²⁸⁶ IB, "Temuan TPF Aceh Utara bila ada uang nyawa selamat" *Serambi Indonesia*(Senin 28 September 1998).

²⁸⁷ Puh, "DOM sissakan trauma bagi korban perkosaan" *Serambi Indonesia*(Senin 19 September 1998).

²⁸⁸ Fik, "Soal Kerusakan Lhokseumawe; Kontras: Ada Indikasi Keterlibatan Serda R" *Serambi Indonesia*(26 Desember 1998).

²⁸⁹ Ib, " Karena Keisengan Aparat, Karno Cacat Seumur Hidup" *Serambi Indonesia*(Senin 28 Desember 1998).

nya memang dialami sendiri. Sebagiannya dialami oleh keluarga dekatnya, mereka tahu dengan diceritakan oleh keluarga tersebut. Sebagiannya melihat dengan matanya sendiri seperti supir-supir truck, supir bus jarak jauh atau supir jarak dekat. Secara keseluruhan juga diketahui oleh masyarakat melalui pemberitaan pers.

Karena itulah barangkali kemudian masyarakat sepakat mengadakan penjagaan Pageu Gampong untuk menghindari unsur rekayasa-rekayasa seperti ini, termasuk dalam masalah pembakaran-pembakaran. Dalam masalah pembakaran ini kemudian diakui sendiri oleh presiden Abdurrahman Wahid dilakukan oleh aparat keamanan. Kemudian presiden memerintahkan agar memindahkan oknum ini sejauh-jauhnya.

Belum lagi yang salah persepsi, hanya karena perbedaan budaya lalu masyarakat menerima penganiayaan tanpa diketahui sebabnya. Misalnya seperti diketahui masyarakat Aceh sudah biasa menghadapi lawan bicara dengan menantang hadapan langsung," kadang-kadang juga anak muda biasa "mengkacak pinggang, aparat yang tidak terbiasa seperti ini merasa ditantang karena itu mereka menghajar anak-anak muda ini dengan tamparan. Hal seperti ini banyak sekali dialami oleh supir-supir atau pedagang kecil yang tiap hari lalu lalang di jalan raya.

Memperhatikan penderitaan rakyat yang seperti ini, kemudian muncul tuntutan-tuntutan. Tuntutan pertama adalah, agar pemerintah menghentikan kekerasan di Aceh. Tuntutan ini tidak mendapat respon pemerintah. Tuntutan selanjutnya adalah agar pemerintah mengadili mereka-mereka yang memperlakukan rakyat semena-semena. Tuntutan ini pun tidak digubris oleh pemerintah, malah yang terjadi sebaliknya pemerintah mengirim pasukan keamanan (PPRM) untuk menegakkan keamanan di Aceh. Mereka mengadakan operasi-operasi keamanan lagi seperti operasi Wibawa. Sehingga yang terjadi adalah semakin banyak kesewenang-wenangan. Hal ini telah memunculkan bermacam pemikiran dikalangan pemimpin di Aceh dalam rangka meredam kemarahan rakyat dan mencegah berlanjutnya kekejaman-kekejaman. Sebagiannya mereka mengusulkan agar dibentuk pemerintahan yang dapat mengurus rumah tangga sendiri namun masih dalam kerangka NKRI. Hal inipun dinilai negatif oleh pusat.

Mungkin karena telah memuncaknya kemarahan rakyat atas penderitaan saudaranya baik yang telah maupun yang sedang dialami, lalu mahasiswa membuat musyawarah besar dengan mengumpulkan semua mahasiswa yang ada di tanah air melalui perwakilan-perwakilannya. Dalam pertemuan tersebut mereka memutuskan agar pemerintah memberi kesempatan kepada rakyat Aceh untuk mengadakan referendum, apakah rakyat Aceh masih ingin bergabung atau pisah dengan RI. Tuntutan ini awalnya hanya merupakan wacana, karena itu muncul bermacam-macam tanggapan. Pemerintah pusat sendiri baik secara individu maupun lembaga termasuk TNI dan Polri menanggapi negatif. Mereka menganggap itu hanya keinginan dari beberapa orang atau hanya di kalangan mahasiswa saja. Melihat tantangan seperti itu kemudian mahasiswa melalui SIRA berusaha mengumpulkan sejumlah rakyat Aceh yang diperkirakan sampai 2.000.000. orang untuk berkumpul di depan Mesjid Raya Baiturrahman untuk menyatakan setuju dengan referendum.

Situasi ini telah menyuburkan kembali ide untuk memisahkan Aceh dengan Republik Indonesia. Kesadaran Aceh sebagai sebuah bangsa semakin mencuat dari hasil pengungkapan kembali sejarah Aceh masa lalu. Kebanggaan terhadap sejarah kemegahan Aceh sebagai salah satu kerajaan dari lima besar kerajaan Islam masa silam semakin mengumandang. Demikian juga kesadaran Aceh sebagai sebuah bangsa mengakibatkan semakin banyak generasi muda yang mencoba menggali kembali sejarah Aceh masa lalu, sehingga memunculkan penafsiran-penafsiran bahwa penggabungan Aceh dengan Indonesia tidak sah.

Penderitaan rakyat semasa DOM ditambah dengan kesadaran pengkajian sejarah Aceh masa lalu semakin memperkuat semangat ke Acehan dan hal itu semua telah memperkuat rasa simpati rakyat Aceh untuk mendukung perjuangan GAM yang ingin memisahkan diri dari RI. Disinyalir sejumlah pemuda Aceh tidak hanya sekedar memberi semangat bahkan turun langsung mengikuti latihan militer untuk angkatan perang yang dibentuk oleh GAM. Hal ini pula yang telah menambah semangat keberanian GAM untuk menantang TNI dan POLRI. Ketika inilah perang terbuka tidak dapat dihindari. Disamping itu teror dan penculikan pun semakin tidak dapat diatasi dan sangat sulit untuk diketahui siapa menculik siapa. Dengan demikian korban rakyat sipil tak berdosa semakin banyak.

Usaha-Usaha Awal Penyelesaian Konflik

Untuk lebih jelas terlihat bagaimana peranan ulama dalam penyelesaian konflik yang terjadi terakhir ini (sejak orde baru sampai sekarang) kita perlu memperhatikan tingkatan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Agaknya analisis Abu Jihad agak mendekati pada realitas yang terjadi dalam masyarakat Aceh. Abu Jihad membagi konflik ini kepada tiga fase dengan tingkat konflik yang berbeda pula. *Pertama*, tahun 1976 sampai 1982 sebagai fase pertama mulai dari membangun kesepakatan sampai mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka. *Periode kedua*, 1982 sampai 1987 Abu Jihad memandang sebagai periode Aceh dalam keadaan tenang, tidak ada konflik. Dalam hal ini mungkin kalau dilihat secara sederhana, namun di lapangan periode itu, dalam catatan ABRI tetap masa-masa pemulihan keamanan kendati pun tidak banyak korban, tetapi penangkapan-penangkapan tetap terjadi. *Ketiga*, dari tahun 1987 sampai 2003.²⁹⁰ Pada periode inilah yang ketegangannya memuncak, kendati pun tidak sama setiap tahun. Situasinya agak fluktuasi. Misalnya ketika diberlakukan DOM, situasi sangat mencekam, selain penculikan juga sering mayat dilempar di jalan-jalan besar yang mengejutkan dan menakutkan banyak orang. Ditahun-tahun ini kekuatan juga tidak berimbang, karena itu aktivitas yang dilihat agak lebih banyak dilakukan oleh ABRI dan di tahun 1994, 1995, 1996, kegitankegiatan ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, kecuali keluarga-keluarga yang diculik saja. Sedangkan ditahun-tahun setelah reformasi, kekuatan mulai berimbang ditandai dengan adanya kontak senjata dan bahkan juga saling menculik. Bahkan menjelang diadakan Sidang Umum MPR untuk rakyat

²⁹⁰ Abu Jihad, 'Berbicara Aceh Jangan Lupa Sejarahnya' dalam Tgk. Lamkaruna Putra, *Perjalanan Panjang Aceh Menuju Islam Kaffah* (Jakarta: Titian Ilmu Insani, 2001), hlm. 2.

Aceh, seperti kekuatan telah berada pada rakyat, sementara polisi dan tentara seperti telah lumpuh.

Sebenarnya sejak awal terjadi konflik ini ulama telah mulai mengambil bagian sebagai usaha meredam agar konflik itu tidak berkembang lebih besar dan bahkan kalau bisa akan tidak terjadi lagi. Ulama-ulama yang turut berusaha meredam kegiatan tersebut melakukan dengan cara yang berbeda-beda, menurut fungsi dan visinya masing-masing yang mungkin sangat berbeda dengan cara pemerintah dan ABRI. Tetapi kita pun harus memberi catatan, tidak semua ulama sejalan pemikirannya mengenai masalah ini. Karena kadang-kadang esensi pergerakan yang dikemukakan oleh GAM dapat mempengaruhi ulama-ulama tertentu, terutama sekali teungku-teungku yang sangat bercita-cita menegakkan seluruh ajaran Islam berlaku dalam masyarakat sementara mereka kurang cukup paham mengenai politik.

Pemerintah dengan aparatnya terutama sekali TNI dan Polri yang di awal gerakan ini masih satu dalam jajaran ABRI menempuh pendekatan pengamanan (*security approach*), seperti yang terjadi di awal gerakan ini dengan menangkap salah seorang warga Aceh di Medan yang diduga terlibat dalam gerakan ini.²⁹¹ Di tahun-tahun 1977-1978 memang banyak yang tertangkap dan setelah diadili mereka kemudian dipenjarakan.

Seperti dijelaskan sebelumnya ketika ini pemerintah masih menggunakan sejumlah tokoh masyarakat terutama sekali mantan DI-TII periode 1953 yang sebagian besar adalah ulama untuk memberi nasehat kepada mereka yang terlibat agar tidak melanjutkan gerakannya. Demikian juga kepada generasi muda yang belum terlibat, dinasehati agar tidak bertindak yang tidak menguntungkan semua pihak. Mereka juga menjelaskan pengalaman mereka dahulu betapa sulit masyarakat ketika harus menyaksikan peperangan diantara dua bersaudara.

A. Hasjmy sendiri yang ketika itu menjabat rektor IAIN Ar-Raniry dan wakil ketua Majelis Ulama Indonesia, ketika mahasiswa memintakan pendapatnya harus mendukung siapa, menghimbau mahasiswa agar lebih memfokuskan dirinya pada belajar mempersiapkan diri sebagai generasi yang profesional. Kendati pun tidak mengatakan secara gamblang agar tidak ikut terlibat, tetapi dengan meminta agar mahasiswa tekun belajar, itu berarti A. Hasjmy lebih mengarahkan agar mahasiswa jangan melibatkan diri terhadap kegiatan politik praktis seperti itu. Lagi pula jika mahasiswa mampu mendidik dirinya menjadi seorang yang profesionalisme biasanya selanjutnya akan disibukkan dengan pekerjaan yang pasti masa depannya. Dengan demikian mereka akan berpikir lebih jernih dan strategis untuk menentukan masa depannya.

A. Hasjmy bersama ulama dan tokoh-tokoh pemimpin di Aceh secara bertahap telah berusaha juga meyakinkan aparat keamanan ketika itu, dan memberi saran agar mereka tidak gegabah dalam mengambil tindakan mengamankan Aceh. Tentara di lapangan memang bertindak sebagaimana tradisi tentara, demikian juga pimpinan ABRI ketika itu membuat pernyataan semacam ancaman kepada masyarakat sehubungan dengan gerakan Aceh

²⁹¹ Syamsuddin, *Integritas ...* hlm. 92

Merdeka ini. Ulama-ulama ketika itu memperhatikan pengalaman sejarah, bahwa Aceh tidak pernah dapat ditaklukkan dengan ancaman atau perang. Hal ini dapat ditelusuri mulai dari aneksasi Belanda ke Aceh sampai pemberontakan DI-TII. Di awal meletusnya pemberontakan DI-TII pemerintah pusat baik pimpinan politik maupun TNI memutuskan akan menumpas dengan tentara. Malah ada pejabat TNI yang menjamin mereka akan dapat menumpas pemberontakan tersebut dalam 6 bulan. Tapi kenyataannya sudah sampai 6 tahun mereka tidak dapat mengamankan Aceh. Baru setelah mereka merubah strategi dengan mengadakan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan, pemberontakan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas.

Hal seperti itulah yang di sarankan oleh ulama-ulama Aceh kepada pimpinan TNI sehingga ketika Menhankan/Pangab dipegang oleh Jenderal Yusuf mengambil kebijaksanaan seperti itu. Melalui ABRI Masuk Desa (AMD) ABRI mengadakan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat desa dengan membangun sarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tempat-tempat ibadah. Sebagian anggota TNI atau POLRI yang ditempatkan di kegiatan AMD juga dapat bertindak sebagai imam shalat, atau bisa mengumandangkan azan, paling tidak dapat mengikuti aktivitas agama di desa seperti wirid yasin. Mungkin karena itulah masyarakat ketika itu sulit membenci aparat keamanan yaitu TNI dan POLRI. Karena itu pula konflik dapat dilokalisasi sehingga tidak tersebar begitu meluas dan tidak begitu banyak tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di saat itu. Mungkin karena itu pula saat itu tidak ada keluhan masyarakat sekeras di masa DOM atau masa masa Darurat Militer, terhadap peran ulama dalam mengayomi masyarakat dari tindakan kekerasan.

Paling tidak, ulama-ulama yang mengerti politik dapat memberi penjelasan-penjelasan pada masyarakat bahwa perjuangan melalui politik dan senjata akan banyak jatuh korban. Lebih-lebih lagi kalau dapat mengakibatkan orang-orang tidak dapat belajar agama maka akan sangat disayangkan nanti disuatu waktu akan tidak ada ulama lagi yang dapat mengajar agama untuk generasi mendatang. Sebagiannya kadang-kadang hanya memberi nasehat agar masyarakat tidak ikut-ikutan pada politik yang belum menentu nanti akan menjadi korban sia-sia dan akan merugikan keluarga.

Pada periode kedua yaitu 1982-1987 yang oleh Abu Jihad dianggap aman sebenarnya juga masih ada gerakan-gerakan kecil di desa-desa. Mungkin karena faktor kekuatan Aceh Merdeka sendiri belum begitu kuat di waktu itu sehingga gerakannya tidak terasa. Seperti juga kita lihat dalam perkembangan aktivitas GAM waktu itu sedang merubah strategi yaitu dengan mempersiapkan angkatan perangnya dengan mendapat latihan di Libiya sehingga kegiatan di tanah air tidak begitu keras. Di saat-saat ini sebenarnya ulama dalam pertemuan-pertemuan resmi atau tidak resmi tetap ada pembicaraan tentang masalah ini. Kendati pun ada diantara para ulama yang ingin agar syari'at Islam diberlakukan di Aceh, tetapi gerakan-gerakan seperti Aceh merdeka tetap tidak menjadi dukungannya dengan alasan banyak sekali masyarakat yang korban. Tetapi suatu hal yang tidak dapat dibendung, karena adanya unsur-unsur tertentu yang mengambil

keuntungan dalam air keruh, masyarakat sering terpaksa menjadi Aceh Merdeka, apakah sekedar kambing hitam atau dia benar mencari dimana gerombolan tersebut kemudian bergabung.

Usaha-Usaha Penyelesaian oleh Majelis Ulama

Mulai tahun 1989 sampai 1998 gerakan Aceh Merdeka ini mulai lagi bergerak dalam radius terbatas, tetapi mereka telah memiliki kekuatan. Sesekali diberitakan tidak hanya anggota GAM yang tertembak tetapi juga TNI atau POLRI juga terbunuh. Tetapi waktu itu Indonesia masih masa-masa tidak terbuka. Pers masih dibatasi. Dalam hal tertentu pers dilarang untuk memberitakan. Pers luar negeri juga dilarang masuk. Karena itu pemerintah melalui ABRI melakukan kegiatan pembersihan sembarangan. Banyak orang ditangkap dan ditahan sekian lama, ternyata kemudian mereka tidak bersalah. Sebagian diantara mereka juga terbunuh, tanpa diketahui apakah sebenarnya dia bersalah atau tidak karena tidak pernah diselesaikan melalui pengadilan.

Situasi saat ini benar-benar tidak menentu. Masyarakat sudah hidup dalam ketakutan yang sangat berat. Karena selain ABRI yang bertindak serampangan seperti ini GAM juga memiliki strategi sendiri dalam menjebak ABRI yang karena sebgaiain ABRI tidak berpikir strategi lalu bentrok dengan masyarakat tak berdosa. Hal ini selain membuat masyarakat terus dalam keadaan ketakutan juga dengan demikian masyarakat semakin membenci ABRI. Keuntungan selanjutnya adalah GAM mendapat simpati dari masyarakat. Tetapi banyak juga pendapat beberapa peristiwa sebenarnya dibuat oleh provokator, tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal ini telah menimbulkan kecurigaan masyarakat bahkan sesamanya.

Hal semacam itulah yang telah mengakibatkan ulama merasa prihatin terhadap masyarakat. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sudah pernah mengirimkan sejumlah ulama ke desa-desa. *Pertama-tama* untuk memberi semangat hidup kepada mereka, agar tidak terus dalam keadaan kecut. *Kedua* agar tidak terjadi saling curiga diantara masyarakat yang dapat mengakibatkan bentrokan sesama masyarakat dan meluasnya konflik horizontal.

Usaha dari Majelis Ulama tersebut memang ada manfaatnya. Menurut keterangan rombongan yang ikut dalam tim ini, diawal kedatangan mereka masyarakat sangat curiga. Mereka tidak diterima dengan sepenuh dan senang hati. Padahal yang datang adalah ulama dan bahkan *muballigh*. Tidak biasa bagi orang Aceh tidak menerima kedatangan ulama. Tetapi begitulah situasi ketika itu, sehingga pertemuan mereka diawalnya begitu tegang. Baru setelah mereka memberi ceramah dengan menyelipkan beberapa penjelasan bahwa mereka adalah dari rombongan Majelis Ulama Propinsi. Kedatangannya bertujuan untuk melihat saudaranya di desa secara langsung dan ingin mendengar kalau ada keluhan-keluhan, situasi berubah, tidak lagi tegang. Mereka mulai tersenyum dan kemudian mereka melapor apa yang mereka alami agar Majelis Ulama bersedia membantu mereka menyampaikan kepada yang berwajib. Mereka mengatakan, bahwa mereka orang-orang desa yang

tidak tahu apa-apa jangan diganggu. Mereka mengharapkan bahwa orang yang berada diantara GAM dan ABRI hendaknya dipahami oleh kedua pihak.

Anggota Majelis Ulama yang turun ke daerah baik kapasitas sebagai anggota Majelis Ulama maupun sebagai seorang ulama kapan pun ada kesempatan bertemu dengan pemerintah, baik itu pemerintah sipil maupun ABRI mereka menyampaikan keluhan masyarakat. Di saat-saat pertemuan formal antara ulama dengan pejabat pemerintah, sipil atau ABRI, biasanya ulama berbicara terus terang. Suatu waktu seorang ulama menyampaikan kepada panglima KODAM I, (diwaktu itu masih Bukit Barisan), bahwa masyarakat lebih takut pada ABRI dari pada GAM. Karena GAM tidak pernah mengganggu masyarakat, tetapi ABRI selalu melakukan tindakan yang menakutkan masyarakat, termasuk menganiaya orang-orang yang belum tentu salah.

Tapi bagaimana pun hasilnya tidak mampu meleraikan konflik diantara mereka yang bertikai. *Pertama*, karena ulama memang tidak memiliki kekuatan pemaksa seperti yang dimiliki ABRI dan GAM yaitu angkatan bersenjata. Mereka hanya memiliki statemen / fatwa atau nasehat. *Kedua*, pertentangan diantara mereka murni politik yang bermuara pada kekuasaan. Mereka masing-masing ingin mempertahankan negaranya. Mereka masing-masing memiliki keyakinan bahwa tanah Aceh adalah hak mereka. *Ketiga* disinyalir yang berkonflik tidak hanya ABRI dan GAM, tetapi banyak faksi lain baik dalam negeri mau pun luar negeri.

Usaha-Usaha Dialog RI-GAM

Seperti telah dijelaskan sebelumnya setelah masa reformasi GAM benar-benar telah eksis dalam artian mereka memiliki struktur secara hirarkhi, memiliki wilayah tertentu dan juga memiliki angkatan tentara dan polisi lengkap dengan baju seragamnya. Mereka malah memiliki kartu anggota GAM, semacam KTP pada rakyat RI. Pada saat ini, susunan pejabat-pejabat negaranya diumumkan secara luas di kalangan masyarakat dan juga dikutip oleh pers. Mulai tahun-tahun tersebut kehidupan masyarakat mulai mencekam, karena hampir tiap hari kontak senjata dan ada korban. Korban juga kadang-kadang tidak hanya karena kontak senjata tetapi juga hasil penculikan, yang dibuang ditempat-tempat tertentu.

Di beberapa tempat dan diwaktu selang, bom juga mengguncang ketenangan hidup masyarakat, disamping korban manusia dan harta benda. Sejumlah kantor diledakkan dengan bom atau dibakar, termasuk rumah-rumah sekolah. Bahkan kantor polisi juga terkena sasaran bom. Tidak hanya masyarakat yang hidup dalam keadaan takut, tapi tentara dan polisi sendiri merasa hal yang sama. Ini terlihat jika ada masyarakat yang melapor malam-malam karena mereka ada gangguan, polisi tetap tidak akan datang, tetapi menunggu siang. Korban tembakan senjata api juga tidak menentu lagi, karena tentara dan polisi telah mencurigai siapa saja. Sehingga sedikit saja terjadi, tidak seperti diperkirakan langsung ditembak.

Ribuan orang telah tewas tertembak, baik dari kedua angkatan mereka mau pun dari masyarakat sipil sendiri. Sebagai akibat dari sebagian

masyarahat dikampung yang trauma dengan kejadian-kejadian tersebut, telah pindah ke kota-kota baik ke kota seperti Banda Aceh atau kota-kota lainnya bahkan juga ke luar daerah Aceh. Begitu banyak perempuan-perempuan telah janda dan begitu banyak anak-anak telah yatim. Dengan demikian sejumlah itu pula anak-anak dan janda kehilangan pencari nafkah dalam keluarga sehingga kehidupan mereka sungguh tidak menentu. Karena itu pula kita dapati sekian banyak pengemis tumbuhan, baik yang di kota-kota Banda Aceh sendiri maupun ditempat galon-galon minyak sepanjang jalan Medan-Banda Aceh.

Penderitaan masyarakat seperti ini telah menimbulkan kesadaran sejumlah elemen dalam masyarakat, yang di dalamnya juga ada ulama, untuk berusaha agar GAM dan TNI/POLRI menghentikan permusuhan. Jika juga masing-masing ingin mencapai maksudnya, hendaknya mereka perjuangkan tanpa harus adu senjata. Elit-elit politik melalui salurannya sendiri bahkan juga tokoh-tokoh kampus telah berusaha agar kedua belah pihak yang bertikai bersedia mengadakan dialog. Demikian juga mahasiswa, berulang-ulang dari bermacam kelompok berdemonstrasi dengan menyeru jangan lagi korbankan rakyat sipil. Selanjutnya mereka menyeru agar TNI dan GAM mengadakan gencatan senjata dan kemudian menuju meja dialog.

Mungkin atas desakan-desakan tersebut para pemimpin RI dan GAM mulai mengusahakan kearah itu. Pada bulan Juli 2000 terjadilah pertemuan antara RI dan GAM di Jenewa dan menghasilkan sebuah Nota Kesepahaman (*Joint of Understanding*) untuk selanjutnya diteruskan dengan dialog-dialog antara RI dan GAM. Tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi, mungkin saja kedua belah pihak tidak ikhlas menandatangani nota ini. Memang tidak mudah meleraikan perselisihan ini. Karena gerakan-gerakan baik dari GAM maupun RI tidak satu faksi. Sangat mungkin karena Jou ini ditandatangani oleh Duta Besar RI dan Dr. Zaini Abdullah, mewakili GAM, adalah dari faksi sipil masing-masing. Sedangkan di lapangan yang banyak bergerak adalah tentara ke dua belah pihak. Merekalah yang merasa langsung sakitnya dianiaya atau ditembak dan mereka juga yang khawatir kekuatan lawan akan semakin besar.

Dialog ini tidak berhasil karena tidak ditangani secara ikhlas dan tidak diajak semua pihak yang terlibat serta berkepentingan untuk menciptakan kedamaian. Pemerintah RI saja sulit mengurus penyelewengan TNI atau POLRI di lapangan, karena itu ulama lebih-lebih lagi tidak bisa, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa mereka seperti yang dimiliki sebuah negara seperti RI.

ULAMA DI TENGAH KONFLIK ACEH

Uraian narasi di bawah ini merupakan hasil revisi dari hasil penelitian saya tahun 2002 dengan menambah sejumlah data serta *cross cek* dalam rangka penyempurnaan, sehingga isinya menjadi suatu isu yang membulat seperti ini. Karya sederhana ini merupakan sebuah hidangan dari sebuah kajian terhadap fenomena yang sedang muncul di Aceh di saat itu. Dengan sajian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada bangsa kita dalam

menganalisis persoalan-persoalan yang sedang berkembang untuk sebuah pengalaman dalam menempuh kebijakan-kebijakan.

Mungkin juga sajian ini akan berguna bagi dunia pakar ilmu dan atau peneliti untuk bahan dasar kajian selanjutnya. Tetapi bagaimana pun juga saya memiliki suatu obsesi yaitu ingin menjawab "selentingan" pertanyaan yang berkembang dalam masyarakat mengenai peran ulama di tengah-tengah konflik Aceh. Apakah benar ulama sekarang sudah berubah seperti hadih maja yang dipopulerkan selama ini bahwa: "Ulama jamuen pijuet-pijuet karena le geu kalut dan geu meudo'a, ulama jinoe tumon-tumon karena le geu ektron tangga istana."

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, secara administratif di waktu itu masih terdiri dari 15 kabupaten dan 4 kota. Lima belas kabupaten tersebut adalah kabupaten Aceh Timur, Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tengah, Gayo Lues, Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulu, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan Aceh Tenggara. Sedangkan yang empat kota adalah kota Langsa, Lhokseumawe, Banda Aceh dan Sabang.

Dari 19 kabupaten dan kota tersebut, penelitian ini mengambil sampel sebanyak 7 kabupaten dan satu kota yang dipandang mewakili wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Diantara hal yang menjadi pertimbangan adalah daerah yang dipilih adalah daerah yang menjadi sumber isu yang relatif akurat. Akurat dalam anti informasi yang diterima dari orang-orang yang memiliki logika agak rasional dan mendapat informasi dari berbagai media, melalui radio, televisi, surat kabar bahkan dari orang yang memiliki otoritas dan dari tangan pertama. Responden ini terdapat di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh adalah sebagai Ibukota Provinsi. Kebanyakan tokoh-tokoh daerah tinggal disini, termasuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi, diantaranya Ketua dan anggota MPU provinsi, Ketua Muhammadiyah, tokoh-tokoh yang terlibat dalam tim monitoring baik dalam rangka jemma kemanusiaan maupun dalam pelaksanaan penghentian tindak kekerasan. Di daerah ini juga banyak orang yang sering terlibat dengan bermacam gerakan, demonstrasi, pertemuan, seminar termasuk diskusi, baik dengan GAM²⁹² sendiri atau tim keamanan RI, baik sipil maupun TNI POLRI.

Pemilihan lokasi beberapa kabupaten seperti Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Timur adalah karena daerah ini termasuk daerah terberat terkena imbas konflik baik mulai sejak awal gerakan Aceh Merdeka, di masa DOM dan juga periode akhir-akhir ini. Dengan demikian banyak sekali pengalaman mereka dengan bermacam variasi termasuk bermacam usaha yang sering melibatkan ulama bahkan ulama sendiri sebagai korban.

Beberapa kabupaten lain seperti Aceh Barat adalah mewakili daerah yang baru terimbas, karena baru setelah masa reformasi daerah ini terlihat gerakan pemberontakan ini mengemuka, kendati pun demikian dapat

²⁹² Misalnya dengan perunding GAM yang berdomisili di Hotel Kuala Tripa atau utusan-utusan GAM lainnya ketika ada pertemuan bersama antara RI, GAM dan kelompok lain dari sipil

digolongkan daerah yang berat menerima akibatnya, baik korban manusia maupun korban harta benda dan juga fasilitas umum termasuk rumah sekolah. Daerah ini sebenarnya masyarakatnya masih sangat homogen karena itu keterikatan mereka pada ulama masih sangat terlihat, karena itulah lokasi ini dianggap sangat penting. Sedangkan kabupaten Aceh Tengah selain di sana juga banyak terlibat konflik bahkan memiliki karakter sendiri baik heterogennya penduduk, daerah bukan pesisir, dan karakter konflik juga memiliki ciri khas sendiri.

Kabupaten Tamiang dan Singkil adalah sebagai mewakili daerah relatif aman, seperti juga Simeulu dan Aceh Tenggara, namun kita ingin lihat bagaimana pandangan ulama mengenai konflik dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap ulama.

Adapun responden yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari warga masyarakat di wilayah sampel, serta pemuka agama (ulama), sejak dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota. Sepanjang memungkinkan, penelitian ini akan juga mengumpulkan data dari person-person yang dianggap sebagai informan kunci (*key informan*).

Jumlah data yang dapat dikumpulkan sebanyak 176 orang, kendatipun direncanakan jumlah sampel warga masyarakat yang direncanakan sebenarnya 200 orang. Jumlah sampel warga masyarakat dari masing-masing kabupaten atau kota, berkisar antara 15 sampai 35 orang yang diambil dengan tehnik "bola salju" (rolling ice ball). Kelompok sampel masyarakat itu terdiri dari umara (pejabat pemerintah), tokoh LSM, pemuka masyarakat, mahasiswa dan keluarga yang terkena konflik. Para umara terdiri dari pimpinan pemerintahan dalam berbagai tingkatan, anggota lembaga legislatif, dan pimpinan masyarakat non formal dan mahasiswa. Sampel terbanyak berasal dari Kabupaten Pidie dan Aceh Utara, masing-masing 35 orang.

Adapun sampel ulama yang direncanakan sebanyak 45 orang terwawancarai hanya 43 orang, itu pun dengan perjuangan yang sangat melelahkan untuk mendapatkannya dan dengan tehnik yang bermacam-macam. Dalam hal inilah saya ingin menjelaskan sebagai sebuah pengalaman. Untuk mengedat dan mengutip kembali kuessioner, bukanlah masalah kendati pun sangat dituntut kehati-hatian, tetapi melakukan wawancara terutama untuk mencari ulama yang dianggap memiliki otoritas data akurat begitu besar kendalanya. Masa pengumpulan data yang semula direncanakan cukup 2 bulan ternyata menghabiskan 3 bulan padahal dalam penelitian ini telah melibatkan 8 orang peneliti.

Pada dasarnya penelitian ini harus dilakukan diseluruh kabupaten yang telah ditetapkan dalam penentuan populasi dan sampel berbagai wilayah tetapi ketika itu perjalanan sangat mengkhawatirkan. Apalagi perjalanan ke wilayah Aceh Barat Selatan. Bus pun tidak beroperasi lagi, kecuali travel yang menggunakan mobil L-300. Orang yang mengadakan perjalanan juga sudah sangat jarang. Pejabat - kendati pun pejabat kecil bahkan sebahagian ulama telah mengadakan perjalanan melalui udara.

Perjalanan ke wilayah timur Banda Aceh - Medan bahkan ke Langsa saja

(masih Aceh Timur) pejabat eselon II sudah dilarang melakukan perjalanan darat. Pejabat yang ke Langsa terbang terlebih dahulu ke Medan (Sumatera Utara) kemudian baru mengadakan perjalanan darat dari Medan ke Langsa (Aceh Timur). Orang bepergian, kalau sudah dianggap penting sekali. Bus malam tidak beroperasi lagi kecuali karena malam dalam perjalanan, tetapi dari terminal Banda Aceh-Medan, atau Medan-Banda Aceh tidak ada lagi yang berangkat malam. Masyarakat lebih senang memilih yang berangkat pagi dan sampai sore. Kalaupun ada yang berangkat agak sore dan mungkin malam di jalan adalah orang yang nekad. Berbagai hambatan ditemui seperti takut pada kontak senjata, ada yang takut dirampok dan diculik. Sebahagian mereka-juga tidak senang diperlakukan kasar oleh aparat pemeriksa di jalan.

Hambatan bukan hanya di jalan, tetapi juga untuk mendapatkan responden di wilayah kita meneliti. Ketika saya menawarkan seorang teman untuk memilih lokasi Aceh Utara, dia menolak, padahal dia kelahiran Aceh Utara. Demikian juga ketika seorang teman ditugaskan ke Aceh Barat atau Aceh Selatan, dia juga menolak ke dua-dua daerah itu, kendati pun dia kelahiran Aceh Selatan. Sehingga ulama-ulama daerah tersebut terpaksa saya datangi sendiri, namun tidak semua saya temui mereka di lokasi.

Kendati pun sudah diusahakan memilih lokasi yang relatif kondusif, kebanyakan teman saya gagal mendapatkan informasi yang diperlukan, khususnya dari ulama. Karena untuk memperoleh informasi dari mereka harus melakukan wawancara. Ulama ketika itu sudah sangat selektif berbicara. Berdasarkan pengalamannya selama ini, mereka sangat menderita apakah penganiayaan, ancaman atau teror kalau salah berbicara.

Pengalaman seorang teman saya yang meneliti di wilayah Aceh Besar. Saya sudah tunjukkan beberapa pimpinan dayah (pesantren) untuk diwawancarai. Dia juga sudah berusaha membuat pendekatan melalui seorang muridnya untuk sama-sama pergi ke dayah tersebut agar tidak dirasa asing oleh pimpinan dayah tersebut. Setelah diterima di rumah, pimpinan dayah ini menanyakan tujuan kedatangan teman saya ini. Begitu penjelasannya mengarah ke konflik yang sedang berlangsung di Aceh, ulama tersebut langsung menutup pembicaraan dan mempersilakan pulang, karena dia tidak mau terlibat dalam konflik tersebut.

Ada dua peneliti yang agak berhasil misalnya yang memilih Aceh Timur dan Aceh Tengah. Menurut keterangan teman saya, yang bertugas di Aceh Timur dia dapat menemui beberapa pimpinan dayah karena dia pernah belajar pada dayah tersebut dan salah satu diantara pimpinan dayah adalah saudaranya. Tetapi dia tidak sempat mendapat jawaban yang lebih detil karena disuatu sore ketika dia sedang duduk berbicara dengan seorang pimpinan dayah, ternyata terjadi kontak senjata antara TNI dan GAM kira-kira 500 meter dengan lokasi dayah tersebut. Karena itu mereka tidak dapat melanjutkan pembicaraan lagi dan bahkan pimpinan dayah tersebut menganjurkan agar teman saya pulang saja langsung malam itu ke Banda Aceh karena dikhawatirkan akan terjadi *sweeping*, sementara itu kendatipun teman saya berada di daerah kelahirannya tetapi dia sudah asing bagi orang-orang yang bertugas dalam bidang keamanan di daerah tersebut.

Sedangkan teman saya yang bertugas di Aceh Tengah tidak mengalami

apa-apa dan sanggup memperoleh sejumlah informasi yang ditanyakan. Dia tidak mengalami hambatan pertama karena dia mencari ulama yang berada di kota saja. Kemudian juga dia masih dikenal oleh orang kota Takengon karena ketika sebagai mahasiswa agak sering pulang, jadi mungkin mereka masih menganggap mahasiswa kendati pun sebenarnya dia telah menyelesaikan studinya S-1. Namun informasi yang di dapat tidak variasi karena tidak sempat mendapatkan bagaimana pengalaman ulama yang ada di desa.

Demikianlah kekurangan-kekurang informasi tersebut saya lengkapi sendiri dengan cara bergerilya. Kadangkala memang saya sendiri datang ke dayah atau ke rumah ulama tersebut. Tetapi sering juga saya mencari mereka di mana mereka sering singgah. Bahkan saya juga mencari informasi kalau-kalau ada acara yang disponsori oleh pemerintah mengundang ulama ke Banda Aceh atau atas undangan organisasi lain dan berkumpul di tempat lain pula. Walaupun demikian ada juga ulama yang benar-benar saya cari untuk mendapatkan informasi darinya tetapi sampai akhir laporan ini saya buat tidak saya temui.

Sampai saat akhir penelitian ini, ada ulama di Aceh yang masih tidak mau muncul di hadapan publik secara bebas, kecuali di beberapa tempat, itu pun tanpa terjadwal. Sebabnya adalah ada ulama yang memberi pendapat sebenarnya demi mencari solusi-solusi yang baik demi kedamaian dalam masyarakat tetapi bisa *missunderstanding* pada pihak-pihak tertentu yang sedang bertikai. Karena itu mereka terpaksa sangat hati-hati dalam perjalannya.

Di bawah ini saya ilustrasikan beberapa pengalaman bagaimana saya dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan yang isi wawancaranya

telah saya uraikan dalam hasil penelitian ini. Saya memperoleh informasi dari satu instansi bahwa akan ada ulama-ulama dayah yang akan diberangkatkan untuk studi banding ke beberapa pesantren di Jawa dan saya diberitahukan hotel tempat mereka menginap sementara di kota Banda Aceh. Bersama dengan salah seorang panitia saya datang ke hotel tersebut dan makan bersama mereka. Karena malam itu malam istirahat kami dapat berbicara panjang lebar. Diantara ulama yang datang pada malam itu ada yang sudah cukup akrab dengan saya, karena kebetulan saya pernah mengurus organisasi dayah yang salah satu diantara anggota organisasi tersebut adalah ulama yang ingin saya datangi ini. Ulama itu termasuk

ulama yang memiliki kharisma lebih kendatipun dia masih muda, dia keturunan dari ulama terkenal di Aceh dan kebanyakan ulama dayah di Aceh pernah

berguru dengannya. Kami terlibat percakapan dengan bermacam persoalan dayah yang kemudian sampai pada masalah situasi. Melihat saya akrab dengan dengan ulama tersebut, seorang temannya ikut nimbrung, yang pada awalnya hanya mendengar saja, tetapi ketika sampai pada tingkat tertentu yang mungkin menyentuh tiik emosionalnya dia juga ikut memberikan pendapat. Demikianlah saya pada malam itu mendapatkan dua pendapat ulama sekaligus dalam sekali wawancara mengenai situasi yang sedang dialami oleh masyarakat di Aceh.

Pada kesempatan lain, saya ke Aceh Utara khusus untuk penelitian ini. Sejak awal saya sudah merencanakan untuk menginap di Gues House PT. Aron dengan prediksi saya akan bertemu dengan beberapa ulama yang sering memberikan ceramah di sana. Benar saja pada malam pertama, saya menginap dan bertemu dengan seorang ulama muda, salah satu pimpinan dayah dalam wilayah Aceh Utara dan penceramah terkenal di masa lalu. Saya juga sudah kenal dengan ulama ini karena sering berbarengan ceramah di PT Arun pada masa-masa lalu. Setelah makan malam bersama, saya ikut ke kamarnya, lalu kami berbicara mengenai perkembangan dayah dan juga pada akhirnya tanpa disadari, pembicaraan telah sampai pada persoalan penelitian saya. Saya malah mendapat informasi yang sangat mengejutkan dari ulama ini. Ketika saya utarakan kepadanya saya ingin ke rumah seseorang ulama dalam wilayah Aceh Utara yang cukup saya kenal, ulama yang dihadapan saya, dengan wajah yang sangat serius mengatakan "jangan". Saya tidak menanyakan kenapa, tetapi setelah kami lama terdiam, ulama ini menjelaskan kepada saya. Rumah ini sedang dalam pantauan sesuatu pihak. Baru dua malam yang lalu, satu rombongan mobil menembak rumahnya, tetapi tidak ada yang cedera. Teungku sendiri tidak keluar sudah berapa hari. Sayapun membatalkan niat saya.

Selanjutnya saya mencari ulama di daerah agak terpencil dan di sana terdapat ulama yang masih mempunyai garis keturunan dengan saya. Ketika saya kemukakan niat saya, dia menyambut tetapi dia mempersilakan saya pulang dulu karena waktu hampir malam, besok dia suruh kembali lagi. Saya tidak diperkenankan menginap di rumahnya. Dia minta ditinggalkan daftar wawancara saja. Besok saya tidak sempat kembali, saya minta seorang kemenakan saya untuk mengambilnya, dia menjawab "belum siap". Sampai saat saya ingin menulis laporan ini dia tidak mengisinya.

Pada hari lain masih di Aceh Utara, saya menelpon seorang mahasiswa saya yang masih belajar di PPS IAIN Ar-Raniry. Saya minta bantuan dia untuk mendatangi beberapa ulama yang mungkin diwawancarai untuk kepentingan penelitian ini. Setelah saya berikan petunjuk, bahwa jangan bawa daftar wawancara dan jangan isi jawaban di depannya dia pun menyatakan sanggup. Saya memprediksi dia lebih mudah masuk ke wilayah teungku-teungku baik di dayah atau bukan, karena dia sendiri adalah salah seorang guru di dua dayah dan termasuk anggota Majelis Permusyawaratan Ulama. Saya menunggu dua hari untuk dua orang ulama tetapi tidak dapat disiapkan. Baru seminggu kemudian mengantarkan hasilnya ke Banda Aceh.

Sambil menunggu mahasiswa yang saya tugaskan untuk mewawancarai dua ulama yang ada di Aceh Utara itu, saya berkunjung pada salah satu teman saya di sekolah SLTA dahulu yang sekarang telah menjadi salah satu ulama terkenal di daerahnya. Pada awalnya kami saling melepaskan kangen-kangenan, tetapi kemudian kami juga terlibat pembicaraan masalah masa depan generasi anak Aceh. Di sini saya banyak sekali mendapat informasi mengenai ini. Rupanya ulama-ulama di daerah ini hampir secara berkala membuat pertemuan secara tidak formal, membicarakan situasi di Aceh dan usaha mencari solusinya. Diskusi mereka termasuk inten dan serius. Pernah sekali mereka saling membawa kitab fiqh dan tafsir untuk mencari bagaimana teks-teks agama baik tafsir maupun fiqh menjelaskan persoalan ini.

Barangkali ada baiknya bila saya menjelaskan pengalaman saya mencari informasi di Aceh Timur. Dengan alasan sebuah keperluan yaitu mengadakan evaluasi suatu proyek pembangunan ekonomi masyarakat desa, saya sempat mewawancarai satu ulama yang masih aktif mengajar dan salah seorang penggerak lapangan dalam proyek ini. Banyak murid-murid pengajiannya di masa lalu, sekarang sedang aktif di gerakan untuk memerdekakan Aceh. Setelah kami meninjau lapangan, saya mengajak dia ke hotel tempat saya menginap. Karena di tempat tertutup dan dia juga sangat serius sedang berusaha melakukan *islah da'i* menceritakan semua apa yang telah pernah dilakukan secara diam-diam untuk menciptakan perdamaian diantara mereka.

Selesai mewawancarai dia saya juga meminta bantuannya untuk mempertemukan saya dengan seorang ulama lain yang saya kenal dan dia juga kenal saya. Mungkin dia telah menyatakan tujuan saya pada ulama tersebut, kemudian saya mendapat jawaban bahwa dia agak sibuk dan tidak sempat hari ini. Saya menunggu satu hari lagi, tetapi dia juga tetap mengatakan tidak sempat. Pada hari ketiga saya menghubungi lagi, katanya dia tidak sempat karena besok dia ingin ke Banda Aceh. Saya tawarkan berangkat bersama ke Banda Aceh melalui darat. Dia menolak, karena dia akan berangkat dengan pesawat melalui Medan.

Saya mencari informasi di mana dia berada di Banda Aceh. Akhirnya saya temui dia di sebuah kafeteria di sebuah wisma di Banda Aceh. Dia memang tidak banyak berbuat, karena kendati pun dia seorang ulama tetapi terikat dengan pemerintah. Namun dia banyak sekali tahu tentang kegiatan seorang ulama, - teman yang sangat akrab dengannya, - mengenai usaha untuk meredam konflik yang sedang terjadi sekarang di Aceh. Dia juga minta maaf tidak memberi kesempatan kepada saya bertemu di Aceh Timur karena dia tahu apa yang saya inginkan yaitu untuk memperoleh informasi tentang usaha ulama dalam meredam konflik, dan itu dianggap sangat berbahaya jika diketahui oleh orang lain. Saya juga menduga informasi yang diberikan kepada saya tentang pengalaman seorang ulama temannya, - yang saya juga kenal, - termasuk dirinya. Tetapi dia selalu berusaha membersihkan dirinya dari aktivitas tersebut.

Satu lagi, mungkin menarik saya uraikan di sini bagaimana seorang ulama menyembunyikan sesuatu kepada saya karena dia sebelumnya tidak mengenal saya. Di sebuah pertemuan ulama-ulama di Banda Aceh, saya ingin bertemu seseorang yang saya kenal, tetapi ketika itu dia tidak muncul. Di ruang makan sebuah hotel saya turut makan kebetulan hanya sebuah kursi yang kosong lalu saya memilih kursi yang berhadapan dengan seorang teungku. Diawal saya duduk saya sudah memperkenalkan diri bahwa saya utusan dari sebuah organisasi ulama, dia hanya mengangguk dan mempersilakan saya.

Tidak banyak pembicaraan yang terjadi karena ketika saya tanya sesuatu, dia selalu menjawab singkat. Termasuk ketika saya tanya bagaimana situasi di jalan ketika pergi ke Banda Aceh dia jawab singkat. "Aman". Bagaimana kemajuan pendidikan di dayah sekarang? "Biasa". Apakah tidak terganggu dengan situasi sekarang? "Biasa". Apakah kedua belah pihak tidak pernah

meminta bantuan teungku untuk melancarkan tugas-tugas mereka? “Tidak, saya tidak kenal mereka. Mereka juga tidak kenal saya”. Saya sudah merasa lelah untuk bertanya, lalu kami sama-sama menyelesaikan makan malam.

Sebentar kemudian seorang teungku turun dari tingkat dua hotel tersebut, lalu bersalaman dengan memeluk saya. Ulama teman saya ini juga memperkenalkan saya lagi kepada teungku yang tadi terlibat bicara dengan saya. Dia tersenyum. Kami terlibat pembicaraan dengan teungku yang baru ketemu. Dan yang ringan-ringan sampai yang serius masalah situasi, lalu teungku tadi yang terkesan merahasiakan sesuatu, akhirnya mengaku juga bahwa kedua belah pihak yang bertikai selalu datang kepadanya, paling tidak memohon petunjuk dan do'a semoga mereka selamat dalam menjalankan tugas. Malah satu kali, pernah GAM terkepung, yang menurut perhitungan mereka sulit lolos. Lalu seseorang datang meminta agar teungku tersebut mau berdo'a agar mereka selamat dapat hidup bersama keluarga lagi. Dan teungku itu bersedia.

Pandangan masyarakat terhadap posisi ulama di masa konflik.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ulama di masa konflik ada beberapa aspek yang kita lihat. *Pertama* masalah komunikasi ulama dengan masyarakat. *Kedua* mengenai peran ulama dalam penyelesaian konflik. *Ketiga* saran masyarakat kepada ulama agar menempuh upaya lain untuk meredam konflik misalnya dengan menerapkan syariat Islam.

Hubungan ulama dengan masyarakat

Dalam situasi normal di Aceh sudah menjadi tradisi ulama saling mengunjungi baik itu karena diundang maupun tidak. Ulama dayah sesama alumninya atau satu wadah organisasi sering saling bersilaturahmi. Terutama antara murid dan guru. Murid dalam situasi tertentu misalnya hari raya, kenduri tertentu atau ada musibah, akan mengunjungi gurunya. Sementara guru sering mengunjungi muridnya atas undangan muridnya atau kebetulan lewat tempat tinggal muridnya. Demikian juga jika ada peristiwa tertentu seperti ada kenduri atau musibah. Sementara ulama yang tinggal di desa mengunjungi masyarakatnya lebih sering karena berbagai aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan agama selalu mengharapkan kehadiran ulama.

Selama masa konflik komunikasi ulama dengan masyarakat masih berjalan baik. Artinya sebagian besar masyarakat menyatakan masih seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan mengatakan hubungan mereka cukup harmonis dan menyenangkan. Hampir tidak ada yang mengatakan kurang harmonis dan tidak ada sama sekali yang mengatakan tidak harmonis. Sebagian besar masyarakat mengatakan mereka kadang-kadang masih dikunjungi oleh ulama. Dalam jumlah yang kecil sekali malah mengatakan mereka dikunjungi selalu. Yang menyatakan dikunjungi selalu mungkin keluarga-keluarga yang dekat dengan ulama saja. Tetapi ada juga yang

mengatakan tidak pernah dikunjungi. Kelompok yang terakhir itu sangat mungkin hidupnya terpisah dari ulama dan mungkin juga di daerah yang hubungan kemasyarakatan sudah tidak seakrab di desa lagi.

Kunjungan ulama ini penting artinya di masa konflik. Masyarakat sedang hidup dalam keadaan depresi karena situasi yang selalu tegang. Dengan kunjungan ulama ini, baik itu hanya tegur sapa maupun singgah di rumah lalu terjadi dialog yang agak panjang dapat menjadi penawar bagi masyarakat. Setidak-tidaknya masyarakat mempunyai tempat dan kesempatan untuk mengeluarkan keluhan-keluhannya. Demikian juga sudah menjadi tradisi ulama lalu memberi nasehat yang sering menenangkan jiwa mereka.

Peranan ulama dalam Penyelesaian Konflik

Untuk melihat bagaimana peran ulama kita dalam konflik selama ini berdasarkan penilaian masyarakat akan kita gambarkan sebagaimana didiskripsikan oleh responden dari penelitian ini. Mereka menganggap fungsi ulama adalah mengajar ajaran agama, memberi nasehat, memberi fatwa dan menciptakan kedamaian, membawa manusia kearah yang lebih baik. Mengajar agama, memberi nasehat dapat digolongkan sebagai tugas mendakwahkan agama kepada orang lain. Memberi fatwa maksudnya ulama harus menentukan dan menetapkan hukum tertentu, sesuai dengan ajaran Islam sebenarnya dalam keadaan apapun. Dalam masalah menciptakan kedamaian lebih jauh mereka memberi alasan karena untuk meredakan konflik yang ada dalam masyarakat kecil atau besar harus diadakan pendekatan melalui pendekatan keagamaan. Ulama juga tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya untuk menciptakan kedamaian seperti terjadi di Aceh sekarang, meski menanggung resiko.

Berdasarkan pendapat mereka mengenai fungsi ulama seperti yang tersebut di atas, sebagian besar masyarakat menilai ulama sekarang kurang berperan dalam menyelesaikan konflik dengan bermacam alasan. Ada yang sangat negatif dengan mengatakan bahwa ulama sekarang tidak lagi mencari ridha Allah dan tidak berani berkata yang benar. Ada juga yang memberi alasan yang kondisional misalnya sebagian ulama sudah pudar citranya karena telah diperalat oleh kelompok tertentu baik di masa orde baru mau pun di masa konflik ini. Namun masih banyak juga yang memberi alasan yang cukup seimbang misalnya kurang berperannya ulama, karena tidak diajak untuk menyelesaikan konflik. Hampir tidak ada yang mengatakan ulama tidak berperan sama sekali.

Bagaimanapun juga masih ada (sebagian kecil) masyarakat yang menganggap ulama berperan dalam menyelesaikan konflik selama ini, dengan alasan misalnya ulama masih didengar ketika diberi nasehat kepada masyarakat sipil mau pun yang terlibat konflik. Demikian juga malah ada yang memberi argumen, sejumlah terobosan telah diajukan oleh ulama-ulama dalam rangka mendamaikan kelompok yang bertikai, seperti melakukan perundingan-perundingan baik di dalam negeri mau pun di luar negeri. Cuma saja mereka tidak sering diajak. Mengenai tidak diajak, responden tidak tahu

sebabnya, tetapi menurut analisa penulis mungkin mereka khawatir tidak membawa keberuntungan kepada mereka yang bertikai.

Mengenai apakah ulama masih dianggap perlu mengambil bagian dalam rangka menyelesaikan konflik di Aceh. Hampir semua responden menjawab sangat perlu. Tidak ada yang menjawab tidak perlu. Berbagai alasan dikemukakan untuk argumen jawaban mereka. Misalnya karena ulama sejak zaman dahulu telah sangat terkenal dan menjadi panutan masyarakat di Aceh dan sampai sekarang pun masih dihormati fatwanya. Yang dikatakan ulama, harus melakukan pencegahan terhadap pekerjaan jahat dan mengajak kepada yang benar. Mereka juga memprediksikan jika ulama langsung turun, sedikit banyaknya ada yang segan dan memperhatikan ulama sehingga mereka akan menghentikan konflik tersebut. Bila persoalan konflik selama ini diselesaikan oleh orang-orang yang terlibat dalam masalah politik saja dikhawatirkan mereka mementingkan golongannya sendiri. Ulama relatif lebih bersih dari tujuan tersebut. Demikian juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah pada tingkat yang rendah sekali, tetapi ulama masih sangat besar kepercayaan masyarakat kepadanya.

Ulama juga dianggap sebagai kompoenen penting yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat Aceh dan mereka akan dapat memberi saran-saran dalam persoalan konflik karena ulama lebih mengetahui liku-liku moralitas, kemauan rakyat Aceh. Ini mungkin dimaksudkan karena ulama memang sering menyatu dengan masyarakat sehingga mereka tahu betul dengan situasi rakyat. Ulama tahu apa yang diderita oleh masyarakat. Ulama tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ulama juga mengenal dan dekat dengan aparat-aparat RI, ulama juga mengenal bahkan ada yang dekat hubungannya dengan sebagian anggota atau pimpinan GAM. Karena itu ulama sangat mungkin efektif jika dijadikan sebagai salah satu komponen dalam penyelesaian konflik ini.

Mengenai konflik Aceh yang belum selesai sampai saat penelitian ini dilakukan ada yang berpendapat, bahwa ulama selama ini hanya berpangku tangan, tidak berperan seperti dulu. Tetapi jawaban ini hanya dari jumlah kecil responden. Sangat mungkin mereka tidak mengetahuinya karena kurang berhubungan dengan ulama-ulama yang aktif dalam persoalan penyelesaian ini. Dan memang secara umum ulama-ulama di desa kebanyakan diam saja dalam persoalan ini. Sangat mungkin persoalan yang muncul sekarang diluar kemampuan berpikirnya atau memang ulama tersebut tidak suka mengurus masalah politik, karena dia berprinsip masalah pengajian adalah masalah lebih penting dari yang lain.

Ada aspek lain yang juga menurut responden kenapa ulama tidak aktif menyelesaikan konflik saat itu, karena ulama sudah pernah terlibat ke dalam masalah tersebut dengan tujuan menciptakan perdamaian kedua belah pihak berdasarkan ajakan dari pihak TNI. Tetapi ketika itu apa yang diusahakan oleh ulama kemudian menurut orang-orang yang diajak oleh ulama tersebut tidak diperlakukan sewajarnya oleh aparat RI. Sehingga mereka yang sudah ikut turun marah kepada ulama, bahkan juga masyarakat yang tahu tentang persoalan ini juga marah kepada ulama-ulama tersebut.

Sebagian besar menjawab ulama ikut berperan, namun belum berhasil

dan perlu waktu. Yang menjawab hal ini adalah mereka yang memperoleh keterangan melalui surat kabar dan majalah-majalah yang melihat sejumlah ulama selalu aktif memberikan pendapat atau menyeru agar kedua belah pihak agar menggunakan hati nurani dan menghentikan permusuhan agar tidak jatuh korban manusia yang tak berdosa. Mereka juga mengenal seseorang ulama yang aktif mengajak damai antara kedua belah pihak yang bertikai. Misalnya kalau pemerintah/TNI/POLRI mengajak ulama untuk membujuk agar anggota GAM turun dan berdamai agar tidak terjadi lagi konflik, ulama itu aktif menemui kedua belah pihak untuk usaha itu, namun kemudian ketidak ikhlasan pihak yang bertikai ini membuat konflik tidak dapat diselesaikan kemudian.

Sebagian besar responden menginginkan agar ulama mengeluarkan fatwa dalam persoalan konflik ini dan mereka merasa sangat perlu. Mungkin mereka ingin ulama menyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebagian kecil sekali yang menyatakan tidak. Karena ulama tidak mengeluarkan fatwa inilah kemudian sebagian masyarakat ulama tidak berani lagi. Padahal persoalannya bukan pada berani atau tidak tetapi sulit untuk menyatakan mana yang salah. Menurut seorang ulama yang diwawancarai, mereka memberi contoh persoalan yang ada sekarang seperti kita melihat seorang imam yang sedang shalat menghadap ke barat dan dua *shaf* makmum di belakangnya menghadap ke utara dan selatan. Kalau kedua makmum masing-masing *shaf* bertanya kepada ulama mana *shaf* yang benar, tentu kita tidak dapat memberi fatwa mana yang benar.

Responden menganggap untuk penyelesaian konflik ini hendaknya dilibatkan berbagai pihak. Namun yang lebih banyak mereka pilih adalah ulama, intelektual/aktivis perguruan tinggi, tokoh masyarakat dari rakyat Aceh sendiri, pemerintah, LSM, TNI/POLRI dan GAM. Yang menarik perhatian untuk orpol hanya dipilih oleh 8 orang dari seratus responden, PBB cuma 3 orang, HDC, OKI masing-masing 1 orang. Nampaknya saat itu orang begitu tidak percaya pada HDC dan bahkan OKI.

Upaya-upaya lain yang mungkin ditempuh

Ada beberapa upaya lain yang mungkin ditempuh dalam usaha penyelesaian konflik ini. Misalnya responden menyarankan agar dilaksanakan syariat Islam secara *kaffah*. Saran ini merupakan pendapat yang lebih banyak. Semua responden sependapat, jika pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* telah dapat direalisasikan di bumi Nanggroe Aceh Darussalam sangat mungkin ketegangan ketegangan di Aceh akan menurun drastis.

Saran lain juga diinginkan agar peran ulama dihidupkan kembali seperti masa dulu. Yang menginginkan ini mungkin menganggap selama ini secara sadar ada pihak-pihak yang menggeser kedudukan ulama dalam masyarakat. Termasuk dalam penyelesaian konflik ini kalau pun diajak ulama untuk menyelesaikannya tetapi tidak sepenuh hati. Karena ulama sering berbicara lurus apa adanya yang sering mengakibatkan posisi sulit bagi yang bertikai.

Saran selanjutnya adalah kesempatan yang diberikan agar rakyat menentukan sendiri nasibnya. Saran keinginan mereka adalah agar diadakan

referendum, sehingga semua rakyat Aceh menyatakan apa keinginannya. Pertama apakah mereka masih ingin bergabung dengan Negara Republik Indonesia atau pisah dengan NKRI. Demikian juga apakah mereka mengikuti GAM atau merdeka rakyat menentukan sendiri kemerdekaannya.

Persoalan lain yang sempat mencuat di kalangan responden adalah masalah pelaksanaan hukum. Mereka menginginkan adanya kepastian hukum. Mungkin persoalan inilah yang membuat semua ragu-ragu bertindak. Masyarakat susah mau berbuat apa, karena selama konflik terjadi tidak ada kepastian hukum. Mungkin suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dianggap baik tetapi kalau tidak baik oleh pihak lain terutama sekali pihak-pihak yang bertikai, maka mereka akan menerima resiko yang tidak tanggung-tanggung.

Aspirasi Ulama Terhadap Penyelesaian Konflik

Pada penjelasan ini akan disajikan mengenai aspirasi ulama sendiri mengenai penyelesaian konflik yang pembahasannya meliputi: peranan ulama dalam masyarakat, sikap proaktif ulama dalam penyelesaian konflik, penyelesaian melalui dialog dan berbagai upaya lain yang ditempuh.

Peranan Ulama dalam Masyarakat

Tugas utama ulama menurut versi ulama sendiri adalah mendidik masyarakat dalam bidang agama atau sesuatu kepada mengenal Allah, melaksanakan segala perintah-Nya, perintah rasul-Nya dan mampu menjalankan ibadah-ibadah serta berakhlak mulia. Tugas selanjutnya adalah dakwah dalam arti mendakwahkan agama kepada masyarakat luas di mana saja berada baik diundang ataupun tidak. Beda antara mendidik dan mendakwah adalah mendidik dalam arti peserta pengajian khusus baik di dayah atau tempat lainnya, sedangkan dakwah dengan mengadakan ceramah dan pesertanya insidental demikian juga pelajarannya tidak tersusun secara sistimatis. Dan biasanya juga topiknya yang sedang muncul dipermukaan masyarakat, adakalanya untuk membicarakan bagaimana melaksanakan sesuatu ke arah yang lebih baik (*khair*), melarang atau mencegah sesuatu yang tidak baik yang terjadi hari-hari dalam masyarakat. Anjuran sering dalam bidang ibadah dan berakhlak baik sedangkan larangan sering dalam perbuatan mungkar seperti syirik, maksiat atau pekerjaan fasiq lainnya. Dakwah ini kadang kala memang secara formal diundang oleh sekelompok orang tetapi kadang kala juga secara informal ketika memberi nasehat kepada seseorang atau suatu rumah tangga.

Sehubungan dengan tugas memberi nasihat, ulama juga sering melerai orang yang berselisih dalam masyarakat, baik karena hanya berbeda pandang, maupun bersengketaan berat bahkan sampai perkelahian. Ulama sering menjadi salah satu elemen penting ketika melerai perselisihan dalam masyarakat selain perangkat desa. Ulama pula yang dipercaya untuk memberikan arahan-arahan yang menyejukkan jika persengketaan itu sempat menimbulkan hubungan memanas atau merenggang diantara kelompok

masyarakat, atau antara satu keluarga dengan keluarga lainnya bahkan antara seorang suami dengan isterinya dalam sebuah rumah tangga.

Selanjutnya, Ulama juga sering bersilaturahmi dengan anggota masyarakat. Silaturahmi dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada kala memang ulama mengunjungi masyarakat atau rumah tangga tertentu. Tetapi yang lebih biasa adalah teungku mengundang masyarakat pada kenduri tertentu di rumahnya. Dengan demikian, ulama dapat bersilaturahmi sekaligus bersama beberapa orang dan itu juga sekaligus memberi contoh kemurahan hati seorang mukmin dengan memberi makan fakir miskin.

Peranan lain yang dimainkan oleh ulama adalah mengurus mesjid. Berbagai lini persoalan mesjid biasanya di pegang oleh ulama. Mulai sebagai panitia pembangunan. Dalam badan ini biasanya ulama duduk sebagai pemberi semangat, misalnya sebagai pengarah atau penasihat. Ini tujuannya selain menghormati ulama juga pemancing penyumbang dana. Karena kalau ada ulama penyumbang lebih yakin, baik untuk kejujuran atau tepat sasaran juga faktor psikologis merasa puas karena ulama yang menerimanya. Seperti kalau ulama yang terima mereka langsung dilihat oleh Tuhan. Tidak jarang mereka sendiri bertindak sebagai ketuanya, bahkan juga termasuk menjadi pencari dana langsung menghadap penyumbang baik secara pribadi atau lembaga seperti perusahaan atau lembaga pemerintah.

Lini lain di mesjid adalah Badan Kemakmuran Mesjid (BKM). Beda BKM dengan panitia pembangunan adalah BKM lebih kepada usaha memakmurkan mesjid sedangkan panitia pembangunan sebagai usaha pembangunan fisik. Dalam hal ini juga sering ulama didudukkan sebagai pemberi semangat baik sebagai penasihat atau ketua umum. Kalau pun didudukkan sebagai ketua umum biasanya beliau hanya menyetujui saja apa yang diprogramkan. Yang bekerja hari-hari adalah wakil ketua serta seksi-seksi dari panitia tersebut. Tidak dapat dipungkiri mereka juga sering langsung terlibat sebagai pekerja aktif.

Suatu hal yang tidak mungkin tidak adalah sebagai imam, baik imam mesjid mau pun imam di meunasah. Tidak pernah terjadi orang lain yang diangkat sebagai imam kalau ulama masih ada. Sebagai imam baik imam di mesjid maupun di meunasah mereka sekaligus bekerja sebagai pelaksana ritual keagamaan misalnya, memimpin pernikahan, menjadi pembagi warisan dan juga pelaksana *tahyiz* mayat, mulai dari memandikan, mengkafankan, memimpin shalat mayit, menguburkan, sampai memimpin do'a baik ketika di perkuburan mau pun *samadiyah* ketika *ta'ziah* ke rumah duka.

Tugas yang umum diemban oleh ulama adalah memimpin lembaga pendidikan agama. Sebagian besar diantara mereka adalah memimpin dayah. Memang selama ini ulama identik dengan pimpinan dayah. Kalau pun tidak memimpin dayah,²⁹³ mereka memimpin sebuah pengajian yang relatif kecil dibandingkan dayah. Dalam hal memimpin dayah sudah biasa ulama tersebut melakukan sendiri kegiatan pembangunan dayah. Artinya ulamalah

²⁹³ Kalau sudah disebut dayah, biasanya sudah merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi di kalangan ulama dayah. Maksudnya ditempat itu tidak lagi hanya belajar membaca Al-Qur'an dan Fiqih dasar ibadah, tetapi telah meningkat kepada fiqih lebih tinggi lagi dan bahkan kitab-kitab yang berbahasa Arab tanpa baris.

penggerak untuk mendirikan dayah, bahkan juga sampai menghidupkannya. Kecuali dayah-dayah modern yang sudah dimenej dengan manajemen modern yaitu memisahkan antara pengurus yayasan dengan guru-guru yang bertugas mengajar. Sedangkan di dayah tradisional biasanya, ulama pemimpin dayah tersebut bertugas mulai dari membangun dayah, mencari murid, mencari guru, mengajar sampai mengurus jalannya dayah.

Sebagian dari ulama aktif di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), sebagai sebuah badan yang menghimpun ulama untuk memikirkan arah berjalannya pemerintah daerah di Aceh. Sebagian diantara mereka bertugas sebagai Dewan Purna Ulama (DPU) yaitu sebagai penggali dan pemberi fatwa hukum untuk keperluan umat di Aceh. Sebagian diantara mereka terlibat kedua-dua institusi ini sebagian diantara mereka hanya terlibat satu diantara dua institusi tersebut. Kendati pun antara MPU dan DPU disebut dua institusi tetapi sebenarnya mereka satu yaitu MPU sebagai organisasi induk sedangkan DPU sebagai majelis fatwanya.

Lembaga keagamaan lainnya yang terlibat ulama adalah Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedeqah (BAZIS). Kalau pun tidak secara keseluruhan pada badan ini terlibat ulama tetapi setidaknya-tidaknya majelis pakarnya terdiri dari ulama. Majelis pakar disini bertugas memberi arah pada kebijaksanaan perekrutan dan pendistribusian zakat. Karena dalam masalah zakat kadang-kadang diambil kebijaksanaan sesuai dengan situasi masyarakat yang berkembang di sekeliling *muzakki*, apakah itu fakir miskin atau senif-senif lainnya. Sesuai dengan perkembangan pendistribusian zakat dan infaq ini selalu berubah-ubah kebijaksanaanya.

Sebagian diantara mereka adalah mengajar di universitas-universitas. Yang mengajar di universitas-universitas tidak hanya lulusan universitas, tetapi juga lulusan dayah, namun sanggup mengajar di universitas. Tidak dipungkiri, umumnya yang mengajar di universitas tersebut tamatan universitas, kendati pun sebelumnya adalah alumnus dayah.

Para ulama di Aceh juga banyak yang aktif di organisasi kemasyarakatan, terutama sekali yang berwarna agama seperti Persatuan Dayah Inshafuddin, Darussa'adah, Himpunan Ulama Dayah, Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI), Nahdatul Ulama, Alwasliyah. Kebanyakan diantara mereka berkedudukan sebagai Dewan Pakar atau Majelis Syura. Tetapi untuk organisasi Inshafuddin, Darusaa'dah dan Huda, mereka sendiri sebagai eksekutifnya. Sebagian mereka juga aktif di organisasi politik, demikian juga kebanyakan di organisasi politik yang berbau agama. Kalaupun ada di organisasi politik yang tidak berorientasi agama biasanya terjadi karena suatu keterpaksaan, atau karena tokoh ulama tersebut sudah mampu berpolitik secara murni.

Sebenarnya ada peranan lain yang dimainkan oleh ulama-ulama di Aceh yang kurang terpantau oleh masyarakat umum yaitu kegiatannya pada tingkatan *high* politik. Ulama ini sering memberi arah kebijakan pemerintah secara tidak langsung, karena mereka sering membuat *approach* secara pribadi karena kemampuannya dalam membuat pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap signifikan dalam menentukan arah negara ini. Aktivitas ini tidak dapat dilakukan oleh semua ulama hanya ulama-ulama tertentu saja yang mempunyai kemampuan melakukannya.

Mereka biasanya memiliki kharisma lebih dari yang lain dan kemudian memiliki diplomasi yang tinggi dalam memberi pemikiran-pemikiran kepada pihak yang dianggap signifikan.

Aktivitas ulama sebagai pimpinan dayah/pengajian, pendakwah atau pemberi nasihat di dalam masyarakat ulama telah berfungsi sebagai pengawal agama dan pengayom masyarakat dari krisis agama dan krisis akhlak. Walaupun mereka aktif di organisasi baik itu ormas maupun di orpol mereka juga selalu konsern dengan agama masyarakatnya. Mereka selalu menjadi benteng atau rem dari ketersesatan umat baik yang mengarah ke arah musyrik atau ke pekerjaan *fasiq* dan maksiat.

Sikap Proaktif Ulama Dalam Penyelesaian Konflik.

Ulama ternyata memiliki sikap proaktif termasuk dalam masalah penyelesaian konflik ini. Persoalan kemudian adalah apakah mungkin atau tidak, namun sebagian mereka menganggap tidak mungkin. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh yang memberi jawaban tidak mungkin. *Pertama* konfliknya sudah kronis sekali. *Kedua*, pertentangan tidak lagi hanya vertikal tetapi juga horizontal. *Ketiga* pertentangan tidak hanya lagi menyangkut persoalan ekonomi, politik dan idiologi, tetapi juga telah merasuk pada sangat pribadi yaitu dendam. *Keempat*, hampir tak ada golongan bahkan perorangan yang dapat kita pegang. *Kelima*, kita tidak tahu lagi mendamaikan siapa, karena yang bertikai itu bermacam-macam motivasinya, ada yang balas dendam karena keluarganya korban, lebih-lebih lagi yang korban itu ayahnya sendiri di masa DOM yang sampai sekarang tidak diketahui di mana kuburannya. Ada yang berpendapat, peminintah Jakarta selalu menipu kita, kita tidak tahan lagi terus menerus ditipu. Ada juga diantara yang bertikai menginginkan agar konflik itu terus berlanjut demi mencari kekayaan dan pangkat.

Sebagian mereka menganggap masih mungkin jika pikiran-pikiran mereka masih dibutuhkan. Sebab kenyataan selama ini sepertinya kedua belah pihak yang bertikai tidak mau mendengar lagi pikiran-pikiran ulama. Hal ini pun ada beberapa alasannya sehingga terjadi seperti itu. *Pertama*, beberapa tindakan orang-orang yang bertikai sering tidak lagi pada jalur-jalur agama, sehingga sulit diberi nasehat agar mereka tidak melakukan seperti itu. Tetapi mereka tetap melakukannya tanpa diketahui apa latar belakang pernikirannya, karena itu nasehat ulama seperti menghambat gerakan mereka. Itulah sebabnya mereka kemudian tidak mau mendengar pendapat ulama. *Kedua*, kedua belah pihak yang bertikai sepertinya telah mencurigai ulama berpihak kepada lawan mereka. Ini dirasakan karena sering pendapat yang diberikan bertentangan dengan kehendak mereka. Padahal ulama telah menjelaskan apa adanya demi lurus menurut agama. Namun dalam hal ini para ulama masih dianggap dapat menjalankan fungsinya untuk penyelesaian ini misalnya dengan berdoa.

Sebagian lagi mereka sendiri merasa sangat perlu aktif dalam penyelesaian konflik ini, alasannya karena usaha tersebut merupakan usaha untuk kepentingan bersama. Mereka sangat prihatin pada situasi selama ini

karena konflik yang berkepanjangan telah mengakibatkan jatuhnya korban harta dan jiwa rakyat sipil terus menerus serta terpuruknya pendidikan dan ekonomi. Namun responden (ulama) menekankan semua komponen harus memainkan perannya masing-masing sesuai fungsi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Karena pertikaian yang terjadi sekarang ini kompleks maka semua pihak harus mencurahkan tenaga, pikiran bahkan harta agar konflik ini selesai. Misalnya ulama dapat bergerak dengan memperkuat aqidah umat, mereka memperdalam kajian ajaran agama kepada umat agar mereka tidak suka dendam, tidak suka berbuat kezaliman, mau memaafkan saudaranya dan tidak memutuskan silaturahmi. Ulama ini malah mengatakan jika kita tidak berbuat sesuatu untuk penyelesaian berarti kita setuju dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan malapetaka ini. Dan sangat mungkin di masa akan datang lebih besar lagi.

Diantara para ulama itu ada yang menangkap bahwa diantara yang bertikai ada yang karena dipengaruhi oleh hawa nafsu. Pertikaian yang dimunculkan oleh hawa nafsu dapat mengakibatkan musnahnya sejumlah manusia dan dapat merusak persaudaraan. Aspek ini adalah menjadi bagian ulama. Ulama bertanggungjawab terhadap keselamatan manusia dari akibat gangguan saudaranya sendiri dikarenakan hawa nafsu. Memang ulamalah yang tepat untuk meluruskan niat yang sudah menyeleweng diantara umat ini.

Ada juga diantara mereka yang melihat bahwa konflik ini telah mengakibatkan terganggu dan menurunnya aktivitas dayah, kalau tidak dapat dikatakan terbengkalai. Karena faktor keamanan, murid-murid dayah ada yang tidak mau merantau lagi jauh-jauh, apalagi kalau mereka tidak berasal dari Aceh atau tidak dapat berbahasa Aceh. Kadang-kadang aktivitas mereka yang bertikai juga dekat dengan dayah sehingga efeknya terjadi terhadap murid dayah. Pernah sekali, bendera GAM dinaikkan dekat dengan dayah, lalu aparat keamanan menanyakan pada murid dayah. Sudah biasa, kalau aparat keamanan yang bertanya biasanya dengan cara kasar dan tindakan-tindakan yang menakutkan. Hal ini membuat anak-anak dayah mengosongkan dayah dan pulang kampung atau dijemput keluarganya.

Penyelesaian melalui Dialog

Mengenai usaha penyelesaian konflik melalui dialog, ulama melihat dengan beberapa sudut pandang. Barangkali ada diantara mereka yang melihat berdasarkan pengalaman selama ini sehingga ada yang berpendapat tidak banyak yang dapat diharapkan dari dialog tersebut. *Pertama*, diantara alasan mereka adalah pihak yang berdialog²⁹⁴ selama ini tidak memperlihatkan keseriusan. *Kedua*, tidak terlihat suatu keikhlasan hati diantara dua pihak yang berdialog. *Ketiga*, kenyataan di lapangan juga, sedang proses dialog, sedang terjadi penculikan, pembunuhan malah menangkap personal-personal yang telah dipercaya menjadi juru rundingnya. Kalau dilihat pada jawaban responden nampaknya ulama lebih banyak mendukung adanya dialog untuk penyelesaian konflik ini. Ada beberapa

²⁹⁴ Dialog ini maksudnya adalah hasil usaha mediator Human Donand Center (HDC)

alasan yang dikemukakan mereka sehingga mereka mendukung dialog ini. *Pertama*, dialog itu dapat dilakukan dengan penuh konsep-konsep berdasarkan dari pikiran mereka sebagai hasil renungan selama ini. *Kedua*, dialog itu biasanya akan dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki sikap-sikap bijaksana. *Ketiga*, berdialog adalah sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat, yaitu dengan bermusyawarah. Karenanya usaha itu jika dilakukan dengan niat yang benar pasti akan di berkahi dan diberi jalan keluar oleh Allah swt. Paling tidak dialog itu akan menjadi angin segar dalam masyarakat, kendatipun dialog bukan satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian, tetapi dialog merupakan salah satunya jawaban diantara sekian banyak jawaban yang dapat menghilangkan beban yang dipikul oleh masyarakat selama ini.

Cuma saja ada beberapa harapan ulama agar dialog itu memiliki makna. *Pertama* personal dan unsur yang berdialog itu harus mewakili elemen masyarakat tertentu yang ada dalam masyarakat Aceh. *Kedua* personal tersebut memiliki intergritas yang dapat dipercaya paling tidak oleh kelompok yang diwakilinya. *Ketiga*, mereka memiliki niat yang baik bahwa apa yang dilakukan harus karena Allah. Hal itu semua dalam rangka menghasilkan keputusan-keputusan yang betul-betul dapat mengayomi rakyat dan semua keputusan mengarah kepada semua perlakuan dari negeri ini sesuai dengan Islam.

Kalaulah dialog dapat dilakukan seperti harapan mereka itu, ulama mendukung sepenuhnya. Maksudnya, pertama-tama mereka akan berdo'a semoga Allah memberi berkah kepada mereka yang berunding dan berhasil dengan baik. Dan selanjutnya mereka akan turut serta dalam mensosialisasikannya ke tengah-tengah masyarakat. Seperti biasanya kalau sudah ulama yang mensosialisasikan sesuatu maka bagi masyarakat Aceh semua itu akan mudah diterima.

Sebagai pengalaman juga selama ini dialog-dialog yang pernah dilakukan tidak berjalan efektif, menurut ulama diperlukan suatu kekuatan lain selain unsur yang bertikai. Unsur lain ini dimaksudkan ada elemen lain yang memiliki kekuatan memaksa jika mereka tidak tunduk pada keputusan-keputusan. Memang ulama dihargai oleh rakyat di Aceh juga pada hakikatnya oleh orang-orang yang bertikai tetapi ulama tidak memiliki kekuatan paksa jika mereka bertikai menggunakan senjata. Ulama hanya dapat memberi *statemen-statemen* atau fatwa dan juga nasehat-nasehat, tetapi itu dapat dilakukan di kala situasi normal-normal saja. Tetapi ketika mereka sedang memegang senjata dan dalam keadaan dikuasai nafsu maka dibutuhkan kekuatan lain diluar dua pihak yang bertikai, sehingga keputusan-keputusan yang diputuskan tetap dapat dijalankan secara efektif.

Usulan lain yang mungkin ditempuh

Ada beberapa hal yang diusulkan sebagai upaya lain yang dapat ditempuh untuk penyelesaian konflik ini. *Pertama*, ulama meminta kepada masyarakat semua agar mengintrospeksi diri apa yang telah dilakukan selama ini baik

yang di lakukan dengan sengaja atau tidak telah memicu konflik ini. Dengan renungan ini, boleh jadi dapat menemukan sesuatu yang salah sehingga kita akan dapat memperbaikinya. Mungkin saja ulama kurang aktif selama ini, mungkin juga kelompok-kelompok tertentu pernah membuat kelompok lain kecewa sehingga memunculkan aksi-aksi dari kekecewaan.

Kedua, seperti sering didengar selama ini pemerintah sering mengecewakan rakyat, apakah karena praktek kotor seperti Korupsi, Kolusi ataupun Nepotisme. Karenanya, hendaknya ulama juga lebih giat membuat pendekatan dengan pemerintah kemudian memberi *advis*. kepada pemerintah agar pemerintah dapat mengubah *imej* selama ini ke arah yang lebih baik sehingga menimbulkan kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat itu penting, karena dengan situasi seperti itu akan lebih banyak orang yang mengurung niatnya jika ada yang mengajak membangkang pemerintah.

Ketiga, ulama sendiri mungkin juga harus lebih mengasah lagi pisau siyasahnya, sehingga benar-benar dapat mendalami persoalan konflik selama ini secara dalam dan konprehensif. Dengan demikian ada hal-hal yang memudahkan ulama dalam menganalisis masalah secara jelas mengenai politik dan kemudian memilah-milah, sehingga dapat dipilih penyelesaiannya secara gradual dengan membuat skala prioritas.

Kapasitas Ulama Dalam Penyelesaian Konflik

Pembahasan di bawah judul ini untuk melihat aspek kemampuan kerja sama ulama dalam usaha penyelesaian konflik.

Kerjasama Ulama dengan pihak lain

Ada beberapa tingkatan usaha ulama bekerjasama dengan pihak lain dalam usaha menyelesaikan konflik Aceh ini. Hal ini dipengaruhi oleh persoalan yang ditangani dan juga tingkat pergaulan mereka sendiri dengan dunia luar. Ulama-ulama yang aktif berusaha menyelesaikan konflik ini ada yang hanya mengandalkan dirinya saja, misalnya memberi nasihat kepada masyarakat agar menjaga dirinya dari tindakan-tindakan yang merusakkan.

Kerja sama dengan pihak lain yang pertama dilakukan yakni antara sesama ulama, baik sesama ulama kenalan, atau pun sesama ulama dalam sebuah organisasi ulama. Dalam hal bekerjasama antar ulama dalam sebuah organisasi seperti Inshafuddin, memang telah lama dilakukan. Setiap ada rapat kerja tidak luput dari pembicaraan ini, mereka selalu membicarakan bagaimana mengusahakan agar rakyat hidup dalam keadaan tenang dan dayah berjalan dengan baik.

Demikian juga ketika memberi nasihat kepada anak-anak muda yang terlibat GAM. Sehubungan dengan ini sudah sering juga ulama berhubungan dengan GAM ketika ada masyarakat yang mengadu kepada ulama bahwa ada GAM yang membuat konflik lebih besar, misalnya penculikan terhadap keluarganya.

Demikian juga ada ulama yang dapat bekerja sama dengan aparat

(TNI/POLRI), jika suatu waktu dilihat telah mengakibatkan penderitaan rakyat. Beberapa kasus diceritakan, ulama menjadi penengah ketika aparat memperlakukan rakyat yang dapat memperbesar konflik dalam masyarakat. Misalnya ada masyarakat yang ditangkap, tetapi menurut ulama dia tidak bersalah, ada ulama yang mau datang berdialog dengan aparat tersebut agar mereka dibebaskan.

Demikian juga ketika terjadi pemerasan di dalam masyarakat oleh orang tak dikenal (OTK) tetapi disinyalir bahwa itu adalah aparat, ulama mendatangi aparat untuk mengadakan klarifikasi. Atas usaha ulama itu aparat dapat mengklarifikasi dirinya bahwa kedatangan mereka tidak akan membuat menderitanya masyarakat. Dengan demikian jika itu dibuat oleh aparat maka akan dihentikan, tetapi jika pihak lain yang melakukan mereka sama-sama membersihkan. Karena itu pula, satu konflik antara rakyat dan aparat keamanan telah terhindarkan.

Lebih jauh lagi, ada diantara ulama yang telah bekerja sama dengan GAM, pemerintah, dan aparat keamanan sekaligus. Karena sejak awal, ada diantara pimpinan-pimpinan TNI/POLRI yang menginginkan agar konflik ini dapat diselesaikan secara damai. Karena itu ada pimpinan TNI/POLRI dan juga pemerintah yang mendekati ulama agar ulama mau membujuk anggota atau pimpinan GAM untuk turun saja agar tidak banyak lagi yang jatuh korban. Atas permintaan itu ada ulama yang telah bekerja membujuk apakah pimpinan atau anggota GAM untuk turun. Sebagian dari usaha mereka telah berhasil, sebagian lagi tidak dan itu memang kendala tersendiri.

Beberapa di antara ulama memang telah masuk lebih jauh ke dalam persoalan ini. Misalnya mereka aktif mendorong pemerintah membuat program-program pembangunan yang benar-benar menyentuh hati rakyat. Dengan demikian diharapkan akan terurungnya niat dari rakyat yang belum terlibat dengan GAM untuk bergabung dengan mereka. Dalam hal ini termasuk dipikirkan agar keluarga korban dari konflik ini, misalnya janda dan anak-anak, diberi santunan. Hal ini sudah pernah berhasil dilakukan sekali misalnya, keluar intruksi Habibie agar mengangkat sebanyak 2000 orang pegawai dalam lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan memberi prioritas kepada anak-anak korban DOM. Demikian juga atas saran ulama agar pemerintah pusat memperhatikan kehidupan beragama di Aceh dengan menyediakan sekolah agama yang baik, Habibie telah memberikan sejumlah madrasah di Aceh dengan penyediaan fasilitas khusus seperti komputer.

Ulama pula yang telah mengusulkan kepada pemerintah agar pemerintah mengusahakan perdamaian ini dilandasi oleh hukum Islam. Karena ulama berkeyakinan apabila penyelesaian konflik ini dilakukan dengan dilandasi hukum agama akan menyentuh hati rakyat Aceh. Karena itulah salah satu jalan untuk menghilangkan dendam diantara keluarga korban konflik (terbunuh), hendaknya dibayar diyat.²⁹⁵ Dalam Islam, hukum terhadap pembunuhan orang lain adalah Qisas, yaitu keluarga korban dapat menuntut sipembunuh dengan hukum nyawa dengan nyawa. Jika keluarga yang

²⁹⁵ Lebih jauh baca Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, "Diyat Sebagai Sebuah *Solusi*" *Sunangroe*, No. 2(21 Mai 2002), hal. 13. Lihat juga Proposal Pemda NAD mengenai *Penanganan Korban Akibat Konflik*.

bersalah meminta maaf maka dibolehkan dengan membayar diyat. Karena korban tidak diketahui siapa pembunuhnya maka pemerintahlah yang wajib membayarnya. Pembayaran ini selain sebagai permohonan maaf pemerintah pada keluarga si korban sekaligus membantu keluarga korban agar tidak terbengkalai terutama sekali dalam masalah pendidikan. Dengan pembayaran berlangsung sampai sepuluh tahun, berarti keluarga tersebut dapat menyekolahkan anaknya selama sepuluh tahun dan diperkirakan mereka telah dapat menyelesaikan universitas.

Dalam rangka mencari jalan untuk penyelesaian konflik ini diketahui telah banyak ulama bekerja sama dengan LSM-LSM, baik LSM dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama seperti ini biasanya sama-sama ingin mendapat akses. Kerja sama ini adakala dalam rangka mendapat informasi yang benar dari tangan pertama, adakala dalam usaha-usaha menjaga agar tidak terjadi konflik yang lebih parah antara GAM dan TNI. Dengan adanya kerjasama ulama dengan LSM ini banyak hal ulama mendapat informasi yang tepat dan kemudian dapat bertindak sesuatu dengan tepat pula. Misalnya mereka ingin tahu sejauh mana perjuangan GAM di luar negeri dan tanggapan negara asing terhadap GAM, mereka telah diundang ke beberapa negara untuk mendengar dan melihatnya, bahkan juga ke kantor PBB yang ada di Washington. Hal yang paling akhir adalah beberapa ulama di Aceh diundang oleh HDC di Swedia, atau persetujuan pemerintah dan GAM untuk memperoleh informasi sebenarnya situasi di Aceh kepada semua pihak yang berunding di Swedia. Dengan informasi tersebutlah kemudian dipertimbangkan oleh kedua pihak apakah penandatanganan *peace agreement* akan menguntungkan semua pihak dan dapat menyelesaikan persoalan konflik di Aceh.

Tidak dapat dipungkiri adanya ulama yang berusaha menghindari dari persoalan ini. Tetapi tidak berarti mereka tidak berusaha menyelesaikan konflik, hanya saja ulama tersebut tidak mau dalam bentuk kerjasama, karena dikhawatirkan akan mengakibatkan terganggunya hubungan kepada semua pihak dan pada gilirannya akan terganggunya dayah. Paling tidak, mereka aktif berdoa agar konflik ini cepat selesai. Tetapi ada juga ulama kita lihat seperti tidak aktif apa-apa dalam persoalan ini, tapi sebenarnya ulama tersebut telah berbuat sesuatu tetapi tidak mau memberitahu kepada siapa pun.

Pandangan Masyarakat

Ada masyarakat yang menganggap ulama selama ini pasif mengenai usaha penyelesaian konflik. Hal ini dapat dipahami karena tidak sernua masyarakat tahu apa yang dikerjakan oleh ulama selama konflik. Masyarakat secara keseluruhan kenal ulama sebagai teungku (guru) di dayah atau tempat pengajian, atau sebagai pendakwah, atau sebagai pemimpin ritual keagamaan. Jadi kalau ada usaha usaha ulama dibidang lain termasuk dalam masalah penyelesaian konflik ini tidak banyak yang tahu, kecuali orang-orang yang aktif dalam persoalan tersebut saja. Ulama yang terlibat juga lebih senang orang lain tidak tahu karena sangat mungkin akan menimbulkan persoalan lain lagi yaitu kesalahpahaman seperti yang biasa

terjadi.

Di sisi lain kebanyakan masyarakat berharap ulama turut aktif untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat, termasuk dalam persoalan konflik ini. Masyarakat sangat mengharapkan agar ulama turun langsung berbicara dengan semua pihak agar menghentikan tindakan-tindakan yang menyakit masyarakat. Namun begitu, masyarakat tetap mengharapkan agar ulama tetap berdiri pada posisi yang netral dan pada garis-garis agama. Harapan ini tanpa harus meninggalkan fungsi utamanya yaitu sebagai pengajar abdi dayah atau pengajian dan pendakwah serta pemimpin ritual keagamaan.

Usaha-Usaha Penyelesaian yang Pernah ditempuh

Tindakan-tindakan Proaktif

Usaha yang paling banyak dilakukan oleh ulama adalah menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberi kedamaian kepada masyarakat, dan agar memperbaiki kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Usaha seperti ini adalah usaha yang paling mudah dilakukan dan juga memang termasuk fungsi utamanya dalam masyarakat. Himbauan ini biasanya dilakukan sambil memberi pengajian atau dalam pertemuan-pertemuan tertentu seperti pada kenduri selamatan dan lain-lain.

Adalah usaha yang sudah sering dilakukan oleh ulama agar sesama masyarakat terus memperkuat ukhuwah, sehingga kehidupan dalam masyarakat terasa damai. Demikian juga isi dakwah yang selalu melarang menfitnah, karena akan mengakibatkan saling membenci, tetapi sebaliknya harus saling menghormati, saling sayang menyayangi dan tolong-menolong. Semua nasehat itu dapat memperkuat ukhuwah dan tidak mudah terprovokasi.

Kepada yang sudah terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejauh masih dapat didekati ulama masih sering mengingatkan agar mereka berhati-hati tidak berjalan pada jalan yang tidak diridhai Allah. Karena memang sulit untuk mengatakan bahwa tindakan mereka sudah salah. Karena memang diantara mereka dasar perjuangannya dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya memiliki dasar agama dan niat yang baik.²⁹⁶ Karena itu ulama harus berhati-hati dalam memberi nasihat, dan jalan yang paling aman adalah meminta agar mereka terus berjalan pada jalan yang diridhai Allah.

Sesuai dengan keinginan rakyat sekarang, yang menginginkan konflik ini tidak berkepanjangan karena rakyat sudah cukup menderita baik dari keamanan jiwa mau pun ekonomi, banyak pihak telah berusaha agar kedua belah pihak yang bertikai mau mengadakan perdamaian melalui meja perundingan. Bahkan TNI sendiri yang sebelum bersikap keras ingin menumpas secara

²⁹⁶ Miswar Sulaiman, "Kaum Intelektual dan Hartawan Masih Was-Was Dukung GAM," dalam Tgk. Lamkaruna Putra, *Perjalan Panjang Aceh Menuju Islam Kaffah*, (Bekasi: Titian Ilmu Insani, 2001), hal. 151.

tuntas dengan senjata sekarang telah bersedia berdialog dengan GAM. GAM sendiri yang sebelumnya sudah berjuang melalui sayap militernya sekarang sudah ingin menandatangani perjanjian perdamaian (*peace agreement*), kendati pun kita belum tahu apa sasaran akhir mereka. Karena itu hampir semua elemen masyarakat telah mendukung kegiatan ini.

Sehubungan dengan itu semakin banyak ulama yang terlibat baik sebagai penghubung dengan kelompok GAM mau pun penghubung untuk pemerintah TNI/POLRI maupun menjadi jembatan keduanya. Ketika ini mereka tidak lagi terlibat personal-personal tetapi sudah secara berkelompok-kelompok, kendati pun tidak permanen. Ulama-ulama ini kemudian juga menjadi elemen penting dalam memberi masukan-masukan kepada pihak ketiga HDC dan LSM luar negeri lain dalam rangka menciptakan kedamaian di Aceh. Beberapa diantara mereka bahkan terus aktif tidak hanya dalam proses sebagai perunding tapi bekerja sampai teknis penanganan di lapangan ketika penandatanganan perjanjian perdamaian telah ditandatangani kedua belah pihak agar kesepakatan itu dapat berjalan dengan baik.

Faktor-faktor Pendukung

Memang ada beberapa faktor yang mendukung keinginan masyarakat agar terjadi penyelesaian konflik ini. Diantaranya adalah orang Aceh semua seagama dan rata-rata orang Aceh mencintai agamanya (agama Islam) kendati pun diantara mereka ada yang masih awam pengetahuannya dan jarang melakukan ibadah. Tetapi paling tidak mereka tidak akan meremehkan jika dijelaskan mengenai ajaran agama. Karena semua orang Aceh memiliki dasar agama sehingga memberi kemudahan kepada ulama membuat pendekatan melalui agama.

Faktor pendukung lain adalah walaupun tidak begitu kuat tetapi rasa persaudaraan, baik karena keluarga mau pun sesama orang Aceh masih kuat. Jadi pendekatan melalui penyadaran akan kasih sayang sesama saudara masih dapat dijadikan sebagai satu potensi untuk terciptanya kembali perdamaian sesama. Melalui pertemuan-pertemuan tertentu ulama juga memberi kesadaran pada mereka yang terlibat GAM agar menyayangi saudaranya yang menjadi korban.

Sebagai anak Aceh biasanya walau sedikit tapi pasti pernah mengaji pada seorang teungku (guru ngaji). Bahkan rata-rata pernah mengaji lama dan kadang-kadang juga pada beberapa teungku. Penghormatan pada teungku (guru mengaji) pada orang Aceh masih sangat tinggi. Ini adalah merupakan pendukung lainnya, karena jika teungku-teungku mereka ikut mengajak mereka untuk turun dari gunung atau setidak-tidaknya tidak melakukan sesuatu yang merusakkan mereka akan menghormatinya.

Sebagaimana pengalaman sejarah Aceh adalah pertikaian-pertikaian yang terjadi selalu berakar dari terhambatnya keinginan masyarakat untuk melaksanakan agamanya sebagaimana mereka kehendaki. Karena itu dengan diberlakukannya syariat Islam di Aceh, baik dengan diberlakukannya UD No. 44 tahun 2000, mau pun UU nomor 18 mengenai otonomi daerah yang daerah dapat mengatur sendiri baik keuangan adat dan agamanya adalah

merupakan faktor penting yang dapat mendukung kearah penyelesaian konflik ini.

Kendala-Kendala yang dihadapi

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak yang mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai ini. *Pertama*, pertikaian ini sudah lama sekali berlangsung kurang lebih sudah 36 tahun. Begitu banyak sudah korban yang berjatuh dan sekaligus muncul dendam dan kebencian. Apalagi ada diantara yang korban yang teraniaya, lebih-lebih lagi aniaya itu dilakukan di depan keluarganya. Bagaimana pun diusahakan untuk mengikis dendam dan kebencian terhadap pemerintah pusat (TNI/POLRI) membutuhkan waktu yang lama.

Kedua, perbedaan jauh ideologi yang dianut kedua belah pihak. GAM menuntut negara merdeka, sedangkan RI menginginkan negara kesatuan yang bergabung dengan RI. Sementara pengalaman bergabung dengan RI hampir tidak pernah menyenangkan Aceh. Yang selalu terjadi adalah Acehlah yang berkorban untuk RI sedangkan Jakarta justru sebaliknya selalu memaksakan kehendaknya terhadap Aceh dan hampir tak pernah terpikirkan untuk balas jasa-jasa kebaikan Aceh.

Ketiga, nampaknya sampai sekarang masih banyak pimpinan pusat di Jakarta yang belum memahami Aceh. Karena itu dalam tindakannya sering tidak sesuai dengan keinginan Aceh. Hal ini baik dalam merancang pembangunan maupun dalam tindakan *security approachnya*. Seperti yang sering diceritakan oleh masyarakat, misalnya tentara dan POLRI yang bertugas di Aceh tidak mengerti budaya Aceh yang Islami. Karena itu mereka sering salah dalam bertindak yang membuat rakyat Aceh tidak menyenangkan kedatangan mereka. Dan yang paling parah lagi, mereka mempertontonkan tidak melakukan shalat, paling tidak ketika waktu yang paling banyak dilakukan misalnya waktu magrib. Hal ini diperparah lagi dengan sikap aparat itu melakukan atau membacking maksiat seperti judi dan pelacuran. Mengenai masalah ini telah menjadi rahasia umum pada masyarakat Aceh.

Mungkin juga merupakan faktor penting sebagai kendala adalah karena tidak adanya suatu lembaga asing yang kuat sebagai penengah (*arbitrase*). Sudah sering keinginan untuk mengadakan perdamaian itu disepakati, tetapi di lapangan sering terjadi sebaliknya. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja tetapi juga kedua belah pihak selalu mencuri kesempatan untuk menang pihaknya. Akhirnya kesempatan itu bubar lagi.

Faktor tidak jelas semua yang bertikai misalnya ternyata tidak hanya GAM dan TNI saja tetapi juga terdapat faksi-faksi lain yang sulit diidentifikasi membuat keinginan untuk perdamaian ini terhambat. Mungkin hal inilah yang paling sulit dihadapi, kecuali kesadaran kedua belah pihak benar-benar membaca dan berbicara dengan hati nuraninya hal ini dapat tercapai. Karena kalau mereka yang secara resmi bertikai GAM dan TNI/POLRI telah mampu menyadari secara sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas, yang lain dapat diperangi secara bersama.

ULAMA TIDAK SENANG DI EKPOSE

Ulama di Aceh nampaknya tetap menjadi suatu kelompok masyarakat yang dihormati oleh masyarakat. Penghormatan terhadap ulama adalah perhormatan yang datang dari hati yang tulus karena kemuliaan hati yaitu selalu mau mengajak umat kepada kebaikan serta kemuliaan pekerjaannya yaitu selalu bekerja untuk mengajar agama kepada umat, dimana dengan agama tersebut umat akan mengerti tentang tujuan hidupnya baik untuk dunia mau pun di akhirat. Dengan ilmu inilah biasanya umat mampu memuliakan arti hidupnya, memuliakan akhlaknya dan saling menghormati serta saling memberi penghargaan terhadap orang-orang berjasa dalam hidupnya terutama sekali pemberi hidupnya yang utama yaitu Allah, seterusnya penyampai wahyu Allah yaitu Nabi Muhammad saw. Demikian juga penghormatan pada orang tua yang telah melahirkannya dan membesarkannya dan selanjutnya guru-guru yang telah memberinya pelajaran sehingga dia memiliki ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kemuliaan hidupnya.

Dalam sejarah Islam di Aceh ulama selalu menjadi kelompok masyarakat yang lebih dihormati dibandingkan dari kelompok masyarakat lainnya. Kalau ada masa-masa menurun dan meningkat hanya dipengaruhi oleh situasi tertentu, misalnya ulama itu adakalanya berfungsi sebagai pengajar agama dan pemberi nasihat saja kepada umat. Tetapi adakala ulama pernah menjadi tidak hanya sebagai pengajar dan pemberi nasihat tetapi juga pemberi keputusan dan pelaksana keputusan tersebut. Ketika ini ulama lebih berwibawa lagi karena apa yang dikatakan oleh ulama baik, maka yang akan berjalan adalah yang baik dan jika ulama mengatakan tidak baik maka itu akan diberantas karena kekuasaan ada pada tangan dia sendiri. Demikian juga ketika kekuasaan ada pada ulama, jika rakyat dalam keadaan terjepit seperti ketika mereka dijajah oleh Belanda dan Jepang, maka ulama yang menjadi pemimpin di depan untuk mengusirnya. Ketika inilah ulama benar-benar menjadi pengayom masyarakat yang realita. Karena itu mereka benar-benar menjadi suatu kelompok yang dihormati dan disegani.

Pada masa-masa lain ulama hanya berfungsi sebagai pengajar kebaikan-kebaikan saja dan pemberi fatwa tentang hukum-hukum agama. Ketika ini, ulama dilihat telah menurun wibawanya, namun sebenarnya tidaklah demikian, masyarakat memberi penghormatan sesuai dengan pekerjaannya. Tetapi bagaimanapun masyarakat tetap lebih percaya dan patuh kepada ulama dibandingkan kepada kelompok masyarakat lainnya, misalnya elit-elit politik. Termasuk dalam situasi konflik, semua komponen masyarakat Aceh masih berharap bantuan ulama, baik tindakan nyatanya maupun doanya. Dalam hal ini tidak hanya masyarakat biasa bahkan orang-orang yang bertikaipun (dalam hal ini Pemerintah sipil, TNI, dan GAM) tetap berharap bantuan dan tetap meminta petunjuk ulama dalam tindakan-tindakannya. Baik secara langsung maupun tidak kedua belah pihak (TNI dan GAM) selalu meminta doa dari ulama agar mereka diberi petunjuk dan keselamatan oleh Allah swt.

Kalaupun ada kritikan dari masyarakat Aceh mengenai ulama dalam

masa konflik seperti tidak lagi berpihak kepada masyarakat, itu hanya jeritan rakyat karena sudah terlampau menderita dan kadang-kadang mereka sudah putus asa dengan situasi konflik terutama sekali perlakuan aparat keamanan, dan OTK²⁹⁷, dan juga tingkah laku penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif.

Kritik keras terhadap ulama juga karena dipengaruhi oleh *eforia* kebebasan selama ini. Karena ternyata sejumlah kritik mereka terhadap ulama tidak benar. Seperti tuduhan bahwa ulama selama ini hanya berpangku tangan saja tidak memperhatikan situasi yang telah mengarah kepada pekerjaan kemungkar. Sebenarnya ulama telah berbuat banyak baik yang mudah dilakukan seperti berdo'a, kemudian memberi saran atau nasehat kepada kelompok yang dituju oleh masyarakat yang berbuat kemungkar sampai menyarankan kepada yang berwajib untuk mempertegas sikapnya terhadap kemungkar.

Dalam masalah usaha menciptakan perdamaian kedua belah pihak yang bertikai, ternyata ada diantara ulama yang telah masuk lebih jauh. Mereka bukan hanya sekedar mempelajari persoalan secara detil tetapi sudah sampai berusaha menjadi jembatan diantara kedua kelompok yang bertikai agar berdamai. Bahkan juga sudah pernah diusahakan mempengaruhi masing-masing pihak agar berhenti bertikai dan berpikir kearah jalan yang terbaik demi rakyat, agama dan negara. Diantara ulama juga berfungsi sebagai konseptor bagaimana strategi untuk menciptakan perdamaian ini dan juga telah bekerja lebih jauh dengan mempengaruhi semua komponen yang ada baik dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga terciptanya perdamaian. Bahkan juga telah dipikirkan bagaimana tindakan-tindakan yang efektif menuju perdamaian setelah adanya penandatanganan *peace agreement*.

Memperhatikan pada sosok ulama dalam sosio-historis masyarakat Aceh nampaknya ulama sekarang masih memperlihatkan aktualisasi diri yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Aktivitas ulama selama ini tetap masih dalam koridornya sebagai pengawal agama dalam masyarakat Aceh, baik dalam menjaga kedalaman dan kebersihan tauhid mau pun dalam meningkatkan kualitas ibadah. Ini merupakan kegiatan amal ma'ruf ulama.

Ulama sekarang juga masih energik dalam melakukan nahyi mungkar, kendatipun usahanya itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Bagaimana pun persoalan situasi dan kondisi adalah suatu hal yang tidak dapat diabaikan oleh siapa pun dalam berbuat termasuk ulama dalam melancarkan dakwah bil lisan mau pun dakwah bil hal. Kalau ada kritik masyarakat terhadap kinerja ulama selama ini hanya karena ketidakmertian mereka terhadap apa yang telah dilakukan oleh ulama, karena mereka tidak memiliki informasi yang akurat mengenai hal ini. Ketidakadanya informasi kepada masyarakat banyak, bukanlah salah masyarakat sendiri atau kesalahan pers, tetapi lebih kepada sistem kerja dan sistem ibadah yang dianut oleh ulama yaitu tidak senang diekspose berlebihan. Hal ini berhubungan dengan usaha mensukseskan usahanya demi menjaga *maru'ah* orang-orang yang diajak dan juga demi pekerjaannya menjadi ibadah yang hanya mendapat penilaian dari Allah swt.

²⁹⁷ Banyak juga yang menamakan dirinya anggota GAM

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan di atas ada beberapa saran yang dianggap perlu direkomendasikan kepada semua pihak: *Pertama*, kepada ulama sendiri kami sarankan hendaknya terus menjaga diri sebagai penjelas kebenaran kepada umat sehingga semua pihak tetap menghargainya. Jangan terpengaruh dan berpihak kepada siapapun dalam situasi apa pun kalau sesuatu telah berjalan di jalan yang tidak diridhai Allah. *Kedua*, kepada pemerintah kami sarankan agar tetap menjaga ulama sebagai pengajar dan penjelas agama, dan membangun umat kearah yang diridhai Allah sehingga kalau mengajak ulama bekerja sama ajaklah mereka pada jalan-jalan seperti itu. Janganlah mempengaruhi mereka agar mendukung program-program yang memenangkan pribadi atau kelompok tertentu apalagi kalau memang telah jelas berjalan tidak sejalan dengan kebenaran. *Ketiga*, kepada masyarakat kami sarankan hendaknya tetap menjaga ulama sebagai aset kita yang berharga, karena dengan adanya mereka kita akan terus dapat menciptakan generasi kita selanjutnya yang berjalan di jalan yang lurus seperti ditetapkan oleh Allah. Janganlah menuduh mereka sembarang karena itu selain akan merugikan mereka juga akan merugikan kita sendiri, yaitu kehilangan orang-orang yang selama ini sangat berwibawa di kalangan masyarakat kita. Dengan wibawanya itu masyarakat kita tetap menghargainya dan selanjutnya tetap bersedia mempelajari ilmu-ilmu yang diajarinya demi masa depan umat yang lebih baik.***

DARUL ISLAM di ACEH

KRONOLOGI DARUL ISLAM

- September 1953 Kegiatan DI di Aceh mulai kelihatan kegiatannya di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh, seorang ulama kharismatik di Aceh, bekas Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo.
- 20 September 1953 DI-TII menyerang secara serentak ke Lhoong, Indrapuri, Keumang, Garot, Matang Glumpang Dua dan Bireuen. Kemudian melancarkan serangan ke Banda Aceh, Sigli, Lhokseumawe, Bireuen, Langsa dan Takengon.
- 23 September 1955 Diadakan rapat di Batee Kureng dihadiri oleh 87 orang tokoh dan menghasilkan Program Batee Kureng yang antara lain menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari N.I.I/SM. Kartosuwirjo. Sebagai Wali Negaranya ialah Teungku Muhammad Daud Beureueh.
- 15 – 19 September 1956 Kongres mahasiswa, pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang berlangsung di Medan yang antara lain menyatakan penyelesaian keamanan di Aceh.
- 8 April 1957 Pertemuan antara KDMA/Pemerintah Daerah dengan pimpinan DI di Aceh di Lamteh yang melahirkan Ikrar Lamteh.
- 9 April 1957 Komandan KDM Aceh mengeluarkan perintah penghentian pertempuran dengan DI di Aceh.
- 19 Oktober 1957 PM merangkap Menteri Pertahanan, Ir. H. Juanda, dan beberapa menteri lainnya berkunjung ke Aceh.
- 15 Maret 1959 Hasan Saleh selaku Kepala Staf Angkatan Darat DI/TII di Aceh mengambil alih pimpinan DI/TII Aceh, kemudian membubarkan Kabinet Hasan Ali dan membentuk Dewan Revolusi yang di ketuai oleh A. Gani Usman.
- 15 Agustus 1959 Presiden RI mengeluarkan surat keputusan No. 180 yang isinya memberikan amnesti dan abolisi kepada anggota DI/TII di Aceh yang kembali dengan sadar.
- 23 November 1959 KASAD Letnan Jenderal A.H. Nasution melantik WAMIL yang berasal dari DI/TII Aceh di Leupung.
- 24 November 1959 Pelantikan WAMIL di Metareuem.
- 29 September 1961 Resolusi pimpinan DPR-GR Aceh mendukung sepenuhnya kebijaksanaan penyelesaian keamanan yang di jalankan oleh Panglima.

- 4 Oktober 1961 Tokoh masyarakat Aceh menemui Teungku Muhammad Daud Beureueh.
- 9 Oktober 1961 Hasan Ali sebagai Perdana Menteri Republik Islam Aceh kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
- 2 November 1961 Panglima KODAM I/ISKANDAR MUDA Kolonel M. Jasin melakukan per-temuan langsung dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh di Langkahan, Aceh Timur.
- 21 November 1961 Panglima KODAM I/ISKANDAR MUDA mengutus KAS Nyak Adam Kamil membawa surat di bawah Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk menghadap Menteri Keamanan Nasional/KASAD Jenderal A.H. Nasution.
- 12 Desember 1961 Berlangsung rapat Staf KODAM I/ISKANDAR MUDA dengan dihadiri pula oleh Polisi dan Brimob.
- 8 Mei 1962 Pimpinan Tertinggi DI/TII Aceh Teungku Muhammad Daud Beureueh 'kembali' ke pangkuan Ibu Pertiwi.



BAB 1

PENDAHULUAN

DARUL ISLAM (DI) di Aceh, jika dilihat dari sisi para pelakunya, adalah sebuah ekspresi “pernyataan sikap” yang tegas terhadap Pemerintah Pusat di Jakarta yang tidak memberlakukan syariat Islam. Jika dilihat dari sudut pandang Pemerintah Pusat, Darul Islam di Aceh adalah sebuah ‘pemberontakan’, ‘pembangkangan’ atau ‘perlawanan terhadap kekuasaan yang sah dan alat-alat negara’ sehingga para pengikut gerakan ini secara sederhana dianggap sebagai ‘pemberontak’. Dalam buku ini, Darul Islam dipandang secara lebih emik²⁹⁸, bukan pemberontakan dan pelakunya tidak disebut sebagai ‘pemberontak’, melainkan ekspresi ideologis dan pernyataan sikap para pelakunya untuk dapat lebih memahami alasan-alasan dan situasi yang melatarbelakangi tindakan “pemberontakan” paling berdarah sepanjang sejarah Aceh. Untuk lebih netral, kasus Darul Islam di Aceh akan dilihat sebagai peristiwa, bukan semata-mata kegiatan pembangkangan rakyat, apalagi sebuah ‘pemberontakan’. Maka, untuk dapat memahami alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu haruslah kita pahami sebab-sebab mengapa daerah-daerah bergolak pada awal kemerdekaan yang penggalan-penggalannya haruslah dicari dari alasan-alasan para pencetus dan pengikut pemberontakan tersebut serta dokumen sekunder.

Peristiwa DI di Aceh terjadi pada 21 September 1953, mencakup hampir keseluruhan wilayah geografis Aceh yang “getarannya” masih terasa hingga sekarang. Nazaruddin Sjamsuddin menyebutkan bahwa meskipun peristiwa berdarah Darul Islam di Indonesia (dan Aceh khususnya) sudah lama terjadi, namun “getaran-getarannya” cukup terasa dalam kepolitikan bangsa kita hingga hari ini.²⁹⁹ Peristiwa yang kemudian secara awam disebut sebagai ‘pemberontakan’ ini —dan para pelakunya dilabel dengan julukan ‘gerombolan’— terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama, dari tahun 1953 hingga tahun 1962.³⁰⁰ DI Aceh sendiri bukanlah ide orisinal para pelakunya di Aceh, melainkan sebuah gerakan dari luar Aceh, tepatnya dari

²⁹⁸ Emik (*emic*) adalah konsep antropologi yang dikonstruksikan oleh Kenneth L. Pike, artinya adalah: berkaitan dengan sistem kebudayaan spesifik dari pemikiran berdasarkan warga masyarakat yang diteliti (*native's viewpoint*). Kebalikannya adalah etik (*etic*), yaitu berkaitan dengan kategori-kategori yang dianggap universal atau didasarkan pada pemahaman objektif pengamat dari luar. Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 89.

²⁹⁹ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, (terj.), (Jakarta: Grafiti, 1990), hlm. xv. Buku Sjamsuddin ini merupakan buku yang sangat bagus — jika tidak merupakan satu-satunya— sebagai referensi utama membahas Darul Islam di Aceh.

³⁰⁰ Dalam kalimat Teungku Daud Beureueh sendiri, rentang waktu ini adalah: 8 tahun 10 bulan 27 hari. Lihat JarahDam-I, *Dua Windhu Kodam I/Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, 1972), hlm. 250.

S.M. Kartosoewirjo di Jawa Barat.³⁰¹ Ide negara Islam sudah hidup lama di Aceh, namun Kartosoewirjo-lah yang memproklamasikannya paling awal; tidak hanya sebagai proklamasi negara Islam paling pertama di Indonesia, melainkan pertama di awal abad ke-20.

S.M. Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 di Malangbong, Garut, Jawa Barat.³⁰² Dalam penjelasan proklamasinya tersebut, terdapat penjelasan bahwa nama lain dari NII adalah *Darul Islam*³⁰³ dan tentaranya disebut dengan TII (Tentara Islam Indonesia).³⁰⁴ Proklamasi berdirinya negara Islam ini segera mendapatkan sambutan yang ramai dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Di Jawa Tengah, Amir Fatah Wijayakusuma mendeklarasikan bergabung dengan Negara Islam Indonesia pada tahun 1950. Pada tahun 1951, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan juga mendeklarasikan penggabungan kekuatan perlawanannya ke NII. Di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakkar pada tahun 1952 juga menyatakan mendukung dan ikut bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikumandangkan oleh SM Kartosoewirjo. Dan terakhir, pada tahun 1953, di Aceh, Teungku Muhammad daud Beureueh mendeklarasikan bahwa Aceh bergabung dengan NII. Melihat luasnya cakupan dan dukungan perlawanan ini, “pemberontakan” ini bukanlah sebuah “pemberontakan” kecil. Untuk memahami bagaimana “pemberontakan” ini menjalar hingga ke Aceh, maka perlu diuraikan bagaimana awal mula Darul Islam di pusaran mata airnya di Jawa Barat.

Pada tahun 1949 Indonesia mengalami suatu perubahan politik besar-besaran di tengah-tengah berkembangnya gerakan komunis dan sosialis dan gerakan kiri lainnya. Ketika itu terjadinya sebuah proklamasi Negara Islam di Nusantara, sebuah negeri *Jumhuriyah*³⁰⁵ Indonesia yang kelak kemudian dikenal sebagai Darul Islam atau Negara Islam Indonesia yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai DI/TII, Islam muncul dalam wajah yang tegang. Islam muncul sebagai pengimbang atas maraknya “sihir” paham komunisme dan ideologi kiri lainnya. Namun, peristiwa ini dimanipulasi sebagai sebuah “pemberontakan”. Kalaupun peristiwa ini disebut sebagai sebuah “pemberontakan”, maka ia bukanlah sebuah ‘pemberontakan’ biasa. Darul Islam —setidaknya dalam pandangan para pejuangnya— merupakan sebuah perjuangan suci (*divine struggle*) anti-kezaliman yang terbesar di dunia di awal abad ke-20 ini. “Pemberontakan” bersenjata yang sempat menguras habis logistik angkatan perang Republik Indonesia ini bukanlah pemberontakan kecil, bukan pula pemberontakan yang bersifat regional, bukan ‘pemberontakan’ yang muncul karena sakit hati atau kekecewaan politik lainnya, melainkan karena sebuah ‘cita-cita’, sebuah ‘mimpi’ yang diilhami

³⁰¹ Anna Marie The, *Darah Tersimbah di Djawa Barat: Gerakan Operasi Militer V*, (Jakarta: Lembaga Sedjarah Hankam, 1968).

³⁰² Tentang SM Kartosoewirjo, lihat Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Nagara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo*, (Jakarta: Darul Falah, 2000).

³⁰³ *Darul Islam* (bhs. Arab), rumah Islam atau wilayah Islam atau negara Islam.

³⁰⁴ Dalam sebutan umum, NII sering disebut dengan singkatan *notorious* DI/TII atau DI-TII. Kalangan NII sendiri cukup menyebut diri sebagai Darul Islam saja, atau DI.

³⁰⁵ *Jumhuriyah* (Bhs. Arab), artinya: republik. Sistem politik Islam di masa Rasulullah SAW (Abad ke-7M) memakai sistem ini, yang dalam istilah agama disebut dengan terminologi “khilafah”.

oleh ajaran-ajaran agama (Islam).

Darul Islam adalah perjuangan umat Islam yang bersifat nasional yang juga meletus di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan (Palembang), Kalimantan Selatan; tidak hanya di Aceh saja. Perjuangan yang bermuara dari Jawa Barat ini telah mengubah banyak persepsi bangsa Indonesia tentang peran ideologi yang ada dalam sebuah perjuangan selama ini. Perjuangan suci³⁰⁶ Darul Islam di daerah-daerah dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal yang memiliki motivasi yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun berangkat dari semangat dan cita-cita yang satu: menegakkan sistem syari'ah dalam kehidupan kenegaraan. Pergolakan Darul Islam di berbagai tempat dalam setting politik politik yang semakin plural di Indonesia adalah juga merupakan respon atas membanjirnya ideologi-ideologi non-Islam yang terus-menerus menggempur bangsa Indonesia dari berbagai arah, dengan berbagai cara yang mungkin, dengan berbagai saluran yang ada pada waktu itu.

Hipotesa “Meminjam Tenaga Luar”

Banyak studi yang membahas tentang resistensi politik mengalami stagnasi dalam melihat persoalan. Stagnasi itu umumnya hanya melihat persoalan resistensi politik dari sudut pandang "struktur agraria" atau *patron-client* atau "restrukturisasi lembaga negara" atau "kekecewaan orang-orang bawah". Padahal, jauh di dalamnya, sebuah perjuangan suci sebenarnya juga merupakan suatu ekspresi nilai-nilai, suatu pengungkapan idealisme, pemikiran dan keinginan mengadakan perubahan berdasarkan orientasi nilai tersebut yang dianggap berlawanan secara norma umum dari sudut pandang *native's viewpoint* di Aceh, di Priangan, di Jawa, di Makasar, di Kalimantan atau di Palembang, sehingga ia disebut pemberontakan. Di dalam buku ini, akan dicoba diterapkan hipotesa “meminjam kekuatan luar” yang pernah dilontarkan oleh Fachry Ali³⁰⁷ menjadi hipotesis dasar bagi buku ini bahwa Darul Islam dari SM Kartosoewirjo adalah “kekuatan luar” yang dipinjam oleh Daud Beureueh untuk mengusir ideologi Pancasila di Aceh, bukan mengusir (bangsa) Indonesia dan tidak bersifat separatis.

Pemberontakan DI sendiri, melihat dari cara Holk Harald Dengel³⁰⁸ mengungkapkan, lebih banyak bersumber dari nilai-nilai keyakinan yang dipegang oleh para pelakunya.³⁰⁹ Pemberontakan Darul Islam sekaligus

³⁰⁶ Disebut dengan ‘perjuangan suci’ dalam buku ini bukanlah untuk *exaggerating* melainkan karena motivasi para pelakunya yang berniat suci (berdasarkan nilai-nilai agama dan perintah ulama) dalam menjalankan ‘tugas pemberontakan’ ini. Bagi para pelakunya, mereka adalah para *political plotters* yang memang berangkat dari sebuah keyakinan akan terciptakan sebuah sistem kekuasaan Islam. Wawancara dengan Tgk Ibrahim, Banda Aceh, 28 Juni 2006.

³⁰⁷ Fachry Ali, “Daud Beureueh dan Hipotesa Meminjam Tenaga Luar”, *Panjimas*, 1 April 1986.

³⁰⁸ Holk Harald Dengel, *Darul Islam: Angan-angan yang gagal*, (terj.), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991).

³⁰⁹ Buku Dengel telah melengkapi satu lagi khazanah sejarah bangsa yang selama ini berada dalam kabut gelap. Penulisan tentang Darul Islam, bukan hanya langka tapi juga usaha ke arah itu bukan suatu kerja yang mudah. Dia memerlukan melihat ke sejarah di masa lampau Indonesia dengan banyak perbandingan dan penelusuran data sekunder, baru kemudian

menunjukkan betapa konflik ideologis para pendiri republik ini berkisar sekitar dasar negara dan haluan politik negara. Dari semenjak ketika organisasi-organisasi nasionalisme pertama-tama berdiri di Nusantara ini, pemikiran bahwa Indonesia akan merdeka menyelimuti sebagian besar keyakinan para nasionalis ketika itu. Maka jauh-jauh hari mereka sudah memperdebatkan tentang jika bangsa ini sudah merdeka maka bagaimanakah bentuk kekuasaan dan tata cara kenegaraannya akan diatur, juga hukum dan pelaksanaan birokrasi negara.

Perdebatan ini begitu alotnya sehingga melibatkan banyak nasionalis tersebut mengajukan berbagai nilai sebagai dasar negara ini. Ada yang mengusulkan nilai nativisme budaya daerah sebagai dasar, juga ada yang mengusulkan demokrasi ala Barat, ada yang menginginkan ideologi komunisme, juga ada Islam. Masing-masing punya alasan kuat kenapa nilai-nilai tersebut diajukan dan masing-masing mengklaim bahwa usulnya sudah merepresentasi mayoritas; keinginan rakyat Indonesia. Sudah sejak semula para nasionalis Islam mencita-citakan suatu negara Islam. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu berbeda-beda, ada yang dengan jalur konstitusi seperti Muhammad Natsir dan tokoh-tokoh Partai Masjumi lainnya, juga ada dengan jalan perjuangan seperti yang dilakukan oleh Kartosuwirjo. Ia sangat konsisten dengan konsep *politik hijrah*-nya yang berarti memisahkan diri secara pemikiran dan menarik garis demarkasi pembeda antara Negara Islam dan Negara Bukan Islam (Negara Pancasila).

Wajar jika kemudian dia tidak aktif lagi dalam diskusi atau rapat atau sidang partai maupun organisasi. Dia bersikap non-kooperatif dalam semua hal dan membangun sendiri kekuatannya tanpa bantuan pihak lain. Bagaimana rumitnya perdebatan itu, ternyata tidak hanya berhenti sebagai perdebatan semata, namun lebih dari itu berusaha mengajukan pemikiran tentang ideologi tersebut secara fisik yakni dengan cara memberontak.

Pada awal pergerakan kebangkitan nasional Indonesia, kekuatan logika Islam dalam lapangan politik adalah sangat besar pengaruhnya dan sangat beragam. Ada yang hanya sebatas memihak, ada yang juga sebatas setuju belaka bahkan ada yang sangat menentang. Kartosuwirjo adalah tokoh yang sangat militan dalam intensitas perjuangan untuk mendirikan negara yang berdasarkan ideologi Islam. Meski ketika itu perdebatan tentang ideologi Islam belum final, ia telah menerjemahkan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam bentuk-bentuk praktek birokrasi dan hukum negara. Mungkin, jika ada yang mempraktekkan nilai-nilai ke-Islaman, dia itu adalah Kartosuwirjo dan

menyusun daftar pertanyaan tak berstruktur dan wawancara serta memahami istilah-istilah lokal serta terma-terma Islam yang rumit. Banyak kesan bagus pada organisasi dan struktur Darul Islam. Namun juga ini yang sulit orang lain melakukannya, adalah cara Dengel menukik ke persoalan-persoalan esensial yang memperlihatkan kehebatan perjuangan Darul Islam ini berdasarkan referensi primer! Sungguh menarik membaca buku karya Holk Harald Dengel yang judul aslinya adalah *Darul Islam: Kartosuwirjos Kampf um einen Islamischen Staat Indonesien* ini. Buku ini memiliki dua keunggulan sekaligus, pertama, bahwa buku ini adalah sebuah tulisan mendalam tentang biografi seseorang (Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo) dan kedua membahas harakah Darul Islam secara lebih bersifat ideologis. Sebagai sebuah karya disertasi pada jurusan sejarah Universitas Heidelberg buku ini sangat padat berisi berhagai data dan informasi baru yang dikorek langsung dari sumber-sumber utama (*primary sources*) seperti wawancara dan tulisan-tulisan asli dari subjek target penelitian.

pejuang mujahidin sejati dalam Darul Islam, sementara umumnya masyarakat hanya mempraktekkan nilai-nilai ritual ibadah dan secara terbatas (bersifat individu) mempraktekkan syari'ah Islam.³¹⁰

Untuk memberi gambaran lebih jauh mengenai posisi politik kelompok Islam yang semakin kuat pada masa pasca revolusi ini, beberapa catatan historis berikut relevan dikemukakan di sini. *Pertama*, pada Agustus 1950, aktivitas partai-partai politik di Indonesia telah mengalami penyegaran kembali dan giat setelah masa *adem-ayem* pada 1949. Dalam Parlemen yang baru dibentuk dengan jumlah keseluruhan anggota 236 orang, Masjumi tampil sebagai partai terbesar dengan menduduki 49 kursi. Namun demikian, karena adanya banyak partai, organisasi, dan asosiasi yang diwakili dalam parlemen (tidak kurang dari 22), bersama PSII, kelompok Islam hanya memperoleh 54 kursi (23%). Kenyataan ini meruntuhkan mitos mayoritas Islam dalam politik. *Kedua*, dalam beberapa kesempatan, Masjumi diminta untuk membentuk dan memimpin kabinet. Dari tujuh kabinet yang berjalan di bawah sistem demokrasi konstitusional (1950-1957), tiga kabinet dipercayakan kepemimpinannya kepada Masjumi (Kabinet Natsir pada 1950-1951; Kabinet Sukiman pada 1951-1952; dan Kabinet Burhanuddin Harahap pada 1955-1956). Selain itu, ketika Partai Nasionalis Indonesia (PNI) diberi mandat untuk membentuk pemerintahan, baik Masjumi maupun NU, berperan sebagai pasangan koalisi yang utama. *Terakhir*, hasil pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada September 1955 menunjukkan, kelompok Islam (kali ini terdiri dari Masjumi, NU, PSII, dan Perti) menguasai 114 dari 257 kursi (43,5%) dalam parlemen. Walaupun hasil akhir tersebut jelas jauh di bawah perkiraan Sjahrir, namun itu telah menggandakan wakil kelompok Islam dalam parlemen.³¹¹

Kenyataan ini, ditambah dengan tidak adanya kontroversi-kontroversi ideologis yang terbuka, boleh jadi turut menyebabkan berlangsungnya hubungan politik yang relatif harmonis antara kedua payung religio-politik besar ini selama tahun-tahun pertama politik Indonesia pasca revolusi (1950-1953). Kritik terang-terangan terhadap Pancasila oleh para pemimpin dan aktivis politik Islam jarang terjadi. Bahkan Mohammad Natsir menyatakan bahwa —karena dimasukkannya prinsip “Percaya kepada Tuhan” ke dalam Pancasila— Indonesia tidak menyingkirkan agama dari masalah-masalah kenegaraan.

³¹⁰ Dibandingkan dengan buku-buku yang mengupas tentang Darul Islam (seperti buku Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dari Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*), buku karya Dengel ini secara tuntas mengupas habis perjuangan DI ini. Kesimpulan-kesimpulan yang diambilnya juga sangat menarik. Artinya ia tidak terpaku pada eksplanasi yang dipakai Jackson yang mengandalkan penjelasan bahwa masyarakat Jawa Barat sangat terikat pada, pemimpin hubungan *patron-client*), lebih dari itu ia adalah suatu perjuangan yang bangkit dari kesadaran penuh pengamatan suatu ideologi. Juga bukan karena kekecewaan reorganisasi tentara pasca kemerdekaan seperti yang dijelaskan C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985). Buku ini juga menentang beberapa asumsi yang salah dari penulis Hirokoshi dan Subardi, dan dengan logika Jermannya yang rijik. Dengel menerangkan secara objektif perjuangan Darul Islam sehingga kesimpulannya tidak akan berat sebelah atau memihak.

³¹¹ Lihat Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (terj. Sylvia Tiwon), Jakarta: Grafiti Press, 1995.

Namun bukan karena itu negara Indonesia dilanda krisis politik, terutama krisis yang direaksikan oleh Islam. Indonesia saat itu tengah jatuh ke dalam “titik terendah dalam hal kemampuannya memperoleh kontrol sosial dan efektivitasnya dalam mendistribusikan sumber-sumber. Ketidakmampuan negara untuk melakukan “penetrasi” ke dalam masyarakat, untuk “mengatur” hubungan-hubungan dengan berbagai pengelompokan sosial-politik, dan untuk “menggali” serta “mendistribusikan” baik sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi dalam cara-cara yang tegas, turut menyebabkan munculnya beberapa gejolak sosial-politik yang amat merepotkan kepemimpinan nasional. Beberapa contoh yang terkenal dari gejolak-gejolak itu adalah "pemberontakan" Darul Islam (DI), Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Perjuangan Semesta Alam (Permesta).

Salah satu di antara butir-butir agenda terpenting dari kabinet-kabinet Indonesia pasca kemerdekaan adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk Parlemen dan Majelis Konstituante. Kabinet Sjahrir berjanji akan menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada awal Januari 1946. Sayangnya, situasi revolusi fisik (1945-1949) tidak memungkinkan dilaksanakannya pemilihan umum itu. Ketika kedaulatan negara diserahkan Belanda ke Republik Indonesia, sebagaimana dicatat Feith, “setiap kabinet menjadikan pemilihan umum untuk menyusun Majelis Konstituante sebagai bagian penting dari program-programnya. Meskipun demikian, baru pada kabinet Burhanuddin Harahap sajalah pemilihan umum pertama berhasil diselenggarakan (1955).³¹²

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tertundanya penyelenggaraan pemilihan umum itu. Yang paling penting adalah ketakutan para elite negara dan partai, khususnya mereka yang berasal dari kelompok nasionalis sekuler, bahwa pesta-pora demokrasi itu dapat mengancam hubungan politik antara agama (Islam) dan negara yang sudah di-“dekonfessionalisasi” seperti yang berlangsung saat itu. Mereka percaya bahwa peristiwa-peristiwa politik seperti pemilihan umum dapat digunakan oleh kalangan Islam untuk menyusun dukungan rakyat guna merealisasikan gagasan negara Islam. Mengingat potensi mereka untuk memenangkan suara mayoritas, sukses kelompok Islam dalam pemilihan umum akan melempangkan jalan bagi mereka untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara di Majelis Konstituante yang artinya akan menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam.

Sejak 1950 hingga sekitar 1959, dekade yang dikenal sebagai periode Demokrasi Konstitusional atau Demokrasi Parlemerter, Indonesia berada di bawah UUD Semenetara 1950. Terlepas dari kenyataan bahwa negara telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, UUD 1950 itu masih dianggap sementara. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa tugas utama Majelis Konstituante adalah menyusun sebuah rancangan konstitusi yang permanen. Dalam kerangka legal-konstitusional inilah para anggota Majelis Konstituante terlibat dalam perdebatan-perdebatan ideologis-politis yang sengit dan panas. Meski bukan tanpa kesulitan, Majelis Konstituante akhirnya dapat menyelesaikan 90% tugas-tugasnya, termasuk membuat

³¹² Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1969).

berbagai ketetapan seputar masalah unsur-unsur substansif konstitusi seperti hak-hak asasi manusia, prinsip-prinsip kebijakan negara, dan bentuk pemerintahan.

Dalam diskursus ini, kelompok Islam pada intinya menyatakan kembali aspirasi-aspirasi ideologi-politik yang sudah mereka kemukakan pada masa pra-kemerdekaan, yakni mendirikan negara yang jelas-jelas berdasarkan Islam. Mereka mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi negara berdasarkan argumen-argumen mengenai (1) watak holistik Islam, (2) keunggulan Islam atas semua ideologi dunia lain, dan (3) kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia. Dipimpin Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Zaenal Abidin Ahmad, Isa Anshari, dan K.H. Masjkur, mereka kukuh mempertahankan watak Islam yang holistik. Mereka percaya bahwa Islam mengatur setiap aspek kehidupan. Menurut mereka, negara —yang pada dasarnya merupakan sebuah organisasi yang meliputi seluruh masyarakat dan lembaga, yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan aturan-aturan yang mengikat — tidak bisa lain kecuali mendasarkan diri kepada prinsip-prinsip *Ilahiyah*.

Dalam konteks Pancasila sebagai ideologi negara, mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang heterogen secara keagamaan, beberapa tokoh kelompok nasionalis memandang Pancasila sebagai suatu kesepakatan bersama. Bagi para politisi PNI dan aktivis Kristen seperti Arnold Mononutu, Pancasila merupakan sebuah sintesis yang memadai bagi berbagai kelompok agama yang berbeda. Jika Islam harus dijadikan dasar negara, yang terutama ia khawatirkan adalah tempat kelompok-kelompok agama lain di Nusantara. Bagaimana pun, hal itu mengandung citra diskriminasi konstitusional. Untuk kasus Aceh, sangat jelas terlihat bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber masalah dan perjuangan melawannya telah menyebabkan munculnya banyak gerakan *dissident* dan *seccesionist movements*.

Diterimanya Pancasila sebagai ideologi negara serta dihapusnya “tujuh kata” dari Piagam Jakarta dapat ditafsirkan sebagai kekalahan politik Islam. Untuk Aceh, diterimanya Pancasila setelah kekalahan tempur Darul Islam, merupakan suatu jamu pahit yang harus ditelan, meskipun orang-orang Aceh percaya bahwa jamu Jawa yang pahit itu tidak bisa menyembuhkan penyakit; hanya Tuhan yang menyembuhkan penyakit.³¹³ Kendatipun demikian, para pendukung gagasan negara Islam tersebut, untuk sebagian besar, tidak menyerah begitu saja. Perjuangan Darul Islam sewaktu perang frontal (1949-1964) dan diproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Sekarmadji Marijan Kartosoewirjo dan perjuangan wakil-wakil Islam di dalam sidang Konstituante hasil pemilu 1955 untuk menggolkan kembali gagasan negara Islam, merupakan indikasi konsistensi perjuangan mereka.³¹⁴

Pergulatan Islam dan negara telah menghasilkan banyak pemberontakan, yang secara ekologi kultural dapat dijelaskan sebagai berikut: secara ekonomi, Sumatra (Aceh dan Palembang), Sulawesi Selatan dan Sulawesi

³¹³ Wawancara dengan Tgk. Saleh, Pulot, Leupung, Aceh Besar, 27 Juni 2006.

³¹⁴ Lihat B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia: 1945-1970*, (terj. Safroedin Bahar), (Jakarta: Grafiti Pers, 1985).

Tenggara, Kalimantan Selatan, adalah wilayah pengekspor hasil alam utama, sedangkan Jawa dengan tingkat perkembangan penduduk dan urbanisasi yang tinggi menjadi pengimpor; wilayah-wilayah perjuangan Islam yang utama di tahun 1957 - 1958 adalah wilayah-wilayah yang surplus eksportnya lebih sejahtera yang mencari jalan untuk memotong garis kekuasaan Jawa dan Pemerintah Pusat dan dengan cara mengambil perdagangan di tangan mereka sendiri dan mencegahnya mengalir ke Jawa.³¹⁵ Sebuah perlawanan subsisten untuk menghadang mengalirnya sumber daya yang hampir tak terbatas ke luar wilayah mereka. Hanya Darul Islam-lah yang tersedia pada waktu itu, hanya inilah satu-satunya gerakan yang berani melawan kekuasaan populis Soekarno dengan segala ideologinya (Marhaenisme, Pantjasila, Nasakom, Manipol Usdek) yang semakin melanglang ke sana ke mari memiriskan kepala orang-orang Aceh pada waktu itu. Bagi orang-orang Aceh waktu itu, semua pemikiran Soekarno dan Komunisme yang masuk ke Aceh, adalah *bui*.³¹⁶ Meskipun tidak terekspresikan secara eksplisit, Darul Islam adalah satu-satunya kekuatan yang tetap *standing in motion* menghadang, menggempur dan menerjang semua ideologi non-Islam ini termasuk semua jajaran tentaranya yang mereka sebut sebagai Tentara Republik Indonesia Komunis (TRIK), sedangkan Republik Indonesia disebut dengan RIK (Republik Indonesia Komunis).

Disebabkan perkembangan politik dan kecondongan haluan politik negara ke dalam suatu arah yang semakin aneh dan tidak menentu di mana kalangan merah dan merah jambu (PKI dan PNI) semakin menguasai situasi dan masuk ke setiap lapisan dan sebaran geografis masyarakat, maka bagi orang-orang Aceh, Pemerintah ini adalah sebuah elit *namiet* (budak) yang semenjak dahulu bergerak bersisian seiring sejalan dan dalam lembaga-lembaga politik ciptaan kolonial Belanda. Maka, melihat ulah Soekarno dan para anggota parlemen yang sudah demikian memuakkan, mereka tidak mungkin lagi menggunakan isyarat untuk memukul pemerintahan yang sudah tak tahu diri lagi, pemerintah yang tak tahu bertema kasih ini. Tercetuslah dalam bahasa ekspresif Aceh yang agak sedikit kasar, *meunyo namiet geupoh ngon tungkat, ngon isyarat han meumada* (Jika budak dipukul dengan tongkat, dengan isyarat tidak mencukupi (memadai)).³¹⁷ Dalam suatu ungkapan tradisional Aceh, bagi orang-orang Aceh, meskipun DI bukanlah dan tidaklah terlalu sesuai untuk disebut sebagai sebuah *tungkat* (tongkat) karena gerakan Islam ini sangat dihargai dan dihormati; dalam namanya saja

³¹⁵ Secara sosiologis, kualitas kolektif yang berkembang pesat dari cara hidup orang-orang yang berbudaya sawah di Jawa sangat berbeda dengan yang luar Jawa (*Outer Islands*) yang tipikal individualisme pertanian (kaum tani komersil). Secara agama, Sumatra Utara, Sulawesi Utara dan beberapa kepulauan di timur telah dikristenisasikan; Islam ortodoks sangat kuat di bagian-bagian tertentu Sumatra, Kalimantan dan Jawa Barat, dan sisanya di Jawa adalah Muslim nominal (atau dengan istilah Clifford Geertz sebagai *Muslim abangan*) yang sangat kuat memegang tradisi Hindu-Buddha sinkretis. Lihat Clifford Geertz, *Involusi Pertanian*, (terj.), (Jakarta: Bhratarata, 1974).

³¹⁶ *Bui*, (bhs. Aceh), berarti babi. Dalam alam pikir rakyat Aceh ketika itu, *bui* (babi) adalah haram, seharam-haramnya binatang yang ada di atas bumi Tuhan ini.

³¹⁷ Tentang hal ini, lihat Athailah, Abdullah Faridan, A Murad Em Djies, Budiman Sulaiman, Sulaiman Sanusi, A Wahab Ismail, *Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984), hlm. 48.

sudah mengandung nilai dan marwah agama yang sangat dihormati masyarakat Aceh. Namun, hanya *tungkat* DI inilah yang ada untuk memukul *namiet* Pemerintah RI yang semakin condong ke komunisme dan Pancasila yang sudah demikian jauh meninggalkan nilai-nilai luhur agama Islam. Indonesia, termasuk Aceh, ketika baru saja lepas dari penjajahan Kolonial Jepang dan Sekutu dan Belanda dengan perjuangan fisik yang revolusioner, di telinga mereka masih terngiang pekik “Allahu Akbar”, tapi yang terdengar sekarang adalah istilah-istilah asing yang membingungkan dan merusak semangat mereka yang masih hangat dengan semangat revolusioner ini. Pancasila, Manipol Usdek, Komunisme, Marhaenisme, Demokrasi Terpimpin, dan lain-lain sebagainya, dalam pandangan orang-orang Aceh telah merebut status propinsi kebanggaan mereka sebagai daerah modal dalam menggempur Belanda di Medan Area. Pancasila, Kejawenisme, Manipol Usdek, Komunisme, Marhaenisme, Demokrasi Terpimpin, dan semua pidato Soekarno adalah yang telah mencabut harkat dan martabat dan mempermalukan dan tidak menghargai Teungku Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo sebagai pahlawan. Bagi masyarakat Aceh, Indonesia ketika itu adalah *namiet* yang tidak cocok dipukul dengan isyarat, harus dengan benda sekeras *tungkat*, maka jatuhlah pilihannya kepada Darul Islam. Sementara di kalangan rakyat kecil, mereka cukup mengekspresikan bahwa Pemerintah RI Soekarno adalah *bui* dan dalam kesadaran kultural Aceh, *Geupeulet bui ngon asee* (mengejar babi dengan memakai anjing) dan memang dalam kebiasaan masyarakat pedalaman Aceh babi biasanya dikejar dengan anjing.³¹⁸ Meskipun mungkin tidaklah terlalu tepat mengasosiasikan DI dengan *asee* atau *bui* dengan RI, namun inilah gambaran yang paling mungkin bisa dilukiskan oleh orang-orang Aceh pada waktu, dengan segala keguyuban, kesederhanaan dan keterbatasannya.³¹⁹

Kesabaran dan sikap pasrah serta ikhlas yang sudah ditunjukkan oleh Teungku Daud Beureueh ini tidaklah dipahami sebagai isyarat oleh kalangan Republik di Pusat. Tidak tersedianya perlengkapan kognitif yang memadai di kalangan pemerintah Pusat saat itu telah menyebabkan isyarat ini tak terbaca sebagai sebuah pukulan. Mereka terlalu jauh untuk dapat mendengar sayup kepedihan Aceh. Kalangan Republik terlalu jauh untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi dengan “singa Aceh” yang sedang duduk diam di kampungnya yang terik di Beureueneun, Pidie. Isyarat ini hanya ditangkap oleh Boyd R Compton³²⁰ dan SM Kartosoewirjo, tapi tidak oleh Soekarno, Aidit, Njoto, dan kalangan merah pemerintahan Republik. Mereka terlalu silau dengan gemerlap pesta di istana Bogor dan riuhnya perdebatan liberal di parlemen. Sementara di Jawa Barat, ideologi Darul Islam terus menjalar, merambat ke setiap jengkal tanah Jawa dan kurir-kurir gerakan radikal ini bertebaran ke berbagai tempat menjangkau wilayah-wilayah jihad, menyebar ajakan untuk memerangi Pancasila. Bagi orang-orang Aceh, kesamaan pandangan akan “Pancasila sebagai musuh” yang mengakibatkan Teungku Daud Beureueh melirik dan menghubungi SM Kartosoewirjo, pihak Darul Islam yang akan mampu “meminjamkan tenaga” untuk mengusir Komunisme, Marhaenisme dan

³¹⁸ Wawancara dengan Ishak Ibrahim, Banda Aceh, 24 Juli 2006.

³¹⁹ *Ibid.*

³²⁰ Lihat Boyd R. Compton, *Kemelut Demokrasi Liberal*, (terj.), (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001). Lihat khususnya kata pengantar dari Fachry Ali.

Pancasila.

Darul Islam SM Kartosoewirjo di Jawa Barat

Pada awalnya, setelah tiga tahun setengah berada dalam kekejaman kolonial Jepang, muncul banyak perlawanan Islam di Jawa Barat, selain yang terbanyak di Aceh. Di Aceh, belum ada sebuah rencana strategis untuk memproklamasikan berdirinya sebuah negara Islam. Namun di Jawa, SM kartosoewirjo sudah memulai menggarap rencana mendirikan negara Islam ini sejak lama. Setelah gagal mensosialisasikan proklamasi yang pertama pada tanggal 14 Agustus 1945, maka baru pada tahun 1949, di Jawa Barat 7 Agustus, diproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo telah dikumandangkan di desa Malangbong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.³²¹ Proklamasi ini selain sebagai tanggapan terhadap kecenderungan Republik Indonesia ke arah sekuler dan komunis, juga merupakan upaya mewujudkan cita-cita teologis umat Islam yang telah demikian lama tertunda. Perjuangan yang dikenal dengan nama lain *Darul Islam* ini berpusat di Jawa Barat dengan meluaskan pengaruhnya hingga ke Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pemimpin *Darul Islam* ini, S.M. Kartosoewirjo, adalah seorang pemimpin pergerakan umat Islam yang semenjak zaman Hindia Belanda telah lama (mulai 1934-1942) mencita-citakan berdirinya suatu negara Islam di Indonesia. Ia telah dari sejak awal mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Belanda dan berjuang secara *non-cooperatif* dan tidak mau melalui parlemen (*volksraad*) atau partai politik yang pernah dimasukinya yaitu PSII (Partai Sjarikat Islam Indonesia) maupun Masjumi (Madjlis Sjoero Moeslimin Indonesia).

Perjuangan *Darul Islam* ini pada awalnya berkesempatan mengkonsolidasikan diri ketika Divisi Siliwangi TNI dipindah ke Jawa Tengah sebagai pelaksanaan Perjanjian Renville, pasukan-pasukan *Lasjkar Hizbullah* dan *Lasjkar Sabilillah* yang berada di bawah kepemimpinan Kartosoewirjo tetap tinggal di Jawa Barat karena memang tidak setuju dengan Perjanjian Renville. Pasukan Hizbullah dan Sabilillah secepatnya mengambil sikap dalam menanggapi kekosongan kekuasaan di wilayah tak bertuan Jawa Barat dengan segera menyusun struktur pertahanan yang merupakan cikal-bakal sebuah negara. Ketika pasukan TNI Divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah untuk melakukan perang gerilya, setelah Belanda melancarkan Agresi Militer II, mereka menjumpai kesatuan-kesatuan Hizbullah dan Sabilillah dan kesatuan-kesatuan bersenjata lainnya yang kemudian bernama Tentara Islam Indonesia (TII). TII mencoba untuk menghalang-halangi kembalinya TNI ke Jawa Barat dan berusaha untuk menarik anggota-anggota TNI ke pihaknya.³²² Pertempuran antara pasukan TII dan TNI Divisi Siliwangi pun tidak dapat dihindarkan. Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 25 Januari 1949 di desa Antralina, Malangbong, antara Batalyon M. Rivai yang baru tiba dari Jawa Tengah dengan pasukan TII.

Jika di zaman kolonial Belanda, perjuangan Islam lebih menyangkut

³²¹ Lihat C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993).

³²² Disjarah TNI, *Album Peristiwa DI-TII*, (Jakarta: Dinas Sejarah TNI, 1981), hlm. 67.

tarik-menarik dan perdebatan strategi perjuangan antara “perjuangan politik” dan “pembangunan moral”, maka ketika meletusnya perjuangan TII ini pembeda utamanya adalah soal keabsahan Republik Indonesia.³²³ Sementara partai-partai politik Islam bertolak dari sikap dasar bahwa RI adalah negara sah, maka *Darul Islam* (DI) mengingkari keabsahannya. Betapapun masalah DI kemudian berhasil "diturunkan" menjadi masalah keamanan, tidak lagi soal ideologis, corak pendekatan yang diajukannya di samping bisa menunjukkan lubang-lubang dalam argumen politik Islam, juga memberi kesempatan kepada faktor luar untuk mengambil inisiatif politik yang pasti, tanpa ambivalensi moral. Sementara itu faktor luar telah makin mendesak dan masalah konstitusional pun makin mengabur, maka terjadilah kegagalan Konstituante, PRRI/Permesta meletus yang melibatkan orang-orang Masjumi dan PSI dan Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno pun makin kuat.

Perbedaan yang paling mendasar antara Masjumi dengan *Darul Islam* yaitu bahwa Masjumi menyetujui rumusan-rumusan Pancasila sekaligus berbicara tentang suatu “masyarakat yang Islami”, tetapi tidak berbicara tentang "Negara Islam" sebagaimana *Darul Islam*. Perkembangan perjuangan Islam selanjutnya pasca-*Darul Islam* hingga masa Orde Baru adalah gerakan yang terpecah dalam dua arus aktivisme sosial yaitu tradisional dan modernis. Yang Tradisionalis adalah gerakan-gerakan yang diwakili oleh NU (Nahdlatul Ulama) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), sementara yang modernis adalah yang diwakili oleh Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), Al-Irsjad dan lain-lain. Aktivisme dan idealisme politik tidak lagi berani mengemuka setelah kegagalan politik ini. Semenjak itu Islam terus menjadi sasaran kecurigaan Negara, seberapapun positifnya sumbangan Islam yang bisa diberikan kepada negara. Sejak itu, posisi politik Islam pun mengalami kelumpuhan total.

Kelumpuhan politik ini selanjutnya diperparah oleh perpecahan politik umat Islam masa kemerdekaan yang dimulai dari terpecahnya kekuatan politik Islam Masjumi yang selama tujuh tahun menjadi wakil tunggal politik Islam. Tidak lagi bergabungnya PSII dan NU dalam Masjumi tampaknya memang harus dijelaskan melalui pendekatan sebagaimana telah disebutkan tadi, terutama yang menyangkut persoalan alokasi peran politik antar berbagai faksi kekuatan yang terfusikan dalam Masjumi. Untuk kasus PSII, Soemarso Soemarsono melihat bahwa hal itu disebabkan oleh tak kunjung datangnya kesempatan bagi PSII untuk duduk dalam kabinet. Namun demikian, persoalan ini tidak begitu mempengaruhi perjalanan Masjumi, karena kecilnya kekuatan PSII itu sendiri. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini merupakan awal melemahnya kekuatan Islam dalam diri partai Masjumi.

Melemahnya Masjumi sebagai kekuatan politik Islam lebih terasakan lagi setelah NU mengikrarkan diri keluar dari partai tersebut. Hal ini disebabkan NU mempunyai massa sangat besar, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Sejak itu (1952) NU mengubah dirinya dari *jam'iyah*, organisasi sosial keagamaan, menjadi partai politik (*hizbul siyasah*). Kebesaran massa NU ini dibuktikan pada Pemilu 1955, di mana NU muncul

³²³ Lihat Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo: Angan-Angan yang gagal*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan), 1996.

sebagai partai terbesar nomor tiga sesudah PNI dan Masjumi dengan meraih 18,4 persen suara dari seluruh jumlah peserta Pemilu. Karena itu, NU mendapatkan 45 kursi dalam Parlemen. Orang boleh melihat bahwa keluarnya NU dari Masjumi sebagai tindakan oportunistik. Tetapi, bagi NU sendiri hal itu merupakan cara terbaik untuk membebaskan diri dan jamaahnya dari rasa tidak puas, baik politik maupun religius, dalam tubuh Masjumi.³²⁴

Perpecahan-perpecahan politik Islam, tetap tidak mengubah orientasi perjuangan sebagian umat Islam untuk terus memperjuangkan gagasan negara Islam. Di dalam berbagai sidang Dewan Konstituante, khususnya Masjumi, tetap menyuarakan ide-ide negara Islam. Sementara itu masa Demokrasi Liberal atau Demokrasi Konstitusional yang ditandai dengan jatuh banggunya kabinet-kabinet, baik oleh alasan-alasan politis-sekuler maupun politis keagamaan, telah mendorong Presiden Soekarno untuk membubarkan Konstituante. Sejak Soekarno memberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin (1957-1965), Indonesia memasuki masa di mana peranan demokrasi telah termanipulasikan oleh prinsip-prinsip kediktatoran, merupakan sebetulnya pemerintahan otokratis yang menumpas tanpa setiap oposisi atau pandangan yang tidak menyetujuinya. Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup (1962) pada periode Demokrasi Terpimpin ini. Ironisnya, dukungan besar untuk itu justru diberikan oleh kaum nasionalis dari kalangan NU. Posisi Presiden pada masa ini sangat dominan dalam hampir semua bidang kehidupan dan diharapkan sebagai pemeberi kata putus terhadap segala persoalan. Masa ini juga ditandai oleh keengganan kelompok militer karena keberhasilan PKI (Partai Komunis Indonesia) mendekati Soekarno. Meski pernah digunting tahun 1948 oleh pemberontakan Komunis di Madiun, Presiden Soekarno justru memberikan keleluasan lebih besar kepada PKI untuk bergerak dan menguasai panggung politik nasional. Hal ini mendatangkan implikasi cukup serius terhadap seluruh aspek kebijaksanaan pemerintah yang mempunyai relevansi dengan kehidupan keagamaan umat Islam. Kebijakan Soekarno itu, menurut W.F. Wertheim,³²⁵ telah "menjinakkan" kekuatan Islam.

Kebijaksanaan lain Soekarno yang dinilai sangat merugikan Islam adalah keputusannya untuk membubarkan Masjumi yang pernah bekerjasama dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) untuk membuat demokrasi tandingan yang diberi nama Liga Demokrasi, karena keterlibatan sebagian pemimpin dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Dengan dibubarkannya Masjumi pada bulan Agustus 1960 itu, NU yang telah menjadi partai politik dan keluar dari keanggotaannya sebagai salah satu partai pendukung Masjumi, tampil sebagai wakil politik Islam. Namun juga memperbesar potensi PKI untuk menguasai massa. PKI tidak hanya berhasil dalam meningkatkan peranannya dalam pemerintahan dan masyarakat, juga lambat laun bekerja sama dengan Presiden lebih erat apalagi karena Presiden tambah lama tambah bergantung pada negara-negara komunis, terutama Cina. Hubungan dengan Cina semakin membuat ekonomi Indonesia terwarnai oleh sistem negara tersebut

³²⁴ Tentang NU, lihat M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994).

³²⁵ Lihat W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition*, (The Hague: W. van Hoeve, 1969).

dan pengaruh orang-orang Cina yang menguasai perekonomian Indonesia.³²⁶

Data perjuangan umat Islam yang terentang di atas ini sesungguhnya menggambarkan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik umat Islam. pada periode itu, terutama periode menjelang kemerdekaan dan pada masa Demokrasi Liberal, perhatian sebagian besar pemimpin Islam terpusatkan pada persoalan-persoalan Islam dalam hubungannya dengan pembangunan politik-ideologi. Yang berkembang ketika itu, misalnya, konsepsi bahwa Islam itu adalah *dinun wa daulah* (agama sekaligus terlibat dalam persoalan-persoalan kenegaraan); Islam itu meliputi kehidupan *dunya wa al-akhirah* (dunia dan akhirat) dan lain sebagainya.

Apa yang dimaksud sebagai perjuangan politik-ideologi itu adalah Islam sebagai dasar dan ideologi Negara, yang pada awalnya diperjuangkan oleh para pemimpin Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH A. Sanusi, KH Mas Mansyur, Abdul Khahar Muzakir, KH A. Wahid Hasyim, KH Masykur, Sukiman Wirjosandjojo, Abikusno Tjokrosujoso, Agus Salim dan lain sebagainya. Di dalam periode Konstituante (1956-1959), perjuangan itu dilanjutkan oleh Mohammad Natsir, Masykur, Hamka, Isa Anshary dan Osman Raliby. Tentang Islam sebagai dasar negara, misalnya, Mohammad Natsir menegaskan pendiriannya bahwa Islam harus dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurutnya, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu sekularisme (*la-dieniyah*) atau paham keagamaan (*dien*). Dan menurut pendapatnya, Pancasila bercorak *la-dieniyah*, karena itu ia sekuler, sebab tidak mengakui wahyu sebagai sumbernya. Artinya, Pancasila hanyalah semacam produk non-Tuhan, atau produk setan. Adapun sepanjang menyangkut persoalan pemberian gelar Kepala Negara, Natsir tidak mengikuti tradisi pemberian gelar sebagaimana diwajibkan oleh teori politik Islam klasik, yaitu *Khalifah*. Baginya, sebutan apa saja boleh. Yang penting, seorang kepala negara memiliki sifat, hak dan kewajiban yang sesuai dengan ajaran agama Islam, di antaranya adalah dengan memberlakukan prinsip-prinsip *syura* (musyawarah) yang dikembangkan dan disesuaikan menurut hasil ijtihad umat. Demikian, corak pemikiran politik Islam Indonesia yang tidak terikat oleh tradisi politik Islam klasik, melainkan bersiteguh pada esensi ajaran Islam yang menyangkut masalah kenegaraan dan pemerintahan.

Tidak satupun keinginan para pemimpin Islam, dalam hal ini Islam sebagai dasar dan ideologi negara, terwujud. Kendatipun demikian, hal ini tidak menjadikan proses Islamisasi terhenti sama sekali. Pada masa Soekarno, kendatipun banyak menggariskan kebijaksanaan politik yang kurang menguntungkan perkembangan politik Islam, sebagian langkahnya cukup berarti untuk dinilai sebagai gerak Islamisasi birokrasi. Gagasan-gagasannya untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Israj Mi'raj, Nuzul Qur'an dan lain sebagainya di lingkungan Istana Merdeka, serta upaya membangun mesjid Istana Baiturrahim dan Masjid Istiqlal yang megah itu, merupakan kegiatan yang secara tidak langsung mengarah pada adanya proses 'ofisialisasi Islam'. Jika

³²⁶ Lihat lebih lanjut tentang hal ini dalam Dewi Fortuna Anwar, "Indonesia's Relations with China and Japan: Images, Perceptions, and Realities," dalam *Contemporary Southeast Asia* (Singapore), 12, No. 3, December 1990, hal 225-246.

boleh disimpulkan, sementara pemimpin Islam berusaha keras agar gagasan tentang Islam sebagai dasar dan ideologi negara diterima, Soekarno, untuk maksud perimbangan kekuasaan, melakukan gerak ofisialisasi Islam. Karenanya, dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam pada masa Soekarno hanya menampilkan dimensi eksoterismenya saja.

Yang menarik dari penjelasan tentang pola-pola pemikiran politik umat Islam pasca kemerdekaan ini adalah munculnya beberapa asumsi tentang persatuan dan perpecahan umat Islam dalam hubungannya dengan persoalan politik-pemerintahan, kekuasaan, dan pemahaman keagamaan itu sendiri. Di bidang politik, sepanjang hal itu menyangkut perjuangan untuk mendirikan negara Islam, terutama pada masa pasca kemerdekaan dan Demokrasi Liberal, karena sifat liberalisasi politik Indonesia ketika itu, umat Islam bersatu untuk membuat gagasan tersebut berhasil. Sementara itu, perkembangan partai politik Islam Masjumi yang berjalan dengan sistem alokasi peran dan kekuasaan yang tidak memuaskan sementara pihak, dalam sejarah telah dianggap sebagai faktor perpecahan. Hal ini nampak benar pada kasus keluarnya PSII dan NU dari Masjumi.

Kenyataan demikian, menimbulkan asumsi lain, bahwa sepanjang menyangkut kekuasaan, umat Islam cenderung melupakan prinsip *ukhuwwah Islamiyah* (persatuan), cita-cita bersama dan lain sebagainya. Kenyataan ini tampak pada upaya Masjumi untuk membuat PSII dan NU merasa tidak puas dengan alokasi peran dan kekuasaan yang dirancang. Maka beberapa pentolannya kemudian merancang sistem politik sendiri yang dirasa memuaskan, yaitu sistem politik Islam. Langkah-langkah ke arah itu dilakukan dengan sangat seksama oleh SM Kartosoewirjo dengan tulisan-tulisannya³²⁷ dan Teungku M. Daud Beureueh dengan orasi-orasinya di berbagai tempat sepanjang pesisir timur, utara hingga ke barat dan selatan Aceh.

Sementara itu, NU yang telah mengubah dirinya menjadi partai politik menyadari kegagalan demi kegagalan perjuangan politik Islam yang bersifat oposan terhadap kekuasaan pemerintahan, tampil dengan manuver-manuver politik yang sama sekali baru. Dalam perjalanannya sebagai partai politik pada periode Demokrasi Terpimpin, NU tampil sebagai *partner* pemerintah dalam pembangunan politik nasional, dengan harapan mendapatkan kedudukan politik tertentu —seperti pos Departemen Agama. Untuk mempertahankan alokasi itu, tak jarang NU melangkah terlalu jauh, meninggalkan prinsip-prinsip yang ada pada partai-partai Islam lainnya. Kesediaan NU untuk menyuarakan perjuangan Darul Islam sebagai *bughat* (pemberontakan) dan menerima Nasakom, merupakan indikasi betapa

³²⁷ Lihat misalnya SM Kartosoewirjo, *Sikap Hidjrah PSII*, (Malangbong, Batavia-C: Madjlis Tahkim Partai Sjarikat islam Indonesia, 1936); juga SM Kartosoewirjo (Karma Yoga), *Pedoman Dharma Bhakti*, Jilid I dan II, (Malangbong: Penerbit Dewan Penerangan Masjoemi Daerah Priangan, 1951); dan SM Kartosoewirjo, *Haloean Politik Islam*, (Malangbong: Penerbit Dewan Penerangan Masjoemi Daerah Priangan, 1946). Untuk Aceh, lihat Teungku M. Daud Beureueh, “Dakwah”, naskah ketik tak diterbitkan, 1961; Teungku M. Daud Beureueh, “Merdekakanlah Bathinmoe! Katakanlah jang benar walau pahit sekalipoen”, dalam *Sang Saka: Kenangan Berlangsungnya Konferensi Daerah jg Kedoea*, (Koetaradja: Badan Penerangan Markas Daerah “Pesindo” Atjeh, 1946; Teungku M. Daud Beureueh, “Muqaddimah Pelaksanaan Unsur-Unsur Sjari’at Islam”, naskah ketik tak diterbitkan, 1962.

organisasi ini berusaha keras untuk dapat tetap menjadi *partner* pemerintah, karenanya tetap mendapatkan alokasi kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Perebutan demi alokasi kekuasaan yang sempit ini harus dibayar dengan kekalahan demi kekalahan politik Islam secara keseluruhan.

Sekali lagi, kelompok Islam secara simbolik berhasil dikalahkan. Dan di balik kekalahan simbolik itu, selama masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, artikulasi legalistik/formalistik gagasan dan praktik politik Islam, terutama gagasan Islam sebagai dasar ideologi negara, mulai menunjukkan implikasi-implikasi bawaannya yang lebih negatif. Kecuali NU, yang segera mengarahkan kembali orientasi politiknya dan menerima Manipol Usdek-nya soekarno, kekuatan politik Islam menurun drastis. Para pemimpin Masjumi khususnya, yang sejak awal diskursus ideologi di Indonesia dipandang sebagai pendukung-pendukung sejati gagasan negara Islam, dijebloskan ke dalam penjara karena oposisi mereka terhadap rezim yang terus berkelanjutan. Dan akhirnya, Soekarno membubarkan Masjumi pada tahun 1960 dengan alasan bahwa beberapa pemimpin utamanya (seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara) terlibat dalam pemberontakan PRRI. Sebagaimana dikatakan oleh Natsir, “selama masih ada kebebasan partai, selama itu demokrasi ditegakkan. Kalau partai dikubur, demokrasi pun otomatis akan terkubur, dan di atas kuburan ini hanya diktatur yang akan memerintah.” Kedekatan nilai-nilai Islam dengan demokrasi, bagi kalangan politisi parlementer Islam ketika itu, dapat kita lihat seperti “zat dengan sifat Tuhan”. Sepeninggal Masjumi, politik Islam yang berlangsung adalah politik penyesuaian diri. Di antara partai-partai Islam di Indonesia, tiga partai yaitu NU, PSII dan Perti berhasil bertahan hidup selama periode Demokrasi Terpimpin. Keberhasilan partai-partai ini bertahan karena mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan Demokrasi Terpimpin seperti yang dikehendak Presiden Soekarno.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Dewan Konstituante dibubarkan, dan Presiden mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945.³²⁸ Dengan dekrit itu, otomatis persoalan Piagam Jakarta terungkit kembali. Untuk itu, Presiden memutuskan bahwa Piagam Jakarta mempunyai hubungan kesejarahan khusus dengan Undang-Undang Dasar (UUD), karenanya dianggap sebagai suatu bagian integral dari UUD itu sendiri. Pengakuan semacam ini terhadap Piagam Jakarta dapat diartikan sebagai indikasi adanya posisi khusus yang dimiliki umat Islam. Dan tampaknya umat Islam, baik dikarenakan oleh problematika intern yang mereka hadapi, seperti konflik-konflik keagamaan, konsep politik yang tidak begitu jelas dan lain sebagainya, membuat mereka tidak begitu tanggap dalam mempergunakan kemunculan pengakuan terhadap Piagam Jakarta yang kedua kalinya itu.

Di sinilah “politik ketakutan akan mayoritas” dari kalangan minoritas yang ademokratis ikut memainkan peran. Keprihatinan terhadap kemungkinan bahwa kelompok Islam akan memenangkan pemilihan umum menyebabkan para pemimpin dan aktivis politik kelompok nasionalis meninjau kembali strategi mereka berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, salah satu pilihan yang paling memadai

³²⁸ *Dekrit Presiden*, 5 Juli 1959. Bahan Penataran P-4 bagi mahasiswa, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 503.

adalah menunda waktu penyelenggaraan pemilihan umum.³²⁹ Seperti dinyatakan A.R. Djokoprawiro dari Partai Indonesia Raya (PIR), strategi partainya adalah "menunda pemilihan umum sampai posisi para pendukung Pancasila lebih kuat". Pemimpin-pemimpin lain seperti Soekarno, yang saat itu kepala negara, berusaha keras mempengaruhi diskursus politik negara untuk mendukung politik yang sudah di-"dekonfessionalisasi". Pada 27 Januari 1953, dalam safari politiknya di Amuntai (terletak di sebelah selatan Kalimantan yang komunitas Muslimnya sangat kuat), ia mengingatkan para pendengarnya akan pentingnya upaya mempertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan nasional. "Negara yang kita inginkan," katanya, "adalah sebuah negara nasional yang mencakup seluruh Indonesia. Jika kita mendirikan negara yang di dasarkan atas Islam, beberapa wilayah yang penduduknya bukan Muslim, seperti Maluku, Bali, Flores, Timor, Kepulauan Kai, dan Sulawesi, akan melepaskan diri. Dan Irian Barat, yang belum menjadi bagian dari wilayah Indonesia, Akan tidak mau menjadi bagian dari Republik."

Ketika pesta demokrasi yang pertama berlangsung (1955) kelompok Islam hanya menguasai 43,5% kursi di Parlemen membuat mereka sulit untuk segera memutuskan apakah mereka akan terus mendesak gagasan Islam sebagai dasar ideologi negara atau tidak. Para politisi Islam menghadapi dilema berat antara agama dan politik. Secara keagamaan, seperti ditunjukkan oleh salah seorang pemimpin mereka, mereka digerakkan oleh kewajiban transendental untuk menghadirkan watak holistik Islam ke dalam realitas. Secara politis, bagaimanapun mereka tetap harus menunjukkan bahwa mereka adalah politisi-politisi yang tidak mengingkari janji mereka dalam kampanye. Setidak-tidaknya, sementara pada akhirnya akan menerima Pancasila sebagai ideologi negara, upaya mendesak dijadikannya Islam sebagai dasar ideologi negara berfungsi sebagai alat tawar-menawar politik untuk memenangkan tujuan-tujuan politik yang lebih kecil (yakni dilegalisasikannya kembali Piagam Jakarta dan Islam sebagai agama negara).

Pada tanggal 4 Agustus 1949 disusun Delegasi Indonesia yang akan mengikuti perundingan-perundingan dengan Belanda di Den Haag selama Konferensi Meja Bundar. Bertepatan dengan itu Moh. Hatta menyarankan kepada Muhammad Natsir untuk mengadakan hubungan dengan Kartosoewirjo, agar Kartosoewirjo menghentikan semua permusuhan terhadap angkatan Bersenjata Republik. Kemudian Muhammad Natsir menugaskan A. Hassan³³⁰ seorang pemimpin Persis (Persatuan Islam) yang juga mengenal Kartosoewirjo untuk menyampaikan surat yang dibuat oleh M. Natsir dengan menggunakan kertas surat hotel, surat tersebut tidak dianggap sebagai surat resmi, dan ditahan selama tiga hari sebelum diteruskan kepada Kartosoewirjo.³³¹

Sementara itu, Islam modern mencapai puncak-puncak baru. Pada tahun 1923 sekelompok pedagang mendirikan Persatuan Islam di Bandung. Pada

³²⁹ A. Hakim Dalimunthe, *Gerak-gerak Partai Politik*, (Langsa: Gelora, 1951).

³³⁰ Tentang A. Hasan Bandung, lihat S.A. Mugni, *Hasan Bandung, Pemikiran Islam Radikal*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

³³¹ Lihat Yusuf Abdullah Puar, dkk., *Muhammad Natsir 70 tahun: Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1978, hal. 185).

tahun 1924 seorang Tamil kelahiran Singapura bernama A. Hassan (lahir tahun 1887) yang beribukan orang Jawa bergabung dengan organisasi tersebut. Pembelaannya yang gigih terhadap doktrin-doktrin Islam Modern, kecamannya terhadap segala sesuatu yang berbau takhyul (yaitu banyak dari apa yang diterima sebagai Islam yang sebenarnya oleh kaum muslim lokal), perlawanannya yang berapi-api terhadap nasionalisme dengan alasan bahwa nasionalisme telah memecah belah kaum muslim daerah yang satu dengan daerah lainnya, kesemuanya itu membenarkan julukan organisasi tersebut, yaitu 'Persis' (berdasarkan atas kata Belanda *precies*, yaitu tepat). Hal ini mengakibatkan keluarnya banyak anggota kelompok ini yang lebih moderat; pada tahun 1926 mereka mendirikan organisasi tersendiri yang bernama Permufakatan Islam.³³²

Pada tanggal 6 Agustus 1949 Mohammad Hatta berangkat ke Den Haag untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar yang dimulai 12 hari kemudian. Kejadian ini bagi Kartosoewirjo merupakan pertanda untuk bertindak, karena dengan keberangkatan Hatta ke Holland baginya kini terdapat “vakuum kekuasaan”³³³ Tetapi tentunya Kartosoewirjo juga bermaksud untuk menghadapi Hatta pada suatu *fait accompli* sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag dimulai. Kemudian Kartosoewirjo sekali lagi menandatangani perlunya berdiri Negara Islam Indonesia dalam masa “*vacuum of power*” dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah NII No.II/7 yang berbunyi:

Bismillahirrahmannirrahim

MAKLOEMAT PEMERINTAH

Negara Islam Indonesia

No. II/7

Sjahdan, maka perdjoeangan kemerdekaan nasional, jang dimoelakan dengan Proklamasi berdirinja Repoeblik Indonesia, 17 Agoestoes 1945, soedahlah mengachiri riwayatnja. Orang boleh memberi tafsir jang moeloek2, jang memboeboeng tinggi menemboes angkasa; orang boleh tjari lagi alasan2 jang lebih litjin, lebih juridis, lebih *staatsrechtelijk*, *lehin volkenrechtelijk*; tetapi meski dipoetar balik betapa poela, dengan lakoe jang serong dan alasan jang tjurang sekalipoen, orang tak koeasa membalik hitam mendjadi poetih, bathil mendjadi haq, haram mendjadi halal..... sepandai-pandai manoesia bersilat, tidaklah ia koeasa membalik Timoer mendjadi Barat!

Setinggi-tinggi bangau terbang, kembali kekoebangan djoega. Maka Repoeblik djatoeh poela kepada tingkatan sebeloem proklamasi; kembali kepada pokok-pangkal pertama, di tangan moesoeh, di tangan Belanda pendjadjah.

Alhamdoelillah, pada saat kosong (*vacuum*), saat di mana tiada

³³² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (terj.), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hal. 268-269.

³³³ Komando Daerah Militer VI Siliwangi, Team pemeriksa *Berita Atjara Interogasi I*, 16 Juni 1962, hal. 2.

kekoeasaan, dan pemerintahan jang bertanggung jawab (*gezags en regringsvacuum*), maka pada saat jang kritis (membahajakan) dan *psychologisch* lemah itoelah Oemmat Islam Bangsa Indonesia memberanikan dirinja menjatakan sikap dan pendiriannya jang djelas-tegas, kepada seloeroeh doenia: Proklamasi berdirinja Negara Islam Indonesia, 7 Agoestoos 1949. Pada saat itoe, maka otomatis (dengan sendirinja) perdjoeangan kemerdekaan Indonesia beralih arah, bentoek, sifat, tjorak dan toedjoeannya, mendjadilah: perdjoeangan Islam Indonesia.³³⁴

Setelah bermusyawarah dengan petinggi-petinggi Dewan Imamah dan semua unsur-unsur yang terkait dalam wadah T.I.I., maka dengan kebulatan tekad bersama untuk segera memproklamasikan berdirinya negara Islam di Indonesia, maka pada tanggal 12 Sjawal 1368/7 Agustus 1949 di desa Cidugaleun, kecamatan Cilugalar, kawedanan Cisayong, Garut diproklamasikannya Negara Islam Indonesia yang ditanda-tangani oleh S.M. Kartosoewirjo sendiri atas nama Umat Islam Bangsa Indonesia. Selengkapnyanya teks proklamasi NII adalah sebagai berikut:

PROKLAMASI

Berdirinja

NEGARA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Asjhadoe anla ilaha illallah wa asjhadoe anna Moehammadar Rasoeleollah

Kami, Oemmat Islam Bangsa Indonesia

MENJATAKAN:

Berdirinja

„NEGARA ISLAM INDONESIA”

Maka hoekoem jang berlakoe atas Negara Islam Indonesia itoe, ialah:

HOEKOEM ISLAM

Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Allahoe Akbar!

Atas nama Oemmat Islam Bangsa Indonesia

Imam

NEGARA ISLAM INDONESIA

ttd.

(S.M. Kartosoewirjo)

³³⁴ Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo*, (Jakarta: Aryaguna, 1964), hlm. 72-73.

Naskah proklamasi ini sebenarnya sudah pernah disosialisasikan oleh SM Kartosoewirjo pada awal bulan Agustus untuk direncanakan dikumandangkan pada tanggal 13 dan 14 Agustus 1945. Namun, karena problem sosialisasi dan popularitas personal Kartosoewirjo yang tidak seagung Soekarno, maka naskah ini kemudian diproklamasikan di suatu tempat terpencil, di Gunung Cupu, jauh dari hiruk-pikuk pergerakan, sunyi dari debat popularitas. Proklamasi itu, berbeda dengan proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta, pada bagian bawahnya diberi penjelasan yang terdiri atas 10 pasal sebagai berikut:³³⁵

Pendjelasan singkat:

1. Alhamdoelillah, maka Allah telah berkenan menganoegerahkan Koernianja jang Maha Besar atas Oemmat Islam Bangsa Indonesia, ialah: *Negara Koernia Allah, jang melipoeti seloeroeh Indonesia.*
2. Negara Koernia Allah itoe, adalah „*Negara Islam Indonesia*”. Atau dengan kata lain „*Ad-daoelat-oel-Islamijah*” atau „*Daroel Islam*” atau dengan singkatan jang sering dipakai orang „*D.I.*” selandjoetnja hanja dipakai satoe istilah jang resmi, ja’ni „*NEGARA ISLAM INDONESIA*”.
3. Sedjak boelan September 1945, pada ketika toeroennja Belanda di Indonesia choesoes di Poelau Djawa, atau seboelan kemoedian daripada Proklamasi berdirinja „*Negara Repoeblik Indonesia*” maka revoloesi Nasional jang dimoelai menjala pada tanggal 17 Agoestoes 1945 itoe, meroepakan „*perang*” sehingga sedjak masa itoe seloeroeh Indonesia di dalam Keadaan Perang.
4. *Negara Islam Indonesia* toemboeh di masa perang, di tengah-tengah revoloesi Nasional, jang pada achir kemoediannja, setelah Naskah Renville dan Oemmat Islam bangoen serta berbangkit melawan keganasan pendjadjahan dan perboedakan jang dilakoekan oleh Belanda, beralih sifat dan woedjoednja mendjadilah Revoloesi Islam atau *Perang Soetji*.
5. Insja Allah, perang soetji atau revoloesi Islam itoe akan berdjalan teroes hingga:
 - a. N.I.I. berdiri dengan sentaoesa dan tegak tegoehnja, keloear dan ke dalam 100% *de-facto* dan *de jure* di seloeroeh Indonesia.
 - b. Lenjapnja segala matjam pendjadjahan dan perboedakan.
 - c. Teroesirnja segala moesoeh Allah, moesoeh Agama dan moesoeh N.I.I.
 - d. Hoekoem2 Islam berlakoe dengan semporna di seloeroeh N.I.I.
6. Selama itoe „*N.I.I.*” meroepakan: *Negara Islam di masa Perang*, atau *Daroel Islam Fi Waqtil-Harbi*.

³³⁵ Lihat S.M. Kartosoewirjo, *Pedoman Dharman Bhakti*, jilid 1, (Batavia-C: Bagian Penerangan Masjumi Daerah Priangan, 1951).

7. Maka segala Hoekoem jang berlakoe dalam masa itoe, di dalam lingkoengan N.I.I. ialah Hoekoem Islam di masa Perang.
8. Proklamasi ini disiarkan ke seloeroeh doenia, karena Oemmat Islam Bangsa Indonesia berpendapat dan berkejakinan bahwa kini adalah tiba saatnja melakoekan *wadjib soetji*, jang seroepa itoe bagi mendjaga keselamatan N.I.I. dan segenap Ra'iatnja, serta bagi memelihara kesoetjian Agama, teroetama sekali bagi „*Mendhohirkan Keadilan Allah di Doenia*”.
9. Pada dewasa ini Perdjoengan Kemerdekaan Nasional jang dioesahkan selama hampir boelat 4 (empat) tahoen itoe kandaslah soedah.
10. Semoga Allah membenarkan Proklamasi Berdirinja Negara Islam Indonesia itoe, djoea adanja.

Insja Allah Amin.

Bismillahi..... Allahoe Akbar.³³⁶

Kumandang proklamasi ini tersiar ke berbagai negara melalui siaran radio dan selebaran naskah proklamasi. Banyak kalangan menyatakan bahwa dengan kumandang proklamasi NII ini, maka *arasy*³³⁷ Allah di langit pun “bergetar”. Bagi mereka, lahirnya Negara Islam Indonesia sesungguhnya bukanlah hasil rekayasa manusia, bukan keinginan pribadi atau apapun yang berkaitan dengan kekecewaan personal Kartosoewirjo, melainkan *af'alullah*,³³⁸ sesuatu yang sudah dikehendaki Allah. Bagi kalangan DI, berdirinya Negara Islam Indonesia adalah perbuatan serta program langsung dari Allah SWT. Manakala kita mau mengamati dengan arif dan bijaksana perjalanannya sejarah Indonesia, di situ terlihat jelas bahwa manusia hanyalah sebagai *fa'il* (pelaksana program dari keinginan Allah tersebut). Pada saat proklamasi ini diikrarkan, sejak saat itulah Umat Islam di seluruh Indonesia khususnya, telah memperoleh kemerdekaannya secara hakiki, termasuk Aceh.³³⁹ Mereka telah memiliki negara dan pemerintahan yang akan melaksanakan syari'at Islam. Karena sesungguhnya Islam datang untuk memerdekakan seluruh umat manusia. Jika kaum muslimin berada di suatu negara, di manapun di seluruh muka bumi ini, baik mereka menjadi penduduk mayoritas ataukah minoritas. Sementara mereka tidak bebas melaksanakan syari'at Islam dan tidak pula diperintah oleh aturan serta undang-undang Islam. Kenyataan menyesakkan ini juga dirasakan di Aceh di mana mereka telah mengidam-idamkan sebetuk “negara yang Islami” di mana hukum syari'at Islam bisa berjalan.³⁴⁰

³³⁶ Naskah ini, yang aslinya terdapat di Museum Waspada Purwawisesa, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, juga dapat dilihat di dalam buku Pinardi, *Sekarmadji...*, *Op.cit.*, hlm. 74-76.

³³⁷ *Arasy* (bhs. Arab), artinya kursi atau tahta (*throne*). Arasy Allah kira-kira sepadan dengan terjemahan Igris dari “The God's Throne”.

³³⁸ Wawancara dengan Gaos Taufik, Jakarta, 7 Agustus 2001.

³³⁹ *Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia*, 5 Oktober 1953. Di dalam bagian II, disebutkan bahwa (sejak) “Proklamasi NII (7 Agustus 1949) diumumkan, sehingga karenanja, maka sedjak sa'at itu Atjeh dan sekitarnja masuk dalam lingkungan NII, tegasnja: Wilayah 5. Statemen Pemerintah NII ini dikelaurakan di Garut, Jawa Barat, 5 Oktober 1953 sebulan setelah kumandang Proklamasi NBA-NII di Kutradja oleh Teungku M. Daud Beureueh.

³⁴⁰ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik...*, hlm. 40-44.

Hakekatnya mereka belum merdeka, tidak akan pernah ada kebebasan. Apalagi kemerdekaan dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam di sebuah negara yang menolak berlakunya hukum Allah berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Hadits shahih*. Maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk memperjuangkan kemerdekaannya bebas dari segala bentuk belenggu jahiliyah demi kemanusiaan, keadilan, serta kebebasan melaksanakan syari'at Islam. Sebesar apapun aktivitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam di negara yang bukan negara Islam. Dan betapapun barangkali menguntungkannya, segala itu tidak akan dapat menghapus kewajiban mereka untuk berjuang menegakkan Negara Islam, yang menjamin terlaksananya hukum Allah dan Rasul-Nya di muka bumi ini.³⁴¹ Sekarang timbul satu pertanyaan, apakah setiap pribadi muslim menginginkan agar Darul Islam (Negara Islam) itu tegak? Pertanyaan ini patut disertakan, karena masalah Negara Islam ini menjadi polemik yang berkepanjangan di sekitar pandangan kaum muslimin bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada istilah yang memuat tentang Negara Islam tersebut, terlebih lagi bahwa Rasulullah Muhammad saw itu tidak pernah mendirikan Negara Islam atau *Daulah Islam* atau *Darul Islam*.

Kartosoewirjo sebelumnya telah sangat serius merealisasikan gambaran tentang sebuah Negara Islam, ketika pada bulan Mei 1948 membentuk Dewan Imamah, begitu pula Undang-undang Dasar Negara Islam Indonesia (*Qanun Asas*) disertakan penjelasan singkat yang terdiri atas 10 pokok yang konsepnya telah disusun pada bulan Agustus 1948. Maka dengan demikian secara formal telah mendirikan Negara Islam.

Susunan organisasi kenegaraan dari Negara Islam Indonesia pada hakekatnya hanyalah sederhana saja, namun cukup praktis. Bahkan dalam kesederhanaan tersebut tampak adanya originalitas pemikiran Kartosoewirjo dalam mengatur administrasi "pemerintahan" dan "kenegaraan" dan "ketentaraan" yang sedang tumbuh. Ketika Negara Islam Indonesia masih dalam *prototype*, yaitu pengaturan kekuasaan sebelum proklamasi, maka pada tanggal 25 Agustus 1948 dikeluarkan apa yang disebut "Maklumat Imam No 1", di mana disebutkan peraturan-peraturan yang menyangkut bidang pemerintahan baik pemerintahan sipil maupun militer. Dalam maklumat No 1 itu disebutkan juga antara lain bahwa seluruh pimpinan pemerintahan sipil diberi tugas sebagai "Komandan pertahanan" di daerahnya masing-masing, sedang pemimpin ketentaraan diberi tugas sebagai "komandan pertempuran".³⁴² Dalam mengatur kekuasaan yang sedang tumbuh ini Kartosoewirjo mengerahkan potensi yang berada di bawah kekuasaannya. Adapun pembagian administrasi pemerintahan Negara Islam Indonesia sebelum proklamasi adalah sebagai berikut:

1. *Divisi dan Wilayah*. (Wilayah = Propinsi).

³⁴¹ Lihat Daamurasysyi Mujahidain, *Menelusuri Langkah-langkah Jihad SM Kartosoewirjo*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 1998), hlm. 52-53.

³⁴² Lihat Makloemat Komandemen Tertinggi NII, No. 1, dalam lampiran Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo*, (Jakarta: Darul Falah, 1999).

Divisi adalah pemerintahan militer yang dipimpin oleh panglima Divisi dan Gubernur bertindak selaku Komandan Pertahanan bagian Politik. Divisi adalah untuk kesatuan prajurit dalam jajaran militer. Sementara wilayah adalah kesatuan administratif sipil setingkat propinsi. Penggabungan keduanya —sipil dan militer— ini menunjukkan bahwa kondisi perang mengharuskan sipil dipermiliterkan dan militer mengerti dan menjalankan tugas-tugas adab secakap para pegawai dan manager sipil.

2. *Resimen dan Residensi.* (Keresidenan).

Pemerintahan militer dipimpin oleh Komandan Resimen dan Residen bertindak selaku komandan Pertahanan Daerah dan bagian politik.

3. *Batalyon dan Kabupaten.*

Pemerintahan militer dipimpin Komandan Batalyon dan Komandan Pertahanan Kabupaten I dan II dipimpin oleh Bupati I dan II.

4. *Kecamatan.*

Dipimpin oleh Camat/Wakil Camat dan Komandan pertahanan kecamatan I dan II.

Berhubung tidak ada parlemen, semua peraturan Negara Islam Indonesia dikeluarkan oleh Komandemen Tertinggi sebagai lembaga eksekutif tertinggi, yaitu Dewan Imamah yang dulu, dalam bentuk Maklumat yang ditandatangani oleh Imam dan kemudian dibagi-bagikan.³⁴³ Adapun anggota Dewan Imamah yang pertama kali terbentuk setelah proklamasi Negara Islam Indonesia adalah:

Imam dan Panglima Tertinggi ³⁴⁴)	: S.M. Kartosoewirjo.
Wakil Imam dan Komandan Divisi	: Kamran.
Menteri Dalam Negeri	: Sanusi Partawidjaja.
Menteri Penerangan	: Toha Arsyad.
Menteri Keuangan	: Udin Kartasasmita.
Menteri Pertahanan	: R. Oni .

Pada saat situasi perang, lembaga legislatif, parlemen yang *me-review* dan *men-supervisi* jalannya pemerintahan oleh lembaga eksekutif belum saatnya diperlukan. Negara sedang berjuang, maka unsur-unsur yang efektif berguna untuk keperluan perjuangan (bersenjata) itulah yang diperlukan. Namun, bukan berarti bahwa hukum tidak berjalan. Meskipun dalam keadaan perang, hukum tetap dijunjung tinggi. Darul Islam adalah perjuangan “meninggikan

³⁴³ Holk H. Dengel, *Darul Islam...*, hlm. 113.

³⁴⁴ SM Kartosoewirjo, dalam segala keterbatasan harus merangkap sebagai Kuasa Usaha (Menteri Luar Negeri).

kalimat Tuhan, dan menjalankan hukum-hukum Tuhan”.³⁴⁵ Pada tanggal 3 Oktober 1949 keluarlah Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1 tentang penyesuaian susunan pemerintahan (Administrasi Pemerintahan NII) dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung saat itu.³⁴⁶ Dalam penjelasan Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1 tersebut antara lain dikatakan sebagai berikut:

*“Segala model organisasi dibentok dengan tjara jang amat praktis jang sekiranya dapat menoenaikan wadjibnja dengan tjepat dan tepat sesoeai dengan toentoetan pergolakan revoloesi. Dan segala sesoeatoe jang menghambat, memperlambat, menghalangi dan menentang kepada hoekoem revoloesi itoe haroes dan wadjiblah diloempoehkan, dipatahkan dan dimoesnahkan”.*³⁴⁷

Inilah beberapa sebab, maka:

“Komandemen Tertinggi merasa wadjib, dengan selekas moengkin mengoebah Soesoenan Pemerintahan Negara Islam Indonesia dengan woedjoed „Komandemen Tertinggi Angkatan Perang NII”. Dengan bentok sekarang, maka oeroesan politik dan militer dipersatoekan. Bahkan segala oesaha dan tjabang2nja „Pemerintahan Negara Islam Indonesia” disesoeaikan dengan beleid politik dan gerakan militer. Ahli politik haroes di-permiliter-kan (gemilitarieseerde politici). Sebaliknya ahli militer haroes di-perpolitik-kan (verpolitiseerde militairen).

Spesialisasi antara sipil dan militer akhirnya lebur, jika harus berjuang — kira-kira mungkin demikianlah yang ingin disampaikan oleh Darul Islam— maka siap-siap angkat kaki, ke gunung, bergerilya di mana pun, angkat senjata dan “musuh djahanam” sudah menunggu di depan yang “*tiap2 tetes darah pantjasila halal-lah hukumnja*”.³⁴⁸ Tidak ada waktu lagi untuk berdiskusi, berdebat dan berkontemplasi tentang dunia dan segala persoalannya.

Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1 tersebut dalam batas-batas tertentu juga dapat memberikan gambaran sampai di mana dinamika cara berpikir Kartosoewirjo dalam usahanya untuk mengemudikan dan menguasai NII yang sedang tumbuh dalam masa pancaroba itu. Pemisahan kekuasaan politik dan militer sebagaimana dipraktekkan oleh RI dan yang ternyata banyak merugikan perjuangan itu telah memberikan pelajaran bagi Kartosoewirjo untuk mengeluarkan MKT No.1 tersebut.³⁴⁹ Dengan demikian maka pimpinan pemerintahan dan kenegaraan dapat dipersatukan dan tidak akan terjadi dualisme dalam pimpinan. Sementara di Aceh, di mana setelah masa-masa yang sulit dalam konflik yang berkepanjangan dan ketidakpuasan yang menggumpal dalam dada, kekecewaan yang terus-menerus menyesak dada, para intelektual, ulama, pedagang, petani subsisten, nelayan dan *pawang laot* dan para pemuda-pemudi telah lebur dalam suatu gairah jihad berjuang hingga syahid atau menang. Ketika struktur ini sampai

³⁴⁵ *Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia*, 5 Oktober 1953.

³⁴⁶ S.M. Kartosoewirjo (nama pena: Karma Yoga), *Pedoman Dharma Bakti*, jilid I, hlm. 24.

³⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 33-34.

³⁴⁸ *Ibid.*

³⁴⁹ Tentang Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1 (MKT No.1), lihat Al Chaidar, *Pemikiran Politik...*, bagian lampiran.

di tangan Teungku Daud Beureueh, maka tidak ada kata lain selain langsung mengisi jabatan-jabatan tersebut, ibarat mengisi sebuah formulir kosong yang diminta untuk diisi. Tidak ada cing-cong dalam “masa memberontak”.³⁵⁰

Terutama untuk mencegah dualisme dan pertentangan yang mungkin disebabkan oleh perasaan superior antara satu golongan dengan golongan lainnya. Misalnya golongan militer yang merasa lebih tinggi daripada golongan sipil atau sebaliknya. Program yang telah dirancang oleh Kartosoewirjo tersebut pada hakekatnya memang baik untuk dipraktekkan dalam negara yang sedang masa bergolak atau dalam keadaan perang. Kepentingannya terutama terletak pada penyatuan pimpinan dan potensi yang ada dalam negara tersebut. Masing-masing pemimpin dari suatu daerah, baik ia militer maupun sipil dapat dengan mudah dan lancar menggerakkan alat-alat kekuasaan yang ada pada mereka. Seorang komandan sipil yang telah dimiliterisir kalau perlu dapat memberikan perintah kepada anggota-anggota pasukan bersenjata untuk menghadapi suatu keadaan yang timbulnya secara tiba-tiba. Demikian pula seorang Komandan militer yang telah diverpolitiser dapat memerintahkan alat-alat kekuasaan sipil, sekiranya memang diperlukan.

Jika di suatu daerah yang dikuasi DI antara pimpinan militer dan sipil tidak ada persesuaian paham dalam menghadapi sesuatu persoalan, maka pimpinan yang lebih tinggi akan mengambil kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan mendamaikan perselisihan yang terjadi antara kedua pimpinan daerah tersebut. Dan apabila usaha dari pimpinan yang lebih tinggi tersebut tidak berhasil maka diadakanlah mutasi atau pemindahan dari salah seorang pimpinan daerah tersebut sampai kedua pimpinan dalam suatu daerah tersebut benar-benar merupakan dwi-tunggal. Demikianlah salah satu dari segi kebaikan dari sistim penyatuan pimpinan yang pernah dipraktekkan oleh Kartosoewirjo untuk mengatur kekuasaan dalam Negara Islam Indonesia.

Selanjutnya mari kita lihat bagaimana susunan bagian dari sistem pemerintahan Negara Islam Indonesia dalam keadaan perang berdasarkan maklumat Komandemen Tertinggi Negara Islam Indonesia No.1³⁵¹ tersebut:

**ORGANISASI PEMERINTAHAN
NEGARA ISLAM INDONESIA**

Menurut Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1

1. Komandemen Tertinggi (K.T). *Pimpinan Umum*, politis dan militer dipegang oleh *Imam sebagai Panglima Tertinggi. Pimpinan Harian*, dilakukan oleh *Kepala Staf Umum* (K.S.U.) atau “Generale-Staf”.

2. Komandemen Wilayah (K.W). *Pimpinan Umum*, politis dan militer dilakukan oleh *Panglima Komandemen Wilayah* (Plm. K.W.), selanjutnya bila berhalangan, maka kewajiban itu dilakukan oleh *Kmd. II dan Kmd. III* (wkl. I dan wkl. II Plm. K.W.). Selainnya, jika dilakukan pembagian pekerjaan yang

³⁵⁰ Wawancara dengan Komandak Ishak Ibrahim, Banda Aceh, 24 Juli 2006.

³⁵¹ Dengel, *Darul Islam dan Kartosoewirjo....*, hlm. 65.

merupakan pembagian tugas. *Pimpinan Harian*, oleh Kepala Staf Komandemen Wilayah (K.S. K.W.).

3. Komandemen Daerah (K.D). *Pimpinan Umum*, oleh Kmd. K.D. (Kmd. I). Jika berhalangan, pindah tugas itu kepada *Kmd. II dan Kmd. III* (wkl. 1 Kmd. K.D dan wkl. Kmd. K.D.). Selainnya, jika dilakukan pembagian pekerjaan yang merupakan pembagian tugas. *Pimpinan Harian*, dilakukan oleh Kepala Staf (K.D) (K.S.K.D.)

4. Komandemen Kabupaten (K.K.). *Pimpinan Umum*, oleh Kmd. K.K. (Kmd.I.) Jika berhalangan, maka kewajiban itu beralih kepada Kmd. II dan Kmd. III (wkl. I dan wkl. II Kmd. Kmd. K.K.). Selainnya, jika dilakukan pembagian pekerjaan yang merupakan pembagian tugas. *Pimpinan Harian*, dipegang oleh Kepala Staf K.K. (K.S.K.K.).

5. Komandemen Kecamatan (K. Kt). *Pimpinan Umum*, oleh K. Kt. (Kmd. I), atau Kmd. II, (wkl. I Kmd. K. Kt.). *Pimpinan Harian*, oleh Kepala Staf K. Kt. (K.S.K.Kt.).

Untuk melengkapi administrasi kenegaraan, maka Negara Islam Indonesia menetapkan “Administrasi Keuangan Negara” guna menstabilkan roda pemerintahan negara yang serasi dengan tuntutan negara di masa perang, hingga sanggup dan siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan (*war minded*).³⁵² Dalam manifesto politiknya yang dikeluarkan tak lama setelah proklamasi NII, Kartosoewirjo menentang Konferensi Meja Bundar (KMB) dan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Pernyataan dia dalam manifesto tersebut adalah sebagai berikut:

*“Telah tiba saat jang menentoekan nasib bangsa Indonesia, teroetama nasib Oemat Islam Indonesia. Perdjoengan kini haroes diteroeskan dengan Islam sampai Mardlotillah tertjapai, itoe adalah satoe-satoenja djalan oentoek membebaskan Oemat Islam dari segala penderitaan di doenia dan di achirat.”*³⁵³ *Moesoeh-moesoeh Allah, moesoeh-moesoeh agama Islam dan moesoeh Negara Islam Indonesia haroes dihantjoerkan agar hoekoem Islam jang sesoeai dengan adjaran Al-Qoer’an dan Soennah Nabi setjara menjeloeroeh dan oetoe dapat dilaksanakan di seloeroeh Indonesia.*

Menurut *Manifesto Politik*-nya Kartosoewirjo menjelaskan bahwa:

“Negara Islam Indonesia dapat mendjalin hoeboengan dengan setiap negara lain, tetapi dengan sjarat, negara terseboet haroes mengakoei Negara Islam Indonesia, bahkan djoega dengan Belanda Negara Islam Indonesia dapat mengadakan hoeboengan berdasarkan sjarat terseboet”. Karena Islam mentjakoep semoea aspek kehidoepan manoesia, boekan hanja jang berhoeboengan dengan keachiratan, melainkan djoega jang berhoeboengan dengan kehidoepan bermasjarkat dan bernegara, maka setjara teoritis di dalam seboeh negara Islam tidak terdapat pemisahan antara negara dan pemerintah, antara politik dan agama. Ada doea anasir jang haroes disatoekan, pertama: “Satoe negara jang berdaoelat penoeh 100 % keloear dan kedalam, “de facto dan de jure”. Kedoea: “Haroes ada peratoeran Allah, jang meroepakan agama Allah, atau agama Islam”. Kedoea anasir ini haroes bersatoe atau

³⁵² S.M. Kartosoewirjo (nama pena: Karma Yoga), *Pedoman Dharma Bakti*, Jilid I, hlm. 229.

³⁵³ Siliwangi dari Masa ke Masa (1979), hlm. 319.

*dipersatukan. Boekan sebagai minjak dan air jang ada di seboeah perioek.*³⁵⁴

Sementara itu sejak tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 dalam Konferensi Meja Bundar Di Den Haag dibahas masa depan Indonesia, salah satu hasilnya adalah perjanjian tentang “penyerahan” kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat.³⁵⁵ Di samping itu dari perjanjian-perjanjian tersebut banyak dikaitkan dengan persetujuan lain yang mengarah ke suatu ketergantungan langsung RIS kepada Belanda dan memungkinkan Belanda mengontrol politik dalam dan luar negeri RIS. Masalah berikutnya adalah peleburan anggota-anggota KNIL ke dalam APRIS dan pembentukan misi militer Belanda yang akan ditugaskan untuk melatih anggota-anggota APRIS.³⁵⁶ Dan yang terpenting dari masalah itu adalah bagaimana upaya pemerintah RIS yang dipimpin oleh Soekarno menyelesaikan kasus Darul Islam sampai tuntas.

Pada akhir bulan Oktober 1949 rancangan Undang-Undang Dasar RIS selesai disusun, dan pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS. Sehari kemudian Soekarno diangkat kembali menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Dalam sebuah keterangan pemerintah NII pada awal Oktober 1949, Kartosoewirjo mengumumkan pendapatnya tentang Konferensi Meja Bundar:

*“Konferensi terseboet boekantlah seboeah konferensi antara doea negara jang berdaelat. Negara soedah didjoel! Kedaoelatan telah moesnah! Kemerdekaan djatoeh di tangan moesoeh!”*³⁵⁷

Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda membuat keadaan lebih mendesak bagi Soekarno, Bagaimana caranya untuk mencari penyelesaian masalah secepatnya tentang Negara Islam Indonesia yang telah diproklamasikan oleh Kartosoewirjo. Namun Pemerintah RIS dan Tentara Republik merasa dihadapkan pada suatu dilema. Karena sebagian dari Tentara Republik yang tergabung di dalam TNI tidaklah mungkin menindak secara cepat para Tentara Islam Indonesia disebabkan sedikitnya jumlah pasukan dan tidak dimilikinya senjata serta perlengkapan. Di samping itu, lawan mereka walaupun dipandang dengan sebelah mata ternyata memperoleh simpati yang sangat besar dari rakyat Jawa Barat. Itulah sebabnya mengapa kebijaksanaan pemerintah sering berubah dalam menghadapi persoalan ini. Apakah ingin melakukan tindakan operasi militer atau memberikan amnesti?³⁵⁸ Selain daripada itu banyak sekali kritikan yang dialamatkan kepada pemerintah tentang penyelesaian masalahnya, terutama dari kalangan politisi Islam yang mendesak untuk diadakan perundingan.

³⁵⁴ Holk H. Dengel, *Darul Islam...*, *Op.cit.*, hlm. 120. Lihat juga SM Kartosoewirjo, *Manifesto Politik Negara Islam Indonesia*, dalam Al Chaidar, *Pemikiran Politik Prklamator Negara Islam Indonesia*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), bagian lampiran.

³⁵⁵ Staf Keamanan Nasional, *Instruksi Menteri Keamanan Nasional No. III/B0048/1961, Tentang Pelaksanaan Kebidjaksanaan Terhadap Pemberontak dan Gerombolah jang Menjerah*, 8-9-1961, oleh A.H. Nasution.

³⁵⁶ Komando Daerah Militer VI Siliwangi, Team Pemeriksa, *Berita Atjara Interogasi VI*, *Op.cit.*, hlm. 8.

³⁵⁷ Mahkamah Angkatan Darat dalam Keadaan Perang untuk Djawa dan Madura, *Berkas Perkara No. X/III/8/1962*, *Op.cit.*, hlm. 81.

³⁵⁸ C. Van Dijk, *Darul Islam...*, *Op.cit.*, hlm. 98-99.

Maka pada bulan Desember 1949 diadakan sebuah usaha untuk membujuk atau menyadarkan Kartosoewirjo supaya dia kembali ke dalam pangkuan Republik. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah RIS yaitu dengan menugaskan menteri agama K.H. Masjkur yang akan berangkat ke Yogyakarta untuk mengadakan pembicaraan dengan Kartosoewirjo. Namun gagal disebabkan K.H. Masjkur tidak bertemu dengannya.³⁵⁹

Dalam Kongres Muslimin Indonesia pada tanggal 20-25 Desember 1949, ada usaha untuk memasukkan pembahasan mengenai perjuangan DI/TII. Di mana sebagian besar dari pembicaraan para peserta kongres membela Kartosoewirjo, mereka menerangkan bahwa perjuangan DI/TII itu bukan menentang Republik melainkan ditujukan menentang Belanda. Kongres juga menyebut bahwa “anak-anak kita” yang telah mempertahankan Jawa Barat dengan gigihnya berperang, telah melemahkan pengaruh Belanda di mata internasional dan melemahkan kekuatan militer Belanda. Justru sebaliknya memperkuat posisi Republik dalam setiap perundingannya.³⁶⁰ Dalam kongres itu juga dinyatakan, mengapa Republik kemudian tidak berusaha untuk mengadakan kompromi dengan perjuangan DI/TII. Bila Republik telah bersedia untuk bekerja sama dengan negara-negara boneka yang mengkhianati Republik, mengapa Republik tidak pula menempuh jalan kompromi dengan perjuangan DI/TII. Bagaimanapun penggunaan kekerasan tidak akan membawa penyelesaian masalah melainkan hanya menyebarkan benih dendam dalam hati umat Islam terhadap Republik.³⁶¹ Selanjutnya dianjurkan supaya pemerintah RIS menyelesaikan masalah DI/TII dengan jalan damai, dan dalam kongres Muslimin tersebut menyokong resolusi Mukhtar Masjumi untuk membentuk sebuah komisi pemerintah untuk menyelesaikan masalah DI/TII. Yang dikritik pula adalah Maklumat Rahasia MBKD No. V. Dalam maklumat tersebut diperintahkan kepada semua instansi, militer, polisi, dan pamongpraja untuk mengawasi gerak-gerik umat Islam. Sebagai akibat adanya maklumat itu, anggota Masjumi didaftar, di setiap rapat-rapat Masjumi dihadiri oleh agen pemerintah. Penderitaan dan korban yang diberikan umat Islam demikian diterangkan, umat Islam dihukum dengan sikap curiga, tuduhan dan pengawasan.

Melihat kenyataan pahit yang dirasakan oleh setiap partai, pada tanggal 1 Januari 1950 Kartosoewirjo mengeluarkan Maklumat Komandemen Tertinggi No. 5 yang isinya antara lain:

“Menimbang bahwa lebih besar moedharat dan keroegiannja, bagi Negara dan Agama Allah serta Oemmat Islam Bangsa Indonesia, akan adanja soeatoe organisasi, party, perhimpoean, perkoempoelan, gerakan atau apapoen djoega, di loear organisasi Negara, atau di loear organisasi jang dibentoeck/disahkan oleh pemerintah. Maka memoetoeskan dilarang keras mendirikan, membentoeck dan mempropagandakan satoe organisasi, di loear dan selain daripada organisasi Negara, atau organisasi jang dibentoeck/disahkan oleh Pemerintah. Dan dileboer dalam salah satoe bagian daripada organisasi Negara, atau salah

³⁵⁹ Lihat Soebagio I.N., *K.H. Masjkur: Sebuah Biografi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 83, sebagaimana dikutip Holk H. Dengel, *Darul Islam...*, *Op.cit.*, hlm. 123.

³⁶⁰ *Buah Congres Muslimin Indonesia*, hlm. 165.

³⁶¹ *Ibid.*, hlm. 165.

*satoe bagian daripada organisasi jang dibentoek/ disahkan oleh Pemerintah.*³⁶²

Setelah Belanda meninggalkan kekuasaannya di Indonesia, maka semakin hebatlah pertarungan politik di Indonesia. Kini ada 3 kekuatan yang saling tarik menarik untuk mempengaruhi peta politik yang sedang berkembang saat itu. Terutama dari kalangan Komunis, mereka berusaha selalu masuk dalam sendi-sendi kehidupan politik Indonesia dan mereka berupaya untuk mengadu kekuatan Nasionalis Islam dengan Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Oleh karena itu dalam setiap maklumat-maklumat yang dibuat oleh Komandemen Tertinggi makin sering menyerang Komunis yang dinyatakannya sebagai musuh utama. Dalam nota rahasia pada bulan Oktober 1950 yang dikirim kepada Soekarno, Kartosoewirjo menawarkan pada Soekarno agar bersama-sama dengan Negara Islam Indonesia membasmi komunisme dan meninggalkan politik netral yang dipraktekkan selama itu. Apabila RI mengakui NII, Kartosoewirjo menjamin bahwa RI akan mempunyai "sahabat sehidup semati" dalam menghadapi segala kemungkinan, terutama menghadapi komunisme, karena nasionalisme tidak dapat mengikat jiwa rakyat Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam. Kekuatan untuk membendung komunisme, menurut Kartosoewirjo hanya dimiliki Islam, karena itu secepatnya membuat Islam sebagai dasar negara.³⁶³

Sebuah nota rahasia berikutnya yang isinya mirip seperti nota di atas, dikirimkan Kartosoewirjo kepada Sukarno pada bulan Februari 1951. Nota tersebut merupakan penjelasan nota sebelumnya. Kata Kartosoewirjo, "*Pemimpin RI mempoenjai tangoengdjawab oentoek membendoeng "aroes merah" dan sekaligoes haroes siap oentoek menghadapi "Perang Barata Joeda Djaja Binangoen"*. Dia meramalkan dalam notanya ini, bahwa nasionalisme Indonesia akan mengalami perpecahan, sebagian akan mengikuti komunisme dan sebagian lagi menggabungkan diri dengan golongan Islam.³⁶⁴ Kartosoewirjo menerangkan, bahwa di Indonesia sejak tiga tahun berdirilah dua negara yang berbeda dalam hukum dan pendirinya, berlainan sikap dan haluan politiknya, bertentangan maksud dan tujuannya; pendek kata berselisih hampir dalam setiap hal. Filsafat Pancasila dinamakannya sebagai satu campuran masakan yang terdiri dari pada Sintoisme, Hokko Itciu, Islam-syirik dan nasionalisme jahil yang kemerah-merahan.³⁶⁵

Namun amat disayangkan kedua nota tersebut tidak pernah dijawab oleh Soekarno, sehingga Kartosoewirjo menyesalkan, bahwa pemerintah RI tidak menjawab kedua nota rahasianya, melainkan mencap negaranya sebagai "gerombolan Darul Islam", pemberontak, perampok, dll, dan menyerang negaranya dengan kekuatan senjata. Semua usaha pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah DI/TII secara damai dinamakannya sebagai perbuatan khianat dan sebagai penipuan. Yang sangat memalukan sekali

³⁶² S.M. Kartosoewirjo (nama pena: Karma Yoga), *Pedoman Dharma Bakti*, Jilid I, (Batavia-C: Seksi penerangan Masjumi Priangan), hlm. 52.

³⁶³ S.M. Kartosoewirjo (nama pena: Karma Yoga), *Salinan Pedoman Dharma Bakti*, Jilid II, Nota Rahasia 22.10.1950, hlm. 345-252.

³⁶⁴ *Ibid.* Lihat juga Nota Rahasia 17.2.1951, hlm. 353-360.

³⁶⁵ *Ibid.* Lihat juga "Manifesto Politik Negara Islam Indonesia No. V/7", dalam *Pedoman Dharma Bhakti* Jilid ke-2, hlm. 334.

bahwa diikuti sertakannya para alim ulama sebagai penghubung dan pengantara. Yang pada akhirnya Kartosoewirjo menamakan Republik Indonesia sebagai “*Republik Indonesia Komoenis*” (RIK) dan angkatan perangnya sebagai “*Tentara Republik Indonesia Komoenis*” (TRIK). Dalam *Manifesto Politik*, Kartosoewirjo memberikan restrospeksi pada perkembangan politik Indonesia secara menyeluruh dan menjelaskan pandangannya tentang masa depan negeri ini. Dengan judul *Manifesto Politik*, SM Kartosoewirjo membuat suplemen tulisan berjudul “Heru Tjokro bersabda: Indonesia kini dan kelak”. Menurutnya “Heru Tjokro” menggambarkan satu makhluk Allah yang menguasai dan memutarakan roda dunia menuju Mardlotillah sejati, yaitu Negara Islam Indonesia. Heru Tjokro diartikan sebagai:

*“Penjapoe masjarakat Djahiljah, pembela gelap goelita, pembasmi barang siapa jang chianat dan moertad, koefoer, dan moenafiq tjoerang dan serong, pendjoedal Agama dan Negara. Tegasnja: segala anak-tjoetjoe iblis la’natoellah jang kini masih leloeasa berkeliaran di tengah-tengah masjarakat dan rakjat Indonesia. Pelepas dan pembebas bagi segenap perikemanoesiaan, daripada bentjana dan malapetaka, dlohira dan batin, di doenia dan achirat kelak”.*³⁶⁶

Melihat karakteristik yang seperti yang disebutkan oleh Karto di atas, maka, Teungku Daud Beureueh dapat disebutkan sebagai penjelmaan Heru Cokro tersebut. Selanjutnya Kartosoewirjo menulis di dalam *Statement Negara Islam Indonesia*, bahwa Soekarno telah menerangkan, Negara Islam Indonesia tidak bersedia diadjak beroending.

*“Kapan RIK mengadjak beroending, atau kapan mereka maoe beroending, demikian pertanjaannya: “Negara Islam Indonesia doea kali kirim nota rahasia, apa reaksi atas nota terseboet? Lebih baik Soekarno soeroeh periksa otak dan hatinja oleh achli djiwa jang tjakap dan berani teroes terang menjatakan penjakit Bung Karno beserta RIK. Lebih baik istirahat di Tjikeumeuh, Bogor (R.S. Gila) daripada memboeat bentjana di tengah-tengah oemmat dan negara, hanja oentoek menoeroet nafsoe merah Moskow belaka”.*³⁶⁷

Bagi Karto, Moskow adalah poros yang sedang dianut kuat oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno, yang bagi Kartosoewirjo, adalah gangguan jiwa yang perlu bantuan perawatan Rumah Sakit Jiwa di Cikeumeuh Bogor. Gaya radikal, ceplak-ceplak dan keras karena komitnya yang keras terhadap Islam, membuat SM Kartosoewirjo cocok untuk karakter tegas Teungku Daud Beureueh dan rakyat Aceh pada umumnya.

Maka bisa dibayangkan bagaimana marahnya Soekarno yang disebut “gila” oleh Kartosoewirjo sehingga ia tidak segan-segan meminta parlemen menyetujui pengiriman pasukan TRI³⁶⁸ untuk menggempur TII di Jawa Barat. Demikianlah cara Soekarno yang telah menjatuhkan vonis salah kepada temannya sendiri yang telah lama dikenalnya. Ketika Mohammad Natsir mulai menjabat sebagai Perdana Menteri, dia memasukkan persoalan DI/TII dalam

³⁶⁶SM Kartosoewirjo, *Manifesto Politik Negara Islam Indonesia*, (Garut: naskah tak diterbitkan, 1950), hlm. 260-344.

³⁶⁷Lihat *Buku Sejarah Dokumenter, Buku Induk I*, Jilid II, Bab V (A), *Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia No. VI/7*, 25.5.1955.

³⁶⁸TRI (Tentara Republik Indonesia) adalah singkatan yang digunakan oleh militer Indonesia ketika itu, sebelum akhirnya berubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).

program kabinetnya. Awal mula yang dijalankannya dia berusaha untuk memecahkan masalah perjuangan D.I lewat cara damai dengan mengutus beberapa tokoh yang dekat dengan Kartosoewirjo. Pada tanggal 14 Mei 1950, Natsir mengutus Wali Al-Fatah untuk berangkat ke Priangan menemui Kartosoewirjo. Namun pertemuan itu gagal karena pasukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) di bawah perintah Kolonel Nasuhi yang sebelumnya telah membuat perencanaan pertemuan tersebut mengepung sebuah kesatuan TII terdiri dari kira-kira 100 tentara yang ditugaskan untuk menjamin keamanan pertemuan itu. Dalam pertempuran yang selanjutnya terjadi, gugurlah Toha Arsjad Menteri Penerangan NII.³⁶⁹ Namun, seorang syahid, lainnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa di berbagai daerah sehingga DI menyebar dengan gerak merayab ke Jawa Tengah, daerah demi daerah, wilayah demi wilayah, desa demi desa; bagai ulat memakan daun hijau yang masih muda.

Kemudian PM Natsir mengadakan usaha berikutnya, ketika dia pada tanggal 14 November 1950 menawarkan amnesti bagi semua kelompok bersenjata yang belum menggabungkan diri dengan Republik dan masih memusuhi pemerintah RI.³⁷⁰ Natsir menugaskan Kyai Muslich, kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan pesan pemerintah kepada Amir Fatah Widjajakusuma, pemimpin perjuangan Darul Islam di Jawa Tengah.³⁷¹ Dalam perjalanan menuju Jawa Barat Amir Fatah dan pasukannya selalu diikuti pasukan pemerintah hingga dia akhirnya menyerah di Jawa Barat tanpa bertemu dengan Kartosoewirjo.³⁷²

Pada akhir Desember 1950 Natsir menugaskan kembali Kyai Muslich untuk menyampaikan amanat pemerintah RI kepada "Tuan Kartosoewirjo". Muslich dibawa ke markasnya Kartosoewirjo di Gunung Galunggung oleh seorang penghubung perjuangan Darul Islam yang hidup di Bandung. Sebelum keberangkatannya, Kyai Muslich masih menemui Panglima Teritorium III/Siliwangi, Kol. Sadikin dan kemudian mendapat disposisi yang ditandatangani oleh Kepala Staf Letkol Soetoko yang berbunyi: "*Berikan bantuan seperlunya, supaya order YM Perdana Menteri dapat dilaksanakan dalam tempo dekat*". Setelah tiba di tempat tujuan Kyai Muslich tidak bertemu muka dengan Katoewirjo yang dia sudah kenal sejak tahun tigapuluhan ketika sama-sama menjadi anggota PSII. Lewat ajudannya Kartosoewirjo menyampaikan pesan, bahwa sebenarnya dia ingin bertemu dengan Kyai Muslich, namun sebagai Imam dan Panglima Tertinggi NII dia tidak dapat menerima seorang kurir dari kedudukan serendah Kyai Muslich. Sebaiknya pemerintah di Jakarta mengirimkan seorang utusan yang resmi, maka dia akan menerimanya. Tetapi sebelumnya, pemerintah RI harus mengakui Negara Islam Indonesia dulu. Menurut Kyai Muslich, dia dititipi 2 surat untuk PM Natsir, yang satu katanya untuk Natsir pribadi. Dalam surat tersebut Kartosoewirjo menulis pada Natsir, bahwa sebagai Perdana Menteri, Natsir punya kekuasaan untuk menambahkan huruf "I" berikutnya di belakang RI,

³⁶⁹ Lihat *Merdeka*, 26.5.1950.

³⁷⁰ Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, Jilid II, (Bandung & The Hague: W. Van Hoeve, 1945), hlm. 8.

³⁷¹ *Merdeka*, 20.6.1950.

³⁷² *Kiblat XVIII* No. 24, 1981, hlm. 13.

menjadi “Republik Islam Indonesia”. Sekiranya Natsir berbuat demikian maka dia akan mempunyai dukungan sepenuhnya dari pihak NII dalam segala hal. Dalam surat berikutnya yang ditujukan kepada Moh. Natsir sebagai Perdana Menteri, Kartosoewirjo menamakan amanat pemerintah RI sebagai “panggilan daun nyiur” karena semua anggota kelompok bersenjata yang menyerah, harus membawa daun nyiur sebagai tanda tekad mereka yang damai.

Tetapi selama masa berlakunya amnesti yang dikeluarkan oleh Muh. Natsir atas nama pemerintah, hanya sedikit dari anggota kelompok bersenjata TII yang turun gunung. Lagi pula, sementara amnesti tersebut masih berlaku, Panglima Teritorium III Jawa Barat mengeluarkan instruksi yang menyatakan 16 organisasi sebagai organisasi terlarang, termasuk perjuangan DI/TII.³⁷³ Banyak dari mereka yang tertangkap adalah politisi dari kalangan Masjumi.³⁷⁴ Sebagai akibat kegagalan himbauan pemerintah RI, dan Moh. Natsir juga menyesalkan, bahwa dia dikecam. Maka pada bulan Desember, Natsir didukung oleh pihak militer mengambil langkah-langkah yang lebih keras dengan menjalankan Operasi Merdeka untuk menjawab seluruh permasalahan tentang Darul Islam.

Menurut Nasution, sudah tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah keadaan perang yang harus dihadapi secara perang pula karena intensitas peperangan ini tidak kalah dengan perang gerilya melawan Belanda.³⁷⁵ Nasution juga menyesalkan sikap pemerintah yang sampai saat itu hanya mengambil tindakan “setengah hati” saja terhadap pemberontakan Darul Islam. Lagi pula semua tindakan tidak pernah dikoordinasi satu dengan yang lainnya.³⁷⁶ Juga hanya 10% dari seluruh pasukan Divisi Siliwangi mengambil bagian dalam penumpasan perjuangan Darul Islam pada waktu itu.³⁷⁷

Semakin pihak RI mengadakan penumpasan terhadap perjuangan Darul Islam, bagi kalangan pemberontak menganggap di situ pula kiranya Allah memberikan pertolongan-Nya terhadap perjuangan Kartosoewirjo ini. Dengan “Kurnia Allah” pada tanggal 20 Januari 1952, Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan Kartosoewirjo diterima oleh Kahar Muzakkar yang siap menggabungkan diri dalam NII.³⁷⁸ Dan siap pula menerima tawaran Kartosoewirjo untuk memegang pimpinan Tentara Islam Indonesia. Yang berdasarkan keputusan Komandemen Tertinggi APNII dia diangkat sebagai Panglima Divisi IV TII untuk daerah Sulawesi dan Indonesia Timur. Menyusul kemudian pada tanggal 21 September 1953, Abu Daud Beureueh menyatakan bahwa daerah Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia dan memutuskan semua hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta.³⁷⁹

³⁷³ Republik Indonesia, *Propinsi Djawa Barat*, Bd. 1, (Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1953), hlm. 221.

³⁷⁴ Herbert Feith, *The Decline and Fall the Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1973), hlm. 210.

³⁷⁵ A.H. Nasution, *Tjataan-tjataan Sekitar Politik Militer Indonesia*, Jakarta Pembimbing, 1955, hlm. 91.

³⁷⁶ A.H. Nasution, *Sedjarah Perdjuaan Nasional...*, *Op.cit.*, hlm. 175.

³⁷⁷ A. Kosasih, *Teguh Tenang Menempuh Gelombang*, (Bandung: Sumur Bandung, 1962), hlm. 29.

³⁷⁸ Bahar Mattaliu, *Kahar Muzakkar dengan Petualangannya*, (Jakarta: Delegasi 1965), hlm. 37.

³⁷⁹ Hardi, *Api Nasionalisme: Cuplikan Pengalaman*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 118;

Melalui kurir yang bernama Mustafa Rasjid, Kartosoewirjo mengirimkan surat pengangkatan Daud Beureueh sebagai Panglima TII untuk daerah Aceh (Komandemen Wilayah 5 atau disingkat dengan KW 5). Maka dengan demikian bertambah kuatlah kedudukan Negara Islam Indonesia dengan masuknya kedua tokoh besar itu.

Dalam usaha Kartosoewirjo untuk terus menggalang Darul Islam, pada bulan Oktober 1952, Kartosoewirjo memerintahkan untuk mempercepat dan memperhebat semua usaha menyelenggarakan persiapan perang totaliter dan memperbaiki organisasi Polisi dan BARIS begitu juga sistem Komandemen.³⁸⁰ Badan-badan ini haroes membentoeok seboeah "Benteng Islam" agar apabila dalam memasoeki tahap ketiga dapat menyelenggarakan negara basis atau "Madinah Indonesia" jang mana: "*Kedalam, berlakoe sebagai alat-alat pembersih dan penjapoe segala matjam koetoe-koetoe masjarakat, dan obat penjemboeh beraneka warna penjakit, pemelihara kadaoelatan Negara Islam Indonesia dan kesoetjian Agama Islam. Keloear, meroepakan Benteng Islam jang koeat sentaoesa, jang sanggoep menghadapi tiap-tiap moesoeh Allah (Islam), dari djoeroesan manapoen djoega.*"³⁸¹

Juga penganugerahan pangkat militer dan penggunaan lencana kepangkatan, serta bentuk dan pembuatan lencana tersebut kini diatur oleh sebuah Maklumat Komando Tertinggi.³⁸² Selanjutnya ditetapkan konsolidasi militer dan aparaturnya Negara Islam Indonesia, agar negara ini juga dalam pandangan internasional sesuai dengan negara yang bebas merdeka. Konsolidasi ini terutama mencakup kekuatan tentara dan persenjataan kesatuan militer Tentara Islam Indonesia yang masih tetap jauh tertinggal dari standar seharusnya. Sebuah batalyon Tentara Islam Indonesia terdiri dari 4 kompi masing-masing dengan 290 tentara dan masing-masing kompi harus mempunyai 12 senjata otomatis berat dan ringan, 3 mortir, 189 pucuk senapan, dan 12 pucuk pistol. Namun standar persenjataan yang ideal ini tidak pernah tercapai, karena selalu kekurangan senjata berat.

Perkembangan gerakan DI ini semakin hari semakin kuat, yang menyeberang ke DI semakin banyak, berasal dari berbagai kalangan: petani, rakyat kecil, mahasiswa, kaum intelektual, militer, polisi dan juga para pegawai negeri jawatan-jawatan pemerintahan. Gerakan ini mengalami proses ekspansi yang sangat cepat, menjalar bagaikan api membakar ladang kering di musim kemarau. Gerakan menentang ideologi Soekarno (Pancasila) ini mendapatkan sambutan luar-biasa di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. DI juga memiliki program ekspansi ke Sumatera secara sangat serius. SM Kartosoewirjo pun memerintahkan Abdul Fatah Wirananggapati, seorang staf kuasa usaha, menuju ke Aceh menemui Tgk. M Daud Beureueh. Utusan khusus ini yang bahkan tidak mengerti situasi politik Aceh, tidak mengerti bahasa dan kultur Aceh, tapi "orang asing" ini pun diterima oleh Teungku Daud Beureueh

Moh. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 21.

³⁸⁰ S.M. Kartosoewirjo (nama pena: Karma Yoga), *Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid I, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 8*, 12.10.1952, hlm. 55-63.

³⁸¹ *Ibid.*

³⁸² *Ibid.*, "Maklumat Komandemen Tertinggi No. 9", 17.10.1952, hlm. 64-111.

dengan hati yang bersih. Maka bergabunglah Teungku Daud Beureueh dan sebagian besar rakyat Aceh ke dalam Negara Islam Indonesia, ke dalam *Darul Islam*.***

BAB 2

ACEH DI AWAL KEMERDEKAAN

Aku bermadah sekali ini, Memoedja noesa Tanah Airkoe,

Djiwa Merdeka bebas bernjanji, Tjoerahan hati tidak terganggu.

*Indonesia merdeka pasti, Rantai pendjadjah lenjap menghilang,
Merah Poetih bendera soetji, Berkibar djaja dipontjak tiang*

*Akoe sedia berkoeah darah. Badankoe rebah djatoeh keboemi,
Niat dihati tidak berobah: Dari terdjadjah baiklah mati!*

*Kasad dan tjita telah berpadoe. Hendak berdjoeang menentang mati,
Oentoek berbakti kepada Iboe, Semangat sjahid penoeh dihati.*

(A. Arify)³⁸³

PUISI A. Arify di atas menggambarkan bagaimana sambutan rakyat Aceh terhadap kemerdekaan Indonesia: *Oentoek berbakti kepada Iboe*. Indonesia adalah “Ibu”, sebuah personifikasi yang sangat suci dalam pandangan rakyat Aceh. Untuk memahami secara lebih jelas tentang sebab-sebab munculnya Darul Islam di Aceh, kita harus melihat sedikit ke belakang, ke sejarah politik Aceh dan bagaimana hubungan rakyat Aceh dengan “sang Ibu” yang kemudian hadir dengan wajah yang sangat kejam. Juga penting melihat sosiologi Aceh setidaknya pada masa awal kemerdekaan dan struktur masyarakat Aceh ketika itu yang sarat dengan nuansa Islam. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta segera menggema ke seluruh pelosok dan mendapat-kan tanggapan dari rakyat Aceh. Di Koetaradja, pada 28 Oktober 1945, terbit sebuah buku pamflet yang ditulis oleh Tgk. Ismail Jacoeb,³⁸⁴ terbit “oentoek penerangan kepada ra’jat” tentang Republik yang baru berdiri, agar rakyat Aceh tahu akan “negeranja yang sedang dalam pembinaan”³⁸⁵ ini. Penyusunnya adalah seorang ulama, jelas sekali memperlihatkan bagaimana Republik Indonesia disambut bak seorang “Ibu” yang telah lama dirindu.

Kaum ulama memegang kekuasaan politik formal dan informal di Aceh jauh sebelum kemerdekaan. Melalui pendi-rian organisasi ulama, POESA³⁸⁶ (Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh), kalangan ulama mendapatkan pengaruh dan dukung-an legitimasi politik di seluruh Aceh. Ulama telah lama men-jadi pemain dominan (*recal-citrant player*) dalam perpolitikan Aceh di antara dua kelompok utama (*major players*) lainnya semenjak jatuhnya kekuasaan Sultan (1914) hingga awal kemerdekaan (1945-1960). Dua kelompok lainnya adalah (1) *uleebalang*, dan (2) rakyat biasa. Untuk melihat bagaimana situasi Aceh sebelum meletusnya “pemberontakan” Darul Islam, maka kita harus memahami bagaimana struktur masyarakat dan perubahan sosiologis Aceh pada masa pra-kolonial, masa kolonial dan pasca kolonial (awal kemerdekaan Republik).³⁸⁷

³⁸³ Puisi ini terdapat di *back-cover* buku Tgk. Isma’il Jacoeb, *Soesoenan Indonesia Merdeka*, (Koetaradja: Semangat Merdeka, 1945).

³⁸⁴ Tgk. Ismail Jacoeb, *Soesoenan Indonesia Merdeka*, (Koetaradja: Semangat Merdeka, 1945).

³⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁸⁶ Dalam buku ini, singkatan POeSA, selanjutnya, disingkat dengan ejaan baru: PUSA.

³⁸⁷ Dengan mengikuti tesis Nazaruddin Sjamsuddin, *The Republican Revolt: A Study of the Achenese Rebellion*, (Singapore: ISEAS, 1985), gambaran struktur masyarakat Aceh pada masa pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial menjadi sedikit lebih terang bagi konstruksi ide buku ini.

Struktur Masyarakat Aceh

Pada masa pra-kolonial, struktur masyarakat Aceh terdiri dari empat kelompok besar: (1) sultan, (2) ulama, (3) *ulee-balang*, dan (4) rakyat biasa. Sesuai dengan urutannya, ke-lompok sultan memiliki porsi kekuasaan yang paling besar. Sementara kelompok ulama dan *uleebalang* yang hampir sama. Namun, karena pengaruh sistem negara kerajaan Aceh yang berhaluan agama, maka kelompok ulama menempati posisi kedua setelah sultan. Kaum *uleebalang*, oleh karena penguasaan sektor-sektor ekonomi yang produktif di sepanjang pesisir pantai, menjadi kekuatan politik ketiga —atau mungkin sama dengan kelompok ulama. Kelompok sultan, ulama dan *uleebalang*, karena kekuasaan yang dimiliki-nya, dapat kita sebut sebagai kelompok penguasa (*the rulers*). Sementara kelompok rakyat biasa, oleh karena kejelataannya, seperti terdapat di manapun, memiliki porsi kekuasaan yang lebih kecil atau tidak memiliki kekuasaan sedikitpun (*the ruled groups*).

Pada masa kolonial, struktur dan komposisi kekuasaan di atas mengalami perubahan setelah masuknya kolonial Belanda dengan cara fisik yang menyebabkan jatuhnya kekuasaan sultan secara definitif. Kekuasaan kolonial muncul dan menggeser kekuasaan sul-tan menjadi kurang lebih sama atau di bawah kekuasaan ulama dan *uleebalang*. Kekuasaan sultan selanjutnya melebur atau mengalami amalgamasi dengan kelompok *uleebalang* atau kelompok ulama. Sultan Aceh terakhir ditangkap dan diasingkan, sehingga pengaruh dan kuasanya sirna di masyarakat. Perjuangan repatriasi kekuasaan kesultanan Aceh dilanjutkan oleh kalangan ulama. Bahkan setelah penetrasi sistem kolonial demikian dalam ke masyarakat Aceh, kekuasaan kolonial hampir hilang sama sekali. Dengan hilangnya kekuasaan Sulthan, maka —di atas puing-puing politik yang tersisa— dimulailah program pembangunan ekonomi di Aceh oleh kolonial Belanda. Belanda mulai membangun jalur kereta api, jalan raya aspal dan jembatan yang menghubungkan *mukim* dan *sagoe* di seluruh Aceh.³⁸⁸

Sementara itu, kalangan ulama dan *uleebalang* melanjutkan perjuangan jihad melawan *kaphe* (kafir) Belanda. Sehingga yang tinggal hanyalah komposisi 3 struktur kekuasaan saja: (1) *uleebalang*, (2) ulama, dan (3) rakyat biasa. Mulai saat itu-lah kohesi sosial politik golongan-golongan masyarakat yang mendukung struktur sosial Aceh menjadi retak.³⁸⁹ Keretakan ini

³⁸⁸ Pembanguna rel kereta api mulai dibangun Belanda pada tahun 1901, dimaksudkan untuk melancarkan peperangan melawan gerilyawan Atjeh (waktu itu disebut gerilyawan Mujahidin) yang sudah berserak di seluruh Aceh. Jalur pertama dibangun adalah Kutaradja ke Seulimeum, dari Seulimum ke Gunung Seulawah. Baru kemudian pada tahun tahun 1904 dibangun jalur kereta api untuk “maksud damai” dari Seulawah ke Sigli. Dari Sigli disambung terus ke Samalanga. Di Samalanga inilah Belanda merasa sudah dapat menaklukkan Aceh dengan terdapatnya stasiun *Atjeh Tram*. Dari Samalanga, diteruskan jalur tram ini hingga ke Bireun, Lhokseumawe, Langsa, Kuala Simpang hingga ke Besitang. Setelah itu, Belanda membangun jalan raya dari Kutaradja ke Sigli yang diresmikan tahun 1924. Efek pembangunan ini pada rakyat Aceh adalah semakin pluralnya Aceh karena banyak kaum pekerja dari Tionghoa dan etnik Minangkabau datang untuk menjadi buruh pembangunan rel dan jalan raya. Belanda tidak menggunakan tenaga Aceh karena suasana *Atjeh-Moorden* yang sangat ditakuti Belanda.

³⁸⁹ Fachry Ali, *Golongan agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi Islam di*

kemudian terus-menerus berimplikasi terhadap dinamika dan pergolakan politik di Aceh. Retakan kohesi sosial-politik ini sangat jelas terlihat pada pergeseran afiliasi politik di antara tiga golongan utama masyarakat Aceh. Sebagian besar golongan *uleebalang*, sesuai dengan politik pecah-belah Belanda, lebih berafiliasi pada pemerintah kolonial. Sementara, golongan ulama cenderung tetap bersatu dengan sultan. Bahkan dalam beberapa hal fungsi kepemimpinan sultan cenderung berpindah ke tangan para ulama. Terutama gejala ini terlihat dalam gerakan-gerakan perlawanan melawan pemerintah kolonial. Meskipun demikian, harus pula diingat bahwa tidak semua golongan *uleebalang* cenderung berafiliasi dengan pemerintah kolonial. Sebab, seperti tercatat dalam sejarah, banyak pula terdapat kaum *uleebalang* menjadi pemimpin perlawanan yang gigih terhadap Belanda seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien di Aceh Barat, Cut Meutia di Aceh Utara, dan lain-lain.³⁹⁰ Bahkan, dalam hal ini, Belanda punya kecenderungan untuk memainkan peranannya sebagai penguasa tunggal. Dalam saatsaat tertentu, terutama ketika hubungan *uleebalang* menjadi dekat, mereka bisa mempro-mosikan golongan sultan untuk lebih dekat dengan pemerintah kolonial. Akan tetapi jelas pula, bahwa dengan munculnya pemerintah kolonial, dinamika dan pergolakan politik di Aceh lebih ditentukan oleh ketidakmampuan struktur sosial masyarakat Aceh. Ini terutama ditandai oleh persaingan yang tajam antara golongan ulama dan *uleebalang*. Golongan ulama, pada dasarnya merupakan golongan mayoritas di dalam masyarakat, terutama karena ia lebih dekat dengan rakyat banyak. Sementara golongan *uleebalang*, merupakan kalangan minoritas.

Akan tetapi justru karena itu pula, konflik di antara mereka menjadi semakin tajam. Sadar akan kekuatan perlawanan yang potensial di pihak ulama, pemerintah kolonial berusaha menetralkan kekuatan itu lewat kemudahan-kemudahan pendidikan bagi kaum *uleebalang*. Sebagai akibatnya, kaum ulama semakin merasa terancam. Mereka menyaksikan dan juga mengkhawatirkan bahwa sebagian dari anak-anak muda Aceh sudah mulai tersosialisasikan ke dalam sistem pendidikan Barat. Kenyataan ini dilihat semakin memperkuat kedudukan *uleebalang* dan dengan demikian sekaligus akan semakin memperlemah kedudukan mereka. Suasana yang penuh dengan benih-benih konflik ini semakin dipanaskan oleh munculnya perkembangan baru: munculnya Muhammadiyah. Organisasi pembaharu Islam ini menjadikan afiliasi-politik dan sosial masyarakat Aceh semakin rumit. Di satu pihak, karena organisasi Muhammadiyah bersifat apolitis yang cenderung mempergunakan kaum *uleebalang* di banyak tempat sebagai pengurus dan tokoh yang memegang kekuasaan politik dan dengan sendirinya pula, memperkuat posisi kelompok ini. Bagi kalangan ulama organisasi Muhammadiyah bisa mengancam pengaruh mereka ke tengah-tengah masyarakat religius Aceh dan dikhawatirkan akan melemahkan semangat jihad melawan kafir penjajah. Tentu saja, golongan ulama menjadi semakin terdesak. Hal inilah yang mendorong mereka berpacu untuk menandingi gerakan Muhammadiyah yang dalam pandangan mereka akan bisa memalingkan anak-anak Aceh dari jihad, dari Islam yang sebenarnya.³⁹¹

Modernisasi pemikiran keagamaan dan sistem pendidikan Islam pun dilancarkan oleh kaum ulama untuk mendahului program-program Muhammadiyah yang sangat masif perkembangannya di Aceh. Ulama pun berencana untuk membuat pendidikan agama yang digabungkan dengan sistem pendidikan sekuler. Akan tetapi, reaksi ini menimbulkan bentuk konflik yang lain, dan justru terjadi di dalam tubuh kaum ulama. Modernisasi yang dilancarkan ini telah menimbulkan perpecahan antara ulama reformis dan ulama tradisional. Sebagai akibatnya, ulama tradisional cenderung berafiliasi dengan golongan *uleebalang*. sampai dengan menjelang runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda, struktur sosial masyarakat Aceh tegak pada dasar yang goyah. Dalam

Indonesia, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 106.

³⁹⁰ Tentang hal ini, lihat T. Ibrahim Alfian, (et.al), *Perang Kolonial Belanda di Aceh (Colonial War in Aceh)*, (Banda Aceh: PDIA, 1995).

³⁹¹ Wawancara dengan Teungku Ibrahim, Banda Aceh, 24 Juni 2006.

pengertian bahwa struktur sosial itu mengandung benihbenih konflik. Kelompok-kelompok pendukung struktur sosial itu telah terperangkap ke dalam suasana prasangka yang mendalam. Dalam kondisi yang semacam itulah kita menyaksikan afiliasi-afiliasi sosial-politik yang relatif “aneh”.

Belanda melancarkan “modernisasi” masyarakat Aceh untuk menetralkan pengaruh atau kekuatan ulama. Untuk tujuan itu, Belanda berafiliasi dengan kaum *ulee-balang*. Sejalan dengan sifat Muhammadiyah yang apolitis, *ulee-balang* bisa bekerja sama dengan organisasi itu. Akan tetapi, karena terjadi perpecahan di dalam tubuh kalangan ulama, maka ulama-ulama tradisional —jadi agak bertentangan dengan modernisasi Belanda—berafiliasi dengan *ulee-balang*. Dan untuk menghadapi pengaruh kaum ulama modernis yang populer di Aceh, kaum *ulee-balang* cende-rung membangun citranya sebagai kalangan yang mempertahankan “adat Aceh”.³⁹² Sementara, justru untuk membendung pengaruh Muhammadiyah, sebagian dari kalangan ulama melancarkan gerakan reformasi. Berdirinya organisasi Per-satuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), adalah refleksi dari usaha ulama-ulama berhaluan modernis dalam menan-dingi Muhammadiyah.³⁹³

Dalam komposisi struktur sosial yang semacam ini, Daud Beureueh berada dalam kalangan ulama reformis. Dialah salah seorang tokoh utama yang mendirikan PUSA. Dan dia pula yang menjadi ketua organisasi itu. Dengan demi-kian, jelas sekali terlihat bahwa dalam struktur sosial masyarakat Aceh di masa kolonial - yang penuh dengan benih konflik itu —Daud Beureueh memimpin golongan yang semakin lama semakin terdesak. Suatu golongan sosial-politik Aceh yang menjadi “kuda hitam” dan paling artikulatif dalam gerakan dan menyuarakan sikap anti Be-landanya.³⁹⁴ Dukungan massa yang besarlah yang menye-babkan kaum ulama reformis ini menjadi “kuda hitam” dalam percaturan politik Aceh. Dan itu pula salah satu yang menjadi sebab, mengapa, walaupun semakin terdesak oleh berbagai pihak, kaum ulama reformis Aceh di bawah pimpinannya, tetap bisa bertahan.³⁹⁵

Sementara, baik kekuatan *ulee-balang* maupun ulama tradisi-onal tidak bisa mengungguli kaum ulama modernis Aceh yang semakin melebarkan sayapnya dengan sekolah Jamiatuddiniyah di Lam Paseh atau Normal Islam Institut di Bireun maupun Al Muslim di Matang Glumpang dua. Dalam kondisi *status quo* kekuatan-kekuatan sosial-politik Aceh inilah pula kita bisa memahami akan selalu timbulnya kebutuh-an untuk meminjam tenaga luar guna memperkuat kedudukan golongan masing-masing. *Ulee-balang* dalam hal ini relatif lebih beruntung. Sebab dalam posisinya yang berhadapan dengan kelompok Daud Beureueh, ia bisa meminjam kekuatan Belanda. Mungkin hal ini pula yang mendorong kaum ulama reformis untuk menghubungkan dirinya dengan kekuatan Jepang sebagai tandingan kekuat-an Belanda. Dari sinilah muncul organisasi F atau *Fujiwara* - salah satu nama keluarga Jepang - yang mengorganisasikan pemberontakan terhadap Belanda dengan bantuan Jepang. Tentu saja, seperti yang dituturkan Van Dijk, organisasi F ini, tidak hanya melulu terdiri dari ulama reformis. Sebab disamping itu terdapat pula unsur-unsur *ulee-balang* nasionalis, seperti Teuku Nya' Arif dan Teuku Panglima Polem Muhammad Ali.

Pada masa pasca-kolonial, struktur masyarakat Aceh mengalami perubahan dengan banyaknya unsur-unsur luar yang semakin merumitkan suasana sosial Aceh. Dalam konteks struktur sosial masyarakat Aceh pasca-kolonial yang masih belum mantap, dan dalam komposisi serta afiliasi sosial-politik yang penuh dengan benih konflik dan dalam suasana yang selalu rnenimbulkan kebutuhan untuk ‘meminjam tenaga luar’ itulah kita lebih bisa mema-hami secara lebih kongkret dan rill “kejutan” munculnya “pemberontakan” DI yang sebenarnya berasal dari Jawa Barat. Dalam

³⁹² Fachry Ali, *Golongan Agama....*, hlm 104.

³⁹³ Fachry Ali, *Ibid.*

³⁹⁴ *Ibid.*

³⁹⁵ *Ibid.*

masa pemerintahan Jepang, jelas sekali kaum ulama reformis menggunakan kekuatan luar inilah yang memberikan peluang meletusnya peristiwa Cumbok, di mana sisa-sisa kaum *uleebalang* dihancurkan. Kaum *ulee-balang* ini, dengan merosotnya kekuatan Jepang dalam bulan Agustus 1945, mengharapkan kembalinya kekuasaan Belanda sebagai sumber dari tenaga luar mereka, berhadapan dengan hum ulama reformis. Dan justru karena kekhawatiran akan kembalinya kekuasaan Belanda — setidaknya-tidaknya, inilah yang terbaca dalam *introduction* tesis Nazaruddin Syamsudin³⁹⁶ — kaum ulama reformis secara cepat menerima kehadiran Republik Indonesia. Tentu saja, kesimpulannya ini tidak bisa diterima secara mutlak. Sebab, seperti Anthony Reid³⁹⁷ menyatakan, sudah sejak tahun 1920, semangat nasionalisme telah tersebar di daerah Aceh. Ini terbukti dari pidato Abdoel Manap pada tahun itu di pedesaan Aceh, tentang perlunya kesatuan dan kesepakatan nasional. Daud Beureueh sendiri, lewat kekuatan luar juga (dalam hal ini Pemerintah Republik ketika ia bersama para ulama menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta), terpilih sebagai Gubernur Militer Aceh dan Tanah Karo. Akan tetapi juga jelas, bahwa dengan meminjam tenaga luar (dalam hal ini Darul Islam Jawa Barat), kaum ulama reformis semakin meneguhkan kekuatan dan kekuasaannya di atas golongan sosial-politik lainnya.³⁹⁸ Namun, dalam kontes perebutan pengaruh dan kekuasaan apakah sehingga ia harus mengusir pengaruh Pancasila dan komunisme dengan tanpa memakai cara-cara separatis. Darul Islam bukan anti Indonesia, melainkan anti-Pancasila, anti-Marhaenisme, anti-Komunisme dan demokrasi. Untuk melihat bagaimana ideologi Darul Islam bisa *compatible* dengan *world-view* orang-orang Aceh, kita terlebih dahulu harus memahami sejarah peran kaum ulama, organisasinya (PUSA) dan perjuangan politiknya dalam mengusir Belanda, memasukkan Jepang — untuk kemudian diusir kembali dari Aceh. Perseteruannya dengan kaum *uleebalang* dan strategi politiknya dalam menolak pengaruh Muhammadiyah di Aceh.

Persatuan Ulama Seluruh Aceh

Organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang didirikan pada 5 Mei 1938 adalah satu-satunya sarana dakwah, kaderisasi dan alat perjuangan politik kaum ulama modernis melawan segala bentuk unsur-unsur baru dan aneh yang datang masuk dan berpengaruh di Aceh. Salah seorang pendirinya adalah Teungku Mohammad Daud Beureueh, seorang pemimpin Islam terkemuka, yang lahir sekitar tahun 1899 di Beureueh, di Distrik Keumangan³⁹⁹, Pidie. Para pendiri bersamanya ialah Teuku Haji Chik Djohan Alamsjah, Teuku Mohammad Amin dan Tengku Ismail Jacub. Daud Beureueh terpilih sebagai ketua umum persatuan ini. Kelompok PUSA inilah yang telah memainkan peran sebagai pemasok tenaga luar (*outside-power broker*)⁴⁰⁰ bagi perubahan politik di Aceh. Orang-orang Aceh pun memiliki *Weltanschauung*⁴⁰¹ sendiri dalam melihat persoalan ini dengan ungkapan *folk wisdom* yang sederhana: “Yang Peutamong Beulanda

³⁹⁶ Nazaruddin Sjamsuddin, *The Republican Revolt, The Case of Achenese Darul Islam*, (Singapore: ISEAS), 1985, hlm. vi.

³⁹⁷ Anthony Reid, “The Birth of Republic in Sumatra” dalam *Indonesia*, 12, (Oktober 1971).

³⁹⁸ Tulisan Fachry Ali, meskipun diakuinya sendiri sebagai sebuah responsi teoritikal, namun sudah menjadi sebuah teori yang bisa menjelaskan mengapa Darul Islam muncul di Aceh. Kekurangan yang menyolok dalam tulisannya sangat mungkin terletak pada ketiadaan data. Karena itu, asumsi dan interpretasinya harus dibuktikan melalui buku ini. Meskipun Fachry Ali lebih cenderung menyebutnya sebagai hipotesa-hipotesa tentatif untuk namun sangat berguna untuk studi tentang perubahan, atau juga kelanjutan dinamika dan pergolakan politik masyarakat Aceh masa DI atau GAM sekarang ini. Fachry Ali, *Ibid*.

³⁹⁹ Distrik Keumangan kini, dengan birokratisasi sistem pemerintahan nasional tahun 1959, bernama Kecamatan Mutiara.

⁴⁰⁰ Konsep “meminjam tenaga luar” ini pertama kali dikemukakan oleh Fachry Ali sebagai sebuah hipotesa untuk menjelaskan proses masuknya Jepang (tahun 1940-an) dan Golkar (tahun 1980-an) ke Aceh. Lihat Fachry Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi dalam Islam di Indonesia*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 103-110.

⁴⁰¹ *Weltanschauung* (Bhs. Jerman) artinya pandangan dunia atau pandangan hidup.

Panglima Tibang, yang peutamong Jeupang Pemuda PUSA” (artinya: “Yang memasukkan Belanda adalah Panglima Tibang, yang mem-bawa masuk Jepang adalah Pemuda PUSA”).⁴⁰² Panglima Tibang adalah simbol representasi kalangan *uleebalang*, sementara Pemuda PUSA adalah simbol dari kalangan ulama. Sehingga tidaklah terlalu keliru bila rakyat biasa menganggap kedua kalangan ini telah memasukkan “kekuatan-kekuatan jahat” (*evil powers*) ke tanah Aceh.

Lambat laun PUSA berkembang menjadi wahana utama para ulama Islam Aceh, yang menamakan dirinya *Tengku*, dalam perjuangan mereka melawan elite tradisional—kepala wilayah atau *uleebalang*— yang menggunakan gelar *Teuku* (T). Ketika sesudah Perang Dunia Kedua kaum ulama mem-berikan pukulan yang menentukan terhadap lawan mereka, terutama para bekas pendiri dan anggota terkemuka PUSA inilah yang memainkan peranan penting dan mengambil alih pemerintahan Aceh. Di dalamnya termasuk Teungku Amir Husin al Mudjahid) dan Husin Jusuf, masing-masing ketua dan sekretaris Pemuda PUSA, dan Teungku Ismail Jacub, Teungku Mohammad Nur el Ibrahimy (menantu Daud Beureueh) dan Teungku Said Abubakar, ketiganya guru pada Perguruan Normal Islam Institute, sekolah pendidikan guru yang didirikan PUSA.

Pada mulanya tidak tampak PUSA merupakan kubu anti-Belanda dan anti-*uleebalang* yang kukuh. Di antara pendiri-nya atau yang bertindak sebagai penasihatnya terdapat *uleebalang* dan sementara PUSA hanyalah suatu organisasi Islam yang modern. Tetapi, segera dengan pengaruh Amir Husin al Mudjahid, badan ini menjadi lebih radikal. Pada hari-hari akhir Hindia Belanda ia tumbuh menjadi organisasi nasionalis murni, yang tujuannya tidak hanya mengusir Belanda, melainkan juga kepala-kepala adat setempat, *ulee-balang*, yang digunakan Pemerintah kolonial menjadi alat untuk memerintah daerah itu.

Sesungguhnya PUSA dalam masa itu adalah satu-satunya gerakan nasionalis yang berarti di Aceh. Tidak terdapat di sini gerakan nasionalis sekuler. Tidak banyak dapat diharapkan dari kalangan *uleebalang*, karena begitu berakar dalam sistem kolonial untuk menjadi pimpinan suatu gerakan anti penjaja-han sekuler. *Uleebalang-uleebalang* ini yang menentang Peme-rintah kolonial harus berpaling kepada PUSA. Pengaruh PUSA terhadap rakyat Aceh ketika itu sangat luar biasa, dalam bahasa S.M. Kartosoewirjo, “PUSA (*persatuan Ulama Seluruh Atjeh*) amat besar pengaruhnja kepada ra’jat Atjeh yang terkenal “Islam-minded” itu.⁴⁰³ Dengan pengaruh yang demi-kian besar ini, rakyat benar-benar berada “di bawah asuhan” PUSA ketika itu.

Pilihan lain diberikan oleh Muhammadiyah. Di Aceh Muhammadiyah telah lebih lama dari PUSA, tetapi seperti juga PUSA, Muhammadiyah pun bersumber pada Islam modern. Berbeda dengan keadaan di bagian-bagian lain di Indonesia, dan karena tidak adanya gerakan nasionalis di Aceh, Muham-madiyah Aceh sebagian juga berfungsi sebagai organisasi Poli-tik dan tidak semata-mata sebagai organisasi keagamaan atau pendidikan. Namun, organisasi ini tidak menarik bagi pe-mimpin-pemimpin Islam Aceh dan para pengikut mereka. Sebagian hal ini adalah karena ia tidak mempunyai akar dalam masyarakat Aceh dan tetap merupakan gejala kota.⁴⁰⁴ Para anggotanya sebagian besar dari luar daerah, atau orang Aceh dengan pendidikan formal yang telah tercerabut dari lingkungan tradisionalnya. Dan juga sebagian karena, dengan adanya hubungan dengan bagian-bagian lain di Indonesia, ia meluas melampaui batasbatas setempat, dan dengan demikian sifatnya cenderung merangkap seluruh Indonesia ketimbang suatu gerakan yang mengutamakan daerah Aceh saja. PUSA, oleh karenanya, menjadi kekuatan yang menjan-jikan untuk upaya pembebasan regional dalam harapan orang-orang Aceh, ketimbang Muhammadiyah. Dalam *setting* yang demikian, bahkan Muhammadiyah dipandang akan merusak semangat dan primordialisme “*the Achenized*

⁴⁰² Wawancara dengan Sayed Mudhahar Ahmad, Jakarta, 14 Maret 1998.

⁴⁰³ Lihat S.M. Kartosoewirjo, “Statement Pemerintah NII Tanggal 5 Oktober 1953”, dalam Al Chaidar, *Pemikiran Politik...*, bagian lampiran.

⁴⁰⁴ Fachry Ali, *Op.cit.*, hlm 108.

Islam” yang dianut oleh orang-orang Aceh.⁴⁰⁵ Muhammadiyah cenderung tidak memihak pada keinginan azasi rakyat Aceh sehingga tidak berakar dalam jiwa masyarakat Aceh.

Sebaliknya PUSA kuat berakar dalam masyarakat Aceh. Ia dapat mengharapkan dukungan para ulama Islam di sini, dan dapat melaksanakan pengaruhnya melalui mereka di desa-desa. Pemimpin-pemimpin mereka terbuka matanya bagi kemanfaatan pendidikan modern dalam usaha untuk menjembatani jurang dalam pengetahuan dan pengalaman administrasi yang memisahkan mereka dari *uleebalang*. Bersama-an dengan itu mereka berhati-hati agar tidak kehilangan hubungan dengan latar belakang budaya dan agama Aceh, dan menghindari kesalahan memasang rintangan antara mereka sendiri dan rakyat. PUSA tetap "sifatnya Aceh murni".⁴⁰⁶ Kerangka acuannya adalah Aceh, bukan Indonesia.

Diterimanya oleh PUSA sikap kebijaksanaan anti-Belanda dan anti-*uleebalang* adalah bertepatan dengan meluasnya hegemoni Jepang di Asia Tenggara. PUSA mencari dan mendapat sekutu pada Jepang untuk melawan Belanda. Melalui perantara orang-orang Aceh yang berdiam di Malaya dilakukan hubungan dengan orang Jepang, dan dibuat rencana untuk mengadakan pemberontakan anti-Belanda menjelang pendaratan Jepang di Hindia Belanda. PUSA sangat cerdas dalam memanfaatkan "kekuatan luar" atau "meminjam tenaga luar" bagi tujuannya mengusir "kafir" Belanda.

Yang menolong dalam melaksanakan rencana ini adalah apa yang disebut Organisasi F, dinamakan demikian menurut nama keluarga seorang agen intelejen Jepang, Iwaichi Fujiwara. Inti Organisasi F ini terdiri dari orang-orang Aceh yang berdiam di Malaya yang berangsur-angsur menyusup kembali ke Aceh; di sini mereka mengkoordinasi aksi-aksi mereka dengan aksi gerakan-gerakan lain yang terdiri dari orang-orang yang merasa tidak puas. Pada Februari dan Maret 1942 Organisasi F ini sesungguhnya memulai suatu pemberontakan terhadap Belanda. Kawat-kawat telepon diputuskan, perjalanan kereta api diganggu, dan sejumlah orang Belanda dibunuh. Anggota organisasi ini muncul di depan umum mengenakan ban lengan putih dengan tulisan huruf F di atasnya. Walaupun terutama merupakan pemberontakan orang Aceh dan di samping itu ulama, kelompok-kelompok lain juga turut serta, seperti orang-orang dari Minangkabau dan daerah Batak, dan *uleebalang*.

Pimpinan pemberontakan ini terutama, walaupun tidak seluruhnya adalah ulama Islam. Di dalamnya tidak saja termasuk Tengku Said Abubakar, seorang tokoh PUSA yang kemudian, pada 1950-an, memainkan peranan penting dalam upaya menyediakan senjata kepada *Darul Islam* Aceh, tetapi juga Teuku Nya' Arif (Nya' Arif), mantan anggota *Volksraad* dan sesudah perang menjadi Residen Republik yang pertama di Aceh, dan Teuku Panglima Polim Mohammad Ali, yang sesudah Agustus 1945, pernah menjadi Wakil Residen Aceh.

Pemberontakan ini membuat Aceh satu-satunya daerah tempat serbuan Jepang mendapat sokongan bersenjata yang aktif dari rakyat. Ia juga tidak semata-mata diilhami perasaan anti-Belanda. Pemimpin-pemimpin Islam mengharapkan dengan melaksanakan dan turut serta dalam pemberontakan mereka akan diberi imbalan oleh Jepang dengan pengangkatan pada jabatan-jabatan dalam pemerintahan yang selama ini diduduki *uleebalang*. Sedikit banyaknya harapan-harapan mereka dipenuhi. Monopoli *uleebalang* diterobos. Namun, seperti juga di bagian-bagian lain di Indonesia, para ulama, walaupun mendapat manfaat dari pendudukan Jepang, tidak berhasil memperoleh kedudukan unggul selama masa itu. Kaum *uleebalang* kehilangan kekuasaan atas administrasi peradilan, karena tidak lagi mengetahui pengadilan, termasuk pengadilan Islam, tetapi dipertahankan sebagai pejabat lokal dalam

⁴⁰⁵ Tentang hal ini, lihat Fachry Ali, "The Revolt of Nation-State Builders: A Study of Achenese Darul Islam and West Sumatran PRRI", *Unpublished thesis*, (Melbourne: Monash University, 1985).

⁴⁰⁶ J.M. Pluvier, (1953:84), sebagaimana dikutip oleh C. van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993), hlm. 165.

pemerintahan sipil. Jepang meneruskan kebijaksanaan Belanda dulu dalam menghadapi rakyat melalui *uleebalang* dan menyerahkan urusan rutin kepada mereka.

Demikian pula para ulama Islam di Aceh muncul dari pendudukan Jepang lebih diperkuat dan sangat yakin, dengan menantikan peluang untuk memberikan pukulan terakhir kepada lawan mereka. Dalam hal ini mereka dapat menghim-pun dukungan rakyat yang luas. Kaum *uleebalang*, karena kedudukan mereka dalam pemerintahan kolonial diidentifikasi-kasikan dengan kekuatan kafir kolonial yang sangat dibenci. Terdapat kekhawatiran bahwa sesudah Jepang menyerah mereka akan menyeberang ke Belanda untuk berusaha memperoleh kembali dan mempertahankan kedudukan mereka yang dahulu dalam masyarakat. Di samping itu mereka merupakan bagian masyarakat yang lebih mampu; banyak dari mereka ini tuan tanah kaya. Di Pidie, umpamanya, menurut James T. Siegel⁴⁰⁷, *uleebalang* memiliki antara sepertiga sampai setengah dari seluruh sawah.⁴⁰⁸ Demikianlah ketika *uleebalang* mengharapkan kembalinya Belanda, ulama sebaliknya cepat memihak Republik Indonesia, dengan menamakan Revolusi Indonesia sebagai “jihad terhadap kafir” Belanda.

Respon Aceh terhadap Proklamasi Berdirinya Republik Indonesia

Ratusan tahun Aceh bergulat dalam kemelut perlawanan menantang penjajahan dengan pekikan-pekikan “*Allahu Akbar!*”. Tapi, tiba-tiba sebuah suara di Jakarta berkumandang dengan nada yang datar dan bersahaja: proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat Proklamasi yang dikumandangkan Soekarno-Hatta ini sampai di Aceh beberapa bulan setelahnya, semua rakyat Aceh antusias menyambutnya. Banyak tokoh yang di dadanya telah tersemai nasionalisme, bermaksud menerimanya dengan segala “suka-cita”, meskipun ada yang masih meyakini akan kembalinya Belanda sebagai penguasa baru setelah kalahnya Jepang. Hal ini disebabkan kerinduan bebasnya negeri mereka dari keter-jajahan telah mengental, mereka ingin menghirup alam yang bebas merdeka lepas dari belenggu penjajahan. Sebagian elite Aceh, tanpa Teungku Muhammad Daud Beureueh ikut serta di dalamnya, tidak lagi mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras dan kepentingan golongan. Mereka semua terha-nyut dalam gelombang besar *integrative revolution*⁴⁰⁹ Indonesia di tahun 1945. Semua sentimen primordial ditinggalkan di belakang, yang dikedepankan hanyalah persatuan dan ke-satuan. Tentang berita proklamasi ke Aceh pertama diketahui oleh Teuku Panglima Polem Muhammad Ali, kemudian berita tersebut dicatat oleh Teuku Teungoh Hanafiah. Lewat dua tokoh ini, bayangan tentang persatuan dan kesatuan ter-terimakan di Aceh. Maka mulailah suatu “masyarakat bayangan” (*imagined communities*)⁴¹⁰ hadir di kalangan orang-orang Aceh dan mereka lupa dengan Negara Islam Aceh yang sebenarnya masih berdaulat dan tidak tergabung dengan Indonesia.

Pada saat rakyat Aceh menerima kabar —walaupun terlambat datangnya— bahwa telah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang mula-mula tergambar dalam pikiran rakyat Aceh ialah bahwa saat yang berbahagia yang selama ini dinanti-nantikan telah tiba yaitu saat akan berlakunya syariat Islam di tanah Aceh. Mereka merindukan kembali masa-masa di mana bangsa Aceh menjadi Kerajaan Islam. Dalam masa-masa kerajaan Islam itu, rakyat Aceh sangat merasakan kebahagiaan hidup lahir dan bathin, karena nikmatnya menjalankan hukum *syari’at Islam*. Oleh karena itulah, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 disambut oleh seluruh rakyat Aceh dengan semangat jihad yang meluap-luap. Mereka bertekad akan memper-

⁴⁰⁷ James T. Siegel, *The Rope of God*, (Los Angeles: California University Press, 1969), hlm. 27.

⁴⁰⁸ *Ibid.*

⁴⁰⁹ Tentang *integrative revolution*, lihat Clifford Geertz, “The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States”, dalam buku Claire Holt (ed.), *The Interpretation of Culture*, (New York: Basic Books, Inc., 1973).

⁴¹⁰ Tentang *imagined communities*, lihat Benedict R. O’Gorman Anderson, *Imagined Communities*, (London: Verso, 1983).

tahankan kemer-dekaan dengan mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk mempertahankan dan menegakkan kemer-dekaan Indonesia sehingga rencana Belanda hendak mendu-duki lagi daerah Aceh tidak dapat terlaksana.

Pernah diketahui bahwa di Aceh ketika itu telah ber-kumandang seruan-seruan rakyat agar hukum-hukum Islam dilaksanakan sepenuhnya. Bahkan, di beberapa tempat rakyat dengan bertindak sendiri-sendiri menjalankan sebahagian dari hukum Islam. Di samping seruan-seruan untuk melak-sanakan hukum-hukum Islam itu terdengar pula seruan agar kesultanan Aceh diproklamasikan kembali.

Pada tanggal 22 Agustus 1945, di rumah Teuku Abdullah Jeunib berkumpul beberapa tokoh di antaranya: Teuku Nyak Arief, Teuku Ahmad Jeunib, Teuku Nyak Hanafiah, Teuku Abdul Hamid, dan Pak Ahmad Kepala Kantor Pos di Kutaraja. Mereka berbincang-bincang tentang seputar kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam pertemuan itu para hadirin semua tertuju pada Teuku Nyak Arief, Teuku Ahmad Jeunib berkata "Saya menyokong apapun yang Teuku Nyak Arief putuskan, tetapi agar diperhatikan bahwa Jepang masih berkuasa penuh di sini dan Belanda serta sekutunya sekarang sudah berada dan menguasai Sabang." Teuku Abdul Hamid, seorang yang berwibawa mengatakan, "Saya sependapat dengan Teuku Ahmad Jeunib". "Harus kita dulu", kata Teuku Teungoh Hanafiah dengan tegas. Jawab Teuku Nyak Arief, "Itu yang ingin saya dengar". Maka Teuku Nyak Arief memerintahkan kepada Pak Usman Commis untuk segera membuat undangan agar besok berkumpul di Kantor Gubernur/Residen Aceh (*Shu Chokan*), diundanglah sebanyak 56 orang tokoh Aceh,⁴¹¹ Namun dalam pertemuan itu Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak hadir.

Pada pukul sembilan lewat, Teuku Nyak Arief membuka rapat. Di sampingnya ada sebuah meja di antaranya terletak sebuah *Al Qur'an* dan bendera Merah Putih, di samping meja berdiri istri Teuku Nyak Arief dan Teuku Dahlan dengan sikap sempurna. Dengan langkah pasti Teuku Nyak Arief maju ke depan, beliau mengambil *Al Qur'an* dengan tangannya sendiri sembari berkata, "*Demi Allah, Wallah, Billah*, saya akan setia untuk membela kemerdekaan Indonesia sampai titik darah saya yang terakhir." Suara Teuku Nyak Arief lantang, tegas dan pasti serta dengan nada keras tanpa keraguan sedikit pun, Teuku Nyak Arief mundur ke tempat semula kemudian maju mengangkat sumpah Teuku Ali Panglima Polem dan disusul kemudian seluruh para hadirin satu persatu.⁴¹²

Setelah itu, di depan kantor Teuku Nyak Arief dinaik-kanlah bendera Merah Putih yang pertama di Aceh, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Penaikan bendera dipimpin langsung oleh Teuku Nyak Arief, sedangkan yang menggerak benderanya adalah Husein Naim (mantan Kepala Polisi pertama) dan Muhammad Amin Bugeh. Sebenarnya, mereka-mereka inilah yang telah "menjual" Negara Islam Aceh yang berdaulat penuh kepada Republik Indonesia Soekarno.

Menyusul kemudian penaikan-penaikan bendera di selu-ruh Aceh, di antaranya: Penaikan bendera di Lhok Sukon, pada 29 Agustus 1945, dipimpin oleh Hasbi Wahidi, di Lhok-seumawe dipimpin oleh Teuku Panglima Agung Ibrahim dan Hasan Sab, di Langsa jam sembilan pagi 1 Oktober 1945 di lapangan stasiun kereta api dinaikkan bendera merah putih, di Kuala Simpang pada tanggal 3 September, penarikan bendera dipimpin oleh H. Burhan Jamil. Pada tanggal 5 Sep-tember dinaikkan bendera di depan Kantor Camat Kuala Simpang dipimpin oleh Syamsuddin Siregar dan Abu Samah, peniup terompet Arifin Bujong dan Sofyan Tanour, Teuku Raja Sulung, pidato disampaikan oleh Haji Burhan Jamil, di Tualang Cut dinaikan bendera pada tanggal 2 Oktober oleh barisan laskar, di Aceh Selatan pada tanggal 4 Oktober dipimpin oleh AR. Hajat, Khabar Ginting, Abdul Karim, Gindo Bangko, di Blang Keujreun pada tanggal 4

⁴¹¹ C. van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993), hlm. 132.

⁴¹² C. Van Dijk, *Op.cit.*, hlm. 198.

Oktober 1945 dipimpin oleh Muhammad Din Sinar Terang, di Aceh Tengah pada tanggal 5 Oktober 1945 dipimpin oleh Teuku Mahmud yang memimpin acara Raja Abdul Wahab Muda Sedang, di Aceh Selatan pada tanggal 4 September 1945 penaikan bendera dipimpin oleh Muhammad Nasir dan Muhammad Ali Akbar, di Aceh Barat Meulaboh September 1945 penaikan bendera dipimpin oleh Wahab Makmur dan Teuku Cut Raman.

Pada tanggal 3 September 1945, penarikan bendera Merah Putih dipimpin oleh Teungku Umar Tiro dan Hasan Muhammad Di Tiro selaku Ketua Barisan Pemuda Indonesia Lamlo yang menggerek bendera adalah Muhammad Saleh (Ayahwa Leh). Pada kesempatan itu Teungku Umar Tiro selaku pewaris satu-satunya keluarga Tiro bersumpah setia atas nama keluarga Tiro terhadap Republik Indonesia. Keluarga Tiro, dengan menaikkan bendera Merah Putih ini, telah mengesahkan *ijab kabul* terjualnya Aceh kepada Indonesia.

Dukungan kepada Republik dari para pemimpin keagamaan yang lebih tua datang pada tanggal 15 Oktober 1945 berupa "Pernyataan Ulama Seluruh Aceh" yang ditandatangani oleh empat ulama terkenal: Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Ahmad Hasballah, keduanya pemimpin PUSA, Teungku Ja'far Sidik, seorang ulama yang menguasai *dayah* yang sudah lama berdiri; dan Teungku Hasan Krueng Kale, ulama konservatif yang terkemuka. Pernyataan ini menyerukan kepada rakyat agar bersatu di belakang "pemimpin besar kita Soekarno" dalam melawan kembalinya Belanda ke "tanah air kita Indonesia". Karena Belanda sekali lagi akan "mencoba menghancurkan agama kita yang murni dan juga menindas serta merintang keagungan dan kemakmuran rakyat Indonesia", maka ke-empat ulama itu menyatakan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan adalah suatu tujuan yang suci yang biasanya dikenal sebagai *Prang Sabi*.

Pada tanggal 30 Oktober 1945, pukul 8:00 pagi, Mr. Teuku Muhammad Hasan mengeluarkan ketetapan tentang pengangkatan residen se-Sumatera.⁴¹³ Adapun susunan residen se-Sumatera itu antara lain: untuk daerah Aceh, Teuku Nyak Arief; untuk daerah Sumatera Timur, Mr. Muhammad Yusuf; untuk daerah Tapanuli, Dr. Ferdinan Lumban Tobing; untuk daerah Sumatera Barat, Muhammad Syafie; untuk daerah Bengkulu, Ir. Idra Tjahya; daerah Jambi, Dr. A. Syaqaq; daerah Lampung, Mr. Abbas; daerah Sumatera Selatan, Dr. A.K. Gani; dan untuk daerah Bangka Belitung, Muhammad A. Syarif.⁴¹⁴

Namun amat disayangkan perjuangan rakyat Aceh mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda kembali dice-mari oleh segolongan dari bangsa Aceh yang haus akan kekuasaan dan rakus terhadap kehidupan dunia. Ketika sedang bergejolaknya api revolusi kemerdekaan di Aceh, sebagian dari golongan *uleebalang* benar-benar mengharap-kembali kekuasaan Belanda sebagai bagian dari pendudukan Sekutu di Indonesia, dan untuk itu mereka enggan mengambil prakarsa apa pun.

Mengapa ada kejadian yang demikian? Golongan bang-sawan di Aceh yang diwakili oleh para *uleebalang*. Mereka itu semacam "raja-raja kecil" di daerah kekuasaannya, yang dahulunya tunduk pada kekuasaan Sultan Aceh. Akan tetapi lambat laun ikatan antara *uleebalang* dan sultan semakin lemah. Hingga akhirnya mereka memisahkan diri dari sultan dan menjadi merdeka. Mereka menjadi "raja-raja kecil" di daerahnya. Dengan demikian, dengan gampang mereka memihak kepada musuh dan mengadakan perjanjian setia kepada Belanda secara sendiri-sendiri. Sehingga hubungan batin dalam tempo yang tidak lama setelah bahu membahu dengan pihak golongan ulama dalam melawan Belanda mulai agak renggang.

Ketika Belanda menancapkan kuku kekuasaannya di Aceh, posisi *uleebalang* sangat diharapkan untuk membantu usaha-usahanya membasmi perlawanan kaum *muslimin*

⁴¹³ SK No.I-X tanggal 3-10-1945.

⁴¹⁴ C. van Dijk, *Op.cit.*, hlm. 43.

dan orang-orang Aceh yang dijangkiti “penyakit” *Atjeh-moorden*. Belanda memberikan kewenangan kepada *uleebalang* atas daerahnya untuk mengatur rakyat, memungut pajak, menentukan hukuman dan bahkan diantara mereka ada yang diangkat menjadi perwakilan pemerintah Belanda di Kutaraja. Itulah jalinan kerjasama antara Belanda dengan para kaum *ulee-balang* sampai Belanda henggang dari bumi Aceh. Sementara para ulama melihat tingkah laku para *uleebalang* yang demikian telah menyulut emosi mereka, sebab utama dari proses ini adalah akibat daripada pertentangan prinsip antara raja-raja yang memerintah dengan bermacam-macam tindakan yang dijalankannya di satu pihak dan kalangan rakyat yang hidup dalam suasana tertekan di pihak lainnya. *Uleebalang* sesuai dengan kedudukannya, telah mendapat dan menjalankan hak-hak kekuasaan yang luas dan keras, sehingga di dalam prakteknya kerap kali dirasakan sebagai suatu tindakan sewenang-wenang oleh penduduk yang bersangkutan. Perlakuan-perlakuan yang dialami oleh semen-tara rakyat Aceh dari “raja”nya ini, misalnya mengenai harta-benda mereka yang diambil, dirasakan sebagai hal-hal yang menyakiti hati.¹⁴

Begitu pula kekuasaan di dalam hukum-adat yang dipe-gang oleh *uleebalang*, kelihatan benar tidak selalu bisa berja-lan paralel dengan hukum agama yang telah berurat berakar menjadi sendi hidup masyarakat Aceh. Kebijakan-kebijakan *uleebalang* yang seperti ini yang kemudian menjadi penyebab bagi suburnya rasa pertentangan-pertentangan antara pihak ulama dan *uleebalang*. Kesempatan meledaknya pertentangan yang telah lama akhirnya tiba juga yaitu ketika menyerahnya tentara Jepang kepada Sekutu dan ketika berkumandangnya proklamasi kemerdekaan. Atas nama Pemerintah Daerah Aceh, Teuku Panglima Polem Muhammad Ali dan atas nama Markas Umum Daerah Aceh, Sjamaun Gaharu terjadilah penyerangan secara sistematis terhadap pasukan *uleebalang* yang diketuai Teuku Muhammad Daud Cumbok, begitu juga dari golongan ulama yang turut berpartisipasi dalam peristiwa tersebut. Peristiwa yang merupakan suatu pertarungan hidup-mati, senjata lawan senjata dan jiwa bertarung dengan jiwa yang kemudian terkenal dengan “Peristiwa Cumbok”. Perang Cumbok inilah yang mengakibatkan runtuhnya kekuasaan feodal yang telah berabad-abad berurat berakar di persada bumi Aceh.

Setelah padamnya api revolusi sosial di Aceh, roda peme-rintahan Keresidenan Aceh berjalan lancar, tinggal mengurus penyempurnaan alat-alat kekuasaan negara di berbagai lapangan, menyelenggarakan soal keamanan serta menempuh jalan-jalan yang mungkin untuk memperbaiki penghidupan rakyat yang belum sembuh dari penderitaan akibat perang. Di samping itu perhatian ditujukan kepada soal-soal perta-hanan bersama-sama dengan angkatan perang dan barisan perjuangan rakyat yang ketika itu banyak terbentuk badan-badan perjuangan dan kelaskaran di Aceh. Setiap waktu Aceh menghadapi serangan-serangan Belanda dari perbatasan de-ngan Sumatera Timur. Para pemimpin di Aceh memikirkan pula persoalan sekitar pengiriman balabantuan untuk Suma-tera Timur, di mana setiap waktu terjadi kegiatan militer Belanda yang ingin menancapkan kukunya kembali di bumi Aceh.

Belanda selalu menganggap kehadirannya kembali ke In-donesia merupakan kelanjutan dari “romantisme” masa lalu yang panjang. Setelah mereka berhasil membangun rezim kolonialismenya selama 350 tahun yang kemudian diakhiri ketika Perang Dunia ke dua, ambisi kebinatangannya untuk menguasai daerah-daerah di Indonesia termasuk juga Aceh mulai muncul kembali seiring dengan takluknya Jepang kepa-da pihak sekutu.

Berkat tekad yang membaja dan pantang menyerah yang didukung oleh persenjataan yang rapi dan koordinasi yang lancar telah diperlihatkan rakyat Aceh, sehingga mereka dapat menghadapi Belanda pada dua kali aksi militernya. Aceh, kemudian menjadi daerah satu-satunya di Indonesia yang bersih dari injakan militer Belanda. Belanda pada akhirnya tidak berani lagi datang ke Aceh, setelah aksi di Medan Area mengalami gempuran yang sangat hebat dari rakyat Aceh, mereka sangat trauma

dengan kejadian masa silamnya di Aceh, kengerian inilah yang membawa dirinya untuk menarik pasukan dari Aceh.

Pada tanggal 16 Juni 1948, Soekarno datang ke Aceh. Sehari kemudian, dalam sebuah rapat akbar yang diselenggarakan di Lapangan Blang Padang, Soekarno menyampaikan pidato. Dalam sambutan pidatonya itu Soekarno menjelaskan tentang kedatangannya ke Aceh, "*Kedatangan saya ke Aceh ini spesial untuk bertemu dengan rakyat Aceh, dan saya meng-harapkan partisipasi yang sangat besar dari rakyat Aceh untuk menyelamatkan Republik Indonesia ini. Daerah Aceh adalah menjadi Daerah Modal bagi Republik Indonesia, dan melalui perjuangan rakyat Aceh seluruh Wilayah Republik Indonesia dapat direbut kembali*".⁴¹⁵ Di sisi lain, dalam suatu acara jamuan makan malam dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang dihadiri oleh para saudagar Aceh, Soekarno menyarankan kepada rakyat dan saudagar Aceh yang tergabung dalam organisasi GASIDA (Gabungan Saudagar Daerah Aceh) mengumpulkan dana untuk membeli pesawat terbang.

Kedatangan Soekarno ke Aceh hanya untuk mengobarkan semangat nasionalisme perjuangan rakyat Aceh. Pengobaran api semangat ini bertujuan untuk menghapus bekas-bekas ideologi Islam sebagai ideologi perjuangan rakyat. Ia menjelaskan begitu gagah beraninya rakyat Aceh dalam perjuangan kemerdekaan, sampai dia memberikan gelar kepada Aceh sebagai "daerah modal perjuangan" yang kemudian gelar itu diulang-ulangi oleh para pemim-pin negara dan politikus lainnya serta diyakini oleh sejarah yang jujur dan objektif. Sesungguhnya dengan pidato politiknya ini Soekarno menipu rakyat Aceh. Orang akan terharu apabila mendengar kisah pengumpulan dana untuk pembelian dua buah kapal tersebut. Betapa tidak, kondisi rakyat Aceh yang serba kekurangan, carut-marut akibat harta kekayaannya terkuras habis akibat penjajah Belanda dan Jepang. Kini, ketika pemerintah meminta sumbangan kepada rakyat Aceh yang besar, dengan rasa penuh tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia tetap menyanggupi permin-taan kepala negara.

Ketika Yogyakarta dikembalikan kepada pemerintah Indonesia, pemerin-tah hampir tidak dapat mengongkosi dirinya lagi. Dengan maksud supaya roda pemerintahan dapat berjalan kembali, maka dari rakyat Aceh telah mengalir ke Yogyakarta sumbangan-sumbangan berupa uang, alat-alat kantor dan obat-obatan. Pada akhirnya orang dapat membaca di surat-surat kabar tentang sumbangan itu dengan angka-angka yang menakjubkan. Bahkan, untuk pemulihan pemerintah Republik Indonesia, Aceh telah menyumbang-kan lima kilogram emas batangan. Entah di mana pula emas itu bersembunyi sehingga tidak ketahuan di mana. Aceh telah membantu RI, namun RI dengan sistem pemerintahan jahiliyahnya telah dengan gampangnyanya mengko-rupsi harta sumbangan rakyat Aceh.

Bukan hanya korupsi yang dipraktekkan pemerintahan Soekarno, tapi juga membalas bantuan Aceh dengan serbuan militer. Sekali lagi, air susu dibalas dengan air tuba, itulah kira-kira gambaran kasar yang diperbuat oleh Soekarno sebagai pemimpin bangsa terhadap rakyat Aceh yang *notabene* adalah warga muslim penyokong utama tegaknya Republik. Betapapun Aceh telah banyak mengorbankan harta dan jiwa bahkan nyawanya untuk tetap mempertahankan negeri ini dari penjajah Belanda ternyata politik pemerintah mengenai perjuangan umat Islam Aceh menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Padahal pada waktu kunjungannya ke Aceh yang pertama, Soekarno telah memberikan harapan bagi perjuangan umat Islam Aceh. Hal itu nampak terlihat ketika dia mengadakan suatu dialog dengan Teungku Daud Beureu-eh. Di mana dalam pertemuan itu Soekarno bersumpah atas nama Allah akan memberikan hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan *syari'at Islam*. Dan akan mempergunakan pengaruhnya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di dalam daerah Aceh.

⁴¹⁵ Lihat Amelz, *Riwajat Singkat Atjeh....*, hlm. 17.

Dan banyak lagi tindakan dan kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh yang dianggap rakyat Aceh telah melanggar kesepakatan. Bagi rakyat Aceh janji adalah hutang, dan hutang haruslah dibayar dengan tunai. Dalam kasus ini, ternyata Soekarno atas nama pemerintah pusat tidak ada niat untuk membayar hutangnya kepada rakyat Aceh. Soekarno lebih suka menjadi seorang penipu dari pada besikap jujur sebagai seorang manusia yang beradab. Maka sangatlah wajar jika kemudian Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai seorang ulama atas nama rakyat Aceh mengumandangkan *Prang Sabi* kepada *umara* yang jahat dan bandit seperti Soekarno yaitu melakukan resistensi politik terhadap kekuasaan pusat.

Bangkitnya Kekuasaan Ulama

Di Banda Aceh pasukan Amir Husin al Mujahid terus juga mengambil apa yang disebut "langkah-langkah koreksi" terhadap para anggota senior Pemerintahan dan Tentara.⁴¹⁶ Tentara Republik menyerah tanpa pertempuran: Nya' Arif memberi perintah agar tidak melakukan perlawanan apa pun. Tetapi tindakan ini sia-sia saja baginya. Nya' Arif ditangkap dan dipenjarakan di Takengon —*uleebalang* yang lain-lain juga ditempatkan di sini. Awal bulan berikutnya Maret 1946, dia tutup usia, sebab kematiannya dinyatakan diabetes. Tindakan Amir Husin al Mujahid merupakan pukulan terakhir bagi *uleebalang*. Pada Agustus 1946, residen Aceh, T.M. Daudsyah menunjuk daerah permukiman yang khusus untuk orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa Daud Tjumbok, seolah-olah melindungi mereka terhadap dendam massa.⁴¹⁷ Penahanan mereka ini diperintahkan olehnya karena: "Tidak mungkin dewasa ini kaum kerabat ataupun sahabat-sahabat akrab para korban revolusi sosial tetap berada di kalangan sisa penduduk lainnya, dan "adalah kewajiban pemerintah untuk memelihara ketertiban umum dan menja-min keselamatan rakyat maupun pihak yang tersebut di atas." Demikianlah diperintakkannya penahanan 62 orang dan kerabatnya,⁴¹⁸ termasuk Sjammaun Gaharu, yang menurut daftar yang dilampirkan pada ketetapan yang dimaksud telah melarikan diri.⁴¹⁹

Para *uleebalang* yang tidak sempat terbunuh secara suka-rela mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan hak turun-temurunnya karena takut akan akibat-akibat ke-mudian.⁴²⁰ Tempat mereka sebagian besar diambil orang-orang PUSA. Dengan kata-kata Pemerintah Pusat setelah meletus-nya pemberontakan *Darul Islam*, "sebagian yang sangat besar dari jabatan-jabatan penting berada dalam tangan orang PUSA dan pengikut-pengikut mereka ... Hanyalah untuk jabatan-jabatan yang memerlukan keterampilan keahlian diangkat orang-orang dari luar daerah."⁴²¹

Jabatan Nya' Arif sebagai residen Aceh diambil alih Teuku Mohammad Daudsyah juga seorang *uleebalang*, tetapi sudah lama menjadi anggota PUSA yang setia. Seorang *uleebalang* lain anggota PUSA, Teuku Mohammad Amin, diangkat menjadi wakil residen. Jabatan yang sama juga diberikan kepada Daud Beureueh, yang kemudian di

⁴¹⁶ JarahDam-I, *Dua Windhu Kodam I/Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, 1972), hlm. 113.

⁴¹⁷ Sumatera Utara, *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 90.

⁴¹⁸ Ketetapan Residen Aceh 18 Agustus 1946 dalam S.M. Amin, *kenang-kenangan dari Masa Lampau*, (1975), hlm. 69-70.

⁴¹⁹ S.M. Amin, *Ibid.*, hlm. 70.

⁴²⁰ Demikianlah *uleebalang* Sagi Mukim XXII menyatakan pada 19 Februari: 1) hak *uleebalang* turun-temurun menggantikan pemimpin negen tidak lagi sesuai dengan zaman; 2) *uleebalang* adalah warga negara Republik dan menghormati kesejahteraan rakyat; dan 3) mereka telah memutuskan, demi tercapainya organisasi yang sempurna. a) memohon kepada Pemerintah dengan hormat agar memberikan kepada penduduk kedua puluh dua mukim hak untuk memilih pemimpin-pemimpinnya sendiri, dan b) meminta agar semua *uleebalang*, termasuk kepala Sagi, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Lihat Insider (S.M. Amin), *Atjeh Sepintas Lalu*, (Jakarta: Fa Archapada, 1950).

⁴²¹ Keterangan Pemerintah, 1953, hlm. 100.

samping itu menjadi kepala Departemen Agama di Aceh. Nya' Arif digantikan sebagai anggota Staf Umum Tentara Republik di Sumatera oleh Amir Husin al Mujahid, yang mengangkat dirinya sendiri dari pangkat mayor menjadi mayor jenderal pada Maret awal, ketika ia mengeluarkan keterangan yang mengumumkan sejumlah perubahan dalam susunan Komando Tentara Republik di Aceh. Rekan dekatnya, Husin Jusuf bekas sekretaris Pemuda PUSA umpamanya, diangkat dari jabatan mayor menjadi kolonel, menggantikan Sjammaun Gaharu sebagai panglima Divisi V. Perubahan-perubahan ini dilakukan atas kehendak rakyat yang diwakili Tentara Perjuangan Rakyat, demikian dinyatakan dengan tegas.⁴²²

Pada akhir 1946 Amir Husin al Mujahid sendiri menjadi korban sebuah komplot. Dia diculik dari Hotel Aceh di Banda Aceh, dan dibawa ke Sigli. Kata orang para penculiknya bermaksud menyerahkannya kepada seorang ulama setempat, yang ingin membalas dendam atas kematian saudaranya atas perintah Amir Husin al Mujahid. Tetapi akhirnya ia diserahkan kepada yang berwajib dan dijatuhi hukuman penjara oleh sebuah pengadilan militer,⁴²³ tetapi segera dibebaskan lagi. Tujuan Tengku Amir Husin al Mujahid bukan hanya untuk mengambil alih komando Tentara Republik di Aceh, tetapi untuk menggabungkan pemerintahan militer dan sipil bersama-sama. Perlawanan dari organisasi-organisasi bukan-*uleebalang* dan bukan-PUSA, dan juga barangkali di dalam PUSA,⁴²⁴ merintang rencana ini. Karena, sebuah usul dari Tentara, yang kini dipimpinnya sendiri, untuk meletakkan pemerintahan sipil di bawah kekuasaan militer ditolak setelah dibahas dalam suatu pertemuan yang di samping dihadiri residen yang baru, juga dihadiri wakil-wakil Tentara, Komite Nasional Daerah, Pesindo, Mujahidin, Masyumi, PSI, PKI, dan sejumlah organisasi kecil pada 6 April 1946. Mereka memutuskan, untuk masa ini keadaannya adalah demikian bahwa "pemerintah sipil belum perlu digantikan oleh pemerintah militer" dan bahwa "belum tiba masanya untuk menyampaikan usul kepada penguasa untuk mengubah pemerintahan sipil menjadi pemerintahan militer".⁴²⁵

Walupun pemerintahan sipil tetap terpisah dari pemerintahan militer dan beberapa orang pamong praja utama masih berasal dari kalangan *uleebalang*, kaum ulama dan PUSA kukuh menguasai keduanya. Juga mereka memperoleh banyak kemajuan dalam bidang ekonomi. Harta milik *uleebalang* yang kariah disita dan dibagi-bagi, sebagian besar mungkin diberikan kepada ulama. Yang akhir ini selanjutnya menuntut kedudukan yang paling menguntungkan dalam ekonomi untuk mereka sendiri. Said Abdullah, umpamanya, menjadi manager perkebunan asing maupun yang dimiliki pemerintah, sedangkan Amir Husin al Mujahid dihiahi jabatan direktur umum perusahaan minyak Sumatera Utara. Seorang pemimpin PUSA lain, Njak Neh membuat karier untuk dirinya sendiri dalam perdagangan.⁴²⁶

Perubahan-perubahan ini menimbulkan banyak perlawanan tidak hanya di pihak kerabat para *uleebalang* yang telah meninggal dunia, yang harta miliknya disita, melainkan juga dipihak rakyat jelata dan ulama-ulama Islam yang tidak termasuk kalangan teras PUSA. Dua dari mereka ini, Tengku Hasan Krueng Kale dan Tengku Hasbullah Indrapuri, terus mengutuk pengambilan harta kekayaan *uleebalang* dan

⁴²² Sebagai wakil komandan Divisi V diangkat Letnan Kolonel Nurdin Sufi, sedangkan Mayor Bachtiar Saleh diangkat menjadi kepala staf. Lihat Sumatera Utara, *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953).

⁴²³ Insider (S.M. Amin), *Atjeh Sepintas Lalu*, (Jakarta: Fa Archapada, 1950), hlm. 25-26.

⁴²⁴ Perasaan iri hati pribadi dan antagonisme daerah mungkin memainkan peranan di sini. Amir Husin al Mudjahid berasal dari Aceh Timur, demikian juga Mohammad Daudsjah. Menurut beberapa pengamat, kenyataan bahwa jabatan militer dan sipil penting di Aceh diduduki dua orang Aceh Timur menimbulkan amarah orang dan Aceh Besar dan Pidie. *Persoalan-Persoalan Politik di Atjeh*, Laporan Ms. Mohd. Sujud kepada Gubernur Sumatera Utara, (Medan, 1953), hlm. 5.

⁴²⁵ Sumatera Utara, *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 116.

⁴²⁶ Dada Meuraxa, *Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Medan: Pustaka Sedar, 1956), hlm. 261.

menyatakan hukumnya haram. Untuk agak meredakan kecamankecaman terhadap pembagian kekuasaan dan harta benda, Pemerintah Daerah Aceh membentuk Majelis Penimbang di tiap kabupaten.

Majelis-majelis ini harus mengawasi agar pembagian barang-barang yang disita ini berlaku jujur dan adil. Pelak-sanaannya terjamin dan ketentuan-ketentuan untuk pembagian barang-barang yang disita ditetapkan dalam "peraturan untuk pengawasan dan pemilikan harta benda dari al-marhum pengkhianat-pengkhianat terhadap Negara Republik Indonesia di Aceh".⁴²⁷ Majelis-majelis ini disertai tugas menge-nai semua bekas barang milik sang *uleebalang* almarhum; dari hasil pendapatan inilah akan diberi ganti kerugian yang ditimbulkan oleh *uleebalang* pada masa lalu maupun dalam bulan-bulan dekat sebelum dan selama revolusi sosial. Barang-barang yang diambil *uleebalang* secara tidak sah ha-rus dikembalikan kepada pemilik yang sah. Demikian pula pemilik asal barang-barang yang dibeli *uleebalang* dengan harga rendah yang tidak wajar diberi kesempatan membeli kembali barang-barang ini menurut harga yang diterimanya semula. Sisanya, menurut ketentuan ini, dibagi antara para ahli waris *uleebalang* almarhum.

Tampaknya tak banyak uang yang tersisa untuk dikembalikan kepada para ahli waris ini pada akhir 1949, ketika majelis-majelis ini mulai bekerja sebagaimana mestinya. Karena, pada ketika pembentukannya, dewan-dewan ini tidak saja menghadapi masalah sulitnya mengumpulkan harta milik yang *uleebalang*— yang dalam banyak hal telah diserobot orang lain dalam rangka "revolusi sosial"—melainkan juga karena kurangnya dana akibat suatu keputusan yang meng-hendaki tunjangan dibayarkan kepada semua penderita cacat maupun janda dan anak-anak mereka yang tewas selama revolusi sosial dari harta kekayaan bersama para *uleebalang*. Jadi sebenarnya sedikit saja uang yang tersisa, hingga khususnya Majelis Penimbang Pidie, daerah yang bergolaknya revolusi sosial "paling hebat" terpaksa minta Pemerintah mengambil alih tanggung jawab membayar tunjangan.

Pembentukan Majelis Penimbang pada Juli 1946 pun bukan tidak menimbulkan tantangan. Pertama, mereka terdiri hampir seluruhnya dari pemimpin-pemimpin Islam. Kedua, mereka tidak berhasil melaksanakan tugas yang telah dite-tapkan bagi mereka.⁴²⁸ Kegagalan Dewan ini diakui anggota-anggotanya sendiri.⁴²⁹ Sejumlah faktor mereka kemukakan sebagai alasan, umpamanya, perang melawan Belanda dan kenyataan bahwa pendaftaran harta milik *uleebalang* mulai hampir satu tahun penuh sesudah revolusi sosial membuat sangat sulit melakukan rekonstruksi peris-tiwa-peristiwa dan menentukan barang-barang mana yang diambil secara tidak sah, demikian pula inflasi terbang benar-benar tidak me-mungkinkan untuk menetapkan jumlah ganti rugi.⁴³⁰

Pada tahun-tahun kemudian pun penyitaan harta milik *uleebalang* dan bekerjanya Madjelis Penimbang merupakan benih-benih konflik yang semakin menggumpal dan me-munculkan per-tentangan-pertentangan berikutnya. Ketika pecah pemberontak-an *Darul Islam* di Aceh, 1953, Pemerintah Republik dan partai-partai politik yang tidak menyetujui pemberontakan terus-menerus berulang-ulang menggunakan kedua soal ini untuk memojokkan pemimpin-pemimpin pem-berontakan dan untuk menarik perhatian akan perlawanan rakyat yang dinyatakan masih keras terhadap mereka. Sebaliknya, simpatisan-simpatisan pemberontakan yang pasif membantah tuduhan bahwa

⁴²⁷ Lihat Keresidenan Republik Indonesia Daerah Aceh, Peraturan Daerah No. 1.

⁴²⁸ Untuk susunan Majelis Penimbang dan laporan tentang bekerjanya Dewan ini di Pidie lihat, Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureu'eh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm. 202.

⁴²⁹ Dada Meuraxa, *Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Medan: Pustaka Sedar, 1956), hlm. 20-21.

⁴³⁰ Lihat surat Nya' Umar, Ketua Majelis Penimbang Pidie kepada para bupati dan wedana Sigli, Lammeulo, dan Meureudu. Lihat Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureu'eh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.).

penyitaan dan pembagian dila-kukan secara tidak jujur dan sebaliknya menuduh golongan *ulee-balang* merampas rakyat sewenang-wenang sejak mereka masuk dalam pemerintahan kolonial, dan penyelewengan *bait al-mal* (dana-dana masyarakat Islam) dan salah urus wakaf (yayasan keagamaan) yang diserahkan dalam pemeliharaan mereka.⁴³¹ Selanjutnya, Republik Indo-nesia berjalan dalam proses yang yang penuh gejolak dan hingar-bingar perdebatan di Pusat, di Jakarta. Sementara Aceh semakin terlupakan dan jasa-jasa rakyat Aceh semakin tak terhiraukan, Jakarta membuat banyak kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Pada tahap ini, rakyat Aceh sudah tidak lagi meminta-minta untuk diperhatikan, melainkan sudah bersikap tidak peduli, suatu kemarahan tersembunyi yang sulit diketahui kapan akan meledak dalam luapan pemberontakan. ***



⁴³¹ Lihat umpamanya pidato Nur el Ibrahimy dan Kasman Singodimedjo. Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureu'eh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm. 134-139, 92-249.

BAB 3

KONGRES ULAMA SELURUH INDONESIA DI MEDAN: PERSIAPAN-PERSIAPAN UNTUK PEMBERONTAKAN

SEBENARNYA, Darul Islam atau NII adalah sebuah gerakan fisik radikal yang dimulai dengan kegiatan non-fisik: konferensi. Di Jawa Barat, SM Kartosoewirjo, sebelum mengumumkan “jihad fi sabilillah” terhadap Belanda di akhir tahun 1948, dan kemudian memproklamasikan Negara Islam Indonesia, ia terlebih dahulu memulainya dengan tiga buah konferensi: (1) Konferensi Cisayong awal tahun 1948; (2) Konferensi Cipendeuy, Maret 1948; dan (3) Konferensi Cijoho, Mei 1948.⁴³² Barulah kemudian, setelah sejumlah konferensi mengkristalkan keyakinan untuk berjuang, naik gunung, angkat senjata, membunuh atau terbunuh, berperang melawan “tentara Pancasila”; *ist kariman aumut syahidan*.⁴³³ Begitu pun dengan di Aceh. Pemberontakan di-mulai dengan sebuah atau dua kongres. Di kongres inilah para ulama menyun sejumlah agenda komitmen, maka di gunung untuk mempertahankannya.

Sebelum Kongres

Sebelum PUSA menyelenggarakan sebuah perhelatan besar kaum ulama di Medan dalam bentuk Kongres Ulama Seluruh Indonesia, Teungku Daud Beureueh dan beberapa anggota PUSA, khususnya Pemuda PUSA, ternyata sudah menjalin hubungan diplomatik rahasia dengan SM Kartosoewirjo di Jawa Barat. Hubungan rahasia ini dijalin dengan modus yang sama dengan *plot* memasukkan Jepang ke Aceh. Teungku Daud Beureueh dan kaum ulama di dalam PUSA merasa perlu “meminjam tenaga luar” untuk membasmi komunisme dan ideologi Pancasila yang dirasakannya semakin hari semakin jauh dari nuansa Islami yang dulu dicita-citakan banyak rakyat Aceh ketika merebut kemerdekaan dan mempertahankan Republik dan Agresi Belanda Pertama dan Aksi Polisionil Belanda Kedua. Merasa bahwa hanya SM Kartosoewirjo dengan jajaran

⁴³² *Album Peristiwa Pemberontakan DI-TII di Indonesia*, (Jakarta: Dinas Sejarah TNI-AD, 1981), hlm. 242-243.

⁴³³ *Ist kariman aumut syahidan*, (hidup mulia atau mati syahid).

Darul Islam dan bala tentara TII-nya yang bisa menghalau gurita komunisme dan Pancasila, maka Teungku Daud Beureueh serius melakukan kontak rahasia dengan Jawa Barat.

Agaknya pada waktu itulah kekecewaan rakyat Aceh sampai ke telinga Imam NII Kartosoewirjo, yang segera mengirim seorang utusan, Abdul Fatah Wirananggapati, alias Mustafa,⁴³⁴ untuk mendekati para pemimpin Aceh pada awal tahun 1952. Melalui Abdul Fatah Wirananggapati⁴³⁵, Kartosoewirjo me-ngirimkan beberapa tulisan⁴³⁶ dan maklumat NII tentang gerakan Darul Islam, dan mengajak para pemimpin Aceh untuk bergabung. Ajakan ini mendapat sambutan baik di Aceh. Pendekatan lebih lanjut terjadi ketika Daud Beureueh mengirim seorang utusan, Jahja Sulaiman, seorang pemimpin Pemuda PUSA dari Meureudu, kepada SM Kartosoewirjo di Jawa Barat, bersama Abdul Fatah yang kembali ke sana. Daud Beureueh dan pemimpin PUSA lainnya merasa kecewa terhadap penjelasan yang tidak jelas dari SM Kartosoewirjo yang hanya berisi konsep-konsep ideologis gerakan Darul Islam tanpa memberikan informasi mengenai struktur gerakan itu.⁴³⁷ Struktur adalah hal terpenting untuk memahami manajemen dan pengelolaan gerakan, apalagi untuk sebuah gerakan menentang kekuasaan sebuah negara yang didukung oleh rakyat banyak. Teungku Daud Beureueh pun mengirimkan utusan ke Jawa Barat bersama dengan Abdul Fatah Wirananggapati untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang Darul Islam sebagai sebuah negara. Oleh sebab itulah utusan Aceh tersebut diberi wewenang untuk membahas secara mendalam susunan pemerintahan dan militer NII dengan Kartosoewirjo. Daud Beureueh mengirimkan surat kepada Kartosoewirjo, bertanggal Aceh Darussalam, 4 Oktober 1956. Dalam surat-nya, Daud Beureueh juga membicarakan hubungan awal di antara kedua pemimpin itu.⁴³⁸ Akan tetapi utusan tersebut tidak pernah bertemu muka dengan Kartosoewirjo melainkan dengan sejumlah pemimpin Darul Islam lainnya. Ia juga tidak memperoleh informasi yang dikehendaki oleh para pemimpin Aceh, malah disuruh kembali ke Aceh bersama Abdul Fatah Wirananggapati. Kali ini Abdul Fatah diangkat sebagai kuasa usaha NII di Sumatera dengan tugas membina gerakan Darul Islam di pulau itu. Abdul Fatah tampak tidak sabar melihat pemimpin-pemimpin Aceh yang bergerak sangat lambat walaupun ia diyakinkan bahwa mereka sedang menuju ke arah pemberontakan. Dia tidak meninggalkan Aceh sampai awal tahun 1953. Saban hari dan malam Abdul Fatah Wirananggapati menjelaskan konsep-konsep kenegaraan dari NII dan seperti melakukan *tentir* kepada Teungku Daud Beureueh. Ia sedikit sekali bersosialisasi dengan masyarakat Aceh sehingga menikah dengan seorang puteri Aceh pun ia tak sempat karena saking padatnya acara *tilawah* (proses transmisi ideologi *a la* Darul Islam) kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh dan para anggota PUSA. *Tilawah* ini dilakukan dengan sangat pelan, hati-hati dan penuh dengan perdebatan. Daud Beureueh sangat serius mendengarkannya dan memper-tanyakan setiap konsep, tahapan dan cara-cara serta mekanisme kenegaraan secara mendetail kalau sudah bergabung dengan Darul Islam. Teungku Daud beureueh adalah seorang ulama yang tidak menyombongkan diri, ia adalah ulama besar dengan kharisma besar dan pernah menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo untuk jangka waktu yang sangat pan-jang dan terbiasa dengan manajemen organisasi negara, *state-craft* serta administrasi pemerintahan. Daud Beureueh lama mempertimbangkan kesediaannya untuk ikut bergabung dengan barisan jihad mati-matian a la Darul Islam.

⁴³⁴ Memakai nama alias atau *nama tsani* adalah tradisi politik dan strategi taktik yang sudah mentradisi dalam gerakan Darul Islam dan mereka memiliki alasan pembenaran yang kuat akan taktik nama alias ini, misalnya untuk keamanan dan siasat dengan pihak musuh.

⁴³⁵ Wawancara dengan Abdul Fatah Wirananggapati, Sumedang, 9 Oktober 1987.

⁴³⁶ Dia antara tulisan-tulisan tersebut adalah *Pedoman Dharma Bhakti*, jilid 1 dan 2, juga *Manifesto Politik NII*.

⁴³⁷ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1990), hlm.90

⁴³⁸ Nazaruddin Sjamsuddin, *Ibid.*, hlm. 89.

Namun, dengan segala kerendahan hati, ia kemudian mengakui akan keberanian Abdul Fatah Wirananggapati atas kesabarannya melakukan dis-kusi *tilawah* yang sangat alot. Pada akhirnya, Teungku Daud Beureueh pun setuju bergabung dan siap berjihad fi sabilillah menegakkan negara kurnia Allah, Negara Islam Indonesia.

Pada awal tahun 1953, Teungku Daud Beureueh ber-*bai'at* untuk jihad menegakkan Negara Islam Indonesia di Aceh. Abdul Fatah Wirananggapati sendiri yang melakukan *bai'at* tersebut. Teungku Beureueh tidak meminta un-tuk dibai'at oleh SM Kartosoewirjo, karena bergabungnya dia ke dalam barisan Darul Islam bukanlah karena kultus individu terhadap SM Kartosoewirjo. Dalam kapasitas dan keseniorannya, ia lebih sedikit dibanding SM Kartosoewirjo dan ia sendiri tidak membangga-banggakan kharisma yang di-milikinya tersebut. Bagi Teungku Daud Beureueh, kemuliaan manusia diten-tukan oleh derajat ketakwaannya, bukan oleh ilmu, harta, tahwa dan wanita yang dimilikinya. Ketika Daud Beureueh setuju mendukung Darul Islam dan membawahkan Aceh pada NII, maka Abdul Fatah Wirananggapati pun pulang ke Jawa Barat membawa berita gembira ini kepada SM Kartosoewirjo nun jauh di sana, di pegunungan yang sunyi tempat ia bersembunyi dan melawan negara RI di suatu tempat yang disebut “Madinah Indonesia”.⁴³⁹

Dalam surat Teungku Daud Beureueh kepada SM Kartosoewirjo bertanggal Aceh Darussalam, 4 Oktober 1956, disebutkan bahwa sebelum meletusnya peristiwa “pemberontakan” DI Aceh, Kartosoewirjo sudah memberitahukan kepada Teungku Daud Beureueh melalui utusannya bahwa dalam keadaan darurat para pemimpin DI Aceh dapat bertindak dengan mengatasnamakan pimpinan pusat di Jawa Barat, terutama dalam bidang hubungan inter-nasional.⁴⁴⁰ Seperti juga dengan harakah *Darul Islam* lainnya, asal dari gerakan Aceh ini dapat ditelusuri hingga perjuangan kemerdekaan— ketika Aceh merupakan salah satu bagian dari Republik Indonesia yang tidak pernah di-duduki pasukan Belanda—dan, sesudah tercapainya kemerdekaan, banyak para pelaku ‘pemberontakan’ DI yang sudah menduduki jabatan-jabatan eksekutif di pemerintahan, meskipun pada level daerah. Pengalaman ini mem-berikan pengalaman cukup penting bagi ethos kerja kemudian ketika mem-berontak. Sebelum memberontak pun, sebuah rapat umum yang berbentuk kongres pun dibentuk, mengundang banyak pihak membicarakan rencana, plot dan arah perjuangan di samping mencari legitimasi untuk mendapatkan dukungan berbagai pihak. Sentimen lokal pun diletakkan pada masalah-masalah yang diciptakan oleh kompromi yang harus dilakukan antara tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari otonomi daerah dan campur tangan Pemerintah Pusat. Di Aceh keadaannya menjadi lebih ruwet karena konfrontasi berdarah antara dua kelompok sosial yang bertentangan: elite tradisional dan pemimpin-pemimpin agama. Kaum ulama, dengan hajatan ini, bukan hanya memperoleh panggung untuk beraksi, melainkan juga merupakan sebuah permakluman dan “mohon doa restu” sebelum bergerak lebih jauh lagi.

Teungku M. Daud Beureueh: Singa Aceh

Selain PUSA, pribadi Teungku M. Daud Beureueh juga perlu kita pahami untuk bisa memberikan gambaran yang jelas bagaimana watak dan karakter pergerakan Darul Islam Aceh dalam mengusir pengaruh Komunisme, Pancasila dan ‘paham kekuasaan Jawa’.⁴⁴¹ Bagi Teungku Daud Beureueh, DI adalah “tenaga luar yang dipinjam” untuk mengimbangi pengaruh sekuler yang merusak Aceh seperti ideologi komunisme,

⁴³⁹ “Madinah Indonesia” adalah tempat di mana SM Kartosoewirjo bermarkas, Dipercayai oleh sebagian orang bahwa “Madinah Indonesia” adalah desa Leuwisari, Cigalontang, sebelah selatan Tasikmalaya. Lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik...*, hlm. 250.

⁴⁴⁰ Surat Teungku Daud Beureueh kepada SM Kartosoewirjo, bertanggal Aceh Darussalam, 4 Oktober 1956, sebagaimana dikutip dalam Nazaruddin Sjamsuddin, *Ibid.*, hlm. 251.

⁴⁴¹ Tentang konsep paham kekuasaan Jawa, lihat Fachry Ali, *Paham Kekuasaan Jawa dalm Indonesia Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1986).

Pancasila dan model berpikir birokratik ala paham kejawen. DI bukan perlawanan separatis, meskipun jika digerakkan ke politik *seccesion* juga bisa jika Teungku Daud beureueh berkenan ketika itu. Tentang pribadi Abu Beureueh, sedikit cuplikan tulisan Boyd R. Compton di bawah ini mungkin tepat untuk menggambarkan sosok dingin yang satu ini:

Selama ini Indonesia dilukiskan sebagai “untaian zamrud yang terhampar di sepanjang khatulistiwa”. Gambaran indah ini tak memadai untuk mengungkapkan keagungan alam dan keragaman manusia di kepulauan ini, tapi ia sangat bagus untuk menggambarkan masalah pokok politik Indonesia. Sebuah untaian zamrud yang mudah putus. Seandainya untaian rumit yang melingkari persatuan Indonesia itu longgar dan putus, permata pertama yang jatuh tentulah Aceh, benteng Islam di ujung Barat Laut Sumatera.⁴⁴²

Boyd Compton mengisahkan saat-saat akan meletusnya pemberontakan ini dengan sangat baik: “Baru-baru ini saya menghabiskan sepuluh hari di Aceh, sebagai tamu Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang kuat, dan kembali ke Medan dengan kesan bahwa keinginan Aceh yang angkuh terhadap kemerdekaan tidaklah sebesar hasratnya akan otonomi pemerintahan lebih luas dan pengembangan ekonomi lebih pesat. Sukar membayangkan apa yang akan terjadi seandainya keinginan-keinginan ini tak terpenuhi. Ketidakpuasan dan kekecewaan terlihat jelas di Aceh, dan homogenitas internal daerah ini memungkinkan hasrat akan kemerdekaan segera diterjemahkan menjadi aksi terorganisasi. Namun sekarang ini suasana Aceh lebih diwarnai oleh penantian yang waspada daripada kegelisahan terbuka. Ketenangan Aceh lebih bernada tak menyejukkan ketimbang menenteramkan.”⁴⁴³ Artinya, otonomi bukanlah jawaban yang bisa memuaskan hati rakyat yang dipimpin oleh seorang ulama kharistik, seorang penjaga bangsa Aceh yang tegar, setegar singa. Dialah Teungku Daud Beureueh, sang singa Aceh. Tanpa dia, maka semuanya tidak akan mungkin terjadi di Aceh ketika itu.

Boyd R. Compton selanjutnya menceritakan bagaimana keadaan Indonesia yang sudah semakin miring dan condong dan hampir-hampir masuk dalam perangkap merah komunis. “Pada akhir Juli, saya meninggalkan Medan dengan berbekal segudang kasak-kusuk, sebagian besar tentang memuncaknya ketegangan di Aceh selama krisis kabinet dewasa ini. Gosip paling menarik adalah bahwa susunan kabinet yang terang didominasi sayap kiri di Jakarta akan menyulut Aceh melakukan pemberontakan terbuka dengan bendera *Darul Islam*, gerakan jihad suci menegakkan Negara Islam Muslim di Jawa Barat. Kasak-kusuk lainnya menyatakan, bahwa tokoh terkenal Daud Beureueh sudah ditunjuk sebagai komandan *Darul Islam* untuk Aceh; laporan agaknya diberi bukti dengan ditahannya sekretaris pribadinya di Jakarta, tak lama sebelum saya berangkat.”⁴⁴⁴ Teungku Daud Beureueh tetap tegar, tak bergeming, darah di dadanya sudah demikian mendidih melihat kondisi Indonesia yang semakin-hari semakin “merah”, seakan ia mampu melihat bagaimana Soekarno menari-menari mengejeknya, yang telah menipunya dulu dengan janji menjadikan Aceh negara (bagian) Islam. Pekik Allahu Akbar rakyat Aceh dulu, nama Tuhan untuk kemerdekaan negeri, nama Tuhan untuk mengusir penjajah, dengan mudah hilang di tengah hiruk pikuk para tokoh partai-partai kiri yang semakin *mengke* dengan kekuasaan fatamorgananya.

Boyd R Compton selanjutnya mengisahkan betapa “bahan bakar” Islam untuk meletusnya sebuah revolusi politik yang paling berdarah sekalipun akan sangat mungkin terjadi di Aceh, negeri pahlawan yang miskin dan compang-camping, tak dipedulikan lagi oleh negara Republik Soekarno yang telah terbang dengan segenap kemegahan dan kereta kencana. Boyd R Compton mengatakan: “Dengan agak ragu akan berbagai kasak-kusuk yang saya dengar, saya tiba di Kutaradja (sekarang Banda

⁴⁴² Lihat Boyd R. Compton, *Surat-Surat Rahasia Boyd R. Compton*, (Jakarta: LP3ES, 1995), halaman 145. Lihat terutama kata pengantar yang ditulis oleh Fachry Ali.

⁴⁴³ Compton, *ibid.*, halaman 145-146.

⁴⁴⁴ Boyd R. Compton, *Ibid.*, hlm. 146.

Aceh - pen), ibukota Aceh yang senyap dan compang-camping. Tugas utama saya adalah mengumpulkan bahan tentang Islam di Aceh, tetapi di relung benak saya tersisip harapan melihat Daud Beureueh yang kondang itu. Jihad suci menegakkan Negara Islam-jihad suci menegakkan Negara Islam paling serius dalam sejarah singkat Indonesia digencarkan oleh komando “orang-orang kuat”: Kartosoewirjo di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang masih ingusan dan rewel, syarat-syarat umum bagi meletusnya jihad suci menegakkan Negara Islam tampak selalu ada. Batas antara kekacauan dan kedamaian acap terletak pada sikap dan keistimewaan seorang pemimpin tunggal yang mempunyai kekuatan mengkomando. Teungku Daud Beureueh adalah seorang pemimpin semacam ini. Beberapa hari setelah kedatangan saya di Kutaradja, saya sudah berjalan menuju desanya untuk berwawancara, ditemani oleh Bupati Sigli yang baik hati.”⁴⁴⁵ Seorang peneliti Amerika berjalan tenang menyusuri hari-hari senyap menjelang perang dan Teungku Daud Beureueh pun menerimanya dengan tangan terbuka. Bahkan ketika Teungku Daud Beureueh membuat seruan selepas proklamasi NII Aceh bahwa orang-orang asing akan dijamin keselamatannya, ia sesungguhnya mengingat pada orang asing semacam Boyd R Compton yang meskipun Amerika, atau mungkin Yahudi sekalipun, ia adalah ilmuwan, warga sipil yang tak ada hubungannya dengan perang yang sedang direncanakan.

Boyd R Compton selanjutnya mengatakan: “Daud Beureueh dikenal luas sebagai gubernur militer Aceh selama tahun-tahun revolusi, tapi sekarang ia hidup tenang-tenang di desanya –tampaknya seperti pensiun. Setelah Aceh masuk ke dalam Republik Indonesia kesatuan dua tahun silam, Daud Beureueh diberi jabatan gubernur kehormatan dan diminta menetap di Jakarta sebagai penasehat di Kementerian Dalam Negeri. Ia tidak menerima ‘penghormatan’ ini. Satu-satunya tindakan pentingnya yang diketahui umum dalam dua tahun ini adalah ketika ia mengetuai Musyawarah Ulama Medan, April lalu. Setelah musyawarah itu, Daud Beureueh melakukan tur singkat keliling Aceh, memberikan ceramah-ceramah provokatif bernada mendukung ide Negara Islam. Ia kemudian kembali ke desanya, dan – membikin takjub penduduk Medan yang sudah maju –membangun sebuah tembok besar dan masjid sungguhan dengan tangannya sendiri.”⁴⁴⁶ Tangan-tangan kekarnya yang sudah berumur itu kembali dilatih dengan kerja-kerja fisik, untuk sebuah persiapan, untuk membiasakan dirinya kalau sudah berada dalam barisan jihad suci nantinya. Ia menolak jabatan simbolis sebagai Gubernur di Jawa, terlepas dari tanah kekuasaannya. Teungku Daud Beureueh adalah sebenar-benarnya pejuang suci, mujahidin tangguh yang sama juga SM Kartosoewirjo yang berani menolak jabatan sebagai Menteri Muda Pertahanan.

Boyd R Compton, melalui surat-surat rahasiannya itu ia menulis: “Selama kami bermobil ke Selatan Sigli, saya tanya Pak Bupati tentang status Daud Beureueh sekarang. Ia mengatakan, sang mantan gubernur militer sebenarnya masih aktif. Karena wibawanya yang amat besar di mata warga desa dan ulama Aceh, Daud Beureueh selalu diminta untuk menengahi perselisihan-perselisihan dan memberi saran. Kesibukan hidupnya terutama dicurahkan untuk mengunjungi desa-desa tetangga dan menerima delegasi dan tamu-tamu di desanya sendiri. Rupanya, kehidupan semacam ini lebih bermakna bagi Daud Beureueh daripada menduduki jabatan kehormatan nun jauh di Jakarta. Saya sudah mendengar bahwa di Jakarta Daud Beureueh menjadi gundah dan “malas”, ketika ia tak diperbolehkan berhubungan dengan masyarakat Aceh. Seperti banyak pemimpin rakyat lainnya, ia dibesarkan dan didorong oleh kontak pribadinya dengan para pengikutnya; sebaliknya mereka bergantung pada personalitasnya yang kuat untuk mengungkapkan harapan-harapan terdalam mereka demi perbaikan nasib mereka.”⁴⁴⁷ Mujahid agung yang pernah dimiliki Aceh ini benar-benar menyadari

⁴⁴⁵ Boyd R. Compton, *Op.cit.*, hlm. 147.

⁴⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁴⁷ *Ibid.*, halaman 147-148.

dirinya harus berada di tengah-tengah rakyatnya, bangsa Aceh, bangsa yang telah mengorbankan nyawanya demi kecintaannya kepada Allah, rasul dan kaum muslimin serta tanah suci serambi Mekkah.

Selanjutnya Boyd R Compton melanjutkan ceritanya: “Mobil kami baru saja melewati pasar riuh desa Daud Beureueh, ketika kami melihat masjid setengah jadi itu. Kalaulah Daud Beureueh adalah kunci untuk memahami Aceh, saya kira bangunan ini –yang sangat penting tapi tak utuh– merupakan simbol dari watak dan sikap Daud Beureueh sekarang ini.”⁴⁴⁸ Boyd benar, bangunan itu adalah refleksi diri Teungku Daud Beureueh yang sangat tegar, sangat sederhana, apa adanya, parut-parutnya mewakili kondisi Aceh yang serba miskin dan compang-camping setelah ditinggal dan dilupakan oleh Republik.

Lihatlah bagaimana selanjutnya Boyd R Compton menggambarkan sosok pejuang jihad suci ini memuloiakan tamunya, yang paling asing sekalipun: “Jauh di sisi masjid, mobil tiba-tiba berbelok ke rumah nyiur. Pemandangan sawah dan pegunungan biru yang jauh hilang, dan kami terguncang-guncang di sepanjang jalan menuju sebuah rumah tembok putih yang asri. Daud Beureueh keluar untuk menemui kami, tersenyum dan tampil rapi dengan celana panjang ketat, kemeja putih, dan peci beludru hitam. Kami segera duduk mengelilingi meja teh, simbol lazim bagi keramahan Indonesia. Sembari kami saling memperkenalkan diri, saya memandangi dua permadani dinding bergambar dari Arab, beberapa gambar kecil masjid, dan ruangan yang sangat bersih. Ruangan ini memperlihatkan kesederhanaan, kesejahteraan, dan disiplin.”⁴⁴⁹ Luar-biasa lengkapnya penggambaran Boyd R Compton tentang rumah dan keadaan diri Teungku yang sangat bersahaja dan keras hati membela Islam ini. Jelaslah sekarang bagi rakyat dan bangsa Aceh bahwa pada diri orang-orang suci “yang berjalan bersama dengan Tuhan” inilah harapan akan terbentuknya Negara Islam bagi rakyat yang telah mendamba demikian lama di tanah rencong.

Tokoh yang menjadi idola banyak orang-orang Aceh dan para pejuang Islam di manapun di Indonesia ketika itu adalah seorang dengan sosok yang sederhana, hidup tenang dan santai di *gampong*-nya yang guyub. Ia tenang setenang air laut Pasifik, karena semuanya sudah ditakdirkan Tuhan, maka baginya hanya ada satu: bagaimana menanti kematian dengan cara yang paling disukai Tuhan, cara martir, menjadi syahid. Boyd Compt menggambarkan tokoh ini dengan kata-kata lugas dan datar: “Daud Beureueh lebih tampak sebagai pensiunan perwira militer ketimbang sebagai ahli agama, hang ditandai oleh gelar *teungku*-nya. Tubuhnya yang kurus dan kuat, tegak tapi santai di kursinya. Dari bawah pecinya, rambut kelabunya yang dipangkas pendek kontras dengan wajahnya yang muda dan coklat kemerahan. Bicaranya lugas, tapi tatapan matanya tampak kurang yakin, seperti orang awam yang menghadapi problem membingungkan. Tiba-tiba ia mengungkapkan pikirannya dengan kegairahan yang nyaris kekanak-kanakan. Saya rasa rekan-rekannya agak kikuk mendengar pernyataannya yang blak-blakan ini: “Anda harus tahu bahwa kami di Aceh ini punya sebuah impian. Kami mendambakan masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, ketika Aceh menjadi Negara Islam. Di zaman itu, pemerintahan memiliki dua cabang, sipil dan militer. Keduanya didirikan dan dijalankan menurut ajaran agama Islam. Pemerintahan semacam itu mampu memenuhi semua kebutuhan zaman modern. Sekarang ini kami ingin kembali ke sistem pemerintahan semacam itu”.⁴⁵⁰ Benar-benar kata-kata yang tajam yang dimiliki oleh mulut-mulut pejuang suci yang akan mempertaruhkan setiap ucapannya dengan darah yang mengalir dalam tubuhnya dan dengan segala kemampuan pikiran yang ada serta para pengikutnya yang setia. Memang benar seperti apa yang disebut oleh Compton bahwa “seperti orang awam yang menghadapi problem membingungkan”, karena Teungku Daud Beureueh telah dibuat bingung oleh Soekarno

⁴⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 148.

⁴⁴⁹ Boyd R. Compton, *Ibid.*, hlm.; 148.

⁴⁵⁰ Boyd R. Compton, *Ibid.*, hlm 149.

yang semakin bersikap aneh dan melupakan janji-janjinya kepada rakyat Aceh. Teungku Daud Beureueh yang semakin bingung dengan perkembangan Indonesia hanya tahu hanya tahu Iskandar Muda, hanya tahu bahwa Aceh harus diseret kembali ke masa kejayaannya di masa lalu, dengan cara apapun, revolusi, perang atau apa sajalah, yang penting adalah jihad! Teungku Daud Beureueh hanyalah seorang *jundullah* seorang tentara Allah yang hanya punya agenda simpel saja dalam hidupnya, berperang dan mengubah tanah tempat ia berkuasa menjadi tanah suci

Teungku Daud Beureueh memang adalah seorang pejuang Islam yang sangat mengerti tentang tata air dan tata pemerintahan. Boyd R Compton kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana: “Apakah pemerintahan seperti itu mampu mengatasi masalah-masalah Aceh sekarang ini.” Maka, Teungku Daud Beureueh pun menjawabnya dengan sangat blak-blakan, bukan seperti gaya-gaya pemimpin-pemimpin yang sudah terlalu banyak mengkonsumsi pendidikan dan teori-teori Barat. Teungku Beureueh hanya menjawab datar dengan sorot mata yang pasti dan berbinar: “Ya. Ambillah pengairan sebagai contoh. Pada zaman Iskandar Muda, dibuat saluran dari sungai yang jauhnya sebelas kilometer dari sini menuju laut. Daerah Pidie menjadi sangat makmur. Dibuat pula saluran lain tak jauh dari yang pertama, keduanya dikerjakan oleh *ulama*. Beda dengan *ulama* zaman sekarang, pemimpin-pemimpin di masa itu tak takut sarung mereka kena lumpur. Sekarang saluran-saluran itu sudah rusak, dan hasil panen padi merosot. Sebelum terjadi perang, Aceh biasa mengekspor beras untuk kebutuhan seluruh daerah Sumatera Timur. Sekarang kita mengimpor beras dari Burma”. Dalam impiannya, ia melihat sebuah Aceh yang sejahtera di bawah pimpinan kelompok *ulama* yang ditampilkan kembali. Di masa keemasan itu, hanya orang-orang yang benar-benar berpengetahuan yang dapat menjadi *ulama*. Sedangkan di zaman modern ini, hampir setiap orang bisa mengaku berhak untuk disebut *ulama*.⁴⁵¹ Teungku Daud Beureueh sesungguhnya adalah seorang yang sangat jenius dengan segudang rencana tata-ruang Aceh yang ada di dalam kepalanya. Siapa saja yang peduli dengan air, dengan beras dengan lingkungan, maka ia adalah orang-orang lurus yang mengerti harus dibawa ke mana rakyat ini.

Boyd R Compton, selanjutnya dengan spontan membuat bandingan antara Soekarno dan teungku Daud Beureueh. Compton menulis: “Daud Beureueh bicara dengan gelora dan kesungguhan tentang perlunya pembaruan. Saya bisa memahami mengapa pak Bupati membandingkannya dengan Sukarno yang cemerlang sebagai orator massa. Seandainya keduanya berpidato di sebuah acara yang sama, konon Sukarno akan menjadi juara kedua jika pendengarnya orang Aceh, terutama kalau sang “Singa Aceh” sudah mulai gusar dan marah.” Hanya Compton sajalah yang mengerti akan kemarahan dan gelora pemikiran dan kemarahan Teungku Daud Beureueh yang luar biasa ini, meskipun tadinya ia hanya menyambut Boyd R Compton dengan senyum dan kehangatan tuan rumah khas *gampong-gampong* di Aceh. Teungku Daud Beureueh adalah singa Aceh yang sudah mulai gusar dan marah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya untuk menjalankan niat sucinya, berperang demi agama Allah, demi tegaknya syariat Islam, demi tegaknya negara Islam bagi bangsa yang telah mengorbankan nyawanya dan syahid dalam peperangan melawan kafir-kafir jahanam dari dunia Barat.

Boyd R Compton pun mengakui kesalahannya dalam menilai sosok tegar yang sedang diusik, diganggu oleh cecunguk-cecunguk revolusi nun jauh di Jawa sana. Teungku Daud Beureueh ibarat singa Aceh yang sedang tertidur, kini dia diusik dengan hal-hal “yang membingungkannya”. Boyd Compton mengisahkan bahwa: “Sementara ia terus bicara tentang pemerintahan Islam di Aceh, saya merasa bahwa aneka kasak-kusuk yang saya bawa dari Medan telah sangat menyesatkan saya. Jelas bahwa ia bicara tentang sebuah Negara Islam untuk seluruh Indonesia, dan bukan cuma untuk Aceh yang merdeka. Ia berusaha meyakinkan saya bahwa kemerdekaan beragama akan

⁴⁵¹ Boyd R. Compton, *Ibid.*, hlm. 150.

dijamin di negara semacam itu, dengan menekankan contoh mengenai toleransi besar bagi penganut Kristen dalam negara-negara Islam di Timur Dekat. Kaum Kristen akan diberi kebebasan dan dilindungi dalam negara Islam Indonesia, sedangkan umat Islam tidak dapat merasakan kemerdekaan sejati kalau mereka tidak hidup dalam sebuah negara yang didasarkan atas ajaran-ajaran Al-Qur-an. Ketika saya tanya apakah sikap ini tak mengandung semacam kontradiksi, ia menandaskan bahwa, sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia harus tunduk pada kehendak-kehendak mayoritas muslim. Ia yakin partai-partai Islam akan menang besar dalam sebuah pemilihan umum.”⁴⁵² Teungku Daud Beureueh adalah tokoh yang cukup *fair*, demokratis dan bertenggang rasa, namun ia akan mengambil jalannya sendiri jika kehendak rakyat tak terlaksanakan dengan paripurna. Ia telah memberikan waktu yang cukup, bagi partai-partai untuk mengupayakan kemenangan, maka jika gagal, giliran dia yang akan membuka cahaya agama Allah dengan cara perang. Kalau Teungku Daud Beureueh sudah menunjukkan cahaya-Nya, maka tidak ada seorang pun yang akan mampu menutup-nutupi cahaya Allah, kecuali para pengkhianat yang turun gunung dan menyerahkan dirinya ke pangkuan Ibu Pertiwi, bukan ke pangkuan haribaan Allah.

Selanjutnya, Boyd R Compton menulis: “Daud Beureueh melihat ada tiga kelompok di Indonesia dewasa ini: kaum Komunis yang menginginkan negara Marxis ateistik, umat Islam yang menghendaki Negara Islam, dan golongan nasionalis tertentu yang mau menghidupkan kembali Hinduisme Jawa. Ia cemas bahwa golongan Hindu dan Marxis sedang mengakar, tapi mereka sendiri khawatir kalau pemilihan umum diadakan, sebab mereka pasti kalah. Karena alasan ini, menurut Daud Beureueh, mereka akan berusaha habis-habisan untuk menunda-nunda pelaksanaan pemilu.”⁴⁵³ Demokrasi bagi Teungku Daud Beureueh adalah sebuah cara syura rakyat yang sangat sederhana, meskipun berbiaya tinggi dengan pemilunya, akan tetapi akan mampu memperlihatkan suara rakyat yang sebenarnya. Teungku Daud Beureueh adalah demokrat sejati, panjaga gawang bagi kehidupan *governance* yang baik dan sehat agar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terjamin.

Sikap demokratiknya ini ia terjemahkan ke dalam aksi kongres untuk mengumpulkan seluruh kaum ulama dan menanyakan apa keinginannya dan bagaimana mencapai keinginannya itu. Boyd Compton menulis: “Musyawarah Ulama Medan, kata Daud Beureueh, adalah bukti bahwa Islam lebih kompak dibanding sebelum perang. Ia menandaskan ketegangan antara kelompok “muda” dan kaum “kolot” sudah berakhir pada tahun tiga puluhan. Salah satu pertanda adanya persatuan baru ini adalah tak ditonjolkannya perbedaan-perbedaan di antara mazhab-mazhab hukum Islam. (Mazhab Syafi’i dominasi di Indonesia). Ia lalu membikin kami geli dengan cerita-cerita tentang guru-guru agama masa silam yang bodoh dan percaya tahayul, yang menyatakan bahwa potongan rambut dan pakaian orang Barat itu haram menurut hukum Islam. Guru-guru agama yang paling konservatif masih yakin bahwa semua kebiasaan orang Barat itu terkutuk, tetapi mereka tak berani mengatakannya di luar desa mereka. Menurutnya, konservativisme cerewet yang lazim di Aceh sampai kemarin-kemarin ini, didasarkan atas kejumudan terhadap hukum Islam; kemajuan di tahun-tahun ini menjadikannya tampak dungu.”⁴⁵⁴ Benar-benar Compton yang mampu menuliskan bagaimana luasnya pikiran modernis Islam Teungku Daud Beureueh dalam melihat persoalan-persoalan perkembangan masyarakat. Sayang, Aceh telah kehilangan pemimpin yang berani mengatakan sesuatu secara jujur dan berani. Ia, Teungku Beureueh yang santun dan sahaja, bukanlah ulama yang kolot, bukan ulama konservatif dan memandang segala sesuatu yang dari Barat sebagai haram. Kesaksian Compton ini menunjukkan betapa tingginya ilmu agamanya dan kesadaran politiknya dan bagaimana ia mengejawantahkan ajaran-ajaran universal Islam ke dalam tindakan,

⁴⁵² *Ibid.*

⁴⁵³ *Ibid.*, hlm. 149.

⁴⁵⁴ Boyd R. Compton, *ibid.*, hlm. 150.

sikap, tingkah laku dan etos kerjanya yang supra-agama. Kesaksian Compton inilah, yang tak pernah seorang pun menuliskannya tentang tokoh dingin dan tenang ini, memperlihatkan betapa Islam di Aceh adalah Islam yang berbeda dengan Islam di tempat lainnya di manapun di dunia ini. Islam yang dianut Teungku Daud Beureueh ini adalah Islam yang sejuk, moderat, tenang tak suka mengusik orang lain dan tak akan lari jika ada yang mengusiknya.

Selanjutnya Compton menulis, “Ada purbasangka luas di Jawa dan banyak bagian Sumatera bahwa Islam di Aceh sangat kental diwarnai oleh tahayul dan kejumudan. Saya rasa anggapan ini keliru besar, sebab ia mengabaikan perubahan-perubahan besar selama tiga dasawarsa terakhir, yang ditimbulkan oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh, biasa disingkat PUSA. Benih fanatisme di Aceh barangkali sebagian besar memang karena pembaruan ala fundamentalis yang dilancarkan oleh tokoh-tokoh PUSA seperti Daud Beureueh, akan tetapi penting disadari bahwa itu tidak sama dengan jenis fanatisme yang membulatkan tekad Aceh untuk membendung penjajahan Belanda pada akhir abad lalu.”⁴⁵⁵ Bagi Teungku Daud Beureueh, Islam bukanlah agama yang membuat pemeluknya menjadi fanatik, melainkan harus inklusif, bukan menjadi fundamentalis, bukan menjadi teroris. Ia juga seorang organisatoris ulung, memimpin organisasi ulama yang kuat dan disegani, PUSA, yang mampu membalikkan tanah Aceh ini menjadi tempat bagi tumpahnya darah-darah suci, yang telah mengantar ratusan ribuan para pejuang Aceh menemui syahidnya yang damai. PUSA, meskipun adalah organisasi sederhana, ia telah menjadi sebuah sarana pencapaian tertinggi bagi siapa-saja yang menyebut dirinya Muslim.

Compton menilai Teungku Daud Beureueh dari berbagai latar-belakang sosial, ekonomi, politik, dari sudut-sudut yang paling memungkinkan orang untuk melihat titik kelemahan manusiawi dari seorang tokoh. Namun, Compton justru melihat ‘kekuatan’ dalam setiap sudut pandangannya: “Dari segi organisasi, PUSA merupakan federasi longgar yang meliputi sebagian besar guru dan tokoh agama pedesaan Aceh. Sumber kekuatannya adalah wibawa para anggotanya di desa-desa mereka dan, sampai batas tertentu, kekayaan anggota-anggota seperti Daud Beureueh, yang memiliki sejumlah toko atau giat berbisnis. PUSA agaknya bukan sebuah organisasi yang berdisiplin, tapi ia mempunyai kemampuan memobilisasi limpahan dukungan rakyat, kalau anggota-anggotanya bersatu menjalankan suatu tugas.”⁴⁵⁶ Teungku Daud Beureueh adalah orang Pidie, salah satu suku dari bangsa Aceh yang agung, yang gesit berniaga, hebat dalam berbisnis, disiplin dalam bekerja, serius dalam berpendapat, dan berani mati untuk sebuah keyakinan, untuk mempertahankan agamanya.

Teungku Daud Beureueh, sama halnya dengan Teungku Hasan Muhammad di Tiro, adalah manusia dengan kombinasi yang sangat unik: intelektualitas, memiliki jaringan, belajar Islam dari sumber mata-air ajaran Islam yang murni (Mekkah) dan mengendalikan organisasi modern dengan prinsip-prinsip manajerial rasional. Compton menulis, “Pimpinan puncak PUSA, termasuk Daud Beureueh, dapat disebut modernis dalam pemikirannya tentang ritual dan hukum Islam. Dalam hal ini kita harus ingat bahwa modernisme dalam Islam mengandung banyak makna. Modernisme PUSA adalah fundamentalis dan keras, jauh berbeda dari modernisme Medan dan Jakarta yang cenderung sekular. Rupa-rupanya rangsangan bagi pembaharuan di Aceh bukan berasal dari Mesir, melainkan langsung dari Mekkah, tempat sebuah koloni besar orang-orang Aceh sudah ada selama berabad-abad. Toh, modernisme di Aceh memancang tujuan pokok serupa dengan modernisme di seluruh dunia Islam: pembaharuan dan pemurnian Imam Muslim melalui pendidikan agama dan umum, dan meraih tujuan-tujuan sosial dan politik melalui organisasi. Sebelum perang, PUSA mengupayakan tujuannya terutama di bidang pendidikan. Di bawah kepemimpinan Daud Beureueh, PUSA mendirikan sekolah-sekolah agama baru, yang meliputi pengajaran sains dan

⁴⁵⁵ *Ibid.*

⁴⁵⁶ Boyd R. Compton, *Ibid.*, hlm. 152.

pengetahuan umum, dan mulai memperbarui kurikulum sekolah-sekolah lama yang dikelola para anggotanya. Tampaknya, pembaruan fundamentalis ini sudah berpengaruh di Aceh sebelum penyerbuan Jepang. Dengan kalahnya Jepang, langkah perubahan itu benar-benar dipercepat.”⁴⁵⁷ Adakah yang mampu melakukan suatu akselerasi kemajuan yang sangat luar biasa seperti ini selain Teungku Daud Beureueh, manusia tegar, unik, berani dan dengan program maksimasi ekonomi, sosial, optimasi pendidikan dan politik dalam waktu yang bersamaan. Adakah energi ini dimiliki oleh sosok manusia lainnya dalam mengubah keadaan? Sulit rasanya untuk bisa memiliki tokoh kharismatik setegar dan setangguh Teungku Beureueh, dan mungkin Tuhan telah memilih dia untuk menjalankan revolusi Aceh kemudian, bukan revolusi sosial yang merugikan Aceh yang Teungku Daud Beureueh pun tak setuju terjadinya pertumpahan darah sesama saudara.

Bagi Compton, PUSA menunjukkan minat besar untuk berkuasa selama revolusi sosial berdarah dan singkat, yang meletus di Aceh tak lama setelah Jepang menyerah. Selama masa penjajahan, Belanda memecah kekuasaan Sultan Aceh yang kalah dan membagi-bagikannya kepada sejumlah perwira militernya yang kurang menonjol (*hulubalang*). Belanda memerintah secara efektif melalui tuan-tuan feodal kecil ini, tetapi sistem pemerintah tak langsung yang pelik dan terlalu berat ke atas ini sangat menindas rakyat Aceh.⁴⁵⁸ Kekalahan Jepang memungkinkan pembebasan sejumlah besar pembangkang yang disekap. Umumnya yang disekap dan ditangkap itu adalah golongan ulama yang dipandang Belanda sebagai “ekstrimis, teroris dan kriminal” yang berbahaya.

Compton pun menulis tentang kisah tragis revolusi sosial Aceh di masa lalu, bahwa para pemimpin agama di Aceh, sebagian besar adalah anggota PUSA, tak menyia-nyaiakan kesempatan ini untuk menindas para bangsawan kecil yang telah mengabdikan Belanda. Kisah penggilasan sebagian besar bangsawan Aceh ini belum ditulis, dan tak jelas seberapa jauh para pemimpin PUSA merestui keganasan pengikut-pengikut mereka. Yang jelas, pelenyapan kaum ningrat ini memungkinkan PUSA untuk meraih kekuasaan lebih besar di Aceh. Pada 1947, Daud Beureueh diakui sebagai gubernur militer Aceh untuk Republik Indonesia, dan dinas militer dan sipil dikuasai bulat oleh tokoh-tokoh dan sahabat-sahabat PUSA.⁴⁵⁹ Bangkitnya kaum ulama dalam politik Aceh adalah sebuah *historical inevitability* (keniscayaan sejarah) di mana para ulama, pemangku agama yang tegar dan tangguh ini tidak bisa menghindari ‘takdir’ pergolakan sosial yang menjatuhkan pulung kekuasaan kepada mereka.

Namun, setelah negara Republik Indonesia diproklamasikan, maka Soekarno merebut apa saja yang dimiliki kaum ulama Aceh, kekuasaan, pengaruh, kekayaan ekonomi dan pengorbanan darah dan nyawa, semuanya terbawa ke Jakarta, sebuah kota semrawut tempat berkumpulnya para penguasa. Compton menulis bahwa: “Salah satu kenyataan penting dalam kehidupan politik di Aceh dewasa ini adalah bahwa kekuasaan PUSA telah diserahkan kepada pemerintah pusat pada 1951. Seperti Daud Beureueh, banyak ulama PUSA yang menolak berpartisipasi dalam pemerintahan baru; yang lain memang tak diajak.”⁴⁶⁰ Tapi Teungku Daud Beureueh tak tergoda untuk ke Jakarta, memegang jabatan simbolik yang dijanjikan Menteri Dalam Negeri. Ia cukup sadar politik, Teungku Daud Beureueh cukup sadar bahwa ia akan “diasingkan” dan akan dicabut dari akarnya, dari masyarakat dan jiwa Aceh, sehingga ia memilih menolak, meskipun uang dan kemewahan telah menantinya di Jawa.

Selanjutnya Compton menulis tentang pribadi yang ‘nyaris sempurna’ ini: “Sementara duduk di rumah Daud Beureueh, saya sadar bahwa saya telah menyangka akan berbicara dengan seorang pemaarah dan tak sabaran. Saya telah mengira bahwa

⁴⁵⁷ Boyd R. Compton, *Ibid.*, hlm. 153.

⁴⁵⁸ *Ibid.*

⁴⁵⁹ Compton, *Loc.cit.*

⁴⁶⁰ Compton, *Ibid.*, hlm. 153.

kejatuhan dari kekuasaan yang nyaris mutlak tentu menimbulkan efek itu atas diri sang mantan gubernur militer. Karenanya menarik sekali melihat Daud Beureueh menunjukkan ciri yang benar-benar berlawanan: kesabaran yang tenang dan nyaris sempurna. Ia terang-terangan, nyaris nekad, mengecam pemerintah Indonesia atas perbuatannya terhadap persoalan warga Aceh. Ia juga menyarankan sangat *blak-blakan* tindakan-tindakan untuk memperbaiki situasi ini. Toh ia tak sedikit pun memperlihatkan kobaran hasrat, dan cuma sering berucap, “yah, kita lihat saja nanti”.⁴⁶¹ Boyd Compton cukup memahami ‘kalimat fatalis’ yang diucapkan pada akhir tema pembicaraan, “kita lihat saja nanti”, sebuah helaan nafas panjang penuh harap, penuh emosi yang ditekan, ditahan, sebuah sikap menunggu dan mengintai suatu saat yang tepat untuk mengambil alih kekuasaan, lewat perang atau revolusi atau apapun yang memungkinkan darah-darah suci bangsa Aceh tumpah memenuhi niat setiap jiwa Aceh yang ingin mati secara lebih terhormat, di hadapan Tuhannya, di hadapan bangsa Aceh, di hadapan tanah leluhur yang suci, di hadapan para arwah pahlawan, di hadapan anak-anak dan istri(-istri), menjadi syuhada, menjadi manusia terkasih Tuhan.

Boyd Compton, sangat sensitif dalam menangkap gelagat dan isi pembicaraan dengan Teungku Daud Beureueh yang penuh muatan kemanusiaan, peradaban dan misteri. Compton menulis, “Daud Beureueh agaknya menunjukkan kesan serupa pada wartawan koran Medan *Waspada*, yang mengutip kata-katanya, “Kami di Aceh hanya jadi penonton”. Kesan saya, Daud Beureueh serta para pemimpin Aceh lainnya sedang menonton sebuah pertunjukan yang tidak mereka sukai, namun agaknya mereka ingin melihat pertunjukan itu berakhir sebelum mereka menjatuhkan penilaian final.”⁴⁶² Ia, Teungku di Beureueh yang tajam dan tegas ini, akan menjawab semua pertunjukan membosankan yang tengah dimainkan di Jawa, di pusat kekuasaan, dengan kekecewaan, meninggalkan arena pertarungan dan pertunjukan dengan tanpa tepuk tangan sedikitpun, *meubacut pih han*, tak sekalipun. Dan, selepas pertunjukan ini, orang Aceh akan mempersiapkan sebuah perlawanan, sebuah *show of respect*, yang paling mungkin hal itu terjadi di Aceh dalam bentuknya yang paling kasar: pemberontakan.

Selanjutnya Compton menulis, “Situasi di Aceh mudah sekali menjadi rawan karena sikap pemerintah Indonesia yang masih belia. Dislokasi sosial akibat revolusi dan keadaan ekonomi yang mengecewakan dewasa ini telah mempertajam perasaan-perasaan tak puas di kawasan ini. Pemerintah pusat tak dapat mengabaikan kenyataan bahwa PUSA berkemampuan untuk mengendalikan dan memanfaatkan sentimen-sentimen rakyat ini. Perlu pula diingat bahwa pimpinan puncak PUSA telah kehilangan posisi kekuasaan yang mereka pegang selama tahun-tahun revolusi. Yang paling merisaukan dari semuanya adalah sosok Daud Beureueh –seorang lelaki yang kuat dan disimak rakyat– yang sedang merenung dan menanti di dusunnya.”⁴⁶³ Republik yang masih belia, atau dalam bahasa Teungku Ismail Jacob sebagai “negara dalam masa pembinaan” tiba-tiba sudah menunjukkan sikap soknya, sikap congkak dengan berbagai penjelasan yang telinga orang-orang Aceh sudah muak mendengarnya.

“Namun,” tulis Compton, “sungguhkah keadaan Aceh rawan pada saat ini? Daud Beureueh menandaskan, desas-desus tentang ketidakpuasan yang pecah di Aceh itu, dihembuskan oleh kaum feodal yang kehilangan kekuasaan selama revolusi. Selain itu, adalah ngawur pikiran bahwa Daud Beureueh mau menerima posisi rendahan di bawah Kartosoewirjo Darul Islam. Sulit pula dibayangkan para tokoh kuat PUSA menyingkir ke pegunungan untuk melancarkan kampanye gerilya gelap melawan pemerintah. Posisi runding mereka dalam berhadapan langsung dengan pemerintah pusat sekarang ini cukup kuat untuk menegaskan keinginan-keinginan secara damai. Namun, tentu saja,

⁴⁶¹ Compton, *Ibid.*, halaman 154.

⁴⁶² Boyd R. Compton, *Ibid.*, hlm. 153.

⁴⁶³ Boyd R. Compton, *Ibid.*, hlm. 154.

tidak ada kepastian bahwa pimpinan PUSA berpikir demikian.”⁴⁶⁴ Sikap Teungku Daud Beureueh sudah pada klimaksnya, ia sudah merasa jijik dengan semua ulah dan tingkah polah Pemerintah Pusat yang tidak akomodatif terhadap Aceh sejak awal, hanya ingin mengeruk keuntungan dari kelimpahan sumber daya yang ada di Aceh: (1) manusia-manusia pejuang yang menghadang dan mengusir penjajah, dan (2) alam belantara yang berlimpah ruah dengan rizki mineral.

Di awal suratnya, Compton menulis: “saya menyatakan bahwa kedamaian dan ketenangan di Aceh agaknya lebih bersifat tak nyaman ketimbang memperlihatkan kegelisahan terbuka. Saya memperoleh kesan umum dari kunjungan singkat ini, bahwa Daud Beureueh dan tokoh-tokoh PUSA memegang kontrol kuat atas pengikut mereka; ketenteraman di Aceh mungkin sekadar menunjukkan bahwa umat Islam Aceh mentaati perintah para pemimpin mereka dan menunggu semacam perkembangan lebih lanjut. Seandainya benar demikian, alternatif-alternatif di Aceh agaknya adalah perdamaian yang terus berlanjut, atau jihad suci menegakkan Negara Islam besar-besaran dan terkoordinasi di masa datang yang cukup jauh.”⁴⁶⁵ Prediksi Compton tepat, orang-orang Aceh di bawah “asuhan” Teungku Daud Beureueh memang sedang bersiap-siap, mengintai-intai, suatu waktu yang tepat untuk menunjukkan sikap tegas, dan pasti: melawan! Revolusi politik Islam akan meletus di Aceh dalam bentuknya paling tegas: pemberontakan!

Namun, Compton menulis, “Betapapun, kesan-kesan dari sebuah perjalanan singkat bisa sangat meleset. Saya melihat cukup bukti bahwa pimpinan PUSA tak memegang kontrol menyeluruh atas peringkat-peringkat bawahan organisasi mereka. Sebagai contoh, lebih dari separuh sekolah-sekolah PUSA telah menolak subsidi pemerintah, kabarnya dengan alasan bahwa besarnya subsidi-subsidi itu tidak menjamin kesediaan mereka untuk dikontrol pihak luar. Pendirian ini membuka mata, sebab subsidi-subsidi itu ditawarkan oleh kanwil Departemen Agama di Kutaradja yang didominasi PUSA. Mungkin, bahkan Daud Beureueh sendiri tidak bersikap menuntut kesetiaan penuh para *ulama* pedesaan Aceh, setidaknya dalam persoalan-persoalan tertentu.”⁴⁶⁶ Sikap *furqan* (menarik garis pembeda) sudah diputuskan, tawaran dan niat baik sudah tak mempan lagi, subsidi, sekecil atau sebesar apapun tak bisa menggoyahkan kemandirian jiwa-jiwa yang tenang dari orang-orang Aceh. Sebuah perangai merdeka dan bebas dari orang-orang Aceh yang sebenarnya.

Compton kemudian menganalisis keadaan persiapan pemberontakan dalam kalimatnya yang menarik, “Suatu perbaikan radikal dalam situasi ekonomi di Aceh agaknya bukan masalah di masa depan bagi Aceh, sementara kemerosotan lebih jauh tampaknya sangat mungkin terjadi, mengingat kondisi keuangan negara Indonesia. Ketidakpuasan di kalangan pemimpin dan rakyat Aceh lebih mudah tumbuh ketimbang hilang.”⁴⁶⁷ Jihad suci tidak tumbuh dalam ruang kejadian sejarah yang kosong, melainkan ia terbentuk dalam suatu akumulasi sikap yang semakin mengkristal menghadapi kekacauan yang diciptakan oleh orang-orang Pusat, Pemerintah, atau siapa saja yang dianggap sebagai *out-sider*, sebagai musuh, —sejauh yang paling mungkin untuk Aceh menganggapnya sebagai *kafir harbi* (kaum kafir yang halal diperangi). Rakyat Aceh, melalui pemimpinnya Teungku Daud Beureueh, telah menarik garis dan memutuskan bahwa darah orang-orang pemerintah Pusat yang anti-Aceh, anti syariat Islam, adalah halal. Maka segalanya menjadi agama, perang pun akan dilancarkan sebagai ekspresi sikap beragama (Islam) yang konsisten.

Compton mengakhiri suratnya yang melaporkan kondisi Aceh secara detail dengan kalimat datar namun mendalam: “Seperti masjid Daud Beureueh, sikap para pemimpin PUSA tak tuntas; mereka tengah menanti dengan agak bimbang kebijakan pemerintah

⁴⁶⁴ Compton, *Ibid.*, hlm. 155.

⁴⁶⁵ Compton, *Ibid.*, hlm 155.

⁴⁶⁶ *Ibid.* hlm 156.

⁴⁶⁷ *Ibid.*, hlm 155.

yang lebih memuaskan. Seandainya otonomi administratif yang didambakan dan perbaikan-perbaikan ekonomi tak kunjung tiba, kesabaran Daud Beureueh dan kawan-kawannya mungkin habis. Sesaat sebelum saya meninggalkan rumah Daud Beureueh, ia mengungkapkan lagi impiannya tentang pemerintahan Islam yang makmur di Aceh. Saya merasa, ia tak akan puas untuk selamanya duduk dan bicara dan bermimpi.⁴⁶⁸ Singa Aceh ini akan bangkit dari tidurnya dan siap untuk menerkam siapa saja yang telah mengganggu mimpi dalam tidurnya yang tenang, tentang sebuah Negara Islam yang maju, modern, manusiawi, mengayomi, melindungi jiwa-jiwa terasing, dan memberdayakan kaum yang lemah dan terkalahkan, terpinggirkan oleh proses pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah sekuler yang kacau dan amburadul.

Kongres Alim Ulama Se-Indonesia di Medan

Sebelum meletusnya peristiwa bersejarah tanggal 21 September 1953 yang terkenal dengan nama “peristiwa Daud Beureueh”, pada bulan april 1953, bertempat di Istana Maimun Al-Rasyid Medan, telah berlangsung Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia yang dihadiri kurang lebih 540 orang ulama. Hajat besar yang diselenggarakan itu Peserta Kongres itu ada yang datang dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon bahkan dari belahan timur Indonesia yaitu NTT turut hadir pula.

Adapun diadakannya kongres itu guna membicarakan seputar nasib umat Islam Indonesia yang baru lepas dari belenggu penjajahan belanda yang ketika itu sedang dipegang oleh Soekarno-Hatta. Para ulama merasakan kegelisahan karena mereka melihat kurang terakomodasinya peran Islam dalam mempertahankan hasil kemerdekaan. Tidak jelas mau dibawa kemana negeri ini oleh Soekarno.

Pada saat Kongres berlangsung, Dewan formatur yang telah dibentuk kemudian merasa kebingungan siapa yang akan dipilih untuk menjadi pimpinan karena sulitnya memilih pimpinan yang mampu serta penuh tanggung jawab. Tetapi, hasil keputusan musyawarah dewan formatur yang terdiri dari Al Ustadz Tuan Arsyad Talib Lubis (ulama besar Sumatra Utara), Kiyai Haji Zainal Arifiin Abbas, Al Ustadz Abidin Nurdin, Al Ustadz Yahya Pintor dan Al Ustadz Ghazali Hasan telah menetapkan berdasarkan penelitian satu persatu secara teliti dan cermat berdasarkan kemampuan bahwa yang pantas menjadi Ketua Kongres adalah Teungku M. Daud Beureueh (seorang ulama besar dari Aceh). Padahal ketika itu ulama besar Aceh lainnya hadir seperti: Teungku Hasballah Indrapuri, Teungku Haji Krung Kali.

Setelah keputusan diambil, segera mereka berlima mendatangi tempat di mana Teungku M. Daud Beureueh menginap. Ketua delegasi, Al Ustadz Arsjad Talib Lubis menyampaikan hasil keputusan itu, namun kemudian mendapat sanggahan dari Teungku M. Daud Beureueh dengan mengatakan: “Jangan, jangan saya yang menjadi ketua karena saya merasa sangat terbatas dalam ilmu, lebih baik Ustadz memilih orang lain yang lebih alim dan berpengaruh”. Kemudian oleh Ustdaz Talib dijawab: “Kami melihat bahwa Teungkulah yang lebih pantas menjadi ketua, karena umur dan ilmu pengetahuan telah mencukupkan kami untuk memilih Teungku. Teungku adalah ulama revolusi dan reformis”. Karena didesak terus pada akhirnya Teungku M. Daud Beureueh tidak ada jalan lain untuk menolaknya.

Kongres yang diadakan selama tiga hari tiga malam dengan rasa kekeluargaan itu telah mendapatkan beberapa keputusan penting yang di antaranya ialah mengajukan kepada pemerintah Republik Indonesia, Soekarno, untuk tidak perlu mengadakan pemilihan umum, sebab umat Islam Indonesia secara mayoritas sudah menang. Hendaknya pemerintah Republik Indonesia tinggal mengganti dan melaksanakannya menjadi negara Islam dan melaksanakan hukum Islam. Dan masalah biaya pemilu dapat dipergunakan ke sektor-sektor yang lain untuk kepentingan rakyat umum.

⁴⁶⁸ *Ibid.*

Sebelum keputusan kongres ini diambil, ketua terpilih, Tgk. M. Daud Beureueh, telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para peserta kongres di antaranya adalah: “Bagaimana seandainya resolusi ini tidak diterima oleh Pemerintah Pusat, Soekarno, apakah saudara sekalian sudah siap untuk angkat senjata?” Secara aklamasi peserta kongres menjawab: “Setuju” sambil mengumandangkan kalimat takbir. “Seandainya resolusi kita ditolak oleh Soekarno apakah saudara sudah siap untuk berhijrah dan berjihad?” Peserta menjawab “setuju”. Apakah resolusi kita ditolak oleh Pemerintah apakah kita pantas mengatakan pemerintah ini kafir? Peserta menjawab: “pantas”. Dan yang terakhir Tgk. M. Daud Beureueh bertanya: “Seandainya usulan kita diterima, apakah saudara sudah siap untuk bekerja dan memimpin serta berkorban untuk Negara?” Para hadirin menjawab: “Siap”. *Alhamdulillah* kata Teungku M. Daud Beureueh mengakhiri pertranyaannya.

Secara aklamasi para peserta kongres telah bersumpah (berbai'ah) bersama-sama bila pemerintah RI tidak bersedia mengumumkan RI ini sebagai negara Islam berarti para ulama bersiap sedia mengangkat senjata. Keputusan ini ditandatangani oleh semua peserta kongres bahkan ada yang menandatangani dengan cap jari darah sebagai tanda bahwa mereka telah bulat dan sepakat untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia.

Selanjutnya hasil dari kongres itu, membentuk tim delegasi yang akan mengantarkan resolusi dan keputusan Mukhtar Medan ini kepada Soekarno baik lisan maupun tulisan yang menyatakan bahwa hasil kongres ulama di Medan berjalan dengan lancar serta memberikan salam dari ketua, Teungku M. Daud Beureueh, untuk Soekarno. Setelah mendengarkan laporan yang disampaikan oleh tim delegasi itu, Soekarno dapat memahami dan memaklumi serta meminta kembali kepada para delegasi untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Lebih lanjut Soekarno mengatakan: “Saya akan mengutus utusan resmi untuk menjumpai kakanda Teungku M. Daud Beureueh”.

Dua minggu kemudian, diutuslah Mohammad Hatta bersama rombongan menjumpai Teungku M. Daud Beureueh di Aceh. Mohammad Hatta secara diplomatis menyampaikan kepada Teungku M. Daud Beureueh apa yang dihasilkan dari kongres ulama di Medan telah dipahami oleh Soekarno dan memohon kepada kakanda untuk menunda dulu maksudnya, karena menunggu hasil pemilu nanti. Mendengar ucapan Hatta itu, Teungku. M. Daud Beureueh menjawab: “Bung Hatta, kami para ulama pantang menjilat kembali air ludah yang telah kami keluarkan, bila keinginan dan hasil kongres di Medan ditolak oleh pemerintah RI, kami telah siap untuk angkat senjata berjihad fisabilillah. Bung Hatta, silahkan malam ini juga tinggalkan Kutaraja, karena saya tidak dapat menjamin keamanan saudara”. Pada malam itu juga setelah berpamitan dengan Teungku M. Daud Beureueh, Mohammad Haat bersama rombongan terpaksa berangkat meninggalkan Kutaraja tanpa hasil.

Dua minggu kemudian Teungku M. Daud Beureueh melalui pidato di radio di Kutaraja, menyerukan kepada seluruh para ulama yang ikut bermusyawarah di Medan agar bersiap-siap untuk mengangkat senjata dan berjihad bila tuntutan ditolak oleh Soekarno. Pada tanggal 21 September 1953, Teungku M. Daud Beureueh memproklamasikan *Darul Islam* Aceh dan bergabung dengan *Darul Islam* NII Jawa Barat di bawah pimpinan Imam Sekarmadji Marjani Kartosoewirjo. Adapun ulama-ulama hasil kongres di Medan yang turut dengan Teungku M. Daud Beureueh hijrah ke hutan hanya sedikit, diantara mereka itu adalah Teungku Haji Hasballah Indra Puri, Teungku Sulaiman Daud dan Teungku Syech Abdul Hamid Samalanga. Yang lainnya satupun tidak ikut sampai Teungku M. Daud Beureueh kembali kepangkuan Ibu Pertiwi.

Berakhirnya Kongres, dimulainya Persiapan Melawan

Darul Islam di Aceh adalah sebuah “pemberontakan unik”, ia dimulai dari sebuah kongres, dan juga berakhir melalui sebuah kongres. Perang hanyalah dianggap sebagai selingan saja, meskipun banyak darah para syuhada tumpah ruah di medan perang suci dari tahun 1953 hingga tahun 1959, bahkan hingga tahun 1962 “getaran-getaran” dari

gemuruhnya roda-roda jihad gerakan Darul Islam masih terasa di Aceh. Berperang adalah hal yang sudah biasa, namun ber-kongres adalah kesempatan yang langka. Artinya, musyawarah adalah sesuatu yang paling dihormati, keputusannya-keputusannya selalu dijunjung tinggi. Bertempur bukanlah sesuatu yang ditakuti oleh rakyat Aceh, namun berkongres adalah hajatan istimewa yang mesti dihadiri, perangpun akan dihentikan sementara jika ada undangan kongres.⁴⁶⁹

Selama bulan-bulan pertama tahun 1953 ketegangan kian memuncak di Aceh. Beredar desas-desus tentang penangkapan-penangkapan baru, rapat-rapat rahasia, dan hubungan antara Daud Beureueh dan Kartosuwiryo. Anggota-anggota PUSA memulai kampanye mereka untuk pemilihan umum dan pidato-pidato mereka menekankan perlunya otonomi daerah serta Negara Islam. Bicara negara Islam ketika itu sangat mengerikan dan bisa mendatangkan bahaya bagi siapa saja yang membicarakannya secara terbuka. Agen mata-mata bersembunyi di mana-mana, intelijen menempel di setiap sudut, bahkan dinding pun memiliki “telinga” di Aceh ketika itu.⁴⁷⁰

Nama-nama yang paling sering muncul sehubungan dengan persiapan-persiapan pemberontakan dalam masa ini adalah Daud Beureueh, Hasan Aly, Husin Jusuf, dan Amir Husin al Mudjahid. Dua yang akhir ini khusus mengusahakan sendiri memperoleh dukungan dari gerilyawan yang didemobilisasikan. Untuk ini mereka membentuk (Persatuan) Bekas Pejuang (Islam) Aceh (BPA). Organisasi ini dipimpin Husin Jusuf, dan Daud Beureueh sebagai pelindungnya. Amir Husin al Mudjahid dikabarkan telah melakukan hubungan dengan sebuah organisasi lain bekas gerilyawan, Biro Bekas Angkatan Perang, demikian puladiusahakannya menarik bekas pejuang gerilyawan yang tidak puas di Sumatera Timur.⁴⁷¹ Juga diadakan hubungan dengan pasukan Aceh dengan maksud menghasut mereka melakukan desersi.⁴⁷²

Bahwa terdapat hubupgan antara Daud Beureueh dan gerakan *Darul Islam* sebelum September 1953 sudah pasti. Tetapi kurang- dapat dipastikan, siapa yang mengambil prakarsa: pemberontak-pemberontak di Aceh atau Kartosoewirjo. Menurut sebuah laporan rahasia, Daud Beureueh dan Amir Husin al Mudjahid dikatakan telah pergi ke Jawa untuk berunding dengan Kartosoewirjo di Jawa Barat sesudah suatu pertemuan rahasia yang diadakan Daud Beureueh pada 13 Maret, yang dihadiri Amir Husin al Mudjahid, Husin Jusuf, Sulaiman Daud, Hasan Aly (Kepala Kejaksaan di Aceh, ketika itu sedang cuti resmi), Said Abubakar, dan A.R. Hanafiah (pegawai Kantor Agama Aceh Timur). Dalam pertemuan ini komplotan itu telah mengutus dua orang untuk pergi ke Jawa untuk melakukan hubungan dengan pemimpin-pemimpin *Darul Islam* di sini.⁴⁷³ Menurut laporan yang sama, sekembalinya dari Jawa, Amir Husin al Mudjahid dari Jawa tinggal beberapa hari di Medan untuk menemui wakil organisasi-organisasi lainnya di sana, seperti Masyumi dan cabang pemudanya, GPII.

Daud Beureueh dan Kartosoewirjo tetap saling berhubungan melalui para utusan. Demikianlah Kartosoewirjo memutuskan untuk mengirim Mustafa Rasjid (Abdul Fatah Wiranangapati) ke Aceh untuk membicarakan penggabungan wilayah ini ke dalam Negara Islam Indonesia dan pengangkatan Daud Beureueh sebagai pemimpin Tentara Islam di Aceh. Mustafa Rasjid, nama yang sebenarnya adalah Abdul Fatah Tanu Wiranangapati, menyatakan dirinya kuasa usaha Negara Islam Indonesia untuk Aceh. Ia ditangkap ketika kembali ke Jawa pada Mei 1953. Di sini juga tertangkap seorang

⁴⁶⁹ Jika kita membandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 1976 kemudian, proklamasi Aceh Merdeka juga dimulai dari sebuah seminar, sebuah kongres, muktamar atau sejenisnya di Medan tentang Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh sejak 1879 hingga 1910.

⁴⁷⁰ Wawancara dengan Tgk. Ibrahim A. Rahman, Banda Aceh, 28 Juni 2006.

⁴⁷¹ Informasi ini diperoleh dari sebuah laporan rahasia yang dikemukakan K. Werdojo (K. Werdoyo) selama perdebatan parlemen mengenai pemberontakan Daud Beureueh (Sekitar t.t.I: 302-303).

⁴⁷² A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Aceh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin*, (Banda Aceh: Pustaka Murni Hati, 1956), hlm. 38.

⁴⁷³ Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm. 302-303.

utusan Daud Beureueh.⁴⁷⁴ Pemerintah Pusat yang berusaha merahasiakan penangkapan-penangkapan ini, tidak terus menangkap Daud Beureueh, dan hanya menambah jumlah satuan Mobil Brigade di Aceh.

Dalam pada itu, berlangsung dua kongres yang penting, April 1953. Pertama, Kongres Alim Ulama yang diadakan di Medan dari 11 sampai 15 April. Kedua, kongres untuk menilai hasil-hasil kongres Medan diadakan oleh PUSA di Langsa dari 15 sampai 29 April. Kedua pertemuan ini diketuai Daud Beureueh, yang dengan demikian mendapat kesempatan yang baik sekali untuk menyampaikan kepada para peserta rencananya dan membicarakan bersama mereka kemungkinan mengadakan pemberontakan.

Kongres Alim Ulama di Medan, menurut Daud Beureueh, adalah bukti bahwa Islam lebih kompak dibanding sebelum perang. Ia menandakan ketegangan antara kelompok "muda" dan kaum "kolot" sudah berakhir pada tahun tiga puluhan. Salah satu pertanda adanya persatuan baru ini adalah tak ditonjolkannya perbedaan-perbedaan di antara mazhab-mazhab hukum Islam. (Mazhab Syafi'i dominasi di Indonesia). Ia lalu membikin kami geli dengan cerita-cerita tentang guru-guru agama masa sialm yang bodoh dan percaya tahayul, yang menyatakan bahwa potongan rambut dan pakaian orang Barat itu haram menurut hukum Islam. Guru-guru agama yang paling konservatif masih yakin bahwa semua kebiasaan orang Barat itu terkutuk, tetapi mereka tak berani mengatakannya diluar desa mereka. Menurutnya, konservatisme cerewet yang lazim di Aceh sampai kemarin-kemarin ini, didasarkan atas kejumudan terhadap hukum Islam; kemajuan di tahun-tahun ini menjadikannya tampak dungu.⁴⁷⁵

Kedua kongres ini merupakan titik awal dari suatu gerakan luas yang meliputi seluruh Aceh, yang digunakan pemimpin-pemimpin Islam untuk mendesak rakyat memberikan suara untuk partai Islam dalam pemilihan umum yang akan datang (yang ketika itu tampaknya sudah dekat), dan untuk Islam sebagai dasar konstitusional Negara Indonesia. Di samping itu mereka mengemukakan sejumlah persoalan yang sejak lama telah menimbulkan kemarahan sebagian besar rakyat Aceh, yaitu sikap Pemerintah Indonesia yang dinyatakan anti-atau bukan-Islam, kelalaian Pemerintah terhadap Aceh, dan penggantian orang Aceh dengan orang dari luar daerah dalam pemerintahan daerah dan tentara. Dalam rapat-rapat umum dan khotbah-khotbah mereka selanjutnya menuduh orang Jawa dan orang Batak mengandung maksud untuk mengambil alih Aceh. Menurut mereka, pasukan Angkatan Darat yang dikirim ke Aceh terdiri dari bekas serdadu-serdadu KNIL dan orang-orang kafir, dan mereka menyerang Soekarno karena ingin memajukan agama Hindu. Sebuah monografi tentang pemberontakan Aceh⁴⁷⁶ menyatakan, para alim ulama "dengan tegas bersumpah ... bahwa sekembalinya mereka ke daerah mereka mereka akan mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk meyakinkan rakyat memperjuangkan Negara Islam dalam pemilihan umum yang akan datang untuk DPR dan Konstituante, dan bahwa bila kemenangan tidak tercapai dengan jalan ini, mereka tidak akan ragu-ragu menggunakan cara-cara yang melanggar hukum guna mencapai tujuan ini".

Kedua kongres ini tidak hanya memberikan titik awal untuk gerakan seluruh Aceh guna menjelaskan pandangan pemimpin-pemimpin Islam tentang Negara Islam dan menghasut rakyat memberontak terhadap Pemerintah Pusat. Juga memberikan dorongan guna memperbaharui usaha meluaskan pengaruh PUSA dalam masyarakat. Struktur organisasi PUSA diperkukuh dengan dibentuknya organisasi-organisasi massa untuk mengerahkan para pendukung. Demikianlah cabang Pemuda PUSA yang selama bertahun-tahun tidak aktif dihidupkan kembali, didirikan Persatuan Bekas Pejuang Islam yang tersebut di atas, dan PUSA memperkuat penguasaannya atas gerakan Pandu

⁴⁷⁴ Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm. 547-553.

⁴⁷⁵ Boyd R. Compton, *ibid.*, hlm. 150.

⁴⁷⁶ Gelanggang, *Op.cit.*, hlm. 13.)

Aceh, Pandu Islam, dengan mengangkat A.G. Mutiara sebagai pemimpinnya. Ketiga organisasi ini memainkan peranan penting dalam persiapan-persiapan militer bagi pemberontakan yang akan datang. Di samping memberikan *Darul Islam* Aceh bagian terbesar pasukannya, mereka barsyuk memudahkan perencanaan untuk aksi-aksi yang terkoordinasi pada saat pemberontakan meletus dengan menyerang kota-kota utama Aceh sekaligus. Para bekas gerilyawan yang dipersatukan dalam Persatuan Bekas Pejuang Islam Aceh merupakan pasukan tempur pokok, disokong para pemuda dari Pemuda PUSA dan Pandu Islam sebagai pembantunya.

Pandu Islam ini tidak hanya menjadi gerakan Pandu. Di samping latihan militer-militeran biasa, kepada para anggotanya diberikan latihan dasar militer. "Pandu Islam hari demi hari bertambah sehat dan pengikutnya makin bertambah banyak. Kemudian ternyata, para anggotanya menerima latihan militer dari prajurit-prajurit berpengalaman pilihan khusus dan diajarkan metode menyerang dan menyerbu. Latihan ini mereka terima tidak hanya siang tetapi juga malam hari".⁴⁷⁷ Sebagian dari Pandu ini, yang jumlahnya menurut taksiran Pemerintah adalah 4.000 orang,⁴⁷⁸ juga bekas gerilyawan.

Persiapan Pemberontakan

Dengan berjalannya persiapan-persiapan yang baik, akhirnya tibalah saatnya menentukan hari dimulainya pemberontakan. Kongres telah meng-hasilkan sejumlah alasan *syar'iyah* bahwa berperang melawan pemerintah dan ideologi yang zalim adalah wajib, sebuah bekal spirit yang penting. Namun, tinggal bekal logistik dan amunisi yang memang tak sulit mendapat-kannya di Aceh ketika itu. Bagi orang-orang Aceh, jika ada niat, maka semua amunisi sudah terbungkus rapi, siap diangkut. Maka dari titik pandangan ideologis hari yang paling cocok mestinya adalah 7 Agustus, hari Kartosoewirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Sebenarnya ada tanda-tanda, para pemimpin *Darul Islam* menganggap ini sebagai hari yang layak. Pada mulanya kaum pemberontak memutuskan akan mulai pemberontakan pada 7 Agustus, tetapi pikiran mereka berubah sesudah informasi sam-pai kepada Pemerintah Pusat.⁴⁷⁹ Wakil Presiden Mohammad Hatta, seorang Muslim yang saleh, lalu mendesak pemimpin-pemimpin gerombolan ini untuk membatalkan rencana ini. Tanggal kemungkinan yang lain disebut adalah 17 Agustus, ulang tahun pernyataan kemerdekaan Indonesia. Menurut laporan rahasia, tanggal 17 Agustus telah diputuskan pada suatu rapat 1 Agustus.⁴⁸⁰ Pada rapat ini dua belas orang, termasuk Amir Husin al Mudjahid (tetapi Daud Beureueh tidak)⁴⁸¹, berkumpul di rumah Zainy Bakri, bupati di Langsa. Juga telah disetujui pada pertemuan ini, menurut laporan ini, untuk me-ngundurkan awal pemberontakan sampai selambat-lambatnya pertengahan September, bila persiapan-persiapan masih belum selesai pada 17 Agustus.

Untuk meredakan situasi di Aceh, dilakukan kunjungan ke daerah ini oleh Presiden

⁴⁷⁷ Gelanggang, *op.cit.*, hlm. 18.

⁴⁷⁸ Keterangan Pemerintah, 1953, hlm. 107.

⁴⁷⁹ *Asia Newsletter* Vol.VIII.n.37,10 Oktober 1953, Sekitar t.t. I:493)

⁴⁸⁰ Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm. 303.

⁴⁸¹ Di antara mereka yang disebut hadir ialah: T. Aziz (Ketua Dewan Sosial Acoh Timur) Burhanuddin (camat Langsa), Aminuddin (kepala Polisi Idi), Garbie (wedana Idi), dan Abdul Rani (camat Peureulak), sedangkan nama Hasan Aly dan A.R. Hadjat (A.R. Hajat), patih Binjai juga disebut sehubungan dengan pertemuan itu, walaupun tidak jelas apakah mereka sesungguhnya hadir atau tidak. Nama Hasan Aly, bekas Kepala Kejaksaan di Aceh dan kemudian Perdana Menteri *Darul Islam* dan daerah ini, juga disebut sehubungan dengan rapat persiapan ketiga. Untuk ini dibentakan, dia dan sejumlah orang lain berkumpul di rumah patih Binjai, yang kemudian menyangkal kunjungan Hasan Aly sama sekali tak ada hubungannya dengan *Darul Islam*, denga. mengatakan bahwa Hasan Aly hanya datang ke rumahnya untuk berkunjung sebelum berangkat ke Jakarta, karena ia dipindahkan ke kota ini. Tidak disangkal, Hasan Aly datang bersama beberapa teman, tetapi yang dibicarakan Hasan Aly dengan teman-temannya ini, Hasan Aly tidak tahu karena mereka bicara bahasa Aceh, bahasa yang tidak diketahuinya C. van Dijk, *Op.cit.*, hlm. 233.

Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Kunjungan yang pertama berlangsung Maret 1953. Tetapi kunjungannya tidak banyak mengurangi ketegangan, karena terlalu banyak dikuasai pidatonya di Amuntai, yang juga telah menimbulkan amarah umat Muslim yang saleh di Aceh. Seperti pada kunjungannya yang terdahulu pada 1951, Soekarno disambut dengan tulisan-tulisan slogan seperti "Kami cinta presiden, tetapi kami lebih mencintai agama".⁴⁸² Lebih berhasil tampaknya usaha Hatta. Selama kunjungannya, yang berlangsung pada bulan Juli, dia berunding antaranya dengan Daud Beureueh. Kemudian dia kembali ke Jakarta dengan kerangka pikiran yang optimistis, yakin bahwa ia telah memecahkan suatu persoalan dan bahwa keadaan masih dapat dikuasai. Daud Beureueh dan rekan-rekannya tidak ditangkap, walaupun Pemerintah mengetahui mereka melakukan hubungan dengan Kartosoewirjo. Belakangan Partai Komunis Indonesia (PKI), partai politik yang paling mengecam pemberontakan, menyalahkan Hatta karena secara pribadi telah mencampuri urusan Pemerintah dengan memerintahkan Perdana Menteri Wilopo (yang kabinetnya jatuh pada akhir Juli) agar tidak mengambil tindakan pencegahan di Aceh. Menurut para juru bicara PKI, tidak berbeda sikap Hatta sebelum dan sesudah kunjungannya ke Aceh. Sebelum berangkat dia merasa yakin akan sanggup menghadapi masalah-masalah di Aceh. Sekembalinya, ia memberi tahu Wilopo bahwa tak akan terjadi apa-apa dan ia merasa pasti, keamanan dan ketenteraman dapat dipelihara.⁴⁸³

Pemerintah tidak saja diserang PKI karena kekurangwaspadaannya. Partai-partai Islam pun, khususnya Masyumi, mengecam Pemerintah karena tidak bertindak sesudah mendapatkan informasi tentang keadaan sebenarnya. Sebetulnya kedua kelompok telah menunjuk kepada keresahan yang kian bertambah di Aceh, yaitu kaum komunis yang minta perhatian terhadap persiapan-persiapan untuk pemberontakan dan usaha-usaha PUSA untuk meluaskan pengaruhnya, dan sebaliknya Masyumi yang berusaha meyakinkan Pemerintah bahwa perasaan tidak puas yang kian memuncak adalah akibat politik kebijaksanaan sendiri yang salah. Masyumi masih mengusulkan perubahan kebijaksanaan sesudah meletusnya pemberontakan, dengan meminta bantuan keuangan yang lebih besar untuk Aceh, penggantian pasukan dari daerah-daerah lain oleh prajurit-prajurit Aceh, dan pengangkatan kembali pejabat-pejabat Aceh yang dulu digeser dalam jabatan militer dan sipil yang tinggi.

Kalangan penguasa Pemerintah Daerah di Sumatera Utara dan Aceh mengikuti garis Pemerintah Pusat di Jakarta dan berusaha sungguh-sungguh menghilangkan kesan bahwa suatu pemberontakan sedang bergolak. Berulang kali mereka menyangkal bahwa keadaan gawat atau bahwa terjadi suatu gerakan pemberontakan. Dalam beberapa hal pernyataan ini memang dibuat karena benar-benar tidak tahu, dalam hal-hal yang lain disebabkan keinginan menenangkan pikiran rakyat, sedang dalam hal-hal yang lain pula ada kesengajaan untuk mempedayakan pejabat-pejabat pemerintah yang lain dan menutupi bermacam tipu daya.

Pada awal September 1953 diadakan sejumlah rapat resmi untuk membicarakan situasi keamanan di Aceh. Salah satu rapat ini berlangsung di Medan pada 14 September 1953 —tepatnya seminggu sebelum pemberontakan pecah. Rapat ini dihadiri Bupati Aceh Timur, Zainy Bakri, Bupati Pidie, T.A. Hasan, dan Bupati Aceh Utara, Usman Azis, yang menguraikan secara singkat kepada Gubernur Sumatera Utara, Abdul Hakim, tentang keadaan dalam daerahnya masing-masing dan memberi jaminan kepadanya bahwa segalanya beres dan tidak terdapat ancaman langsung bagi keamanan. Rapat ini juga dihadiri Sulaiman Daud, pejabat residen-koordinator Aceh,⁴⁸⁴ yang beberapa minggu kemudian ternyata adalah komandan pasukan

⁴⁸² Herbert Feith, *The Indonesian Election of 1955*, (Ithaca, New York: Modern Indonesian Project, Cornell University, 1973), hlm. 46.

⁴⁸³ Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm. 281-286.

⁴⁸⁴ Gelanggang, *Op.cit.*, hlm. 19-25.

pemberontak di Aceh Besar. Pada waktu yang sama ternyata, bupati Pidie T.A. Hasan, dan bupati Aceh Timur, Zainy Bakri, telah menyeberang ke *Darul Islam*.⁴⁸⁵ Tentu saja Abdul Hakim juga menerima informasi yang bertentangan dengan pandangan yang dikemukakan para bupati. Informasi demikian disampaikan kepadanya oleh, antara lain Nja' Umar, koordinator Polisi untuk Aceh, yang menilai keadaan demikian gawat hingga ia memerintahkan penempatan pengawal di gedung-gedung pemerint-tah yang penting.⁴⁸⁶ Sebenarnya Abdul Hakim mungkin sungguh-sungguh lebih percaya kepada jenis informasi yang belakangan ini. Pada akhir September, ketika bebas untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, ia mengakui, suasana memang "hangat" pada Agustus, lalu keredaan menenangkan kembali, namun mencapai klimaks baru pada pertengahan September, ketika pemberontakan meletus.⁴⁸⁷

Pada Agustus rakyat mulai mempersiapkan diri meninggalkan Aceh atau bersembunyi. Sementara Pemerintah terus juga tidak mempedulikan peringatan-peringatan tentang bertambahnya ketegangan oleh orang dari kiri maupun dari kanan, penduduk mulai meninggalkan daerah menuju Medan dan Sumatera Timur dalam jumlah yang besar. Kebanyakan mereka ini adalah keluarga uleebalang dan anggota atau simpatisan partai-partai sekuler, terutama PKI. Tetapi anggota partai-partai Islam pun, termasuk PUSA, merasa tidak aman. Kekhawatiran akan tindakan penumpas-an oleh Angkatan Darat— seperti yang mereka saksikan pada Agustus 1951—meningkat ketika tersebar desas-desus, Pemerintah telah menyusun daftar nama orang Aceh terkemuka yang dinyatakan akan ditangkap. Menurut sementara orang, daftar ini memuat tiga ratus, menurut yang lain-lain, seratus sembilan puluh nama.⁴⁸⁸

Beberapa penulis menyatakan, daftar ini yang menjadi penyebab langsung pemberontakan. Menurut informasi yang diperoleh di Aceh, kaum politisi sayap kiri di Jakarta sebelumnya pada 1953 menyebarkan desas-desus bahwa Aceh benar-benar mengatur suatu pemberontakan.⁴⁸⁹ Akibatnya "Djakarta" men-cantumkan dalam daftar 190 orang Aceh terkemuka yang harus ditangkap. Hal ini diketahui di Aceh pada Juli 1953 belakangan ternyata bahwa daftar nama ini barangkali sengaja dibocorkan dengan tujuan tertentu. Karena orang-orang Aceh terkemuka ini merasa bahwa mereka mungkin akan ditangkap, mereka memutuskan-lari ke gunung pada 19 September 1953. Ini merupakan pemu-tusan resmi dengan Jakarta, dan awal dari apa yang disebut pemberontakan *Darul Islam* di Aceh."

Pandangan yang sama dikemukakan Amelz dalam suatu perdebatan parlemen ketika meletus pemberontakan. Tetapi dengan mendasarkan diri pada sebuah artikel dalam tarian Indonesia Lembaga, ia menyatakan kebocoran daftar itu pada tanggal lebih belakangan, yaitu sesudah terjadi tindakan pemberontakan pertama pada 20 dan 21 September. Tetapi dia menyetujui pendapat Boland bahwa hadirnya nama mereka di daftar menyebabkan sejumlah pemimpin mengikuti pemberontakan. Mereka yang bermaksud tidak akan bertindak sebelum Pemerintah lebih dulu bertindak, kini sesudah diberitahu tentang daftar itu, menurut Amelz, memutuskan untuk membelot.⁴⁹⁰

Walaupun ada benarnya penilaian Boland dan Amelz akan arti pentingnya daftar hitam ini, kedua penulis mengabaikan, atau meremehkan, perbedaan pendapat antara

⁴⁸⁵ Bupati ketiga, Moh. Hasan dari Aceh Tengah, ditangkap pasukan Republik ketika pemberontakan meletus.

⁴⁸⁶ Lihat S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956).

⁴⁸⁷ Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureu'eh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm. 8.

⁴⁸⁸ Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureu'eh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm. 263.

⁴⁸⁹ B.J. Boland, *The Struggle of Islam In Modern Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, Verhandelingen KITLV, 1971), hlm. 73.

⁴⁹⁰ Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureu'eh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm. 263.

calon pemimpin-pemimpin *Darul Islam* mengenai urgensi pemberontakan bersenjata. Keyakinan yang diperlihatkan Hatta sekembalinya dari Aceh mungkin karena salah memperhitungkan posisi Daud Beureueh. Daud Beureueh dianggap Hatta sebagai pemimpin unsur-unsur yang tidak puas di daerah itu, dan dia yakin unsur-unsur ini dapat dikuasai Daud Beureueh. Tentu saja sangat mungkin bahwa Daud Beureueh dianggap sebagian besar rakyat Aceh sebagai satu-satunya orang yang pantas dan mampu memimpin pemberontakan terhadap Pemerintah Pusat. Juga benar pula, sebaliknya, Daud Beureueh menghadapi banyak kesulitan dalam mengendalikan orang-orang kepala batu yang tidak sabar untuk bertindak.

Jadi mungkin saja pemberontakan dicetuskan oleh tindakan bersenjata yang terburu nafsu yang dilakukan pemuda-pemuda yang kena hasut dengan tujuan menyerobot senjata dari Polisi, dengan begitu memaksa melaksanakan rencana yang dibuat pada awal 1953 yang realisasinya telah ditangguhkan sesudah pembicaraan antara Hatta dan Daud Beureueh. Daud Beureueh, yang kini menyadari bahwa dia akan termasuk mereka yang pertama-tama akan ditangkap pada tanda pertama pemberontakan, lalu tidak punya pilihan lain kecuali ikut dan menerima pimpinan pemberontakan. Bahwa Daud Beureueh benar-benar mengalami kesulitan dalam mengendalikan kaum radikal muda diungkapkan Amelz yang menyatakan, terdapat suara-suara yang menuntut bertindak cepat terdengar dalam sebulan sebelum pemberontakan meletus. Permintaan bertindak oleh orang-orang muda ini didorong keadaan yang bertambah tegang, maupun karena khawatir akan kemungkinan langkah represif dari pihak Pemerintah.⁴⁹¹ Tetapi pemimpin-pemimpin yang lebih tua berhasil untuk sementara waktu membungkam suara-suara ini.

Teori yang menyatakan beberapa pemimpin ditangkap tak terduga-duga oleh mereka akan menjelaskan beberapa perkembangan yang terjadi pada minggu-minggu pertama sesudah ini. Walaupun tampaknya dipersiapkan secara baik, dengan serangan yang dilancarkan sekaligus pada kota-kota di seluruh Aceh, ada beberapa kenyataan yang membuktikan kekurangan persiapan tertentu dari peristiwa ini. Pada saat serangan atas pos polisi di Peureulak oleh pasukan *Darul Islam* yang dipimpin Ghazali Idris pada 19 September, yang menandai awal pemberontakan yang sesungguhnya, Daud Beureueh masih di Banda Aceh. Di samping itu, pemimpin-pemimpin lainnya belum kembali dari Medan tempat mereka menghadiri pesta olahraga nasional.

Kongres 'Alim Ulama se-Indonesia, yang telah berlangsung di Medan pada bulan April 1953, di mana Teungku Muhammad Daud Beureueh memegang pucuk pimpinan selaku Ketua Umumnya, di antara lain dengan suara bulat dan sepakat, telah mengambil keputusan: "*Memperjuangkan dalam pemilihan umum yang akan datang supaya negara RI ini menjadi Negara Islam Indonesia.*" Demikianlah salah satu keputusan, keputusan yang harus diperjuangkan dengan segenap fikiran dengan segenap tenaga dan harta benda dan jika perlu dengan berkuah darah, seluruh umat Islam di bawah pimpinan ulama-ulamanya harus dapat bersatu dan berjuang untuk meng-Islamkan RI ini. Sekalian Alim Ulama dan cerdik pandai yang hadir dalam Kongres di waktu itu telah berjanji dengan dirinya sendiri dan dengan Allah secara bai'ah (bersumpah) betapa pun susah dan sukarnya pasti segenap keputusan yang telah diambilnya itu akan dilaksanakannya.

Sebagai langkah pertama para kongresisten sekembalinya ke daerahnya masing-masing akan menyarankan dan menyampaikan segenap putusan kongres kepada umum, laki-laki dan perempuan, supaya segenap umat Islam dapat mengetahui isi kongres tersebut untuk dijadikan pedoman manakala nanti sampai da'wah kepada mereka. Begitu juga supaya tiap kaum muslimin dalam pemilihan umum yang akan datang akan memilih Islam sebagai dasar negaranya. Para ulama yang insaf dan sadar akan ketinggian Agama Islam, agama yang menjamin hidup berbahagia dunia dan

⁴⁹¹ Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm.262.

akhirat, agama yang tinggi, tidak ada yang lebih wajib dita'ati oleh segenap muslim yang beriman penuh kepada Allah dan Sunnah Rasul, harus dihormati, dipelihara diperjuangkan dan dipertahankan menjadi Undang-undang dasar hidup dan harus pula menjadi Undang-undang Dasar Negara.

Sebab mereka telah muak menonton, melihat, betapa kakafiran-kekafiran ummat manusia, yang telah mencemoohkan dan meng-hina terus-menerus Nabi Muhammad SAW, Al Qur'an dirobek-robek, diinjak-injak, dijadikan bungkus pisang-goreng, dipalsukan, dibakar, dihinakan sebagaimana perlakuan Kartawinata dan sebagainya. Malahan Pemerintah Indonesia sendiripun telah berani bertindak dengan tegas, melarang beberapa ayat Allah itu dibaca di radio RI Jakarta, dengan mencoret ayat dan *hadist* yang menjadi keimanan ummat Islam sedunia, dengan dikatakan mengganggu ketentraman umum, dan sebagainya.

Memperhatikan juga betapa kecurangan-kecurangan alat Negara yang memeras rakyat, baik dari sudut lalu lintas, dari sudut perdagangan di berbagai jawatan. Memperhatikan juga betapa besarnya sudah berjangkit penyakit korupsi yang dimainkan pegawai negeri Tinggi, menengah dan bawahan yang membuat Negara bangkrut karenanya. Dengan dasar pertimbangan inilah para ulama telah muak dengan sistem pemerintahan. Pancasila, yang sesungguhnya telah menjadi pengetahuan umum, dan memerlukan adanya perubahan-perubahan yang sesuai dengan jiwa dari ummat yang 90% memeluk agama Islam.

Para ulama dengan tegas telah berjanji bahwa untuk menyempurnakan maksud merobah dasar Pancasila kepada dasar ke Islaman, tidak ada daya upaya yang lain selain sekembalinya ke daerah masing-masing mengajak rakyat memperjuangkan Negara Islam dalam pemilihan umum dan konstituante nanti, bahkan jika dengan itu tidak dicapai kemenangan, secara ilegal pun harus ditempuh. Mungkin dengan tekad yang bulat itulah para ulama sekembalinya ke daerahnya masing-masing lalu mengadakan rapat umum dimana-mana menyampaikan segenap keputusan Kongresnya yang baru itu. Oleh karena itulah maka terdengarlah adanya rapat-rapat umum dimana-mana terutama di daerah Aceh, dimana ketua umumnya sendiri Teungku Muhammad Daud Beureueh menjelajah seluruh daratan Tanah Rencong memaparkan keputusan Kongres 'Alim Ulama, di mana antara lain diajaknya agar dalam pemilihan umum nanti ummat Islam harus memilih blok Islam, jika benar-benar menghendaki adanya negara Islam. ***

BAB 4

PENGHAPUSAN PROVINSI ACEH: KEGAGALAN POLITIK SOEKARNO DAN KEBERHASILAN PROPAGANDA KARTOSOEWIRJO

SEBAGAIMANA akan kita lihat di dalam uraian di bawah, ketidak-mampuan atau kegagalan politik kaum birokrasi dan partai politik telah mengakibatkan bagaimana kekecewaan dan sakit hati rakyat demikian menggumpal. Haluan politik negara RI pun semakin dikuasai kaum merah, kaum komunis. Komunisme telah demikian kuat berakar di masyarakat Aceh yang terkenal —dalam bahasa SM Kartosowirjo— “*Islam-minded Indonesia-minded*”.⁴⁹² SM Kartosoewirjo, menyebut Republik Indonesia dalam singkatan yang mengejek: RIK (Republik Indonesia Komunis) alias Pantjasila.⁴⁹³ Dan si saat-saat ketidakcerdasan birokratik ini terjadi, ide-ide radikal dari SM Kartosoewirjo menyeruak dan mempengaruhi para tokoh ulama Aceh. Ide-ide radikal —dan terkadang sinis serta emosional ini menjadi hal yang sangat menarik hati kaum Islam di Aceh.⁴⁹⁴ Kejadian ini terjadi demikian cepat sehingga di Aceh yang masih belum pulih dari luka serangkaian konflik (Cumbok, Sajid Ali), dengan mudah menerima pengaruh pemikiran-pemikiran radikal SM Kartosoewirjo sebagai *healing anti-dote* mengobati sakit hati dan frustrasi. Dalam beberapa minggu penangkapan Sajid Ali terjadi konflik baru, kali ini mengenai maksud Pemerintah Pusat untuk menggabungkan Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara. Seperti juga "revolusi sosial" dan perbantahan mengenai pembagian kekuasaan ekonomi, politik, dan militer, perbedaan tentang status administratif Aceh tetap merupakan penyebab ketidakpuasan dan perpecahan selama bertahun-tahun. Ketidak-sensitivitasan pemerintah, khususnya kalangan birokrasi, telah menggumpalkan perasaan memberontak yang begitu menggungung di kalangan rakyat Aceh. Akibat ketidak pedulian setitik, rusaklah belanga rakyat: kekecewaan, keputusasaan, pemberontakan pun muncul di mana, bukan hanya di Aceh, melainkan di santero

⁴⁹² Lihat S.M. Kartosoewirjo, “Statemen Pemerintah NII Tanggal 5 Oktober 1953” tentang Atjeh, dalam Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, SM Kartosoewirjo*, (Jakarta: darul Falah, 1999), bagian lampiran.

⁴⁹³ *Ibid.* TRI (Tentara Republik Indonesia) dalam bahasa bombastik SM Kartosoewirjo menjadi TRIK (Tentara Republik Indonesia Komunis. Dari sebutan ini, dapat disimpulkan bahwa “kebencian ideologis” menjadi fondasi perlawanan Darul Islam.

⁴⁹⁴ Wawancara dengan Ishak Ibrahim, Banda Aceh, 24 Juli 2006.

Indonesia. Seba-gaimana akan kita lihat di bawah ini, birokrasi eksekutif pemerintah justru melakukan hal yang tidak penting sementara hal penting tidak dilakukan. Sakit hati dan marah adalah ekspresi wajar dari ethos yang tidak cerdas seperti ini. Bahkan penentangan terhadap provinsi Sumatera Utara dan makin bertambahnya campur tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi menjadi salah satu sebab langsung pecahnya pemberontakan Darul Islam di sini.

Peristiwa DI/TII yang meletus di Aceh tahun 1953 merupakan suatu peristiwa yang cukup kompleks yang diakibatkan oleh faktor yang cukup kompleks pula. Meskipun hampir semua ahli sepakat bahwa penghapusan otonomi merupakan salah satu faktor sentral yang menyebabkan terjadinya gerakan ini, tetapi tidak semua setuju bahwa faktor penghapusan otonomi sebagai satu-satunya faktor terjadinya Peristiwa DI/TII Aceh. Dalam hal ini penulis juga sepakat dengan kelompok yang disebutkan terakhir, dengan alasan terdapat selisih waktu yang cukup lama (sekitar 3 tahun) antara penghapusan otonomi dengan meletusnya DI/TII. Penulis berpendapat bahwa di samping penghapusan otonomi yang telah berakibat pada kekecewaan yang cukup dalam pemimpin Aceh dan telah menimbulkan ketegangan hubungan Aceh dengan Pemerintah Pusat, juga akibat-akibat yang ditimbulkan setelah penghapusan otonomi yang dalam banyak aspek sangat merugikan masyarakat Aceh yang semakin memicu meletusnya DI/TII. Untuk mendukung pendapat tersebut akan diuraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aceh menjelang meletusnya Gerakan DI/TII.

Penghapusan Status Provinsi Aceh dan Reaksi Masyarakat Aceh

Setelah Negara Kesatuan terbentuk kembali pada tahun 1950 dan pemerintah mengadakan penyederhanaan administrasi pemerintahan, maka beberapa daerah mengalami penurunan status. Salah satu di antaranya adalah Aceh yang diturunkan statusnya dari daerah istimewa⁴⁹⁵ menjadi Keresidenan di bawah provinsi Sumatra Utara.⁴⁹⁶ Keputusan membubarkan Provinsi Aceh itu akibat persetujuan antara RI dan RIS untuk membentuk negara kesatuan, sehingga lahir PP No. 21 Tahun 1950 tanggal 20 Agustus 1950 yang menetapkan bahwa Indonesia terdiri atas 10 provinsi, 3 provinsi di antaranya di Sumatra yaitu Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatra Tengah dan Provinsi Sumatra Selatan. Akibatnya, Provinsi Aceh harus dilebur ke dalam Provinsi Sumatra Utara dengan ibukota Medan.⁴⁹⁷

Sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan pada bulan Maret 1950 Pemerintah Pusat di Yogyakarta mengirimkan sebuah "Panitia Penyelidik" yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprodjo untuk mengadakan penyelidikan di Aceh. Pada tanggal 13 Maret 1950 diadakan pertemuan dengan instansi-instansi pemerintah daerah. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Aceh Tgk. M. Daud Beureueh, Residen T. M. Daud Syah, Ketua DPR Provinsi Aceh Tgk. Abdul Wahab, anggota-anggota Dewan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh T. M. Amin, O.K.H. Salamuddin, A.R. Hasyim, Abdul Gani, Ketua DPR Kabupaten Aceh Besar Zaini Bakri, Bupati Aceh Besar T.A. Hasan, dan Kepala Kejaksaan Hasan Ali. Dalam pertemuan tersebut Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Pemerintah Pusat belum menetapkan adanya Provinsi Aceh dan maksud kedatangan panitia adalah untuk mengumpulkan

⁴⁹⁵ Provinsi Aceh terbentuk berdasarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dalam bentuk peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah tanggal Kutaraja, 17 Desember 1949 No. 8/Des/W.K.P.M., dengan Tgk. M. Daud Beureueh sebagai Gubernur. Lihat S. M. Amin, *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 82-83. Lihat juga T. Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh: PDIA, 1999), hlm. 214.

⁴⁹⁶ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1993), hlm. 271.

⁴⁹⁷ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 127.

bahan guna dijadikan pertimbangan perlu tidaknya diadakan Provinsi Aceh. Menurut hal ini sangat penting dilakukan Pemerintah karena ketika Ketetapan Wakil Perdana Menteri mengenai pembentukan Provinsi Aceh diserahkan kepada Parlemen, beberapa anggota parlemen menyatakan tidak menyetujuinya.⁴⁹⁸

Pertemuan antara Menteri Dalam Negeri dengan instansi-instansi pemerintahan di Aceh⁴⁹⁹ tersebut menimbulkan suasana yang sangat tegang dan tidak mencapai suatu hasil. Hampir semua unsur Pemerintahan Aceh yang hadir bersikeras untuk tetap mempertahankan status Provinsi Aceh. Gubernur Tgk. M. Daud Beureueh dengan tajam mengemukakan antara lain bahwa keinginan rakyat Aceh untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Wakil Presiden Mohd. Hatta yang kebetulan sedang berada di Kutaraja pada Bulan Nopember. Wakil Presiden menyatakan persetujuannya memberikan otonomi kepada daerah Aceh. Gubernur melanjutkan bahwa "apalagi Provinsi Aeh telah berdiri dan kami ingin supaya Provinsi ini tetap berdiri".⁵⁰⁰

Ketua DPR Provinsi Tgk. Abdul Wahab dengan penuh emosi mengatakan bahwa "Aceh berjiwa Islam", "Telah banyak jiwa dan harta kami korbakan dalam mengadakan revolusi mengejar kemerdekaan". Pendapat dengan penuh emosi dan mengandung ancaman dikemukakan oleh Ketua DPR Kabupaten Aceh Besar Zaini Bakri, yaitu "Jikalau Aceh tidak menjadi daerah Provinsi, mungkin Pemerintah Pusat tidak akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi".⁵⁰¹

Sekitar lima bulan berlalu setelah pertemuan rombongan Menteri Dalam Negeri dengan Pemerintahan Daerah Aceh yang menegankan tersebut, belum juga ada keputusan Pemerintah Pusat mengenai persoalan Provinsi Aceh. Sebaliknya, Provinsi ini sendiri berjalan dengan memuaskan. Gubernur, Dewan Perakilan Daerah, dan Dewan Pemerintahan Daerah menjalankan tugas masing-masing seperti biasa, seakan-akan tidak ada sesuatu hal yang menjadi persoalan bagi kelanjutan hidup Provinsi ini. Meskipun demikian, pimpinan-pimpinan Pemerintah Daerah tetap gelisah selama belum ada pengesahan Provinsi oleh Pemerintah Pusat. Untuk mendapatkan kepastian tersebut, pada tanggal 12 Agustus 1950 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi mengadakan sidang dan mengeluarkan Mosi dengan tuntutan "Aceh minta tetap jadi provinsi sendiri", dengan berbagai pertimbangan, yaitu pengetahuan, ekonomi, geografi, sosiologi, agama, kebudayaan, politik, dan keuangan. "Aceh berlainan kepentingan dengan Sumatera Timur dan Tapanuli, berlainan adat istiadat, berlainan agama dengan Tapanuli Utara. Hal-hal ini dapat menimbulkan masalah-masalah yang bersifat perentangan-pertentangan dalam rumah tangga dimana termasuk Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur. Kami menuntut rumah tangga Aceh sendiri, dimana kami dapat mengurus hal-hal dan kepentingan-kepentingan kami tanpa dihalang-halangi oleh anggota-anggota rumah tangga yang berlainan pandangan hidup, adat istiadat, agama dan kepercayaan".⁵⁰²

Melihat kegelisahan masyarakat Aceh Pemerintah Pusat mengirim rombongan kedua dengan tugas meneliti perkembangan keadaan di Aceh, sehubungan dengan persoalan Provinsi Aceh ini, tiba di Kutaraja pada tanggal 26 September 1950. Rombongan yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat ini terdiri atas Menteri Keuangan Mr. Syafruddin Prawiranegara, Acting Gubernur Sumatera Utara Sarimin Reksodihardjo, Anggota Persiapan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara Residen T. M. Daud Syah, Komisaris Besar Polisi Darwin Karim, Kepala Polisi Sumatera S. Suparto, dan anggota

⁴⁹⁸ S. M. Amin, *op. cit.*, hlm. 86.

⁴⁹⁹ Semua unsur vital Pemerintah Provinsi Aceh saat itu dipegang oleh aktivis Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Lihat M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 222.

⁵⁰⁰ S. M. Amin, *loc. cit.*

⁵⁰¹ *Ibid.*, hlm. 86-87.

⁵⁰² *Ibid.*, hlm. 87-88.

Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Amelz dan Tgk. M. Nur El Ibrahimy. Delegasi ini mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur Tgk. M. Daud Beureueh, Bupati-bupati, wakil-wakil Kepala Negeri, wakil-wakil Jawatan Agama Kenegerian, petugas-petugas Jawatan Agama, Ulama, dan pemimpin-pemimpin terkemuka.⁵⁰³

Pertemuan kedua ini juga tidak mencapai titik temu antara kedua belah pihak. Para pemimpin Aceh tetap berupaya mempertahankan status provinsi bagi Aceh, yang malahan beberapa pembicara dengan rasa marah dan disertai dengan ancaman seperti Tgk. Amir Husin Al Mujahid dengan ucapan “ di dalam soal Provinsi Aceh, saudara-saudara yang bukan warga Aceh jangan campur tangan”, dan Zaini Bakri dengan ucapan “jika otonomi tidak akan diberikan, barangkali saya sendiri tidak akan bisa bertanggung jawab dalam Kabupaten Aceh Besar ini”. Sebaliknya, Pemerintah Pusat mencoba meyakinkan para pemimpin Aceh bahwa mereka berada pada posisi yang sulit sebagaimana ucapan Mr. Syafruddin Prawiranegara, “Pemerintah Pusat mempunyai beban yang berat sekali untuk menetapkan apakah Aceh tetap sebuah provinsi. Beban Pemerintah Pusat akan bertambah ringan jika Aceh masuk Provinsi Sumatera Utara...” “bahwa yang sekarang menjadi Perdana Menteri adalah seorang Islam, seorang Ulama pula. Dalam keadaan sebagai ini tentu kedudukan Agama Islam akan cukup mendapat perhatian beliau.”⁵⁰⁴

Akhirnya Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat memberi tanggapan dan kesimpulan bahwa “alasan-alasan Agama, Adat istiadat, Kebudayaan, Perjuangan dan Pengorbanan tidak dapat menjadi alasan-alasan untuk menuntut otonomi bagi daerah Aceh; oleh karena daerah-daerah lain dapat juga memajukan alasan-alasan yang demikian dan bila otonomi diberikan atas alasan-alasan tersebut, pasti banyak daerah-daerah lain yang juga akan menuntut otonomi dengan alasan-alasan yang sama”.⁵⁰⁵ Tanggapan ini semakin membuat para pemimpin Aceh tidak puas. Dengan demikian kedatangan rombongan Mr. Assaat sebagai utusan Perdana Menteri Natsir tersebut bukan saja tidak membawa hasil, malah menambah panas suasana.⁵⁰⁶

Dalam suasana yang semakin panas tersebut kelompok bangsawan (*uleebalang*) yang banyak melarikan diri ke luar Aceh, terutama Medan dan Jakarta, setelah Revolusi Sosial tahun 1946 sebaliknya mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk menghapus satatus Provinsi Aceh. Di bawah komando T.A. Rahman Muli dan T. Teungoh Hanafiah, dua orang bangsawan yang sangat menderita akibat Revolusi Sosial bangkit untuk menyerang pendukung otonomi yang sesungguhnya adalah lawan politik mereka. Said Ali dan T. Syamaun Latif yang berada dalam pengasingan di Medan membongkar kecurangan politik di Aceh yang dimuat dalam Surat Kabar Rakyat tanggal 9 Februari 1950. Thusnisah yang juga di Medan menerbitkan sebuah brosur berjudul Suasana Atjeh I pada bulan Mei 1950. Brosur berbahasa Aceh dengan langgam hikayat itu membeberkan kejelekan-kejelekan tokoh-tokoh pendukung otonomi, seperti T. M. Daud Beureueh, T.M. Amin, Tgk. A. Husin Almujaahid dan Abdullah Arief selama berkuasa di Aceh. “Masyarakat Aceh yan telah Rusak, dirusak oleh orang-orang yang hendak tetap meperoleh kekuasaan setelah merampas dengan jalan menipu rakyat jelata...” tulis T. Teungoh Hanafiah dalam upaya menjatuhkan reputasi pendukung otonomi dimata rakyat.⁵⁰⁷

Ketidak setujuan golongan bangsawan terhadap status otonomi tiba-tiba mendapat dukungan dari dua orang ulama berpengaruh di negeri Meuraksa, Aceh Besar, Tgk. A. Salam Meuraksa dan Tgk. Makam Gampong Blang. Pada bulan September secara gamblang mereka mengeluarkan pernyataan bahwa mereka mendukung pembubaran

⁵⁰³ *Ibid.*, hlm. 88-89.

⁵⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 89-90.

⁵⁰⁵ *Ibid.*

⁵⁰⁶ Hasan Saleh, *op. cit.*, hlm. 131.

⁵⁰⁷ M. Isa Sulaiman, *op.cit.* hlm. 226-227.

Provinsi Aceh kepada Pemerintah Pusat. Pernyataan tersebut cukup mengejutkan pendukung otonomi, sehingga mereka terpaksa menggunakan saluran partai politik atau organisasi massa untuk membuat mosi tandingan pada tanggal 10 Oktober 1950.⁵⁰⁸

Selain itu para buruh dan karyawan perkebunan di Aceh Timur dan Aceh Tengah juga ikut mendukung penghapusan otonomi bagi Aceh. Di Aceh Timur, terutama di Tamiang, buruh perkebunan asal pendatang merasa tidak puas terhadap milisi yang menderes getah perkebunan, pembayaran gaji yang tidak teratur oleh administrator kebun dan retribusi getah yang diberlakukan oleh Wedana setempat Ishak Amin, mantan pemimpin Pesindo, yang mencapai 12,5 - 20%. Para buruh baik melalui organisasinya Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sebupri) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) maupun melalui pemimpin mereka Arsyad Lubis dan A. W. Sutan Palembang juga melakukan reaksi dengan menjual paksa getah untuk menutupi gaji buruh, petisi dan membuat surat terbuka yang isinya juga mengancam otonomi yang sedang diperjuangkan yang dimuat dalam surat kabar Waspada terbitan Medan tanggal 30 Agustus 1950.⁵⁰⁹

Suara kelompok pendukung penghapusan otonomi ini ternyata telah menjadi salah satu alasan yang semakin memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat untuk menghapus Provinsi Aceh. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ucapan Mr. M. Rum "di Aceh juga terdapat suara golongan raja-raja yang menyetujui dibuarkannya Provinsi Aceh, malahan meminta agar Keputusan Pemerintah Pusat itu segera direalisasikan, sambil memperlihatkan setumpuk surat kepada Hasan Sab⁵¹⁰ dan rombongan."⁵¹¹

Pada tanggal 14 Agustus 1950, sekitar delapan bulan setelah Provinsi Aceh dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri, provinsi inipun dibubarkan Pemerintahan Acting Presiden Mr. Assaat yang masih berkedudukan di Yogya melalui PP Pengganti UU No. 5 Tahun 1950. Padahal dua hari sebelumnya DPRD Aceh secara aklamasi telah mengeluarkan pernyataan untuk tetap mempertahankan Provinsi Aceh, dan apabila hal ini tidak dikabulkan, seluruh putra-putri Aceh yang duduk dalam pemerintahan akan meletakkan jabatan pada hari dileburnya provinsi ini.⁵¹²

Pada tanggal 27 Nopember 1950 Wakil Presiden RI Mohd. Hatta berkunjung ke Kutaraja untuk mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Aceh. Dalam pertemuan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Mohd. Hatta memberi penjelasan mengenai ketetapan Pemerintah Pusat menghapuskan Provinsi Aceh. Wakil Presiden tidak dapat meyakinkan para pemimpin Aceh yang hadir dan ketegangan meliputi suasana rapat seperti halnya pertemuan dengan Rombongan Pemerintah Pusat sebelumnya.⁵¹³

Baru setelah Perdana Menteri M. Natsir mengunjungi Kutaraja pada tanggal 22 Januari 1951 dengan maksud dan tujuan yang sama dengan kunjungan Menteri Dalam Negeri dan Wakil Presiden, golongan yang pro provinsi dapat menerima untuk sementara pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Dalam kunjungan ini dicapai suatu kesepakatan bahwa tuntutan otonomi Aceh tidak ditolak Pemerintah Pusat, tetapi akan diusahakan dan diperjuangkan secara integral.⁵¹⁴ Keputusan pembubaran Provinsi Aceh dibacakan sendiri oleh Perdana Menteri M. Natsir di depan corong RRI Kutaraja pada tanggal 23 Januari 1951, yang isinya yaitu "Bismillahirrahmanirrahim, Atas nama Allah seru sekalian alam dan atas nama Pemerintah, dengan ini saya umumkan bahwa sejak

⁵⁰⁸ *Ibid.* hlm. 228.

⁵⁰⁹ *Ibid.* 228-229.

⁵¹⁰ Hasan Sab merupakan salah seorang anggota delegasi yang dikirim Pemerintah Aceh ke Jakarta untuk meyakinkan Pemerintah Pusat terhadap perlunya dipertahankan Provinsi Aceh.

⁵¹¹ *Ibid.* hlm. 130.

⁵¹² Hasan Saleh, *op. cit.* hlm. 130.

⁵¹³ Insider, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: N.V. Soeroengan, 1957), hlm. 37. Lihat juga T. Ibrahim Alfian, *op. cit.* hlm. 219.

⁵¹⁴ *Ibid.*

saat ini status Provinsi Aceh dicabut kembali dan seluruh kabupatennya digabungkan ke dalam Provinsi Sumatra Utara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh”.⁵¹⁵

Penghapusan status otonomi Aceh tersebut telah membawa dampak yang cukup besar, bukan hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga ketegangan. Kebijakan tersebut diinterpretasikan oleh para pemimpin Aceh sebagai wujud pengkhianatan Pemerintah Pusat terhadap pengorbanan rakyat Aceh selama masa revolusi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang tokoh DI/TII Aceh Hasan Saleh, yaitu “Inikah balas jasa terhadap Aceh yang telah membiayai wakil-wakil pemerintah pusat dan bahkan membeli dua buah pesawat terbang pertama untuk Indonesia. Inikah balas jasa pusat terhadap perjuangan rakyat Aceh dalam masa revolusi fisik dulu, sehingga Presiden RI sempat menjuluki daerah Aceh ini sebagai “daerah modal perjuangan Republik Indonesia”.⁵¹⁶

Dampak terhadap Kesatuan Militer

Penghapusan otonomi Aceh yang sejalan dengan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi yang dijalankan Pemerintah Pusat mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi daerah Aceh yang telah mengecap otonomi yang sangat besar pada masa revolusi kemerdekaan. Salah satu dampak yang sangat dirasakan adalah reorganisasi militer. Pada masa revolusi kemerdekaan, Daerah Aceh mempunyai 1 divisi tentara reguler, 3 divisi milisi (Rencong, Tgk. Chik Ditiro, dan Tgk. Chik Paya Bakong) dan kesatuan tentara pelajar. Reorganisasi militer sebenarnya telah dimulai sejak pertengahan tahun 1948 dengan pembentukan Divisi X AP TNI Sumatera, yang sejak Nopember 1949 berubah menjadi Komando Teritorium Aceh. Akan tetapi kesatuan militer Aceh waktu itu masih utuh di bawah Letkol Husin Yusuf. Sementara itu kesatuan-kesatuan tentara dan milisi yang tidak terjaring ke dalam tentara reguler diberikan kemudahan-kemudahan usaha baik diperbengkelan maupun di perkebunan.⁵¹⁷

Berbeda dengan sebelumnya, reorganisasi tahun 1950 oleh Komando Staf Angkatan Darat, Komando Teritorium Aceh yang baru dibentuk pada bulan Nopember 1949 digabungkan ke dalam Komando Teritorium I yang berpusat di Medan terhitung 1 Februari 1951, sehingga kesatuan militer Aceh berstatus Brigade AA dan kemudian berubah menjadi Resimen I. Reorganisasi tersebut sangat mengecewakan para pimpinan militer Aceh sebagaimana diungkapkan oleh Hasan Saleh berikut ini “.... ketika para pejuang Aceh sedang diliputi rasa kebanggaan dan patriotisme perjuangan pada pertengahan 1950, datanglah kabar bahwa Divisi X akan dibubarkan; di Aceh hanya akan ada satu brigade yang tunduk di bawah Divisi Bukit Barisan di Medan. Timbul keresahan dikalangan pemerintah dan rakyat Aceh, terutama dikalangan perwira dan prajurit serta kaum pejuang lainnya. Semua unsur pemerintahan Aceh memohon dengan segala kerendahan hati pemerintah pusat, dalam hal ini Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) yang dipimpin Kolonel A. H. Nasution, membatalkan keputusan tersebut. Silih berganti utusan dikirim kepada Nasution agar pa dapat bertindak lebih bijaksana. Panglima Divisi sendiri, Kol. Husin Yusuf, kemudian menghadap KSAD di Jakarta. Di sana ia mendapatkan jawaban bahwa, “kalian orang militer yang wajib mematuhi segala titah dan mentaati segala perintah; patuhilah perintah ini tanpa embel-embel!” Maka Divisi X tetap harus dibubarkan.⁵¹⁸

Ketika delegasi lain masih berada di Jakarta untuk memperjuangkan pembatalan pembubaran Divisi Aceh, Panglima Divisi Bukit Barisan Kolonel Kawilarang datang ke Aceh dengan pesan agar Panglima Divisi X yang kini menjadi Komanda Brigade, Husin

⁵¹⁵ Hasan Saleh, *op. cit.* hlm. 134.

⁵¹⁶ *Ibid.*

⁵¹⁷ M. Isa Sulaiman, *op. cit.*, hlm. 235.

⁵¹⁸ Hasan Saleh, *op. cit.* hlm. 125.

Yusuf, yang pangkatnya telah diturunkan pula menjadi Letnan Kolonel, datang menemuinya. Husin Yusuf, yang merasa dirinya masih tetap Panglima Devisi, karena hal pembubaran Devisi Aceh itu masih belum tuntas, tidak mau menghadap Kawilarang. Ia malah pulang ke kampungnya di Bireun, menenangkan gejolak hatinya. Tindakan Husin Yusuf ini dianggap indisipliner, sehingga di Lapangan Udara Blang Bintang, Kawilarang langsung memecat Husin Yusuf. Ketetapan pemecatan ini ditulisnya pada secarik kertas kecil. Akhirnya datang Kolonel Abimanyu ke Aceh sebagai utusan dari MBAD, yang menuntaskan masalah pembubaran Devisi Aceh, menarik Kolonel Husin Yusuf ke Jakarta, dan mengangkat Mayor Hasballah Haji sebagai Komandan Brigade. Maka semua persenjataan, yang dianggap berlebihan untuk suatu brigade ditarik ke Medan, termasuk kesatuan arteleri dan meriam di Lhok Nga.⁵¹⁹

Oleh karena khawatir rakyat Aceh akan melakukan sesuatu setelah pembubaran provinsi, pemerintah Pusat mengambil tindakan preventif dengan memutasikan semua kesatuan militer Aceh ke luar daerah; sebagai gantinya dimasukkan kesatuan lain. Mayor Hasballah Haji, Komanda Brigade, dimutasikan ke Tarutung, Tapanuli, dan diganti oleh Letkol Nazir; Batalion T. Manyak dimutasikan ke Jawa Barat; Batalion Alamsyah ke Indonesia Timur; Batalion Hasan Saleh ke Sulawesi Selatan lalu ke Maluku Selatan; dan Batalion Nyak Adam Kamil entah ke mana. Perwira lain yang berada di luar kesatuan batalion juga disebar ke mana-mana. Sebagai gantinya dimasukkan batalion dari Tapanuli, yang secara etnologis dan adat istiadat sangat berbeda dengan orang Aceh; bahkan sebagian besar dari mereka bukan muslim. Datanglah Batalion Manaf Lubis, Batalion Ulung Sitepu, dan Batalion Boyke Nainggolan. Menurut Hasan Saleh, banyak tindakan mereka yang sangat menyakitkan hati rakyat Aceh, seperti memasuki rumah ibadah dengan sepatu yang berlumpur, memperlihatkan kemaluannya kepada kaum wanita, menenggak minuman keras dihadapan umum, dan sikap-sikap propokatif lainnya.⁵²⁰

Perpindahan ke dalam lingkungan kerja baru yang berada di luar etnis budaya telah memunculkan persoalan penyesuaian diri di kalangan sebagian perwira-perwira tersebut. Akibatnya mereka yang tidak betah dengan suasana baru tersebut terpaksa meninggalkan tugas sebagaimana dilakukan oleh Mayor Hasballah Daud dan Letnan Banta Khairullah yang dipindahkan ke MABAD, ataupun yang dilakukan oleh Letnan Ahmad Adam yang dipindahkan ke Tapanuli.⁵²¹

Dampak terhadap Birokrasi Pemerintahan Sipil

Perubahan administrasi ini juga berdampak cukup luas dalam birokrasi sipil di Aceh. Dalam pemerintah sipil di Aceh saat itu terjadi mutasi secara besar-besaran. Tgk. Syekh Marhaban dan Ali Hasjmy pada pertengahan 1952 dipindahkan ke Medan, sedangkan Hasan Ali sejak permulaan tahun 1953 dipindahkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Mereka yang tidak bersedia pindah menempuh berbagai cara seperti Tgk. M. Daud Beureueh dan Hasan Ali yang memilih untuk cuti, sementara T.M. Amin beralih profesi menjadi pedagang. Jabatan-jabatan yang kosong tersebut segera diisi oleh pejabat yang didatangkan dari Sumatera Timur dan Tapanuli.⁵²²

Dampak reorganisasi dan rasionalisasi juga menyentuh pada level negeri, mukim sampai ke desa (gampong). Pejabat pamong praja pada ketiga level paling bawah itu selama revolusi kemerdekaan telah diakui sebagai pejabat pemerintah melalui Perda Nomor 3 tanggal 10 Desember 1946, yang memperoleh gaji atau honorarium dari Pemerintah Keresidenan Aceh. Dengan diintegrasikan ke dalam Pemerintah Pusat melalui implementasi UU Nomor 22 tentang Daerah Otonom dan PGSP 1948 tentang

⁵¹⁹ *Ibid.* hlm. 126.

⁵²⁰ *Ibid.* hlm. 135-136.

⁵²¹ *Ibid.* hlm. 187. Lihat juga M. Isa Sulaiman, *op.cit.* hlm. 236-237.

⁵²² M. Isa Sulaiman, *op. cit.*, hlm 237.

peraturan penggajian pegawai negeri, timbulah persoalan siapa di antara pejabat tersebut yang dianggap aparatur paling bawah pamong praja, *imeum mukim* atau *geuchik*, sehingga mengganggu proses pembayaran gaji. Keadaan ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sebagaimana dapat dilihat dengan keluarnya Resolusi kepala negeri, kepala mukim sekabupaten Aceh Besar tanggal 28 Maret 1951 yang berisikan ancaman untuk tidak melaksanakan tugas jika status mereka tidak diakui oleh PGPS 1948.

Berkenaan dengan keluhan kepala negeri dan imem mukim tersebut, Kementerian Dalam Negeri hanya mengakui kepala negeri yang berjumlah 105 buah di Aceh sebagai pegawai negeri dalam kedudukan sebagai asisten wedana. Sementara itu imeum mukim yang berjumlah 552 orang dianggap sebagai perantara antara asisten wedana dengan keuchik, dan kedua mereka tidak diakui sebagai pegawai negeri. Keputusan tersebut telah membangkitkan kegelisahan dikalangan *imeum mukim*. Merekapun memobilisasi diri untuk memprotes keputusan itu. Sepanjang tahun 1952 para *imeum mukim* dari Seulimeum, Kutaraja, Pidie, dan Lhokseumawe melakukan rapat-rapat untuk menyusun petisi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Petisi tersebut berisikan himbauan agar nasib mereka ditinjau kembali. Menanggapi petisi tersebut, baik Gubernur Hakim maupun Menteri Dalam Negeri tetap pada pendiriannya, sehingga para *imeum mukim* tersebut merupakan satu unsur kelompok yang tidak puas kepada Pemerintah Pusat hingga saat menjelang meletusnya pemberontakan.

Jabatan pamong praja lain yang dianggap kurang efisien oleh Gubernur Hakim adalah Residen. Pada tahun 1952 jabatan residen Sumatera Timur dan Tapanuli dihapus, sehingga hanya tinggal Residen Aceh. Begitu Residen R. Maryono Danubroto dipindahkan ke Palembang akhir juni 1953 Gubernur Hakim bermaksud juga menghapuskan jabatan Residen Aceh dan digantikan semacam koordinator saja. Oleh karena itu, Sulaiman Daud bupati t/b yang bertindak selaku pemangku jabatan sepeninggalan R. Maryono Danubroto tidak diperlakukannya sebagai residen penuh. Situasi demikian rupanya juga telah membangkitkan keresahan politik di Aceh saat itu.

Badan Peradilan yang telah ada pada tingkat negeri sejak masa pendudukan Jepang (*kuhoin*), yang kemudian menjadi pengadilan rendah, juga tidak luput dari penataan. Pada tanggal 2 Desember 1952 Pemerintah Pusat mengeluarkan Penetapan Menteri Kehakiman No. 3/451/18 tentang Susunan Organisasi Pengadilan. Implementasi dari ketetapan tersebut mengakibatkan hakim rendah yang telah ada di tingkat negeri (kecamatan) harus dihapuskan. Tindakan tersebut mendapat reaksi dari para hakim rendah yang secara kebetulan mantan pemimpin milisi. Ketua pengadilan rendah daerah Pidie misalnya, di bawah pimpinan H. Cut Sulaiman telah mengumpulkan rekan-rekannya tanggal 20 Juni 1953 untuk membicarakan nasib mereka. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan untuk mengirimkan dua utusan ke Jakarta untuk membicarakan nasib mereka kepada Pemerintah Pusat.⁵²³

Instansi lain yang juga terkena reorganisasi dan rasionalisasi adalah kantor Jawatan Agama. Kantor Jawatan Agama Aceh pada masa revolusi telah memiliki birokrasi yang cukup besar melalui pembentukan sekolah-sekolah agama (SRI, SMI, dan SMIA) dan Mahkamah Syariah, sedangkan Kementerian Agama waktu itu hanya memiliki Mahkamah Syariah di Pulau Jawa dan sekolah agama berupa Pendidikan Guru Agama (PGA) atau Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) dalam jumlah yang sangat terbatas. Birokrasi Jawatan Agama Aceh yang cukup gemuk telah menimbulkan persoalan tersendiri saat bergabung ke dalam Kementerian Agama terutama menyangkut status sekolah dan Mahkamah Syariah serta pembiayaannya. Walaupun Pemerintah telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut, namun suatu hal yang jelas bahwa kedudukan sekolah agama dan Mahkamah Syariah belum juga selesai menjelang meletusnya pemberontakan. Dengan demikian, sekolah agama dan Mahkamah Syariah

⁵²³ M. Isa Sulaiman, *op. cit.*, hlm 237-240.

telah muncul sebagai basis kelompok yang tidak puas terhadap penghapusan otonomi.⁵²⁴

Dampak terhadap Ekonomi Daerah

Pencabutan status otonomi Aceh berpengaruh cukup besar juga dalam aspek ekonomi. Kewenangan moneter bersifat lokal yang dinikmati Daerah Aceh selama masa revolusi kemerdekaan dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan RIS Sjafruddin Prawiranegara Nomor 53810/UU tanggal 26 Maret 1950 tentang tata aturan nilai tukar uang RIS dengan mata uang lokal yang ada di Jawa dan Sumatera, yang efektif berlaku sejak 30 Maret 1950. Bagi Daerah Aceh yang mata uang lokal (Urips, Uripsu dan Uriba) yang beredar mencapai sekitar 8 milyar rupiah harus mengkonversi uangnya dengan uang republik sejak 1 Juni 1950. Dalam kesatuan moneter baru biaya operasional pemerintah baikdana rutin dan dana pembangunan disuplai oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan itu sangat berpengaruh terhadap birokrasi yang dibiayai oleh pemerintah lokal.⁵²⁵

Berbarengan dengan itu perkebunan dan pertambangan yang pada masa revolusi kemerdekaan merupakan sumber utama pendapatan daerah dialihkan tanggung jawab pengelolaannya kepada Pemerintah Pusat. Dengan demikian, secara ekonomi Daerah Aceh semakin tergantung kepada Pemerintah Pusat, baik untuk biaya rutin maupun biaya pembangunan. Akibatnya, pem-bangunan sarana dan prasarana fisik yang mengalami kerurakan selama masa revolusi berjalan agak lambat. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam tahun1952-1953 belum dapat memulihkan seperti situasi sebelum Perang Asia Timur Raya meletus.⁵²⁶

Beralihnya tanggung jawab keuangan dari daerah ke pusat berdampak pula terhadap perusahaan-perusahaan di daerah, seperti yang dialami oleh NV. Indolco, NV. Permai dan NV. Sakti, yang pada masa revolusi kemerdekaan merupakan rekanan dan sekaligus suplier Pemerintah Aceh. Masalahnya pengusaha-pengusaha tersebut masih mempunyai tagihan kepada Pemerin-tah Daerah baik berupa harga barang pasokan ataupun jatah hasil kebun yang dijanjikan. Dengan reorganisasi administrasi pemerintahan tersebut mereka harus mengurus piutangnya melalui jalur yang baru dengan birokrasi yang semakin panjang.⁵²⁷ Konsekuensi dari kebijakan tersebut banyak klaim pengusaha Aceh yang pada masa revolusi telah menantang maut dari blokade Angkatan Laut Belanda banyak yang ditolak Pemerintah sebagaimana diung-kapkan oleh S.M. Amin "Sangat disayangkan, mereka yang sangat berjasa ini, kecuali Muhammad Saman dari PT. Puspa, setelah revolusi kemerdekaan berakhir tidak memperoleh perlakuan yang wajar. Malahan, hutang getah yang masih harus diperoleh dari Pemerintah atas perjanjian jual beli, ditolak pembayarannya".⁵²⁸

Kesukaran yang dialami pengusaha Aceh waktu itu adalah penataan tata niaga. Pada tahun 1952 Pemerintah menggantikan perniagaan barter dengan *deviezen rezim* atau *letter of credit*, larangan ekspor kopra dan peraturan yang mengharuskan ekspor sapi/kerbau melalui pelabuhan Belawan. Bagi masya-rakat Aceh yang sudah terbiasa dengan perdagangan tersebut dirasakan suatu pukulan yang sangat keras. Demikian pula dengan keharusan meng-ekspor melalui pelabuhan Belawan telah berdampak pada biaya yang mereka keluarkan semakin membengkak. Kebijakan ini, ditambah lagi dengan dihapuskan Provinsi Aceh yang digabung ke dalam Provinsi Sumatera Utara telah membuat masyarakat Aceh merasa dikhianati oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pedagang-pedagang Aceh melalui Gasida melakukan protes kepada Pemerintah

⁵²⁴ *Ibid.* hlm. 241.

⁵²⁵ *Ibid.* hlm. 242.

⁵²⁶ *Ibid.* hlm. 243.

⁵²⁷ *Ibid.*

⁵²⁸ S. M. Amin, *op. cit.* hlm. 103.

Provinsi.⁵²⁹

Kekecewaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat bertambah pada tahun 1952 dengan pengumuman Menteri Keuangan tentang pembayaran kembali obligasi tahun 1946 yang hanya dibayar 5 % menurut kurs uang pada saat pengumuman dikeluarkan. Padahal keresidenan Aceh merupakan salah satu keresidenan yang paling sukses dalam pengumpulan dana melalui obligasi. Pemimpin milisi yang berkuasa saat itu telah melakukan berbagai cara agar rakyat mau membeli obligasi. Kebijakan Menteri keuangan tersebut mendapat reaksi luas dari masyarakat. Amelz, mantan ketua Panitia Obligasi Keresidenan Aceh yang waktu itu telah menjadi anggota DPR, terpaksa turun tangan untuk mempersoalkan *beleid* Menteri Keuangan tersebut. Tanggal 3 Mei 1952 ia mengirim nota menegenai persoalan obligasi tersebut kepada Menteri Keuangan. Akan tetapi, apapun yang dilakukan, persoalan obligasi telah membangkitkan kekecewaan rakyat yang semakin luas dan mendalam terhadap Pemerintah Pusat.⁵³⁰

Dampak terhadap Penerapan Hukum Syari'at Islam

Sejak revolusi kemerdekaan sampai dengan dicabutnya otonomi, Pemerintah Daerah Aceh yang didominasi elit agama telah berusaha sejauh untuk mengubah wajah masyarakat Aceh agar lebih Islami melalui berbagai produk aturan yang dikeluarkan. Pada tahun 1950 Gubernur Tgk. Daud Beureueh, DPRD dan DPD Aceh disibukkan oleh tugas bagaimana merumuskan peraturan yang lebih ampuh untuk melarang permainan seudati dan hukuman yang lebih berat bagi pemain judi.⁵³¹ Dengan dihapusnya otonomi, peraturan-peraturan daerah tersebut sangat sulit untuk diimplementasikan. Dengan berpedoman pada ketentuan formal, polisi yang bertanggung jawab terhadap perizinan sering memberi izin untuk penyelenggaraan keramaian rakyat baik berupa pertunjukan seudati maupun pasar malam. Keramaian tersebut sering diisi oleh pertunjukan ronggeng atau joded dan permainan ketangkasan atau judi. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan keramaian tersebut sering mendapat reaksi dari elit ulama, malahan ada yang menyuruh santrinya untuk melempar arena keramaian seperti yang terjadi di Geudong tahun 1952.

Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya yang terutama terjadi di kota-kota di Aceh menjadi kecemasan tersendiri bagi ulama sebagaimana disuarakan surat kabar tegas pimpinan A. Gani Mutiara. Konon lagi pergaulan melampaui batas yang dilakukan oleh pejabat. Sewaktu "affair wanita" yang dilakukan oleh Residen R.M. Danubroto terbongkar pada tahun 1953, peristiwa ini segera menjadi topik pembicaraan penduduk. Akibatnya Pemerintah Pusat terpaksa memindahkannya 3 bulan kemudian ke luar daerah, dan digantikan oleh Sulaiman Daud.

Persoalan disharmoni hukum juga terjadi pula pada produk-produk keputusan Mahkamah Syariah. Proses hukum yang dihasilkan Mahkamah Syariah belum memperoleh kekuatan hukum bila belum mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri. Hal ini menimbulkan konsekuensi tertentu dalam pelaksanaan eksekusi manakala pihak yang kalah, terutama dalam perkara harta, berkeberatan. Untuk itu cukup logis bila ketua Mahkamah Syariah Kutaraja Twk. Aziz pada tahun 1953 menghimbau pemerintah untuk memberikan hak yang sama antara pengadilan negeri dengan Mahkamah Syariah dalam memutuskan perkara.⁵³²

⁵²⁹ M. Isa Sulaiman, *op. cit.* hlm. 244. Lihat juga Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. (Jakarta: Pustaka utama Grafiti, 1990), hlm. 77.

⁵³⁰ M. Isa Sulaiman, *ibid.*, hlm. 245.

⁵³¹ Komunitas Cina yang mendiami kota-kota di Aceh sangat menyenangi permainan judi (wewe, dadu kocok dan loterij), sementara orang Aceh amat menggemari permainan seudati. Lihat Insider, *op. cit.* hlm. 100-101. Lihat juga M. Isa Sulaiman, *op. cit.* hlm. 246.

⁵³² M. Isa Sulaiman, *op. cit.* hlm. 247- 249.

Razia Agustus 1951

Peristiwa yang sudah tegang di Aceh semakin menggelisahkan dengan dilakukannya Razia Agustus. Razia Agustus merupakan kebijakan Kabinet Sukiman dengan tujuan mencari bahan peledak dan penyimpanan barang-barang terlarang yang menghambat kelancaran ekonomi.⁵³³ Tentara yang tergabung dalam Brigade AA mengadakan razia di seluruh Aceh untuk mencari senjata gelap yang diduga masih disimpan oleh sebagian rakyat. Sebenarnya beberapa bulan sebelum razia ini dilaksanakan telah diperintahkan kepada koordinator kepolisian untuk menarik seluruh senjata api yang ada di tangan perorangan baik yang mendapat surat izin maupun yang tidak. Razia yang dilakukan tiba-tiba pada tanggal 29 Agustus 1951 tersebut didasari pada anggapan bahwa ada orang-orang atau organisasi yang mencoba menimbulkan kerusuhan. Menurut M. Nur El Ibrahimy alasan itu terlalu mengada-ada karena sama sekali tidak ada gejala ke arah itu.⁵³⁴

Razia Agustus tersebut telah dimanfaatkan oleh keluarga *uleebalang* untuk menekan lawan politik mereka. Hal ini bisa terjadi karena Mayor Hasballah Haji, Komandan Resimen I, sejak awal 1951 telah dipindahkan ke Medan dan digantikan oleh Mayor M. Nazir, dan kesatuan militer yang ditempatkan di Aceh kebanyakan berasal dari pendatang. Para keluarga *uleebalang*, terutama di Pidie, sebagaimana diungkapkan Hasan Saleh menghasut tentara untuk menggeledah rumah-rumah bekas pejuang termasuk rumah Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. Hasballah Indrapuri dan A. Gani Mutiara dengan dalih mencari senjata. Malahan sejumlah eks pemimpin milisi seperti Tgk Tahir (Kepala Negeri Mutiara), H. Ibrahim (Jaksa Lhok Sukon), Peutua Husen, Tgk. Hitam Peureulak, Tgk. M. Aji Di Garot (Trienggadeng), Tgk. Hasan Hanafiah (Kepala Jawatan Agama Aceh Barat), dan Syekh Marhaban (Wedana Kutaraja), ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara.⁵³⁵

Pengeledahan secara kekerasan dan penangkapan tokoh-tokoh pejuang itu segera menimbulkan reaksi dari rekan-rekan mereka. Di Aceh T.M. Amin yang waktu itu telah menjadi Presiden Direktur NV. Indolco dan Tgk. A. Wahab Seulimeum, Kepala Jawatan Agama Aceh melakukan kritik terhadap tindakan itu. Di Jakarta M. Nur El Ibrahimy dan Amelz yang waktu itu Anggota DPR pada bulan September dan Oktober mengajukan interpelasi kepada Pemerintah Pusat. Demikian juga Tgk. M. Daud Beureueh secara pribadi tanggal 8 Oktober 1951 mengirimkan sepucuk surat kepada Presiden Sukarno menumpahkan kejangkelannya terhadap perlakuan yang ia terima.⁵³⁶ Dalam suratnya ia mengatakan bahwa dia tidak keberatan ditangkap tetapi jangan dengan alasan yang dibuat-buat dan jangan mengelabui mata rakyat. Dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang pihak tentara, lanjutnya, rakyat akan melauai tiga tahap; tahap bersabar, tahap benci, dan tahap melawan. Sekarang sudah sampai ke tahap kedua, oleh karenanya dia mengharapakan kebijaksanaan Presiden, kiranya hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.⁵³⁷

Majelis Penimbang dan Harta *Uleebalang*

Majelis Penimbang dan harta *uleebalang* juga mempunyai andil yang besar terhadap Peristiwa DI/TII Aceh, sebagaimana keyakinan Pemerintah seperti yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo dalam Keterangan Pemerintah dalam rapat pleno DPR tanggal 2 Nopember 1953 mengenai Peristiwa Daud Beureueh, yaitu

⁵³³ *Ibid.*, hlm. 260.

⁵³⁴ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Da'wah, 2001), hlm. 73.

⁵³⁵ M. Isa Sulaiman, *loc. cit.* Lihat juga Hasan Saleh, *op. cit.* hlm. 140-146.

⁵³⁶ M. Isa Sulaiman, *ibid.* hlm. 261.

⁵³⁷ M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.* hlm. 75.

“Pemerintah tetap berkeyakinan bahwa soal harta benda peninggalan *uleebalang* merupakan faktor terpenting dalam sebab musabab pemberontakan di Aceh sekarang ini”. Majelis Penimbang dibentuk dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1946 yang ditandatangani oleh Residen Aceh T.M. Daudsyah dan disetujui oleh Wakil Ketua Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh, Mr. S.M. Amin, atas anjuran Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh. Badan ini mempunyai hak dan kewajiban mengurus harta dan peninggalan *uleebalang* yang terlibat dalam Peristiwa Cumbok yang telah tewas.⁵³⁸

Ada dua hak luar biasa yang diberikan kepada Majelis Penimbang untuk dapat menyelenggarakan kewajibannya, pertama Majelis Penimbang mempunyai hak kehakiman dan keputusannya merupakan vonis yang tidak dapat diganggu gugat; dan kedua, dalam melaksanakan kewajiannya majelis tidak semestinya menurut peraturan (susunan acara-proses) kehakiman, melainkan tergantung atas kebijaksanaan Majelis Penimbang semata-mata.⁵³⁹ Dari kedua kewenangan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Penimbang terhadap harta peninggalan *uleebalang* sangat besar dan tanpa batas.

Kekuasaan yang cukup besar tersebut telah menimbulkan persoalan yang cukup ruwet dalam penyelesaian harta *uleebalang*. Sampai tahun 1950 Majelis Penimbang masih tetap melakukan fungsinya. Pada tanggal 17 Mei 1950 Majelis Penimbang Pidie secara terbuka mengumumkan pelelangan kilang padi milik almarhum Toke Wahab Meureudu dan T. Laksamana Umar.

Sukar sekali diketahui secara persis jumlah harta *uleebalang* yang masih menjadi sengketa. Mr. S.M. Amin pada pertengahan tahun 1956 memperkirakan diperlukan dana sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan ganti rugi, sedangkan Tgk. Hitam Peureulak memperkirakan bahwa Majelis Penimbang Pidie telah menjual 145 *gunca* dan 9 *naleh* bibit sawah, 60 petak kebun, 13 buah rumah, 26 kedai, 4 los pasar, 1 pabrik padi Toke Wahab Meureudu di Langsa dan 2/5 bagian pabrik padi T. Laksamana Umar di Sigli. Dari kedua data tersebut tidak mencantumkan perhiasan, kendaraan, dan ternak.

Memang benar Majelis Penimbang telah memproses perkara harta *uleebalang* yang berada di tangan mereka, namun bila dilihat jumlah yang diproses, seperti yang dilaporkan oleh Tgk. A. Wahab Seulimeum tanggal 6 Nopember 1951 ternyata perkara yang banyak dilayani majelis tersebut lebih banyak menyangkut dengan perkara ganti rugi rumah penduduk yang terbakar akibat perang (terutama di Ilot dan Meutareum), perkara tuduhan bahwa *uleebalang* mengambil paksa harta penduduk sewaktu mereka masih hidup, dan perkara harta *baital mal*.

Setelah dihapusnya otonomi telah membangkitkan keberanian ahli waris *uleebalang* untuk menggugat vonis Majelis Penimbang yang dianggap mereka bertentangan dengan konstitusi. Untuk tujuan tersebut beberapa *uleebalang* yang berdomisili di Kabupaten Pidie pada pertengahan tahun 1951 memben-tuk forum koordinasi yang diberi nama Panitia Penuntut Harta Uleebalang di bawah pimpinan T. Harun. Gerakan itu mendapat simpati dari rekan-rekan mereka yang berdomisili di Kutaraja antara lain T. Ali Lam Lagang dan T. A. Rahman Muli, dan juga dukungan dari beberapa ulama berpengaruh yaitu Tgk. A. Salam Meuraksa, Tgk. Makam Gampong Blang, dan Tgk. Hasan Krueng Kale. Dalam sebuah rapat tanggal 8 April 1951 di Lamteumen, Kutaraja, berhasil dibentuk sebuah badan yang diberi nama Badan Keinsyaf-an Rakyat (BKR) yang diketuai oleh T. Ali Lam Lagang dengan tujuan mem-bantu Pemerintah. Tujuh hari kemudian BKR telah berhasil menyusun suatu resolusi yang dikirim kepada Pemerintah yang isinya mendesak Pemerintah supaya segera menertibkan 8 butir usulan untuk menegakkan wibawa Peme-rintah di mata rakyat, antara lain, *retooling* pegawai,

⁵³⁸ Menurut M. Nur El Ibrahimy, dalam naskah aslinya dicantumkan kata pengkhianat, bukan *uleebalang*. Lihat M. Nur El Ibrahimy, *ibid.*, hlm. 173.

⁵³⁹ *Ibid.* hlm. 174.

memberlakukan peme-rintahan militer, dan memaksa Majelis Penimbang untuk mengembalikan harta anak yatim (keluarga *uleebalang*) yang masih mereka kuasai.⁵⁴⁰

Menanggapi persoalan harta *uleebalang* tersebut Gubernur Sumatera Utara, A. Hakim, membentuk sebuah wadah yang bersifat integral dan dibentuk pada setiap kabupaten tanggal 2 September 1952 dengan nama Panitia Pemeriksa Harta eks *Zelbestuurder*. Pada bulan Januari 1953 Gubernur Hakim mengeluarkan pula sepucuk kawat kepada Residen Danubroto yang isinya antara lain, pengembalian harta *uleebalang* yang ada di tangan Majelis Penimbang ke tangan ahli warisnya, perkara-perkara yang ada di luar kompetensi Majelis Penimbang diserahkan kepada Jaksa di Kutaraja, dan pengiriman vonis perkara yang dijatuhkan oleh Majelis Penimbang ke tangan Gubernur.

Perubahan formal tersebut belum dapat menyelesaikan persoalan harta *uleebalang* secara tuntas terutama di Pidie. Persoalannya adalah personil yang duduk dalam lembaga baru tersebut umumnya bekas pemimpin milisi. Hal ini ditambah lagi dengan status harta *uleebalang* yang memang telah habis terpakai atau dijual oleh Majelis Penimbang kepada pihak ketiga. Uangnya sendiri telah diunakan untuk biaya operasional Majelis Penimbang, berbagai keperluan daerah selama Revolusi Kemerdekaan, dan ganti rugi terhadap “Korban Perang” dipihak rakyat berupa santunan dan ganti rugi rumah yang dibakar. Situasi tersebut menimbulkan ketidakpuasan dikalangan ahli waris *uleebalang*. Akibatnya persoalan harta *uleebalang* tidak kunjung selesai menjelang meletusnya DI/TII.⁵⁴¹

Provinsi Aceh sebagai Kebanggaan

Orang-orang Aceh, setelah tahun-tahun awal revolusi telah menyerahkan semuanya bagi pemerintah pusat di Jawa, nyaris tak memiliki apa-apa lagi kecuali kebanggaan akan provinsinya, secuil tanah batas yang tetap mereka kenang. Provinsi Aceh timbul dari pendudukan Jepang, benar-benar sebagai daerah otonom. Pada 1945 ia menjadi salah satu residensi provinsi Sumatera. Walaupun Dewan Perwakilan Provinsi Sumatera—di dalamnya hanya termasuk sepuluh orang Aceh di antara seratus anggotanya—memutuskan dalam sidang yang pertama bahwa Sumatera akan terbagi dalam tiga subprovinsi, antaranya Sumatera Utara, yang terdiri dari Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Timur. Aceh terus berfungsi hampir sebagai daerah yang berdiri sendiri. Pada tahun-tahun kekacauan sesudah masa pendudukan Jepang, Aceh melaksanakan urusan pemerintahan dan militernya sendiri tanpa banyak campur tangan dari luar. Untuk suatu masa singkat antara Agustus 1947 dan Juni 1948, sesudah aksi militer Belanda yang pertama, situasi ini malahan dengan resmi ditegaskan dengan menyatakan Aceh—bersama Langkat dan Tanah Karo—sebagai suatu daerah militer yang dikepalai seorang gubernur militer. Tetapi keadaan berubah, karena struktur pemerintahan Republik Indonesia mengambil garis yang lebih jelas dan pengaruh Pemerintah Pusat dan Provinsi makin bertambah terasa. Pada April 1948 subprovinsi diberi status provinsi, dan provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Timur; gubernur pertamanya ialah S.M. Amin, yang hingga kini menjadi wakil gubernur subprovinsi Sumatera Utara. Karena itu, pada pandangan pertama kelihatannya tak ada yang berubah. Tetapi tindakan ini menunjukkan normalisasi kehidupan pemerintahan dan pengaruh Pemerintah Pusat yang kian bertambah.

Gubernur S.M. Amin dalam pidato pembukaannya pada sidang pertama Dewan Perwakilan Daerah Sumatra Utara menunjukkan pengertian yang mendalam terhadap masalah-masalah yang terkandung sehubungan dengan pembentukan provinsi khusus ini dengan menyatakan: "Perubahan pemerintahan yang akan dilaksanakan ini membawa perubahan prinsipial dan perubahan yang bersifat radikal. Sampai saat ini

⁵⁴⁰ M. Isa Sulaiman, *op. cit.* hlm. 251.

⁵⁴¹ *Ibid.*, hlm. 263-265.

dasar Pemerintahan Daerah adalah kesatuan keresidenan; kesatuan keresidenan ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang terutama bersifat etnologis. Keresidenan Aceh didasarkan atas kesatuan Aceh; Keresidenan Tapanuli atas kesatuan Batak; Keresidenan Sumatera Timur atas kesatuan Melayu. Nyatalah kepada kita bahwa bentukan kesatuan ini didasarkan atas kesatuan kebangsaan yang sempit. Suatu dasar yang sefiarusnya tidak layak lagi dipergunakan di dalam Republik kita. Maka, pembentukan provinsi yang akan kita laksanakan ini tidaklah lagi didasarkan atas dasar-dasar yang lama, tetapi atas dasar baru, yaitu atas dasar-dasar yang mengenai persatuan ekonomi, politik, dan lain lain".⁵⁴² Selanjutnya dikemukakan: "Negara kita berdasar antara lain atas perasaan kebangsaan yang satu, bangsa Indonesia; tidak ada tempat untuk bangsa Aceh, bangsa Batak, ataupun bangsa Melayu. Bagi negara hanyalah satu bangsa, bangsa yang terdiri dari beberapa golongan, yaitu yang berasal dari daerah Tapanuli, daerah Aceh, daerah Sumatera Timur, dan seterusnya. Perbedaan agama bagi kita bukanlah menjadi soal. Kita bebas menganut agama yang kita percayai menurut keyakinan kita; perbedaan agama tidaklah sekali-kali memecah persatuan kebangsaan kita".⁵⁴³ Kedua faktor yang menarik perhatian S.M. Amin dalam pidatonya ini, yaitu perbedaan kesukuan dan keagamaan antara Aceh dan kedua daerah Sumatera Utara lainnya, sesungguhnya memainkan peranan penting dalam tuntutan Aceh untuk otonomi daerah.

Soal pemerintah daerah untuk sementara bergeser ke tempat kedua pentingnya ketika Desember 1948 Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua dan menangkap seluruh Pemerintah Republik di Yogyakarta. Dalam pengaturan pertahanan daerah terhadap serangan Belanda, pembagian pemerintahan Indonesia pada akhir 1948 dibatalkan dan sistem yang berlaku sebelumnya dipergunakan lagi. Menurut sistem akhir ini Sumatera dibagi dalam lima daerah militer, salah satu di antaranya terdiri dari Kabupaten Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Pada 1947, dan demikian pula pada akhir 1948, Tengku Daud Beureueh menjadi gubernur militer dengan pangkat tituler mayor jenderal. Perubahan besar yang menyangkut ini adalah, Daud Beureueh kini menjadi kepala Pemerintahan Sipil maupun Tentara, sedangkan pada 1947 kekuasaan gubernur militer hanya dalam urusan militer dan urusan-urusan sipil yang berhubungan dengan pertahanan.

Pengaturan baru ini secara resmi dikukuhkan Mei 1949 oleh Pemerintah Darurat yang dikepalai Sjafruddin Prawiranegara yang dibentuk setelah ditangkapnya Soekarno dan kabinetnya yang mula-mula berkedudukan di Buktinggi dan kemudian di Banda Aceh. Pada 16 Mei Pemerintah ini mengumumkan, dbalam daerah-daerah militer khusus semua kekuasaan sipil dan militer akan berada pada gubernur militer.⁵⁴⁴ Keesokan harinya jabatan gubernur provinsi dihapuskan di Sumatera, dan berubah menjadi jabatan wakil pemerintah.⁵⁴⁵

Sesudah Kabinet yang lama mulai lagi melaksanakan tugasnya, Juli 1949, setelah para anggotanya dibebaskan Belanda dan Pemerintah Darurat dibubarkan jabatan wakil perdana menteri khusus untuk Sumatera diadakan. Jabatan ini diberikan kepada Sjafruddin Prawiranegara. Mengingat perhubungan antara Jawa dan Sumatera masih sangat sulit, dia diberi kekuasaan luas. Demikianlah dia berhak membuat peraturan yang mempunyai kekuatan hukum sesudah seperlunya minta pendapat Dewan Pertimbangan, yang para anggotanya akan diangkat Presiden. Dia dapat pula mengeluarkan peraturan pemerintah "biasa" tanpa minta pendapat Dewan.⁵⁴⁶

Agustus 1949 Sjafruddin mengunjungi Aceh, dan segera menghadapi sejumlah

⁵⁴² Sumatera Utara, *Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 188-189.

⁵⁴³ *Ibid.*, hlm. 1901.

⁵⁴⁴ Lihat, Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia no. 21.

⁵⁴⁵ Lihat, Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia no. 22.

⁵⁴⁶ Lihat Undang-undang No.2/1949.

masalah di sini, seperti lanjutan kegagalan kup Sajid Ali Alsaqaf dan tuntutan-tuntutan yang keras dari pemimpin-pemimpin PUSA untuk memberikan Aceh status provinsi. Tekanan demikian besarnya hingga dia terpaksa melakukan pembentukan provinsi Aceh. Seperti dinyatakan dalam keterangan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 1953, "provinsi otonom Aceh dibentuk karena keadaan memaksa."⁵⁴⁷

Dengan menggunakan kekuasaan istimewanya, Sjafruddin Prawiranegara pada 17 Desember 1949 mengeluarkan peraturan yang mempunyai kekuatan peraturan pemerintah, yang menyatakan Sumatera Utara terbagi dalam dua provinsi baru: provinsi Aceh (termasuk sebagian Langkat), dan provinsi Tapanuli/Sumatera Timur.⁵⁴⁸ Mukadimah bagi peraturan ini menyatakan, pembentukan provinsi Aceh merupakan masalah yang mendesak, yang tidak mengikuti prosedur hukum biasa. Demikianlah dikemukakan sementara pembentukan provinsi baru seharusnya secara biasa terjadi oleh undang-undang DPR, dalam hal sekarang hal ini telah digantikan oleh suatu peraturan Wakil Perdana Menteri tanpa berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan, pertamatama karena tak ada dewan demikian yang sudah terbentuk, dan kedua, mengingat mendesaknya guna memperbaiki struktur pemerintahan.

Pengangkatan sebagai gubernur provinsi Aceh yang baru pertamatama ditolak Tengku Daud Beureueh, yang menyarankan Teuku Mohammad Daudsjah, yang selama masa jabatan Daud Beureueh sebagai gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo menduduki jabatan residen Aceh, untuk menjabat kedudukan itu. Alasan yang dikemukakannya bagi penolakan itu adalah, ia merasa tidak mungkin menilai kecakapannya sendiri, walaupun alasan yang sebenarnya mungkin adalah, ia meramalkan terjadi banyak penentangan terhadap dia sendiri. Namun, keesokan harinya berubah pikirannya.

Mengingat perkembangan di Aceh dari tahun 1945 sampai 1950, tidaklah mengejutkan bahwa terdapat banyak penentangan terhadap pelantikan Daud Beureueh sebagai gubernur, dan kecurigaan yang keras bahwa pembentukan provinsi Aceh merupakan upaya lain para anggota PUSA untuk mempertahankan dan meluaskan pengaruh mereka di Aceh. Sebaliknya, sangat dapat dipahami bahwa Pemerintah dan para pendukungnya, sesudah proklamasi Daud Beureueh tentang Aceh sebagai daerah *Darul Islam*, seyogyanya menaruh perhatian akan penentangan rakyat terhadap pengangkatan Daud Beureueh sebagai Gubernur Aceh. Keterangan Pemerintah tahun 1953⁵⁴⁹ sebenarnya mengemukakan, reaksi masyarakat Aceh terhadap pengangkatan ini sungguh dingin. Selanjutnya dikemukakan dalam hubungan ini kegagalan upaya Zainuddin, salah seorang usahawan Aceh yang paling terkemuka, untuk membentuk panitia yang menyelenggarakan pesta merayakan pelantikan Daud Beureueh. Rapat yang diadakan untuk membentuk panitia ini sangat sedikit pengunjungnya karena tidak mendapat perhatian dan dukungan.⁵⁵⁰

Di samping penentangan di Aceh sendiri terhadap apa yang dilukiskan S.M. Amin sebagai "pengalihan semua kekuasaan di daerah kepada pihak PUSA, tanpa suatu penilikan atau pengawasan dari penguasa daerah yang lebih tinggi", Pemerintah Pusat

⁵⁴⁷ A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Aceh dan Kegagalan Politik Mr. SM Amin*, (Banda Aceh: Pustaka Murni Hati, 1956), hlm. 87.

⁵⁴⁸ Lihat, Peraturan Wakil Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah no. 8 1949.

⁵⁴⁹ Gelanggang, *Op.cit.*, hlm. 87.

⁵⁵⁰ Bahkan orang seperti Amelz, yang biasanya membela kaum pemberontak *Darul Islam* menyatakan dalam DPR Oktober 1953: "Walau pun saya banyak berbeda pendapat dengan dia di masa lalu, saya—seperti juga banyak sahabat dan musuhnya yang lain— terpaksa mengakui pengaruhnya yang hebat di kalangan rakyat, terutama dalam masa kemerdekaan kita, sejak ia menjadi kepala Jawatan Agama, gubernur militer dan kemudian gubernur Aceh. Tidak disangkal, namanya jatuh sesudah pengangkatannya sebagai gubernur militer dan gubernur Aceh dan dia menjadi sangat tidak disenangi sebagian para pengikutnya. Tetapi menjadi sangat kuat kembali setelah ia berhenti, terutama pada 1952 dan 1953". Lihat Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm 269.

juga bertindak berhati-hati.⁵⁵¹ Ketimbang me-nyokong peraturan Sjafruddin Prawiranegara dan seharusnya memberlakukan undang-undang yang menyatakan Aceh sebagai provinsi terpisah, dibentuk suatu Komisi Penyelidikan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, Susanto Tirtoprodjo, S.H.

Dalam kunjungannya ke Banda Aceh, Komisi ini lalu memberitahukan kepada para pemimpin Aceh bahwa Pemerintah Pusat belum mengambil keputusan apakah Aceh benar-benar menjadi provinsi tersendiri. Tentu saja pengumuman ini tidak diterima dengan baik. PUSA berusaha memperkuat permohonan mereka untuk provinsi terpisah dengan mengancam, jika Aceh menjadi bagian lagi dari provinsi Sumatera Utara mereka tidak akan bertanggung jawab lagi dalam memelihara ketertiban dan keamanan. Di samping itu, seperti juga Amir Husin al Mudjahid mereka berusaha menghimpun dukungan rakyat untuk terus berdirinya provinsi Aceh.⁵⁵² Menurut laporan, Daud Beureueh sendiri berulang kali membayangkan kemungkinan pemberontakan dengan menyatakan secara terang-terangan, dia dan para pendukungnya akan pergi ke pegunungan untuk membangun Aceh dengan cara mereka.⁵⁵³ Walaupun terdapat penentangan pihak Aceh, suatu panitia persiapan yang baru untuk pembentukan provinsi Sumatera Utara, didirikan pada 1 Agustus 1950. Panitia ini diketuai S. Parman Reksodihardjo dan termasuk dalam anggotanya Teuku Mohammad Daudsjah. Lagi-lagi perkembangan politik di luar kekuasaan pihak Aceh yang telah mempengaruhi sikap Pemerintah Pusat terhadap pembagian administratif Sumatera. Satu setengah tahun sebelumnya "aksi militer" Belanda yang kedua telah mendorong Republik untuk menangguk pembentukkan provinsi Sumatera Utara. Sekarang perundingan antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat merupakan alasan untuk membentuk kembali provinsi ini.

Pada 15 Agustus 1950, dengan resmi Republik Indonesia Serikat dihapuskan, dan diproklamasikan Republik Indonesia kesatuan. Hal ini didahului dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan yang menetapkan pembagian administratif Indonesia oleh Pemerintah Indonesia pada hari sebelumnya.⁵⁵⁴ Peraturan ini menyatakan dalam pasal 1-nya, wilayah Indonesia terbagi dalam sepuluh provinsi, satu di antaranya ialah Sumatera Utara. Bersamaan dengan itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang no.5, dengan menarik kembali peraturan Sjafruddin Prawiranegara yang telah membentuk provinsi Aceh.

Dasar hukum bagi pembentukan provinsi Sumatera Utara sangat sulit. Lagi-lagi dibentuk suatu provinsi tidak berdasarkan hukum tetapi dengan peraturan pemerintah. Di samping itu kedua peraturan— barangkali untuk menghilangkan pengaruh penentangan—menunjuk kepada persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia, termasuk suatu persetujuan tanggal 20 Juli mengenai pembagian Sumatera menjadi tiga provinsi. Tetapi seperti dikemukakan,⁵⁵⁵ persetujuan ini tidak pernah diumumkan.

Reaksi Aceh cepat. Sebuah mosi yang menolak penggabungan ke dalam provinsi Sumatera Utara diterima dengan suara bulat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mosi ini dilengkapi pada September dengan suatu keterangan penjelasan yang disusun Pemerintah Daerah Aceh.⁵⁵⁶ Mosi ini dan lebih teristimewa keterangan penjelasannya, sangat panjang lebar? dengan mencantumkan semua alasan untuk memberikan status tersendiri untuk Aceh. Panjang lebar diuraikan kedudukan istimewa dan masalah-masalah khusus daerah ini, dan alasan-alasan dikemukakan tentang perlunya

⁵⁵¹ S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 28.

⁵⁵² S.M. Amin, *Kenang-kenangan dari Masa Lampau*, (1975), hlm. 30.

⁵⁵³ A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Aceh dan Kegagalan Politik Mr. SM Amin*, (Banda Aceh: Pustaka Murni Hati, 1956), hlm. 13.

⁵⁵⁴ Lihat, Peraturan Pemerintah no.21, 1950.

⁵⁵⁵ C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993), hlm. 263.

⁵⁵⁶ *Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm.400-409.

memperlakukan Aceh berbeda dalam banyak hal.

Keadaan istimewa Aceh dan masalah-masalah khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan agama membedakannya dari bagian lain Sumatera Utara, demikian dikemukakan. Daerahnya lain bukan saja karena sifat khusus masalah-masalah ini, tetapi juga karena ukuran besarnya. Aceh harus menghadapi keterbelakangan pendidikan yang amat besar, sedangkan sistem irigasi dan jalan-jalan raya buruk sekali, dan industri perikanan sangat membutuhkan perbaikan. Seterusnya dinyatakan, masalah-masalahnya begitu hebat untuk bisa dihadapi secara efektif oleh pemerintahan kabupaten, maka memerlukan perhatian pemerintah tingkat provinsi. Bersamaan dengan itu ditekankan perlunya bagi orang yang menanggulangi masalah-masalah ini untuk menyadari dan mengenal keadaan khusus Aceh, dengan mengemukakan kekhawatiran bahwa bila Aceh menjadi bagian dari Sumatera Utara syarat-syarat ini tidak terpenuhi, hingga akibatnya persoalan-persoalannya tidak akan dihadapi secara tepat. Pernyataan itu mengakhiri dengan ancaman, "bila Aceh tidak menjadi provinsi tersendiri di bawah kedaulatan Pemerintah

Pusat, kami, Putra-putra Aceh yang dewasa ini menduduki jabatan dalam pemerintahan dan semua yang menganut cita-cita yang sama, pada hari Pemerintah Pusat menolak tuntutan-tuntutan tersebut tadi akan meninggalkan lembaga-lembaga pemerintah dan akan minta mengembalikan mandat kami oleh kepala Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat". Namun, Daud Beureueh mengisyaratkan, orang Aceh bukanlah orang Maluku, para pegawai negeri hanyalah mengundurkan diri dan Aceh tidak akan memproklamasikan diri menjadi negara tersendiri.⁵⁵⁷

Ancaman ini diulangi pada saat kunjungan sebuah delegasi Pemerintah Pusat dari Jakarta yang diketuai Menteri Dalam Negeri, Assaat, pada akhir September. Pada kesempatan ini para pamong praja Aceh mengeluarkan pernyataan pada penutupan suatu pertemuan antara delegasi dan mereka sendiri yang membicarakan status Aceh bahwa bila Pemerintah Pusat terus menolak mengakui tuntutan rakyat Aceh untuk otonomi dalam arti yang seluas-luasnya, mereka akan meletakkan jabatan, demikian pula sejumlah besar bawahan mereka. Delegasi Assaat gagal bicara tentang soal itu dengan pemimpin-pemimpin daerah. Demikian juga Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta tidak berhasil dalam hal ini. pada kunjungannya ke Banda Aceh, November 1950.

Akhirnya tercapai penyelesaian pada Januari 1951 oleh Perdana Menteri ketika itu, Natsir. Pada 23 Januari dia mengucapkan pidato radio di Banda Aceh dengan mengumumkan tercapainya persetujuan mengenai persoalan ini. Nalsir menyatakan di sini, pembentukan provinsi Aceh tidak lagi dianggap "saudara-saudara kita di Aceh ini sebagai suatu palang pintu yang menutup segala kemungkinan lain".⁵⁵⁸ Tengku Daud Beureueh mengeluarkan pernyataan tentang persetujuan yang dicapai pada waktu yang sama. Pernyataan ini mengemukakan sejumlah sebab mengapa Aceh menghentikan perlawanannya terhadap penggabungan ke dalam provinsi Sumatera Utara, termasuk kenyataan bahwa Pemerintah Pusat tidak menolak tuntutan Aceh untuk otonomi, dan persetujuan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam kerangka seluruh bangsa, dan Aceh tidak akan merintang pelaksanaan pemerintahan Sumatera Utara. Bersamaan dengan itu dinyatakan, perjuangan untuk otonomi akan dilanjutkan dan bahwa "niat perletakan jabatan secara non kooperatif sebagai suatu syarat bila tuntutan mendapat otonomi buat daerah Aceh kalau tidak dipenuhi, masih tetap dipegang penuh".⁵⁵⁹

Pada 25 Januari 1951 Abdul Hakim dilantik sebagai gubernur Sumatera Utara, dengan Medan sebagai ibukota Pemerintah Provinsi; ke kota inilah pegawai bekas provinsi Aceh kemudian harus pindah. Untuk daerah Aceh diangkat seorang residen-

⁵⁵⁷ C. van Dijk, *Op.cit.*, hlm. 259.

⁵⁵⁸ *Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 422-430.

⁵⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 430-431.

koordinator untuk mengawasi terlaksananya pemerintahan setempat.

Pembentukan jabatan yang belakangan pada mulanya menimbulkan sedikit kesalahpahaman. Daud Beureueh menyatakan tidak diberitahu mengenai ini. Bahkan mungkin kedudukan ini dimaksudkan Pemerintah baginya, dengan atau tanpa diketahuinya. Bagaimanapun, semua surat yang dialamatkan kepada residen koordinator dikembalikan ke Medan tanpa dibuka atas perintah Daud Beureueh.⁵⁶⁰ Penetapan resmi R.M.D. Danubroto dalam jabatan residen koordinator mengakhiri secara definitif keadaan ini. Lalu Daud Beureueh dipanggil ke Jakarta oleh Pemerintah Pusat untuk diangkat sebagai gubernur yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, walaupun tak pernah ia pergi ke Jakarta untuk menerima jabatan ini. Bersamaan dengan itu sejumlah perubahan lain dilakukan dalam Pemerintahan Sipil di Aceh—umpamanya sejumlah bupati diganti— tanpa menimbulkan penentangan untuk sementara waktu.

Persiapan-Persiapan Intelektual untuk Pemberontakan

Darul Islam, sebagaimana akan dibahas dalam bab-bab buku ini, adalah gerakan intelektual. Intelektualitas adalah bekas terbanyak yang mereka bawa, ketimbang senjata. Menurut M. Nur El Ibrahimy dengan berlandaskan pada pernyataan Tgk. M. Daud Beureueh yang dia peroleh dari Ayah Gani sebelum peristiwa meletus, menyatakan bahwa Peristiwa DI/TII Aceh yang meletus tanggal 21 September 1953 dilakukan dengan persiapan yang tidak matang. Ketidakmatangan ini dilihat dari aspek persenjataan, pembiayaan dan pendukung yang menjadi sumber bantuan biaya dan senjata selanjutnya, serta gerakan yang dilakukan secara tidak serempak.⁵⁶¹ Untuk melihat kebenaran pendapat tersebut selanjutnya akan dipaparkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok DI/TII menjelang terjadinya peristiwa.

Sebenarnya, kegiatan-kegiatan untuk menggalang solidaritas dan kekutan antar anggota mantan pejuang (milisi) telah dilakukan sejak tahun 1953. Hal ini didasari pada kejadian-kejadian terakhir yang menimpa kelompok mereka. Tidak lama setelah kena razia, tanggal 1 Maret 1952 Tgk. M. Daud Beureueh yang tidak melaksanakan tugas kepegawaian setelah masa cuti 6 bulan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui siaran RRI. Walaupun 14 bulan kemudian status tersebut dipulihkan, tindakan tersebut sangat melukai perasaan pendukung otonomi. Hal itu ditambah lagi tindakan Gubernur Hakim yang memerintahkan bawahannya Bupati Pidie T.A. Hasan untuk mengambil mobil dinas buick merah dari Tgk. Daud Beureueh agar dibawa ke Medan. Sebaliknya, pemerintah memberi kemudahan kepada lawan politik mereka uleebalang, misalnya T. Chik M. Johan Alamsyah dan T. Amat Aree⁵⁶² memperoleh tunjangan pensiun dari Kementerian Dalam Negeri. Demikian juga ketujuh orang pemuka Gerakan Said Ali yang diusir ke luar Aceh, sejak 1952 dicabut hukuman bersyarat dan boleh kembali ke Aceh.⁵⁶³

Kejadian-kejadian tersebut bagi pendukung otonomi dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif dan tidak dihargai jasa perjuangan yang telah mereka lakukan untuk Republik.⁵⁶⁴ Kegiatan penggalangan solidaritas, kekuatan dan menyusun strategi perjuangan dilakukan melalui organisasi Pusa dan Pemuda Pusa yang merupakan wadah tradisional perjuangan mereka. Sebulan setelah seluruh pemimpin mereka diepas dari tahanan, Pusa dan Pemuda Pusa Pidie menyelenggarakan sebuah Konperensi di gedung SMI Sigli tanggal 2 April 1952, yang dihadiri juga oleh Tgk. M. Daud Beureueh, T.A. Hasan, dan A. Gani Usman. Selanjutnya, para pemimpin Pusa

⁵⁶⁰ C. van Dijk, *Op.cit.*, hlm. 78.

⁵⁶¹ M. Nur El Ibrahimy, *op.cit.*, hlm. 27.

⁵⁶² Keduanya mantan *Zelbestuurder*.

⁵⁶³ M. Isa Sulaiman, *op. cit.* hlm. 269-270.

⁵⁶⁴ Hasan Saleh, *op. cit.*, hlm. 147-148.

memutuskan akan perlunya kependuan dengan nama Pandu Islam yang berfungsi sebagai sayap perjuangan bersenjata tanggal 2 Maret 1952. Oleh karena Kependuan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat, maka dibuka cabang-cabangnya di kabupaten-kabupaten. Menjelang pemberontakan diperkirakan Pandu Islam telah memiliki sekitar 4.000 anggota. Mereka menurut T. A. Hasan mendapat latihan tentara mengenai cara menyerbu dan cara bertahan siang dan malam, oleh mantan tentara. Komisariat keresidenan berada di bawah M. Ali Piyeung (mantan Letnan CPM), A. Gani Mutiara (mantan Kapten TRI), dan A. Gani Usman (Kepala SMI).⁵⁶⁵

Sambil menempa Pandu Islam para pemimpin PUSA mencurahkan perhatian mereka kepada Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo yang meletus di Jawa Barat 7 Agustus 1947. Kontak dengan Kartosuwiryo terbukti dengan kedatangan seorang kurir Darul Islam Mustafa alias A. Fatah ke Aceh bertepatan saat Konperensi PUSA dan Pemuda PUSA di Langsa tanggal 25-29 April 1953. Konperensi yang dihadiri tokoh-tokoh PUSA yang sangat berpengaruh, antara lain oleh Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. Amir Hoesin Al-Mudjahid, T.M. Amin, dan A. Gani Usman, juga dihadiri oleh 300 utusan dan sekitar 3.000 hadirin. Di samping kritikan, agitasi dan provokasi terhadap Pemerintah, konperensi tersebut juga membicarakan pembentukan Biro Perjuangan Aceh (BPA) dan korespondensi dengan Imam Kartosuwiryo. BPA yang dipimpin oleh Husin Yusuf dan dibantu oleh Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. Amir Hoesin Al-Mudjahid, dan Ali Hasjmy, merupakan organisasi yang memayungi rekan seperjuangan mereka yang telah berjuang pada masa Revolusi Kemerdekaan. Berkenaan korespondensi dengan Imam Kartosuwiryo mereka menunjuk Ilyas Leube mendampingi Mustafa membawa surat Tgk. M. Daud Beureueh.⁵⁶⁶

Keberangkatan Ilyas Leube dengan Mustafa tidak berhasil karena setibanya di Jakarta tanggal 7 Mei 1953 Mustafa ditangkap aparat keamanan sedangkan Ilyas Leube berhasil meloloskan diri. Penangkapan Mustafa tersebut menurut M. Nur El. Ibrahimy mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap meletusnya Peristiwa DI/TII Aceh. Tertangkapnya Mustafa menyebabkan kegelisahan yang sangat besar pemimpin dan rakyat Aceh karena dia telah membuka perhubungan Tgk. Daud Beureueh dengan Kartosuwiryo dan telah menyerahkan kepada Kejaksaan di Jakarta "surat pengangkatan" Tgk. M. Daud Beureueh oleh Kartosuwiryo sebagai Gubernur Militer Darul Islam di Aceh.⁵⁶⁷ Meskipun demikian, setelah kegagalan itu kontak dilanjutkan oleh M. Yahya Sulaiman dan Tgk. Sulaiman Mahmud, dan juga dengan memakai jasa perantau Aceh sebagai kurir seperti Amin Basyah Kembang Tanjong dan Ismail. Amin Basyah Kembang Tanjong menurut Hasan Aly malah berhasil melakukan kontak dengan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.⁵⁶⁸

Untuk mematangkan persiapan pemberontakan, Tgk. M. Daud Beureueh, Hasan Aly, Zaini Bakri, Sulaiman Daud dan Tgk. Abdul Wahab Seulimum sejak Maret 1953 berkali-kali melakukan pertemuan di Kutaraja, Lameulo, dan Langsa. Dalam kaitannya dengan itu, Zainal Abidin Tiro dan Tgk. Sulaiman Mahmud pada pertengahan 1953 telah melakukan dialog serius dengan tiga perwira Aceh terkemuka, yaitu: (1) Mayor Hasballah Haji, Koman-dan Komando Militer Kota Besar (KMKB) Medan, (2) Kapten Hasan Saleh dan, (3) Komisaris Polisi M. Insyah di rumah Mayor Hasballah Haji tentang rencana gerakan mereka. Rumah Syekh Marhaban juga didatangi oleh pemimpin PUSA untuk mengajak bergabung. Tgk. Amir Husin Al Mudjahid berkunjung ke Medan guna mengadakan kontak dengan pemuda Aceh di sana.

Kontak-kontak tersebut membuahkan hasil, Hasan Aly misalnya malah telah bertindak lebih jauh untuk mengumpulkan rekan-rekannya di Sumatera Timur guna memperoleh persetujuan akhir. Dengan ditemani A.R. Hanafi, pegawai Kantor Agama

⁵⁶⁵ M. Isa Sulaiman, *op. cit.* hlm. 271.

⁵⁶⁶ *Ibid.* hlm. 273.

⁵⁶⁷ M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.* hlm. 22.

⁵⁶⁸ *Ibid.*

Aceh Timur menghimpun rekan-rekannya di rumah A. R. Hajad, Bupati Langkat yang berasal dari Blang Keujeuren, di Binjai. Tidak kurang dari 20 orang pemuka Aceh baik sipil maupun militer yang hadir dalam pertemuan tersebut, seperti Syekh Marhaban, Letnan Usman Nyak Gade, Mayor Hasballah Haji, dan Kapten Hasan Saleh. Pertemuan tersebut bertujuan mendapatkan ketegasan dari yang hadir karena hari H pemberontakan yang direncanakan tanggal 1 Muharam atau 8 September sudah cukup dekat. Dalam kesempatan itu pula Hasan Aly mengajak dua perwira senior Mayor Hasballah Haji dan Kapten Hasan Saleh berbicara secara rahasia di kamar tidur A. R. Hajad. Persoalan yang dibicarakan adalah tata cara melakukan desersi dan sekaligus menetapkan hari dimulainya pemberontakan. Agar desersi mereka berjalan mulus, mereka sepakat pemberontakan dimulai tanggal 21 September 1953 bertepatan dengan pembukaan PON III di kota Medan.⁵⁶⁹

Dalam usaha mendapatkan dukungan dari rakyat luas dan memompa semangat pengikut para pemimpin pendukung otonomi melakukan kritikan-kritikan kepada Pemerintah melalui pidato-pidato dalam rapat-rapat umum yang sengaja diadakan. Menurut A. H. Geulanggang⁵⁷⁰ pidato-pidato tersebut berisikan agitasi terhadap dekadensi moral yang dibiarkan oleh Pemerintah Pancasila yang mengakibatkan agama Islam terabaikan. Akibatnya tiap selesai mengikuti rapat umum tersebut terbayang dalam pikiran hadirin bahwa Negara Islam yang dicita-citakan telah berdiri. Selanjutnya mereka melakukan *bai'at* (sumpah) terhadap hadirin agar seiya-sekata dalam mewujudkan Negara Islam.⁵⁷¹

Di tengah propaganda-propaganda kepada rakyat untuk mendukung rencana mereka yang dilakukan oleh penuntut otonomi dengan melakukan agitasi kepada Pemerintah yang menurut mereka tidak sesuai dengan Islam dan cenderung kepada komunis, terjadi dua peristiwa yang menurut M. Nur El Ibrahimy, di samping kasus tetangkapnya Mustafa, merupakan faktor yang semakin mempercepat meletusnya Peristiwa DI/TII Aceh, yaitu latihan besar-besaran Mobrig di Aceh dan bocornya rahasia “les hitam” di Medan. Latihan Mobrig besar-besaran yang dilakukan di Aceh saat keadaan semakin tegang dianggap oleh para pemimpin Aceh sebagai suatu pameran kekuatan dan juga sebagai suatu tantangan terhadap tuntutan-tuntutan rakyat Aceh. Latihan Mobrig yang demonstratif itu sangat berlawanan dengan laporan para pejabat Aceh yang mengatakan bahwa situasi daerah mereka aman. Suasana semakin tegang dengan adanya latihan yang dilakukan oleh Pandu Islam yang berjumlah sekitar 4.000 personil di seluruh Aceh yang menurut M. Nur El Ibrahimy mungkin sebagai jawaban terhadap tantangan manuver Mobrig tersebut.⁵⁷²

Adapun “les hitam” menurut M. Nur El Ibrahimy merupakan daftar yang dibawa oleh Jaksa Tinggi Sunarjo dari Jakarta. Di dalamnya disebutkan nama-nama lebih dari 300 orang pemimpin Aceh yang akan ditangkap. Menurutnya nama-nama tersebut didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Mustafa, yang ditangkap sebelumnya. Dia menambahkan bahwa “les hitam” tersebut sengaja dibocorkan oleh pihak tertentu dan sengaja pula disampaikan kepada Tgk. M. Daud Beureueh yang namanya beserta teman-teman seperjuangan tercatat sebagai orang-orang yang terkemuka di dalam “les hitam” itu.⁵⁷³

“Les hitam” tersebut sebenarnya tidak ada atau tidak pernah dibuat oleh Jaksa Agung sebagaimana diungkapkan oleh M. Nur El Ibrahimy yang didasari pada pernyataan Pemerintah. Dalam jawaban Pemerintah yang diberikan oleh Perdana

⁵⁶⁹ M. Isa Sulaiman, *op. cit.* hlm. 177-178.

⁵⁷⁰ A.H. Geulanggang adalah nama samaran T.A. Hasan, mantan Bupati Pidie yang pada tahun 1956 diangkat menjadi Menteri Keuangan dan Kesehatan NII, Negara Bahagian Aceh.

⁵⁷¹ A.H. Geulanggang, *Rahasia Pemberontakan di Aceh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin*, (Tanpa tempat penerbit: Pustaka Murnihati, 1956), hlm. 9.

⁵⁷² M. Nur El Ibrahimy, *loc. cit.*

⁵⁷³ *Ibid.* hlm. 23.

Menteri Ali Sostroamidjojo tanggal 2 Nopember 1953 dalam rapat paripurna DPR-RI atas pertanyaan anggota DPR mengenai "Peristiwa Daud Beureueh" disebutkan bahwa "mengenai pertanyaan tentang penyusunan daftar penangkapan kurang lebih 300 orang, di sini Pemerintah hendak menerangkan bahwa Jaksa Agung tidak pernah menyusun daftar tersebut". Berdasarkan keterangan tersebut M. Nur El Ibrahimy berkesimpulan bahwa pembuatan dan sekaligus pembocoran "les hitam" tersebut sengaja dilakukan oleh lawan-lawan politik, termasuk Jaksa Tinggi Sunarjo, yang dengan sengaja ingin menjebak Tgk. M. Daud Beureueh dan kawan-kawannya. Meskipun "les hitam" tersebut tidak benar⁵⁷⁴ namun pengaruhnya sangat besar terhadap menciptakan keresahan dan mematangkan rencana pemberontakan.⁵⁷⁵

Menggumpalnya Kekecewaan

Masa tenang di Aceh hasil penyelesaian yang diusahakan Natsir dan Daud Beureueh tidak berlangsung lama. Sejak awal April tampak tanda-tanda per-tama keresahan baru, ketika suatu gerakan anti-PUSA baru memperoleh mo-mentum. Pada 8 April 1951 di Aceh dibentuk Badan Keinsjafan Rakyat (BKR). Badan ini dalam banyak hal mirip dengan gerakan Sajid Ali Alsaqaf. Kelihat-annya semua tujuannya adalah untuk menegakkan pemerintah yang tidak korup dan berkesanggupan, namun sasaran pokok adalah pemimpin-pemimpin PUSA. Seperti juga dalam gerakan Sajid Ali Alsaqaf, *uleebalang* dan alim ulama turut serta di dalamnya. Tujuan-tujuan BKR yang dinyatakan adalah untuk membantu Pemerintah, "di mana perlu", dalam memberikan pene-rangan tentang kebijaksanaannya dan memperkuat hubungannya dengan rakyat.

Program yang lebih konkrit diuraikan dalam suatu resolusi yang diterima BKR pada 15 April 1951. Resolusi ini mulai dengan pernyataan bahwa rakyat Aceh telah jadi terasing dari Pemerintah, "atau, lebih tepat, dari mayoritas mereka yang menamakan dirinya wakil atau pemimpin rakyat, yang pada saat ini menduduki kursi dalam Pemerintahan Aceh, dan bahwa kesadaran rakyat dalam hal ini telah menjadi lebih cerah karena pengalaman mereka selama ini pemimpin-pemimpin ini berjuang untuk cita-cita mereka sendiri dan bersaing dalam menumpuk kekayaan pribadi".

Sebagai suatu jalan untuk memulihkan kepercayaan rakyat, BKR men-desak Pemerintah memecat pejabat-pejabat yang merintang pelaksanaan keputusan Pemerintah atau mereka yang korup atau tidak mampu. Selanjut-nya mereka mengimbau Pemerintah untuk memberikan bukti, Pemerintah benar-benar berusaha melindungi para warga negara dan harta miliknya. Langkah-langkah yang diusulkan BKR termasuk pemulihan harta kekayaan yang diurus Dewan-dewan Penimbang kepada anak-anak yatim piatu *uleebalang* almarhum, dan penjelasan tentang sikap Pemerintah mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama "revolusi sosial" dan a'kibatnya. Tambahan lagi BKR memohon kepada Pemerintah agar memecat panitia—yang dinyatakan dikuasai PUSA—yang dibentuk guna persiapan pemilihan umum di Aceh dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Akhirnya, bila perlu, Pemerintah Sipil hendaknya diganti oleh pemerintahan militer.⁵⁷⁶ Walaupun resolusi BKR tidak menyebut nama-nama, jelas ia tertuju pada PUSA dan pemimpin-pemimpinnya.

Baik BKR maupun PUSA mempunyai cukup kesempatan untuk menarik perhatian umum terhadap keinginannya selama kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh. Ketika tiba di Banda Aceh 30 Juli 1951, ia disambut para demonstiran PUSA maupun BKR.

⁵⁷⁴ Tidak benarnya "les hitam" baru diketahui setelah pemberontakan sudah terjadi. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah kurang tanggap terhadap kondisi yang terjadi di Aceh saat itu.

⁵⁷⁵ *Ibid.*

⁵⁷⁶ *Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 439-440; SM Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 267-269.

Tulisan-tulisan BKR berbunyi: "Jangan rakyat saja yang diadili, tetapi juga penyeleweng-penyeleweng milik rakyat", "Pencuri ayam masuk penjara, pencuri-pencuri besar tetap dalam jabatannya", dan "Tengku Daud Beureueh, penghisap darah rakyat". Semua slogan ini jelas menyinggung praktek-praktek jelek yang dinyatakan dilakukan kalangan pemimpin-pemimpin Aceh, yang memanfaatkan jabatannya sendiri untuk memperoleh kekayaan pribadi dan menutupi kejahatan-kejahatannya.

Para demonstran PUSA membawa papan bertuliskan seperti "Aceh jangan diperlakukan sebagai anak tiri", dan "Kami cinta Presiden, tetapi kami lebih mencintai agama". Ada juga slogan "Menudju negara Islam", sebuah pernyataan sangat berani dari kalangan ulama dan pemuda PUSA.⁵⁷⁷ Dengan slogan akhir ini, para demonstran PUSA menyatakan ketidakpercayaannya kepada Soekarno, yang mereka anggap telah mengkhianati Islam dengan mempropagandakan Pancasila, ketimbang Islam, sebagai dasar Negara Indonesia. Bagi kalangan PUSA, yang sebagian mereka sudah menerima dakwah dari DI Kartosoewirjo, menyebut Soekarno sebagai "Abu-Lahab Indonesia." Bahkan, SM Kartosoewirjo sendiri memberikan tanggapan yang sangat keras terhadap apa-apa yang diaucapkan Bung Karno dalam pidatonya di Masjid Raya Kotaradja bahwa rukun Islam harus ditambah dengan 2 rukun lagi yaitu *keadilan sosial* dan *kemanusiaan*. Upaya untuk mencocok-cockkan Pancasila dengan Islam ini mengundang marah banyak orang Aceh. Dan, SM Kartosoewirjo dengan sangat cekatan memanfaatkan situasi ini untuk program dakwah Darul Islam. Soekarno yang disebut sebagai "Abu-Lahab Indonesia" ini dengan "sifat dan jiwa penipu, pengchjianat, dengan perantaraan lidahnja jang berbisa (beratjun) itu, maka ia tjoba2 menina-bobokkan kawan2 kita di Atjeh, dengan kata2 dan tjeritera, jang "memikat hati dan memberi harapan."⁵⁷⁸ Kedatangan Soekarno ini kemudian harus dikoreksi dengan perjalanan Hatta, dengan maksud yang lebih baik: "melunakkan kawan2 kita seperdjuangan sutji di Atjeh".⁵⁷⁹ Sebutan "kawan2 kita seperdjuangan sutji di Atjeh" menunjukkan bahwa S.M. Kartosoewirjo sudah memiliki jaringan (networks) yang kuat di Aceh sebelum terjadinya pemberontakan.

Persoalan berikutnya yang meluapkan perasaan di Aceh adalah penangkapan besar-besaran yang dilakukan di seluruh Indonesia. Kabinet yang berkuasa ketika itu, Kabinet koalisi Masyumi-PNI yang dipimpin Sukiman, bercirikan sikap anti - komunis yang keras. Ini mencapai puncaknya dalam apa yang disebut "razia Agustus". Dengan dalih terungkapnya suatu komplotan untuk menggulingkan Pemerintah, kira-kira 15.000 orang ditangkap. Di dalamnya termasuk sejumlah politisi Masjumi, rupanya karena melakukan hubungan dengan kelompok-kelompok *Darul Islam*. Tetapi seperti dikemukakan⁵⁸⁰: "Rupanya jumlah terbesar mereka yang ditangkap adalah orang Cina atau pendukung PKI". Pilihan orang-orang yang akan ditangkap dilakukan tergesa-gesa, banyak diserahkan kepada kebijaksanaan para pejabat setempat, terutama para bupati, untuk menangkap siapa yang mereka anggap berbahaya bagi keamanan di daerah mereka.⁵⁸¹ Penilaiannya pada umumnya tepat. Benar-benar banyak tergantung pada kebijaksanaan para penguasa setempat. Tetapi justru faktor inilah yang membedakan penangkapan-penangkapan di Aceh dengan penangkapan di bagian lain Indonesia.

Seperti juga di tempat lain, para penguasa militer keras anti-komunis. Tetapi berbeda dengan penguasa di bagian-bagian lain di Indonesia, mereka merasa masih menghadapi musuh yang lebih berbahaya: PUSA. Hal lain yang membedakan Aceh ialah tajamnya pertentangan kalangan militer provinsi Sumatera Utara dengan pemerintahan sipil di Aceh. Yang belakangan ini, walaupun terdapat perubahan-perubahan

⁵⁷⁷ Tentang hal ini, lihat juga "Statement Pemerintah NII", 3 September 1953, hlm. 7.

⁵⁷⁸ *Ibid.*

⁵⁷⁹ *Loc.cit.*

⁵⁸⁰ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1968), hlm. 189.

⁵⁸¹ Feith, *Ibid.*, hlm. 190.

sebelumnya dalam personil, masih berorientasi PUSA. Akibatnya, justru pada pokoknya anggota-anggota PUSA ketimbang anggota-anggota atau para pendukung partai Komunis, PKI, yang ditangkap atau diinterogasi di Aceh. Di dalamnya termasuk beberapa tokoh puncak PUSA, seperti Daud Beureueh, Tengku Sulaiman Daud, bupati Pidie ketika itu, dan Tengku Hasan Hanafiah, kepala Kantor Agama di Aceh Barat. Selanjutnya, dinyatakan oleh Dewan Penimbang Pidie, anggotaanggotanya merupakan sasaran khusus razia Agustus.⁵⁸² Sesungguhnya, penangkapan-penangkapan ini ditafsirkan para korbannya sebagai upaya uleebalang melakukan pembalasan.

Karena masih berlaku keadaan Darurat Perang (SOB) di Sumatera Utara, penangkapan dilaksanakan Komando Militer Daerah. Mereka yang ditangkap dilukiskan dalam suatu monografi Sumatera Utara⁵⁸³ sebagai "anasir-anasir yang mengganggu keamanan dan ketenteraman, dan anasir-anasir yang melakukan perbuatan yang bersifat a-nasional atau merugikan kekuasaan Pemerintah". Tentara di Sumatera Utara di pihaknya menyangkal dengan keras bertindak atas kekuasaan sendiri, tanpa perintah dari atau tidak sepengetahuan sebelumnya dari para atasannya.

Dalam keadaan kemudian lagi-lagi kesulitan di Aceh dipandang dari segi konflik yang telah lama berlangsung antara ulama dan *uleebalang*. Terdapat perbedaan antara kalangan militer dan pemerintah sipil di Keresidenan Aceh, yang mengikuti garis yang sama antara *uleebalang* dan ulama atau PUSA. Dalam penafsiran ini, yang menambah ketegangan pula, pemerintah sipil masih didominasi PUSA, sedangkan Tentara kian merupakan alat *uleebalang*. Kekhawatiran semakin terjadi di Aceh, terutama sesudah Soekarno menyatakan dalam majalah *Time*, terbitan Amerika Serikat, bahwa "DI Kartosoewirjo sekarang tidak hanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah sebelah Barat saja, melainkan sudah mencoba melancarkan infiltrasi ke wilayah-wilayah Jawa Timur, Sumatera Utara (mungkin maksudnya adalah Aceh), Sumatera Selatan, Kalimantan dan Sulawesi."⁵⁸⁴ Bagi Kartosoewirjo, berita ini menunjukkan suatu pengakuan bahwa Negara Islam Indonesia semakin hari makin bertambah kuat dan meluas dan juga bahwa proses keruntuhan RIK dipertontonkan dimedan internasional.⁵⁸⁵

Pada 1953, selama perdebatan parlemen tentang pemberontakan *Darul Islam* di Aceh, penangkapan-penangkapan oleh Tentara dipertahankan anggota PNI Abdullah Jusuf (Abdullat Yusuf), yang juga secara tak langsung menunjuk kepada perpecahan antara Tentara dan pemerintahan sipil Sumatera Utara. Dengan mengancam pemerintahan sipil karena mengabaikan keluhan-keluhan yang disampaikan dan informasi yang diteruskan kepadanya mengenai kegiatan-kegiatan Daud Beureueh dan pemimpin-pemimpin PUSA lainnya pada awal tahun 1950-an, ia memuji Tentara yang merupakan lembaga satu-satunya yang bertindak berdasarkan informasi ini dan terus-menerus merintangai rencana PUSA.⁵⁸⁶ Seorang juru bicara lain untuk partai-partai sekuler, anggota PKI Sarwono S. Sutardjo, juga menyalahkan bahwa pemberontakan ini sebagiannya karena kelalaian pemerintahan sipil. Menurut dia, gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim, "lebih menaruh kepercayaan pada para bawahannya di Aceh— yang dikenal sebagai pembela PUSA/Masyumi — ketimbang fakta-fakta yang sesungguhnya..."⁵⁸⁷

Para anggota Parlemen yang mewakili partai-partai Islam, ketimbang menekankan hubungan antara PUSA dan pemerintahan sipil, seperti Abdullah Jusuf dan Sarwono S. Sutardjo, meletakkan tekanan pada hubungan *uleebalang* atau Badan Keinsyafan Rakyat dengan pihak militer. Seorang bekas sekretaris PUSA, Nur el Ibrahimy,

⁵⁸² *Ibid.*, hlm. 138.

⁵⁸³ *Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm.448.

⁵⁸⁴ *Time*, 5 Februari 1953.

⁵⁸⁵ "Statemen Pemerintah Negara Islam Indonesia", 3 September 1953.

⁵⁸⁶ Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm.278.

⁵⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 279.

umpamanya, mengajukan tuduhan, BKR secara aktif telah bekerja sama dengan Tentara selama penangkapan-penangkapan Agustus,⁵⁸⁸ Amelz juga menyinggung hubungan antara Tentara dan uleebalang. Ia menyatakan, ketidakpercayaan rakyat kepada Tentara telah bertambah karena melihat, Tentara dan Polisi mengadakan hubungan dengan orang-orang yang mereka namakan penghalang kemerdekaan.⁵⁸⁹

Namun, dengan mengidentifikasi pemerintahan sipil dengan PUSA dan pihak militer dengan uleebalang orang mengabaikan kerumitan dari masalah-masalah yang diliputinya. Konflik di Aceh bukanlah semata-mata hasil suatu perjuangan kekuasaan antara dua kelas sosial ulama dan uleebalang. Tuntutan Aceh untuk otonomi daerah dan usaha-usaha Pemerintah Pusat untuk meluaskan pengaruhnya juga memainkan peranan di sini. Pemerintah Pusat, dalam upayanya meluaskan pengaruhnya, memandang musuh-musuh PUSA sebagai kemungkinan sekutu, dan berusaha mengurangi cengkaman PUSA atas pemerintahan sipil dan Tentara di daerah ini. Dalam usahanya yang akhir mereka jauh lebih berhasil dengan Tentara ketimbang dengan pemerintahan sipil. Walaupun terdapat sejumlah pegawai negeri sipil senior yang digantikan sesudah provinsi Sumatera Utara dibentuk, pada tingkat lebih rendah Pemerintah gagal dalam menegakkan pengawasannya atas pemerintahan sipil dengan mengangkat pejabat-pejabat pro-pemerintah yang loyal. Dalam Tentara sebaliknya, masalahnya lebih mudah ditanggulangi. Pemerintah berhasil dalam membersihkan Tentara dari pengaruh PUSA melalui kebijaksanaan penggantian, pembubaran satuan-satuan tentara khusus, dan penempatan pasukan dari daerah-daerah lain di Aceh sudah sejak 1950.

Karena itu kesetiaan Tentara di Aceh pada saat ini jauh berbeda dari kesetiaan dalam masa segera sesudah revolusi sosial berlangsung. Karena tak lama sesudah digantikannya Sjammaun Gaharu oleh Husin Jusuf sebagai komandan Divisi V, Divisi Tentara Republik di Aceh, menyusuli kup Amir Husin al Mudjahid kekuasaan PUSA keras sekali. Kemudian Husin Jusuf menjadi komandan Divisi Gajah I, demikian Divisi V dinamakan pada Februari 1947, dan sebulan kemudian komandan Divisi X, yang di dalamnya Divisi Gajah I bergabung dengan Divisi Gajah II di Sumatera Timur, dan Kolonel Sitompul, seorang bekas komandan Divisi Gajah II, diangkat menjadi kepala stafnya.⁵⁹⁰

Pada Juni 1947 diumumkan perintah tentang satuan gerilya "liar" yang begitu banyak yang seharusnya digabungkan ke dalam Tentara Republik. Keputusan ini disambut dengan sikap hati-hati—kalaupun tidak penolakan terang-terangan—oleh organisasi gerilya Aceh, yang pada mulanya sangat menentang integrasi demikian. Sebenarnya penentangan mereka demikian keras, sehingga, seperti dikemukakan Nur al Ibrahimy kemudian di DPR,⁵⁹¹ ada kekhawatiran terjadi pertumpahan darah. Baru sesudah upaya dengan perantaraan Daud Beureueh, ketika itu masih gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, organisasi-organisasi gerilya mengalah. Perundingan mengenai integrasi mulai pada Desember 1947. Pembicaraan terjadi tidak hanya antara Daud Beureueh dan komandan-komandan organisasi gerilya, tetapi juga dengan satuan-satuan gerilya sendiri. Maka, pada 14 Desember suatu pertemuan intern khusus diadakan Mujahidin maupun Divisi Rencong Kesatria Pesindo (kelanjutan BPI). Di sini penggabungan ke dalam Tentara Republik merupakan salah satu masalah pembahasan.⁵⁹² Sebelumnya, pada 8 Desember, dibentuk suatu panitia untuk persiapan

⁵⁸⁸ C. van Dijk, *Op.cit.*, hlm. 142.

⁵⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 262.

⁵⁹⁰ Penggabungan ini berlaku pada 26 April 1947. Pada Februari 1947 Komando Sumatera terbagi dalam tiga subkomando, satu di antaranya subkomando Sumatera Utara, dipimpin Mohammad Daudsjah. JarahDam-I, *Dua Windhu Kodam I/Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, 1972), hlm. 116-117.

⁵⁹¹ C. van Dijk, *Op.cit.*, hlm. 132.

⁵⁹² Empat hari sesudah ini Pesindo Sumatera mengeluarkan instruksi yang berisi agar semua pasukan Pesindo di seluruh Sumatera bekerja sama dalam usaha membentuk Tentara Nasional Indonesia. Tetapi

penggabungan di Aceh. Sebagai kepalanya diangkat Kolonel R.M.S. Surjosurarso (R.M.S. Suryosurarso), salah seorang penasihat militer Daud Beureueh, sedangkan para anggotanya, termasuk Amir Husin el Mudjahid dan Letnan Kolonel tituler Tengku A. Wahab. Pada akhir Desember, Dewan Pimpinan Sementara TNI dibentuk di Aceh atas saran Komisi ini, dengan A. Wahab sebagai ketua, dan R.M.S. Surjosurarso sebagai wakil ketua. Yang belakangan ini juga menjadi Kepala Staf Umum, selanjutnya termasuk dalam Komandan Divisi tentara resmi di Aceh, dan para komandan organisasi gerilya "liar" setempat: Divisi Rencong Kesatria Pesindo, I; Divisi X Tengku Chik di Tiro (yang dibentuk pada 1947, sesudah reorganisasi Mujahidin), dan Divisi Tengku Chik Baya Bakong (didirikan oleh Amir Husin al Mudjahid).

Enam bulan lamanya barulah penggabungan menjadi kenyataan, dan pembentukan Divisi X baru secara resmi diumumkan pada 13 Juni 1948. Panglimanya yang pertama adalah Daud Beureueh, dalam kedudukannya sebagai gubernur militer, kemudian pada Oktober panglima yang lama, Husin Jusuf. Pada November 1949 Divisi Aceh mengubah namanya menjadi Komando Tentara dan Territorium Aceh, Husin Jusuf tetap sebagai panglimanya.⁵⁹³

Lalu diadakan beberapa perubahan besar. Pertama-tama, pada Desember 1949, terbentuk Komando Tentara dan Territorium I/Sumatera Utara di bawah pimpinan Kawi Oarang, yang kemudian digantikan lima bulan kemudian oleh Sitompul, seorang Batak Kristen. Kemudian Komando Tentara dan Territorium Aceh menjadi Brigade CC Komando Tentara dan Territorium I/Bukit Barisan, di bawah pimpinan Hasbullah Hadji (Hasbullah Haji), karena Husin Jusuf, sesudah konflik dengan Kawilarang, meninggalkan Tentara.

Barangkali karena perubahan-perubahan ini, para pemimpin gerilya di Aceh pada akhir 1950 menghidupkan kembali berbagai organisasi gerilya liar, yang menimbulkan desas-desus terus-terusan akan timbul pemberontakan. Di Aceh sendiri tindakan ini dibenarkan dengan mengatakan, organisasi-organisasi ini dihidupkan kembali sebagai persiapan menghadapi Perang Dunia ketiga.⁵⁹⁴

Perubahan Divisi Aceh menjadi brigade membuat sejumlah perubahan personal yang penting jadinya dan sangat menaikkan wibawa Pimpinan Tentara Pusat. Tentara Aceh telah menjadi korban kebijaksanaan politik demobilisasi Pemerintah Pusat. Yang terkena demobilisasi di Aceh termasuk pimpinan penting seperti Husin Jusuf, Amir Husin al-Mujahid, Nyak Neh (panglima Divisi Rencong Kesatria Pesindo) dan Said Abubakar. Marah sekali mereka karena pemimpin-pemimpin sipil dan militer Aceh yang dibebaskan terang-terangan dinyatakan sebagai "hanya buta huruf" (yang dalam banyak hal tidaklah benar) dan "orang kelangan madrasah". (Husin Jusuf dalam sebuah surat tahun 1954 kepada S.M. Amin.⁵⁹⁵

Di samping itu, Pimpinan Tentara Pusat menempatkan pasukan dari Aceh di bagian-bagian lain Indonesia dan memindahkan pasukan bukan Aceh ke dalam Aceh. Di dalam yang terakhir ini termasuk orang Batak dan bekas serdadu-serdadu KNIL. Brigade CC sendiri diperintahkan ke Sumatera Timur dan ke Tarutung di Tapanuli Utara, sementara pasukan orang Aceh dikirim ke Maluku. Kemudian, ketika tanda-tanda timbulnya segera *Darul Islam* makin kuat, satuan-satuan Brigade Mobil dikirim ke Aceh.

Tindakan ini di satu pihak memberikan jaminan kepada Pimpinan Tentara akan kehadiran pasukan yang setia di Aceh. Ketika pecah pemberontakan *Darul Islam* sungguh hanya sedikit prajurit tetap yang ditempatkan di Aceh turut serta. Sebaliknya,

seperti kita lihat, hubungan antara pimpinan pusat dan cabang Aceh tidak baik.

⁵⁹³ *Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 439-440; SM Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 165-169.

⁵⁹⁴ C. van Dijk, *Op.cit.*, hlm.150.

⁵⁹⁵ Lihat A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Aceh dan Kegagalan Politik Mr. SM Amin*, (Banda Aceh: Pustaka Murni Hati, 1956), hlm. 135.

jamina'n ini mengakibatkan lebih menjauhnya bekas gerilyawan di Aceh. Curiga mereka, kalau-kalau orang Batak akan menguasai tentara Sumatera Utara, dan karena itulah prajurit Batak dipandang hampir sebagai musuh di Aceh. Selanjutnya ada anggapan, panglima Sumatera Utara yang baru, Mauluddin Simbolon, ingin berkuasa di Aceh, dan memperoleh bantuan dalam rencananya dari sesama orang Batak di Jakarta, yaitu Jenderal Nasution dan Jenderal Simatupang.⁵⁹⁶

Demikianlah, Pemerintah Pusat tidak berhasil membangun tentara yang setia pada Republik di Aceh, juga gagal dalam upaya memperoleh pengaruh dalam pamong praja. Taksiran mengenai jumlah pegawai negeri yang masuk dalam gerakan *Darul Islam* di sini berbeda-beda, tetapi semuanya cukup tinggi. Letnal Kolonel tituler Sutikno P. Sumarto—yang ketika itu menjadi anggota staf keamanan di Aceh—menyatakan, sejak 24 Oktober 1953 kira-kira tujuh puluh persen pegawai negeri di Aceh menjadi peserta aktif dalam pemberontakan.⁵⁹⁷ Pada kira-kira waktu yang sama Amin menyatakan, sembilan puluh persen dari mereka itu diperkirakan memihak kaum pemberontak, karena "semua mereka itu berasal dari kelompok yang sama".⁵⁹⁸ Dalam analisa SM Kartosoewirjo, Aceh bergerak angkat senjata terhadap Pancasila karena empat sebab: (1) tidak sanggup hidup dan mati dalam kekufuran pantjasila; (2) tak sanggup hidup dan mati hanyalah bagi umpan mereka di dunia dan akhirat; (3) tak sanggup hidup lebih lama lagi dalam lingkungan dan di bawah kekuasaan negara Pancasila, negara nasional jahiliyah dan (4) hendak menuntut, mempertahankan dan mensentausakan hak-hak asasi umat islam Bangsa Indonesia, istimewa yang ada di Aceh dan sekitarnya (*velkomen* dan *volleding*) dan kedaulatan Negara islam Indonesia yang sempurna, sehingga dapat melakukan hukum-hukum Allah (Islam) dengan seluas-luasnya, satu-satunya tugas Ilahi yang maha suci, walau maha-berat sekalipun.⁵⁹⁹ Secara ideologis, alasan terkuat orang-orang Aceh melawan dan menghadang Republik, karena tidak berlakunya hukum syariat Islam bagi negara yang baru dimerdekakan oleh perjuangan revolusi rakyat, bukan karena keinginan-keinginan separatis.***

⁵⁹⁶ Maludin Simbolon adalah panglima Sumatera Utara dari 1950 sampai 1956. Abdul Haris Nasution Kepala Staf Angkatan Darat dari 1950 sampai 1952 dan dan 1955 sampai 1962. Tahi Bonar Simatupang adalah Penjabat Kepala Staf dan Kepala Staf Angkatan Darat dari 1949 sampai 1954.

⁵⁹⁷ Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureu'eh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm.78-79.

⁵⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 180.

⁵⁹⁹ S.M. Kartosoewirjo, "Statemen Pemerintah NII Tentang Aceh" tanggal 5 Oktober 1953, dalam *Pedoman Dharma Bhakti*, jilid 2.

BAB 5

MELETUSNYA **PEMBERONTAKAN**

DARUL ISLAM ACEH

*Seloeroeh Atjeh bergolak!
Revolusi Islam berkobar dengan hebat dan dahsjatnja!
Perebutan kekuasaan antara Negara Islam Indonesia dan Negara Pantjasila!
(S.M. Kartosoewirjo)⁶⁰⁰*

⁶⁰⁰ Idarul Huda (nama pena: SM Kartosoewirjo), "Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia Tanggal 5 Oktober 1953", dalam Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, SM Kartosoewirjo*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), bagian lampiran, hlm. 815. SM Kartosoewirjo sangat gembira atas munculnya "pemberontakan" ini.

AKHIRNYA, setelah lama menahan diri dan bertoleransi atas semua ‘penyimpangan’ politik yang dilakukan Pemerintah Pusat di Jakarta, “perebutan kekuasaan” — meminjam istilah SM Kartosoewirjo— pun meletus di Aceh. Seluruh Aceh tumpah ruah dalam “djihad berperang berkuah-darah pada Djalan Allah, bagi melakukan Hukum-hukum-Nja”.⁶⁰¹ Daerah terakhir di Indonesia yang di dalamnya terjadi suatu pembelaan terhadap Islam dari “jajahan” Republik Indonesia, dan di sana para pejuang masuk dalam Negara Islam Indonesia Kartosoewirjo adalah Aceh. Perjuangan Negara Islam ini meletus 21 September 1953, ketika salah seorang pemimpin Islam yang paling berpengaruh di daerah itu, Teungku Daud Beureueh menyatakan Aceh dan daerah-daerahnya yang berbatasan dengannya menjadi bagian Negara Islam Indonesia. Para pengikutnya pada waktu yang sama menyerang sejumlah kota—beberapa di antaranya mereka duduki sebentar—dan mereka merebut kekuasaan di daerah-daerah pedesaan sekitarnya.

Dalam minggu-minggu pertama kaum pejuang mujahidin menguasai hampir seluruh Aceh. Hanya kota-kota besar yang utama, seperti Kutaradja, (sekarang Banda Aceh), Sigli dan Langsa di timur, dan Meulaboh di pantai barat tetap dalam tangan Republik. Tetapi, dalam beberapa minggu saja pasukan *Darul Islam* dihalau keluar pusat-pusat perkotaan lagi, dan terpaksa melanjutkan perjuangan mereka di daerah-daerah pedesaan. Selama bertahun-tahun terutama di bagian utara mereka kuat, di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Utara. Seluruh rakyat Aceh berbangga hati dengan perjuangan suci ini, berjuang benar-benar karena Allah semata dalam suatu “djihad berperang menjabung nyawa.”⁶⁰²

Tepat tanggal 21 September 1953, bersamaan dengan pembukaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) III di Medan dibuka Peristiwa DI/TII Aceh meletus yang diproklamkan⁶⁰³ oleh Teungku M. Daud Beureueh. Saat itulah Pemerintah Pusat baru percaya bahwa desas-desus yang selama ini santer beredar telah menjadi kenyataan. Padahal menurut T.M. Ali Panglima Polem sejak awal tahun 1953 keadaan di Aceh mulai tegang dan sudah ada desas-desus Aceh akan memberontak. Hal ini menurutnya semakin hari semakin santer namun Pemerintah Pusat tidak percaya sama sekali akan hal itu. Berdasarkan keadaan itu pula dia sangat yakin bahwa hal itu pasti akan terjadi, sehingga mengambil keputusan untuk kembali ke Kutaradja untuk tinggal bersama keluarganya.⁶⁰⁴

Dalam bukunya *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin* (1956), A.H. Gelanggang, seorang tokoh NII Daerah Aceh, mengajukan suatu pertanyaan yang cukup menarik, yaitu “Apa sebab Aceh berontak...?”. Terhadap pertanyaannya itu dia memberi jawaban bahwa sebab-sebab ulama menggerakkan rakyat untuk memisahkan diri dari Negara Pancasila antara lain adalah karena mereka telah muak melihat Agama Islam dicemooh dan dihina terus-menerus, kerusakan-kerusakan moral pemuda-pemudi, adanya perzinaan di setiap liku negara, sedangkan perhatian Pemerintah dan alat-alatnya kurang sekali terhadap hal itu, adanya kecurangan-kecurangan alat negara yang memeras rakyat, baik dari sudut lalu lintas, dari sudut perdagangan, di berbagai jawatan, dst., berjangkitnya penyakit korupsi yang parah yang dilakukan oleh pegawai tinggi, menengah, dan bawahan yang menyebabkan Negara bangkrut karenanya.⁶⁰⁵

Saat pemberontakan terjadi hampir semua bupati tidak berada di daerahnya karena

⁶⁰¹ *Ibid.*

⁶⁰² *Ibid.*

⁶⁰³ Teks proklamasi dan susunan Kabinet DI/TII dapat dilihat pada lampiran. Lihat juga *ibid.* hlm.1-6.

⁶⁰⁴ T.M. Ali Panglima Polem, *Sumbangsih Aceh Bagi Republik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 72-73.

⁶⁰⁵ A. H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin* (Banda Aceh: Pustaka Murni Hati, 1956), hlm. 10-13. Lihat juga T. Ibrahim Alfian, *op. cit.* hlm. 219-220.

menghadiri pembukaan PON III di Medan. Menurut kabar yang didengar Teuku Panglima Polem Muhammad Ali, begitu mendapatkan kepastian tentang terjadinya pemberontakan itu langsung mereka meninggalkan hotel tempat mereka menginap, kecuali Teungku Usman Aziz (Bupati Aceh Utara) dan Raja Wahab (Bupati Aceh Besar). Keadaan sangat panik dan perhubungan antar daerah terputus. Kota Sigli dan Lhokseumawe mendapat serangan yang sangat hebat dan seluruh Aceh boleh dikatakan *vacuum*. Menurut T.M. Ali Panglima Polem lebih 90 % tokoh Aceh yang penting dan berjasa ikut memberontak, termasuk Bupati Kutaraja, Teungku Sulaiman Daud. Hal ini membuat Pemerintah Pusat sangat kerepotan. Oleh karenanya Pemerintah mengirimkan para pejabat untuk melakukan peninjauan bersama tokoh Aceh yang tidak ikut terlibat.⁶⁰⁶

Berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan, M. Isa Sulaiman memperkirakan kekuatan kelompok pemberontak ada sekitar 10.000 orang, dengan jumlah senjata api sekitar 800 – 1.000 pucuk. Pasukan intinya berasal dari Pandu Islam, yang sebelum pemberontakan meletus berjumlah sekitar 4.000 orang, yang diperkuat oleh 98 militer desersi dari Sidikalang dan sekitar 400 orang lain berasal dari polisi, termasuk pegawai penjara dan mantan tentara yang tergabung dalam Biro Pejuang Aceh. Unsur lain berasal dari kelompok yang tidak puas terutama pamong praja, Jawatan Agama termasuk Mahkamah Syariah, Sekolah Agama, dan pelajar Sekolah Agama.⁶⁰⁷

Walaupun secara umum pemberontakan meletus sesuai dengan skenario tanggal 21 September 1953, namun milisi yang berada di Idi dan Peureulak telah mendahului gerakan mereka sehari sebelumnya. Oleh karena yakin kontingen militer Aceh yang berada di Sumatera Timur dan Tapanuli di bawah Mayor Hasballah Haji dan Kapten Hasan Saleh akan memasuki Aceh Timur, A. R. Hanafi, Gazali Idris dan Teungku Amir Husin Al Mujahid pada malam Minggu tanggal 19 September 1953 mengerahkan pengikut-pengikut mereka untuk merebut kantor polisi dan pamong praja yang terdapat di wilayah Idi dan Peureulak. Perebutan kekuasaan itu berjalan lancar karena polisi dan pamong praja di tempat tersebut berhasil mereka pengaruhi. Sebaliknya, harapan akan tibanya kontingen militer Aceh dari Sumatera Timur dan Tapanuli meleset. Hanya Kapten Hasan Saleh beserta supirnya saja yang tiba dari Medan, sementara Mayor Hasballah Haji menurut Hasan Saleh telah membatalkan niatnya secara sepihak. Selain Hasan Saleh, abangnya Letnan Ibrahim Saleh, (Komandan Kompi Sidikalang) yang masih memenuhi janjinya. Bersama 98 anggota kompi Letnan Ibrahim Saleh memasuki Aceh melalui jalur pedalaman Kutacane – Blang Keujeuren dan Takengon.⁶⁰⁸

Lambat laun situasi di bidang militer mulai berubah dan terlihat tanda-tanda yang lebih menguntungkan pihak perjuangan TII. Pada tahun 1953, rata-rata setiap hari ada saja yang gugur dari tentara Republik dalam pertempuran dengan pasukan TII. Sebaliknya pada tahun 1954 kerugian akibat serangan perjuangan TII setiap tahun sudah meningkat dua kali lipat.⁶⁰⁹ Dari “berita kemenangan” dan laporan-laporan yang disampaikan dalam setiap *briefing* pasukan juga menjadi jelas, bahwa sebagian besar senjata yang dimiliki perjuangan DI/TII adalah hasil rampasan dalam pertempuran. Dengan demikian pada tahun 1956, rata-rata dalam satu bulan jatuh 15 senjata ke tangan sebuah kesatuan TII.

Sadar akan kekuatannya sendiri yang pada tahun 1957, T.I.I. mencapai 13.129 tentara,⁶¹⁰ serta mengingat keadaan politik dan ekonomi pemerintah pusat di Jakarta sedang terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh intrik politik Komunis yang semakin mempengaruhi kebijakan pemerintah, keyakinan nampak pada setiap anggota TII bahwa

⁶⁰⁶ *Ibid.*

⁶⁰⁷ M. Isa Sulaiman, *op. cit.* hlm. 292.

⁶⁰⁸ Hasan Saleh, *op. cit.* hlm. 11-12. Lihat juga M. Isa Sulaiman, *op. cit.*, hlm. 287-289.

⁶⁰⁹ A.H. Nasution, *Tjataan-tjataan Sekitar Politik Militer Indonesia*, (Jakarta: Pembimbing, 1955), hlm. 92.

⁶¹⁰ *Penumpasan Pemberontakan DI-TII/SMK di Jawa Barat*, (Bandung: Dinas Sejarah TNI-Angkatan Darat, 1974), hlm. 94.

sesungguhnya dalam waktu dekat tujuan perjuangan akan tercapai. Kartosoewirjo segeral mengeluarkan pernyataan resminya: “*Dalam keadaan RIK jang soenggoeh katjau balau seperti sekarang ini, kita haroes pandai dalam menoenjoekkan segenap tindakan revoloesioner kita jang memoengkinkan lebih besar oentoek dapat menarik hati ra’iat, sekali lagi: Hati ra’iat! Sebaliknya, djanganlah kita melakoekan tindakan-tindakan jang membawa akibat bertambah sakitnja djiwa ra’iat jang memang telah loeka hatinja oleh karena tindakan kekedjaman dari serdadoe-serdadoe pantjasila. Tindakan-tindakan kita jang langsoeng berhoeboengan dengan kepentingan dan keselamatan ra’iat banjak, hendaklah dilakoekan sebidjaksana-bidjaksananja*”.

Dengan adanya kekalahan demi kekalahan yang diterima oleh tentara Republik dalam menghadapi perjuangan DI/TII, maka membuat hati Soekarno menjadi resah dan gelisah. Karena dia khawatir manakala perjuangan yang dipimpin oleh Kartosoewirjo menang dalam gelanggang pertempuran baik ideologi maupun fisik akan mengancam eksistensi dia sebagai presiden, terlebih dia masih punya hutang “PR” kepada Belanda bahwa masalah perjuangan DI/TII harus diselesaikan dengan secepatnya.

Untuk tetap mempertahankan kedudukan bahwa dialah sebagai presiden yang sah di Indonesia dan dia pulalah yang berhak mengatur jalannya roda pemerintahan Indonesia, maka Soekarno mengadakan perjalanan keliling ke beberapa provinsi dan menegaskan dalam setiap pidatonya, bahwa “*Negara Indonesia ini adalah negara nasional yang berdasarkan Pancasila, dan bukan negara berdasarkan Islam maka banyak daerah-daerah yang penduduknya yang tidak beragama Islam akan melepaskan diri dari Republik*”. Pidato Soekarno menimbulkan reaksi yang sangat keras di kalangan kaum Muslimin dan para politisi partai-partai Islam.⁶¹¹ Salah satu di antara politisi tersebut, yaitu Isa Anshori dari Masjumi yang sejak dulu memperjuangkan ide sebuah negara Islam. Sebagai jawaban atas kericuhan politik yang diakibatkan pidatonya, Soekarno pada bulan Mei 1953 memberi sebuah ceramah kuliah di hadapan mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta, mengenai “*Negara Nasional dan Cita-cita Islam*”.⁶¹² Dalam ceramahnya itu Soekarno menyatakan, bahwa dia belum pernah menjumpai perkataan “negara” dalam kitab-kitab Islam, yang dia jumpai adalah perkataan-perkataan seperti *Darul-Islam*, *Darul-Salam*, atau *Ad-Daulah*, tetapi istilah yang terakhir tersebut berarti “Kedaulatan”. Begitu juga dalam pidato pada malam resepsi penutupan Muktamar ke 7 Partai Masjumi Sukarno pernah mengatakan, bahwa menurut anggapannya segala sesuatu akhir-akhir ini berkembang ke arah yang kurang sehat. Bagi setiap orang terbukalah kesempatan untuk mendukung pemerintahan atau beroposisi, namun janganlah melupakan toleransi karena demokrasi yang sejati tidak dapat hidup dengan tiada toleransi.⁶¹³

Masih sebelum dimulainya sidang-sidang Konstituante pada 2-7 Maret 1954, untuk tetap melanggengkan kekuasaannya, Soekarno mengumpulkan 3000 orang ulama NU dan lainnya dalam suatu konferensi di Cipanas Jawa Barat.⁶¹⁴ Menurut mantan menteri agama K.H. Masjkur yang turut serta dalam konferensi itu bahwa “*Dalam prinsip keislaman negara dianggap sah dan dituruti bila pemimpinnya memenuhi syarat Waliyul Amri. Yaitu ia seorang yang jujur, mempunyai kekuatan dan kewibawaan, yang terpenting dia muslim yang taat. Apabila ada pihak lain yang menentang dan memberontak, maka hukumnya bughat,*⁶¹⁵ wajib dibasmi. Persoalannya, apakah

⁶¹¹ Lihat M.I. Sajoeti, *Ummat Islam Menghadapi Pemilihan Umum*, (Bandung: Jajasan Djaja, 1953), hlm. 48.

⁶¹² Lihat Soekarno, “*Negara Nasional dan Cita-cita Islam*”, naskah ceramah di hadapan civitas akademika Universitas Indonesia, 1953.

⁶¹³ Soekarno, *Djangan Tinggalkan Toleransi*, Pidato P.M.J. Presiden Republik Indonesia dalam malam resepsi penutupan Muktamar ke 7, Partai Masjumi tgl. 27 Desember 1954 di Surabaya: Djawatan Penerangan RI, Propinsi Djawa Timur, t.t., hlm. 6.

⁶¹⁴ Daamurasyi Mujahidain, *Menelusuri Jejak Langkah Jihad S.M. Kartosuwiryo*, (Yogyakarta: Wihdah Press), 1998. hlm. 55-57.

⁶¹⁵ *Bughat* (Bhs. Arab), artinya memberontak. Dalam *fiqh siyasah Islam*, makna *bughat* adalah memberontak terhadap pemerintahan Islam yang sah sehingga hukumnya haram. Namun, jika

Soekarno memenuhi syarat dan siap diuji sebagai Waliyul Amri? Adalah jawaban Soekarno saat itu sanggup diperiksa. Maka selama tiga hari pada tahun 1954 para ulama seluruh Indonesia berkumpul di Cipanas dengan membawa kitab-kitab untuk membicarakan soal ini. Dari pertemuan ulama itu dan dialog dengan Bung Karno, akhirnya disimpulkan bahwa Bung Karno memang seorang yang jujur, berwibawa dan seorang muslim. Tapi Bung Karno sholat Jum'at di mana? Mendapat pertanyaan tersebut Bung Karno lalu mendirikan masjid di istana negara. Sebelumnya masjid tersebut memang belum ada. Dari penilaian tersebut Bung Karno dianggap memenuhi syarat sebagai "*Waliyul Amri Addharuri Bisyy Syaukah*".

Menyinggung soal shalat Jum'at, dari beberapa sumber yang dapat dipercaya menerangkan, bahwa Soekarno dikenal tidak pernah melakukan shalat Jum'at, kecuali pada saat pembukaan atau peresmian Masjid Baiturrahim yang terletak di kompleks Istana Jakarta. Dengan adanya pemberian gelar ini banyak kecaman yang datang dari tokoh-tokoh Islam dan organisasi Islam yang menyatakan, bahwa istilah *Waliyul Amri Ad-dharuri* hanya dapat dipergunakan pada negara yang berdasarkan Islam, dan selanjutnya dikatakan, bahwa tiap-tiap negara dalam Islam, termasuk *Waliyul Amri* harus bertanggung jawab kepada rakyat atau lembaga perwakilan rakyat Islam yang tidak dianut dalam UUD Sementara 1950. Oleh karena itu presiden Indonesia tidak bisa menjadi *Waliyul Amri Ad-dharuri*. Di sisi lain presiden dan kabinetnya bersumpah untuk setia kepada Pancasila dan bukan kepada Islam.

Pertemuan para ulama di Cipanas itu jelas merupakan rekayasa politik, sematamata dimaksudkan memberikan legalitas pada Soekarno untuk menumpas perjuangan Darul Islam. Dan untuk itu dia memerlukan bantuan para ulama pendukungnya guna menentukan. "siapa *bughat* yang harus diperangi dan siapa *Waliyul Amri* yang mesti dita'ati". Topeng yang menutupi wajah para pengkhianat agama sedikit demi sedikit mulai tersingkap. Dari pengakuan yang dituturkan ini saja, orang dapat mengerti bahwa ini semua adalah permainan politik. Sekalipun mereka memikul sekeranjang kitab laksana "*keledai*", pertemuan para ulama di Cipanas itu pasti tidak akan menemukan hujjah yang benar bagi penumpasan suatu perjuangan Darul Islam yang berjuang kearah terlaksananya hukum Allah. Begitu pula mereka tidak akan bisa meyakinkan dirinya sendiri, bahwa manusia macam Soekarno yang mempelajari Islam sekedar kebutuhan, layak dinobatkan sebagai *Waliyul Amri*. Jika pada akhirnya mereka memutuskan "yang ini *bughat* dan yang itu *Ulil Amri*", maka itu tidak lain hanya sekedar rekayasa guna memenuhi tuntutan politik penguasa dengan memeralat Islam serta memanfaatkan kebodohan ulamanya. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat: Muhammad, ayat 14.

"Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabb-Nya sama dengan orang yang (syetan) menjadikan ia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?"

Dalam sebuah keterangan pemerintah Negara Islam Indonesia pada bulan Mei 1955, yang dianggap Kartosoewirjo sebagai jawaban atas "permakluman perang resmi oleh RIK terhadap Negara Islam Indonesia", dan yang juga merupakan sebuah jawaban atas sikap kabinet Ali Sastromidjojo, Kartosoewirjo kembali lagi mengingatkan bentrokan senjata yang pertama antara TNI dan TII di Antarlina. Pada saat itu umat Islam merasa haknya diperkosa, karena TNI "melanggar batas-batas daerah *de facto* Negara Islam Indonesia", demikian keterangan Kartosoewirjo.⁶¹⁶ Dia juga membenarkan aksi-aksi teror terhadap pengkhianat-pengkhianat Negara Islam Indonesia, pengkhianat Agama (Islam) dan pengkhianat Allah beserta kaki tangannya, sedang pembakaran dilakukan atas serangan serdadu TRIK dan hak milik anak cucu Iblis la-natullah, yang haram mutlak

"memberontak" terhadap pemerintahan yang bukan Islam (*ghairul Islam*), maka tidak dapat disebut *bughat*, melainkan "*jihad fi sabilillah*" yang justru hukumnya malah wajib (*fardlu ain*).

⁶¹⁶ Lihat *Buku Sejarah Dokumenter, Buku Induk I, Jilid II, Bab V (A), Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia No. VI/7, 25.5.1955.*

itu. Merampas hak milik pengkhianat bukanlah barang baru. Semua itu berlaku atas sendi-sendi tegasnya hukum perang".⁶¹⁷

Seluruh anggota Angkatan Perang Negara Islam Indonesia (APNII) kini dilarang memiliki radio, kamera dan dilarang main kartu, catur, bulutangkis, dan sepak bola. Waktu senggang mereka harus diisi hanya dengan pendidikan militer dan politik.⁶¹⁸ Selanjutnya penduduk di daerah Negara Islam Indonesia berada dalam keadaan perang. Setiap orang diwajibkan untuk menyediakan harta kekayaannya untuk Negara Islam Indonesia. Seandainya masih tetap ada yang melakukan perjalanan Haji meskipun ada larangan tersebut, maka sebagai hukumannya dia harus membayar pada Negara Islam Indonesia jumlah uang yang digunakannya untuk perjalanan tersebut. Sebagai alasan atas larangan tersebut dijelaskan, bahwa perjalanan naik haji hanya dapat dilakukan atas nama Republik Indonesia, dan ini akan merusak citra Negara Islam Indonesia.⁶¹⁹ Tetapi dalam kenyataan memang banyak surat-surat Negara Islam Indonesia dibawa ke Mekkah oleh Haji-haji dari daerah Priangan, seperti terbukti oleh sebuah surat rahasia dari seorang Sunda yang berdiam di Mekkah.⁶²⁰

Sistem komandemen kini tetap bertahan pada bentuknya yang lama selama 7 tahun mendatang, dan juga semua peraturan dan perundang-undangan Negara Islam Indonesia terus berlaku. Maklumat yang berikutnya dari komandemen Tertinggi APNII baru dikeluarkan pada bulan Agustus 1959, ketika diadakan reorganisasi militer dan aparaturnya Negara Islam Indonesia secara menyeluruh namun pada saat itu titik klimaks Negara Islam Indonesia telah berlalu. Menurut keterangan Kartosoewirjo sendiri, bahwa dia dan keluarganya antara tahun 1954-1959 pindah ke daerah pegunungan selatan Jawa Barat di sekitar Karangnunggal.⁶²¹ Sementara itu dia mengangkat Sanusi Partawidjaja sebagai wakilnya.⁶²² Namun selama tahun-tahun itu semua Maklumat NII masih tetap ditandatangani oleh beliau sendiri.

Ketika Kartosoewirjo mendengar, bahwa Sanusi Partawidjaja bersama-sama dengan van Kleef, seorang Belanda yang bergabung dengan Darul Islam, merencanakan kup untuk menggulingkan Kartosoewirjo, maka Kartosoewirjo mengambil alih kembali pimpinan NII dan pada bulan Juli 1959, dia berangkat kembali ke daerah Jawa Barat, pusat Perjuangan Darul Islam. Pada waktu itu Kartosoewirjo rupanya benar-benar prihatin melihat keadaan perjuangannya, sehingga dia pada bulan Juli 1959 mengatakan, bahwa kalau kemenangan tidak dapat dicapai dalam waktu dekat ini, kesempatan berikutnya baru akan tiba dalam waktu 32 tahun. Dalam pidatonya pada waktu penyerahan ijazah pada lulusan akademi Wana Yudha, semacam akademi militer NII, Kartosoewirjo juga menyindir rencana Sanusi Partawidjaja untuk menggulingkannya dan dia berkata: "*Soenggoeh pahit bagi Bapak, dengan keadaan Negara kita sekarang karena banjak hal-hal yang menjeleweng. Bahaja akan datang, apabila ada doalisme dan bertengkar dalam tiap-tiap komandemen. Ada pertengkar antara komandan-komandan, maka kebawahannya apalagi*".⁶²³

⁶¹⁷ *Ibid.*

⁶¹⁸ Lihat *DI/TII Djabar, Kumpulan Dokumen No. 30*, APNII Komandemen Wilayah 7 No. 770075/G/KW '56, Hal: Pengumuman, 10.4.1956.

⁶¹⁹ APNII, "Komandemen Ketjamatan Balubur Limbangan No. 03T/KB/3'58", 3.3.1958, *Permakluman dan Harapan*.

⁶²⁰ Sjeih Abduldjalil Al-Mukaddasi, *Fatwa ti Mekka Tina "Darul Islam"*, tt., Dewan Penerangan Islam 1950. Surat ini sengaja dipesan oleh Hamka untuk menyatakan bahwa Darul Islam Kartosoewirjo adalah sesat dan hanya diikuti oleh orang-orang bodoh. Siapa yang mengatakan orang itu bodoh, biasanya dirinya sendirilah yang bodoh. Lihat C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiri Pers, 1993).

⁶²¹ Karangnunggal, terletak di sekitar daerah hutan Denuh.

⁶²² Komando Daerah Militer VI Siliwangi, Team Pemeriksa *Berita Atjara Interogasi IV*, Bandung, 24 Djuni 1962, hlm. 7.

⁶²³ Komando Daerah Militer VII Diponegoro, Staf Umum I, *Bahan Perang Urat Sjaraf Terhadap Gerombolan D.I. Kartosuwirjo*, (18.4.1962).

Untuk dapat kembali mengendalikan secara menyeluruh perjuangan Darul Islam yang telah didirikan, Kartosoewirjo kini mengadakan reorganisasi dan pengetatan seluruh pimpinan militer, begitu juga Kartosoewirjo sebagai Imam dan Panglima Tertinggi. Tampaknya selama Kartosoewirjo diwakili oleh Sanusi Partawidjaja telah terjadi beberapa perkembangan dalam perjuangan DI yang tidak lagi dapat ditolerir oleh Kartosoewirjo. Seruan akan tanggung jawab setiap orang terhadap pimpinan dan terhadap tujuan-tujuan perjuangan, terhadap solidaritas Islam dan kewajiban untuk menegakkan hukum Islam adalah petunjuk, bahwa Kartosoewirjo sangat khawatir tentang keadaan perjuangan Darul Islam pada waktu itu.

Dijelaskan Kartosoewirjo dalam Maklumat Komandemen Tertinggi APNII No. 11.⁶²⁴:

“Mengingat, bahwa perloe dibentoeck Pimpinan Perang atau Komando Perang jang lebih koeat, dan penjempoernaan systeem atau Stelsel Komandemen jang lebih efektif demikian roepa, sehingga lebih terdjamin makin hebat dan bergeloranja peperangan, dan sehingga tertjapailah dengan tolong dan koernia Allah djoea kemenangan perang terachir, tegasnja kemenangan Islam dan Negara Islam Indonesia, ialah satoe-satoenja pintoe gerbang menoe djoe dan memasoeki Negara Madinah Indonesia, atau/dan Negara Islam Indonesia boelat sempoerna, merdeka dan berdaoelat sepenoehnja, kedalam dan keloe ar, de facto dan de jure, sepanjang boekti-boekti kenjataan dan hoekoem. Dan berpendapat, bahwa perloe dalam waktoe jang sesingkat-singkatnja diselenggarakan Soesoenan Pimpinan Perang dalam bentoeck baroe, ialah perpadoean antara Stelsel Komandemen lama jang tetap berlakoe hingga sa’at ini, dan peratoeran-peratoeran perang baroe atau jang diperbaroeckan, demikian roepa:

- A. *Sehingga terdjaminlah dengan pasti berlakoenja dan pelaksanaan Komando Perang jang berdaja goena sebesar-besarnja, teroetama pada sa’at-sa’at dikeloerkannja Komando Perang Semesta atau Komando Perang Totaliter dalam kata jang seloeas-loeasnja, dan terlebih-lebih lagi mendjelang sa’at moestari, atau sa’at di keloe arkannja Komado Perang Moethlak, Komando Oemoem, ialah Komando Allah langsoeng melaloei Imam Panglima Tertinggi Angkatan Perang NII, selakoe Chalifatoellah dan Chalifatoen-Nabi di noesantara Indonesia; ialah Perang Semesta dan Perang Moethlak, jang akan menentoekan nasibnja Negara Islam Indonesia dan hari depan Oemat Islam Bangsa Indonesia di masa mendatang; dan*
- B. *Sehingga seleroeh Negara Islam Indonesia, beserta segenap Angkatan perang dan ra’iat warga negaranja, tanpa ketjoeali soenggoeh-soenggoeh ikoet serta meweodjoedkan tenaga perang raksasa maha/dahsjat, satoe gelombang Jamaah Moedjahidin maha-Besar, jang lagi madjoe-bergerak memenoehi panggilan dan seroean Allah, langsoeng menoe djoe arah Mardlatillah sejati, di doenia dan di akhirat; ialah potensi perang maha-berat, persatoe-padoean segenap tenaga dan kekoean seleroeh Oemmat Moedjahidin; Oemmat-pilihan dan kekasih Allah, jang sanggoep dan mampoe menghadapi serta mengatasi, dan akhirnja menghantjoer-lidaskan segala jenis dan bentoeck moesoeh-moesoeh Allah, moesoeh Islam, moesoeh Negara Islam Indonesia dan moesoeh-moesoeh seleroeh Barisan Moedjahidin, hingga tekoek-loetoet atau hancoer-binasa; dengan karena berkat kehendak dan kekoekaan, tolong dan koernia Allah, Dzat Jang Maha Agoeng djoea adanja.*

Dalam Maklumat No.11 itu Kartosoewirjo memutuskan Membagi Indonesia dalam 7 (tujuh) Daerah Perang, atau “*Sapta Palagan*”. Yang klasifikasi dan penggolongannya secara administratif adalah sebagai berikut:

1. Daerah Perang Pertama melipoeti seleroeh Indonesia dan diseboet “Komando Perang Seleroeh Indonesia” (KPSI) jang dipimpin langsoeng oleh Imam dan Panglima Besar

⁶²⁴ S.M. Kartosoewirjo (Karma Yoga), *Salinan Pedoman Dharma Bakti*, Jilid I, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 11, 7.8.1959, hlm. 128.

APNII, jang djoega berwenang oentoek mengeloearkan “Komando Oemoem”. KPSI terseboet adalah identik dengan Dewan Imamah jang doeloe dan Komandemen Tertinggi.

2. Daerah Perang Kedoea melipoeti beberapa wilayah NII dan diseboet sebagai “Komado Perang Wilajah Besar” (KPWB), dengan tjatatan, bahwa oentoek seloeroeh Indonesia ditetapkan 3 KPWB jang masing-masing dipimpin oleh seorang Panglima Perang KPWB, ja’ni:
 - a. KPWB I, terdiri atas poelau Jawa dan Madoera dan dipimpin oleh Agoes Abdoellah.
 - b. KPWB II, terdiri atas seloeroeh Indonesia Timoer termasuk Soelawesi, Noesatenggara, Maloekoe, Irian Barat dan Kalimantan dan di pimpin oleh Kahar Muzakkar.
 - c. KPWB III, terdiri atas seloeroeh Soematra dan kepoelauan sekitarnja di bawah pimpinan Daud Beureueh.
3. Daerah Perang Ketiga hanya melipoeti satoe wilayah NII dan diseboet sebagai “Komando Perang Wilayah” (KPW). Dengan demikian beberapa KPW meroepakan satoe KPWB. Djoega setiap KPW dipimpin oleh seorang Panglima Perang KPW.

Seluruhnya terdapat 7 KPW di Indonesia.

KPW I Terdiri dari daerah keresidenan Jakarta, Purwakarta, Cirebon dan Priangan Timur.

KPW II Hanya terdiri dari Jawa Tengah, namun wilayah ini dihapus, karena Perjuangan suci DI yang dipimpin oleh Amir Fattah telah lama gagal.

KPW III Direncanakan Jawa Timur di bawah pimpinan Masduki.

KPW IV Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar.

KPW V Sumatra dipimpin oleh Daud Beureueh.

KPW VI Direncanakan daerah Kalimantan, tapi gagal.

KPW VII Keresidenan Bogor, Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang dan Keresidenan Banten dipimpin oleh Ateng Djaelani Selatan.

4. Daerah Perang Keempat melipoeti satoe Keresidenan/Resimen dan diseboet “Komando Militer Pangkalan Setempat” (Komando Operasi Resimen Pertempoeran Setempat) djoega dioebah mendjadi “Kompas” jang hanja mempoenjai foengsi taktis dan tidak boleh lagi mentjampoeri administrasi negara. Setiap Kom-pas dipimpin oleh seorang Komandan Pertempoeran Kompas.
5. Daerah Perang Kelima hanjalah melipoeti satoe Kaboepaten/ Batalyon dan diseboet “Sub-Kompas” dan dipimpin oleh seorang Komandan Pertempoeran Sub-Kompas.
6. Daerah Perang Keenam hanjalah melipoeti satoe Ketjamatan/ Kompi atau lebih dan diseboet “Sektor”. Setiap Sektor dipimpin oleh seorang Komandan Pertempoeran Sektor.
7. Daerah Perang Ketoedjoeh melipoeti satoe desa atau lebih dan diseboet sebagai “Sub-Sektor” jang dipimpin oleh seorang Komandan Pertempoeran Sub-Sektor.

Kartosoewirjo kembali menerapkan manajemen pemerintahan yang sangat rigid dan efektif disertai dengan segala dispensasi manajerial dan administratif untuk pelaksanaannya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah perintah yang sangat kharismatik:

“Memerintahkan kepada seloeroeh Komandan dan Komandemen, serta segenap Pedjabat/Foengsionaris dan Petoegas Negara dalam lingkoengan Negara Islam Indonesia: Soepaja segera, dengan tjepat dan tepat, tapi tetap tertib, teratoer dan berentjana, menjelenggarakan isi dan djiwa Makloemat Komandemen Tertinggi No. 11 ini, dengan sebaik-baik dan sesempoerna-sempoernanja, sehingga segala persiapan dan pelaksanaannja soedah boleh diselesaikan pada tanggal 1 Januari 1960 dengan tjatatan, bahwa oentoek daerah-daerah Negara Islam Indonesia jang terpentjil letaknja, sehingga terhalang oleh djarak djaoeh dan kesoelitan perhoeboengan, diberi batas waktoe hingga tanggal 1 Februari 1960”.

Menurut struktur komando yang baru, hampir semua perjuangan militer dan komandonya kini dipertanggungjawabkan kepada Komandan Pertempuran Kompas, yang mengatur langsung setiap pasukan yang ada di bawah pimpinannya. Juga Komandan Kompas adalah pengantara terakhir untuk menyalurkan dan melanjutkan segala instruksi atasannya kepada bawahannya. Sebagai komandan lapangan, Komandan Kompas juga harus menentukan siasat dan strategi militer, Kartosoewirjo berharap, bahwa dengan pelaksanaan penyusunan struktur komando yang baru, Negara Islam Indonesia terhindar daripada “setiap jenis, sifat dan bentuk dualisme”, dalam bidang dan lapangan apa dan manapun sehingga di lingkungan NII hanya dikenal satu pimpinan negara yang juga bertugas memegang Pimpinan Perang dan Pimpinan Umat Berperang.⁶²⁵ Struktur inilah yang banyak menjadi esensi pembicaraan antara Kartosoewirjo dan Teungku Daud Beureueh dalam komunkas-komunikasi lewat surat-menyurat mereka. Keduanya adalah intelektual dan ulama serta berpengalaman dalam menjalankan tugas-tugas manajerial keorganisasian.

Bantuan Militer atau Operasi Militer?

Segera sesudah proklamasi menegakkan Negara Islam Daud Beureueh, Gubernur Sumatera Utara, Abdul Hakim, meminta bantuan militer kepada Pemerintah Pusat. Permintaannya cepat dikabulkan, dan pasukan dari Sumatera Tengah dan daerah lain Sumatera pun digerakkan untuk bertindak. Kemudian satuan-satuan Divisi Jawa Tengah Diponegoro juga diperintahkan ke Aceh. Pemerintah bertekad akan menghadapi situasi dengan keteguhan hati dan menyapu jihad suci menegakkan Negara Islam dengan cepat. Seperti dikemukakan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo: "Bila rumah terbakar, padamkanlah api tanpa berhenti menanyakan macam-macam"⁶²⁶. Namun tanggung jawab terakhir untuk operasi-operasi keamanan terus juga terletak pada para penguasa sipil. Ini disebabkan sifat khusus daerah, dan lebih khusus ialah sifat-sifat khusus Aceh dan kekuatan Islam di daerah ini, seperti dijelaskan Ali Sastroamidjojo dalam DPR pada 1955. Tidak ada pengumuman keadaan perang, yang membuat militer mengambil alih pimpinan. Di samping itu, sejak mula jihad menegakkan Negara Islam, Pemerintah berjanji menyelidiki masalah otonomi untuk Aceh dan memberikan lebih banyak perhatian terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Mereka yang menyetujui diadakannya perundingan juga memiliki organisasi. Di Aceh mereka membentuk Badan Kontak Pribadi Peristiwa Aceh dengan tujuan mengadakan hubungan dengan kaum pejuang mujahidin dan menyampaikan keluhan-keluhan mereka ini kepada Pemerintah Pusat, atas prakarsa seorang pedagang terkemuka, D.M. Djuned, pada November 1953.⁶²⁷

⁶²⁵ *Ibid.*, hlm. 143.

⁶²⁶ Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik*, (Jakarta: Pustaka Grafiti Pers, 1985), hlm. 63.

⁶²⁷ D.M. Djuned, anggota Perti Aceh, ditangkap pada Mei 1954, tak lama sesudah Sulaiman ditangkap Pasukan Republik. Sesudah dibebaskan, Djuned melanjutkan usaha-usahanya. Pada Februari 1955 dia pergi ke Jakarta untuk membicarakan keadaan di Aceh dan kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya dengan para pejabat Pemerintah Pusat. Lihat A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Aceh dan Kegagalan*

Pemerintah dikecam tentang ketidakamanan Aceh maupun kelakuan pasukan yang tidak senonoh di sini. Walau pun aksi-aksi militer ada hasilnya, keadaan jauh dari memuaskan. Hasil operasi-operasi Angkatan Darat dan Brigade Mobil demikian rupa hingga pada pertengahan 1954 hampir setengah dari Aceh cukup aman untuk bisa menarik bantuan militer dan menyerahkan pemeliharaan hukum dan ketertiban kepada Angkatan Kepolisian daerah. Hanya di Kabupaten Aceh Besar (di sini kaum pejuang mujahidin bergerak hanya beberapa mil dari Banda Aceh), Kabupaten Pidie (tempat Daud Beureueh memusatkan pemerintahan sipil dan militernya), Kabupaten Aceh Utara dan daerah Takengon di Aceh Tengah—daerah-daerah tempat kaum pejuang mujahidin yang paling kuat—dilanjutkan bantuan militer.

Di daerah-daerah yang belakangan ini *Darul Islam* tetap sangat aktif. Di desa-desa di bawah pengawasannya ini mereka menetapkan pajak— dalam beberapa hal juga dikenakan pada guru-guru sekolah dan para pejabat Pemerintah Republik yang terus bekerja —, melakukan pencatatan perkawinan dan perceraian, dan pada umumnya menjalankan hukum, mengadili kasus-kasus kejahatan rutin dan kasus-kasus yang merupakan pelanggaran syariat Islam, seperti membatalkan puasa, dan kadang-kadang juga menjatuhkan hukuman pada mereka yang ragu-ragu mengambil keputusan apakah memihak Negara Islam atau memihak Republik Indonesia.⁶²⁸

Dari posisi mereka di gunung-gunung dan hutan-hutan kaum pejuang mujahidin terus juga mengganggu lalu lintas dan menyerang patroli dan pos-pos tentara, dengan beroperasi dalam kelompok-kelompok yang kadang-kadang terdiri dari beberapa ratus orang. Sekali-sekali mereka lakukan pula serangan pada kota-kota kecil dan besar. Pada kunjungan komisi parlemen ke Aceh pada Januari 1954 para anggotanya sempat mencatat beberapa kali tembak-menembak di sekitar Banda Aceh dan Sigli. Selama komisi tinggal di Banda Aceh kaum pejuang mujahidin melemparkan bom-bom pembakar dan berusaha mengadakan pembakaran di dalam kota.⁶²⁹ Pada 17 Agustus 1954, pasukan *Darul Islam* memasuki dan menduduki Lamno, yang dikuasai selama dua hari. Sekitar waktu yang sama mereka menyerang Seulimeum, juga di Aceh Besar. Tahun berikutnya kaum pejuang mujahidin berusaha memasuki Idi dan menembaki Sigli. Serangan terhadap Idi merupakan satu petunjuk bahwa juga daerah-daerah lain Aceh ini masih menghadapi kegiatan-kegiatan *Darul Islam*, yang sesudah 1954 menjadi sering lagi. Di Aceh Barat, Tengah, dan Timur pun—daerah-daerah yang dianggap Pemerintah Republik relatif aman—*Darul Islam* menjadi lebih aktif, sebagian akibat kemarahan terhadap tingkah laku pasukan Republik dan sebagian karena gerakan pasukan Tentara Islam. Pada awal 1955 Hasan Saleh pindah dari Pidie ke Aceh Barat. Sesudah meninggalkan saudaranya Ibrahim Saleh memimpin di sini, dia lalu terus ke Aceh Timur, dengan tujuan terakhir Tapanuli. Pasukannya di Aceh Timur diperkuat satuan-satuan yang dipimpin Banda Chairullah, yang juga berasal dari Pidie. Pasukan lain dari Pidie, yang dipimpin A.G. Mutiara, masuk di Aceh Barat.⁶³⁰

Lebih daripada sebelumnya, *Darul Islam* di Aceh kini juga berusaha merugikan Pemerintah Republik secara ekonomis. Bukan saja mereka terus melakukan upaya mengganggu perhubungan, tetapi juga menunjukkan serangan pada bermacam perkebunan dan perusahaan industri. Sejumlah perkebunan damar di Aceh Tengah

Politik Mr. SM Amin, (Banda Aceh: Pustaka Murni Hati, 1956), hlm. 204. Untuk susunan Badan Kontak Pribadi Peristiwa Aceh lihat S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Aceh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 198. Pada Maret 1955 dibentuk Panitia Badan Penyelesaian Peristiwa Aceh yang diketuai T.M. Jahja. Seperti juga Badan Kontak Pribadi, dia sendiri menetapkan tugasnya mencari penyelesaian dengan mengadakan hubungan dengan Daud Beureueh maupun Pemerintah Republik Pusat. Prakarsa membentuk panitia baru ini dilakukan Persatuan Masyarakat Aceh (Perma) pada November tahun 1954. Lihat A.H. Gelanggang, *Ibid.*, hlm.20.

⁶²⁸ A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Aceh dan Kegagalan Politik Mr. SM Amin*, (Banda Aceh: Pustaka Murni Hati, 1956), hlm. 103.

⁶²⁹ Gelanggang, *Ibid.*, hlm. 105.

⁶³⁰ Gelanggang, *Ibid.*, hlm. 130, 132.

diserang dan dibakar. Di Aceh Timur ladang-ladang minyak menjadi sasaran serangan kaum pejuang mujahidin. Gerilyawan mencatat salah satu hasilnya yang terbesar pada Maret 1955, ketika meledak menyerang Pelabuhan Kuala Langsa, dengan membakari semua gudang (hanya gudang KPM yang luput secara misterius), dan mengakibatkan banyak sekali kerugian.⁶³¹

Sulit sekali Tentara Republik menumpas kegiatan-kegiatan pejuang. Pada 1956 Komando Militer Sumatera Utara terpaksa mengakui, semangat tentara pejuang mujahidin—yang kekuatannya ditaksir 1.400 orang, musuh mampu nyai pendukung dan simpatisan di hampir setiap desa. Di Aceh, demikian dinyatakan, satu syarat utama untuk melakukan perang gerilya dengan berhasil terpenuhi, yaitu dukungan rakyat setempat. Bahkan orang-orang yang pada mulanya menentang Negara Islam Indonesia, atau bersikap netral, dapat ditarik ke pihak pejuang mujahidin karena propaganda yang mereka lakukan.

Pimpinan tentara mengakui, tingkah laku yang tidak senonoh para prajuritnya sendiri menambah keberhasilan propaganda *Darul Islam*.⁶³² Prajurit-prajurit dari luar daerah—Batak Minangkabau, dan Jawa—kadang-kadang sangat menyakitkan hati orang Aceh dengan kelakuan mereka. Untuk memperbaiki hal ini Angkatan Darat mengeluarkan perintah kepada anggotanya agar berlaku baik terhadap rakyat setempat, dengan memberikan keterangan tentang masyarakat Aceh maupun nasihat bagaimana harus bersikap dalam masyarakat ini. Demikianlah mereka dilarang memasuki masjid memakai sepatu dan main judi serta minum minuman keras, dan diperingatkan agar menghormati adat istiadat setempat. Dalam hubungan ini mereka diberi tahu bagaimana bersikap sopan dalam menghadapi wanita Aceh, dengan menasihatkan mereka, bila ingin kawin dengan seorang gadis setempat, agar menghubungi orang tuanya dan kerabatnya, dan mengetahui aturan-aturan yang bersangkutan lebih dahulu.⁶³³

Namun, sikap pendirian Daud Beureueh makin ditentang. Khususnya di dalam Tentara Islam Indonesia Aceh terdapat banyak yang memikirkan untuk menyerah. Kelompok ini dipimpin Hasan Saleh, Panglima Divisi Teungku Chik Di Tiro dan Kepala Staf Tentara Islam. Ia menuduh Daud Beureueh berusaha menjerumuskan Aceh ke dalam suatu perang baru tanpa memikirkan nasib prajurit biasa dan rakyat pada umumnya yang harus menanggung akibat-akibatnya.⁶³⁴

Akibatnya pertempuran sangat banyak berkurang sesudah Ikrar Lam Teh. Namun, belum juga tampak akhir jihad menegakkan Negara Islam ini. Dua tahun lamanya lagi barulah kawan-kawan Daud Beureueh bulat hatinya dan benar-benar memisahkan diri dari pada Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Proklamasi Negara Islam Aceh

Gerakan berbisik dari kaki tangan Teungku Muhammad Daud Beureueh berjalan terus menerus dengan tidak diketahui sedikit pun oleh alat petugas. Pemimpin-pemimpin yang dipercayai telah dibai'ahnya. Sehingga mereka memegang peranan penting di tiap pelosok kota kampung mensosialisasikan. Mereka menjalankan rol filmnya dengan diam-diam tetapi berhasil. Hampir semua pamong praja di kecamatan dan desa telah dipengaruhinya. Pandu rakyat sendiri seorang pun tidak ada yang mengetahui kemana mereka akan dibawa kecuali beberapa pemimpinnya, itu pun yang benar-benar telah ada kepercayaan dan yang dapat menyimpan rahasia 100%. Rakyat

⁶³¹ Gelanggang, *Ibid.*, hlm. 115-119.

⁶³² Gelanggang, *Ibid.*, 12-13, 46.

⁶³³ *Ibid.*, 54-63

⁶³⁴ *Ibid.*, 41-42.

umum sama sekali tidak tahu akan gerakan yang akan diletuskan itu.⁶³⁵

Ketika *jihad* suci menegakkan Negara Islam meletus, pada hari Ahad malam Senin, kira-kira jam 01.00 tengah malam,⁶³⁶ Daud Beureu'eh mengumumkan proklamasi Islam yang bunyi teksnya sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim
PROKLAMASI

*Berdasarkan pernyataan berdirinya
Negara Republik Islam Indonesia
pada tanggal 12 Syawal 1308 / 7 Agustus 1949,
oleh Imam S. M. Kartosoewirjo
atas nama Ummat Islam Bangsa Indonesia,
maka dengan ini kami nyatakan,
DAERAH ATJEH DAN SEKITARNYA
menjadi Bahagian dari pada
NEGARA ISLAM INDONESIA.*

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!

Atjeh Darussalam,
13 Muharram 1372 / 21 September 1953.

*Atas nama
Ummat Islam Daerah Aceh dan sekitarnya*

t. t. d.

(Teungkoeh Muhammad Daud Beureueh)

Kumandang proklamasi ini, sebagaimana SM Kartosoewirjo menggambarkan, “menggemparkan dan mengdjutkan seloeroeh Indonesia, bahkan berku-mandang djauh melintasi lautan menembus tabir seluruh dunia” ini merupa-kan “perumuman (ulangan) Proklamasi Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949, jang karenanjaAtjeh dan sekitarnja mendjadi bagian (Komandemen Wilayah 5) Negara Islam Indonesia”.⁶³⁷ Atas nama masyarakat Islam Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh menyatakan Aceh dan daerah-daerah sekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia. Untuk membenarkan proklamasi ini ia mengemukakan alasan, bahwa pemimpin-pemimpin Republik di Jakarta telah menyimpang dari jalan yang benar. Republik Indonesia tidak berkembang menjadi suatu negara yang berdasarkan Islam, yang menurut pandangannya adalah satu-satunya kemungkinan yang terkandung dalam prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila. Sebaliknya, makin menjadi jelas bagi Teungku Muhammad Daud Beureueh bahwa para politisi Republik kian lama kian jauh juga beralih dari cita-cita ini. Maka disinggungunya usaha-usaha yang menempatkan tekanan yang lebih besar pada sila Pancasila yang lain: nasionalisme Indonesia, yang dengan tajam dibedakannya.

Agar supaya Negara Islam di Aceh itu dapat mewujudkan cita-cita dari proklamatornya, maka disusunlah suatu pemerintahan yang susunannya adalah seperti dijelaskan di bawah ini:

Kepala Negara

: Teungku Muhammad Daud Beureueh

⁶³⁵ M. Noer el-Ibrahimi, *Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1981), hlm 198.

⁶³⁶ S.M. Kartosoewirjo, *Statement Pemerintah NII 5 Oktober 1953*, hlm. 2.

⁶³⁷ *Ibid.*

Ketua Majelis Syura

: Teungku Amir Hoesin Al-Moedjahid

Susunan Kabinet

Perdana Menteri/ Menteri Dalam Negeri	: Hasan Aly
Menteri Keuangan/Kesehatan	: Teuku Ahmad Hasan
Menteri Pertahanan/Keamanan	: Kolonel Husin Yusuf
Menteri Kehakiman	: Teungku Zainal Abidin
Menteri Pendidikan	: Teungku Muhammad Ali Kasim
Menteri Penerangan	: A.G. Mutyara
Menteri Perhubungan	: Teungku Yusuf Hasyim
Menteri Sosial	: Teungku Harun B.E
Menteri Peperangan	: Hasan Saleh

Dengan tersusunnya struktur pemerintahan NBA-NII tersebut, maka Aceh benar-benar memiliki sebuah “negara” sendiri secara definitif, meski masih harus diperjuangkan lebih dulu. Aceh memiliki kabinet sendiri, kepala negara sendiri, seorang wali negara yang sudah lama diidam-idamkan. Teungku Daud Beureueh pun mengumumkan kepada seluruh rakyat, siapa saja, tua-muda, kaya miskin, laki-perempuan, pedagang, saudagar, pegawai dan juga orang asing yang non Islam tak perlu takut: keselamatan mereka dijamin. Sebuah pernyataan dari seorang yang benar-benar memiliki sebuah ‘kuasa’ yang independen, memerintah dan memimpin negeri yang selama ini berada di tangan penguasa-penguasa yang “salah urus”.

Yang menarik, orang asing yang non-Muslim pun dijamin keselamatannya. Sebuah perintah, kata-kata yang bermuatan hukum yang pasti. Siapakah di Aceh yang bisa membuktikan lagi, selain Teungku Daud Beureueh, bahwa asumsi Soekarno tentang negara Islam salah? Hukum berjalan dengan baik, selama Aceh berada di bawah naungan Darul Islam. Demikianlah, Teungku Daud Beureueh mengemukakan beberapa unsur pokok pidato Soekarno “yang malang” di Amuntai. Dengan mengemukakan keterangan Soekarno bahwa dia memilih negara nasional karena takut kalau-kalau jika terbentuk negara Islam beberapa daerah akan memisahkan diri, Daud Beureueh menyatakan memelopori dalam memisahkan diri dari suatu negara yang hanya didasarkan atas nasionalisme. Kata-kata Daud Beureueh membuktikan, tentang perbedaan antara negara agama atau Islam dan negara nasional tidak lagi merupakan sekedar wacana, tetapi telah berkembang menjadi suatu penentangan yang sesungguhnya.

Daud Beureueh menyatakan, rakyat Aceh memahami arti sebenarnya kata-kata “agama” dan “nasionalisme” dan setiap orang yang percaya bahwa orang yang beragama tidak mencintai negerinya barangkali tidak memahami Islam. Selanjutnya ia menegaskan, sebenarnya Republik Indonesia tidak menjamin kebebasan beragama dalam arti kata sesungguhnya. Dia tidak menerima kenyataan bahwa Islam tidak membedakan bidang keagamaan dengan bidang sekuler atau pandangan Muslim bahwa prinsip-prinsip Islam harus diterapkan dalam semua lapangan kehidupan. Jika memang terdapat kebebasan beragama yang sesungguhnya, maka syariat Islam haruslah berlaku di Aceh, mengingat bahwa seratus persen rakyat di Aceh adalah Muslim. Dalam keadaan seperti itu sama sekali tidak mungkin Jaksa Agung melarang khotbah yang mengandung politik, katanya, karena politik dan agama tak dapat dibedakan.

Hal lain yang diserang oleh Daud Beureueh terhadap Pemerintah Pusat adalah bahwa Pemerintah ini tidak pernah mengabaikan suatu permintaan Aceh apa pun dan bahwa ia sekarang menganggap Aceh —yang selama revolusi merupakan daerah “modal”

Republik— sebagai daerah yang tidak patuh.²² Tidak pula diberikan suatu konsesi apa pun terhadap permohonan otonomi Aceh yang ketika itu masih dibayangkan dalam kerangka Republik Indonesia. Daud Beureu'eh mempertanyakan mengapa perdebatan tentang ini harus menunggu terbentuknya Konstituante, dan apakah ini barangkali karena Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat hanya ingin menyisihkan persoalan ini.

Padahal, bahwa lembaga yang akhir ini mampu bertindak cepat telah diperlihatkan pada waktu pengubahan Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia kesatuan. Daud Beureueh menggarisbawahi kenyataan, rakyat Aceh dengan sabar telah menanti terbentuknya Konstituante selama bertahun-tahun, tetapi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyadari ini dan bahkan memutuskan menunda pemilihan umum. Ia menduga, barangkali pemerintah lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan rakyat. Selanjutnya dipertanyakannya, apakah pemerintah mungkin lebih memberikan bantuan dan dorongan kepada kelompok kecil mereka yang mempercayai Ketuhanan yang Maha Esa suatu keyakinan lain, atau kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, dengan secara menyolok bertentangan dengan cita-cita dan hasrat mayoritas.

Rakyat Aceh tidak ingin memisahkan diri dari saudara-saudaranya, Daud Beureu'eh menegaskan, tetapi tidak pula mereka ingin diperlakukan sebagai anak tiri. Dalam hubungan ini ia mengemukakan kurangnya fasilitas pendidikan yang baik dan kesempatan kerja bagi anak-anak Aceh, sedangkan tidak adanya sistem perhubungan yang memadai menghalangi rakyat dalam kegiatan ekonominya. Ia menambahkan, proklamasi Negara Islam Aceh tidaklah berarti bahwa telah terbentuk suatu negara dalam negara. Pada masa lalu Republik Indonesia dianggap sebagai jembatan emas menuju pelaksanaan cita-cita negara yang diidamkan sejak semula. Tetapi kini jembatan ini tidak lagi dianggap sebagai sarana komunikasi, melainkan lebih merupakan rintangan. Kesetiaan kepada Republik, yang didasarkan pada nasionalisme, telah lenyap sedangkan selanjutnya rakyat pun tidak merasa dipersatukan oleh suatu sistem hukum yang sama.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan bahwa proklamasi Negara Islam akan menimbulkan kekacauan dan bertentangan dengan hukum, Daud Beureueh menegaskan, sebaliknya kekacauan hukum yang berlakulah yang telah menimbulkan jihad suci menegakkan Negara Islam. Ia menasihati para pemimpin Republik agar tidak menggunakan kekerasan, tetapi menanggulangi inti pokok persoalan dan memperbaiki dasar-dasar negara mereka, juga kebijaksanaan mereka.²³

Jihad suci menegakkan negara Islam selanjutnya digambarkan kepada rakyat Aceh sebagai kelanjutan perlawanan sebelum Perang terhadap kolonialisme Belanda dan perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Republik Indonesia secara tegas dinyatakan telah kehilangan hak untuk bertindak atas nama proklamasi kemerdekaan. Bukan saja ia tidak memberikan kepada Islam tempat yang layak dalam masyarakat, tetapi lebih celaka lagi, sesungguhnya ia merupakan produk Belanda. Menurut kebiasaan gerakan-gerakan pejuang *mujahidin* lain, ia dijuluki nama "Republik Konferensi Meja Bundar". Ahli waris yang sah dari proklamasi Agustus 1945 adalah Negara Islam Indonesia, yang telah mengambil alih perjuangan untuk kemerdekaan setelah eksistensi Republik Indonesia berakhir sebagai akibat Pemerintahnya ditangkap Belanda Desember 1948.²⁴

Ketika mengajukan alasan yang terakhir, para pemimpin pejuang *mujahidin* mengalami sedikit kesulitan dalam menjelaskan mengapa mereka baru sekarang masuk Negara Islam Indonesia dan tidak sejak lahirnya pada 1949. Karena itu tekanan pada penangguhan pemilihan umum dan pada perubahan dalam pemerintah. Walaupun rakyat Aceh terus menerus telah mengharapkan dan dengan sabar menantikan permohonan mereka dikabulkan Jakarta, dua peristiwa ini merupakan bahan yang

terakhir. Maka, habislah kesabaran orang-orang Aceh untuk memaklumi dan mencoba mengerti Pemerintah Republik yang berdasarkan Pancasila terus menerus menjadi “budak” Belanda. Maka, sebagaimana dikatakan oleh SM Kartosoewirjo sendiri, “di Atjeh, pengikoet2 Pantjasila ini diberi nama “Belanda Hitam” ataw “Kafirin Indonesia.”⁶³⁸ Jelaslah bahwa sebutan ini terpancar dari alam pikir kultural orang-orang Aceh bahwa Pemerintah Republik di Pusat adalah *lamiet-lamiet* Belanda semata.

Sistem dan Struktur Pemerintahan Negara Islam Aceh

Sebagaimana DI di Jawa Barat pada awalnya struktur pemerintahan Negara Islam langsung dibuat, diisi dan langsung menjadi alat efektif untuk menjalankan perintah-perintah komandan dan keputusan-keputusan bersama, maka di Aceh pun alat-alat kelengkapan dari negara ini langsung dibuat dan disempurnakan dengan orang-orang yang memang sudah menyatakan sumpah setia atau *bai’at*⁶³⁹ terhadap Allah dalam mentaati perintah Ulil Amri. Untuk kelengkapan berdirinya sebuah Negara, maka disusunlah pemerintahan NII Aceh. Adapun susunan pemerintahan ketika itu adalah sebagai berikut:

1. Aceh dan daerah sekitarnya, merupakan satu daerah otonom luas, yang berbentuk wilayah (bagian NII).
2. Wilayah atau Propinsi dengan otonomi yang luas tersebut dipimpin oleh seorang Gubernur Sipil dan Militer yang berkedudukan di ibu kota Wilayah.
3. Gubernur Sipil dan Militer, merupakan Kepala Pemerintah Tertinggi dan Pemimpin tertinggi dari Angkatan Perang N.I.I. yang berada di daerah aceh dan daerah sekitarnya, oleh sebab itu ia pula merupakan Komandan Tentara Islam Indonesia Teritorium V. Divisi Teungku Tjik Di Tiro.
4. Untuk Wilayah, berada sebuah Dewan Syura (Dewan Pemerintah Daerah) dan sebuah Majelis Syura (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
5. Dewan Syura terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, dan 5 (lima) orang anggotanya.
6. Gubernur Sipil/Militer karena jabatannya, menjadi Ketua Majelis Syura.
7. Majelis Syura, dikepalai oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua serta jumlah anggota akan ditetapkan dengan peraturan yang akan ditetapkan.
8. Dewan Syura (D.P.D) merupakan badan Eksekutif dan Majelis Syura (D.P.R.D) merupakan badan Legislatif.
9. Gubernur Sipil dan Militer, karena jabatannya selain dari Ketua Eksekutif Wilayah, merupakan Wakil Pemerintah Pusat dari J. Muhammad Imam Negara.
10. Disamping Gubernur Sipil dan Militer, diperbantukan sebagai Staf Penasehat Militer, Dewan Militer, dengan Gubernur S. Muhammad sebagai Ketuanya dan Anggota-anggotanya terdiri dari Sdr. Wakil Ketua D.P.D. Kepala Staf Umum Divisi yang berada dalam Wilayah tersebut Sdr. Teungku Amir Husin Al Mujahid dan sdr. Kolonel Husin Yusuf.
11. Dewan Militer mempunyai kekuasaan, di antaranya:

⁶³⁸ *Statemen Pemerintah NII tanggal 5 Oktober 1953*, dalam Al Chaidar, *Ibid.*, bagian lampiran. Mungkin SM Kartosoewirjo ketika menuliskan statemen ini, ia sudah mendengar berita-berita dan khabar dari kurirkurirnya atau dari kurir-kurir Teungku Daud Beureueh yang dikirim dari Aceh. Pemahaman Kartosoewirjo terhadap *heart and mind* orang-orang Aceh cukup mengesankan.

⁶³⁹ Tentang jabatan-jabatan dan posisi militer dalam DI atau TII dan tentang Bai’at (sumpah setia kepada Allah, dan kepada Ulil Amri) di Aceh diuraikan dengan sangat baik oleh Ishak Ibrahim. Wawancara dengan Ishak Ibrahim, Banda Aceh, 24 Juli 2006.

- a. Memberi nasehat dan pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Sipil dan Militer, baik ada dimintanya maupun tidak, khusus dalam soal-soal Kemiliteran.
 - b. Menetapkan *beleid* dan garis-garis politik dari sudut strategis dan pertahanan.

Pertahanan dan Pimpinan, untuk seluruh Angkatan Perang, baik Militer maupun Mobilisasi Umum dan
 - c. Menyusun dan merencanakan koordinasi dalam lapangan Barisan-barisan Rakyat sukarela.
12. Wilayah Aceh dan sekitarnya, merupakan suatu Daerah Territorium tentara dengan kekuatan satu Divisi Besar, seterusnya yang tersebut: Tentara Islam Indonesia Territorium V Divisi Teungku Tjik Di Tiro.
 13. Tentara Islam Indonesia Territorium V Teungku Tjik Di Tiro, dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh sebuah Staf-Komando yang dipimpin oleh seorang Kepala Staf-Umum.

Apa yang sudah diatur dalam struktur pemerintahan NII di Aceh, dalam pelaksanaannya tidaklah sesulit yang dibayangkan karena banyak dari yang ikut bergabung, berbaiat dan berperang bersama-sama dengan Teungku Daud Beureueh adalah para pemimpin lokal hingga residen yang masih aktif, yang masih cakap dalam mengetik surat-surat dan membuat keputusan-keputusan eksekutif di tingkat lokal dengan pekerjaan-pekerjaan administratif seperti biasanya. Posisi apapun yang dipegang oleh para pejuang DI di Aceh ketika itu, dikerjakan dengan kemampuan teknis yang maksimal dan pekerjaan lapangan apapun, dilaksanakan dengan profesionalitas penuh tanpa pamrih, tanpa mengharap-harap gaji atau *reward* dari pimpinan. Semuanya karena Allah semata. Suasana berjuang seperti inilah yang dirasakan banyak pejuang DI Aceh pada waktu itu.⁶⁴⁰ DI Jawa Barat pun pada waktu mengirimkan bantuan untuk “mengentengkan beban yang lagi ditanggung oleh kawan2 pejuang sutji di Aceh.”⁶⁴¹

Pada mulanya Aceh dibayangkan sebagai suatu provinsi Negara Islam Indonesia dengan otonomi yang luas. Kepala provinsi ini adalah Tengku Daud Beureueh, yang seperti semasa perjuangan kemerdekaan menduduki jabatan gubernur sipil dan militer dan dalam kedudukan ini juga menjadi panglima Divisi Territorium V Tentara Islam Indonesia, Divisi Tengku Chik Di Tiro, dan wakil Pemerintah Pusat Negara Islam Indonesia. Dalam urusan sipil ia dibantu suatu dewan pemerintahan, yang disebut Dewan Syura. Juga diumumkan terbentuknya suatu parlemen, Majelis Syura.²⁵ Dalam urusan militer ia dibantu Dewan Militer, yang terdiri dari tiga orang: Daud Beureueh sendiri, Amir Husin al-Moedjahid, sebagai wakil ketua Dewan Syura, dan Husin Jusuf, sebagai Kepala Staf Divisi Tengku Chik Di Tiro. Pada tingkat-tingkat yang lebih rendah, tingkat kabupaten dan kecamatan, urusan militer dan sipil untuk sementara tetap terpisah, setidak-tidaknya dalam prinsip. Para komandan satuan tentara setempat tidak perlu menjadi kepala pemerintahan sipil, dan sebaliknya.²⁶

Dengan adanya bentuk negara federasi RPI dalam usahanya menangkal dan melenyapkan kesempatan pemerintah Soekarno memecah belah sesama kelompok oposisi negara baik dalam rakyat NBA/NII maupun dalam rakyat PRRI/Permesta. Amat disayangkan, kedua pihak antara PRRI/Permesta dan NBA/NII dalam memasuki federasi baru ini dengan rasa enggan. Perundingan-perundingan sebelumnya antara pemimpin-pemimpin *Darul Islam* dan PRRI/Permesta hampir tak ada hasilnya. Sekalipun telah dijanjikan kerjasama dan dukungan militer, hal ini tidak pernah terlaksana. Dalam kedua pihak juga terdapat orang yang terang-terangan menolak setiap bentuk kerja sama resmi. Di Sulawesi Selatan cumbu rayu Kahar Muzakkar

⁶⁴⁰ Wawancara dengan Teungku Ibrahim, seorang petugas PHB (Penghubung) DI di Pidie, Banda Aceh, 19 Juni 2006.

⁶⁴¹ *Statemen Pemerintah NII*, 5 Oktober 1953.

dengan Permesta sebagian menjadi sebab menyerahnya Bahar Mattaliu, sementara di Aceh hubungan yang demikian merupakan salah satu faktor yang mendorong terbentuknya Dewan Revolusi. Pembelotan-pembelotan sekaligus memaksa kaum pejuang mujahidin *Darul Islam* yang tersisa untuk bekerja sama lebih erat dengan PRRI/Permesta.

Para pejuang PRRI di Sumatera pada akhir 1959 terbagi dalam tiga kelompok yang berbeda, yang menganjurkan jalan yang berbeda-beda. Satu kelompok ingin semata-mata melanjutkan PRRI, bagaimana pun sudah hampir tidak ada artinya lagi akibat aksi-aksi Angkatan Darat, Kelompok lain, dengan Zulkifli Lubis dan Maludin Simbolon sebagai wakil-wakil utamanya, menyetujui proklamasi Republik Indonesia Federal, sekalipun menentang kerja sama dengan *Darul Islam*. Faksi yang ketiga menyetujui bergabung dengan *Darul Islam*. Jurubicara utamanya adalah dua orang bekas perdana menteri, yaitu: Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, dan politikus Indonesia yang berpengaruh, Sjafruddin Prawiranegara. Ketiga mereka ini lari dari Jakarta untuk bergabung dengan panglima-panglima daerah yang merasa tidak puas di Sumatera pada Desember 1957.³²

RPI tidak banyak harganya baik dalam arti militer atau pun arti politik. Persekutuan yang mengkhawatirkan antara orang-orang muslim seperti Daud Beureueh dan Kahar Muzakkar yang selama bertahun-tahun telah bertempur untuk menegakkan dan mempertahankan Negara Islam Indonesia, orang-orang muslim yang terus-menerus dalam waktu yang lama menduduki jabatan-jabatan penting di Republik Indonesia, dan panglima-panglima militer seperti Maludin, Simbolon, Kawilarang, dan Warouw yang selama masa berikutnya telah memimpin aksi-aksi militer Republik Indonesia terhadap *Darul Islam*, dan beberapa orang dari mereka itu Kristen pula, sangatlah berbahaya. RPI mungkin mewakili, seperti yang dilukiskan Hasan Muhammad Tiro, suatu tindakan “untuk menjamin hak suci mereka untuk membentuk pemerintahan sendiri yang diingkari kediktatoran Soekarno di Jakarta yang memaksakan kolonialisme Jawa terhadap lebih dari selusin bangsa”, atau penolakan terhadap “kolonialisme baru, Jawa sawo matang”, tetapi hanya dendam terhadap Soekarno dan orang Jawa sajalah yang merupakan persamaan mereka.

Akibatnya, RPI sangat singkat usianya. Pada April 1961 Maludin Simbolon dan seorang panglima militer lain, Achmad Husein (Achmad Husein), memisahkan diri dari RPI untuk membentuk Pemerintah Darurat Militer.³³ Kemudian mereka mengeluarkan imbauan kepada para pejuang untuk menghentikan perlawanan mereka dan menyerahkan diri pada Juni dan Juli. Pemimpin-pemimpin sipil menyusul setelah menerima janji diberi ampun oleh Soekarno.³⁴

Sebetulnya, meskipun telah terjadi penyerahan-penyerahan kepada Pemerintah Republik Indonesia, pemimpin-pemimpin RPI sampai bulan April bahkan sampai bulan Juni 1961 masih optimis bahwa pada suatu waktu kemenangan akan dicapai oleh RPI. Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang RPI dalam amanatnya kepada alat-alat kekuasaan Negara RPI baik sipil maupun militer dan pemimpin rakyat pada tanggal 29 April 1961 menyatakan bahwa “Betapa beratnya pun tekanan militer dari pihak regime Soekarno dan meskipun memang telah terjadi beberapa penyerahan berkat propaganda palsu musuh, akan tetapi umumnya kekuatan militer dan kekuatan rakyat RPI masih tetap utuh dan sanggup pada saat-saat yang berat mengadakan pukulan-pukulan yang hebat terhadap kubu-kubu pertahanan regime Soekarno. Bahwa apa yang dicanangkan itu bukanlah suatu pernyataan yang hampa, akan tetapi pernyataan itu didasarkan kepada fakta-fakta yang diketahui oleh pemimpin-pemimpin RPI.”

Pada tanggal 25 Agustus 1961, secara resmi Mr. Sjafruddin Prawiranegara, perdana menteri kaum pejuang, menyerah di Padang Sidempuan. Lalu diapun menasihati para pengikutnya untuk menyerah, termasuk tiga kali pengiriman surat kepada Teungku

Muhammad Daud Beureueh mengajak untuk melapor kepada Pemerintah Republik Indonesia.³⁵ Setelah Mohammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara menyerah ke pangkuan RI, pada akhirnya Teungku Muhammad Daud Beureu'eh mencoba tetap bertahan dengan keyakinannya semula yakni terus melanjutkan revolusi Islam di Aceh. Dengan segala kekuatan senjata dan pasukan yang sangat terbatas —menterinya pun hanya tinggal sepuluh orang karena banyak yang turun gunung— dicetuskanlah berdirinya *Republik Islam Aceh* (RIA) pada tanggal 15 Agustus 1961.

Dalam struktur kelembagaannya Republik Islam Aceh pada dasarnya telah putus komunikasi dengan kekuatan-kekuatan pergerakan lainnya di Indonesia, termasuk gerakan *Darul Islam* di Jawa Barat. Kesulitan perhubungan dan lalu-lintas penghubung atau kurir menyebabkan sebagian besar surat-menyurat antara Teungku Daud Beureueh dan SM Kartosoewirjo stagnan. Hal mana bagi Teungku Muhammad Daud Beureueh sendiri sikap seperti itu dilakukan karena berita tentang pergerakan pusat *Darul Islam* di Jawa Barat mengalami tekanan yang cukup berat dari pihak militer dengan diberlakukannya Pagar Betis.⁶⁴² Oleh karena itu, Teungku Muhammad Daud Beureu'eh berinisiatif tetap melanjutkan jihad suci menegakkan syariat Islam dan negara Islam di bumi Aceh.

Pada tahun 1962, ketika mendapat tawaran dari Nasution melalui Panglima/Penguasa Perang Kodam I Iskandar Muda, Kolonel Muhammad Jasin, mengadakan perundingan dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk menyelesaikan konflik berdarah di Aceh. Dalam perundingan itu pemerintah akan memberikan hak penuh untuk melaksanakan hukum *syari'at Islam* bagi rakyat Aceh. Setelah mengadakan rapat khusus dengan para tokoh ulama serta mengambil *mudharat* dan manfaatnya dari sebuah perundingan itu, pada akhirnya diputuskan untuk menerima tawaran pemerintah RI. Selanjutnya, Undang-Undang syariat Islam pun telah dirumuskan dengan baik. Akan tetapi tawaran itu hanya sebagai alat untuk melumpuhkan kekuatan perjuangan mujahidin RIA. Hal itu terlihat ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh dan para mujahidin RIA turun gunung, bahwa perundingan itu hanya merupakan siasat untuk menangkap beliau. Sama persisnya dengan Soekarno yang membuat perangkap pada tahun 1948. Pemerintah RI, dalam pandangan masyarakat Aceh, kembali menampakkan belang yang sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang anti akan Islam, akan tetapi bagi para *mujahidin* Aceh, cita-cita *Darul Islam* merupakan tujuan hidup yang abadi.***



⁶⁴² Pagar Betis, adalah strategi militer yang diajarkan di West-Point dan Breda untuk mengatasi pemberontakan bergerilya yang diekanl dengan human-shield strategy. Namun, bagi kalangan *Darul Islam*, khususnya di Jawa Barat, Pagar Betis adalah sebuah singkatan dari Pasukan Gabungan ABRI Rakyat Berantas Tentara Islam. Strategi ini juga dipergunakan di Aceh ketika Nyak Adam Kamil menyisir beberapa bagian Geumpang, Idi, dan Perlak.

BAB 6

DITABUHNYA GENDERANG ‘PERANG SABIL’ DAN ‘MILITAIRE BIJSTAND’

REAKSI Pemerintah terhadap penyelesaian Gerakan DI/TII Aceh adalah dengan peberlakuan *Militaire Bijstand* (Daerah Berbantuan Militer) bukan *Staat van Oorlog en Beleg* (Keadaan Darurat Perang). Penentuan status tersebut, di satu sisi dipersepsikan sebagai keberhasilan Gubernur S.M. Amin, yang menggantikan A. Hakim, meyakinkan Pemerintah Pusat untuk tidak memberlakukan status Darurat Perang (*Staat van Oorlog en Beleg*). Menurut *Militaire Bijstand* koordinasi keamanan berada di bawah tanggung jawab sipil, yaitu Gubernur S.M. Amin, sedangkan pihak tentara (Kolonel Simbolon) hanya mensuplai personel militer sesuai dengan permintaan Gubernur. Pelaksanaan *Militaire Bijstand* tidak mencakup seluruh Aceh, tetapi hanya meliputi Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara dan kadang-kadang meluas ke Aceh Timur dan Aceh Tengah.⁶⁴³

Untuk mendukung pelaksanaan *Militaire Bijstand* di Aceh yang didasari pada

⁶⁴³ S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Aceh*, (Jakarta: Soerongan, 1956), hlm. 300-301. Lihat juga Insider, *op. cit.* hlm. 186-193.

Keputusan Presiden No. 175 Tahun 1952, Pemerintah telah menerjunkan sebanyak 4 batalyon tentara dan 13 batalyon Mobrig ke seluruh Aceh. Dalam kaitannya dengan itu Pemerintah menyatakan bahwa tugas tentara dalam penyelesaian Peristiwa Daud Beureueh ialah untuk memungkinkan Pemerintah menjalankan kebijakan bagi kepentingan rakyat Aceh khususnya dan rakyat Indonesia umumnya. Seluruh Daerah Aceh harus tetap dikuasai Pemerintah dan terhindar dari pengacau. Ulama-ulama, di antaranya Teungku Abdussalam Meuraksa, Teungku Makam, Teungku Hasan Krueng Kale, Teungku Saleh Meusigit Raya dan Teungku Muda Wali yang tidak menyebelahi kepada pemberontak diajak turut serta menggerakkan rakyat yang telah menyebelahi kepada pemberontak untuk menginsyafi kesalahan mereka dan membantu kekuasaan alat-alat negara. Sementara itu patroli harus dilakukan untuk mengejar pemimpin-pemimpin pemberontak, dan Angkatan Udara ditugaskan untuk membantu gerakan Angkatan Darat.⁶⁴⁴

Dengan tekanan kekuatan militer yang besar tersebut Pemerintah di bawah Kabinet Ali Sostroamidjojo berkeyakinan bahwa kaum pemberontakan dapat ditumpas pada akhir tahun 1953 atau paling lambat pada Maret 1954. Dengan keyakinan tersebut Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo berkeras dalam menyelesaikan persoalan Aceh, Pemerintah tidak akan mau berkompromi dengan pihak pemberontak.⁶⁴⁵ Sikap keras Ali Sostroamidjojo dalam penyelesaian Pemberontakan DI/TII Aceh terlihat saat mengemukakan pendapat Pemerintah tanggal 14 April 1954 yaitu "...setiap pemberontakan atau pengacau dengan senjata harus diberantas dengan senjata pula..."⁶⁴⁶ Keyakinan Ali Sostroamidjojo tersebut ternyata meleset jauh karena sampai dengan kabinetnya jatuh tahun 1955 keadaan Aceh masih belum bisa dipulihkan.

Peristiwa Idi dan Peureulak berimplikasi terhadap proses perebutan kekuasaan di daerah-daerah lainnya karena pihak keamanan mulai bersiaga. Hal ini terbukti saat gerombolan dari Idi dan Peureulak mau merebut Langsa gerakan mereka dapat dipatahkan oleh pihak keamanan. Demikian juga saat Hasan Aly berangkat dari Kutaradja menuju Sigli untuk menggempleng pemberontak di kota itu terpaksa ia harus mengalihkan niatnya dan mengalihkan kendaraannya ke kam-pungnya di Sanggeu karena aparat keamanan kota Sigli sudah dalam keadaan siaga.

Meskipun demikian, gerakan pemberontakan juga menjalar ke seluruh wilayah Aceh. Di Aceh Utara pasukan pemberontak yang berada di bawah Husen Yusuf, H. Abu Bakar Bireun, H. Afan, Teungku Syekh A. Hamid dan H. Ibrahim hanya mampu menguasai Lhok Sukon dan ibukota-ibukota kecamatan, sedangkan kota Lhokseumawe dan Bireun tetap berada dalam kekuasaan tentara dan polisi, walaupun mereka telah berkali-kali mencoba melancarkan serangan. Keadaan yang sama juga terjadi di daerah Pidie, tempat Teungku Daud Beureueh dan Hasan Ali berada. Walaupun berkali-kali telah dicoba untuk direbut namun Kota Sigli tetap berada di bawah kekuasaan aparat keamanan, sedangkan Meureudu baru dapat direbut setelah mendapat bantuan dari pasukan Sidikalang yang dibawa Ibrahim Saleh.

Di Aceh Besar pasukan pemberontak yang berada di bawah pimpinan Ishak Amin, Abdul Gani Usman, dan Teungku H.A. Hasballah Indrapuri juga hanya berhasil merebut kota-kota kecamatan seperti Seulimeum, Indrapuri dan Lhok Nga. Demikian juga di Aceh Barat, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Teungku Hasan Hanafiah, T.R. Idris, dan Teungku Zakaria Yunus hanya berhasil menduduki beberapa kecamatan, sedangkan kota Meulaboh berhasil diamankan pihak keamanan.⁶⁴⁷

⁶⁴⁴ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Da'wah, 2001), hlm. 187-188.

⁶⁴⁵ *Ibid.* hlm. 196.

⁶⁴⁶ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 326.

⁶⁴⁷ M. Isa Sulaiman, *Ibid.*, hlm. 289- 291.

Takengon merupakan satu-satunya ibukota kabupaten yang berhasil di-duduki pemberontak melalui pertempuran yang dipimpin oleh Ilyas Leube dan M. Saleh Adri. Aparat Pemerintah yang tetap setia mengungsi ke Bireun, sementara Bupati M. Husin yang berpihak kepada pemberontak berhasil ditangkap. Sebaliknya Tapaktuan walaupun dapat dikuasai oleh pemberontak di bawah pimpinan Teungku Zamzami Yahya dan M. Saleh Kapa, namun mereka tidak berhasil meng-ambil alih kekuasaan karena Sekretaris Kabu-paten J.A.M. Hutabarat dan Perwira Distrik Militer Letnan Hasan Samosir telah mengungsikan pemerintahan ke Kandang, Bakongan. Kegagalan menguasai pusat-pusat pemerintahan baik ibukota keresidenan maupun kabupaten (kecuali Takengon) tentulah membuyarkan skenario perang yang telah disusun pemberontak sebelumnya. Tempat-tempat tersebut telah berubah fungsinya menjadi basis pertahanan Republik dalam merebut kembali daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kelompok pemberontak.⁶⁴⁸

Pertempuran-pertempuran frontal yang dilakukan oleh pemberontak sejak awal pemberontakan hasilnya tidak sesuai dengan skenario awal tersebut telah mengakibatkan pasukan mereka tercerai-berai. Sejak saat itu Hasan Saleh menata kembali pasukan pemberontak yang masih tersisa dan me-nempuh strategi perjuangan baru yaitu perang gerilya, dengan taktik inti-midasi dan pengacauan terhadap posisi aparat keamanan negara. Taktik ter-sebut direalisasikan melalui tindakan-tindakan pencegahan atau penghadang-an terhadap konvoi atau patroli militer, pengrusakan prasarana dan sarana perhubungan seperti jembatan dan halte kereta api, jaringan telepon, men-culik dan membunuh lawan politik, dan penyebaran pamflet terutama “Suara Gerilya Rimba Raya” yang berisi ancaman terhadap mereka yang merugikan kepentingan gerombolan.

Untuk mendukung strategi gerilya tersebut, pasukan pemberontak di-pencar-pencar berdasarkan daerah asal mereka di bawah komandan-koman-dan setempat. Namun demi-kian, kekuatan utama pemberontak berada di Pidie karena tenaga terlatih, terutama tentara desersi dan persenjataan yang lengkap hanya terdapat di lingkungan Resimen I Gajah Putih, di bawah pimpinan A.R. Hasyim, dan kemudian diganti oleh Ibrahim Saleh. Adapun markas resimen itu berada di Pintu I sebuah lokasi strategis yang diapit oleh pegunungan di pedalaman Tiro. Resimen II Syiah Kuala atau Batee Kureng di Aceh Utara di bawah komandan Teungku Syekh A. Hamid dan Yusuf Hasjmy. Resimen III di Aceh Timur di bawah komandan A.R. Hanafi, —yang mangkat tahun 1955 — dan diganti oleh Ghazali Idris. Resimen IV Teungku Chik Batee Tunggal di Aceh Barat-Selatan di bawah komandan Tg. Hasan Hanafiah, yang setelah ditangkap tahun 1954 diganti oleh T.R. Idris. Resimen V Laut Tawar di pedalaman Aceh Tengah dan Aceh Utara di bawah komandan Ilyas Leube. Resimen-resimen itu tunduk di bawah Divisi TII V Teungku Chik Ditiro di bawah panglima Teungku M. Daud Beureueh yang sekaligus Gu-bernur Sipil Militer NII. Dia dibantu oleh Kastaf Umum Hasan Aly dan 2 orang Dewan Militer, yaitu Teungku Amir Husin Al Mujahid dan Husin Yusuf.

Untuk menunjang operasi perjuangan, di samping peng-organisasian militer kaum pemberontak juga membangun birokrasi sipil. Gubernur Militer Teungku Daud Beureueh, yang merupakan pimpinan tertinggi dibantu oleh Majelis Syu-ra yang terdiri antara lain Teungku H.A. Hasballah Indrapuri, Teungku Syekh A. Hamid dan Teungku H. Abdullah Ujong Rimba. Tiap hirarki pemerintahan yang ada di bawah peme-rintahan pemberontak diangkat pejabat sipil yang terdiri dari bupati, wedana, camat dan *imeum mukim*. Namun demikian, dalam mobilisasi perjuangan birokrasi sipil dan militer dipa-yungi dalam komandemen-komandemen.⁶⁴⁹

Setelah berakhirnya Kongres Batee Kureng akhir Sep-tember 1955 status daerah dan susunan pemerintahan terjadi perubahan besar. Daerah Aceh yang tadinya

⁶⁴⁸ *Ibid.*

⁶⁴⁹ *Ibid.* hlm. -305- 305.

merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia menjadi Negara Bagian Aceh, Negara Islam Indonesia; Sistem Pemerintahan Komandemen yang dualistis berubah menjadi sistem pemerintahan biasa; dan di dalam Negara Bagian Aceh terdapat Majelis Syuro dan sebuah kabinet. Sebagai Kepala Negara pertama terpilih Teungku M. Daud Beureueh, dan ketua Majelis Syura semantara terpilih Teungku Amir Husin Al Mujahid. Mulai saat itu terbentuk pula kabinet pertama dengan susunan sebagai berikut:

1. Perdana Menteri merangkap
Menteri Dalam Negeri : Hasan Ali
2. Menteri Keuangan dan
Kesehatan : T. A. Hasan
3. Menteri Pertahanan dan
Keamanan : Husin Yusuf
4. Menteri Ekonomi dan
Kemakmuran : T. M. Amin
5. Menteri Kehakiman : Teungku Zainal Abidin
6. Menteri Pendidikan : Teungku M. Ali Kasim
7. Menteri Penerangan : A. Gani Mutiara⁶⁵⁰

Dalam perkembangan selanjutnya diadakan dua buah ke-menterian baru yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sosial yang masing-masing dipimpin oleh Teungku Ju-suf Hasjim dan Teungku Harun B.E. Selanjutnya, Husin Yu-suf yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan digantikan oleh Hasan Saleh yang memakai jabatan baru ya-itu sebagai Menteri Peperangan.⁶⁵¹

Setelah terbentuknya Dewan Repolusi pimpinan Hasan Saleh pada bulan Mei 1959 DI/TII Aceh terpecah menjadi dua, sebagian berada di bawah Hasan Saleh yang tidak lama kemudian membubarkan diri setelah tercapai persetujuan dengan Misi Hardi dan sebagian lagi berada di bawah Teungku M. Daud Beureueh yang melanjutkan pemberontakan. Kelompok Daud Beureueh yang melanjutkan pemberontakan membentuk kabinet baru yang terdiri dari orang-orang yang tetap setia kepadanya, yaitu:

1. Perdana Menteri merangkap
Menteri Keuangan dan
Kemakmuran : Hasan Aly
2. Menteri Dalam Negeri : Teungku Sulaiman Daud
3. Menteri Peperangan : Teungku H. Affan
4. Menteri Pendidikan dan
Penerangan : Saleh Adri
5. Menteri Kehakiman : Teungku Zainal Abidin.⁶⁵²

Untuk mendukung jalannya perjuangan, kelompok pemberontak mendapatkan dana untuk membeli persenjataan, pakaian, obat-obatan, dan keperluan lainnya yang dipungut dari penduduk. Pungutan dana tersebut resmi atas instuksi Teungku M. Daud Beureueh tanggal 5 April 1954 yang isinya "Perang menegakkan Negara Islam adalah Fardhu Ainyang wajib dikerjakan oleh tiap rakyat yang memeluk agama Islam". Oleh karenanya dana perjuangan wajib dipungut bagi wra yang tidak memungut senjata.⁶⁵³ Jenis nafkah perang yang mereka kumpulkan terdiri dari Senif, Ibnu Sabil dan Mualaf dari zakat fitrah, infaq kendaraan bermotor dan sepeda, cukai galian pasir, cukai ternak dan cukai dari komoditi pertanian.⁶⁵⁴

Selain itu kelompok pemberontak juga mengambil cukai dari perkebunan-pekebunan besar yang ada di Aceh. Pihak perkebunan tidak punya pilihan lain kecuali

⁶⁵⁰ M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.* hlm. 5.

⁶⁵¹ *Ibid.*

⁶⁵² *Ibid.*

⁶⁵³ Insider, *op. cit.* hlm. 96-97.

⁶⁵⁴ M. Isa Sulaiman, *op. cit.*, hlm. 306.

harus mematuhi untuk menjamin kelancaran usahanya, karena saat itu mereka tidak dapat mengandalkan perlindungan dari pasukan Pemerintah. Pembayaran pajak terhadap kelompok pemberontak tersebut tidak dilaporkan kepada Pemerintah. Untuk menjamin keselamatan dan kedudukan pimpinan perkebunan, kelompok pemberontak merekayasa seakan-akan pajak tersebut dipungut di bawah todongan senjata. Situasi ini terus berlangsung sampai penyelesaian masalah ini tuntas dilakukan pada awal tahun 1960-an.⁶⁵⁵

Gerilya: Dari Desa Menyerang Kota

Pasukan TII (Tentara Islam Indonesia) Darul Islam Aceh, selama dua minggu pertama pemberontakan menyerang berbagai kota kecil dan kota besar, termasuk Banda Aceh. Aceh hampir sepenuhnya dikuasai oleh Darul Islam. Rencana menyerang kota yang belakangan ini baru diketahui Polisi sehari sebelum malam pemberontakan dimulai, yaitu 19 September 1953.⁶⁵⁶ Di pantai timur serangan dipusatkan pada kota-kota yang sepanjang jalur kereta api mulai dari Banda Aceh, lewat Seulimeum di Aceh Besar, Sigli dan Meureudu di Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe di Aceh Utara, dan Idi, Peureulak dan Langsa di Aceh Timur, hingga ke Medan. Tanpa kata-kata, tanpa riuh-riuh, gendang “perang sabil” sudah ditabuh oleh para pejuang Darul Islam Aceh. Hampir semua rakyat Aceh menjadi *mujahidin* DI. Semua pejuang sejati hanya butuh satu tempat: front pertempuran. Di sinilah nyawa dan semangat dipertaruhkan, hidup atau mati, membunuh atau terbunuh, menjadi syuhada atau *cuak*,⁶⁵⁷ menjadi pahlawan atau pengecut, yang kesemuanya bermuara hanya pada dua pilihan: mati syahid atau menang.⁶⁵⁸ Jihad waktu itu benar-benar karena Allah.⁶⁵⁹ Bukan karena ingin memperkaya diri dengan mengutip *infaq*, *shaqaqah* atau *zakat* atau *pajak nanggroe* (pajak negara), melainkan karena memang para pejuang DI Aceh adalah “Islam minded”.⁶⁶⁰

Seruan perang telah berkumandang, panggilan jihad telah memanggil para pemuda dan orang-tua untuk berangkat ke *front*, menjalankan wajib suci menegakkan *li Ila’i Kalimatillah*. Maka, sebuah pos kecil milik Mobrig (Polisi) di Peureulak, yang anggotanya kira-kira sepuluh petugas, termasuk yang pertama diserang. Baik pos polisi maupun Kota Peureulak diduduki pasukan pemberontak yang dipimpin Ghazali Idris tanpa suatu perlawanan pun dalam waktu dua jam. Pada tempat-tempat yang strategis diadakan penjagaan dan bendera *Darul Islam* pun dikibarkan dari gedung-gedung penting di kota itu.⁶⁶¹ Sesudah itu dan beberapa hari berikutnya kota-kota yang berdekalan, Idi dan Bayeuen, pun direbut lagi-lagi tanpa perlawanan sedikit pun. Pendudukan semua kota ini banyak dipermudah dukungan yang diperolehnya para pejuang DI dari sejumlah pegawai negeri setempat. Di Peureulak asisten wedana A.R. Hasan, dan di Idi inspektur polisi Amin-uddin Ali yang membantu barisan perjuangan DI.⁶⁶² Para pejabat

⁶⁵⁵ *Ibid.*

⁶⁵⁶ A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. SM Amin*, (Banda Aceh: Pustaka Murni Hati, 1956), hlm. 71.

⁶⁵⁷ *Cuak*, (Bahasa Aceh) berarti pengkhianat, mata-mata. Di beberapa daerah lainnya, para pengkhianat ini disebut dengan istilah *lhoh* yang juga bermakna sama.

⁶⁵⁸ Moto hidup hampir semua pejuang DI di Aceh adalah “*Ist kariman aumut syahidan*” (hidup mulia atau mati syahid). Moto ini sangat sesuai dengan prinsip moral dan mentalitas rakyat Aceh yang sarat dengan ekstrimitas.

⁶⁵⁹ Wawancara dengan Teungku Ibrahim A. Rahman, Banda Aceh, 28 Juni 2006.

⁶⁶⁰ S.M. Kartosewirjo, “Statement Pemerintah NII, Tanggal 5 Oktober 1953”, dalam Al Chaidar, *Pemikiran Proklamator Negara Islam Indonesia, SM Kartosoewirjo*, (Jakarta: darul Falah, 1999), bagian lampiran.

⁶⁶¹ Gerakan *Darul Islam* Aceh mempunyai empat bendera: sebuah bendera merah dengan bintang dan bulan sabit putih, sebuah bendera hijau dengan bintang dan bulan sabit putih, sebuah bendera merah dengan bulan sabit putih dan empat bintang, dan sebuah bendera putih dan merah dengan bulan sabit pada jalur merah dan bintang di jalur putih. *Pikiran Rakyat*, tanggal 4-11-1953.

⁶⁶² Laporan SM Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 60-61, mengukuhkan, Asisten Wedana Peureulak, A.R. Hasan memihak pemberontak. Yang belakangan ini mengetahui sebuah rapat pada 21 dan 22 September. Di sini nasib pemberontakan ini dibicarakan dan

lokal, sipil dan militer ini, kemudian oleh Pemerintah Pusat dicabut jabatannya dan diberi sanksi yang berat. Tapi, apapun risikonya, bagi orang-orang Aceh tidak menjadi mas-alah. Yang penting adalah berjuang. Komunalitas dalam pemberontakan adalah tradisi politik Aceh yang tak pernah hilang.

Sesudah merebut Idi, Bayeuen, dan Peureulak dan meng-hentikan semua lalu lintas kereta api, pasukan pemberontak bergabung menuju Langsa, ibukota Aceh Timur. Untuk tujuan ini semua bus dan mobil pribadi disita untuk mengangkut pasukan. Sampai pada saat itu kaum pemberontak hanya sedikit mendapat perlawanan, dan Polisi mereka lucuti tanpa mengalami kesulitan sama sekali. Sejenak tampaknya seolah-olah mungkin pula Langsa mereka rebut tanpa melepaskan sekali tembakan pun. Karena penduduk kota ini, dengan tidak adanya bupati Aceh Timur (yang bagaimana pun memihak kaum pemberontak) dan kepala Polisi, yang kedua-duanya masih berada di Medan, sangat ingin menyerah. Karena itu dikirimkanlah utusan ke Peureulak dan Bayeuen untuk menyampaikan kepada kaum pemberontak maksud keinginan mereka dan membicarakan syarat-syarat penyerahan dengan mereka. Mereka ini kembali dengan pesan, pasukan *Darul Islam* bagaimana pun akan menuju Langsa untuk mengum-pulkan senjata Tentara dan Polisi yang ditempatkan di sana. Rencana menyerah ini dihalangi kepala Polisi ketika kembali dari Medan yang sebaliknya menyodorkan ultimatum kepada kaum pemberontak untuk menyerahkan senjata mereka. Pa-sukan *Darul Islam* mendekati Langsa dari barat dan utara serta melancarkan serangan bersama terhadap asrama Polisi Militer dan Mobile Brigade⁶⁶³ pada 21 September. Tentara Republik yang telah mendapat bala bantuan baru dari Medan dapat memukul serangan ini. Kekalahan kaum pemberontak di Langsa merupakan titik balik dalam pertempuran di Aceh Timur. Pada 23 September 1953 pasukan Republik merebut kembali Bayeuen, dan dalam dua hari berikutnya Idi dan Peureulak.

Di Aceh Utara ibukota daerah Lhokseumawe sering diserang dengan hebat, tetapi selalu gagal, pertama kali pada pagi hari 21 September 1953, ketika para pejuang Darul Islam mengundurkan diri sesudah bertempur kira-kira empat jam. Serangan Tentara Islam Indonesia di Aceh ini penuh dengan im-provisasi, penuh dengan *trial and error*; kaum TII memperbaharui taktik dan strategi beberapa kali seminggu. Dalam hari-hari berikutnya tetapi lagi-lagi tanpa hasil, walaupun pada satu saat keadaan menjadi begitu gawat hingga diper-timbangkan untuk mengungsikan penduduk. Sebuah kota lain di Aceh Utara, Bireuen, mereka duduki sebentar. Demikian pula Seulimeum di Aceh Besar, yang direbut pada 21 September. Ketika tentara DI menyerangnya, garnisun Polisi Republik tidak memberikan perlawanan. Dalam pantauan SM Kartosoewirjo, "beberapa markas polisi RIK dan markas TRIK diserang, disapu bersih dan dirampas sendjatanja, sepanjang pantai Timur hingga bagian Barat dan Utara. Be-ratus2 putjuk sendjata musuh djatuh ditangan A.P.N.I.I. Alhamdu lillah! Muddah2an selandjutnja", demikian harapannya.⁶⁶⁴

Di Pidie, tentara Darul Islam gagal merebut Sigli. Mereka lebih berhasil di Tangse, Geumpang, dan Meureudu, tetapi kota yang terakhir ini sempat ba-nyak menyulitkan mereka. Di samping itu, baru direbut sesudah serangan di-lakukan oleh "pasukan kawakan *Darul Islam Aceh*" dan sesudah pembela-pembelanya kehabisan peluru. Pasukan yang menduduki Meureudu terdiri dari satuan prajurit Angkatan Darat yang berasal dari Aceh, dipimpin Hasan Saleh, yang ketika pem-berontakan meletus melakukan desersi dan bergerak dari Sidikalang di Tapanuli, tempat mereka bertugas

didirikan cabang Tentara Islam Indonesia.

⁶⁶³ Mobile Brigade, adalah unit pasukan pengamanan khusus kepolisian, disingkat *Mobrig*. Mobrig ini adalah pasukan yang sangat menyeramkan dalam ingatan historis orang-orang Aceh. Mobrig memiliki pos-pos penjagaan di sepanjang jalan di seluruh Aceh yang disebut BOP (*Brigade Operation Post*). BOP inilah menjadi semacam "pangkalan kematian" dalam persepsi orang-orang kampung dikarenakan operasi mereka yang melampaui batas. Wawancara dengan Saudah Hasan, Geudong, 15 Juni 2006.

⁶⁶⁴ S.M. Kartosoewirjo, "Statement Pemerintah NII Tanggal 5 Oktober 1953", dalam Al Chaidar, *Op.cit.*

kembali ke Aceh Utara. Hasan Saleh sendiri sudah diberi cuti panjang sebelum meletus pemberontakan.

Di Aceh Tengah pasukan *Darul Islam* menduduki Ta-kengon. Seperti juga di Meureudu, mereka baru dapat memasuki kota sesudah pasukan Republik kehabisan amunisi. Kota lain yang jatuh adalah Tapak Tuan di Aceh Selatan.⁶⁶⁵ Pemerintah Propinsi Sumatera Utara di Medan berkabung dengan berpindahannya sebagian besar kota-kota penting Keresidenan Aceh “ke tangan para pemberontak”.

Tidak banyak yang dicapai pasukan DI dengan menduduki kota-kota ini. Mungkin pemimpin-pemimpin mereka meng-harapkan, mereka cukup kuat menghalau Tentara Republik —paling tidak dari sebagian besar wilayah Aceh dan memukul setiap serangan balasan. Akan tetapi ternyata ini merupakan taksiran yang terlalu tinggi tentang pasukan *Darul Islam*. Mereka tidak mampu menguasai terlalu lama kota-kota kecil dan kota-kota besar. Ternyata mudah saja pasukan Pemerintah Republik dalam serangan balasan menghalau pasukan *Darul Islam* ke luar kota-kota ini. Beberapa kota dikuasai kembali dalam beberapa hari. Kota-kota dan daerah-daerah lain bertahan lebih lama di bawah naungan pasukan DI. Tetapi dengan jatuhnya Takengon, Tangse dan Geumpang pada akhir November 1953, para pejuang DI telah terusir dari daerah-daerah perkotaan. Mereka mengundurkan diri ke daerah pedalaman. Di sini, terutama di kabupaten-kabupaten sepanjang pantai utara, mereka melakukan perlawanan gigih dengan cara gerilya dari satu hutan ke hutan lainnya, dari gunung ke gunung.

Para pejabat pemerintah sendiri menyatakan sangat gembira akan hasil yang cepat dari aksi-aksi militer pertama. Demikianlah S.M. Amin, yang segera sesudah itu diangkat menjadi gubernur Sumatera Utara, mengemukakan, dari segi pandangan militer “pemberontakan telah berakhir” dan apa yang masih perlu harus dilancarkan Pemerintah adalah gerakan pengamanan.⁶⁶⁶ Namun, tentulah jelas waktu itu juga—mengingat keadaan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan —pengamanan bukanlah masalah yang mudah. Pasti ini disadari panglima Divisi Sumatera Utara Bukit Barisan Kolonel Maludin Simbolon, yang sejak semula mengemukakan pendapat, keadaan sangat gawat dan terus demikian, sehingga para pemberontak tidak mungkin ditaklukkan dengan cara militer saja.⁶⁶⁷

“Pemberontakan” DI telah membuat pemerintahan daerah ini jadi sangat sulit. Bagi Pemerintah Republik dan sangat mengganggu fungsi administrasi pemerintahan; kop surat dan stempel Republik menjadi tak berlaku. Yang lebih mem-prihatinkan dari setiap aksi “kaum pemberontak” ini adalah merosotnya ekonomi daerah. Mulanya departemen yang paling banyak pengikut PUSA-nyalah yang paling banyak terkena karena pegawai-pegawainya membelot. Dalam pandangan S.M. Kartosoewirjo, “*karena rajat Atjeh yang terkenal Islam-minded di bawah pengaruh PUSA, maka tidak mengherankan jika residen koordinator, bupati2 (Pantjasila) dan lain2 pemimpin dan komandan di Atjeh, serentak membelok haluan, mem-belang RIK, meninggalkan kedudukannya, dan memihak kepada N.I.P.*”⁶⁶⁸ Diperkirakan dalam suatu penilaian sementara akan keadaan sekitar tujuh puluh persen pegawai Pemerintah Daerah di Jawatan Agama, Urusan Sosial, dan Penerangan telah meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti kaum pemberontak.⁶⁶⁹ Jawatan Pendidikan menghadapi masalah yang berbeda walaupun sama gawatnya, yaitu sebagian besar para guru melarikan diri ke Medan atau mengungsi. Pada bulan-bulan pertama pemberontakan mereka menolak kembali ke Aceh dengan mengatakan, mereka lebih suka dipecat.⁶⁷⁰ Terdapat soal-soal

⁶⁶⁵ SM. Amin, *Op.cit.*, hlm. 48-61.

⁶⁶⁶ S.M. Amin, *Peristiwa Teungku daud Beureueh*, (Medan: 1953), Laporan, hlm. 4.

⁶⁶⁷ Gelanggang, *Op. cit.*, hlm. 66.

⁶⁶⁸ S.M. Kartosoewirjo, “Statemen Pemerintah NII Tanggal 5 Oktober 1953”, dalam Al Chaidar, *Pemikiran Politik...*, bagian lampiran.

⁶⁶⁹ S.M. Amin, *Peristiwa...*, hlm. 7.

⁶⁷⁰ *Ibid.* hlm. 8.

yang sama dalam pemerintahan setempat. Seperti telah kita lihat, sejumlah bupati memihak kaum pem-berontak. Keadaan pada tingkatan yang lebih rendah lebih buruk lagi. Banyak dari pejabat tingkat yang terendah, para *keuchik* dan *imeum mukim*,⁶⁷¹ menyeberang ke pihak pem-berontak.⁶⁷² Yang paling parah terkena adalah Pidie, yang bupatinya, semua wedana, dan semua camat kecuali seorang, dan 99 dari 188 imam mukim berubah pengabdian kesetia-annya.⁶⁷³ Seperti juga di daerah-daerah lain yang terkena pemberontakan *Darul Islam*, pejabat-pejabat paling rendahlah yang merasakan dampak pemberontakan paling langsung. Melaksanakan pekerjaan di daerah-daerah yang pengaruh *Darul Islam*-nya kuat berbahaya sekali. Jadi tidaklah meng-herankan, Pemerintah Republik—dalam usahanya untuk membangun pemerintahan lokalnya lagi—menghadapi kesulit-an mendapatkan orang yang bersedia mewakilinya di tingkat desa. Walaupun berhasil mengisi lowongan-lowongan dan mengganti para pejabat yang kesetiaannya diragukan dalam eselon-eselon pemerintahan yang lebih tinggi, Pemerintah tidak bisa mendapatkan cukup calon yang setia untuk jabat-an-jabatan yang lebih rendah ini. Pada April 1954 Pemerintah Republik berhasil membangun pemerintahan lagi dari tingkat camat ke atas, yaitu di daerah-daerah perkotaan yang relatif aman. Namun suatu komisi parlemen yang mengunjungi Aceh pada awal 1954 terpaksa melaporkan bahwa para bupati, we-dana, dan camat yang baru diangkat di Aceh Besar dan Pidie masih tidak bisa melakukan perjalanan tugas di daerah-daerahnya dan hanyalah Saman di kota-kota dan tempat-tempat tugas pasukan Angkatan Darat.f Beberapa camat harus diiringi pengawalan bersenjata ke posnya pada pagi hari dan kembali ke kota dengan cara yang sama pada malam hari.⁶⁷⁴ Bersamaan dengan itu dua puluh persen jabatan imam mukim dan keuchik masih lowong.⁶⁷⁵ Tambahan lagi, di sejumlah desa, imam mukim pemerintah Republik Indonesia dan keuchik juga diam-diam bekerja untuk kaum pembembe-rontak.

Secara ekonomis daerah ini sangat menderita karena terganggunya lalu lintas. Pada banyak bagian di Aceh pada waktu itu seperti lazimnya daerah yang dikuasai pemberontak—terlihat jembatan-jembatan yang hancur atau jalan-jalan yang tak dapat dilalui. Kadang-kadang melakukan perjalanan di darat hanyalah mungkin dengan konvoi. Dalam hal-hal lain diperlukan izin pasukan *Darul Islam*, yang biasanya diperoleh setelah membayar. Ini tidak hanya berlaku bagi perjalanan pribadi tetapi juga bagi lalu lintas bus dan truk. Sebenarnya beberapa pengusaha membayar kepada kaum pemberontak sejumlah uang tertentu hanya untuk bisa terus berusaha.⁶⁷⁶ Juga perjalanan kereta api mengalami kesulitan. Di samping risiko dihentikannya kereta api, sering terjadi bencana pada jalan kereta api dan stasiun. Selama bertahun-tahun tidak mungkin menjadwalkan perjalan kereta api, khususnya di Pidie.⁶⁷⁷ Jalan yang paling aman adalah berlayar dengan kapal, tetapi fasilitas-fasilitas perkapalan jauh dari cukup untuk mengimbangi kekurangan fasilitas perhubungan darat.⁶⁷⁸

Pada mulanya pemberontakan tampaknya tidak meng-akibatkan terjadinya kekurangan pangan secara mendadak atau penurunan dalam produktivitas perkebunan pertanian. Ada laporan-laporan menggelisahkan yang beredar tentang pengaruh pemberontakan yang negatif di ekonomi perkebun-an, seperti larinya buruh dalam

⁶⁷¹ *Imeum Mukim* (Bahasa Aceh), berarti imam mukim, sebuah jabatan religius terpenting di sebuah desa. Jabatan ini sangat kompatibel dengan struktur politik *Darul Islam* yang memang ingin menerapkan konsep-konsep politik, sosial dan pemerintahan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

⁶⁷² *Keuchik* adalah kepala *gampong* (kampung). Sejumlah kampung merupakan sebuah *mukim*.

⁶⁷³ Gelanggang, *Op.cit.*, hlm.106.

⁶⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

⁶⁷⁵ C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (ter.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993), hlm. 54.

⁶⁷⁶ Bachtiar Yunus menyatakan (1953:3) mengenai Aceh, sementara perusahaan seperti - Atra dan Nasional dapat terus berjalan tanpa diganggu, yang lain-lain praktis harus menghentikan dinasny karena kendaraan mereka sering dihentikan dan diserang

⁶⁷⁷ Gelanggang, *Op.cit.*, hlm. 113-115.

⁶⁷⁸ Amin, *Op.cit.*, hlm.8.

jumlah besar dan bahwa pekerjaan pertanian dan pengurusan perkebunan sangat menderita. Personil asing dianjurkan mengungsi dari perkebunan, sedangkan dalam beberapa hal di samping itu manajemen Indonesia lari mengikuti pemberontak. Ada laporan tentang Said Abubakar, yang mengontrak sebuah perkebunan di Langsa, lenyap dengan membawa serta Rp 300.000,— uang gaji. Selanjutnya di ladang-ladang minyak Aceh Timur, seluruh manajemen, termasuk Direktur Umum Amir Husin al Mudjahid menghilang. Tetapi sumber-sumber resmi pemerintah menyatakan semua ini tidak mempengaruhi produktivitas. Ladang-ladang minyak masih berfungsi normal (artinya sedikit sekali) sedangkan hasil perkebunan malahan naik dengan 15 persen, demikian keyakinan SM Amin selaku pemerintah.⁶⁷⁹

Pasukan *Darul Islam* sendiri juga dituduh melakukan keja-hatan dan pembantaian besar-besaran. Demikianlah dinyatakan, mereka telah membunuh lebih dari 200 tawanan di dekat Lammeulo, daerah tempat mulainya revolusi sosial, ketika dipaksa mundur ke sini Oktober 1953. Bicara tentang peristiwa yang sama ini, komisi parlemen melaporkan terbunuhnya secara keji 123 anggota PNI, 120 anggota PKI dan 28 anggota Perti sesudah kunjungannya ke Aceh.⁶⁸⁰

Peristiwa yang menyangkut pasukan Republik digunakan mereka yang menyetujui penyelesaian damai untuk mendesak sekali lagi diadakan perundingan dan diberikan konsesi kepada beberapa tuntutan kaum pemberontak. Sejauh ini upaya untuk meyakinkan pemberontak-pemberontak *Darul Islam* di Aceh untuk menghentikan perjuangan mereka dan berunding dengan Republik telah gagal. Gubernur baru Sumatera Utara, S.M. Amin, melakukan surat-menyurat dengan pemimpin-pemimpin pemberontak yang terkemuka sejak akhir 1953. Walaupun dia sendiri bukan orang Aceh (dia sendiri seorang Batak Mandailing), hubungan Amin dengan Daud Beureueh dan rekan-rekannya yang akrab baik. Sebenarnya, pengangkatannya sebagai pengganti Abdul Hakim, yang menjauhi pemimpin-pemimpin Aceh dengan sikapnya, sebagian adalah karena didorong perkenalannya yang akrab dengan pemimpin-pemimpin ini.⁶⁸¹ Karena, selama masa Jepang dia menjadi kepala sekolah menengah di Banda Aceh, sedangkan kemudian dia menjadi anggota mahkamah pengadilan di Sigli bersama Usman Raliby dan Hasan Aly. Sesudah proklamasi kemerdekaan ia menjadi anggota dan kemudian, Januari 1946, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh. Kemudian menyusul pula pengangkatannya sebagai gubernur Sumatera Utara.

Sejak mula pemberontakan Amin memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang membela perundingan dengan pemberontak sebagai cara memperoleh penyelesaian damai.⁶⁸² Berpegang pada prinsip ini, ia melakukan kontak dengan Said Abubakar. Selanjutnya ia mengadakan surat-menyurat dengan pemimpin-pemimpin *Darul Islam* secara diam-diam, tanpa lebih dahulu memberitahukan kepada Pemerintah Pusat, Desember 1953. Dalam surat-surat ini—yang dinyatakannya sendiri dengan tegas, ia menulis sebagai seorang warga negara pribadi — ia menyatakan, menyetujui tujuan pemberontak yang merupakan cita-cita semua umat muslim dan ia merasa peristiwa-peristiwa yang telah mencetuskan pemberontakan adalah akibat salah paham. Tetapi cara-cara yang dipilih kaum pemberontak tidak disetujui semua umat muslim. Karena itu ia meminta kaum pemberontak mengemukakan gagasan bagaimana mengakhiri pertumpahan darah.⁶⁸³

⁶⁷⁹ Amin, *Peristiwa....*, hlm. 10.

⁶⁸⁰ Gelanggang, *Op.cit.*, hlm. 149.

⁶⁸¹ Ketika Amin diangkat, dua puluh partai dan organisasi, di antaranya Masyumi, GPII dan Muhammadiyah mendesak agar Abdul Hakim terus menduduki jabatannya. Partai-partai yang menentang termasuk PKI, yang ingin Abdul Hakim segera dipecat. Persoalannya adalah politik agraria Abdul Hakim; PKI menyatakan dia bertanggung jawab tentang penangkapan para petani. SM Amin, *Sekitar....*, hlm. 369-370.

⁶⁸² Gelanggang, *Op.cit.*, hlm. 67.

⁶⁸³ Gelanggang, *Ibid.*, hlm. 126, 129-130)

Amin menerima jawaban dari Husin Jusuf dan Daud Beureueh. Keduanya menggarisbawahi kewajiban setiap mus-lim Indonesia untuk turut serta dalam jihad mempertahankan Negara Islam Indonesia, yang demikian mereka kemukakan, telah menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Lalu mereka menyatakan, konflik dapat berakhir segera sesudah Pemerintah Republik memperhatikan hasrat masyarakat Islam. Mereka menyangkal, revolusi sosial atau keinginan memperoleh otonomi mengilhami pemberontakan mereka, dengan menegaskan, penyebab pangkalnya terletak dalam agama. Mereka tidak sependapat dengan pandangan Amin bahwa kekacauan yang terjadi adalah disebabkan kesalah-pahaman. Politik kebijaksanaan yang dijalankan Pemerintah Republik, reaksi Pemerintah terhadap Peristiwa Cumbok dan terhadap tuntutan otonomi, reorganisasi Tentara di Aceh, dan sebagainya merupakan cukup bukti kebalikannya.⁶⁸⁴

Amin menjawab pada Agustus 1954. Dengan menolak menemui pemimpin-pemimpin gerilya ini sendiri, ia mengirim suatu rancangan surat untuk ditandatangani Daud Beureueh dan Hasan Aly yang menyatakan, keduanya berjanji akan mengakhiri perlawanan mereka, meletakkan senjata mereka, dan akan menemui wakil-wakil Pemerintah Republik bila yang belakangan ini bersedia mengakui hak mereka untuk memperjuangkan Negara Islam bukan dengan jalan kekerasan, memberikan lebih banyak perhatian demi kepentingan Aceh di masa depan dan memberikan amnesti kepada para pemberontak. Bila Daud Beureueh dan Hasan Aly menandatangani rancangan ini, ia, Amin, pribadi akan ke Jakarta untuk memperjuangkan agar persetujuan ini diterima Pemerintah.

Tetapi Daud Beureueh dan Hasan Aly tidak menandatangani. Sebaliknya mereka merencanakan suatu peraturan pemerintah untuk ditandatangani Ali Sastroamidjojo yang mereka minta dibawa Amin ke Jakarta. Di dalamnya dinyatakan, Pemerintah Republik berusaha membuka perundingan dengan pendiri-pendiri Negara Islam Indonesia di Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi, dan melindungi serta membantu para anggota delegasi Negara Islam selama perundingan-perundingan ini berlangsung. Dalam surat pengiringnya, tertanggal 5 Oktober 1954, mereka menjelaskan, apa yang mereka inginkan bukanlah amnesti tetapi perundingan.⁶⁸⁵

Masalah yang paling banyak membuat sakit kepala pemerintah waktu itu, di samping aksi-aksi militer sendiri, adalah masalah pengurusan dan akomodasi tawanan. Sampai pada akhir Maret 1954, 4.666 orang ditangkap. Kapasitas penjara-penjara yang ada jauh dari cukup untuk menghadapi jumlah yang besar ini, dan sekolah-sekolah dan gedung-gedung pemerintah harus diubah menjadi kamp-kamp pengasingan. Ketika itu pun tak terdapat cukup ruangan lalu para tawanan harus diangkut ke tempat-tempat di luar Aceh.⁶⁸⁶ Dengan cara yang belakangan ini Pemerintah Republik juga mengharapakan mempercepat pemeriksaan para tawanan, karena di Aceh tidak cukup jumlah personil yang memenuhi syarat untuk ini. Tetapi langkah ini tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penjara dan kamp-kamp di Aceh terus juga dipenuhi hingga melimpah, dan proses pemeriksaan para tawanan sangat lambat. Ketika pemeriksaan benar-benar berlangsung, sebagian besar tawanan ternyata tidak bersalah dan ditangkap hanyalah berdasarkan kecurigaan yang sangat kecil. Pada 1956 kecuali 400 orang semua tawanan dibebaskan lagi.⁶⁸⁷

Nasionalisme Bukan Alasan Untuk Bersatu

Rakyat Aceh tidak ingin memisahkan diri dari saudara-saudaranya, Daud Beureueh menegaskan, tetapi tidak pula mereka ingin diperlakukan sebagai anak

⁶⁸⁴ Gelanggang, *Ibid.*, hlm. 132-157; Amin, *Sekitar...*, hlm. 198-200.

⁶⁸⁵ Gelanggang, *Ibid.*, hlm. 157-167.

⁶⁸⁶ Gelanggang, *Ibid.*, hlm. 145.

⁶⁸⁷ Amin, *Sekitar...*, hlm. 130-132.

tiri. Dalam hubungan ini ia mengemukakan kurangnya fasilitas pendidikan yang baik dan kesempatan kerja bagi anak-anak Aceh, sedangkan tidak adanya sistem perhubungan yang memadai menghalangi rakyat dalam kegiatan ekonominya. Ia menambahkan, proklamasi Negara Islam Aceh tidaklah berarti bahwa telah terbentuk suatu negara dalam negara. Pada masa lalu Republik Indonesia dianggap sebagai jembatan emas menuju pelaksanaan cita-cita negara yang diidamkan sejak semula. Tetapi kini jembatan ini tidak lagi dianggap sebagai sarana komunikasi, melainkan lebih merupakan rintangan. Kesetiaan kepada Republik, yang didasarkan pada nasionalisme, telah lenyap sedangkan selanjutnya rakyat pun tidak merasa diperlakukan oleh suatu sistem hukum yang sama.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan bahwa proklamasi Negara Islam akan menimbulkan kekacauan dan bertentangan dengan hukum, Daud Beureueh menegaskan, sebaliknya kekacauan hukum yang berlakulah yang telah menimbulkan pemberontakan. Ia menasihati para pemimpin Republik agar tidak menggunakan kekerasan, tetapi menanggulangi inti pokok persoalan dan memperlabai. dasar-dasar negara mereka, juga kebijaksanaan mereka.⁶⁸⁸

Dalam pernyataan-pernyataan yang lain pemberontakan ini ditandai sebagai suatu gerakan untuk membebaskan Aceh dari kolonialisme Jawa. Di sini pemimpin-pemimpin di Jakarta dilukiskan sebagai orang kafir sesudah Islam dihancurkan, umpamanya melalui pengubahan sistem pendidikan. Selanjutnya mereka dicap sebagai pejabat-pejabat yang korup, mengangkat teman-teman sendiri pada jabatan-jabatan yang penting, dan dinyatakan memecat atau memberhentikan dengan sewenang-wenang setiap orang yang tidak termasuk kalangannya "karena kesehatan mereka tidak seratus persen, karena mereka tidak berpendidikan, ada yang tidak beres dengan penampilan mereka, pendeknya senbu satu alasan".⁶⁸⁹ Sambil lalu, kutipan yang akhir ini menunjukkan, kebijaksanaan Pemerintah Pusat menggunakan ukuran-ukuran tertentu untuk diterima menjadi pegawai negeri dan tentara juga menimbulkan kemarahan yang sangat besar di Aceh.

Pemimpin-pemimpin Republik di Jakarta dituduh berusaha mengutamakan kepentingan Jawa dan orang Jawa. Banyak dikemukakan latar belakang Hindu mereka. Pada April 1954 umpamanya, Daud Beureueh melukiskan Pemerintah Republik sebagai pemerintah Hindu yang mengenakan baju nasionalis yang sangat mirip dengan komunisme.⁶⁹⁰ Hasrat pokoknya, dalam mata kaum pemberontak Aceh, adalah untuk mengembalikan zaman kerajaan Majapahit dalam masa jayanya. Dikatakan, penyebaran ide-idenya dilakukan melalui saluran undang-undang, peraturan-peraturan, dan sebagainya yang dikeluarkan Republik Indonesia, yang semuanya bernapaskan semangat Hinduisme. PNI dan sejumlah partai kecil dituduh menjadi alat dalam usaha-usaha ini. Karena partai-partai ini semuanya menekankan sila Pancasila nasionalisme Indonesia sebagai kedok politik bagi usaha-usaha mereka melanjutkan Hinduisme. Banyak orang muslim menurut laporan masuk dalam perangkap dan mendukung orang-orang yang sesungguhnya berusaha menghancurkan Islam.

Di samping mengidentifikasi kalangan Muslim Jawa dengan Hinduisme, pernyataan-pernyataan ini mengungkap-kan kecemasan dan melakukan serangan terhadap kemajuan komunisme. Perubahan pemerintah pada Juli 1953 ditafsirkan sebagai tanda nyata pengaruh komunisme yang makin bertambah dalam bidang politik. Perubahan ini meliputi penggantian Kabinet Wilopo, yang didukung Masyumi dan PNI, oleh kabinet pertama Ali Sastroamidjojo, yang di dalamnya tidak terdapat menteri-menteri Masyumi dan memperoleh dukungan PKI di DPR. Perubahan ini dinyatakan sebagai salah satu sebab langsung dari pemberontakan. Dengan Ma-

⁶⁸⁸ Gelanggang, *Ibid.*, hlm. 45-51.

⁶⁸⁹ Amin, *Sekitar...*, hlm. 88.

⁶⁹⁰ Gelanggang, *Ibid.*, hlm. 54.

syumi yang dipaksa menjadi oposisi, pemerintah telah jatuh ke dalam tangan musuh-musuh Islam.

Pemberontakan selanjutnya digambarkan kepada rakyat Aceh sebagai kelanjutan perlawanan sebelum Perang terhadap kolonialisme Belanda dan perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Republik Indonesia secara tegas dinyatakan telah kehilangan hak untuk bertindak atas nama proklamasi kemerdekaan. Bukan saja ia tidak memberikan kepada Islam tempat yang layak dalam masyarakat, tetapi lebih celaka lagi, sesungguhnya ia merupakan produk Belanda. Menurut ke-biasaan gerakan-gerakan pemberontak lain, ia dijuluki nama "Republik Konperensi Meja Bundar". Ahli waris yang sah dari proklamasi Agustus 1945 adalah Negara Islam Indonesia, yang telah mengambil alih perjuangan untuk kemerdekaan setelah eksistensi Republik Indonesia berakhir sebagai akibat Pemerintahnya ditangkap Belanda Desember 1948.⁶⁹¹

Ketika mengajukan alasan yang terakhir, para pemimpin pemberontak mengalami sedikit kesulitan dalam menjelaskan mengapa mereka baru sekarang masuk Negara Islam Indonesia dan tidak sejak lahirnya pada 1949. Karena itu tekanan pada penangguhan pemilihan umum dan pada perubahan dalam pemerintah. Walaupun rakyat Aceh terus menerus telah mengharapkan dan dengan sabar menantikan permohonan mereka dikabulkan Jakarta, dua peristiwa ini merupakan bahan yang terakhir.

Pada mulanya Aceh dibayangkan sebagai suatu provinsi Negara Islam Indonesia dengan otonomi yang luas. Kepala provinsi ini adalah Daud Beureueh, yang seperti semasa perjuangan kemerdekaan menduduki jabatan gubernur sipil dan militer dan dalam kedudukan ini juga menjadi panglima Divisi Territorium V Tentara Islam Indonesia, Divisi Tengku Chik Ditiro, dan wakil Pemerintah Pusat Negara Islam Indonesia. Dalam urusan sipil ia dibantu suatu dewan pemerintahan, yang disebut Dewan Syura. Juga diumumkan terbentuknya suatu parlemen, Majelis Syura.⁶⁹² Dalam urusan militer ia dibantu Dewan Militer, yang terdiri dari tiga orang: Daud Beureueh sendiri, Amir Husin al Mudjahid, sebagai wakil ketua Dewan Syura, dan Husin Jusuf, sebagai Kepala Staf Divisi Tengku Chik Ditiro. Pada tingkat-tingkat yang lebih rendah, tingkat kabupaten dan kecamatan, urusan militer dan sipil untuk sementara tetap terpisah, setidak-tidaknya dalam prinsip. Para komandan satuan tentara setempat tidak perlu menjadi kepala pemerintahan sipil, dan sebaliknya.

Dalam dua tahun berikutnya struktur pemerintahan dua kali berubah. Penyesuaian-penyesuaian yang pertama dilakukan setelah kaum pemberontak pulih dari kejutan yang dide-rita akibat gagal rencana menduduki kota-kota besar dan kecil dan pasukan *Darul Islam* terusir ke hutan. Mereka terdorong kesadaran, strategi harus diubah dari strategi serangan frontal terhadap pasukan Republik Indonesia menjadi strategi perang gerilya dan kesadaran, jumlah rakyat yang dengan suatu dan cara lain membantu musuh hari demi hari bertambah.⁶⁹³

Demi perang gerilya yang lebih efektif, pemerintah militer dan sipil dijadikan dalam satu tangan dengan pembentukan komandemen-komandemen. Maka terdapat suatu komandemen demikian untuk Aceh secara menyeluruh maupun untuk masing-masing kabupaten (yang terbagi dalam sejumlah sub-komandemen) dan

⁶⁹¹ Amin, *Sekitar....*, hlm. 87-94; Gelanggang, *Op.cit.*, hlm.33-34.

⁶⁹² Dewan Syura terdiri dari seorang ketua (Daud Beureueh), seorang wakil ketua (Amir Husin al Mudjahid), dan lima anggota. Majelis Syura juga terdiri dari seorang ketua (Daud Beureueh) dan seorang wakil ketua, sedangkan susunan yang sebenarnya maupun jumlah anggotanya masih akan ditentukan. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul islam Aceh*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hlm. 134.

⁶⁹³ Penjelasan Komando Tentara Islam Indonesia Terr.V Divisi Tengku Chik Ditiro 5-4-1954, lihat dalam JarahDam-I, *Dua Windhu Kodam/Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Sejarah Daerah Militer KODAM Iskandar Muda, 1972).

kecamatan. Komandan satuan militer yang bersangkutan menjadi komandan pertama komandemen dan kepala stafnya menjadi kepala staf komandemen. Para kepala pemerintahan sipil, bupati atau camat (dan dalam hal sub-komandan kabupaten wedana), dijadikan komandan kedua. Ketiga fungsionaris ini—komandan pertama dari mereka ini adalah pimpinan tertinggi—dengan demikian merupakan komite pelaksana dari setiap komandemen.⁶⁹⁴

Perubahan-perubahan ini selanjutnya memperkuat kedudukan Daud Beureueh, karena kini dia mengepalai baik pemerintahan sipil maupun militer. Bagi Komando Aceh secara menyeluruh ini berarti, dia adalah hampir seluruh komite pelaksana. Di samping itu, Dewan Syura, Majelis Syura dan Dewan Militer dinyatakan "pasif", sedangkan komandemen diberi kekuasaan legislatif. Sebagai imbalan, diumumkan bersamaan waktunya bahwa semua keputusan yang bersifat legislatif harus dibicarakan dengan suatu badan konsultatif yang baru dibentuk. Tetapi badan ini terdiri dari pelaksana komandemen dilengkapi

dengan kepala-kepala perwakilan pemerintah dari daerah yang bersangkutan— yang semuanya termasuk dalam staf komandemen dan tunduk kepada komandan pertamanya—dan paling-paling tiga orang luar, biasanya pemimpin-pemimpin agama.⁶⁹⁵

Untuk menghasilkan perubahan-perubahan, struktur Tentara Islam Aceh juga harus diubah. Mula-mula Divisi Tengku Chik Ditiro terdiri dari lima resimen, masing-masing terbagi dalam sejumlah batalyon. Sejak akhir 1953 resimen-resimen ini disebut "pangkalan", dan dianggap dalam teori setidaknya terdiri dari pasukan mobil dan teritorial,⁶⁹⁶ yang belakangan ini terdiri sebagian besar dari rakyat setempat yang bersenjatakan parang, pisau, dan sebagainya. Kini, Juni 1954, divisi ini dibagi lagi dalam enam resimen, satu resimen untuk tiap kabupaten. Kemudian resimen yang ketujuh, Resimen Tharmihim terbentuk, untuk melakukan operasi-operasi gerilya di Sumatera bagian timur.⁶⁹⁷

Para bupati ketika itu ialah: Pidie: T.A. Hasan. Aceh Utara: Tengku Sjah Abdul Hamid (Ajah Hamid) (Ayah Hamid). Aceh Timur: Saleh Adri. Aceh Selatan: Tengku Zakaria Junus (Zakaria Yunus). Aceh Besar: Ishak Amin (bupati pertama di sini, Sulaiman Daud, bekas residen-koordinator Aceh, ditangkap pada Mei 1954). Komandan Resimen ketika itu: Resimen I (Pidie): Ibrahim Saleh, abang Hasan Saleh. Resimen II (Aceh Utara): H. Ibrahim. Resimen III (Aceh Timur): A.R. Hanafiah. Resimen IV (Aceh Selatan): Saleh Kafa. Resimen V (Aceh Tengah): Ilyas Lebai (Ilyas Lebai). Resimen VI (Aceh Besar): Abdullah Wahab. Resimen VII (Sumatera Timur): Haji Hasanuddin (pasukan Aceh Barat, yang dipimpin T.R. Idris, merupakan bagian Resimen Aceh Selatan). Angkatan Polisi *Darul Islam* dipimpin A.R. Hasjim (A.R. Hasyim). Selanjutnya terdapat tiga wakil gubernur, yaitu: Hasan Aly untuk Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Tengah. Hasan Saleh untuk Aceh Utara, dan Timur dan Langkat-Tanah Karo. A.G. Mutiara untuk Aceh Selatan dan Barat serta Tapanuli Barat.

Perubahan-perubahan selanjutnya dilakukan pada September tahun berikutnya, ketika para pemberontak melakukan konferensi di Batee Kureng, di Aceh Besar. Konferensi ini dihadiri sembilan puluh orang, dua orang dari mereka mewakili Sumatera Timur. Konferensi ini diselenggarakan beberapa bulan sesudah Daud Beureueh diangkat Karto-su-wirjo sebagai wakil presiden Negara Islam Indonesia, Januari 1955. Selain dari Daud Beureueh dimasukkan orang-orang Aceh lainnya dalam kabinet baru seluruh Indonesia Negara Islam Indonesia. Demikianlah

⁶⁹⁴ Untuk para komandan resimen dan batalyon-batalyonnya lihat Amin, *Peristiwa...*, 83-85..

⁶⁹⁵ Gelanggang, *Op.cit.*, hlm. 63-71; Amin, *Peristiwa...*, hlm. 72.

⁶⁹⁶ Gelanggang, *Ibid.*, hlm. 56.

⁶⁹⁷ B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff Verhandelingen KITLV, 1971), hlm. 88.

Al Murthada (Amin Husin al Mudjahid) diangkat menjadi Wakil Kedua Menteri Pertahanan, Hasan Ali Menteri Urusan Luar Negeri dan Tengku Nya' Tjut (Nya' Cut) Menteri Pendidikan. Di konperensi Batee Kureng dibicarakan kedudukan Aceh dalam Negara Islam Indonesia dan struktur pemerintahan daerah. Mula-mula Daud Beureueh hanya bermaksud mengadakan perundingan dengan penasihat-penasihatnya yang terdekat, para anggota badan konsultatif Komandemen Aceh, tentang hubungan daerah dengan Negara Islam Indonesia dan Republik Indonesia. Ia menganjurkan pembentukan suatu negara Aceh yang tersendiri, masih dalam kerangka Negara Islam (federal). Hadirnya benar-benar sejumlah pemimpin *Darul Islam* lebih banyak di Batee Kureng sehubungan dengan rencana untuk merayakan ulang tahun kedua proklamasi 1953 memaksa Daud Beureueh mengadakan pertemuan yang lebih besar. Pada pertemuan kedua ini para pemimpin sepakat tentang pembentukan suatu negara tersendiri, walaupun beberapa orang, seperti T.A. Hasan, enggan berbuat yang demikian. Sebagai gantinya mereka mengajukan keinginan mereka menghendaki struktur negara ini yang lebih demokratis, yang di dalamnya pemerintah sipil akan bebas lagi dari pengawasan militer dan akan dibentuk parlemen. Konperensi mencapai puncaknya dalam Piagam Batee Kureng, dengan mengubah status Aceh dari status provinsi menjadi negara dalam Negara Islam Indonesia.

Piagam, yang menjadi semacam undang-undang dasar sementara, lagi-lagi mengemukakan pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala negara, wali negara, yang akan dipilih rakyat Aceh, akan menjadi kepala eksekutif. Tetapi untuk sementara Daud Beureuehlah yang ditunjuk para hadirin. (pasal. 3). Dia dibantu dalam fungsinya oleh suatu kabinet yang diketuai seorang perdana menteri. Kabinet dan para menteri bertanggung jawab kepada kepala negara (pasal 4). Dalam Piagam ini Majelis Syura muncul lagi. Walaupun para anggota parlemen ini dipilih rakyat, untuk sementara waktu mereka ditunjuk Kepala Negara (pasal 5) Majelis Syura yang disetujui di Batee Kureng terdiri dari seorang ketua (Amir Husin al Mudjahid), dua wakil ketua dan enam puluh satu anggota.⁶⁹⁸ Tidak dibuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai masa jabatan para anggota atau kekuasaannya. Di samping Majelis Syura, dibentuk Majelis Ifta, dewan untuk memberikan fatwa yang diketuai Tengku Hasbullah Indrapuri. Tentang masalah hubungan daerah terhadap Pemerintah Pusat Negara Islam Indonesia, Piagam Batee Kureng menyatakan, Negara Aceh melaksanakan urusannya sendiri kecuali dalam soal-soal kebijaksanaan luar negeri, politik pertahanan, dan ekonomi (pasal 6). Bersamaan dengan itu ditekankan, selama Negara Islam Indonesia berada dalam perang dan terus bertempur mempertahankan Islam, satuan-satuan Tentara Islam Indonesia yang beroperasi di Aceh harus tetap merupakan alat Negara Aceh seperti juga Angkatan Kepolisian dan lasykar (pasal 8). Dalam kabinet yang baru terbentuk, yang diketuai Hasan Aly sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Husin Jusuf menduduki jabatan Menteri Keamanan, dan T.A. Hasan memegang portfolio Keuangan dan Kesehatan, sedangkan T.M. Amin diangkat menjadi Menteri Urusan Ekonomi dan Kesejahteraan, Zainul Abidin Muhammad Tiro Menteri Kehakiman. M. Ali Kasim Menteri Pendidikan, dan Abdul Gani Mutyara Menteri Pene-rangan.⁶⁹⁹

Kabinet baru ini menyusun program sembilan pasal yang di dalamnya mengadakan reorganisasi dan memperbaiki Pemerintahan Sipil, Tentara dan Angkatan Kepolisian, dan untuk memperbaiki keadaan sosial pegawai sipil dan

⁶⁹⁸ Untuk susunannya lihat Dada Meuraxa, *Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Medan: Pustaka Hasmar, 1956), hlm. 54-56.

⁶⁹⁹ T.M. Amin adalah bekas bupati yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri. Dia Direktur Manager Trade and Development (bekas Indolco) Ltd. dan anggota pengurus Aceh Mining Co., dengan Hasballah Daud, putra Daud Beureueh, sebagai direktornya. A.G. Mutiara (juga dikenal sebagai Abdul Gani) adalah pemimpin redaksi harian *Tegas*, yang terbit di Banda Aceh. Zainal Abidin Muhammad Tiro (juga dikenal sebagai Zainal Abidin) adalah bekas hakim pengadilan Sigli. Amin, *Peristiwa...*, hlm.6.

militernya, maupun rakyat pada umumnya. Langkahlangkah ke arah ini telah diambil dengan pembentukan Akademi Militer di Aceh Timur dan pembangunan rumah-rumah sa-kit.⁷⁰⁰ Kabinet baru selanjutnya berjanji dalam programnya untuk meluaskan peradilan, yang secara tegas dinyatakan dalam Piagam Batee Kureng merupakan kekuatan terpisah. Tetapi, sebagaimana halnya dengan Pemerintahan Sipil, ia mengemukakan syarat nyata dalam program itu bahwa harus disadari kenyataan, negara masih dalam perang (gerilya) harus diperhitungkan dalam pelaksanaannya.⁷⁰¹

Kabinet tidak mempunyai menteri luar negeri, karena Piagam menyerahkan urusan luar negeri kepada Pemerintah Pusat. Sungguhpun begitu, persis seperti ia pun mempunyai politik pertahanannya, demikian pula Aceh mempunyai hubungan luar negerinya sendiri. Dalam hal ini ia jauh lebih beruntung ketimbang daerah-daerah *Darul Islam* yang lain. Sebagian ini adalah akibat dekatnya dengan Semenanjung Malaysia, yang memudahkan penyelundupan senjata dan barang-barang lain serta uang, maupun hubungan yang akrab dengan para wakil dan simpatisan di pantai yang berseberangan. Sesewaktu beredar desas-desus, Daud Beureueh telah menyeberangi Selat untuk memperoleh dukungan di Malaysia. Di samping itu, Said Abubakar sering disebut berada di Penang atau Singapura untuk mengumpul-bantuan keuangan atau bahkan mengadakan hubungan dengan pemberontak-pemberontak komunis di Malaysia.⁷⁰² Paling aktif dalam mendapatkan dukungan luar negeri untuk Negara Islam Indonesia, dan kemudian untuk Republik Indonesia Serikat kiranya adalah Hasan Muhammad Tiro, abang kandung Menteri Kehakiman DI, Zainal Abidin Tiro.⁷⁰³

Hasan Muhammad Tiro, yang dilukiskan seorang war-tawan Amerika sebagai "inteligent, berpendidikan baik, dan diberkahi dengan kombinasi yang jarang terdapat: pesona dan keteguhan hati", lahir di Desa Tiro, dekat Lammeulo di Pidie.⁷⁰⁴ Dalam zaman Belanda dia adalah salah seorang murid Daud Beureueh di Madrasah Blang Paseh di Sigli, sedangkan dalam masa pendudukan Jepang dia belajar di Perguruan Normal Islam Institute; tempat ia menjadi "anak emas" Said Abubakar. Sesudah proklamasi kemerdekaan ia berangkat ke Yogyakarta untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dia kembali ke Aceh sebentar untuk bekerja pada Pemerintah Darurat Sjafruddin Prawiranegara. Kembali ke Yogyakarta, dia menjadi salah seorang dari dua mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pada tahun 1950 menerima beasiswa untuk melanjutkan pelajarannya di Universitas Columbia. Di Ame-rika Serikat Hasan Mohammad Tiro bekerja pada Dinas Penerangan Delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebentar.⁷⁰⁵

Dalam paruh kedua tahun 1954 dia menimbulkan hal-hal yang mengabaikan Pemerintah Republik. Dengan menamakan dirinya "Menteri Berkuasa Penuh" dan

⁷⁰⁰ Demikianlah ada laporan-laporan dari penduduk desa dekat Kualabee, di Aceh Barat, yang mendapat perawatan kesehatan cuma-cuma di rumah sakit *Darul Islam* setempat; di sini bertugas seorang asing yang juga adalah instruktur militer. Mungkin orang asing ini ialah Dr. Schiphorst, yang hilang dari rumah sakit di Kabanjahe, Tanah Karo, bersama seorang juru rawat bernama Adne Israel, sejak Februari 1954, dan dilaporkan bekerja untuk pemberontak. C. van Dijk, *Op.cit.*, hlm. 143-144, 151. Menurut Abdul Murat Mat Jan, *Darul Islam* mendidik personil kesehatannya di Pulau Kampai, di Sumatera Timur, dan obat-obatan diperoleh dari kerabat mereka ini di luar Aceh dan dari para pekerja kesehatan di Aceh yang bersimpati dengan mereka. Lihat Abdul Murat Mat Jan, "Gerakan Darul Islam di Aceh 1953-1959", dalam *Akademika* 8, 1976 hlm. 24.

⁷⁰¹ Gelanggang, *Op.cit.*, hlm. 202-27; Amin, *Sekitar peristiwa Berdarah...*, hlm.72; Meuraxa, *Op.cit.*, hlm. 49-57.

⁷⁰² Di samping Singapura, Penang, dan New York, Tokyo disebut sebagai salah satu tempat para simpatisan Negara Islam Aceh berusaha mengumpulkan sokongan keuangan dan moril. Di samping itu di Singapura gerakan ini diwakili "pejabat hubungan masyarakat Irlandia yang giat" (Mossman 1961:44).

⁷⁰³ Gelanggang, *Op.cit.*, hlm. 127-128.

⁷⁰⁴ Gelanggang, *Ibid.*, hlm. 124.

⁷⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

“Dutabesar pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat” Republik Islam Indonesia, demikian disebutnya Negara Islam ini, ia mengirim ultimatum kepada Perdana Menteri Ali Sastro-amidjojo pada awal September tahun itu. Dalam ultimatum ini ia menuduh pemerintah “fasis-komunis” membawa bangsa Indonesia hampir ke dalam kehancuran ekonomi dan politik, kemiskinan, percekocokan, dan perang saudara, serta melaku-kan agresi terhadap rakyat Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Tengah dan Kalimantan, dan selanjut-nya menjalankan politik *divide et impera* dan kolonialisme, dan mengadu domba berbagai suku bangsa dan agama satu sama lain. Ia bertanya kepada Ali Sastroamidjojo apakah barangkali telah tiba abad baru kolonialisme yang di dalamnya hanyalah kaum komunis yang memungut hasil buah kemerdekaan, sedangkan yang lain dibunuh habis begitu saja. Lalu ia menuntut agar Ali Sastroamidjojo meng-hentikan politik agresifnya, membebaskan tahanan-tahanan politik, dan mulai berunding dengan pemberontak *Darul Islam*. Bila tidak, maka ia pribadi akan mengambil sejumlah langkah. Umpamanya, ia akan membuka kedutaan-kedutaan di selu-ruh dunia —di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan semua nega-ra Islam, demikian pula di Perserikatan Bangsa-Bangsa— dan menelanjangi kebuasan Pemerintah Republik dan kekejaman serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di Aceh di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan me-minta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan Komisi Pe-nyelidikan ke Aceh. Biarlah forum internasional mengeta-huinya, katanya, tentang tindakan-tindakan kekejaman yang paling keji yang dilakukan di dunia sejak zaman Jenghis Khan dan Hulagu.⁷⁰⁶

Langkah-langkah lain yang dipertimbangkan Hasan Muhammad Tiro mengadukan Pemerintah Republik Indonesia di depan PBB atas tuduhan melakukan pembunuhan massal untuk memberitahu Dunia Islam akan kekejaman yang dilakukan terhadap para alim ulama di Aceh, Jawa Barat dan Tengah, Kalimantan dan Sulawesi dan memperjuangkan pengakuan internasional akan dukungan moril dan materiil untuk Republik Islam Indonesia. Di samping itu ia mengumumkan, bila Pemerintah Republik tidak memenuhi tuntutan-tuntut-annya, ia akan mengusahakan pemboikotan diplomatik dan ekonomi secara internasional terhadap Republik Indonesia juga penghentian bantuan yang diberikan lewat Rencana Kolombo atau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat.⁷⁰⁷

Pemerintah Indonesia menolak tuntutan-tuntutan Hasan Muhammad Tiro dan memberinya waktu sampai 22 Septem-ber untuk kembali ke Indonesia. Bila perintah ini diabaikannya, maka paspornya ditarik. Hasan Muhammad Tiro lalu dimasukkan dalam tahanan oleh Imigrasi Amerika dan dise-kap di Ellis Island. Dia dibebaskan lagi sesudah membayar denda US\$ 500,—Ia membalas dengan mengumumkan sepucuk surat dalam *New York Times* yang meminta perhatian akan kemajuan komunisme di Indonesia sejak Pemerintah Ali Sastroamidjojo berkuasa dan menyampaikan sebuah laporan tentang “Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh rezim Ali Sastroamidjojo di Indonesia”.

Pemerintah Indonesia tidak mampu membungkam Muhammad Hasan Tiro, atau memintanya diekstradisikan dari Amerika Serikat. Hasan Muhammad Tiro dengan demikian dapat melanjutkan kampanye propaganda anti-Indonesia-nya di New York. Pada awal 1955 ia mengirim surat kepada dua belas negara Islam dengan meminta kepada mereka memboikot Konperensi Asia-Afrika, kebanggaan Pemerintah Republik, yang akan diada-kan di Bandung pada bulan April. Sebagai alasan mendasari permintaannya, ia mengemukakan, pemimpin-pemimpin Islam dan para pengikutnya—kecuali mereka yang membungkuk terhadap kaum komunis—disiksa

⁷⁰⁶ Hulagu adalah cucu Jenghis Khan yang terkenal bengis dan kejam dalam sejarah perang penaklukan Iran dari tahun 1251 hingga tahun 1265.

⁷⁰⁷ Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, t.t., Jilid III), hlm. 445-447.

dan dibunuh Tentara dan Polisi Pemerintah Ali Sastroamidjojo yang “didominasi komunis”.⁷⁰⁸



BAB 7

OPERASI MILITER: PEMBANTAIAN RAKYAT ACEH DI COT JEUMPA, PULOT, GUNUNG KULU, DAN KRUENG KALA

TIBA-TIBA, negara yang tadinya dipersepsikan sebagai “Ibu” datang ke hadapan rakyat Aceh dengan muka yang bengis. Negara Republik Indonesia sudah berubah dari sebuah negara baru yang lemah lembut, diharapkan kasih dan sayangnya oleh semua

⁷⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 443-48.

rakyat dengan perlindungan dan perjuangan suci mempertahankan kemerdekaan; secara mendadak hadir di hadapan rakyat Aceh dengan sebuah kemarahan besar: operasi militer. Kebijakan *militaire bijstand* secara ketat masih tetap dipertahankan untuk pemulihan keamanan di Aceh sebelum pemberontakan reda. Tetap dipertahankannya operasi militer oleh Pemerintah setelah terjadinya Peristiwa Pulot Cot Jeumpa juga yang sangat menggemparkan Indonesia tahun 1955.⁷⁰⁹ Peristiwa Pulot Cot Jeumpa adalah peristiwa penghadangan terhadap truk yang membawa 15 orang tentara dari Batalyon 142 yang bermarkas di Lhok Nga, Aceh Besar. Penghadangan ini bermula dari serangan kilat terhadap truk militer yang penuh dengan tentara di dalamnya oleh TII dari Resimen VII Kuta Karang di bawah pimpinan Hasan Saleh.⁷¹⁰ Penghadangan yang dilakukan tanggal 22 Februari 1955 ini tepatnya terjadi di tikungan sempit pendakian Gunung Paroe di Km 34 Jalan Raya Banda Aceh-Meulaboh yang menewaskan 15 orang seketika dan 1 orang lagi luka parah, sedangkan truk hangus terbakar.

Mendengar berita tersebut temannya peleton lain dari batalyon tersebut dengan sangat emosi melakukan pengejaran, namun kelompok pemberontak (TII) telah melarikan diri. Oleh karena yang dicari tidak ketemu, pihak tentara mengalihkan amarah mereka kepada penduduk desa yang ada di sekitar itu. Secara berturut-turut tanggal 26 dan 28 Februari dan 4 Maret 1955 mereka memporak-porandakan desa Pulot, Cot Jeumpa, Lhok Seudu dan Krueng Kala, dan melakukan eksekusi massal terhadap penduduk laki-laki remaja dan dewasa yang mereka temui. Peristiwa tersebut mengakibatkan sekitar 100 orang penduduk tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka, dan sejumlah kios dibakar.⁷¹¹

Peristiwa Pulot Cot Jeumpa tersebut telah menjadi *turning point* terhadap proses penyelesaian masalah Aceh. Tekanan-tekanan politik terhadap Pemerintah Pusat akibat Peristiwa Pulot Cot Jeumpa telah mempengaruhi Pemerintah dalam penggunaan personil militer. Untuk menghindari terulangnya Peristiwa Pulot Cot Jeumpa dan bertambahnya pertumpahan darah di bumi Aceh berbagai usaha dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian masalah Aceh, baik dilakukan secara pribadi maupun kelompok.

Usaha melakukan negosiasi dengan pihak pemberontak juga dilakukan oleh Wakil Presiden Mohd. Hatta. Pada bulan Juni 1955 Hatta mengirim dua orang kurir yaitu Hasballah Daud⁷¹², anak Tgk. M. Daud Beureueh sendiri, dan Abdullah Arief untuk menemui Tgk. M. Daud Beureueh dan pimpinan pemberontak lainnya. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Hatta tanggal 14 Agustus 1955, pertemuan tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang konkrit. Namun demikian, pihak pemberontak mengatakan bahwa maksud untuk mengembalikan keamanan di Aceh sangat mereka hargai.⁷¹³

Negosiasi yang mandek masa PM Ali dihidupkan kembali oleh Perdana Menteri yang baru Burhanuddin Harahap. Setelah mendapat mandat dari Pemerinah Pusat, S. M. Amin meneruskan korespondensinya dengan pimpinan pemberontak. Namun demikian, sampai jabatannya sebagai Gubernur Sumatera Utara digantikan oleh Komala Pontas pada 28 Februari 1956 pemulihan keamanan di Aceh belum terpecahkan. Pada pertengahan September 1956 dilangsungkan Musyawarah Mahasiswa /Pemuda/ Pelajar/ Masyarakat Aceh se-Indonesia di Medan untuk membahas masalah pemulihan keamanan di Aceh. Sebulan kemudian, tepatnya pertengahan Oktober 1956 diadakan pula Reuni Mantan Perwira Devisi Gajah I di Yogyakarta dalam upaya memecahkan

⁷⁰⁹ M. Noer el-Ibrahimi, *Peranan Teung Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hlm. 198.

⁷¹⁰ Wawancara dengan Teungku Shaleh, Leupung, Cot Jeumpa, 14 Juni 2006.

⁷¹¹ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 314-315.

⁷¹² Hasballah Daud adalah anak kandung Tgk. M. Daud Beureueh sendiri yang waktu itu sudah berwiraswasta.

⁷¹³ M. Nur El Ibrahimi, *op. cit.*, hlm. 197.

persoalan keamanan di Aceh. Namun demikian, semua usaha tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan.⁷¹⁴

Hadirnya sebuah perlawanan atau pemberontakan, akan selalu direspon dengan operasi militer. Gubernur Sumatera Utara meminta bantuan militer kepada Pemerintah Pusat untuk segera memberangus “gerombolan” Teungku Daud Beureueh. Permintaan ini dengan cepat dikabulkan, dan pasukan dari Sumatera Tengah (Padang) dan daerah lain Sumatera pun digerakkan untuk bertindak. Kemudian satuan-satuan militer TRI Jawa Tengah, Divisi Diponegoro, juga diperintahkan ke Aceh. Pemerintah bertekad akan menghadapi situasi dengan keteguhan hati dan menyapu pemberontakan dengan cepat. Di dalam tabel di bawah ini terdapat nama-nama Batalyon TRI (dan kemudian berubah nama menjadi TNI) setelah terjadinya peristiwa DI di Aceh di dalam lingkup tugas Kodam I Iskandar Muda:

Tabel 1

Kesatuan-Kesatuan Militer yang melakukan Operasi Militer di Aceh dalam Menumpas Darul Islam di Aceh (mulai September 1953-1962)

N o.	Nama Batalyon	Pimpinan	Keterangan
1	Yonif 118	Mayor A. Manap Lubis	Peristiwa Geudong
2	Yonif 131	Mayor B. Nainggolan/Mayor Hendri Siregar	
3	Yonif 132	Mayor O. Sarumpaet/Kapten S.M. Pohan	
4	Yonif 133	Kapten R. Syahnun/Kapten Zein Hamid	
5	Yonif 134	Kapten N.H. Sitorus	
6	Yonif 135	Kapten Nyak Adam Kamil	

⁷¹⁴

Ibid.

7	Yonif 136	Mayor Teuku Manyak	Terlibat PRRI tahun 1958.
8	Yonif 137	Mayor J. Rambe	
9	Yonif 138	Mayor R. Permata	
10	Yonif 139	Mayor A. Manap Lubis	
11	Yonif 140	Kapten Dharmansyah	
12	Yonif 141	Mayor Anwar Umar	
13	Yonif 142	Mayor Johan/Mayor Iskandar Martawijaya	Peristiwa Cot Jeumpa, Pulot dan Krung Kala
14	Yonif 431/Diponegoro	Mayor Suraksono	
15	Yonif 434 /Diponegoro	Mayor Rustamadji Wibowo	
16	Yonif 435/Diponegoro	Mayor Soebandono	
17	Yonif 436/Diponegoro	Mayor Jimin	
18	Yonif 443/Diponegoro	Kapten Hamzah	
19	Yonif 445/Diponegoro	Letkol Sabadhono	
20	Yonif 446/Diponegoro	Mayor Sabadhono	

21	Yonif 447/Diponegoro	Mayor Sugiarto	
22	Yonif 448/Diponegoro	Mayor Sudarto Slamet	
23	Yonif 452/Diponegoro	Mayor Otteng Hasmeng	
24	Yonif B. TT-I/SWD	Lettu Gunawan	
25	Yonif C. TT-II/SWD	Mayor Juhartono	
26	Yonif D. TT- I/Bukit Barisan	Kapten B. Siregar	
27	Yonif E. TT- II/SWD	Kapten W. Tummawiwi	
28	Yonif ROI-B- RES-3 TT- I/BB	(?)	
29	Kesatuan Resimen 2 TT-I/BB	Letkol Ibrahim Ajie	
30	Kie Rajasa POM	Lettu Sudarman	

31	Kie R.P.K.A.D.	(t.a.d)	
32	Kesatuan KKO-AL	(t.a.d)	
33	Kesatuan Bantuan AURI	(t.a.d)	
34	Kesatuan dari Polisi	(t.a.d)	
35	Kesatuan dari BRIMOB (Mobrig)	(t.a.d)	
36	Resimen-I	(t.a.d)	Kesatuan organik KDMA/ KODAM-I/ Iskandar Muda

Sumber: Sebagian disarikan dari JarahDam-I, *Dua Widhu Kodam I/Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Sejarah Kodam-I Iskandar Muda, 1972), hlm. 243-244.

Seperti dikemukakan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo: "Bila rumah terbakar, padamkanlah api tanpa berhenti menanyakan macam-macam".⁷¹⁵ Namun tanggung jawab terakhir untuk operasi-operasi keamanan terus juga terletak pada para penguasa sipil. Sementara rumah-rumah banyak yang dibakar karena siasat militer untuk memenangkan pertempuran melawan "para pemberontak" Darul Islam di berbagai daerah di Aceh. Banyak sekali rumah-rumah yang dibakar oleh tentara Republik yang menyebabkan kerugian di pihak sipil karena konflik ini, tidak mendapatkan ganti-rugi disebabkan oleh karena "pembumihangusan adalah perbuatan guna siasat pertahanan negara".⁷¹⁶

Soal penggantian kerugian akibat perang ini telah demikian menyulitkan aparat sipil. Sementara di Sumatera, banyak aparat sipil berlepas tangan tidak mau bertanggung-jawab terhadap persoalan ini dan "supaya selanjut-nya soal2 serupa tidak perlu dimintakan perantaraan kami (Kementerian Dalam Negeri Djakarta)".⁷¹⁷ Selanjutnya, para aparat juga menggunakan Peraturan Pemerintah R.I.S No. 10 tahun 1950 tentang *oorlogs-risico*.⁷¹⁸

Tetapi konflik-konflik yang terjadi bukanlah semata-mata karena ketidaktahuan. Juga terdapat peri laku menyakitkan hati yang disengaja, maupun kasus-kasus yang di

⁷¹⁵ Nazaruddin Sjamsuddin, "The Achehnese Rebellion of 1953: some outlines", dalam *Solidarity* 10-6, hlm. 63.

⁷¹⁶ Surat Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Medan, tanggal 27 Juni 1953, No. 25743/2. Juga Surat Kementerian Pertahanan, Djawatan Perbendaharaan Pusat, tanggal 14 Januari 1953, No. 43/A/53/k, tentang Pembumihangusan rumah di daerah Blitar. Siasat "pembumihangusan rumah" ini telah demikian sukses menyebarkan isu bahwa DI adalah singkatan dari "Duruk Imah" (Bahasa Sunda) yang berarti 'bakar rumah'.

⁷¹⁷ Salinan Surat Kementerian Dalam Negeri Djakarta, tanggal 9 Mei 1953, No. Pem. 75/3/5.

⁷¹⁸ Peraturan ini mengatur tentang negara dalam keadaan darurat perang, di mana menurut artikel 13 ayat 8 kerugian hanya diberikan terhadap pengambilan barang-barang untuk dimiliki dan pengambilan untuk dipakai, sementara menurut Lembaran negara RIS No. 10, tahun 1950 pasal 1 menyebutkan "perbuatan guna siasat pertahanan negara oleh karena barang dihancurkan seanteronya atau buat sebagian atau tidak dapat dipakai lagi, tidak termasuk dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau tidak dapat dipakai lagi, sehingga tidak termasuk dalam pengertian tersebut, maka terhadap pembumihangusan rumah tersebut tidak dapat dimintakan penggantikerugian.

dalamnya kemungkinan ada tuduhan penyiksaan dan pembunuhan. Banyak tuduhan sesungguhnya ditujukan pada Angkatan Darat yang dinyatakan melakukan kejahatan perang dan tindak-tanduk yang tidak senonoh, dan sudah pada Februari 1954 anggota Parlemen Masjumi Muhammad Nur el Ibrahimy mengusulkan agar dibentuk komisi parlemen untuk menyelidiki apa yang disebutnya tingkah laku yang kejam dan sewenang-wenang prajurit-prajurit Republik.⁷¹⁹ Beberapa kasus menyangkut pelanggaran susila (yang ketat) dari daerah ini. Pada awal 1955 umpamanya, beberapa prajurit dari Batalyon 142 (Sumatera Barat) memasuki sebuah desa dekat Banda Aceh dan memerintahkan semua wanita berkumpul, kemudian celana mereka-mereka turunkan dengan memperlihatkan kemaluan mereka, dan mereka tanyakan pada para wanita ini apakah kemaluan mereka ini tidak sama indahnya dengan milik pria Aceh. Pada kesempatan lain beberapa tawanan perang Aceh dipaksa membandingkan kemaluan mereka dengan kemaluan prajurit Angkatan Darat untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa tidak terdapat perbedaan, dan prajurit Republik pun disunat dan karena itu agar tidak dicap sebagai kafir.⁷²⁰

Peristiwa-peristiwa lain menyangkut perampokan oleh pasukan Republik, pembakaran rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya karena mereka dicurigai telah menyeberang ke pihak pejuang *mujahidin*,⁷²¹ dan pembunuhan serta penyiksaan para tawanan dan penduduk-penduduk desa yang tidak berdosa.⁷²² Di Lhokseumawe juga banyak syuhada DI yang syahid ditembak oleh TRI dan Mobrig.

Di Geudong, Aceh Utara, di ujung jembatan Geudong, juga banyak syu-hada bergelimpangan menemui ajalnya karena ditembak oleh pasukan dengan senjata lengkap. Sementara rakyat hanya bersenjatakan pedang, *parang cikok*, klewang dan pisau dapur tetap melakukan perlawanan. Hasilnya tentu tidak sebanding. Sebanyak kurang lebih 100 atau 90 orang menemui kesyahidannya. Sementara dari pihak TRI hanya luka-luka ringan seorang.

Pemerintah dikecam tentang ketidakamanan Aceh maupun kelakuan pasukan yang tidak senonoh di sini. Walau pun aksi-aksi militer ada hasilnya, keadaan jauh dari memuaskan. Hasil operasi-operasi Angkatan Darat dan Brigade Mobil demikian rupa hingga pada pertengahan 1954 hampir setengah dari Aceh cukup aman untuk bisa menarik bantuan militer dan menyerahkan pemeliharaan hukum dan ketertiban kepada Angkatan Kepolisian daerah. Hanya di Kabupaten Aceh Besar (di sini kaum pemberontak bergerak hanya beberapa mil dari Banda Aceh), Kabupaten Pidie (tempat Teungku Daud Beureueh memusatkan pemerintahan sipil dan militernya), Kabupaten Aceh Utara dan daerah Takengon di Aceh Tengah—daerah-daerah tempat kaum pemberontak yang paling kuat—dिलanjutkan bantuan militer.

Di daerah-daerah yang belakangan ini *Darul Islam* tetap sangat aktif. Di desa-desa di bawah pengawasannya ini mereka menetapkan pajak— dalam beberapa hal juga dikenakan pada guru-guru sekolah dan para pejabat Pemerintah Republik yang terus bekerja —, melakukan pencatatan perkawinan dan perceraian, dan pada umumnya menjalankan hukum, mengadili kasus-kasus kejahatan rutin dan kasus-kasus yang merupakan pelanggaran syariat Islam, seperti membatalkan puasa, dan kadang-kadang

⁷¹⁹ Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, t.t., Jilid III), hlm. 124.

⁷²⁰ A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin*, (Banda Aceh: Pustaka Murni Hati, 1956), hlm 94 dan 103.

⁷²¹ Sebutan *mujahidin* juga diberikan oleh oleh para tentara TRI terhadap para pejuang DI di Aceh. Artinya, jihad orang-orang DI secara sadar atau tidak telah diakui sebagai “perang di jalan Allah” meskipun mereka berperang di jalan disebaliknya. Sebutan ‘gerombolan’, ‘pengacau liar’, ‘pemberontak’, ‘perusuh’, ‘pengganggu keamanan’, ‘perusak ketertiban’, dll masih juga sering dialamatkan kepada para pejuang Darul Islam di barisan Teungku Daud Beureueh, bersisian dengan imam SM Kartosoewirjo. Namun, para pejuang DIAceh tak pernah merisaukan sebutan-sebutan dari “tentara Pancasila”. Wawancara dengan Tgk. Ibrahim, banda Aceh, 28 Juni 2006.

⁷²² Gelanggang, *Ibid.*, hlm. 81-112.

juga menjatuhkan hukuman pada mereka yang ragu-ragu mengambil keputusan apakah memihak Negara Islam atau memihak Republik Indonesia.⁷²³

Dari posisi mereka di gunung-gunung dan hutan-hutan kaum pemberontak terus juga mengganggu lalu lintas dan menyerang patroli dan pos-pos tentara, dengan beroperasi dalam kelompok-kelompok yang kadang-kadang terdiri dari beberapa ratus orang. Sekali-sekali mereka lakukan pula serangan pada kota-kota kecil dan besar. Pada kunjungan komisi parlemen ke Aceh pada Januari 1954 para anggotanya sempat mencatat beberapa kali tembak-menembak di sekitar Banda Aceh dan Sigli. Selama komisi tinggal di Banda Aceh kaum pemberontak melemparkan bom-bom pembakar dan berusaha mengadakan pembakaran di dalam kota.⁷²⁴ Pada 17 Agustus 1954, pasukan *Darul Islam* memasuki dan menduduki Lamno, yang dikuasai selama dua hari. Sekitar waktu yang sama mereka menyerang Seulimeum, juga di Aceh Besar. Tahun berikutnya kaum pemberontak berusaha memasuki Idi dan menembaki Sigli. Serangan terhadap Idi merupakan satu petunjuk bahwa juga daerah-daerah lain Aceh ini masih menghadapi kegiatan-kegiatan *Darul Islam*, yang sesudah 1954 menjadi sering lagi. Di Aceh Barat, Tengah, dan Timur pun—daerah-daerah yang dianggap Pemerintah Republik relatif aman—*Darul Islam* menjadi lebih aktif, sebagian akibat kemarahan terhadap tingkah laku pasukan Republik dan sebagian karena gerakan pasukan Tentara Islam. Pada awal 1955 Hasan Saleh pindah dari Pidie ke Aceh Barat. Sesudah meninggalkan saudaranya Ibrahim Saleh memimpin di sini, dia lalu terus ke Aceh Timur, dengan tujuan terakhir Tapanuli. Pasukannya di Aceh Timur diperkuat satuan-satuan yang dipimpin Banda Chairullah, yang juga berasal dari Pidie. Pasukan lain dari Pidie, yang dipimpin A.G. Mutiara, masuk di Aceh Barat.⁷²⁵

Lebih daripada sebelumnya, *Darul Islam* di Aceh kini juga berusaha merugikan Pemerintah Republik secara ekonomis. Bukan saja mereka terus melakukan upaya mengganggu perhubungan, tetapi juga menunjukkan serangan pada bermacam perkebunan dan perusahaan industri. Sejumlah perkebunan damar di Aceh Tengah diserang dan dibakar. Di Aceh Timur ladang-ladang minyak menjadi sasaran serangan kaum pemberontak. Gerilyawan mencatat salah satu hasilnya yang terbesar pada Maret 1955, ketika mereka menyerang Pelabuhan Kuala Langsa, dengan membakari semua gudang (hanya gudang KPM yang luput secara misterius), dan mengakibatkan banyak sekali kerugian.⁷²⁶

Sulit sekali Tentara Republik menumpas kegiatan-kegiatan gerilyawan. Pada 1956 Komando Militer Sumatera Utara terpaksa mengakui, semangat tentara pemberontak—yang kekuatannya ditaksir 1.400 orang—tinggi, musuh mempunyai pendukung dan simpatisan di hampir setiap desa. Di Aceh, demikian dinyatakan, satu syarat utama untuk melakukan perang gerilya dengan berhasil terpenuhi, yaitu dukungan rakyat setempat. Bahkan orang-orang yang pada mulanya menentang Negara Islam Indonesia, atau bersikap netral, dapat ditarik ke pihak pemberontak karena dakwah yang mereka lakukan.

Menurut laporan, dua peristiwa yang paling hebat adalah di Cot Jeumpa dan Pulot Leupung, dua desa dekat Banda Aceh di Aceh Besar, suatu daerah yang dianggap aman oleh Angkatan Darat, pada Februari 1955. Kedua peristiwa ini disingkapkan harian Peristiwa, yang terbit di Banda Aceh. Menurut berita Peristiwa, pasukan Republik pada 26 Februari menangkapi semua penduduk Cot Jeumpa dan menembak mati mereka semua. Peristiwa yang serupa terjadi dekat Pulot Leupung dua hari kemudian. Peristiwa mengatakan, dalam kedua kejadian ini kira-kira dua ratus orang seluruhnya terbunuh,

⁷²³ Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, t.t., Jilid III), hlm.103.

⁷²⁴ *Ibid.*, hlm. 105.

⁷²⁵ *Ibid.*, hlm. 130, 132.

⁷²⁶ A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin*, (Banda Aceh: Pustaka Murni Hati, 1956) hlm. 115-119.

termasuk anak-anak. Tetapi versi yang dikemukakan Tentara berbeda. Dengan tidak menyangkal besarnya jumlah kematian, mereka berusaha memberi alasan dengan mengatakan, korban-korban ini semua tewas dalam pertempuran. Beberapa hari sebelum kejadian-kejadian ini, juru bicara Angkatan Darat menjelaskan, tembakan-tembakan dilepaskan terhadap sebuah truk tentara pada sebuah jembatan dekat Cot Jeumpa. Salah sebuah peluru mengenai tank bensin, truk terbakar, akibatnya lima belas prajurit mati terbakar. Jebakan itu dipasang Pawang Leman, bekas mayor pada zaman revolusi dan bekas camat setempat. Keterangan yang dikumpulkan Tentara Republik menyatakan, rakyat setempat pada hari yang nahas itu menyuruh pulang kembali semua lalu lintas—kecuali truk tentara itu—dengan dalih bahwa jembatan putus. Menurut sumber yang sama, Pawang Leman telah menghasut rakyat untuk memulai perang sabil. Kemudian komandan pasukan Angkatan Darat setempat memutuskan menyelidiki berdasarkan keterangan ini, dan mengirim sebuah patroli ke Cot Jeumpa. Di sini patroli ini ditembaki dan diserang pasukan *Darul Islam* (dengan ini dimaksudkan rakyat setempat) dengan parang dan pisau dan harus menjawab serangan ini. Hal seperti itu terjadi di Pulot Leupung. Di sini sebuah patroli tentara diserang penduduk desa. Sebuah keterangan lain yang dikeluarkan menekankan, tidaklah mungkin membedakan gerilyawan dari penduduk desa biasa, karena para gerilyawan telah bercampur dengan rakyat setempat atau memaksa penduduk desa maju di barisan depan.

Pembunuhan di Cot Jeumpa dan Pulot Leupung menimbulkan protes hebat dari organisasi-organisasi Islam dan Aceh. Front Pemuda Aceh mengancam akan melaporkan peristiwa ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara Konperensi Asia-Afrika, bila tidak ditindak demi keadilan dan suatu penyelidikan dimulai Pemerintah. Dalam Parlemen pernyataan-pernyataan diajukan Muhammad Nur el Ibrahimy, Amelz, dan Sutardjo Kartohadikusumo. Di pihak Pemerintah Menteri Dalam Negeri dikirim ke Aceh, sedangkan wakil-wakil Staf Tentara Pusat dan Jaksa Agung pun mengunjungi daerah itu. Selanjutnya, gubernur Sumatera Utara, S.M. Amin, mulai penyelidikan. Ketika mengunjungi kedua desa itu didapatinya Cot Jeumpa seluruhnya kosong, sedangkan di Pulot Leupung semua mereka yang luput dari pembantaian telah lari ke gunung. Sesudah ini Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memberikan keterangan kepada DPR atas nama Pemerintah dalam pertengahan April. Keterangan tentang peristiwa-peristiwa ini tidak berbeda dengan yang dikemukakan Angkatan Darat.⁷²⁷

Pasukan *Darul Islam* sendiri juga dituduh melakukan kejahatan dan pembantaian besar-besaran. Demikianlah dinyatakan, mereka telah membunuh lebih dari 200 tawanan di dekat Lammeulo, daerah tempat mulainya revolusi sosial, ketika dipaksa mundur ke sini Oktober 1953. Bicara tentang peristiwa yang sama ini, komisi parlemen melaporkan terbunuhnya secara keji 123 anggota PNI, 120 anggota PKI dan 28 anggota Perti sesudah kunjungannya ke Aceh.⁷²⁸

Peristiwa yang menyangkut pasukan Republik digunakan mereka yang menyetujui penyelesaian damai untuk mendesak sekali lagi diadakan perundingan dan diberikan konsesi kepada beberapa tuntutan kaum pejuang mujahidin. Sejauh ini upaya untuk meyakinkan pejuang mujahidin-pejuang mujahidin *Darul Islam* di Aceh untuk menghentikan perjuangan mereka dan berunding dengan Republik telah gagal. Gubernur baru Sumatera Utara, S.M. Amin, melakukan surat-menyurat dengan pemimpin-pemimpin pejuang mujahidin yang terkemuka sejak akhir 1953. Walaupun dia sendiri bukan orang Aceh (dia sendiri seorang Batak Mandailing), hubungan Amin dengan Teungku Daud Beureueh dan rekan-rekannya yang akrab baik. Sebenarnya, pengangkatannya sebagai pengganti Abdul Hakim, yang menjauhi pemimpin-pemimpin Aceh dengan sikapnya, sebagian adalah karena didorong perkenalannya yang akrab

⁷²⁷ Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, t.t., Jilid III), hlm.272-442.

⁷²⁸ *Ibid.*, hlm. 149.

dengan pemimpin-pemimpin ini.⁷²⁹ Karena, selama masa Jepang dia menjadi kepala sekolah menengah di Banda Aceh, sedangkan kemudian dia menjadi anggota mahkamah pengadilan di Sigli bersama Usman Raliby dan Hasan Aly. Sesudah proklamasi kemerdekaan ia menjadi anggota dan kemudian, Januari 1946, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh. Kemudian menyusul pula pengangkatannya sebagai gubernur Sumatera Utara.

Pimpinan tentara mengakui, tingkah laku yang tidak senonoh para prajuritnya sendiri menambah keberhasilan propaganda *Darul Islam*.⁷³⁰ Prajurit-prajurit dari luar daerah—Batak Minangkabau, dan Jawa—kadang-kadang sangat menyakitkan hati orang Aceh dengan kelakuan mereka. Untuk memperbaiki hal ini Angkatan Darat mengeluarkan perintah kepada anggotanya agar berlaku baik terhadap rakyat setempat, dengan memberikan keterangan tentang masyarakat Aceh maupun nasihat bagaimana harus bersikap dalam masyarakat ini. Demikianlah mereka dilarang memasuki masjid memakai sepatu dan main judi serta minum minuman keras, dan diperingatkan agar menghormati adat istiadat setempat. Dalam hubungan ini mereka diberi tahu bagaimana bersikap sopan dalam menghadapi wanita Aceh, dengan menasihatkan mereka, bila ingin kawin dengan seorang gadis setempat, agar menghubungi orang tuanya dan kerabatnya, dan mengetahui aturan-aturan yang bersangkutan lebih dahulu.⁷³¹

Tetapi konflik-konflik yang terjadi bukanlah semata-mata karena ketidaktahuan. Juga terdapat perilaku menyakitkan hati yang disengaja, maupun kasus-kasus yang di dalamnya kemungkinan ada tuduhan penyiksaan dan pembunuhan. Banyak tuduhan sesungguhnya ditujukan pada Angkatan Darat yang dinyatakan melakukan kejahatan perang dan tindak-tanduk yang tidak senonoh, dan sudah pada Februari 1954 anggota Parlemen Masjumi Muhammad Nur el Ibrahimy mengusulkan agar dibentuk komisi parlemen untuk menyelidiki apa yang disebutnya tingkah laku yang kejam dan sewenang-wenang prajurit-prajurit Republik.⁷³² Beberapa kasus menyangkut pelanggaran susila (yang ketat) dari daerah ini. Pada awal 1955 umpamanya, beberapa prajurit Minangkabau memasuki sebuah desa dekat Banda Aceh dan memerintahkan semua wanita berkumpul, kemudian celana mereka-mereka turunkan dengan memperlihatkan kemaluan mereka, dan mereka tanyakan pada para wanita ini apakah kemaluan mereka ini tidak sama indahnya dengan milik pria Aceh. Pada kesempatan lain beberapa tawanan perang Aceh dipaksa membandingkan kemaluan mereka dengan kemaluan prajurit Angkatan Darat untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa tidak terdapat perbedaan, dan prajurit Republik pun disunat dan karena itu agar tidak dicap kafir.⁷³³

Peristiwa-peristiwa lain menyangkut perampokan oleh pasukan Republik, pembakaran rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya karena mereka dicurigai telah menyeberang ke pihak pemberontak, dan pembunuhan serta penyiksaan para tawanan dan penduduk-penduduk desa yang tidak berdosa.⁷³⁴

Menurut laporan, dua peristiwa yang paling hebat adalah di Cot Jeumpa dan Pulot Leupung, dua desa dekat Banda Aceh di Aceh Besar, suatu daerah yang dianggap aman oleh Angkatan Darat, pada Februari 1955. Kedua peristiwa ini disingkapkan harian

⁷²⁹ Ketika Amin diangkat, dua puluh partai dan organisasi, di antaranya Masyumi, GPII dan Muhammadiyah mendesak agar Abdul Hakim terus menduduki jabatannya. Partai-partai yang menentang termasuk PKI, yang ingin Abdul Hakim segera dipecat. Persoalannya adalah politik agraria Abdul Hakim; PKI menyatakan dia bertanggung jawab tentang penangkapan para petani Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, t.t., Jilid I), hlm. 369-370.

⁷³⁰ *Ibid.*

⁷³¹ *Ibid.*

⁷³² *Ibid.*, hlm. 124.

⁷³³ A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin*, (Banda Aceh: Pustaka Murni Hati, 1956), hlm. 94, 103.

⁷³⁴ *Ibid.*, 81-112.

Peristiwa, yang terbit di Banda Aceh. Menurut berita *Peristiwa*, pasukan Republik pada 26 Februari menangkapi semua penduduk Cot Jeumpa dan menembak mati mereka semua. Peristiwa yang serupa terjadi dekat Pulot Leupung dua hari kemudian. Peristiwa mengatakan, dalam kedua kejadian ini kira-kira dua ratus orang seluruhnya terbunuh, termasuk anak-anak. Tetapi versi yang dikemukakan Tentara berbeda. Dengan tidak menyangkal besarnya jumlah kematian, mereka berusaha memberi alasan dengan mengatakan, korban-korban ini semua tewas dalam pertempuran. Beberapa hari sebelum kejadian-kejadian ini, juru bicara Angkatan Darat menjelaskan, tembakan-tembakan dilepaskan terhadap sebuah truk tentara pada sebuah jembatan dekat Cot Jeumpa. Salah sebuah peluru mengenai tank bensin, truk terbakar, akibatnya lima belas prajurit mati terbakar. Jebakan itu dipasang Pawang Leman, bekas mayor pada zaman revolusi dan bekas camat setempat. Keterangan yang dikumpulkan Tentara Republik menyatakan, rakyat setempat pada hari yang nahas itu menyuruh pulang kembali semua lalu lintas—kecuali truk tentara itu—dengan dalih bahwa jembatan putus. Menurut sumber yang sama, Pawang Leman telah menghasut rakyat untuk memulai perang sabil. Kemudian komandan pasukan Angkatan Darat setempat memutuskan menyelidiki berdasarkan keterangan ini, dan mengirimkan sebuah patroli ke Cot Jeumpa. Di sini patroli ini ditembaki dan diserang pasukan *Darul Islam* (dengan ini dimaksudkan rakyat setempat) dengan parang dan pisau dan harus menjawab serangan ini. Hal seperti itu terjadi di Pulot Leupung. Di sini sebuah patroli tentara diserang penduduk desa. Sebuah keterangan lain yang dikeluarkan menekankan, tidaklah mungkin membedakan gerilyawan dari penduduk desa biasa, karena para gerilyawan telah bercampur dengan rakyat setempat atau memaksa penduduk desa maju di barisan depan. Tabel-tabel di bawah ini menjelaskan secara detail betapa anak-anak telah menjadi syuhada muda, korban yang tak berdosa:

Tabel 2

Daftar Nama-Nama Syuhada Korban Pembantaian di Tjot Jeumpa, Lhoong, Aceh Besar Pada Tanggal 26 Februari 1955 yang dilakukan oleh TNI, Batalyon 142, Peleton 32 (Berdasarkan Laporan Abdul Rachman Ms, Assisten Wedana Kecamatan Lhoong, 28 Februari 1955)

No.	Nama yang Meninggal	Umur	Pekerjaan	Tempat Tinggal
1	Ali Lam Beurahim	16 tahun	Buruh P.U.	Gampong Birek
2	Abdullah Ali	16 tahun	Tani	Gampong Birek
3	Zainul Sjam	22 tahun	Bekas M.S.G.B.	Gampong Birek
4	Amat Lampoh U	18 tahun	Tani	Gampong Birek
5	Umar Kadir	20 tahun	Tani	Gampong Birek
6	Beurahim Baroih	25 tahun	Tani	Gampong Birek
7	Abdul Rani Ali	14 tahun	Tani	Gampong Birek
8	Husen Bileu	25 tahun	Tani	Gampong Birek
9	Nja' Hasjim Bn. Blang	25 tahun	Tani	Gampong Birek
10	Usuh Nago	14 tahun	Tani	Gampong Birek
11	Amin Husen	20 tahun	Tani	Gampong

				Birek
12	Saleh Musa	25 tahun	Tani	Gampong Birek
13	Nja' Hasjim Musa	14 tahun	Tani	Gampong Birek
14	Abd. Rani	25 tahun	Tani	Gampong Birek
15	Leman Limah	25 tahun	Tani	Gampong Birek
16	Nja' Oenoh	16 tahun	Tani	Gampong Birek
17	Mahmud Kandih	16 tahun	Tani	Gampong Birek
18	Nago Baroih	35 tahun	Tani	Gampong Birek
19	Nja' Main Tgk. Leman	27 tahun	Tani	Gampong Birek
20	Berahim Kaoh	23 tahun	Tani	Gampong Birek
21	Nja' Ali Idris	35 tahun	Jualan	Seungko Mulat
22	Nja' Harun	25 tahun	Jualan	Seungko Mulat
23	Nja' Leman	30 tahun	Jualan	Seungko Mulat
24	Amin Kareung	25 tahun	Tani	Kareung
25	Harun Hasim	25 tahun	Tani	Kareung

Tabel 3

Daftar Nama-Nama Syuhada Korban Pembantaian di Pulot, Leupung, Aceh Besar Tanggal 29 Februari 1955 yang dilakukan oleh TNI, Batalyon 142, Peleton 32 (Berdasarkan Laporan Abdul Wahab, Bupati/Kepala daerah Kabupaten Atjeh Besar, 3 Maret 1955)

No.	Nama yang Meninggal	Umur	Tempat Tinggal
1	Tgk. Muhammad Chalud	45 tahun	Meunasah Bak U
2	Tgk. Muhammad Daud	50 tahun	Meunasah Bak U
3	Tgk. Hassan	55 tahun	Lam Seunia
4	Pawang Husen	40 tahun	Mesdjid
5	Pawang Hasim	40 tahun	Mesdjid
6	Pawang Ali	27 tahun	Lam Seunia
7	Pawang Hassan	27 tahun	Pulot
8	Pawang M. Sjaref Ahmad	25 tahun	Meunasah Bak U
9	Pawang Baharuddin (Laud)	25 tahun	Meunasah Bak U
10	Pawang Harun	40 tahun	Pulot
11	Pawang M. Ali	45 tahun	Lam Seunia
12	Pawang Jusuf Pukat Pari	35 tahun	Lam Seunia
13	Tgk. Ahmad Wk. Deurih	40 tahun	Lam Seunia
14	Keutjhik Budiman	45 tahun	Pulot
15	Itam Pw. Harun	25 tahun	Pulot
16	Muhammad Ali Pt. Harun	12 tahun	Pulot
17	Agam Amik	30 tahun	Pulot
18	Abu Atjeh	25 tahun	Meunasah Bak U
19	Daod Ahmad	11 tahun	Lam Seunia
20	Muhammad Ali S.G.B.	12 tahun	Pulot
21	Abdurrahman (Puasa)	25 tahun	Lajeun

22	Seuman Beurahim	11 tahun	Meunasah Bak U
23	Su'id Pante	13 tahun	Lam Seunia
24	Seuman Rachman	14 tahun	Pulot
25	Junus Main (Barat)	30 tahun	Meunasah Bak U
26	Mahmud Tgk. Hassan	25 tahun	Lam Seunia
27	Him Blang	25 tahun	Deah Mamplam/Pulot
28	Gam Him	45 tahun	Deah Mamplam/Pulot
29	Agam Nago	12 tahun	Mesdjid
30	Amat Pintjang	30 tahun	Meunasah Mesdjid
31	Amin Sani	11 tahun	Pulot
32	Jusuf Ahmad	13 tahun	Pulot
33	Hasjem Rahman	35 tahun	Pulot
34	Hassan Nipah	100 tahun	Pulot
35	Toke Su'id	50 tahun	Meunasah Bak U
36	Gam Lam Kawe	50 tahun	Lam Kawe
37	Ahmad Mese	12 tahun	Lam Seunia
38	Sufi Kama	30 tahun	Meunasah Bak U
39	Utoh Ma'e	35 tahun	Meunasah Bak U
40	Dolah Leman	45 tahun	Deah Mamplam
41	Agam Dolah	20 tahun	Deah Mamplam
42	Amin Tjalok	50 tahun	Pulot
43	Bintang Pulot	50 tahun	Pulot
44	Hasjem Gam Doli	12 tahun	Lam Seunia
45	Musa Pulot	35 tahun	Pulot
46	Dolah Pante	40 tahun	Meunasah Bak U
47	Harun Toke	35 tahun	Meunasah Bak U
48	Sarong Gapi	25 tahun	Mesdjid
49	Raman Kob	50 tahun	Pulot
50	Him Amat	40 tahun	Pulot
51	Hasan Gam Blang	11 tahun	Meunasah Mesdjid
52	Amad Subin	50 tahun	Pulot
53	Dolah Ahmad	11 tahun	Pulot
54	Hajem Husen	18 tahun	Lam Seunia
55	Ma'e Riek	40 tahun	Lam Seunia
56	Mud Leupoh	55 tahun	Lam Seunia
57	Itam Him Idi	35 tahun	Deah Mamplam
58	Bunthok Musa	14 tahun	Deah Mamplam
59	Djuned Adam	11 tahun	Deah Mamplam
60	Zainun Petua Hasjem	12 tahun	Meunasah Bak U
61	Harun Tjapik	40 tahun	Lam Seunia Peg. P.U.
62	Hassan K/ Adjad	35 tahun	Lam Seunia
63	Min Hassan Bile	20 tahun	Lam Seunia/Pulot
64	Dullah Teupin	50 tahun	Meunasah Pulot

Dan 4 orang lagi yang tidak dikenal namanya dengan pasti.

Tabel 4
Daftar Yang Luka-Luka Dalam Peristiwa Pembantaian di Pulot

No.	Nama Korban Luka	Umur	Tempat Tinggal
1	Dullah		Mns. Seunia
2	Tgk. Agam		Pulot
3	Abd. Salam	11	Pulot
4	Abdullah Pw. Amat	11	Meunasah Bak Oe
5	Machmoed M Ali	14	Lam Seunia

Tabel 5

Daftar Nama-Nama Syuhada Korban Pembantaian di Kroeng Kala, Lhoong, Aceh Besar Pada Tanggal 4 Maret 1955 yang dilakukan oleh TNI, Batalyon 142, Peleton 32 (Berdasarkan Laporan Koresponden *Peristiwa*, 5 dan 10 Maret 1955)

N o.	Nama yang Meninggal	Umur	Tempat Tinggal
1	Tgk. Harun	35	Rima Peukan Bada
2	Harun	27	Tjot Djeumpa
3	Muhammad Ali	30	Djalan Arik Koeloe
4	Leman	35	Djalan Arik Koeloe
5	Sikoh	15	Nedjit Peukan Bada
6	Ali P.U.	25	Birik Koeloe
7	Hasjim Minah Blang	27	Birik Koeloe
8	Ahmad Lampoh U	27	Birik Koeloe
9	Nago	40	Birik Koeloe
10	Hasjim Sago	18	Birik Koeloe
11	Zainoen S.G.B.	17	Birik Koeloe
12	Oesoep Nago	14	Birik Koeloe
13	Harun Asem	25	Birik Koeloe
14	Beurahim Raman	25	Birik Koeloe
15	Amin Petua Husin	19	Mns. Birik
16	Sulaiman Limah	19	Mns. Birik
17	Saleh Tgk	16	Mns. Birik
18	Beurahim Raoef	18	Mns. Birik
19	Junus raman	16	Mns. Birik
20	M. Ali Beurahim	17	Mns. Birik
21	Husin Mudin leman	15	Mns. Birik
22	Umar Brahim	18	Mns. Birik
23	Rani Tengah	20	Mns. Birik
24	Rani Ali	13	Mns. Birik
25	Amin Seman	18	Mns. Birik
26	Mahmud Kando	14	Mns. Birik

Tabel 6

Daftar Nama-Nama Syuhada Korban Pembantaian di Gunung Kulu, Pantan-Sedu, Lhoong, Aceh Besar pada Tanggal 4 Maret 1955 yang dilakukan oleh TNI, Batalyon 142, Peleton 32

dengan menggunakan senjata Bren, 2 mobil, 2 jeep, 2 truk

***Peristiwa*, 10 Maret 1955**

No.	Nama yang Meninggal	Umur	Tempat Tinggal
1	Tgk. Mahmud	60	Meunasah Tunong
2	Leman Muda	55	Meunasah Kareung
3	Apa Ali	60	Meunasah Kareung
4	Puteh Kulu	45	Meunasah Kareung

5	Wk Leman	50	Meunasah Baroh
6	Wk. Mud	70	Meunasah Kareung
7	Keutjihik Ali	65	Meunasah Kareung
8	Gading Blang Mee	42	Meunasah Kareung
9	Anzib	45	Meunasah Baroh

Respon Anggota Parlemen

Pembunuhan di Cot Jeumpa (Lhoong) dan Pulot (Leupung) menimbulkan protes hebat dari organisasi-organisasi Islam dan Aceh. Front Pemuda Aceh (FPA) mengancam akan melaporkan peristiwa ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara Konferensi Asia-Afrika, bila tidak ditindak demi keadilan dan suatu penyelidikan harus dimulai Pemerintah. Dalam Parlemen pernyataan-pernyataan diajukan Muhammad Nur el-Ibrahimi, Amelz, dan Sutardjo Kartohadikusumo. Pembentukan suatu kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Masjumi, dan di dalamnya PNI tidak terwakili, membuat lebih besar terdapat kemungkinan perukunan. Di samping itu, Burhanuddin Harahap diketahui menyetujui mengakhiri pemberontakan dengan cara damai. Sudah beberapa bulan sebelumnya dia sependapat dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Kolonel Zulkifli Lubis—Wakil Kepala Staf Angkatan Darat yang kontroversial ketika itu—segala sesuatu harus dilakukan untuk mendapat penyelesaian politik bagi persoalan berbagai pemberontakan ini.⁷³⁵ Selanjutnya ia meminta anak Teungku Daud Beureueh, Hasballah Daud, pergi ke Aceh berhubungan dengan bapaknya dan menawarkan amnesti kepadanya. Hasballah Daud meninggalkan Jakarta pada 5 Juli 1955 dengan surat dari Hatta dan dari Kementerian Penerangan dalam sakunya, dan disertai Abdullah Arif, seorang pegawai Kementerian Penerangan.

Pada akhir Agustus dia kembali. Baik Kabinet Ali Sastroamidjojo maupun Kabinet Burhanuddin Harahap tidak secara resmi bertanggung jawab untuk perjalanan ini, dan keduanya menekankan, hal ini merupakan prakarsa pribadi. Namun, Abdullah Arif pergi ke Aceh sekali lagi untuk menemui Hasan Aly pada Februari 1956. Upaya ini pun sia-sia. Pemimpin-pemimpin Islam di Aceh belum tergoda oleh tawaran amnesti, sedangkan Republik menolak tuntutan kalangan Darul Islam yang dipandang sebagai ‘pemberontak’ untuk berunding atas dasar pemerintah dengan pemerintah. Upaya untuk menengahi, yang tidak jelas sejauh mana hal ini disokong Pemerintah Republik di Jakarta, hanyalah menjengkelkan pemimpin-pemimpin pemberontak. Mereka ini tetap bersedia berunding, tetapi hanya atas dasar resmi.

Di pihak Pemerintah Menteri Dalam Negeri dikirim ke Aceh, sedangkan wakil-wakil Staf Tentara Pusat dan Jaksa Agung pun mengunjungi daerah itu. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara, S.M. Amin, memulai suatu ‘penyelidikan’. Ketika mengunjungi kedua desa itu didapatinya Cot Jeumpa seluruhnya kosong, sedangkan di Pulot Leupung semua mereka yang luput dari pembantaian telah lari ke gunung. Sesudah ini Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memberikan keterangan kepada DPR atas nama Pemerintah dalam pertengahan April. Keterangan tentang peristiwa-peristiwa ini tidak berbeda dengan yang dikemukakan Angkatan Darat.⁷³⁶

Respon Hasan Tiro

⁷³⁵ Zulkifli Lubis dan Burhanuddin Harahap juga terlibat dalam upaya mengadakan hubungan dengan Kartosuwirjo. Ini menjadi jelas pada Februari 1956, ketika seorang utusan—yang membawa surat-surat untuk Kartosuwirjo yang memintanya agar menyetujui gencatan senjata—dituduh. Lihat, C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993).

⁷³⁶ Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, t.t., Jilid III), hlm. 272-442.

Peristiwa Cot Jeumpa, Pulot, Krung Kala ini mendapatkan respon cepat dari seorang humanis Aceh yang bekerja di New York. Dia adalah Hasan Tiro, yang menulis surat yang sangat keras terhadap Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari partai komunis yang dianggapnya tidak memiliki *sense of humanity* yang memadai untuk menghormati HAM di Aceh. Lihatlah, betapa geramnya Teungku Hasan Tiro dalam suratnya berikut ini:

Kepada Yth.

Tuan Perdana Menteri
Ali Sastroamidjojo
Djakarta.

New York, 1 September, 1954.

Dengan hormat :

Sampai hari ini sudahlah lebih setahun lamanja Tuan memegang kendali pemerintahan atas tanah air dan bangsa kita. Dalam pada itu alangkah sajangnja, kenjataan² sudahlah membuktikan bahwa Tuan, bukan sadja telah tidak mempergunakan kekuasaan jang telah diletakkan ditangan Tuan itu untuk membawa kemakmuran, ketertiban, keamanan, keadilan dan persatuan dikalangan bangsa Indonesia, tetapi sebaliknja Tuan telah dan sedang terus menjeret bangsa Indonesia kelembah keruntuhan ekonomi dan politik, kemelaratan, perpedjahan, dan Perang Saudara. Belum pernah selama dunia berkembang, tidak walaupun dizaman pendjadjahan, rakjat Indonesia dipaksa bunuh-membunuh antara sesama saudaranja setjara jang begitu meluas sekali sebagaimana sekarang sedang Tuan paksakan di Atjeh, di Djawa Barat, di Djawa Tengah, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah dan Kalimantan.

Ataukah zaman pendjadjahan baru sudah datang ke Indonesia dimana hanja kaum Komunis jang mengetjap kemerdekaan, sedang jang lain² harus dibunuh mati ? Lebih dari itu lagi, Tuan-pun tidak segan² memakai politik "petjah dan djadjah" terhadap suku² bangsa diluar Djawa. Bahkan untuk menghantjurkan persatuan dikalangan suku bangsa Atjeh, Tuan-pun tidak malu² memakai "Politik Atjeh" pendjadjah Belanda jang Tuan mengaku begitu membentjinja. Tetapi ketahuilah, politik kotor Tuan ini, bukan sadja sudah gagal, bahkan karenanja, kami rakjat Atjeh semakin bersatu-padu menentang tiap penindasan dari regime Komunis Fasist Tuan.

Lebih rendah dari segala²nja, Tuan sekarang sedang melakukan kejahatan politik jang se-jahat²nja jang bisa diperbuat dalam negara jang terdiri dari suku² bangsa, sebagai halnja Indonesia, jaitu mengadu-dombakan satu suku bangsa dengan suku bangsa jang lain, mengadu-dombakan suku bangsa Kristen dengan suku bangsa Islam, dan sebagainya. Tuan mengadu suku Minahasa dengan suku Sunda, suku Sunda dengan suku Bugis, suku Djawa dengan suku Ambon, dan suku Batak Kristen dengan suku Atjeh Islam. Dan Tuan mengatakan bahwa Tuan telah memperbuat semua ini atas nama persatuan nasional dan patriotisme! Rasanja tak ada suatu tjontoh jang lebih tepat bagi pepatah jang mengatakan bahwa patriotisme itu adalah tempat perlindungan jang terachir bagi seorang pendjahat!

Sampai hari ini, sembilan tahun sesudah tertjapainja kemerdekaan bangsa, sebagian besar bumi Indonesia masih terus digenangi darah dan air mata puterinja jang malang, di Atjeh, di Djawa Barat, di Djawa Tengah, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah dan Kalimantan, jang kesemuanja terdjadi hanja karena Tuan ingin melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik Tuan. Seluruh rakjat Indonesia menghendaki penghentian pertumpahan darah jang maha kedjam ini sekarang djuga, dengan djalan musjawarat antara kita-sama-kita. Tetapi Tuan dan kaum Komunis lainnja, sedang terus mentjoba mengeruk keuntungan jang sebesar-besarnja dari kesengsaraan rakjat ini, dan hanja Tuan sendirilah jang terus berusaha memperpanjang agresi terhadap rakjat Indonesia ini. Dan sekarang, belum puas dengan darah jang sudah tertumpah, harta benda jang sudah musnah, ratusan ribu djiwa jang sudah melajang, Tuan sedang merentjanakan pula buat melantjarkan agresi jang lebih hebat, dahsjat dan kedjam lagi terhadap rakjat Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Djawa Barat, Djawa Tengah, Kalimantan dan Atjeh. Tetapi Tuan akan mengetahui dengan segera bahwa djiwa merdeka, harga diri, dan ketjintaan suku-suku bangsa ini kepada keadilan, tidak dapat Tuan tindas dengan sendjata apapun djuga. Rakjat Indonesia sudah merebut kemerdekaannja dari pendjajah Belanda. Pastilah sudah mereka tidak akan membiarkan Tuan merebut kemerdekaan itu dari mereka, djuga tidak akan membiarkan Tuan menukarnja dengan pendjadjahan model baru !.

Persoalan jang dihadapi Indonesia sesungguhnya bukan tidak bisa dipetjahkan, tetapi Tuanlah jang mentjoba membuatnja mendjadi sukar. Sebenarnja djika Tuan hari ini mengambil keputusan buat menjelesaikan pertikaian politik ini dengan djalan semestinja, yakni perundingan, maka besok hari djuga keamanan dan ketenteraman akan meliputi seluruh tanah air kita. Oleh karena itu demi kepentingan rakjat Indonesia, saja mengandjurkan Tuan mengambil tindakan berikut :

1. Hentikan agresi terhadap rakjat Atjeh, rakjat Djawa Barat, rakjat Djawa Tengah, rakjat Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan rakjat Kalimantan;
2. Lepaskan semua tawanan-tawanan politik dari Atjeh, Sumatera Selatan, Djawa Barat, Djawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan dan Maluku;
3. Berunding dengan Tengku Muhammad Daud Beureueh, S.M. Kartosuwirjo, Abdul Kahar Muzakkar dan Ibnu Hadjar.

Djika sampai pada tanggal 20 September 1954, andjuran-andjuran kearah penghentian pertumpahan darah ini tidak mendapat perhatian Tuan, maka untuk menolong miliunan djiwa rakjat jang tidak berdosa jang akan mendjadi korban keganasan kekedjaman agresi jang Tuan kobarkan, saja dan putera-putera Indonesia jang setia, akan mengambil tindakan-tindakan berikut :

1. Kami akan membuka dengan resmi perwakilan diplomatik bagi Republik Islam Indonesia di seluruh dunia, termasuk PBB, benua Amerika, Eropa dan Asia dan seluruh negara-negara Islam;
2. Kami akan memajukan kepada General Assembly PBB j.a.d. segala kekedjaman, pembunuhan, penganiajaan, dan lain-lain pelanggaran terhadap Human Rights jang telah dilakukan oleh regime Komunis-Fasist tuan terhadap rakjat atjeh. Biarlah forum international mendengarkan perbuatan-perbuatan maha kedjam jang pernah dilakukan didunia sedjak zamannya Hulagu dan Djengkiz Khan. Kami akan meminta PBB mengirinkan komisi ke Atjeh. Biar rakjat Atjeh mendjadi saksi;
3. Kami akan menuntut regima Tuan di muka PBB atas kedjahatan genocide jang tuan sedang lakukan terhadap suku bangsa Atjeh;
4. Kami akan membawa kehadiran mata seluruh dunia Islam, kekedjaman-kekedjaman jang telah dilakukan oleh regime Tuan terhadap para alim ulama di Atjeh, Djawa Barat, Djawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan;
5. Kami akan mengusahakan pengakuan dunia international terhadap Republik Islam Indonesia, jang sekarang de facto menguasai Atjeh, sebagian Djawa Barat dan Djawa tengah, Sulawesi Selatan dan Tengah dan sebagian Kalimantan;
6. Kami akan mengusahakan pemboikotan diplomatik dan ekonomi international terhadap regima Tuan dan penghentian bantuan teknik dan ekonomi dari PBB, Amerika Serikat, dan Kolombo Plan;
7. Kami akan mengusahakan bantuan moral dan material buat Republik Islam Indonesia dalam perdjuanngannya menghapus regime-teror Tuan dari Indonesia.

Dengan demikian terserah kepada Tuanlah, apakah kita akan manjelesaikan pertikaian politik ini setjara antara-kita atau sebaliknya. Tuan dapat memilih tetapi kami tidak ! Apakah tindakan tindakan jang saja ambil ini untuk kepentingan bangsa Indonesia atau tidak, bukanlah hak tuan untuk menentukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala dan 80 djuta rakjat Indonesialah jang akan mendjadi Hakim, jang ketengah-tengah mereka saja akan kembali didunia, dan keharibaanNja saja akan kembali di hari kemudian.

Hasan Mohammad Tiro

Hasan Muhammad Tiro, yang dilukiskan seorang wartawan Amerika sebagai “intelen, berpendidikan baik, dan diberkahi dengan kombinasi yang jarang terdapat: pesona dan keteguhan hati”,⁷³⁷ lahir di Desa Lhok Rheum, Tiro, Pidie. Dalam zaman Belanda dia adalah salah seorang murid Teungku Daud Beureueh di Madrasah Jami’atuddiniyah Blang Paseh di Sigli, sedangkan dalam masa pendudukan Jepang dia belajar di Perguruan Normal Islam; tempat ia menjadi “anak emas” Said Abubakar. Sesudah proklamasi kemerdekaan ia berangkat ke Yogyakarta untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dia kembali ke Aceh sebentar untuk bekerja pada Pemerintah Darurat Sjafruddin Prawiranegara. Kembali ke Yogyakarta, dia menjadi salah seorang dari dua mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pada tahun 1950 menerima beasiswa untuk melanjutkan pelajarannya di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat Hasan Mohammad Tiro selain belajar ia juga bekerja pada Dinas Penerangan Delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebentar dan memiliki bisnis yang tersebar di berbagai bidang: perkapalan, pengeboran minyak dan menjadi konsultan pada beberapa perusahaan multinasional.⁷³⁸

Dalam paruh kedua tahun 1954 dia membuat surat protes, kombinasi antara diplomasi, kemarahan dan spirit kemanusiaan yang sangat halus yang menimbulkan hal-hal yang mengabaikan Pemerintah Republik. Ia kemudian dipecat dari kantor

⁷³⁷ J. Burham, “Dispatch from a forgotten front”, *National Review* 25 Maret 1961.

⁷³⁸ *Ibid.*, hlm. 154.

perwakilan diplomatik RI dan memulai suatu kerja serius untuk rakyat Aceh. Ia menyebut dirinya “Menteri Berkuasa Penuh” dan “Dutabesar pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat” Republik Islam Indonesia. Dengan mewakili Negara Islam ini, ia mengirim ultimatum kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada awal September tahun itu. Dalam ultimatum ini ia menuduh pemerintah “fasis-komunis” membawa bangsa Indonesia hampir ke dalam kehancuran ekonomi dan politik, kemiskinan, percekocokan, dan perang saudara, serta melakukan agresi terhadap rakyat Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Tengah dan Kalimantan, dan selanjutnya menjalankan politik *divide et impera* dan kolonialisme, dan mengadu domba berbagai suku bangsa dan agama satu sama lain.

Ia bertanya kepada Ali Sastroamidjojo apakah barangkali telah tiba abad baru kolonialisme yang di dalamnya hanyalah kaum komunis yang memungut hasil buah kemerdekaan, sedangkan yang lain dibunuh habis begitu saja. Lalu ia menuntut agar Ali Sastroamidjojo menghentikan politik agresifnya, membebaskan tahanan-tahanan politik, dan mulai berunding dengan pejuang mujahidin *Darul Islam*. Bila tidak, maka ia pribadi akan mengambil sejumlah langkah. Sebuah langkah berani dan penuh perhitungan intelejensia. Dari surat yang hanya secarik ini, ia adalah satu-satunya “wakil suara Aceh” di luar negeri. Hasan Tiro akan membuka kedutaan-kedutaan Republik Islam Aceh di seluruh dunia—di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan semua negara Islam, demikian pula di Perserikatan Bangsa-Bangsa—dan menelanjangi kebuasan Pemerintah Republik dan kekejaman serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di Aceh di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan Komisi Penyelidikan ke Aceh. Sesuatu yang tak pernah terbayangkan akan dilakukan oleh pejuang *Darul Islam* manapun di Indonesia, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, atau di Kalimantan Selatan ketika itu. Biarlah forum internasional mengetahuinya, katanya, tentang tindakan-tindakan kekejaman yang paling keji yang dilakukan di dunia sejak zaman Jenghis Khan dan Hulagu.⁷³⁹

Langkah-langkah lain yang dipertimbangkan Hasan Muhammad Tiro mengadukan Pemerintah Republik Indonesia di depan PBB atas tuduhan melakukan pembunuhan massal untuk memberitahu Dunia Islam akan kekejaman yang dilakukan terhadap para alim ulama di Aceh, Jawa Barat dan Tengah, Kalimantan dan Sulawesi dan memperjuangkan pengakuan internasional akan dukungan moril dan materiil untuk Republik Islam Indonesia. Di samping itu ia mengumumkan, bila Pemerintah Republik tidak memenuhi tuntutan-tuntutannya, ia akan mengusahakan pemboikotan diplomatik dan ekonomi secara internasional terhadap Republik Indonesia juga penghentian bantuan yang diberikan lewat Rencana Kolombo atau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat.⁷⁴⁰ Sebuah ultimatum jihad yang sangat berani yang tak terpikirkan oleh banyak pejuang dan mujahidin *Darul Islam* yang hidup dan berjuang di tengah-tengah keguyuban alam pedesaan dan lebatnya hutan belantara.

Pemerintah Indonesia menolak tuntutan-tuntutan Hasan Muhammad Tiro dan memberinya waktu sampai 22 September untuk kembali ke Indonesia. Bila perintah ini diabaikannya, maka paspornya ditarik. Ia sama sekali tak bergeming dengan ancaman ini, malah ia mengambil jalan dengan konsekuensi yang berani: Hasan Muhammad Tiro lalu dimasukkan dalam tahanan oleh Imigrasi Amerika dan disekap di Ellis Island. Dia dibebaskan lagi sesudah membayar denda US\$ 500,—Ia membalas dengan mengumumkan sepucuk surat dalam *New York Times* yang meminta perhatian akan kemajuan komunisme di Indonesia sejak Pemerintah Ali

⁷³⁹ Hulagu adalah cucu Jenghis Khan, yang memerintah Iran dengan tangan besi dari tahun 1251 hingga 1265.

⁷⁴⁰ Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, t.t., Jilid III), hlm. 445-447.

Sastroamidjojo berkuasa dan menyampaikan sebuah laporan tentang “Pelanggaranpelanggaran Hak Asasi Manusia oleh rezim Sastroamidjojo di Indonesia”. Reaksi Hasan di Tiro ini sesungguhnya adalah sebuah ekspresi kemarahan intelektual, dengan sangat etis ia mengirimkan surat “kepada Jang Terhormat” Pemerintahan yang komunis di Indonesia. Seandainya Indonesia tidak ada partai komunis waktu itu, maka ia akan bersikap dengan nada yang lebih rendah.

Pemerintah Indonesia tidak mampu membungkam Muhammad Hasan Tiro, atau memintanya diekstradisikan dari Amerika Serikat. Hasan Muhammad Tiro dengan demikian dapat melanjutkan kampanye propaganda anti-Indonesia-nya di New York. Pada awal 1955 ia mengirim surat kepada dua belas negara Islam dengan meminta kepada mereka memboikot Konperensi Asia-Afrika, kebanggaan Pemerintah Republik, yang akan diadakan di Bandung pada bulan April. Sebagai alasan mendasari permintaannya, ia mengemukakan, pemimpin-pemimpin Islam dan para pengikutnya—kecuali mereka yang membungkuk terhadap kaum komunis—disiksa dan dibunuh Tentara dan Polisi Pemerintah Ali Sastroamidjojo yang “didominasi komunis”.⁷⁴¹ Komunisme adalah sumber segala masalah bagi Indonesia yang religius dan bagi rakyat Aceh semakin memperlihatkan betapa komunis tidak memiliki hati dalam menyelesaikan kasus pemberontakan di Aceh.

Dari pihak Darul Islam Aceh sendiri, juga mengirimkan surat-surat kepada Pemerintah atau Parlemen. Surat-surat dari pusat pemberontakan di Pidie yang dikonsep oleh Hasballah Daud ini sempat menimbulkan reaksi yang keras dari partai-partai sekuler di Jakarta. Semua protes kemudian mengarah pada Pemerintah dan Parlemen di Jakarta, tetapi Pemerintah tidak memberi reaksi. Kemudian surat-menyurat antara Pemerintah dengan Darul Islam Aceh untuk sementara dihentikan, dan baru dimulai lagi sesudah Kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh, dan digantikan pemerintah baru yang dikepalai Burhanuddin Harahap dari Masjumi pada Agustus 1955.⁷⁴² Jelas sekali, bahwa haluan politik suatu negara atau pemerintahan akan sangat menentukan bagaimana proses penyelesaian kasus pemberontakan atau protes daerah. Jika komunis yang berkuasa di Indonesia, maka selamanya kasus dari Islam Aceh akan tak pernah selesai. Dari sini pula dapat diambil satu kesimpulan sementara bahwa rakyat Aceh sesungguhnya tidak melawan terhadap pemerintahan Republik, melainkan melawan kuasa rezim komunis fasis yang otoriter. ***



⁷⁴¹ *Ibid.*, hlm. 443-488.

⁷⁴² S.M. Amin, *Sekitar peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 205.

BAB 8

KONFERENSI BATEE KUREENG

DAN

KONSEPSI PRINSIPIL BIJAKSANA

PERKEMBANGAN gerakan Darul Islam sudah mencapai tahap yang menggembirakan ketika banyak rakyat yang mendukung dan hingga tahun 1955 banyak kemajuan dan kemenangan perang yang diraih, meskipun beberapa serangan TNI belum sempat dibalas. Untuk memperingati 2 tahun proklamasi NBA-NII, ketika para mujahidin Darul Islam yang pada waktu itu bergerilya di Baital Julud, memutuskan untuk ‘merayakan’ peringatan hari proklamasi ini dengan syukur berbentuk konperensi dinas. Para utusan DI Aceh Utara mengusul tempat, yaitu di

Batee Kureeng, dekat Peudada, Aceh Utara, yang aman untuk berkongres. Gerakan DI ini dimulai dengan Kongres Ulama Se-Indonesia, di tengah-tengah perjalanannya juga terdapat kongres. Gerakan 'pemberontakan' ini, dari cara para pelakunya menjalaninya dengan berbagai kongres, adalah sebuah gerakan intelektual.

Konferensi Dinas NBA-NII di Batee Kureeng

Pada tanggal 23 September 1955, Konperensi Batee Kureeng berlangsung, di suatu desa yang aman, yang sudah dikategorikan sebagai *darul amman*. Usul-usul Pemerintah Republik dibahas para pemimpin *Darul Islam* di Batee Kureng. Sebenarnya inilah yang menjadi penyebab langsung kehendak Daud Beureuh untuk berunding dengan penasihat-penasihatnya yang akrab. Hasil kongkret pembicaraan ini, seperti dirumuskan dalam salah satu butir program kabinet baru adalah ketetapan bahwa harus diusahakan menyelesaikan konflik dengan "pemerintah Pancasila" tidak hanya dengan kekuatan senjata melainkan juga dengan cara politik.⁷⁴³ Setiap gerakan intelektual, senantiasa bersikap peduli dengan upaya damai (politik) melalui berbagai saluran yang mungkin dan tidak bertentangan dengan idealisme.

Karena itu Hasan Aly mengirim surat pada bulan November kepada Amin yang isinya mendesak agar Pemerintah Republik secara terbuka menyatakan pendiriannya dan bahwa semua perundingan selanjutnya akan dilakukan delegasi resmi dari kedua pihak, dan tidak lagi informal. Hanyalah bila ada alasan-alasan yang mendesak yang mencegah Pemerintah Republik berbuat demikian. Hasan Aly bersedia melanjutkan pembicaraan informal. Tetapi dalam hal itu Pemerintah Republik hendaknya memberitahunya secepat mungkin bahwa terdapat alasan-alasan yang mendesak demikian.⁷⁴⁴

Akibat dari kontak pribadi atau korespondensi politik antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan Mr. S.M. Amin, Gubernur Sumatra Utara yang berlaku sejak bulan Desember 1955, sampai kepada akhir riwayat dengan kebuntuannya, kemudian ditambah lagi dengan datangnya Hasballah Daud/Abdullah Arif, baik sebagai utusan Hatta ataupun Pemerintah Pusat, yang oleh rakyat umum dianggap sebagai delegasi Pemerintah, meyebabkan suasana politik di Aceh menjadi hangat. Bukan saja menjadi perhatian dan tanda tanya rakyat legal malahan rakyat yang dikatakan dari Negara Islam sendiri, yaitu pejuang Islam yang puluhan ribu banyaknya itu pun memperbincangkan persoalan itu sehingga akhirnya oleh hangatnya pembicaraan umum, lalu Pemimpin Tinggi kalangan Mujahidin Islam itu mengadakan Konferensi Dinas di Batee Kureng pada tanggal 21 September 1955, di samping merayakan hari ulang tahunnya kedua dari Proklamasi NII yang telah dicetuskan pada tanggal 21 September 1954 itu.

Menurut laporan pihak DI sendiri,⁷⁴⁵ maksud semula selain konferensi atau membicarakan sekitar maju mundurnya pemerintahan dan perjuangan militer juga akan mengetahkan persoalan perundingan dengan RI yang disalurkan oleh Amin dan Pemerintah di waktu itu. Usul-usul Pemerintah Republik dibahas para pemimpin *Darul Islam* di Batee Kureng. Sebenarnya inilah yang menjadi penyebab langsung kehendak Daud Beureuh untuk berunding dengan penasihat-penasihatnya yang akrab. Hasil kongkret Kongres Batee Kureng ini adalah pembentukan Majlis Syura, Reorganisasi Pemerintahan Sipil dan Reorganisasi Militer (TII).

Konperensi Batee Kureng merupakan salah satu tanda yang paling tidak mungkin diragukan lagi akan adanya perselisihan pendapat di kalangan para pejuang mujahidin

⁷⁴³ Amelz, *Riwajat Singkat Atjeh Bangoen dari Tidoernja jang Njenjak Beberapa Poeloeh Tahoen Jang Laloe*, (Pidie, naskah ketikan, t.t.), hlm. 31.

⁷⁴⁴ S.M. Amin, *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 301.

⁷⁴⁵ Amelz, *op.cit.*, hlm. 31.

Darul Islam di Aceh. Ini membuktikan ketidakpuasan akan cara semua keputusan dibuat Daud Beureueh dengan sekelompok kecil penasihat, dan tunduknya urusan sipil kepada militer. Masyarakat pun mengetahui adanya perpecahan di antara mereka, meskipun semuanya kelihatan sangat solid.⁷⁴⁶

Walaupun pasti terdapat persaingan dan pertentangan di kalangan pemimpin-pemimpin Negara Islam di Aceh, berbeda dengan daerah-daerah lain, tampaknya di sini ini tidak sampai mengakibatkan sering terjadi bentrokan antara komandan pasukan.⁷⁴⁷ Dengan penggeseran beberapa pemimpin angkatan pertama dari pusat kekuasaan pada tahun-tahun pertama, konperensi Batee Kureng mengadakan perubahan tertentu. Kendatipun laporan-laporan tentang konflik dan perjuangan untuk kekuasaan antara pucuk pimpinan—nama Daud Beureueh, Hasan Saleh, dan Husin Jusuf paling sering muncul—pada umumnya terdapat persatuan dan kekompakan yang kuat di daerah itu.⁷⁴⁸ Pemusatan kekuasaan dan lenyapnya pemimpin-pemimpin tertentu terjadi pada 1954, ketika Dewan Syura, Majelis Syura, dan Dewan Militer dibubarkan. Ketika itu Husin Jusuf kehilangan jabatannya sebagai Kepala Staf Divisi Tengku Chik Ditiro beralih kepada Amir Husin al Mujahid. Walau pun ia diangkat sebagai koordinator keamanan untuk Aceh, kenaikan ini berarti kehilangan kekuasaan atas sebagian besar pasukan tempur. Hal yang sama terjadi kemudian pada penggantinya, Amir Husin al Mudjahid, yang digantikan oleh Hasan Aly.

Akhirnya, karena Pemimpin-pemimpin rakyat seluruh Aceh turut hadir sejak dari Pasir Putih sampai ke Besi Merah (Langkat Tamiang), mereka lalu mendesak supaya di samping Konferensi pemerintahan diadakan Kongres Rakyat, sebab Pemimpin-pemimpin rakyat yang bertanggung jawab seluruhnya telah turut diundang dan turut hadir ketika itu.

Resolusi yang membawa kejernihan politik pemerintahan sementara Negara Islam itu diterima baik oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, sehingga ketika itu diumumkan satu Kongres Rakyat yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin rakyat yang berpengaruh dalam Aceh waktu itu, yaitu pemimpin-pemimpin lama yang telah turut dalam perjuangan dan yang masih pro.

Akhirnya pada tanggal 23 September 1955 berlangsunglah Kongres Rakyat dengan meriahnya, yang kemudian dinamakan Kongres Batee Kureng. Adanya Kongres Batee Kureng ini menyebabkan status Daerah dan Pemerintahan berubah sama sekali. Dan gerakan DI menjadi gerakan yang hampir “baru” sama sekali. Konperensi Batee Kureng seakan sudah mentransformasikannya menjadi gerakan politik damai.⁷⁴⁹ Perubahan-perubahan lain di antaranya ialah:

1. Daerah Aceh yang tadinya menjadi bahagian dari Negara Islam Indonesia menjadi Negara Bagian Aceh, Negara Islam Indonesia. Aceh menjadi KW (Komandemen Wilayah V) dalam struktur nasional NII.
2. Sistem Pemerintahan Komandemen yang dualis itu berubah pula sebagai pemerintahan biasa, di mana sipil dijalankan oleh sipil dan kekuasaan militer

⁷⁴⁶ *Pikiran Rakyat*, 14 Februari 1956.

⁷⁴⁷ Namun, terdapat beberapa laporan tentang tindakan disiplin yang diambil terhadap komandan-komandan *Darul Islam* setempat. Di Aceh Utara umpamanya, salah seorang pembantu Hasan Saleh, Usman Balo, lari ke Pidie ketika mengetahui, ia akan dihukum karena kekejamannya. Bagian Dokumentasi Deppen, *Sekitar Peristiwa Berdarah Daud Beureueh*, vol. III, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, 1953), hlm.18.

⁷⁴⁸ *Pikiran Rakyat*, 15 Februari 1956.

⁷⁴⁹ Surat kemungkinan perdamaian yang dikirm oleh Hasan Aly November kepada S.M. Amin (Gubernur Sumatera Utara) yang isinya mendesak agar Pemerintah Republik secara terbuka menyatakan pendiriannya secara resmi memakai surat, bukan komunikasi oral dan bujukan verbal. Gerakan DI terlihat sangat disiplin dalam manajemen administrasinya, bagaikan mengurus sebuah negara sungguhan dan tak pernah berfikir untuk main-main dalam urusan ini. Wawancara dengan Komandan Ishak Ibrahim, Banda Aceh, 28 Juli 2006.

dipegang langsung oleh militer sendiri.

3. Kepala Negeranya diangkat dan terus dilantik, Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Wali Negara, Negara Bagian Aceh NII.
4. Teungku Husin Al Mujahid sebagai Ketua Parlemen (Ketua Majelis Syura). Majelis Syura ini beranggotakan para alim ulama yang berani memberontak terhadap Republik, sekitar 65 orang.
5. Juga pada hari itu dibentuk Kabinet Pertama dari Negara Bagian Aceh yang terdiri dari:
 - a. Perdana Menteri: Hasan Aly.
 - b. Menteri Dalam Negeri : Hasan Aly.
 - c. Menteri Keuangan: T.A. Hasan.
 - d. Menteri Kesehatan: T.A. Hasan.
 - e. Menteri Pertahanan/Keamanan: Kolonel Husin Yusuf.
 - f. Menteri Kehakiman: Teungku Zainul Abidin.
 - g. Menteri Penerangan: A. G. Mutiara.
 - h. Menteri Ekonomi/kemakmuran: T. Muhammad Amin.
 - i. Menteri Pendidikan: Teungku Muhammad Ali Kasim.
 - j. Menteri Sosial: Teungku Harun B.E.
 - k. Menteri Perhubungan: Teungku Muhammad Yusuf Hasyim.
6. Menyusun Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari 6 kabupaten:
 1. Kabupaten Pidie.
 2. Kabupaten Aceh Utara.
 3. Kabupaten Aceh Timur.
 4. Kabupaten Aceh Barat.
 5. Kabupaten Aceh Tengah.
 6. Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya disusunlah struktur ketentaraan yang terdiri dari 7 resimen:

1. Resimen I Gajah Putih selaku komandannya: Ibrahim Saleh.
2. Resimen II Samudra selaku komandannya: Haji Ibrahim.
3. Resimen III Shalahuddin selaku komandannya: Gazali Idris.
4. Resimen IV Kawai selaku komandannya: Teungku Hasan Hanafiah.
5. Resimen V Laut Tawar selaku komandannya: Teungku Ilyas Leube.
6. Resimen VI Kuta Karang selaku komandannya: A. Wahab Ibrahim.
7. Resimen VII Tarmihim selaku komandannya: Haji Hasanuddin Siregar.

Setelah terbentuknya Kabinet ini, maka disusun program kerja kabinet sesuai dengan keputusan Majelis Syura Negara Bagian Aceh NII pada rapat yang

diselenggarakan tanggal 10 Safar 1375 / 27 September 1955. Kemudian mereka melakukan rapat-rapat dalam Madjlis Ifta untuk membahas berbagai perkembangan dan hubungan dengan dunia luar. Majlis Ifta pun, seperti dirumuskan dalam salah satu kesepakatan Kongres Dinas Batee Kureng adalah untuk menyokong ketetapan penyelesaian konflik dengan "pemerintah Pancasila" tidak hanya dengan kekuatan senjata melainkan juga dengan cara politik. Hasan Aly bersedia melanjutkan pembicaraan informal, namun Majlis Ifta menginginkan pembicaraan bersifat formal dan berlangsung secara *face-to-face*, bukan *incognito* seperti yang sudah-sudah. Tetapi dalam hal itu Pemerintah Republik hendaknya memberitahukannya secepat mungkin bahwa terdapat alasan-alasan yang mendesak demikian.⁷⁵⁰

Pada tanggal 15 Februari 1958 didengar khabar adanya Proklamasi PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang mengambil kesempatan pada saat Hatta di luar negeri, dan Hamengkoe Boewono ke Amerika.⁷⁵¹ Pemerintah NII Aceh berpendapat bahwa jika PRRI tak dapat diperlihatkan suatu tanda bahwa kalau tak dapat ditimbulkan suatu moment baru, akan menempuh suatu bahaya yang besar. Pemerintah NII hanya berpikir pada sisi finansial saja bahwa gerakan yang dibantu Amerika Serikat ini hanya akan bertahan sebentar saja, karena bukan berlandaskan agama, melainkan kepentingan materil belaka. Bagi Pemerintahan NII, strategi dan tentera harus kuat, sebagai keputusan pemerintah NII Aceh mengirim suatu delegasi keluar negeri dan misi yang lain untuk ke dalam.

Keputusan kabinet bulan Agustus di Pantja, menguraikan perjalanan PM ke Luar Negeri bertemu dengan duta-duta PRRI di Geneva dan Jerman Barat, berembuk tentang pembentukan federasi. Namun, bagi NII Aceh, ide PRRI tidaklah menarik, karena tidak dilandasi agama. Meskipun uang berlimpah sebagai sarana operasional pemberontakan, namun bagi Teungku Daud Beureueh itu merupakan "terjun bebas menuju neraka".⁷⁵² Namun, bagi kalangan Dewan Repolusi NBA-NII melihat peluang ini dengan sangat cerdas dan banyak di antara mereka yang terpengaruh oleh ide-ide Syafruddin Prawiranegara dan Simbolon untuk 'memisahkan diri'. Perjuangan, bagi kalangan DI yang masih bersama dengan Teungku Muhammada Daud Beureueh, bukanlah semata-mata "talak 3" (pemisahan diri total), melainkan cara-cara dan prosesnya mestilah sangat *syar'ie*.⁷⁵³

Secara umum, banyak kalangan melihat bahwa sejak berdirinya, PRRI telah mengadakan kerjasama yang erat dengan NBA/NII terutama dalam bidang militer. Pasukan NBA/NII telah mengadakan operasi bersama dengan pasukan PRRI yang tergabung dalam apa yang dinamakan Operasi Sabang Merauke di daerah-daerah perbatasan Aceh-Sumatra Timur. Padahal sesungguhnya pihak NII Aceh yang berada di bawah komando Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak menyukai perangai dan moralitas tentera "flamboyan" PRRI.

Pada akhir tahun 1959, sesuai dengan kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan di Genewa pada bulan Desember tahun 1958 antara pemimpin-pemimpin PRRI/Permesta, dan dalam pertemuan itu turut hadir juga Hasan Ali, Perdana Menteri NBA/NII dan Hasan Muhammad Tiro maka diputuskanlah untuk mendirikan suatu negara yang berbentuk federal yang dinamakan Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) atau sering juga disebut dengan hanya Republik Persatuan Indonesia saja (RPI) guna mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari daerah-daerah dan untuk lebih mengefektifkan perjuangan menghancurkan regime Soekarno yang diktatorial.⁷⁵⁴

RPI terdiri dari sepuluh negara, semuanya kecuali dua negara yang berada di

⁷⁵⁰ S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 301.

⁷⁵¹ Amelz, *Riwajat Singkat Atjeh....*, hlm. 56.

⁷⁵² *Ibid.*, hlm. 57.

⁷⁵³ *Syar'ie* (Bhs. Arab), artinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syariah).

⁷⁵⁴ C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993), hlm. 266.

Sumatera dan Sulawesi. Aceh, sebagai Republik Islam Aceh (RIA), adalah salah satu dari enam negara Sumatera, dan Sulawesi Selatan satu dari dua negara di pulau itu.⁷⁵⁵ Selain dari delapan negara ini, barangkali sebagai tindakan mengambil hati terhadap RMS, terdapat Negara Maluku dan Negara Maluku Selatan. Secara menyolok tidak terdapat negara-negara di Jawa, seperti Negara Jawa Barat, bumi kelahiran gerakan *Darul Islam*, dan di Kalimantan Selatan, tempat Ibnu Hadjar beroperasi.⁷⁵⁶

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia antara lain disebutkan bahwa Negara RPI adalah suatu bentuk federasi yang menjiwai ketatanegaraan Islam yang mempunyai landasan pijakan berdasarkan Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk atau golongan untuk memeluk agamanya atau kepercayaannya masing-masing dan untuk beribadah serta hidup bermasyarakat sesuai dengan syariat agamanya atau kepercayaannya.⁷⁵⁷

Adapun mengenai kebebasan berpendapat, diberikan haknya secara penuh. Namun bila mengeluarkan pendapat itu mengandung unsur cacian kepada salah satu agama, atau ajakan untuk mendirikan diktator atau untuk menganut dan melaksanakan paham-paham komunis atau jelasnya paham yang membayakan negara, maka hal itu dilarang.⁷⁵⁸

Harapan besar dari terbentuknya negara federasi RPI ini upaya memperlihatkan hanya ada satu organisasi negara saja di Indonesia yang menentang dan memberi perlawanan bersenjata terhadap organisasi pemerintahan Soekarno. Di sisi lain supaya menarik perhatian dunia Internasional terhadap kesanggupan rakyat Indonesia dalam memegang kekuasaan politik di Indonesia terutama dalam menumpas regime Soekarno, serta sebagai landasan untuk memperoleh sokongan bantuan moril dan materil dari pihak luar negeri, baik di forum PBB maupun dari pihak negara-negara Blok anti Komunis yang ketika itu dalam pemerintahan Soekarno sudah mulai condong ke arah Komunisme.

Konperensi Batee Kureng merupakan salah satu tanda yang paling tidak mungkin diragukan lagi akan adanya perselisihan pendapat di kalangan pemberontak-pemberontak *Darul Islam* di Aceh. Ini membuktikan ketidakpuasan akan cara semua keputusan dibuat Daud Beureueh dengan sekelompok kecil penasihat, dan tunduknya urusan sipil kepada militer.

Walaupun pasti terdapat persaingan dan pertentangan di kalangan pemimpin-pemimpin Negara Islam di Aceh, berbeda dengan daerahdaerah lain, tampaknya di sini ini tidak sampai mengakibatkan sering terjadi bentrokan antara komandan pasukan.⁷⁵⁹ Dengan penggeseran beberapa pemimpin angkatan pertama dari pusat kekuasaan pada tahun-tahun pertama, konperensi Batee Kureng mengadakan perubahan tertentu. Pemusatan kekuasaan dan lenyapnya pemimpin-pemimpin tertentu terjadi pada 1954, ketika Dewan Syura, Majelis Syura, dan Dewan Militer dibubarkan. Ketika itu Husin

⁷⁵⁵ *Ibid.*

⁷⁵⁶ *Ibid.*

⁷⁵⁷ *Ibid.*

⁷⁵⁸ *Ibid.*

⁷⁵⁹ Namun, terdapat beberapa laporan tentang tindakan disiplin yang diambil terhadap komandan-komandan *Darul Islam* setempat. Di Aceh Utara umpamanya, salah seorang pembantu Hasan Saleh, Usman Balo, lari ke Pidie ketika mengetahui, ia akan dihukum karena kekejamannya (Sekitar t.t.III:18). Kendatipun laporan-laporan tentang konflik dan perjuangan untuk kekuasaan antara pucuk pimpinan—nama Daud Beureueh, Hasan Saleh, dan Husin Jusuf paling sering muncul—pada umumnya terdapat persatuan dan kekompakan yang kuat di daerah itu.

Jusuf kehilangan jabatannya sebagai Kepala Staf Divisi Tengku Chik Ditiro beralih kepada Amir Husin al Mujahid. Walau pun ia diangkat sebagai koordinator keamanan untuk Aceh, kenaikan ini berarti kehilangan kekuasaan atas sebagian besar pasukan tempur. Hal yang sama terjadi kemudian pada penggantinya, Amir Husin al Mudjahid, yang digantikan oleh Hasan Aly.

Di samping itu terdapat perlawanan terhadap reaksi Daud Beureueh mengenai tawaran dari pihak Republik Indonesia. Sementara orang tidak menyetujui penolakannya yang terang-terangan akan kemungkinan tawaran amnesti, dan khususnya dalam Tentara Islam yang sebenarnya, ada sekelompok besar yang kuat menyetujui menerima tawaran yang demikian.⁷⁶⁰

Mengingat hal yang di atas dan banyaknya jumlah prajurit yang sudah kembali ke desa mereka, salah seorang komandan daerah, Iljas Leubee dari Aceh Tengah, mengeluarkan komunike pada November 1955 yang mengumumkan, tidak akan diambil tindakan terhadap para prajurit resimennya yang pulang ke rumah, asal saja ini tidak merugikan perjuangan. Dia sendiri pun diminta melapor kepada para penguasa, katanya, tetapi ia jngin menantikan hasil pemilihan umum. Dia memikirkan akan melapor demikian karena kabinet yang memerintah sekarang, Kabinet Burhanuddin Harahap, ideologinya berdekatan dengan cita-cita perjuangan di Aceh.⁷⁶¹

Pada umumnya sikap kaum pemberontak *Darul Islam* di Aceh terhadap pemilihan umum lunak. Mula-mula, ketika pemberontakan meletus, sikap mereka terhadap ini mendua. Di satu pihak mereka menuduh Pemerintah Republik berusaha membiarkan mereka menunggu tanpa batas waktu, sedangkan di pihak lain pemilihan umum mereka cap sebagai alat Pemerintah Pusat untuk melakukan kehendaknya. Kini ketika pemilihan umum telah di ambang pintu, mereka tidak melakukan apa pun untuk merintanginya.⁷⁶²

Hasil pemilihan umum yang memuaskan di Aceh, yaitu Masyumi memperoleh dua pertiga jumlah suara, memberi mereka yang menyetujui diakhirinya pemberontakan alasan lain untuk menyokong sikap mereka. Kasus mereka lebih diperkukuh ketika, kali ini di bawah Kabinet Ali Satroamidjojo lagi; pada akhir 1956 suatu rancangan undang-undang disahkan, yang memberikan status provinsi otonom kepada Aceh. Undang-undang ini berlaku sejak Januari 1957. A. Hasjmy pemimpin Pemuda PUSA Aceh Besar sebelum Perang dan bekas Ketua BPI/Pesindo, menjadi gubernur pertama provinsi ini.

Konsepsi Prinsipil-Bidjaksana

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Peristiwa Pulot Cot Jeumpa telah mempengaruhi Pemerintah dalam menggunakan personil militer, maka kesempatan ini digunakan oleh Komanda KDMA, Sjamaun Gaharu untuk mengusulkan "jalan politik" bagi penyelesaian masalah militer (pemberontakan bersenjata) Darul Islam ini. Mayor Syamaun Gaharu yang sebelumnya bertugas di Banjarmasin, sejak 9 April 1956 dipindahkan ke Aceh untuk menjabat Komandan Resimen I, kemudian dipanggil oleh AH Nasution di Jakarta untuk membicarakan kasus Peristiwa Daud Beureueh. Demikian pula beberapa perwira lain seperti Kapten Nyak Adam Kamil yang telah lebih dulu diangkat sebagai Komandan Sektor FF di Lhokseumawe dan Lettu Usman Nyak Gade di Kutaraja.

Dengan seizin WKPM II K. H. Idham Khalid yang bertanggung jawab masalah keamanan, Syamaun Gaharu mulai mengadakan kontak dengan para pimpinan

⁷⁶⁰ Abdul Murat Mat Jan, "Pemberontakan darul Islam di Aceh, 1953-1959", dalam *Akademia*, (1976), hlm. 39-40.

⁷⁶¹ Pengumuman Pemerintah 20 November 1955.

⁷⁶² Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (New York: Cornell University Press, 1963), hlm. 42.

pemberontak. Bersama dengan Lettu Abdullah Masri, Perwira Distrik Militer Pidie, Syamaun Gaharu berhasil mendekati Tgk. Syekh Daud Tangse, yang mempunyai pengaruh besar di Tangse karena tiga orang pimpinan pemberontak di Tangse yaitu Banta Khairullah, Sulaiman Adami dan Hamada adalah putra dan menantunya sendiri. Hasil dari pendekatan tersebut 43 orang anggota pemberontak di Tangse kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan Tgk. Syekh Daud Tangse sendiri nantinya dieksekusi oleh pemberontak.

Selanjutnya bersama dengan Lettu Usman Nyak Gade, Syamaun Gaharu mengadakan kontak dengan dua pemimpin pemberontak di Aceh Besar yaitu Isak Amin dan Pawang Leman (Ayah Keude). Melalui merekalah Syamaun Gaharu dapat berkorespondensi dengan teman sekompinya dulu, Pimpinan TII Hasan Saleh pada akhir Desember 1956. Hasan Saleh yang mula-mula mengirim surat kepada Syamaun Gaharu. Surat itu sangat bersifat pribadi antara dua kawan lama yang saling berhadapan di medan perang. Langkah Syamaun Gaharu diikuti juga oleh Komisaris M. Isa, yang telah menjadi Kepala Polisi Sumatera Utara di Medan. Dengan memanfaatkan jasa T. M. Ali, kepala kepolisian wilayah Bireun dia berusaha melakukan kontak dengan Husin Yusuf yang waktu itu Menteri pertahanan NBA-NII. Dalam balasannya tanggal 14 Oktober 1956, sesuai dengan pasal 4 program Kabinet Hasan Ali, secara tegas dia mengatakan bahwa perundingan dapat diterima sepenuhnya dan waktu diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Proses penyelesaian politik yang ditempuh Syamaun Gaharu memperoleh pijakan yang kuat oleh dua peristiwa penting yang terjadi berturut-turut yaitu pengesahan UU No. 24 Tentang Pembentukan Propinsi Aceh tanggal 29 Nopember 1956 yang berlaku efektif 1 Januari 1957, dan pembangkangan yang dilakukan oleh Kolonel M. Simbolon terhadap Kabinet Ali II tanggal 22 Desember 1956. Kejadian tersebut dimanfaatkan oleh Syamaun Gaharu untuk melepaskan Resimen I dari Teritorium I dan tunduk langsung di bawah KSAD dengan nama baru Komando Daerah Militer Aceh (KDMA), sehingga kekuasaannya semakin besar. Tindakan tersebut mendapat dukungan dari KSAD Mayjen A. H. Nasution dan sebaliknya Kol. M. Simbolon diberhentikan dan digantikan oleh Jamin Ginting.⁷⁶³

Pembentukan KDMA tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi pemulihan keamanan di Aceh. Sebagai komandan KDMA yang juga Penguasa Perang Daerah Peperda), Letkol Syamaun Gaharu⁷⁶⁴ semakin leluasa menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan keamanan di Aceh. Berdasarkan konsultasi dengan Pemerintah Pusat yaitu WKPM Idham Khalid dan KSAD A. H. Nasution maupun dengan masyarakat di Aceh, Syamaun Gaharu merumuskan formula penyelesaian pemberontakan di Aceh yang dinamakan Konsepsi Prinsipil dan Bijaksana pada pertengahan Januari 1957.

Konsepsi Prinsipil dan Bijaksana merupakan suatu proses penyelesaian keamanan yang diawali oleh proklamasi pemberhentian permusuhan, lalu diikuti perundingan antara Pemerintah dengan pihak Tgk. M. Daud Beureueh dan dengan pihak kaum bangsawan. Dengan Tgk. Daud Beureueh Cs. Dibicarakan persoalan tuntutan hukum terhadap mereka dan rehabilitasi pada status sebelumnya, dan dengan pihak bangsawan dibicarakan persoalan ganti rugi harta mereka yang diambil oleh Majelis Penimbang dan direhabilitasi bagi mereka yang diberhentikan semena-mena dahulu. Bersamaan dengan itu Pemerintah bersama masyarakat melakukan penerangan dan pembangunan. Seterusnya diakhiri dengan upacara memproklamirkan perdamaian dan persaudaraan abadi di Aceh.⁷⁶⁵

⁷⁶³ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 355-358.

⁷⁶⁴ Setelah menjadi komandan KDMA, pangkat Syamaun Gaharu dinaikkan satu tingkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel.

Berbarengan dengan otonomi militer, birokrasi sipil juga mendapat otonomi dengan direalisasinya UU No. 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Propinsi Aceh. Untuk pertama sekali jabatan Gubernur Propinsi Aceh dipilih Ali Hasjmy, yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Sunaryo tanggal 27 Januari 1957. Setelah pelantikan itu mulailah duet Syamaun Gaharu dan Ali Hasjmy melaksanakan tugas utama mereka yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat yaitu pemulihan keamanan di Aceh. Konsepsi prinsipil bijaksana ini sendiri sebenarnya gagal. Bahkan Misi Hardi pun dapat dianggap gagal karena, kejatuhan Darul Islam sendiri bukanlah karena kedua konsep ini, melainkan karena spirit perang kaum ‘mujahidin’ yang sudah jatuh dan yang tertinggal kemudian adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh sendirian di hutan dan gunung sebelum kemudian tertangkap.⁷⁶⁶

Sehubungan dengan itu, tidak lama setelah pengangkatannya sebagai Gubernur Aceh, Ali Hasjmy mulai melakukan kontak dengan para pemimpin pemberontak terutama yang mempunyai hubungan akrab dengannya waktu sekolah, berjuang atau yang mempunyai ikatan kekerabatan. Langkahnya itu semakin mulus setelah ia menerima surat yang berisi ucapan selamat dari T. A. Hasan, A. Gani Mutiara, dan iparnya Ishak Amin. Pada tanggal 30 Januari 1957 Ali Hasjmy berangkat ke Lubuk, sekitar 12 Km dari Kutaraja, untuk menemui rekan sekolah dan sederahnya yang telah menjadi pimpinan pemberontak di Aceh Besar yaitu A. Jalil Amin, M. Ali Piyeung dan Ishak Amin. Kontak dalam bentuk surat juga dikirim Ali Hasjmy kepada Hasan Muhammad Tiro dari Singapura saat dia singgah di kota tersebut untuk bertemu beberapa tokoh Aceh di sana.⁷⁶⁷

Seiring dengan itu, kontak antara Syamaun Gaharu dengan para tokoh pemberontak semakin intensif. Buktinya, hingga tanggal 5 maret 1957 paling tidak sudah 5 pucuk surat-menyurat berlangsung antara dia dengan Ishak Amin, Pawang Leman, dan Hasan Saleh. Keinginan Syamaun Gaharu untuk bertemu Hasan Saleh secara pribadi mendapat respon yang sama dari Hasan Saleh. Dalam suratnya tanggal 4 April 1957 Hasan Saleh menatakan bahwa pertemuan mereka berdua sangat penting demi masa depan Aceh. Dia juga memuji sikap dewasa Syamaun Gaharu yang bersedia melupakan peristiwa masa lalunya. Persoalan tempat dan waktu pertemuan dia serahkan kepada Ishak Amin dan Pawang Leman untuk mengaturnya.⁷⁶⁸

Setelah mendapat persetujuan dan petunjuk dari masing-masing atasan mulailah mereka melangkah ke negosiasi formal mulai tanggal 8 April 1957 bertempat di rumah Pawang Leman di desa Lamteh, sekitar 6 Km barat laut Kutaraja. Dalam pertemuan itu Letkol Syamaun Gaharu ditemani oleh stafnya Kapten Abdullah Sani, Letnan Usman Nyak Gade, dan Kepala Kepolisian Sumatera Utara dan Aceh Komisaris Polisi M. Isya. Sementara itu pihak pemberontak dipimpin oleh PM. Hasan Ali dan didampingi oleh stafnya Hasan Saleh, Ishak Amin, Nyak Umar, dan Pawang Leman. Pertemuan tersebut berlangsung sangat alot dan hampir mengalami jalan buntu. Pada saat pertemuan hampir mengalami *dead lock* tersebut menurut Hasan Saleh mereka disadarkan oleh ucapan yang cukup keras dan penuh haru dari Pawang Leman yang isinya “Kalau Bapak-bapak tidak sanggup menyelesaikan masalah ini, mari kita bakar saja Aceh ini supaya kita puas dan agar cucu kita di belakang hari akan menuduh kita sebagai pengkhianat dan orang yang tidak bertanggung jawab!”⁷⁶⁹

Pertemuan yang berlangsung alot akhirnya mencapai kata sepakat bahwa untuk dapat menjunjung tinggi kehormatan agama dan kepentingan rakyat dan daerah Aceh,

⁷⁶⁵ Naskah asli Konsepsi Prinsipil dan Bijaksana yang diberi judul “Penyelesaian Peristiwa Pemberontakan di Aceh” ditandatangani oleh Letnan Kolonel Syamaun Gaharu. Lihat *Ibid.*, hlm. 373-374.

⁷⁶⁶ Penting untuk dipahami di sini adalah, bahwa Teungku Daud Beureueh bukanlah “turun gunung” atau menyerah, melainkan karena sudah tertawan dan tertangkap, baru kemudian dia dijemput oleh Nyak Adam Kamil.

⁷⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 378.

⁷⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 179. Lihat juga Hasan Saleh, *op.cit.* hlm. 308-309.

⁷⁶⁹ Hasan Saleh, *op. cit.* hlm. 310.

sebagaimana yang diinginkan kedua pihak, maka perlu dilaksanakan gencatan senjata sebagai landasan bagi perundingan lebih lanjut. Kesepakatan tersebut diberi nama Ikrar Lamteh⁷⁷⁰, yang ditandatangani oleh Letkol Syamaun Gaharu, Komisaris M. Isya (dan kemudian Gubernur Ali Hasjmy dan Mayor T. Hamzah) dari pihak Pemerintah, dan Hasan Ali, Hasan Saleh, dan Ishak Amin dari pihak pemberontak.⁷⁷¹ Atas dasar Ikrar Lamteh ini tercapai pula suatu persetujuan antara pihak pemberontak dengan KDMA untuk menghentikan tembak-menembak atau gencatan senjata yang waktu itu menurut M. Nur El Ibrahimy lebih dikenal dengan istilah *caese fire*. Gencatan senjata ini berlangsung sampai tahun 1959.⁷⁷²

Dengan adanya gencatan senjata tersebut maka terbukalah jalan bagi sebagian pemberontak untuk pulang ke kampung untuk menjenguk keluarga yang telah bertahun-tahun ditinggalkan dan turun ke kota untuk melihat-lihat keramaian setelah bertahun-tahun hidup dalam hutan yang penuh kesepian. Dengan demikian terbukalah kesempatan bagi Letkol Syamaun Gaharu untuk bersilaturahmi dengan para pemimpin pemberontak. Begitu juga sebaliknya para pemimpin pemberontak yang sebagian beralasan ingin menghindari Aceh dari kehancuran dan sebagian lagi memang telah letih berjuang dan telah bosan hidup di dalam hutan yang telah mencapai enam tahun lamanya, mempergunakan kesempatan itu untuk berkomunikasi dengan Syamaun Gaharu.⁷⁷³

Usaha mencari solusi penyelesaian damai masalah Aceh terus digiatkan antara kedua belah pihak. Sejalan dengan itu, duet Syamaun Gaharu dan Ali Hasjmy juga secara giat melobi Pemerintah Pusat, terutama PM. Juanda dan KSAD A. H. Nasution, agar Pemerintah mau memberikan kelonggaran atau konsesi kepada pemberontak. Namun PM. Juanda hanya bersedia memberikan otonomi yang luas, apakah hukum, pendidikan, agama, dan sebagainya asal bukan Negara Bagian sebagaimana tuntutan pemberontak, karena menurutnya hal itu bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia. Pendirian itu ditegaskan kembali oleh Juanda saat bertemu dengan dua tokoh perunding pemberontak yaitu Hasan Ali dan Hasan Saleh, saat dia berkunjung ke Aceh bersama Menteri Agama tanggal 19-25 Oktober 1957.⁷⁷⁴ Ketegasan Juanda tentang penyelesaian masalah Aceh tidak keluar dari bingkai Negara Kesatuan dapat dilihat dari ucapannya sebagaimana ditulis Hasan Saleh yaitu “Kalau Saudara-saudara benar ingin menempuh jalan damai, maka tuntutlah sesuatu yang lebih luas dan lebih tinggi dari otonomi biasa, tetapi bukan negara bagian. Tuntutlah yang lain, yang berada dalam batas perundang-undangan yang ada. Insyaallah saya bantu”.⁷⁷⁵

Pendirian Pemerintah bahwa bagi Aceh yang penting adalah substansi otonomi bukan status nama terus dijabarkan di lapangan. Pengadilan Agama yang dulu menjadi salah satu sumber keresahan mulai ditangani. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Menteri, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Aceh ditandatangani oleh Presiden Sukarno tanggal 6 Agustus 1957 dalam bentuk PP No. 29 tahun 1957. Lalu Menteri Agama K. H. Ilyas mengeluarkan penetapan No. 58/1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Daerah Aceh. Melalui penetapan tersebut Pemerintah mengesahkan 16 Pengadilan Agama di kota-kota besar di Aceh dan sebuah Pengadilan Tinggi Agama di Kutaraja. Selain itu, dalam bidang agama pada tanggal 1 Oktober 1957 Dewan Menteri mengeluarkan Keputusan No. 44 Tentang Pernyataan Mesjid Raya Kutaraja (Mesjid Baiturrahman) sebagai milik Negara, sehingga terbuka landasan yuridis bagi Pemerintah untuk merawat dan membanggunya. Mendukung ketetapan itu tanggal 21 Oktober 1957

⁷⁷⁰ Menurut Hasan Saleh nama Ikrar Lamteh diambil sebagai nama perundingan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Lihat *ibid.* hlm. 310.

⁷⁷¹ *Ibid.* Lihat juga M. Isa Sulaiman, *op. cit.* hlm. 82. Lihat juga M. Nur El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm. 197.

⁷⁷² M. Nur El Ibrahimy, *ibid.*

⁷⁷³ *Ibid.*, hlm. 199.

⁷⁷⁴ M. Isa Sulaiman, *op. cit.* hlm. 386-387.

⁷⁷⁵ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 330.

Menteri Agama K. H. Ilyas menyediakan bantuan Rp. 500.000,- sebagai tanda permulaan pekerjaan renovasi yang diperkirakan menghabiskan biaya Rp. 12.000.000,-.

Persoalan SRI juga mendapat perhatian Pemerintah dengan dikeluarkan Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1959 Tentang Pengasuhan dan Pemeliharaan SRI di Propinsi Aceh. Dengan demikian sejak saat itu 205 buah SRI di Aceh secara yuridis formal berada di bawah Kementerian Agama. Selanjutnya Sekolah Menengah Islam (SMI) yang waktu itu mencapai 30 buah dan berstatus swasta juga mendapat Perhatian Pemerintah. Sejak permulaan tahun 1958 Pemerintah membangun sebuah kompleks PGA yang representatif di Kutaraja. Pembangunan yang menelan biaya Rp. 7.193.350,- itu mencakup pengadaan gedung sekolah, asrama siswa, SRI latihan, rumah guru dan mushalla.

Pemerintah daerah juga tidak mau ketinggalan dalam menggiatkan pembangunan di Daerah yang telah dikoyak oleh perang. Pada tanggal 15 Maret 1958 Letkol Syamaun Gaharu selaku Peperda membentuk Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh (YDKA) yang diketuai oleh M. Husin, bupati t/b pada Kantor Gubernur dan Mayor R. Sunaryo. YDKA dibentuk dengan misi untuk mempersiapkan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam. Di samping itu sebelumnya, tanggal 15 September 1957 telah dibentuk Lembaga kebudayaan Aceh yang dipimpin oleh T. Hamzah untuk mempersiapkan penyelenggaraan festival kebudayaan yaitu Pekan Kebudayaan Aceh (PKA).

Kedua proyek monumental tersebut direalisasikan pada bulan Agustus 1958 dengan kedatangan Menteri Agama K. H. Ilyas untuk membuka PKA di Kutaraja. Pada tanggal 17 Agustus 1958, ditengah hiruk pikuk gelar budaya, Menteri Agama meresmikan dimulainya pembangunan Kopelma Darussalam yang terletak sekitar 7 Km sebelah timur Kutaraja. Selanjutnya tanggal 23 Agustus 1958, Menteri PP&K Prof. Dr. Priyono yang menutup PKA juga menyempatkan diri untuk meletakkan batu pertama pembangunan gedung Kopelma Darussalam.⁷⁷⁶

Meskipun sikap Ali Sostroamidjojo sangat tegas terhadap penyelesaian masalah Aceh dengan kekuatan militer, namun usaha untuk mencari penyelesaian secara damai sudah muncul sejak awal dengan diangkatnya Mr. S. M. Amin sebagai Gubernur Sumatera Utara menggantikan Gubernur Hakim. Pengangkatan S.M. Amin tidak lama setelah meletusnya pemberontakan didasari pada pertimbangan bahwa dia cukup mengenal Aceh dan juga cukup dekat dengan para pemimpin pemberontak, karena selain sebagai pejuang masa revolusi, dia juga pernah menjadi Gubernur Muda, dan Komisaris Pemerintahan di Sumatera Utara, sebelum mengundurkan diri dan menjadi advokat di Jakarta.⁷⁷⁷

Dengan kekuasaan yang ada padanya dalam *Militaire Bijstand* yang sedang berlaku di Aceh, S. M. Amin mencoba melakukan korespondensi dengan pemimpin pemberontak. Pada tanggal 5 Desember 1953 ia mengirim surat kepada empat orang pimpinan puncak pemberontakan yaitu Tgk. M. Daud Beureueh, Hasan Ali, Tgk. A. Husin Al Mujahid, dan Husin Yusuf, dengan tembusan dikirim kepada Said Abu Bakar yang sudah menyeberang ke Penang sebagai wakil DI di Semenanjung. Isi surat-surat tersebut adalah pesan agar pemimpin pemberontak mau mengemukakan alasan mereka memberontak, keinginan minimum mereka, dan kemungkinan mengakhiri petumpahan darah.

Walaupun pemimpin pemberontak belum lagi membalas suratnya yang pertama, S. M. Amin mengirim surat kedua masing-masing kepada Tgk. M. Daud Beureueh, Hasan Ali, Husin Yusuf, Tgk. A. Husin Al Mujahid, T. M. Amin, Tgk. Ali Piyeung, A. Jalil Amin dan Ishak Amin. Isi surat kedua ini dia menegaskan kembali keinginannya agar para pemimpin utama pemberontak bersedia mengemukakan pendirian mereka guna

⁷⁷⁶ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 387-392.

⁷⁷⁷ T. M. Ali Panglima Polim, *loc. cit.*

mengakhiri pertumpahan darah yang telah lama berlangsung di Aceh.

Pemimpin pemberontak pertama yang membalas surat tersebut adalah Husin Yusuf, Tgk. A. Husin Al Mujahid, T. M. Amin, dan akhirnya Tgk. M. Daud Beureueh beserta kepala stafnya Hasan Ali. Dalam balasannya tanggal 20 Juni 1954 Tgk. A. Husin Al Mujahid menulis “Adalah mungkin mengakhiri pertikaian yang terjadi antara Pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Aceh asal saja kedua pihak ingin memperlihatkan goodwillnya masin-masing”. Dia juga mengemukakan ketidakpuasannya terhadap perlakuan yang mereka terima. Hal senada juga terungkap dalam surat balasan T. M. Amin dan Husin Yusuf.⁷⁷⁸

Setelah mengeluarkan pernyataan korespondensi itu kepada masyarakat barulah Tgk. M. Daud Beureueh membalas surat S. M. Amin dengan tembusan kepada Said Abu Bakar di Penan dan M. Nur El Ibrahimy di Jakarta. Dalam surat tersebut mereka mengusulkan enam butir prasyarat perundingan antara lain adalah penegasan posisi berdaulat dua pemerintahan yang saling berseteru sehingga perlu pemecahan yang integral dengan pemberontak di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, persoalan status hukum tawanan, persoalan janda dan yatim piatu yang telah menjadi korban perang, dan persoalan anti rugi harta benda yang musnah.⁷⁷⁹ Usul yang diajukan Tgk. M. Daud Beureueh dan Hasan Ali yang berada di luar kewenangannya maka usul tersebut dibawa S. M. Amin ke kabinet. Pemerintah Pusat sendiri menurut Amin tidak menghendaki penyelesaian melalui perundingan seperti harapan pemberontak. Menurut pendapat PM Ali berunding dalam kedudukan sejajar dengan pemberontak berarti merendahkan derajat dan martabat negara.⁷⁸⁰

Berdasarkan keterangannya sendiri Sjammaun Gaharu mendapat pengangkatannya berkat dukungan yang diterimanya dari Nasution akan gagasannya untuk mengakhiri jihad suci menegakkan Negara Islam di Aceh. Sering kali ia bertemu dengan Nasution dalam masa antara 1952 dan 1955, ketika Nasution dibebaskan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, untuk memberikan keterangan bagi buku-buku yang tengah ditulisnya tentang revolusi Indonesia dan tentang perang gerilya pada umumnya. Intisari teori ini adalah, situasi Aceh berbeda dengan di tempat lain dan rumit sekali, dan persoalan ini paling baik diselesaikan orang Aceh sendiri dengan cara Aceh. Wakil Presiden juga tertarik akan gagasan Sjammaun Gaharu tentang masalah ini dan meminta dia menuliskannya. Pada Oktober 1955 ia menyampaikan hasilnya kepada Hatta, dan ketika beberapa hari kemudian Nasution diangkat kembali menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, ia pun mengirimkan sebuah salinan kepada Nasution.

Nasution kemudian menyambutnya dengan menawarkan kepadanya jabatan pimpinan militer Aceh. Pada mulanya Sjammaun Gaharu bermaksud menolak tawaran ini, karena dia merasa, pandangannya tidak sesuai dengan kebijaksanaan panglima Sumatera Utara, Maludin Simbolon. Tetapi dengan janji Nasution bahwa Maludin Simbolon akan dipindahkan dalam waktu dekat, ia menerima kedudukan ini. Kesempatan untuk melaksanakan gagasannya dalam praktek diperolehnya ketika pada akhir 1956 Maludin Simbolon—yang merupakan saingan utama Nasution untuk jabatan kepala staf—dalam upaya mencegah kepindahannya memutuskan hubungan Komando Tentara Teritorium Sumatera Utara dengan Pimpinan Angkatan Darat. Segera Sjammaun Gaharu menjauhkan diri dari Maludin Simbolon dan tetap berhubungan erat dengan AH Nasution.⁷⁸¹

Nama-Nama Pejabat-Pejabat Dari Kdma/Penguasa Perang Dan Pemerintah Daerah Aceh

⁷⁷⁸ M. Isa Sulaiman, *op. cit.*, hlm. 346-348.

⁷⁷⁹ *Ibid.*, hm. 349. Lihat juga A. H. Geulanggang, *op. cit.* hlm. 153-156.

⁷⁸⁰ Insider, *op. cit.* hlm. 205-206. Lihat juga M. Isa Sulaiman, *op. cit.*, hlm. 350.

⁷⁸¹ Sjammaun Gaharu, *op.cit.*, 1958:40-43.

**Dalam Penyelesaian Pemberontakan Di/Tii Aceh
Tanggal 23-26 Mei 1959⁷⁸²**

1. Ali Hasjmy : Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Aceh
2. Overste T. Hamzah : Wakil Komandan KODAM
"A"/Iskandar Muda
3. Mayor Nyak Adam Kamil : Wakil Kepala Staf KODAM
"A"/Iskandar Muda
4. Kapten Ismet Noor : Perwira SU- 1
5. Lts. A.K. Abdullah : Sekretaris
6. Zaini Bakri : Bupati/Kepala Daerah Aceh
Besar
7. Achmad Abdullah : Kepala Penerangan Propinsi
Aceh

Sekarang Sjammaun Gaharu bebas melaksanakan rencananya. Bersama dengan gubernur yang baru diangkat, A. Hasjmy, dan dengan sokongan tegas Nasution, ia menempuh politik kebijaksanaan perukunan. Pada pertengahan April 1957, pertengahan puasa, diadakan perundingan dengan sejumlah pemimpin *Darul Islam* terkemuka di Lamteh, sebuah desa beberapa kilometer dari Aceh. Pembicaraan mencapai puncaknya dalam Ikrar Lamteh yang di dalamnya keduanya berjanji masing-masing untuk memajukan Islam, mendorong pembangunan Aceh dalam arti kata yang seluas-luasnya, dan berusaha mendatangkan kemakmuran dan keamanan kepada rakyat dan masyarakat Aceh. Di pihak Republik piagam itu ditandatangani Sjammaun Gaharu dan kepala stafnya, Teuku Hamzah, Hasjmy, dan Kepala Polisi untuk Aceh, M. Insja. Pemimpin-pemimpin *Darul Islam* yang menandatangani adalah Hasan Aly, Hasan Saleh, dan Ishak Amin (Bupati Aceh Besar³. Kemudian, disertai Ali Hasjmy, dan M. Insja, jammaun Gaharu juga menjumpai Daud Beureueh, yang pada waktu itu masih tidak ingin mendengarkan penyelesaian .⁷⁸³

Sesuai dengan kebijaksanaannya, yang dinamakannya Konsepsi Prinsipil dan Bijaksana, Sjammaun Gaharu bersama dengan Ali Hasjmy melanjutkan usaha-usahanya mencari penyelesaian. Keduanya tetap berhubungan dengan pemimpin-pemimpin *Darul Islam* dan mengunjungi Jakarta berkali-kali untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat melangkah dalam perundingan mereka dengan kaum pejuang mujahidin. Pada September 1957 Perdana Menteri Djuanda mengatakan kepada mereka, mereka boleh memberikan konsep otonomi daerah penafsiran yang seluas mungkin, bahkan sampai kepada pengertian bahwa Aceh diperlakukan sebagai negara terselldiri, asal saja mereka tetap dalam batas-batas UUDS Indonesia yang masih mengakui suatu republik kesatuan.⁷⁸⁴

Tetapi tak tercapai penyelesaian pada waktu itu. Sebagiannya ini adalah disebabkan kenyataan bahwa jihad suci menegakkan Negara Islam PRRI-Permesta menarik perhatian, dan sebagiannya karena adanya dalam Negara Islam Aceh suatu faksi yang amat kuat, yang dipimpin Daud Beureueh, yang tidak ingin mendengarkan kompromi apa pun juga dan berpegang pada prinsip perundingan resmi antara Negara Islam Aceh dan Republik Indonesia.

Perkembangan-perkembangan baru dalam tubuh *Darul Islam* Aceh yang mulai pecah, membuat Sjammaun Gaharu dan Ali Hasjmy memulai serangkaian perundingan baru. Pada awal Mei Sjammaun Gaharu dan Ali Hasjmy bertolak lagi ke Jakarta, kali ini

⁷⁸² Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latarbelakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Citra Panca Serangkai, 1993), bagian lampiran

⁷⁸³ Abdul Murat Mat Jan, *op.cit.*, hlm. 40-41.

⁷⁸⁴ C. van Dijk, *Darul Islam...*, hlm. 258.

atas undangan Perdana Menteri Djuanda. Mereka menjelaskan situasi yang baru kepada Kabinet dan kepada Presiden Soekarno serta memberikan sejumlah anjuran tentang langkah-langkah yang harus diambil sehubungan dengan ini. Kemudian Juanda mengeluarkan keputusan⁷⁸⁵ yang menyatakan, sejak 26 Mei Provinsi Aceh dapat menamakan dirinya Daerah Istimewa Aceh. Ini menempatkan Aceh dalam kedudukan yang agak khas, karena dari provinsi-provinsi yang lain hanyalah ibukota, Jakarta, dan Yogyakarta yang memiliki status istimewa. Kepada Aceh selanjutnya dijanjikan otonomi yang seluas mungkin, terutama dalam bidang agama, pendidikan dan hukum adat, tetapi dengan ketentuan, seperti dinyatakan Djuanda dalam keputusannya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada waktu yang sama Pemerintah Pusat mengirimkan sebuah misi ke Aceh untuk berunding dengan Dewan Revolusi. Misi ini dipimpin Wakil Perdana Menteri Pertama Hardi, dan di dalamnya termasuk Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Gatot Subroto dan Menteri Kestabilan Ekonomi tanpa Portfolio, Kolonel Suprajogi. Dua hari kemudian, 26 Mei 1959, sesudah melalui usaha Ali Hasjmy dan Letnan Kolonel T. Hamzah menembus jalan buntu, tercapai persetujuan sementara dengan pemimpin-pemimpin Dewan Revolusi yang menerima usul-usul Pemerintah Pusat. Secara tertulis mereka sendiri berjanji kembali ke dalam haribaan Republik dan mengucapkan sumpah setia kepada Undang-Undang Dasar.

Sifat yang sebenar-benarnya dari kompromi itu tetap samar-samar. Seperti telah ditetapkan Djuanda sebelumnya, otonomi janganlah ditafsirkan sedemikian rupa hingga setiap ketentuan baru yang diadakan akan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Hardi menambahkan di Banda Aceh, masalah apakah masyarakat Islam di Aceh dapat dipaksakan melaksanakan syariat Islam atau tidak, merupakan persoalan yang akan diputuskan Konstituante, yang ketika itu sedang membicarakan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Ia menghubungkan hal ini dengan Piagam Jakarta, yang kini kembali menjadi masalah yang hangat diperdebatkan dalam Konstituante di Jakarta. Seperti ternyata, kaum politisi Islam tidak cukup kuat untuk meluluskannya kali ini. Satu-satunya hasil yang mereka peroleh ialah diakuinya oleh Soekarno dalam Dekrit yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Piagam Jakarta telah mengilhami Undang-Undang Dasar ini dan merupakan kesatuan dengannya.⁷⁸⁶

Selanjutnya disetujui secara prinsip, sebagian prajurit Tentara Islam, se-telah melalui *screening* wajib, akan dijadikan wajib militer darurat. Kemudian, pada 1 Oktober disetujui akan dibentuk Divisi Tengku Chik Ditiro sebagai bagian khusus dari Divisi Tentara di Aceh. Pegawai-pegawai negeri *Darul Islam* yang mengikuti Dewan Revolusi mendapat perlakuan yang sedikit ba-nyaknya sama. Usaha yang menyatakan bahwa di mana mungkin mereka akan diintegrasikan ke dalam Pemerintahan Republik dikukuhkan para penguasa militer pusat pada akhir Oktober. Ini berarti memberikan kuasa ke-pada Pemerintah Daerah Aceh untuk mengangkat bekas pejuang mujahidin yang telah menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia pada jabatan-jabatan dalam pemerintahan sipil.⁷⁸⁷

⁷⁸⁵ Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia no. 1/Miss8-1959.

⁷⁸⁶ Kekaburan kompromi ini menimbulkan beberapa masalah pada 1962. Pada akhir tahun itu tersiar berita, Angkatan Darat Pusat menentang (diberlakukannya hukum Islam di Aceh. Berita ini dibantah juru bicara Tentara. Ia membacakan sebuah pernyataan yang pokoknya berisi 1) hukum Islam tidaklah a priori ditolak, karena itu juga tidak di Aceh; 2) dapat dibuat hukum bagi masyarakat Islam yang mungkin di sesuaikan dengan hukum Islam; dan 3) Pemerintah Daerah Aceh, sesuai dengan keterangan misi Hardi, boleh mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hukum Islam, asal saja ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum kebijaksanaan negara, kepentingan umum, atau peraturan hukum tingkat yang lebih tinggi. Dalam pembicaraan turut serta Menteri Agama, yang menyatakan dirinyayakin Angkatan Darat Pusat mengakui dan karena itu tidak menolak prinsip hukum Islam di Aceh. B.J. Boland, *Pergumulan Islam dalam Indonesia Modern*, (terj.), (Jakarta: Grafiti, 1981), hlm. 90-100.

⁷⁸⁷ Ini berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat no.010541959 31 Oktober 1959. Indonesia berada dalam keadaan perang dari Maret 1957 sampai Maret 1962. Selama masa ini terdapat Penguasa Perang Pusat (Peperpups dan di provinsi-provinsi Penguasa Perang Daerah (Peperda). Di Aceh yang menjadi ketua



BAB 9

DEWAN REVOLUSI:

PERPECAHAN

INTERNAL DARUL ISLAM ACEH

BERBARENGAN dengan kegiatan pembangunan Kopelma Darussalam, usaha mencari solusi damai masalah Aceh terus dilakukan oleh Ali Hasjmy dan Syamaun Gaharu. Proses perundingan tersebut sempat tertunda beberapa saat akibat keterlibatan beberapa pimpinan dan bekas teman seperjuangan pemberontak dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Operasi Sabang Meuroke (OSM),⁷⁸⁸ dan tersiar kabar bahwa pihak pemberontak mau memulai lagi pemberontakan pada 1 Januari 1959 dan rencana pemberontak merebut Kutaraja. Dalam usaha memperjelas proses perdamaian tersebut Syamaun Gaharu berhasil mempertemukan

Peperda (Penguasa perang Daerah) adalah panglima militer, Sjammaun Gaharu, dan wakil ketuanya adalah Gubernur A. Hasjmy.

⁷⁸⁸ Putra Aceh yang terlibat dalam gerakan PRRI dan OSM adalah Amelz sebagai Mendagri PRRI, dan A. Gani Usman (Ayah Gani) diangkat sebagai Mensos PRRI, dan Mayor Sayid Usman, Mayor Nukum Sanani, Kapten Hasanuddin dan mantan Letnan Sayid Ali Alaydrus dalam OSM. Lihat M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, Gugagatan terhadap Tradisi.*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 394. Lihat Juga Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 345.

KSAD A. H. Nasution, yang datang ke Kutaraja untuk meresmikan perubahan KDMA menjadi Kodam A Iskandarmuda, dengan pimpinan pemberontak. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja rumah Panglima KDMA di Neusu Kutaraja tanggal 22 Desember 1958 Hasan Saleh yang ditemani oleh A. Gani Usman (Ayah Gani) telah menjamin tidak akan ada perang lagi sebagaimana ucapannya “*Bismillahirrahmanirrahim*, dengan ini saya atas nama seluruh rakyat Aceh, mengikrarkan di depan Pak Nas bahwa saya menjamin keamanan Aceh dan akan menggagalkan usaha untuk berperang kembali pada tanggal satu bulan satu tahun sembilan belas lima sembilan”. Sebagai konsekuensinya KSAD berjanji akan berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan yang diajukan Hasan Saleh.⁷⁸⁹

Tindakan selanjutnya yang dilakukan Hasan Saleh setelah pertemuan dengan KSAD adalah mengirim surat resmi kepada KSAD tanggal 28 Desember 1958 yang isinya ikrar pernyataan taat setia kepada Republik Indonesia, sumpah prajurit, Sapta Marga, dan permohonan agar Ibrahim Saleh direhabilitasi dalam pangkat Kapten dan Yacob Ali dalam pangkat Letnan Satu, sedangkan A. Gani Usman (Ayah Gani) dipercayakan sebagai Penghubung Tinggi/TII. Sementara itu, para pimpinan pemberontak lainnya yang telah berdiam di kota, seperti T. M. Amin, A. Gani Mutiara dan Husin Yusuf diberikan fasilitas dan peluang usaha oleh Syamaun Gaharu – Ali Hasjmy. T. M. Amin mulai aktif kembali mengelola NV. Indolco, Husin Yusuf mengelola NV. Sakti, dan Husin Shab mengurus pembayaran ganti rugi rumahnya di Sigli dan usul rapel gajinya di Perusahaan Tambang Minyak.⁷⁹⁰

Tindakan Hasan Saleh dan Ayah Gani tersebut mendapat dukungan dari beberapa pimpinan penting pemberontak, antara lain Tgk. A. Husin Al Mujahid dan Husin Yusuf. Sebaliknya tindakan tersebut membuat Tgk. M. Daud Beureueh sangat murka. Akibatnya sejak awal tahun 1959 mulai terlihat perpecahan dikalangan pemberontak antara kubu Tgk. M. Daud Beureueh, Hasan Ali, dan Ilyas Leube dan lainnya di satu pihak dengan kubu Hasan Saleh, Ayah Gani, Amir Husin Al-Mujahid dan lainnya di pihak yang lain. Perpecahan itu termanifestasi secara tegas setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Hasan Saleh⁷⁹¹ pada tanggal 15 Maret 1959 dan terbentuknya Dewan Revolusi⁷⁹².

Sebenarnya, terbentuknya Dewan Revolusi NBA-NII ini secara rahasia, tak diberitahukan kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh. Pengambil-alihan kekuasaan secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Imam/Panglima/Wali Negara sebenarnya sebuah tindakan penipuan. Namun, dalam pidato Hasan Saleh, Dewan Revolusi mengambil over kekacauan dari Wali Negara dan Kabinet. Proklamasi Dewa Revolusi dibaca oleh Abdoel Gani Oesman (Ajah Gani) yang susunannya adalah:

Ketua	: Abdoel Gani Oesman
Wakil Ketua	: Tgk. H. A. Oejong Rimba/Moedjahid?
Sekretaris Djenderal	: A. G. Moetiara
Wakil sekretaris	: Tgk. Njak Oemar merangkap anggota

⁷⁸⁹ Hasan Saleh, *op. cit.* hlm. 345.

⁷⁹⁰ M. Isa Sulaiman, *op. cit.* hlm. 406.

⁷⁹¹ Menurut Hasan Saleh, keputusannya mengambil keputusan mengambil alih kekuasaan dari Tgk. M. Daud Beureueh atas desakan dari kawan-kawannya baik sesama pemberontak, tokoh sipil maupun militer, yang menginginkan perdamaian di Aceh seperti A. Gani Mutiara, A. Gani Usman (Ayah Gani), T. Amin, T. A. Hasan, Zaini Bakri, Abduh Syam, A. Hasjmy, Ishak Amin, A. R. Hajad, Ibrahim Amin, dan hampir semua tokoh TNI. Lihat Hasan Saleh, *op. cit.* hlm. 354-355.

⁷⁹² M. Nur El Ibrahimy, *Peranan teungku Muhammad daud Beureueh Dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm. 199.

Anggota-anggota : Seluruh bekas Menteri2,
Seluruh bupati-bupati
Panglima Pertahanan : Hasan Saleh
Kepala staf T&T/Kores I : Ibrahim Saleh

Hanya susunan ini yang kemudian diketahui oleh Teungku Daud Beureueh. Teungku Daud Beureueh tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Sementara itu, pada saat terbentuknya Dewan Revolusi ini, malah Teungku Daud Beureueh masih akan membicarakan tentang rencana pembentukan Kabinet akan dibicarakan dalam Majelis Syura. Kegiatan DI Aceh masih tetap seperti biasa. Surat-menyurat masih lancar dari "atas" di gunung hingga ke "bawah" di keudai-kedai di pinggiran jalan raya yang ramai. Pada tanggal 18/19 Maret 1959, Teungku Daud Beureueh masih memberikan perintah untuk membentuk pos penjagaan pada Alamsjah dan Mahmoed, kekuatan Alamsjah 10 orang, Mahmoed 2 orang di Tjot Bajoe.⁷⁹³ Hal ini menunjukkan, meskipun telah terjadi desersi pada beberapa personil utama TII, pasukan DI masih solid dan patuh.

Di dalam jajaran Darul Islam Aceh sendiri, pada tanggal 22 Maret 1959 Amin Basjah masih mengatur jadwal dan tempat serta panita kegiatan dakwah dan khutbah-khutbah Teungku Daud Beureueh di Geumpang.⁷⁹⁴ Baru pada sore harinya ada dialog antara jajaran teungku Muhammad Daud Beureueh dengan Abdul Ganie Oesman yang menanyakan Hendak kemana Dewa Revolutive dengan Panglima Hasan Salehnya? Maka, Abdoel Gani pun menjawab "Untuk mencari jalan keluar dari kehancuran Aceh seluruhnya." Karena tindakan ini dianggap sudah merupakan improvisasi yang berlebihan, maka Haroen Ali bertanya lagi: "Mengapa tidak diberi tahukan kepada orang tua itu?" Yang dimaksud dengan orang tua adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh.⁷⁹⁵

Ayah Gani akhirnya hanya menjawab bahwa ia "Tak berani pergi kesama takut tersentuh pribadi." Artinya, kharisma Teungku daud Beureueh malah dalam manajemen pergerakan akan menjadi penghalang bagi bawahannya untuk menyampaikan aspirasi. Haroen Ali kemudian menanyakan lagi, "Apa sebab dalam proklamasi dan pengumumannya dilakukan oleh Hoesin Joesoef, A.G. Moetiara, T. A. Hasan, T. M. Amin, yang dianggap telah keluar dari kesatuan TII. Abdoel Gani kemudian menukas, "Mereka adalah pelopor T.I.I. juga." Namun ketika Haroen Ali menanyakan "Apakah gerakan ini tidak bersangkutan dengan divizen yang telah diperoleh mereka masing-masing 7 (tujuh juta) rupiah?" Tampak Abdoel Gani bersikap diplomatis dengan memberikan jawaban netral: "Ini saya tiada ketahui mereka sudah mendapat divizen itu."⁷⁹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa ada ketertutupan dan ada yang berusaha mencari keuntungan dari cara damai yang ditempuh secara sepihak. Menyerah dengan mendapatkan keuntungan dan hasil konsesi politik memperlihatkan bahwa memberontak adalah jalan lain untuk meraih kekayaan.

Haroen Ali menyebutkan bahwa ketika diadakan pertemuan dengan Nasution hadir Hoesin Joesoef, Hasan Saleh, Ajah Gani. Dan mereka sudah menanda tangani suatu perjanjian dengan memberikan pangkat kepada Hasan Saleh Letnan Kolonel berarti telah kembali kepada TNI. Tak ada bantahan apa-apa dari Ajah. Namun Ayah Gani kembali menyatakan bahwa ia tidak tahu tentang hal tersebut. Artinya, Hasan Saleh sangat cerdas dalam memainkan disinformasi Dewan Revolusi dan segala sepakterjangnya. Bahkan Ayah Gani, menyatakan bahwa "Gerakan ini boleh jadi sudah

⁷⁹³ Amelz, *Riwajat Atjeh Bangkit dari Tidoernya jang Njenjak Sesoedah beberapa Poeloh Tahoen Lamanja*, (Pidie, Naskah ketikan, t.t.), hlm. 71.

⁷⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

⁷⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

⁷⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

diboncengi oleh golongan ke III.”⁷⁹⁷

Lebih terkejut lagi Ayah gani ketika dikatakan oleh Haroen Ali bahwa sudah terdapat banyak pamflet-pamflet itu sesudah disusun dirumah Zaini Bakri, oleh A. G. Moetiara dan lain-lain, dibawa oleh Hoesin Joesoef dan Hamidy kepada percetakan untuk dicetak. Dan sesudah dicetak disuruh siarkan dengan kapal terbang. T.N.I. ketika menempelkan pamflet itu dengan riang gembira.⁷⁹⁸ Husin Ali mencoba menyatakan kepada Ayah Gani bahwa ”Bukankah penerimaan rakyat umum dalam hal ini sangat buruk akibatnya? Bermaksud hendak menghindarkan Aceh dari keruntuhan, tetapi sekarang nampaknya bukan runtuh lagi sudah hancur seluruhnya.”⁷⁹⁹

Sesudah diadakan pertemuan dengan Nasution, ia kembali ke Djakarta, entah dengan jalan bagaimana Pemerintah Asing (Inggeris) telah mengetahui dan menyiarkan di surat kabar.⁸⁰⁰ Toeanku Hoesin mengatakan pada Badaroeddin Tjoet ”Dahulu saya dituduh Pang Bajak, sekarang Hasan Saleh sendiri telah menjadi Pang Baroen. Telah membuka celana Teungku Di Beureu-eh.”⁸⁰¹ Perkembangan internal gerakan DI Aceh selanjutnya pada bulan Maret 1959 sudah banyak yang terpengaruh dengan Dewan Revolutiener. Hal ini menyebabkan Hasan Saleh ke Geumpang bersama dengan Wedana Ali Gade dan Gam Manjak. Bahkan Njak Ma’oen nampaknya sudah terpengaruh dengan Dewan Revolutive.

Hal ini terjadi pada Maret 1959, ketika, dengan menuduh Daud Beureueh bertindak sewenang-wenang, Hasan Saleh dan pendukung-pendukungnya mengambil jalan pintas yang lain dan meninggalkan Teungku Muhammad Daud Beureueh tinggal bersama tokoh DI lainnya yang sudah terisolir. Mereka membentuk pemerintah mereka sendiri pada suatu pertemuan di Pidie yang dihadiri kira-kira seribu orang pada 15 Maret, mereka yang berlainan pendapat ini menamakan dirinya Gerakan Revolusioner Islam Indonesia, kemudian membentuk Dewan Revolusi (Negara Bagian Aceh). Ketuanya adalah Abdul Gani Usman, dan wakil ketuanya adalah Hasan Saleh, dengan Abdul Gani Mutiara sebagai sekretaris umum dan kepala Bagian Penerangan. Sebagai anggota termasuk pemimpin-pemimpin *Darul Islam* terkemuka seperti Amir Husin al Mudjahid, T.A. Hasan, Ibrahim Salehs T.M. Amin, dan Husin Jusuf.

Tabel di bawah ini memperlihatkan nama-nama anggota Dewan Revolusi yang menjalin hubungan damai untuk perundingan bagi penyelesaian kasus Darul Islam Aceh. Para anggota Dewan Revolusi ini dengan berbagai motif dan niat pada akhirnya bukan hanya berhasil menekan pemerintah Pusat, melainkan membuka lubang dalam pergerakan sehingga, ibarat kapal yang dibocorkan sengaja dari dalam, akan mengakibatkan perpecahan dan karamnya kapal tersebut. Namun, kapal Darul Islam tidaklah karam di lautan leaps yang jauh dengan pantai, melainkan di pinggiran pantai. Artinya, perpecahan yang diakibatkan oleh munculnya Dewan Revolusi ini tidak semuanya menyumbang bagi hancurnya gerakan Darul Islam di Aceh.

Tabel 7

**Nama-Nama Anggota Delegasi Dewan Revolusi DI/TII Aceh
Peserta Musyawarah Dengan Missi Pemerintah Pusat
Untuk Penyelesaian Pemberontakan DI/TII Aceh
Tanggal 23-26 Mei 1959⁸⁰²**

⁷⁹⁷ *Ibid.*

⁷⁹⁸ *Ibid.*

⁷⁹⁹ *Ibid.*

⁸⁰⁰ *Ibid.*

⁸⁰¹ *Ibid.*

⁸⁰² Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latarbelakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Citra Panca Serangkai, 1993), bagian lampiran.

No.	Nama	Jabatan
1.	Tgk. A. Husin Al Mujahi	Wali Negara NBA-NII
2.	A. Gani Usman	Ketua Dewan Revolusi
3.	Hasan Saleh	Wakil Ketua Dewan Revolusi
4.	A.G. Mutyara	Sekjen Dewan Revolusi
5.	T.M. Amin	Anggota Dewan Revolusi
6.	T.A. Hasan	Anggota Dewan Revolusi
7.	Nya' Umar	Wakil Sekjen Dewan Revolusi
8.	M. Saleh Kapa	Anggota Dewan Revolusi
9.	M.K. Arsjad	Anggota Dewan Revolusi
10	Tgk. Ishak Amin	Anggota Dewan Revolusi
11	Tgk. Ibrahim Saleh	Anggota Dewan Revolusi
12	Kol. Husin Jusuf	Anggota Dewan Revolusi
13	Tgk. Hasballah	Anggota Dewan Revolusi
14	Mayor Abdul Wahab Ibrahim	Komandan Resimen VI TII
15	Mayor M.A. Hanafiah	Kepala Staf Resimen I/Gajah Putih TII
16	Mayor Ben Husin	Komandan Batalyon 315 TII
17	Kapten Abdullah Husin	Perwira Staf Resimen VI
18	Mayor Dja'far Abdullah	Komandan Resimen II TII
19	Kapten Ismail M.	Perwira Staf T&T TII
20	H. Abu Bakar	Anggota Majelis Syura NBA NII
21	Tgk. Harus B.E.	Anggota Majelis Syura
22	Tgk. Daud Ali	Anggota Majelis Syura
23	Tgk. M. Daud Bugeh	Anggota Majelis Syura
24	Tgk. Raden	Anggota Majelis Syura
25	Thamrin Amin	Anggota Majelis Syura

Langkah pertama Abdul Gani Usman dalam kedudukannya sebagai ketua Dewan Revolusi adalah membuat pengumuman yang menyatakan, jabatan kepala negara untuk sementara dilaksanakan Dewan Pertimbangan Revolusi, yang diketuai Amir Husin al Mudjahid. Pada waktu yang bersamaan ia memerintahkan para pengikutnya menghentikan pemungutan pajak di desa-desa, disertai ancaman terhadap siapa saja yang masih terus melakukannya. Mengenai Tentara Islam, Hasan Saleh membatasi gerak para prajurit Divisi Tengku Chik Ditiro dalam asrama mereka, dengan menarik mereka dari desa-desa tempat mereka ditempatkan. Selanjutnya ia mengumumkan, Dewan Revolusi akan mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk membicarakan berakhirnya jihad suci menegakkan Negara Islam dengan para penguasa Republik. Pada

bulan-bulan berikutnya Dewan Revolusi diikuti pasukan dari Aceh Barat yang dipimpin T.R. Idris dan Komandan Resimen VII Sumatera Timur, Haji Hasanuddin.⁸⁰³ Pada Agustus, Abdul Gani Mutiara menyatakan Dewan Revolusi didukung 25.000 anggota *Darul Islam*.⁸⁰⁴ Namun, kemudian banyak anggota Dewan Revolusi yang sudah beralih masuk ke PRRI.

Hadji Hasanoeddin Siregar yang tetap patuh kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh dan tetap setia dalam TII, ia kemudian mengangkat Noekoem menjadi penguasa perang di Resimen VII. Dalam suatu operasi mendapat suatu kekecewaan yang menjadi pecah antara PRRI dengan TII. Noekoem datang Mayor Hadji Hasanoeddin Siregar membentangkan segala keburukan yang telah terjadi zina, judi, rampok, agama baru. Hadji Hasanoeddin Siregar adalah sebagai pengurus keuangan Sabang Merauke dan TII, sampai sekarang belum ada perbaikan. Noekoem menyatakan keluar dari Sabang Merauke (PRRI) dan masuk DI dan diangkat menjadi *consigner* TII dengan minta bantuan dari Gazali, tetapi tak diberikan. Nukum berikhtiar mencari jalan untuk memperoleh uang, sekarang baru dapat membantu TII sedikit-sedikit dan sudah saya beli pakaian dan peluru Ketika datang Menteri Perang dan Menteri Dalam Negeri NII tak dikatakan pada Menteri Dalam Negeri bahwa di sini banyak perjudian, perzinahan, perampokan dan membuat aliran baru yang aneh-aneh dalam Islam.⁸⁰⁵

TII kemudian bergerak terus menghadang barisan PRRI dan berhasil mensita satu kapal milik PRRI sejumlah 30 mil yang merupakan kepunyaan saudagar-saudagar. Para TII menceritakan bahwa Tentara PRRI hanya 64 orang lagi yang selalu berjudi, pernah ditangkap oleh Noekoem selagi judi itu tetapi oleh Hasanoeddin dilepaskan. Bagi Noekoem, dalam memerangi PRRI, ia rela mati dalam Islam, suatu moralitas yang jarang terdapat pada tentara kita.

Menurut Moe'in Hasjim, dari TII, kondisi moral tentara PRRI ini payah diatasi karena ada dua komando, ada dua hukum. Banyak tentara PRRI yang tertangkap tak bersedia masuk DI, sedang sebahagian dari TII sudah masuk PRRI karena mewah, tak mau kembali lagi ke TII. Kerusakan moral karena terpengaruh pemberontakan yang lain terjadi karena banyak personil TII yang sudah terpengaruh Dewan Revolusi menjadi oportunistis dan menjadi rusak moralnya.⁸⁰⁶ Sementara itu, banyak TII berdiri di dua *nokang* (perahu) dalam pengertian bahwa banyak dari TII yang juga menjadi anggota tentara PRRI. Tetapi, dalam beberapa hal, sebagaimana diakui oleh Gazali, "dengan kami tetap baik, tetapi dalam hal itu berupa rahasia tak ada pertimbangan apa-apa."⁸⁰⁷

Kekuatan TII terus menurun, bahkan banyak dari para pendukung dana sudah beralih ke PRRI. Hasan ATRA, misalnya, yang memiliki perusahaan angkutan bus kota yang menghubungkan kota-kota antara Kutaradja dan Medan, tak dapat meladeni Resimen VII karena ia dalam PRRI dan aktif malah tak ada jaminan apa-apa lagi darinya tentang hal keuangan karena ia sudah membangga-banggakan PRRI.⁸⁰⁸

Sementara itu TII dengan sangat bersahaja meneruskan perjuangannya. Bahkan, dari operasi pencurian dan dakwah, TII kemudian berhasil memperoleh 180 pucuk senjata dari "tentara Pantjasila". Hasanoeddin membuat pernyataan bahwa segala senjata-senjata diserahkan kepada NBA-NII demikian orang-orangnya. Pada hari-hari berikutnya, dengan tanpa bantuan dan sokongan dana dari Hasan ATRA, TII

⁸⁰³ Kedudukan Haji Hasanuddin sebagai komandan Resimen Sumatera Timur diambil alih Teuku Saat; tetapi kebanyakan prajurit mengikuti Haji Hasanuddin Siregar. Adanya tokoh ini sekaligus menegaskan bahwa ini bukanlah pergerakan dari Aceh untuk Aceh, melainkan lebih sebagai dari Aceh untuk Indonesia, untuk umat Islam.

⁸⁰⁴ C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1991), hlm. 265.

⁸⁰⁵ Amelz, *Riwajat Singkat Atjeh....*, hlm. 61. Dan juga lihat M Noer el-Ibrahimi, *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001).

⁸⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 62.

⁸⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

⁸⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

mendapatkan kembali spiritnya dengan berhasilnya merampas 35 pucuk senjata, 1 bren gun, dan 1 mortir.⁸⁰⁹

Perolehan ini kemudian dikirim kepada Resimen VII dan Batalyon 175 TII. Pada 31 Januari 1959, di hadapan Amin Djalil dan Moe'in Hasjim, Wali Negara NII Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh mengingatkan kembali bahwa pekerjaan ini semata-mata untuk ibadat bukan karena yang lain, segala sesuatu oleh atasan tidak hanya dapat mendengar dari sebelah pihak. Dalam pertemuan ini saya harap supaya kepada saya dapat diberikan bahan-bahan untuk fikiran dan pertimbangan.

Segala apa yang terasa dalam hati harap dilaksanakan tetapi jangan hatap saya dapat memberi bantuan. Teungku Muhammad Daud Beureueh kemudian berkeluh atas banyaknya pengkhianatan dan yang menyerah: "saya hanya seorang diri dengan tak ada kawan."⁸¹⁰ Pada T&T, semua perintah sudah berjalan, tetapi pelaksanaan "sedemikian rupa". Artinya, banyak penyimpangan dan kemerosotan akhlak dari para prajurit. Kepala staf minta bubar kabinet, sudah bubar, kepal staf diangkat menjadi Meteri Perang dan kepala staf di ganti oleh Ibrahim Saleh, namun urusan tak juga beres. Kemudian Amin Jalil mengungkapkan idenya bahwa: (1) punya modal ; (2) minta perbaikan kemungkaran-kemungkaran.

Moei' Hajim juga menegaskan bahwa TII yang sudah masuk PRRI supaya kembali ke TII dan dilatih kembali, jangan sampai menyerah kepada "Pancasila". Wali Negara menyatakan dengan tegas, "Segala sesuatu sudah saya dengar dan akan saya salurkan dengan perantaraan Gazali ataupun dengan Hasunddin sendiri. Wakil saya pun sudah mengurus hal ini di luar Negeri. Modal yang dipinjam sudah bayar. Belanja untuk tentara selama 3 bulan Rp. 90.000.- Dapat diurus dengan TII saja sedang dengan PRRI tak dapat langsung. Amin Djalil sekarang saya anggap orang pusat, yang akan ditempatkan dimana perlu akan ditempatkan nanti. Moe'in juga kalau tak ada keberatan akan ditempatkan dipusat (disini), apa untuk mejadi pelatih atau lain, nanti akan ditentukan."⁸¹¹ Sementara itu, berbagai godaan terus berdatangan ke TII yang menyeruak dan menggerogoti moral prajurit misalnya Banta Chairullah dijanjikan akan diangkat sebagai agen tambang minyak.⁸¹²

Teungku Daud Beureueh pun kembali terpuruk oleh jatuhnya moral prajurit dan perwira TII yang mudah tergoda. Namun, ia, sebagaimana biasanya, tetap tegar dan keras hati berdiri menghadang setiap kerusakan yang ada. Sebagai Wali Negara, ia mengeluarkan komando umum sederhana: "Untuk menyelesaikan satu persatu pekerjaan yang sepenuh-penunya agak payah dan susah dan apa lagi saya hanya tinggal seorang diri saja dan didesak oleh lawan dan kawan. Untuk memperbaiki kerja ini supaya saya suka *dibantu dengan karena Allah*. Untuk Resiment VII Kuta Karang, saya berhak bicara dan beri perintah sedang untuk sabang mauroke cara pribadi boleh juga saya bicara dan sudah bicara dengan sumpah. Apabila satu-satu muslihat yang saya fikir harap supaya di ta'ati gunanya untuk menenteramkan tempat bukan karena curiga tetapi karena untuk tambah tenaga harap dipatuhi."⁸¹³

Akhirnya, dengan susah payah, semua bawahan yang hadir ketika itu, Jahja Ahmad, Ali Daud, dan lain-lain menjawab pasti: "Kami ta'at sepenuhnya, disamping itu kami minta izin untuk kembali sebentar menyelesaikan urusan terbengkalai."⁸¹⁴ Tiba-tiba, satu berita gembira dibawa oleh Hasanuddin Siregar yang sudah berhasil menarik kembali satu kompie TII yang tadinya masuk PRRI. Maka pada tanggal 4-5-1958 Hasanuddin Siregar meresmikan Batalyon 275. Hasanudin pun akhirnya harus juga

⁸⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

⁸¹⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

⁸¹¹ *Ibid.*, hlm. 64.

⁸¹² *Ibid.*, hlm. 64.

⁸¹³ *Ibid.* hlm. 64.

⁸¹⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

membereskan urusan-urusan infiltrasi yang sangat sulit dari kalangan PRRI. Sabang Merauke PRRI bahkan bertindak melampaui batas-batas hukum militer, mereka memakai lencana dan tanda pangkat TII dengan tak mendapat penetapan dari yang berwajib (kedapatan di Batalyon 435) sedang tingkah lakunya bertentangan dengan TII.⁸¹⁵

Wali Negara di tengah situasi perang yang tak menentu dan di tengah desersi serta sikap indisipliner, ia masih tegar sebagai seorang tentara Islam sejati. Wali Negara kemudian mengangkat dan memberikan pangkat-pangkat, masih dalam sikap tegar kemiliteran. Banta Abdullah jadi Kapten; Ali Daud Letnan Satu; Jahja Ahmad Letnan Dua; Amin Jalil Letnan; dan, Moe'in Hasyim Kapten.⁸¹⁶ Penetapan dibuat karena untuk menyegarkan urusan, bahkan kepada yang sudah berulang kali dipanggil tetapi tak datang juga diberikan pangkat baru. Daya tarik-menarik antara TII, TNI dan PRRI begitu hebatnya dan Wali Negara tak mau kehilangan para prajurit dan perwira handalannya. Menurut berita dari Amin Djalil, ia menyatakan bahwa Said Ali, adik Said Abu Bakar, agar ditarik dan jangan dilepaskan, jangan sampai sudah didakwa dan dibekali dengan latihan nanti akan diambil orang.⁸¹⁷

Kekuatan TII masih berputar, meski dengan energi yang tinggal separuhnya saja, pada tanggal 4 Januari 1959, Moe'in Hasyim, melakukan pemindahan perwira-perwira Resimen VII yang meskipun akan mengakibatkan yang tak baik bagi Resimen VII, tapi tetap harus dilakukan berdasarkan pertimbangan militer. Kesatuan Ali Daud akan kacau balau jika tidak diperbaharui struktur komando dan orang-orangnya. Batalyon 275 juga diusulkan untuk tak di bentuk lagi.⁸¹⁸

Di tengah camp persembunyiannya yang menjadi markas besar TII, Wali Negara masih memberikan semangat: "Pikiran saya sepenuhnya kepada pekerjaan yang sedang dilaksanakan, harap anak-anak saya demikian juga. Kedudukan saya demikian anak-anak saya adalah sebagai kode harap diturut. Sebagai pikiran saya untuk perbaiki sesuatu harus lebih dahulu memukau membentuk anak sendiri, tak mungkin satu perasaan tamu yang masuk, maka inilah sebabnya kami pindahkan anak-anak saya kemari supaya tidak dituduh orang macam-macam. Ada-ada saja orang yang mempengaruhinya. Cita-cita saya tak dapat saya harap kalau bukan pada orang Aceh. Resimen VII adalah tanggung jawab saja, yang mesti saya perbaiki. Dengan komandan Resimen VII akan saya bicara lebih lanjut. Dengan pemindahan anak-anak saya ini, Resimen VII sudah terang mesti diisi segera, jangan ada anggapan saya memberikan hukum, nanti akan ada urusan."⁸¹⁹ Suatu sikap militer yang penuh pertimbangan antropologis dalam menentukan hukum terhadap bawahannya.

Wali negara, Teungku Muhammad Daud Beureueh, dengan sikap yang tegar meski pasukannya digerogoti oleh para perwira yang sudah terpengaruh oleh pihak Republik, maupun yang terpengaruh oleh pihak PRRI, ia masih mengingat siapa dirinya dan siapa yang dipimpinnya. "Saya adalah orang yang menanggung 4 amanah," katanya suatu sore di gunung, "Pertama, Amanah Tuhan; kedua Amanah dari rakyat Aceh (ulama-ulama); ketiga Amanah dari sambutan rakyat sekitar; keempat Amanah dari tentara Pancasila yang sudah menyeberang kepada kita yaitu yatim piatu dan janda-janda."⁸²⁰ Luar biasa tegarnya pemimpin Islam yang satu ini. Sesudah itu pun ia masih sempat untuk mengurus pelaksanaan hukuman rajam, potong tangan, buang, dan bunuh. Hukum Islam selalu terlaksana dengan baik meskipun dalam keadaan perang. Kemungkaran dan tindak pidana asusila ditindak dengan memakai hukum-hukum ini.

⁸¹⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

⁸¹⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

⁸¹⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

⁸¹⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

⁸¹⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

⁸²⁰ *Ibid.*, hlm. 67.

Persetujuan Mei secara resmi diterima para pendukung Dewan Revolusi pada suatu konferensi besar yang diadakan dalam minggu pertama November 1959. Pada akhir bulan itu Nasution bertolak ke Pidie. Di sini ia menerima pemberian hormat lima ribu pendukung Dewan Revolusi.⁸²¹ Anggota Dewan Revolusi ini sebagian besar tidak mengetahui perkembangan di tingkat atas komando, sehingga memandang bahwa *cease fire* sudah merupakan persetujuan bersama yang dianggap ‘menguntungkan’.

Daud Beureueh tidak menerima persetujuan itu. Dia dan Hasan Aly melanjutkan bertempur. Menurut gubernur Aceh ketika itu A. Hasjmy, mereka masih dapat mengharapkan dukungan dari kira-kira tiga puluh persen pengikut pertamanya.⁸²² Seperti juga rekannya di Sulawesi Selatan—Kahar Muzakkar—Daud Beureueh bergabung dengan sisa-sisa pasukan PRR8Permesta. Mula-mula pasukannya bergerak bersama dengan sejumlah komandan PRRI bawahan dengan anak-anak buahnya. Kemudian diperkuat dengan satuan-satuan pejuang mujahidin yang dipimpin Mayor Nukum dan Kapten Hasanuddin, bekas kapten Polisi Militer.⁸²³ Kedua mereka ini ditawarkan kedudukan menteri oleh Daud Beureueh untuk mengisi jabatan yang lowong karena mereka yang membelot ke Dewan Revolusi.⁸²⁴

Perlu di catat bahwa pada tanggal 15 Maret 1959, DI mengalami friksi, yaitu : sebagian dipimpin oleh Hasan saleh, yang menamakan dirinya “ Dewan revolusi”. Adapun bagian dari DI yang setia kepada Teungku Muhammad daud Beureueh mempertahankan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Adapun Kabinet Hasan Ali yang setia kepada Teungku Muhammad daud Beureueh mengalami perubahan seperti di jelaskan di bawah.

Perdana Menteri merangkap

Menteri Keuangan/Kemakmuran : Hasan Ali

Menteri Dalam Negeri : Teungku Sulaiman
Daud

Menteri Penerangan : Teungku H. Affan

Menteri Pendidikan/Penerangan : Saleh Adri

Menteri Kehakiman : Teungku Zainal Abidin

Daud Beureueh tidak menerima persetujuan dari Konferensi Batee Kureng. Dia dan Hasan Aly melanjutkan bertempur. Menurut Gubernur Aceh ketika itu Ali Hasjmy, mereka masih dapat mengharapkan dukungan dari kira-kira tiga puluh persen pengikut pertamanya.⁸²⁵ Seperti juga rekannya di Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Kahar Muzakkar, Daud Beureueh bergabung dengan sisa-sisa pasukan PRRI/Permesta. Mula-mula pasukannya bergerak bersama dengan sejumlah komandan PRRI bawahan dengan anak-anak buahnya. Kemudian diperkuat dengan satuan-satuan pemberontak yang dipimpin Mayor Nukum dan Kapten Hasanuddin, bekas kapten Polisi Militer.⁸²⁶ Kedua mereka ini ditawarkan kedudukan menteri oleh Daud Beureueh untuk mengisi jabatan yang lowong karena mereka yang membelot ke Dewan Revolusi.⁸²⁷

⁸²¹ Abdul Murat Mat Jan, “Pemberontakan Darul Islam Aceh 1953-1959”, dalam *Akademika* No. 9, 1976, hlm. 43.

⁸²² Duta Masyarakat, 20-5-1960. Lihat juga C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*.

⁸²³ Kedua perwira ini termasuk dalam apa yang disebut OSM (Operasi Sabang Merauke), organisasi yang dipimpin Mayor Bojke Nainggolan (Boyke Nainggolan). Mulanya ini adalah nama operasi PRRI, dan ketika itu Medan diduduki kaum pemberontak selama satu hari pada Maret 1958.

⁸²⁴ Duta Masyarakat, 20-5-1959, 21-5-1959. Lihat juga C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*.

⁸²⁵ Duta Masyarakat, 20-5-1960. Van Dijk, *Op.cit*.

⁸²⁶ Kedua perwira ini termasuk dalam apa yang disebut OSM (Operasi Sabang Merauke), organisasi yang dipimpin Mayor Bojke Nainggolan (Boyke Nainggolan). Mulanya ini adalah nama operasi PRRI, dan ketika itu Medan diduduki kaum pemberontak selama satu hari pada Maret 1958.

⁸²⁷ Lihat C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*.

Pada waktu yang bersamaan dilakukan pembicaraan oleh pemimpin-pemimpin PRRI dan *Darul Islam* di Aceh. Ini menghasilkan proklamasi Republik Persatuan Indonesia (RPI) federal, Februari 1960, yang mewakili koalisi mereka yang kalah, orang-orang yang merasa dirinya bertempur dalam perang yang kalah di rimba.⁸²⁸ Di samping itu, RPI mempersatukan mereka yang di masa lalu berada dalam dua kubu yang berbeda dan paling-paling secara baik mereka memiliki simpati satu sama lain, dan secara jelek, mereka sama sekali bermusuhan. Tambahan lagi, Republik Persatuan Indonesia merupakan urusan Sumatera dan Sulawesi semata-mata. Ini membatalkan pengakuan yang masih dinyatakan oleh Negara Islam Indonesia dan PRRI/Permesta, bahwa wilayahnya meliputi seluruh Indonesia.

RPI terdiri dari sepuluh negara, semuanya kecuali dua negara yang berada di Sumatera dan Sulawesi. Aceh, sebagai Republik Islam Aceh (RIA), adalah salah satu dari enam negara Sumatera, dan Sulawesi Selatan satu dari dua negara di pulau itu.⁸²⁹ Selain dari delapan negara ini, barangkali sebagai tindakan mengambil hati terhadap RMS, terdapat Negara Maluku dan Negara Maluku Selatan. Secara menyolok tidak terdapat negara-negara di Jawa, seperti Negara Jawa Barat, bumi kelahiran gerakan *Darul Islam*, dan di Kalimantan Selatan, tempat Ibnu Hadjar beroperasi.⁸³⁰

Kedua pihak memasuki federasi baru ini dengan rasa enggan. Perundingan-perundingan sebelumnya antara pemimpin-pemimpin *Darul Islam* dan PRRI/Permesta hampir tak ada hasilnya. Sekalipun telah dijanjikan kerjasama dan dukungan militer, hal ini tidak pernah terlaksana. Dalam kedua pihak juga terdapat orang yang terangterangan menolak setiap bentuk kerja sama resmi. Di Sulawesi Selatan cumbu rayu Kahar Muzakkar dengan Permesta sebagian menjadi sebab menyerahnya Bahar Mattaliu, sementara di Aceh hubungan yang demikian merupakan salah satu faktor yang mendorong terbentuknya Dewan Revolusi. Pembelotan-pembelotan sekaligus memaksa kaum pemberontak *Darul Islam* yang tersisa untuk bekerja sama lebih erat dengan PRRI/Permesta.

Kaum pemberontak PRRI di Sumatera pada akhir 1959 terbagi dalam tiga kelompok yang berbeda, yang menganjurkan jalan yang berbedabeda. Satu kelompok ingin semata-mata melanjutkan PRRI, bagaimana pun sudah hampir tidak ada artinya lagi akibat aksi-aksi Angkatan Darat, Kelompok lain, dengan Zulkifli Lubis dan Maludin Simbolon sebagai wakil-wakil utamanya, menyetujui proklamasi Republik Indonesia Federal, sekalipun menentang kerja sama dengan *Darul Islam*. Faksi yang ketiga menyetujui bergabung dengan *Darul Islam*. Jurubicara utamanya adalah dua bekas perdana menteri, Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, dan politikus Indonesia yang berpengaruh, Sjafruddin Prawiranegara. Ketiga mereka ini lari dari Jakarta untuk bergabung dengan panglima-panglima daerah yang merasa tidak puas di Sumatera pada Desember 1957.⁸³¹

RPI tidak banyak harganya baik dalam arti militer atau pun arti politik. Persekutuan yang mengkhawatirkan antara orang-orang muslim seperti Daud Beureueh dan Kahar Muzakkar yang selama bertahun-tahun telah bertempur untuk menegakkan dan

⁸²⁸ Republik Persatuan Indonesia kadang-kadang juga disebut Negara Demokrasi Indonesia (NDI). Karena itu tentaranya, Tentara Persatuan Indonesia, kadang-kadang juga disebut Tentara Demokrasi Indonesia (TDI). Untuk Konstitusi RPI lihat Mudzakkar (t.t. :24-64).

⁸²⁹ Negara-negara Sumatera lainnya ialah: gabungan Negara Tapanuli dan Sumatera Timur dan Negara-negara Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Negara yang lain di Sulawesi adalah Negara Sulawesi Utara. Lihat juga C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*.

⁸³⁰ Hasan Mohammad Tiro, *The Political Future of the Indonesian Archipelago*, (Medan: Sumatera Berdaulat, 1965), hlm. 19. Hasan Tiro membela Republik Persatuan Indonesia dan menyatakan dirinya sebagai wakilnya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan Konfederasi Negara-negara Asia Tenggara yang terdiri dari Republik-republik Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Irian Jaya, Bali, dan Sunda. Walaupun mengabaikan Jawa dan bagian-bagian Nusa Tenggara lainnya dalam penyebutannya, dia menyatakan, Jawa juga harus merupakan bagian dari konfederasi.

⁸³¹ Lihat juga C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*. Hlm. 229.

mempertahankan Negara Islam Indonesia, orang-orang muslim yang terus-menerus dalam waktu yang lama menduduki jabatan-jabatan penting di Republik Indonesia, dan panglima-panglima militer seperti Maludin Simbolon Kawilarang, dan Warouw yang selama masa berikutnya telah memimpin aksi-aksi militer Republik Indonesia terhadap *Darul Islam*, dan beberapa orang dari mereka itu Kristen pula, sangatlah berbahaya. RPI mungkin mewakili, seperti yang dilukiskan Hasan Muhammad Tiro, suatu tindakan "untuk menjamin hak suci mereka untuk membentuk pemerintahan sendiri yang diingkari kediktatoran Soekarno di Jakarta yang memaksakan kolonialisme Jawa terhadap lebih dari selusin bangsa"⁸³², atau penolakan terhadap "kolonialisme baru, Jawa sawo matang"⁸³³, tetapi hanya dendam terhadap Soekarno dan orang Jawa sajalah yang merupakan persamaan mereka.

Akibatnya, RPI sangat singkat usianya. Pada April 1961 Maludin Simbolon dan seorang panglima militer lain, Achmad Husein, memisahkan diri dari RPI untuk membentuk Pemerintah Darurat Militer.⁸³⁴ Kemudian mereka mengeluarkan imbauan kepada para pemberontak untuk menghentikan perlawanan mereka dan menyerahkan diri pada Juni dan Juli. Pemimpin-pemimpin sipil menyusul setelah menerima janji diberi ampun oleh Soekarno.⁸³⁵ Sjafruddin Prawiranegara, perdana menteri kaum pemberontak, lalu menasihati para pengikutnya untuk menyerah, dia sendiri melapor kepada penguasa pada akhir Agustus.⁸³⁶

Ini berarti akhir yang sesungguhnya dari pemberontakan-pemberontakan, termasuk pemberontakan *Darul Islam* di Aceh. Di sini pada bulan-bulan sebelumnya banyak orang telah melaporkan diri. Keamanan sepenuhnya pulih di Aceh, Mei 1962, ketika Daud Beureueh pun menghentikan perlawanannya.

Untuk merayakan perubahan Aceh dari *dar al harb*, wilayah perang, ke *Dar al-salam*, daerah damai (untuk menggunakan ungkapan yang berlaku ketika itu), dan selanjutnya guna mengungkapkan pernyataan resmi akan persatuan Aceh yang telah pulih, diselenggarakan suatu upacara akbar pada akhir tahun itu, yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA), yang berlangsung di Blangpadang dari 18 sampai 22 Desember 1962. Puncak hasilnya adalah Ikrar Blangpadang, yang ditandatangani tujuh ratus orang Aceh terkemuka yang hadir. Mereka berjanji akan memelihara dan membina kerukunan serta memancarkan persatuan dan persahabatan abadi.⁸³⁷

Sesudah itu Aceh tetap tenang selama kira-kira lima belas tahun. Pada awal 1977, ketika diberitakan lagi tentang kegiatan-kegiatan *Darul Islam* juga di Jawa dan bagian-bagian lain di Sumatera, Hasan Muhammad Tiro memproklamasikan Aceh sebagai negara merdeka. Dengan menamakan dirinya Ketua Front Pembebasan Nasional dan Kepala Negara, ia kembali ke Aceh untuk secara pribadi memimpin perjuangan Gerakan Aceh Merdeka.***

⁸³² Hasan Muhammad Tiro, *Neo-Colonialism in Indonesia (How a New Colonialism has been established under the cover of the cry of "anti-colonialism")*, Naskah Pidato pada Sidang Umum XVI PBB Oleh Wakil Republik Federasi Indonesia di PBB, (New York: 1961), hlm. 1..

⁸³³ Hasan Muhammad Tiro, *The Political Future of the Indonesian Archipelago*, (Medan: Sumatera Berdaulat, 1965), hlm. 1.

⁸³⁴ Letnan Kolonel Achmad Husein memainkan peranan penting dalam peristiwa-peristiwa sampai kepada pemberontakan PRRI/Permesta. Dia menjadi Ketua Dewan Banteng di Sumatera Tengah dan pada Februari 1958 mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Republik Pusat. Penolakan atas usul ini menimbulkan proklamasi PRRI. Letnan Kolonel Achmad Husein memainkan peranan penting dalam peristiwa-peristiwa sampai kepada pemberontakan PRRI/Permesta. Dia menjadi Ketua Dewan Banteng di Sumatera Tengah dan pada Februari 1958 mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Republik Pusat. Penolakan atas usul ini menimbulkan proklamasi PRRI. Herbert Feith dan Daniel Lev, "The End of Indonesian rebellion", dalam *Pacific Affairs*, 36, No. 1, 1963, hlm. 43.

⁸³⁵ Peraturan Presiden no.13/1961.

⁸³⁶ Salah seorang dari yang melapor bersama Sjafruddin Prawiranegara ialah Amelz.

⁸³⁷ Lihat C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan..*



BAB 10

IKRAR LAMTEH

PADA tanggal 8 April 1957 terjadi sebuah pertemuan antara Pemerintah (yang diwakili oleh KDMA (Komando Daerah Militer Aceh dan Pemerintah Daerah) dengan elite pemimpin gerakan Darul Islam Aceh di Lamteh. Lamteh adalah sebuah tempat netral di Aceh Besar. Pertemuan antara “musuh dan kawan” dalam perang ini sebenarnya berlangsung tanpa sepengetahuan Teungku Daud Beureueh. Beberapa perwira tinggi dan menengah TII —yang sulit menghadapi sikap “keras” Teungku Daud Beureueh—akhirnya meretas jalan sendiri menuju ke perundingan. Pertemuan ini menghasilkan Ikrar Lamteh yang berisikan 3 prinsip:

- (1) Sama-sama berusaha untuk memajukan agama Islam.
- (2) Sama-sama berikhtiar untuk membangun Aceh dalam arti yang seluas-luasnya.
- (3) Sama-sama bekerja untuk memberikan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat dan masyarakat Aceh.⁸³⁸

⁸³⁸ JarahDam-I, *Dua Windhu Kodam I/Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Sejarah Militer I Kodam Iskandar Muda, 1972), hlm. 244.

Ikrar ini ditandatangani oleh Letkol Sjamaun Gaharu (Komandan KDMA), Ali Hasjmy (Gubernur Kepala Daerah Propinsi Aceh), M. Insja (Kepala Kepolisian Aceh), Mayor Teuku Hamzah (Kepala Staf KDMA); dan dari unsur Darul Islam ditandatangani oleh Hasan Aly, Hasan Saleh dan Ishak Amin.⁸³⁹ Ikrar Lamteh ini sendiri belum bisa menjamin suatu “gencatan senjata” (*cease-fire*) secara menyeluruh, karena beberapa kalangan DI yang masih berada di gunung belum bisa menerima perjanjian (*truce*) yang dianggap tidak seimbang ini. Sjamaun Gaharu bebas melaksanakan rencananya. Bersama dengan gubernur yang baru diangkat, Ali Hasjmy, dan dengan sokongan tegas Nasution, ia menempuh politik kebijaksanaan perukunan. Pada pertengahan April 1957, pertengahan puasa, diadakan perundingan dengan sejumlah pemimpin *Darul Islam* terkemuka di Lamteh, sebuah desa beberapa kilometer dari Aceh. Bulan puasa (Bulan Ramadhan) adalah bulan yang tepat dan sengaja dipilih sebagai bulan penuh rahmat dan maghfirah untuk membuat perundingan dan pembicaraan damai. Pembicaraan yang mencapai puncaknya dalam Ikrar Lamteh ini tidak hanya di dalamnya keduanya berjanji masing-masing untuk memajukan Islam, mendorong pembangunan Aceh dalam arti kata yang seluas-luasnya, dan berusaha mendatangkan kemakmuran dan keamanan kepada rakyat dan masyarakat Aceh, melainkan juga sebuah upaya strategis membuka kontak dengan para tokoh pergerakan DI Aceh. Di pihak Republik piagam itu ditandatangani Letkol Sjammaun Gaharu dan kepala stafnya, Mayor Teuku Hamzah, Ali Hasjmy, dan Kepala Polisi untuk Aceh, M. Insja bukan hanya menunjukkan sebuah perhatian serius, namun juga untuk mendemonstrasikan betapa pentingnya memakai cara-cara non-militer dalam penyelesaian konflik. Pemimpin-pemimpin *Darul Islam* yang menandatangani adalah Hasan Aly, Hasan Saleh, dan Ishak Amin seperti terdorong untuk “mempertimbangkan” tawaran-tawaran sehingga akan ada suatu jeda bagi militer untuk menarik nafas panjang guna mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang terburuk sekali pun. Kemudian, disertai Ali Hasjmy, dan M. Insja, Sjammaun Gaharu juga menjumpai Daud Beureueh, yang pada waktu itu masih tidak ingin mendengarkan penyelesaian.⁸⁴⁰ Teungku Daud Beureueh adalah seorang petempur sejati, medan perang lebih disukainya ketimbang rebah-rebahan berleha-leha melihat hancurnya moral masyarakat Aceh. Abu Beureueh, demikian ia biasa dipanggil, adalah sosok yang tegas dan keras, seradikal SM kartosoewirjo.

Sebagai tindak lanjut dari Ikrar Lamteh ini, pada tanggal 9 April 1957, Komandan KDMA mengeluarkan perintah penghentian pertempuran dengan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Aceh.⁸⁴¹ Kemudian Sjamaun Gaharu selaku KDMA mengirim 2 rombongan utusan ke seluruh Aceh untuk mengkadakan pendekatan dengan para pemimpin DI-TII di seluruh kabupaten. Rombongan utusan ini terbagi menjadi dua kelompok: (1) kelompok pertama menjalankan misi sosialisasi damai ini di sepanjang pantai barat dan selatan yang dipimpin oleh Kapten Usman Nyak Gade, bertugas mengunjungi para tokoh pergerakan DI di Aceh Barat dan Aceh Selatan; (2) kelompok kedua menjalankan misi sosialisasi sekaligus penetrasi damai ke sepanjang pantai utara (Aceh Utara), timur (Aceh Timur) dan ke Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapten Ahmad Rivai Harahap.⁸⁴²

Belum cukup dengan upaya kalangan militer mendatangi kaum pergerakan DI di berbagai daerah, ditambah lagi dengan sejumlah kunjungan kerja para menteri ke Aceh. Pada tanggal 19 Oktober 1957, Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Ir. H. Djuanda, mengunjungi Aceh dengan sejumlah menteri lainnya: Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Penghubung Antar Daerah.⁸⁴³ Rombongan ini mendatangi Aceh dan mengunjungi seluruh plosok Aceh sambil melihat akibat-akibat yang ditimbulkan dari

⁸³⁹ *Ibid.*

⁸⁴⁰ Abdul Murat Mat Jan, “Gerakan Darul Islam di Aceh 1953-1959”, dalam *Akademika* 8, 1976. hlm. 40-41.

⁸⁴¹ Jarah Dam-I, *Dua Windhu....*, hlm. 245.

⁸⁴² *Ibid.*, hlm. 245.

⁸⁴³ Jarah Dam-I, *Dua Windhu....*, hlm. 245.

konflik antara Pemerintah dengan pihak Darul Islam Aceh di bawah Teungku Daud Beureueh.

Melihat situasi yang berkembang semakin kondusif bagi keamanan, maka pada tanggal 22 Desember 1957 dilakukanlah sebuah Rapat Lengkap KDMA untuk membahas hasil-hasil pencapaian di bidang keamanan. Keamanan menjadi barang abstrak yang sangat mahal harganya di Aceh selama “pemberontakan” meletus. Ada satu perubahan besar paradigma militer dalam memahami gejolak masyarakat di dalam rapat lengkap KDMA ini. Panitia merasakan suasana kegairahan dan persaudaraan.⁸⁴⁴ Ada dua kesimpulan teoritis penting yang diambil dalam rapat ini, yaitu perlunya pemahaman faktor psikologis masyarakat dan perlunya data dan pemahaman terus-menerus (*continuum*) tentang catatan etnologis⁸⁴⁵ dan etnografis masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dan pemulihan keamanan. Meskipun militer memiliki logika sendiri dalam menghadapi setiap situasi, namun ilmu pengetahuan antropologis sangat mutlak diperlukan.

Khususnya untuk masyarakat Aceh dengan karakter budaya yang unik faktor-faktor etnologis dan psikologis mutlak tidak bisa diabaikan sama sekali. Dalam rapat ini, bermodal perspektif teoritis antropologik tersebut, maka panitia rapat —yang diketuai oleh Mayor Teuku Manyak dan Kapten Abdullah Sani— berkesimpulan bahwa perlunya mengharap Pemerintah Daerah dan KDMA melanjutkan terus upaya membuka kontak dan hubungan secara formil dengan DI.

Namun, Ikrar Lamteh yang sudah ditanda-tangani ini sesungguhnya masih merupakan *fragile agreement* karena hanya berisi semangat tanpa ada aturan-aturan dengan kesepakatan yang mengikat. Ikrar ini hanya merupakan suatu ekspresi emosional tentang perlunya gencatan senjata, suatu periode jeda perang setelah melewati sejumlah panjang episode perang yang berat. Pada tahun 1958, terjadi suatu peristiwa yang merusak kesepakatan awal Ikrar Lamteh yang adanya beberapa usaha memasukkan senjata ilegal ke Aceh oleh tokoh-tokoh yang menyeleweng di Sumatera Tengah. Peristiwa ini juga melibatkan beberapa tokoh daerah Aceh yang dulunya telah menyetujui Ikrar Lamteh.⁸⁴⁶

Sjammaun Gaharu sebagai KDMA masih berketetapan hati untuk mempertahankan dengan segala daya yang ada pada garis-garis Konsepsi Pinsipil-Bidjaksana yang sudah dirumuskannya dulu dan dianggap sinkron dengan Ikrar Lamteh. Sesuai dengan kebijaksanaannya, yang dinamakannya Konsepsi prinsipiel dan bijaksana, Sjammaun Gaharu bersama dengan Ali Hasjmy melanjutkan usaha-usahanya mencari penyelesaian. Keduanya tetap berhubungan dengan pemimpin-pemimpin *Darul Islam* dan mengunjungi Jakarta berkali-kali untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat melangkah dalam perundingan mereka dengan kaum pemberontak. Pada September 1957 Perdana Menteri Djuanda mengatakan kepada mereka, mereka boleh memberikan konsep otonomi daerah dengan penafsiran yang “seluas mungkin”, bahkan sampai kepada pengertian bahwa Aceh diperlakukan sebagai negara tersendiri, asal saja mereka tetap dalam batas-batas UUDS Indonesia yang masih mengakui suatu republik kesatuan.⁸⁴⁷

Tetapi tak tercapai penyelesaian pada waktu itu, sebagiannya ini disebabkan kenyataan bahwa pemberontakan PRRI-Permesta telah menyita perhatian kalangan militer dan kalangan DI, dan sebagiannya karena adanya dalam Negara Islam Aceh suatu faksi yang amat kuat, yang dipimpin Daud Beureueh, yang tidak ingin mendengarkan kompromi apa pun juga dan berpegang pada prinsip perundingan resmi antara Negara Islam Aceh dan Republik Indonesia. Bagi teungku Beureueh, Ikrar

⁸⁴⁴ JarahDam-I, *Dua Windhu....*, hlm. 245.

⁸⁴⁵ *Loc.cit.*

⁸⁴⁶ JarahDam-I, *Dua Windhu....*, hlm. 245.

⁸⁴⁷ Ali Hasjmy, *Almanak Umum 1959*, (Banda Aceh: Atjeh Press Service, 1959), hlm. 57-58.

Lamteh tetap bersemayam di Lamteh, tidak di Lammeulo dan Beureuneun. Namun, sikap pendirian Teungku Daud Beureueh ini makin hari makin ditentang oleh para stafnya di jajaran lingkaran pertama kekuasaan negara Aceh yang tengah berjuang ini. Khususnya di dalam Tentara Islam Indonesia Aceh terdapat banyak yang memikirkan untuk menyerah karena banyak konsesi yang ditawarkan jika turun. Sementara Teungku Daud Beureueh tak bergeming dengan semua tawaran-tawaran ini. Bagi Abu Beureueh, biar senadainya diberikan kebun teh di tangan kirinya dan galon bensin di tangan kanannya, dia akan terus memperjuangkan negara Islam Aceh yang sudah dimulainya hingga akhir. Namun, spirit gerilya tidak semata-mata cukup dimiliki oleh pemimpinnya saja, melainkan para bawahan dan pendukungnya juga harus terus disiram dengan *tilawah-tilawah* yang membangkitkan semangat. Kelompok ini dipimpin Hasan Saleh, Panglima Divisi Tengku Chik Ditiro dan Kepala Staf Tentara Islam. Ia menuduh Daud Beureueh berusaha menjerumuskan Aceh ke dalam suatu perang baru tanpa memikirkan nasib prajurit biasa dan rakyat pada umumnya yang harus menanggung akibat-akibatnya.⁸⁴⁸

Akibatnya pertempuran sangat banyak berkurang sesudah Ikrar Lamteh. Namun, belum juga tampak akhir pemberontakan. Dua tahun lamanya lagi barulah lawan-lawan Daud Beureueh bulat hatinya dan benar-benar memisahkan diri dari padanya.

Hal ini terjadi pada Maret 1959, ketika, dengan menuduh Daud Beureueh bertindak sewenang-wenang, Hasan Saleh dan pendukung-pendukungnya menggulingkannya. Mereka membentuk pemerintah mereka sendiri pada suatu pertemuan di Pidie yang dihadiri kira-kira seribu orang pada 15 Maret, mereka yang berlainan pendapat ini menamakan dirinya Gerakan Revolusioner Islam Indonesia, kemudian membentuk Dewan Revolusi (Negara Bagian Aceh). Ketuanya adalah Abdul Gani Usman, dan wakil ketuanya adalah Hasan Saleh, dengan Abdul Gani Mutiara sebagai sekretaris umum dan kepala Bagian Penerangan. Sebagai anggota termasuk pemimpin-pemimpin *Darul Islam* terkemuka seperti Amir Husin al Mudjahid, T.A. Hasan, Ibrahim Saleh, T.M. Amin, dan Husin Jusuf.

Langkah pertama Abdul Gani Usman dalam kedudukannya sebagai ketua Dewan Revolusi adalah membuat pengumuman yang menyatakan, jabatan kepala negara untuk sementara dilaksanakan Dewan Pertimbangan Revolusi, yang diketuai Amir Husin al Mudjahid. Pada waktu yang bersamaan ia memerintahkan para pengikutnya menghentikan pemungutan pajak di desa-desa, disertai ancaman terhadap siapa saja yang masih terus melakukannya. Mengenai Tentara Islam, Hasan Saleh membatasi gerak para prajurit Divisi Tengku Chik Ditiro dalam asrama mereka, dengan menarik mereka dari desa-desa tempat mereka ditempatkan. Selanjutnya ia mengumumkan, Dewan Revolusi akan mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk membicarakan berakhirnya pemberontakan dengan para penguasa Republik. Pada bulan-bulan berikutnya Dewan Revolusi diikuti pasukan dari Aceh Barat yang dipimpin T.R. Idris dan Komandan Resimen VII Sumatera Timur, Haji Hasanuddin.⁸⁴⁹ Pada Agustus, Abdul Gani Mutiara menyatakan Dewan revolusi didukung 25.000 anggota *Darul Islam*.⁸⁵⁰

Perkembangan-perkembangan ini memulai serangkaian perundingan baru. Pada awal Mei Sjammaun Gaharu dan A. Hasjmy bertolak lagi ke Jakarta, kali ini atas undangan Perdana Menteri Djuanda. Mereka menjelaskan situasi yang baru kepada Kabinet dan kepada Presiden Soekarno serta memberikan sejumlah anjuran tentang langkah-langkah yang harus diambil sehubungan dengan ini. Kemudian Juanda mengeluarkan keputusan⁸⁵¹ yang menyatakan, sejak 26 Mei Provinsi Aceh dapat

⁸⁴⁸ Abdul Murat Mat Jan, "Gerakan Darul Islam di Aceh 1953-1959", dalam *Akademika* 8, 1976. hlm. 41-42.

⁸⁴⁹ Kedudukan Haji Hasanuddin sebagai komandan Resimen Sumatera Timur diambil alih Teuku Saat; tetapi kebanyakan prajurit mengikuti Hasanuddin. C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*.

⁸⁵⁰ Van Dijk, *Ibid*.

⁸⁵¹ Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia no. 1 | Miss81959.

menamakan dirinya Daerah Istimewa Aceh. Ini menempatkan Aceh dalam kedudukan yang agak khas, karena dari provinsi-provinsi yang lain hanyalah ibukota, Jakarta, dan Yogyakarta yang memiliki status istimewa. Kepada Aceh selanjutnya dijanjikan otonomi yang seluas mungkin, terutama dalam bidang agama, pendidikan dan hukum adat, tetapi dengan ketentuan, seperti dinyatakan Djuanda dalam keputusannya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak mula jihad suci menegakkan Negara Islam Amin memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang membela perundingan dengan pejuang mujahidin sebagai cara memperoleh penyelesaian damai.⁸⁵² Berpegang pada prinsip ini, ia melakukan kontak dengan Said Abubakar. Selanjutnya ia mengadakan surat-menyurat dengan pemimpin-pemimpin *Darul Islam* secara diam-diam, tanpa lebih dahulu memberitahukan kepada Pemerintah Pusat, Desember 1953. Dalam surat-surat ini—yang dinyatakannya sendiri dengan tegas, ia menulis sebagai seorang warga negara pribadi — ia menyatakan, menyetujui tujuan pejuang mujahidin yang merupakan cita-cita semua umat muslim dan ia merasa peristiwa-peristiwa yang telah mencetuskan jihad suci menegakkan Negara Islam adalah akibat salah paham. Tetapi cara-cara yang dipilih kaum pejuang mujahidin tidak disetujui semua umat muslim. Karena itu ia meminta kaum pejuang mujahidin mengemukakan gagasan bagaimana mengakhiri pertumpahan darah.⁸⁵³

Amin menerima jawaban dari Husin Jusuf dan Daud Beureueh. Keduanya menggarisbawahi kewajiban setiap muslim Indonesia untuk turut serta dalam jihad mempertahankan Negara Islam Indonesia, yang demikian mereka kemukakan, telah menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Lalu mereka menyatakan, konflik dapat berakhir segera sesudah Pemerintah Republik memperhatikan hasrat masyarakat Islam. Mereka menyangkal, revolusi sosial atau keinginan memperoleh otonomi mengilhami jihad suci menegakkan Negara Islam mereka, dengan menegaskan, penyebab pangkalnya terletak dalam agama. Mereka tidak sependapat dengan pandangan Amin bahwa kekacauan yang terjadi adalah disebabkan kesalahpahaman. Politik kebijaksanaan yang dijalankan Pemerintah Republik, reaksi Pemerintah terhadap Peristiwa Cumbok dan terhadap tuntutan otonomi, reorganisasi Tentara di Aceh, dan sebagainya merupakan cukup bukti kebalikannya..⁸⁵⁴

Amin menjawab pada Agustus 1954. Dengan menolak menemui pemimpin-pemimpin gerilya ini sendiri, ia mengirim suatu rancangan surat untuk ditandatangani Daud Beureueh dan Hasan Aly yang menyatakan, keduanya berjanji akan mengakhiri perlawanan mereka, meletakkan senjata mereka, dan akan menemui wakil-wakil Pemerintah Republik bila yang belakangan ini bersedia mengakui hak mereka untuk memperjuangkan Negara Islam bukan dengan jalan kekerasan, memberikan lebih banyak perhatian demi kepentingan Aceh di masa depan dan memberikan amnesti kepada para pejuang mujahidin. Bila Daud Beureueh dan Hasan Aly menandatangani rancangan ini, ia, Amin, pribadi akan ke Jakarta untuk memperjuangkan agar persetujuan ini diterima Pemerintah.

Tetapi Daud Beureueh dan Hasan Aly tidak menandatangani. Sebaliknya mereka merancang suatu peraturan pemerintah untuk ditandatangani Ali Sastroamidjojo yang mereka minta dibawa Amin ke Jakarta. Di dalamnya dinyatakan, Pemerintah Republik berusaha membuka perundingan dengan pendiri-pendiri Negara Islam Indonesia di Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi, dan melindungi serta membantu para anggota delegasi Negara Islam selama perundingan-perundingan ini berlangsung. Dalam surat pengiringnya, tertanggal 5 Oktober 1954, mereka menjelaskan, apa yang mereka inginkan bukanlah amnesti tetapi perundingan.⁸⁵⁵

⁸⁵² Lihat C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan...*, hlm.67.

⁸⁵³ A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin*, (Banda Aceh, 1956), hlm. 126, 129-130.

⁸⁵⁴ Gelanggang, *Ibid*.

⁸⁵⁵ Gelanggang, *Ibid*, hlm. 157-167.

Semua surat ini dikirim Amin ke Jakarta, tetapi Pemerintah tidak memberi reaksi. Kemudian surat-menyuratnya untuk sementara dihentikan, dan baru dimulai lagi sesudah Kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh, dan digantikan pemerintah baru yang dikepalai Burhanuddin Harahap dari Masyumi pada Agustus 1955 (Amin 1956:205).

Pembentukan suatu kabinet baru di bawah pimpinan perdana menteri Masyumi, dan di dalamnya PNI tidak terwakili, membuat lebih besar terdapat kemungkinan perukunan. Di samping itu, Burhanuddin Harahap diketahui menyetujui mengakhiri jihad suci menegakkan Negara Islam dengan cara damai. Sudah beberapa bulan sebelumnya dia sependapat dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Kolonel Zulkifli Lubis—Wakil Kepala Staf Angkatan Darat yang kontroversial ketika itu—segala sesuatu harus dilakukan untuk mendapat penyelesaian politik bagi persoalan berbagai jihad suci menegakkan Negara Islam ini.⁸⁵⁶ Selanjutnya ia meminta anak Daud Beureueh, Hasballah Daud, pergi ke Aceh Untuk menyampaikan penawaran kepada bapaknya amnesti dan abolisi jika bersedia menghentikan perlawanan. Hasballah Daud meninggalkan Jakarta pada 5 Juli 1955 dengan surat dari Hatta dan dari Kementerian Penerangan dalam sakunya, dan disertai Abdullah Arif, seorang pegawai Kementerian Penerangan, melewati jalan laut dan darat yang sangat melelahkan. Baru pada akhir Agustus 1955 dia kembali ke Jakarta. Baik Kabinet Ali Sastroamidjojo maupun Kabinet Burhanuddin Harahap tidak secara resmi bertanggung jawab untuk perjalanan ini, dan keduanya menekankan, hal ini merupakan prakarsa pribadi. Namun, Abdullah Arif pergi ke Aceh sekali lagi untuk menemui Hasan Aly pada Februari 1956. Upaya ini pun sia-sia. Pemimpin-pemimpin Islam di Aceh belum tergoda oleh tawaran amnesti, sedangkan Republik menolak tuntutan pejuang mujahidin untuk berunding atas dasar pemerintah dengan pemerintah. Bagi kaum Republik, DI bukanlah sebuah pemerintahan, melainkan sebuah organisasi bawah tanah belaka yang kantor pun tak punya apalagi mesin ketik. Upaya untuk menengahi, yang tidak jelas sejauh mana hal ini disokong Pemerintah Republik di Jakarta, hanyalah menjengkelkan pemimpin-pemimpin pejuang mujahidin. Mereka ini tetap bersedia berunding, tetapi hanya atas dasar resmi: antara sesama pihak pemerintah NII Aceh dengan pihak Republik Indonesia.

Usul-usul Pemerintah Republik dibahas para pemimpin *Darul Islam* di Batee Kureng. Sebenarnya inilah yang menjadi penyebab langsung kehendak Daud Beureueh untuk berunding dengan penasihat-penasihatnya yang akrab. Hasil kongkret pembicaraan ini, seperti dirumuskan dalam salah satu butir program kabinet baru adalah ketetapan bahwa harus diusahakan menyelesaikan konflik dengan "pemerintah Pancasila" tidak hanya dengan kekuatan senjata melainkan juga dengan cara politik.

Karena itu Hasan Aly mengirim surat pada bulan November kepada S.M. Amin (Gubernur Sumatera Utara) yang isinya mendesak agar Pemerintah Republik secara terbuka menyatakan pendiriannya dan bahwa semua perundingan selajutnya akan dilakukan delegasi resmi dari kedua pihak, dan tidak lagi informal. Hanyalah bila ada alasan-alasan yang mendesak yang mencegah Pemerintah Republik berbuat demikian. Hasan Aly bersedia melanjutkan pembicaraan informal. Tetapi dalam hal itu Pemerintah Republik hendaknya memberitahukannya secepat mungkin bahwa terdapat alasan-alasan yang mendesak demikian.⁸⁵⁷

Konperensi Batee Kureng merupakan salah satu tanda yang paling tidak mungkin diragukan lagi akan adanya perselisihan pendapat di kalangan para pejuang mujahidin *Darul Islam* di Aceh. Ini membuktikan ketidakpuasan akan cara semua keputusan dibuat Daud Beureueh dengan sekelompok kecil penasihat, dan tunduknya urusan sipil

⁸⁵⁶ Zulkifli Lubis dan Burhanuddin Harahap juga terlibat dalam upaya mengadakan hubungan dengan Kartosuwirjo. Ini menjadi jelas pada Februari 1956, ketika seorang utusan—yang membawa surat-surat untuk Kartosuwirjo yang memintanya agar menyetujui gencatan senjata— telah dididuk oleh pihak keamanan Republik. *Pikiran Rakyat*, 4 Februari 1956.

⁸⁵⁷ S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 301.

kepada militer. Masyarakat pun mengathui adanya perpecahan di antara mereka, meskipun semuanya kelihat sangat solid.⁸⁵⁸

Walaupun pasti terdapat persaingan dan pertentangan di kalangan pemimpin-pemimpin Negara Islam di Aceh, berbeda dengan daerahdaerah lain, tampaknya di sini ini tidak sampai mengakibatkan sering terjadi bentrokan antara komandan pasukan.⁸⁵⁹ Dengan penggeseran beberapa pemimpin angkatan pertama dari pusat kekuasaan pada tahun-tahun pertama, konperensi Batee Kureng mengadakan perubahan tertentu. Kendatipun laporan-laporan tentang konflik dan perjuangan untuk kekuasaan antara pucuk pimpinan—nama Daud Beureueh, Hasan Saleh, dan Husin Jusuf paling sering muncul—pada umumnya terdapat persatuan dan kekompakan yang kuat di daerah itu.⁸⁶⁰ Pemusatan kekuasaan dan lenyapnya pemimpin-pemimpin tertentu terjadi pada 1954, ketika Dewan Syura, Majelis Syura, dan Dewan Militer dibubarkan. Ketika itu Husin Jusuf kehilangan jabatannya sebagai Kepala Staf Divisi Tengku Chik Ditiro beralih kepada Amir Husin al Mujahid. Walau pun ia diangkat sebagai koordinator keamanan untuk Aceh, kenaikan ini berarti kehilangan kekuasaan atas sebagian besar pasukan tempur. Hal yang sama terjadi kemudian pada penggantinya, Amir Husin al Mudjahid, yang digantikan oleh Hasan Aly.

Di samping itu terdapat perlawanan terhadap reaksi Daud Beureueh mengenai tawaran dari pihak Republik Indonesia. Sementara orang tidak menyetujui penolakannya yang terang-terangan akan kemungkinan tawaran amnesti, dan khususnya dalam Tentara Islam yang sebenarnya, ada sekelompok besar yang kuat menyetujui menerima tawaran yang demikian.⁸⁶¹

Mengingat hal yang di atas dan banyaknya jumlah prajurit yang sudah kembali ke desa mereka, salah seorang komandan daerah, Iljas Leubee dari Aceh Tengah, mengeluarkan komunike pada November 1955 yang mengumumkan, tidak akan diambil tindakan terhadap para prajurit resimennya yang pulang ke rumah, asal saja ini tidak merugikan perjuangan.⁸⁶² Dia sendiri pun diminta melapor kepada para penguasa, katanya, tetapi ia jngin menantikan hasil pemilihan umum. Dia memikirkan akan melapor demikian karena kabinet yang memerintah sekarang, Kabinet Burhanuddin Harahap, ideologinya berdekatan dengan cita-cita perjuangan di Aceh.⁸⁶³

Pada umumnya sikap kaum pemberonak *Darul Islam* di Aceh terhadap pemilihan umum lunak. Mula-mula, ketika jihad suci menegakkan Negara Islam meletus, sikap mereka terhadap ini mendua. Di satu pihak mereka menuduh Pemerintah Republik berusaha membiarkan mereka menunggu tanpa batas waktu, sedangkan di pihak lain pemilihan umum mereka cap sebagai alat Pemerintah Pusat untuk melakukan kehendaknya. Kini ketika pemilihan umum telah di ambang pintu, mereka tidak melakukan apa pun untuk merintanginya.⁸⁶⁴

Hasil pemilihan umum yang memuaskan di Aceh, yaitu Masyumi memperoleh dua pertiga jumlah suara, memberi mereka yang menyetujui diakhirinya jihad suci menegakkan Negara Islam alasan lain untuk menyokong sikap mereka. Kasus mereka

⁸⁵⁸ *Pikiran Rakyat*, 14 Februari 1956.

⁸⁵⁹ Namun, terdapat beberapa laporan tentang tindakan disiplin yang diambil terhadap komandan-komandan *Darul Islam* setempat. Di Aceh Utara umpamanya, salah seorang pembantu Hasan Saleh, Usman Balo, lari ke Pidie ketika mengetahui, ia akan dihukum karena kekejamannya. Bagian Dokumentasi Deppen, *Sekitar Peristiwa Berdarah Daud Beureu'eh*, vol. I, II, III, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, 1953), hlm.18.

⁸⁶⁰ *Pikiran Rakyat*, 15 Februari 1956.

⁸⁶¹ Abdul Murat Mat Jan, "GerakanDarul Islam di Aceh 1953-1959", dalam *Akademika* 8, 1976. hlm. 39-40.

⁸⁶² Lihat juga S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 198-200.

⁸⁶³ Pengumuman Pemrintah 20 November 1955.

⁸⁶⁴ Herbert Feith, *The Indonesia Election of 1955*, (Ithaca, New York: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, Interim Report Series, 1971), hlm. 42.

lebih diperkukuh ketika, kali ini di bawah Kabinet Ali Satroamidjojo lagi; pada akhir 1956 suatu rancangan undang-undang disahkan, yang memberikan status provinsi otonom kepada Aceh. Undang-undang ini berlaku sejak Januari 1957. A. Hasjmy pemimpin Pemuda PUSA Aceh Besar sebelum Perang dan bekas Ketua BPI/Pesindo, menjadi gubernur pertama provinsi ini.

Namun, faktor lain yang menyokong diakhirinya permusuhan adalah di bidang militer pun diangkat seorang bekas pemimpin gerilya menjadi pimpinan tertinggi di Aceh. Dia adalah Sjammaun Gaharu, panglima Tentara Republik di Aceh untuk masa singkat selama revolusi dan salah seorang penandatanganan ultimatum terhadap uleebalang di Lammeulo (sebelum jabatannya diserahkan kepada Amir Husin al Mudjahid).

Pada waktu yang bersamaan dilakukan pembicaraan oleh pemimpin-pemimpin PRRI dan *Darul Islam* di Aceh. Ini menghasilkan proklamasi Republik Persatuan Indonesia (RPI) federal, Februari 1960, yang mewakili koalisi mereka yang kalah, orang-orang yang merasa dirinya bertempur dalam perang yang kalah di rimba.⁸⁶⁵ Di samping itu, RPI mempersatukan mereka yang di masa lalu berada dalam dua kubu yang berbeda dan paling-paling secara baik mereka memiliki simpati satu sama lain, dan secara jelek, mereka sama sekali bermusuhan. Tambahan lagi, Republik Persatuan Indonesia merupakan urusan Sumatera dan Sulawesi semata-mata. Ini membatalkan pengakuan yang masih dinyatakan oleh Negara Islam Indonesia dan PRRI/Permesta, bahwa wilayahnya meliputi seluruh Indonesia.

RPI terdiri dari sepuluh negara, semuanya kecuali dua negara yang berada di Sumatera dan Sulawesi. Aceh, sebagai Republik Islam Aceh (RIA), adalah salah satu dari enam negara Sumatera, dan Sulawesi Selatan satu dari dua negara di pulau itu.⁸⁶⁶ Selain dari delapan negara ini, barangkali sebagai tindakan mengambil hati terhadap RMS, terdapat Negara Maluku dan Negara Maluku Selatan. Secara menyolok tidak terdapat negara-negara di Jawa, seperti Negara Jawa Barat, bumi kelahiran gerakan *Darul Islam*, dan di Kalimantan Selatan, tempat Ibnu Hadjar beroperasi.⁸⁶⁷

Kedua pihak memasuki federasi baru ini dengan rasa enggan. Perundingan-perundingan sebelumnya antara pemimpin-pemimpin Darul Islam dan PRRI/Permesta hampir tak ada hasilnya. Sekalipun telah dijanjikan kerjasama dan dukungan militer, hal ini tidak pernah terlaksana. Dalam kedua pihak juga terdapat orang yang terangterangan menolak setiap bentuk kerja sama resmi. Di Sulawesi Selatan cumbu rayu Kahar Muzakkar dengan Permesta sebagian menjadi sebab menyerahnya Bahar Mattaliu, sementara di Aceh hubungan yang demikian merupakan salah satu faktor yang mendorong terbentuknya Dewan Revolusi. Pembelotan-pembelotan sekaligus memaksa kaum pejuang mujahidin *Darul Islam* yang tersisa untuk bekerja sama lebih erat dengan PRRI/Permesta.

Kaum pejuang PRRI di Sumatera pada akhir 1959 terbagi dalam tiga kelompok yang berbeda, yang menganjurkan jalan yang berbedabeda. Satu kelompok ingin semata-mata melanjutkan PRRI, bagaimana pun sudah hampir tidak ada artinya lagi akibat

⁸⁶⁵ Republik Persatuan Indonesia kadang-kadang juga disebut Negara Demokrasi Indonesia (NDI). Karena itu tentaranya, Tentara Persatuan Indonesia, kadang-kadang juga disebut Tentara Demokrasi Indonesia (TDI). Untuk Konstitusi RPI, lihat Mudzakkar, *Konsep negara Demokrasi Indonesia*, (t.t.), hlmn. 24-64.

⁸⁶⁶ Negara-negara Sumatera lainnya ialah: gabungan Negara Tapanuli dan Sumatera Timur dan Negara-negara Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Negara yang lain di Sulawesi adalah Negara Sulawesi Utara. Lihat J. Mossman, *Rebel in Paradise: Indonesia's Civil war*, (London: Jonathan Cape, 1961), hlm. 228.

⁸⁶⁷ Mohammad Hasan Tiro, *The Political Future of The Indonesian Archipelago: A Manifest by Dr. Teungku Hasam Muhammad di Tiro*, (Medan: Sumatera Berdaulat, 1965), hlm. 19, yang membela Republik Persatuan Indonesia sebagai wakilnya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan Konfederasi Negara-negara Asia Tenggara yang terdiri dari Republik-republik Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Irian Jaya, Bali, dan Sunda. Walaupun mengabaikan Jawa dan bagian-bagian Nusa Tenggara lainnya dalam penyebutannya, dia menyatakan, Jawa juga harus merupakan bagian dari konfederasi.

aksi-aksi Angkatan Darat, Kelompok lain, dengan Zulkifli Lubis dan Maludin Simbolon sebagai wakil-wakil utamanya, menyetujui proklamasi Republik Indonesia Federal, sekalipun menentang kerja sama dengan *Darul Islam*. Faksi yang ketiga menyetujui bergabung dengan *Darul Islam*. Jurubicara utamanya adalah dua bekas perdana menteri, Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, dan politikus Indonesia yang berpengaruh, Sjafruddin Prawiranegara. Ketiga mereka ini lari dari Jakarta untuk bergabung dengan panglima-panglima daerah yang merasa tidak puas di Sumatera pada Desember 1957.⁸⁶⁸

RPI tidak banyak harganya baik dalam arti militer atau pun arti politik. Persekutuan yang mengkhawatirkan antara orang-orang muslim seperti Daud Beureueh dan Kahar Muzakkar yang selama bertahun-tahun telah bertempur untuk menegakkan dan mempertahankan Negara Islam Indonesia, orang-orang muslim yang terus-menerus dalam waktu yang lama menduduki jabatan-jabatan penting di Republik Indonesia, dan panglima-panglima militer seperti Maludin Simbolon Kawilarang, dan Warouw yang selama masa berikutnya telah memimpin aksi-aksi militer Republik Indonesia terhadap *Darul Islam*, dan beberapa orang dari mereka itu Kristen pula, sangatlah berbahaya. RPI mungkin mewakili, seperti yang dilukiskan Hasan Muhammad Tiro, suatu tindakan "untuk menjamin hak suci mereka untuk membentuk pemerintahan sendiri yang diingkari kediktatoran Soekarno di Jakarta yang memaksakan kolonialisme Jawa terhadap lebih dari selusin bangsa",⁸⁶⁹ atau penolakan terhadap "kolonialisme baru, Jawa sawo matang",⁸⁷⁰ tetapi hanya dendam terhadap Soekarno dan orang Jawa sajalah yang merupakan persamaan mereka.

Akibatnya, RPI sangat singkat usianya. Pada April 1961 Maludin Simbolon dan seorang panglima militer lain, Achmad Husein, memisahkan diri dari RPI untuk membentuk Pemerintah Darurat Militer.⁸⁷¹ Kemudian mereka mengeluarkan imbauan kepada para pejuang mujahidin untuk menghentikan perlawanan mereka dan menyerahkan diri pada Juni dan Juli. Pemimpin-pemimpin sipil menyusul setelah menerima janji diberi ampun oleh Soekarno.⁸⁷² Sjafruddin Prawiranegara, perdana menteri kaum pejuang mujahidin, lalu menasihati para pengikutnya untuk menyerah, dia sendiri melapor kepada penguasa pada akhir Agustus.⁸⁷³

Akibatnya pertempuran sangat banyak berkurang sesudah Ikrar Lamteh. Namun, belum juga tampak akhir pemberontakan. Namun, sikap pendirian Daud Beureueh makin ditentang. Khususnya di dalam Tentara Islam Indonesia Aceh terdapat banyak yang memikirkan untuk menyerah. Kelompok ini dipimpin Hasan Saleh, Panglima Divisi Tengku Tjhik di Tiro dan Kepala Staf Tentara Islam. Ia menuduh Daud Beureueh berusaha menjerumuskan Aceh ke dalam suatu perang baru tanpa memikirkan nasib prajurit biasa dan rakyat pada umumnya yang harus menanggung akibat-akibatnya.⁸⁷⁴ Dua tahun lamanya lagi barulah lawan-lawan Daud Beureueh bulat hatinya dan benar-

⁸⁶⁸ Herbert Feith dan Daniel Lev, "The End of Indonesian Rebellion", dalam *Pacific Affairs* 36, 1963, hlm. 38; J. Mossman, *Rebel in Paradise: Indonesia's Civil War*, (London: Jonathan Cape, 1961), hlm. 229.

⁸⁶⁹ Lihat Muhammad Hasan Tiro, *Neo-Colonialism in Indonesia (How a new Colonialism Has Been Established Under the Cover of the Cry of "Anti-Colonialism")*, Naskah pidato pada Sidang Umum XVI PBB oleh Wakil Republik Federasi Indonesia di PBB, (New York, 1961).

⁸⁷⁰ Lihat Mohammad Hasan Tiro, *The Political Future of The Indonesian Archipelago: A Manifest by Dr. Teungku Hasam Muhammad di Tiro*, (Medan: Sumatera Berdaulat, 1965).

⁸⁷¹ Letnan Kolonel Achmad Husein memainkan peranan penting dalam peristiwa-peristiwa sampai kepada pemberontakan PRRI/Permesta. Dia menjadi Ketua Dewan Banteng di Sumatera Tengah dan pada Februari 1958 mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Republik Pusat. Penolakan atas usul ini menimbulkan proklamasi PRRI. Letnan Kolonel Achmad Husein memainkan peranan penting dalam peristiwa-peristiwa sampai kepada pemberontakan PRRI/Permesta. Dia menjadi Ketua Dewan Banteng di Sumatera Tengah dan pada Februari 1958 mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Republik Pusat. Penolakan atas usul ini menimbulkan proklamasi PRRI. Lihat Herbert Feith dan Daniel Lev, "The End of Indonesian Rebellion", dalam *Pacific Affairs* 36, (1963), hlm. 43.

⁸⁷² Lihat Peraturan Presiden No. 13/1961.

⁸⁷³ Salah seorang dari yang melapor bersama Sjafruddin Prawiranegara ialah Amelz. Lihat S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 198-200.

benar memisahkan diri dari padanya.***



³⁷⁴ Abdul Murat Mat Jan, "GerakanDarul Islam di Aceh 1953-1959", dalam *Akademika* 8, 1976, hlm. 41-42.

BAB 11

AMNESTI DAN ABOLISI UMUM: CARA HALUS SESUDAH GAGALNYA CARA KASAR

DALAM menyusun kebijaksanaannya, Pemerintah harus mempertimbangkan di satu pihak tuntutan PNI dan PKI untuk mengambil tindakan militer yang lebih keras, dan di pihak lain tekanan untuk melakukan perundingan dan memenuhi beberapa tuntutan kaum pejuang mujahidin. Bagi PNI dan PKI, mereka berpendapat bahwa pemerintah harus menggempur terus pemberontakan DI/TII Aceh. Banyak pihak mengatakan bahwa gerakan militer dan kekerasan saja, tidak akan dapat menyelesaikan soal Aceh dengan sempurna, melainkan harus disertai dengan kebijaksanaan (bujukan dan tipuan) yang seluas-luasnya.⁸⁷⁵ SM Kartosewirjo sudah memprediksikan, bahwa “djika Atjeh digempur dan ditindak keras (dengan kekerasan sendjata) sadja, maka Revolusi Islam akan mendjalar, meluas, berkobar dan bergelora dengan seru dan seremnja!”⁸⁷⁶ Dan sebaliknya, jika dilakukan tindakan-tindakan lunak, halus maka akan berhasil. “Jalan halus” penyelesaian pemberontakan ini umumnya diajukan oleh Zainul Arifin (Wakil II PM), H. Masjkur (Menteri Agama dari NU), Simbolon (Panglima Tentara Territorium I), A. Hakim (Gubernur Sumatera Utara) dan Masjumi.⁸⁷⁷

Pendukung-pendukung kedua pandangan terdapat di Jakarta maupun di Aceh. Beberapa partai politik dan organisasi di Aceh mendesak Pemerintah tidak membicarakan suatu tuntutan kaum pejuang mujahidin apa pun sebelum keamanan pulih. Di samping itu sejumlah alim ulama menyesalkan terjadinya jihad suci menegakkan Negara Islam dan mencapnya sebagai dilarang Islam dan bertentangan dengan hukum Islam.⁸⁷⁸ Kutukan alim ulama Islam ini mencapai puncaknya pada awal 1955, ketika dua orang dari mereka itu, Tengku Haji Sani dan Tengku Haji Ismail, membentuk Gerakan Keamanan Rakyat Muslimin Daerah Aceh.⁸⁷⁹ Dalam selebaran yang dijatuhkan pesawat di atas Banda Aceh dan Lhokseumawe secara tegas mereka

⁸⁷⁵ S.M. Kartosewirjo, “Statemen Pemerintah NII 5 Oktober 1953”.

⁸⁷⁶ *Ibid.*

⁸⁷⁷ *Ibid.*

⁸⁷⁸ S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 106-107.

menyangkal, Islam menganjurkan perlawanan terhadap pemerintah yang sah, bagaimana pun juga lalimnya pemerintah itu. Dan berpegang pada terjemahan bahasa Indonesia pengertian-pengertian Dasar Negara Islam oleh penulis Pakistan Khalif Abdul Hakim, mereka mengemukakan, bila orang tidak berhasil mempertahankan hak-hak asasi manusianya dengan cara-cara damai, maka satu-satunya jalan yang tinggal terbuka baginya adalah hijrah. Selanjutnya mereka berusaha meyakinkan rakyat, Pemerintah Republik menjamin bagi semua warga negaranya kebebasan beragama dan mereka menyerang Hasan Mohammad Tiro mengenai kegiatan-kegiatannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁸⁸⁰ Tetapi tindakan gerakan ini berbalik jadi bumerang. Besar kecurigaan bahwa gerakan ini secara aktif disokong Pemerintah Pusat, sementara umat Muslim yang saleh merasa tersinggung karena selebaran dengan tulisan ayat-ayat Quran itu akhirnya masuk selokan, dan menganggapnya sebagai penghinaan terhadap Islam.⁸⁸¹

Panglima Kolonel M. Yasin melanjutkan kegiatan Kolonel Sjamaun Gaharu dengan lebih intensif. Terhadap yang membangkang di lakukan operasi tempur, sebaliknya secara pribadi melakukan kontak informil dengan pimpina DI. Operasi Ketam dipimpin oleh staf Letkol Nyak Adam Kamil dengan menggunakan 4 kompi infantri dan 1 kompi Raiders. Komnado Operasi Mobil di Aceh timur juga dipimpin oleh Kepala staf Letkol Nyak Adam Kamil. Di samping itu operasi seruan kembali kepangkuan Ibu Pertiwi tetap dijalankan sehingga terciptalah penyelesaian keamanan yang wajar.

Kekuatan Darul Islam Aceh

Cara penyelesaian kasus DI Aceh yang “halus” agaknya menjadi pertimbangan kuat Soekarno dalam mengeluarkan peraturan tentang amnesti dan abolisi umum bagi para pelaku pemberontakan. Cara halus yang ditawarkan ini lebih efektif dalam melemahkan dan menjinakkan gelora dan semangat para pejuang DI Aceh. Namun, cara-cara halus berupa tawaran amnesti dan abolisi menjadi “simpanan” bagi pejuang DI Aceh. Berhubung kekuatan mereka masih sangat besar, maka, untuk sementara kebaikan hati ini belum bisa diterima. Kekuatan DI pada akhir tahun 1960 berdasarkan SBM yang dapat kita kumpulkan adalah sebagai berikut:⁸⁸²

- Staf Divisi, dengan 200 personil serta 43 pucuk senjata, berada di sekitar Langkahan, perbatasan Aceh Timur dengan Aceh Utara.
- Resimen -1/Aceh Pidie dengan 700 personil serta 100 senjata terdiri dari 4 bren, 1 bazoka dan 1 LMG, bermarkas di pintu satu.
- Resimen -2/Aceh Utara, dengan 700 personil serta 250 pucuk senjata terdiri dari 7 bren, 3 bazoka, 4 LMG, markas berada disekitar Langkahan.
- Resimen -3/Aceh Timur, dengan 900 personil serta 494 pucuk senjata terdiri dari 14 bren, 9 LMG, 5 bazoka dan 2 mortir.
- Resimen -4/Aceh Barat, dengan 130 personil 63 pucuk senjata terdiri dari 4 bren, 1 LMG, dan 1 mortir.
- Resimen -5/Aceh Tengah, dengan 550 personil serta 171 pucuk senjata terdiri dari 3 bren, 1 LMG, dan 1 mortir.
- Resimen -6/Aceh Besar, dengan 316 personil serta 250 pucuk senjata terdiri dari 1 bren, 1 LMG, 1 bazoka dan mortir.
- Resimen -7/Aceh Timur, Sumatera Timur, dengan 150 personil serta 150 pucuk senjata terdiri dari 1 bren, 1 LMG, 1 bazoka dan 1 mortir.

⁸⁷⁹ Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, t.t., Jilid III), hlm.177.

⁸⁸⁰ Gerakan Keamanan Rakyat Muslimin Daerah Aceh, Siaran Kilat no. 1, 2, 3 dan 4)

⁸⁸¹ Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureueh*, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, t.t., Jilid III), hlm. 193-200.

⁸⁸² JarahDam-I, *Dua Windhu Kodam I/Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Sejarah DAM Iskandar Muda, 1972), hlm. 189.

Resimen -5/SBU/OSM/Aceh Timur, dengan 150 personil serta 100 pucuk senjata terdiri dari 1 bren, 2 LMG, 1 bazoka dan 1 mortir.⁸⁸³

Panglima KODAM-I Kolonel M. Yasin melancarkan seruan kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Operasi ini dilakukan baik melalui semua mass media yang ada di Aceh maupun Medan. Bahkan dengan surat-surat pribadi kepada semua DAN DIM, panglima juga telah menyampaikan ketentuan-ketentuan pokok tentang operasi seruan kembali itu.⁸⁸⁴ Resolusi Pimpinan DPRD-GR Aceh NO. B-7/1/DPRD-GR/1961 tanggal 29 September 1961 mendukung sepenuhnya kebijaksanaan penyelesaian keamanan panglima beserta follow upnya. Walaupun dalam sidang-sidang terdengar suara ragu-ragu dan anti dari PNI dan PKI.

Teungku Daud Beureueh Menolak “Turun”

Ketika pemberontakan meletus, Daud Beureueh mengumumkan proklamasi: atas nama masyarakat Islam Aceh, ia menyatakan Aceh dan daerah-daerah sekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia. Untuk membenarkan proklamasi ini dan tidak lagi mengakui Republik Indonesia ia mengemukakan alasan, pemimpin-pemimpin Republik di Jakarta telah menyimpang dari jalan yang benar. Republik Indonesia tidak berkembang menjadi suatu negara yang berdasarkan Islam, yang menurut pandangannya adalah satu-satunya kemungkinan yang terkandung dalam prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila. Sebaliknya, makin menjadi jelas baginya, para politisi Republik kian lama kian jauh juga beralih dari cita-cita ini. Maka disinggungunya usaha-usaha yang menempatkan tekanan yang lebih besar pada sila Pancasila yang lain: nasionalisme Indonesia, yang dengan tajam dibedakannya. Demikianlah, ia mengemukakan beberapa unsur pokok pidato Soekarno yang malang di Amuntai. Dengan mengemukakan keterangan Soekarno bahwa dia memilih negara nasional karena takut kalau-kalau jika terbentuk negara Islam beberapa daerah akan memisahkan diri, Daud Beureueh menyatakan memelopori dalam memisahkan diri dari suatu negara yang hanya didasarkan atas nasionalisme. Kata-kata Daud Beureueh membuktikan, sedikit-tidaknya untuk sementara orang, perbedaan antara negara agama atau Islam dan negara nasional tidak lagi merupakan masalah peristilahan, tetapi telah berkembang menjadi suatu penentangan sesungguhnya yang penting. Daud Beureueh menyatakan, rakyat Aceh memahami arti sebenarnya kata-kata "agama" dan "nasionalisme" dan setiap orang yang percaya bahwa orang yang beragama tidak mencintai negerinya barangkali tidak memahami Islam. Selanjutnya ia menegaskan, Republik Indonesia sebenarnya tidak menjamin kebebasan beragama dalam arti kata itu sesungguhnya. Dia tidak menerima kenyataan bahwa Islam tidak membedakan bidang keagamaan dengan bidang sekuler atau pandangan Muslim bahwa prinsip-prinsip Islam harus diterapkan dalam semua lapangan kehidupan. Jika memang terdapat kebebasan beragama yang sesungguhnya, maka syariat Islam haruslah berlaku di Aceh, mengingat bahwa seratus persen rakyat di Aceh adalah Muslim. Dalam keadaan seperti itu sama sekali tidak mungkin Jaksa Agung melarang khotbah yang mengandung politik, katanya, karena politik dan agama tak dapat dibedakan.

Hal lain yang dijadikan Daud Beureueh serangan bagi Pemerintah Pusat adalah bahwa Pemerintah ini tidak pernah mengabulkan suatu permintaan Aceh apa pun dan bahwa ia sekarang menganggap Aceh—yang selama revolusi merupakan daerah "modal" Republik—sebagai daerah yang tidak patuh.⁸⁸⁵ Tidak pula diberikan suatu konsesi apa

⁸⁸³ *Ibid.*

⁸⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁸⁵ Aceh memperoleh nama Daerah Modal Republik Indonesia, karena peranan yang dimainkannya selama revolusi. Di satu pihak nama ini mengemukakan kenyataan bahwa Aceh—berbeda dengan bagian Republik Indonesia lainnya—tidak pernah diduduki Pasukan Belanda. Di pihak lain ini menunjukkan

pun terhadap permohonan otonomi Aceh yang ketika itu masih dibayangkan dalam kerangka Republik Indonesia. Daud Beureueh mempertanyakan mengapa perdebatan tentang ini harus menunggu terbentuknya Konstituante, dan apakah ini barangkali karena Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat hanya ingin menyisihkan persoalan ini. Padahal, bahwa lembaga yang akhir ini mampu bertindak cepat telah diperlihatkan pada waktu perubahan Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia kesatuan. Daud Beureueh menggarisbawahi kenyataan, rakyat Aceh dengan sabar telah menanti terbentuknya Konstituante selama bertahun-tahun, tetapi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyadari ini dan bahkan memutuskan menunda pemilihan umum. Ia menduga, barangkali pemerintah lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan rakyat. Selanjutnya dipertanyakannya, apakah pemerintah mungkin lebih memberikan bantuan dan dorongan kepada kelompok kecil mereka yang mempercayai Ketuhanan yang Maha Esa suatu keyakinan lain, atau kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, dengan secara menyolok bertentangan dengan cita-cita dan hasrat mayoritas.

Menguatnya Lobby di Parlemen

Di Jakarta terdapat *lobby* pro-pejuang mujahidin yang kuat, yang berpusat sekitar anggota-anggota DPR, Amelz, bekas anggota PSII tetapi kini bertindak bebas, dan Nur el Ibrahimy, anggota Masyumi dan bekas sekretaris PUSA, yang membela kasus mereka. Pada umumnya mereka didukung para politisi Masyumi, yang juga mendesak Pemerintah tidak berusaha mengatasi keadaan hanya dengan tindakan-tindakan militer, melainkan mencari penyelesaian politik dan melenyapkan beberapa penyebab yang mendorong kaum pejuang mujahidin mengangkat senjata. Jadi Pemerintah dianjurkan secara teliti menyelidiki alasan yang pro dan kontra untuk memberikan Aceh suatu bentuk otonomi daerah dan bahkan memberikannya status daerah istimewa.

Karena yang akhir ini merupakan masalah yang ada sangkut pautnya dengan salah satu masalah konstitusional utama Republik Indonesia, yaitu apakah struktur negara Indonesia harus kesatuan atau federal, masalah ini sangat luas pengaruhnya. Mereka yang menyetujui memberikan Aceh otonomi yang lebih luas adalah partai-partai dan kelompok-kelompok yang sama, yang membela struktur negara federal atau desentralisasi yang lebih besar. Di dalamnya tidak hanya termasuk Partai Sosialis Indonesia, tetapi juga sebuah partai dengan dasar kedaerahan seperti Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), dari Kalimantan Selatan. Secara bersama-sama mereka menjadi kelompok yang mampu menghimpun dukungan yang banyak. Ini menjadi jelas pada Februari 1954, ketika sebuah komisi parlemen yang telah mengunjungi Aceh sebulan sebelumnya menyampaikan laporan hasilnya. Laporan ini secara luas mengutip para alim ulama Islam Aceh, yang telah berbicara dengan anggota-anggota komisi. Di antara anjuran yang diusulkan para alim ulama ini laporan menganjurkan agar Pemerintah menerima, mengingat cita-cita Negara Islam di Aceh, sebagian dari hukum Islam, umpamanya hukum sipil, dan dengan demikian melarang segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum ini, seperti berjudi, berdansa, dan menjual minuman keras. Tambahan bagi laporan itu mengutip para alim ulama yang berpendapat, Pemerintah Pusat harus mengirimkan misi ke Aceh untuk menemui Daud Beureueh, dan seharusnya memperhatikan tuntutan-tuntutan banyak orang Aceh mengenai otonomi.⁸⁸⁶

sokongan keuangan dan materi yang diberikannya kepada Pemerintah Republik.. Lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1990), terutama bagian kesimpulan.

⁸⁸⁶ Anjuran-anjuran lain yang dilakukan para ulama kepada Pemerintah yang dikemukakan komisi parlemen dalam laporannya adalah, seyogyanya Pemerintah mendorong kerja sama antara golongan tengku dan teuku, memberikan prioritas kepada orang Aceh dalam politik pengangkatannya, berusaha

Komisi ini tetap sepenuhnya tidak memihak dalam laporannya, cukup dengan hanya mengutip pendapat-pendapat yang dikemukakan rakyat di Aceh. Tetapi, para anggotanya, dalam perjalanan pulang ke Jakarta, telah merumuskan usul mereka sendiri dengan mendesak Pemerintah mengubah pembagian administratif Indonesia dan menjadikan Aceh salah satu dari sembilan belas provinsi (baru) Indonesia.⁸⁸⁷ Karena Pemerintah memerlukan lebih banyak waktu dan sudah mulai membuat persiapan untuk pembagian provinsi yang baru, usul ini tidak dikemukakan.

Kalangan kiri, seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI) lebih menekankan pemberian otonomi bagi Aceh. Namun, selama pembicaraan laporan ini suatu usul lain disampaikan kali ini oleh sekelompok anggota parlemen yang diketuai oleh Djuir Muhammad dari PSI.⁸⁸⁸ Dikemukakannya Aceh sebagai contoh yang paling baik dari suatu cara yang dibuat-buat bagaimana provinsi-provinsi dibentuk pada masa lalu, dan dikemukakannya bahwa jalan satu-satunya menyelesaikan permasalahan di Aceh adalah dengan memberikannya otonomi.⁸⁸⁹

Di daerah Aceh sendiri, kalangan parlemen dan kalangan partai politik nasionalis (sekuler) seperti PKI memberikan tanggapan yang keras dan “aneh”. Tanggapan paling keras, dari semua partai-partai politik adalah dari PKI. PKI bahkan berkesan “marah” dengan pemberian rehabilitasi dan abolisi bagi para pejabat daerah Aceh yang pernah menjadi anggota DI dan kemudian direhabilitir oleh Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masjumi.⁸⁹⁰ Bukan hanya PKI, ormas onderbouwnya juga memberikan pernyataan keras serupa. Gerwani menuntut untuk menambah operasi dan personil militer dengan alasan wanita adalah yang paling menderita dari konflik DI/TII ini.⁸⁹¹ Gerwani juga berharap agar DI bisa “kembali kedjalan jang benar”.⁸⁹² Bagi Gerwani, wanita-wanita DI adalah “mereka jang telah tersesat”.⁸⁹³ Dalam perdebatan berikutnya, wakil-wakil PNI dan PKI, yang keduanya mempunyai pengikutnya yang terbanyak di Jawa, menolak usul itu. Mereka mengemukakan, rakyat biasa di Aceh tidak menyatakan dirinya menyetujui otonomi, dan bukanlah masalah otonomi tetapi cita-cita Negara Islamlah yang berada di belakang jihad suci menegakkan Negara Islam. Di pihaknya Pemerintah menjawab, usul itu mubazir karena Pemerintah sudah mempersiapkan suatu pembagian kembali provinsi di Indonesia dan dalam hubungan ini sedang mempertimbangkan memberikan Aceh status provinsi.⁸⁹⁴ Pada akhirnya usul

memperlakukan Aceh bagaikan seorang bapak memperlakukan anaknya (mengingat keteguhan hati diperlihatkan orang Aceh), dan berusaha mencapai kewa-jaran dalam segala bidang untuk memenuhi rasa keadilan yang kuat dari rakyat Aceh. Komisi ini sendiri menganjurkan agar Pemerintah Republik dan aparatnya menjauhkan segala sesuatu dalam tindakannya yang dapat menyinggung perasaan orang Aceh atau menimbulkan perpe-cahan, menghindarkan timbulnya kesan dalam pengangkatan pegawainya bahwa suatu golongan tertentu diutamakan dan karena itu memastikan bahwa setiap orang yang diangkat dalam jabatannya di Aceh memenuhi syarat: dapat diterima, mampu, dan jujur; dan memberikan prioritas kepada Aceh dalam penjatahan dana dan materi untuk alat pemerintahan agar memberikan penghargaan kepada rakyat Aceh yang begitu hebat mempertahankan bangsa. Lihat C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993).

⁸⁸⁷ Kesembilan belas propinsi ini adalah: Aceh, Sumatera Timur (termasuk Riau) Minang-kabau (Sumatera Barat), Sumatera Selatan (Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, Bangka, dan Belitung), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali-Lombok, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian Barat, Mataram (Yogyakarta dan Surakarta), dan Jakarta Bagian Dokumentasi Deppen, *Sekitar Peristiwa Berdarah Daud Beureu'eh*, vol. III, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, 1953), hlm.15.

⁸⁸⁸ Usul ini turut ditandatangani Amelz, A.M. Djohan (A.M. Johan) (PIR), Ibrahim Sedar (tak berpartai), Mayor Polak (PSI), dan A.C. Manoppo (Demokrat).

⁸⁸⁹ Bagian Dokumentasi Deppen, *Sekitar Peristiwa Berdarah Daud Beureu'eh*, vol. III, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, 1953) hlm. 12.

⁸⁹⁰ *Keterangan Thaib Adamy*, Sekretaris Komite PKI Daerah Atjeh, 30 Januari 1957.

⁸⁹¹ *Usul2 Jg Dimajukan Dalam Pertemuan Antara Dewan Tjambang Gerwani Kutardja dgn Gubernur Atjeh*, 6 Februari 1957.

⁸⁹² *Ibid.*

⁸⁹³ *Ibid.*

⁸⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 14-54.

itu ditanggguhkan, ternyata untuk jangka waktu yang tiada terbatas, menantikan hasil perdebatan mengenai suatu rancangan tentang pemerintahan daerah yang diajukan Pemerintah yang baru saja mulai. Terus juga terdapat banyak ketidakpuasan mengenai kebijaksanaan Pemerintah dan ketidaksanggupannya menundukkan berbagai jihad suci menegakkan Negara Islam. Politik keamanan Pemerintah jadinya tetap mendapat serangan, dan menyebabkan Jusuf Wibisono dari partai Masyumi umpamanya mengajukan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah. Mosi ini—yang dikalahkan dengan mayoritas tipis 115 lawan 92 pada akhir 1954—terus menghidupkan pertentangan tentang Aceh.

Ini disebabkan sifat khusus daerah, dan lebih khusus ialah sifat-sifat khusus Aceh dan kekuatan Islam di daerah ini, seperti dijelaskan Ali Sastroamidjojo dalam DPR pada 1955. Tidak ada pengumuman keadaan perang, yang membuat militer mengambil alih pimpinan. Di samping itu, sejak mula pemberontakan Pemerintah berjanji menyelidiki masalah otonomi untuk Aceh dan memberikan lebih banyak perhatian terhadap perkembangan ekonomi daerah. Dalam menyusun kebijaksanaannya, Pemerintah harus mempertimbangkan di satu pihak tuntutan PNI dan PKI untuk mengambil tindakan militer yang lebih keras, membatalkan keputusan rehabilitasi yang pernah diberikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masjumi kepada pamongpraja dan pegawai sipil militer yang “pro-gerombolan” dan di pihak lain tekanan untuk melakukan perundingan dan memenuhi beberapa tuntutan kaum pemberontak.

Membujuk Tgk. Daud Beureueh Secara Halus

Tanggal 4 Oktober 1961 dikirimkan tokoh-tokoh masyarakat untuk menemui Tgk. M. Daud Beureueh di gunung. Tokoh-tokoh itu terdiri dari: H. Ibnu Saadan, residen dp. Gubernur Aceh; Mayor M. Daud Hasan, WAKASDAM-I/Iskandarmuda; Dr. T. Iskandar, Universitas Syiah Kuala; Gani Usman, Wakil Ketua DPH Aceh; T. Ali Keurukon, anggota BPH Aceh; T. Usman Yakub, Wali Kota Kutaraja; Zaini Bakri, Bupati Aceh Besar; Ibrahim Abduh, Bupati Pidie; Usman Azis, Bupati Aceh Utara; Wahab, Bupati Aceh Tengah; Tgk. M. Daud, Patih dp. Bupati Aceh Timur; T. Cut Mamat, Bupati Aceh Selatan; Komisariss Muda M. Yusuf, Kepala Kepolisian Aceh Barat ; Tgk. H. Abdullah Ujung Rimba, Ulama; H. Abubakar Ibrahim, Ulama; Pawang Leman⁸⁹⁵; Nyak Abbas, Patih dp. Bupati Pidie; Tgk. Mahyiddin Yusuf, Ulama; Muzakir Walad, Veteran/angkat 45; Nyak-Na Hamzah, Saudagar; Ismail Usman, Saudagar; A.R. Ahmadi, Pemuda; M. Thahir Mahmud, Pemuda; Hasanuddin, Pemuda; Gazali Idris, Pemuda; Usman, Palang Merah Indonesia; Insya, Buruh; A.R. Chemeng, Wartawan Foto.⁸⁹⁶ Namun sikap tegas Teungku Daud Beureueh masih tetap, tak bergeming untuk menyerah.

Pada tanggal 9 Oktober 1961, apa yang menamakan dirinya Perdana Menteri republik Islam Aceh, Hasan Aly, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi di Lhok Nibong Aceh Timur, diterima oleh Kepala staf KODAM-I/Iskandarmuda Komando Operasi Mobil Aceh Timur Letkol Nyak Adam Kamil. Laporan ini disaksikan oleh Asisten-1 Kakosdam-I Kapten A. Manan S, Asisten -3 Kakosdam-I Kapten Maito Mukmin, Dan Dim 0104 Letkol Mohd. Nurdin dan Kasdim 0103 Kapten M. Rasyid. Antara tanggal 17 Februari 1961 sampai dengan 10 Desember 1961 jumlah personil DI yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi adalah 12.362 orang dengan 1075 pucuk senjata terdiri dari 28 bren, 24 LMG, 9 bazoka dan 8 mortir. Tanggal 17 Oktober 1961 Pangdam-I selaku penguasa perang daerah mengeluarkan keputusan No. KPTS/Peperda/122/ 10/1961 tentang tuntutan hukuman mati bagi oknum-oknum yang meng-ganggu keamanan di dalam rangka pemantapan situasi. Banyaknya prajurit dan perwira menengah dan juga perwira tinggi yang menyerah mengakibatkan DI hanya dipertahankan oleh sangat sedikit orang:

⁸⁹⁵ (Tokoh DI Leupung).

⁸⁹⁶ *Ibid.*

Pada tanggal 2 November 1961 Panglima Kolonel M. Yasin melakukan pertemuan langsung dengan Tgk. Muhammad Beureueh di Langkahan Aceh Timur. Panglima disertai oleh As-I Kakosdam-I Kapten A. Manan S, As-3 Kakosdam-I Kapten Maito Mukmin, Dan Dim 0103 Letkol H.M. Syarif, Dan Yonif 136 Mayor Usman Nyak Gade, Pa. Pendam-I Kapten Mohd. Syah Asyik dan 5 orang wartawan dari Medan. Tanggal 21 November 1961 Koda mengutus Kepala Staf Letkol Nyak Adam Kamil, As-I Kakosdam-I Kapten A. Manan S, serta Hasballah Daud (salah seorang putra dari Tgk. Muhammad Daud Beureueh) membawa surat dakwah Tgk. Muhammad Daud Beureueh untuk menghadap Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution. Utusan diterima MKN/KASAD di STAF KEAMANAN NASIONAL pada jam 11.¹⁵ – 11.⁴⁵ didampingi oleh Letkol Barkah. Keputusan Teungku Daud Beureueh masih tetap, tidak akan “turun gunung” meskipun banyak prajurit, tamtama dan perwira DI yang menyerah dengan ikut membawa serta senjata. Pertahanan Teungku Daud Beureueh pun hanya tinggal beberapa pucuk senjata dan satu bren gun saja. Persediaan amunisi pun sudah tinggal sedikit, logistik makanan pun tinggal 20 *areé* (bambu).⁸⁹⁷

Pada tanggal 12 Desember 1961 di langungkan rapat Staf KODAM yang juga dihadiri oleh Polisi dan Brimob. Kemudian untuk lingkungan ABRI di bentuk suatu tim penertib yang diketuai oleh Mayor Ahmad Amins, Dan Dim 0108.⁸⁹⁸ yang beranggotakan: Mayor Idrus Abbas, dan Dim 0101; Mayor Subiakto Pa. Pomdam-I; Kapten T. Sabi Ubit, Kejaksaan Tentara; Kompol Drs. Suwardi, Kepolisian; AKP. M. Dhaim, Dan Yon Brimob 515; dan, Kompol II Burhanuddin, Kepolisian. TNI menggiring para mujahidin DI/TII ke gunung yang semakin terisolir dan tidak ada kontak dengan masyarakat sehingga *supply* makanan pun akan habis dalam waktu sebentar. Teungku Daud Beureueh adalah tokoh Aceh yang kharismatik, sangat konsisten dan tegas, bahkan ketika senjata banyak pun tidak turun gunung, pun ketika senjata sudah tidak ada dan amunisi sebutir pun tiada, ia masih bersiteguh “jalan terus”.

Sementara itu pasukan-pasukan DI, baik perorangan maupun berkelompok terus juga kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Akhirnya pada tanggal 8 Mei 1962 Tgk. Muhammad Daud Beureueh tertangkap karena kehabisan logistik dan amunisi. Namun, beberapa kalangan petinggi militer daerah ketika itu mengubah situasi ini untuk menunjukkan penghormatan kepada tokoh kharismatik Aceh yang sangat disegani ini. Nyak Adam Kamil kemudian “menjemputnya” untuk menunjukkan situasi damai yang bermartabat bagi rakyat Aceh. Namun sesungguhnya Teungku Daud Beureueh sendiri tak pernah “turun gunung” atau menyerah.⁸⁹⁹ Sehabis shalat jum’at di mesjid Raya Baiturrahman Kutaraja, antara lain beliau mengatakan:

*“Saya kembali kemasyarakat atas kehendak rakyat, maka saya penuhi dengan baik. Kami tinggalkan perbuatan yang tidak layak lagi setelah 8 tahun 10 bulan dan 27 hari. Bahwa saya Muhammad Daud Beureueh, dengan keinginan dan hasrat serta memenuhi kebijaksanaan Panglima KODAM-I Kolonel Mohd. Yasin dan Wakil Menteri pertama bidang Pertahanan /Keamanan/Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution khususnya dan Pemerintah Republik Indonesia pada umumnya serta hasrat masyarakat, kini benar-benar saya telah berada ditengah-tengah masyarakat. Dengan ini berarti pula perkelahian antara sesama kita, sesama bangsa selama 8 tahun 10 bulan 27 hari tidak ada lagi”.*⁹⁰⁰

Dengan demikian penyelesaian keamanan diseluruh Aceh selesai sama sekali sehingga Panglima Kolonel M. Yasin mencanangkan bahwa Aceh telah berobah dari *Darul Harb* Ke *Darussalam*, yang diucapkan pada upacara 17 Agustus 1961 di Langsa,

⁸⁹⁷ Amelz, *Riwajat Singkat Atjeh Bangoen dari Tidoernja Jang Njenjak Sesoedh Beberapa Poeloeh Tahoen*, (Pidie, naskah ketikan, t.t.), hlm. 106.

⁸⁹⁸ *Dua Windhu Kodam I...*, hlm. 156.

⁸⁹⁹ Wawancara-wawancara dengan Masnur, Banda Aceh, dari tanggal 14 Juni hingga 7 Agustus 2006.

⁹⁰⁰

Ibid.

Aceh Timur. ***



BAB 12

MISI HARDI: AKOMODASI POLITIK PUSAT UNTUK PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

PEMBERONTAKAN, melihat dari cara dan latar-belakang ideologis yang memicu terjadinya, sangat sedikit yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat. Tetapi, tidak demikian halnya dengan Aceh, pemberontakanlah yang telah banyak mengubah status dan akomodasi politik, sosial dan ekonomi bagi daerah, khususnya bagi rakyat Aceh.⁹⁰¹ Bagi Angkatan Darat sendiri, pemberontakan DI sangat dipahami karena kekecewaan terhadap unsur sipil dalam “negara [RI] yang sedang dalam masa pembinaan” ketika itu. Surat-menyurat antara DI Aceh dengan TNI-AD jauh lebih lancar ketimbang dengan para pejabat setingkat menteri atau Perdana Menteri atau Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana pun akan diakui bahwa ini adalah kekecewaan yang bersumber dari kalangan internal militer Republik sendiri, terutama yang berada di daerah.

Proses akomodasi politik terhadap gerakan Darul Islam Aceh bermula dari keputusan berunding yang diambil oleh Dewan Revolusi. Sesuai dengan Komunike No. 2 Dewan Revolusi, kelompok Hasan Saleh melanjutkan musyawarah dengan Pemerintah Republik Indonesia. Demikian juga Pemerintah Pusat menyambut baik kebijakan tersebut. KSAD A. H. Nasution melalui suratnya tanggal 15 April 1959 kepada Kolonel Syamaun Gaharu menyatakan persetujuannya untuk menampung maksimum 10.000 mantan pemberontak ke dalam tubuh militer Republik dengan catatan harus melalui proses peralihan Wajib Militer Darurat (WMD) selama 1 tahun dan kemudian baru diseleksi persyaratannya untuk diproses menjadi tentara sukarela.⁹⁰² Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1959 Pemerintah Pusat mengirim sebuah Misi ke Kutaraja di bawah pimpinan WKPM Hardi yang terdiri atas beberapa Menteri dan Pejabat dari berbagai Instansi. Misi ini lebih dikenal dengan sebutan Misi Hardi.⁹⁰³

Pertemuan Misi Hardi dengan Dewan Revolusi NBA-NII berlangsung di Aula Peperda Aceh tanggal 25-26 Mei 1959. Setelah pembukaan oleh Gubernur Ali Hasjmy perundingan dilanjutkan dengan membahas isu pokok perundingan yang telah disiapkan oleh Dewan Revolusi tanggal 10 Mei 1959. Naskah setebal 20 halaman ditambah 3 halaman lampiran itu dengan butir-butir isi pentingnya adalah perubahan status Propinsi Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh Darussalam, tuntutan penyusunan kembali aparatur Pemerintahan Daerah, otonomi dalam bidang agama berupa pelaksanaan syari’ah, pengesahan peradilan agama dan pengajaran pelajaran agama di sekolah umum, tuntutan penampungan mantan TII ke dalam Legiun Aceh Tgk. Chik Ditiro sebanyak 7 batalyon, mantan pegawai dan polisi pemberontak direhabilitasi dan diterima ke dalam pegawai/polisi RI dan sisanya disalurkan dalam perusahaan, tuntutan biaya hidup dari Pemerintah sebesar Rp. 1000,- per-orang per-bulan dalam masa peralihan selama 1 tahun, tuntutan pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi dari presiden, tuntutan pembubaran badan legislatif daerah yang telah dibentuk tahun 1957 untuk disusun anggota baru dan tuntutan pembangunan gedung perdamaian dan kampus Universitas Syi’ah Kuala dan IAIN Ar-Raniry dan upacara perdamaian yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat Aceh selama 3 hari yang disaksikan oleh Pemerintahan Pusat.⁹⁰⁴ Semua ini tak akan diberikan tanpa pemberontakan lebih dahulu. Seharusnya, secara etis, sebuah pemerintahan pusat yang baik dan kuat mesti membangun semua yang menjadi aspirasi rakyat tanpa harus dituntut melalui jalan-jalan non-damai.

⁹⁰¹ Pihak Angkatan Darat, AH Nasution pernah menjanjikan kepada Hasballah Daud ketika membawa surat Teungku M. Daud Beureueh ke TNI-AD di Jakarta bahwa “Untuk Aceh akan di beri status Daerah Istimewa, sungguh daerah-daerah lain tak di berikan. Ini akan saya bawa kepada pemerintah pusat dan kepada presiden.” Lihat Amelz, *Riwayat Atjeh Bangoen dari Tidoernja jang Njenjak Sesoedah Beberapa Tahoen Lamanja*, (Pidie, naskah ketikan, t.t.), hlm. 128.

⁹⁰² Lihat Keputusan KSAD No. 264/4/1960 Tanggal 15 April 1959 Tentang Penampungan eks DI/TII.

⁹⁰³ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 415.

⁹⁰⁴ Lihat *Naskah Perdamaian Darussalam Tentang Penyelesaian Persengketaan Bersenjata antara Pihak NBA dengan RI di Aceh*, Dewan Revolusi NBA-NII, Aceh Darussalam 10 Mei 1959. Lihat juga M. Isa Sulaiman, *Ibid.*, hlm. 416.

Setelah melalui perdebatan yang cukup alot akhirnya tercapai juga beberapa kesepakatan dasar tanggal 26 Mei 1959 dalam bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh A. Gani Usman, A. Gani Mutiara, dan Kol. Hasan Saleh yang diserahkan kepada WKPM Hardi⁹⁰⁵. Isi pernyataan tersebut adalah pernyataan setia kepada UUD '45, peleburan NBA sipil/militer ke dalam tubuh Republik dan harapan bahwa sesuatu yang belum dapat disepakati dalam pertemuan itu akan dilanjutkan pembicaraannya. Setelah itu WKPM Hardi pun mengeluarkan keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959 Tanggal 26 Mei 1959 tentang perubahan Daerah Swatantra Tk. I Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh dengan catatan bahwa daerah ini tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Daerah Swatantra Tk. I seperti termuat dalam UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Unsur militernya diterima dalam pasukan Tgk. Chik Ditiro dan mereka yang dahulu berasal dari pegawai negeri akan direhabilitasi status kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu WKPM Hardi menyerahkan bantuan dana pembangunan sebesar Rp. 88.400.000,-

Keesokan hari Kastaf Kodam A Letkol. T. Hamzah dan Gubernur Ali Hasjmy mengeluarkan pernyataan bersama yang mengandung 11 butir menguraikan kronologis perundingan dan keputusan yang diambil, yang disebarluaskan kepada masyarakat. Untuk merealisasikan keputusan tersebut mereka menghimbau agar semua pemberontak turun ke pangkuan Ibu Pertiwi dan semua aparat Pemerintah baik sipil maupun militer agar menyesuaikan diri dengan perkembangan baru.⁹⁰⁶

Pihak Dewan Revolusi dan Kol. Syamaun Gaharu – Ali Hasjmy terus mengusahakan tundak lanjut dari keputusan Misi Hardi yang berjalan lamban. Dalam pertemuan tanggal 29 September dan 1 Oktober 1959 di Aula Peperda Aceh telah menghasilkan suatu Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh keempat mereka. Adapun butir-butir penting persetujuan itu adalah penegasan kembali komitmen mereka untuk memperjuangkan legalitas perundang-undangan terhadap status Daerah Istimewa, merealisasi pembentukan batalyon pasukan Tgk. Chik Ditiro di bawah Komandan Hasan Saleh yang tunduk langsung di bawah Kodam A Iskandar Muda dengan masa peralihan selama 2 tahun, berusaha secepatnya merealisasi kan rehabilitasi dan penampungan pegawai/polisi eks NBA-NII ke tubuh Pemerintah, dan berusaha untuk menampung mereka yang tidak tertampung pada perusahaan-perusahaan.⁹⁰⁷

Walaupun tidak semulus seperti yang dibayangkan sebelumnya, namun proses realisasi persetujuan terus dilakukan oleh kedua belah pihak. Meskipun proses realisasi persetujuan sedang berjalan, namun Pemerintah berpendirian bahwa tugas Dewan Revolusi telah selesai. Pada tanggal 8 Juni 1960 Menteri Keamanan Nasional/KSAD A. H. Nasution mengirimkan instruksi kepada Kodam I Iskandar Muda yang berisi petunjuk lanjutan pemulihan keamanan di Aceh. Dalam instruksi itu dia perintahkan supaya Dewan Revolusi dibubarkan terhitung 1 Juli 1960 dan tugasnya dialihkan kepada Peperda/Panglima Kodam I Iskandar Muda. Selanjutnya pemberontak yang belum menggabungkan diri hingga tanggal tersebut masih diberikan kesempatan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan Penampungan mereka tetap didasarkan kepada keputusan KSAD No. Kpts – 264/4/1960 tanggal 15 April 1959.

Pembubaran Dewan Revolusi baru terlaksana pada tanggal 28 Juli 1960. Berdasarkan petunjuk dari KSAD, lima personalianya diberi tugas baru. A. Gani Usman diangkat menjadi anggota DPRD I Aceh. Husin Yusuf dikembalikan statusnya menjadi

⁹⁰⁵ Menurut Hasan Saleh, persoalan yang hampir menggagalkan perundingan tersebut adalah masalah penyerahan pernyataan tertulis mereka kepada Hardi. Hardi menginginkan naskah itu diserahkan dulu untuk dibawa ke Jakarta kemudian baru diproses, sebaliknya Hasan Saleh tidak mau sampai tuntutan mereka dipenuhi. Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 364.

⁹⁰⁶ M. Isa Sulaiman, *op. cit.* hlm. 418.

⁹⁰⁷ Lihat *Persetujuan Bersama* Kutaraja, 1 Oktober 1959 A.n. Dewan Repolusi (Gerakan Revolusioner Islam Aceh), Kodam Aceh Iskandar Muda dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Kolonel TNI pensiun sebagai anggota MPRS, Tgk. A. Husin Al Mujahid diangkat menjadi penasehat PPN di Idi, T. M. Amin diangkat kembali pada kantor Gubernur, dan Hasan Saleh sambil menunggu proses lanjutan diangkat sebagai Perwira Staf Pribadi Kodam I Iskandar Muda.⁹⁰⁸ Menurut M. Nur El Ibrahimy, setelah direhabilitasi kembali ke dalam TNI dengan pangkat Kolonel, tidak lama kemudian dipensiunkan, dan kepada dia dan kawan-kawannya diberi sebuah kebun teh bekas milik Inggris di Sukabumi sebagai tempat penampungan.⁹⁰⁹ Dengan demikian pulihlah keamanan sebagian wilayah Aceh terutama wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Dewan Revolusi.

Usaha selanjutnya untuk memulihkan keamanan di Aceh dengan menekan posisi sisa-sisa pemberontak pimpinan Tgk. Daud Beureueh yang belum mau menyerahkan diri. Di samping operasi militer, Gubernur Ali Hasjmy dan Pangdam M. Yasin, yang menggantikan Syamaun Gaharu, juga melanjutkan pendekatan-pendekatan untuk membujuk mereka supaya turun. Usaha mereka memperoleh hasil dengan kembalinya satu persatu pimpinan pemberontak ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada tanggal 27 Maret 1961 pimpinan pemberontak di Aceh Besar, A. Wahab Ibrahim dan Sulaiman Ahmad menyerahkan naskah penyerahan diri mereka melalui Bupati Aceh Besar Zaini Bakri. Di Aceh Barat pimpinan pemberontak, M. Yunus Ali, Tgk. Main Idris dan Tgk. Hasan Hanafiah secara berturut-turut pada bulan Maret, Juni dan Juli 1961 dengan para pengikutnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Di Aceh Utara M. Thaher Mahmud, Komandan Resimen II Samudra beserta Kepala Stafnya dan 2.477 personelya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tanggal 9 Mei 1961. Demikian juga pimpinan pemberontak Aceh Timur seperti Gazali Idris dan O. K. Husen tanpa menunggu persetujuan Wali Negara telah melapor untuk menyerahkan diri. Hal serupa juga diikuti nantinya oleh PM Hasan Ali dan Sulaiman Daud beserta seluruh pengikutnya juga menyerahkan diri.

Setelah para pengikutnya beramai-ramai menyerahkan diri maka posisi Tgk. Daud Beureueh semakin terpojok. Surat menyurat maupun negosiasi melalui utusan antara Kolonel M. Yasin – Ali Hasjmy dengan Tgk. Daud Beureueh terus dilakukan untuk membujuk Tgk. Daud Beureueh turun. Proses yang cukup panjang ini akhirnya berhasil setelah Tgk. M. Daud Beureueh yang akhirnya bersedia turun. Proses penjemputan Tgk. Daud Beureueh dilakukan tanggal 9 Mei 1962 yang dipimpin oleh Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Letkol Nyak Adam Kamil. Turut meyerahkan diri bersama Tgk. Daud Beureueh adalah pengikut setianya Ilyas Leube dan Hasballah Daud beserta sekelompok kecil pengiktnya. Rombongan Tgk. Daud Beureueh memasuki Kutaraja persis pada Hari Raya Idul Adha di Mesjid Raya Kutaraja. Pada tanggal 21 Mei 1962 diselenggarakan sebuah upacara selamat di pendopo gubernuran untuk memperingati secara khidmad berakhirnya pemberontakan yang sudah berlangsung hampir sembilan tahun itu.

Sebagai penghormatan terhadap dirinya, Pemerintah menyediakan rumah kediaman untuk Tgk. M. Daud Beureueh di Kutaraja. Akan tetapi Tgk. M. Daud Beureueh menolaknya dengan alasan lebih suka berbaur kembali dengan rakyat di Beureuneun, Pidie untuk menghabiskan masa tuanya.⁹¹⁰ Dengan turunnya Tgk. Daud Beureueh dan pengikutnya maka tuntaslah persoalan keamanan di Aceh berkaitan dengan Pemberontakan DI/TII.

Pada waktu yang sama Pemerintah Pusat mengirimkan sebuah misi ke Aceh untuk berunding dengan Dewan Repolusi NBA-NII. Misi ini dipimpin Wakil Perdana Menteri Pertama Hardi, yang di dalamnya termasuk juga Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Gatot Subroto dan Menteri Kestabilan Ekonomi tanpa Portofolio, Kolonel Suprajogi.

⁹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 435.

⁹⁰⁹ Lihat M. Nur el-Ibrahimy, *Peranan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan di Aceh*, (Jakarta: Media Dakwah, 1992), hlm. 203.

⁹¹⁰ M. Isa Sulaiman, *Op.cit.*, hlm. 440-456.

**Susunan Missi Pemerintah RI
Untuk Penyelesaian Pemberontakan DI/TII Aceh
Tanggal 23-26 Mei 1959⁹¹¹**

No	Nama	Jabatan
1.	Mr. Hardi	Wakil Perdana Menteri I
2.	Mr. Sugianto	Pembantu Wakil Perdana Menteri I
3.	Kol. Suprajogi	Menteri Negara Urusan Stabilitas Ekonomi
4.	Jend. Mayor Gatot Subroto	Wakil KASAD
5.	Ahmad	Biro Keamanan
6.	Mayor Kaswadi	Pembantu (MBAD)
7.	Kapten Suhut Alimuddin	Pembantu (Musek)
8.	Sutedjo	Pengawal
9.	Mayor Arjono	Geni Angkatan Darat
10	S.K. Bonar	Kementerian Penerangan
11	Overste Wilujo	MBAD
12	Lts. P.M. Sudibjo	Pembantu Pribadi Wakil KASAD
13	Abubakar Adami	Kementelran Agama
14	K.H. Mustaim	Kementerian Agama
15	Ruhadji Wirjohardjo	Kementerian Dalam Negeri
16	Sukiat	Kementerian Dalam Negeri
17	Sukedjo	Kementerian Pertanian
18	R Sudjati	Kementerian Keuangan
19	M. Selamat	Kementerian Keuangan
20	Tatang Asmawinata	Kementerian Pelayaran
21	M. Sarewo	Kementerian Pelayaran
22	Sutingkir	Kementerian PP&K
23	Zulkifli	Kementerian P.U. & Tenaga
24	Ir. Urip	Kementerian P.U. & Tenaga
25	M. Sudji	Kementerian Perhubungan

⁹¹¹ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latarbelakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Citra Panca Serangkai, 1993), bagian lampiran.

26	Sumekto	Kementerian Perhubungan/Penerbangan Sipil
27	M. Nahar	P.I.A.
28	Waluyo	Antara
29	Rusli Jacob	Perusahaan Film Negara
30	Hasan Gayo	Wartawan "Sulindo"

Usaha pemerintah daerah di Aceh mengalami jalan buntu. Dua hari kemudian, 26 Mei 1959, sesudah kebuntuan ini mencapai klimaksnya, Ali Hasjmy dan Letnan Kolonel T. Hamzah dengan sangat cerdas mengambil inisiatif yang akhirnya sampai pada sebuah persetujuan sementara dengan pemimpin-pemimpin Dewan Revolusi NBA-NII yang menerima usul-usul Pemerintah Pusat. Secara tertulis mereka sendiri berjanji kembali ke haribaan Republik dan mengucapkan sumpah setia kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Realisasi dan aplikasi dari kompromi ini sesungguhnya masih samar-samar. Seperti telah ditetapkan PM Djuanda sebelumnya, otonomi janganlah ditafsirkan sedemikian rupa hingga setiap ketentuan baru yang diadakan akan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Hardi menambahkan di Banda Aceh, masalah apakah masyarakat Islam di Aceh dapat dipaksakan melaksanakan syariat Islam atau tidak, merupakan persoalan yang akan diputuskan Konstituante, yang ketika itu sedang membicarakan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Ia menghubungkan hal ini dengan Piagam Jakarta, yang kini kembali menjadi masalah yang hangat diperdebatkan dalam Konstituante di Jakarta. Seperti ternyata, kaum politisi Islam tidak cukup kuat untuk meluluskannya kali ini. Satu-satunya hasil yang mereka peroleh ialah diakuinya oleh Soekarno dalam Dekrit yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Piagam Jakarta telah mengilhami Undang-Undang Dasar ini dan merupakan kesatuan dengannya.⁹¹²

Kekaburan kompromi ini menimbulkan beberapa masalah pada 1962. Pada akhir tahun itu tersiar berita, Angkatan Darat Pusat menentang (diberlakukannya hukum Islam di Aceh. Berita ini dibantah juru bicara Tentara. Ia membacakan sebuah pernyataan yang pokoknya berisi (1) hukum Islam tidaklah *a priori* ditolak, karena itu juga tidak di Aceh; (2) dapat dibuat hukum bagi masyarakat Islam yang mungkin disesuaikan dengan hukum Islam; dan (3) Pemerintah Daerah Aceh, sesuai dengan keterangan Misi Hardi, boleh mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hukum Islam, asal saja ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum kebijaksanaan negara, kepentingan umum, atau peraturan hukum tingkat yang lebih tinggi. Dalam pembicaraan tentang kompromi politik ini, turut serta Menteri Agama, yang menyatakan dirinya yakin Angkatan Darat Pusat mengakui dan karena itu tidak menolak prinsip hukum Islam di Aceh.

Selanjutnya disetujui secara prinsip, sebagian prajurit Tentara Islam, setelah melalui *screening* wajib, akan dijadikan wajib militer darurat. Kemudian, pada 1 Oktober disetujui akan dibentuk Divisi Tengku Chik di Tiro sebagai bagian khusus dari Divisi Tentara di Aceh. Pegawai-pegawai negeri *Darul Islam* yang mengikuti Dewan Revolusi mendapat perlakuan yang sedikit banyaknya sama.⁹¹³ Usaha yang menyatakan bahwa di mana mungkin mereka akan diintegrasikan ke dalam Pemerintahan Republik dikukuhkan para penguasa militer pusat pada akhir Oktober. Ini berarti memberikan kuasa kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk mengangkat bekas pemberontak yang

⁹¹² C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993), hlm. 264.

⁹¹³ B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), hlm. 90-100.

telah menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia pada jabatan-jabatan dalam pemerintahan sipil.⁹¹⁴

Persetujuan Mei secara resmi diterima para pendukung Dewan Repolusi pada suatu konferensi besar yang diadakan dalam minggu pertama November. Pada akhir bulan itu Nasution bertolak ke Pidie. Di sini ia menerima pemberian hormat lima ribu pendukung Dewan Repolusi.⁹¹⁵ Suasana ini benar-benar memperlihatkan betapa sebuah sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) mestilah akomodatif terhadap semua tuntutan rakyat. Karena rakyatlah pemilik saham terbesar negara ini. ***



⁹¹⁴ Ini berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat No. 010541959 31 Oktober 1959. Indonesia berada dalam keadaan perang dari Maret 1957 sampai Maret 1962. Selama masa ini terdapat Penguasa Perang Pusat (Peperpups dan di provinsi-provinsi Penguasa Perang Daerah (Peperda). Di Aceh yang menjadi ketua Peperda adalah panglima militer, Sjammaun Gaharu, dan wakil ketua gubernur Ali Hasjmy. Lihat Hardi, Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), hlm. 149-172.

⁹¹⁵ Abdul Murat Mat Jan, "Gerakan Darul Islam di Aceh 1953-1959", dalam *Akademika* 8, 1976 hlm. 43.

BAB 13

REINTEGRASI DAN REKONSIALIASI PASCA KONFLIK

PEMBERONTAKAN ini diakhiri dengan sebuah musyawarah besar, sebuah perhelatan diskursus keacehan dalam keindonesiaan. Jika pada awalnya pemberontakan dimulai dengan Kongres Ulama di Medan, maka kisahnya ini pun diakhiri dengan sebuah kongres dalam bentuknya yang lain, yaitu: MKRA (Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh). Ini berarti akhir yang sesungguhnya dari jihad suci menegakkan *Darul Islam* Negara Islam, termasuk jihad menegakkan Negara Islam di Aceh, meskipun tertunda namun sudah mendapatkan akomodasi politik yang sangat besar, sebuah pengakuan akan jati-diri Aceh dan peneguhan sikap dan keinginan menjalankan syariat Islam. Di sini pada bulan-bulan sebelumnya banyak orang-orang DI yang telah “melaporkan diri” atau “turun gunung” atau menyerah. Kondisi ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah Propinsi Aceh untuk mengadakan perhelatan musyawarah: sebuah upaya untuk mengkonvergensi Aceh dari energi pemberontakan ke energi pembangunan. Keamanan sepenuhnya pulih di Aceh, pada 8 Mei 1962, ketika Daud Beureueh pun tertangkap dan menghentikan perlawanannya.

Untuk merayakan perubahan Aceh dari *dar al harb*, wilayah perang, ke *dar al-salam*, daerah damai (untuk menggunakan ungkapan yang berlaku ketika itu), dan selanjutnya guna mengungkapkan pernyataan resmi akan persatuan Aceh yang telah pulih, diselenggarakan suatu upacara akbar pada akhir tahun itu, yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA), yang berlangsung di Blangpadang dari 18 sampai 22 Desember 1962. Puncak hasilnya adalah Ikrar Blangpadang, yang ditandatangani tujuh ratus orang Aceh terkemuka yang hadir. Mereka berjanji akan memelihara dan membina kerukunan serta memancarkan persatuan dan persahabatan.⁹¹⁶

Sesudah itu Aceh tetap tenang selama kira-kira lima belas tahun. Pada awal 1977, ketika diberitakan lagi tentang kegiatan-kegiatan *Darul Islam* juga di Jawa dan bagian-bagian lain di Sumatera, Hasan Muhammad Tiro memproklamasikan Aceh sebagai negara merdeka. Dengan menamakan dirinya Ketua Front Pembebasan Nasional dan Kepala Negara, ia kembali ke Aceh untuk secara pribadi memimpin perjuangan Gerakan Aceh Merdeka, tetapi gerakan ini tidak banyak memperoleh momentum.

Pemberontakan *Darul Islam* di Aceh adalah satu-satunya pemberontakan *Darul Islam* (dari 5 pemberontakan dengan motif serupa di Indonesia) yang bisa diselesaikan dengan cara kompromi politik. Hal ini dimungkinkan oleh adanya Dewan Revolusi di dalam tubuh *Darul Islam* Aceh di bawah pimpinan Amir Hoesin Al-Moedjahid yang telah diprakarsai oleh Hasan Saleh. Berbeda dengan perjuangan politik Negara Islam lain yang diilhami *Darul Islam*, perjuangan yang khusus ini berakhir secara damai melalui permusyawaratan ketimbang kekalahan militer. Peristiwa ini terjadi sesudah Pemerintah Pusat pada 1959 akhirnya memenuhi tuntutan yang gigih dari rakyat Aceh dan memberikan daerah itu status Provinsi Istimewa, dengan otonomi di bidang agama, hukum adat, dan pendidikan. Di samping itu, Daud Beureueh, pemimpin perjuangan yang benar-benar terpenting ini, yang merupakan salah seorang pejuang mujahidin terakhir yang kembali dari hutan pada tahun 1962, tidak tewas dalam pertempuran atau dihukum mati, tetapi diberi ampun.

⁹¹⁶ Lihat Harian *Duta Masyarakat*, tanggal 20-11-1962, tanggal 28-12-1962, tanggal 29-12-1962, tanggal 31-12-1962.

Untuk merayakan perubahan Aceh dari *Dar al harb*, wilayah perang, ke *Dar al-salam*, daerah damai (untuk menggunakan ungkapan yang berlaku ketika itu), dan selanjutnya guna mengungkapkan pernyataan resmi akan persatuan Aceh yang telah pulih, diselenggarakan suatu upacara akbar pada akhir tahun itu, yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA), yang berlangsung di Blangpadang dari 18 sampai 22 Desember 1962. Puncak hasilnya adalah Ikrar Blangpadang, yang ditandatangani tujuh ratus orang Aceh terkemuka yang hadir. Mereka berjanji akan memelihara dan membina kerukunan serta memancarkan persatuan dan persahabatan.⁹¹⁷

Musyawarah kerukunan Rakyat Aceh ini merupakan sebuah upaya Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang menyerukan "*nibak tje-bre, get meusaboh, tameudjroh-droh ngon sjeedara*" (daripada berpecah belah, lebih baik kita berbaik-baikkan sesama saudara).⁹¹⁸ Bagi banyak orang Aceh, MKRA ini merupakan suatu rekonsiliasi rakyat Aceh yang menghasilkan Ikrar Blangpadang yang meskipun tidak tepat benar akomodasi politik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Jakarta) ini, harus diterima dengan hati yang lapang. "*Beuthat tameh surang sureng, asaj puteng roh lam bara*" (bagaimanapun bengkoknya tiang asalkan ujung pahatan masuk ke dalam lubang kayu), sebuah ungkapan kultural yang sangat teknis tentang membangun Aceh, sebuah "rumah bersama" yang dihuni oleh semua komponen yang selama ini kurang puas dengan "proses pembuatannya" yang mungkin harus dilalui dengan segala kepayahan.

Di sini, kaum pemberontak DI diharapkan secara sangat diplomatis untuk bersedia berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan mengingatkan mereka, para pejuang DI, yang sudah bersepakat dalam berbagai ikrar dan musyawarah. Musyawarah adalah norma politik penting masyarakat Aceh, dan panitia MKRA kembali mengingatkan bahwa "*buet mupakat beu tadjundjong, bek meukong-kong ngon sjeedara*"⁹¹⁹ (hasil mufakat harus kita junjung dan jangan berkelahi dengan sesama saudara).

Sesudah itu Aceh tetap tenang selama kira-kira lima belas tahun. Pada awal 1976, ketika diberitakan lagi tentang kegiatan-kegiatan *Darul Islam* di Jawa dan juga bagian-bagian lain di Sumatera, Hasan Muhammad Tiro memproklamasikan Aceh sebagai negara merdeka. Proklamasi ini, dengan mengambil cara pandang Nazaruddin Sjamsuddin,⁹²⁰ adalah "getara-getaran" dari gerakan pemberontakan *Darul Islam* yang secara ideologis belum terakomodasi secara penuh. Dengan menamakan dirinya Ketua Front Pembebasan Nasional dan Wali Negara, Hasan Tiro kembali ke Aceh pada tahun 1976 untuk memimpin sendiri perjuangan Gerakan Aceh Merdeka, tetapi gerakan ini tidak banyak memperoleh momentum hingga tahun 1985.***



⁹¹⁷ Lihat Harian *Duta Masyarakat*, 20 Nopember 1962; 28-29 Desember 1962; dan 31 Desember 1962.

⁹¹⁸ Tgk. Abdullah Arif Atjeh, *Sja'ir Kerukunan Ra'jat Atjeh*, (Kutaradja: Penerbit dan Pustaka Darussalam, 1962), hlm. 2.

⁹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

⁹²⁰ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum republik, Kasus Darul Islam Aceh (1953-1962)*, (terj.), (Jakarta: Pustaka Grafiti Pers, 1995), bagian pengantar.

BAB 14

KESIMPULAN

TIDAK banyak yang tahu bahwa Darul Islam di Aceh adalah bagian dari gerakan Darul Islam yang diproklamasikan oleh S.M. Kartosoewirjo di Jawa Barat.⁹²¹ Bahkan dunia Barat, melalui media dan persnya, menyebut sejumlah pemberontakan Darul Islam di awal kemerdekaan yang dialami Indonesia dari tahun 1949 hingga 1953 sebagai “*the unknown war*” (perang yang tak diketahui).⁹²² Dalam pandangan Barat, populasi Islam di Indonesia —yang berjumlah 68 juta jiwa ketika itu— adalah populasi Muslim terbanyak di dunia yang terdiri dari kaum petani subsisten yang lemah yang hanya berpuas diri dengan memanen setangkup getah karet, se-*gunca* padi, seikat tebu, sekarung teh dan sekaleng kopi. Selain itu, yang diketahui umum adalah bahwa Indonesia menyimpan bara api berbahaya di satu sudut kehidupan subsistennya —yang sama berbahayanya dengan gugusan gunung berapi di setiap pulaunya— yaitu Islam. Islam telah memberikan kekuatan dan spirit untuk menghadapi kolonial Belanda dan pemerintahan Republik. Bagi Barat yang awam, Darul Islam adalah “*a fanatic guerilla organization*” yang mengganggu Republik Indonesia yang baru berdiri dengan kekacauan dan perang sipil.⁹²³ Padahal, jauh dari sekedar sebuah penjelasan tentang fanatisme, banyak alasan yang perlu diungkapkan untuk memberikan gambaran yang lebih distingtif tentang Darul Islam, khususnya di Aceh.

⁹²¹ Untuk kasus Darul Islam, lihat beberapa referensi lain, di antaranya adalah: Van Nieuwenhuijze, “The Dar-ul-Islam Movement in Western Java till 1949,” dalam *Aspects*, hal.161-179; George McTurnan Kahin, *Nationalism*, hal.326-331; Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Massachusetts: University of California Press, 1983); Henri J. Alers. *Om een Rode of Groene Merdeka*, Eindhoven: EJ Brill, 1956, hal. 240-274; C. van Dijk, *Revolution Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*; B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Indonesia: 1945-1970*; Holk Harald Dengel, *Darul Islam: Kartosuwirjo’s Kampf um Einen Islamischen Staat in Indonesia*, Heidelberg: Heidelberg Universiaet, 1990. Sumber-sumber Indonesia adalah: Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo*, (Jakarta: Darul Falah, 2000); lebih lanjut ada buku-buku kecil yang dimaksudkan sebagai bacaan anggota militer, seperti Zainabun Harahap, *Operasi-Operasi Militer Menumpas Kahar Muzakkar*, (Jakarta, 1965), dan Anna Marie The, *Darah Tersimbah di Djawa Barat*, (Jakarta, 1968). Bahan selanjutnya diperoleh dari arsip militer dan wawancara di daerah tempat kejadian di berbagai wilayah di Aceh.

⁹²² *Time*, 16 Februari 1953.

⁹²³ *Ibid.*

Sebuah bangsa mengalami konflik atau konsensus karena alasan-alasan tertentu. Bangsa 'bersepakat bersatu' atau 'bersepakat untuk berpisah' karena alasan-alasan yang kesemuanya sesungguhnya merupakan pilihan dengan *label price* harga mati. Dengan memperhatikan alasan-alasan dari semua daerah yang bergolak, dari dulu hingga sekarang, sesungguhnya ter-dapat sebab-sebab yang menjadi pemicu rapuhnya alasan-alasan persatuan lama. "This nation," tulis Fachry Ali, "stood on the fragile foundation."⁹²⁴ Oleh karenanya, fondasi di mana ditanam alasan-alasan yang *beyond imagination* tersebutlah yang harus dilihat pertama kali untuk menilai realitas terkikisnya alasan-alasan untuk bersatu di dalam ikatan sebuah bangsa dan negara. Misalnya, untuk kasus "pemberontakan" *Darul Islam* atau *Negara Islam Indonesia* di paruh kedua tahun 1953 adalah sebuah luapan ekspresi cita-cita yang hidup dalam benak dan semangat kalangan nasionalis Islam, tidak hanya di Aceh, melainkan juga di Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi. Islam adalah ideologi dan cara hidup yang dianut mayoritas rakyat. Bermula dari Jawa Barat, *Darul Islam* diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 dengan nama resmi *Negara Islam Indonesia* (NII) dengan dukungan bala tentaranya yang disebut sebagai *Tentara Islam Indonesia* (TII). Masa pasca 1945 hingga 1960 adalah masa *booming* deprivatisasi agama pada awal 1945 hingga 1960-an, tidak hanya di Aceh mengilhami munculnya peran-peran agama yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat. Demikian halnya wilayah politik yang secara tradisional masih tabu dengan nilai-nilai profetis yang menjadi *trade mark* pesan agama. Setelah agama menjadi masalah publik, masalah politik (harus) selalu bersinggungan dengan agama, baik pada tataran etik-normatif maupun praktik. Mengungkapkan sejarah perjuangan *Darul Islam* di Indonesia, sama pentingnya dengan mengungkapkan kebenaran. Sebab perjalanan sejarah gerakan ini telah banyak terdistorsi oleh kepentingan penguasa yang memiliki haluan ideologis yang non-Islam.

Pada masa kolonial, struktur dan komposisi kekuasaan di atas mengalami perubahan setelah masuknya kolonial Belanda dengan cara fisik yang menyebabkan jatuhnya kekuasaan sultan secara definitif. Kekuasaan kolonial muncul dan menggeser kekuasaan sultan menjadi kurang lebih sama atau di bawah kekuasaan ulama dan *uleebalang*. Kekuasaan sultan selanjutnya melebur atau mengalami amalgamasi dengan kelompok *uleebalang* atau kelompok ulama. Sultan Aceh terakhir ditangkap dan diasingkan, sehingga pengaruh dan kuasanya sirna di masyarakat. Perjuangan repatriasi kekuasaan kesultanan Aceh dilanjutkan oleh kalangan ulama. Bahkan setelah penetrasi sistem kolonial begitu mendalam ke masyarakat Aceh, kekuasaan kolonial hampir hilang sama sekali. Sehingga yang tinggal hanyalah komposisi 3 struktur kekuasaan saja: (1) *uleebalang*, (2) ulama, dan (3) rakyat biasa. Mulai saat itulah kohesi sosial politik golongan-golongan masyarakat yang mendukung struktur sosial Aceh menjadi retak.⁹²⁵ Keretakan ini kemudian terus-menerus berimplikasi terhadap dinamika dan pergolakan politik di Aceh. Retakan kohesi sosial-politik ini sangat jelas terlihat pada pergeseran afiliasi politik di antara tiga golongan utama masyarakat Aceh. Sebagian besar golongan *uleebalang*, sesuai dengan politik pecah-belah Belanda, lebih berafiliasi pada pemerintah kolonial. Sementara, golongan ulama cenderung tetap bersatu dengan sultan. Bahkan dalam beberapa hal fungsi kepemimpinan sultan cenderung berpindah ke tangan para ulama. Terutama gejala ini terlihat dalam gerakan-gerakan perlawanan melawan pemerintah kolonial. Meskipun demikian, harus pula diingat bahwa tidak semua golongan *uleebalang* cenderung berafiliasi dengan pemerintah kolonial. Sebab, seperti tercatat dalam sejarah, banyak pula terdapat kaum *uleebalang* menjadi pemimpin perlawanan yang gigih terhadap Belanda. Bahkan, dalam hal ini, Belanda punya kecenderungan untuk memainkan peranannya sebagai penguasa tunggal. Dalam saatsaat tertentu, terutama ketika hubungan *uleebalang* menjadi dekat,

⁹²⁴ Fachry Ali, "The Revolt of Nation-state Builders: The Case of Acehnesse *Darul Islam* and West Sumatran PRRI", tesis master yang tidak diterbitkan, (Melbourne: Monash University, 1986).

⁹²⁵ Fachry Ali, *Golongan agama dan Etika Kekusaan: Keharusan Demokratisasi Islam di Indonesia*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 106.

mereka bisa mempromosikan golongan sultan untuk lebih dekat dengan pemerintah kolonial. Akan tetapi jelas pula, bahwa dengan munculnya pemerintah kolonial, dinamika dan pergolakan politik di Aceh lebih ditentukan oleh ketidakmampuan struktur sosial masyarakat Aceh. Ini terutama ditandai oleh persaingan yang tajam antara golongan ulama clan *uleebalang*. Golongan ulama, pada dasarnya merupakan golongan mayoritas di dalam masyarakat, terutama karena ia lebih dekat dengan rakyat banyak. Sementara golongan *uleebalang*, merupakan kalangan minoritas. Akan tetapi justru karena itu pula, konflik di antara mereka menjadi semakin tajam. Sadar akan kekuatan perlawanan yang potensial di pihak ulama, pemerintah kolonial berusaha menetralkan kekuatan itu lewat kemudahan-kemudahan pendidikan bagi kaum *uleebalang*. Sebagai akibatnya, kaum ulama semakin merasa terancam. Mereka menyaksikan dan juga mengkhawatirkan bahwa sebagian dari anak-anak muda Aceh sudah mulai tersosialisasikan ke dalam sistem pendidikan Barat. Kenyataan ini dilihat semakin memperkuat kedudukan *uleebalang* dan dengan demikian sekaligus akan semakin memperlemah kedudukan mereka. Suasana yang penuh dengan benih-benih konflik ini semakin dipanaskan oleh munculnya perkembangan baru: munculnya Muhammadiyah. Organisasi pembaharu Islam ini menjadikan afiliasi-afiliasi politik dan sosial masyarakat Aceh semakin rumit. Di satu pihak, karena organisasi itu bersifat apolitis, maka ia cenderung mempergunakan kaum *uleebalang*, clan dengan sendirinya pula, memperkuat posisi kelompok ini. Tentu saja, golongan ulama menjadi semakin terdesak. Hal inilah yang mendorong mereka berpacu untuk menandingi gerakan Muhammadiyah.⁹²⁶ Modernisasi pemikiran dan sistem pendidikan Islam pun dilancarkan oleh kaum ulama. Akan tetapi, reaksi ini menimbulkan bentuk konflik yang lain, dan justru terjadi di dalam tubuh kaum ulama. Modernisasi yang dilancarkan ini telah menimbulkan perpecahan antara ulama reformis dan ulama tradisional. Sebagai akibatnya, ulama tradisional cenderung berafiliasi dengan golongan *uleebalang*, sampai dengan menjelang runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda, struktur sosial masyarakat Aceh tegak pada dasar yang goyah. Dalam pengertian bahwa struktur sosial itu mengandung benih-benih konflik. Kelompok-kelompok pendukung struktur sosial itu telah terperangkap ke dalam suasana prasangkayangmendalam. Dalam kondisi yang semacam itulah kita menyaksikan afiliasi-afiliasi sosial-politik yang relatif "aneh". Belanda melancarkan "modernisasi" masyarakat Aceh untuk menetralkan pengaruh atau kekuatan ulama. Untuk tujuai, itu, ia berafiliasi dengan kaum *uleebalang*. Sejalan dengan sifat Muhammadiyah yang apolitis, *uleebalang* bisa bekerja sama dengan organisasi itu. Akan tetapi, karena terjadi perpecahan di dalam tubuh kalangan ulama, ulama-ulama tradisional - jadi agak bertentangan dengan modernisasi Belanda-berafiliasi dengan *uleebalang*. Dan untuk menghadapi pengaruh kaum ulama, kaum *uleebalang* cenderung membangun citranya sebagai kalangan yang mempertahankan "adat Aceh". Sementara, justru untuk membendung pengaruh Muhammadiyah, sebagian dari kalangan ulama melancarkan gerakan reformasi. Berdirinya organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), adalah refleksi dari usaha ulama-ulama berhaluan modernis dalam menandingi Muhammadiyah.⁹²⁷

Dalam komposisi struktur sosial yang semacam ini, Daud Beureueh berada dalam kalangan ulama reformis. Dialah salah seorang tokoh utama yang mendirikan PUSA. Dan dia pula yang menjadi ketua organisasi itu. Dengan demikian, jelas sekali terlihat bahwa dalam struktur sosial masyarakat Aceh di masa kolonial —yang penuh dengan benih konflik itu— Daud Beureueh memimpin golongan yang semakin lama semakin terdesak. Suatu golongan sosial-politik Aceh yang menjadi "kuda hitam" dan paling artikulatif dalam gerakan dan menyuarakan sikap anti Belandanya. Dukungan massa yang besarlah yang menyebabkan kaum ulama reformis ini menjadi

⁹²⁶ Fachry Ali, *Ibid.*

⁹²⁷ Fachry Ali, *Ibid.*

“kuda hitam” dalam percaturan politik Aceh.⁹²⁸ Dan itu pula salah satu yang menjadi sebab, mengapa, walaupun semakin terdesak oleh berbagai pihak, kaum ulama reformis Aceh di bawah pimpinannya, tetap bisa bertahan. Sementara, baik kekuatan *uleebalang* maupun ulama tradisional tidak bisa mengunggulinya. Dalam kondisi *status quo* kekuatan-kekuatan sosial-politik Aceh inilah pula kita bisa memahami akan selalu timbulnya kebutuhan untuk meminjam tenaga luar guna memperkuat kedudukan golongan masing-masing. *Uleebalang* dalam hal ini relatif lebih beruntung. Sebab dalam posisinya yang berhadapan dengan kelompok Daud Beureueh, ia bisa meminjam kekuatan Belanda. Mungkin hal ini pula yang mendorong kaum ulama reformis untuk menghubungkan dirinya dengan kekuatan Jepang sebagai tandingan kekuatan Belanda. Dari sinilah muncul organisasi F atau *Fujiwara* - salah satu nama keluarga Jepang - yang mengorganisasikan pemberontakan terhadap Belanda dengan bantuan Jepang. Tentu saja, seperti yang dituturkan Van Dijk,⁹²⁹ organisasi F ini, tidak hanya melulu terdiri dari ulama reformis. Sebab disamping itu terdapat pula unsur-unsur *uleebalang* nasionalis, seperti Teuku Nya' Arif dan Teuku Panglima Polem Muhammad Ali.⁹³⁰

Pada masa pasca-kolonial, struktur masyarakat Aceh mengalami perubahan dengan banyaknya unsur-unsur luar yang semakin merumitkan suasana sosial Aceh. Dalam konteks struktur sosial masyarakat Aceh pasca-kolonial yang masih belum mantap, dan dalam komposisi serta afiliasi sosial-politik yang penuh dengan benih konflik dan dalam suasana yang selalu menimbulkan kebutuhan untuk ‘meminjam tenaga luar’ itulah kita lebih bisa memahami secara lebih kongkret dan riil “kejutan” munculnya “pemberontakan” DI yang sebenarnya berasal dari Jawa Barat. Dalam masa pemerintahan Jepang, jelas sekali kaum ulama reformis menggunakan kekuatan luar inilah yang memberikan peluang meletusnya peristiwa Cumbok, dimana sisa-sisa kaum *uleebalang* dihancurkan.⁹³¹ Kaum *uleebalang* ini, dengan merosotnya kekuatan Jepang dalam bulan Agustus 1945, mengharapkan kembalinya kekuasaan Belanda sebagai sumber dari tenaga luar mereka, berhadapan dengan ulama reformis. Dan justru karena kekhawatiran akan kembalinya kekuasaan Belanda —setidak-tidaknya, inilah yang terbaca dalam *introduction* tesis Nazaruddin Syamsudin⁹³²— kaum ulama reformis secara cepat menerima kehadiran Republik Indonesia.

Tentu saja, kesimpulan ini tidak bisa diterima secara mutlak. Sebab, seperti Anthony Reid⁹³³ menyatakan, sudah sejak tahun 1920, semangat nasionalisme telah tersebar di daerah Aceh. Ini terbukti dari pidato Abdoel Manap pada tahun itu di pedesaan Aceh, tentang perlunya kesatuan dan kesepakatan nasional. Daud Beureueh sendiri, lewat kekuatan luar juga (dalam hal ini Pemerintah Republik ketika ia bersama para ulama menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta), terpilih sebagai Gubernur Militer Aceh dan Tanah Karo. Akan tetapi juga jelas, bahwa dengan meminjam tenaga luar (dalam hal ini Darul Islam Jawa Barat), kaum ulama reformis semakin meneguhkan kekuatan dan kekuasaannya di atas golongan sosial-politik lainnya.⁹³⁴ Namun, dalam kontes perebutan pengaruh dan

⁹²⁸ Tentang hal ini, lihat misalnya C. van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993).

⁹²⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

⁹³⁰ *Loc.cit.*

⁹³¹ Anthony Reid dan Shiraishi Saya, “Rural Unrest in Sumatra, 1942: A Japanese Report”, dalam *Indonesia* 21 (April 1976), hlm. 115-133.

⁹³² Nazaruddin Sjamsuddin, *The Republican Revolt, The Case of Achehnese Darul Islam*, (Singapore: ISEAS), 1985, hlm. vi.

⁹³³ Anthony Reid, “The Birth of Republic in Sumatra” dalam *Indonesia*, 12, (Oktober 1971).

⁹³⁴ Tulisan Fachry Ali, meskipun diakui sendiri sebagai sebuah responsi teoritikal, namun sudah menjadi sebuah teori yang bisa menjelaskan mengapa Darul Islam muncul di Aceh. Kekurangan yang menyolok dalam tulisannya sangat mungkin terletak pada ketiadaan data. Karena itu, asumsi dan interperetasinya harus dibuktikan melalui buku ini. Meskipun Fachry Ali lebih cenderung menyebutnya sebagai hipotesa-hipotesa tentatif untuk namun sangat berguna untuk studi tentang perubahan, atau juga kelanjutan dinamika dan pergolakan

kekuasaan apakah sehingga ia harus mengusir pengaruh Pancasila dan komunisme dengan tanpa memakai cara-cara separatis. Darul Islam bukan anti Indonesia, melainkan anti-Pancasila, anti-Marhaenisme, anti-Komunisme dan demokrasi. Untuk melihat bagaimana ideologi Darul Islam bisa *compatible* dengan *worldview* orang-orang Aceh, kita terlebih dahulu harus memahami sejarah peran kaum ulama, organisasinya (PUSA) dan perjuangan politiknya dalam mengusir Belanda, memasukkan Jepang —untuk kemudian diusir kembali dari Aceh. Perseteruannya dengan kaum *uleebalang* dan strategi politiknya dalam menolak pengaruh Muhammadiyah di Aceh.

Sebelum PUSA menyelenggarakan sebuah perhelatan besar kaum ulama di Medan dalam bentuk Kongres Ulama Seluruh Indonesia, Teungku Daud Beureueh dan beberapa anggota PUSA, khususnya Pemuda PUSA, ternyata sudah menjalin ‘hubungan diplomatik rahasia’ dengan S.M. Kartosoewirjo di Jawa Barat. Hubungan rahasia ini dijalin dengan modus yang sama dengan *plot* memasukkan Jepang ke Aceh. Teungku Daud Beureueh dan kaum ulama di dalam PUSA merasa perlu “meminjam tenaga luar” untuk membasmi komunisme dan ideologi Pancasila yang dirasakannya semakin hari semakin jauh dari nuansa Islami yang dulu dicita-citakan banyak rakyat Aceh ketika merebut kemerdekaan dan mempertahankan Republik dan Agresi Belanda Pertama dan Aksi Polisionil Belanda Kedua. Merasa bahwa hanya SM Kartosoewirjo dengan jajaran Darul Islam dan bala tentara TII-nya yang bisa menghalau gurita komunisme dan Pancasila, maka Teungku Daud Beureueh serius melakukan kontak rahasia dengan Jawa Barat.

Kekecewaan rakyat Aceh ini ditangkap dengan sangat cerdas oleh Imam NII, S.M. Kartosuwirjo, yang segera mengirim seorang utusan, Abdul Fatah Wirananggapati,⁹³⁵ alias Mustafa,⁹³⁶ untuk mendekati para pemimpin Aceh pada awal tahun 1952. Melalui Abdul Fatah Wirananggapati⁹³⁷, Kartosuwirjo mengirimkan beberapa tulisan⁹³⁸ dan maklumat NII tentang gerakan Darul Islam, dan mengajak para pemimpin Aceh untuk bergabung. Ajakan ini mendapat sambutan baik di Aceh. Pendekatan lebih lanjut terjadi ketika Daud Beureueh mengirim seorang utusan, Jahja Sulaiman, seorang pemimpin Pemuda PUSA dari Meureudu, kepada SM Kartosuwirjo di Jawa Barat, bersama Abdul Fatah yang kembali ke sana. Daud Beureueh dan pemimpin PUSA lainnya merasa kecewa terhadap penjelasan yang tidak jelas dari SM Kartosuwirjo yang hanya berisi konsep-konsep ideologis gerakan Darul Islam tanpa memberikan informasi mengenai struktur gerakan itu.⁹³⁹ Struktur adalah hal terpenting untuk memahami manajemen dan pengelolaan gerakan, apalagi untuk sebuah gerakan menentang kekuasaan sebuah negara yang didukung oleh rakyat banyak. Teungku Daud Beureueh pun mengirimkan utusan ke Jawa Barat bersama dengan Abdul Fatah Wirananggapati untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang Darul Islam sebagai sebuah negara. Oleh sebab itulah utusan Aceh tersebut diberi wewenang untuk membahas secara mendalam susunan pemerintahan dan militer NII dengan Kartosuwirjo. Daud Beureueh mengirimkan surat kepada Kartosuwirjo, bertanggal Aceh Darussalam, 4 Oktober 1956. Dalam suratnya, Daud Beureueh juga membicarakan hubungan awal di antara kedua pemimpin itu.⁹⁴⁰ Akan tetapi utusan tersebut tidak pernah bertemu muka dengan Kartosuwirjo melainkan dengan sejumlah pemimpin Darul Islam lainnya. Ia juga tidak memperoleh informasi yang dikehendaki oleh para pemimpin Aceh, malah disuruh kembali ke

politik masyarakat Aceh masa DI atau GAM sekarang ini. Fachry Ali, *Ibid*.

⁹³⁵ Wawancara dengan Abdul Fatah Wirananggapati, Sumedang, 1 November 1991.

⁹³⁶ Memakai nama alias atau *nama tsani* adalah tradisi politik dan strategi taktik yang sudah mentradisi dalam gerakan Darul Islam dan mereka memiliki alasan pembenaran yang kuat akan taktik nama alias ini, misalnya untuk keamanan dan siasat dengan pihak musuh.

⁹³⁷ Wawancara dengan Abdul Fatah Wirananggapati, Sumedang, 9 Oktober 1987.

⁹³⁸ Dia antara tulisan-tulisan tersebut adalah *Pedoman Dharma Bhakti*, jilid 1 dan 2, juga *Manifesto Politik NII*.

⁹³⁹ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik...*, hlm.90

⁹⁴⁰ Nazaruddin Sjamsuddin, *Ibid.*, hlm. 89.

Aceh bersama Abdul Fatah Wirananggapati. Kali ini Abdul Fatah diangkat sebagai kuasa usaha NII di Sumatera dengan tugas membina gerakan Darul Islam di pulau itu. Abdul Fatah tampak tidak sabar melihat pemimpin-pemimpin Aceh yang bergerak sangat lambat walaupun ia diyakinkan bahwa mereka sedang menuju ke arah pemberontakan. Dia tidak meninggalkan Aceh sampai awal tahun 1953. Saban hari dan malam Abdul Fatah Wirananggapati menjelaskan konsep-konsep kenegaraan dari NII dan seperti melakukan *tentir* kepada Teungku Daud Beureueh. Ia sedikit sekali bersosialisasi dengan masyarakat Aceh sehingga menikah dengan seorang puteri Aceh pun ia tak sempat karena saking padatnya acara *tilawah* (proses transmisi ideologi *a la* Darul Islam) kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh dan para anggota PUSA. *Tilawah* ini dilakukan dengan sangat pelan, hati-hati dan penuh dengan perdebatan. Daud Beureueh sangat serius mendengarkannya dan mempertanyakan setiap konsep, tahapan dan cara-cara serta mekanisme kenegaraan secara mendetail kalau sudah bergabung dengan Darul Islam. Teungku Daud beureueh adalah seorang ulama yang tidak menyombongkan diri, ia adalah ulama besar dengan kharisma besar dan pernah menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo untuk jangka waktu yang sangat panjang dan terbiasa dengan manajemen organisasi negara, *state-craft* serta administrasi pemerintahan. Daud Beureueh lama mempertimbangkan kesediaannya untuk ikut bergabung dengan barisan jihad mati-matian *a la* Darul Islam. Namun, dengan segala kerendahan hati, ia kemudian mengakui akan keberanian Abdul Fatah Wirananggapati atas kesabarannya melakukan diskusi *tilawah* yang sangat alot. Pada akhirnya, Teungku Daud Beureueh pun setuju bergabung dan siap berjihad *fi sabilillah* menegakkan negara kurnia Allah, Negara Islam Indonesia.

Pada awal tahun 1953, Teungku Daud Beureueh ber-*bai'at* untuk jihad menegakkan Negara Islam Indonesia di Aceh. Abdul Fatah Wirananggapati sendiri yang melakukan *bai'at* tersebut. Teungku Beureueh tidak meminta untuk dibai'at oleh SM Kartosoewirjo, karena bergabungnya dia ke dalam barisan Darul Islam bukanlah karena kultus individu terhadap SM Kartosoewirjo. Dalam kapasitas dan keseniorannya, ia lebih sedikit dibanding SM Kartosoewirjo dan ia sendiri tidak membangga-banggakan kharisma yang dimilikinya tersebut. Bagi Teungku Daud Beureueh, kemuliaan manusia ditentukan oleh derajat ketakwaannya, bukan oleh ilmu, harta, tahta dan wanita yang dimilikinya. Ketika Daud Beureueh setuju mendukung Darul Islam dan membawahkan Aceh pada NII, maka Abdul Fatah Wirananggapati pun pulang ke Jawa Barat membawa berita gembira ini kepada SM Kartosoewirjo nun jauh di sana, di pegunungan yang sunyi tempat ia bersembunyi dan melawan negara RI di suatu tempat yang disebut "Madinah Indonesia".⁹⁴¹

Dalam surat Teungku Daud Beureueh kepada SM Kartosoewirjo bertanggal Aceh Darussalam, 4 Oktober 1956, disebutkan bahwa sebelum meletusnya peristiwa "pemberontakan" DI Aceh, S.M. Kartosoewirjo sudah memberitahukan kepada Teungku Daud Beureueh melalui utusannya bahwa dalam keadaan darurat para pemimpin DI Aceh dapat bertindak dengan mengatasnamakan pimpinan pusat di Jawa Barat, terutama dalam bidang hubungan internasional.⁹⁴² Kondisi "negara yang sedang berjuang" memang membutuhkan banyak improvisasi dari para pelaku (pemberontakan) untuk bisa tetap survive. Perang gerilya sendiri merupakan taktik improvisasi dalam peperangan. Bagi kalangan Darul Islam, agama Islam memberikan cukup *room for improvement* dalam pelaksanaan ajaran-ajarannya. Jika tidak ada improvisasi, maka ajaran-ajaran agama akan hanya tinggal praktek *ubudiyah*⁹⁴³ yang statis.

Kongres 'Alim Ulama se-Indonesia, yang telah berlangsung di Medan pada bulan

⁹⁴¹ "Madinah Indonesia" adalah tempat di mana SM Kartosoewirjo bermarkas, Dipercayai oleh sebagian orang bahwa "Madinah Indonesia" adalah desa Leuwisari, Cigalontang, sebelah selatan Tasikmalaya. Lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik...*, hlm. 250.

⁹⁴² Surat Teungku Daud Beureueh kepada SM Kartosoewirjo, bertanggal Aceh Darussalam, 4 Oktober 1956, sebagaimana dikutip dalam Nazaruddin Sjamsuddin, *Ibid.*, hlm. 251.

⁹⁴³ *Ubudiyah* (Bhs. Arab) artinya ibadah-ibadah ritual.

April 1953, di mana Teungku Muhammad Daud Beureueh memegang pucuk pimpinan selaku Ketua Umumnya, di antara lain dengan suara bulat dan sepakat, telah mengambil keputusan: “Memperjuangkan dalam pemilihan umum yang akan datang supaya negara RI ini menjadi Negara Islam Indonesia.”⁹⁴⁴ Sebenarnya, amanat memperjuangkan Islam secara demokratis (melalui parlementer dan pemilu) sudah ditempuh dengan banyak kesalahan dan kekalahan yang fatal, sehingga mengharuskan para pembuat keputusan dalam kongres tersebut untuk melaksanakannya di lapangan perang.

Demikianlah salah satu keputusan, keputusan yang harus diperjuangkan dengan segenap pikiran dan dengan segenap tenaga dan harta benda dan jika perlu dengan berkuah darah, seluruh ummat Islam di bawah pimpinan ulama-ulamanya harus dapat bersatu dan berjuang untuk meng-Islamkan RI ini. Sekalian Alim Ulama dan cerdik pandai yang hadir dalam Kongres di waktu itu telah berjanji dengan dirinya sendiri dan dengan Allah secara bai’ah (bersumpah) betapa pun susah dan sukarnya pasti segenap keputusan yang telah diambilnya itu akan dilaksanakannya. Sebagai langkah pertama para peserta kongres sekembalinya ke daerahnya masing-masing akan menyarankan dan menyampaikan segenap putusan kongres kepada umum, laki-laki dan perempuan, supaya segenap ummat Islam dapat mengetahui isi kongres tersebut untuk dijadikan pedoman manakala nanti sampai da’wah kepada mereka. Begitu juga supaya tiap kaum muslimin dalam pemilihan umum yang akan datang akan memilih Islam sebagai dasar negaranya.⁹⁴⁵

Para ulama yang insaf dan sadar akan ketinggian Agama Islam, agama yang menjamin hidup berbahagia dunia dan akhirat, agama yang tinggi, tidak ada yang lebih wajib dita’ati oleh segenap muslim yang beriman penuh kepada Allah dan Sunnah Rasul, harus dihormati, dipelihara diperjuangkan dan dipertahankan menjadi Undang-undang dasar hidup dan harus pula menjadi Undang-undang Dasar Negara. Sebab mereka telah muak menonton, melihat, betapa kakafiran-kekafiran ummat manusia, yang telah mencemoohkan dan menghina terus menerus Nabi Muhammad SAW, Al Qur’an dirobek-robek, diinjak-injak, dijadikan bungkusan pisang goreng, dipalsukan, dibakar, dihinakan sebagaimana perlakuan Kartawinata dan sebagainya.⁹⁴⁶ Malahan Pemerintah Indonesia sendiripun telah berani bertindak dengan tegas, melarang beberapa ayat Allah itu dibaca di Radio RI Jakarta, dengan mencoret ayat dan *hadist* yang menjadi keimanan umat Islam sedunia, dengan dikatakan mengganggu ketentraman umum, dan sebagainya.⁹⁴⁷

Memperhatikan juga betapa kecurangan-kecurangan alat Negara yang memeras rakyat, baik dari sudut lalu lintas, dari sudut perdagangan di berbagai jawatan. Memperhatikan juga betapa besarnya sudah berjangkit penyakit korupsi yang dimainkan pegawai negeri Tinggi, menengah dan bawahan yang membuat Negara bangkrut karenanya. Dengan dasar pertimbangan inilah para ulama telah muak dengan sistem pemerintahan. Pancasila, yang sesungguhnya telah menjadi pengetahuan umum, dan memerlukan adanya perubahan-perubahan yang sesuai dengan jiwa dari ummat yang 90% memeluk agama Islam.

Para ulama dengan tegas telah berjanji bahwa untuk menyempurnakan maksud merobah dasar Pancasila kepada dasar ke Islaman, tidak ada daya upaya yang lain selain sekembalinya ke daerah masing-masing mengajak rakyat memperjuangkan Negara Islam dalam pemilihan umum dan konstituante nanti, bahkan jika dengan itu tidak dicapai kemenangan, secara ilegal pun harus ditempuh.

⁹⁴⁴ Lihat hasil-hasil kongres di dalam Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan kaum Republik...*, hlm. 209.

⁹⁴⁵ Hanya saja, dakwah tentang perlunya negara Islam bagi Aceh telah terhenti semenjak ditangkapnya Teungku Muhammad Daud Beureueh.

⁹⁴⁶ Nazaruddin Sjamsuddin, *Op.cit.*, hlm. 225.

⁹⁴⁷ *Ibid.*

Mungkin dengan tekad yang bulat itulah para ulama sekembalinya ke daerahnya masing-masing lalu mengadakan rapat umum dimana-mana menyampaikan segenap keputusan Kongresnya yang baru itu. Oleh karena itulah maka terdengarlah adanya rapat-rapat umum dimana-mana terutama di daerah Aceh, dimana ketua umumnya sendiri Teungku Muhammad Daud Beureueh menjelajah seluruh daratan Tanah Rencong memaparkan keputusan Kongres 'Alim Ulama, di mana antara lain diajaknya agar dalam pemilihan umum nanti ummat Islam harus memilih blok Islam, jika benar-benar menghendaki adanya negara Islam.

Darul Islam adalah perjuangan umat Islam yang bersifat nasional yang juga meletus di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan; tidak hanya di Aceh saja. Perjuangan yang bermuara dari Jawa Barat ini telah mengubah banyak persepsi bangsa Indonesia tentang peran ideologi yang ada dalam sebuah perjuangan selama ini. Perjuangan suci⁹⁴⁸ Darul Islam di daerah-daerah dipimpin oleh tokoh lokal yang memiliki motivasi yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun berangkat dari semangat dan cita-cita yang satu: menegakkan sistem syariah dalam kehidupan kenegaraan.

Banyak studi yang membahas tentang resistensi politik mengalami stagnasi dalam melihat persoalan. Stagnasi itu umumnya hanya melihat persoalan resistensi politik dari sudut pandang "struktur agraria" atau *patron-client* atau "restrukturisasi lembaga negara" atau "kekecewaan orang-orang bawah". Padahal, jauh di dalamnya, sebuah perjuangan suci sebenarnya juga merupakan suatu ekspresi nilai-nilai, suatu pengungkapan idealisme, pemikiran dan keinginan mengadakan perubahan berdasarkan orientasi nilai tersebut yang dianggap berlawanan secara norma umum dari sudut pandang *native's viewpoint* di Aceh, di Priangan, di Jawa, di Makasar, di Kalimantan atau di Palembang, sehingga ia disebut pemberontakan. Di dalam buku ini, akan dicoba diterapkan hipotesa "meminjam kekuatan luar" yang pernah dilontarkan oleh Fachry Ali⁹⁴⁹ menjadi hipotesis dasar bagi buku ini bahwa Darul Islam dari SM Kartosoewirjo adalah "kekuatan luar" yang dipinjam oleh Daud Beureueh untuk mengusir ideologi Pancasila di Aceh, bukan mengusir (bangsa) Indonesia dan tidak bersifat separatis.

Pemberontakan —kalaulah istilah ini layak digunakan— DI/TII Negara Bagian Aceh (NBA-NII) yang dipimpin oleh seorang ulama kharismatik Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah bukti nyata pertama tentang keinginan melepaskan diri rakyat Aceh dari pengaruh komunisme dan Pancasila. Komunisme dan Pancasila adalah paham yang dalam persepsi rakyat Aceh bersifat non-Islami, inilah yang dilawan oleh Darul Islam di Aceh. Jadi, pemberontakan ini sendiri bukanlah pemberontakan melawan negara *an sich*, melainkan hanya melawan ideologi komunisme dan paham Pancasila. Meskipun gerakan ini bisa "dijinakkan" di kemudian hari, bukan berarti hati kecil rakyat Aceh telah menguburkan keinginan tersebut. Dalam bahasa SM Kartosoewirjo, "*Revolusi Islam —djuga di Atjeh dan sekitarnja— akan berkobar teroes-meneroes ta' kundjung padam, selama Negara Kurnia Allah, Negara Islam Indonesia belum berdiri dengan tegak-teguhnya, di permukaan bumi Allah Indonesia.*"⁹⁵⁰ Hal ini dibuktikan bahwa rangkaian gerakan-gerakan perlawanan ideologis rakyat Aceh selanjutnya (Republik Islam Aceh atau RIA) disambung oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) —dengan sedikit modifikasi ke

⁹⁴⁸ Disebut dengan 'perjuangan suci' dalam buku ini bukanlah untuk *exaggerating* melainkan karena motivasi para pelakunya yang berniat suci (berdasarkan nilai-nilai agama dan perintah ulama) dalam menjalankan 'tugas pemberontakan' ini. Bagi para pelakunya, mereka adalah para *political plotters* yang memang berangkat dari sebuah keyakinan akan terciptakan sebuah sistem kekuasaan Islam. Wawancara dengan Tgk Ibrahim, Banda Aceh, 28 Juni 2006.

⁹⁴⁹ Fachry Ali, "Daud Beureueh dan Hipotesa Meminjam Tenaga Luar", *Panjimas*, 1 April 1986.

⁹⁵⁰ S.M. Kartosoewirjo, "Statement Pemerintah NII Tanggal 5 Oktober 1953", bagian VII, dalam Al Chaidar, *Pemikiran Proklamator Negara Islam Indonesia, SM Kartosoewirjo*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), bagian lampiran.

arah separatis— merupakan benang merah metamorfosis dari pemberontakan Darul Islam. ***

PERISTIWA PKI DI ACEH

Bab 1

PENDAHULUAN

PERISTIWA pembantaian sesama bangsa tidak dapat dilupakan, sehingga sejarah mencatatnya menjadi sebuah luka yang tergores. Pembantaian yang dilakukan Partai Komunis Indonesia telah menjadi suatu bagian kelam dalam perjalanan nasib anak bangsa sekaligus menjadikannya suatu pelajaran berharga yang akan menjadi cerminan bagi Indonesia dalam menapaki langkah-langkahnya ke depan.

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah [partai politik](#) di [Indonesia](#) yang ber-ideologi [komunis](#). Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pembe-rontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada [1926](#), mendalangi [pem-berontakan PKI Madiun](#) pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi pemberontakan G30S

pada tahun [1965](#). Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh [Soeharto](#) (dan [CIA](#)). Hal ini masih diperdebatkan oleh go-longan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI.

Keberadaan Partai Komunis di Indonesia, termasuk kemu-dian di Aceh, tidak dapat ditafsirkan secara sederhana, bahwa kelahiran PKI di Indonesia hanya sebagai produk budaya In-donesia sendiri, tanpa keterkaitan dengan dunia luar atau kondisi sosial politik bangsa-bangsa di dunia. Jauh sebelum masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda, rezim komunis telah membentangkan pengaruh ajarannya yang luar biasa di beberapa negara di dunia. Misalnya, negara-negara bekas Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, beberapa negara di Eropa Timur, dan juga Republik Kuba di Amerika Latin. Partai Komunis dunia telah lahir pada beberapa dekade setelah Karl Marx meninggal pada tahun 1883.⁹⁵¹

Setelah revolusi Bolshevik (1917) Partai Komunis mene-mukan tempat yang subur bagi kejayaannya di Uni Soviet Rusia, yang kemudian dikenal dengan partai Komunis Rusia. Di tangan Stalin (1930) Partai Komunis Rusia mencapai kejayaan politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan, yang kemu-dian mulai timbul keinginan untuk menjadikan Rusia sebagai “induk peradaban” kumunis dunia.

Ambisi inilah yang kemudian mendorong gerak langkah ekspansionisme komunis ke seluruh penjuru dunia, baik dalam wilayah kawasan blok timur, terutama Cina, blok barat, maupun kawasan negara-negara non-blok pada waktu itu. Kondisi inilah yang kemudian mengundang kecurigaan Ame-rika (CIA) yang ada pada waktu itu disebut sebagai pemimpin persekutuan blok barat. Amerika merasa khawatir, jika komunisme berkembang atau mendapat sambutan di berbagai negara tertentu, maka eksistensi paham demokrasi, liberal-isme dan kapitalisme yang telah lama menjadi ideologi politik Amerika akan terancam.

Komunisme, harus dipahami, bahwa ia sangat dekat dengan rezim-rezim pemerintahan yang menindas, totaliter dan tiran. Komunisme juga sangat dekat dengan tentara-ten-tara revolusioner yang kejam dan brutal. Komunisme juga dekat dengan system dan kondisi perekonomian yang senjang antara satu golongan masyarakat dengan golongan yanglain, antara buruh dengan majikan, antara kuli dengan manajer, antara barjuis dan proletar. Semua ini merupakan gambaran situasi yang sangat mudah bagi tumbuh-suburnya benih-benih komunisme. Situasi dan kondisi inilah yang menjadi sebab, sehingga komunisme pernah ada di Kamboja, Philipina, Laos, Malaysia, Indonesia, dan juga di Nepal.⁹⁵²

⁹⁵¹ *Karl Marx* lahir di Kota Trier Jerman Barat, 5 Mei 1818 dan meninggal dunia pada tahun 1883, dari keluarga Yahudi beragama Protestan. Tahun 1842 Marx meraih Doktor (Ph.D) dalam ilmu hukum. Marx sangat senang bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar radikal di Jerman dan Perancis. Banyak menulis tentang filsafat, ekonomi dan politik terutama gerakan revolusioner. Di Jerman dan Perancis, Marx berjuang membela kaum buruh. Marx sering menderita dan hidup dalam kepedihan. Sahabatnya *Engels* yang banyak membantu. Kemudian mereka menulis bersama-sama. Ada 40 buku mereka yang terkenal, di antaranya *Das Kapital* dan *Manifesto Komunis* (1967).

⁹⁵² Jiuping, “*9 Komentari Mengenai Partai Komunis*”, PT. Sinar Era Baru, Jakarta, 2005. hlm. 4-5. Dalam buku ini dijelaskan secara gamblang, bahwa perkembangan komunisme di negara-negara tersebut sangat besar peran dan dukungan dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) atau dalam buku lain disebut Partai Komunis Cina (PKC). Jiuping, juga menjelaskan bahwa komunisme menerapkan *teori kompetisi spesies*

Dalam kiprahnya kemudian, PKI Indonesia juga memiliki ciri, watak dan metoda pergerakannya yang mirip dengan apa yang ada pada partai-partai komunis di dunia seperti yang disebut di atas. Pola dan metoda gerakan selalu mengedepankan kekerasan yang berujung pada pembunuhan lawan-lawan politiknya. Dalam rangka ekspansi cita-cita ajarnya itu, PKI di Indonesia juga telah melakukan pemberontakan terhadap negara dan pemerintah Indonesia pada tahun 1948 dan 1965 dengan cara-cara tersebut di atas, melalui pertarungan dan kekerasan. Pemberontakan itu telah menjadi prahara yang berdarah-darah dan akhirnya oleh pemerintah Orde Baru, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.

Dengan itu, citra PKI pada saat ini bukan hanya menimbulkan trauma bagi siapa saja yang terindikasi dan ada kaitan dengannya, tetapi secara ideologis nama itu juga telah menimbulkan kesan yang kuat dalam ingatan dan pemahaman masyarakat Aceh, bahwa PKI sebagai partai sarat dengan kekejaman, sadisme dan lebih dari pada itu semua, PKI juga dicap sebagai gerakan anti Tuhan (atheisme). Konsep dan citra PKI sebagai partai yang anti Tuhan, dalam persepsi orang Aceh hal itu juga identik dengan melawan Allah swt, dan identik pula dengan sikap yang berseberangan dengan ajaran Islam, berikutnya umat Islam dan juga dengan eksistensi Islam itu sendiri di tanah Aceh.

Islam telah berakar dan menghujam dalam peradaban masyarakat Aceh jauh sebelum datangnya kolonialisme bangsa eropah dan Jepang di Indonesia. A. Hasjmy berpendapat, bahwa agama Islam telah diterima dan menjadi agama negara atau kerajaan sejak masa kerajaan Islam Perlak yang didirikan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah (840 Masehi). Selanjutnya, agama Islam semakin bertambah kuat, begitu juga dengan akidah dan kaidah-kaidahnya kedalam berbagai sistem dan ruang kehidupan masyarakat Aceh, ketika berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam pada 1 Ramadhan 601 Hijriah (1205 Masehi). Hal ini disebabkan oleh suatu kondisi politik yang mendorong situasi untuk terjadinya suatu proses integrasi kekuatan politik, agama, budaya dan perekonomian yang sangat luar biasa, yang ditandai dengan bersatunya semua kerajaan Islam yang ada di Aceh seperti Kerajaan Islam Samudera Pase, Kerajaan Islam Banua, Kerajaan Islam Lingga, Kerajaan Islam Pedir, Kerajaan Islam Jaya, dan juga Kerajaan Islam Perlak sendiri.⁹⁵³

Setelah Islam bersemi dan berakar kuat dalam akidah dan kaidah kehidupan masyarakat Aceh selama seribu tahun lebih (840 – 1873) kemudian datanglah paham asing ke Aceh, termasuk komunisme yang dibawa oleh orang-orang tertentu yang bekerja dalam sistem pemerintahan kolonialisme Belanda.

Sebenarnya komunis telah memasuki Indonesia jauh sebelum pemberontakan PKI Muso di Madiun tahun 1948. Bahkan organisasi perintisnya telah ada sebelum berdirinya organisasi kepemudaan di Indonesia (Boedi Oetomo) tahun 1920.

Cikal bakal gerakan komunis di Indonesia diawali oleh berdirinya *Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV)* pada tahun 1914 di Surabaya. lalu tanggal 23 Mei

kedalam pertarungan kelas evolusi sosial, dan komunisme selalu mengedepankan kekerasan. Pertarungan dan kekerasan adalah *keyakinan* komunis, begitu kata Mao Zedong, dan itu adalah *jalan utama* untuk memperoleh kekuasaan politik (jabatan pemerintahan) dan mempertahankan hidup. Hal itu pula sebagai *metoda* untuk mempertahankan eksistensi partai-partai komunis di dunia.

⁹⁵³ A. Hasjmy, *Peranan Islam Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976. hlm 8-12.

1920, ISDV telah berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Empat tahun kemudian, organisasi ini kembali mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai ini memusatkan kegiatannya di Semarang, hal ini membuat Semarang dikenal sebagai “ibukota Komunis pertama di Indonesia”.

Ribuan mil dari Jawa, Lenin menulis, ”Perkembangan yang signifikan dalam pergerakan revolusi demokrasi telah tersebar sampai ke Hindia Belanda. Partai dan persatuan komunis telah terbentuk dengan kecepatan yang mence-ngangkan. Pemerintah Hindia Belanda melarang pendirian itu, tapi itu hanya membuat mereka tambah membenci peme-rintah dari belakang dan menambah kecepatan dari gerakan tersebut.⁹⁵⁴

Asal usul kaum komunis di Indonesia tidak bisa dilepas-kan dari dua nama besar, Henks Sneevliet dan Semaoen. Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet memulai kariernya sebagai seorang penganut mistik Katolik tetapi kemudian beralih ke ide-ide sosial demokratis yang revolu-sioner. Pada saat di Belanda, ia memimpin sebuah pemogokan buruh galangan kapal di Amsterdam. Aktivasnya itu mem-buat ia sukar mendapatkan pekerjaan, oleh sebab itu ia pergi menuju Indonesia untuk mencari penghidupan.

Pekerjaanya yang pertama ialah sebagai staf editor *Soerabajaasch Handelsblad*. lalu, pada tahun 1913 ia pindah ke Semarang untuk menggantikan posisi rekannya D.M.G Koch sebagai sekretaris *Semarang Handelsvereniging*. Kemu-dian, pada tahun 1914, bersama dengan tiga orang rekannya J.A. Bransteder, H.W. Dekker dan P. Bergsma mendirikan ISDV di Surabaya. Selain itu ia juga aktif di *Vereeniging voor Spoor -en Traamwegpersoneel (VSTP)* sebagai editor pada *De Volharding*, sebuah koran terbitan VSTP. Atas sarannyalah, VSTP terbuka bagi bumiputera dan bergerak radikal membela kepentingan pegawai-pegawai bumiputera yang miskin.Figur kedua dalam gerakan ini ialah Semaoen. Ia dikenal sebagai seorang anak didik Sneevliet yang cerdas. Lahir pada tahun 1899 di Mojokerto sebagai anak buruh kereta api. Ia bukanlah keturunan priayi, namun, karena dibesarkan pada zaman etis, ia turut mengenyam pendidikan dasar gaya Barat. Lulus dari Sekolah Bumiputera Angka Satu, bergabung dengan *Staat-spoor (SS)* pada tahun 1912 di usia tiga belas tahun. tahun berikutnya, ia bergabung dengan Sarekat Islam (SI) afdeling Surabaya. Berkat kecakapannya Semaoen langsung tampil ke depan sebagai sekretaris SI di Surabaya pada tahun 1914. Pada masa itulah, ia bertemu dengan Sneevliet dan terkesan akan “sikap manusiawi yang tulus” yang sama sekali terbebas dari “mentalitas kolonial” yang dimilikinya. Melalui Sneevliet, Semaoen mulai belajar menulis dan berbicara dengan bahasa Belanda. pada Juli 1916, ia pindah ke Semarang untuk menjadi propagandis VSTP dan menjadi editor SI Tetap, surat kabar VSTP yang berbahasa Melayu. Satu tahun setelahnya, ia kembali dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai propagandis dan komisar SI Semarang pada usia 18 tahun. Setelah Sneevliet diasingkan, Semaoen mengambil alih kepe-mimpinan dalam partai.

Di awal pendiriannya, anggota ISDV didominasi oleh orang-orang Belanda. Didorong oleh keinginan untuk menarik simpati rakyat Indonesia, pada 1915 - 1916 ISDV menjalin hubungan dengan Insulinde (Kepulauan Hindia), sebuah partai yang didirikan pada tahun 1907 dan setelah tahun 1913 partai ini menerima anggota dari *Indische*

⁹⁵⁴ Craig Bowen, *From Ashes The Rise and Fall of the PKI, A Short History of The Indonesian Communist Party*, Militant International Publication.

Partij yang terdiri dari beberapa orang Indonesia yang radikal. Namun, kerjasama ini belum menjadi alat yang ideal untuk mengambil hati rakyat pribumi secara keseluruhan. Berdasarkan hal itu, ISDV mengubah haluannya ke SI, satu-satunya organisasi yang memiliki massa Indonesia terbanyak. Dengan menggunakan cara ini, ISDV berhasil menggaet dukungan kelas pribumi yang pada umumnya ialah muslim nominal. Strategi ini dikenal sebagai “blok di dalam” atau *block within* yang dikembangkan sejak tahun 1916 oleh ISDV untuk meraih dukungan dari massa Sarekat Islam (SI). Maksud dari taktik ini ialah mengembangkan propaganda dan koneksitas di antara massa dengan membuat semacam sel-sel di dalam tubuh partai induk. Namun begitu, di masa selanjutnya, strategi telah mendatangkan persetujuan antara SI dan PKI. Dalam masa awal kebangkitan gerakan kiri, mencuat isu tentang *Indie Werbaar* (pertahanan Hindia). *Indie Werbaar* merupakan reaksi kecemasan pemerintah kolonial atas bangkitnya pan Asianisme yang dipimpin oleh Jepang dalam Perang Dunia I (1914-1918). Demi mengamankan asetnya dari pengaruh negatif Perang Dunia I, pemerintah bermaksud untuk membentuk milisi pertahanan yang terdiri dari rakyat bumiputera. Menanggapi hal tersebut, muncul sikap pro dan kontra. Dalam pada itu, gerakan kiri yang dimotori oleh Semaoen, Darsono, Haji Misbach, dan Mas Marco berada di pihak yang kontra. Melalui pidato-pidato propaganda dan tulisan-tulisannya, mereka menentang keras kebijakan pemerintah itu. Mereka tak ingin rakyat pribumi menjadi korban sia-sia dari perjuangan yang tak pasti arahnya.

Dengan cepat isu ini berubah menjadi tuntutan untuk membentuk perwakilan rakyat pribumi. Gonjang-ganjing ini kemudian ditanggapi oleh parlemen Belanda dengan meluluskan permintaan untuk membentuk *Volksraad* (Dewan Rakyat) dan menolak *Indie Werbaar*. Pada kenyataannya, *Volksraad* hanya diisi oleh orang-orang yang bersikap kooperatif pada kekuasaan dan menafikan kepentingan rakyat. Menanggapi hal itu, koran “Sinar Djawa” mengkritik pemilihan anggota *Volksraad* sebagai hal yang tak berguna bagi rakyat. Ketidakpuasan ini secara jelas menunjukkan sikap kepedulian yang tinggi atas nasib bangsa pribumi. Dalam pandangan gerakan kiri, *Volksraad* harus benar-benar mewakili dan berjuang demi perbaikan nasib wong cilik. Di waktu selanjutnya, kritik-kritik tajam Semaoen dan kaum kiri lainnya tidak hanya diujamkan kepada isu *Volksraad* saja, namun diperluas lagi menjadi kecaman-kecaman terhadap kapitalisme yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial. Kecaman-kecaman itu direalisasikan dalam berbagai bentuk, tidak hanya artikel, tapi juga dalam bentuk kisah yang sastrawi.

PKI yang telah menjadi sebuah partai pribumi yang progresif, mengembangkan propaganda yang bersifat ke-Indonesia-an. Pada saat itu PKI kurang menekankan pada doktrin-doktrin teoritis Marx dan Lenin, namun ia lebih memberikan perhatian pada propaganda yang berbasis kultural Jawa. Berbeda dengan pemerintah kolonial yang menetakannya sebagai pemberontak, PKI menyebut Diponegoro, Kyai Maja, dan Sen-tot sebagai pahlawan dalam Perang Jawa. PKI juga menggunakan ramalan-ramalan yang bersifat mesianistik mengenai Ratu Adil sebagai daya tariknya. Satu hal yang tampak sebagai sebuah keunikan pada periode ini, munculnya istilah Islam Komunis. Haji Misbach ialah salah satu tokoh muslim-komunis yang melegenda saat itu. Sebagai mubaligh lulusan pesantren, ia sering melakukan ceramah tentang Islam dan komunis, sehingga ia dikenal sebagai “Haji Merah”.

Namun PKI alpa, bahwa sebenarnya hubungan Islam dan komunis seibarat minyak

dengan air, dapat dicampur, tapi tak mungkin bersatu. Di balik kekompakan mereka dalam menye-rang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, pertikaian ideologis telah merapuhkannya dari dalam. Dan tampaknya, atas dasar itulah Semaoen bermaksud mendirikan federasi antara 20 sarekat dagang yang berada di bawah naungan SI dengan 72.000 orang anggota PKI di bulan Desember 1919. Akan tetapi, sang “raja mogok”, yang juga pemimpin serikat sekerja dari Central Sarekat Islam (CSI), Surjopranoto, mem-persoalkan kepemimpinan Semaoen sehingga bubarlah fede-rasi itu. pertikaian antara Islam dan komunis semakin tak terbendung ketika pada bulan November 1920, sebuah terbitan PKI yang berbahasa Belanda, *Het vrije woord* (Kata yang bebas) menerbitkan tesis-tesis Lenin tentang masalah-masalah nasional dan penjajahan yang meliputi kecaman-kecaman terhadap Pan-Islam dan Pan-Asianisme. Berbagai pihak berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, ter-masuk oleh Tan Malaka. Namun, sia-sia belaka, akibat dari pertikaian ini SI terbelah menjadi dua bagian, SI merah dan SI Putih. Kemudian, SI merah diberi nama sebagai Sarekat Rak-yat. Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa strategi PKI dalam mencari massa ini telah menyebabkan pertikaian yang kronis antara SI dengan PKI.

Dan perpecahan tersebut tampaknya telah meningkatkan rasa permusuhan di semua pihak. Persaingan mempere-butkan pengikut penduduk desa antar cabang-cabang SI dan cabang Sarekat Rakyat, telah menyeret PKI ke dalam ling-kungan keras dan anarkis. Akhirnya PKI tergelincir dalam se-buah pemberontakan ketika organisasi ini tidak dapat memu-tuskan apakah harus membubarkan Sarekat Rakyat yang jumlah pengikutnya dari kelas non proletar semakin ber-tambah banyak. Suasana yang tidak menguntungkan bagi pergerakan nasional ini berlangsung cukup lama dan berla-rut-larut. Gerakan kiri tejobak ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan, lebih-lebih setelah Semaoen, sang pionir kiri, mengalami nasib yang tragis; dibuang oleh pemerintah kolo-nial karena menyerukan pemogokan buruh tahun 1923.

Di tengah-tengah suasana yang carut marut, akibat ketat-nya pengawasan penguasa dan konflik internal yang mulai merapuhkan gerakan kiri, sebuah pemberontakan disiapkan pada bulan Desember 1924. Sesungguhnya, aksi ini tidak mendapatkan restu dari Komintern di Uni Soviet, mengingat pemimpin PKI, Semaoen, dibuang karena kasus pemogokan besar-besaran buruh VSTP pada tahun 1923. Namun, bebe-rapa pimpinan PKI yang tersisa, tetap bermaksud untuk “unjuk gigi” di hadapan penguasa kolonial.

Sebuah keunikan muncul dalam pemberontakan ini. Ban-ten, sebuah daerah yang dikenal dengan daerah pengikut Islam yang ortodoks, juga turut memberontak atas nama PKI. Malah, di daerah ini pemberontakan komunis jauh lebih besar ketimbang tiga daerah lainnya, yakni Priangan, Batavia, dan Sumatera Barat. Khusus di Banten, pemberontakan komunis terjadi akibat para pemimpin tradisional, kyai dan jawara, merasa tidak puas dengan SI. Faktor lainnya ialah kesamaan sifat radikalisme yang dikandung, baik oleh PKI, maupun oleh rakyat Banten. Betapun hebatnya pemberontakan kaum kiri ini, akhirnya dapat ditumpas pada tangga 14 November 1926. sekitar 13.000 orang ditangkap, beberapa orang ditembak dan sebagian lain dijebloskan ke kamp di Boven Digul. Pemberon-takan yang abortif ini sekaligus menandakan kehancuran gerakan kiri pada masa kolonial, untuk lalu kembali bergerak di masa selanjutnya.

Sebuah tahapan kebangkitan nasional ditutup oleh pem-berontakan PKI tahun

1926. akan tetapi, *sad ending* yang menyakitkan ini bukan berarti menutup semua gerakan yang bertujuan merebut kemerdekaan Indonesia. Kehadiran PKI di dalam kancah pergerakan nasional memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas mengenai apa dan siapa sesungguhnya bangsa Indonesia itu. Gerakan kiri yang diwakili oleh PKI telah menyadarkan kaum pribumi sebagai sebuah bangsa ter-tindas oleh kapitalisme dan imperialisme bangsa Belanda. Berdasarkan hal di atas, PKI telah menetapkan secara tegas identitas kelas pribumi. Lebih jauh lagi, dengan segala aksinya, baik melalui tulisan, pidato-pidato propaganda, aksi-aksi mogok dan pemberontakan melawan pemerintah kolonial, PKI telah mengangkat kaum pribumi menjadi lebih bermartabat.

Jika pada pemberontakan 1926 pemerintah kolonial mem-berangus gerakan ini dengan membuang dan membunuh pengikutnya, pada masa Orde Baru, gerakan kiri lagi-lagi dipersalahkan atas tragedi Gestapu 1965. Ribuan pengikut PKI ditangkap, dibuang, bahkan dibunuh secara biadab. Gerakan kiri tidak dapat lagi bernafas lega, ia terengah-engah dan sekarat, tergulung deras arus kapitalisme.

Revolusi ajaran komunisme pada dasarnya adalah gelora serangkaian usaha yang dilakukan oleh pihak kaum komunis di mana saja mereka berada untuk menjalankan misi, cita-cita dan menyatakan eksistensinya sebagai kekuatan baru. Misi utama setiap gerakan komunisme adalah melenyapkan perbedaan kelas, jenis kelamin atau gender, dan perbedaan kebangsaan dengan cara revolusioner dan parlementer. Selanjutnya, perjuangan komunis akan membuka suatu dunia baru yang didalamnya penuh ruang dan kesempatan yang bebas untuk semua orang, terutama untuk mereka yang selama ini terpinggirkan atau mendapat perlakuan diskriminatif dalam berbagai kesempatan yang ada.⁹⁵⁵

William Ebenstein, juga menjelaskan bahwa, baik di Cina RRC maupun di Russia, orang-orang Komite Central Partai Komunis sangat menyadari, bahwa "*dunia baru yang terbuka*" itu harus diisi dan dipilih dari kalangan anak-anak generasi baru yang cerdas-cerdas dari kalangan keluarga petani atau buruh-buruh dan kuli-kuli yang relatif miskin. Mereka inilah yang kemudian disebut "*kaum terpilih*". Kemajuan Uni Soviet Rusia, begitu juga RRC setelah perang dunia pertama, dan selanjutnya Russia unggul dalam perang dunia kedua, hingga menjadi kekuatan besar yang menyaingi Amerika, menurut Ebenstein, semuanya bermula dari karya-karya besar "*kaum terpilih*" ini. Mereka sebagai kekuatan intelektual yang cukup handal dan diberikan peran yang cukup besar dalam memajukan industrialisasi, yang kemudian memajukan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemiliteran, politik, ekonomi dan seterusnya.

Sebagian kecil anak-anak cerdas yang direkrut dan ter-pilih itu, dapat dipastikan telah cukup siap secara mental ideologis. Mereka dipastikan mempunyai semangat dan akat yang luar biasa untuk belajar dan mengejar cita-cita, merubah nasib dan kedudukan, agar dapat mengantarkan mereka menjadi pemimpin elit pemerintahan, militer, industrialisasi, dan dalam berbagai sektor kehidupan lainnya. Peluang ini adalah bagaikan jalan raya yang cukup mulus bagi anak-anak petani, buruh dan kuli-kuli untuk melaju kencang menuju terminal kemajuan di dunia baru.

Namun, di balik itu komunis juga berpikir dalam kerangka strategi militer terhadap sebagian jumlah populasi yang lebih besar itu. Mereka harus tetap berada dalam

⁹⁵⁵ William Ebenstein, *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia*, Narasi, Jakarta, 2006. hlm.83-89.

organisasi-organisasi kaum pekerja, karena dalam perspektif tujuan militer komunis, posisi organisasi kaum pekerja di pusat-pusat industri di kota-kota dan buruh tani yang bekerja di basis-basis mekanisme pertanian di daerah-daerah pedalaman, adalah sebagai kekuatan cadangan yang berdiri di belakang tentara profesional menjadi gerilyawan sejati, apabila sewaktu-waktu negara komunis terlibat dalam pertempuran atau perang terbuka pada setiap perjuangan cita-cita dan misi komunisme untuk dunia.

Dalam tulisan Jiuping, terdapat uraian yang jelas tentang langkah-langkah Partai Komunis (Komunisme) dalam setiap usahanya untuk melaksanakan misi dan cita-cita komunis-me dunia. Di antara banyak cara yang disebutkan dalam buku itu, beberapa dari padanya dapat disebutkan sebagai berikut. Pertama, komunisme dalam setiap gerakannya selalu melancarkan revolusi dengan kekerasan, tujuannya adalah untuk mengguling pemerintahan yang berkuasa, terutama pemerintahan atau sistem politik yang tidak sesuai dengan cita-citanya, kemudian menggantikannya dengan rezim baru yang berjiwa marxis dan berwatak proletar. Kedua, komunisme selalu mencampur adukkan kebenaran dengan kebathilan, atau kebaikan dengan kejahatan. Misalnya, ketika membangkitkan semangat kaum buruh/proletar, para pemimpin revolusi selalu berkata; "...kaum buruh adalah kelas yang paling progresif, kelas yang paling ideal, paling sabar dan kelas yang tidak egois. Buruh adalah kelas paling depan dalam perjuangan untuk cita-cita revolusi, dan buruh adalah pioner-pioner kaum proletar di mana saja mereka berada. Tanpa petani yang miskin, tidak ada revolusi sejati, dan revolusi ini kita buka adalah untuk membela mereka, membela orang-orang miskin". Ini adalah kata-kata Mao Zedong yang selalu dikutip oleh tokoh-tokoh politik dari partai komunis.

Ketiga, dalam setiap gerakannya komunis selalu memanfaatkan cara-cara menghasut dan menyulut pertikaian massa. Keharmonisan yang telah ada dan tumbuh subur dalam suatu masyarakat yang tertib, baik di kota-kota dan lebih-lebih di desa-desa, kondisi ini dianggap sebagai hambatan bagi tegaknya ideologi dan misi masyarakat komunisme atau masyarakat baru. Oleh sebab itu komunis selalu berusaha memporak-poranda keharmonisan ini, dengan cara memfitnah orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, tokoh-tokoh agama, pemimpin masyarakat yang jumlahnya relatif sedikit (misalnya 5%). Sebaliknya, komunis menghasut sejumlah orang-orang yang tidak kaya, tidak mempunyai kedudukan tinggi, penganggur, dan lain-lain yang jumlahnya relatif banyak (misalnya 95%). Kondisi ini dimanfaatkan dan dipertentangkan oleh komunis sesuai dengan "teori pertentangan kelas", sehingga keadaan yang damai-harmonis tadi menjadi berubah dengan tumbuhnya benih-benih kebencian, hilangnya ukhuwah sesama warga, munculnya jurang pemisah, dan selanjutnya semakin dekat dengan kondisi perpecahan dan huru-hara.⁹⁵⁶

Dalam pergerakannya di Indonesia, Partai Komunis (Indonesia) dianggap lebih berani dalam menyatakan misi dan tujuan politik-politiknya dibandingkan dengan partai-partai politik yang lain. Pada waktu itu, PKI adalah satu-satunya partai yang relatif berani menyatakan secara terbuka kepada publik, bahwa PKI ingin mewujudkan masyarakat komunis Indonesia yang adil dan merata. Disamping PKI, pada waktu itu juga ada PNI yang juga berani menyatakan diri dengan slogan nasionalisme. Pamor PNI pada waktu itu terutama dalam hal pro-paganda, berada dibawah PKI. Oleh sebab

⁹⁵⁶ *Ibid*, 205. hlm.23 – 35.

pamor gerakannya yang kuat, maka PKI relatif radikal dalam sikap dan gerakan politiknya. Salah satu propaganda PKI yang relatif populer adalah ketika PKI menyatakan secara terbuka, bahwa revolusi 17 Agustus 1945 belum selesai.⁹⁵⁷

Revolusi itu masih berada pada tahap yang paling awal dari cita-cita revolusi PKI di Indonesia. PKI bersama rakyat dan pengikut-pengikutnya harus segera bersiap-siap menuju tahap revolusi berikutnya, yaitu revolusi kedua. Dalam revolusi kedua ini PKI bercita-cita dan bersungguh-sungguh mewujudkan negara dan pemerintahan yang berdasarkan komunisme. Kapan itu tercapai, ketika semua alat-alat negara dan birokrasi pemerintahan negara berada di tangan orang-orang komunis. Artinya ketika Presiden, Kepala Angkatan, para menteri, Gubernur, Bupati, Walikota hingga ke Lurah dan Kepala Desa semuanya dipegang oleh orang-orang komunis. Dan setelah itu, PKI Indonesia segera akan melangkah ke revolusi ketiga, revolusi yang akan melahirkan masyarakat Indonesia yang sama rata dan sama rasa antara borjuis dan proletar.

Gambaran ini, dapat memberikan pemahaman yang jelas, betapa ambisi PKI untuk berkuasa seperti tak sabar menunggu dan tak bisa di bendung lagi. Di sisi yang lain, ambisi PKI yang demikian rupa, secara implisit telah mendesak nurani umat Islam dan kaum nasionalis Indonesia, berikutnya tentara Indonesia dan semua pihak yang merasa dirugikan oleh gerakan dan propaganda PKI untuk kemudian bangkit menentang. Dalam suasana yang kian paradoks ini, yang disertai dengan adanya gesekan ideologis antar golongan, sebagaimana pengalaman konflik-konflik di berbagai negara berkembang, telah menjadi ruang dan iklim baru bagi tampil tentara sebagai pihak yang akan melakukan upaya stabilisasi politik dan kemudian mengambil keuntungan politik (berkuasa) jika kondisi dapat segera tercipta untuk yang disebut terakhir itu.

Persaingan politik dan ideologi di tingkat nasional, dalam bentuk yang lebih formal dapat dilihat kemudian dalam peta hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955. Cerminan ideologi politik tersebut misalnya, dapat dibaca pada posisi empat buah partai yang berhasil tampil menjadi “Empat Besar” pemenang Pemilu 1955 itu, yang secara berturut-turut disebutkan PNI, MASYUMI, NU dan PKI. Masing-masing partai tersebut dapat dikatakan mewakili ideologi nasionalisme (PNI), mewakili ideologi Islam (Masyumi dan NU) dan berikutnya ideologi komunis yang diwakili oleh PKI. Pada masa itu (1955) walaupun secara nasional PKI telah berhasil nyata mencapai empat besar dalam Pemilu, tetapi keadaan di Aceh begitu muncul ke permukaan. Gerakan dan aktifitas PKI di Aceh baru diketahui secara terang-terangan pada tahun 1963, ketika Thaib Adamy mulai melakukan gerakan propaganda, kampanye dan mempengaruhi massa untuk mendukung PKI yang dipimpinnya. Thaib Adamy adalah kader PKI yang dianggap tangguh dan militan pada masa itu. Jabatannya selaku wakil Sekretaris Komite Central PKI, di samping itu ia juga berkedudukan sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Aceh mewakili Partai Komunis Indonesia (PKI) di Aceh.***



⁹⁵⁷ M.H.Lukman seorang ideolog/pemikir di Komite Central PKI pada tahun 1957 telah menerbitkan buku pedoman revolusi sosial-agraria yang diberi nama ABC Revolusi Indonesia.

Bab 2

SEJARAH MASUKNYA PKI KE ACEH

ADA pendapat yang menyatakan bahwa secara historis PKI di Aceh sudah mulai ada sejak zaman kolonial Belanda yang disebarkan oleh kelompok pendatang, yang kebanyakan di antara mereka itu adalah dari golongan buruh atau peker-ja-pekerja di perkebunan dan sebagainya di pertambangan. Dengan kata lain, kebanyakan dari mereka itu adalah petani miskin, buruh perkebunan, kuli-kuli jalan, pegawai pemerintahan yang golongan rendah, buruh kereta api, dan lain.⁹⁵⁸ Dimungkinkan juga, kebanyakan dari mereka yang terpenga-ruh dengan komunisme karena tidak memiliki aqidah Islam, yang kuat, serta tekanan kemiskinan yang relatif berat terutama kalangan buruh dari luar atau pendatang.

Di sisi lain, juga diketahui bahwa sejak tahun 1963 usa-ha-usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PKI dalam bentuk kampanye, propaganda, rapat-rapat umum dan berbagai agi-tasi lainnya relatif kuat dan sangat gencar di seluruh Aceh, terutama di ibukota Kabupaten dan Kotamadya seperti yang dilakukan oleh Thaib Adamy. Massa yang datang mendengar-kan kampanye PKI dapat dikatakan relatif banyak di mana-mana, walaupun hal itu tidak menjadi ukuran untuk menye-butkan bahwa semua itu adalah anggota pendukung PKI.

Penulis lain misalnya, Aminuddin Kasdi, menyatakan bahwa persoalan konflik PKI tanah air, serta berbagai aksi pergerakan yang dilakukannya sepanjang masa, idak mungkin dapat terjawab atau dapat dipahami jika hanya dengan melihat peristiwa G30S saja. Peristiwa G30S adalah sepenggal kisah nyata, yang di dalam peristiwa itu ada kabar filosofi dan cita-cita PKI, ada missi yang diemban, ada orang-orang yang terlibat, ada

⁹⁵⁸ I Ketut Ardhana, *Dimensi-dimensi Konflik di Tingkat Lokal*, Lokakarya Kerjasama LIPI, DIKNAS, MSI, 2005. hlm. 15.

rapat-rapat yang dibuat sebelumnya, ada langkah-langkah rencana dan target yang telah diatur dengan rapi, dan seterusnya. Secara ideologis PKI akan bersinggungan dengan aqidah dan kaidah Islam, secara politis PKI akan berhadapan dengan pemerintah dan militer Indonesia (TNI/POLRI) dan secara sosiologis PKI berhadapan dengan sistem sosial masyarakat setempat yang telah mapan dan berakar. Semua ini berada dalam satu totalitas sistem gerakan.⁹⁵⁹

Segera setelah Aceh mengalami kekalahan definitif melawan tentara Marechausse dari Kolonial Belanda pada 1904, maka pembangunan ekonomi pun bisa langsung digelar. Teknologi Barat pun didatangkan, selain persenjataan modern. Kereta Api dengan relnya pun dibangun di Aceh dari Kutaradja hingga Seulimeum, pada tahun 1924. Pada tahun berikutnya dibangun jalan rel kereta api dari Kutaradja ke Sigli, dari Sigli ke Samalanga, dari Samalanga ke Bireun, dari Bireun ke Lhokseumawe, langsung terus ke Lhok Sukon, Panton Labu, Perlak, Langsa, Kuala Simpang dan berakhir di Besitang.⁹⁶⁰ Di setiap kota-kota yang dilewati jalur rel kereta api ini terdapat banyak stasiun (*halte*) yang merupakan pranata keramaian baru bagi masyarakat Aceh ketika itu. Kehadiran kereta api ini membawa perubahan besar terhadap Aceh. Roda-roda perekonomian berputar, pembangunan dilaksanakan di banyak tempat. Jalan-jalan darat beraspal pun mulai dibangun. Di setiap stasiun kereta api ini menjadi kantong-kantong baru para imigran dari luar Aceh yang keahliannya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk memelihara dan memperbaiki lokomotif atau gerbong serta rel yang rusak.

Pembangunan rel kereta api mulai dibangun Belanda pada tahun 1901, dimaksudkan untuk melancarkan peperangan melawan gerilyawan Aceh (waktu itu disebut gerilyawan *Mujahidin*) yang sudah berserak di seluruh Aceh.⁹⁶¹ Jalur pertama dibangun adalah Kutaraja ke Seulimeum, dari Seulimeum ke Gunung Seulawah. Baru kemudian pada tahun 1904 dibangun jalur kereta api untuk “maksud damai” dari Seulawah ke Sigli. Dari Sigli disambung terus ke Samalanga. Di Samalanga inilah Belanda merasa sudah dapat menaklukkan Aceh dengan terdapatnya stasiun *Atjeh Tram*.⁹⁶² Dari Samalanga, diteruskan jalur tram ini hingga ke Bireun, Lhokseumawe, Langsa, Kuala Simpang hingga ke Besitang. Setelah itu, Belanda membangun jalan raya dari Kutaraja ke Sigli yang diresmikan tahun 1924. Efek pembangunan ini pada rakyat Aceh adalah semakin pluralnya Aceh karena banyak kaum pekerja dari Tionghoa dan etnik Minangkabau datang untuk menjadi buruh pembangunan rel dan jalan raya. Belanda tidak menggunakan tenaga Aceh karena suasana *Atjeh-Moorden* yang sangat ditakuti Belanda.⁹⁶³

Para migran ini adalah pekerja-pekerja dari Minangkabau (Padang) yang memang rata-rata memiliki kemahiran teknikal di bidang perkereta-apian. Di tempat asalnya, mereka telah lebih dahulu menikmati kereta api; sedangkan Aceh karena resistensi dan

⁹⁵⁹ Aminuddin Kasdi, *PKI/BTI Membakar Jawa dan Madura dengan Aksi-aksi Sepihak (1963 – 1965) dan Selogan Revolusi Belum Selesai*, Kerjasama LIPI, DIKNAS, MSI, Jakarta, 2005. hlm. 1, dan lihat juga Singgih Tri Sulistiyono, *Peran Angkatan Darat dalam G 30 S 1965*, Lokakarya Kerjasama LIPI, DIKNAS, MSI, Jakarta, 2005. hlm. 1-10.

⁹⁶⁰ Amelz, *Riwayat Singkat Atjeh Bangoen Sesoedah Tidoer Njenjak Beberapa Poeloeh Tahoen Laloe*, (Pidie, naskah ketikan, t.t.), hlm. 17.

⁹⁶¹ Amelz, *Ibid.*, hlm. 17.

⁹⁶² *Ibid.*

⁹⁶³ Amelz, *Riwayat Singkat Atjeh Bangoen Sesoedah Tidoer Nyenyak Beberapa Poeloeh Tahoen Jang Laloe*, naskah ketika, (Kutaradja: t.t.), hlm 6.

meletusnya peperangan yang dahsyat, maka “pembangunan” tidak bisa dijalankan ketika itu.

Masuknya “Unsur-Unsur Asing” ke Aceh

Setelah Aceh kalah, Belanda berkuasa, maka yang masuk ke Aceh bukan hanya perangkat-perangkat teknologi kemajuan peradaban Barat ke Aceh, namun juga perangkat-perangkat lunak lain juga ikut masuk, berbagai macam ideologi dan agama.⁹⁶⁴ Komunisme adalah ideologi asing masuk setelah kekalahan definitif Aceh. PKI sangat giat mengganggu keguyuban Aceh yang terkenal dengan tradisi dan nilai-nilai religiusitas. Masuknya Komunis ke Aceh sudah tercatat dalam *Mail Rapporten* Belanda semenjak lama. Catatan pertama tentang adanya gerakan komunis di Aceh dalam laporan Belanda tahun 1926. Gerakan komunis pertama terdapat di Gayo Luas.⁹⁶⁵ Keadaan politik di Aceh pada masa itu sudah sangat plural.⁹⁶⁶

Keadaan Aceh yang baru saja reda dari Perang Jihad ternyata langsung diwarnai oleh berbagai gerakan yang masuk ke wilayah ini. Yang sangat mengejutkan adalah sebuah surat laporan penguasa militer Hindia Belanda di Aceh ketika itu tentang aktivitas PKI yang sudah demikian marak di Samalanga. Dari sumber *Mail Rapporten* itu, ada sebuah laporan tentang pengasingan M. Hanafiah, seorang aktivis komunis di Samalanga.⁹⁶⁷ Artinya, pada tahun 1931, PKI sudah demikian hebat merebak di Samalanga. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa Samalanga? Mengapa bukan daerah lainnya di Aceh? Dan Mengapa juga bukan Gayo Luas?

Kata ‘pengasingan’ sendiri mengandung makna bahwa M. Hanafiah adalah tokoh PKI yang sudah sangat meresahkan Belanda sehingga perlu diasingkan. Demikian *concern*-nya Belanda dalam hal ini —di tengah-tengah periode sulit menghadapi perang gerilya dari para pejuang perang sabil Aceh— sehingga mesti perlu membuat laporan khusus atas tindakan pengasingan M. Hanafiah tersebut ke suatu tempat yang tidak jelas.

Samalanga adalah salah satu [kecamatan](#) di [Kabupaten Bireuen](#) yang mempunyai peranan penting dalam sejarah [Aceh](#). Pahlawan yang terkenal dari Samalanga adalah [Pocut Meuligoe](#), perempuan asal desa [Kampong Baro](#) yang memimpin pemuda-pemuda Samalanga menggempur [Belanda](#) di [Batee Iliiek](#), yang kini menjadi sebuah objek wisata terkenal di Aceh. Setelah Teuku Umar tewas dan pasukannya mulai cerai-berai, Belanda merasa bahwa mereka telah ber-hasil untuk menaklukkan seluruh Aceh, padahal masih terlalu banyak daerah-daerah yang masih secara utuh dikuasai oleh pasukan gerilya Aceh, dan pasukan Belanda belum mampu untuk menjejakkan kakinya di sana. Salah satu daerah itu adalah Samalanga, di mana terdapat sebuah benteng gunung, Batee Iliiek.

Pentingnya posisi Samalanga di mata *kaphe* Hindia Belanda menunjukkan betapa daerah ini menjadi sasaran utama mereka. Bahkan, bagi pasukan Marsose, Samalanga tak bisa dilupakan. Lagu Mars Marsose sendiri berjudul “Samalanga”. Domine Iz Thenu

⁹⁶⁴ Salah satu agama yang masuk ke Aceh adalah ajaran Ahmadiyah. Lihat M. Isa Sulaiman, (et.al), *Aceh dan Belanda: Kumpulan Bibliografis*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan, 2003).

⁹⁶⁵ *Mail Rapporten* No. 829X/26, dalam M. Isa Sulaiman (et.al), *Ibid.*, hlm. 21.

⁹⁶⁶ Terdapat juga surat-menyurat antara Rahmad Ali, utusan Ahmadiyah Qadian untuk Hindia Timur yang menceritakan sepak-terjang gerakan Ahmadiyah di daerah Aceh. Lihat *Mail Rapporten* No. 938X/26; juga MR. No. 872X/26; dan MR No. 899X/26. *Ibid.*, hlm. 22.

⁹⁶⁷ MR No. n687 Geh/1931 dalam M. Isa Sulaiman, *Ibid.*, hlm. 23.

mengarang lirik syair Samalanga ini, ketika para serdadu-serdadu Bumiputera yang tergabung dalam barisan bala tentara kolonial Belanda mengadakan serangan ke Samalanga Aceh Utara pada tahun 1901.⁹⁶⁸ Lirik syair ini bersama salinan lirik Lagu Korps Marechaussee (*Marsose*) sampai dengan saat ini masih tersimpan dengan rapi di museum Angkatan Darat Kerajaan Belanda di Bronbeek Arnhem. Cuplikan dari sepuluh bait pertama⁹⁶⁹ dari delapan belas bait lirik syair ini adalah sebagai berikut:

*Mari sobat, mari soedara !
Pergi prang di **Samalanga** ;
Mari koempoel dan bersoeara ,
Laloe bernjanji bersama-sama .*

*Satoe njanjian jang amat merdoe
Menghiboer hati jang amat doeka ,
Hari ini kita di Merdoe ,
Esok loesa djalan kamoeka .*

*Dari Merdoe djalan disawa
Itoe djalan jang amat soesah ,
Tempo-tempolah liwat rawa ,
Asal bisa dapat kemoeka .*

*Kaloe djalan haroes berdiam
Karna moesoeh berdjaga-djaga ,
Kaloe dengar boenji meriam
Itoe tandalah moesoeh ada .*

*Soenggoeh moesoeh banjak sekali ,
Ada berdiri didalam benteng
Haroes kami berlari-lari
Waktoe komandolah : ‘ Attaqueeren ‘ .*

*Djangan tinggal berdiri lama ,
Kaloe komandolah : ‘ Attaqueeren ‘ .
Lari lekas datang kesana ,
Masoek pertama dalam benteng .*

*Siapa Masoek nommer satoe
Itoelah tanda amat berani ,
Nanti dapatlah bintang satoe
Tanda setia lagi berani .*

*Maski dengarlah hoedjan pelor
Dari moesoehmoe orang Atjeh ,
Djangan sekali bersoesah keloeh ,
Tapi peranglah hidoep mati .*

⁹⁶⁸ Rifky Pradana, *Syair Perang*, (typescript, t.t.), hlm. 4.

⁹⁶⁹ Dicuplik dari Rifky Pradana, *Ibid*.

*Mari kamoe he orang Ambon !
Lagi Menado lagi Ternate !
Lawan moesoeh bertamboen-tamboen ,
Sampe gagahnya djadi berhenti .*

*Anak Ambon gagah berani
Ta takoet mati atau loeka
Toeroet hati orang **serani** ,
Anak Ambon berani di moeka.*

Jenderal van der Heijden, yang dinobatkan menjadi Jenderal Mata Sebelah oleh orang Aceh, karena matanya buta terkena peluru pasukan santri Batu Ilieq, telah berulang-ulang tidak berhasil menaklukkan benteng tersebut. Bahkan sesudah daerah Samalanga dapat takluk kepada Belanda, tetapi benteng Batu Ilieq masih tetap berfungsi sebagai pusat perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Saat ini Samalanga dikenal sebagai kota [santri](#) — meski pada prakteknya tidak nampak kesantrian pada kota ini — karena banyaknya dayah/[pesantren](#) yang tumbuh berkembang di daerah ini. Di antaranya adalah Dayah MUDI Mesra yang sudah eksis sejak zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dan dipimpin pertama kali oleh Faqeh Abdul Ghani, hingga saat ini dipegang oleh seorang ulama kharismatik di Bireun, Teungku Hasanoel Bashry. Selain MUDI Mesra, banyak dayah-dayah lain yang bertebaran di Samalanga, bahkan hanya beberapa meter dari dayah tersebut berdiri sebuah dayah lain, yaitu Dayah Ummul Ayman di Samalanga yang dipimpin oleh Teungku Nuruzzahry.

Kereta Api (Atjeh Tram)

Daerah Aceh dikenal memiliki berbagai historis kejayaan di masa lalu. Bukan hanya dari segi perjuangan melawan penjajahan, namun dari segi transportasi. Daerah itu pada zaman penjajahan Belanda sampai tahun 1970-an, pernah berjaya lintasan angkutan kereta api.⁹⁷⁰ Sisa-sisa kejayaan kereta api di Aceh, diabadikan dalam bentuk monumen lokomotif uap bernomor seri BB 84 yang kini masih kokoh berdiri. Lokasinya berada di sebelah kanan depan Masjid Baiturrahman Banda Aceh. Monumen lokomotif itu, termasuk di antara sejumlah benda bersejarah di Banda Aceh yang selamat dari amukan gelombang Tsunami. Walau tak urung terkena semburan air bah, namun karena pondasi bangunan kuat, posisinya masih tetap bertahan. Selamatnya monumen lokomotif, setidaknya masih mampu menjadikan bahan bersejarah yang dapat disaksikan generasi muda setempat. Apalagi, lintasan rel kereta api di Aceh sudah tak ada lagi, setelah dihentikan operasionalnya pertengahan tahun 1980-an lalu.

Monumen lokomotif kereta api dibangun di atas lokasi yang tadinya merupakan bekas Stasiun Banda Aceh. Namun setelah bertahun-tahun tak dioperasikan lagi karena tidak efisien, sisa-sisa bangunannya kini tak tampak lagi karena sudah dijadikan areal pertokoan. Saat masih aktif, rangkaian kereta api di Banda Aceh yang ada menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat . Walau pada umumnya jenis lokomotifnya masih bertenaga uap yang di Priangan Jabar disebut “Si Gombar”, namun pemunculan dalam

⁹⁷⁰ *Pikiran Rakyat*, 23 Juni 2005.

lintasan hampir selalu dinanti masyarakat, terutama anak-anak. Dahulunya, lintasan kereta api yang ada di Kota Banda Aceh, mulai menyusur masuk dari Simpang Surabaya sampai kemudian pada ujungnya di Stasiun Banda Aceh dekat Masjid Baiturrahman. Sedangkan ke arah Selatan-Timur, lintasan kereta api itu menuju ke Aceh Timur sampai Medan.

Menurut beberapa warga Banda Aceh, kereta api yang ada, menjelang tak dioperasikan lagi, lebih sering hanya melakukan perjalanan selama satu rit dengan tujuan ke Medan. Setiap keberangkatan kereta api itu, biasanya selalu disaksikan banyak masyarakat di sekitar Stasiun Banda Aceh, karena termasuk tontonan langka.

Kuli Kontrak Perkebunan

Sama seperti umumnya di Indonesia (dahulu Hindia Belanda), pemba-ngunan lintasan kereta api kebanyakan diperuntukkan untuk keperluan angkutan perkebunan. Begitu pula di Aceh, jalur dari Banda Aceh menuju Medan, semuanya melalui berbagai kawasan perkebunan di Aceh Bagian Timur, seperti Kabupaten Sigli dan Aceh Timur. Di Aceh Bagian Timur sendiri, sejak zaman Belanda sampai kini masih eksis berbagai perkebunan, terutama mengusahakan tanaman karet yang kini ditambah kelapa sawit. Sebagian besar, perkebunan eks Belanda itu kini dikelola pemerintah melalui PTPN I yang berpusat di Kebun Baru, Langsa, Aceh Timur.

Jalur itu oleh pemerintahan Belanda tak disambungkan ke pelabuhan setempat di Banda Aceh. Namun saat itu lebih diutamakan ke Pelabuhan Belawan di Medan, karena di sana pusat penampungan penjualan karet untuk tujuan ke luar daerah atau luar negeri. Keberadaan lintasan kereta api saat masih berjaya di Aceh, disebut-sebut sejumlah kalangan usaha perke-bunan di sana, pada zaman dahulu memang sangat terasa manfaatnya. Bukan hanya angkutan produk perkebunan, namun pula para karyawan, pimpinan, serta keluarga perkebunan, masyarakat setempat, sebagai cara utama bepegian yang dirasakan efisien.

Pensiunan *sinder* Kebun Julu Rayeu PT Perkebunan I, Iskandar Zulkarnaen, menyebutkan, sampai pertengahan tahun 1970-an, rangkaian kereta api di Aceh memang menjadi tulang punggung angkutan produk dan karyawan perkebunan. Apalagi, jalan trans Sumatra Timur belum selebar dan semulus sekarang. "Seingat kami waktu itu, pengangkutan produk perkebunan dilakukan pula untuk lateks dari kebun ke pabrik, untuk jam-jam tertentu. Ini disebabkan, saat itu sejumlah kebun masih belum optimal atau belum ada pabrik pengolahan, sehingga harus diproduksi pada perkebunan lain," katanya. Karena jalan aspal kondisinya masih banyak yang jelek, maka penyadapan getah dan pengangkutan banyak diakali untuk disesuaikan dengan jadwal tiba kereta dari Banda Aceh. Biasanya, jadwal sekira pukul 9.00 WIB, seperti zaman Belanda, di mana pada waktu itu jam-jam yang optimal untuk pengakutan lateks ke pabrik.

Karena lokomotif dan jalur kereta apinya hanya yang itu-itu juga, menu-rutnya, saat itu angkutan lateks umumnya selamat sampai ke pabrik tujuan. Pernah dicoba melalui angkutan truk, namun karena jalan jelek, tak jarang selip di jalan sehingga lateks keburu menggumpal sebelum masuk ke pabrik. Begitu pula saat tahun 1960-an, perkebunan pemerintah di Aceh masih ber-nama Perusahaan Perkebunan Negara (PPN)

Kesatuan Aceh, para pimpinan pun sering memanfaatkan kereta api untuk menuju ke Banda Aceh. Pasalnya, saat itu kantor pusatnya masih di Kutaraja, Banda Aceh. "Dengan menggunakan kereta api, dari Langsa sampai Banda Aceh, saat itu memakan waktu sehari-semalam. Kalau nekad menggunakan kendaraan mobil, selain lebih lama juga risiko dicegat gerombolan pemberontak waktu itu," kenang Iskandar.

Namun seiring perkembangan zaman, sama pula dengan di Pulau Jawa, menyusul pudarnya masa kejayaan usaha perkebunan, begitu pula di Aceh, peran kereta api mulai berkurang. Apalagi, belakangan saingan kendaraan mobil yang waktu tempuhnya lebih cepat, karena kondisi jalan yang semakin baik dan dilebarkan. Begitu pula nasib jalan rel kereta api di lintasan Sumatra, untuk di Banda Aceh boleh dikatakan sudah tak terlihat lagi bekas relnya. Kondisinya sama dengan di sekitar lintasan Kadipaten-Cirebon di Jabar, selain sudah tertutupi aspal atau bangunan, ada yang dicabut untuk dijual sebagai besi tua. Sejumlah warga Banda Aceh menuturkan, pada sekira tahun 1999 lalu, sempat tersiar kabar bahwa bekas lintasan kereta api di Banda Aceh sempat akan dibangun lagi. Bahkan, sejumlah tenaga ahli asing konon sudah melakukan penjajakan dan pengecekan lokasi.

Namun seiring pergantian pemerintahan, rencana itu kemudian tak jelas lagi. Ini bukan hanya terjadi di Aceh, namun pula dikabarkan terjadi di Pulau Jawa pada sejumlah bekas lintasan kereta api yang ada. Jadinya, zaman ke-emasan dan keberadaan kereta api di Aceh, kini hanya dapat disaksikan le-wat monumen. Entah kapan, rangkaian kereta api di sana akan kembali aktif.

Masuknya SI (Sarekat Islam) ke Aceh

Pada tahun 1920-an, Sarekat Islam (SI) sudah hadir di Aceh. SI men-dapati Aceh sebagai tempat yang subur untuk perkembangan pergerakan tersebut, karena sebagian besar *dayah* dan *ranggang-ranggang* di Aceh menerima ide-ide radikal yang menjadi ciri khas SI.⁹⁷¹ Dan ketika para ulama Aceh berkumpul di suatu tempat persembunyian menggelar Mukhtar Gerilya di tengah rimba pedalaman Aceh,⁹⁷² yang kemudian menghasilkan dua hal penting, yaitu "politik perang baru" dan menerima SI dari HOS Tjokroaminoto sebagai organisasi politik Islam modern untuk memenuhi strategi "politik perang baru". Keputusan Mukhtar gerilya ini, pada tahun 1913, membuat para ulama *dayah* dan *ranggang* merasa perlu mempersiapkan pendirian cabang organisasi ini di Aceh.

Dipilihlah Kutaradja sebagai tempat berdirinya SI di Aceh. Pada tahun 1914, berdirilah SI dengan Presidennya Teungku Abdul Manaf dan Wakil Presiden Marah Hoesin Gelar Mangaraja Tagor.⁹⁷³ Masih dalam tahun 1914, maka lahirlah organisasi-organisasi cabang dan ranting SI ini di seluruh Aceh. Para ulama dan uleebalang bersatu padu untuk mengembangkan organisasi ini di seluruh Aceh. Para uleebalang yang mendukung SI adalah uleebalang yang tidak mau bekerja-sama dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.⁹⁷⁴ Teuku Raja Bujang dan Imuem Gam adalah

⁹⁷¹ Ali Hasjmy, *Perang Gerilya dan Pergerakan Politik di Aceh Untuk Merebut Kemerdekaan Kembali*, (Banda Aceh: Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1980), hlm. 11.

⁹⁷² *Ibid.*, hlm. 16.

⁹⁷³ *Ibid.*, hlm. 17.

⁹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

beberapa di antara banyak uleebalang yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda, dan sebaliknya malah memilih bekerja sama dengan para ulama sebagai ujung tombak pergerakan anti-Belanda.

PKI Masuk ke Aceh Melalui SI

Ideologi PKI merambah ke Aceh melalui sebuah cara yang tidak elegan dengan menggunakan organisasi lain yang sesungguhnya bertentangan secara ideologis. PKI hadir melalui proses panjang yang dimulai dari perpecahan SI Putih dan SI Merah di Jawa. Maka, perpecahan ini kemudian diperpanjang oleh PKI sebagai alat untuk melakukan ekstensi politik ke seluruh Indonesia, khususnya ke Aceh. Pada tahun 1927 Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah berkembang di Samalanga, oleh sebab itu banyak pemuda-pemuda Samalanga masuk anggota PKI antara lain termasuk seorang putra dari Tgk. Haji Malem seorang Ulama Besar di Tanjongan Barat bernama Tgk. Abdoel Hamid.⁹⁷⁵ Namun, PKI yang berkembang di Aceh ketika itu bukanlah PKI beraliran atheis, melainkan PKI yang merupakan pecahan dari organisasi Islam terbesar, yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam adalah organisasi kaum nasionalis Islam yang paling ditakuti Belanda karena sikap dan pendirian ideologisnya yang konsisten. SI didirikan oleh Hadji Oemar Said Tjokroaminoto atau sering disingkat dengan nama HOS Tjokroaminoto. SI terpecah menjadi dua, SI putih dan SI merah. SI merah lah yang kemudian diboncengi oleh PKI sehingga mereka mendapatkan pendukung dari kalangan Islam. Hadji Misbach adalah kiyai komunis yang terkenal di Jawa Tengah yang memasuki organisasi PKI karena partai ini menganut ideologi pergerakan nasionalis yang kuat dan radikal.

Dampak masuknya Tgk. Abdoel Hamid menjadi anggota PKI membuat kolonial Belanda hendak menangkapnya. Pada tahun itu (1927) Teuku Tjhik Moehammad Ali Basjah, *Zelfbestuurder* Samalanga, berhenti dari jabatannya diganti oleh puteranya T. Moehammad menjadi *Uleebalang* Samalanga. Sikap berani mempertaruhkan jabatan yang secara tradisional selalu diberikan kepada para bangsawan oleh Belanda ini menunjukkan bahwa Teuku Tjhik Muhammad Ali lebih nasionalis dan menjadi PKI ketika itu adalah sebuah sikap nasionalisme. PKI ketika itu bahkan mampu mengadaptasikan dirinya menjadi organisasi yang akrab dengan Islam, selain dekat dengan kaum nasionalis. Kedekatannya dengan Islam ini membuktikan bahwa PKI yang berkembang di Aceh adalah PKI yang sudah ter-islam-kan. Sehingga tidaklah mengherankan mengapa uleebalang bekerjasama sangat erat dengan kaum ulama dalam urusan nasionalisme, untuk memerdekakan diri dari penjajah. T. Tjhik Moehammad Ali Basjah bermaksud untuk pergi menunaikan rukun Islam ke lima ke Tanah Suci Makkah, haji, bersama dengan 40 orang pengiringnya. Oleh sebab itu maka T. Tjhik Moehammad Ali Basjah men-charter kapal K.P.M. (*Koningkelijke Pakkat Vaar Maataschappij*) dan sudah berlabuh di Kuala Samalanga.⁹⁷⁶

T. Tjhik Moehammad Ali Basjah mengetahui bahwa Tgk. Abdoel Hamid mau ditangkap oleh Pemerintah Belanda karena masuk PKI maka dipanggilnya Tgk. Abdoel Hamid. PKI adalah organisasi terlarang di Hindia Belanda dan dianggap sebagai

⁹⁷⁵ Amelz, *Riwajat Singkat Atjeh Bangoen Dari Tidoer Njenjak Beberapa Poeloeh Tahoen Jang Laloe*, (Pidie, naskah ketikan, t.t.), hlm 7.

⁹⁷⁶ Amelz, *Ibid.*

organisasi yang berbahaya karena bisa membangkitkan kesadaran nasionalisme rakyat untuk menghadapi penjajahan Belanda. Sesudah Tgk. Abdoel Hamid tiba, T. Tjihik Moehammad Ali Basjah mengatakan, bahwa Tengku akan ditangkap oleh Pemerintah Belanda karena Tengku sudah menjadi anggota PKI Untuk menghindari supaya Tengku tidak ditangkap oleh Pemerintah Belanda ada lebih baik Tengku berangkat dengan saya ke Mekkah untuk menunaikan Rukun Islam yang Kelima, yang disertai juga oleh 40 orang yang sudah siap-siap untuk berangkat. “Kapal K.P.M. (*Koningkelijke Pakkat Vaar Maataschappij*) sudah saya charter dan sedang berlabuh ke Kuala Samalanga. Kalau Tengku setuju harus bersiap-siap dari sekarang karena besok pagi kita berangkat.” Anjuran Teuku Tjihik Moehammad Ali Basjah diterima baik oleh Tgk. Abdoel Hamid dan besoknya terus berangkat bersama dengan rombongan 40 orang itu menuju ke jazirah Arab.⁹⁷⁷

Sesudah menunaikan Rukun Islam ke Lima, Tgk. Abdoel Hamid tidak pulang bersama T. Tjihik Moehammad Ali Basjah, hanya tinggal di Makkah menjadi penampung jama'ah haji yang baru datang dari Aceh. Dengan sebab itu ia bergelar Tgk. Sjech Abdoel Hamid. Selama di Makkah Tgk. Abdoel Hamid memperhatikan perkembangan-perkembangan dan kemajuan Ulama-ulama di Makkah. Berhubung dengan itu ia mengirim surat ke Aceh dialamatkan kepada Tgk. Hadji Abdoellah Oedjong Rimba, meminta supaya ulama-ulama di Aceh mengubah cara bergerak untuk mencapai kemajuan, tidak lagi sebagai keadaan sekarang. Sesudah surat diterima dan diperhatikan oleh T. Hadji Abdoellah Oedjong Rimba dibawa ke Garot untuk diperlihatkan kepada Tgk. Yan Garot yaitu Tgk. Moehammad Amin seorang ulama tua yang berpengaruh di daerah Pidie.

Tgk. Yan memperhatikan isi dan maksud surat tersebut tak ada sam-butanya, karena bersamaan dengan rencana kaum Komunis.⁹⁷⁸ Karena surat itu tak ada sambutan dari Tgk. Yan Garot, Maka Tgk. Moehammad Daud Beureueh meminta surat itu dari Tgk. H. Abdoellah Oedjong Rimba. Sesudah di-perhatikan dan ditelaah, Tgk. Moehammad Daud Beureueh bermaksud akan membawa surat itu untuk diperlihatkan kepada Tgk. Hoesin Poelo Pandjoe, seorang ulama yang berpengaruh di daerah Poelo Pandjoe. Tgk. Moehammad Daud Beureueh mengirim utusan untuk menjumpai Tgk. Hoesin Poelo Pandjoe Landjoe sambil mengirim pesan, bahwa beliau akan berbuka puasa di Masjid Poelo Pandjou, dengan sebab itu beliau miminta supaya segala ulama-ulama didaerah Poelo Panjdjoe turut berbuka puasa di Masjid Poelo Pandjoe karena pada hari tersebut adalah tanggal 1 bulan Ramadhan tahun itu.

Tgk. Moehammad Daud Beureueh berangkat ke Poelo Pandjoe berbuka puasa dengan ulama-ulama yang hadir. Sesudah shalat tarawih, surat yang dikirim oleh Tgk. Abdoel Hamid di Mekkah diperlihatkan kepada ulama-ulama tersebut. Sesudah dibaca dan diperhatikan isi dan maksud surat tersebut, ulama yang hadir menerima baik dan menjunjung gagasan yang dikemukakan oleh Tgk. Abdoel Hamid. Besoknya surat itu dibawa kembali oleh Tgk. Moehammad Daud Beureueh diserahkan kepada Tgk. Yan Garot, sambil memberi penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama di Poelo Pandjoe sangat setuju sebagai yang dimaksud dan yang dikehendaki oleh Tgk. Abdoel Hamid.

Beberapa orang *uleebalang* sudah mengetahui dan sudah memberi perse-tujuannya,

⁹⁷⁷ *Ibid.*

⁹⁷⁸ Amelz, *ibid.*

terutama: T. Pakeh Mahmoed; T. Bentara Pineueng; T. Moeda Dalam; T. Ahmad Aree; T. Tjhik Peusangan. Wakil-wakil Tuanku Raja Keumala yang dikirim untuk menyertai permusyawaratan itu terdiri dari: Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri; Tgk. Sjech Ibrahim; dan lain-lain. Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, seluruh Ulama-Ulama yang dihubungi dan diundang turut hadir semua. Dalam musyawarah itu surat yang dikirim oleh Tgk. Abdoel Hamid di Makkah dirumuskan bersama-sama. Semua memberi pendapat dan menyetujui apa yang dianjurkan oleh Teungku Sjech Abdoel Hamid.***



Bab 3

SUASANA ACEH AWAL 1960-AN

BERSAMA dengan situasi politik yang tidak menentu setelah Indonesia merdeka karena aksi Belanda untuk ingin kembali menjajah Indonesia, terjadi beberapa fenomena gerakan pemberontakan di beberapa daerah. Berbagai pergolakan atau pemberontakan yang terjadi di negara Republik Indonesia pada umumnya terjadi karena ketidakpuasan pada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara pusat dan daerah yang cukup mencolok. Pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) misalnya. Semula, gerakan itu tidak tampak berniat ingin menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tetapi, pemberontakan itu akhirnya dikenal sebagai "gerakan anti-Jawa", karena kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa dianggap semakin besar.

Sejak kemerdekaan diproklamasikan 1945, beberapa gerakan atau pemberontakan demi memisahkan diri dari negara kesatuan, terjadi di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Indonesia Bagian Timur.

Gerakan di Aceh diawali oleh kekecewaan dan keresahan. Setelah likuidasi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada Agustus 1950, daerah itu begitu saja dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, mantan Gubernur Militer, Teungku Daud Beureueh, yang sangat berpengaruh di Aceh, tidak diberi jabatan berarti. Tampaknya, pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat kurang didasari kepekaan terhadap perasaan rakyat Aceh. Apalagi ada kebanggaan tersendiri pada masyarakat Aceh, melihat wilayah Serambi Mekah itu suatu bagian republik yang tidak pernah dimasuki penjajah Belanda. Gerakan di Aceh yang dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan gerakan yang cukup alot. Meskipun pemerintah terus berusaha menyelesaikan masalah GAM ke meja perundingan, namun tidak pernah berhasil.

Terakhir, proses penyelesaian konflik di Aceh dengan jalan damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan GAM berlangsung di Tokyo.. Hasilnya, gagal. Maka secara resmi pemerintah Indonesia memberlakukan Keputusan Pemerintah (Keppres) Nomor 28 Tahun 2003, yang menetapkan seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam keadaan bahaya dengan status Darurat Militer. Keputusan pemerintahan Presiden Megawati itu merupakan keputusan tegas, dalam upaya agar Aceh tetap berada dalam bingkai negara kesatuan RI.

Keputusan yang sama diambil Presiden Sukarno dalam menghadapi pemberontakan PRRI/Permesta pada 16 Februari 1958. Ketika Sukarno kembali dari luar negeri menegaskan, PRRI/Permesta harus dihadapi dengan kekerasan senjata. Pemerintahan Megawati mengerahkan sekitar 28.000 personel TNI dan Polri ke Aceh untuk melancarkan operasi terpadu yang meliputi operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, operasi pemulihan pemerintahan, dan operasi pemuliharaan keamanan.

Seorang bekas pemimpin gerilya kemudian diangkat menjadi pimpinan tertinggi di Aceh, yaitu Sjamaun Gaharu, panglima Tentara Republik di Aceh untuk masa singkat selama revolusi dan salah seorang penandatanganan ultimatum terhadap *uleebalang* di Lammeulo (sebelum jabatannya direbut Amir Husin al Mudjahid).

Berdasarkan keterangannya sendiri Sjamaun Gaharu mendapat pengangkatannya berkat dukungan yang diterimanya dari Nasution akan gagasannya untuk mengakhiri pemberontakan di Aceh. Sering kali ia bertemu dengan Nasution dalam masa antara 1952 dan 1955, ketika Nasution dibebaskan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, untuk memberikan keterangan bagi buku-buku yang tengah ditulisnya tentang revolusi Indonesia dan tentang perang gerilya pada umumnya. Selama wawancara-wawancara ini Sjamaun Gaharu berangsur-angsur mengungkapkan pandangannya tentang cara-cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan di Aceh. Intisari teori ini adalah, situasi Aceh berbeda dengan di tempat lain dan rumit sekali, dan persoalan ini paling baik diselesaikan orang Aceh sendiri dengan cara Aceh. Wakil Presiden juga tertarik akan gagasan Sjammaun Gaharu tentang masalah ini dan meminta dia menuliskannya. Pada Oktober 1955 ia menyampaikan hasilnya kepada Hatta, dan ketika beberapa hari kemudian Nasution diangkat kembali menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, ia pun mengirimkan sebuah salinan kepada Nasution.

Nasution kemudian menyambutnya dengan menawarkan kepadanya jabatan pimpinan militer Aceh. Pada mulanya Sjammaun Gaharu bermaksud menolak tawaran ini, karena dia merasa, pandangannya tidak sesuai dengan kebijaksanaan panglima Sumatera Utara, Maludin Simbolon. Tetapi dengan janji Nasution bahwa Maludin Simbolon akan dipin-dahkan dalam waktu dekat, ia menerima kedudukan ini. Kesempatan untuk melaksanakan gagasannya dalam praktek diperolehnya ketika pada akhir 1956 Maludin Simbolon—yang merupakan saingan utama Nasution untuk jabatan kepala staf—dalam upaya mencegah kepindahannya memutuskan hubungan Komando Tentara Teritorium Sumatera Utara dengan Pimpinan Angkatan Darat. Segera Sjammaun Gaharu menjauhkan diri dari Maludin Simbolon dan tetap berhubungan erat dengan Nasution.⁹⁷⁹

Sekarang Sjammaun Gaharu bebas melaksanakan rencananya. Bersama dengan gubernur yang baru diangkat, A. Hasjmy, dan dengan sokongan tegas Nasution, ia

⁹⁷⁹ (Gaharu 1958:40-43).

menempuh politik kebijaksanaan perukunan. Pada pertengahan April 1957, pertengahan puasa, diadakan perundingan dengan sejumlah pemimpin *Darul Islam* terkemuka di Lamteh, sebuah desa beberapa kilometer dari Aceh. Pembicaraan mencapai puncaknya dalam Ikrar Lamteh yang di dalamnya keduanya berjanji masing-masing untuk memajukan Islam, mendorong pembangunan Aceh dalam arti kata yang seluas-luasnya, dan berusaha mendatangkan kemakmuran dan keamanan kepada rakyat dan masyarakat Aceh. Di pihak Republik piagam itu ditandatangani Sjammaun Gaharu dan kepala stafnya, Teuku Hamzah, Hasjmy, dan Kepala Polisi untuk Aceh, M. Insja. Pemimpin-pemimpin *Darul Islam* yang menandatangani adalah Hasan Aly, Hasan Saleh, dan Ishak Amin (Bupati Aceh Besar). Kemudian, disertai A. Hasjmy, dan M. Insja, Sjam-maun Gaharu juga menjumpai Daud Beureueh, yang pada waktu itu masih tidak ingin mendengarkan penyelesaian.⁹⁸⁰

Sesuai dengan kebijaksanaannya, yang dinamakannya Konsepsi prinsipiel dan bijaksana, Sjammaun Gaharu ber-sama dengan Ali Hasjmy melanjutkan usaha-usahanya men-cari penyelesaian. Keduanya tetap berhubungan dengan pe-mimpin-pemimpin *Darul Islam* dan mengunjungi Jakarta berkali-kali untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat melangkah dalam perundingan mereka dengan kaum pemberontak. Pada September 1957 Perdana Menteri Djuanda me-ngatakan kepada mereka, mereka boleh memberikan konsep otonomi daerah penafsiran yang seluas mungkin, bahkan sampai kepada pengertian bahwa Aceh diperlakukan sebagai negara tersendiri, asal saja mereka tetap dalam batas-batas UUDS Indonesia yang masih mengakui suatu republik kesa-tuan.⁹⁸¹

Tetapi tak tercapai penyelesaian pada waktu itu. Seba-giannya ini adalah disebabkan kenyataan bahwa pembe-rontakan PRRI-Permesta menarik perhatian, dan sebagiannya karena adanya dalam Negara Islam Aceh suatu faksi yang amat kuat, yang dipimpin Daud Beureueh, yang tidak ingin mendengarkan kompromi apa pun juga dan berpegang pada prinsip perundingan resmi antara Negara Islam Aceh dan Republik Indonesia.

Hal ini terjadi pada Maret 1959, ketika, dengan menuduh Daud Beureueh bertindak sewenang-wenang, Hasan Saleh dan pendukung-pendukungnya menggulingkannya. Mereka membentuk pemerintah mereka sendiri pada suatu perte-muan di Pidie yang dihadiri kira-kira seribu orang pada 15 Maret, mereka yang berlainan pendapat ini menamakan diri-nya Gerakan Revolusioner Islam Indonesia, kemudian mem-bentuk Dewan Revolusi (Negara Bagian Aceh). Ketuanya adalah Abdul Gani Usman, dan wakil ketuanya adalah Hasan Saleh, dengan Abdul Gani Mutiara sebagai sekretaris umum dan kepala Bagian Penerangan. Sebagai anggota termasuk pemimpin-pemimpin *Darul Islam* terkemuka seperti Amir Husin al Mudjahid, T.A. Hasan, Ibrahim Saleh, T.M. Amin, dan Husin Jusuf.

Langkah pertama Abdul Gani Usman dalam kedu-dukannya sebagai ketua Dewan Revolusi adalah membuat pengumuman yang menyatakan, jabatan kepala negara untuk sementara dilaksanakan Dewan Pertimbangan Revolusi, yang diketuai Amir Husin al Mudjahid. Pada waktu yang bersa-maan ia memerintahkan para pengikutnya menghentikan pemungutan pajak di desa-desa, disertai ancaman terhadap siapa saja

⁹⁸⁰ (Abdul Murat Mat Jan 1976:40-41; DM 23-3:1959)

⁹⁸¹ (Hasjmy 1958:57-58)

yang masih terus melakukannya. Mengenai Tentara Islam, Hasan Saleh membatasi gerak para prajurit Divisi Tengku Chik Ditiro dalam asrama mereka, dengan menarik mereka dari desa-desa tempat mereka ditempatkan. Selanjutnya ia mengumumkan, Dewan Revolusi akan mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk membicarakan berakhirnya pemberontakan dengan para penguasa Republik. Pada bulan-bulan berikutnya Dewan Revolusi diikuti pasukan dari Aceh Barat yang dipimpin T.R. Idris dan Komandan Resimen VII Sumatera Timur, Haji Hasanuddin.⁹⁸² Pada Agustus, Abdul Ga-ni Mutiara menyatakan Dewan revolusi didukung 25.000 anggota *Darul Islam*.⁹⁸³

Perkembangan-perkembangan ini memulai serangkaian perundingan baru. Pada awal Mei Sjammaun Gaharu dan A. Hasjmy bertolak lagi ke Jakarta, kali ini atas undangan Perdana Menteri Djuanda. Mereka menjelaskan situasi yang baru kepada Kabinet dan kepada Presiden Soekarno serta memberikan sejumlah anjuran tentang langkah-langkah yang harus diambil sehubungan dengan ini. Kemudian Juanda mengeluarkan keputusan yang menyatakan, sejak 26 Mei Provinsi Aceh dapat menamakan dirinya Daerah Istimewa Aceh.⁹⁸⁴ Ini menempatkan Aceh dalam kedudukan yang agak khas, karena dari provinsi-provinsi yang lain hanyalah ibukota, Jakarta, dan Yogyakarta yang memiliki status istimewa. Kepada Aceh selanjutnya dijanjikan otonomi yang seluas mungkin, terutama dalam bidang agama, pendidikan dan hukum adat, tetapi dengan ketentuan, seperti dinyatakan Djuanda dalam keputusannya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada waktu yang sama Pemerintah Pusat mengirimkan sebuah misi ke Aceh untuk berunding dengan Dewan Revolusi. Misi ini dipimpin Wakil Perdana Menteri Pertama Hardi, dan di dalamnya termasuk Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Gatot Subroto dan Menteri Kestabilan Ekonomi tanpa Portofolio, Kolonel Suprajogi. Dua hari kemudian, 26 Mei 1959, sesudah melalui usaha A. Hasjmy dan Letnan Kolonel T. Hamzah menembus jalan buntu, tercapai persetujuan sementara dengan pemimpin-pemimpin Dewan Revolusi yang menerima usul-usul Pemerintah Pusat. Secara tertulis mereka sendiri berjanji kembali ke dalam haribaan Republik dan mengucapkan sumpah setia kepada Undang-Undang Dasar.

Sifat yang sebenar-benarnya dari kompromi itu tetap samar-samar. Seperti telah ditetapkan Djuanda sebelumnya, otonomi janganlah ditafsirkan sedemikian rupa hingga setiap ketentuan baru yang diadakan akan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Hardi menambahkan di Banda Aceh, masalah apakah masyarakat Islam di Aceh dapat dipaksakan melaksanakan syariat Islam atau tidak, merupakan persoalan yang akan diputuskan Konstituante, yang ketika itu sedang membicarakan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Ia menghubungkan hal ini dengan Piagam Jakarta, yang kini kembali menjadi masalah yang hangat diperdebatkan dalam Konstituante di Jakarta. Seperti ternyata, kaum politisi Islam tidak cukup kuat untuk meluluskannya kali ini. Satu-satunya hasil yang mereka peroleh ialah diakuinya oleh Soekarno dalam Dekrit yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Piagam Jakarta telah mengilhami Undang-Undang Dasar ini dan merupakan

⁹⁸² Kedudukan Haji Hasanuddin sebagai komandan Resimen Sumatera Timur diambil alih Teuku Saat; tetapi kebanyakan prajurit mengikuti Hasanuddin (DM 7-8-1959).

⁹⁸³ (D.M 18-3-1959, 23-3-1959, 28-3-1959, 25-5-1959, 6-8-1959, 7-8-1959, 25-8-1959)

⁹⁸⁴ (Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia no. 1/Miss8 1959)

kesatuan dengannya.⁹⁸⁵

Selanjutnya disetujui secara prinsip, sebagian prajurit Tentara Islam, setelah melalui *screening* wajib, akan dijadikan wajib militer darurat. Kemudian, pada 1 Oktober disetujui akan dibentuk Divisi Tengku Chik Ditiro sebagai bagian khusus dari Divisi Tentara di Aceh. Pegawai-pegawai negeri *Darul Islam* yang mengikuti Dewan Revolusi mendapat perlakuan yang sedikit banyaknya sama. Usaha yang menyatakan bahwa di mana mungkin mereka akan diintegrasikan ke dalam Pemerintahan Republik dikukuhkan para penguasa militer pusat pada akhir Oktober. Ini berarti memberikan kuasa kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk mengangkat bekas pemberontak yang telah menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia pada jabatan-jabatan dalam pemerintahan sipil.⁹⁸⁶

Persetujuan Mei secara resmi diterima para pendukung Dewan Revolusi pada suatu konferensi besar yang diadakan dalam minggu pertama November. Pada akhir bulan itu Nasution bertolak ke Pidie. Di sini ia menerima pemberian hormat lima ribu pendukung Dewan Revolusi.⁹⁸⁷

Sementara masalah-masalah yang terjadi di Aceh belum selesai, PKI mulai menyusup dalam lembaga pemerintahan tingkat propinsi. A. Karim AS selaku pimpinan PKI Sumatera Utara sangat sering datang ke Aceh. Ia melakukan berbagai rapat dan pertemuan-pertemuan terbatas, termasuk dengan berbagai politisi dan tokoh-tokoh lainnya di Aceh, di antaranya termasuk Thaib Adamy. Thaib Adamy adalah salah satu tokoh PKI yang terlibat dalam peristiwa revolusi sosial yang terjadi di Aceh pada tahun 1956 yang dikenal dengan peristiwa "Cumbok".

Pada masa Pemilu 1955, walaupun secara nasional PKI telah berhasil nyata mencapai empat besar dalam Pemilu, tetapi keadaannya di Aceh belum begitu muncul ke permukaan. Gerakan dan aktifitas PKI di Aceh baru diketahui secara terang-terangan pada tahun 1963, ketika Thaib Adamy mulai melakukan gerakan propaganda, kampanye dan mempengaruhi massa untuk mendukung PKI yang dipimpinnya. Thaib Adamy adalah kader PKI yang dianggap tangguh dan militan pada masa itu. Jabatannya selaku wakil Sekretaris Komite Central PKI, di samping itu ia juga berkedudukan sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Aceh mewakili Partai Komunis Indonesia (PKI) di Aceh.

Banyak kaum muda yang tergiur dengan slogan-slogan revolusioner yang disuarakan oleh PKI waktu itu. Slogan yang dihembus terutama dalam rangka persiapan menghadapi agresi Belanda atau penjajahan asing sangat digemari oleh kalangan

⁹⁸⁵ Kekaburan kompromi ini menimbulkan beberapa masalah pada 1962. Pada akhir tahun itu tersiar berita, Angkatan Darat Pusat menentang (diberlakukannya hukum Islam di Aceh. Berita ini dibantah juru bicara Tentara. Ia membacakan sebuah pernyataan yang pokoknya berisi 1) hukum Islam tidaklah a priori ditolak, karena itu juga tidak di Aceh; 2) dapat dibuat hukum bagi masyarakat Islam yang mungkin disesuaikan dengan hukum Islam; dan 3) Pemerintah Daerah Aceh, sesuai dengan keterangan misi Hardi, boleh mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hukum Islam, asal saja ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum kebijaksanaan negara, kepentingan umum, atau peraturan hukum tingkat yang lebih tinggi. Dalam pembicaraan turut serta Menteri Agama, yang menyatakan dirinya yakin Angkatan Darat Pusat mengakui dan karena itu tidak menolak prinsip hukum Islam di Aceh (Boland 171: 90-100).

⁹⁸⁶ Ini berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat no.010541959 31 Oktober 1959. Indonesia berada dalam keadaan perang dari Maret 1957 sampai Maret 1962. Selama masa ini terdapat Penguasa Perang Pusat (Peperpups dan di provinsi-provinsi Penguasa Perang Daerah (Peperda). Di Aceh yang menjadi ketua Peperda adalah panglima militer, Sjammaun Gaharu, dan wakil ketua gubernur A. Hasjmy.

⁹⁸⁷ (Abdul Murat Mat Jan 1976: 43; DM 28-5-1959, 25-11-1959, 26-11-1959, 27-11-1959, 1-12-1959)

masyarakat Aceh yang telah lama memendam kebencian terhadap segala bentuk penjajahan dan mereka siap membe-rontak terhadap siapa saja yang hendak menguasai tanah airnya. Pada saat itu kegiatan yang dilakukan PKI sah-sah saja, karena PKI belum dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia, termasuk di Aceh. Dengan demikian seluruh usaha dan kegiatan PKI, membuat rapat-rapat dengan *onderbouw-onderbouw*-nya seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Sen-tral Organisasi Buruh seluruh Indonesia (SOBSI) serta ang-gota-anggota mereka yang bekerja sebagai buruh dan kuli di perkebunan dan pertambangan di Aceh dapat berjalan lancar dianggap legal.

Sikap anti penjajahan dan anti penindasan yang selama ini menjadi slogan dan doktrin PKI ditujukan untuk persiapan melawan Belanda di Aceh, secara kebetulan bertemu dengan realita sosial yang realtif timpang antara kaum Uleebalang, ulama dan rakyat bisa dalam sistem sosial masyarakat Aceh. Oleh karenanya tatkala Tengku A. Husein Al. Mudjahid dengan pasukan Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) melakukan aksi protes dan menurunkan kaum bangsawan (Uleebalang) dari tahta kekuasaannya pada bulan Februari-Maret 1956, yang kemudian dikenal dengan istilah “Peristiwa Cumbok” atau “Revolusi sosial”, disebut-sebut bahwa dua orang tokoh PKI terlibat di dalamnya yaitu Nathar Zainudin dan Thaib Adamy. Dalam pandangan mereka peristiwa Cumbok adalah sebuah gerakan pembebasan dalam rangka membebaskan rakyat dari segala bentuk kesewenang-wenangan kaum borjuis atau kaum ningrat di Aceh.

Sulit dipahami, apakah peristiwa Cumbok adalah murni sebagai aksi yang dilakukan oleh kaum pembebasan dengan tentara perjuangan rakyat (TPR) untuk melakukan koreksi total terhadap kekuasaan Uleebalang yang dianggap mewah sejak zaman penjajahan Belanda, atau ada intervensi dari PKI. Dalam perjalanan selanjutnya setelah peristiwa Cumbok, banyak dijumpai konflik-konflik yang relative tajam antara PKI dengan tokoh-tokoh pemimpin Aceh, terutama dengan para penguasa. Keadaan ini menggambarkan peta hubungan PKI dengan berbagai elemen masyarakat Aceh selamanya har-monis⁹⁸⁸.

Konflik yang cukup seru antara aktivis komunis dengan pihak penguasa Aceh terjadi pada masalah perebutan ladang minyak dan lahan perkebunan di Aceh Timur. Masing-masing pihak bersikeras untuk mempertahankan hak dan mengu-asainya yang kemudian melahirkan pemberontakan komunis terhadap pemerintah daerah pada bulan Mei 1949 yang dikenal dengan istilah “*Langsa Affair*” Konflik lain ketika terjadi rencana peleburan propinsi Aceh ke dalam Propinsi Sumatera Utara, di aman PKI waktu itu nyata-nyata menolak rencana Aceh untuk menjadi propinsi yang berdiri sendiri dan terlepas dari Sumatera Utara. Ketika masaah otonomi Aceh diperdebatkan tahun 1950-1953, tokoh-tokoh PKI bergabung dengan kekuatan luar agar Aceh menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini PKI selalu melihat dari sisi keuntungan politik yang lebih banyak dan lebih diuntungkan bagi per-kembangan ideologinya jika Aceh hanya berstatus residen dalam wilayah propinsi Sumatera Utara. Perdebatan masalah ini telah mengundang lahirnya pemberontakan baru di Aceh yang dikenal dengan sebutan “Gerakan Darul Islam/ tentara Islam Indonesia” yang dipimpin oleh Daud Beureuh.

Puncak dari aksi menghalang-haangi dan rasa ketidak-puasan PKI terhadap

⁹⁸⁸ Ramadhan KH dan Hamid Djabbar, *Sjamaun Gaharu Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm 243-244.

pemerintah dan rakyat Aceh dapat disimak dalam pidato Thaib Adamy tanggal 3 Maret 1963 di kota Sigli yang didengarkan ribuan mass yang hadir. Isi pidato tersebut mengantarkannya ke meja pengadilan, diantaranya dapat dikutip sebagai berikut ,

Tajak bak geusiyik lagee boh piki hana sagoe
Tajak bak mukim lagee being hana rampage
Tajak bak aswed lagee langet hana uroe
Tajak bak wedaan lagee time hana taloe
Tajak bak bupati lagee jeungki hana sujoe
Tajak bak polisi lagee keudidi keunong taloe
Tajak bak tentara lagee nuga kayee jatoe
Tajak bak gubernur lagee cinue hana garoe
Tajak bak menteri lagee gusi hana gigoe

Artinya sebagai berikut,

Pergi mengadu kepada Kapala desa bagaikan gambas tak tak bersegi
Pergi mengadu kepada Kepala Mukim seperti kepiting tak punya penjepit
Pergi mengadu kepada Asisten wedana sama halnya seperti langit tak bermatahari
Pergi mengadu kepada Bupati sama seperti penumpuk padi tak berbaji
Pergi mengadu kepada Polisi sama halnya seperti burung kedidi terjerat tali
Pergi mengadu kepada tentara sama halnya dengan pentungan kayu
Pergi mengadu kepada Gubernur sama halnya seperti gayung tanpa gaganganya
Pergi mengadu kepada menteri sama saja, seperti gusi tak punya gigi (ompong)

Di depan pengadilan, Thaib Adamy menyebutkan bahwa apa yang diucapkannya merupakan “Sajak Rakyat Aceh za-man Dahulu Kala”. Walau dianggap mengada-ada dan dianggap menyebarkan khabar bohong, namu kata-kata ini sempat populer dan tersebar luas dalam masyarakat, terutama di kalangan aktivis politik.

Makna dan substansi dari setiap kata tersebut adalah mencerminkan suatu keadaan di mana masing-masing peja-bat pemerintah tidak bisa menampung dan menyelesaikan masalah yang disampaikan masyarakat. Keadaan ini meng-gambarkan betapa rapuhnya nilai-nilai wibawa dan kehor-matan pemerintah di mata rakyat, karena citra tampilan yang lemah dan tak berdaya. Jika dilihat dari sisi pemerintah, ungkapan ini dianggap berlebihan, bersifat penghinaan dan dapat pula dituduh sebagai fitnah dan provokasi yang menanam rasa kebencian di masyarakat terhadap peme-rintahan yang sah.

Selain ungkapan-ungkapan tersebut di atas, ada beberapa ungkapan lain yang sering diucapkan dalam pidato Thaib Adamy, yang substansinya seperti meng-gambarkan keadaan pemerintah yang lemah dalam segi tanggung jawab dan otoritas.

“Uek keubeu, keubeu mate lam seunamuek,
Pakon matee dikah hai keuebeu?
Hana soe rabee dilon hai po
Pakan han karabee dikah hai cut?
Saket pruet dilon hai po
Pakon saket dihai hai pruet...?
Bu meuntah dikah hai bu..?
Kayee basah dilon hai po
Pakon basah dikah hai kayee...?

*Ujeun rhaha dilon hai po
Pakon karhah dikah hai ujeun...?
Canggung lakee dilon hai po
Pakon kalekee dikah hai canggung...?
Uleue bathuep dilon hai po
Pakon kabathueb dikah hai hai uleue...?
Kleung sama dion po
Pakon kasama dikah hai keung...?
Siwah tak ilon po
Pakon katak dikah hai siwah..?
Galak-galak kutak sioe”.*

Artinya sebagai berikut,

“Uwak, kerbau uwak, kerbau mati dalam kubangan
Mengapa mati dikau hai kerbau...?
Karena tidak ada gembala
Mengapa tak gembala hai buyung...?
Karena aku sakit perut
Mengapa sakit perut engkau hai perut...?
Karena nasi kumakan mentah
Mengapa mentah engkau nasi...?”
Karena kayunya basah
Mengapa basah engkau hai kayu...?
Karena hujan menyirami aku
Mengapa engkau siram wahai hujan..?
Karena katak yang memintaku
Mengapa engkau meminta hai katak..?
Karena ular mematukku
Mengapa engkau patuk wahai ular...?”
Karena Siwah menyambar aku
Mengapa engkau menyambar wahai Siwah..?
Suka-suka kusambar sekali.”

Akibat dari semua gerakannya, Thaib Adamy ditangkap pada 29 Maret 1963 atas perintah Panglima Kodam I Iskandar Muda yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel M. Yasin selaku Penguasa Daerah Militer Aceh.

Selanjutnya setelah enam kali masa persidangan Thaib dipenjara selama dua tahun. Terhadap keputusan ini, Sekre-taris komite PKI Aceh, Muhammad Samadikin menyatakan, ”bahwa perkara Thaib Adamy adalah suatu proses terha-dap pribadi yang bersangkutan, yang juga sama prosesnya terhadap PKI dan proses terhadap rakyat. Ini merupakan tan-tangan yang ofensif Manipol dan walaupun ini terjadi di Aceh, tetapi mempunyai arti nasional yang penting dan juga merupakan suatu perkara politik yang revolusioner besar setelah SOB dihapuskan.”⁹⁸⁹

Setelah mendekam di penjara selama dua tahun, Thaib disambut para pe-ngikutnya dan langsung dibawa ke sebuah rapat umum yang sedang membi-carakan berbagai

⁹⁸⁹ A.R Ibrahim, *Awal Kehancuran PKI di Aceh*, Harian *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Tanggal 30 September 1993.

persiapan untuk hari bersejarah pada akhir bulan September 1965. Jumlah simpatisan PKI di Aceh tidak ada catatan yang pasti, tapi berdasarkan perkiraan sementara hanya belasan ribu orang saja. Salah satu penyebab peningkatan jumlah anggota adalah karena para pimpinan PKI sangat berani menentang setiap tindakan/kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Seperti Thaib Adamy yang rela mendekam dua tahun di penjara, karena menghina pemerintah demi membela kepentingan rakyat dan sekaligus mempertinggi pamor dan pengaruh PKI di mata publik.

Melihat perkembangan PKI yang makin meluas tahun 1965, yang didukung aksi dan propaganda Thaib Adamy setelah keluar dari penjara, akhirnya muncul kekhawatiran dari kalangan mahasiswa dan pelajar, terutama yang aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII). Dari kalangan HMI muncul nama-nama seperti Sayed Hasan Babud dan M. Ali Basyah Amin.

Berikutnya dari kalangan PII muncul nama-nama seperti Mansur Amin, Dahlan Sulaiman, Syarif Aamudian, A. Malik Raden, yang kemudian menjadi pimpinan KAPPI.⁹⁹⁰ Dari kalangan kampus muncul nama-nama seperti Noor Majid, Nurdin Abdurrahman, Dhimurtala, Let Bugeh, Thabrani Ibrahim dll. Dari kalangan santri seperti Said Zainal Abidin, Usman WD, Hamdan, Yusuf Isa dan lain-lain.⁹⁹¹ Reaksi yang diberikan kalangan pemuda terhadap gerakan PKI beraneka macam, mulai meminta perhatian pemerintah dan panglima TNI untuk selalu berhati-hati terhadap pengaruh dan propaganda PKI, hingga kepada aksi penyebaran pamflet-pamflet anti PKI, membentuk resimen mahasiswa anti PKI, membuat rapat-rapat, dan terakhir ikut serta dalam aksi penganyangan dan penumpasan sisa G-30-S PKI setelah nyata-nyata diketahui PKI terlibat aksi gerakan 30 September 1965 di Jakarta.

Mulai tanggal 2 Oktober 1965 mahasiswa Syiah Kuala dan mahasiswa IAIN Ar. Raniry bersama-sama di bawah komando Noor Majid melakukan rapat di lapangan tugu Darussalam dengan mengibarkan bendera merah putih, bendera dewan mahasiswa dan bendera senat mahasiswa. Kemudian massa mahasiswa bergerak ke gedung Rektor Unsyiah, Rektor IAIN dan Rektor IKIP Bandung Cabang Banda Aceh, untuk menyampaikan orasi dan pernyataan sikap bahwa mereka mengutuk PKI dan menggalang kekuatan selanjutnya untuk menumpas semua bentuk gerakan PKI yang ada di Aceh.

Kemudian massa bergerak menuju kota Banda Aceh dan menancapkan ketiga bendera merah putih di atas hotel Nyak sarong di jalan Mohd. Jam Banda Aceh, sebagai tanda perlawanan terhadap PKI sudah harus dimulai. Pada saat itulah muncul berbagai bendera ormas pendukung Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk perlawanan terhadap komunisme dan segala bentuknya.

Atas desakan mahasiswa, pemuda pelajar dan segenap komponen masyarakat, pada tanggal 29 Oktober 1965 Panglima Daerah pertahanan A, Brigadir Jendral Ishak Juarsa mengumumkan bahwa PKI beserta organisasi

⁹⁹⁰ Sayed Abubakar, *Wawancara*, Banda Aceh, tanggal 8 Juli 2006

⁹⁹¹ Said Umar Al Habsyi, *Hanya Sekali PKI Lancarkan Aksinya di Banda Aceh*, Harian Waspada, Medan, tanggal 22 September 1986.

BAB 4

PERISTIWA G-30-S/PKI DAN RESPON MILITER

GERAKAN 30 September sering disebut juga Gestok. Ini adalah istilah yang digunakan oleh Presiden Soekarno untuk menyebut “gerakan” yang terjadi pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 yang melakukan penculikan terhadap beberapa orang Jenderal TNI AD. Pelaku peristiwa itu sendiri mena-makan dirinya “Gerakan 30 September” tetapi pentolan Angkatan Darat menyebutnya “Gestapu” agar bisa disosialisasikan masyarakat dengan Gestapo Jerman yang kejam itu. Peristiwa ini menjadi catatan hitam bagi negara Indonesia dan bagian dari perjalanan panjang bangsa untuk dijadikan prasasti agar lebih mawas diri di masa mendatang.

Pembantaian Pahlawan Revolusi

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ke XX pada tanggal 5 Oktober 1965 di Taman Pahlawan Kalibata Jakarta⁹⁹² telah dilakukan upacara pemakaman 7 orang pahlawan revolusi yang telah menjadi korban gerombolan kontra revolusi yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.

Peristiwa itu dimulai sejak hari Kamis malam tanggal 30 September 1965. Sekelompok pasukan yang terdiri dari berbagai kesatuan Angkatan Darat bergerak menuju kediaman 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Hanya satu tujuan mereka, membawa ketujuh orang jenderal tersebut hidup atau mati ke hadapan Presiden Soekarno. Pada kenyataannya, mereka yang diculik tak pernah dihadapkan kepada Soekarno. Dalam aksinya tanggal 1 Oktober 1965 dinihari, gerakan itu hanya berhasil menculik 6 jenderal saja. Keenam jenderal tersebut ialah Letjen. Ahmad Yani, Mayjen. Suprpto, Mayjen. S. Parman, Mayjen. Haryono M.T., Brigjen. D.I Pandjaitan, Brigjen. Sutojo Siswomihardjo dan Lettu. Piere Tendean ajudan Jenderal A.H. Nasution. Nasution sendiri berhasil meloloskan diri dengan melompat ke rumah Duta Besar Irak yang terletak persis disebelah kediamannya.

Pagi harinya tanggal 1 Oktober 1965, sebuah susunan Dewan Revolusi diumumkan melalui corong Radio Republik Indonesia (RRI). Pengumuman itu memuat pernyataan

⁹⁹² *Kompas*, 6 Oktober 1965

bahwa sebuah gerakan yang terdiri dari pasukan bawahan Angkatan Darat telah menyelamatkan Presiden Soekarno dari aksi *coup d'etat*. Menurut mereka, *coup d'etat* ini sejatinya akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal dan CIA pada tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan hari jadi ABRI ke 20.

Meski peristiwa G-30-S/PKI disebut sebagai aksi yang didalangi PKI, tetapi banyak pihak juga yang berpendapat lain, yang menyatakan bukan hanya PKI yang pantas disebut dalang peristiwa itu, tetapi banyak pihak-pihak lain yang ikut bermain dan terlibat didalamnya. Dalam sebuah tulisannya tentang memecahkan teka-teki sejarah G-30-S/PKI, Salahudin Wahid berpendapat bahwa ketika terjadinya peristiwa itu tidak ada keraguan sedikitpun bahwa yang mendalangi kejadian tersebut adalah PKI. Keyakinan serupa sampai juga ke Aceh. Akan tetapi, sejak tahun 1971 ketika mulai beredar *Cornell Paper*, sebagian besar para sejarawan sadar, peneliti, dan pengamat politik baru sadar bahwa peristiwa G-30-S/PKI bukan hanya PKI saja yang terlibat, tetapi lebih disebabkan oleh pihak-pihak lain, terutama keterlibatan TNI Angkatan Darat. Bukan hanya sebatas *Cornell Paper* saja yang membahas tentang peristiwa tersebut, tetapi ada sepuluh teori yang mengungkapkan hal itu.⁹⁹³

Cornell Paper adalah hasil penelitian Benedict R. Anderson dan Ruth T. Mc Vey dari universitas Cornell Amerika Serikat tentang peristiwa G-30-S yang ditulis pada bulan Januari 1966, sekitar empat bulan setelah peristiwa itu terjadi. Paper ini pada intinya menyatakan bahwa peristiwa itu pada dasarnya merupakan masalah internal Angkatan Darat dan tidak ada kaitannya dengan PKI. Sejumlah Kolonel AD dari divisi AD Diponegoro Jawa Tengah merasa tidak puas terhadap kepemimpinan tentara yang rusak oleh kemewahan di Jakarta. Tesis ini tentu saja tidak benar, karena sebagian besar Jenderal TNI/ AD masih bergaya puritan seperti Nasution dan Sudirman. Disebut juga bahwa keterlibatan PKI ke dalam arus pertikaian adalah suatu kecelakaan. Secara garis besar disimpulkan oleh Salahudin Wahid, diantaranya:

⁹⁹³ Salahudin Wahid, *Memecahkan Teka-Teki Sejarah G.30.S*, dalam buku Aminuddin Kasdi, *G.30.S. PKI/1965 Bedah Cessar Dewan Revolusi Indonesia*, Java Pustaka, Jakarta, 2005. hlm vii

Pertama, seperti diungkapkan oleh versi pemerintah yang berkuasa yang menyebutkan PKI sebagai dalangnya.

Kedua, versi *Cornell Paper* yang menegaskan bahwa peristiwa ini dipicu oleh persoalan internal AD.

Ketiga, peristiwa itu digerakkan atas dasar kerja sama perwira-perwira pembelot dengan pemimpin PKI.

Keempat, ada teori yang mengungkap tabir keterlibatan tangan-tangan Amerika melalui agen-agen CIA.

Kelima, teori yang menyebutkan keterlibatan Presiden Soekarno dalam kerangka mengimbangi basis dukungan terhadap kepemimpinannya.

Keenam, ada teori yang menguak keterlibatan Soeharto yang menjelma-kan ketidakpuasan TNI/AD terhadap kepemimpinannya Soekarno.

Ketujuh, ada teori *chaos* yang menyatakan tidak ada “*grand scenario*” daam peristiwa tersebut. Semuanya didominasi oleh improvisasi lapangan, yang memungkinkan terjadinya kombinasi unsur-unsur Nekolim, pimpinan PKI dan oknum TNI yang membelot.

Terlepas dengan berbagai ragam teori yang mungkin kian bertambah atau mungkin menyusut karena saing berten-tangan satu sama lainnya. Berikut ini diungkapkan sekilas bentuk *action plan* pada 30 September 1965 yang terjadi di Jakarta. Langkah pertama, dimulai dari Biro khusus PKI yang me-nyampaikan tiga macam langkah perintah yang harus dilaksanakan. Pertama, menculik dan membunuh para Jenderal yang reaksioner untuk meniadakan mereka dari Dewan Jenderal. Kedua, pasukan revolusioner dari TNI/AD yang asli menduduki Istana Presiden dan sekitarnya, menguasai RRI pusat, me-nguasai pusat Telkom dan objek vital lain di Jakarta. Ketiga, Presiden Soekarno harus diamankan ke pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah dan dipaksa mengadakan kerja sama. Tugas pertama yang berkenaan dengan penculikan dan pembunuhan para Jenderal reaksioner dibebankan pada kelompok Pasopati, yang terdiri dari Yon Cakrabirawa yang dibantu oleh sukarelawan Pemuda Rakyat. Kelompok satu ini dipimpin oleh Kolonel A. Latief dan Letnan satu Dul Arief. Lettu Dul Arief ditugasi memimpin aksi penculikan para Jenderal. Pasukan ini berangkat dari Lubang Buaya pukul 3 dinihari dan tiba di sasaran pukul 4. Sebelum pasukan diberangkatkan, Syam memberikan instruksi agar menangkap para Jenderal itu daam keadaan hidup atau mati. Masing-masing regu atau peleton (A) dipimpin oleh Sersan Mayor Soerono. Peleton (B) dipimpin oleh Sersan Kepala Bungkus dari Cakra Birawa. Peleton (C) oleh Sersan Mayor Sukardjo (dari Yon 454). Peleton (D) dipimpin Sersan Mayor Satar Cakra Birawa dengan Sersan Mayor Paat (Yon 530). Peleton (E) Pembantu Letnan Satu Mukidjan (Jaya Sakti-I). Peleton (F) oleh Letda Djahuruf Cakrabirawa. Dan Peleton (G) dipimpin oleh Sersan Dua Sulaiman. Masing-masing dengan target sebagai berikut, (a) Brigjen Soetojo di Jl. Sumenep. (b) Mayjen Haryono. (c) Brigjen Panjaitan di Jl. Hasanudian Kebayoran Baru. (d) Mayjen S.Parman. (e) Letjen Ahmad Yani di Jl.Lembang. (f) Jenderal A.H. Nasution di Jl. Teuku Umar dan (g) Mayjen Soeprapto di Jl. Basuki.⁹⁹⁴

Pada pukul 5 pagi tanggal 1 Oktober 1965 di sekitar Lubang Buaya telah berkumpul

⁹⁹⁴ Harian Sinar Harapan, 27 November 1965 dalam buku Aminuddin Kasdi, *ibid*, hlm. 61-74. Mengutip catatan dalam “*Bunga Kehormatan untuk Tujuh Kematian*” dalam Buku Keluarga Pahlawan Revolusi, Kunang-kunang Kebenaran di Langit malam, tuturan anak-anak Pahwan revolusi Keluarga korban Peristiwa Dini hari 1 Oktober 1965, Jakarta, 2002. hm. 119-172.

100 orang sukarelawan anggota GERWANI, BTI dan SOBSI untuk menyambut kedatangan kendaraan dan truk-truk yang membawa korban penculikan G-30-S yang dilancarkan sejak tadi malam itu, yang terdiri dari enam jenderal dan satu orang perwira ajudan yang saat itu dianggap jenderal A.H. Nasution. Para tawanan diserahkan dari pasukan penculik Pasopati kepada pasukan basis tempur Pringgodani. Di situ dilaporkan bahwa ada dua jenderal yang tewas di tempat kejadian, yaitu Jenderal A. Yani dan Mayjen S. parman. Selebihnya segar bugar.

Setelah menerima tawanan itu, Mayor Udara Gatot Sukirno, selaku komandan pasukan Pringgodani melaporkan kepada atasannya Mayor Udara Soejono selaku Komandan Central Komandi-I. Selanjutnya sang atasan memberikan perintah agar tawanan segera “diselesaikan”. Lalu mulailah penyiksaan yang cukup sadis yang dilakukan oleh anggota GERWANI, BTI, SOBSI dan anak-anak PKI yang hadir. Sambil melakukan penyiksaan, mereka melantunkan lagu-lagu perjuangan ciptaan LEKRA, meneriakkan yel-yel anti Syetan Desa, Ganyang KABIR (Kapitalis Birokrat) dan Ganyang Dewan Jenderal. Mereka juga melakukan pesta harum bunga yang diikuti dengan tari-menari anak-anak wanita Gerwani sambil melakukan penyiksaan terhadap tawanan yang masih hidup.

Kesaksian Sukitman (Bharada Poisi yang ditawan G-30-S/PKI) sebagaimana disebutkan dalam buku “Kunang-kunang Kebenaran di langit malam” menjelaskan bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh anak-anak PKI terhadap tawanan G-30-S di Lubang Buaya benar-benar di luar perikemanusiaan, sadisme dan kejam. Setelah disiksa dan tak berdaya lagi, masing-masing korban ditembak mati dan dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu diberondong lagi dengan tembakan kematian ke dalam sumur.

Aksi Dewan Revolusi. Pada pukul 07.00 pagi hari itu juga, RRI pusat yang telah diduduki dan dikuasai oleh Gerakan 30 September, dipaksa untuk menyiarkan pengumuman pertama kepada seluruh rakyat Indonesia setanah air, yang isinya adalah.

“... Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di ibukota Negara RI, Jakarta, teah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, komandan batalyon Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno, tampil memimpin perlawanan yang ditujukan kepada mereka yang menamakan dirinya Dewan Jenderal . Sejumlah anggota Dewan Jenderal telah ditangkap, alat-alat komunikasi penting serta obyek-obyek vital lainnya telah dikuasai dan telah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September. Presiden Soekarno telah selamat dan dalam lingkungan G. 30.S. Dewan Jenderal adalah gerakan *subversive* yang disponsori oleh CIA. Mereka mulai aktif pada saat Presiden Soekarno sakit pada bulan Agustus 1965, dengan menyebarkan berita bahwa Presiden Soekarno sakit dan diharapkan meninggal. Oleh karena itu, Dewan Jenderal merencanakan aksi pameran kekuatan pada hari ABRI tangga 5 Oktober 1965 dengan menggelar pasukan yang didatangkan dari Jawa Timur, Jawa tengah dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasinya kekuatan militer di di Jakarta, maka Dewan Jenderal akan mudah melakukan *Coup-contra* militer revolusioner. Atas dasar tersebut maka Let. Kol Untung selaku komandan gerakan 30 September menyatakan bahwa gerakan ini semata-mata gerakan dalam tubuh AD yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama baik AD, bermaksud jahat terhadap RI dan Presiden Soekarno. Let. Kol. Untung menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu

adalah suatu keharusan sebagai anggota Cakrabirawa yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden RI.

Selanjutnya, apa yang telah dilakukan di Jakarta, segera akan diikuti oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, yang ditujukan untuk membersihkan seluruh kaki Indonesia. Selanjutnya sebagai *follow up* dari semua Gerakan 30 September ini, segera dibentuk Dewan revolusi pusat, dewan revolusi propinsi, dewan revolusi Kabupaten dan kota, hingga dewan revolusi kecamatan, kelurahan dan desa-desa. Anggota dewan revolusi terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang setia dan mendukung gerakan 30 September 1965 tanpa *reserve*. Seluruh partai-partai politik, ormas-ormas dan juga seluruh surat kabar dapat meneruskan kegiatannya dengan catatan menyatakan kesetiiaannya kepada dewan revolusi Indonesia. Kepada seluruh perwira, bintara dan tamtama angkatan darat di seluruh tanah air, Untung menyerukan supaya bertekad bulat agar segera mengikis habis pengaruh-pengaruh Dewan Jenderal dan semua kaki tangannya yang ada dalam tubuh AD. Semua Jenderal dan perwira-perwira yang hidup di atas penderitaan anak buahnya, yang hidup berfoya-foya, bermewah-mewah, menghina kaum wanita dan menghamburkan uang Negara semuanya harus ditendang dari TNI/AD dan diberikan hukuman yang setimpal. AD bukan untuk Jenderal-Jenderal tetapi milik semua prajurit Ad yang setia kepada cita-cita revolusi Agustus 1945. "Kepada seluruh rakyat Indonesia, Letkol Untung menyerukan agar tetap waspada dan mempertinggi semangat untuk menyelamatkan RI dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat." Dalam waktu dekat, Letkol Untung akan segera mengumumkan Dekrit-I tentang dewan revolusi Indonesia yang segera disusul dengan dekrit-dekrit lainnya.⁹⁹⁵

Militer (TNI-AD) Bertindak

Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, Pangdam Jaya, Mayjen Umar Wirahadikusumah menerima telepon dari ajudan Jenderal Ahmad Yani, Mayor CPM Sudarto, yang menjelaskan peristiwa penculikan terhadap Jenderal Ahmad Yani dan lain-lain. Selanjutnya, Umar memerintahkan Sudarto agar segera melaporkan kepada Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Kemudian Sarwo Edhi langsung memerintahkan Mayor C.I Santoso agar segera menarik seluruh pasukan RPKAD yang sedang mengikuti latihan persiapan upacara HUT ABRI di parkir timur Senayan. Keadaan pagi itu memang sangat membingungkan, dan pengumuman Letkol Untung hanyalah sebuah isyarat bahwa peristiwa ini melibatkan orang-orang Cakra birawa. May. Jen Soeharto, selaku panglima KOSTRAD menerima kabar dari tetangganya Mashuri yang menyatakan telah terjadi gerakan miter yang mencurigakan di rumah beberapa orang Jenderal, dan dikabar-kan beberapa orang dari mereka telah ditembak mati di rumahnya oleh

⁹⁹⁵ Dalam isi pengumuman RRI tersebut, menurut versi Untung, dapat diketahui tiga hal, (1) ada gerakan jahat dari kalangan jendrak AD yang tidak setia pada Presiden Soekarno. Tujuannya untuk membangkitkan rasa benci rakyat terhadap jendral, yang namanya tidak disebutkan Untung saat itu. (2) Untung menggunakan lembaga Cakrabirawa sebagai penyelamat Bung Karno, sehingga Untung dan Cakrabirawa mendapat dukungan publik. (3) Dikesankan bahwa gerakan itu bukan suatu kudeta yang negatif, tetapi semata-mata murni gerakan dalam tubuh Angkatan darat (AD/TNI) dengan maksud agar satuan angkatan lain tidak ikut campur tangan. Berikutnya pada jam 14.00 hari itu juga ia mengumumkan DEKRIT-I tentang pembentukan dewan revolusi Indonesia, yang isinya, "*untuk sementara waktu menjelang diadakannya Pemilihan Umum MPR RI sesuai dengan amanat UUD 1945, maka dewan revolusi menjadi sumber dari segala sumber kekuasaan dalam Negara RI untuk mewujudkan Pancasila dan Panca azimat Revolusi seluruhnya.*"

gerombolan senjata yang mengaku dirinya dari Yon Cakrabirawa.

Setelah mendapat informasi itu, Mayjen Soeharto langsung pergi ke kantornya di Medan Merdeka Timur. Dalam perjalanannya itu Soeharto melihat sendiri ada dua batalyon Kostrad yang sedang siaga mengikuti latihan persiapan HUT 5 Oktober 1965. Kedua Batalyon itu adalah, Yon 454/Para dari Jawa Tengah yang ditempatkan di bagian utara lampung Medan Merdeka menghadap Istana Merdeka, dan Yon 530/Para dari Jawa Timur yang ditempatkan di sekitar Museum, Bundaran Air Mancur, gedung Postel dan terus keselatan ke Stasiun Gambir. Setibanya di kantor Pankostrad, Soeharto langsung melakukan pertemuan dengan para pembantunya untuk menganalisis situasi dan kondisi yang terjadi sejak tadi malam hingga keluarnya siaran pengumuman RRI pada pukul 07.00 dan siaran DEKRIT-I Tahun 1965 tentang pembentukan Dewan Revolusi pada pukul 14.00 hari 1 Oktober 1965 yang di pimpin oleh Letnan Kolonel Untung, selaku Komandan Pasukan Cakrabirawa. Hasil analisis situasi yang dilakukan di kantor Pangkostrad itu menyimpulkan bahwa telah terjadi penghianatan terhadap TNI/AD dan usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang bersekongkol dengan gerakan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung.

Soeharto kemudian bertekad untuk melawan dan menum-pas seluruh Gerakan 30 September 1965 yang dipimpin oleh Untung, dan bertekad pula untuk melawan semua upaya yang hendak merebut kekuasaan Negara Republik Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan Soeharto adalah segera mengam-bil alih jabatan pimpinan angkatan darat berdasarkan order tetap Menpangad tentang pejabat yang mewakili pimpinan TNI/AD apabila Menpangad berhalangan. Langkah ini dise-tujui oleh para perwira tinggi yang ada dalam tubuh jajaran organisasi Kostrad.

Soeharto segera memanggil Pangdam Jaya Umar Wiraha-dikusumah yang sedang di lapangan bersama dengan Letkol CPM Hidayat Wiryanjaya “mengunjungi rumah-rumah duka” para korban peristiwa G-30-S tadi malam. Tiba-tiba A Haris Nasution keluar dari persembunyiannya (yang selamat dari aksi penculikan tadi malam) dan segera menemui Letkol Hidayat. Selanjutnya Letkol Hidayat bersama Bob Sunario (ipar Nasution) segera membawa Pak Nas keluar dari kediamannya itu untuk pindah ke tempat yang aman di sekitar Markas Kostrad.

Pada siang hari 1 Oktober 1965 Jenderal Nasution bergabung ke Kostrad di Markas Kostrad jalan Merdeka Timur Jakarta. Selanjutnya mereka bertiga (Soeharto, Umar Wirahadikusumah, dan Nasution) yang dibantu oleh perwira-perwira tinggi lainnya di Markas Kostrad melakukan rapat evaluasi terakhir terhadap situasi yang terjadi. Kesimpulan yang diambil dalam rapat itu adalah, segera melakukan pembelaan dan melakukan tindak pembalasan terhadap para pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal angkatan darat. Disinyalir bahwa pasukan penculik itu pada saat ini berkonsentrasi di sekitar PAU (Pangkalan Angkatan Udara) Halim Perdanakesuma.

Langkah berikutnya adalah melakukan konsolidasi pasukan untuk menggempur seluruh kekuatan G-30-S yang terkonsentrasi di PAU-Halim dan atau dimana saja mereka berada. Pada saat itu diakui oleh Pangkostrad masih sangat sulit untuk mendapatkan pasukan yang terpercaya dan terlatih, karena situasi yang sedang kacau. Namun berkat keseriusan dan kesigapan Kostrad, pada pukul 14.00 melalui Letkol. Ali Murtopo, diterima kabar dari Kapten Soekarbi, batalyon 530 Brawijaya, bahwa pada

pukul 16.30 dijanjikan akan membawa batalyon 530 untuk bergabung dengan Kostrad. Pada pukul 20.00 malam bergabung lagi dua kompi dari pecahan pasukan Yon 454 yang membelot bergabung dengan Kostrad. Berikutnya juga bergabung Yon Para 328 Kujang yang sedang berada di Jakarta dalam rangka persiapan latihan HUT 5 Oktober 1965.

Dengan berbekal pasukan RPKAD dari Cijantung, Yon Para 328 Kujang, dan dua kompi dari Yon 454 tadi, Kolonel Sarwo Edhi Wibowo dengan penuh percaya diri, menghadap Pangkostrad Soeharto, dan menyatakan pasukan siap diberangkatkan untuk menggempur seluruh tempat konsen-trasi pengkhianat TNI/AD yang pada saat itu sedang berkumpul di sekitar PAU-Halim. Soeharto minta ditangguh-kan untuk sementara, karena pada saat yang sama itu, ada sepucuk surat dari Presiden Soekarno yang sedang dibahas di dalam rapat para perwira tinggi Kostrad. Surat tersebut dibawa oleh Kolonel Bambang Widjonarko dari Presiden Soekarno kepada Pangkostrad Mayjen Soeharto.

Surat tersebut dibuat di Halim, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa Presiden Soekarno dalam keadaan sehat dan selamat serta tetap memegang kendali selaku Pimpinan Negara. Dalam surat itu juga disebutkan, bahwa Presiden telah mengangkat Mayjen Pranoto Reksosamudro selaku Pejabat Harian (Caretaker) Menteri Panglima Angkatan Darat, selanjutnya Pangti ABRI (Presiden) juga memerintahkan agar pasukan-pasukan ditarik dari posnya masing-masing dan baru boleh bergerak hanya atas perintah. Para perwira tinggi yang berkumpul di Markas Kostrad termasuk Nasution, ikut melakukan telah dan pembahasan terhadap isi surat Presiden itu. Keputusan yang mereka ambil adalah menunda pelaksanaan perintah Presiden Soekarno dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁹⁹⁶

- a) Operasi penumpasan dan pengejaran terhadap pasukan penculik Jenderal -Jenderal TNI sedang berjalan.
- b) Para Jenderal diculik itu belum diketahui identitasnya dan belum juga diketahui bagaimana nasibnya.
- c) Melaporkan kepada presiden, bahwa biasanya bila Men/ Pangad Jenderal A. Yani tidak ada di tempat, maka yang mewakilinya adalah Pangkostrad May. Jend. Soeharto sebagai perwira paling senior. Selanjutnya melalui Bambang Widjanarko, May. Jen. Soeharto juga meminta bantuan agar dapat membantu Bung karno untuk segera keluar dari PAU Halim. Karena dalam waktu dekat PAU Halim akan segera diserang RPKAD dan Presiden tidak boleh ada di tempat salah. Karena panik, saat itu Umar DAni tidak dapat menunjuk tempat yang aman bagi Presiden, antara ke Yogya, Bali atau ke Bogor. Sehubungan dengan itu Pangdam Jaya Umar Wirahadikusumah juga telah mengumumkan DKI-Jakarta “dalam keadaan bahaya perang” serta pemberlakuan jam malam mulai pukul 18.00 hingga jam 06.00 pagi. Selanjutnya Pangkostrad May jen Soeharto memerintahkan pasukan RPKAD dan Yon 328 Kujang untuk merebut kembali RRI serta obyek vital lain, dan semua bisa direbut kembali tanpa perlawanan. Sejak itu mulai disiarkan kembali semua kebijakan Pangkstrad selaku pimpinan sementara TNI/AD

⁹⁹⁶ Sugiarto Suroyo, *Siapa Yang Menabur Angin, Akan Menuai Badai*, Jakarta, 1988. Laporan yang tidak dipublikasikan, dalam buku Aminuddin Kasdi, *Ibid.* hlm.78.

untuk menyelamatkan Negara dan mematahkan seluruh unsur-unsur pemberontakan G. 30.S/PKI yang dikendalikan oleh dewan Revolusi dibawah pimpinan Let. Kol Untung.

Soeharto segera meralat nama-nama perwira AD yang dicatat namanya dan disebutkan sebagai anggota dewan revolusi sebagaimana yang diumumkan oleh Letkol Untung dalam DEKRIT-I tahun 1965. nama-nama tersebut adalah; Basuki Rahmat, Amir Mahmud, Umar Wirahadikusumah, Solihin, Ryacudu dan Andi Rivai.

Selanjutnya Pangkostrad Soeharto melalui corong RRI menyampaikan pengumuman sebagai Komandan Pimpinan AD RI, sebagai berikut;

PENGUMUMAN
No. 002/Peng/ Pus/1965

Dengan ini diumumkan bahwa :

1. Telah ada pengertian dan kerjasama dan kebulatan penuh antara AD, AL dan Angkatan Kepolisian untuk menumpas gerakan kontra revolusioner dari apa yang menamakan dirinya “gerakan 30 september”.
2. Dengan telah mengumumkan apa yang mereka sebut “Dewan Revolusi Indonesia” dan menganggap bahwa Kabinet Dwikora sudah demisioner, maka jelaslah bahwa orang-orang gerakan 30 September itu adalah orang yang kontra revolusi yang telah melakukan pengambil alihan kekuasaan Negara RI dari tangan P.J.M Presiden/ panglima tertinggi ABRI/ Pimpinan besar Revolusi, Bung Karno, disamping mereka yang telah melakukan penculikan terhadap beberapa perwira tinggi Angkatan Darat.
3. Masyarakat diharap tenang dan tetap waspada serta siap siaga.

Jakarta, 01 oktober 1965

Pimpinan sementara Angkatan RI

Ttd

Mayor Jenderal Soeharto.

Latar Belakang Peristiwa G-30-S/PKI

Skenario terjadinya peristiwa Gerakan 30 September dibuat dalam berbagai versi. Diantaranya adalah *Van der Plas Connection*. *Van der Plas Connection* adalah jaringan riil yang canggih, hanya anggota-anggota inti tertentu yang sadar akan keberadaannya sebagai anggota jaringan, lainnya adalah oknum-oknum oportunist tanpa sadar, sekedar sebagai alat saja. Ini adalah posting yang sudah cukup lama, 16 Januari 1998, yang dikirim oleh *owner*-nya milis

Pada tanggal 1 Oktober 1965, terjadi gerakan militer yg menamakan diri G30S, menculik dan membunuh 7 orang Jenderal dan seorang lolo Jend. Nasution karena keliru dengan Let. Tendean. Para Jenderal tersebut adalah anggota Tim Pengusut MBAD yang ditugasi mengusut - kriminalitas terorganisasi -yang terjadi di Jawa Tengah dalam penggal kedua tahun 50-an .Mereka adalah Mayjen. Soeprapto ketua Tim dan anggota Mayjen S. Parman, Majen. Harjono MT., Brigjen. Soetomo Siswomihardjo dan

Brigjen Pandjaitan dan yang diluar Tim, Letjen A. Yani Menpangad. Drama berdarah subuh tgl. 1 Oktober 1965 yang traumatik, membuka jaringan mega konspirasi yang menelan korban rakyat besar sekali, komunis maupun non komunis dalam abad ini di Indonesia karena adanya interaksi konflik internal dengan kekuatan-kekuatan besar eksternal.

Disusul kemudian dengan pembentukan Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung, dengan anggauta baik sipil maupun militer, a.l. tokoh yang menonjol ialah Dr. Soebandrio, Waperdam I (Wakil Perdana Menteri), orang kedua sesudah Bung Karno, Mayjen Amir Mahmud, Pang Kodam Jaya, Brigjen Soepardjo, Panglima Komando Tempur II Kalimantan Barat. Apabila diikuti dengan cermat peristiwanya, ternyata yang mengeluarkan pernyataan mendukung Dewan Revolusi secara spontan dan vokal waktu itu, hanyalah Utomo Ramelan, Walikota Solo, sedangkan dari CDB (Comite Daerah Besar) PKI tidak ada yang mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ini bukan peristiwa yang kebetulan, tetapi jelas ada merekayasa di balik semua itu.

Para pelaku utama G-30-S adalah, Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Kawal Presiden Cakra Birawa, Kol. Latief, Komandan Brigade Infantri Kodam Jaya, Brigjen Soepardjo, Panglima Komando Tempur II Kalbar dalam rangka Ganyang Malaysia, Syam Kamaruszaman, Kepala Biro Khusus CC PKI. Keempat pelaku utama tersebut berorientasi dan ada hubungan jaringan dengan PKI, sebagai suatu hasil binaan dan infiltrasi komunis kedalam AD. Dengan Jenderal Suharto keempat pelaku utama tsb. juga mempunyai hubungan erat sejak dulu.

Latief bersama istri dan seorang perwira lain dari Solo bersama istri berkunjung kerumah kediaman Soeharto untuk menyamakan maksud pertemuan yang sebenarnya, yaitu untuk membicarakan penyingkiran para Jenderal anggauta Tim Pengusut MBAD. Dengan hadirnya para istri justru kelihatan jelas betapa eratnya hubungan mereka itu, sekaligus membantah pernyataan Soeharto, bahwa Latief datang ke Rumah Sakit itu akan membunuh diri Soeharto. seharusnya dibalik, salah satu tanda jelas adanya konspirasi dan rekayasa gerakan tersebut.

Dalam penggal kedua tahun 50-an, di Jawa Tengah berpusat di Semarang, terjadi -kejahatan terorganisasi - (*organized crime*) berupa penyelundupan besar-besaran, penggelapan barang-barang milik perusahaan negara, manipulasi dump kendaraan bermotor milik Divisi Diponegoro dan pungutan liar atas barang-barang kebutuhan rakyat. (Pungli terkenal tahun 70-an di Jawa Tengah sudah berjalan 20 tahun lebih dulu).

Para pelakunya terdiri dari oknum-oknum militer dan sipil, terorganisasi baik seperti galibnya organisasi GANGSTER. Pelaksana utamanya a.l. adalah Liem Siu Liong, Thee Kian Seng (Bob Hasan), Tik Liong (Sutikno - pedagang besi tua). Baru-baru ini bahkan Bob Hasan dengan bangga berceritera di depan wartawan. tentang hal tersebut. Sedangkan biang dari kejahatan terorganisasi tersebut tidak lain adalah Kol. Soeharto, Panglima Divisi Diponegoro waktu itu..

Adanya kriminalitas terorganisasi tersebut akhirnya sampai ditangan Jenderal Nasution Menteri Pertahanan / Ketua PARAN (Badan Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Aparat Negara). Atas laporan dari Kepala Staf Divisi Diponegoro Kol. Pranoto Reksosamodra dan Letkol. Soenarjo, komandan CPM Jawa Tengah yang mendeteksi dan mengamati kejahatan tersebut. (Letkol Sunaryo kemudian diangkat menjadi Jaksa Agung Muda).

Jenderal Nasution memerintahkan agar kejahatan tersebut diusut, yang dilakukan oleh Tim Pengusut MBAD, terdiri dari Majen Soeprapto deputi Pangad sebagai ketua, dengan anggota Majen. S. Parman, Majen Harjono MT, Brigjen Soe-tojo dan Brigjen Panjaitan. Dengan teliti dan kerja keras, dengan didukung bukti-bukti yang sah akhirnya Tim berkesimpulan, bahwa terhadap para pelaku, harus diambil tindakan.

Pertama Kol. Soeharto yang menjadi biangnya harus dipe-cat dari kedudukannya selaku Panglima Divisi Diponegoro, dan kedua mereka yang terlibat diajukan ke depan Pengadilan.

Keputusan yang diambil atasan adalah, memecat Kol. Soeharto sebagai Panglima Divisi Diponegoro, tetapi tidak dia-jukan kedepan pengadilan. Kol. Soeharto kemudian dipindah ke Jakarta tanpa jabatan. Sedang Tik Liong diusut oleh Kejaksaan Negri Semarang atas perintah Jaksa Tinggi Jawa Tengah Mr. Imam Bardjo yang kemudian ternyata meninggal secara misterius.

Dengan pemecatan dirinya sebagai Panglima Divisi Diponegoro tersebut, Kolonel. Soeharto sangat marah dan dendam, bersumpah untuk membuat perhitungan dan akan meng-habisi, mereka-mereka yang membuat dirinya celaka. Mereka itu tidak lain adalah para perwira anggota Tim Pengusut MBAD, dan penanda tangan Surat Keputusan Pemecatan Panglima Divisi Diponegoro yang tidak lain adalah Panglima Tertinggi/Presiden Soekarno .

Dengan terjadinya drama berdarah subuh 1 Oktober 1965, ternyata seluruh anggota Tim Pengusut MBAD yaitu, Jenderal-jenderal Soeprapto, S. Parman, Harjono MT, Soetojo dan Panjaitan, dibantai habis, dengan tambahan Men Pangad Letnan Jenderal A. Yani. Peristiwa tersebut menggocangkan Indonesia dengan hebat, suatu kondisi awal yang diperlukan untuk mengantar penggulingan Presiden Soekarno melalui G30S oleh *Van der Plas connection*.

Dengan dibantainya para Jenderal anggota Tim Pengusut MBAD yang terdiri dari Majen Soeprapto, Majen S. Parman, Majen Harjono MT, Brigjen Soetojo Siswomihardjo dan Brigjen Panjaitan dan masih ditambah dengan Letjen A. Yani serta dilucutnya kekuasaan Presiden Soekarno, telah lengkap dan tuntas terlaksana, sumpah Kol. Soeharto yang diucapkan tahun 1957.

Demikian pula dengan pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966, tugas pokok terakhir kolonel Soeharto yang dibebankan padanya oleh induk jaringannya (*Van der Plas connection*) yang merekrut dia telah dilaksanakannya dengan tuntas.

Amerika bersama sekutunya pada tahun 1958 melun-curkan sebuah projek pemberontakan, dengan tujuan meng-gulingkan Presiden Soekarno dan memecah Indonesia untuk dijadikan beberapa negara dan menghapuskan PKI. Mereka menarik pengalaman dari Cina, yang secara utuh sesudah jatuhnya Chiang Kai Sek, seluruh daratan Cina jatuh ditangan komunis kecuali Taiwan karena terhalang lautan dan kemudian disekat oleh Armada ke-VII Amerika dengan dalih pakta dengan Cina (Chiang Kai Sek).

Di Indonesia Sekutu mempunyai kepentingan langsung yaitu sumber minyak di Sumatra dan Kalimantan yang meru-pakan miliknya. Mereka meluncurkan projek pemberontakan tersebut secara gegabah dan arogan, karena merasa telah menjadi pemenang dalam Perang Dunia ke II

Dengan dibantu koordinasi yang dilakukan oleh agen utamanya (*master agent*) Prof. Soemitro Djojohadikusumo, Sekutu menyalurkan dana dan senjata lewat Singapura untuk PRRI dan Permesta. Amerika dengan garang menodong Jakarta dengan Armada ke-VII, minta jaminan keselamatan warganya dan perusahaan-perusahaan miliknya. Jika Repu-blik Indonesia tidak sanggup maka mereka akan menggerak-kan Armada ke-VII yang sudah siap di laut Jawa.

Dengan terjadinya pemberontakan PRRI-Permesta, proyek Amerika Inggris tersebut, Bung Karno sebagai pemimpin kenamaan dunia, sempat jatuh citra dan martabatnya sampai dititik terendah dimata dunia. Kemudian tampil Kolonel A. Yani dengan Operasi 17 Agustus untuk menumpas pemberontakan tersebut, dibawah ancaman Armada ke VII Ame-rika yang menang perang melawan Jepang di Pasifik. Bintang terang berada di pihak Yani. Dalam tiga hari berhasil direbut ibukota PRRI - Padang dan dalam waktu sekitar satu minggu seluruh PRRI berhasil digulung.

Permesta juga mengalami nasib sama, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diselesaikan pula. Di Sulawesi malahan terjadi seorang penerbang berkebangsaan Amerika, Allen Pope, ditembak jatuh oleh My. Ud. Dewanto, ditawan dan diadili serta mendapatkan vonnis hukuman mati, karena dia telah mengebomi wilayah Republik Indonesia dan juga beberapa kapal Indonesia, sehingga menimbulkan kerusakan dan tewasnya rakyat yang tidak berdosa. Dia mengaku bahwa operasinya dilakukan dengan terbang dari Pangkalan Angkatan Udara Amerika di *Clark Field*, Fillipina

Dengan ditumpasnya pemberontakan projek Amerika - Inggris tersebut dalam waktu yang mengejutkan singkatnya, muka mereka tercoreng di mata dunia internasional dan terbuka kedoknya menyerang kedaulatan negara lain semasanya sendiri. Disamping itu Amerika terpaksa harus menjadi pengemis untuk memohon ampunan keselamatan jiwa Allen Pope, yang oleh Bung Karno dengan jiwa besar diluluskan.

Jika penumpasan berjalan agak lama dan pemerintahan-pemerintahan tandingan tersebut sempat membuat perjanjian dengan Amerika, maka Amerika dapat menggerakkan Armada ke-VII untuk mendarat di wilayah Indonesia. Sikap yang garang dan arogan Sekutu tersebut dilandasi ego yang kuat karena telah menjadi pemenang dalam Perang Dunia ke-II dan Amerika di bawah pemerintahan Partai Republik ini berbau rasialis. . Wajah dan citra Bung Karno terangkat kembali dimata dunia dan Indonesia tidak dapat dipandang remeh saja oleh negara-negara lain, terutama negara bekas kolonialis. Bung Karno merasa lega dan sangat berterima kasih kepada kolonel A. Yani yang mampu mengangkat kembali citra dan martabatnya dimata dunia internasional.

Apabila ditelusuri lebih mendalam, dalam rangka untuk lebih menjamin kepentingan Sekutu (politik, ekonomi dan keamanan di Indonesia) Amerika dan sekutunya merasa perlu untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan memecah-belah Indonesia menjadi beberapa negara, menyingkirkan para perwira yang berdedikasi dan menghapus PKI. Kegagalan yang dialami Amerika dan sekutunya dalam meluncurkan projek pemberontakan PRRI-Permesta membuatnya sadar setelah mendapat advis dari Blanda, bahwa pendekatan dari daerah untuk menyingkirkan Presiden Soekarno adalah kesalahan yang fatal dan sulit untuk dapat berhasil.

Sekutu mulai melakukan pendekatan ke Pusat. Kepada Jakarta mulai ditawarkan untuk membeli pesawat angkut raksasa Hercules, Indonesia diberi bantuan stasiun

komunikasi beserta perlengkapannya yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia (dengan demikian Sekutu dapat menyadap semua perintah-perintah dari pusat maupun daerah), kepada para perwira Indonesia diberi kesempatan untuk belajar ke Amerika, diadakan program *Civic Mission* dan perwira pelaksanaannya dilatih di Amerika beberapa bulan, juga dikirim ke *Indonesia Peace Corps*.

Para sarjana sipil dan mahasiswa diberi beasiswa untuk belajar ke Amerika. Para kader Dr. Soemitro Djojohadikusumo berbondong-bondong berangkat belajar ke Amerika dan kembali menggondol gelar-gelar akademis yang diperlukan untuk mengajar di Universitas. Hubungan yang semula tegang menjadi cair, tidak ada pesta atau resepsi di Kedutaan Amerikayang tidak mengundang para sarjana yang kira-kira berpotensi.

Bersamaan dengan dilaksanakannya program-program tersebut diatas,dengan diam-diam dilakukan *talent scouting* (mencari calon jago berbakat) oleh perwira tinggi dari bagian sandi yang ternyata berada dalam jaringan Van der Plas. Calon jago adalah perwira-perwira dengan kriteria, avonturir, berani malu, berani mati, doyan duit, berpengalaman dan berhasil dalam berpetualang serta telah menikmatinya.

Ditemukan seorang perwira yang memenuhi kriteria tersebut,ialah seorang kolonel asal Jawa Tengah dan pernah menduduki posisi tertinggi ditempatnya sebagai Panglima Divisi,yaitu Kolonel Soeharto. Malahan padanya ditemukan faktor lain yang sangat penting,yaitu menaruh dendam kesumat kepada para perwira atasannya, terutama anggauta Tim Pengusut MBAD dan rival berat A. Yani juga kepada Presiden Soekarno yang menandatangani Surat Keputusan pemecatannya sebagai Panglima Divisi Diponegoro. Maka ter-pilihlah Kolonel Soeharto untuk dijadikan jago utamanya.

Dalam bulan Agustus 1965, datang sebuah Tim Dokter RRC, setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan Bung Karno, berkesimpulan penyakit Bung Karno adalah serius tak boleh diabaikan. Bagi Bandrio dan PKI berita ini adalah sangat menyentakkan. Sejak saat itu, mulai terjadi kegiatan dan manuver-manuver politik yang luar biasa. Bandrio melancarkan *move-move* politik dan PKI yang merasa belum siap sangat khawatir akan diterkam oleh AD (dokumen Gilchrist dsb). Lebih baik melakukan ofensif revolusioner daripada diam dan defensif.

Mereka bergegas untuk membuat persiapan-persiapan, guna menyingkirkan Jend. A. Yani dan para perwira pimpinan Angkatan Darat. Karena mereka sesudah penumpasan pemberontakan lebih terkonsolidasi, perhitungan Bandrio jika hanya Yani yang disingkirkan, kemungkinan Nasution akan dapat dimunculkan, maka Nasution segera dimasukkan juga dalam daftar untuk dihabisi. Dengan persiapan yang tergesa-gesa dan kurang cermat dan tidak rapi tersebut menjadikan para pelaksana penculikan tidak mampu membedakan antara Nasution dan Letnan Tendean, yang membuat lolosnya Nasution dari penculikan dan pembunuhan.

PKI segera meluncurkan kampanye politiknya, dengan melontarkan tudingan bahwa para perwira Pimpinan AD adalah fasis yang merencanakan kup ternadap Bung Karno dengan membentuk Dewan Jenderal . Pengertian Fasis adalah militer (yang ganas dan rakus) yang bekerja sama dengan kaum kapitalis (disini dikenal sebagai cukong, konglomerat). Sepanjang pengetahuan orang banyak, para jenderal Pimpinan AD tsb., tidak ada yang dikenal sebagai tukang dagang apalagi mempunyai cukong, maka tudingan fasis dari PKI tersebut jauh meleset dan kurang mendapat sambutan dari masyarakat bahkan oleh masyarakat mereka dinilai tertib, jujur dan disiplin.

Partai yang memberikan dukungan utama kepada Bung Karno dalam meluncurkan politik penggalangan negara Nefos (*New Emerging Forces*). Strategi politik ini, mengancam strategi politik Amerika Serikat, yang dalam rangka perang dingin menginginkan hanya ada dua kubu saja, kubu Kapitalis dan kubu Komunis. Bung Karno ingin menggalang kekuatan negara-negara berkembang, menjadi kubu ketiga karena PKI dalam hal ini merupakan pendukung utama, maka PKI selalu mendapat perlindungan dan dukungan Bung Karno, jika ada yang mengganggu atau menentangnya.

Sejak akhir tahun 1962, setelah Irian Jaya kembali ke pangkuan RI, PKI mengadakan evaluasi diri, mengapa sejak aktif kembali sudah hampir 15 tahun mulai 1949, belum juga dapat meraih kekuasaan, sedang dalam Pemilu 1955 sudah menjadi salah satu dari empat besar. Diluar negeri partai komunis dengan massa 10% saja sudah dapat meraih kekuasaan dengan mudah.

Mereka menemukan kesalahan tersebut, yaitu PKI telah menerapkan strategi politik yang keliru, yaitu strategi 'konformisme' menyesuaikan diri dengan garis politik Pemerintahan Nasional -Bung Karno. Maka PKI segera mengambil keputusan untuk beralih ke strategi 'konfrontasi' sesuai dengan garis perjuangan kominis yaitu '*Klassen Strijd*', pertentangan kelas.

D.N. Aidit dan Nyoto ke Moskow untuk menyampaikan keputus-an tsb., tetapi justru mendapat marah dari bos Partai Komunis Sovyet, yang tidak dapat menyetujuinya, karena kerjasama dengan pimpinan borjuis nasional seperti Bung Karno masih diperlukan dalam menghadapi kapitalis Amerika Serikat. Dengan adanya tokoh seperti Bung Karno, dapat digunakan menarik negara-negara berkembang disisi komunis.

Aidit merupakan tokoh yang misterius, dia dengan alasan untuk melaksanakan alih strategi politik yaitu "-konfrontasi-" dalam rangka mengemban misi dari induk jaringannya lewat Syam yaitu *Van der Plas connection*, guna menyesuaikan agenda waktu yang sudah ditentukan oleh jaringan tersebut dalam upaya hendak menggoncang Indonesia. Maka baginya tidak ada jalan lain selain beralih kiblat ke Beijing, yang masih berwawasan nasional / lokal yang menerapkan doktrin, -kekuasaan ada di ujung bedil- desa mengepung kota - berkonfrontasi dengan penguasa nasional, hal yang tidak dapat dielakkan. Dengan menerapkan strategi politik konfron-tasi tersebut, akan sesuai dengan agenda waktu yang sudah ditentukan *Van der Plas connection* - (Sekutu) untuk menggoncang Indonesia dalam rangka menyingkirkan Presiden Soekarno.

Sebagai realisasi strategi konfrontasi, dilancarkan Gerakan Aksi Sefihak, yang menimbulkan antagonisme dan konflik konflik dengan partai dan golongan lain, seperti a.l. Masyumi, PSI, PNI, NU dan AD serta lain-lain kelompok. Menciptakan setan-setan kota dan setan desa, kabir (kapitalis birokrat), dsb. yang membikin suasana politik semakin panas, seperti, Peristiwa Bandar Betsi, Jonggol, Boyolali, Klaten dll.

Kekuatan yang menentang aksi-aksi PKI tsb. dituding oleh Bung Karno sebagai kaum kontrev (kontra revolusioner), komunisto fobi dan reaksioner, karena tidak berani melaku-kan kompetisi revolusioner. Terhadap AD, oleh PKI diluncurkan tuduhan bahwa pimpinannya membentuk Dewan Jenderal yang mau mengkup Bung Karno.

Bung Karno secara sistematis dihasut bahwa para Jenderal tersebut. tidak dapat dipercaya maka adalah mendesak untuk dibentuk Angkatan ke V, dengan

mempersenjatai buruh dan tani. Hasil Hasutan tersebut membuat sikap Bung Karno mendua. RRC politis mendukung usul PKI tersebut dan bersedia untuk membantu persenjataanya. Sikap mendua Bung Karno, dimanfaatkan dengan pengiriman senjata secara diam-diam dari Beijing ke Jakarta, baik dengan pesawat-pesawat Hercules maupun dengan kapal laut, yang dibaurkan dengan pengiriman barang-barang untuk Asian Games.

Semua usaha ekstra PKI tersebut dilakukan karena partainya belum siap dan merasa dirinya berada dalam keadaan kritikal, sejak diketahui sakitnya Bung Karno yang serius. Menyangkut rencana PKI terhadap Yani, Bandrio terus mendukungnya sepanjang paralel dengan rencana dan keuntungannya sendiri, bahkan mengipas dan mendorongnya, agar PKI segera bertindak.

Didepan sidang para menteri bersama para panglima daerah dan para gubernur, (waktu itu unsur PKI sudah ada yang duduk dalam kabinet menjadi menteri) Jenderal A Yani secara terus terang atas nama para panglima daerah menyatakan, menolak dibentuknya angkatan ke lima usulan PKI dengan mempersenjatai buruh dan tani. Dengan menarik pelajaran dari pengalaman tahun 45-an, adanya Biro Perjuangan - TNI-Masyarakat, hanya menimbulkan konflik dan perpecahan yang memperlemah bahkan merusak kekuatan nasional. A Yani juga menyatakan ketidak senangannya PKI diberi posisi di dalam kabinet.

Aidit tokoh muda PKI yang misterius. Sejak 1948 (*affair Madiun*) tertawan di Solo, dapat lolos dari tahanan di Solo, terus meloloskan diri ke luar negeri, lewat Surabaya meskipun Surabaya dan sekitarnya diduduki oleh Inggris - Belanda. Aidit adalah sekelompok dengan Soemarsono (Ketua Pesindo yang melakukan proklamasi negara Sovyet dari Madiun atas suruhan Van der Plas, maka dapat lolos sewaktu tahun 1948 terus ke Australia dan selanjutnya menjadi warga negaranya). Demikian pula Syam Kamaruzzaman adalah sekelompok dengan mereka itu. Dari peristiwa ini sudah jelas, siapa-siapa mereka itu ialah agen-agen Sekutu-Belanda maupun komunis.

Tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Aksi Militer ke II dengan penyerbuan ke wilayah Republik Indonesia tiga bulan sebelumnya yaitu pada tanggal 18 September 1948, Van der Plas menyuruh PKI berontak di Madiun (dengan proklamasi negara sovyet tersebut), guna memperlemah Republik Indonesia. Namun TNI berhasil menumpas pemberontakan PKI, bahkan Mr. Amir Syarifudin anggauta jalur Van Mook (pernah jadi Perdana Menteri RI) tertawan didesa Klambu, Purwodadi Jawa Tengah, bersama-sama tokoh-tokoh PKI lainnya. Kecurangan Belanda dengan siasat adu domba dapat kita patahkan sebelum Belanda menyerbu wilayah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948 tersebut.

Setelah beberapa tahun di luar negeri, Aidit kemudian dapat diselundupkan kembali ke dalam negeri, berkat reka-daya Syam Kamaruszaman. Sejak datang kembali, karier politiknya dengan lancar dan cepat terus menanjak seperti diroketkan, hingga menjadi bos partai Sekjen PKI, Ketua Politbiro CC PKI (sebagaimana biasanya seseorang yang diorbitkan, selalu diatur kariernya).

Dengan melalui Van der Plas connection, pertama terlihat jalur lewat DR. Bandrio. Dia yang sangat berambisi untuk menggantikan kedudukan Presiden Soekarno (didukung oleh induk jaringannya), tetapi terhalang oleh Yani dan Nasution. (Dewan Revolusi yang dia sponsori mendapat dukungan hanya dari Utomo Ramelan-yang

sejaringan dengan Bandrio dalam *Van der Plas Connection*).

Kedua adalah jalur PKI, atas rintisan Syam Kamaruszaman bersama DN Aidit dengan menciptakan kondisi-kondisi politik dengan strategi baru sehingga PKI yang belum siap terjebak didalamnya.

Ketiga adalah lewat Jenderal Soeharto yang melancarkan operasi intel (menghapus jejak dengan cara menyingkirkan atau menghabisi orang/ organisasi yang telah berhasil mencapai tujuan atau sasarannya, seperti G30S yang seminggu setelah terjadi, dibelakangnya diberi label PKI, meskipun Letkol Untung termasuk jalur PKI, tetapi juga juga termasuk jalur Jenderal Soeharto).

Letkol Untung yang telah berhasil menghabisi para Jenderal anggota Tim Pengusut MBAD kemudian juga dihabisi. Dan Perwira Tinggi yang telah melakukan mencuci *het vuile was* (melaksanakan pekerjaan kotor) masih beruntung hanya disingkirkan keluar negeri, mengingat dia adalah orang penting di Kostrad.

Van der Plas Connection adalah jaringan riil yang canggih, hanya anggota-anggota inti tertentu yang sadar akan keberadaannya sebagai anggota jaringan, lainnya adalah oknum-oknum oportunistik tanpa sadar, sekedar sebagai alat saja. Jelaslah yang "punya gawe" G30S adalah: PKI, Soeharto, Soebandrio dan CIA.^{997***}



⁹⁹⁷ Dikutip dari Mediakrasi.com.

BAB 5

SUARA SUNYI KORBAN TAK BERDOSA

Sejarah, hanyalah catatan atas aneka kejahatan dan kemalangan manusia. (Voltaire, 1694-1778)

SHADOW Play karya sutradara film Chris Hilton adalah gambaran catatan pilu sejarah Indonesia. Film tentang peristiwa G-30-S/PKI 1965 di Indonesia ini, membuka lagi genocida dahsyat sepanjang abad 20 lalu. Sebuah kurun waktu yang disebut sebagai zaman ekstrim. Menurut catatan sejarah, kebiadaban abad XX berawal pada tahun 1904 saat penguasa Jerman membantai 65.000 orang di Selatan Afrika. Berturut-turut jutaan manusia tewas di era kekuasaan Hitler dan Stalin. Dari Eropa kekejaman menyebar ke Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Kaum Budhist dibantai di Tibet, etnis Hutu oleh kaum Tutsi di Burundi, kaum Indian di Guatemala dan Paraguay, orang-orang Iho di Nigeria, Bengalis di Pakistan, Kamboja, Timor-Timur, anggota Baha'i di Iran, Kurdi di Irak, serta Muslim Bosnia. Indonesia ikut menyumbang kisah buruk itu melalui tragedi yang hingga kini masih menoreh tak kalah dengan Hitler dan Stalin, Tragedi 1965 memakan korban yang tidak sedikit. Sekedar meng-ingatkan laporan para peneliti, jumlah korban disebut-sebut mencapai 60.000 hingga 400.000 jiwa; 500.000 jiwa; 200.000 jiwa. Sementara di masyarakat bahkan ada yang menyebut sampai jutaan orang.

Sepanjang abad 20 itu angka pasti jumlah jiwa yang melayang tidak pernah diketahui. Eric Hobsbawm menyebut 187 juta jiwa. Tapi Hobsbawm menulis sebelum pembantaian di Bosnia. PBB juga tidak berani menyebut angka yang pasti. PBB mendefinisikan *genocide* sebagai upaya penghancuran dengan sengaja suatu kelompok ras, agama, suku atau suatu bangsa. Dengan begitu pembunuhan massal berbasis kelas, jender dan kelompok politik tidak dianggap sebagai *genocide*.⁹⁹⁸

Kesadaran sejarah menyangkut kebiadaban terhadap kemanusiaan, pertama-tama memang bukanlah soal statistik dan debat definisi. Ini adalah inspirasi agar kita tidak lagi membuat kesalahan yang serupa atas nama ideologi dan kekuasaan. Perang antara blok barat dan blok timur. Kete-gangan politik internasional berimplikasi pada wajah politik nasional. Diam-diam, di antara kekuatan politik dominan Indonesia saat itu; PKI

⁹⁹⁸ Fendry ponomban, Periset dari Off Stream Komunitas Media dan Dolumenter Jakarta.

—Partai komunis berbasis massa jutaan orang, dan tentara (Angkatan Darat) saling berebut pengaruh. tindak-tanduk kekuatan-kekuatan asing yang sibuk mencermati ketegangan-ketegangan ini. Peristiwa 1965 dalam konteks perseteruan dua negara adi daya AS dan Uni Soviet.

Antah-berantah politik bagi banyak orang mungkin menarik sebagai sebuah tontonan. Tetapi gairah politik, sering membuat lupa diri politikus. Trik, persekongkolan dengan ambisi kekuasaan, akhirnya bermuara pada kesengsaraan insan manusia dan penderitaan para korban. ‘kebenaran utuh obyektif’ menyangkut tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.⁹⁹⁹

Genocide Skala Nasional

Pemberontakan PKI yang didalangi oleh beberapa pihak pada tanggal 30 September di Jakarta bukan hanya memberi pengaruh pada anggota PKI di daerah itu saja, namun mempengaruhi seluruh negeri. Pada pemberontakan gerakan PKI tahun 1926 pemerintah kolonial memberangus gerakan ini dengan membuang dan membunuh pengikutnya. Kemu-dian pada pemberontakan PKI Madiun 1948 setelah dihancurkan juga disertai “pembersihan” yang diikuti dengan penum-pasan sisa-sisa PKI di basis-basisnya di Blitar Selatan. Terakhir, pada masa Orde Baru, gerakan kiri lagi-lagi dipersalahkan atas tragedi Gestapu 1965. Ratusan ribu pengikut PKI (kali ini bukan hanya di satu daerah, tapi di hampir seluruh daerah di nusantara) ditangkap, dibuang, bahkan dibunuh secara biadab. Tengku Darwis Djeunieb (Ketika itu panglima GAM di Batee Iliék) memberikan him-bauan yang intinya, “sejarah PKI di Aceh harus diluruskan” terutama soal pemberangusan tahun 1965, yang menurutnya cukup banyak rakyat Aceh yang tidak tahu apa-apa mengenai PKI menjadi korban pembunuhan dengan tuduhan sebagai anggota PKI dan simpatisannya. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.¹⁰⁰⁰

Hal ini adalah merupakan salah satu sudut pandang betapa masalah pemberangusan PKI di Aceh dan di Indonesia pada umumnya, telah menjadi sedemikian rupa, sehingga seperti lepas kendali dan jatuh korban begitu banyak, dan termasuk mereka korban yang sia-sia tanpa ikut terlibat PKI. Sebanyak 3000 rakyat Aceh jadi korban, baik karena keter-libatannya maupun karena dianggap terkait atau terlibat dengan PKI. Ada juga yang salah tangkap, khususnya para penduduk di daerah pedalaman Aceh yang umumnya petani miskin. Bukan tidak mungkin mereka tertuduh karena mene-rima cangkul dari BTI, yang diplesetkan menjadi Barisan tani Islam padahal sebenarnya adalah BTI (Barisan Tani Indonesia). Selain itu semua bangunan, rumah, gedung atau kantor yang ada hubungannya dengan PKI. Semua itu juga rata dengan tanah karena diamuk massa pada saat itu.

Sehari setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mengeluarkan surat perintah ber-nomor 1/3/1966 yang memuat tentang pembubaran serta pelarangan PKI dan organisasi *onderbouw*nya di Indonesia. Inilah *coup d’etat* sesungguhnya. Bersamaan ini, dimulai dra-ma malapetaka kemanusiaan di Indonesia.

Di daerah-daerah seluruh Indonesia, kampanye pengga-nyangan PKI diwujudkan

⁹⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰⁰ Sejarah G.30. S/PKI di Aceh perlu diluruskan, Serambi Indonesia, Banda Aceh, tanggal 4 Oktober 2000. Di dalamnya termuat komentar Tengku Darwis seperti disebutkan di atas.

dengan tindakan penculikan dan pembunuhan secara massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Semua anggota organisasi massa yang disinyalir memiliki hubungan dengan PKI pun tak luput mengalami hal serupa. Pembantaian dilakukan kadang-kadang oleh tentara, kadang-kadang oleh sipil, orang-orang Islam atau lainnya. Di sini, tentara merupakan pendukung utama. Masyarakat merupakan unsur korban propangadis Angkatan Darat yang secara nyata memiliki konflik dengan PKI. Di beberapa tempat memang terjadi konflik antara PKI dan kelompok lain di kalangan masyarakat. Di Klaten misalnya, aksi pembantaian massal menjadi ajang balas dendam musuh-musuh PKI yang berkali-kali melakukan aksi sepihak penyerobotan lahan-lahan milik tuan tanah di sana. Aksi sepihak ini berakibat bagi kemunculan benih-benih konflik di masyarakat. Pasca Gestapu 1965, PKI menjadi sasaran utama kebencian yang terpendam sekian lama.

Apa yang terjadi di Klaten tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Jombang dan Kediri. Namun kedua daerah ini memiliki sejarah konflik yang sangat kronis. Kaum komunis menuduh umat Islam telah mengobarkan “Jihad” untuk mem-bunuh orang komunis dan mempertahankan tanah miliknya atas nama Allah, sedangkan umat Muslim menuduh PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI) melakukan penghinaan terhadap agama Islam. Saling tuduh ini merupakan manifestasi konflik kepentingan diantara dua kelompok. Bagi PKI, tanah merupakan komoditi politik-ekonomi yang dapat dijadikan alasan untuk menyerang kaum Muslim sebagai penguasa tanah mayoritas. Sedangkan kaum Muslim menggunakan isu ideologis atheis terhadap PKI untuk menyerang balik. Dua hal ini memang berujung pada kepentingan ekonomis. Namun, dengan keyakinannya masing-masing, kedua kelompok ini berhasil membangun sebuah opini yang mengarahkan pengi-kutnya pada titik temu konflik berkepanjangan. Keduanya sama-sama ngotot.

Berbeda dengan di Jombang, Kediri dan Klaten, di Pur-wodadi, pembunuhan massal lebih tepat dikatakan sebagai bagian dari genosida yang dilakukan oleh militer terhadap massa PKI. Di daerah lain yang menjadi ladang pembantaian, tentara hanya bermain sebagai sponsor di belakang kelompok agama dan sipil. Sementara di Purwodadi, tentara memegang peranan aktif dalam pembunuhan massal. Purwodadi ialah sebuah kota kecil yang terletak 60 Km di sebelah Tenggara Semarang. Purwodadi ialah ibukota Kabupaten Grobogan. Daerah ini merupakan salah satu basis komunis terbesar di Jawa Tengah. Amir Syarifudin, tokoh komunis yang terlibat dalam *Madiun Affairs* tahun 1948, pun tertangkap di daerah ini.

Kasus Purwodadi sempat mencuat ketika pada tahun 1969, H.J.C Princen, seorang aktivis kemanusiaan, berkunjung ke Purwodadi. Dengan disertai Henk Kolb dari Harian *Haagsche Courant* dan *E. Van Caspel*¹⁰⁰¹, Princen meninjau secara langsung keabsahan berita pembunuhan massal yang didengarnya dari seorang pastor. Adalah Romo Wignyo-sumarto yang kali pertama menyampaikan adanya pembu-nuhan besar-besaran ini. Romo Sumarto melaporkan berita tersebut pada Princen setelah ia mendengarkan pengakuan dari seorang anggota Pertahanan Rakyat (Hanra) yang turut dalam pembunuhan massal. Digunakannya unsur Hanra da-lam pembunuhan massal sangat dimungkinkan karena lebih mudah diorganisir dan dikendalikan secara langsung oleh ten-tara setempat. tak terjadinya konflik *horizontal* di Purwodadi menyebabkan militer harus turun tangan langsung untuk melakukan pembunuhan massal. Di Jombang,

¹⁰⁰¹ *Sinar Harapan*, 3 Maret 1969.

Kediri dan Klaten, tentara hanya mensuplai senjata bagi kelompok-ke-lompok sipil. Selanjutnya mereka hanya memberikan dukung-an-dukungan baik dalam penangkapan maupun dalam hal penahanan Anggota dan Simpatisan PKI.

Pembunuhan dan penangkapan Anggota dan Simpatisan PKI di Purwodadi dibagi kedalam dua periode. Pertama, ialah penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan tahun 1965. pada peristiwa ini ukuran penangkapan ialah jelas, artinya militer hanya menangkap mereka yang memiliki indikasi anggota PKI aktif beserta anggota-anggota organisasi *onder-bouw* PKI. Penangkapan periode pertama lebih memper-lihatkan bagaimana militer melakukan strategi penghancuran secara sistemik terhadap PKI. Organisasi yang memiliki hu-bungan dengan PKI atau apapun itu sepanjang berbau komunis dapat dipastikan ditangkap. Ini memang cara yang paling efektif kendati jumlah korban tentu sangat banyak.

Dengan cara ini penguasa Orde Baru dapat meminimalisir ancaman komunisme. Perang terhadap penganut Marxisme ini memang lebih rumit dari sekedar anti-komunisme.¹⁰⁰² Dari sudut pandang manapun terlihat jelas jika Orde Baru beru-saha membangun sebuah konstruk kekuasaan tanpa aroma komunisme sedikitpun.

Periode kedua, penangkapan dan pembunuhan massal yang dilakukan pada tahun 1968. Pada periode ini, ukuran penangkapan sangat tidak jelas, serba semrawut dan serba asal-asalan. Hanya karena menjadi anggota Partai Nasional Indonesia – faksi Ali Sastroamidjojo- Surachman – militer sudah dapat menangkapnya. Penangkapan ini dikenal sebagai penangkapan terhadap Soekarno – Sentris atau dikenal sebagai SS.¹⁰⁰³

Operasi penangkapan pada tahun 1968 ini dilakukan di bawah Komandan Komando Distrik (Kodim) 0717 Purwodadi dengan dibantu Batalyon 404 dan 409. Operasi ini diberi nama Operasi Kikis. Melalui operasi inilah seluruh anasi-anasir kekuatan komunis dan Orde Lama (SS) ditangkap.

Tak jelas apa motivasi penangkapan terhadap orang-orang SS ini. Namun ini dapat dipahami sebagai usaha untuk mengikis kekuatan Orde Lama. Di pusat kekuasaan, Soe-harto sedang berusaha untuk mengukuhkan kekuasaannya. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 1971, kekuatan anti Orde Baru tentu menjadi penghalang bagi kekuasaannya.

Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang yang diang-gap komunis ini didesain sebagai massa mengambang atau *floating mass*. Mereka tak dibiarkan memasuki sebuah organisasi politik tertentu selama kurun waktu lima tahun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu),¹⁰⁰⁴ namun suara mereka dapat dipastikan disalurkan melalui Golongan Karya (Golkar). Konsep massa mengambang sendiri ialah sebuah konsep yang diajukan oleh Mayjen Widodo, Panglima Kodam VII/Dipone-goro Jawa Tengah. Lalu konsep ini

¹⁰⁰² Memorandum Intelejen CIA, “Indonesian Army Attitudes toward Communism” Directorate of Intelligence, *Office Current Intelligence*, 22 November 1965, case #88-119, Doc. 119, butir 1.

¹⁰⁰³ Wawancara dengan Bapak S., seorang Sekretaris Sarekat Buruh Kereta Api (SBKA) Stasiun Purwodadi. SBKA, menurut versi Orde Baru, adalah *onderbouw* PKI. Bapak S., mengatakan bahwa penangkapan dan pembunuhan yang paling besar justru terjadi pada tahun 1968. Tentara dapat menangkap orang-orang hanya karena menjadi anggota PNI Ali Sastroamidjojo – Surachman (PNI-ASU) atau motif dendam lainnya.

¹⁰⁰⁴ General Widodo maintained that party activity in the villages disrupted the hard work and unity necessary for development. Far better to let the population ‘float’ without party contact in the five year period during elections....diskusi lebih lanjut lihat Hamis McDonald dalam *Suharto’s Indonesia* (Blackburn, Victoria: Fontana Books, 1980), hal. 109.

dikembangkan oleh pemi-kir dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga *think-tank* Orde Baru yang berdiri pada tahun 1971 atas sponsor Ali Murtopo dan Soedjono Hoemar-dani, dua orang jenderal yang memiliki hubungan spesial dengan Soeharto. Tak berlebihan jika kasus di Purwodadi da-pat dikategorikan ke dalam tindakan Genosida. *Genocide* menurut Helen Fein adalah suatu strategi berupa pembu-nuhan, bukan semata-mata karena benci atau dendam, terhadap sekelompok orang yang bersifat ras, suku, dan poli-tik untuk meniadakan ancaman dari kelompok itu terhadap Keabsahan Kekuasaan para pembunuh.

Penangkapan dan pembunuhan massal pada tahun 1968 ini banyak menimbulkan korban. Banyak mereka yang tak mengetahui apapun tentang politik ditangkap bahkan dibu-nuh. Contohnya seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak SP. “Saya hanya pemain sandiwara Ketoprak pedesaan. Namun, saya ditangkap karena saya dianggap memiliki hubungan dengan Lekra. Oleh karena itu saya sempat mendekam di Penjara Nusa Kambangan selama 3 tahun. Di sebuah Kamp di Pati, saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya anggota PKI.”. Ini membuktikan ekses negatif pada sebuah operasi militer. Hal serupa pernah diungkapkan oleh Ali Murtopo, ia menga-takan jatuhnya korban pembunuhan massal di Purwodadi ia-lah sebuah konsekuensi dalam sebuah operasi militer. Ope-rasi militer merupakan salah satu usaha yang digunakan tentara Indonesia dalam mengontrol, memperkukuh dan memberikan sebuah ukuran kesetiaan bagi pemerintah pusat. Operasi ini kerap dilakukan dalam rangka menumpas gerakan perlawanan daerah terhadap pusat. Penguasa Pusat (Baca: Jakarta) memposisikan sebagai kosmis kekuasaan Raja sementara daerah ditempatkan sebagai Kawula. Hal ini merupakan hasil dari interdependensi antara kekayaan dan politik dalam masyarakat tradisional. Jelas sebuah operasi militer memiliki arti strategis dalam menjaga kekuasaan pusat atas kekayaan daerahnya.

Kebijakan operasi militer di Purwodadi tidak terlepas dari peranan komandan Kodim 0717 sendiri sebagai penguasa militer setempat. Letkol Tedjo Suwarno, Komandan Kodim dikenal sebagai orang yang keras dan berambisi. Atas perin-tahnyalah ratusan orang ditangkap selama tahun 1968. Pada waktu itu banyak perwira-perwira yang menumpuk kekayaan hasil dari uang sogok kerabat tahanan tahanan. Di waktu selanjutnya sudah menjadi kebiasaan jika seorang penguasa militer merupakan pelindung yang ampuh untuk apapun. Seorang pengusaha misalnya, ia dapat bebas berdagang di sebuah daerah dengan meminta *backing* pada penguasa militer setempat bukan isapan jempol jika penguasa militer di daerah memiliki pengaruh besar.

Figur kepemimpinan militer di daerah seperti halnya di Purwodadi memang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Di masa Orde Baru, sudah menjadi kebiasaan jika seorang Ko-mandan Kodim (Dandim) diangkat menjadi Bupati. Ini dilaku-kan atas pertimbangan kemandan dan realisasi dari Dwi Fung-si ABRI.

Fenomena tersebut dikenal sebagai konsep kekaryaan ABRI. Konsep ini diperuntukan bagi perwira militer yang karirnya mentok atau tak lagi memiliki kesempatan menapaki jenjang karir yang lebih tinggi. Para perwira ini biasanya diplot menjadi kepala daerah baik di tingkat I atau II. Orde Baru menciptakan kategori daerah-daerah tertentu bagi penem-patan perwira-perwira mentok ini.

Pada masa Orde Baru, Penguasa militer di daerah, dari Tk I hingga II atau bahkan tingkat Komando Rayon Militer (Koramil) berusaha dengan keras menciptakan suasana

aman dan stabil. Maka ukuran kestabilan keamanan pasca Gestapu 1965 ialah dengan mencegah timbulnya kembali kekuatan komunisme di Indonesia.

Ada kesan dengan menahan sebanyak-banyaknya massa PKI merupakan prestasi tersendiri. Dengan cara ini kondisi sosial-politik setempat dinyatakan stabil dan terkendali. Pemerintah Orde Baru menganggap komunisme ialah musuh yang paling utama dalam pembangunan. Selama hampir 32 tahun, bahaya laten komunis didengung-dengungkan sebagai sebuah momok yang menakutkan. Ini ditunjukkan dengan cara memutar film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G-30-S/PKI yang disutradarai oleh Arifin C. Noor setiap tahunnya.

Kekhawatiran yang teramat sangat pada komunis (*komunisto phobia*) memang terlihat begitu jelas inheren pada masa Orde Baru. tak hanya itu, pemerintah Orde Baru tak segan-segan melemparkan stigma PKI pada organisasi-organisasi yang berlawanan dengan kebijakannya. Kasus 27 Juli 1996 memperlihatkan secara jelas usaha Orde Baru dalam membangkitkan ketakutan masyarakat akan komunisme.

Penahanan ribuan anggota dan simpatisan PKI selama kurun waktu 1965 – 1980-an (dalam beberapa kasus bahkan hingga masa reformasi tiba) juga bagian dari usaha Orde Baru mencegah penularan komunisme pada masyarakat. Tahanan politik ini dibuang di Pulau Buru, Nusa Kambangan dan penjara-penjara di tiap daerah. Tak ada itikad dari Orde Baru untuk melepaskannya. Segera setelah mendapatkan tekanan internasional, khususnya Amnesti Internasional, pemerintah Orde Baru melepaskan beberapa tahanan politik dengan klasifikasi A, B dan C. Pemerintah memiliki berbagai dalil dalam aksi penahanan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Pada tahun 1975, Pangkopkamtib Laksamana Sudomo mengatakan bahwa pelepasan tahanan politik di saat itu merupakan ancaman bagi kestabilan nasional.

Penahanan atas anggota dan simpatisan PKI tidak saja menyisakan trauma mendalam¹⁰⁰⁵ bagi mereka namun keluarga-nya juga harus menghadapi kenyataan hidup yang serba kekurangan. Di Purwodadi banyak keluarga yang hidup dalam kesederhanaan akibat penahanan dan pembunuhan terhadap anggota keluarganya yang dituduh anggota maupun simpatisan PKI. Bahkan di sebuah desa di Purwodadi, dikenal sebagai “kampung janda” karena suami-suami mereka dicituk oleh militer.

Hingga kini tak dapat dipastikan secara pasti berapa jumlah korban yang meninggal dalam peristiwa pembunuhan massal di Purwodadi dalam kurun waktu tahun 1965-1968. H.J.C Princen mengatakan bahwa korban tewas ada sekitar 850 – 1000 orang. Sementara itu menurut perhitungan Mas-kun Iskandar, seorang wartawan harian *Indonesia Raya*, korban berkisar 6.000 jiwa. Berapapun jumlahnya, satu nyawa manusia yang hilang merupakan dosa yang tak terampuni. Maka penegakan hukum ialah jawabannya untuk menghindari perulangan peristiwa serupa. Penderitaan tidak berakhir begitu saja. Setelah para tahanan politik pulang dari pembuangan di pulau Buru, Nusa Kambangan atau penjara lainnya, aparat militer masih saja melakukan pengawasan pada diri mereka dan keluarganya. Bapak Rk, seorang tahanan politik jebolan Pulau Buru menceritakan bagaimana dirinya diintimidasi oleh aparat setelah pulang dari Pulau Buru pada tahun 1979. “Sepulangnyanya dari Pulau Buru, saya membuka praktek sebagai mantri. Obat-obatan yang saya bawa dari Pulau Buru saya

¹⁰⁰⁵ Untuk lebih lengkap periksa Liem Soei Liong, *It's the Military, Stupid!* Dalam Freek Colombijn dan Thomas Lindblad (ed) et.al., *Roots of Violence In Indonesia* (Leiden: KITLV, 2002), hal. 199.

gunakan untuk mengobati masyarakat yang membutuhkan. Namun karena hal tersebut, Koramil mendatangi saya dan memanggil saya untuk diinterogasi. Pengawasan yang extra ketat ini memang diberlakukan bagi mantan tahanan politik. Salah satu cara untuk memantau gerak gerik mereka pemerintah Orde Baru menetapkan untuk memberi tanda khusus Ex Tapol (ET) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) para mantan tahanan politik. Tindakan lainnya, selama Orde Baru, keluarga mantan tahanan politik tidak diperkenankan memasuki dunia politik atau menjadi pegawai negeri. Untuk yang satu ini pemerintah menetapkan Penelitian Khusus (Litsus) kepada calon pegawai negeri. Seorang mantan tahanan politik pernah mengatakan sebuah lelucon bahwa label ET dalam KTP-nya bukan berarti Ex-Tapol tapi tidak lain adalah "elek terus"

Pemberitaan mengenai pembunuhan massal dalam pembersihan PKI dan antek-anteknya bukan hanya tersebar di Indonesia, namun juga tersiar ke manca Negara. "Time Magazine" pada tanggal 17 Desember 1965 melaporkan bahwa "Ribuan pengikut-pengikut PKI beserta keluarga mereka telah dibunuh secara massal. Setelah diinterogasi dan terbukti terlibat, bukan hanya TNI tapi juga rakyat mengeksekusi ribuan dari anggota PKI. Contohnya, dengan bersenjatakan parang, sekelompok muslim mendatangi rumah para anggota partai komunis, membunuh seluruh keluarga mereka kemudian menguburkannya dalam kuburan dan "The New York magazine" pada tanggal 8 Mei 1966 melaporkan bahwa ada suatu sekolah di sebuah desa dekat Yogyakarta dimana sang guru mengatakan bahwa anak didiknya dibawa oleh tentara. Keluarga anak itu dituduh terlibat PKI dan merupakan anggotanya. Kemudian tentara menembaki seluruh anggota keluarga tersebut. Baik sang ayah yang anggota PKI maupun sang istri dan anak mereka yang masih kecil. Sangat mengerikan.

Di Bali yang merupakan daerah tercepat dimana organisasi PKI berkembang pembunuhan massal dilakukan tanpa pandang bulu sehingga akhirnya Angkatan bersenjata mengambil langkah untuk mengendalikannya.

"The murder campaign became so brazen in parts of rural East Java that Moslem bands placed the heads of victims on poles and paraded them through villages. The killings have been on such a scale that the disposal of the corpses has created a serious sanitation problem in East Java and North-ern Sumatra where the humid air bears the reek of decaying flesh. Travellers from those areas tell of small rivers and streams that have been literally clogged with bodies. River transportation has at places been seriously impeded."

Berkenaan dengan aksi pembantaian terhadap mereka yang diindikasikan anggota dan simpatisan PKI, permasalahan yang muncul berada di seputar keakuratan jumlah korban pembantaian. Robert Cribb memperkirakan jumlah korban berkisar antara 78.000 jiwa hingga 2 juta jiwa. John Hughes, dalam bukunya "*Indonesian Upheaval*" (1967), memprediksikan antara 60.000 hingga 400.000 orang. Donald Hindley, dalam tulisannya, "*Political Power and the October 1965 Coup in Indonesia*" (1967), memperkirakan sekira setengah juta orang. Guy J. Pauker, dalam tulisannya, "*Toward A New Order in Indonesia*" (1967), memperkirakan sekira 200.000 orang, sedangkan Yahya Muhaimin, dalam bukunya, "*Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*" (1982), memprediksikan sekira 100.000 orang. Khusus untuk Jawa Barat, tanpa menyebut angka, Ulf Sundhaussen, dalam bukunya, "*The Road to Power: Indonesian*

Military Politics 1945-1967" (1982), mengatakan bahwa dari seluruh anggota komunis yang dibunuh di Jawa Barat, bisa jadi hampir seluruhnya dibantai di Subang.

Sebuah sumber dari CIA mengatakan bahwa "Dalam hal jumlah orang yang terbunuh dalam peristiwa pembunuhan massal anti-PKI di Indonesia, Indonesia menempati salah satu peringkat dalam pembunuhan terburuk sepanjang sejarah abad 21."

Kuburan Massal G-30-S/PKI

Dari polemik antara Menhankam/Pangab dengan tim Komnas HAM telah muncul ke permukaan masalah kuburan massal G-30-S/PKI. Padahal selama ini ditutup-tutupi oleh pejabat. Sampai-sampai dalam "buku putih" (G-30-S pembekuan PKI) yang diterbitkan tahun 1994 tidak disinggung sama sekali tentang adanya kuburan massal G-30-S/PKI. Dalam arti tertentu dimunculkannya masalah kuburan massal G-30-S/PKI oleh mantan Menhankam/Pangab Wiranto, banyak sedikitnya akan mendorong saksi sejarah yang menyaksikan pembantaian massa anggota dan simpatisan PKI di tahun 1965/1966 akan menuliskannya, baik melalui media massa atau lainnya.

Karena itu adalah sangat menarik cerita seram Pendeta Johannes Tua Boro S.Th tentang penjagalan manusia di NTT tahun 1965.¹⁰⁰⁶ Tampaknya massa anggota dan simpatisan PKI yang dibantai pada tahun 1965 itu, bukan saja di Aceh yang dilemparkan ke laut, tetapi di NTT pun ada yang demikian. Pendeta Johannes Tua Boro S.Th mengatakan dengan terungkapnya peristiwa berdarah/pembantaian di Aceh, Santa Cruz, Tanjung Priok, Lampung dll, maka perlu juga peristiwa berdarah secara massal, sejumlah kurang lebih 2-3 juta orang dalam Peristiwa G-30-S/PKI juga harus diungkapkan secara terbuka, sesuai tuntutan pelaksanaan reformasi secara transparan dan menyeluruh.

Kalau peristiwa berdarah di Aceh karena menuntut memisahkan diri dari wilayah RI, dan dianggap mengkhianati cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tetapi mengapa sehingga mereka dibunuh secara massal? Maka demi hukum dan HAM kasus itu diungkap ke permukaan. Mengapa pembunuhan massal G-30-S/PKI yang dituduh anti Pancasila dan UUD 1945 tidak dipermasalahkan atau ditutup-tutupi? Padahal belum tentu tuduhan itu benar berlaku atas mereka, karena saksi kunci Aidit dan Untung tidak diadili secara terbuka sebagaimana mestinya.

Padahal Pendeta Johannes anti-PKI, namun mendambakan keadilan hukum, perlindungan HAM bagi setiap orang, sesuai dasar Pancasila, keadilan sosial, keadilan hukum dan peri kemanusiaan yang adil dan beradab ditegakkan. Manusia membunuh sesama manusia yang tidak berdasarkan hukum, atau hanya didorong dendam kesumat karena kuasa adalah berlaku hukum rimba, seperti perilaku binatang di hutan tanpa hukum.

Perlu diketahui kata Pendeta Johannes bahwa pemerintah pusat untuk menindak mereka yang terlibat dalam Peristiwa G-30-S/PKI adalah Instruksi KOTI No 022/XII/65, bulan Desember 1965, yang isinya bahwa mereka yang terlibat ditentukan 3 klasifikasi, yaitu A, B dan C.

¹⁰⁰⁶ *Swadesi* (No 1545/th XXX/Agustus 1998)

Klasifikasi A dipidanakan, yaitu bagi mereka yang terlibat langsung seperti Untung beserta anggota pasukan Cakra-birawa dan lain-lain. Klasifikasi B adalah mereka yang mengetahui rencana gerakan, namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, dikenakan pemberhentian sementara dari tugas jabatannya (*diskorsing*). Sedang bagi mereka yang berklasifikasi C, hanya diindoktrinasi beberapa waktu (semacam pembinaan mental).

Dengan adanya Surat Perintah 11 Maret 1966, maka Soeharto telah bertindak menyimpang dari instruksi KOTI itu dan membabat secara membabi buta, baik dari klasifikasi A, B, dan C, termasuk orang yang tidak tahu menahu sama sekali. Yang sangat kasihan ialah bagi anggota biasa di desa-desa tanpa diproses secara hukum langsung ditangkap dan dijagal begitu saja. Bukan saja anggota dan simpatisan PKI yang dibabat, orang-orang yang dicurigai sebagai aktivis Bung Karno, orang-orang PNI dan Partindo yang kena pembabatan massal tanpa proses hukum. Di provinsi NTT saja terbabat massal pada waktu itu sejumlah kurang lebih 10-20 ribu orang.

Pelaksanaan Pembabatan Anggota PKI

Menurut Pendeta Johannes cara pelaksanaan pembabatan di NTT bervariasi. Ada yang dibuang hidup-hidup di tengah laut setelah lehernya digantungkan batu untuk mudah tenggelam, ada yang dipenggal batang lehernya, ada yang ditembak dengan senjata api, belum mati didorong masuk ke dalam lubang kubur, ada yang dipotong kemaluannya lalu disuruh memakannya.

Di kota Ende/Flores seorang aktivis PKI dibakar hidup-hidup. Rakyat kota Ende dikerahkan oleh Kodim untuk datang berduyun-duyun buat menonton drama maut yang mengerikan itu.

Di kabupaten Sikka/Flores Timur dalam satu daerah Kecamatan semua lelaki tua muda besar kecil semua dibabat rata, yang dibiarkan hidup wanita saja. Di kampung Mangulewa Dati II Ngada, lima orang pencuri kerbau dilibatkan lalu ditembak oleh tentara dan rakyat disuruh menyaksikan *live-show* itu.

Pelaksanaan teknis pengganyangan/pembabatan di NTT umumnya dan kota Kupang khususnya sebagai berikut: Asal ada laporan dari masyarakat dengan berbagai motif ke Kodim, malam-malam orang-orang yang dilaporkan itu dijemput tentara dibawa ke Kodim, rumah-rumah tahanan Pepelrada, Kantor Resor Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk ditahan, untuk diperiksa atau diinterogasi.

Setelah tiba saat pembabatan massal, mereka dikeluarkan dari sel-sel dan rumah tahanan menghadap ke kantor Kodim, di sana diatur secara berbaris, bergiliran mencap jari mereka dengan tinta stempel dengan ibu jari kanan di atas kertas putih bagian kanan bawah yang masih kosong.

Selanjutnya mereka yang sudah mencap jarinya pindah ke kamar lain untuk ditutup matanya dengan kain hitam segi tiga, kemudian dinaikkan ke atas truk-truk terbuka, disak-sikan oleh rakyat banyak, lalu truk-truk itu meluncur ke arah luar kota. Di atas truk tubuh mereka disilet oleh pengawal lalu luka-luka mereka ditetesi perasan air jeruk nipis, sehingga orang-orang tawanan yang sedang menuju lobang maut itu berteriak histeris kesakitan. Kertas yang sudah dicap itu ditulis pengakuan-pengakuan palsu.

Setelah rombongan tahanan itu tiba di pinggir lubang, mereka ditembak atau dipenggal batang lehernya, walaupun belum mati mereka diseret ke lubang kubur dan ditutup seadanya. Di Maumere, seperti diceritakan di atas, bau mayat melanda desa-desa dan kota, karena kepala yang dipenggal dikubur tidak dalam, sehingga dibawa anjing ke sana ke mari.

Di Tarus, sebuah desa terletak lebih kurang 10 km dari sebelah Timur kota Kupang, wanita-wanita yang dituduh Gerwani ditahan dalam satu ruangan, diperkosa oleh tentara seenaknya, lalu dinaikkan ke atas truk, dibawa untuk dijagal.

Salah satu desa di Dati II So'e Timur Tengah Selatan, ada seorang ibu dituduh Gerwani, dibawa ke pinggir lubang kubur. Sebelum ia dipenggal batang lehernya, ia sempat memeras air tetek di telapak tangannya untuk meminumkan bayinya yang baru berumur 3 bulan.

Dampak peristiwa gerakan 30 September yang menyebabkan pemberangusan massal atau *genocide* bukan saja mengakibatkan banyak nyawa melayang, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah dampaknya bagi yang hidup. Keluarga dari orang-orang yang tersangkut PKI ataupun orang-orang yang pada saat itu dianggap terlibat dengan PKI meski tidak tahu banyak tak urung mendapat getahnya. Diantaranya adalah para dosen UI yang diberhentikan untuk sementara karena terlibat dalam peristiwa GESTAPU, mereka menolak keputusan Rektor UI no. 040/SK/BR/65, tgl 23 Oktober 1965.¹⁰⁰⁷

Dr. Sumijarsi adalah dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang terlibat dalam petualangan kontra-revolusioner G-30-S. Berhubung dengan itu maka seluruh mahasiswa FK UI menuntut kepada Dekan agar menge-luarkan dr. Sumijarsi karena perbuatannya yang meng-khianati Negara Pancasila.¹⁰⁰⁸ Dalam rangka membersihkan Universitas Indonesia (UI) dari oknum-oknum yang baik secara langsung maupun tidak langsung tersangkut dalam apa yang menamakan diri "Gerakan 30 September". Rektor Universitas Indonesia memutuskan bahwa bagi para staf pengajar UI anggota HSI (Himpunan Sarjana Indonesia) telah dibebaskan untuk sementara dari jabatannya.¹⁰⁰⁹ Mereka berasal dari semua kegiatan politik atau yang mengarah kepada politik, bagi semua dosen, Asisten, Pimpinan, semua pegawai Tata usaha, Panitia-panitia, dan bagian-bagian Tata usaha yang menjadi anggota PKI dan semua organisasi yang berkaitan dengan Gestapu.¹⁰¹⁰

Rektor ITB Kol. Kuntoadji telah memutuskan membeku-kan PKI dan semua organisasi mantelnya yang ada diling-kungan ITB serta memecat sementara semua anggota-anggo-tanya yang berstatus sebagai mahasiswa, karyawan dosen non dosen dari kedudukannya dilingkungan ITB.¹⁰¹¹ Sejumlah 227 mahasiswa dari berbagai fakultas dalam lingkungan Unpad telah diberhentikan untuk sementara, terhitung mulai tanggal 1 Nopember yang lalu, dalam rangka pembersihan taraf pertama akibat petualangan politik "G-30-S". 25 Dosen/asis-ten Unpad dan 17 karyawan Unpad telah diberhentikan.¹⁰¹²

¹⁰⁰⁷ *Kompas*, 29 November 1965.

¹⁰⁰⁸ *Kompas*, 21 Oktober 1965.

¹⁰⁰⁹ *Kompas*, 4 November 1965

¹⁰¹⁰ *Kompas*, 8 November 1965.

¹⁰¹¹ *Kompas*, 8 November 1965.

¹⁰¹² *Kompas*, 26 November 1965.

Pada tanggal 20-1-1965, dihalaman depan Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada di Bulaksumur Yogyakarta telah dilangsungkan upacara penutupan Indoktrinasi khusus bagi para Dosen, Asisten, Pegawai dan Mahasiswa yang secara tidak langsung tersangkut dalam "G-30-S" dan selama ini dinonaktifkan.¹⁰¹³ Enam orang dosen dari universitas Gajah Mada, berdasarkan keputusan dari Dewan Penyantun, telah dipecat dan dicutikan. Nama-nama mereka itu pernah diajukan oleh KAMI Yogyakarta kepada Rektor dan Dewan Penyantun Gama, agar dipecat. Seorang dari 6 dosen itu, yakni Purbadi SH dari fakultas hukum.¹⁰¹⁴

PB. PGRI Kongres pimpinan Subiadinata Jusuf menje-laskan bahwa memang ada Guru yang terlibat didalam Peristiwa kontrarevolusioner apa yang disebut G-30-S. Juga diketahui adanya Guru yang terlibat dalam perbuatan keji di Lubang Buaya.¹⁰¹⁵ Setelah diselidiki ternyata mereka itu adalah aktivis.¹⁰¹⁶ Dari jumlah 120.000 orang guru Sekolah Dasar di daerah Jawa Tengah yang terlibat peristiwa kontrev Gestapu/PKI, setelah *discreen* dengan teliti ternyata 58.000 orang yang nyata-nyata terlibat Gestapu/PKI. Menurut Inspeksi PDK Jawa Tengah, Sumadi mereka yang positif terlibat Gestapu/PKI.¹⁰¹⁷ Karena itu tidak kurang dari 25.000 orang guru di Indonesia yang diberhentikan atau diamankan karena terlibat dalam petualangan Gestapu/PKI.¹⁰¹⁸

Di seluruh daerah dilakukan pembersihan guru, karena dikhawatirkan bahwa mereka akan doktrin PKI pada murid-muridnya. Bahkan buku "*civics*" karya Supardo Sh yang anggota PKI juga dilarang. Untuk mengisi kekosongan dan sambil menunggu terbitnya buku pegangan guru mengenai kewarga negaraan yang baru, Menteri PDK dalam surat keputusannya menetapkan untuk mengganti buku pegangan guru mengenai kewargaan negara "Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia" ("*Civics*") karangan Supardo S.H.¹⁰¹⁹

Sementara itu 221 guru dari 1400 orang tenaga pendidik telah dipecat dari seluruh daerah dikabupaten Sukohardjo, Surakarta yang meliputi 245 Sekolah Dasar negeri, subsidi dan swasta, berkenaan dengan terlibatnya dalam G-30-S. Untuk mengisi kekosongan tersebut. telah dapat dimasukkan tenaga-tenaga pendidik baru.¹⁰²⁰ Dari jumlah 120.000 orang guru Sekolah Dasar didaerah Jawa Tengah yang terlibat peristiwa kontrev Gestapu/PKI, setelah *discreen* dengan teliti ternyata 58.000 orang yang nyata-nyata terlibat Gestapu/PKI. Menurut Inspeksi PDK Jawa Tengah, Sumadi mereka yang positif terlibat Gestapu/PKI.¹⁰²¹

Permohonan beslit kenaikan golongan guru yang telah dikirimkan ke Departemen P dan K sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, ternyata banyak yang hilang terutama yang berasal dari daerah. Menanggapi berita semen-tara pers yang bersumber pada PAB mengenai "Permohonan Beslit Kenaikan Golongan Guru-guru Banyak yang Hilang" Departemen P dan K menjelaskan kemarin bahwa memang beberapa usul

¹⁰¹³ *Kompas*, 3 Februari 1966.

¹⁰¹⁴ *Kompas*, 9 Juni 1966.

¹⁰¹⁵ *Kompas*, 23 Oktober 1965.

¹⁰¹⁶ *Kompas*, 7 Oktober 1966.

¹⁰¹⁷ *Kompas*, 17 Desember 1966.

¹⁰¹⁸ *Kompas*, 20 Maret 1967.

¹⁰¹⁹ *Kompas*, 19 Februari 1966.

¹⁰²⁰ *Kompas*, 7 Oktober 1966.

¹⁰²¹ *Kompas*, 17 Desember 1966.

kenaikan tingkat para guru dan pegawai lenyap terutama yang diajukan sekitar tahun 1966.¹⁰²²

Operasi pembersihan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata bukan hanya terjadi di kota-kota atau desa-desa tetapi juga masuk ke dalam hutan atau bahkan luar negeri. Dibawah pimpinan Letnan Kardiat berhasil membersihkan pemusatan gerombolan PKI disekitar hutan-hutan Kombi (Tondano). 3 Orang anggota gerombolan PKI antaranya L. Watuseke bekas Kepala Penjara Tondano tewas dalam penyer-buan.¹⁰²³ Seekor beruk didaerah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Pariaman, membantu massa rakyat untuk mering-kus sisa gerombolan "Gestapu/PKI", yang melarikan diri ke hutan-hutan sejak gagalnya kudeta PKI. Massa rakyat melihat antek "Gestapu/PKI" itu memanjat pohon kelapa.¹⁰²⁴ Tiga gembong kontrev Gestapu/PKI masing-masing (ketua Gerwani Bengkulu Selatan), E. Ridwan (Sekretaris CR PKI Palak Bangkarun) dan Kamaluddin anggota BTI Bengkulu Selatan Sumsel yang sejak tgl. 13 Oktober 1965 melarikan diri masuk hutan, pada 3 Oktober telah ditangkap oleh Koramil Pagar Agung di Bengkulu.¹⁰²⁵ "Ngalah, ngalah, ngalah, ngantem" merupakan doktrin baru PKI yang berhasil diketahui, setelah disitanya beberapa dokumen PKI. "Ngalah" (mengalah) - bukan berarti kalah - dengan jalan "ngalah" (berpindah tempat), kalau perlu "ngalah" (masuk hutan) untuk kemudian menyusun kekuatan di hutan.¹⁰²⁶

Tujuh belas wartawan buronan bekas anggota Persatuan Wartawan Indonesia berkeliaran di luar negeri sejak kudeta yang gagal awal Oktober 1966, dikabarkan telah membuat pernyataan yang telah dimasukkan oleh seorang "penyumbang istimewa" ke dalam harian Belanda, *Algemeen Handelsblad*.¹⁰²⁷ Kemudian KBRI di Bukarest (Rumania) juga mencabut paspor 13 orang mahasiswa Indonesia yang memberikan bantuan kepada gerakan-gerakan G-30-S/PKI di Luar Negeri. Pencabutan paspor terhadap pembantu2 G-30-S/PKI juga dilakukan negara Eropa Timur lain seperti Sofia, Warsawa, Praha.¹⁰²⁸

Peninjauan Kembali Sejarah Kekejaman PKI

Penting untuk menyelidiki sejarah peristiwa tahun 1965. Sebuah bukul yang berisi sajak dari Magusig O. Bungai yang berjudul "Anak Naga dan Tahun-Tahun Pembunuhan". Yang isinya bahwa hutan pun bukan lagi di mana rahasia bisa berlindung, Magusig O. Bungai menulis tentang pembunuhan massal antas perintah Stalin.

"50 tahun berlalu 50 tahun hutan Katyn menutup rahasia 15.000 prajurit polan dimasakre di tengah rimba 50 tahun kemudian waktu memaksa kekuasaan terkuat membuka suara menurut kebenaran."

Menurut saya penting sekali bahwa Magusig mendorong anak-anak negerinya agar mencari kebenaran. Ahli sejarah Abdurahcman Suriomihardjo dalam "Editor" 2 Juni

¹⁰²² *Kompas*, 11 Agustus 1970.

¹⁰²³ *Kompas*, 19 Maret 1966.

¹⁰²⁴ *Kompas*, 12 April 1966

¹⁰²⁵ *Kompas*, 4 November 1966.

¹⁰²⁶ *Kompas*, 14 April 1967.

¹⁰²⁷ *Kompas*, 9 Maret 1966.

¹⁰²⁸ *Kompas*, 27 April 1967.

1990 menulis, bahwa "pembukaan dokumen yang semula rahasia itu sangat membantu rekonstruksi sejarah". Akan tetapi duduk perkara masakre di Indonesia 25 tahun yang lalu agak berlainan dari pembunuhan Katyn yang menimpa 15.000 orang perwira Polandia. Kelainannya ialah oleh karena masakre di Indonesia itu pada hakikatnya tidak ada rahasianya sama sekali. Pembunuhan massal di Indonesia atas tanggung jawab Jenderal Soeharto bukanlah suatu rahasia. Si penanggungjawab ini justru terus-menerus bangga akan perbuatannya. Terhadap masakre benar-besaran dalam tahun-tahun pembunuhan sesudah 1965, Soeharto tidak pernah memperlihatkan penyesalannya atas pelanggaran hak azasi manusia yang luar biasa itu. Sebaliknya, ia selalu memamerkan dengan bangga tindakannya yang durjana itu. Tentang ini telah terbukti sekali lagi baru-baru ini. Dengan adanya pengakuan pers Amerika Serikat, bahwa staf kedubes Amerika Serikat di Jakarta menyerahkan daftar nama-nama kader PKI dan ormas yang dekat dengannya kepada Angkatan Darat Indonesia agar mereka itu ditangkap dan dibunuh, tidak seorangpun juru bicara pemerintah Orde Baru yang memungkiri telah terjadinya pembantaian massal, ataupun mengucapkan penyesalan mereka terhadap peristiwa yang terjadi 25 tahun yang lalu itu. Mereka ini cukup berpuas diri dengan penegasan pengakuan: bahwa militer Indonesia sama sekali tidak perlu menerima daftar tersebut dari pihak asing, oleh karena mereka sendiri cukup mengetahui siapa-siapa kader-kader PKI!

Juga di dalam otobiografinya, Soeharto sama sekali tidak menunjukkan tanda, bahwa ia menyesali terhadap jatuhnya korban rakyat sebanyak setengah atau satu juta. Justru sebaliknya, terhadap prajurit-prajurit pembunuh pun ia tidak mencela perbuatan mereka. Misalnya dalam hal kolonel Jasir Hadibroto, dalam "Kompas Minggu", 5 Oktober 1980 ia menceritakan pengakuannya kepada Soeharto, yaitu bahwa ia telah membunuh ketua PKI DN Aidit tanpa keputusan pengadilan. Dengan jalan demikian Aidit tidak bisa membela diri di depan sidang pengadilan, dan karenanya pula penguasa dengan leluasa dapat menyiarkan 'pengakuan' Aidit yang palsu. Kolonel ini justru dihadiahi Soeharto dengan kedudukan sebagai gubernur Lampung. Dalam hal ini tentu saja Soeharto sendirilah yang bertanggungjawab. Karena pembunuhan itu hanya terjadi sesudah Jasir Hadibroto menerima perintah dari Soeharto yang, menurut Jasir, mengatakan: "Bereskan itu semua!".

Masih cukup banyak hal yang harus dibukakan di depan mata seluruh rakyat Indonesia. Sejarah peristiwa 1965 dan lanjutannya, seperti yang tertera didalam tulisan resmi para pendukung Orde Baru, seluruhnya harus ditinjau kembali dan dikoreksi. Misalnya tentang pembunuhan terhadap para anggota PKI atau BTI (Barisan Tani Indonesia) yang selalu dibenarkan dengan dalih, seakan-akan mereka dibunuh karena "terlibat dalam Gestapu/PKI 1965". Barangkali benar, ada beberapa kader PKI yang telah ikut memainkan peranan dalam peristiwa 1 Oktober 1965 itu. Tetapi bisakah ratusan ribu kaum tani di Jawa dituduh terlibat dalam peristiwa penyerangan terhadap 7 orang jenderal pada pagi-pagi buta 1 Oktober 1965 saat itu di Jakarta? Dari berita "The Washington Post" 21 Mei 1990 menjadi jelas, bahwa sejak semula Soeharto telah berketetapan hati untuk menghancurkan-leburkan PKI. Dalih umum yang dikemukakan oleh Mahmilub atau pengadilan semacamnya adalah bahwa semua anggota atau simpatisan PKI 'terlibat dalam peristiwa G-30-S-PKI'. Dalih demikian pulalah yang dipakai pemerintah untuk membenarkan pembuangan tanpa pemeriksaan pengadilan lebih dari 10.000 orang yang dipandang sebagai simpatisan gerakan kiri ke Pulau Buru,

yang pada umumnya selama 10 tahun lebih. Mereka itu dianggap sebagai 'terlibat secara tidak langsung dalam Gestapu/PKI'. Lalu, siapakah yang terlibat langsung? Yang betul-betul terlibat langsung adalah seorang yang paling memperoleh untung dari kejadian itu, tak lain tak bukan ialah Jenderal Soeharto sendiri.

Ada sebuah kewajiban lagi yang penting, yaitu meneliti kembali duduk perkara Gerwani di dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Dari semula penguasa menuduh gadis-gadis Gerwani di Lubang Buaya berbuat paling keji dan tak tahu malu. Melalui media pers bertahun-tahun disiarkan, seolah-olah mereka dihadirkan di sana oleh PKI untuk melakukan upacara 'harum bunga' sambil menari-nari lenso untuk mengantar jiwa jenderal-jenderal itu, melakukan perbuatan-perbuatan tak senonoh, dibagi-bagikan pisau silet, dan lantas ikut ambil bagian dalam perbuatan jahat serta menyiksa jenderal-jenderal itu sebelum mereka tewas. Sebagai akibat dari cerita-cerita demikian terbentuklah bayangan, seakan-akan Gerwani adalah perkumpulan perempuan lacur, jahat dan bengis yang harus dihinakan dan bahkan dibinasakan.

Cerita-cerita demikian sebenarnya tidak terbukti. Tidak pernah ada suatu proses, di mana dakwaan demikian bisa dibenarkan. Seorang saksi dalam sidang yang, menurut Sudisman 'terbuka tapi tertutup' dan 'serba umum tapi tidak umum', bernama Jamilah dan yang mereka gunakan sebagai dasar bangunan dongengan itu, adalah seorang perempuan bayaran belaka. Beberapa tahun yang lalu Profesor Benedict Anderson, di dalam majalan ilmiah "Indonesia", memuat keterangan resmi dari lima dokter yang memeriksa mayat-mayat para jenderal itu sesudah diangkat dari Lubang Buaya. Jauh sebelum itu, keterangan resmi para dokter ini pun telah diumumkan oleh Soekarno di depan sidang kabinet, sengaja untuk membantah dongengan yang beredar saat itu, yang antara lain mengatakan bahwa mata para jenderal itu telah dicungkil dan bahwa kemaluan mereka dipotong-potong sebelum ditembak mati. Keterangan dokter-dokter resmi itu ringkasnya mengatakan, bahwa tidak ada tanda penyiksaan pada korban, dan tidak sebijaksana matapun dicungkil sebelum mereka dibunuh.

Penting sekali membersihkan Gerwani dari tuduhan yang tidak adil itu. Terutama sangat perlu, oleh karena sebelum 1965 Gerwani sangat aktif dalam membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti diketahui, sejak Orde Baru berkuasa semua perjuangan untuk kepentingan perempuan melalui pergerakan yang bebas dan mandiri, dianggap oleh penguasa sebagai kegiatan yang harus diharamkan dengan mengingat kepada 'perbuatan Gerwani' dalam akhir tahun 1965 itu.

Ada satu tuduhan lagi yang harus dibantah. Dari sejak awal telah disiarkan cerita, bahwa seolah-olah di rumah-rumah orang PKI terdapat (kecuali cungkil mata dan kursi listrik) daftar nama-nama orang yang memusuhi komunisme, dan yang harus dibinasakan sesudah PKI beroleh kemenangan dengan gerakannya di akhir 1965 itu. Tidak selebar daftar seperti itu bisa dipertunjukkan di pengadilan manapun. Sekaranglah, sesudah adanya pengakuan pers Amerika Serikat itu, kita ketahui bahwa sesungguhnya daftar orang-orang yang harus dibinasakan itu memang ada. Tetapi, inilah bedanya, daftar yang ada justru bukan daftar bikinan komunis, melainkan daftar yang diberikan oleh Kedubes Amerika Serikat kepada Soeharto yang memuat ribuan nama komunis Indonesia yang harus dibunuh!¹⁰²⁹

Begitu beragamnya versi yang berbicara tentang dalang G-30-S serta jumlah korban

¹⁰²⁹ Prof. Dr. W.F. Wertheim, "Sejarah Tahun 1965 yang Tersembunyi", *Arah*, No.1/ tahun 1990.

pembantaian jelas menjadikan peristiwa G-30-S menjadi demikian menarik untuk dikaji kembali. Terbukanya akses untuk menggali sumber dari aktor-aktor sejarah yang selama ini menjadi "terpidana" hendaknya mampu disikapi secara arif sebagai peluang berharga untuk mengungkap peristiwa G-30-S secara transparan sehingga setiap pelaku sejarah dapat ditempatkan sesuai dengan peran sejarah yang dimainkannya. Sikap emosional dan membabi buta dalam upaya pengkajian atau penelusuran kembali peristiwa G-30-S bukan saja hanya akan menjadikan peristiwa tersebut tetap tidak jelas dan penuh rekayasa, tetapi juga akan membuat karya sejarah yang dilahirkan nanti tidak ada bedanya dengan karya sejarah yang dilahirkan pemerintah Orba, yakni sejarah yang sarat dengan kepentingan sesaat atau kepentingan subjektif para tokoh atau penguasa. Bila demikian, apa gunanya membaca dan mempelajari karya sejarah. Dalam kaitan itu pula, penggunaan istilah pelurusan sejarah hendaklah dihindari dan akan terasa lebih tepat bila yang digunakan adalah istilah penelusuran kembali peristiwa sejarah atau pengkajian kembali peristiwa sejarah.***



BAB 6

RESPON INTERNASIONAL DAN NAIKNYA SOEHARTO SEBAGAI PENGUASA ORDE BARU INDONESIA

Lahirnya Orde Baru dan

Strategi Pementapan Kehidupan Politik

ORDE Baru lahir dari suatu pertentangan dalam ruang lingkup nasional.¹⁰³⁰ Pertentangan ini bersifat pertentangan antara dua aspirasi yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia, yang masing-masing diejawantahkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, baik secara terorganisir maupun tidak. Pertentangan ini mencapai puncaknya pada tanggal 30 September 1965 pada saat gerakan komunis secara terorganisir melansir usaha-usaha untuk menggulingkan pemerintahan dan sekaligus merobohkan Negara Pancasila. Namun demikian sumber pertentangan itu telah ada sebelumnya dan terlihat dari dualisme bahkan pluralisme nasional di segala bidang kehidupan, ideologi, politik, sosial-budaya dan militer. Pertentangan nasional antara dua aspirasi ini diwakili oleh dua kelompok dalam masyarakat yang kemudian dikenal sebagai orde lama dan orde baru. Adapun kekuatan Orde Lama itu berpusat sekitar orang-orang yang berideologi komunistik dengan tulang punggung PKI beserta ormas-ormasnya, bersama dengan orang-orang yang mengukuhkan individu Presiden Sukarno dan konsep-konsep politik Nasakom, Nefo, Dekon, dan sebagainya. Dalam kelompok ini juga termasuk orang-orang oportunis yang hanya berpikiran untuk menggunakan kesempatan-kesempatan guna memperoleh secara politis ataupun ekonomis. Sebaliknya kekuatan-kekuatan Orde Baru adalah golongan-golongan serta perorangan yang anti-komunistik atau non-komunistik beserta organisasi-organisasinya, termasuk pula golongan-golongan ekstrim dan orang-orang yang anti konsepsi politik Bung Karno.

Dualisme yang ada itu berjalan terus hingga pada saat pengukuhan Jendral Soeharto menjadi Presiden RI dalam bulan Maret 1968. Tahap berakhirnya Dualisme ini merupakan bagian-bagian yang kritis bagi Orde Baru, sebab pada saat tersebut dihadapkan pada ujian mental dan fisik untuk dapat keluar sebagai pemenang dari konflik nasional yang sangat prinsipil dan esensial bagi bangsa dan negara. Apalagi bila diingat bahwa kekuatan administratif dan propaganda Orde Baru jauh lebih kecil dari pada yang dimiliki oleh Orde Lama. Priode itu prinsipil karena menyangkut hakikat dasar dan tujuan Negara Pancasila, dan esensial karena menentukan kelanjutan serta hari depan bangsa dan Negara, dan secara praktis hanya dengan mengakhiri dualisme itu bangsa dapat memantapkan kembali dan mengisi cita-cita perjuangannya. Strategi politik dalam prosesnya secara garis besar dapat dilihat dalam berbagai tahapannya masing-masing dengan tuntutan dan tantangannya sendiri, tetapi satu dan lainnya merupakan urutan berantai yang merupakan kosekwensi logis dari hasil dan usaha yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Tahap I, yaitu penghancuran PKI. Usaha ini berhasil berkat adanya persatuan rakyat serta kepeloporan ABRI bersama generasi muda. Tuntutan-tuntutan masyarakat diikuti oleh berbagai tindakan yang merupakan luapan tekanan hati rakyat secara spontan yang kemudian secara bertahap dapat ditertibkan dengan dibekuknya organisasi-organisasi PKI oleh Peleprada-peleprada dan akhirnya melalui Surat Perintah 11 Maret, pada tanggal 12 Maret 1966 secara formil PKI dibubarkan, Pembubaran ini mempunyai

¹⁰³⁰ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1974.

rationale strategis-nya, yakni untuk mematahkan paralatan strategi musuh, yang tidak hanya mempunyai arti dalam jangka pendek, tetapi dengan dilarangnya PKI mulai saat itu berarti untuk jangka panjang tidak lagi diberikan tempat kepadanya untuk mengambil bagian dalam mekanisme Politik Negara Pancasila.

Tahap II, yaitu konsolidasi pemerintahan dan pemurni-an Pancasila dan UUD '45. Sebagai konsekwensi pembubaran PKI, maka dimulailah konsolidasi pemerintah dengan penang-kapan 18 Menteri Kabinet Dwikora yang lebih disempurnakan.

Dalam sidang umum ke-IV MPRS, Letjen TNI Soeharto diangkat sebagai Pengemban Ketetapan No. IX/MPRS/1966 dan sekaligus ditugaskan untuk membentuk Kabinet Ampera dengan tugas pokok Dwi Dharma, yakni (a) menciptakan kestabilan ekonomi; dan dengan program Catur Karya, yakni (1) memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan, (2) melaksanakan pemilihan Umum (3) melaksanakan politik luar negeri yang bebas-aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan No. XII/ MPRS/1966, dan (4) melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifes-tasinya.

Respons Internasional

Pada awalnya dunia Barat tidak menganggap bahwa Indonesia dikuasai militer. Tetapi faktor militer di Indonesia mempunyai peranan penting untuk stabilisasi situasi setelah goncang oleh kup PKI. Kemudian muncul suara-suara yang menyatakan Indonesia dikuasai oleh kaum militer reaksioner kanan di luar negeri.¹⁰³¹ Awal Juli 1966 sejumlah besar wartawan dalam dan luar negeri yang mengira akan dapat memancing "berita besar" datang ke Istana Bogor. Pada saat itu mereka mengharapkan akan mendapat suatu pernyataan penting dari Presiden Pemimpin Besar Revolusi Soekarno tentang "Gerakan 30 September".¹⁰³²

Kemudian Presiden Soeharto yang saat itu masih men-jabat sebagai Pejabat Presiden mulai mengambil alih tugas-tugas Presiden Soekarno. Misalnya hal-hal yang menyangkut urusan hubungan diplomatik dengan negara-negara asing. Salah satunya adalah mengeluarkan Keputusan no. 158 th 1967 dan 160 th 1967 yang ditetapkan tgl 2 Oktober 1967, yang isinya memberhentikan dengan tidak hormat dua orang Duta Besar Republik Indonesia di luar negeri, karena indisipliner / terlibat G30S PKI. Mereka itu adalah Muhamad Ali Chanafiah dan Sukrisno.¹⁰³³ Sebelumnya pada 7 Oktober 1965, Direktorat Penerangan Departemen Luar Negeri R.I. juga menyatakan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan tetap melindungi keamanan dan keselamatan dari semua Perwakilan Negara-negara Asing beserta pejabat-pejabatnya. Pernyataan tersebut dikeluarkan sehubungan dengan terja-dinya demonstrasi-demonstrasi anti-komunis yang sedang marak khususnya di ibukota dimana terdapat banyak kedutaan negara sahabat..¹⁰³⁴

Reaksi RRC

¹⁰³¹ *Kompas*, 7 Juli 1966.

¹⁰³² *Kompas*, 7 Oktober 1965.

¹⁰³³ *Kompas*, 9 Oktober 1967.

¹⁰³⁴ *Kompas*, 5 Oktober 1967.

Sebulan sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 1965 delegasi PKI dibawah pimpinan Ketua CC PKI, D.N. Aidit tiba di Indonesia setelah sebelumnya delegasi tersebut mengadakan perundingan-perundingan dengan CC Partai Komunis Uni Sovyet dan CC Partai Komunis Tiongkok. Di luar negeri.¹⁰³⁵

Hal ini memunculkan adanya teori bahwa negara-negara komunis ikut merencanakan pemberontakan yang dilakukan PKI. Setelah itu, paska peristiwa G 30 S, harian "Angkatan Bersendjata" memuat sebuah berita yang secara panjang lebar menyatakan bahwa Mao Tse-tung secara langsung mendalangi kup gerakan 30 September atau 1 Oktober dinihari. Hal ini sesuai dengan politik keras RRC untuk menguasai dunia.¹⁰³⁶

Padahal pada saat itu terdapat suatu analisa tentang kegoncangan-kegoncangan hebat yang sedang terjadi di RRC. Disana telah terjadi pertarungan antara pimpinan komunis yang keras dari garis Mao dengan pimpinan komunis yang lunak dari garis Liu Shao-chi. Garis Mao didukung oleh tentara dibawah pimpinan Lin Piao.¹⁰³⁷

Setelah gerakan 30 September dapat dibasmi, yang disertai pemberangusan massal dan pembersihan oknum-oknum PKI. Etnis Cina yang ada di Indonesia terkena imbasnya. Selain kecurigaan pada etnis tersebut, juga terdapat pembatasan yang membatasi ruang gerak mereka. Di RRC sendiri terjadi kampanye anti Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Departemen Luar Negeri RI memberikan dua buah nota protes keada Kuasa Usaha RRC di Jakarta, Lu Tzu Po untuk disampaikan pada pemerintahnya. Dua buah nota protes tersebut berisi komplain akibat adanya kampanye anti Indonesia di RRC serta nota protes berhubung tindakan-tindakan yang tidak senonoh, melanggar prike-manusiaan¹⁰³⁸ Sementara itu paska Gerakan 30 September saat terjadi penumpasan sisa-sisa PKI, Radio Peking menyatakan bahwa Indonesia telah ditunggangi golongan kanan yang dalam hal ini adalah Amerika serikat dan Bloknnya.

Reaksi Kuba

Kuba dan RRC sebagai negara komunis memberikan reaksi negatif paska G 30 S PKI dan pemberantasannya. Kedua perwakilan negara tersebut menolak untuk mengibarkan bendera setengah tiang, disaat pemerintah/rakyat Indonesia sedang berkabung, dengan gugurnya tujuh pahlawan revolusi akibat peristiwa G-30-S/PKI.¹⁰³⁹ Hal ini dapat dimaklumi karena secara tidak langsung pemerintah Indonesia menentang doktrin negara mereka yaitu komunisme. Tapi kejadian itu cukup disesalkan mengingat sebagai perwakilan negara asing mereka seharusnya menghormati urusan bangsa dan negara yang mereka datangi. Mengingat reaksi kedua perwakilan negara tersebut, maka dapat diperkirakan reaksi yang jauh lebih keras pada Indonesia terjadi di negara mereka masing-masing.

¹⁰³⁵ *Kompas*, 10 Agustus 1965.

¹⁰³⁶ *Kompas*, 2 Mei 1966.

¹⁰³⁷ *Kompas*, 29 April 1967.

¹⁰³⁸ *Kompas*, 6 Mei 1967.

¹⁰³⁹ *Kompas*, 20 Oktober 1965.

Reaksi Soviet-Rusia

Beberapa bulan sebelum peristiwa G-30 S/PKI, D. Sytenko, duta besar URSS di Indonesia datang ke kantor CC PKI ditemui oleh Sudisman, anggota Politbiro CC PKI. Maksud kedatangan Sytenko untuk membicarakan undangan yang disampaikan oleh CC PKUS (partai komunis Uni Sovyet) kepada CC PKI.¹⁰⁴⁰

Ini juga menjadi indikasi adanya kerja sama antara PKI di Indonesia dengan PK Rusia. Peristiwa G 30 S PKI bisa jadi adalah hasil dari perencanaan yang didukung oleh negara-negara pemimpin Komunis dunia yaitu Uni Sovyet dan RRC. Selain kenyataan bahwa pengikut PKI di Indonesia cukup banyak, bahkan mencapai jutaan, ditambah dukungan Presiden Soekarno akan eksistensi partai ini dan juga keberhasilan PKI masuk empat besar partai pemenang dalam PEMILU 1955. Oleh karena itu RRC dan Uni Sovyet menganggap peluang bagi PKI cukup besar untuk menguasai Negara Indonesia melalui kup yang mereka rencanakan. Dan jika PKI berhasil menjadikan Indonesia menjadi negara komunis maka kekuatan blok timur akan bertambah. Hal ini dimaklumi karena pada masa perang dingin itu, blok barat dan blok timur saling bersaing untuk menanamkan pengaruhnya di seluruh dunia.

Meski demikian tidak menutup kemungkinan pula blok barat yang diwakili Amerika dengan CIA-nya bisa mencium adanya rencana pemberontakan tersebut dan ikut terlibat dalam "*conspiracy theory*" tanpa diketahui pihak lawan. Jadi bisa dibayangkan peristiwa G 30 S PKI adalah bagian dari skenario internasional yang bukan hanya merupakan "perang" antara ideologi komunis dan Pancasila, tetapi juga merupakan pertarungan antara blok timur dan blok barat.

Reaksi Pakistan

Pakistan sebagai negara Islam yang bersahabat dengan Indonesia menyambut positif keberhasilan Indonesia dalam memberantas komunisme yang dalam hal ini adalah PKI dan antek-anteknya. Selain itu Presiden Sukarno yang banyak diidolakan masyarakat Indonesia dan Pakistan mendapat perhatian yang cukup besar. Bahkan di Karachi saat itu diadakan suatu pertemuan oleh masyarakat Pakistan – Indonesia untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terhindarnya Presiden Soekarno dari marabahaya yang ditimbulkan oleh "gestapu". Salah satu yang hadir adalah Menteri Dalam Negeri dan Urusan Kehakiman Pakistan Achmad Akbar¹⁰⁴¹ turut berpartisipasi dalam acara itu dan menyatakan kegembiraannya.

Hal tersebut menggambarkan persahabatan yang erat antara rakyat Indonesia dan Pakistan. Duta besar RI untuk Pakistan saat itu, Mayor Jenderal Rukminto Hendraningrat dalam harian berbahasa Inggris "*Pakistan Times*" yang terbit di Lahore dan Rawalpindi menyatakan hal-hal yang mengenai gerakan kontrarevolusi 30 September. Jendral berbintang dua ini adalah salah seorang yang berhasil memupuk persahabatan militan antara rakyat Indonesia dan Pakistan.¹⁰⁴² Selain itu bukti betapa eratnyanya hubungan Indonesia-Pakistan dan betapa populernya tokoh ini di sana

¹⁰⁴⁰ *Kompas*, 6 Juli 1965.

¹⁰⁴¹ *Kompas*, 12 Oktober 1965.

¹⁰⁴² *Kompas*, 14 Oktober 1965.

ditunjukkan yaitu pada tanggal 19 Nopember 1965 di Multan (Pakistan Barat) diadakan "Hari Sukarno" untuk merayakan terhindarnya Presiden Sukarno dari malapetaka maut akibat timbulnya petualangan "Gestapu". Lembaga Persahabatan Pakistan - Indonesia di Multan mengatakan bahwa seluruh rakyat Pakistan akan merayakannya sebagai hari Soekarno.¹⁰⁴³

Reaksi AS

Potret peristiwa yang terjadi paska revolusi gerakan 30 September tidak hanya penegasan sikap anti-PKI. Seperti yang didoktrinkan Soekarno yang anti kapitalis, maka terjadi aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa maupun ormas-ormas. Diantaranya adalah aksi ribuan jemaah Nahdlatul Ulama dan ormas-ormasnya di jalan Suropati Jakarta yang bertujuan untuk menyampaikan orasi ganyang imperialis Inggris dan Amerika Serikat serta pembubaran PKI pada akhir Oktober 1965.¹⁰⁴⁴

Puncak aksi dan demonstrasi tersebut adalah aksi mahasiswa UI bersama rekan-rekan mereka dari KAMI dan KAPPI pada tanggal 12 Januari 1966 dan menyampaikan tiga tuntutan rakyat (TRITURA), yang isi salah satu diantaranya adalah pembubaran PKI.

Selain itu demonstrasi juga dilakukan di depan kedutaan RRC dan Amerika. Kedua negara tersebut dianggap terlibat dalam rekayasa peristiwa G 30 S PKI. Pemerintah menang-gapinya bahwa terlepas dari cara demonstrasi, aksi-aksi pa-triotik dan revolusioner para mahasiswa tersebut merupakan suatu manifestasi kesadaran berpolitik yang demokratis.¹⁰⁴⁵

Pengusaha Amerika yang telah lama menetap di Indonesia, William Palmer menyangkal mengetahui tentang apa yang disebut "Dokumen *Gilchrist*" seperti apa yang dikatakan Dr. Subandrio. Dokumen tersebut menurut Subandrio ditemukan di bungalow Palmer yang terletak di daerah perkebunan miliknya yang juga disangkal merupakan kepunyaannya di Puncak Jawa Barat.¹⁰⁴⁶ Dokumen ini dianggap berhubungan dengan rekayasa Amerika dan CIA dalam peristiwa G 30 S di Indonesia.

Meski begitu banyak terjadi aksi anti-Amerika di Indonesia saat itu, tapi ini tidak membuat Amerika memutuskan hubungannya dengan Indonesia. Hal ini disebabkan jika mereka meninggalkan Indonesia, maka akan lebih riskan lagi bagi Indonesia dalam menghadapi kekuatan PKI. Bekas Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Jones dalam *interview* di Washington menyatakan bahwa, pengurangan jumlah orang-orang Amerika yang menetap di Indonesia, berarti menolong kembali kaum komunis untuk berkuasa. Menurut Jones, kaum komunis Indonesia selalu berusaha memaksa dengan kekerasan agar bisa menguasai Indonesia.¹⁰⁴⁷

Paper Cornell yang mengulas mengenai peristiwa G 30 S PKI membuat heboh dikalangan resmi di Indonesia dan Amerika Serikat. Paper yang pernah diulas oleh Rosihan Anwar berasal dari Universitas Cornell itu mengajukan dalil bahwa PKI tidak

¹⁰⁴³ *Kompas*, 10 November 1965.

¹⁰⁴⁴ *Kompas*, 21 Oktober 1965.

¹⁰⁴⁵ *Kompas*, 10 Februari 1966.

¹⁰⁴⁶ *Kompas*, 6 Oktober 1966.

¹⁰⁴⁷ *Kompas*, 11 Oktober 1966.

tersangkut dalam Peristiwa G-30-S.¹⁰⁴⁸ Meski tidak semua asumsi di dalam paper ini benar, tapi hal tersebut menjadi sesuatu bahan yang dikaji dalam perkembangan penelusuran sejarah peristiwa G 30 S PKI di masa berikutnya.

Saat itu oleh beberapa mahaguru di Amerika Serikat bahkan sampai saat ini masih dinanti sebuah "Buku putih" dari Pemerintah Indonesia yang akan mengungkap mengenai kejadian-kejadian sebenarnya sekitar peristiwa Gestapu/-PKI.¹⁰⁴⁹ Meski begitu banyak aksi anti-Amerika tetapi pada tanggal 7 Januari 1967 ditanda tanganilah suatu perjanjian jaminan modal asing Amerika untuk Indonesia antara Indonesia dan Amerika Serikat di Jakarta. Menlu Adam Malik bertindak sebagai wakil Indonesia dan kuasa Usaha Amerika di Jakarta.¹⁰⁵⁰

Aksi anti- Amerika yang dipelopori Presiden Soekarno menyebabkan penghancuran produk-produk negara Imperial-isme termasuk diantaranya musik dan film barat, yang kebanyakan berasal dari Amerika dan Inggris. Lagu-lagu penyanyi barat yang populer di seluruh dunia juga dilarang diperdengarkan di Indonesia begitu pula penyanyi Indonesia dilarang untuk menyanyikan lagu barat. Pengganyangan terhadap film Amerika mencapai klimaksnya, ketika Pemerintah Indonesia melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia, dan Pemerintah Amerika menyokong politik Malaysia. Bukan hanya "*The Bird*" saja yang akhirnya diganyang, sampai AMPAI dengan Bill Palmernya kena ganyang.¹⁰⁵¹ Yang mengherankan, pada umumnya dapat dikatakan, bahwa "*image*" atau gambaran tentang Indonesia di Amerika Serikat adalah cukup baik. Bahkan dari percakapan dengan orang-orang yang bergerak dibidang mass-media, dikalangan Universitas dan lembaga-lembaga *research*, dikemukakan kekaguman mereka terhadap Indonesia.¹⁰⁵²

Naiknya Soeharto sebagai Penguasa Orde Baru.

Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri seperti yang dilakukan di dalam negeri segera membersihkan diri dari unsur serta oknum-oknum "gestapu". Di Indonesia telah tercapai suatu kebulatan tekad diantara *civitas academica* untuk menggalang persatuan dengan tujuan untuk membasmi komunisme.¹⁰⁵³ Bersamaan dengan hal tersebut, mahasiswa mulai bersimpati pada ABRI/AD Khususnya yang berjasa menumpas gerakan 30 September. Selama ini ABRI selalu dijadikan sasaran fitnah baik oleh nekolim (Barat dan Timur) luar negeri, maupun kaum kontra revolusioner dan plin-plan dalam negeri, yang tujuannya tidak lain untuk memisahkan ABRI dari Rakyat dan Pemimpin Besar Revolusi yaitu Soekarno¹⁰⁵⁴.

Pada tanggal 14 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengumumkan untuk mengangkat Mayjen Soeharto sebagai Men/pangad. Setelah menjabat Men/pangad Soeharto menge-luarkan instruksi untuk memencilkan terus anggota orga-nisasi GESTAPU dan didukung oleh instruksi Menteri PTIP untuk membersihkan Perguruan tinggi dari kaum Kontra revolusi pendukung Gestapu.¹⁰⁵⁵

¹⁰⁴⁸ *Kompas*, 17 Desember 1966.

¹⁰⁴⁹ *Kompas*, 15 Juni 1967

¹⁰⁵⁰ *Kompas*, 16 Januari 1967.

¹⁰⁵¹ *Kompas*, 14 Agustus 1967.

¹⁰⁵² *Kompas*, 6 September 1967..

¹⁰⁵³ *Kompas*, 29 Oktober 1965.

¹⁰⁵⁴ *Kompas*, 18 Februari 1966.

¹⁰⁵⁵ *Kompas*, 19 Oktober 1965.

Men/Pangad Mayjen. Soeharto menegaskan akan menghancurkan G30S secara simultan mengerahkan kekuatan fisik disertai dengan usaha-usaha mental dan spirituil. Hal ini disebabkan peristiwa kontrev "G-30-S" mencekam perasaan perikemanusiaan segenap bangsa Indo-nesia yang progresif-revolusioner dan merupakan peringatan yang harus dibayar sangat mahal. Meski demikian dapat diketahui dengan jelas siapa kawan siapa lawan yang dihadapi.¹⁰⁵⁶ Oleh karena itu tugas ABRI dengan bantuan rakyat yaitu menumpas "G 30 S" sampai ke-akar-akarnya. Tujuan daripada tugas itu yaitu mengamankan jalannya Revolusi diatas rel Pancasila.¹⁰⁵⁷ Bagi prajurit dikenakan tindakan tegas bagi yang bermuka dua yaitu menganut ideologi selain pancasila. Karena itu terus dilakukan pembersihan dan penertiban di tubuh ABRI khususnya AD. Pada waktu itu para pelaku G-30-S di Jawa Tengah seperti Usman - Suherman - Marjono yang disinyalir berada disekitar daerah Merapi terus dikejar bahkan beberapa waktu sebelumnya sudah nyaris ditangkap kesatuan ABRI, tetapi bisa lolos karena kabut.¹⁰⁵⁸ Sementara itu eks Kol. Suherman, eks Kol. Marjono dan eks Major Sukirno tertembak mati pada tanggal 14 Desember 1965. Ketiga anggota ABRI yang terlibat peristiwa kontra revolusi G30S itu berhasil ditembak oleh pasukan Angkatan darat yang mengejarnya.¹⁰⁵⁹ Kemudian Letjen Soeharto ditunjuk sebagai penyerah perkara oknum-oknum yang akan diajukan ke Mahmilub. Sidang-sidang Mahmilub tersebut tetap bersifat terbuka, tetapi diseleng-garakan dalam ruangan dengan undangan terbatas.¹⁰⁶⁰

Meski Peristiwa G 30 S membawa petaka bagi anak bangsa, tapi Men/Pangad/Kas Koti Mayjen Soeharto menyatakan bahwa disamping akibat-akibat negatip yang ditimbulkan oleh "Gestapu" ada juga beberapa hal yang positif bagi revolusi, yakni antara lain menimbulkan kesempatan untuk membersihkan revolusi kaum gadungan, dari orang-orang yang tdiak bertanggung jawab.¹⁰⁶¹ Pemecahan dan pemberantasan gerakan kontra revolusioner 30 September yang direncanakan dan dilaksanakan oleh PKI harus menjamin bahwa peristiwa terkutuk seperti itu takkan terulang lagi dinegara kita untuk generasi-generasi yang akan datang.¹⁰⁶²

Berkat kepemimpinan Soeharto, kekuatan Gestapu tak berarti lagi. Bahkan situasi ditanah air pada umumnya mencapai kemajuan-kemajuan pesat.¹⁰⁶³ Pada tanggal 20 Januari 1966 ia menerima 12 anggota KAMI di DEPAD. Dalam kesempatan itu Soeharto sebagai Men/Pangad menyatakan bahwa ia sepenuhnya memahami tiga pokok tuntutan para mahasiswa KAMI tentang Pembubaran PKI, Penurunan Harga dan perombakan Kabinet Dwikora.¹⁰⁶⁴

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa Mayjen Soeharto telah berhasil mengemban tugasnya dan mendapat sambutan positif dari rakyat, juga mahasiswa. Sambutan ini berkem-bang menjadi rasa simpati pada kepemimpinannya. Lama-kelamaan banyak rakyat yang mendukungnya untuk menjadi pemimpin negara Indonesia menggantikan Soekarno yang popularitasnya turun di mata rakyat dan mahasiswa karena dianggap

¹⁰⁵⁶ *Kompas*, 12 November 1965.

¹⁰⁵⁷ *Kompas*, 23 November 1965.

¹⁰⁵⁸ *Kompas*, 4 Desember 1965.

¹⁰⁵⁹ *Kompas*, 16 Desember 1965.

¹⁰⁶⁰ *Kompas*, 12 Februari 1966.

¹⁰⁶¹ *Kompas*, 9 Desember 1965.

¹⁰⁶² *Kompas*, 3 Januari 1966.

¹⁰⁶³ *Kompas*, 13 Januari 1966.

¹⁰⁶⁴ *Kompas*, 22 Januari 1966.

sebagai pendukung PKI.

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa Jendral Suharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965 ditengah-tengah kerusuhan Indonesia dan menjadi Presiden Indonesia kedua pada tahun 1967. Kemudian pada masa jabatannya, Indonesia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, membatalkan hubungan diplomatik dengan Cina, dan mendirikan lagi ikatannya dengan organisasi internasional. Indonesia juga mengambil peran aktif dalam pembentukan ASEAN (1967) untuk mengembangkan kerja sama ekonomi dan budaya diantara negara-negara anti-komunis di daerah sekitarnya, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Suharto mendirikan regime "Pemerintahan Baru" (berlawanan dengan Pemerintahan Lama oleh Sukarno). Antara tahun 1965 dan 1975, Suharto berhasil menstabilkan ekonomi Indonesia dan mendukung serta mengikuti polis-polis daerah Barat. Setelah tahun 1975, regime Suharto menempatkan restriksi-restriksi tertentu terhadap penanaman dana dari luar negeri dan mendukung perkembangan yang didasarkan dari industri dalam negeri. Walaupun ada beberapa kemajuan yang nyata di bidang kesejahteraan masyarakat dalam masa regime beliau, banyak dari kemajuan ini menjadi terbalik pada waktu krisis ekonomi di Indonesia yang bermula pada tahun 1997. Regime Suharto sangat menyandarkan pada kekuasaan sentralisasi terhadap Presiden. Dalam proses ini, beliau memperkaya keluarga dan kolega-koleganya, menekan perbedaan politik, mengadakan represi terhadap orang Indonesia keturunan Cina, dan secara teratur menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan terhadap daerah-daerah di Indonesia yang tidak sepakat dengan beliau.

Teori Konspirasi

Seorang mantan pejabat CIA Ralph McGehee yang berdinasnya dari 1952 sampai 1977, menulis antara lain bahwa fokus utama perhatian mereka mendiskreditkan kelompok-kelompok lawan politik dengan dokumen-dokumen palsu seolah-olah berasal dari mereka. Di samping itu juga dilakukan menipulasi terhadap publikasi lawan tersebut. Hal-hal itu dilakukan secara kasar maupun halus. Pada awal tahun 1960-an Indonesia menjadi perhatian khusus CIA dengan operasi paling terpadu. Propaganda yang kasar menyatakan bahwa PKI alat Cina komunis. Untuk memperkuat pernyataan ini, maka telah ditemukan peti-peti berisi senjata berlabel bahan bangunan dari Cina untuk PKI.

Berita yang jauh lebih membakar menyatakan bahwa sebelum Oktober 1965 terdapat daftar rahasia para pemimpin sipil dan militer untuk dipenggal kepalanya. Sudah lama sebenarnya orang tidak dapat dibodohi dengan berita yang tidak masuk akal, penuh fitnah keji itu, akan tetapi tak satu pun yang mencoba membantahnya, karena histeris dan ketakutan yang dibangkitkan rejim militer AD Jendral Soeharto ketika itu luar biasa dahsyatnya. Kini terbukti bahwa rekayasa yang keji itu paling tidak sebagian merupakan hasik godakan laboratorium CIA dan dinas dinas rahasia Inggris M16. Jendral Suharto dan Jendral Nasution pun secara pribadi ikut memamah biaknya, pendeknya keduanya bagian dari orkestra fitnah dan rekayasa. Para pemimpin militer mulai melakukan kompanye pembasmian berdarah. Kelompok sipil seperti Soksi yang disponsori AD dan CIA serta organisasi mahasiswa yang menjadi sekutu mereka. *"Rekayasa media telah memainkan peran terpenting dalam membentuk pendapat umum dan memobilisasi kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan"*

pembunuhan besar-besaran" [kursif-hs]. Dalam telegram No. 868 kepada kemlu AS pada tanggal 5 Oktober 1965, sore hari setelah menghadiri pemakaman para jenderal di Kalibata, Dubes AS Marshall Green memaparkan tentang petunjuk dasar dalam membantu rejim militer di Indonesia agar benar-benar dijaga kerahasiaannya. Pentingnya disebarkan dongeng kesalahan dan pengkhianatan PKI serta kebiadabannya, sesuatu yang bersifat amat mendesak.

"4. Following guidelines may supply party of the answer to what our posture to be: (A) Avoid overt involvement as power struggle unfolds. (B) Convertly, how ever, indicate clearly to key people in army such as Nasution and Suharto our desire to be assistance where we can, wehile at same time conveying to them our assumption that we should avoid our appearance of involvement or interference in any way (C) Maintain and if possible extend our contact with military. (D) Avoid move that might br interpreted as note of non cinfidence in army (such as precipately moving out our dependents or cutting staff). (E) Spread the story of PKI's guilt, treachery and brutality (this priority effort is perhaps most needed immediate assistance we can give army if we can find to do it without identifying it as solely or largely US effor.

Seperti telah tersebut terlebih dahulu, pihak dinas rahasia Inggris saling isi mengisi dengan dinas rahasia AS. Kedubes Inggris di Jakarta menghubungi kantor besar dinas rahasia AS. Kedubes Inggris di Jakarta menghubungi kantor besar dinas mereka di Singapura tentang langkah-langkah yang perlu segera diambil menghadapi perkembangan situasi di Indo-nesia. Perang urat syaraf untuk mengrorong dan melemahkan PKI. Tema propaganda berupa kisah kebiadaban PKI dalam pembunuhan para jenderal dan puteri Jendral Nasution, bahwa PKI agen asing. Hal-hal itu harus dilaksanakan dengan halus, seolah sama sekali tidak melibatkan Inggris, bahan semacam itu sebaiknya dikirim dari Pakistan atau Filipina sebagai tercamtum dalam telegram rahasia kedubes Inggris No. 1835 6 Oktober 1965.

"... We certainly do not exclude any unattributable propaganda or psywar activies which would contribute to weakening the PKI permanently, Suit-able propaganda theme might be: PKI bruatality in murdering Generas and Nasution's daughter... PKI suverting Indonesia as agents of foreign Comunist.... But treatment will need to be subtle, e.g. (a) all activities should be strictly unattributable, (b) British participation or co-operation should be carefully concealed.... (d) material should preferably appear to originate from Pakistan or Philippines.

Pemerintahan Inggris menunjuk Norman Reddaway dalam menangani perang urat syaraf alias perang penyesatan ter-hadap lawan. Sebagai spesialis propaganda ia dipilih oleh Dubes Inggris Gilchirt sebagian orang terbalik untuk peker-jaan kotor itu. Selanjutnya sang spesialis memanfaatkan jalur koresponden BBC Asia Tenggara, Ronald Challis, Ia meminta sang korespoden untuk melakukan apa saja untuk merusak dan menghancurkan Sukarno, di samping PKI serta mendukung Jendral Suharto dengan menyiapkan dokumen-dokumen untuk memamfaatkan olehnya. Karena sang korespoden tak bisa masuk ke Indonesia sampai pertengahan 1966, maka ia menggunakan sumber-sumber M16 yang agen-agennya mondar-mandir keluar-masuk Indonesia. Berita-berita yang ditulisnya tak pernah menyinggung pembantaian ribuan orang di Indonesia, yang adalah perang saudara dan gerombolan komunis bersenjata. Berita itulah yang muncul dalam koran-koran Inggris *The Times, Daily Telegraph,*

Observer, dan *Daily Mail*. Demikian pengakuan Ronald Challis dalam bukunya *Shadow of a Revolution; Indonesia and the Generals yang terbit baru-baru ini (2001)*. Sayang pembukaan dokumen rahasia Inggris konon sampai 50 tahun. Inggris amat piawai dalam menggunakan momentum untuk mempro-vokasikan Indonesia seperti diuraikan Greg Paulgrain, jebakan konfrontasi terhadap Malaysia sampai menuju pecahnya G 30 S.¹⁰⁶⁵

“Seorang wanita anggota Gerwani yang telah mendapat latihan di Lubang Buaya, oleh massa rakyat telah ditangkap dalam suatu penggerebegan di rumahnya di Pematang Siantar.... Menurut Komandan CPM, G30S merencanakan akan memengal 15.000 kepala di Sumatra Utara jika gerakan mereka berhasil di Jakarta. Tetapi sebelum rencana mereka dapat dilaksanakan, dokumen-dokumen mengenai rencana tersebut telah diketemukan”.

Itulah nukilan Jendral Nasution setelah 5 Oktober 1965 yang bersama Jendral Suharto, CIA dan M16 berada dalam orkestra sumbang fitnah terhadap Gerwani, PKI dan gerakan kiri serta hasutan terhadap rakyat Indonesia, fitnah dan hasutan berdarah.

Daftar Maut CIA

Tentu saja pembunuhan dalam skala besar-besaran itu memiliki tujuannya. Setelah pembunuhan sejumlah Jendral yang didalangi oleh tangan-tangan jahat dengan kambing hitam Gerwani dan Pemuda Rakyat yang komunis, momentum pun tiba untuk menghancurkan PKI dan sekutunya dengan cara membasmi secara fisik seluruh pimpinan dan kadernya. Cara-cara yang digunakan merupakan demonstrasi peringatan yang tiada bandingnya kepada mereka yang hendak menentang elite penguasa Orde Baru. Selanjutnya diciptakan pemusutan sejarah secara dramatik dengan apa yang mereka sebut Orde Lama dengan menciptakan apa yang mereka sebut dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Pembunuhan massal yang kejam dalam jangka amat singkat menimbulkan trauma sosial secara luas, hal ini justru dijadikan alat penting dan pokok bagi hegemoni penguasa Orba.¹⁰⁶⁶ Penghancuran terhadap PKI dan seluruh gerakan kiri pertama-tama adalah membasmi secara fisik para anggota dan pendukungnya. Basmi sampai Suharto maupun Jendral Nasution serta para pengikutnya. Kekuasaan, dan segalanya ada di bawah laras senapan. Sebagaimana pengakuan mantan pejabat CIA Ralph McGehee, sudah sejak tahun 1963, CIA melatih aktivis buruh tertentu Indonesia (yang dimaksud antara lain Soksi bentukan militer) guna mengumpulkan nama-nama dan simpatisan penting SOBSI yang berafiliasi pada PKI. Hal yang sama dilakukan tenaga kepolisian terhadap PKI. Hal-hal itu dilakukan berdasarkan pengalaman Amerika di Vietnam Selatan. Daftar demikian disusun berlanjut sampai pada tahun 1965, saat dipergunakan secara praktis bagi keperluan

¹⁰⁶⁵Pramoedy Ananta Toer dalam pengantar buku tesis dokter dari Greg Poulgrain, pengajar di University of New England, Australia, *The Genesis of Malaysia Konfrontasi Brunai and Indonesia, 1945-1965*, disebutkan sebagai metamorfosis anti konfrontasi menjadi G30S. Kelihaiannya Inggris dikupas sangat menarik sejak provokasi serangan Inggris terhadap kota Surabaya pada 1945, Provokasi terhadap para pemuda di Sumatra Timur yang berhasil menglikuidasi para bangsawan setempat. Apa yang kemudian dinamai dengan “revolusi Sosial”, salah satu kornannya adalah penyair Amir Hamsah, bertujuan menghapus pengaruh Indonesia melalui para bangsawan tersebut terhadap koloni Inggris ketika itu, yakni Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara; www.agbardsley.h.11-5

¹⁰⁶⁶ Michael van Langenberg dkk, *Gestapu: Matinya Para Jenderal dan Peran CIA*, editor Sutoro, Cermin, Yogyakarta, 1999.hlm. 16,18.

sekutunya di Indonesia yang sejalan dengan kepentingan AS. Sebelum tahun 1965, pihak CIA di Jakarta mempunyai jalur akses ke markas G-2 AD dibawah Mayjen S Parman. Mantan pejabat AS yang diwawancarai Kathy Kadane menyebutkan bahwa catatan-catatan tentang PKI yang ada dimarkas tersebut jauh dari memadai. Mereka tidak mampu meng-indetifikasi ribuan orang yang menggerakkan partai komunis di tingkat daerah, atau yang melakukan kegiatan terselubung, termasuk penyandang dana.¹⁰⁶⁷ Dengan demikian daftar maut yang disusun oleh pihak CIA sungguh-sungguh bermanfaat bagi rezim militer. Daftar nama ini merupakan bahan intelijen strategi dalam pembasmian berdarah rubuan aktivis kiri, komunis dan non komunis.

Robert J Martens, seorang agen CIA dengan jabatan perwira politik pada kadubes Amerika Serikat telah berhasil menyusun daftar terpilih terdiri atas 5.000 orang kader PKI dari tingkat pusat sampai pendesaan beserta organisasi massanya dengan rincian jabatannya. Daftar itu di buat selama dua tahun (1963-1965) dengan bantuan para pegawai CIA sebagaimana yang dibenarkan oleh Joseph Lazarsky, Deputy kepala CIA di Jakarta. Bob Martens merupakan bawaan dari Edward Masters, yang jabatan resminya Kepala Bagian Politik. Kelompok inti di Kedubes Amerika di Jakarta terdiri dari Dubes Mashall Green, Deputy kepala misi Jack Lydman, Kepala CIA di Jakarta HB Tovar, Atase Pertahanan Willis Ethel dan Edward Masters. Seperti yang dikatakan Lazarsky, secara berkala daftar itu diberikan kepada Tirta Kencana (Kim) Adhyatman, Ajudan Adam Malik. Dari Adam Malik daftar tersebut disampaikan ke Markas Jendral Suharto. Tentu saja kegiatan ini telah direstui oleh Duta Besar AS di Indonesia Mashall Green. Bob Martens adalah seorang analis masalah-masalah gerakan komunis yang berpengalaman, mengetuai suatu kelompok yang terdiri dari Pejabat Depar-temen Luar Negeri dan CIA. Antara lain Berdasarkan daftar tersebut AD telah melakukan penangkapan-penangkapan dan pembunuhan.¹⁰⁶⁸ Berdasarkan keterangan Martens, Green kelak menyatakan bahwa informasi yang diberikan kepada AD sangat berharga terbanding apa yang mereka miliki.¹⁰⁶⁹

Selanjutnya menurut penuturan Joseph Lazarsky, Deputy CIA di Jakarta, telah diadakan kesepakatan dengan perwira Intelijen Kostrad Ali Murtopo, secara berkala yang bersangkutan melaporkan siapa-siapa dari daftar itu telah ditangkap dan siapa-siapa yang telah dibunuh, meski kemudian disangkal. Kontrad menjadi pusat pemantauan terhadap pihak militer dari seluruh penjurus tentang penangkapan dan pembunuhan terhadap kaum komunis dan golongan kiri lain.¹⁰⁷⁰ Dengan pembunuhan itu seperti disebut oleh Jendral Soeharto dan pembantunya mereka tidak usah lagi memberi makan. Kemudian dibuatlah oleh pihak CIA tanda-tanda dalam daftar tersebut.¹⁰⁷¹ Lazarsky melanjutkan kisahnya :

“Kami mempunyai catatan yang baik di Jakarta mengenai siapa saja yang telah dicituk.... Pusat-pusat penahanan didirikan untuk menampung mereka yang tidak

¹⁰⁶⁷ Kathy Kadane, Ex-agents Say CIA Compiled Death Lists for Indonesians, *San Fransisco Examiner*, 20 Mei 1990, termuat dalam situs internet pir.org/kadane.html. hlm. 6.

¹⁰⁶⁸ Kathy Kadane, Ex-agents Say CIA Compiled Death Lists for Indonesians, *San Fransisco Examiner*, 20 Mei 1990, termuat dalam situs internet pir.org/kadane.html. hlm. 6.

¹⁰⁶⁹ (Kathy Kadane, Ex-agents Say CIA Compiled Death Lists for Indonesians, *San Fransisco Examiner*, 20 Mei 1990, termuat dalam situs internet pir.org/kadane.html). hlm. 3.

¹⁰⁷⁰ Kathy Kadane, Ex-agents Say CIA Compiled Death Lists for Indonesians, *San Fransisco Examiner*, 20 Mei 1990, termuat dalam situs internet pir.org/kadane.html. hlm. 115.

¹⁰⁷¹ Kathy Kadane, Ex-agents Say CIA Compiled Death Lists for Indonesians, *San Fransisco Examiner*, 20 Mei 1990, termuat dalam situs internet pir.org/kadane.html. hlm. 117.

segera akan dibunuh. Mereka tidak mempunyai cukup regu tembak untuk menghabisi tahanan itu semua, dan beberapa orang sangat berharga untuk diinterogasi. Infra struktur PKI hampir dengan segera dapat dibasmi habis. Kami tahu apa saja yang mereka kerjakan. Kami tahu bahwa mereka akan mening-galkan hidup beberapa orang untuk bahan pengadilan sandiwara.... “¹⁰⁷²

“*We knew they would keep a few and save them for the kangaroo courts, but Suharto and his advisers said, if you keep them alive, you have to feed them*”.¹⁰⁷³

Tentu saja Jendral Suharto dan kawan-kawannya mem-bantah adanya daftar semacam itu, mereka menyatakan mempunyai cukup kemampuan untuk melakukan sendiri. Dimana sumber-sumber CIA tersebut menurut Edward Mas-ters hal merupakan suatu yang akan tetap dirahasiakan.¹⁰⁷⁴ Dalam wawancaranya pada tahun 1990, Bob Martens yang sedang menjabat konsultan di Kementerian Luar Negeri AS mengakui bahwa tangannya berlumuran darah, tatapi tidak semuanya buruk, katanya “*It really was a big help to the army. They Probably killed a lot of people, and I probably have a lot blood an my hands, but that’s not all bad...*”.¹⁰⁷⁵ Mantan Direktur CIA William Colby mengakui memerintahkan CIA untuk memusatkan perintah guna membuat daftar nama anggota PKI dan kelompok kiri lain. Perintah ini tahun 1963 dilaksanakan dengan melatih sejumlah kader serikat buruh [SOKSI yang dibentuk militer di bawah kolonel Suhardiman dan unsur-unsur PSI]. Para spion buruh ini merupakan peletak dasar pembunuhan massal pada 1965/1966.

Bagi mantan Dubes Marshall Green, Bob Martens dengan keahliannya merupakan gurui tentang masalah PKI.¹⁰⁷⁶ Ketika itu tentu saja Mashall Green sama sekali tidak pernah menyinggung soal-soal di atas, mereka harus hati-hati benar karena Sukarno akan segera Mencap CIA dan Green sebagai bandit yang hendak merongrongnya.

Ketika masalah daftar kematian CIA tersebut dimuat di *Washington Post* pada 21 Mei 1990 berdasarkan wawancara dengan Robert Martens, maka ia buru-buru menyangkal beberapa hal. Dikatakan olehnya bahwa penyampaian daftar itu semata-mata kehendak diri pribadinya, tidak ada hubungannya dengan kelompok Kadubes AS di Jakarta yang memang tidak ada. Bahwa daftar itu diambil dari penerbitan resmi PKI sendiri, bukan dari pengumpulan selama dua tahun dari kelompok di kedubes tersebut. Penyangkalan khas seorang agen rahasia yang “baik” guna menutupi dosa-dosanya maupun dosa orang lain.***



¹⁰⁷² Kathy Kadane, Ex-agents Say CIA Compiled Death Lists for Indonesians, *San Fransisco Examiner*, 20 Mei 1990, termuat dalam situs internet pir.org/kadane.html.hlm. 122.

¹⁰⁷³ Kathy Kadane, Ex-agents Say CIA Compiled Death Lists for Indonesians, *San Fransisco Examiner*, 20 Mei 1990, termuat dalam situs internet pir.org/kadane.html.hlm. 4.

¹⁰⁷⁴

¹⁰⁷⁵

¹⁰⁷⁶

BAB 7

PEMBERSIHAN “ANTEK-ANTEK” PKI DI ACEH

Reaksi Rakyat Aceh terhadap G-30-S/PKI

DENGAN adanya dualisme pergerakan yang terjadi di ibukota negara RI, telah menimbulkan kebingungan masyarakat yang semakin meluas, baik di sekitar ibukota maupun masyarakat di daerah-daerah. Di satu pihak, versi Letkol Untung telah menyampaikan pengumuman melalui Dekrit-I tanggal 1 Oktober 1965 tentang pembentukan dewan Revolusi Indonesia hingga ke desa-desa di daerah, sementara pihak lain di bawah pimpinan Pangkostrad Mayjen Soeharto juga telah menyampaikan pengumuman pada hari yang sama, yang isinya sangat berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh yang pertama. Tegasnya Pangkostrad selaku Pimpinan sementara ABRI me-ngecam “G-30-S” yang dikendalikan oleh Letkol Untung sebagai gerakan yang ingin mengambil alih Negara RI dengan cara-cara yang tidak benar dan memulainya dengan gerakan penculikan jendral-jendral TNI/AD.

Akibatnya, sejalan dengan keadaan posisi gerakan 30 Sep-tember yang semakin mendesak oleh tekanan kekuatan ga-bungan yang dimobilisir oleh Soeharto, maka dewan revolusi di daerah juga tidak sempat terbentuk sebagaimana yang diinginkan oleh pimpinan pusat Dewan Revolusi Indonesia. Bahkan jika ada daerah-daerah yang sudah terlanjur menyun komposisi calon pimpinan Dewan revolusi daerah, segera mendapatkan khabar aba-aba peringatan dari orang-orang yang setia dengan jaringan Pangkostrad Soeharto. Begitulah situasi yang sedang panik ketika itu, dan kendali pemerintahan Negara betul-betul dalam keadaan yang tidak menentu. Daerah-daerah masih kebingungan. Di Banda Aceh hanya sekali saja sempat beredar berita dan selebaran yang dila-kukan oleh PKI, terutama tentang pembentukan dewan jenderal dan isu akan dibakarnya Kampung Keudah Banda Aceh oleh PKI. Selebaran dan berita ini dimunculkan setelah Letnan Kolonel Untung mengumumkan peristiwa G-30-S dan pembentukan dewan revolusi Indonesia melalui siaran berita RRI pusat pada pukul 07.00 sampai pukul 14.00 siang hari. Dengan itu, sebagian masyarakat Aceh yang sempat mendengar RRI terlanjur mengira bahwa Presiden RI telah diselamatkan dari bahaya oleh Letkol Untung.¹⁰⁷⁷ Sebaliknya, sejak siang hari beredar desas-desus bahwa di Jakarta sedang terjadi perlawanan terhadap PKI. Perlawanan ini dikendalikan dalam skenario bersama yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto selaku Pangkostrad, dibantu oleh Pangdam Jaya Umar Wira-hadikusumah dan A.H Nasution yang didukung oleh RPKAD dan Yon 328 Kujang bersama kelompok angkatan bersenjata lain, kecuali kesatuan angkatan udara. Apa yang dirasakan dalam perubahan situasi di Jakarta sepertinya sudah dapat dirasakan oleh orang-orang PKI yang berada di Aceh.

Masing-masing mereka, satu persatu mencoba merubah perilaku, mendekati tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan meminta perlindungan diri pada Kantor Distrik Kepolisian setempat, pada Markas Kodim daerah dan Kodam Iskandar Muda.

¹⁰⁷⁷ Said Umar Al, Habsyi, “Hanya sekali PKI lancarkan Aksinya di Banda Aceh”, dalam harian *Waspada* Medan, tanggal 22 September 1986. Al Habsyi adalah Wakil komandan Kompi Legiun Veteran di Banda Aceh. Dialah yang menenangkan masyarakat kampung Keudah ketika PKI menghembus kabar bahwa kampung itu akan dibakar, dan mengkoordinir “jam malam 24 jam”.

Kesempatan baik ini tidak disia-siakan oleh Pangdam-I Iskandar Muda yang waktu itu dijabat oleh Brigjen Ishak Ju-arsa yang sangat terkenal anti komunis. Dialah yang memerintahkan agar mengumpulkan semua orang PKI di satu tempat.

Pada tanggal 3 Oktober 1965, front nasional daerah Aceh mengadakan rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nyak Adam Kamil. Dalam rapat itu diputuskan bahwa daerah Aceh menyatakan sikap “mengutuk gerakan yang mengambil alih kekuasaan Negara, atas nama dewan revolusi Indonesia.” Dan menurut Ishak Juarsa selaku Panglima Daerah dengan tegas menyampaikan bahwa masalah G-30-S ini “diserahkan saja kepada rakyat” apakah ia mau mempertahankan Pancasila atau memihak pada PKI.¹⁰⁷⁸

Sejak saat itu, massa rakyat di kota-kota seluruh Aceh mulai bergerak melakukan demonstrasi dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.....” mereka menuntut pembubaran PKI dan seluruh antek-anteknya. Setelah itu pada tanggal 16 Desember 1965 diadakan musyawarah alim ulama di Banda Aceh yang melahirkan fatwa bahwa komunisme dalah *kufur* dan *haram* hukumnya bagi kaum muslimin. Selanjutnya Pangdam-I Iskandar Muda memerintahkan satuan aparat di jajaran dan lingkungannya untuk segera membentuk *screening team* untuk meneliti dan memastikan seseorang terlibat atau tidak dalam PKI serta seluruh ormas-ormasnya. Ketua *screening team* dipegang oleh Dandim, Kapten M. Syah Asyek, dibantu oleh beberapa orang anggota.

Gambaran di atas menunjukkan hampir seluruh elemen sosial dan perangkat pimpinan daerah yang menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dan semakin terorganisir. Sumber kekuatan yang paling utama adalah fatwa ulama yang menetapkan haram hukumnya menganut ajaran komunis bagi kaum muslimin. Berikutnya sikap Panglima Kodam-I Iskandar Muda, Gubernur dan Kepala kepolisian yang tegas tanpa kompromi terhadap PKI, dukungan gerakan pemuda, pelajar dan kampus serta santri yang meminta agar PKI beserta *Oenderbow*-nya harus dibubarkan. Semua ini adalah kekuatan yang dahsyat, yang bukan hanya PKI yang patah nyalnya, tetapi juga siapapun tak sanggup melawan kekuatan ini. Inilah yang disebut kekuatan maha kuasanya kehendak rakyat yang di bawah kekuatan Maha Kuasa-nya Tuhan, sebagaimana yang disebut dalam tesis teori demokrasi. Seluruh sumber kekuatan yang disebutkan tadi, dan berbagai kekuatan lainnya ketika secara serentak diminta kembalikepada yang punya yaitu rakyat. Selanjutnya rakyat dengan kekuatan yang dahsyat itu bergerak melawan dan menghancurkan musuhnya yaitu PKI dan antek-anteknya.

Reaksi dan gerakan rakyat untuk mengejar dan membunuh PKI serta antek-anteknya di seluruh Aceh terus berjalan hingga tahun 1966. Tak terhitung dengan jumlah angka berapa jumlah anggota dan antek-antek PKI yang terbunuh diseluruh Aceh. Di Banda Aceh diketahui dengan pasti, bahwa pimpinan/ sekertaris dan wakil sekretaris Komite PKI Daerah Aceh, Muhammad Samidikin dan Thaib Adamy telah terbunuh. Thaib Adamy sebelum dipancung di pengadilan rakyat masih sempat meminta pada yang hadir agar menyampaikan salamnya pada Bung Karno dan sempat

¹⁰⁷⁸ Sikap panglima yang menyerahkan kepada rakyat, diterjemahkan oleh para tokoh dan pemimpin masyarakat, bahwa panglima betul-betul marah terhadap aksi-aksi PKI. Sehingga biarlah rakyat yang menghukumnya sampai batas mana rakyat merasa puas dan adil. Diantaranya sepertinya seperti yang didengar dan dijelaskan oleh Said Abubakar, *Wawancara, Op, Cit.*

pula meneriakkan “Hidup Bung karno”. Ini menunjukkan betapa teguhnya kader tersebut, Thaib Adamy menghadapi resiko perjuangan. Setelah dua tahun dipenjara karena pidatonya yang dianggap menghina dan menghasut, berikutnya ia menghadapi hukuman pancung di pengadilan rakyat.

Hal yang sama, berupa hukuman pancung atau pembunuhan juga di alami oleh Ketua Gerwani, Ketua Pemuda rakyat, anggota CGMI, Ketua Baperki dan antek-antek PKI yang lain. Mereka semua mati di tiang eksekusi yang dilakukan oleh para pemuda bersama rakyat yang tersulut emosi. Emosi ini bermula dari tingkah polah anggota PKI yang sering menyiksa dan menya-kiti hati rakyat, menyebar fitnah dan propaganda ketika PKI masih jaya dan berkuasa. Pimpinan Biro khusus PKI, bernama Nyak Amat juga diajukan ke pengadilan. Keluarga anak dan istri Samadikin kebetulan dikawal oleh Kosekhan (tim screening) keluar dari Aceh diantar sampai Tanjung Pura-Medan selamat dari pembunuhan. Kasan Siregar, meskipun mantan ketua PKI, tapi rajin sholat di Masjid Baiturrahman juga menemui ajal dieksekusi. Ada sebagian tokoh PKI yang sempat lari, yaitu Cut Husen, K. Ampu, dan Lim Ka Kee.

Bersamaan dengan gerakan eksekusi dan pembunuhan terhadap PKI dan antek-anteknya, di Banda Aceh dan Aceh besar muncul pula nama-nama eksekutor yang dianggap cukup premanisme seperti Rani plang dan Tuan Saleh. Kedua eksekutor handal ini akhirnya juga hilang tak tentu rimbanya. Khabarnya dihilangkan oleh OTK (orang tak dikenal) tanpa diketahui sebab musababnya.

Peristiwa eksekusi terhadap anggota PKI dan seluruh antek-anteknya seba-gaimana di Banda Aceh juga terjadi diberbagai daerah lain. Hal ini dipahami dengan adanya beberapa tempat pelaksanaan eksekusi di masing-masing daerah yang dimaksud. Di Banda Aceh tempat eksekusi adalah di Pantee Cermin Ulee lheu. Di Aceh besar tempat eksekusinya di Mon Benggali Indrapuri dan di kawasan Ie seuum Krueng Raya. Di Meulaboh tempat ekse-kusinya di Kuala Trang dan Rantau Kepala Gajah. DI aceh tengah, Kebayakan. Di Pidie terkenal dengan nama Guha Tujoh di kawasan Laweung. Dan sebagainya.

Berakhirnya Riwayat PKI di Aceh.

Perkembangan situasi politik tingkat nasional, juga ikut berpengaruh ke daerah-daerah seluruh tanah air, tidak ter-kecuali Aceh. Khususnya di Aceh ada dua kebijakan nasional yang paling berpengaruh, disamping kebijakan yang sangat besar artinya bagi rakyat Aceh dalam hal menyelamatkan bangsa dan tanah air dari komunisme yang di dalangi oleh PKI. Kebijakan nasional yang pertama adalah keberhasilan Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto dalam menguasai keadaan yang dibantu Pangdam Jaya Umar Wirahadikusumah dan Jendral A.H. NASution yang selamat dari penculikan Jenderal 30 Septem-ber 1965. Mereka bertiga dibantu pejabat lain berhasil memanfaatkan waktu pada hari 1 Oktober 1965 untuk merebut kembali RRI pusat sekaligus me-nyampaikan pengumuman Panglima Angkatan No. 002/Peng/pus/1965 untuk membantah pengumuman yang disampaikan oleh Letkol Untung pada pukul 07.00 tentang Dekrit-I Dewan Revolusi Indonesia, mengembalikan moral kesatuan TNI/Ad tentang kesetiaan RPKAD, mengatur rencana penye-rangan PAU Halim, dan meyakinkan Pangdam-Pangdam di seluruh wilayah Propinsi hingga kabupaten dan kota, termasuk di dalamnya wilayah Aceh.

Keberhasilan Pangkostrad Mayjen Soeharto, tercermin pada ketegaran Pangdam-I Iskandar Muda dalam memahami dan menguasai informasi dan mengendalikan situasi, yang pada saat itu banyak terjadi kepanikan.

Kebijakan yang kedua adalah Keputusan Menteri dalam negeri No. Des.2/8/45 tanggal 24 April 1966 tentang pemberhentian tidak hormat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD-GR atas nama Thaib Adamy dan Nyak Ismail karena kedua nama itu aktif dalam PKI. Kebijakan ini bukan hanya menambah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, tetapi juga merupakan penegasan yang cukup konkrit untuk menyatakan bahwa PKI merupakan partai terlarang dan sejalan pula dengan fatwa ulama Aceh yang menyatakan haram hukumnya bagi setiap pribadi kaum muslimin. Menyangkut dengan kebijakan daerah adalah seperti yang telah disebutkan diatas, terutama terkait dengan sikap gubernur, Pangdam-I Iskandar Muda, Kepala kepolisian dan fatwa ulama Aceh. Semua itu merupakan *factor-faktor legitimasi moral bagi masyarakat* untuk mengakhiri riwayat PKI di seluruh Aceh.

Namun masih ada catatan pinggir yang harus diingat, betapapun peristiwa penyingkiran PKI di Aceh telah diakhiri dengan tragis oleh kehendak rakyat, juga masih ada beberapa hal yang perlu dicari jalan untuk diluruskan kembali. Mungkin ada sisi pandang yang menggugah nurani dan akal sehat jika kita membaca kembali apa yang menjadi himbuan Tengku Darwis Djeunieb (Ketika itu panglima GAM di Batee Iliak) yang intinya, "sejarah PKI di Aceh harus diluruskan" terutama soal pemberangusan tahun 1965, yang menurutnya cukup banyak rakyat Aceh yang tdiak tahu apa-apa mengenai PKI menjadi korban pembunuhan dengan tuduhan sebagai anggota PKI dan simpatisannya. Sementara di pulau Jawa sebagai basis PKI hukumannya hanya sekedar ditahan kemudian dilepaskan kembali. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.¹⁰⁷⁹

Apa yang disinyalir oleh Tgk. Darwis Djeunieb, adalah merupaka salah satu sudut pandang betapa masalah pemberangusan PKI di Aceh telah menjadi sedemikian rupa, sehingga seperti lepas kendali dan jatuh korban begitu banyak, dan termasuk mereka korban yang sia-sia tanpa ikut terlibat PKI. Dari sejumlah sumber yang didengar dari keterangan Panglima penguasa militerwaktu itu, pernah menyebutkan 3000 rakyat Aceh yang jadi korban, baik karena keterlibatannya maupun karena dainggpa terkait atau terlibat dengan PKI. Ada juga yang salah tangkap, seperti yang dialami Ibrahim Kadir dari aceh tengah. Khususnya di aerah pedalaman Aceh yang umumnya petani miskin. Bukan tidak mungkin mereka tertuduh karena menerima cangkul dari BTI, yang dipeleaskan menjadi Barisan Tani Islam padahal sebenarnya adalah BTI (barisan Tani Indonesia), yang jelas-jelas *oenderbouw* PKI yang sangat aktif. Begitu juga yang terjadi dengan semua bangunan, rumah, gedung atau kantor yang ada hubungannya dengan PKI. Semua itu juga rata dengan tanah karena diamuk massa pada saat itu.

Pembersihan Aparat Pemerintah Sipil

Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi/Panglima operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Major Jendral TNI Suharto¹⁰⁸⁰ atas nama Presiden Panglima Tertinggi Sukarno dalam instruksinya telah memutuskan kepada Kompartimen-kompartimen,

¹⁰⁷⁹ "Sejarah G.30. S/PKI Di Aceh Perlu Diluruskan", *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, 4 Oktober 2000. Di dalamnya termuat komentar Tengku Darwis seperti disebutkan diatas.

¹⁰⁸⁰ *Kompas*, 17 November 1965.

Departemen, Badan/Lembaga Pemerintah untuk melaksanakan penertiban.

Oleh karena itu di seluruh sektor baik pemerintahan maupun rakyat sipil diadakan pembersihan total dan besar-besaran. Di antaranya pada aparat-aparat sipil pemerintahan. Pembersihan LKBN atau kantor berita nasional dianggap mutlak perlu karena tempat adalah adalah pusat pemberitaan nasional, dimana saat itu bahkan sampai saat ini, informasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Khususnya saat itu dimana situasi sangat genting.¹⁰⁸¹ Di Departemen-departemen lain juga mulai mengadakan pembersihan berkenaan dengan adanya gerakan kontra revolusi Gestapu. Di berbagai Departemen dan lembaga-lembaga pemerintahan diadakan pemeriksaan terhadap para pegawainya. Daftar-daftar absensi diperkeras dan diteliti.¹⁰⁸² Para pegawai yang sejak tanggal 1 Oktober 1965 tidak masuk kantor diharuskan memberi keterangan.

Selain itu sepasukan KKO serta dibantu oleh kesatuan-kesatuan dari Angkatan Bersenjata lainnya pada tanggal 11 Oktober 1965. juga mengadakan pembersihan terhadap oknum-oknum kontrev Gestapu yang bercokol di daerah pelabuhan Tanjung Priok.¹⁰⁸³ Hal ini dilakukan karena pelabuhan ini adalah akses bagi keluar masuknya orang dari dan keluar untuk pulau Jawa pada umumnya dan Jakarta pada khususnya.

Sementara itu dalam melaksanakan "pembersihan" tersebut Presiden Soekarno meminta agar dilakukan dengan tenang dan tertib. Ketenangan dan ketertiban yang dimaksud bukanlah ketenangan yang beku melainkan ketenangan yang dinamis. Ketenangan dan ketertiban yang bertujuan membantu Presiden Soekarno dan ABRI.¹⁰⁸⁴ Membantu Presiden Soekarno dengan memberikan fakta-fakta sebanyak mungkin tentang gerakan PKI tersebut.

Departemen Iuran Negara sejak tanggal 12 Oktober 1965 telah mengadakan pembersihan didalam tubuh Departemen Iuran Negara dari oknum-oknum yang terlibat atau diduga telah terlibat apa yang dinamakan "gerakan 30 September".¹⁰⁸⁵ Menteri Kehakiman, A. Astrawinata SH, mengadakan pembersihan di departemennya dengan memberhentikan untuk sementara para pegawai yang sejak tanggal 1 Oktober tidak masuk kerja tanpa alasan. Sedang bagi mereka yang terlibat telah diadakan tindakan yang tegas pula.

Pembersihan ini didukung oleh para menteri dan pejabat tinggi. Diantaranya yaitu Menko/Menteri Agama yang membenarkan dan menerima baik untuk dilaksanakannya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sebuah team khusus dalam rangka pembersihan Departemen Agama dari anasir/oknum yang diduga kuat mempunyai hubungan dengan.¹⁰⁸⁶ "Gerakan 30 September" dan atau turut terlibat dengan PKI. Sementara itu MDN Dr. Sumarno melaporkan kepada Presiden Sukarno pada tanggal 3 november 1965 situasi keamanan dari daerah-daerah yang laporannya telah masuk ketangan Menteri Dalam Negeri. Dikatakan oleh Dr. Sumarno, bahwa didaerah Boyolali dan Klaten kini sedang giat diadakan pembersihan-pembersihan terhadap gerombolan

¹⁰⁸¹ *Kompas*, 8 Oktober 1965.

¹⁰⁸² *Kompas*, 13 Oktober 1965.

¹⁰⁸³ *Kompas*, 15 Oktober 1965.

¹⁰⁸⁴ *Kompas*, 18 Oktober 1965.

¹⁰⁸⁵ *Kompas*, 20 Oktober 1965.

¹⁰⁸⁶ *Kompas*, 3 November 1965.

kontrarevolusi.¹⁰⁸⁷ Pegawai Imigrasi Tuntut pembersihan Drs. B. Suwarno atas nama seluruh pegawai kantor imigrasi daerah Jakarta Raya dan sekitarnya menolak untuk dipimpin oleh oknum-oknum yang terlibat dalam gerakan kontra revolusi "Gerakan 30 Sep-tember". Peperda Jaya dalam telah menetapkan Direktorat Imigrasi untuk dibersihkan.¹⁰⁸⁸

Pembersihan Aparat Militer

Berdasarkan instruksi Menko Hankam/Kasab, bahwa Hansip harus ikut aktif membantu ABRI dalam pelaksanaan operasi-operasi pembersihan terhadap gerombolan yang me-namakan dirinya "Gerakan 30 September" dalam rangka pemulihan keamanan adn ketertiban.¹⁰⁸⁹

Pembersihan Di Kodam V Djaya Pangdam V Jaya selaku Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya dila-kukan dengan cara memerintahkan kepada semua Koman-dan/Kepala/Perwira dalam lingkungan Kodam V Jaya untuk melakukan pembersihan di lingkungan instansinya masing-masing terhadap oknum-oknum tertentu baik militer maupun sipil serta pekerja¹⁰⁹⁰ Selain itu, sebagai kelanjutan tindakan-tindakan AURI dalam rangka pembersihan dan pengusutan terhadap anggota-anggota yang diduga terlibat dalam gerakan kontra revolusi dengan apa yang dinamakan "Gerakan 30 September" maka Komando Pengusutan AURI¹⁰⁹¹ melaporkan hasil-hasil pemeriksaannya kepada Men/Pangau a.i. Lak-samana

Menko Hankam/Kasab Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jen-deral Dr A.H. Nasution menginstruksikan kepada depar-temen-departemen dalam lingkungan Kompartimen Pertahan-an Keamanan/KASAB untuk melaksanakan pembersihan di dalam departemen masing-masing terhadap oknum-oknum dan organisasi PKI.¹⁰⁹²

Menko Kompartimen Maritim Mayjen KKO Ali Sadikin dengan cekatan berhasil mengamankan kompartimennya, se-hingga sejak terjadinya gerakan kontra revolusi G-30-S, tak sebuah kapalpun terhenti akibat sabotase. Sekalipun demi-kian Menko Ali Sadikin terus mengadakan pembersihan-pembersihan di lingkungan kompartimen Maritim.¹⁰⁹³ Men-ko/Hankam/KASAB Djenderal A.H. Nasution kemudian mengeluarkan instruksi untuk mencapai keserasian dan ke-seimbangan antara upaya dan tujuan serta hasil guna yang semaksimal mungkin dalam pelaksanaan penertiban dan pembersihan dalam tubuh Angkatan Bersenjata serta semua aparat dibidang keamanan.¹⁰⁹⁴

Gerakan Pembersihan PKI di Masyarakat

Gerakan pembersihan PKI dan antek-anteknya di seluruh daerah Indonesia meliputi

¹⁰⁸⁷ *Kompas*, 6 November 1965.

¹⁰⁸⁸ *Kompas*, 6 November 1965.

¹⁰⁸⁹ *Kompas*, 11 Oktober 1965.

¹⁰⁹⁰ *Kompas*, 16 Oktober 1965.

¹⁰⁹¹ *Kompas*, 26 Oktober 1965.

¹⁰⁹² *Kompas*, 4 November 1965.

¹⁰⁹³ *Kompas*, 4 November 1965.

¹⁰⁹⁴ *Kompas*, 16 November 1965

seluruh lapisan kehidupan dari pemerintahan, bidang pendidikan dan masyarakat. Di masyarakat, pembersihan ini masuk ke kampung-kampung dan desa-desa. Pengurus RK II Kelurahan Bukit Duri Jatinegara telah mengambil prakarsa membersihkan empat buah RT yang berada di wilayah RK II, dari oknum-oknum yang secara langsung dan terlibat dalam apa yang dinamakan "Gerakan 30 September".¹⁰⁹⁵ Pada tgl. 21 Oktober 1965 pemeriksaan dari rumah ke rumah. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pembersihan ibukota Jakarta-Raya dari oknum-oknum kontrev G-30-S.¹⁰⁹⁶

Dalam waktu bersamaan di daerah Cipanas dilakukan operasi oleh ABRI untuk menyapu bersih kontrev Gestapu. Kemudian di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1965 suatu rapat raksasa yang dikoordinir oleh Kesatuan Aksi Pengga-nyangan, ratusan ribu massa rakyat yang tergabung dalam 50 parpol/orpol/ormas dan golkar telah membanjiri Taman Untung Suropati¹⁰⁹⁷

Sejumlah anggota Front Nasional cabang Kotapraja Yogyakarta juga diberhentikan untuk sementara sesuai dengan surat keputusan Pangdam VII/Diponegoro selaku Peperlada Jateng dan surat keputusan Dan Rem 72/Dipone-goro sebagai pengawas dan pembantu Peperlada Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁰⁹⁸

Pembersihan dalam Lembaga-Lembaga Non-Negara

Pembersihan atau *screening* di berbagai lapisan dilakukan juga pada lembaga-lembaga di luar pemerintahan atau negara. Pengurus Daerah Front Nasional Jakarta Raya dalam sidangnya pada tanggal 23 Oktober 1965 memutuskan; memberhentikan sementara dari keanggotaan pengurus/pega-wai petugas PD Front Nasional Jakarta Raya, memberhentikan sementara organisasi politik dan organisasi-organisasi massa dari keanggotaan Front Nasional.¹⁰⁹⁹ Alat Negara dari kesatuan Ki-B 328 selama beberapa hari telah mengadakan pembersihan disekitar kelurahan Petojo Binatu. Sebagai hasil pembersihan ini telah ditangkap 19 orang yang dicurigai tersangkut dalam Gerakan Kontra Revolusi 30 September.

Pembersihan Diri Dari G30S MAGELANG PWI (persatuan Wartawan Indonesia) perwakilan Kedu/Malang dilakukan dengan memecat 2 anggotanya karena terlibat dalam "ges-tapu". PONTIANAK. Sedangkan Bambang Soemitro Wakil Kepala cabang kantor berita "Antara" Pontianak oleh Pengu-asa/Pimpinan "Antara" Pusat di Jakarta dinon-aktifkan dari tugas dan jabatannya.¹¹⁰⁰

Di lingkungan perguruan tinggi, Drs. A. Koesdarminta, Rektor Parahyangan menginstruksikan dalam rangka pember-sihan dari oknum2 "G-30-S", semua dosen dan mahasiswa diwajibkan menyatakan diri Orpol/Ormas apa yang pernah dimasukinya. Pernyataan itu harus disampaikan selambat-lambatnya pada tgl. 5 Nopember 1965 pada pimpinan Fakultas.¹¹⁰¹

¹⁰⁹⁵ *Kompas*, 19 Oktober 1965.

¹⁰⁹⁶ *Kompas*, 23 Oktober 1965.

¹⁰⁹⁷ *Kompas*, 27 Oktober 1965.

¹⁰⁹⁸ *Kompas*, 8 November 1965.

¹⁰⁹⁹ *Kompas*, 28 Oktober 1965.

¹¹⁰⁰ *Kompas*, 6 November 1965.

¹¹⁰¹ *Kompas*, 13 November 1965.

Reaksi etnis Cina

Etnis Cina sebagai salah satu etnis yang dicurigai terlibat dalam PKI karena negara RRC asal etnis tersebut adalah negara yang notabene komunis. Namun demikian etnis tersebut meyakinkan kepada masyarakat bahwa secara etnisitas mereka tidak terlibat. Dan jika ada yang terlibat maka hal itu hanyalah oknum dan tidak ada hubungannya dengan etnis itu. Dari Sukabumi pada tanggal 26 Oktober 1965 WNI keturunan Tionghoa telah menyatakan tekadnya mengutuk gerakan kontra-revolusi 30 September. Mereka juga mengatakan tetap setia kepada Pemerintah Republik Indonesia.¹¹⁰²

Tanggapan juga diberikan oleh Menlu RRC Chi Peng-fei yang memberikan jaminan pada Menlu Adam Malik, bahwa Peking tidak lagi mempunyai atau menjalankan biro khusus pembinaan bagi orang-orang Cina perantauan. Dan Pemerintah RRC menegaskan pada orang-orang Cina perantauan, bahwa mereka harus loyal pada negara dan pemerintah tempat mereka tinggal.¹¹⁰³

Menurut Menpen B.M Diah, W.N.I. Keturunan Asing, khususnya keturunan Cina pun adalah bagian dari pada tubuh bangsa Indonesia, oleh karena itu penyelesaian masalahnya dewasa ini tak boleh tegang dengan semangat bermusuhan tetapi harus dengan semangat persaudaraan memberi dan menerima serta didik mendidik melalui proses asimilasi.¹¹⁰⁴

Tahanan Pulau Buru

Pulau Buru dulu memang bukan sebuah pulau terkenal. Kecuali dalam pelajaran Ilmu Bumi ada sedikit keterangan bahwa pulau itu menghasilkan minyak kayu putih yang asli. Sampai pada tahun 1969. Empat tahun sesudah peristiwa G30S. Dan mulailah pulau yang terpencil itu mendapat perhatian.¹¹⁰⁵ Awal tahun 1972 pemerintah memasyarakatkan tapol Buru. Pemasyarakatan disini berarti memberi kesempatan untuk mendatangkan keluarga mereka.¹¹⁰⁶ dengan tiga syarat yaitu, mental Pancasila, berproduksi cukup dan kesediaan keluarga yang bersangkutan.

Bulan Juli ini, rombongan pertama para keluarga tahanan politik mulai dikirim ke Pulau Buru. Pemerintah, dengan kapal-kapal transport serta keuangan yang diperlukan.¹¹⁰⁷ Sekitar 700 isteri dan anak-anak para tahanan politik yang ditahan dipulau Buru dikirimkan ke pulau itu untuk tinggal disana. Mereka adalah keluarga sekitar 90 orang Tapol yang telah memenuhi syarat-syarat boleh menerima keluarga masing-masing.¹¹⁰⁸

Sebanyak 2500 tahanan G-30-S/PKI dari golongan B yang termasuk klasifikasi "berbahaya" kalau dikembalikan ketengah-tengah masyarakat diberangkatkan ke pulau Buru untuk mulai penghidupannya yang baru disana.¹¹⁰⁹ Jaksa Agung Mayjen Sugih

¹¹⁰² *Kompas*, 30 Oktober 1965.

¹¹⁰³ *Kompas*, 30 Maret 1973.

¹¹⁰⁴ *Kompas*, 19 Oktober 1966.

¹¹⁰⁵ *Kompas*, 16 Desember 1971.

¹¹⁰⁶ *Kompas*, 31 Agustus 1971.

¹¹⁰⁷ *Kompas*, 9 Mei 1972.

¹¹⁰⁸ *Kompas*, 22 Juni 1972.

¹¹⁰⁹ *Kompas*, 2 Agustus 1969.

Arto dalam rangka 'resettlement' ('pene-tapan kembali') tahanan G30S/PKI, mengatakan bahwa Pemerintah secara bergelombang telah selesai memindahkan sebanyak 2500 tahanan politik yang dikategorikan dalam golongan B kepulau Buru.¹¹¹⁰

Dalam laporannya mengenai hasil peninjauan Komisi II ke Pulau Buru akhir Nopember 1969, ketua Komisi II Imron Rosyidi menyatakan bahwa keadaan para tahanan politik disana adalah jauh lebih baik dari pada keadaan para trans-migran.¹¹¹¹ Para tahanan politik di pulau Buru yang berjumlah 2500 orang itu berhasil memasarkan hasil pertaniannya diluar pulau tempat tahanannya. Hasil-hasil yang dipasarkan di Ambon antara lain berupa kacang hijau, sayur mayur dan beberapa hasil pertanian lainnya.¹¹¹²

Maksud dari Penempatan tapol G30S/PKI golongan B dipulau Buru bukan bertujuan untuk memencilkan mereka dari masyarakat, tetapi guna memberi kesempatan baru bagi tapol untuk hidup bersama keluarga mereka nantinya. Karena jika kembali kelingkungan masyarakatnya semula, mereka hanya akan mempertaruhkan keselamatan mereka. Adapun tujuan akhir pemerintah dalam membina para tahanan politik dipulau Buru adalah menjadikan mereka Pancasila sejati. Kalau mereka sudah jadi Pancasila, maka dengan sendirinya selesailah tugas Bapreru dan para Tapol akan menjadi orang merdeka kembali seperti warganegara lainnya.¹¹¹³

Sembilan puluh sembilan persen tahanan politik yang tinggal di pulau Buru pada akhirnya memeluk agama dan mempelajarinya. Namun tidak diteliti secara seksama apakah Tapol tersebut melakukannya dengan kesadaran sendiri atau sebaliknya

Mengenai Tapol Buru membuat tidaklah beralasan kalau masih ada yang mengatakan, bahwa perlakuan terhadap ta-hanan politik saat itu tidak berkemanusiaan. Palang Merah Internasional ketika meninjau Pulau Buru menyatakan kepuasannya. Ini suatu bukti bahwa pemerintah memper-lakukan para tapol dengan baik. Sedangkan bagi yang lain mungkin Pulau Buru cuma berarti tempat dimana sekian ribu tapol sedang menunggu proses resosialisasi.^{1114***}



¹¹¹⁰ *Kompas*, 3 Oktober 1969.

¹¹¹¹ *Kompas*, 14 Februari 1970.

¹¹¹² *Kompas*, 22 Juli 1970.

¹¹¹³ *Kompas*, 7 Oktober 1972.

¹¹¹⁴ *Kompas*, 12 November 1973.

BAB 8

PKI SEBAGAI “BAHAYA LATEN”

KENDATIPUN anggota-anggota PKI dan ormas-ormasnya sudah dilarang, diburu, ditangkap dan banyak yang berakhir dengan kematian, namun baha-yanya dianggap masih saja mengintai Indonesia. Beberapa pejabat Orde Baru, khususnya pejabat di lembaga-lembaga sipil yang berasal dari militer, mem-buat terminologi-terminologi baru tentang “musuh”. Jaksa Agung Mayjen Sugih Arto, misalnya, menyebutkan bahwa Komunis merupakan bahaya laten sehingga untuk memberantasnya perlu diadakan Operasi Otak-Hati-Perut. Otak adalah lambang indoktrinasi Pancasila, Hati adalah masalah moralitas politik dan perut adalah lambang ekonomi. Meskipun PKI yang tadinya legal di bawah Orde Lama telah dibubarkan, mereka akan tetap bergerak di bawah tanah. Gerakan PKI bawah tanah ini sangat merisaukan para manajer politik Orde Baru ketika itu. Karena itu komunis merupakan bahaya yang *laten*,¹¹¹⁵ sebab dalam gerakannya tidaklah lepas dari gerakan komunis internasional. Mungkin saja bahwa para mantan anggota PKI atau ormas-ormas *onderbouw*-nya itu melarikan diri ke hutan-hutan karena ingin menghindari pembantaian. Sangat mungkin sekali bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi selain lari menghindar dan menyelamatkan diri saja, tanpa ada kekuatan un-tuk mengadakan serangan balas yang memang mereka tak pernah terlatih untuk itu. Namun keberadaan mereka kemudian menjadi preseden buruk bagi politik sehingga dirumuskanlah konsep “bahaya laten” ini. Jaksa Agung Mayjen Sugih Arto¹¹¹⁶ adalah tokoh Orde Baru pertama yang melontarkan istilah ini.

Tetap waspada dan sekaligus memberantas sisa-sisa ke-kuatan laten PKI, inilah salah satu dari tiga masalah besar nasional yang dihadapi oleh penguasa Orde Baru pada saat-saat pertama naiknya kalangan militer se-bagai pemegang kekuasaan politik Indonesia. Kemudian, sebagaimana disim-pulkan oleh Presiden Soeharto salam pidato kenegaraan di depan DPR-GR¹¹¹⁷ tanggal 16 Agustus 1967 bahwa betapa perlu-nya memelihara terus kewaspa-daan itu dibuktikan oleh masih banyaknya anggota PKI yang belum tertang-kap di Kalimantan Barat.¹¹¹⁸ Di Aceh sendiri, PKI tidak ada yang

¹¹¹⁵ *Latent*, (Bhs. Inggris) artinya tak terlihat.

¹¹¹⁶ *Kompas*, 1 Maret 1967.

¹¹¹⁷ DPR-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

¹¹¹⁸ Rosihan Anwar, “Peta Bumi Politik Sekarang”, *Kompas*, 27 Agustus 1968.

melarikan diri ke hutan atau ke mana pun. Hampir semua mereka habis diganyang sejak 1 Oktober 1965. Pembantaian terhadap mereka di Aceh adalah pembantaian pertama dari semua rentetan pembantaian PKI di seluruh Indonesia.

Regimentasi Politik Orde Baru Terhadap Paham-Paham Kiri

Politik regimentasi Orde Baru tentang PKI diarsiteki oleh Ali Murtopo. Ia menulis tentang studi-studi strategis dalam memperkuat Orde Baru.¹¹¹⁹ Tentang Golongan Ekstrim, Asisten Pribadi Presiden dan Ketua Urusan Perbekalan Pemilu, Brig-jen Ali Murtopo dalam *briefingnya* kepada pejabat-pejabat tingkat propinsi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, membagi golongan ekstrim dinegeri ini kedalam golongan yang ingin mengubah Pancasila dan UUD 45.¹¹²⁰ Menjadi ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan adalah kelompok agama yang menganggap ideologi Pancasila sebagai ancaman. Adapun ekstrim kiri jauh lebih canggih dalam menjalankan misi dan aksi politiknya, namun secara ideologis, ekstrim kiri berkeinginan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme atau sosialisme atau ideologi-ideologi kiri lainnya.

Regimentasi politik Orde Baru dalam menghadapi kelompok ekstrim kiri ini kemudian berubah pasca G-30-S/PKI. Ketika terdapat sedikitnya 8225 anggota sisa-sisa PKI yang masih “berkeliraran” di Kalimantan Barat dalam berbagai organisasi dan pergerakan. Jumlah sisa-sisa eks-PKI di daerah Kalimantan Barat tercatat sebanyak 8225 orang. Ber-hubung mereka belum tertangkap, maka kegiatannya masih merupakan bahaya *laten*.¹¹²¹ Kapendam XII/Tanjungpura Major Drs. Soewardi Poespojo menyebutkan bahwa sampai saat ini jumlah tapol PKI yang cukup besar ini menjadi “ancaman” baru bagi Negara Orde Baru yang belum lama tegak ini. Istilah “bahaya laten” kemudian menjadi strategi politik yang sangat penting dalam menghalau dan memberantas kecambah-kecambah komunisme yang senantiasa mengintai Indonesia.

Pengejaran terhadap orang-orang yang dicap atau dituduh PKI atau sekedar antek-anteknya atau anggota-anggota organisasi-organisasi *onderbouw*-nya menjadi fokus perhatian yang sangat luar-biasa dalam periode awal kekuasaan Orde Baru. Operasi Intel Kodam V ciduk aktivis-aktivis PKI di Jakarta. Ka Pendam V/Jaya Letkol. Wirjadi SH menegaskan bahwa mengingat Komunisme merupakan bahaya laten bagi terselenggaranya masyarakat Pancasila, maka operasi-operasi terhadap G30S/PKI oleh ABRI ditingkatkan terus dan mendapatkan *support* dari masyarakat.¹¹²² Masyarakat pun ketika itu telah kehilangan kesadaran humanismenya sehingga manusia hanya dikategorikan dua saja, baik dan tidak baik, musuh atau kawan, yang Pancasilais dan yang PKI. Periode pengajaran ini, meskipun sudah diambil alih sepenuhnya oleh jajaran-jajaran militer, masih membekaskan pada masyarakat akan *dikhotomi simplistis* ini. Pengejaran anggota-anggota sisa-sisa PKI ini menjadi kisah yang dinikmati masyarakat, bagaikan sebuah perang melawan kejahatan dan musuh yang sulit terkalahkan dan di akhir cerita biasanya selalu saja pihak militer yang keluar sebagai pemenangnya setelah berhasil menciduk aktivis-aktivis PKI di tempat-tempat persembunyiannya.

¹¹¹⁹ Lihat salah satunya, Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1969).

¹¹²⁰ *Kompas*, 6 Mei 1970.

¹¹²¹ *Kompas*, 6 Agustus 1970.

¹¹²² *Kompas*, 17 Februari 1968.

Soeharto, sebagai pengendali kekuasaan Orde Baru pun memulai episode bahaya laten PKI ini dalam setiap kesempatan yang ada. Dari Sidang Lengkap Kabinet Pembangunan yang dipimpinnya, Soeharto masih menyebutkan bahwa sisa-sisa G30S/PKI gunakan pertentangan antar kita sebagai peluang untuk mengadakan “*come back*”-nya. Dari sini ia mencoba merekatkan kembali persatuan Indonesia dalam format baru; sama-sama memburu dan mengejar sisa-sisa PKI sehingga seluruh rakyat akan bahu-membahu bersatu di bawah panji-panji Pancasila dan Orde Baru. Soeharto dalam Sidang Lengkap Kabinet Pembangunan telah memperingatkan agar kita tetap waspada terhadap sisa-sisa G-30-S/PKI, tindakan-tindakan subversi serta tindakan-tindakan ekstrim lainnya yang sampai sekarang masih laten.¹¹²³ Dari sini pulalah dipancarkan sebuah pilar politik bahwa siapa saja yang akan melwan Orde Baru adalah melawan Pancasila, adalah musuh negara. Dikatakan oleh Presiden bahwa sisa-sisa G-30-S/PKI akan menggunakan cara-cara pertentangan (kelas, kepentingan, ideologi, dan sebagainya) sebagai metode.

Bahaya laten PKI pada akhirnya telah juga menjadi konsep untuk menghancurkan kelompok-kelompok ideologis lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan politik Orde Baru. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa kekuatan-kekuatan politik agama (Islam) menjadi redup, juga ideologi-ideologi separatis di daerah-daerah menjadikan *signal* yang menakutkan jika berencana untuk bergerak melawan kedaulatan negara.

Bersih Lingkungan: Surat Bebas Organisasi Terlarang PKI

Presiden Soeharto menegaskan, bahaya laten bagi Indonesia saat ini bukan hanya berasal dari sisa-sisa G-30-S/PKI. Tapi juga dari kekuatan-kekuatan sosial-politik lainnya, yang dalam usaha mengembangkan dan mencapai keinginan-keinginannya, ternyata menempuh cara-cara inkonstitusional.¹¹²⁴

Setelah penumpasan PKI dan antek-anteknya paska gerakan 30 September 1965 tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah bersama aparat-aparatnya adalah “pembersihan”. Pembersihan orang-orang yang terlibat PKI ini dilakukan dengan cara terang-terangan maupun diam-diam. Istilah “pencidukan” menjadi populer sekaligus menakutkan bagi masyarakat Indonesia di seluruh lapisan.

Pada saat itu diterbitkan apa yang disebut dengan “surat bersih diri” atau “surat bebas G-30-S/ PKI” untuk menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki keterlibatan dengan PKI. Segelintir orang memanfaatkan hal tersebut untuk mencari keuntungan. Beberapa oknum bahkan membuat sendiri blanko surat bebas G-30-S untuk diperdagangkan. Sebagai contoh, pada bulan Mei 1974 ditemukan blanko-blanko Surat Bebas G30 S yang sudah dicap di rumah Freddy Supit, seorang penodong/pencuri mobil yang selama ini menjadi buronan polisi Jakarta yang tertangkap dipasar Mayestic, Kebayoran Baru.¹¹²⁵ Meski saat itu blanko tersebut sudah tak diperlukan lagi, tetapi hal ini membuktikan bahwa blanko tersebut pernah diproduksi secara *illegal* untuk memenuhi kebutuhan orang yang memerlukannya. Pada waktu itu surat bebas G-30-S ini wajib dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia yang tidak terlibat dalam Gerakan G-30-S PKI..

¹¹²³ *Kompas*, 13 Agustus 1968.

¹¹²⁴ *Kompas*, 20 Februari 1974.

¹¹²⁵ *Kompas*, 20 Mei 1969.

Beberapa tahun kemudian, kewajiban untuk memiliki surat bebas G-30-S/PKI telah dihapuskan. Misalnya di Jawa Timur Penghapusan ini dimulai sejak tanggal 22 Desember 1969. Penghapusan itu dilakukan oleh Pelaksana khusus Pangkoptip daerah Jawa Timur, Mayjen. M. Yasin dalam surat keputusannya no. 13/12/1969.¹¹²⁶

Sementara itu di Jakarta masih diberlakukan kepemilikan surat tersebut. Pendatang baru harus membawa surat bebas G-30-S/PKI. Surat keterangan bebas G-30-S/PKI saat itu diperlukan untuk masalah-masalah yang menyangkut kepen-dudukan di wilayah DKI Jakarta Raya. Setiap penda-tang/penduduk baru yang bermaksud menetap di Jakarta masih diwajibkan memiliki surat keterangan tersebut dari tempat asalnya.¹¹²⁷

Deputy KSAD yang baru, Mayjen M. Yasin, dalam suatu pertemuan dengan wartawan-wartawan di Surabaya mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak pemimpin Indonesia jang lemah namun ditutupi dengan utjapan "*hij is een goode vader*" (ia seorang bapak jang baik).¹¹²⁸ Ia mengatakan hal tesebut sehubungan tidak beraninya pemimpin-pemimpin Indonesia untuk meninjau kembali penting-tidaknya surat bersih diri dari Gerakan 30 September. Namun demikian dalam keputusan no. 020-KOPKAM-4-1970 KOPKAMTIB (Ko-mando Pemulihan Keamanan Ketertiban) Pusat dijelaskan mengenai Tatacara Pemberian Surat Keterangan Bebas Ges-tapu, penggunaannya dan jangka waktu berlakunya.¹¹²⁹

Setelah terbitnya keputusan tersebut, 1969 Surat kete-rangan "bersih diri" (tak terlibat G30S/PKI) yang sudah Diha-puskan di Jawa Timur Desember 1969 dinyatakan berlaku kembali. Dengan instruksinya no. Ins/01/Komda/70 tanggal 27 Juli 1970 pelaksana khusus Pangkoptip Jatim menu-gaskan Danrem-danrem 018 sampai dengan 084 membantu kepolisian¹¹³⁰ dalam rangka penerbitan surat bersih diri tersebut.

Dalam keputusan no 020 Kopkam-4-1970, Komando Pe-mulihan Keamanan Ketertiban Pusat memutuskan, bahwa su-rat bebas G-30-S dapat diperoleh di Kepolisian. Surat itu da-pat diperoleh dengan menunjukkan surat berkelakuan baik dari lurah setempat.¹¹³¹ Surat bersih diri itu berlaku untuk satu kali jalan. Tetapi atas kebijaksanaan Kepala Polisi Hugeng, Surat Bebas G-30 S yang jangka waktu berlakunya surat keterangan bebas G.30 S yang tadinya hanya berlaku untuk satu kali jalan atau *exit* menjadi berlaku 3 bulan.¹¹³² Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam proses untuk mendapatkan Surat-Bebas G-30-S/PKI yang sebelumnya bertele-tele, dan memuat hal-hal yang kurang tepat akan disederhanakan.¹¹³³

Sidang paripurna khusus DPRD Kotamadya Bandung Kamis 19 Nopember menerima dengan bulat usul inisiatif Bagir Manan S.H. dan kawan-kawan agar Penda Kotamadya Bandung mengusulkan kepada gubernur Jawa Barat, Laksus Pangkoptibda Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat,¹¹³⁴ agar surat bebas G-30 tidak

¹¹²⁶ *Kompas*, 27 Desember 1969

¹¹²⁷ *Kompas*, 23 Januari 1970.

¹¹²⁸ *Kompas*, 3 Februari 1970.

¹¹²⁹ *Kompas*, 22 Mei 1970.

¹¹³⁰ *Kompas*, 18 Agustus 1970.

¹¹³¹ *Kompas*, 1 September 1970.

¹¹³² *Kompas*, 5 Oktober 1970.

¹¹³³ *Kompas*, 16 Oktober 1970.

¹¹³⁴ *Kompas*, 23 November 1970.

diwajibkan bagi pelajar.

Sejak urusan surat bebas G-30-S/PKI dialihkan dari Kodim ke pihak Kepolisian, kini Komresko 961 Kota Jogja sibuk luar biasa. Lebih-lebih menjelang tahun ajaran baru, yang menjadi problem sekarang adalah murid-murid yang baru saja lulus SMP ikut berdesak-desakan mencari surat bebas G-30-S tersebut.¹¹³⁵

Oleh sebab itu kemudian surat Bebas G30S/PKI Bagi Anak2 Sekolah ditinjau kembali. Kriteria bagi pelajar yang ditinjau untuk tidak perlu memiliki surat tersebut adalah, anak-anak sekolah yang dewasa ini masih dibawah umur 16 tahun, pada waktu meletusnya Berhubung masih banyaknya orang yang belum mengetahui untuk apa dan siapa surat keterangan bebas G30S/PKI, maka AKBP Pramono Kamis kemarin memberikan perincian-perinciannya.¹¹³⁶ Kepala Dinas Humas Komdak Metro Jaya itu menerangkan bahwa surat keterangan itu diberikan hanya diperlukan untuk pindah tempat tinggal antar-propinsi atau bertugas keluar wilayah Kabupaten lebih dari satu bulan.¹¹³⁷ Surat itu juga harus dimiliki oleh mereka yang ingin mendaftarkan diri sekolah atau melamar pekerjaan, baik di pemerintahan, ketentaraan maupun swasta.

Periode I (PKI 1926)

Seorang Belanda bernama Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet datang ke Jawa pada tahun 1913, dan bekerja sebagai pemimpin redaksi harian *Soerabajasch Handelsblad*, Surabaya, selama dua bulan. Kemudian dia menjabat sebagai sekretaris pada Kamar Dagang Semarang (*Semarangse Handelsvereniging*) ternyata dia adalah seorang aktivis politik dan propagandis paham sosialis di Hindia Belanda.

Pada bulan Mei 1914, bersama Ir. Adolf Baars, dan beberapa orang Belanda peranakan mendirikan perkumpulan baru di kalangan orang-orang Indo, bernama *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV), pada masa awal pergerakan nasional, mengikuti berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912, dan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912.

Siasat yang ditempuh Sneevliet dan ISDV, karena tidak berhasil menarik anggota yang banyak, adalah mengusahakan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Sarekat Islam (SI) yang pada waktu itu berkembang pesat sebagai pergerakan kebangsaan bersifat kerakyatan. Berkat hubungan itu, Sneevliet dan Baars berhasil dengan leluasa berbicara dalam forum Kongres SI, bahkan mendapat kesempatan untuk menyajikan prasaran dalam sidang-sidangnya tentang soal-soal perburuhan dan pemerintahan. Kontaknya yang erat dengan Ketua SI Semarang, Semaoen, memberikan kesempatan baginya untuk berceramah dalam kursus-kursus kader, sehingga ISDV akhirnya banyak memperoleh pengikut di dalam SI yang menciptakan keanggotaan ganda. Banyak anggota ISDV menyelundup ke dalam tubuh SI, sebaliknya, aktivis-aktivis SI merangkap menjadi anggota ISDV. Bahkan orang-orang seperti Semaoen, Darsono, Alimin Prawirodirdjo dan Tan Malaka adalah sekaligus tokoh dan pimpinan kedua organisasi yang sebenarnya berlainan pahamnya itu. Ini terbukti dengan berdirinya SI Merah yang berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berdiri kemudian pada

¹¹³⁵ *Kompas*, 10 Desember 1970.

¹¹³⁶ *Kompas*, 26 Mei 1972.

¹¹³⁷ *Kompas*, 14 November 1973.

tanggal 23 Mei 1920, dengan Semaoen sebagai Ketua-nya.¹¹³⁸

Atas pengaruh paham sosialis dan kemudian berkembang lebih tegas menjadi komunisme, setelah Revolusi Oktober di Rusia tahun 1917, tokoh-tokoh SI yang kemudian digolongkan sebagai Merah, seperti Semaoen dan Darsono, dengan gencar melancarkan kritik dan bahkan fitnah kepada Tjokro, Salim dan Moeis, yang berhasil mengguncangkan suasana partai serta menimbulkan perpecahan dan pengelompokan antara pengikut Semaoen-Darsono-Alimin dengan pengikut Salim-Moeis-Soerjopranoto, sehingga mendorong yang terakhir untuk melancarkan tindakan disiplin partai kepada yang per-tama. Tapi Tjokro yang sangat gandrung terhadap persatuan, dan barangkali juga melihat dirinya sebagai pemimpin utama yang harus berdiri di atas semua golongan, tidak setuju terhadap maksud menyingkirkan elemen komunis dalam SI. Baru ketika Tjokro masih berada dalam tahanan karena Peris-tiwa Garut, duet Salim-Moeis yang menguasai persidangan Kongres Nasional VI SI di Surabaya, berhasil melaksanakan tindakan disiplin partai kepada golongan komunis yang ternyata telah mendapatkan dukungan kuat dari cabang-cabang Semarang, Solo, Salatiga, Sukabumi dan Bandung. Salim-Moeis mendapat dukungan dalam Kongres dengan per-bandingan suara 23 lawan 7.¹¹³⁹ Pada kongres itu pula, Salim-Moeis terlibat dalam perdebatan sengit di bidang ideologi dengan Soemaoen-Tan Malaka. Yang pertama mempertahankan ajaran-ajaran sosial Islam dan melawan ajaran-ajaran sosial Karl Marx yang dibawakan oleh yang kedua

Pada tanggal 23 Mei 1920, *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV) yang didirikan di Semarang sepuluh tahun sebelumnya, berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di India (PKI). PKI merupakan organisasi pertama di Asia di luar kekaisaran Rusia, menggunakan kualifikasi "Komunis." Partai Komunis Cina sendiri baru didirikan setahun kemudian, yakni pada bulan Juli 1921. Orang yang ditugaskan oleh *Internationali Comuniste* untuk membantu Partai baru tersebut adalah Henk Sneevliet, seorang organisator ISDV Belanda, yang pada tahun 1918 diburu-buru oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena kegiatan-kegiatan revolusionernya.

Kata "perserikatan" dalam bahasa Melayu merupakan terjemahan dari kata Belanda "Partij." Sedang nama PKI itu sendiri, menurut dokumen awal dari organisasi tersebut, merupakan kependekan dari bahasa Melayu "Perserikatan Komunis di India," yang bila di Belandakan menjadi "*Partij der Kommunisten in Indie*." Pada tahun 1927, kata "perserikatan" digunakan oleh PNI, sebelum menetapkan namanya menjadi Partai Nasional Indonesia.

Dalam kongres bulan Juni 1924 di Weltevreden (sekarang Jakarta Pusat), Perserikatan Komunis di India diubah nama-nya menjadi Partai Komunis Indonesia, ini merupakan perta-ma kalinya di Hindia Belanda, sebuah organisasi memakai kata "Indonesia". Sebetulnya sejak tahun 1922 sudah terdapat sebuah organisasi politik yang bernama *Indonesische Vereeniging*, yang kemudian diterjemahkan menjadi Perhimpunan Indonesia. Tapi organisasi tersebut berada di Nederland, bukan di negeri jajahan.

PKI juga merupakan organisasi politik Indonesia pertama yang menggunakan

¹¹³⁸ Beberapa buku menerangkan asal-usul berdirinya ISDV, misalnya A.K. Pringgodigdo SH, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1967, hal. 21-22. Sartono Kartodirdjo et al. *Sejarah Nasional Indonesia* jilid V. Jakarta: Balai Pustaka, 1977, hal. 203-212. Memberi sedikit informasi tentang berdirinya ISDV dan hubungannya dengan SI.

¹¹³⁹ *Ibid*, hal. 140.

konsepsi "Partai" dalam nama resminya, dalam bahasa Melayu. Pergantian kata "perserikatan" menjadi "Partai," merupakan bagian dari konflik terbuka sejak tahun 1922 di dalam tubuh Sarekat Islam, antara militan pro komunis dan yang menentangnya. Sarekat Islam, sejak awal tahun 1910 dan di sepanjang awal tahun 1920, merupakan suatu gerakan sosial politik yang berpengaruh, suatu gerakan yang pertama kali mengambil corak sosial-politik di Indonesia, di mana organisasinya tidak lagi membatasi dalam lingkaran tertentu, baik secara sosiologis maupun geografis, dan berkembang tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan juga di Sumatera dan kawasan lain. Anggota-anggota ISDV (kemudian PKI) seringkali merangkap anggota Sarekat Islam. Pada awalnya keanggotaan rangkap tersebut tidak menimbulkan masalah dan tidak bertentangan dalam hal agama; lagipula Sarekat Islam tidaklah menjadi lebih atau kurang sekuler pada saat telah menjadi gerakan massa, Tapi pembengkakan pengaruh ide-ide komunis di tengah gerakan dan munculnya persaingan guna merebut kepemimpinan, telah mendorong para pimpinan yang ada, yang khawatir akan kedudukannya, mencoba menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Islam dengan Komunisme, Sambil menekankan ciri keislaman dari Sarekat Islam, dan menganggap hal yang mustahil anggota suatu organisasi Islam merangkap menjadi anggota organisasi Komunis. Untuk menegaskan perbedaan tersebut, para pemimpin Sarekat Islam kemudian mengusulkan agar gerakan SI dianggap sebagai sebuah Partai—dalam pengertian Belanda "Partij"—dan melarang anggotanya menjadi anggota partai yang lain pada saat yang bersamaan. Dari sini nampak bahwa kata "partij" mengandung arti khusus yang tidak dipunyai oleh kata "sarekat", yang tidak cukup jelas dalam mencerminkan pengertian "perserikatan": Organisasi dengan kata Partai memiliki kelainan, yakni kekhususan bahwa seseorang tidak dapat menjadi anggota banyak partai pada saat yang sama, padahal ia boleh menjadi anggota banyak "sarekat" atau anggota suatu "sarekat" dan suatu "Partai." Jadi ketika PKI memilih kata "Partai," ini merupakan pernyataan adanya sifat eksklusif dari kelompok tersebut, dimana berlaku berbagai peraturan ketat organisasi serta disiplin tertentu. Sedangkan SI sendiri, baru pada tahun 1927 menyepakati nama Partai Sarekat Islam; namun pada saat itu, organisasi tersebut sudah tidak lagi menampilkan gambaran sebagai sebuah organisasi yang kuat seperti sepuluh tahun sebelumnya.

Setelah terjadi perdebatan tentang konsepsi "partai" dalam SI, di kalangan PKI kemudian timbul pemikiran tentang peranan Partai itu sendiri dan bentuk macam apa yang harus diambil supaya peranan tersebut dijalankan dengan baik. Jadi bukan hanya terbatas berbicara dengan rakyat, mengucapkan pidato persiapan kongres Juni 1924, atau bukan lagi hanya meyakinkan mereka, tapi juga menyatukan keyakinan tersebut dalam perbuatan serta mempersatukan segenap kekuatan perubahan dalam suatu organisasi yang mendasarkan kekuatannya pada disiplin, yang berbicara hanya dalam satu bahasa dan bertindak seperti seorang manusia¹¹⁴⁰ Tidak lagi hanya menyemaikan ide-ide tapi harus dijaga agar ide-ide tersebut bisa menjadi buah, lalu berkembang menjadi tekad, untuk itu diperlukan sebuah organisasi yang mampu melaksanakan tekad tersebut, menjadi suatu perubahan politik, yang membangkitkan dan dapat menjadi pemimpin dari gerakan yang dilahirkan oleh tekad tersebut. Kebutuhan adanya suatu organisasi yang lebih kokoh, lebih kuat dan lebih disiplin untuk menjamin keberhasilan peranannya sebagai organisasi pelopor, menyebabkan ditanggalkannya

¹¹⁴⁰ Ruth McVey, *The Rise of Indonesian Communism*, Ithaca, Cornell University Press, 1966. hal. 192.

kata "per-serikatan" yang melekat pada awal kelahiran PKI, pada masa kegagalan dan belajar, menjadi sebuah "Partai." Partai besar yang bersatu juga diperlukan agar Partai bisa bertahan dari tekanan pemerintah Hindia Belanda yang semakin lama, semakin sewenang-wenang. Ruth McVey menulis bahwa seorang pemimpin partai dijamin akan dipenjarakan selama beberapa bulan dalam setiap tahunnya.¹¹⁴¹

Suatu peristiwa genting pernah terjadi pada tahun 1923, setelah kegagalan aksi pemogokan yang cukup besar di jawatan kereta api dan diusirnya Semaun--Sekjen PKI sejak 1920 dan sekjen Sindikat Buruh Kereta Api--keluar negeri. Di Solo dan Semarang terjadi serangkaian sabotase dengan "bom". Orang-orang Komunis segera dituduh sebagai

Penanggung jawab. Tempat pertemuan mereka digeledah dan sejumlah pimpinannya ditangkap. Tapi tidak ditemukan bukti-bukti bahwa partai terlibat dalam peristiwa pembom-an tersebut. Namun dua dari pimpinan yang dipenjarakan itu diusir dan sejumlah lainnya di penjarakan selama empat bulan.¹¹⁴² Dengan demikian, disamping terdapat hal-hal yang dilakukan guna memajukan nasib kaum buruh, juga terjadi aksi-aksi yang membuat partai mundur, ada tindakan yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan ada pula tindakan yang hanya melayani kepentingan polisi. Oleh karena itu harus dapat dibedakan antara aksi-aksi yang berguna dengan tindakan yang memperkeruh suasana. Bagi pimpinan partai, perkembangan tersebut berarti harus dibenahinya pendidikan politik anggota, mereka harus mampu membedakan antara aksi yang benar dengan aksi yang keliru, terutama kemampuan mereka untuk menghindari jebakan polisi, yakni yang berupa "provokasi." Massa juga harus diperingatkan tentang hal ini. Polisi sangat berkepentingan untuk meyakinkan bahwa "revolusi" itu sama dengan "peledakan bom," karena hal tersebut akan membuat golongan revolusioner terkucil dari massa 'rakyat', polisi juga sangat berkepentingan untuk membuat "provokasi" sabotase dengan "bom," untuk kemudian menuduh PKI sebagai dalangnya, agar ada alasan yang baik untuk menindasnya. Partai, militansi dan kawan-kawan separtai harus senantiasa waspada, dan tidak ada kewaspadaan tanpa disiplin; sekali lagi, masalah disiplin ini menjadi tuntutan utama. Dengan demikian tanggung jawab partai makin besar dan peranan partai dalam perjuangan anti kolonial semakin meningkat. Akibatnya tekanan dari musuh pun semakin keras.

Di depan kongres partai, Juni 1924, Darsono, yang pernah menjadi tangan kanan Semaun, menyatakan bahwa, "Partai tanpa disiplin adalah ibarat tembok tanpa semen, mesin tanpa baut"¹¹⁴³ dan ia juga memperingatkan tentang bahaya konsepsi "avonturistis" dalam sebuah perubahan politik atau "revolusi." Juga harus dipahami adanya hukum perkembangan sejarah, untuk membantu kemajuannya (par-tai - penj). Tapi sejarah itu tak bisa dimajukan lebih cepat dengan memperkosanya. Suatu dokumen berjudul "Manifes Komunis Indonesia" yang bertanggal di bulan pertama pendirian PKI telah menyatakan:

"Kaum komunis dan partainya tidak bisa *bikin* pembe-rontakan. Komunisme tergantung dari keadaan pergaulan hi-dup dan ia hanya bisa bekerja menurut keadaannya. Kewajib-an kaum komunis dan partainya yaitu memimpin pergerakan kaum buruh supaya dalam pertentangannya tidak demikian banyak ada jiwa manusia

¹¹⁴¹ Ibid., hlm. 258.

¹¹⁴² Ibid., hlm. 187.

¹¹⁴³ Ibid., hlm. 194.

yang dikorbankan percuma. Kewa-jiban kaum komunis yaitu membawa pergerakan kaum buruh di jalan-jalan yang baik dan mudah. Fihak sana mendakwa kita hendak *membikin* revolusi. Kita menjawab bahwa kita tidak *membikin* revolusi, tetapi kita yakin-yakin benar, bahwa revolusi dunia itu akan pecah sendiri (...). Kaum komunis dan partainya hanya bisa memudahkan lahirnya dunia baru, lain tidak. Partai komunis yaitu dukun beranak bagi dunia baru yang akan lahir itu¹¹⁴⁴⁾

Dengan dipindahkannya kedudukan partai dari basis awalnya di Semarang ke Jakarta, kongres telah melengkapkan pengertian PKI, dalam nama dan peranannya sebagai suatu organisme yang matang, mampu menantang kekuasaan, bahkan dipusatnya sendiri, di mana kekuasaan itu bercokol dan menindas, mengawasi dan menghukum.

Peristiwa-peristiwa dari bulan November 1926-Januari 1927 serta serangkaian demonstrasi yang tak terkendali, yang dapat menimbulkan perlawanan umum terhadap diktaktor kolonial, menunjukkan, bahwa rencana partai tentang tanggung jawab dan disiplin yang dibahas dalam kongres Juni 1924, tetap menjadi cita-cita yang belum bisa dicapai. Pimpinan partai yang berantakan akibat tekanan yang terus menerus, tak mampu lagi menanggulangi berbagai usul dari kader-kader regional yang cenderung menilai kekuatan mereka secara berlebihan.

Banten, sebuah daerah yang dikenal dengan daerah pengikut Islam yang ortodoks, juga turut memberontak atas nama PKI. Malah, di daerah ini pemberontakan komunis jauh lebih besar ketimbang tiga daerah lainnya, yakni Priangan, Batavia, dan Sumatera Barat. Khusus di Banten, pemberontakan komunis terjadi akibat para pemimpin tradisional, kyai dan jawara, merasa tidak puas dengan SI. Faktor lainnya ialah kesamaan sifat radikalisme yang dikandung, baik oleh PKI, maupun oleh rakyat Banten. Betapapun hebatnya pemberontakan kaum kiri ini, akhirnya dapat ditumpas pada tanggal 14 November 1926. sekitar 13.000 orang ditangkap, beberapa orang ditembak dan sebagian lain dijebloskan ke kamp di Boven Digul, Tan Malaka salah satu diantaranya. Sedangkan Semaoen sudah lebih dulu dibuang karena terlibat kerusuhan tahun 1923.

Setelah berbagai kejadian, yang menyebabkan dilarangnya PKI dan ditangkapnya 13.000 orang, dengan 5.000 di antara-ranya diadili dan dihukum (16 orang diantaranya dihukum mati dan akan digantung), serta sekitar 1.000 orang dideportasikan tanpa diadili ke Irian Barat. Dalam suatu kamp konsentrasi yang khusus dibuat untuk itu, telah mengungkapkan sampai di mana *raison d'etre* PKI dan *raison d'etre* Partai Komunis di Indonesia, spesifikasi suatu Partai yang menggunakan kata "komunis" untuk membedakan diri, tidak begitu mudah dipahami oleh golongan komunis itu sendiri. Para pendiri PKI itu sendiri—yaitu pimpinan tingkat pertama, yang beberapa diantaranya ada di luar negeri dan berhubungan dengan gerakan komunis Internasional—yang paling cepat menguburkan PKI sebagai suatu organisasi.

Mula-mula adalah Semaun. Sejak ia diburu-buru di Indonesia, ia lalu sering berada di Nederland, berhubungan erat dengan para mahasiswa pendiri Perhimpunan Indonesia (PI), dan tentu saja dengan orang-orang Komunis Belanda. Semaun menjadi perantara antara kedua grup tersebut, bersamaan dengan kedudukannya sebagai wakil PKI di Eropa dan dalam organisasi Internationale Communiste. Bulan Desember 1926,

¹¹⁴⁴ *Manifes Komunis India*, Bab 8: Usaha untuk mencapai maksud kita.

segera setelah kegagalan gelombang pem-berontakan pertama di Jawa, atas nama PKI, Semaun yang masih dianggap sebagai pemimpin PKI, menandatangani suatu persetujuan rahasia dengan ketua PI Moh. Hatta. Dalam persetujuan itu disebutkan bahwa, kaum komunis Indonesia menyerahkan kepemimpinan gerakan pembebasan Indonesia kepada PI, yang tadinya dipimpin oleh PKI. Hatta mengatakan:

"Dalam konvensi itu antara lain disebutkan pengakuan PKI atas kepemimpinan Perhimpunan Indonesia terhadap gerakan rakyat Indonesia seluruhnya, dan PKI tidak akan mengadakan oposisi dalam gerakan itu konsekuensi menuju Indonesia merdeka"¹¹⁴⁵

Karena persetujuan itu bersifat rahasia, maka ia hanya menjadi tanggung jawab Semaun pribadi dan tidak ada kelanjutannya yang lebih kongkrit. Tapi persetujuan itu ke-mudian diumumkan oleh pengadilan Belanda, setelah penang-kapan Hatta dan 3 pimpinan PI lainnya pada bulan September 1927. Pemerintah Belanda hendak menggunakan dokumen tersebut untuk menunjukkan bahwa Perhimpunan adalah suatu organisasi komunis dan subversif, tapi keempat ter-dakwa yang diadili dalam bulan maret 1928 itu kemudian dibebaskan. Dan Semaun harus memberi pertanggung jawaban terhadap kawan-kawan Komunisnya akibat terbongkarnya dokumen tersebut. Pada tanggal 19 Desember 1927, Harian Partai Komunis Belanda memuat suatu komuni-ke yang ditandatangani Semaun:

"Pers Belanda telah mempublisir suatu persetujuan yang saya tanda tangani atas nama PKI dan yang ditandatangani M. Hatta atas nama Perhimpunan Indonesia. Saya mengakui bahwa saya telah menandatangani persetujuan itu tapi (...) setelah saya pelajari dengan lebih seksama menurut prinsip-prinsip komunis di satu pihak dan berbagai peristiwa di Indonesia di lain pihak, saya menyadari bahwa tandatangan saya itu telah dapat diartikan sebagai pertanda hilangnya independensi Partai Komunis dan hilangnya kepemimpinan Partai. Berbagai peristiwa telah menunjukkan bahwa kaum komunis di Indonesia, walaupun dikejar-kejar dan ditindas, tetap melanjutkan perlawanan (...) Juga telah diketahui bahwa perlawanan nasional yang terjadi, dipimpin oleh Partai Komunis. Sekarang partai kami telah membayar dengan harga yang mahal (...) tapi kaum buruh (...) tetap bersimpati terhadap perjuangan besar kami. Kesalahan yang telah saya lakukan dalam penandatanganan persetujuan itu bukanlah karena saya berpikir bahwa partai kita harus siap berjuang sepenuhnya dengan golongan nasionalis revolusioner yang jujur tapi karena saya telah menerima mereka sebagai pemim-pin seluruh gerakan revolusioner nasional (...) Garis kaum komunis Indonesia, sebagaimana di negara lain, sangat jelas: dalam keadaan yang bagaimanapun, harus tetap dijaga inde-pendensi partai. Ini adalah prinsip yang mutlak (...) Saya bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi atas penan-datanganan persetujuan tersebut. Ketika saya menan-datangani persetujuan itu, keadaan telah menyebabkan saya tidak dapat menghubungi kamarad-kamarad saya di PKI dan di Internationale Communiste"

Dalam peristiwa di atas, pentingnya suatu organisasi yang otonom bagi golongan komunis-lah yang dipertanyakan oleh Semaun, ketika ia bergabung dengan posisi Hatta. Dalam pikirannya, suatu partai memiliki nilai yang lain pada saat ia berjuang bagi kemerdekaan nasional. Harus ada suatu partai yang memimpin perjuangan itu, dan bila Partai Komunis tak dapat melakukannya, maka kaum komunis menerima kepe-

¹¹⁴⁵ M Hatta, *Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan nasional Indonesia*, Idayu, Jakarta, 1980, h. 13.

mimpinan partai lain.

Tentu saja jalan pikiran Semaun tersebut tak bisa diterima oleh anggota-anggota militan partai yang berjuang bagi ke-langsungan hidup PKI. Walaupun secara praktis persetujuan Semaun-Hatta itu tidaklah penting, namun secara teoritis itu sudah cukup untuk meruntuhkan pengaruh dan kewibawaan Semaun, sebagai pemimpin partai, kendati ia telah melakukan otokritik.

Seorang pimpinan PKI yang lain, pembantu dekat Semaun di Indonesia, dan menjadi wakil Internationale Communiste di Asia Tenggara, yaitu Tan Malaka, yang sebagaimana Semaun, telah menganggap PKI tidak ada lagi sebagai suatu organisasi. Bersama beberapa pelarian yang mampu pergi keluar negeri, pada bulan Juni 1927 di Bangkok, Tan Malaka mendirikan suatu partai baru, PARI (Partai Republik Indonesia), sebagai pengganti PKI.

Nama Partai itu diambil dari sebuah buku Tan Malaka yang diterbitkan dua tahun sebelumnya "Naar de Republiek-Indonesia", dan menanggalkan seluruh hubungannya dengan komunisme. Dokumen-dokumen yang diumumkan PARI me-nyatakan bahwa partai itu independen yang carut marut, akibat ketatnya pengawasan penguasa dan konflik internal yang mulai merapuhkan gerakan kiri, sebuah pemberontakan disiapkan pada bulan Desember 1924. Sesungguhnya, aksi ini tidak mendapatkan restu dari Komintern di Uni Soviet, mengingat pemimpin PKI, Semaun, dibuang karena kasus pemogokan besar-besaran buruh VSTP pada tahun 1923. Namun, beberapa pimpinan PKI yang tersisa, tetap bermak-sud untuk "unjuk gigi" di hadapan penguasa kolonial.

Pemberontakan tahun 1926-1927 ini sekaligus menan-dakan kehancuran gerakan kiri pada masa kolonial, untuk lalu kembali bergerak di masa selanjutnya.

Periode II (1926-1948)

Penumpasan pemberontakan PKI di Banten tahun 1926 menandakan berakhirnya fase pertama dari aktivitas gerakan komunis di Indonesia. Pada saat itu Indonesia sendiri belum merdeka dan memiliki kekusaan sendiri. Sampai tahun 1935 tidak ada aktivitas penting PKI di Indonesia. Kemudian Muso, seorang pemimpin PKI yang berada dalam pengasingan dan tinggal di kota Moskow, Uni Sovyet, kembali ke Indonesia untuk menyusun kembali "Partai terlarang"...Hal yang jauh lebih penting dari aktivitas komunis pada masa itu adalah bahwa di Netherland (Belanda) banyak pemimpin masa depan dari Negara Republik Indonesia tinggal di negeri itu sebagai mahasiswa, salah satunya berasal dari partai komunis.

Depresi ekonomi dunia internasional tahun 1929 mem-pengaruhi perekonomian di Indonesia. Petani dipaksa untuk menggadaikan tanah mereka untuk membayar pajak yang meningkat sebanyak 44 % untuk mengatasi krisis antara tahun 1926 sampai 1932. Pengarang sayap kanan JM Van Der Kroef mengatakan " Proses proletarisasi dalam jangka panjang hanya akan memberi kekuatan bagi munculnya Partai Komunis. Pada tahun 1930-an memang tidak ada peristiwa hebat yang berarti bagi partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1933 para kelasi dari kapal angkatan laut Belanda "Zeven Prvincien" melakukan pemberontakan, kemu-dian merampas kapal tersebut dan bermaksud membawanya ke pelabuhan Rusia. Rencana pemberontakan itu dapat digagalkan setelah pesawat tempur angkatan laut Belanda menyerang dengan sebuah

bom. Pemberontakan ini, meski jelas-jelas hasutan dari sebuah persatuan Negara-negara Sosialis, tapi menimbulkan efek bagi perubahan opini politik di Indonesia.

PNI, prototype partai yang dikehendaki Sukarno didirikan pada tahun 1933, untuk mengisi kekosongan, akibat larangan de jure dan keruntuhan de facto PKI. Ada pula PARI yang dari luar negeri dan dalam klandestin ingin memainkan peranan serupa. Kegagalan PKI agaknya telah memberikan semangat bagi tumbuhnya partai-partai, dan dalam perkembangan tersebut, kata "kiri" kemudian dipakai secara lebih luas lagi, sebagai unsur klasifikasi yang menjadi suatu kebutuhan.

Kata "kiri" dalam perbendaharaan kata politik interna-sional, agaknya merupakan konsekuensi dari Revolusi Perancis; kata "kiri" seringkali digunakan dalam perempat abad XIX, dan "kiri" menunjuk pada ide-ide wakil rakyat yang duduk sebelah kiri Ketua di ruang Parlemen Perancis. Kata "kiri" juga digunakan, pada masa yang sama, di Inggris, tanpa dihubungkan dengan letak duduk anggota parlemen di ruang sidang¹¹⁴⁶

"Kiri" di Perancis mula-mula didukung dengan tuntutan "kedaulatan bangsa" melawan "kedaulatan raja," kedaulatan yang datang dari bawah dan bukan dari atas; ia mendukung demokrasi melawan otoriterisme, yakni majelis pilihan rakyat melawan anggota yang diangkat, ia memperjuangkan pemilihan umum melawan pemilihan censitaire (dimana yang memilih dan yang dipilih harus membayar pajak tertentu - penj.) dan menentang hak pilih yang hanya diberikan kepada orang-orang kaya.

Pada saat pengertian "kiri" mulai meluas di Eropa, munculah "sosialisme" dan "komunisme". Lalu ketiga pengertian tersebut saling kait-mengkait. Di samping golongan kiri "liberal" terdapat kelompok "ekstrim kiri," sosialis atau komunis. Namun ketiga-tiganya memiliki ide bersama yang berasal dari Revolusi Perancis. Konstitusi dan pengadaan lembaga-lembaga negara, kedaulatan rakyat harus dijamin, dan rakyat berhak untuk berontak terhadap pemerintahan despotis yang tidak mengakui kedaulatannya: "bila pemerintah melanggar hak-hak rakyat, maka pemberontakan adalah bagi rakyat dan merupakan bagian dari rakyat. Kedaulatan merupakan hak rakyat yang paling suci dan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan"¹¹⁴⁷

Dasar utama dari doktrin sosialis adalah pemikiran bahwa, kedaulatan rakyat telah dilanggar apabila hubungan sosial mengakibatkan timbulnya inegalite (ketimpangan) dan terpecahnya masyarakat menjadi pemilik dan proletar, serta menempatkan kaum proletar di bawah dominasi pemilik; sedang Revolusi Perancis 1789 yang memproklamkan "ke-merdekaan, persamaan, persaudaraan" tidak menghendaki digantinya dominasi aristokrasi menjadi dominasi para pemilik besar, golongan sosialis ingin membebaskan rakyat seluruhnya.

Perubahan yang tampil di Eropa pada awal abad XIX dan berbagai tuntutan yang ditimbulkannya, merupakan akibat gelombang besar gerakan revolusioner 1848, yang melanda seluruh Eropa, serta menimbulkan gerakan pembebasan nasional di beberapa negara. (Hongaria misalnya), gerakan republikan (di Perancis, Februari 1848), pemberontakan kaum buruh (di Paris, Juni 1848). Tepat seratus tahun kemudian, gerakan revolusioner yang cukup kompleks dan berbeda-beda berkembang di Asia, gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di negara-negara yang masih dijajah atau gerakan demokratis anti feodalisme atau anti kapitalisme di negeri-negeri yang sudah

¹¹⁴⁶ Jean Dubois, *Le Vocabulaire Politique et Social en France 1869-1872*, Paris, Larousse, 1962

¹¹⁴⁷ Konstitusi Republik Perancis 24 Juni 1793, "Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warganegara", pasal 35.

merdeka. Beberapa penulis mencoba meyakinkan bahwa berbagai revolusi di Asia tersebut "dipimpin" oleh komandan yang sama, Uni Soviet; tapi tak seorangpun yang menyebut "komandan" dari revolusi Eropa 1848.

Di Indonesia, sekitar tahun 1930, terdapat dua aliran besar dalam gerakan nasional. Di satu pihak di sekitar Sutomo (pendiri BU) di Surabaya dan M.H Thamrin di Jakarta, aliran yang menerima lembaga-lembaga yang didirikan Belanda, sambil mencoba menambah jumlah orang Indonesia di Lembaga tersebut dan mencoba mengarahkan sistem administratif dari dalam sistem itu sendiri. Di lain pihak, PNI dan Serekat Islam yang mengikuti Partai Kongres India, menolak segala kerjasama dengan pemerintahan kolonial; aliran inilah, yang terutama terdiri dari orang-orang laique—bukan dari kalangan agama—yang akan menyebut dirinya sebagai "gerakan nasional kiri." Tentu saja, berbagai organisasi bawah tanah yang ilegal, termasuk dalam aliran ini.

Golongan kiri legal tidak hanya berbeda dalam sikapnya terhadap pemerintah; PNI—setelah bubarnya—dua partai yang saling mengaku sebagai pewarisnya, Partindo (Sukarno, Sartono, Amir Sjarifudin) dan Pendidikan Nasional Indonesia (Hatta, Sjahrir), mengembangkan program yang diilhami golongan sosialis; "Marhaen", sebagai pengganti "buruh" dalam teks komunis, harus mampu mengatasi masalah hubungan klas/massa seperti yang dihadapi PKI, paling tidak dalam tingkat konsepnya; "marhaen" adalah nama yang diberikan kepada seluruh orang Indonesia yang tidak punya kekuatan, buruh atau bukan. "Marhaenisme" digunakan sebagai definisi dari "Sosialisme ala Indonesia

Selama beberapa tahun, organisasi nasional yang disebut sebagai Perhimpunan Indonesia cukup eksis di negeri Belanda dimana organisasi ini adalah tempat bersatunya para ekspatriat mahasiswa dari Indonesia. Sepanjang periode tese-but calon-calon dari pembangun organisasi nasional Indonesia berada dalam perhimpunan tersebut termasuk dari PNI, Partindo dan Gerindo.

Menghadapi tiga serangan golongan kanan dan ekstrim kanan, Jepang, Belanda, Indonesia, golongan kiri akhirnya merubah sama sekali taktiknya dan menanggalkan politik non-koperasi yang semula merupakan ciri mereka. Golongan kiri akhirnya bergabung dalam organisasi baru Gerindo, yang dibentuk bulan Mei 1937, dengan diilhami oleh "Front Populer", aliansi golongan kiri yang sebelumnya mencapai kekuasaan di Spanyol dan Prancis. Berbeda dengan Front Populer, Gerindo bukanlah aliansi partai-partai independen, melainkan penge-lompokan kembali anggota partai-partai kiri seperti Partindo, yang memutuskan bubar atau kelompok yang mewakili partai bawah tanah PKI dan PARI. Para pemimpin utamanya adalah Amir Sjarifudin dan A.K Gani.

Tujuan dari Gerindo adalah mempersatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang asal daerahnya, guna menuntut demokratisasi lembaga-lembaga dan dibentuknya Dewan Perwakilan yang sesungguhnya dari pemerintahan Belanda. Dalam rangka tuntutan Demokratisasi tersebut Ge-rindo mengakui lembaga-lembaga kolonial. Tapi hal itu ditun-tut juga oleh Parindra. Yang membedakan Gerindo dari Parin-dra adalah, konsepsinya yang anti rasis dalam kebangsaan dan nasion, orang Indonesia manapun, dari rakyat Indonesia, yang memilih menjadi orang Indonesia, tindakan ini merupakan suatu keputusan politik, bukan hak dari kela-hiran atau lamanya nenek-moyang tinggal di Indonesia. Perbe-daan yang lain dengan Parindra adalah tekananya

pada kerakyatan sebagai kedaulatan dan pada "hak-hak kaum susah." Terakhir adalah tawarannya kepada seluruh kekuatan politik di Indonesia, termasuk Belanda, untuk membentuk Front Bersama menghadapi imperialisme Jepang. Fasis dan militeristis; yang terakhir ini tidak akan bisa dipahami secara baik, sebagaimana nampak pada lemahnya perlawanan ketika Jepang menduduki Indonesia.

Tapi di samping golongan "kiri legal" tersebut, adakah, dalam ilegalitas, kelanjutan dari PKI? Bila ia tidak ada di penjara atau di dalam kamp-kamp di Nusakambangan dan Irian, di Digul, di manakah golongan Komunis Indonesia? Masih adakah mereka? Masihkah mereka melakukan sesuatu? Polisi politik Belanda secara periodik berhasil membongkar jaringan PKI, tapi ini tidak berarti bahwa jaringan-jaringan itu betul-betul ada. Sebuah dokumen PKI menyatakan:

"Sesudah kejadian pemberontakan tahun 1926-1927 ini, kaum Komunis Indonesia boleh dikatakan putus sama sekali hubungannya yang teratur dengan luar negeri. Partai tidak mendapat didikan yang teratur mengenai pekerjaannya dan tidak mendapat teori tentang perjuangan revolusioner. Keda-tangan kawan Musso secara illegal dari luar negeri dalam tahun 1935 membantu kaum komunis Indonesia menyusun organisasi illegal dan menentukan politik partai dalam per-juangan melawan fasisme (...) Walaupun tidak lama sesudah kawan Musso kembali keluar negeri diadakan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin dan pengikut-pengikut PKI. PKI masih terus bisa menjalankan aktivitasnya di bawah tanah hingga jatuhnya kekuasaan fasis Jepang"¹¹⁴⁸

Analisa tersebut agaknya menyimpulkan bahwa, pada saat Komunis Indonesia tidak dapat mempertahankan hubungannya dengan dunia luar, sebelum tahun 1935, dan sangat terpecah dalam menentukan sikapnya di masa datang: ini terlihat bahkan dalam tingkatan militan yang dideportasi ke Irian, yang terpecah menjadi berbagai kelompok yang bermusuhan. Beberapa diantaranya barangkali mencoba mengikuti PARI, saat partai tersebut mulai dikenal, secara gelap tentu saja, di dalam negeri; bagi mereka, agaknya, PARI tidak lain dari PKI itu sendiri. Yang lainnya masuk ke dalam PNI, yang telah menyatakan bahwa partai itu akan melanjutkan kerja yang telah dimulai PKI; bagi mereka, rintangan ideologis pada saat mereka masuk ke dalam partai non komunis, tidak terlalu besar dibanding halangan nyata dalam mengorganisasi PKI sebagai aparat klandestin; air akan menyeret lumpur yang dilaluinya, air akan memenuhi jambangan yang ditemuinya. Bagaimanapun, antara PKI, PARI, PNI, berada pada landasan yang sama; para ahli teori boleh mengarahkannya pada "nasionalisme" atau "internasionalisme" atau "dwitunggal", tapi landasan tersebut, yang menimbulkan pemberontakan pada berbagai lapisan rakyat melawan dominasi kolonial, menciptakan terutama suatu aspirasi yang berciri khas, yang diungkapkan serentak oleh seluruh partai rakyat Indonesia, oleh seluruh golongan kiri Indonesia, betapapun konflik teori memisahkannya.

Tapi untuk kelompok Komunis Indonesia di eropa, yang baru mengetahui bahwa PARI-nya Tan Malaka telah menyatakan independensinya dari Internationale Communiste, PARI tidak boleh di anggap sebagai PKI bentuk baru; jadi harus dicegah jangan sampai golongan Komunis Indonesia bergabung di sekitar Tan Malaka, dan untuk itu partai harus dibangun kembali sambil melakukan hubungan dengan Partai Komunis lain di seluruh dunia. Misi itulah yang pada tahun 1935 dipercayakan kepada

¹¹⁴⁸⁾ G.H Bousquet, *Le Politique (?) et Coloniale des Paya-Bas*, CEPE, Paris, 1939

Musso, anggota pimpinan PKI yang berada di Eropa pada saat meletusnya peristiwa 1926-1927, dan yang menggantikan Semaun di Belanda; misi tersebut kemudian mendapat perlawanan dari para pendukung Tan Malaka, di luar negeri dan juga di Indonesia, yang menya-takan bahwa PKI sudah mati dan bahwa mereka adalah ahli warisnya.

Bagi Musso, PKI tetap ada dan PARI hanyalah merampas. Kejaksaan Belanda tidak ambil pusing terhadap perbedaan itu, baginya semua itu adalah "Komunis," "ekstrimis yang ber-bahaya" dan ia membuang mereka ke Irian tanpa diadili, siapa saja yang berhasil ditangkap. Di antara mereka terdapat orang-orang yang menyusun sel-sel PKI yang dibentuk Musso di Surabaya awal tahun 1936, di lingkungan sindikalis Djokosudjono. Dalam kamp tahanan di Irian, anggota-anggota PARI menjulukinya "PKI muda" atau "baru." Ketika para tahanan itu dipindah ke Australia dan anggota-anggota PKI berkat bantuan kaum Komunis Australia, menerbitkan suatu buletin gelap, mereka menulis:

"Lawan selalu mencoba memecah pergerakan kita. Cara memecahnya dengan bermacam-macam jalan. Antara lain adalah sebutan PKI Lama dan PKI baru (...) Bagi kita kawan sefaham, PKI hanya satu. Kita hanya mengenal satu partai komunis yaitu PKI. Tidak ada lama tidak baru..."¹¹⁴⁹

Itulah tujuan Musso yaitu menjamin kontinuitas PKI, mempertahankan namanya, kehidupan organisasinya, men-jamin kedudukan PKI dalam sejarah Indonesia, dan membuat PKI sebagai pionir dalam sejarah Indonesia. Dengan cara yang sama Aidit tahun 1950 mencoba menunjukkan bahwa pemuda-pemuda Komunis memainkan peranan penting di Jakarta dalam periode Mei-September 1945, tanpa perlu membuktikan dan menyatakan di mana-mana bahwa mereka itu adalah Komunis.¹¹⁵⁰

Bila Musso pada tahun 1948, tiga tahun setelah 17 Agustus 1948, dan Aidit tahun 1950 (Musso telah terbunuh dalam peristiwa Madiun) mencoba menunjukkan bahwa sejarah Ko-munis adalah sejarah yang gilang-gemilang, adalah karena PKI dalam tiga tahun pertama kemerdekaan itu hampir tidak pernah terang-terangan membiarkan golongan kiri mengi-dentifikasikan dirinya kepada Partai Sosialis, partai yang pendirinya adalah Amir Sjarifudin, dia lagi, sekeluarnya dari pen-jara dimana Jepang telah menjebloskannya ke sana sejak Februari 1943. Ketika para aktivis PKI yang "dibuang" kembali dari negeri Belanda, George Kahin menulis," Sangat jelas bahwa saat mereka tiba di Indonesia akhir 1945 dan awal 1946, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan jalur Moskow....Orientasi pertama mereka adalah, menseja-jarkan.bahwa Partai komunis Belanda, anti republik. Mereka menganggap bahwa Republik adalah buatan Jepang dan fasistik, ini bertujuan untuk menyatukan lagi Belanda dengan Indonesia. Karena itulah pemerintah Belanda sangat senang dan mau melepaskan mereka tanpa syarat ke Indonesia. Tapi kemudian, sepanjang perjuangan untuk kemerdekaan, atas petunjuk Moskow PKI menemukan mereka secara obyektif menuju ke sisi kanan, bukan hanya PNI, tapi juga sayap kanan partai Islam, masyumi.

Tapi kemudian para tokoh PKI dari pembuangan ini me-nyadari bahwa posisi mereka sungguh menggelikan. Menurut Kahin," Mereka melihat RI dari dalam.

¹¹⁴⁹ "Lahirnya PKI Dan Perkembangannya", *Bintang Merah*, No 7, 15 November 1950, hlm. 199.

¹¹⁵⁰ Sebutan Yang Berbahaya," *Red Front*, Suara official PKI seksi luar negeri, No 3, Desember, 1944.

Kemudian mereka menyimpulkan bahwa RI bukanlah produk Jepang atau diktator fasis. Sangat jelas bahwa berdirinya Negara RI adalah dukungan dari seluruh populasi rakyat.”

Bulan September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun. Tentara-tentara yang pro-PKI merebut kendali kota Madiun di Jawa timur. Muso, pemimpin PKI, menyatakan dirinya sebagai pemimpin alternative dan mencoba untuk mengambil alih kekuasaan. Meski terlihat bahwa Partai komunis Indonesia tidak merencanakan pembe-rontakan tersebut dan dianggap hanya pemberontaka lokal saja, tapi seperti kejadian tahun 1926, anggota-anggota PKI ditumpas dan dihancurkan. Namun bisa dianggap bahwa peristiwa pemberontakan PKI Madiun ini merupakan mata rantai gerakan komunis di Indonesia. Peristiwa itu bukanlah hanya sekedar pertarungan antara kekuatan-kekuatan politik yang berbeda, namun telah menjadi suatu tujuan dari gerakan organisasi komunis yang berada di Indonesia. Jika pada pemberontakan PKI 1926, para pemberontak diberangus oleh pemerintah kolonial Belanda, maka pemberontakan PKI 1948 ini berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia.

PKI tetap merupakan bahaya laten, walaupun basis-basisnya di Blitar Selatan telah dihancurkan, namun kader-kadernya masih bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. ¹¹⁵¹Usaha-usaha dari sisa-sisa G30S/PKI sampai saat itu masih terus ada. Dari tokoh-tokoh yang berhasil ditangkap diketahui, bahwa mereka masih terus melakukan kegiatan dengan sistem kerja OTB (organisasi tanpa bentuk).¹¹⁵² Organisasi sisa-sisa PKI yang masih bergerak di beberapa tempat di Indonesia dan masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan konspiratif dan *illegal*.

Agustus 1948, ketika Sjahrir (perdana menteri Indonesia) dan bekas anggota pendidikan ke luar dari Partai Sosialis untuk membentuk Partai Sosialis Indonesia dan mendukung pemerintahan Hatta yang menggantikan Amir, Musso berhasil kembali dari Eropa untuk meyakinkan Partai Sosialis agar bergabung dengan PKI. Dengan maksud mengarahkan politik partai agar tidak lagi berdasar pada kompromi, tapi pada perjuangan melawan penyerbuan Belanda, guna menjamin kemerdekaan negara dan untuk memberikan dukungan kepada kaum buruh dan tani, khususnya untuk merealisasi reformasi agraria. Tahun 1951, D.N. Aidit yang baru berusia 30 tahun lebih menjadi pemimpin PKI. Ini menjadi awal babak baru kebangkitan partai ini kembali.

Periode III (Pemberontakan PKI 1965)

Meski sudah berkali-kali ditumpas dan diberangus, bahkan dikejar sampai ke akar-akarnya, tetapi organisasi komunis ini masih terus berkembang secara diam-diam. Arnold C. Brackman dalam bukunya “*Indonesia Communism*” menyatakan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun saja (tahun 1952 – 1962) jumlah anggota-anggota PKI menanjak dari 7.910 orang sampai 2.000.000, yang berarti bahwa PKI adalah partai Komunis yang terbesar di negara-negara non-Komunis di seluruh dunia. PKI pada tahun 1962 telah mempunyai 262 cabang, di tiap pulau mempunyai sarang “sel-sel” yang mempropagandakan tujuan dan *mythos* Komunisme. PKI juga berhasil membentuk front-front, yang mempunyai anggota sejumlah 10.000.000 orang, termasuk 4.000.000

¹¹⁵¹ Rosihan Anwar, “Peta bumi politik sekarang”, *Kompas*, 18 September 1968.

¹¹⁵² *Kompas*, 11 Juni 1973.

BTI (Barisan Tani Indonesia). Di tiap-tiap jawatan dan instansi pemerintah diinfiltrir oleh kader PKI yang sudah dilatih baik dalam negeri, di Uni Sovyet, maupun di Cina Komunis. Dari Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta, disebarkan kader-kader inti ke seluruh pelosok. Aidit lebih beruntung dari Muso, karena gerakannya dilegalisir oleh Ir. Soekarno, dengan penempatan orang-orangnya di berbagai instansi pemerintah berdasarkan konsepsi Nasakom. Dengan menggembar-gemborkan "*revolusi gemilang di Cuba*" yang dikatakan memberi pelajaran dan pengalaman yang patut ditiru oleh bangsa Indonesia, indoktrinasi dipaksakan kepada pejabat-pejabat dan rakyat. Tetapi Aidit menyadari bahwa musuhnya yang paling kuat ialah Angkatan Perang Indonesia, terutama Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1959, dalam kongres ke VI Partai Komunis, ia menyerang Jenderal Nasution secara tidak terang-terangan dengan mengatakan antara lain, bahwa untuk membentuk apa yang dinamakannya "*Pemerintah nasional, demokratis dan merdeka*" maka perlu digulingkan kekuasaan militer yang "reaksioner dan kejam" yang hanya "berbakti pada imperialisme Amerika Serikat. " Suatu fitnah yang sangat keji dan kotor ! Jadi mula-mula Aidit mengikuti taktik-taktik yang telah digunakan oleh Mao Tse Tung dengan kombinasi taktik "koeksistensi secara damai" Uni Sovyet. Bukankah Mao sebelum menggulingkan pemerintah nasionalis Chiang Kai Shek menggunakan petani-petani di desa-desa yang masih sebahagian besar buta huruf dengan janji "tanah bagi petani kecil?" Janji ini menjalar sampai ke pelosok-pelosok desa dan lekas sekali merangsang petani-petani kecil terutama di pulau Jawa yang padat penduduknya. Tetapi di dalam, Aidit menggunakan taktik "Koeksistensi secara damai" dengan partai-partai yang ada dan Soekarno, yang hendak memaksakan kabinet berkaki empat dan Nasa-komisasi semua instansi pemerintah sipil dan militer. Angkatan Darat menentang Nasakomisasi Angkatan Perang. Untuk mencapai strateginya yaitu mendirikan kekuasaan mutlak di bawah pimpinan PKI yang sejak tahun 1950 dikomandokan dari Moskow sesuai dengan pola komunitas-internasional. Untuk merebut kekuasaan di negara-negara baru merdeka sesudah Perang Dunia II dengan mengombar-ngombarkan *chauvinisme* yang berlebih-lebihan dan ke dalam mengadu-dombakan golongan rakyat dan partai-partai politik. Aidit sangat beruntung karena Indonesia satu-satunya negara non-komunis di dunia ini yang mempunyai Presiden yang melindungi Partai Komunis. Dalam waktu yang singkat jumlah anggota-anggota PKI termasuk yang terbesar di seluruh dunia, bahkan nomor tiga sesudah Uni Sovyet dan RRC. Infiltrasi dipergiat di mana-mana. Pembentukan Universitas-universitas Swasta, Akademi-akademi tempat penempatan marxist-marxist-atheis dipergiat. Indoktrinasi paksaan diadakan sampai ke pelosok-pelosok dimana kader-kader revolusi (yang mungkin tidak menyadari bahaya komunisme) dan yang telah tamat dipandang paling "revolusioner". Pada tahun 1960 dalam wawancaranya, Aidit terus-terang memuji titik Krushev "koeksistensi secara damai" yang katanya dipraktekkan oleh Cuba di Indonesia. Pada tahun itu, Aidit mengetahui, bahwa sebenarnya Ir. Soekarno tidak menghendaki PKI merebut kekuasaan. Soekarno tak mau kalau ada orang yang lebih berkuasa dari padanya, karena itu ia pelihara keseimbangan kekuatan antara dua kekuatan besar yang tak dapat diper-temukan, yaitu Tentara dan PKI. Aidit menggunakan krisis ekonomi yang timbul karena konfrontasi dengan Belanda mengenai Irian Barat. Pada tahun 1962 inflasi melonjak naik bukan terutama karena konfrontasi, tetapi karena Cina-cina Komunis yang digerakkan untuk menambah kebobrokan ekonomi yang mendorong merajalelanya korupsi dan kebobrokan moral. Cina-cina komunis yang menguasai

perekono-mian Indonesia yang berpusat di Pintu Kecil, Jakarta memper-hebat penyeludupan dan manipulasi dengan bantuan petua-lang-petualang ekonomi bangsa Indonesia, terutama yang berketurunan asing. Aidit sejak semula membela Cina-cina, terbukti pada saat PP 10 dijalankan, ia katakan bahwa peraturan itu tidak sesuai dengan Manipol dan dalam suatu wawancara pada tahun 1960, ia antara lain menyatakan bahwa PKI selalu memperjuangkan supaya ekonomi Indonesia harus berada di tangan bangsa Indonesia, tetapi dimaju-kannya alasan bahwa pengusiran cina-cina dari desa-desa merugikan perekonomian kita (PKI). Pernyataan ini serba kontradiksi, yang sesuai dengan pemikiran dialektika marx. “Saya seorang desa – saya mempunyai dua butir telur – kepada siapa saya menjualnya? Orang Tionghoa! Dan jika tidak ada orang Tionghoa saya tak dapat menjual telur saya..... Orang-orang Tionghoa membantu kita, demikian Aidit. Kalkulasi Aidit tepat. Cina-cina harus dilindungi, karena merekalah yang membiayai subversi PKI dan sebagai alat ampuh untuk mengkoar kacirkan perekonomian Indonesia, membobrokan moral petugas-petugas negara.

Sebagaimana umumnya pemimpin-pemimpin Komunis menderita penyakit dikejar-kejar bayangan sendiri yang selalu merasa ketakutan, Aidit menyatakan pada Kongres VI PKI, bahwa “walaupun PRRI-Permesta sudah digagalkan,” pertualang-pertualang politikus reaksioner “masih cukup banyak di negara kita, dan Hatta masih tetap ada yang dapat “menenggelamkan “bangsa Indonesia dengan jalan mem-bentuk kabinet “reaksioner atau menyusun “kediktatoran militer” atau kediktatoran seorang”. Dalam kata-kata Aidit ini, turut diserang secara tidak terang-terangan perwira-perwira Angkatan Darat. (Jenderal Nasution, Jendral Ahmad Yani almarhum, dan lain-lain).

Brackman berkesimpulan, bahwa membubarkan PKI pada waktu itu (tahun 1962) sudah kasip, seharusnya PKI dibu-barkan antara tahun-tahun 1948 sampai 1952. Membu-barkannya akan justeru berbahaya sekali, karena mereka akan bergerak di bawah tanah. Anggota-anggotanya sudah cukup banyak jumlah dan jaringan sel-selnya sudah teratur rapi. Tambahan lagi Cina-cina Komunis yang memegang pun-cak kekuasaan ekonomi membantu pula mereka dan aparaturnya yang sudah korup dan telah didemoralisir karena kekurangan jaminan akibat politik “ pemiskinan “ yang dija-lankan oleh PKI mudah diperalat.

Kemudian Gerakan organisasi PKI mencapai puncaknya hari Pada hari kamis malam tanggal 30 September 1965, sekelompok pasukan yang terdiri dari berbagai kesatuan Angkatan Darat bergerak menuju kediaman 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Hanya satu tujuan mereka, membawa ke-tujuh orang jenderal tersebut hidup atau mati ke hadapan Presiden Soekarno. Pada kenyataannya, mereka yang diculik tak pernah dihadapkan kepada Soekarno. Dalam aksinya, gerakan itu hanya berhasil menculik 6 jenderal saja. Keenam jenderal tersebut ialah Letjen. Ahmad Yani, Mayjen. Suprpto, Mayjen. S.Parman, Mayjen. Haryono M.T., Brigjen. D.I Pan-djaitan, Brigjen. Sutoyo Siswomihardjo dan Lettu. Piere Tendean ajudan Jenderal Nasution. Nasution sendiri berhasil meloloskan diri dengan melompat ke rumah Duta Besar Irak yang terletak persis disebelahnya.

Gerakan ini dianggap sebagai *coup d’etat* yang bertujuan mengganti falsafah Negara dengan doktrin Negara komunis. Untungnya kejadian ini dapat ditanggulangi oleh TNI dan unsur-unsurnya yang loyal terhadap bangsa dan Negara Indonesia.

Setelah berhasil diantisipasi, gerakan PKI mendapat serangan dari berbagai pihak. Baik di ibukota maupun daerah-daerah, kampanye pengganyangan PKI diwujudkan dengan tindakan penculikan dan pembunuhan secara massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Semua anggota organisasi massa yang disinyalir memiliki hubungan dengan PKI pun tak luput mengalami hal serupa. Diperkirakan hampir setengah juta jiwa yang terlibat dalam PKI maupun ormas-ormasnya diberangus, *discreening*, atau dicituk.

Kini, pemberontakan PKI atau organisasi komunis tak lebih dari sebuah *lulabye* pengantar tidur yang merdu bagi anak-cucu kita. Tapi bagaimanapun, peristiwa-peristiwa tidak bisa dienyahkan begitu saja dari catatan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Sejarah berulang. Ini terbukti dengan hidup dan matinya organisasi ini yang bagai jamur di musim hujan. Setelah dihabisi pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda 1926, gerakan ini muncul lagi tahun 1948 dan kembali ditumpas habis. Terakhir 1965 organisasi ini melambung hingga anggotanya mencapai jutaan orang di Indonesia. Oleh sebab itu, meski saat ini gerakan ini terlihat sedang “tidur”, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa partai atau organisasi komunis Indonesia suatu saat akan muncul kembali.***



BAB 9

PENUTUP

PERISTIWA gerakan 30 September lebih dari empat dekade lalu masih meninggalkan setumpuk tanda tanya dan “pe-er” bagi pemerintah Indonesia. Pemberontakan yang dianggap didalangi oleh PKI itu terjadi di Jakarta, tetapi dampaknya merata di seluruh Indonesia. Setelah G 30 S PKI ditumpas, sama halnya dengan apa yang terjadi di Jakarta, sentimen anti-PKI juga tampak secara jelas di daerah-daerah, seperti Aceh, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bahkan, berbeda dengan apa yang terjadi di ibu kota, sentimen anti-PKI di daerah-daerah tidak hanya ditandai oleh adanya aksi-aksi demonstrasi, tetapi lebih dari itu diwarnai pula oleh banyaknya aksi pembantaian terhadap mereka yang diindikasikan menjadi anggota atau simpatisan PKI. Begitu mengerikannya aksi-aksi pembantaian tersebut. Tidaklah mengherankan kalau Kolonel Sarwo Edhi Wibowo ketika berada di Solo merasa perlu untuk mengingatkan rakyat dengan mengatakan, "Kita tidak boleh menjawab teror dengan teror karena Alquran sendiri memperingatkan kita untuk tidak melampaui batas. Kita semua adalah manusia yang percaya kepada Tuhan, perikemanusiaan, dan kelima sila (Pancasila). Oleh sebab itu, tidaklah baik jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan."

Diperkirakan 500.000 sampai 2 juta jiwa menjadi korban dalam genosida penumpasan gerakan 30 September PKI. Sekitar 175.000 jiwa rakyat melayang dalam peristiwa Pembantaian PKI di Aceh. “Sepanjang sejarahnya manusia telah membuktikan

diri sebagai produser penderitaan yang ulung dan konsumennya atau objeknya adalah manusia juga “, begitu Profesor Teuku Jacob menyimpulkan kekejaman yang telah diciptakan oleh manusia terhadap sesamanya. Peristiwa pembantaian PKI di Aceh adalah sebagian kecil dari kisah pembantaian kemanusiaan yang berantai di seluruh Indonesia dari tahun 1965 hingga 1967, untuk menaikkan sebuah rezim penguasa baru. Sebuah rezim naik ke tahta kekuasaannya dengan melewati tangga kekejaman dan kekerasan yang luar biasa (*holocaust*) untuk mencapai ke puncak ‘kestabilan politik’ dan anak tangganya adalah mayat-mayat perempuan, tengkorak-tengkorak laki-laki dan tulang-belulang anak-anak kecil yang nyawanya hilang dalam pembantaian mengerikan sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini.

Profesor Teuku Jacob, seorang antropolog ragawi dari Universitas Gadjah Mada, mendaftar ulah kekejaman tersebut dengan kata-kata yang cukup mencengangkan. “Penyiksaan dan penganiyaan tahanan dan tawanan menunjukkan kebengisan yang tak terbayangkan, mulai dari mencambuk, mencabut kuku, menjepit ibu jari, melilit tubuh, membakar bagian badan, menyiram cairan panas, menjepit daging dengan jepitan membara, memotong urat, mengebiri, membuang ke hutan, gurun dan pulau, memperbudak, memenggal kepala, menggantung, melempar dari tempat tinggi, mencekik, membenamkan, melontari dengan batu sampai mati, menyalip, mengubur hidup-hidup, mencincang, mencurahkan cairan ke dalam mulut, sampai membunuh atau memperkosa anggota keluarganya di depan mata, menjemur, tidak memberi makan, menyeret dengan kuda, membakar dalam unggun api, dan sebagainya..... sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah terhadap rakyatnya sendiri....”¹

Begitu sulit untuk dipercaya bahwa ulah kekejaman semacam itu hampir seluruhnya dilakukan oleh rejim Orde Baru terhadap musuh politik mereka atas nama suatu gagasan yang begitu tinggi dan mulia, yakni Pancasila! Malahan rejim ini masih menggenapi khasanah penyiksaan dan pembunuhan dengan penemuan baru mereka: memasukkan tahanan hidup-hidup ke dalam leweng atau sumur alam yang amat dalam, memasukkan kedalam kapal bobrok dan menenggelamkannya, menenggelamkan hidup-hidup tahanan dengan beban besi atau batu, menyiram gua dan ruba tempat persembunyian dengan bensin dan membakarnya serta melemparkan alat peledak, menyetrom kemaluan laki perempuan ketika mereka dipaksa bersetubuh, menancapkan bambu runcing ke dalam vagina, suatu tindakan keji yang sulit diterima akal sehat. Tidak ada akal normal masyarakat beradab yang mampu menerima kenyataan ini dengan tanggapan biasa-biasa saja. Dan hebatnya rejim ini berusaha keras untuk menghapusnya dari memori orang banyak dengan segala macam cara termasuk memalsu sejarah dan menggantinya dengan memori rekayasa, Pancasila sakti dengan mengutal sekian juta nyawa.

Pembantaian PKI di Aceh adalah sebuah catatan sejarah yang paling suram, merinding bulu roma mendengar jeritan dan tangisan mereka, meski lewat sumber penutur sekunder sekalipun. Kita hanya berpikir, jika mendengarnya saja kita sudah mengindik kengerian, bagaimanakah para pelaku pembantaian itu bisa dengan tenang dan dingin memenggal kepala mereka dan menusukkan bambu runcing ke dalam kemaluan perempuan-perempuan tak berdosa dan menjadi tertuduh? Sanggupkah mereka mendengarkan jerit pedih kesakitan mereka? Sudah kemanakah rasa kemanusiaan kita yang luhur dan selalu kita bangga-banggakan itu? Bagi orang Aceh, sederhana saja menjawabnya, *kemanusiaan awak nyan ka asee hue* (rasa kemanusiaan mereka sudah tidak ada, sudah dibawa lari oleh anjing).

Beberapa tahun terakhir ini, pentas politik Indonesia diwarnai oleh terjadinya berbagai perubahan besar, yang sebagian di antaranya bisa dikatakan merupakan perubahan yang sangat tidak terduga. Jiwa zaman (*zeit geist*) yang sebelumnya ditandai oleh kuatnya budaya politik parokial dan kaula diganti oleh zaman baru yang diwarnai oleh semakin berkembangnya budaya politik partisipan. Dalam kaitan itu, seiring dengan runtuhnya kekuasaan Soeharto, muncul tuntutan-tuntutan untuk merevisi sejarah Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sepak terjang Orba, termasuk sepak terjang para tokoh Orba. Adapun satu di antara kisah perjalanan sejarah Orba yang kini banyak digugat kembali adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G-30-S).

Pada dasarnya ada empat alasan yang membuat suatu peristiwa sejarah perlu ditelusuri kembali. Pertama, adanya ketidakpuasan terhadap sejarah yang ada. Kedua, adanya penemuan sumber baru. Ketiga, adanya reinterpretasi sumber lama. Keempat, adanya perubahan sikap dan pandangan terhadap masa lalu.

Berpijak pada keempat alasan tersebut, jelaslah bahwa pengkajian kembali suatu peristiwa sejarah akan selalu terbuka dan bisa dilakukan setiap saat bila kondisi-kondisi sebagaimana dikemukakan di atas muncul ke permukaan. Bila penelusuran kembali peristiwa sejarah dilakukan tidak hanya akan membuka peluang bagi lahirnya "versi" baru tentang sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga bisa jadi akan membuka peran sesungguhnya dari para aktor sejarah.

Berdasarkan deskripsi singkat perjalanan Gerakan 30 September 1965 sebagaimana yang telah dikenal luas selama ini, secara implisit terlihat adanya dua jenis fakta sejarah yang muncul ke permukaan. Pertama, fakta lunak (*soft fact*), yakni berupa fakta sejarah yang kebenarannya masih terbuka untuk diperdebatkan. Kedua, fakta keras (*hard fact*), yakni fakta sejarah yang kebenarannya sudah tidak diragukan lagi karena telah menjadi pengetahuan umum serta didukung oleh sumber-sumber primer, baik lisan, tulisan, maupun benda.

Peristiwa di seputar Gerakan 30 September yang telah merupakan fakta keras di antaranya adalah, pertama, realita bahwa Gerakan 30 September 1965 memang benar adanya pernah terjadi dalam pentas sejarah Indonesia. Dengan demikian, Gerakan 30 September ini bukanlah merupakan sebuah imajinasi sejarah sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi menyangkut ada tidaknya peristiwa tersebut. Kedua, kenyataan bahwa Gerakan 30 September 1965 merupakan sebuah gerakan yang didominasi oleh unsur-unsur militer yang ditujukan pada kelompok kekuatan militer lainnya. Ketiga, Gerakan 30 September 1965 merupakan sebuah gerakan pemberontakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Kenyataan bahwa Gerakan 30 September 1965 merupakan sebuah upaya kudeta tampak jelas dalam pengumuman radio yang dikeluarkan oleh Komando Gerakan 30 September melalui RRI, termasuk dokumen tertulis berupa Dekrit No. 1 tentang Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, Keputusan No. 1 tentang Susunan Dewan Revolusi Indonesia, dan Keputusan No. 2 tentang Penurunan dan Penaikan Pangkat.

Selanjutnya, bila dicermati lebih mendalam, jelas terdapat pula bagian-bagian dari peristiwa Gerakan 30 September ini yang masih terbuka untuk diperdebatkan. Yang paling mendasar adalah menyangkut dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965, sekaligus tentang benar tidaknya PKI sebagai dalang G-30-S. Permasalahan kedua, menyangkut jumlah korban aksi-aksi pembantaian di berbagai daerah.

Sejarah nasional versi Orba yang berkembang selama ini menempatkan PKI sebagai dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sementara di luar itu, telah lama berkembang versi-versi lain yang hampir kesemuanya kontradiktif dengan versi sejarah yang dikembangkan Orba. B.R.O.G. Anderson dan Ruth McVey dari Cornell University, Amerika Serikat, dalam tulisannya yang berjudul, *"A Preliminary Analysis of The October 1, 1965: Coup in Indonesia"*, serta Harold Crouch dalam bukunya, *"The Army and Politics In Indonesia"* (1978), secara tegas mengatakan bahwa Gerakan 30 September 1965 merupakan puncak dari konflik intern di dalam TNI-AD. Dengan kata lain, PKI hanyalah sekadar kambing hitam yang digunakan untuk mengaburkan dalang sebenarnya.

Pendapat lain yang lebih kontroversial dikembangkan Wertheim dalam bukunya, *"Whose Plot? New Light on The 1965 Events"* (1979). Menurut Wertheim, penempatan PKI sebagai dalang G-30-S sangat tidak beralasan. Kalaupun PKI terlibat di dalamnya, perannya bisa dipastikan sangatlah kecil dan hal itupun lebih merupakan sebuah rekayasa. Dengan demikian, menurut Wertheim, sulit untuk terbantahkan bahwa dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak lain adalah Mayjen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad. Untuk mendukung argumennya, Wertheim mengemukakan adanya dua buah kegagalan yang menyertai G-30-S.

Pertama, terbitnya koran "Harian Rakjat" edisi 2 Oktober 1965 yang memuat dukungan terhadap Gerakan 30 September 1965. Padahal menurut Wertheim pada tanggal tersebut secara jelas G-30-S telah gagal. Kedua, pada hari itu ada larangan untuk memuat berita tentang G-30-S.

Analisis Wertheim tentang keberadaan Soeharto sebagai dalang G-30-S ternyata mendapat dukungan dari beberapa cendekiawan lainnya. Bahkan, di samping argumen yang dikembangkan Wertheim, setidaknya masih ada dua hal lainnya yang memperkuat "teori" bahwa Soeharto dalang peristiwa G-30-S. Pertama, tidak masuknya Soeharto dalam daftar jenderal yang harus diamankan G-30-S, padahal saat itu ia memegang posisi strategis sebagai Pangkostrad. Kedua, Soeharto mengenal secara baik dan dikenal juga secara baik oleh Letkol Untung dan Kolonel Latief karena kedua perwira tersebut merupakan mantan anak buah Soeharto di Divisi Dipenogoro. Ketiga, pertemuan Soeharto dengan Kolonel Latief pada malam hari tanggal 30 September 1965 di RSPAD. Menurut para analis, maksud Latief menemui Soeharto pada malam tersebut tidak lain untuk melaporkan Gerakan 30 September. Sementara itu, Soeharto sendiri berargumen bahwa pertemuan tersebut lebih merupakan upaya Latief untuk memastikan bahwa Soeharto ada di rumah sakit dan tengah diliputi duka besar atas musibah yang menimpa puteranya.

Versi lain seputar G-30-S menempatkan Presiden Soekarno sebagai dalang peristiwa G-30-S. Analis yang berpendapat Soekarno sebagai dalangnya adalah John Hughes dalam bukunya, *"The End of Sukarno"* (1967). Menurut Hughes, tindakan Untung menggelar G-30-S telah mendapat restu Soekarno sehingga Soekarno tampak tidak memperlihatkan reaksi istimewa ketika Brigjen Soepardjo yang melaporkan terbunuhnya para jenderal TNI-AD. Pendapat yang sejalan dengan Hughes, dikemukakan pula oleh Anthonie CA Dake dalam bukunya, *"The Spirit of Red Banteng"* (1973). Menurut Dake, G-30-S terpaksa digelar Soekarno karena ia sudah tidak sabar dengan sikap oposan yang diperlihatkan dua perwira tinggi TNI-AD, yakni Jenderal A.H. Nasution dan Letjen Ahmad Yani. D.N. Aidit sendiri baru tahu perintah tersebut dalam rapat Politibiro tanggal 7 Agustus 1965. Mengingat ketergantungan PKI yang sangat

besar terhadap Soekarno, PKI mau tidak mau kemudian melibatkan diri di dalamnya.

Begitu beragamnya versi yang berbicara tentang dalang G-30-S serta jumlah korban pembantaian jelas menjadikan peristiwa G-30-S menjadi demikian menarik untuk dikaji kembali. Terbukanya akses untuk menggali sumber dari aktor-aktor sejarah yang selama ini menjadi "terpidana" hendaknya mampu disikapi secara arif sebagai peluang berharga untuk mengungkap peristiwa G-30-S secara transparan sehingga setiap pelaku sejarah dapat ditempatkan sesuai dengan peran sejarah yang dimainkannya. Sikap emosional dan membabi buta dalam upaya pengkajian atau penelusuran kembali peristiwa G-30-S bukan saja hanya akan menjadikan peristiwa tersebut tetap tidak jelas dan penuh rekayasa, tetapi juga akan membuat karya sejarah yang dilahirkan nanti tidak ada bedanya dengan karya sejarah yang dilahirkan pemerintah Orba, yakni sejarah yang sarat dengan kepentingan sesaat atau kepentingan subjektif para tokoh atau penguasa. Bila demikian, apa gunanya membaca dan mempelajari karya sejarah. Dalam kaitan itu pula, penggunaan istilah pelurusan sejarah hendaklah dihindari dan akan terasa lebih tepat bila yang digunakan adalah istilah penelusuran kembali peristiwa sejarah atau pengkajian kembali peristiwa sejarah.

Berpijak pada konsep pemikiran itu pula, jelaslah bahwa selama rekon-struksi sejarah didasarkan atas fakta-fakta sejarah tidak ada satu pun karya sejarah yang bisa dikategorikan sebagai sebuah manipulasi sejarah atau kebohongan sejarah. Oleh karena itu, perkembangan bangsa ini ke depan yang perlu dikembangkan dalam melahirkan kajian-kajian terhadap peristiwa sejarah adalah melakukan penjarakan (distansiasi) terhadap peristiwa sejarah yang tengah diteliti. Terlebih lagi terhadap kepentingan penguasa atau kepentingan pihak-pihak yang tengah memegang kekuasaan. Hal lain yang tidak kalah penting, bahwa sejarah sebagai hasil rekonstruksi membuka peluang yang seluas-luasnya bagi terjadinya perbedaan pendapat selama perbedaan pendapat tersebut didasarkan atas fakta dan interpretasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.***



DAMAI DI SERAMBI MEKAH

BAB 1

PENDAHULUAN

Dari AM menjadi GAM melalui proses dialog dan perundingan, diakhiri dengan MOU HELSINKI

BERAWAL dari perbedaan persepsi dan keyakinan, seolah-olah kolonial Belanda telah menyerahkan Aceh kepada Republik Indonesia, pada saat pengakuan kedaulatan RI di tahun 1949.

Yang terjadi adalah, Belanda menyatakan pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Menurut pemahaman Hasan Tiro, tidak seharusnya kedaulatan Indonesia yang diakui oleh Belanda tersebut, juga berlaku untuk Aceh. Karena menurut beliau, Aceh bukanlah bagian dari Indonesia, atau Aceh adalah “negara merdeka” sejak awal.

Jika kita tarik ke belakang, ditemuilah pita emasnya bahwa, Belanda sebagai bagian dari Sekutu, menyerah kepada Jepang di awal Perang Dunia II, yang ditandai dengan penyerangan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, Pearl Harbour, oleh Jepang, pada tahun 1942. Dengan demikian Jepang menguasai Aceh atau diundang/dijemput masuk ke Aceh, menggantikan penjajah Belanda. Kemudian Jepang menyerah kepada Sekutu menyusul Bom Atom atas Hiroshima dan Nagasaki, pada tahun 1945, yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Sementara Indonesia ketika itu sedang sangat serius memproses kemerdekaannya, dan kemudian berhasil diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh Soekarno-Hatta.

Belanda tidak rela, maunya dia, agar Jepang meyerahkan kem-bali Indonesia sebagai bekas jajahannya kepada Belanda, setelah Sekutu dinyatakan menang perang. Sementara Indonesia yang ke-merdekaannya “sudah hamil tua”, ingin segera memproklamasikan kemerdekaannya tersebut. Terjadilah gerakan perjuangan rakyat, untuk membela tanah air dari cengkeraman aneka rupa penjajah baik baru maupun lama. Gerakan perjuangan ini ingin mengusir se-tiap penjajah dari setiap jengkal wilayah Indonesia. Inilah yang dinamakan kemudian sebagai “perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan penegakan kedaulatan Republik Indonesia.”

Belanda bersikukuh hendak menguasai kembali Indonesia, ter-masuk Aceh, dan untuk itu dia memdompleng Sekutu yang ber-alasan masuk ke Indonesia untuk melucuti Jepang, yang sudah kalah perang. Terjadilah dua kali apa yang disebut sebagai Agresi (Aksi) Polisionil Sekutu/Belanda terhadap Indonesia. Dalam agresi-agresi tersebut, seluruh wilayah Aceh tidak terjamah kembali oleh Belanda, kecuali Sabang/Pulau Weh. Setelah capek berperang dan banyak menelan korban, serta atas tekanan masyarakat Inter-nasional, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1949, lebih dari 4 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pengertian Indonesia bagi Belanda adalah bekas jajahannya yang lazim disebut sebagai Hindia Belanda, di mana Aceh ada di dalamnya.

Dalam pengakuan kedaulatan Indonesia tersebutlah, terkesan, seolah-olah Belanda ikut menyerahkan Aceh kepada Indonesia.

Hasan Tiro dan pengikutnya, mengklaim bahwa Belanda tidak berhak menyerahkan Aceh kepada Indonesia, dengan dua alasan. *Pertama*, Belanda tidak mempunyai atau tidak memegang kedaulatan atas Aceh; dan *kedua*, Aceh memang bukan atau belum pernah menjadi bagian dari Indonesia. Aceh menurut beliau sejak semula merupakan suatu kerajaan yang merdeka dan berdaulat. “*Our fatherland Aceh, Sumatra, had always been a free and independent sovereign State since the world begun*”, kata Hasan Tiro dalam berbagai kesempatan, dan juga disebutkan dalam *Redeclaration of Aceh Sumatra*, December 4, 1976, yang artinya lebih kurang: “Aceh sejak semula adalah negara yang merdeka dan berdaulat”. Sedang-kan di pihak lain, Belanda menganggap Aceh adalah bagian dari Indonesia, mengingat daerah ini adalah bagian dari Hindia Belanda (Nederlands Indie), bersama seluruh Sumatra (kecuali Bengkulu), Jawa, Borneo, Celebes, pulau-pulau lainnya di kepulauan Nusa Tenggara, kepulauan Maluku dan Papua. Anthony Reid, dalam bukunya¹¹⁵³ menyebutkan bahwa, Gubernur Jendral Hindia Belanda Van Swieten mengumumkan pada tanggal 31 Januari 1874: “Aceh sebagai bagian dari Hindia Belanda atas dasar hak kemenangan perang”.¹¹⁵⁴ Belanda juga mungkin merasa berhak atas kedaulatan Aceh, sejak dari ditandatanganinya perjanjian oleh beberapa *ulee-balang*, yang menurut T. Ibrahim Alfian ada sebanyak 31 *uleebalang* menandatanganinya, sebagai Penguasa dan atas nama *keuleebalang*-annya. Perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa “ke *uleebalangan* mereka menjadi suatu bagian daripada Hindia Belanda, dan setia untuk selama-lamanya kepada Baginda Sri Maharaja Belanda dan kepada wakil Baginda Sri Paduka yang Dipertuan Besar Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan oleh karenanya Gubernur Jenderal memberikan kepada *uleebalang* tersebut jabatan peme-rintahan dalam *keuleebalangan* itu”.¹¹⁵⁵ Selain itu menurut Anthony Reid, ada tujuh *uleebalang* (di antara 12 *uleebalang* semuanya) bersama Habib Abd ar Rahman dan Teuku Muda Baet, yang “dekat” dengan mereka, yang berkuasa di sekitar Kutaraja dan Aceh Besar, menyerah pada tanggal 13

¹¹⁵³ Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, (terj.), 2005, hlm. 170.

¹¹⁵⁴ Reid, *ibid*.

¹¹⁵⁵ *Uleebalang* Pidie, Teuku Pakeh Dalam, misalnya, menandatangani pernyataan “mengaku takluk kepada Belanda, dan membenarkan Belanda mendirikan Benteng-nya di Pidie”, pada tanggal 28 Februari 1876.

Oktober 1878. Sedangkan *uleebalang* Pase, dan Idi mendukung ekspedisi Belanda pada bulan Nopember 1876. Lalu menyusul *uleebalang-uleebalang* lainnya seperti di Simpang Ulim, Tanjong Seumantok, Langsa, Teunom, Lhokkruet, dan sebagainya. Kemudian rangkaian pengakuan kepada Hindia Belanda tersebut diikuti dengan menyerahnya Sultan Aceh Tuanku Muhammad Daud, pada tanggal 20 Januari 1903, yang diterima oleh Van Heutsz. Dalam pernyataan beliau antara lain menyebutkan, bahwa: “kerajaan Aceh merupakan bagian dari Hindia Belanda dan oleh karena itu berada di bawah kedaulatan Belanda”. Selain itu, semenjak berseminya benih-benih perjuangan menuju Indonesia Merdeka, Aceh sebagai bagian dari Hindia Belanda, telah bersama bagian Indonesia lainnya, mengusir setiap penjajah dari bumi persada Nusantara. Bahkan Presiden Soekarno memberi gelar kepada Aceh sebagai “daerah modal bagi Republik Indonesia”. Hal tersebut disebutkan dalam pidatonya pada rapat raksasa tanggal 18 Juli, 1948, di Bireuen, yang kemudian diulangi lagi dalam pidatonya di Meulaboh, Aceh Barat, tanggal 4 September 1959. 1). Jika dibedah perihal predikat tersebut, ditemuilah alasannya antara lain adalah:

1. Sementara wilayah Indonesia lainnya, dikuasai dan dijajah Belanda sekitar 350 tahun, Aceh, terus berjuang dengan gigih sejak awal mula Belanda menyatakan perang kepada Aceh pada tahun 1873, sampai dengan datangnya Jepang pada tahun 1942. Belanda hanya dapat mengklaim telah menguasai Aceh secara formal, dalam bentuk pernyataan atau perjanjian pengakuan kedaulatan oleh Sultan dan atau beberapa *uleebalang*, namun secara material atau *de facto*, terjadi perlawanan dan peperangan rakyat melawan pendudukan Belanda yang terus-menerus dan di mana-mana.
2. Ketika kemerdekaan Indonesia masih bayi di tahun 1945, dan masih mengalami berbagai krisis dan kontroversi, 4 orang ulama Aceh, yakni, Tgk. H. Hasan Krueng Kale, Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. H. Jafar Lam Jabat, dan Tgk. Ahmad Hasballah Indrapuri, tampil atas nama ulama seluruh Aceh, menyatakan: “Segenap lapisan rakyat telah bersatu padu dengan patuh berdiri di belakang pemimpin Ir. Soekarno untuk menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan. Menurut keyakinan kami bahwa perjuangan ini (maksudnya: perjuangan kemerdekaan) adalah perjuangan suci yang disebut perang sabil. Maka percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah sebagai sam-bungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh Almarhum Tengku Chik Ditiro, dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Dan sebab itu bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu menyusun bahu mengangkat langkah maju kemuka untuk mengikut jejak perjuangan nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh akan segala perintah-perintah pemimpin kita untuk kesela-matan tanah air, agama, dan bangsa.”
3. Gubernur Militer Aceh Tgk. M. Daud Beureueh menolak undangan Dr. Tengku Mansur yang menamakan dirinya Wali Negara Sumatra Timur, untuk hadir dalam Mukhtar Sumatra yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 1949 selama 5 hari di Medan. Abu Beureueh, “mencium aroma lain” dari maksud penyelenggaraan Mukhtar tersebut, yakni untuk tujuan pendirian atau pengu-kuhan Negara Bagian Aceh, sebagai negara “boneka” Belanda yang di arsiteki oleh Van Mook, seorang ahli “pecah dan kuasai (*divide et impera*)”. Beliau secara tegas menolaknya untuk hadir dengan mengatakan, menurut Ibrahim Alfian dalam bukunya “Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah”, 1999, labih kurang sebagai berikut: “Maksud Belanda ialah hendak mendiktekan kepada Dr. Mansur, supaya menjalankan politik *divide et impera*-nya lagi, sebab itu kita menolak adanya Mukhtar Sumatra tersebut, dan kita sendiri telah siap sedia menanti segala ke-mungkinan yang bakal terjadi dari sikap penolakan kita ini. Kita yakin bahwa mereka yang telah menerima baik undangan Dr. Mansur tersebut, bukanlah orang Republikan, tetapi adalah kaki tangan dan budak kolonialisme Belanda yang selama ini sudah diberi makan roti. Kesetiaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Republik Indonesia bukan dibuat-buat serta diada-adakan,

tetapi kesetiaan yang tulus dan ikhlas yang keluar dari lubuk hati mur-ni dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah, negara per negara, tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi.”

5. Ketika Indonesia di awal kemerdekaan sedang berada di jurang kebangkrutan, terutama dari segi keuangan atau dana perjuangan, rakyat Aceh, terutama ibu-ibu Aceh secara beramai-ramai mengumpulkan perhiasannya seperti: emas, suasa, intan, dan berlian, untuk disumbangkan kepada Pemerintah, bagi menam-bah biaya perjuangan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Di lain pihak para pengusaha Aceh yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) urunan untuk membeli dua pesawat terbang, yang kemudian satu pesawat diserahkan kepada Pemerintah Pusat dengan nama *Seulawah-01*, sedangkan yang satu lagi tidak diketahui entah ke mana diselewengkan oleh pihak tertentu. Dari laba pengoperasian pesawat tersebut dijadikan tambahan dana perjuangan, dan kemudian pesawat itulah sebagai cikal-bakal dari maskapai Garuda Indonesian Airways. (GIA).
6. Ketika Belanda hendak menguasai kembali Indonesia dengan melakukan agresinya di mana Belanda menyusup dalam ketiak Sekutu, dan menyerang Medan-Sumut, secara bergelombang Aceh mengirimkan pasukan dan bala tentaranya untuk memper-tahankan RI (dalam hal ini Medan) di front pertempuran “Medan Area Selatan”. Memang, ketika itu Sekutu tidak sampai men-jamah Aceh, kecuali Sabang. Oleh kerennanya Aceh berperang melawan Belanda/Sekutu di Medan, dan bukan di Aceh.

Ke semua ceritera tersebut di atas, mengantarkan kita atau orang-orang yang bersedia menjadikan ceritera di atas sebagai refe-rensi, kepada kesimpulan bahwa Aceh adalah bagian integral dari Indonesia, betapun ada pihak-pihak yang mengingkarinya. Kondisi dan kenyataan ini juga rupanya di sadari dan dipahami betul oleh Belanda dan Jepang. Oleh karenanya menjadi masuk akal (make sense) pula jika setelah Jepang menyerah kerana bom atom Sekutu pada tahun 1945, Jepang tidak menyerahkan Indonesia kembali kepada Belanda dan atau kepada Sekutu, tetapi kepada Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Demikian pula ketika Belanda setelah dua kali gagal melakukan agresi dengan menumpang pada keberadaan Sekutu. Akhirnya, harus mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949.

Walaupun Hasan Tiro, mendalihkan gerakannya kepada kebe-naran sejarah Aceh yang murni, tetap saja Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian, bersikukuh mengatakan bahwa Gerakan Aceh Merdeka yang dipim-pin Hasan Tiro, 4 Desember 1976 merupakan tindakan untuk men-cari keuntungan pribadi. Sebab, lanjutnya, tingkah laku Hasan Tiro selama ini tidak hanya berkhianat terhadap negara RI, tetapi juga kepada pemimpin Aceh Tengku M. Daud Beureueh dan rakyat Aceh. Rakyat Aceh dibohongi, katanya, dengan menjual hasil bumi untuk kepentingannya sendiri. Alfian juga mengatakan bahwa yang menen-tang ajakan Hasan Tiro adalah Hasan Saleh, yang dalam bukunya Hasan Saleh menyatakan bahwa Gerakan Aceh Merdeka pimpinan Hasan Tiro merupakan upaya pembohongan terhadap Tengku M. Daud Beureueh dan rakyat Aceh untuk ketiga kalinya. Hasan Saleh juga mengatakan dalam bukunya tersebut bahwa: “Saudarakan tahu bahwa Hasan Tiro telah menipu Tengku Daud Beureueh dan rakyat Aceh sebanyak dua kali?. Ganjilkah apabila hendak menipu untuk ketiga kalinya”.¹¹⁵⁶ Namun, Hasan Tiro secara diametral membantah tudingan tersebut, dengan antara lain mengatakan: “tidaklah mung-kin rakyat mau diajak untuk memberontak, jika hanya untuk meme-nuhi kepentingan, atau atas keinginan satu atau segelintir orang saja”.

¹¹⁵⁶ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, 1992.

Hasan Tiro dengan pengetahuannya yang cukup dan kepiawaiannya dalam mengorganisir orang-orang, mampu meyakinkan bebe-rapa kalangan terutama para orang muda baik dari Universitas Sumatra Utara (USU), maupun non-USU Medan, Unsyiah dan sebagainya. Mereka antara lain adalah: Dr. Muchtar Yahya Hasbi, Dr. Husaini Hasan, Dr. Zaini Abdullah, Dr. Zubir Mahmud, Marzuki Mahmud, Ir. Asnawi, Amir Ishak, Ilyas Nurdin, Dailami, Munzir, Hasbi Abdullah, Nurdin Abdurrahman, dan juga dari berbagai Perguruan Tinggi dan kalangan lain baik di Aceh maupun di luar Aceh.

Tidak begitu jelas kapan persisnya Hasan Tiro bersama teman-teman beliau (atau sendiri?) kemudian membentuk “Aceh-Sumatra National Liberation Front”, disingkat ASNLF, kecuali yang kita ketahui adalah redeklarasi dari “The Independence of Aceh Sumatra” di mana Hasan Tiro menyatakan dirinya sebagai Chairman, National Liberation Front of Aceh Sumatra, and Head of State”. Abu Jihad mengatakan dalam bukunya “Hasan Tiro dan Pergolakan Aceh” ANSLF dibentuk pada tanggal 29 Nopember 1976. Namun, menurut catatan Hasan Tiro¹¹⁵⁷, pada tanggal tersebut, kegiatan beliau dan teman-temannya adalah memindahkan Markas Besarnya dari Pantan Weng ke daerah Tiro. Memang ada dikatakan oleh beliau sebagai berikut: “By November 29, 1976, thirty days after may landing, our adherents have become large enough and the formal Organization of the National Liberation Front of Aceh Sumatra has become a reality”. Penulisan ASNLF pun, yang dikutip baik dalam bukunya Abu Jihad¹¹⁵⁸ maupun bukunya Al Chaidar¹¹⁵⁹, ternyata dalam catatan harian Hasan Tiro disebut sebagai NLFAS, yakni singkatan dari National Liberation Front of Aceh Sumatra. Namun, kedua singkatan (*abriviation*) tersebut sesungguhnya mewakili substansi yang sama. Gerakan ini menyatakan akan berjuang untuk kemerdekaan dari apa yang mereka sebut sebagai neokolonial Indonesia-Jawa. Gerakan ini menggunakan tema pokok, tuntutan keadilan, anti diskriminasi, dan anti eksploitasi kekayaan alam Aceh oleh dan untuk pihak lain, serta isu kesejahteraan atau perbaikan hidup rakyat. Oleh karenanya relatif cepat mendapat perhatian dan kemudian simpati rakyat. Sedangkan di lain pihak, Pemerintah terutama aparat Keamanan melebelkan gerakan Hasan Tiro ini sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) atau Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT), dan kemudian sekitar awal tahun 2001, menamakannya sebagai Gerakan Sipil Bersenjata Aceh (GSBA). Barulah pada atau sejak tanggal 11 April 2001, melalui Konsideran Inpres No.4 tahun 2001, gerakan Hasan Tiro ini disebut secara resmi sebagai Gerakan Separatis Bersenjata. Gerakan ini selain disambut oleh beberapa intelektual muda Aceh, juga menarik perhatian dan mendapat dukungan di kalangan sebagian masyarakat di akar rumput. Rakyat Aceh lebih populer mengenalnya dan lebih lancar menyebut gerakan ini sebagai “Aceh Merdeka (AM)”. Merasakan kenyataan seperti itu, telah memberikan semangat dan kebulatan tekad bagi Hasan Tiro dan pengikutnya, untuk mendeklarasikan Kemerdekaan bagi Aceh-Sumatra pada tanggal 4 Desember 1976. Sejak itulah orang-orang GAM selalu memperingati tanggal 4 Desember sebagai hari Ulang Tahun GAM.

Secara perlahan-lahan tetapi pasti gerakan ini meluas, merambat baik dalam dimensi kalangan (*strata*) dan kelompok masyarakat maupun dalam dimensi kewilayahan. Secara segmenter, pengaruh AM telah merasuk ke hampir semua lapisan masyarakat, termasuk pegawai negeri dan bahkan para oknum beberapa aparat keamanan. Pendukung atau simpatisan AM mulanya adalah mereka yang

¹¹⁵⁷ Hasan Tiro, *The Price of Freedom (The Unfinished Diary)*.

¹¹⁵⁸ Abu Jihad, *Hasan Tiro dan Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Titian Ilmu Insani, 2000).

¹¹⁵⁹ Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 1999).

menggandrungi keadilan, perubahan dan perbaikan, serta berasumsi di sana akan ada sesuatu yang mereka harapkan. Salah satu penyebabnya adalah adanya janji pimpinan AM, bahwa kalau masuk GAM, tidak usah bekerja pun akan dapat gaji. Hasan Tiro menuliskan dalam bukunya, yakni: menurut Edmund Burke yang mengutip ucapan ahli negara Perancis yang mengatakan: “Belum pernah rakyat dari suatu negara memberontak oleh karena pemerintahnya lemah dan kocar-kacir. Bagi rakyat, yang telah menggerakkan mereka memberontak bukanlah keinginan buat menyerang, tetapi kehilangan kesabaran buat menderita”. Dan Edouard Laboulaye menurut beliau, pernah mengatakan bahwa: “pemberontakan adalah usaha terakhir rakyat yang hak-haknya sudah dirampas oleh penindasan.”¹¹⁶⁰

Selain itu, sebagian dari orang-orang yang mempunyai hubungan historis dan tradisional serta kaitan emosional dengan DI/TII, juga merupakan kelompok yang potensial menjadi pendukung AM. Sedangkan pada tahapan perkembangan berikutnya, orang-orang atau keluarga yang teraniaya dan terzalimi oleh kekerasan dan kekejaman Aparat Keamanan, adalah juga pendukung potensial AM, dan bahkan ada yang terang-terang menjadi anggota AM hanya untuk balas dendam, walaupun dia tadinya bukan AM.

Namun, ada hal yang cukup menarik untuk diamati, jika dibandingkan dengan peristiwa DI/TII, maka pendukung terhadap AM dapat dikatakan lebih merata. Jika kita sepakat dengan Snouck Horgronye dan juga diperkuat oleh pendapat Nazaruddin Syamsuddin, dalam bukunya “Revolusi di Serambi Mekkah”, (1999), yang membedakan elite Aceh menjadi 3 kelompok besar yakni ulama, kalangan sultana dan kalangan *uleebalang*, maka DI/TII hampir dapat dikatakan tidak didukung oleh kalangan *uleelang*, kecuali satu dua orang. Di samping itu, DI/TII juga tidak didukung oleh kalangan ulama Perti yang sebagian besar mendiami daerah pantai Barat/ Selatan (yang menghadap Lautan Hindia), serta ulama dayah, yang umumnya alumni Pesantren Darussalam Labuhan Haji di bawah Pimpinan Tengku H. Muda Wali, sebagaimana dikatakan oleh Abu Adnan Bakongan dan Buya Zamzami Syam, Singkil. Sedangkan AM, walaupun keseluruhan pendukungnya secara kuantitatif relatif lebih kecil dari DI/TII, namun dapat dikatakan lebih merata di kalangan semua kelompok dan wilayah Aceh. Dengan nama gerakan seperti itu, jelaslah secara harfiah bahwa AM atau ASNLF bukanlah gerakan yang berideologikan agama (baca: Islam) sebagaimana DI/TII, tetapi lebih sebagai gerakan nasionalis yang sekuler yang berjuang untuk kemerdekaan. Karena sifat sekulernya itulah, makanya para ulama tidaklah secara *unblock* dan serta merta mendukungnya, sebagaimana DI/TII, walaupun ada juga beberapa ulama atau pimpinan pesantren yang diketahui umum, adalah orang-orang AM. Bahkan menurut Richard Barber, perjuangan AM yang sekuler tersebut tidaklah menyenangkan atau memuaskan bagi para ulama. “*Whilst sentiment in Aceh were sympathetic to the cause, this did not translate to strong active participation, primarily because the relatively secular nature of the independent state proposed by GAM did not satisfy the Islamic objectives of the ulama*”.¹¹⁶¹

Ada beberapa issue atau berita “miring” yang terdengar pada awal mula munculnya A.M. dan ketika maraknya GAM, antara lain

1. Hasan Tiro ingin mendirikan Negara Aceh Merdeka yang merupakan bagian dari Commonwealth Inggris.).
2. Tgk. H.M. Daud Beureueh, mendukung perjuangan Hasan Tiro, dengan motivasi untuk menjadikan Aceh sebagai bagian dari Negara Bagian Kelantan Malaysia.

¹¹⁶⁰ Hasan Tiro, *Demokrasi untuk Indonesia*, 1958.

¹¹⁶¹ Richard Barber, *Aceh: The Untold Story*, 2000.

3. Hasan Tiro akan mendirikan negara Aceh yang Merdeka berbentuk Kerajaan (absolut monarki) dengan mengangkat dirinya sebagai Raja Aceh, dan putera mahkotanya adalah Karim bin Hasan Tiro.
4. Akibat ketidak sepakatan soal bentuk negara tersebut dan ideologi yang akan diterapkan, maka GAM telah terpecah menjadi dua faksi; yang pertama disebut sebagai GAM, dipimpin oleh Malik Mahmud, di Stockholm; dan yang kedua disebut MP GAM (Majelis Pemerintahan GAM), dipimpin oleh Dr. Husaini Hasan, juga berada di Stockholm; serta kedua-duanya mengakui dan mendaulat Hasan Tiro sebagai Wali Negara.
5. Ada keterangan yang mengatakan bahwa sebab khusus sebagai pemicu munculnya ASNLF (Aceh-Sumatra National Liberation Front) yang kemudian menjadi Aceh Merdeka (AM), lalu menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), adalah rasa kecewa yang mendalam dari gagalnya Hasan Tiro mendapatkan konsesi untuk menjadi kontraktor di Mobil Oil, yang ketika itu sedang memulai eksploitasi gas (LNG) di Arun, Aceh Utara.

Perjalanan waktu bergerak terus, GAM semakin membesar, sementara orang-orang yang tadinya menganggap enteng atau anggap kecil (*under estimate*), mulai menyadari kenyataan bahwa senjata GAM telah lebih banyak, yang diawali dengan keberanian/kenekatan mereka merampas senjata milik Apkam RI, baik Polisi maupun tentara, dan mulai pula melakukan penghadangan, pencuculan dan penyerbuan secara terbuka. Usaha *fund rising* di kalangan masyarakat di desa dan kota di Aceh, semakin untensip dan merata, dengan dalih untuk membeli senjata. Sementara di kalangan TNI/Polri, menanggapi secara terbelah, ada yang ingin melakukan pendekatan kultural dan sosial-politik, yang ditentang habis-habisan oleh kalangan “garis keras” yang menginginkan AM atau GAM, ditumpas, dibasmi, diberantas, dan juga menggunakan istilah-istilah lainnya yang ganas dan “haus darah”, seolah-olah GAM adalah barang mati, begitu saja dengan mudah dapat dimusnahkan atau diberantas.

Adalah Presiden Habibie awal mulanya yang berupaya keras untuk merubah sikap dan paradigma bangsa ini dalam melihat dan memposisikan GAM. Kata beliau, GAM atau pendukungnya adalah orang Aceh, jadi mereka adalah warga negara Indonesia. Orang Aceh adalah saudara kandung dari orang Indonesia lainnya, jadi tidak selayaknya dan tidak masuk akal kita memerangi mereka. GAM adalah persoalan dalam negeri kita, mari kita selesaikan secara internal, dengan persuasif secara kekeluargaan, dengan pendekatan budaya, dengan secara damai, adil, dan bermartabat serta ber-wawasan ke depan, kata beliau. Beliau pun telah mencabut DOM, membebaskan tapol/napol dan memberikan amnesti, dan membangun beberapa proyek vital dan strategis, serta mempersiapkan bantuan bagi para korban konflik, baik dalam bentuk uang, *natura (in kind)* maupun beasiswa. Beliau sendiri menyatakan dan menyediakan diri sebagai Bapak Angkat dari beberapa siswa Aceh korban Konflik. Beliau sangat memberi perhatian kepada pelanggaran HAM dan juga secara khusus yang berhubungan dengan adanya kuburan masaal, ataupun kuburan orang-orang yang terbunuh karena kekejaman dan kekerasan, selama DOM.

Upaya damai melalui dialog untuk menyelesaikan masalah Aceh diteruskan oleh Presiden Gus Dur, yang memprakarsai mengundang keikutsertaan HDC, sebagai mediator dan fasilitator dialog antara Pem RI dengan GAM. Dialog pun berlangsung di Jenewa, walaupun lebih banyak secara tidak langsung, yang akhirnya menghasilkan Jeda Kemanusiaan atau lengkapnya *Joint Understanding on Humanitarian Pause* ditandatangani pada 12 Mei 2001. Setelah berjalan beberapa waktu dan semua badan/istitusi yang berkenaan dengan “kesepahaman” tersebut telah dibentuk dan telah bekerja di Aceh, namun akhirnya, terpaksa berhenti. Hanya karena kedua pihak

kurang konsekuen dalam memenuhi tugas dan kewajibannya serta komitmen-komitmennya. Dalam Era Gus Dur, arus dan semangat Referendum bertiup kencang dan menggetarkan banyak kalangan. Gus Dur pun tidak mau ketinggalan dengan aspirasi tersebut, beliau lebih cenderung menyesuaikan diri, sehingga terkesan, lebih “memberi angin” kepada kemungkinan dilaksanakannya referendum. Hal itu tidak saya terkait dengan berbagai statement beliau yang memang susah ditebak, dan suka bukin kejutan, tetapi juga, ber-hubungan dengan sikap beliau sebelum menjadi Presiden ketika membuka selubung referendum di halaman Masjid Raya Baitul Rahman.

Kemudian Presiden Megawati, meneruskan upaya damai melalui dialog, dengan tetap mendapat bantuan atau fasilitasi dari HDC. Kemudian Menko Polkam yang waktu itu dijabat oleh SBY, membentuk *Desk Aceh*, di kantor Menko Polkam, di mana 6 orang masyarakat sipil Aceh di Jakarta diangkat sebagai penasehatnya. Walaupun diselingi dengan berbagai “operasi” dalam rangka melaksanakan beberapa Inpres, tantang “Langkah-langkah Kompre-hensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh”, akhirnya pembicaraan damai melalui dialog tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan “Cessation of Hostilities Agreement” (COHA). Yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002. COHA itu pun kemudian dapat disebut “gagal”, mengingat di ujung-ujungnya ternyata kedua pihak (entah siapa yang memulai), tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak kesepakatan tersebut. Akhirnya diberlakukanlah status Darurat Militer bagi Aceh selama setahun (2 tahapan) sejak 19 Mai 2003 s/d 19 Mai 2004, dan kemudian disusul dengan status Darurat Sipil, selama 6 bulan. Sejak saat Megawati pula, Menko Kesra Jusuf Kalla, mulai melirik soal penyelesaian masalah Aceh secara damai, setelah beliau sukses menangani konflik Maluku dan Poso, sehingga sering bertemu dengan penasihat *Desk Aceh*.

Terpilihnya SBY sebagai Presiden RI dan JK sebagai Wakil Presiden RI, selain sebagai kemenangan bagi pencinta demokrasi Indonesia, juga merupakan sesuatu harapan dari rakyat Aceh, karena kedua beliau, di mata orang Aceh adalah sebagai tokoh yang menggandrungi penyelesaian masalah Aceh secara damai, bukan melalui peperangan. Dengan dikomandani oleh JK, tentunya setahu dan seizin Presiden, terjadilah penjajakan dan kemudian mulailah perundingan generasi ketiga, yang di fasilitasi dan dimediasi oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, di Helsinki. Setelah melalui jalan yang berliku dan beronak/duri, sampailah pada kemungkinan penanda-tangan MoU, antara Pem Ri dan GAM, dengan dise-pakatnya rumusan berkenaan dengan beberapa substansi yang dianggap oleh Pem RI dan GAM selama ini sebagai pengganjal. Substansi-substansi krusial tersebut antara lain berkenaan dengan soal independence, soal *self-government*, soal *special autonomy*, soal mobilisasi dan decommissioning senjata GAM, soal relokasi TNI/ Polri non organik. Demikian pula substansi berkenaan dengan soal Partai lokal, dan pemilihan lokal, soal-soal yang berkenaan dengan per-setujuan DPRD/Pemerintahan Daerah, terhadap beberapa kebijakan pusat, beberapa hal dibidang ekonomi, dan sebagainya.

Akhirnya dengan kelapangan dada masing-masing dan dengan keinginan keras untuk menghentikan peperangan dan memulai damai, kedua pihak menandatangani naskah final dari MoU Helsinki, pada tanggal 15 Agustus 2005, tepat 7 bulan 20 hari setelah terjadinya bencana Gempa dan Tsunami di Aceh, dengan nama aslinya: “Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia, dan Gerakan Aceh Merdeka” (*Memorandum of Understanding between The Government of the Republic of Indonesia, and The Free Aceh Movement*). Penanda tangan tersebut disambut secara beragam di Aceh dan di berbagai kalangan Indonesia lainnya. Ada yang gembira dan bersyukur, serta menaruh banyak harapan, ada pula yang menyambutnya dengan pesimistis,

bahkan ada pula yang secara terang-terangan menentang-nya yang sesungguhnya sejak dalam proses perundingan pun mereka sudah menyuarakan ketidak setujuannya tersebut. Disadari bahwa masih banyak yang harus dikerjakan, antara lain: yang berkenaan dengan ketaatan masing-masing pihak terhadap komitmen yang telah dibuat dalam MoU, demikian pula yang berkenaan dengan reintegrasi baik GAM maupun masyarakat korban konflik, kedalam masyarakat, berikut dengan pencairan dana bantuan dan bantuan lainnya yang diberikan oleh pemerintah untuk memperlancar reintegrasi. Bagaimana pula proses rekonsiliasi di tengah-tengah masyarakat, adalah perkara yang sangat menentukan apakah damai di Aceh akan abadi atau hanya sementara. Kesemuanya sang waktulah yang menjadi saksi sejarah bagaimana juntrungan MoU Helsinki tersebut dalam pelaksana-naannya (*MoU in Action*) dan bagaimana wujud ke depannya. Apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang tertulis dalam MoU, dan harapan rakyat, atau tidak, akhirnya tingkah laku (*performance*) para pihak lah yang akan menentukan-nya. Oleh karenanya jangan berhenti berdoa dan berbuat. Semoga Allah Swt menerangi hati mereka.***



BAB 2

HASAN TIRO

*kembali ke Aceh dan Redeklarasi ASNLF
ka trep neujak, jinou ka neuwou
pue na nue puwou keu kamou lam kuta
ci neu peugah siat haba nyang mangat
nyang beuseulamat rakyat jeulata.*

ITULAH sesungguhnya harapan dan dambaan orang-orang dekat Hasan Tiro, ketika mendengar beliau telah kembali ke Aceh.

Menurut catatan harian Hasan Tiro¹¹⁶², beliau tiba kembali di pantai desa nelayan, Kuala Tari, Pasi Lhok, Pidie, Aceh, pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 1976, sekitar pukul 8.30 pagi. Beliau berlayar selama kurang dari 2 hari dua malam, mulai tanggal 28 Oktober 1976, pukul 2.00 siang, dari suatu pelabuhan yang tidak disebutkan secara pasti apa namanya, diduga mungkin terletak di Malaysia. Banyak orang ikut menjemput beliau di pantai tersebut, sedangkan Muhammad Daud Husen yang kemudian lebih populer sebagai Daud Paneuk yang dikenal sebagai orangnya Hasan Tiro yang paling setia, tidak ikut menjemput, beliau sedang bepergian ke Sigli.

Dari catatan yang dituliskan oleh Abu Jihad¹¹⁶³ dan tulisan Al Chaidar¹¹⁶⁴, terkesan adanya dua organisasi perjuangan untuk dijadikan alat memperjuangkan kemerdekaan bagi Aceh, walaupun tidak begitu jelas bagaimana hubungan dan integrasi yang satu ke dalam yang lainnya, yakni Aceh Sumatra Liberation Front (ASNLF), dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menurut Abu Jihad, Hasan Tiro kembali ke Aceh pada akhir tahun 1976. Beliau segera mengumpulkan teman-teman dan pengikut setianya untuk persiapan deklarasi

¹¹⁶² Hasan Tiro, *The Price of Freedom: The Unfinished Diary*, 1977.

¹¹⁶³ Abu Jihad, *Hasan Tiro dan Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Titian Ilmu Insani, 2000).

¹¹⁶⁴ Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 1999).

ASNLF (Aceh-Sumatra National Liberation Front). Ada sedikit perbedaan pendapat dalam menentukan tanggal dan hari deklarasi tersebut, namun akhirnya ditetapkan tanggal 4 Desember 1976. Mengenai tempat pengucapan Redeklarasi tersebut, menurut catatan harian Hasan Tiro¹¹⁶⁵, adalah di Bukit Cokan (Tjokkan Hill).

Setelah dirasakan cukup matang persiapannya, maka dikumandangkanlah deklarasi kembali ASNLF pada tanggal tersebut, yang menurut Abu Jihad dan Al Chaidar, yang ternyata cocok pula dengan catatan harian Hasan Tiro berbunyi sebagaimana terlampir.¹¹⁶⁶

REDECLARATION OF INDEPENDENCE
OF ACHEH-SUMATRA

Acheh, Sumatra, December 4, 1976

To the peoples of the world:

We, the peoples of Aceh, Sumatra, exercising our rights of self-determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien peoples of the island of Java.

Our fatherland Aceh, Sumatra had always been a free and independent sovereign State since the world begun. Holland was the first foreign power to attempt to colonialize us when it declare war against the sovereign State of Aceh, on March 26. 1873, and on the same day invaded our territory, aided by Javanese mercenaries. The aftermath of this invasion was duly recorded on the front pages of contemporary newspaper all over the world. The London Times on April 22, 1873 wrote: "A remarkable incident in modern colonial history is reported in East Indian Archipelago. A considerable of Europeans has been defeated and held in check by the army of native state – the state of Aceh. The Acehnese have gained a decisive victory. Their enemy is not only defeated, but compelled to withdraw". The New York Times on May 6th, 1873 wrote: A sanguinary battle has taken place in Aceh, a native Kingdom occupying the Northern portion of the island of Sumatra. The Dutch delivered a general assault and now we have details of the result. The attack was repulsed with great slaughter. The Dutch general was killed, and his army put to disastrous flight. It appear indeed to have been literally decimated" This event had attracted powerfull worldwide attention. President Ulysses S. Grant of the United State, issued his famous proclamation of impartial neutrality in this war between Holland and Aceh.

On Christmas day 1873,. The Dutch invaded Aceh for the second time, and thus begun what Harper's Magazine had called "A Hundred Years War of Today", one of the bloodiest and longest colonial war in human history, during which onehalf of our people have laid down of their lives defending our sovereignty State. It was being fought right up to the beginning of world war II. Eight immediate forefathers of the signer of this Declaration died in the battlefields of that long war, defending our sovereign nation, all as neccessive rulers and supreme commanders of the forces of the sovereign and independent State of Aceh, Sumatra.

However, when, after World War II, the Dutch East Indies, was supposed to have been liquidate, --an empire is not liquidated if its territorial integrity is preserved, -- our fatherland Aceh, Sumatra, was not return to us. Instead, our fatherland was turned over

by the Dutch to the Javanese – their ex mercenaries – by hasty flat of former colonial powers. The Javanese are alien and foreign people to us Acehnese, Sumatrans. We have no

¹¹⁶⁵ Hasan, *op.cit.*, hlm. 174.

¹¹⁶⁶ Al Chaidar, *op.cit.*

historic, political, cultural, economic or geographic relationship with them. When the fruits of Dutch conquests are preserved, intact, and then bequeathed, as it were, to the Javanese, the result is inevitable that the Javanese colonial empire would be established in place of that of the Dutch over our fatherland, Aceh, Sumatra. But, colonialism, either by white, Dutch, Europeans or by brown Javanese, Asians, is not acceptable to the people of Aceh, Sumatra.

This illegal transfer of sovereignty over our fatherland by old, Dutch colonialists to the new, Javanese colonialists, was done in the most appalling political fraud of the century: the Dutch colonialist was supposed to have turned over sovereignty over our fatherland to a “new nation” called “Indonesia”. But, “Indonesia” was a fraud: a cloak to cover up Javanese colonialism. Since the world began, there never was a people,

much less a nation, in our part of the world by that name.. no such people existed in the Malay Archipelago by definition of ethnology, philology, cultural anthropology, sociology and by any other scientific findings. “Indonesia” is merely a new label, in a totally foreign nomenclature, which has nothing to do with our own history, language, culture or interests; it was a new label considered useful by the Dutch to replace the despicable “Dutch East Indies”, in an attempt to unite administration of their ill-gotten, far-flung colonies, and the Javanese neo-colonialists knew its usefulness to gain fraudulent recognition from the unsuspecting world, ignorant of the history of the Malay-Archipelago. If Dutch colonialism was wrong, the Javanese colonialism which was squarely based on it cannot be right. The most fundamental principle of international law states: *Ex injuria jus non oritur*, -- Right cannot originate from wrong. !

The Javanese nevertheless are attempting to perpetuate colonialism which all the Western colonial powers had abandoned and the world had condemned. During these last thirty years the peoples of Aceh, Sumatra, have witnessed how our fatherland has been exploited and driven into ruinous conditions by the Javanese colonialists: they have stolen our properties; they have robbed us from our livelihood, they have abused the education of our children; they have exiled our leaders; they have put our people in chains of tyranny, poverty and neglect; the life expectancy of our people is 34 years and decreasing—compare this to the world’s standard of 70 years and is increasing ! While Aceh, Sumatra, has been producing a revenue of over 15 billion US dollars yearly for the Javanese neo-colonialists, which they used totally for the benefit of Java and the Javanese.

We the people of Aceh, Sumatra, would have no quarrel with the Javanese, if they had stayed in their own country, and if they had not tried to lord it over us. From now on, we intend to be the masters of our own house, the only way life is worth living, to make our own laws, as we see fit, to become the guarantor of our own freedom and independence, for which we are capable, to become equal with all the peoples of the world, as our forefathers had always been. In short to become sovereign in our fatherland. !

Our cause is just! Our land is endowed by the Almighty with plenty and bounty. We covet no foreign territory. We intend to be a worthy contributor to human welfare the world over. We extend the hands of friendship to all peoples and to all governments from the four corners of the earth.

In the name of the sovereign people of Aceh, Sumatra.

Tengku Hasan M. di Tiro

Chairman, National Liberation Front of Aceh, Sumatra dan Head of State,

Aceh, Sumatra, Desember 4, 1976.

Dari judulnya, jelas terbaca bahwa yang terjadi adalah “deklarasi kembali” (redeclaration) kemerdekaan Aceh Sumatra, dan bukan “deklarasi”. Hal itu adalah dapat

menegaskan, bahwa Hasan Tiro sangat konsisten dengan keyakinannya, bahwa Aceh sesungguhnya adalah negara merdeka sejak awal, oleh karenanya yang perlu dilakukan ada mendeklarasikan kembali kemerdekaan tersebut. Teks Redeklarasi tersebut, segera beredar di tengah-tengah masyarakat, dalam dua versi, yakni versi bahasa Inggris, yang umumnya beredar di kalangan orang-orang asing termasuk di kantor-kantor Perwakilan negara dan/ atau perusahaan asing baik di Aceh, Medan dan juga Jakarta, dan bahasa Aceh, umumnya beredar di Aceh, dan di kalangan masyarakat Aceh perantauan. Ada juga sebagian kecil beredar dalam bahasa Indonesia.

Garis besar isi dari redeklarasi tersebut antara lain adalah:

Paragraf I: Menyatakan bahwa rakyat Aceh akan menggunakan hak mereka untuk *self-determination*.

Paragraf II: Menyatakan bahwa Aceh adalah selalu sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat sejak semula. Kemudian datang Belanda yang berusaha untuk menjajah kami, dan menyatakan perang kepada kami pada tanggal 26 Maret 1873, yang kemudian menginvasi kami, yang dibantu oleh tentara Jawa.

Paragraf III: Pada hari Natal tahun 1873 Belanda menginvasi Aceh untuk kedua kalinya, dan perang 100 tahun dimulai, di mana lebih separuh penduduk Aceh tewas dalam peperangan tersebut.

Paragraf IV: Setelah berakhirnya Perang Dunia –II, harusnya Belanda telah dilikuidasi, tetapi nyatanya Aceh tidak kembali kepada kami, tetapi diserahkan kepada Jawa. Jawa adalah sesuatu yang lain dan orang asing bagi orang Aceh.

Paragraf V: Penyerahan yang tidak sah (illegal transfer) dari penjajah lama Belanda kepada penjajah baru Jawa. Belanda sebetulnya menyerahkannya kepada Indonesia, tetapi Indonesia sesungguhnya adalah negara baru yang palsu yang hanya untuk menutupi penjajah Jawa.

Paragraf VI: Jawa berusaha untuk menjajah semua wilayah yang telah ditinggalkan oleh penjajah Barat.

Paragraf VII: Kami orang Aceh tidak akan ada pertengkaran apa-apa dengan orang Jawa, jika mereka tinggal di negaranya sendiri.

Paragraf VIII: Yang kami inginkan adalah keadilan, tanah kami adalah rahmat Tuhan Yang Mahabesar, kami tidak akan mengganggu negara asing, kami mengharapkan pengakuan dari masyarakat dunia.

Redeklarasi asli tersebut memang dalam bahasa Inggris, yang beredar di kalangan perwakilan negara asing dan di kantorkantor orang asing, tetapi untuk kepentingan propaganda, juga dicetak dalam bahasa Aceh, dan beredar di kalangan masyarakat Aceh baik di Aceh maupun di luar Aceh. Secara terbatas juga beredar dalam bahasa Indonesia/bahasa Melayu. Siapa persisnya yang mengedarkan redeklarasi tersebut, tidak ada yang tahu secara pasti, tetapi, seorang petugas loper IPTR (Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Tanah Rencong), Medan bernama Dailami, mengakuinya bahwa dia juga ikut mengedarkannya terutama kepada beberapa orang Aceh di Medan, dan juga kepada beberapa kantor konsul negara asing atau perusahaan asing yang ada di Medan. Sedangkan di Banda Aceh juga beredar awal mulanya di kalangan mahasiswa, konon kabarnya diedarkan oleh beberapa mahasiswa Darussalam yang telah “ter-sentuh” sejak tahapan mula pertama, baik secara langsung maupun melalui teman-teman mereka yang ada di Medan

Selanjutnya kapan AM atau ASNLF berubah atau bermeta-morfose menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebagaimana populer disebut saat ini, kami tidak menemui catatan tentang waktu yang pasti. Catatan yang ada memang sedikit

meragukan yakni dari buku Al Chaidar dan buku Abu Jihad, yang berkenaan dengan susunan “Kabinet Pertama Negara Islam Aceh”, yang berbunyi sebagai berikut: “untuk segera berjalannya roda pemerintahan, dalam mengatasi masalah-masalah yang mendesak, setelah empat hari diproklamasikannya GAM, maka Kabinet Pertama Negara Islam Aceh disusun, pada tanggal 24 Mei 1977, di Gunung Halimon, Aceh Pidie. Sedangkan catatan harian Hasan Tiro¹¹⁶⁷, yang ditulis untuk (pada) tanggal 22 Oktober 1977, antara lain menyebutkan bahwa: Pembentukan Kabinet Aceh Merdeka adalah bersamaan waktunya dengan redeklarasi Kemerdekaan Aceh Merdeka, yakni tanggal 4 Desember 1976. Pelantikan dan pengambilan sumpah menteri-menteri kabinet dilakukan pada tanggal 30 Oktober 1977, persis setelah setahun Hasan Tiro berada di Aceh, di Kamp Lhok Nilam, di pedalaman Tiro. Komandan Kamp Lhok Nilam adalah Tgk Darul Kamal, kemanakan dari Hasan Tiro.

Sementara mengenai kabinetnya sendiri, juga terdapat beberapa perbedaan menurut sumber informasi yang berbeda¹¹⁶⁸, seperti berikut ini:

Mufti Empat: M.Daud Beureueh sama. tidak disebut.

Dewan Syura: Ilyas Leube, Ilyas Cot Plieng, sama tidak disebut. Hasbi Geudong, Ayah Sabi.

Wali Negara: Dr. Hasan Mohd.di Tiro sama sama.

Wkl. Wali Negara: Dr. Muchtar Y. Hasbi sama tidak ada wakil.

Menteri Dalam Negeri: Dr. Muchtar Y. Hasbi sama sama.

Menteri Luar Negeri: Dr. Hasan Tiro sama sama.

Wakil Menteri Luar Negeri: Dr. Muchtar Y Hasbi tidak ada sama.

Menteri Pertahanan. Pangab: Dr. Muchtar Y Hasbi Dr. Hasan di Tiro Dr. Hasan di Tiro.

Wkl. Menteri Pertahanan: tidak ada Dr. Muchtar Y. Hasbi sama.

Menteri Kehakiman: H.Ilyas Leube sama sama.

Menteri Sosial: Dr. Zubir Mahmud sama sama.

Menteri Kesehatan: Dr. Zaini Abdullah sama sama.

Menteri Pendidikan: Dr. Husaini Hasan sama tidak disebut.

Menteri Penerangan: Muhd Taher Husin sama sama.

Menteri Perhubungan: Amir Ishak, SH. sama sama.

Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Asnawi Ali sama sama.

Menteri Keuangan: Muhd Usman Lp.Awe sama sama.

Menteri Perdagangan: tidak disebut tidak disebut A.Rasyid Mahmud (di Singapura).

Menteri Negara, merangkap Wkl di PBB: tidak disebut tdk disebut Malik bin Mahmud.

Menteri Sekretaris Negara: Darul Kamal sama tidak disebut.

Setelah tersusunnya para menteri, disusun pula pejabat tinggi negara setingkat menteri, yang terdiri dari:

Kepala Staf Angkatan Bersenjata: Fauzi Hasbi Geudong sama tidak disebut

¹¹⁶⁷ Hasan, *op.cit.*, hlm. 173.

¹¹⁶⁸ Menurut Abu Jihad, Al Chaidar, dan Isa Sulaiman.

Kepala Pengawasan Keuangan Negara: Uzir Jaelani sama tidak disebut
Duta Kuasa Penuh/Duta Keliling: Malik Mahmud sama tidak disebut (di Singapura)
Panglima Pengawal Wali Negara: Daud Husen sama tidak disebut

Catatan:

1. Semua gelar Tengku (Tgk.), tidak dituliskan.
2. Jika tertulis “sama”, berarti sama dengan pendapat Abu Jihad.
3. Isa Sulaiman tidak menyebutkan tanggal dan tempat pengumuman kabinet tersebut.
4. Catatan Harian Hasan Tiro, menyebutkan bahwa Asnawi Ali adalah Menteri PU dan Industri, sementara Daud Husen, sebagai Kepala Staf AD.

Dari kalimat intro, (sumber Abu Jihad dan Al Chaidar), sebelum daftar para Menteri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kabinet Pertama tersebut disusun pada tanggal 24 Mei 1977, di Gunung Halimon, Pidie, sedangkan catatan harian Hasan Tiro, dan Isa Sulaiman, mengatakan pada hari yang sama dengan Redeklarasi Kemerdekaan Aceh, Merdeka, yakni tanggal 4 Desember 1976.
2. Kabinet tersebut adalah Kabinet Negara Islam Aceh; bukan kabinet GAM, atau bukan kabinet Republik Islam Aceh (RIA). Kalaupun ya, maka berarti Kabinet Pertama GAM sama dengan Kabinet Republik Negara Islam Aceh, walaupun Isa Sulaiman tidak mengatakannya demikian.
3. Tanggal 24 Mei 1977 tersebut adalah empat hari setelah diproklamasikannya GAM.
4. Jadi berarti: GAM diproklamasikan pada tanggal 20 Mei 1977.

Jadi dengan menggunakan kedua literatur tersebut (Abu Jihad dan Al Chaidar) sebagai referensi, maka jelaslah bahwa ASNLF atau kemudian disebut sebagai AM (Aceh Merdeka) lahir pada tanggal 4 Desember 1976, dan kemudian bermetamorfose atau berubah namanya dan meningkat menjadi GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada tanggal 20 Mei 1977. Namun, yang sering diperingati sebagai waktu atau tanggal kelahiran GAM adalah 4 Desember 1976.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa semua menteri tersebut dilantik dan diambil; sumpahnya pada tanggal 30 Oktober 1977 di Kamp Lhok Nilam. Bunyi sumpahnya adalah sebagaimana dituliskan oleh Hasan Tiro dalam catatan hariannya sebagai berikut:

“In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful, I swear:

- *To obey the Commandment of Allah and the Prophet Muhammad;*
- *To continue the struggle of Sultan Iskandar Muda and Tengku Tjhik Ditiro;*
- *To obey the Order of my Chief, the Wali Negara of Acheh Sumatra (the Head of State of Acheh Sumatra);*
- *To protect and to preserve the Constitution of the State of Acheh Sumatra.*

So Help me, God”

Dengan terjemahan bebas, dapatlah sumpah tersebut diring-kaskan sebagai berikut: menyatakan setia dan taat akan mengikuti, perintah Allah SWT, dan Nabi Muhammad SAW, meneruskan perjuangan Sultan Iskandar Muda, dan Tgk Chik Di

Tiro, patuh dan setia kepada Pimpinan yakni Wali Negara Aceh-Sumatra, dan melindungi/mempertahankan serta melestarikan UUD Negara Aceh.

Setelah para Menteri kabinet tersebut diambil sumpahnya satu demi satu oleh Menteri Kehakiman, Ilyas Leube, yang selain karena jabatannya, juga kebetulan beliau adalah menteri yang paling senior. Pengambilan sumpah para menteri tersebut disaksikan oleh Wali Negara, dan setelah itu, Ilyas Leube sendiri diambil sumpahnya oleh Wali Negara sendiri. Kemudian masing-masing menteri tersebut memberikan kata sambutan singkat, diawali oleh Ilyas Leube, disusul oleh Dr. Muchtar Y. Hasbi Menteri Dalam Negeri, merangkap Wakil Menteri Luar Negeri, dan seterusnya, yakni Dr. Zaini Abdullah, Dr. Zubir Mahmud, Tgk. Usman Lp.Awe, Tgk Asnawi Ali, Amir Ishak, dan terakhir Komandan Angkatan Darat, Daud Husen. Acara tersebut ditutup dengan doa bersama yang dibawakan oleh Tgk. Ilyas Leube.

Dengan kondisi awal seperti itu, GAM berkembang terus, antisipasi dari Pemerintah RI pun beraneka rupa, sementara waktu berjalan terus. Sesuatu hal yang patut dicatat adalah, banyak pihak ketika itu kurang yakin bahwa Gerakan Aceh Merdeka betul-betul sebagai gerakan yang ingin memisahkan diri Negara Republik Indonesia atau gerakan separatis. Akibatnya adalah, penangannya pun dari pihak Pemerintah RI tidaklah secara politis, tetapi lebih kepada soal keamanan. Padahal, bayi itu bertumbuh dan besar terus. Sementara itu ada berbagai tanggapan dari pihak luar negeri, atas keberadaan GAM dan atau adanya upaya untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Robert S. Gelbart, Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia misalnya, sebagaimana diberitakan oleh berbagai media massa, pada tanggal 13 Juni 1999, mengatakan antara lain: bahwa Amerika Serikat tidak mendukung kemerdekaan Aceh, karena tuntutan tersebut dinilainya tidak realistis. Dia juga mengatakan bahwa tidak satu negara pun di dunia yang mendukung kemerdekaan Aceh atau kepada GAM. Namun demikian kata beliau, saya telah bertemu dengan anggota komite dari pihak GAM, dan mereka itu sangat impresif. Kedua belah pihak juga sangat impresif. Kedua pihak juga sangat pragmatis dan praktis. Dan saya mengharapkan, kata beliau, sikap pragmatis dan praktis terus berkelanjutan dalam upaya menyelesaikan persoalan Aceh secara menyeluruh. Dubes Amerika Serikat tersebut menambahkan bahwa Pemerintah AS mendukung keutuhan wilayah Indonesia. Kami tidak mendukung usaha-usaha kemerdekaan bagi Aceh, katanya. Beliau menambahkan bahwa dia percaya bahwa pemerintahan yang demokratis di Indonesia dapat melakukan pendekatan lewat proses dialog dengan menampung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Aceh, tetapi hal itu tidak terjadi dalam satu malam, katanya. Namun apa pun yang dikatakan Dubes AS tersebut, tetap saja Hasan Tiro dan pengikutnya tidak bergeming, terus berjuang. Beliau bersama pendukung setianya, baik yang bekas DI/TII, maupun rekrutmen baru yang umumnya tenaga muda, terus berada di pedalaman Aceh. Sebenarnya kadangkadang mereka merapat juga keperkampungan dan bahkan ke dekat perkotaan untuk keperluan tambahan logistik. Sampai akhirnya beliau meninggalkan Aceh pada tanggal 30 Oktober 1979. Itu berarti adalah keberadaan Hasan Tiro yang terakhir kali semenjak kepulangan beliau untuk meredeklarasikan ASNLF (Aceh Merdeka).

Perjalanan waktu bergerak terus, banyak tokoh AM atau GAM, pergi dan datang, ada yang tertangkap, dan ada pula yang tewas. Konsolidasi organisasi juga berjalan terus antara lain berkenaan dengan: struktur dan persoalan GAM dan berkenaan dengan kabinet GAM. Dalam pertemuan intern GAM di Stavanger, Norwegia, pada bulan July 2002, menurut Kirsten E. Schulze¹¹⁶⁹, dari East-West Center, Washington, dalam makalahnya berjudul, dikeluarkan suatu deklarasi yang berisi beberapa hal antara lain:

¹¹⁶⁹ Kirsten E. Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization*, 2004.

- Sifat negara adalah demokrasi, dan tidak mesti kembali ke ke-sultanan, namun tetap saja akan ditentukan kemudian, berdasar-kan kehendak rakyat.
- Mengangkat Malik Mahmud menjadi Perdana Menteri, dan Zaini Abdullah sebagai Menteri Luar Negeri.
- Tentang nama pemerintahan Aceh saat ini, adalah *The State of Aceh Government in Exile*".
- Menyesuaikan dan mempertegas kembali struktur pemerintahan, yang pada dasarnya terdiri dari pemerintahan sipil dan pemerint-tahan militer.

Pimpinan tertinggi Aceh Merdeka, adalah Wali Nanggrou, yakni Hasan Tiro, sendiri. Di bawah Wali Nanggrou, pada tingkat Pusat ada beberapa menteri (*meuntrou*). Di samping itu dari sayap militernya ada Tentara Neugara Aceh (TNA), yang dipimpin oleh Panglima TNA, (yang saat ini adalah: Muzakkir Manaf, menggantikan Abdullah Syafei, sejak beliau tewas tertembak pada tanggal 22 Januari 2003), yang membawahi 17 wilayah yang masing-masing dipimpin oleh panglima wilayah.

- Secara vertikal ke bawah, sebelumnya, para gubernur, yang me-ngepalai provinsi atau *nanggrou* atau wilayah, sebanyak 17 wilayah. gubernur juga disebut *ulee nanggrou*. Sedangkan di sayap militernya, pimpinannya di tingkat provinsi, atau *nanggrou*, adalah *panglima nanggrou*. Saat ini setelah Deklarasi Stavanger, berubah menjadi region atau wilayah, yang dipimpin oleh gubernur, yang dibantu oleh pimpinan sayap militer, yang bernama *regional mili-tary commander* atau panglima wilayah, dan *regional police chief*, atau *ulee bentara*.
- Nanggrou, atau wilayah terdiri dari beberapa distrik atau daerah, namun setelah Deklarasi Stavanger dibatasi hanya 4 distrik yang dipimpin oleh kepala distrik. Sayap militernya adalah panglima distrik.
- Setiap distrik terdiri dari beberapa *sagou*, yang dipimpin oleh *ulee sagou* sebagai pimpinan masyarakat, dan kemudian terdiri dari beberapa *mukim*, sedangkan mukim terdiri pula dari beberapa desa yang dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai *geu-syhik*. Setiap *geusyhik* dibantu oleh seorang wakil yang disebut *gaki*, dan dikelilingi oleh empat orang yang dituakan, yang disebut sebagai *tuha peuet*.

Dari struktur menurut Kirsten tersebut, terasa agak rancu tentang struktur pada tingkat distrik ke bawah.

Mengenai 17 wilayah yang disebutkan di atas, Kirsten merincinya sebagai berikut: 1) Langkat, 2) Teumieng, 3) Peureulak, 4) Pase, 5) Batei Iliék, 6) Pidie, 7) Atjeh Rayeuk, 8) Meureuhom Daya, 9) Meulaboh, 10) Linge, 11) Alas, 12) Lhok Tapak Tuan, 13) Blang Pidie, 14) Simeulu, 15) Pulo Le, 16) Sabang, 17) Tiro.

Ada beberapa fase yang telah dilalui oleh GAM, yang menurut Kirsten¹¹⁷⁰, menyebutkan sebagai berikut:

Fase I: Tahun 1976-1982, yang oleh Hasan Tiro disebutnya sebagai fase pendidikan, yang lebih banyak berisi motivasi politik, latar belakang sejarah serta membangkitkan kesadaran nasional Aceh. Menurut Hasan Tiro bahwa ketika rakyat kehilangan kesadaran nasionalnya dan melupakan sejarahnya, mereka tidak lagi akan menggunakan haknya untuk *self-determination*. ("when a people lose their national consciousness and forget their history, they will no longer exercise their right to self-determination"). Hasan Tiro sendiri ketika itu berada di pedalaman Aceh, bersama para pengikutnya, sampai dengan tanggal 30 Oktober 1979, dan kemudian pergi ke Swedia dan menetap di sana. Dalam fase ini pemerintah RI terutama jajaran Ke-amanan

¹¹⁷⁰ Kirsten E. Schulze, dalam makalahnya, "The Struggle for an Independent Aceh: The Ideology, Capacity, dan Strategy of GAM", 2003.

Negara, masih menganggap enteng terhadap GAM. Mereka baru tersentak kaget, ketika, pada tahun 1977, GAM menyerang Mobil Oil di Aceh Utara dan terbunuhnya seorang kontraktor Warganegra AS, dan melukai warga asing lainnya. Sejak itulah GAM dianggap serius, dan mulailah berbagai macam operasi militer di Aceh, yang diawali dengan operasi intelijen yang intinya adalah pasukan Kopassus, dengan kode sandi “Ninggala-16”.

Pada akhir fase ini, dan awal faseII, banyak di antara pimpinan GAM yang tewas, tertangkap dan atau melarikan diri keluar daerah atau keluar negeri.

Fase II: tahun 1982 – 1988; yang mulanya menggunakan taktik mengundurkan diri, atau *calm down*. Dalam Fase ini juga lebih banyak manuver GAM di luar negeri, baik dalam rangka mencari dukungan masyarakat internasional, mengumpulkan dukungan dana dari masyarakat Aceh di Malaysia, melakukan pelatihan bagi anggota militer GAM di Lybia, setelah mendapatkan *green light* dari Pemerintah Lybia, dan sebagainya.

Fase III: tahun 1988-1998; adalah masa operasi militer untuk menghadapi operasi militer Apkam RI yang sangat intensif, yang dimulai dengan DOM pada tahun 1989. Kapasitas dan daya tempur pasukan GAM, berikut kondisi moril mereka agak meningkat, dengan adanya tambahan tenaga dan semangat dari para alumni Lybia. Sebagaimana diketahui, dalam fase ini korban rakyat sipil sangat banyak, disebabkan oleh berbagai tindak kekerasan, oleh kedua pihak.

Fase IV: tahun 1998-2006; setelah dicabutnya DOM pada bulan Agustus tahun 1998, dimulailah proses dialog, dan atau perundingan, untuk mencari pemecahan permasalahan Aceh secara damai, tidak lagi dengan kekerasan

Ideologi GAM, menurut Kirsten, yang disarikannya dari berbagai pendapat, tulisan, dan ucapan Hasan Tiro¹¹⁷¹, antara lain, pada garis besarnya terdiri dari 4 elemen yaitu:

1. Berkenaan dengan kebesaran sejarah Aceh dan kekhasan identitas orang Aceh
2. Sentimen anti Jawa dan anti-Indonesia, yang diartikulasikan sebagai anti kolonialisme
3. Anti kapitalisme
4. Islam.

Untuk kedua elemen yang terakhir, Kirsten menuliskan/ menilainya sebagai elemen ideologi yang sedikit kurang kental, dibandingkan dengan dua elemen lainnya.

Sementara itu Kirsten juga memerinci 4 kategori dari orang-orang (pengikut) GAM, yakni: pertama: GAM yang tergolong “garis keras”, yang kadar ideologinya jauh lebih kental dari pada yang lainnya, yakni mereka yang lebih memilih aksi militer, ketimbang dialog, dan referendum. Kedua, adalah GAM yang ideologinya moderat, yakni yang mau/dapat menerima proses dialog dan referendum, sedangkan yang ketiga adalah, GAM yang menjadi GAM karena sakit hati atau ingin balas dendam, disebabkan orang tuanya atau saudaranya menjadi korban kekerasan dan/atau kekejaman Apkam RI, baik selama DOM, setelah atau sebelum DOM, maupun selama Darurat Militer. Untuk kategori pertama dan kedua ini, dikonfirmasi oleh Said Mustafa, salah seorang mantan petinggi GAM di Aceh Barat. Beliau sendiri menurutnya, masuk menjadi GAM betul-betul karena per-timbangan ideologis, ingin memperjuangkan agar Aceh berdiri tegak sebagai Bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, walau-pun Said kurang sepakat jika dia disebut sebagai berada di garis keras. Adapun ketegori keempat adalah, GAM ekonomi, atau GAM preman, yang lebih sering melakukan tindakan-tindakan untuk mencari/ mendapatkan uang, ataupun tindak kriminal lainnya. GAM seperti yang

¹¹⁷¹ Hasan, *op.cit.*

terakhir ini juga sering disebut sebagai *GAM cantoi*, walaupun tidak semua *GAM cantoi* tersebut melakukan tindakan kriminal.¹¹⁷²

Sekelumit Garis Keturunan Tiro

Hasan Tiro, yang nama lengkapnya jika ditulisnya sendiri adalah Dr. Tengku Hasan M. di Tiro.¹¹⁷³ Namun terkadang, tertulis pula, Hasan Muhammad Tiro¹¹⁷⁴, namun pernah pula beliau menulis-kannya sebagai Tengku Hasan Muhammad di Tiro, sebagaimana tertera di akhir Redclaration of Independence of Aceh Sumatra. Namun, secara populer, orang sering menyapanya, dengan nama Hasan Tiro, yang terasa lebih akrab, merakyat, lebih gagah dan lebih berwibawa dan charismatik.

Menurut Isa Sulaiman¹¹⁷⁵, beliau lahir di desa Tanjong Bungong, hulubalang 5, Mukim Cumbok (sekarang Kecamatan Sakti, Kabu-paten Pidie), Provinsi Aceh, Indonesia, pada tanggal yang tidak dituliskan oleh Isa Sulaiman, sekitar tahun 1925. Berarti beliau saat ini (th 2006) berusia sekitar 81 tahun. Sedangkan menurut Kirsten, Hasan Tiro lahir pada tanggal 3 September 1930, yang berarti saat ini beliau berusia 76 tahun. Namun orang-orang yang pernah bertemu dengan beliau, seperti Ilyas Abed, dan Chalidin, mantan Gubernur GAM untuk wilayah Pidie misalnya, mengatakan bahwa dalam usianya yang sekitar 80 an tahun tersebut, beliau kelihatan sangat segar dan sehat. Beliau masih sanggup naik-turun melalui tangga, dengan membawa tas tangan beliau, tanpa memakai lift elektronik. Ayah beliau adalah Tgk Muhammad, seorang alim di desa tersebut, dan ibunda beliau adalah Tgk Fatimah binti Tgk Mahyuddin bin Tgk Chik Di Tiro Muhammad Saman. Di sinilah beliau terkait dengan Pahlawan Nasional Indonesia, Tgk. Chik Ditiro. Tgk Chik di Tiro Muhammad Saman adalah seorang ulama dan sekaligus pemimpin perlawanan terhadap Kompeni Belanda sekitar tahun 1885-1891. Sesungguhnya Tgk Chik di Tiro M.Saman mempunyai 7 orang putra dan putri.

Ikhtisarnya adalah sebagai berikut:

Tgk Chik di Tiro M.Saman, menikah dengan Aisyah, melahirkan 7 orang putra dan putri, antara lain: Tgk. M. Amin dan Tgk. Mahyiddin.

Tgk Mahyiddin, menikah dengan seseorang Perempuan, dan melahirkan 4 orang putra, yakni: 1. Tgk. Umar, 2. Tgk. Abdullah, 3. Cut Amat, dan 4. Fatimah, jadi 3 orang laki-laki, dan 1 orang perempuan. Yang perempuan inilah ibundanya Hasan Tiro. Tgk Muhammad, ayahandanya Hasan Tiro berasal dari Tanjong Bungong, yang oleh orang sekampungnya sering disapa dengan Leube Muhammad. Leube bagi orang Aceh adalah seseorang yang tergolong alim di lingkungannya.

Pasangan Fatimah, cucunya Tgk. Chik di Tiro M.Saman dengan Tgk Muhammad, melahirkan dua orang putra yaitu: 1) Tgk Zainal Abidin, 2). Tgk. Hasan. Yang bernama Tgk. Hasan inilah yang kemudian dikenal sebagai Hasan Tiro.

Hasan Tiro kemudian, menikahi seorang Perempuan, yang menurut Isa Sulaiman bernama, Dora, berkebangsaan AS, serta melahirkan seorang putra bernama, Karim. Sedangkan Tgk. Zainal Abidin, menikahi seorang perempuan bernama Zainab, yang saat ini menempati rumah pusaka mereka di desa Lhok Rheuem, Kecamatan Tiro,

¹¹⁷² Wawancara penulis dengan Said Mustafa, di Jeuram, tanggal 3 Juli 2006.

¹¹⁷³ Hasan, *op.cit.*

¹¹⁷⁴ Hasan Tiro, *Demokrasi untuk Indonesia*, 1958.

¹¹⁷⁵ Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka*, 2000.

melahirkan dua orang putra, yakni: 1). Fauzi, dan 2). Iskandar. Skemanya adalah sebagai berikut:

Tgk. Chik di Tiro M.Saman X Aisyah: 7 orang Putra/Putri: a.l: Mahyiddin X Perempuan: 3 Putra dan seorang Putri: Yaitu: Umar, Abdullah, Cut Amat, dan Fatimah X Muhammad: 2 orang Putra, yaitu: Zainal Abidin dan Hasan = Tgk. Hasan Tiro

Ayahnya Hasan Tiro, Leube Muhammad, meninggal pada tahun 1932, yang berarti ketika itu Hasan Tiro baru berusia, 7 tahun. Oleh karenanya Hasan Tiro, bersama abangnya Zainal Abidin, dipelihara/diasuh dan dibesarkan oleh ayahnya yakni Tgk. Umar, yang lazim disapa dengan Tgk. Umar Tiro, atau menurut isterinya Zainal Abidin, anggota keluarga atau orang sekampung sering menyapanya dengan Tu. Hasan Tiro bersekolah di madrasah Sa'adah al Abadiyah, pimpinan Tgk. Daud Beureueh, di Sigli, Pidie. Kemudian beliau bersama Zainal Abidin, abangnya, melanjutkan pendidikan ke Perguruan Normal Islam di Bireuen, yang dipimpin oleh Tgk. M.Nur El Ibrahimy, Sejak awal kemerdekaan Indonesia Hasan Tiro muda bersama abangnya Zainal Abidin, telah mengambil bagian dalam perjuangan atau berbagai kegiatan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, di level Lameulo, suatu Kecamatan di kabupaten Pidie. Mereka berdua ketika itu, menurut Isa Sulaiman, adalah pengurus dari organisasi PRI, singkatan dari Pemuda Republik Indonesia, di Kecamatan tersebut, sedangkan menurut Abu Jihad, Hasan Tiro, ketika itu adalah Ketua BPI singkatan dari Barisan Pemuda Indonesia.

Usia beliau saat itu adalah sekitar 20 tahun, seorang muda belia. Tidak lama kemudian Hasan Tiro, meninggalkan Aceh dan kampung halamannya berangkat ke Yogyakarta, untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum, Universitas Islam Yogyakarta. Setelah membantu, terutama dalam hal membangun kantor sementara dari Pemerintahan Sementara RI, di Kutaradja, Hasan Tiro menjadi cukup dekat dengan Syafruddin Prawiranegara. Hasan Tiro pun sangat efektif memanfaatkan ke dekatannya tersebut dengan Syafruddin, dan setelah kembali ke Yogya, dia pun kemudian mendapatkan beasiswa Colombo Plan. Menurut Isa Sulaiman pada tahun 1950, berangkatlah beliau bersama Harun Ali, ke Amerika Serikat, dengan fasilitas beasiswa tersebut. Sejak itulah Hasan Tiro berdomisili dan melanglang buana di negeri Paman Sam tersebut. Selain kuliah di Columbia University, beliau juga bekerja di bagian Penerangan Perwakilan Tetap RI di PBB, New York. Tentu saja, bekerja di perwakilan yang sifatnya multilateral ini, akan mempunyai kesempatan untuk menimba banyak sekali ilmu pengetahuan dan pengalaman yang cukup berharga dan menantang. Hasan Tiro, memang terus-menerus mengikuti perkembangan di tanah air, termasuk menghangatnya suhu politik di Aceh, dan hubungan yang semakin tegang antara Aceh dengan Pemerintah Pusat.

Semenjak diproklamirkannya DI/TII di Aceh oleh Abu Beureueh, pada tanggal 21 September 1953, Hasan Tiropun tidak ketinggalan menjadi salah seorang pendukung utamanya, dari jauh. Dengan pengalaman dan pengetahuan serta keberanian yang dipunyainya dia pun membuat ultimatum kepada Pemerintah RI, agar segera menghentikan kekerasan di Aceh dalam rangka penumpasan DI/TII, yang dikatakannya sebagai *genocide*. Hal itu tentu saja membuat Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo berang, dan segera memerintahkan untuk mencabut paspor Hasan Tiro, dan diperintahkan pula untuk segera pulang ke Indonesia. Bukan Hasan Tiro namanya,

kalau dia tidak dapat lolos dari jeratan ini. Beliau pun segera pula meminta suaka politik kepada Pemerintah USA. Sejak saat itulah Hasan Tiro tidak lagi sebagai staf di Watapri New York, tetapi mulai bekerja sebagai orang DI/TII di luar negeri, dan kemudian membentuk *Aceh Institute in America*. ***



BAB 3

REKRUITMEN TENAGA MUDA

DARI

MEDAN DAN KAMPUS DARUSSALAM

MUNGKIN hanya kebetulan, bahwa tenaga intelektual dan professional muda yang pertama-tama terekrut menjadi tenaga inti dalam AM adalah orang-orang yang berasal dari beberapa Universitas di Medan-Sumut, terutama dari USU (Universitas Sumatra Utara), seperti yang telah disebutkan diatas. Dalam kabinet AM pada tahapan awal, antara lain tercantum nama-nama orang Medan seperti: Muchtar Yahya Hasbi, Husaini Hasan, Zaini Abdullah, Amir Ishak, Zubir Mahmud, Asnawi Ali. Sedangkan kalangan bekas DI/TII yang mulanya tampil mendukung dan/atau bersimpati kepada gerakan Hasan Tiro, antara lain adalah Tgk. M.Daud Beureueh, Tgk. Ilyas Leube, Tengku Hasbi Geudong, Tgk. Ibrahim Lhok Sukon, Tgk. Djalil Amin, Tgk. M.Taher Husen, Tgk. Ilyas Cot Plieng, Tgk. Umar Tiro, Tgk. Amir Mahmud (Sungapura), Tgk. Malik Mahmud (Singapura), Tgk. Abdul Azis, Tgk. Idris Ahmad, Tgk. Yusuf Hasan, Tgk. Jamil Syamsuddin, Ayah Sabi, Tgk. Muhamad Yunus Keumbang Tanjung, Tgk. Zainal Abidin, Tgk. Usman Lampoih Awe, Tgk. Daud Husen, Geusyhik Uma, Geusyhik Amin, Tgk. Syamaun Teumieng, Tgk. Ali Daud, Tgk. Darul Kamal, Tgk. Ismail Ben, Tgk. Fauzi Hasbi, dan lainnya, berikut dengan beberapa keturunan dan sahabat dekatnya. Simpatinya mereka ini kepada gerakan Hasan Tiro, mulanya selain terusik oleh tema keadilan, anti diskriminasi, dan kesejahteraan, juga dengan motivasi tersendiri yakni untuk mene-ruskan perjuangan bagi berdirinya suatu Negara Aceh yang Islami, atau yang disebut oleh Al Chaidar sebagai Republik Islam Aceh (RIA). Namun setelah kemudian, ketahuan bahwa perjuangan tersebut adalah perjuangan kemerdekaan dari

“penjajahan” Indonesia-Jawa, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ideologi Islam, maka para bekas pentolan DI/TII pun, kecuali yang telah terlanjur, menjadi kendur semangatnya. Salah satu di antara mereka yang tetap konsisten dapat dianggap paling dekat hubungannya dengan Hasan Tiro dan AM adalah Tengku Ilyas Leube sampai dengan beliau meninggal, dan Tengku Usman Lapoih Awe, yang meneruskan jabatannya sebagai Menteri Keuangan.

Keterlibatan sebagian di antara mereka, telah ada sejak awal dari persiapan gerakan ini. Sebagai contoh Dr. Muchtar Hasbi, telah menggunakan kesempatan ketika dia mengikuti suatu non-degree short course untuk studi Kedokteran Tropis di Bangkok, pada tahun 1975, untuk bertemu dan memperdalam pengenalannya dengan Hasan Tiro. Sudah barang tentu Muchtar Hasbi “dipompa semangat-nya” dan “diisi” habis-habis an oleh Hasan Tiro, sehingga jadilah beliau kader tempaan langsung pimpinan tertinggi AM, yang ampuh. Sehingga tak ragu sedikit pun ketika kemudian Muchtar yang Dokter Umum tersebut diangkat menjadi Wakil Wali Negara, merangkap Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Pertahanan dalam Kabinet AM yang pertama. Al Chaidar¹¹⁷⁶, dan juga Abu Jihad¹¹⁷⁷ menyebutkan bahwa perginya Muchtar Hasbi menemui Hasan Tiro adalah sebagai utusan dari Tgk. Daud Beureueh, untuk menkonfirmasi beberapa hal berkenaan dengan AM, khususnya yang berhubungan dengan kesiapan persenjataan dalam rangka perang bersenjata melawan pemerintah RI. Menurut kedua penulis tersebut, Muchtar Hasbi dua kali menemui Hasan Tiro, yang pertama pada tahun 1972 di Singapura dan Malaysia, dan yang kedua pada tahun 1974 di Bangkok. Ketika bertemu Hasan Tiro yang kedua kalinya tersebut, kemudian Muchtar dibawa oleh Hasan Tiro untuk melihat senjata di Subic-Fillipina. 5) dan 6). Sebagai catatan, perlu diketahui, Subic adalah salah satu Pangkalan Armada Amerika Serikat di Filipina. Selain Muchtar Hasbi, ada satu orang utusan Tgk Daud Beureueh lainnya yang menemui Hasan Tiro yakni Tgk. H.Zainal Abidin abang kandungunya Hasan Tiro, pada tahun 1972. Hasan Saleh¹¹⁷⁸ mengatakan perginya Zainal Abidin Tiro menemui adiknya yakni Hasan Tiro, di Amerika pada tahun 1970.¹¹⁷⁹

Dengan keyakinan yang teguh bahwa semua yang didapatkan-nya melalui dua kali pertemuannya dengan Hasan Tiro, mulailah Dr. Muchtar Yahya Hasbi, yang kebetulan menjabat sebagai Pembantu Utama IPTR (Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Tanah Rencong), Medan, menularkan dan sekaligus menggembelng orang-orang atau teman-temannya yang dianggap se ide dengan beliau. Pembantu Utama IPTR lainnya adalah Drs. Surya Paloh. Pada tahap pertama terjaringlah beberapa orang yang kemudian tergolong sebagai “lingkaran dalam” dari cikal bakal AM di Medan, yakni Dr. Zaini Abdullah, Seksi Pendidikan IPTR, yang kebetulan mempunyai hubungan keluarga atau famili dengan Hasan Tiro, Dr. Husaini Hasan, Wakil Sekretaris Umum IPTR, Dr. Zubir Mahmud, Ketua Seksi Sosial IPTR, Amir Ishak, anggota Seksi Sosial IPTR, Ilyas Nurdin, Wakil Sekretaris Umum, Asnawi, anggota IPTR, Idris Mahmud, anggota Pengurus IPTR, Dailami, Petugas Ekspedisi (pengantar Surat-menyurat atau lopper) IPTR, Uzir Jaelani, anggota Seksi Sosial, Marzuki Mahmud, anggota IPTR, dan Ibrahim, petugas administrasi IPTR, Asgadi, dan sebagainya. Sedangkan Zakaria M Pase, seorang wartawan Majallah Tempo, diketahui kemudian ikut bersimpati, karena beliau adalah

¹¹⁷⁶ Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. (Jakarta: Madani Press, 1999).

¹¹⁷⁷ Abu Jihad, *Hasan Tiro dan Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Titian Ilmu Insani, 2000).

¹¹⁷⁸ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, 1992.

¹¹⁷⁹ Sedangkan isterinya Zainal Abidin, Ibu Zainab, dalam wawancara dengan AL Chaidar menyebutkan, seingat beliau Tengku Zainal Abidin, yang adalah suaminya, pergi menjenguk Hasan Tiro di Amerika Serikat pada tahun 1970, dan bukanlah sebagai utusan Abu Beureueh, tetapi sebagai kunjungan keluarga.

teman baik dari Dr. Muchtar. Husaini Hasan yang juga seorang dokter jebolan Fakultas Kedokteran USU, Medan, kini berdomisili di Stockholm, sebagai pucuk pimpinan dari MP GAM (Majelis Pemerintahan GAM), sedangkan Dr. Zubir Mahmud, dan Idris Mahmud, telah tewas dalam suatu pertempuran, Aceh Timur. Sementara yang lainnya saat ini ada yang berdomisili di Medan, ada yang di Aceh dan ada pula di Jawa ataupun di tempat-tempat lainnya.

Sebagai catatan; perlu pula diinformasikan bahwa IPTR, adalah suatu organisasi yang mewadahi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa asal Tanah Rencong (Aceh), yang didirikan pada tahun 1957, sebagai antisipasi terhadap nasib yang buruk dari para pemuda, pelajar dan mahasiswa Aceh yang merantau ke Medan/Sumatra Utara, sebagai akibat peristiwa DI/TII. Salah satu program yang sangat terkenal dan digandrungi oleh para anggota IPTR ketika itu adalah, apa yang disebut sebagai *Studie Fond*, atau bantuan untuk para pelajar dan mahasiswa anggota IPTR yang diberikan oleh Pemerintah. Para pendiri IPTR adalah tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Medan, antara lain: Zainuddin Yusuf, M. Nur Nikmat, Jusuf Hanafiah, Ilyas Ben Cut, Muhammadar, Said Ibrahim Husen, Mahyuddin Amin, Cut Irawati, Jacob Ahmad, Yusuf Bung Tomo, Adlan, Muhammad Twh, dan sebagainya. Sejak periode 1968, IPTR berkembang menjadi ITR Pusat yang mencakup seluruh Sumatra Utara, dan IPTR Cabang Medan, yang berwilayah se Kotamadya Medan. IPTR Cabang Medan ketika itu dipimpin oleh, Usman Hasan, sebagai Ketua Umumnya, dengan Sekretaris Umum, Razali Husen, yang kemudian menjadi Dokter dan bertugas di Aceh, serta Bendahara, Saleh Habsyi. IPTR Cabang Medan ketika itu, sedang mengalami krisis kepemimpinan dan bahkan cenderung perpecahan. Sebagian mahasiswa, memisahkan diri dari IPTR dan membentuk IMA (Ikatan Mahasiswa Aceh), sekaligus mereka mendaulat Dr. Muchtar Yahya Hasbi sebagai Pimpinannya. Sebagian besar dari mahasiswa dan mantan mahasiswa yang ikut terpengaruh dengan Gerakan Hasan Tiro tersebut umumnya adalah mereka-mereka yang telah mengelompok ke dalam IMA, dan menjadi pengurus dari organisasi tandingan IPTR tersebut, kecuali Ilyas Nurdin, Dailami dan Ibrahim serta Uzair Jailani. Dengan demikian wajar jika kegiatan-kegiatan mereka, luput dari pengamatan Pengurus IPTR lainnya, termasuk dari pengetahuan Ketua Umumnya.

Ada yang menganalisa, bahwa terbentuknya IMA adalah suatu rekayasa “politis” yang rapi, mengingat untuk mengatasnamakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa Aceh di Medan-Sumut, akan mendapat hambatan jika menggunakan nama IPTR. Karena sebagian besar pengurus dan para senior pendirinya yang masih hidup, seperti M. Nur Nikmat, Dr Jusuf Hanafiah, Cut Irawati, Said Ibrahim Husen, Muhammdar, memang tidak setuju dengan Aceh Merdeka, maka sulit untuk diyakinkan agar IPTR mendukung gerakan Hasan Tiro tersebut. Namun di lain pihak, kemudian ternyata, banyak di antara Pengurus IMA, juga tidak menjadi pendukung Aceh Merdeka, dan nyatanya mereka tidak ikut berangkat ke Aceh untuk ber-gabung/berjuang bersama Hasan Tiro, seperti misalnya Bustami Usman, T. Syaifuddin, M. Nur Husen, Farhan Hamid, Aisyah, dan sebagainya. Untuk diketahui ketika menjelang proklamasi Aceh Merdeka (ASNLF), menurut wawancara dengan Tgk. Dailamy, ada seruan, dari Dr. Mukhtar Hasbi, agar semua pemuda, pelajar dan mahasiswa Aceh di Medan, agar pulang ke Aceh untuk ikut berjuang bersama Hasan Tiro, mencapai “Aceh Merdeka”. Ketika itu Ketua Umum IPTR Cabang Medan Usman Hasan, bersama pengurus harian lainnya seperti: Razali Husen, Said Mudhahar Ahmad, Ishak Madjid, T.M,Nur, Saleh Habsyi, Usman Yusuf menemui M. Nur Nikmat sebagai Ketua Penasehat dan pendiri IPTR, di tengah malam, untuk memintakan pendapat beliau,. Beliau dengan tegas sekali mengata-kan, seruan tersebut, tidak usah digubris, dan tidak perlu dipenuhi. Mengingat seruan tersebut juga telah sempat beredar luas dan dike-tahui oleh masyarakat lainnya, selain Aceh, juga

oleh aparat keamanan dan Pemerintah, maka Nur Nikmat bejanji akan menemui Pejabat Pemerintah dan Pejabat Keamanan di Sumut/Medan, untuk mengklarifikasikan masalah tersebut, sekaligus menegaskan sikap IPTR yang tidak mendukung secara organisatoris gerakan Hasan Tiro.¹¹⁸⁰

Seminar Perjuangan Aceh berikut ini, membuktikan hal tersebut.

AM Berkecambah di Kampus Darussalam

Di Aceh sesungguhnya AM, bermula penyaberannya adalah melalui teman-teman dekat/kerabat dekat Hasan Tiro, yang sebagian besar adalah orang-orang ex DI/TII, dan orang-orang sekampung beliau di Tiro. Sementara Abu Beureueh, tidak tegas-tegas menyatakan mendukung, dan tidak pula menentangnya. Walaupun banyak rumors ketika itu yang mengatakan bahwa Abu Beureueh tidak senang atau selalu *reserve* kepada Hasan Tiro, karena dianggap kurang bagus performancenya berkaitan dengan perjuangan DI/TII, namun sikap Abu terhadap gerakan Aceh Merdeka, tidaklah dapat dikatakan beliau menentangnya atau menolaknya. Gerak-gerik Abu, menurut banyak pengikut setia beliau, termasuk Tgk Muslimin Beureunuen, mengatakan Abu, menunjukkan sikap simpatiknya kepada gerakan AM tersebut. Dan sikap Abu Beureueh yang seperti itulah yang membuat teman-teman lama Abu pun mengambil posisi, tidak menolak gerakan tersebut, terutama di awal pemunculannya. Oleh karena yang demikian terjadilah simpul-simpul penyebaran AM, yang terfokus pada tokoh-tokoh yang mendukungnya, seperti di Tito dan Pidie, di Pase dengan titik sentralnya Tgk Hasbi beserta putra-putra beliau; di Bireuen, titik sentralnya, Ayah Sabi beserta keluarga beliau; di Batei Iliiek, dengan titik sentralnya Tgk. Idris Ahmad, di Lhok Sukon, titik sentralnya Tgk Ibrahim, dan seterusnya dan sebagainya.

Sementara itu di kalangan Kampus Darussalam, baik dari Unsyiah, (IKIP), maupun dari IAIN imbasan dan getaran AM menjalar selain melalui para orang-orang seketurunan/ keluarga, orang dekat dan sekampung, juga melalui intelektual dan aktivis yang kritis terhadap kondisi sosial-politik dan ekonomi ketika itu dan sebelumnya. Awal mulanya, menurut Hasballah Saad, adalah beredarnya selebaran, baik tentang Redeklarasi Aceh Merdeka, maupun berisi berbagai propaganda Aceh Merdeka dan Hasan Tiro lainnya, termasuk propaganda tentang kebesaran Aceh di masa lalu, di kalangan kampus, cendekiawan dan bahkan di masyarakat luas, yang umumnya dalam bahasa Aceh dan bahasa Inggris. Walaupun ada juga dalam bahasa Indonesia/Melayu. Kemudian atau bersama-an dengan itu diikuti dengan berkibarnya “bendera berwarna merah, bergambar pedang hitam”, yang dipahami masyarakat ketika itu sebagai bendera Aceh Merdeka di Kampus Darussalam (Tugu Darussalam), dan di Depan SMA I Banda Aceh. Tidak diketahui persis dari mana atau siapa yang menyebar luaskan selebaran tersebut di Banda Aceh atau di Aceh, dan siapa pula yang mengibarkan bendera AM tersebut. Tetapi yang jelas adalah adanya beberapa orang datang dari Medan untuk berceramah atau semacam “sosialisasi” tentang AM di Aceh. Menurut Hasballah Saad, yang datang dan berceramah tersebut antara lain adalah Amir Ishak dan Asnami Ali di desa Iboih, Pidie, yang dihadiri oleh beberapa mahasiswa dari Banda Aceh. Sedangkan mahasiswa yang hadir dalam ceramah tersebut antara lain Muluk dan Harun. Tidak pula diketahui, apakah mereka, para mahasiswa dari Banda Aceh itu, hadir di “forum ceramah tentang AM di Iboih tersebut” secara kebetulan atau memang telah direncanakan sebelumnya, wallahu’alam.

¹¹⁸⁰ Wawancara dengan M. Nur Nikmat di Medan.

Secara prinsip, sebenarnya tidak semua mahasiswa atau aktivis yang kemudian ditahan dan/atau diinterogasi oleh Aparat Keamanan, adalah orang-orang AM. Namun mereka dianggap dan/atau dicurigai sebagai anasir yang mula pertama tersentuh oleh gerakan Hasan Tiro tersebut. Sehingga untuk mengetahui apa sesungguhnya gerakan tersebut, bagaimana penyebarannya dan sudah sejauh mana me-luasnya, maka sebagian dari mahasiswa tersebut diinterogasi dan bahkan ada yang ditahan. Ada pula yang kemudian terbukti keter-libatannya sebagai orang AM atau pengikut Hasan Tiro, mereka di-hukum atau diperpanjang masa tahanannya sampai tahunan. Hasbi Abdullah misalnya yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Unsyiah, adalah tergolong mahasiswa Unsyiah yang pertama-tama dicatat dan dicurigai oleh Aparat Keamanan, sebagai orang atau pendukung AM, demikian pula Nurdin Abdurrahman, Muluk, Mulkan Harun, Muchsin, Hasanuddin Latif, Mustafa, Hasan Basri, Zulfan, Sofyan Ibrahim Tiba, dan Hasballah Saad, dan beberapa lainnya, yang jumlah awalnya tidak lebih dari 10 orang, demikian menurut wawancara penulis dengan Dr. Hasballah Saad, pada tanggal 29 juli 2006. Hasballah Saad, ketika itu adalah men-jabat sebagai Wakil Ketua Dewan Mahasiswa Unsyiah. Hasballah yakin bahwa Hasbi Abdullah, ketika itu, bukanlah atau belumlah menjadi orang yang akitp sebagai tokoh AM. Salah satu penyebab kuatnya keyakinannya tersebut, adalah bahwa yang mengorganisir pertemuan mereka yang pertama kali di Pantai Cermin, Ulee Lheue, untuk mendengarkan laporan Muluk dan Harun tentang kehadiran-nya mendengarkan “dakwah” atau “orasi” di Iboih, dari Amir Ishak dan Asnawi, tentang AM, bukanlah Hasbi Abdullah tetapi orang lain yang tidak diingat lagi siapa namanya. Amir Ishak dan Asnami adalah orang muda/mahasiswa USU, Medan, yang sengaja pulang kampung untuk kampanye atau sosialisasi AM.

Walaupun demikian, Hasbi Abdullahlah yang paling dicurigai sebagai orang AM, ketimbang yang lain-lainnya, mengingat Hasbi adalah adik kandung dari Zaini Abdullah tokoh kunci AM, seorang alumni Fakultas Kedokteran USU, Medan, yang juga adalah ke-menakannya Hasan Tiro. Setelah ditangkapnya Hasbi, maka secara beruntun kemudian, ditangkap pula mahasiswa lainnya yang hadir dalam pertemuan sambil makan ikan laut, di Pantai Ulee Lheue tersebut termasuk Hasballah Saad sendiri. Tanpa proses pengadilan, dan bahkan diperiksapun tidak, Hasballah ditahan selama 1 tahun 3 bulan, yakni sejak 1 Mei 1978 s/d September 1979. Dalam tahanan itulah Hasballah nyantri menjadi mapum tentang AM dari yang tadi-nya dia sesungguhnya “buta huruf” tentang gerakan Hasan Tiro tersebut. Dia menjadi tahu tentang ideologi dan lika-liku AM, setelah berakses dengan tokoh-tokoh AM yang telah terlebih dahulu ditahan dalam tahanan tersebut,, seperti: Ayah Sabi, Tgk. Wahab Tiro, Daud Nahar, Tgk. Mohd Arif, Ali Jadun, orang dekatnya Ilyas Leube, Tgk. Affan Laweueng, Nurdin Amin, dan sebagainya. Bersamaan dengan ini gangguan terhadap beberapa Perusahaan Asing di Aceh, seperti Bechtel Inc. dan Perusahaan HPH PT. Seulawah, juga semakin me-ningkat, yang diikuti dengan penagihan “pajak” untuk AM, sehingga mengakibatkan operasi dari Aparat Keamananpun menjadi lebih meningkat, dan semakin intensif

Gubernur Aceh ketika itu adalah Mazakkir Walad dan Panglima Kodam Iskandar Muda adalah R.A. Saleh, menggantikan Rivai Harahap.

Seminar Perjuangan Aceh di Medan

Dari tanggal 22-25 Maret 1976, terjadi suatu even di Medan yang dilaksanakan oleh IPTR (Ikatan Pemuda /Pelajar dan Mahasiswa Tanah Rencong), bersama tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Medan-Sumut, yakni suatu seminar, dengan tema “Perjuangan Aceh sejak 1873 s/d Kemerdekaan RI”. Panitia seminar ini, dipimpin H.M.Ramly Mahmud,

pengusaha Aceh, bidang perkebunan yang cukup sukses, sebagai Ketua Umum Panitia, dan Mukhtar Yahya Hasbi sebagai Ketua Organizing Committee (OC), sedangkan Usman Hasan sebagai Ketua Steering Committee (SC). Seminar dilaksanakan di Universitas Cut Nyak Dhien, Medan, dan diikuti oleh peserta sebanyak sekitar 350 orang dari Medan, Aceh, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan dari kota-kota lainnya. Para Pemerasaran Utama sebanyak 8 orang yakni: H.M.Said, tokoh sejarah dan penulis¹¹⁸¹, H.A.Hasjmy, tokoh sejarah, budayawan serta ulama Aceh, Buya Hamka, tokoh ulama terkemuka, Prof. Tgk Ismail Jakub, SH, ilmuwan hukum/agama, Dr. Ibrahim Alfian, ilmuwan dan tokoh sosial budaya Aceh, dari UGM, Drs Darwis Sulaiman, tokoh sejarah dan intelektual muda Aceh, dari Unsyiah, T.Cut Ahmad, SmH, tokoh sejarah muda Aceh/ Pengurus IPTR, Mr.T.M.Hasan, tokoh pejuang/perintis kemerdekaan RI. Sedangkan pembahasnya adalah: Tuanku Hasyim, SH, Yoesuf Soe'ib, Drs. A.Gani,MA, Dr. Syamsuddin Ishak, Drs. Zakaria Ahmad, Said Zainal Abidin. Sementara itu para penulis makalah penunjang, sebanyak 24 orang/makalah. Makalah penunjang tersebut selain ditulis dan disumbangkan oleh para pengamat, pencinta, dan ahli sejarah, mereka juga sebagian adalah para pelaku sejarah itu sendiri, seperti: Syamaun Gaharu, H.A.Hasjmy, Tuanku Hasyim, SH., Tengku Lukman Sinar, SH., T. Raja Muluk Atthahashi, T.Syahbuddin Razi Peuseunu, Syahadat, Benny Banta Cut, Prof.Abubakar Aceh, T.Abdullah ben Peukan, Dr. Mukhtar Y. Hasbi, T.M. Hasan, Angkatan '45 Sumut, Dinas Sejarah Kodam-I, T. Sulaiman Trieng Gadeng, OK Makmun Al Rasyid, T.Alibasyah Talsya, T.Cut M.Husen (Tjoetje), Mustafa Kamal Pasya, A.Gani Mutiara, Hanafi Mahmud, Bapperis Aceh, Daud Ali, SH., Drs. Abdullah Syam.

Salah satu keputusan seminar, adalah tentang pentahapan perjuangan Aceh, semenjak sebelum diserang oleh Belanda s/d kemerdekaan RI, adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama: Fase Prolog Perang Aceh melawan Belanda, yakni sebelum tahun 1873 .

Tahap Kedua: disebut Fase Perang Frontal melawan Belanda, yakni antara tahun 1873 s/d 1904.

Tahap Ketiga: disebut Fase Perang Gerilya melawan Belanda, sampai dengan masuknya Jepang, yakni antara 1904 s/d 1942.

Tahap Keempat: Perjuangan melawan penjajah Jepang, dan perjuangan selama menegakkan Kemerdekaan RI, yakni antara tahun 1942 s/d 1945 dan setelahnya ketika menghadapi Agresi Belanda/Sekutu di front Medan Area Selatan.

Keputusan-keputusan lainnya dari seminar 3 hari tersebut antara lain adalah:

1. Nilai-nilai perjuangan kemerdekaan di Aceh, antara lain:

Ajaran agama Islam yang berakar dan bertumbuh dalam masyarakat Aceh sejak berabad-abad yang lalu sampai sekarang, merupakan pandangan hidup menjiwai sikap dan perbuatan rakyat Aceh dalam berbagai aspek kehidupan, dan telah menjadi tenaga penggerak bagi patriotisme perjuangan melawan Belanda/ penjajah lainnya dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Kesadaran nasional dan persatuan bangsa yang telah menjiwai rakyat Aceh, terbukti dari kenyataan sejarah, bahwa sekalipun pada waktu setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, Aceh dihadapkan kepada berbagai tantangan, namun rakyat Aceh telah memilih untuk tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selain dari pada itu, Aceh merupakan Daerah Modal, di mana selain telah turut serta secara aktif dalam perjuangan fisik, rakyat Aceh telah ikut membiayai perjuangan Pemerintah RI, baik di dalam maupun di luar negeri.

¹¹⁸¹ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Jakarta: Bina Cipta, 1981).

Berdasarkan kenyataan sejarah, seminar berpendapat bahwa Aceh tidak pernah ditaklukkan sampai dengan kekuasaan Jepang. Sehubungan dengan itu maka istilah “pemberontakan” adalah tidak tepat dipakai di dalam setiap perjuangan rakyat Aceh menentang kekuasaan Belanda.

2. Penggalan, pemeliharaan, dan pengembangan sejarah kemerdekaan di Aceh, antara lain:

Penggalan untuk menemukan benda-benda dan dokumen sejarah, perlu digalakkan dengan dukungan dari pemerintah secukupnya.

Memelihara dan mengawetkan benda-benda dan dokumen sejarah, perlu diupayakan secara lebih terencana dan sungguh-sungguh.

Memelihara dan meningkatkan semua monumen sejarah, termasuk pengadaan monumen baru, yang bernilai kejuangan, heroisme, dan patriotisme, keluhuran harkat dan martabat orang Aceh, serta kebesaran Aceh dimasa lalu.

Permuseuman dan Kepurbakalaan, perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dapat menunjang kepada pemurnian dan pengungkapan nilai-nilai perjuangan Aceh.

3. Perpustakaan; perlu ditingkatkan, diikuti dengan penumbuhan kesadaran masyarakat untuk membaca. Aspek ini perlu digandengkan dengan adanya upaya untuk mendorong penulisan sejarah.

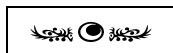
4. Tentang: Penelitian Sejarah; terhadap perjuangan dari setiap pejuang di setiap tahapan perjuangannya dan pengungkapan/ mempublikasikan sejarah perjuangan tersebut, yang mempunyai nilai patriotisme dan heroisme.

5. Para pejuang dan/atau pahlawan. Seminar mengajukan sejumlah 479 orang pejuang Aceh, yang telah berjuang mengorbankan segala-galanya termasuk nyawanya untuk negara dan bangsa ter-cinta, untuk ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Pahlawan Nasional. Kepada mereka dan atau keluarganya juga dihimbau agar Pemerintah memberikan penghargaan yang wajar baik non-material, berupa tanda jasa/penghargaan dan/atau pengakuan/ status lainnya, maupun material berupa santuan bagi keluarganya.

6. Seminar Perjuangan Aceh keII agar dapat dilaksanakan di Aceh dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Panitia juga mengundang Abu Beureueh, dengan menemui beliau di rumahnya Bapak Hasballah Haji di Jl. Hayam Wuruk Medan, 4 hari menjelang seminar, namun dengan penuh kearifan, beliau menolak untuk hadir, dengan alasan “agar semuanya berjalan lancar”.

Sedangkan Abu Hasin Al Mujahid, selalu datang ke arena semi-nar, hanya untuk mendapatkan makalah-makalah yang disajikan dalam seminar, namun beliau keberatan untuk masuk ke dalam ruangan seminar. Dari hasil-hasil seminar, terlihat jelas, tidak ada satu kata atau kalimat pun dari rumusan keputusannya yang dapat dikaitkan dengan ideide Gerakan Hasan Tiro atau dengan gerakan “Aceh Merdeka” yang terjadi atau meletus sekitar lebih dari 8 bulan kemudian. Dengan demikian, terbantahlah, jika ada yang mangata-kan atau mengaitkan, bahwa “Seminar Perjuangan Aceh” di Medan tersebut adalah salah satu persiapan untuk menuju atau mendukung gerakan Aceh Merdeka. Walaupun harus diakui, banyak di antara para panitianya baik yang duduk di OC maupun di SC, adalah orang-orang yang kemudian ternyata pendukung dan bahkan pendukung utama dari gerakan Hasan Tiro tersebut. ***



BAB 4

PENTOLAN GAM HIJRAH

KELUAR

ACEH DAN LATIHAN DI LIBYA

Hasan Tiro Meninggalkan Aceh

SEMAKIN terbuka dan menyebarnya gerakan Hasan Tiro atau AM, pastilah diantisipasi oleh aparat keamanan (apkam) dengan semakin intensifnya operasi mereka, baik operasi intelijen, maupun, teritorial, dan bahkan operasi tempur sekalian, jika perlu. AM bersenjata yang dipimpin oleh Daud Paneuk semakin berani pula mengadakan penghadangan-peng-hadangan terhadap pos-pos apkam baik polisi maupun TNI, dan perorangan apkam tersebut, untuk merebut senjata, maupun kekerasan terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Tidak kurang dari Hasan Saleh, seorang tokoh Dewan Revolusi DI/TII, ditembak oleh pasukannya Daud Paneuk di rumahnya di Metareuem, Pidie, pada tanggal 16 Januari 1978, hanya karena beliau

selalu mengkritik gerakan Hasan Tiro, dan AM, secara terbuka. Dua orang temannya Hasan Saleh tewas ketika itu, dan beliau sendiri luka-luka ringan.

Karena merasa tertekan oleh semakin intensipnya operasi militer di Aceh tersebut, sedangkan senjata tidak kunjung tiba, sebagian dari orang GAM meninggalkan Aceh, hijrah ke berbagai negara, dan yang terbanyak ke Malaysia, dengan berbagai cara. Ada pula di antara mereka pergi dari Aceh ke daerah lainya seperti ke Medan, Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya, dan tempat-tempat sebagainya. Bagi yang pergi ke Malaysia, sebagian mereka dianggap oleh Kerajaan Malaysia sebagai imigran illegal (pendatang haram). Banyak di antara mereka yang menyamar sebagai calon pekerja atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia), yang datang melalui prosedur perusahaan jasa pengiriman TKI.

Banyak para elit GAM hengkang ke luar negeri sekitar tahun 1977 dan 1979.

Sebenarnya yang memulai hijrah ini adalah Hasan Tiro sendiri, dalam kapasitasnya sebagai Wali Negara. yang meninggalkan Aceh pada subuh tanggal 28 Maret 1979, melalui pantai di Kuala Jeunieb, setelah berada di Aceh selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan. Menurut Abu Jihad, Hasan Tiro sebelum berangkat ke luar negeri terlebih dahulu pamt kepada Dr. Muchtar Yahya Hasbi sebagai Wakil Wali Negara, bahwa beliau harus pergi untuk mencari senjata dan mencari dukungan luar negeri yang keduanya sangat diperlukan untuk memenangkan perjuangan Aceh Merdeka. Dalam catatan hariannya, Hasan Tiro¹¹⁸² tidak menyebutkan secara terang perihal tersebut. Yang beliau tuliskan dalam diary tersebut, pada halaman 349 (untuk tanggal 28 Maret 1979), antara lain adalah: *"Now I have to go abroad for a while, on a mission that only I can do it"* (Sekarang saya harus pergi ke luar negeri, untuk suatu misi yang hanya saya yang dapat melakukannya). Beliau melanjutkan dengan mengatakan: *"I must go. only crazy and stupid men will believe that I will not come back"* (Saya harus pergi. Hanya orang-orang gila dan bodohlah yang akan percaya bahwa saya tidak akan kembali lagi). Tentang senjata beliau menuliskan dalam diary tersebut sebagai sambungan kalimat di atas, antar lain sebagai berikut: *"With a few thousand of guns we will have our country back. You knew what we have been able to do even without guns. I will get you those guns. But even if I can not get it, you can always get it: first you get a knife; with a knife you can get the guns, right here, and with the guns you can have our country back, freed from Javanese colonialism"* (Dengan beberapa ribu senjata, kita akan mendapatkan kembali negeri kita. Kalian tahu apa yang telah dapat kita perbuat, walaupun tanpa senjata. Namun saya akan mencari senjata-senjata itu untuk kalian. Tetapi jika saya tidak berhasil, kalian akan selalu mendapatkannya juga; pertama, dapatkan pisau lebih dahulu; dengan pisau itu kalian akan mendapatkan senjata, di sini, dan dengan senjata itu kalian akan mendapatkan kembali negeri kita, memerdekakannya dari kolonial Jawa). Jadi jelaslah bahwa bukanlah perkara mencari senjata, yang menjadi misi utama Hasan Tiro ke luar negeri. Jadi mengapa beliau tiba-tiba meninggalkan medan juang, dan meninggalkan teman-teman seperjuangan di Aceh? Lari !?, atau menghindar!?, atau takut!?, atau untuk suatu tujuan tertentu yang lebih besar dan lebih strategis!?, Hanya beliau dan Allahlah yang paling tahu jawabannya.

Tepat waktu, (subuh tanggal 28/29 Maret 1979), beliau berangkat dengan boat, dengan diantar atau dikawal oleh antara lain Daud Paneuk, dan pasukannya. Selain itu juga ikut mengantar beliau adalah Tengku Muslimin dan beberapa lainnya, yakni orang-orang yang selalu mendampingi dan setia kepada beliau. Mereka melambai-lambaikan tangan sampai dengan boat bermesin dua itu, yang membawa Hasan Tiro, yang dinakhodai oleh Saiman, meninggalkan muara Jeunieb, dan menghilang dari pandangan

¹¹⁸² Hasan Tiro, *op.cit.*

mata. Dalam catatan hariannya Hasan Tiro menuliskan beberapa bait kalimat yang dinilai cukup puitis, yakni: *“I have replanted the seeds of my highest hope, under the point of my enemy’s bayonets. And it is growing before my eyes. My ground is still rich enough for that, because it has been fertilized*

by the spilled blood of my forefathers and now has added by the spilled blood of my loyal recent followers. I shall return, again, to look after the harvest !”.

Wali negara, Hasan Tiro, sempat menerbitkan dekrit, bahwa selama perginya Hasan Tiro ke luar negeri, pimpinan AM dipegang oleh Perdana Menteri (PM), yakni Dr. Muchtar Y. Hasbi yang didampingi oleh Wakil-wakil PM. Menurut Isa Sulaiman, ada 4 orang Wakil PM, yakni Wkl. PM-I: Ilyas Leube, Wkl. PM-II: Dr Husaini Hasan, Wkl. PM-III: Dr. Zaini Abdullah, dan Wkl. PM-IV: Dr. Zubir Mahmud, sedangkan menurut catatan harian Hasan Tiro disebutkan ada 3 Wkl. PM, yaitu; Wkl. PM-I: ILYas Leube, Wkl. PM-II: Dr. Zaini Abdullah, Wkl. PM-III: Dr. Zubir Mahmud.

Orang AM Lainnya Meninggalkan Aceh

Ada tiga cara atau alibi orang-orang GAM pergi ke luar negeri: Pertama, secara terang-terangan pergi ke UNHCR atau ke kedubes salah satu negara Eropa, dan minta suaka politik, dengan alasan sedang dikejar-kejar oleh aparat keamanan Indonesia; Kedua, menyamar sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan pergi bersama-sama rombongan TKI lainnya, dan setelah selesai kontrak kerja, tetap tinggal di Malaysia, sebagai pemukim gelap; dan Ketiga, melalui jalur dan prosedur normal sebagai turis atau pelaku bisnis, dan sesampainya di Malaysia, baru pergi kepada UNHCR atau salah satu KEDUBES negara Eropa, untuk minta suaka politik ke suatu negara, atau bentuk-bentuk perlindungan lainnya, dan atau menjadi pen-datang haram (illegal immigrant) di Malaysia atau dinegara lainnya.

Setelah sekitar setahun menunggu, namun tetap tidak ada berita yang pasti tentang pengiriman senjata oleh Hasan Tiro ke Aceh, akhirnya, rapat kabinet AM yang dipimpin oleh Perdana Menteri: Muchtar Yahya Hasbi, di Langkahan, Pantan Labu, memutuskan untuk mengutus Dr. Husaini Hasan menemui Hasan Tiro di Luar negeri. Memenuhi keputusan Kabinet tersebut, Husaini Hasan, yang sebelumnya selama 3 tahun sejak 1977, melanglang buana dalam hutan, dengan ditemani oleh Yusuf Daud, berangkat ke Swedia melalui Malaysia pada tahun 1980. Menurut Isa Sulaiman, Husaini Hasan, meminta suaka politik pada UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) di Kuala Lumpur, Malaysia, dan memilih tempat tinggal di Swedia agar bergabung bersama Hasan Tiro. Setelah melakukan studi penyesuaian sebagai seorang dokter, akhirnya dia lulus matrikulasi sebagai genikolog, dan saat ini berpraktek sebagai dokter kebidanan yang cukup dikenal di Stockholm.

Tidak lama kemudian menyusul Dr. Zaini Abdullah, yang saat itu sedang laris-larisnya membuka praktek Dokter kesehatan dan bekerja di Puskesmas Kuala Simpang, pada bulan Juni 1981, melalui Medan. Seterusnya pada pertengahan tahun 1982 berangkat pula Daud Husen atau yang sering disapa dengan Daud Paneuk, karena orangnya memang agak pendek, berserta beberapa temannya, seperti Saiman, Bachtiar dan sebagainya. Umumnya mereka yang pergi ke luar negeri, selain nyangkut baik sesaat, maupun untuk beberapa saat, bahkan ada yang menetap sampai dengan hari ini di Malaysia, banyak pula yang meminta suaka politik dan memilih negara tempat tinggal mereka di beberapa negara Eropa, khususnya di Swedia. Dengan berangsurnya kepindahan tokoh-tokoh GAM dari Aceh ke luar Aceh, maka terjadilah tiga konsentrasi keberadaan pimpinan GAM, yakni: pertama, GAM di Aceh, kedua, GAM di Malaysia, dan ketiga, GAM di Swedia, walaupun ada juga orang-orang GAM dan/atau simpatisannya di

kota/ negara lainnya di Dunia, seperti: di Denmark, di New York, dan di kota-kota Amerika Serikat lainnya, di Australia, di Den Haag, Thailand Selatan, Singapura, dan sebagainya.

Hasan Tiro sebagai Pimpinan Tertinggi GAM, berada di Stockholm, Swedia, yang selalu didampingi oleh tokoh-tokoh GAM lainnya, seperti: Dr Zaini Abdullah, Jamil Amin, Bachtiar Abdullah, Syarif Usman, yang kemudian berubah namanya menjadi Syarif Goran Usman, Ramli Abubakar, Tgk Jalil Ismail, Yusril Abdullah, Teuku Sarong, Teuku Hasan Ibrahim, Mustafa Jalil, dan kemudian bergabung Malek Mahmud, yang tadinya berdomisili di Sangapura dan Zakaria Saman, yang tadinya berada di Thailand. Mulanya Dr. Husaini Hasan dan juga Daud Paneuk, berikut putranya, Yusuf Daud, Syahbuddin A. Rauf, Adam Umar, serta seseorang yang ber-gelar Guru Raman (Abdurrahman), dan beberapa yang lain, juga berada bersama Hasan Tiro, namun sejak tahun 1986, karena proses dinamika intern GAM, Husaini Hasan dan beberapa temannya menjadi renggang dengan “Wali Negara”. Proses “konsolidasi dan kristalisasi” berjalan terus, sehingga sampai dengan tahun 1998, beberapa anggota GAM yang tadinya merupakan “lingkaran dalam” Hasan Tiro, seperti: Daud Paneuk, Yusuf Daud, Syahbuddin menjadi berseberangan dengan orang-orang dekat Hasan Tiro yang di imami oleh Zaini Abdullah, yang berarti mendekat ke kubu Husaini Hasan, walaupun mereka tetap ber Wali Nanggrou kan Hasan Tiro.

Sibak Rukok Treuk

Sejak awal tahun 1980'an, mulai diperdengarkan issue “*sibak rukok treuk*” yang bermakna, bahwa perjuangan GAM untuk mencapai Aceh Merdeka, sudah hampir tercapai/berhasil, tinggal hanya “sebatang rokok lagi”. Slogan tersebut cukup menyentuh, dan mengelorakan semangat para pendukung dan pejuang GAM, baik kalangan sipil, maupun sayap militernya. Slogan tersebut, cepat sekali menyebar di kalangan rakyat, bersamaan dengan issue lainnya yakni: pertama, GAM didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat melalui Armada VII-nya, yang saat ini (saat itu) kapal induknya sedang berlabuh di Lautan Hindia. Issue tersebut dilengkapi dengan selebaran berupa gambar sketsa, yang memperlihatkan titik-titik di mana bantuan senjata dari Amerika Serikat berada/akan didrop, disekitar Aceh, demikian pula kapal – kapal selam dan pesawat tempur udara, yang setiap saat dapat digerakkan/dikerahkan untuk membantu peperangan Aceh melawan RI. Issue lainnya adalah, bahwa Hasan Tiro telah berhasil melobby dan mempengaruhi PBB (khususnya Sekjen PBB Kofi Annan), dan negara-negara industri maju, untuk memihak dan memberikan bantuan kepada perjuangan Aceh mencapai kemerdekaannya dari Indonesia.

Beberapa Orang AM Tertembak

Sementara banyak tokoh-tokoh GAM exodus ke luar negeri, sisa-nya yang ada di dalam negeri bertarung dengan serba kekurangan dan keterbatasan terutama dalam hal senjata dan logistik, serta terus berjuang di hutan-hutan, dengan segala keprihatinan, setiap saat diburu oleh aparat keamanan RI, sehingga satu demi satu mereka tewas di medan juang.

Dr. Zubir Mahmud misalnya, tewas tertembak dalam suatu pengepungan, pada tanggal 25 Mei 1980, disuatu tempat di Aceh Timur. Sementara temannya bernama Ilyas Syamsuddin, dapat melarikan diri.

Dr. Muchtar Yahya Hasbi, bersama pengawalnya bernama Daud Jenggot tewas tertembak oleh operasi militer dari Batalion Kuala Simpang di Pulau Tiga, Aceh Timur, pada hari pertama Idul Fitri tahun 1980, yakni tanggal 12 Agustus 1980. Tgk Ilyas

Leubee, wafat tertembak selesai sholat Ashar di di Jeunieb, pada tanggal 15 April 1982, bersama dengan Tgk Idris Ahmad, Gubernur Batei Ilikek, dan seorang stafnya bernama Yacob Piah. Sedangkan pada tanggal 20 Mei 1982, Idris Mahmud, Gubernur AM, Peureulak, yang juga abangnya Dr. Zubir Mamud, tertangkap di desa Matang Bungong, Idi, Aceh Timur.

Latihan di Lybia

Orang-orang GAM di negara-negara Skandinavia, terutama disekitar Stockholm, Swedia, sebagian besar adalah pendatang baru, semenjak Hasan Tiro menjadikan kota tersebut sebagai domisilinya dan sebagai Markas Besar GAM di luar negeri. Keberadaan Hasan Tiro di Stockholm, Swedia, bagaikan inti magnet, yang menyerap/ menarik semua metal lain yang berada dalam medan magnet, untuk konsentrasi di sekitar kota/negara tersebut. Umumnya mereka datang dari Malaysia, atau Singapura, dan dari Aceh/Indonesia baik melalui maupun tanpa melalui Malaysia, serta juga dari negara-negara lainnya di dunia, sedangkan sebagian kecil dari mereka me-mang telah merupakan mukimin lama di negara-negara Skandinavia.

Sebagian kecil dari orang-orang GAM yang berada di luar negeri, ada pula yang dikirim ke Lybia untuk mengikuti pelatihan militer di Kamp Maktabah, Tajura, dekat Tripoli.¹¹⁸³ Mereka yang dikirim ke Lybia umumnya berusia muda, rata-rata di bawah umur 30 tahun. Muzakkir Manaf sendiri yang kemudian menjadi Panglima Perang GAM, menggantikan Abdullah Syafe'i adalah jebolan Lybia lichtung pertama, tahun 1986. Ada berbagai keterangan tentang jumlah orang GAM yang dilatih di Libya, antara tahun 1986 s/d 1989, sebagaimana ditulis oleh Kirsten E. Schulze, dalam makalahnya¹¹⁸⁴ sebagai berikut:

- Menurut Hasan Tiro, di antara 30.000, ada sebanyak 5. 000 gerillia GAM telah dilatih di Libya, antar tahun 1986 dan 1989, Malik Mahnud mengatakan ada sebanyak 1. 500 orang.
- Para pengamat, mempercayai ada sebanyak 700–800 orang GAM dilatih di Lybya, sedangkan kalangan militer Indonesia, mengata-kan sebanyak 583 orang GAM adalah lulusan latihan di Lybia.

Tgk. Hasan Tiro sendiri ikut menggembleng mereka yang dilatih di Lybia, khususnya dalam hal, politik, sejarah, dan ideologi perjuangan.

Walaupun orang-orang GAM dilatih di sana, namun tidaklah otomatis berarti Lybia mendukung “Aceh Merdeka”, hal itu terbukti kemudian ketika pada tahun 2003, Presiden Lybia Muammar Khadhafi, secara terang-terangan mendukung “the unity and integrity of the Indonesian state”.

Sedangkan keseluruhan orang GAM menurut Kirsten, berkembang dengan pesat dari sebanyak 70 orang pada tahun 1976, menjadi beberapa ratus pada akhir tahun 1980-an, dan antara tahun 1999–2000 meningkat menjadi 3.000 orang. Pada sekitar atau selama berlakunya COHA, yakni pada tahun 2002/2003, ada sekitar 5.500 orang, serta saat ini (2004) menjadi sebanyak 8.000 orang.

Mereka yang dikirim untuk latihan di Lybia umumnya adalah orang-orang GAM yang tadinya berdomisili di Malaysia atau Singapura, walaupun ada juga beberapa orang langsung datang dari Aceh atau Indonesia, namun tetap saja melalui Malaysia dan atau Singapura, untuk kemudian berangkat ke Lybia. Setelah menyelesaikan

¹¹⁸³ Isa Sulaiman, *op.cit.*

¹¹⁸⁴ Kirsten E. Schulze, dalam makalah, “Insurgency and Counter-Insurgency: A Strategic Analysis of the Aceh Conflict”, 2004.

latihan tersebut mereka umumnya kembali ke Aceh melalui Malaysia dan/atau Singapura. Sesampainya di Aceh, menurut Kirsten, mereka menata organisasi baru dari Para Komando GAM, yang terbagi menjadi tiga group, yakni: 1). Group yang bertanggung jawab untuk pendidikan dan kewaspadaan, 2). Group yang bertanggung jawab untuk diplomasi, dan 3). Group yang bertanggung jawab untuk operasi militer. Pulangnya mereka para alumni Libya tersebut, menambah semangat dan maraknya GAM di Aceh.

Sementara itu ada pula orang-orang GAM merasa tidak nyaman lagi berada di Aceh, dan belum atau tidak siap untuk “naik ke gunung atau hutan”, mereka hijrah ke Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan juga ke tempat-tempat lainnya di Indonesia. Mereka, ditempat baru meneruskan perjuangan dengan berbagai cara, dan bila perlu sesewaktu kumpul di Jakarta atau ditempat lainnya untuk menggerakkan dan meramaikan demonstrasi dengan tema-tema tertentu. Sebagian dari mereka telah berubah pikiran, tidak lagi berstatus sebagai pejuang GAM, tetapi cukup sebagai simpatisan atau pendukung saja, atau bahkan memutuskan hubungan sama sekali dengan GAM.

Manuver Hasan Tiro di Luar Negeri

Kondisi yang tidak kondusif untuk kembali ke Aceh telah sangat disadari dan diperhitungkan benar oleh Hasan Tiro. Sedangkan perjuangan ingin dilanjutkan. Di tengah dilemma itu mengharuskan Hasan Tiro, untuk menempuh strategi dan taktik membuka dan mempengaruhi mata dunia terhadap esensi perjuangannya, sekaligus menggalang dukungan mereka.

Untuk itu Hasan Tiro mulai sering tampil di forum-forum dunia termasuk diberbagai Seminar terutama yang membahas masalah yang berkenaan dengan kemerdekaan, dekolonisasi, self determination, hak-hak asasi manusia, dan sebagainya. Beliau juga meningkatkan hubungan yang lebih intensif dengan tokoh-tokoh Republik Maluku Selatan (RMS), seperti Manusama, Otto Matulesy, Frieda Saouhuat dinegeri Balanda, dengan tokoh-tokoh Papua Merdeka, dan tokoh-tokoh Fretelin-Timor Leste, seperti Ramos Horta, dan sebagainya. Demikian pula dengan berbagai tokoh NGOs International, termasuk Carmel Budiardjo, seorang pelarian dari Indonesia, karena diduga terlibat PKI. Beliau juga berhasil membina hubungan dengan Presiden Lybia, Muammar Khadafi, sehingga dengan ke dekatannya itulah, akhirnya banyak pemuda AM dilatih di Lybia, sebagaimana disebutkan di atas. Jika dikenang ke belakang, kepada tulisan beliau di catatan hariannya tanggal 28 Maret 1979: “*Now I have to go abroad for a while on a mission that only I can do it*”. Tugas dan misi inilah rupa-rupanya yang hanya beliau sajalah yang dapat dan mampu melakukannya. Di kalangan orang-orang yang mengenal Hasan Tiro, memang sulit bisa mempercayai, bahwa misi seperti di atas, akan mampu dilakukan oleh orang AM lainnya, sebaik oleh beliau sendiri.***



BAB 5

ACEH SEBAGAI DAERAH

OPERASI

MILITER DAN KEKEJAMAN

*Ta jak lam uteuen ji kap le romueng,
Ta treun lam krueng ji kap le buya.
Ta jak u laot ji top le parou,
Ta wou u nanggrou ji poh le bangsa.
(Syamaun Gaharu)*

APA yang disebut dengan operasi militer, sesungguhnya lah mulai digelar sejak mula munculnya AM di Aceh. Pemerintah pusat mulai menganggap serius terhadap gerakan yang diprakarsai oleh Hasan Tiro ini, setelah terjadinya penyerangan terhadap 2 orang asing (AS) kontraktor pada perusahaan pengeboran minyak/gas Bechtel di sekitar Lhoksukon, yang termasuk Aron Field, cluster III, dan seorang Cina warganegara Malaysia, pengusahaan HPH. Salah seorang di antaranya yang berkewarganegaraan AS, bernama George Parucome ditembak oleh orang AM yang akan menagih Pajak, pada tanggal 29 Nopember 1977, dan meninggal dunia, sedangkan seorang lagi bernama Donal Stayer, mengalami luka berat. Konon kabarnya kemudian dia pun meninggal.

Pelaku penembakan tersebut, menurut pihak intelijen, yang ketika itu sebagai aparat dari Operasi Nanggala XVI Kopassus, adalah pasukan GAM di bawah pimpinan Fauzi Hasbi (Abu Jihad). Ada pula yang menyebutkan bahwa pelakunya adalah pimpinan AM di sekitar Aron ketika itu, adalah seseorang yang bernama Robert dan/atau Yusuf Ali.

Tertembaknya mereka, berbarengan dengan semakin meningkat-nya gangguan terhadap pembangunan proyek vital LNG. Korban pun berjatuh, baik dalam bentuk

nyawa orang, luka-luka, maupun harta benda. Bersamaan dengan itu, sebenarnya telah ada di Aceh, apa yang disebut dengan Operasi Keamanan Dalam Negeri, baik berupa operasi teritorial, operasi tempur, maupun operasi intellijen dan sebagainya. Demikian dikatakan oleh Jenderal (Purn) Try Sutrisno dalam dengar Pendapat dengan Pansus DPRRI tentang Aceh, pada tanggal 19 Nopember, 1999. Mungkin sejak adanya berbagai macam operasi tersebutlah, Aceh lalu disebut berstatus sebagai “daerah operasi militer”, yakni sejak tahun 1989. Mengingat daerah operasi militer atau sering disingkat dengan DOM, bukanlah suatu status bagi suatu daerah yang dikenal dalam lingkup Dephankam dan/ atau di kalangan Mabes TNI dan/ atau di Mabes Polri, sehingga tidak ada deklarasi kapan operasi tersebut dimulai sebagai suatu status formal bagi Aceh. Oleh karenanya juga, maka tidaklah diketahui dengan jelas, kapan mulainya DOM tersebut.

Sementara itu “dakwah GAM” pun semakin sering dan intensif dilaksanakan, yang kadang kala dikaitkan dengan *peusijuek* senjata, sebagaimana antara lain yang dilaksanakan oleh Yusuf Ali, Panglima Pase, di Meunsa Dayah, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, yang membai’at 40 orang pejuang GAM, dan juga perusijuek senjata mereka, pada tanggal 17 September 1989. Demikian pula yang dilakukan oleh Rais di Meureudu, rekrutmen anggota GAM oleh Tgk Serawak di Banda Aceh dan Aceh Besar, oleh Tgk. Iskandar di Langsa serta oleh Pawang Rasyid, di Geumpang, semuanya pada tahun 1990. Aksi perampasan senjata pun semakin meningkat, baik yang dilakukan oleh Yusuf Ali, maupun oleh GAM bersenjata lainnya, di berbagai daerah, seperti di Pos jalan KKA Krueng Tuan oleh Robert yang bernama asli Surya Darma, seorang desersi Pratu TNI, tanggal 26 September 1989, di Proyek PT Gruti, Krueng Tuan, pada tanggal 27 Februari 1990, di desa Pulo Naleueng Peusangan, oleh Umarmiyah, pada 20 April 1990, di Polsek Syamtalira Bayu, Aceh Utara, pada bulan April 1990, di Polsek Kec, Peukan Baro, Pidie, tanggal 2 Januari 1990, di dekat Kampus Jabal Gafur, Pidie, pada tanggal 10 Maret 1990, di Reubei, tanggal 2 Mei 1990, di desa Aramiah, Aceh Timur, pada tanggal 20 Mei 1990, di Simpang Ulim, Aceh Timur, pada tanggal 6 Juni 1990.

Orang-orang GAM juga mulai melakukan intimidasi dan teror terhadap transmigran, di UPT (Unit Penempatan Transmigrasi) Pintu Rimba, Kecamatan Peudada, di Pirbun (Perusahaan Inti Perkebunan) Krueng Pase, Kecamatan Kuta Makmur, di Bukit Hagu, Lhok Sukon, di Kecamatan Julok, di Rambung Lup, Kecamatan Idi Rayeuk, yang mengakibatkan sejumlah transmigran pulang kembali keJawa, atau melarikan diri ke tempat lainnya seperti ke Langkat, dan Deli Serdang, sementara sebanyak 44 KK atau 210 orang mengungsi ke Bireuen, dan Lhokseumawe, untuk memperoleh perlindungan dari aparat keamanan.

Aksi kekerasan orang GAM bersenjata terhadap suku tertentu, dalam hal ini Jawa, selain meresahkan masyarakat, rupa-rupanya juga cukup mengkhawatirkan orang-orang GAM tertentu lainnya, demikian pula khususnya di kalangan beberapa aktivis mahasiswa, yang oleh apkam dikategorikan sebagai pendukung atau simpatisan GAM. Mereka merasakan kurang tepatnya cara-cara kekerasan terhadap suku tertentu tersebut. Untuk itu sekitar bulan Juni dan Juli 1990, yang menurut Isa Sulaiman, mereka yang terdiri dari Hasbi Abdullah, Mulkan, Nurdin AR, dan beberapa orang lainnya, sering “duduk” membicarakan perihal tersebut, dan akhirnya sampai pada kesimpulan untuk mengusulkan agar kekerasan terhadap suku Jawa tersebut dihentikan. Namun usulan tersebut tidak mendapat respon yang memuaskan dari pihak GAM yang bersenjata, dibuktikan dengan masih terjadinya kekerasan serupa setelah itu, walaupun kualitas dan frekuensinya sudah semakin berkurang. Namun di lain pihak muncul pula kekerasan model baru, dengan modus operandi yang baru pula, yakni

pembakaran rumah-rumah sekolah, seperti misalnya: pembakaran SMA Negeri Idi Rayeuk, SMA Negeri Bireuen, SMA Negeri Peudada, SMP Negeri Lueng Putu, SMP Negeri Trieng Gadeng, dan sebagainya.

Selain mengganggu keamanan dan ketertiban serta sangat meresahkan masyarakat, pihak Aparat ke mana pun menjadi lebih serius menanggapi. Kalau tadinya masih ada sikap anggap enteng kepada GAM, malah ada yang mengatakan, GAM akan segera dapat dibasmi atau diberantas, atau ditumpas, sejak saat itu sikap seperti itu terkoreksi dengan sendirinya. Apalagi setelah GAM menunjukkan kemampuannya menghadapi ABRI atau aparat keamanan yang persenjataannya lebih lengkap, dan lebih modern, misalnya ketika terjadinya perampasan 19 pucuk senjata M-16, beberapa pistol dan 2 pucuk minimi, serta 4.000 butir peluru, dari TNI yang sedang melakukan kegiatan pembangunan jalan dalam rangka "ABRI masuk Desa", atau juga sering disebut dengan Operasi Bhakti ABRI. Perampasan senjata tersebut terjadi pada tanggal 26 September 1989 di Muara Batu, Krueng Tuan dan tanggal 28 Mei 1990, di suatu desa di Kecamatan Buloh Blang Ara (Kuta Makmur), sekitar 15 km dari Ibukota Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe. (Buku Kontras). Tiga orang prajurit TNI, tewas, dan beberapa orang luka-luka, dalam insiden tersebut. Dengan kejadian itu nama Robert sebagai tokoh AM bersenjata, di sekitar Aceh Utara semakin tenar dan semakin diburu siang malam oleh TNI/Polri, sehingga menurut informasi ada sebagian dari senjata tersebut, berhasil direbut kembali. Ada pula yang mengatakan bahwa Yusuf Ali, yang saat itu sebagai Panglima Pase dan Ishak Daud, yang kemudian menjadi Panglima Peureulak, juga ikut berperan dalam perebutan senjata tersebut.

Sejak itulah operasi militer lebih intensip dan lebih teratur di-laksanakan, baik operasi intellijen yang ketika itu diperankan oleh Kopassus, mulai dari operasi Nanggala-16, yang dipimpin oleh Mayor Sofian Efendi, digantikan dengan operasi Nanggala-21, pimpinan Letda Syafrie Syamsuddin, kemudian digantikan oleh Operasi Nanggala 35, dipimpin oleh Kapten Sutiyoso, di samping operasi-operasi lainnya. Tujuan utama dari operasi-operasi tersebut antara lain adalah, menetralsir situasi dan kondisi, memulihkan keamanan agar konstruksi dari proyek-proyek LNG dapat berjalan tanpa gang-guan, dan tentunya untuk mengatasi gerakan Aceh Merdeka. Anehnya, sudah demikian kondisinya, masih saja pemerintah atau tepatnya pihak keamanan mengatakan bahwa kekerasan dan pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh orang-orang atau kelompok kriminal, yang tidak mempunyai motivasi politik. Mereka adalah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). (Buku Kontras).

Status sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), walaupun dapat dikatakan sebagai "status", sesungguhnya dimulai dengan adanya penempatan/penugasan (*deployment*) pasukan TNI untuk melakukan operasi dengan nama sandi "Operasi Jaring Merah" di Aceh yang dimulai pada tahun 1989 dan berakhir dengan dihentikannya operasi tersebut. Sejak operasi jaring merah tersebut, terjadi penambahan jumlah personil pasukan non-organik sebanyak 6.000 orang, suatu angka yang cukup fantastis. Sementara dihentikannya Operasi Jaring Merah, terkesan sebagai mencabut status DOM oleh Panglima TNI Wiranto pada tanggal 7 Agustus 1998. Banyak petinggi militer, merasa kurang pas, dengan istilah pecabutan DOM dan mereka terus berargumentasi dengan mengatakan, sesungguhnya tidak ada istilah baku di kalangan ABRI, untuk menyatakan atau memberi status suatu daerah sebagai Daerah Operasi Militer atau DOM, jadi tidak ada yang perlu dicabut. Yang ada adalah, untuk Aceh sejak akhir tahun 1989-an, mengingat meningkatnya kegiatan GAM, diadakan dan di tingkatkan operasi militer yang menurut Try Sutrisno, tergolong sebagai Operasi Keamanan dalam Negeri (Ops Kamdagri), dan bukan operasi tempur. Yang dilakukan di Aceh ketika itu, lebih berbobot sebagai operasi intellijen yang inti kekuatannya didominasi oleh aparat

Kopassus (Komando Pasukan Khusus), dibantu oleh pasukan elit lainnya, yang merupakan pasukan non-organik di Aceh, yang dikenal dengan nama Operasi Jaring Merah. Operasi intelligen, dapat saja digabung dengan operasi teritorial, yang tujuan utamanya adalah membina, membimbing dan mengembangkan masyarakat. Sedangkan status Aceh adalah tap saja sebagai “tertib sipil”, sebagaimana daerah (Propinsi) lainnya.

Gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban yang diduga dilakukan oleh orang-orang GAM, membuat Gubernur Aceh. Prof. Dr. Ibrahim Hasan kuatir, jangankan gangguan keamanan yang semakin meningkat tersebut pada waktunya akan mengganggu proyek vital yang sedang giat-giatnya dibangun saat itu, serta akan mengganggu ketenangan dan keselamatan rakyat pada umumnya. Oleh karenanya Ibrahim Hasan melaporkan perihal tersebut, kepada Mendagri dan Presiden RI di Jakarta, dan itu memang salah satu kewajibannya sebagai Gubernur/Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Sebenarnya yang di permalahkan dan/atau yang menjadi masalah dan bahkan ditentang, bukanlah operasi militernya, apalagi kalau operasi, tersebut benar-benar bertujuan baik, demi kemaslahatan rakyat Aceh, dan keberlanjutan pembangunan Aceh. Tetapi justru berbagai kasus pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, dan berbagai tindak kekerasan, yang telah sangat menyengsarakan dan menzalimi rakyat, yang menyertai operasi tersebut, yang ditentang habis-habisan oleh orang Aceh, bahkan oleh siapa saja di muka bumi ini, yang punya hati dan perasaan. Banyak sekali contoh dapat dikemukakan sebagai indikator untuk mengatakan bahwa di Aceh telah terjadi eskalasi atau peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban umum, sekaligus juga banyak sekali terjadi tindak keke- rasan, kekejaman terhadap rakyat, serta pelanggaran HAM.

Pasukan organik yang ada di Aceh juga tentunya ikut membantu operasi tersebut. Dengan legalitas Operasi Jaring Merah, keberadaan militer menjadi merata di hampir seluruh Aceh, terutama di daerah-daerah kantong GAM. Selama 9 tahun berada dalam status DOM, cukup banyak menelan korban nyawa manusia, orang hilang, harta benda yang hancur dan musnah, baik milik pribadi maupun milik publik. Adanya kuburan massal, adanya orang mati tak tahu di mana kuburannya, adanya orang hilang karena dihilangkan, adanya orang diculik atau ditahan untuk disiksa, adanya pembakaran rumah/tempat-tinggal, toko atau kedai dan bahkan bangunan publik, yang kesemuanya tergolong sebagai pelanggaran HAM, sangat menonjol terjadinya dimasa DOM. Bahkan setelah DOM pun masih banyak korban berjatuh. Inilah antara lain yang dikatakan sebagai sesuatu yang baru oleh Prof. Jim Siegel, Pengamat Aceh dari Cornell University, sebagaimana ditulis oleh Fikar F. Weda, dan S. Satya Dharma, sebagai berikut: “Sekarang Pemerintah Indonesia dengan ABRI-nya melakukan tindakan terhadap rakyat yang berat sekali. Kalau boleh bilang malah ganas. Kita melihat kuburan massal, itu luar biasa. Luar biasa buat saya. Sejak perang Aceh melawan Belanda, tidak ada kuburan massal. Kalau ada foto-foto, kita hanya lihat banyak orang yang terbunuh oleh Belanda. Dan itu terjadi dengan cara bertempur. Jadi lain yang terjadi di Aceh sekarang. Orang diculik, dibunuh, disiksa. Itu hal yang baru dalam sejarah Aceh”.¹¹⁸⁵

Forum Peduli HAM Aceh melaporkan tentang berbagai korban kekerasasn, selama DOM, sebagai berikut:

Orang tewas/terbunuh, sebanyak 1. 321 kasus.

Orang hilang, sebanyak 1. 958 kasus.

Penyiksaan, sebanyak 3. 430 kasus.

Pemeriksaan, sebanyak 128 kasus.

¹¹⁸⁵ Fikar F. Weda, dan S. Satya Dharma, *Aceh Menggugat*, 1999; dan buku laporan lembaga Kontras.

Pembakaran, sebanyak 597 kasus.¹¹⁸⁶

Total keseluruhannya, sebanyak 7.434 kasus.

Pada prinsipnya dan logikanya, penambahan personil militer ke Aceh, untuk melakukan operasi militer adalah untuk menghadapi semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan GAM, dan/atau pengacau keamanan lainnya, yang tidak mampu di atasi oleh personil TNI/ Polri organik, yang ada di Aceh saat itu. Dengan penambahan baik personil TNI/Polri, berikut peralatan dan persenjataannya, menjadi lebih mudahlah bagi TNI/Polri untuk melakukan operasi, apa pun namanya, tegasnya dalam mengejar/memburu dan mengeliminir ruang gerak GAM. Pihak GAM pun sangat sadar akan kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka tersebut. Mulailah mereka menempuh taktik menghindar, bahkan menjauh dari konsentrasi dan area operasi TNI/Polri dan/atau dari perkampungan masyarakat, atau dari sekitar jalan raya. Sebagian dari orang-orang GAM melarikan diri ke luar negeri, rerutama ke Malaysia, terutama melalui cara-cara illegal, yang menurut Isa Sulaiman, ada sebanyak 286 orang mendarat di berbagai tempat disepanjang pantai Malaysia, antara tanggal 15 Maret s/ 5 September 1991. Tentunya tidak semuanya mereka adalah orang GAM, tetapi yang pasti adalah mereka semuanya tidak tahan dan/atau takut kepada kekejaman operasi apkam di Aceh yang tidak pilih bulu. Banyaknya pendatang illegal (haram) dari Aceh ke Malaysia itu, telah menimbulkan masalah tersendiri dalam hubungan diplomatik Indonesia –Malaysia, walaupun kemudian masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Sebagian dari mereka kemudian berhasil “dibujuk” untuk dipulangkan kembali ke Aceh melalui apa yang disebut sebagai “operasi bujuk” yang digelar pada akhir tahun 1991. Sebagian dari mereka selamat sampai di Aceh, namun sebagian ada pula yang hilang di tengah jalan, atau tepatnya di tengah laut. Namun, Musanna, putranya A. Wahab Umar Tiro. Iklil Iyas Leube, Said A. Hanan Adami, Yusra Habib Gani, dan lain-lain sebanyak 43 orang, menerobos masuk halaman kantor UNHCR (United Nations High Commisioner of Refugees) di Kuala Lumpur, pada tanggal 22 Juni 1992, untuk meminta status pengungsi (*refugee*). Setelah itu bebas-lah bagi mereka untuk menetap di negara mana yang dipilihnya.

Sementara itu, ada pula orang GAM yang tidak bernasib baik, mereka tetap berada di Aceh, dan terus berjuang sambil dikejar-kejar oleh apkam RI, sampai ke pucuk-pucuk gunung dan ke rawa-rawa dipantai, siang-malam, sehingga banyak pula di antara mereka yang tewas, seperti: Iskandar di Langsa, Amin Nafi di Pidie, Imum Hamzah di Batei Iliiek, Yusuf AB di Matang Keusijuek, Yusuf Ali di Krueng Guci, dan sebagainya, atau tertangkap seperti T. M. Said, Ir. Linggadiansyah, dan sebagainya. Namun GAM tentunya, sangat sadar bahwa semuanya tersebut adalah resiko atau harga yang harus dibayar oleh suatu perjuangan, yang akan dipikul/diterima oleh siapa pun, apalagi untuk suatu perjuangan yang diyakini oleh GAM sebagai suatu perjuangan besar. Adalah wajar menurut masya-rakat, jika resiko dari operasi apkam tersebut diterima secara pro-porsional oleh GAM, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam suatu konflik besar. Demikian juga halnya, adalah wajar, jika ada akibat konflik yang diterima oleh apkam RI.

Tetapi yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan oleh fikiran sehat, adalah mengapa rakyat yang tak terlibat langsung sebagai pihak dalam konflik atau orang-orang yang tak berdosa, orang-orang sipil, termasuk anak-anak dan kaum perempuan yang tidak tahu menahu, menerima akibat buruk dari kekerasan dan kekejaman Operasi Militer tersebut. DOM. kenyataannya tidak hanya mengatasi, menekan dan mengeliminir gerakan atau pasukan dan orang-orang GAM, tetapi juga banyak, dan

¹¹⁸⁶ Sumber: Forum Peduli HAM Aceh, 1999.

menurut sementara laporan, bahkan lebih banyak tertuju kepada rakyat biasa yang bukan GAM. Walaupun hal itu dikategorikan oleh aparat keamanan, sebagai akibat sampingan dari suatu operasi militer, namun nyata-nya terjadi terus menerus dan semakin meluas, tanpa perbaikan yang berarti, betapapun dikritik keras oleh banyak pihak. Oleh karenanya, akhirnya terbentuklah citra, DOM adalah kekejaman dan kekasaran/kebrutalan/ penyiksaan terhadap rakyat sipil, yang kesemuanya adalah pelanggaran HAM berat. Sudah barang tentu, Pemerintah atau pimpinan instansi keamanan, mengatakan bahwa itu bukanlah kebijakan yang disengaja, tetapi lebih merupakan ekses. Kalaupun ada yang disengaja, hanya lah berupa *shock therapy* semata. Tetapi masyarakat tentu dapat menilai, masa iya suatu *shock therapy* berlangsung selama 9 tahun secara terus-menerus dan merata diseluruh Aceh.

Kalau kita bertanya mengapa hal tersebut terjadi? Tentu banyak sekali jawabannya, tetapi yang paling masuk akal, mungkin jawaban berikut:

1. Memang lebih mudah menemukan dan kemudian menganiaya rakyat sipil di kampung-kampung, atau dikedai-kedai dari pada repot-repot mencari GAM ke gunung-gunung, atau ke rawa-rawa, sedangkan ongkos operasinya sama saja kalau dihitung perhari. Mencari GAM akan ada resiko kemungkinan kena tembak oleh senapan GAM, tetapi menemukan rakyat yang tak bersenjata, tidak ada resiko apa-apa. Mendapatkan orang-orang kampung atau siapa saja, dan sekaligus menganiayanya menjadi perlu dan bahkan harus, bagi apkam yang tidak professional dan cenderung untuk sekedar balas dendam, atau untuk memenuhi dorongan emosional setia kawan/solidaritas korp, mengingat pada waktu lain ada teman mereka yang diganggu dan/atau ditembak oleh GAM, bukan oleh orang kampung yang dianiaya tersebut. .
2. Perlu ada laporan, baik ke induk pasukan, maupun ke Jakarta, tentang berapa orang GAM yang ditemui dan dimusnahkan, atau dibina, sehingga kalau memang sulit mencari GAM yang se-benarnya, ya, siapa sajalah yang ketemu, yang penting dalam laporannya disebutkan bahwa mereka adalah orang GAM.
3. Setaip ada laporan menemukan atau memusnahkan orang GAM, adalah suatu prestasi, dan credit point, yang mempunyai dampak bagi kenaikan pangkat. Oleh karenanya setiap operasi, dibenak masing-masing orang yang ikut operasi, adalah kenaikan pangkat, dan tambahan insentif lainnya, tidak perduli siapa yang akan menjadi korban, atau dikorbankan untuk itu. .
4. Prajurit apkam RI memang rendah sekali *sense of Human Rights*nya, sehingga nyawa manusia bagi mereka adalah sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali, dibandingkan dengan kenaikan pangkat dan insentif yang mungkin dirimanya. Lain halnya kalau nyawa tersebut adalah nyawa dia sendiri, atau kalau kejadian tersebut menimpa dia sendiri dan/atau keluarga-nya. Hak Asasi Manusia oleh karenanya akan kalah atau pun dikorbankan untuk sesuatu yang dibungkus dengan adagium *to kill or to be killed* dalam suatu pertempuran.
5. Diduga ada “grant strategy” untuk menganiaya dan menghancurkan-leburkan orang Aceh, karena selalu berontak, dengan cara menyamaratakan atau berasumsi bahwa semua orang Aceh ada-lah GAM atau pendukung GAM atau simpatisan GAM. Maka semua orang Aceh haruslah diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap GAM, jadi harus dimusnahkan atau paling tidak harus di lumpuhkan, atau dibuat tak berdaya.

6. Diduga ada “grant strategy” lain, yakni untuk memelihara kelanggengan konflik di Aceh. Dengan berbuat kejam dan sangat menyakiti hati orang Aceh tersebut, akan terpeliharalah dendam di hati sanubari orang Aceh, kepada apkam RI. Sehingga sedikit saja ada masalah, diharapkan oleh sutradara “grant strategy” tersebut, agar Aceh akan berontak lagi, karena dendam dan sakit hati itu. Orang-orang yang menghendaki kelanggengan konflik Aceh atau konflik di Aceh, adalah mereka yang memang bisnisnya hanya akan hidup dan menguntungkan dalam suasana konflik. Adalah paling keji, jika ada di antara mereka yang mendesain, Aceh sebagai tempat atau wilayah ajang latihan bagi apkam RI, terutama latihan perang-perangan secara fisik atau latihan menggunakan senjata, dengan menjadikan tubuh orang Aceh sebagai sasaran tembak, atau sasaran penganiayaan. Ada pula yang ingin menjadikan konflik Aceh sebagai ajang latihan untuk meningkatkan kewaspadaan dan “Katahanan Nasional” di segala bidang.

Ada di antara korban kekejaman tersebut diambil atau diculik, disiksa, dan kemudian dibunuh diam-diam di suatu tempat, atau ada juga yang bernasib baik, dilepas. Ada pula yang dibunuh terang-terangan atau dipertontonkan di depan publik, atau di depan keluarga dan kaum kerabatnya. Oleh karenanya rakyatlah yang paling banyak menderita selama 9 tahun masa DOM. Rakyat benar-benar terzalimi, bagaikan berada dalam “neraka”, dan tidak tahu mau berbuat apa, dan tidak pula tahu mau mengadu ke mana atau kepada siapa.

Kondisinya persis, sebagaimana yang digambarkan oleh banyak panyair, yang diinspirasi oleh syair Taib Adami¹¹⁸⁷ ketika membela diri di pengadilan, lebih kurang sebagai berikut:

Ta jak bak Geusyhik, lagei bok pik hana sagou

Ta jak bak Camat, haba mangat geunap urou

Ta jak bak Wedana, lagei tima hana talou,

Ta jak bak Bupati, lageu gusi hana gigou,

Ta jak bak Gubernur, hom hai, ta meuleueh-lheueh keudrou

Akhirnya rakyat pasrah, tidak tahu lagi ke mana mengadu, apa yang terjadi terjadilah. Rakyat pun berfikir, tentu disuatu waktu pertolongan dan keadilan akan datang, karena keadilan tersebut ada di tangan Allah SWT, dapat saja disalurkan melalui tangan-tangan makhluk yang dikendakinya. Hanya dengan berfikir pendek yang sedemikianlah rakyat akhirnya mengurut dada, menerima kenyataan tersebut, semata sebagai takdir Allah. Mungkin dengan cara demi-kianlah dia dapat kembali tegak dan tegar menghadapi masa depan yang lebih penting lagi dari pada masa yang lalu yang penuh keke-laman dan kepahitan.

Rakyat ketika itu, memang serba salah, baik dalam menghadapi berbagai operasi militer TNI/Polri, dan juga dalam menghadapi kontra operasi tersebut dari pihak GAM, atau orang-orang yang mengatas namakan GAM. Hampir tiap hari orang mati, orang hilang atau dihilangkan, pembakaran, pemerkosaan, perampasan hak dan harta bendanya, penganiayaan/penyiksaan, dan hampir tiap hari pula kedatangan mayat bergelimpangan baik tanpa maupun dengan identitas di pinggir jalan, di semak-semak, dalam sungai, dan di tempat-tempat lain.

Sementara itu terkenallah beberapa arena pembunuhan (*killing field*) dan pasca pembunuhan baik kuburan massal yang sengaja digali, atau kuburan gelap dan/atau tempat pembuangan mayat, setelah dibunuh dengan kejam, seperti:

¹¹⁸⁷ Taib Adami, *Aceh Mendakwa..*

- Kuburan massal, atau tempat pembuangan mayat, dengan mayat yang bertumpuk-tumpuk di Bukit Tengkorak, di Kec. Jambo Aye, Aceh Utara, pada tahun 1990.
- Kamp Tahanan dan Jembatan di di Buket Takteh, Peureulak Aceh Timur, 7 orang tewas, ditembak setelah/pada saat diinterogasi di jembatan dan mayatnya jatuh ke sungai.
- Tanggal 12-16 September 1990, ditemukan tiga jenazah dalam karung, di tepi jalan raya, di Seumadam, Aceh Timur, dan beberapa hari kemudian ditemukan lagi 4 jenazah di Kejuruan Muda, kemudian di Halaban, Besitang Sumut pada tanggal 19 September 1990, ditemukan satu jenazah, sedang di Jempa, Aceh Utara, ditemukan pula 8 jenazah pada pertengahan September 1990, dan seterusnya.
- Desa Lueng Sa, Simpang Ulim, Aceh Timur, dua orang tewas, dieksekusi di depan umum, pada hari 17 Ramadhan 1991.
- Kuburan massal Blok B, UPT IV, Kebun Kelapa Sawit, Jambo Aye, Februari 1991.
- Tempat tahanan dan penganiayaan serta pembunuhan Rumoh Geudong, di Pidie, dan juga Kamp Tahanan dan penyiksaan Rancung, dikomplek Proyek Vital, dekat Lhokseumawe. Dua Kamp ini sangat termasyhur dimasa DOM, dan tentu saja, jangankan masuk ke dalamnya, mendengar namanya sajakpun orang sudah menggeletar ketakutan.
- Beberapa kuburan massal, seperti di Jalan Mobil Oil, Kec. Sukamakmur, di Perkebunan Kelapa Sawit PTP-V hutan Seureuke, Perkebunan Alue Nireh, Jurang Jalan TangseBeureunuen.

Demikian pula banyak terdapat tempat pembuangan mayat, seperti Sungai Arakundou, Lhok Nibong, di desa Seureuke, Kec. Jambo Aye, Kuburan massal di Bukit Sentang, Lhok Sukon, Jurang Cot Panglima, Pembantaian Tgk. Bantaqiah, dan sebagainya. Di samping itu menonjol pula adanya “kampung janda” sebagai simbol dari pemusnahan kaum laki-laki di suatu kampung, sehingga tinggallah para janda dan anak-anak.

Memang, dari berbagai fakta di lapangan, tidak seluruhnya kekerasan dan kekejaman serta pembunuhan/penghilangan tersebut dilakukan oleh aparat keamanan TNI/Polri. Ada juga yang dilakukan oleh orang-orang tak dikenal, atau oleh orang yang dikenal masyarakat sebagai GAM, atau orang-orang yang mengatasnamakan TNI/Polri dan/atau GAM. Namun yang sangat disesali masyarakat adalah perlakuan-perlakuan yang menyakiti hati, perasaan dan fisik rakyat, tegasnya yang menzalimi rakyat, yang dilakukan oleh apkam RI. Karena mereka adalah warganegara syah dari RI. Karena tugas apkam RI, adalah untuk melindungi rakyat dan bukan sebaliknya, dan tugas mereka adalah untuk membina dan mendekati rakyat dan bukan sebaliknya, tugas mereka adalah untuk mencari simpati rakyat dan masyarakat dan bukan sebaliknya. Perlakuan/ kekejaman/kekasaran mereka, diakui oleh masyarakat sebagai lebih menonjol dan lebih merata ketimbang yang dilakukan oleh pihak GAM dan atau oleh provokator lainnya.

Jika di renung-renung kembali, memang masuk akal juga, mana mungkin GAM sempat melakukan sesuatu lagi, termasuk keke-jaman dan kekerasan terhadap rakyat, sementara mereka sedang atau pagi-sore, siang-malam, dikejar-kejar oleh TNI/Polri, mereka lebih memilih lari terbirit-birit menyelamatkan diri, ketimbangan melakukan sesuatu yang menyakiti rakyat dikampung. Perlu juga dicatat, bahwa selama DOM, operasi TNI/Polri sangat intensip dan merata setiap saat, dan diseluruh wilayah Aceh, dari pantai sampai ke kaki-kaki bukit.

Sangat tragis, mencekam dan menyakitkan rakyat Aceh terhadap berbagai kekejaman dan kebrutalan selama DOM tersebut, oleh karenanya ketika Pangab Wiranto, mengumumkan akan menarik semua pasukan non-organik dari Aceh dihadapan Muspida Aceh di pendopo Aceh Utara, pada tanggal 7 Agustus 1998, disambut oleh hadirin/hadirat, dengan kumandang “Allahu Akbar”, disertai dengan katerharuan yang mendalam, serta secara beramai-ramai pula mereka melakukan sujud syukur, demikian pula di kalangan masyarakat. Pangab Wiranto, antara lain mengatakan “Setelah mendapat restu dari Presiden Habibie, mulai hari ini, ABRI akan segera menarik satuan-satuan ke luar Aceh, September tahun ini. Kepada Pangdam, saya beri waktu satu bulan untuk menarik semua pasukan yang bukan organik Aceh, Sebagai pimpinan ABRI saya putuskan bahwa keamanan Aceh, sepenuhnya saya serahkan kepada rakyat Aceh sendiri, yaitu kepada para ulama, tokoh masyarakat, guru, pejabat pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk satuan-satuan ABRI milik Polda dan Korem-Korem Aceh sendiri”

Kekerasan dan Kekejaman setelah DOM

Namun setelah DOM dicabut, bersama dengan dihentikannya Operasi Jaring Merah, bukanlah berarti Aceh terbebas dari operasi militer. Setelah keamanan Aceh beralih ke tangan Pasukan TNI dan Polri organik, dibentuklah kemudian operasi yang menggunakan tenaga inti Polri dan TNI organik tersebut, antara lain yang dikenal dengan nama: Operasi Sadar Rencong-I (Mei 1999-Januari 2000), Operasi Sadar Rencong II (Februari 2000-Mei 2000), Operasi Sadar Rencong III (Juni 2000-Februari 2001), PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa), Operasi Cinta Meunasah (Juni 2000-2001), dan Operasi Cinta Damai (2001-2002).

Suatu kenyataan yang sangat disesalkan, kembali terjadi sebagaimana adagium “operasi militer tetap saja menelan korban, siapa pun pelaksananya, tidak peduli organik ataupun non-organik”. Dicabutnya DOM, kemudian digantikan oleh PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa), Operasi Satgas Wibawa 1999, tetap saja yang menonjol adalah pembunuhan, kekejaman, kekerasan di mana-mana, dan tetap saja tidak pilih bulu dan pelanggaran HAM, baik yang diduga dilakukan oleh oknum aparat keamanan, maupun oleh oknum GAM atau oleh orang tak dikenal lainnya, dengan korban yang sama, yaitu rakyat sipil. Ada beberapa kasus yang tampil di media massa, di samping banyak lainnya yang tidak terekspose, seperti:

- Penganiayaan di gedung KNPI, Lhokseumawe, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 1999, di mana 4 orang tewas, dan 23 orang tahanan lainnya terpaksa dirawat di Rumah Sakit.
- Penembakan membabi buta di Idi Cut, terhadap kerumunan orang/ rakyat yang baru pulang dari (baru selesai) mendengarkan dakwah, pada tanggal 2 Februari 1999, dan *sweeping* yang dilakukan oleh aparat keamanan besok harinya tgl 3 Februari 1999, sehingga jumlah orang tertembak dan hilang sebanyak 25 orang.
- Penembakan brutal di Simpang KKA (Kertas Kraft Aceh), Krueng Geukueh, Aceh Utara, tanggal 3 Mei 1999, yang menewaskan rakyat sebanyak 65 orang, dan luka-luka sebanyak 119 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.
- Pembunuhan orang di Alue Nireh, Aceh Timur, tanggal 14 Mei 1999.
- Penghadangan pasukan PPRM dan tenaga medis, di Cot Kruet, Peudada, Aceh Utara, tanggal 25 Mei 1999, yang menewaskan dua orang polisi, seorang Dokter, dan seorang tenaga para medis.

- Penghadangan pasukan Aparat Keamanan yang berpatroli di Gunung Malem, Aceh Barat pada tanggal 29 Mei 1999, yang menewaskan 9 orang aparat keamanan.
- Penembakan kepada kerumunan rakyat, akibat pecah ban mobil PPRM yang sedang operasi di Alue Nireh, Peureulak, Aceh Timur, pada tanggal 13 Juni 1999, menewaskan 2 orang anak dan 3 orang dewasa, serta beberapa orang luka-luka.
- Upaya menggagalkan Pemilu dengan ancaman, di Aceh Utara dan Pidie, pada bulan Juni 1999.
- Pembantaian Tgk Bantaqiah, seorang Pimpinan Pesantren (Dayah) di desa Blang Meurandeh, Beutong Ateueh, Aceh Barat, berikut anak dan santrinya serta penduduk sekitar, seluruhnya sebanyak 57 orang, pada tanggal 23 Juli 1999, karena dituduh (menurut laporan intelijen) menyimpan senjata dan menanam ganja. Mereka ditembak mati di Pesantren tersebut dan meninggal di tempat sebanyak 31 orang, selebihnya dieksekusi di kilometer 7, dan 8 dalam perjalanan menuju ke Takengon.
- Upaya mengancam rakyat yang hendak mengibarkan bendera Merah-Putih pada tanggal 17 Agustus 1999, dan merampas bendera tersebut.
- Pembakaran Hotel Meutia, milik Pupuk Iskandar Muda, di Aceh Utara Oktober 1999.
- Pembakaran kantor Bupati, DPRD, Bappeda, dan kantor lainnya di Meulaboh, Aceh Barat, tanggal 2 Nopember 1999.
- Mengancam dan memaksa Geusyhik untuk tidak bekerja, sehingga banyak Geusyhik yang mengembalikan Cap Stempel ke kantor Camat.
- Memaksa orang/rakyat untuk mengungsi, dengan alasan takut kepada operasi Aparat Keamanan.
- Merajalelanya produksi dan lalu lintas Ganja.
- Ustaz atau ulama, yang sering menganjurkan *amar ma'ruf nahi munkar*, walaupun sedang pulang sholat di masjid atau di meu-nasah, atau mereka yang tidak membayar uang pajak nanggrou, diculik, kemudian dianiaya atau dibunuh.
- Seseorang, laki atau perempuan, dibunuh dengan semena-mena dengan tuduhan cuak, atau dekat dengan si pai.
- Seseorang dibunuh di depan keluarganya tanpa diketahui apa kesa-lahannya, kecuali dia adalah suku Jawa, demikian juga pembu-nuhan lainnya seperti terhadap orang yang tidak bersedia atau tidak cukup membayar uang tebusan.
- Penculikan dan Pemerasan terhadap Pegawai negeri atau pejabat negara atau kontraktor, atau orang tertentu, yang diharuskan membayar upeti atau "uang tebus nyawa" sejumlah tertentu, jika tidak sanggup memenuhinya akan dianiaya atau dieksekusi, atau dirampas harta bendanya.
- Pembakaran atau perampokan atau perampasan dijalanan umum baik terhadap Bus, dan atau angkutuan barang.
- Pembakaran bangunan publik, terutama rumah-rumah sekolah.
- Sweeping di jalanan umum, jika menemukan anggota TNI/ Polri dan atau orang-orang tertentu yang curigai, segera diculik, dianiaya dan atau dieksekusi.
- Pamaksaan atau "anjuran" untuk mogok kerja pada tanggal 4-5 Agustus 1999, dan anjuran mogok kerja bagi pegawai negeri, kecuali pegawai Rumah Sakit, PLN, kantor Pos, dan beberapa kantor pelayanan umum, sejak tanggal 1 Oktober 1999 s/d merdekanya Aceh.

- Penembakan terhadap 6 orang anggota Marinir di Jeunieb, Bireun, saat menunaikan sholat maghrib di suatu Mushalla, pada bulan Januari 2000.
- Penculikan dan pembunuhan terhadap Tgk. Nashiruddin Daud, Wakil Ketua Pansus DPRRI tentang “Permasalahan Aceh”, di Medan, dan mayatnya kemudian ditemui di desa Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.
- Diculik dan kemudian dibunuhnya Djafar Siddik, aktivis IFA (International Forum for Aceh), suatu LSM yang berbasis di New York.
- Dan berbagai bentuk praktek kekerasan lain.

Reaksi DPRRI dan Masyarakat terhadap DOM dan Kekerasa

DPRRI, menanggapi kekejaman dan kekerasan, serta buruknya akibat DOM ini, segera membentuk apa yang disebut dengan Tim Pencari Fakta (TPF), yang diketuai oleh Letjen Hari Sabarno, dengan anggotanya antara lain Ghazali Abbas Adan, Dr. Muchtar Azis, T. Syahrul, ketiganya anggota DPRRI dari Daerah Pemilihan Aceh, dan sebagainya. TPF inipun mengadakan kunjungan ke Aceh. dan bertemu dengan banyak kalangan. Selama kunjungan lima hari ke Aceh, selain TPF banyak sekali menemukan kejadian-kejadian dan/atau laporan tentang kejadian yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM. Namun yang mengherankan adalah bahwa TPF tidak menemukan adanya latar belakang ideologis dari Gerakan Aceh Merdeka, tetapi semata-mata berkaitan dengan keadilan terutama di bidang ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.¹¹⁸⁸

Sementara itu Taman Iskandar Muda (TIM), untuk meng-antisipasi akibat buruk dari DOM tersebut segera pula membentuk Komite Solidaritas HAM Daerah Istimewa Aceh, disingkat KOSHAMDA, yang diketuai oleh Amran Zamzami, Wakil-wakil Ketua: Dr. Said Zainal Abidin, dan Debra H. Yatim, Sekretaris Drs. Hasballah Saad, Wakil-wakil Sekretaris, Mawardi Abdullah, SE dan Dra Umaimah Wahid, Bendahara, Marzuki Djoened, SH., Wakil Bendahara, Drs. H A. Wahab Rachmadsyah, dengan 14 orang relawan yakni: H. M. Yusuf Gading, H. Syamsuddin Abubakar, SH., Drs. H. Ali Hasyim, Drs. H. Said Umar Husin, Fachry Ali, MA, Drs. Sayed Mudhahar Ahmad, SH., Drs. H. Ramly Ganie, H. Said Mustafa, Ir. H. T. Zulkarnain Yusuf, Drs. Hasyim Syam, Fajran Zein, SH., Christine Hakim, Eros Djarot, dan Ir. H. Nur Gaybita.

Penasihat adalah: Prof. Dr. Ismail Sunny, SH., H. Ismail Hasan Metareuem, SH., M. Salim, SH., dan Ir. Mustafa Abubakar.

Pernyataan atau resolusi perdana yang dikeluarkan oleh Komite Solidaritas HAM di Aceh ini, yang ditandatangani oleh Amran Zamzami sebagai Ketua dan Hasballah M. Saad sebagai Sekretaris, adalah terdiri dari 6 butir “Pokok-Pokok Pikiran Masyarakat Aceh, Jakarta”. Pokok-pokok pikiran tersebut disampaikan oleh KOSHAMDA, dalam dengar pendapat dengan Komisi-I DPRRI, tanggal 19 Februari 1999, yakni sebagai berikut:

Meminta kepada pemerintah dan ABRI agar segera menghenti-kan berbagai tindak kekerasan, pembunuhan dan pelanggaran HAM di Aceh yang berlarut-larut. Mengharapkan pemerintah dan ABRI bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman dan perlindungan hukum terhadap anggota masyarakat yang hak-hak dasarnya telah dirampas, sehingga mereka dapat kembali hidup layak sebagai warga negara.

Meminta agar pemerintah dan ABRI segera mengusut tuntas dan memberi tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku tindak kekerasan dan penembakan terhadap anggota masyarakat di ber-bagai tempat di Daista Aceh.

¹¹⁸⁸ Weda, *op.cit*, hlm. 159 dan 216.

Meminta agar pemerintah dan ABRI menjelaskan kepada masyarakat secara jujur dan terbuka, siapa saja para pelaku penembakan dan tindak kekerasan itu, serta segera dilakukan penyelidikan terhadap motivasi dibalik tindak kekerasan itu secara obyektif dan terus-terang, sehingga para pelakunya dapat dibawa ke depan pengadilan.

Meminta kepada pemerintah dan ABRI menindak lanjuti berbagai komitmen, seperti membantu pemulihan para korban dengan pemberian kompensasi yang layak dan pelayanan yang berdasarkan nilai agama terhadap korban pembunuhan massal, dan penyelesaian jaminan kelangsungan hidup, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak korban tindak kekerasan.

Meminta pemerintah dan ABRI, agar bersungguh-sungguh mencari penyelesaian terhadap masalah Aceh secara politik, hukum dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga akar masalah pertentangan dan perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara tuntas, namun bukan dengan jalan kekerasan dan arogansi kekuasaan sepihak. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa cara-cara kekerasan tidak pernah dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Anggota ABRI non-organik yang beroperasi di Aceh, perlu segera ditarik, untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang berkepanjangan, serta memudahkan jalan penyelesaian secara damai, obyektif, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pedihnya DOM, dirasakan secara merata oleh semua penduduk Aceh. Walaupun operasi jaring merah sebagai inti dari DOM dimaksudkan untuk mengatasi dan mengantisipasi serta membe-rantas GAM, tetapi yang merasakan dampak negatifnya adalah umumnya rakyat sipil yang tidak bersenjata, dan tidak ada urusan apa pun dengan GAM. Oleh karenanya secara bergelombang timbul reaksi masyarakat, tidak hanya di Aceh tetapi juga di luar Aceh bahkan di luar negeri sekalipun. Sesungguhnya banyak usaha dari instansi keamanan di Aceh untuk mendekati tokoh-tokoh non-formal, termasuk para ulama, dan mengikutsertakan mereka dalam upaya mempersuasi, mengajak dan membina masyarakat agar menjauhi dan tidak mengikuti GAM. Namun perlakuan kejam dan berbagai kekerasan oleh apkam RI, serta ekses negatif lainnya dari DOM terhadap rakyat, yang sangat menyakitkan hati, akhirnya tidak membuat rakyat lebih dekat dan lebih sayang kepada apkam RI. Bahkan mereka menjadi lebih jauh dan membenci mereka. Dan sebaliknya walaupun mereka tadinya sesungguhnya bukan orang GAM, tetapi karena sakit hati dan fisiknya oleh apkam, timbullah dendam atas kekejaman dan kekerasan tersebut, mereka menjadi lebih memihak orang-orang GAM ketimbang kepada apkam RI. Beberapa kali pimpinan apkam RI baik di tingkat Kodim, Korem, yakni Korem Lilawangsa yang dipimpin oleh Kol. Sofian Efendi, dan kemudian digantikan oleh Kol. Syarwan Hamid, demikian pula Korem Teuku Umar, maupun Pangdam, Mayjen Pramono, mengadakan pertemuan dan melibatkan banyak ulama dan tokoh masyarakat seperti Ali Hasjimi, Ketua MUI, Aceh, Hasan Ali, Tgk. H. Usman Ali Kuta Krueng, pimpinan Pesantren Al Munawarah Ulee Gle, Tgk. H. Ibrahim Bardan, pimpinan Pesantren Maklikussaleh, Panton Labu, Tgk H. Abdullah Trubue, Tgk. H. M. Ali Irsyad, pimpinan Pesantren Darussa'adah, Teupin Raya, dan banyak tengku-tengku atau abu-abu lainnya. Selain itu, Bustanil Arifin sebagai Menteri Koperasi pun ditugaskan oleh Presiden Soeharto untuk ikut membantu pemulihan keamanan di Aceh, dan kemudian juga M. Nur Nikmat dari Medan, namun semuanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Upaya-upaya tersebut ternafikan oleh kekejaman dan kekerasan apkam RI terhadap rakyat di Aceh.

Rektor Unsyiah Prof. Dr. Dayan Dawood pun nimbrung dengan mengajukan fikiran bahwa agar status *trouble spot* untuk Aceh segera dicabut agar pembangunan dapat

berjalan lebih lancar. Beliau nampaknya sengaja menggunakan istilah *trouble spot* untuk tidak menyebut DOM. Sayangnya saran yang keluar dari pikiran jernih sang Rektor tersebut, yang ditanggapi positif oleh para penguasa di bidang Keamanan di tingkat pusat, tetapi nyatanya berbeda prakteknya di tingkat daerah.

Hampir bersamaan dengan itu Aktivis HAM, Ir. Gani Nurdin juga menyuarakan hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran HAM selama DOM di Aceh, yang mendapat sambutan dari para aktivis lainnya, walaupun tidak digubris oleh penguasa. Suara Gani Nurdin tersebut disambut positif oleh aktivis HAM di daerah antara lain Dr. Humam Hamid, dan Syaifuddin Bantasyam, yang kemudian membentuk Forum Peduli HAM (FP HAM), serta di tingkat pusat antar lain oleh Asmara Nababan, SH., Munir, SH., Hakim Garuda Nusantara, SH., Bambang Wijayanto, SH., dan sebagainya. Sedangkan di kalangan masyarakat Aceh sendiri, selain di Aceh, juga mahasiswa Aceh di Jakarta, yakni IMAPA (Ikatan Mahasiswa Pelajar Aceh), Pimpinan Fajran Zein S. Ag, dan Ismail Bardan, SH. Kesemuanya menuntut (meminta dengan hormat kepada) Pemerintah agar segera menghapuskan DOM untuk Aceh. Di Aceh sendiri banyak LSM dan/atau aktivis yang muncul menghujat DOM dan menuntut agar DOM dicabut, seperti Yusuf Ismail Pase, SH a/n LPLH (Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup), Aguswandi, yang melakukan mogok makan bersama 12 mahasiswa lainnya, Radhi Darmansyah, SMUR, FORMIDA, 12 senat mahasiswa perguruan tinggi, KARMA (Kesatuan Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh), beberapa wanita dan juga pria korban DOM, Otto Syamsuddin, M, Yacob Hamzah, SH. a/n LBH Lhokseumawe, Aktivis Wanita yang tergabung dalam FOPA (Forum Organisasi Perempuan Aceh), SOMAKA (Solidaritas Mahasiswa untuk Kasus Aceh) Jakarta yang dipimpin oleh Fajran Zein dan Fadli Ali, semuanya menuntut agar para pelanggar HAM segera diproses menurut hukum yang berlaku dan dicabutnya DOM. Demonstrasi pun hampir tiap hari terjadi baik yang dilakukan oleh Mahasiswa dari berbagai universitas, di Banda Aceh, Sigli, Lhokseumawe, Langsa dan di kota-kota lainnya. Ada juga sebagian mereka yang pergi ke Jakarta dengan bus untuk demonstrasi di sana, menuntut pancabutan DOM, dan agar pelanggar HAM diadili, seperti yang dilakukan oleh Taufik Abda, bersama 40 mahasiswa IAIN, pada tanggal 20 Juli 1998.

Demikian pula rapat kerja ulama Insyafuddin (ulama dayah), yang berlangsung dari tgl 23-26 April 1997, di Banda Aceh, menelurkan keputusan yang cukup penting yaitu: "melawan, menentang dan melakukan makar terhadap pemerintah yang sah, kedudukan-nya haram. Hukum serupa juga berlaku bagi yang memberikan bantuan dan dukungan kepada yang menentang dan melawan pemerintah RI".¹¹⁸⁹ Terlibat aktif dalam Raker tersebut, sebagai pemakalah antara lain adalah: Tgk. H. Daud Zamzami, Tgk Usman Ali Kuta Krueng, Tumin (Tgk. H. M. Amin Mahmud), Blang Bladeh, Drs. Tgk. Ismail Yakub, dan juga Pandam I, Mayjen Sudaryanto, dan sebagainya.

Para pejabat formal pun tidak ketinggalan menghimbau agar DOM dicabut, antara lain yang diusulkan oleh Gubernur Aceh, Syamsuddin Mahmud, Ketua DPRD Aceh, T. Johan, Pimpinan MUI Aceh Prof. Dr. Ibrahim Husen, MA dan H. Badaruzzaman, SH., Ghazali Abbas Adan sebagai anggota DPRRI, Drs. Djafar Hatta sebagai Rektor Unima.

Selain itu banyak pula reaksi dari berbagai pihak terhadap DOM dan lebih-lebih lagi terhadap berbagai dampak negatifnya. Reaksi tersebut, terutama muncul setelah DOM dicabut, yang umumnya menyerang dan menggugat pihak-pihak pelaku kekejaman, kekerasan dan pelanggaran HAM selama berlangsungnya DOM.

Data, fakta dan bahan-bahan, serta informasi yang dikumpulkan oleh berbagai pihak, terutama oleh LSM yang bergerak di bidang HAM, kemudian menjadi masukan

¹¹⁸⁹ Sulaiman, *op.cit.*, hlm. 87-88.

bagi badan-badan yang terbentuk kemudian, dalam rangka mengungkap dan menyelesaikan pelanggaran HAM selama DOM.

Duek Pakat Inong Aceh misalnya, yang mengadakan rembukan dari tanggal 20-22 Februari 2000, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, dan dihadiri oleh 358 orang dari seluruh Aceh, ditambah dengan Inong Aceh di peran-tauan, dalam salah satu rekomendasinya menyebutkan, bahkan pada reko-mendasi No. 1, agar pemerintah harus segera menghentikan tindak kekerasan yang terus-menerus terjadi di Aceh. Mereka juga merekomendasikan agar pemerintah harus memberi jaminan kepada masyarakat Aceh, bahwa para pelaku tindak kekerasan agar diadili menurut hukum yang berlaku. Forum perempuan orang Aceh tersebut juga menyarankan agar pemerintah mem-berikan rasa aman dan damai kepada seluruh warga masyarakat Aceh dengan berusaha menahan diri dan mengadakan gencatan senjata supaya pihak-pihak tertentu antara lain provokator tidak memanfaatkan situasi dengan menangguk di air keruh. Selain itu mereka juga mendesak pemerin-tah pusat dan Komnas HAM, agar segera membentuk KPP HAM di Aceh guna mengusut dan mengadili pelanggaran HAM di Aceh baik selama masa DOM maupun pasca-DOM, hingga terciptanya Aceh yang adil dan damai. ***



BAB 6

RERERENDUM DAN SPONSORNYA

Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau

PADA tanggal 17 Agustus, Panglima TNI Wiranto, menyatakan meng-hentikan operasi militer di Aceh dan akan menarik semua militer non-organik dari Aceh. Dengan pernyataan itu, berarti DOM sejak saat itu dicabut. *Alhamdulillah hi Rabbil 'Alamin, insya Allah*, akan selamatlah nyawa, batin dan fisik orang Aceh dari segala ma-cam penyiksaan/ kekejaman dan kekerasan yang telah dialaminya selama DOM. Pencabutan DOM disambut dengan rasa syukur yang sangat mendalam oleh segenap rakyat Aceh baik yang di Aceh maupun di luar Aceh, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun. Di Jakarta misalnya TIM yang dipimpin oleh Ir. Mustafa Abubakar, mengorganisir acara Sujud Syukur dan Sholat Sunnat Syukur, atas dicabutnya DOM, di Masjid Raya Al Azhar, Kebayoran Baru yang dihadiri oleh ribuan masyarakat Aceh dan bukan Aceh yang bersimpati kepada Aceh.

Dalam suasana lega tersebut, tidak lama setelah dicabutnya DOM, isu referendum, mulai disemai dan bergulir, yang diawali oleh “Kongres Maha-siswa dan Pemuda Aceh Serantau” yang disingkat KOMPAS yang berlangsung pada tanggal 31 Januari s/d 4 Februari 1999, di gedung Chik Ditiro, Banda Aceh. Salah satu rekomendasi dari kongres tersebut menurut Al Chaidar¹¹⁹⁰ adalah: *“to help find the resolution to the Aceh conflict in a peaceful and comprehensif manner, through referendum, which in other words, returning the choices to the concerned themselves, the people of Aceh, in order for them to determine their own future”*, yang pengertian bebasnya adalah: “membantu penyelesaian konflik

¹¹⁹⁰ Al Chaidar, “Fight for Independent or Fight for Democracy?”

Aceh dengan cara damai, dan komprehensif, melalui referendum yang berarti mengembalikan atau menyerahkan pilihan kepada rakyat Aceh sendiri untuk menentukan hari depan mereka”

Terlepas dari apa sesungguhnya latar belakang dan motivasi dari dikumandangkannya wacana ini, dan apa ideologi di belakangnya, namun yang dapat kita baca adalah, referendum muncul sebagai akibat dari kurang ditanggapinya secara tepat dan cepat, berbagai isu yang berkembang sebelumnya, terutama pasca-DOM, seperti: pengadilan bagi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM, kompensasi bagi korban kekerasan, tuntutan akan keadilan eko-nomi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan proporsional, perbaikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Secara harfiah dan juga secara nomenklatur politik, referendum sesungguhnya tidak lebih dari suatu cara yang demokratis, partisipatif, dan damai (tanpa kekerasan) untuk mencapai tujuan bersama yang demokratis pula. Sebagian dari isu-isu tersebut adalah isu yang sering disuarakan oleh orang-orang GAM, dan juga oleh orang-orang kritis yang bukan GAM. Jadi seharusnya di negara Indonesia yang demokratis ini, referendum tidak berkonotasi negatif samasekali. Namun pengalaman referendum di Timtim, yang juga tadinya dianggap normal-normal saja, ternyata dalam pelaksanaannya hasilnya sangat mengecewakan dan menyakitkan Indonesia, jadi telah membuat pemerintah dan pejabat RI double dan bahkan ultra hati-hati. Oleh sementara kalangan (lagi-lagi yang garis keras), menganggap kegagalan Indonesia dalam memenangkan referendum Timtim adalah “blunder yang fatal” dari Presiden Habibie. Tetapi, sebaliknya, di lain pihak “kesuksesan” referendum Timtim telah sangat memicu semangat para promotor referendum untuk Aceh.

Namun secara pragmatis, sikap dan penampilan politik kita telah lama dirasuki, dan dibentuk oleh slogan-slogan seperti: “NKRI adalah Final”, “Pancasila sebagai dasar negara tak dapat ditawar-tawar”, “Bentuk negara Republik adalah Harga Mati”, dan sebagainya, maka terkesanlah bahwa apa pun upaya, walaupun sangat demokratis sekalipun yang mengutak-atik bentuk negara, dasar negara, dan sifat negara, adalah dianggap inkonstitusional, bahkan dianggap sebagai “musuh negara dan makar”. Jika di negara demokratis lainnya, referendum dianggap biasa-biasa saja sebagai “democratic tools”, bahkan di Switzerland, untuk membuat jembatan bawah tanah, atau membangun suatu jalan tol pun, dilakukan dengan persetujuan rakyat melalui referendum, maka di Indonesia hal tersebut dianggap momok yang menakutkan.

Promotor utama dari referandum adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya sebagai SIRA, singkatan dari Sentral Informasi Referendum Aceh. SIRA memang bukan GAM, dan SIRA tidak bekerja untuk GAM. Tetapi LSM ini bekerja untuk memperjuangkan dilaksanakannya referendum di Aceh dengan pilihan: pertama, Aceh tetap bersama Indonesia, atau kedua, Aceh lepas dari Indonesia, menjadi Negara Merdeka. Kalau Aceh yang merdeka yang menjadi alternatif perjuangan SIRA, nanti-nya bernama “Aceh Merdeka”, mungkin menjadi sama dengan tujuan GAM, tetapi lain halnya jika tidak sama. Namun Pemerintah, terutama aparat keamanan, dalam memperlakukan SIRA, terkesan seolah-olah menyamakan SIRA dengan GAM, atau lebih tepatnya dengan GAM yang sipil.

Dalam memasyarakatkan referendum, SIRA tidak bekerja sendiri, dia dibantu sepenuhnya oleh beberapa LSM lainnya seperti KARMA dan KMPAN, kemudian FARMIDA (Forum Aksi Reformasi Mahasiswa Islam Daerah Istimewa Aceh), Thaliban, SMUR (Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat), dan beberapa organisasi atau LSM lainnya. Di luar negeri, referendum didukung penuh oleh IFA (International Forum for Aceh), suatu NGO yang berkedudukan di New York, yang dipimpin oleh Djafar Sidik dan Suraiya IT. Pada sekitar penggalan pertengahan dan akhir tahun 1999, demam

referendum cukup menggelora, bahkan rakyat diakar rumput pun menjadi tahu dan terlibat pula dalam mengelu-elukan referendum, walaupun sesungguhnya mereka tidak tahu persis apa maksudnya dan bagaimana caranya. Itu semua adalah berkat cara kerja dan kerja keras SIRA yang dipimpin oleh tokoh sentralnya Muhammad Nazar S. Ag, dalam mengkampanyekannya, yang didukung sepe-nuhnya oleh kalangan mahasiswa. Persimpangan jalan dan gedung-gedung baik milik pribadi maupun kepunyaan publik, serta rumah ibadat, sekolah-sekolah, penuh dengan spanduk dan/atau coretan yang berkaitan dengan referendum, bahkan di hampir setiap kilo-meter aspal jalan raya pun demikian. SIRA kemudian mengorganisir beberapa kali demonstrasi damai, untuk menyuarakan referendum, yang menurut Syarifudin Tippe¹¹⁹¹ mengatakan bahwa, yang pertama, pada tanggal 28 Oktober 1999 dengan sebutan “Sumpah Bangsa Aceh”; kedua, tgl 8 Nopember 1999, yang terkenal dengan sebutan “SU MPR”, singkatan dari “Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum”, dan yang ketiga, adalah pada tanggal 14 Nopember 2000

Demostrasi referendum yang kedua pada tgl 8 November 1999, adalah yang terbesar yang menurut berbagai media massa diikuti oleh sejuta orang, yang datang dari hampir semua Kabupaten/Kota, dan telah memacetkan kota Banda Aceh dan semua jalan-jalan menuju/keluar Banda Aceh. Domonstrasi serupa tidak hanya terjadi di Aceh tetapi juga di Jakarta yang diorganisir oleh tokoh-tokoh SIRA Cabang Jakarta, demikian pula di kota-kota lainnya. Dengan kejadian itu, tidak hanya mengundang perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta terhadap SIRA, serta dunia internasional, tetapi juga mengundang kecurigaan pemerintah, lebih-lebih lagi aparat keamanan. *Pertama*, SIRA, sebagaimana di Aceh juga dicu-rigai mempunyai hubungan dan bahkan dikatakan sebagai sayap politik dari GAM. Salah satu alasannya sebagaimana dikatakan oleh Al Chaidar, bahwa SIRA telah meningkat menjadi suatu gerakan politik untuk penentuan nasib sendiri (*self determination*) di Aceh, walaupun SIRA berkali-kali mengatakan tidak ada hubungannya dengan GAM. Al Chaidar selanjutnya mengatakan bahwa sebagai organisasi SIRA tidaklah memihak GAM. Tetapi SIRA memilih untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui keinginan mekanisme referendum.

SIRA Jakarta misalnya pada bulan Januari 2002, menggelar demonstrasi yang lumayan besarnya, dan oleh karenanya meng-akibatkan ditahannya Faisal Saifuddin, Ketua SIRA Jakarta sebagai penanggung jawab dari demo tersebut, dengan tuduhan menyebar luaskan kebencian. Walaupun jumlah pendukung SIRA di Jakarta, dari segi jumlahnya lebih sedikit dari di Aceh, namun kegiatan-kegiatan yang digelar di Ibukota, selalu mempunyai makna dan signifikansi yang lebih dan akan bergema secara nasional, karena diliput oleh lebih banyak media nasional, ketimbang dilakukan di daerah. Oleh karenanya pengelolaan kegiatan SIRA di Jakarta selalu ditangani secara baik dan rapi oleh tokoh/aktivis yang telah berpengalaman dan bekerja tanpa mengenal lelah, seperti Faisal dan didukung oleh Radhy Darmansyah dan lain sebagainya. Walaupun selalu mengumandangkan seruan demokrasi dan perdamaian, atau *non-violence*, namun karena dasarnya memang telah dicurigai, tetap saja beberapa bomb yang meledak di Jakarta, selalu atau kadang-kadang dikaitkan juga dengan SIRA, yang oleh kalangan tertentu dipersamakan dengan sayap politiknya GAM

Ada beberapa pernyataan dan sikap, yang membuat pemerintah dan khususnya aparat keamanan menaruh curiga kepada SIRA dan referendum yang diusungnya, antara lain Rekomendasi Kongres Mahasiswa dan Pemuda Serantau, antar lain berbunyi:

¹¹⁹¹ Syarifudin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan*, 2000.

“Bertitik tolak dari realitas historis dan kondisi sosial realistis-obyektif, maka dipastikan terjadinya neokolonialisme yang diorganisir Pemerintah Indonesia dalam tiga masa sekaligus, Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Solusi otonomi seluas-luasnya, negara federasi, dan pembentukan kembali Kodam Iskandar Muda, tidak representatif dan interpretatif terhadap keinginan universal rakyat Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi, negara federasi dan pengembalian Kodam Iskandar Muda, dapat saja menjadi strategi baru RI untuk menjerat rakyat Aceh ke dalam ketidakpastian. Maka visi, misi dan opsi Kongres Mahasiswa dan Pemuda Serantau menyetakan “penentuan nasib sendiri (*self determination*) berdasarkan kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan bagi semua rakyat Aceh secara damai, yuridis dan demokratis. Referendum, merupakan jalan terbaik menuju kedaulatan rakyat dalam mewujudkan keinginan menentukan pilihan bagi lahirnya masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan. Sedangkan pelaksanaan referendum diawasi dan dilegitimasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga independen internasional yang ditunjuk”.

Kecurigaan dan penyamaan SIRA dengan GAM, semakin lebih mantap di kalangan pemerintah dan aparat keamanan, setelah mengikuti gerak-gerik dan berbagai panampilan serta pernyataan tokoh-tokoh SIRA, kemudiannya. Salah satu di antaranya adalah “siaran SIRA” yang beredar luas di masyarakat, yang lebih kurang berbunyi sebagai berikut:

1. Mahasiswa, Santri dan Pemuda Aceh yang datang dari berbagai daerah di Aceh, luar Aceh dan luar negeri, telah mengambil kata sepakat melalui suatu Kongres yang dilaksanakan di Banda Aceh, 31 Januari s/d 4 Februari 1999 oleh Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (KARMA) bersama dengan Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) dengan satu tekad untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh masa depan yang berkeadilan dan bermartabat melalui referendum.
2. Mereka yakin, dengan referendum seluruh rakyat Aceh bisa menyodorkan pendapatnya secara damai, yuridis dan demokratis, apakah bergabung kembali dengan RI, yang sampai sekarang masih saja suka menipu, menyiksa dan membunuh etnis Aceh dan peradabannya, atau memisahkan diri dari RI demi kebaikan rakyat Aceh sendiri.
3. Dan sangat wajar bila rakyat Aceh seperti terlihat dalam situasi dan kondisi sekarang serta pengalaman suram masa lalu, menolak otonomi seluas-luasnya dan negara federasi. Lebih-lebih bagi pembentukan kembali Kodam Iskandar Muda yang telah dicoba lontarkan oleh beberapa tokoh Aceh sendiri
4. Referendum untuk perdamaian, persaudaraan dan demokrasi yang membawa kepada kemerdekaan tanpa kekerasan dan tanpa sungai darah.
5. Sekali lagi, mari kita sebagai rakyat Aceh dan yang pro rakyat Aceh yang sedang diteror, bersatu mendukung dan menuntut pelaksanaan referendum di Aceh tanpa kekerasan dan permusuhan, bukan seperti dilontarkan Menteri Kehakiman RI, Muladi, yang ingin mempertahankan negara kesatuan RI.

Karena kesamaan tujuan ini SIRA menjadi sangat dekat dengan GAM, yang dalam perjuangannya selalu membela atau memihak setiap upaya bagi kemerdekaan Aceh, dan mendukung keinginan rakyat untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*). Akibatnya beberapa ledakan bom yang terjadi di Jakarta pun kadang-kadang dikaitkan dengan orang-orang SIRA.

Ada suatu kejadian yang seharusnya serius, tetapi karena aktornya

KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang selain kocak juga cuwek (*easy going*), berubah menjadi ceritera lucu. Gus Dur yang ketika itu belum sebagai Presiden RI, tetapi lebih sebagai Pimpinan Poros Tengah, datang ke Banda Aceh, pada tanggal 15 September 1999, bersama Prof. Dr. Amin Rais, Matori Abdul Djalil, Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail dan seorang putra Aceh Dr. Muchtar Azis, untuk menghadiri istighosah, yang dilaksanakan secara bersama oleh HUDA (Himpunan ulama Dayah Aceh), Thaliban, dan aktivis mahasiswa pendukung referendum, di halaman masjid raya Baiturrahman. Acara tersebut, menurut Dr. Isa Sulaiman, dihadiri oleh lebih kurang 2000 orang. Setelah acara orasi dari Tgk. H. Nurruzahri, Ketua HUDA, dan Tgk Syeh Marhaban, pembacaan keputusan Musyawarah HUDA yang berlangsung tanggal 13-14 September 1999, Gus Dur didaulat oleh Mahasiswa untuk membuka selubung yang tidak disebutkan selubung apa, di Masjid Raya Baiturrahman. Gus Dur dengan spontan mau dan melangkahkan kaki kearah selubung yang masih tertutup, dengan dipandu tentunya, mengingat beliau tidak bisa melihat. Tetapi apa yang kejadian, ketika selubung dibuka, terpampang tulisan yang cukup besar, "REFERENDUM". Persisnya, *billboard* yang berukuran 4 x 16 meter tersebut, menurut Isa Sulaiman, bertuliskan: "Konflik Aceh Hanya Dapat Diselesaikan dengan REFERENDUM". Semua audiens terutama yang ikut bersama beliau ketempat itu, menjadi terkejut, dan tak menyangka sama sekali "referendum" lah yang diresmikan oleh beliau. Padahal referendum adalah barang yang sangat kontro-versial saat itu. Setelah dibisikkan oleh staf pribadinya, tentang itu, beliau pun santai saja mengatakan: "mengapa rupanya, referendum kan bagus, demokratis dan damai lagi, daripada dengan cara kekerasan". Semua hadirinpun bertepuk tangan meriah.

Bukan Gus Dur namanya, kalau tidak selalu tampil dengan penuh tanda tanya dan kontroversi, bahkan sulit ditebak, misalnya seperti dituliskan oleh Richard Barber¹¹⁹², antara lain sebagai berikut: "*Wahid had already proclaimed Aceh a top priority as soon as he took office. He pledged to withdraw non-Acehnese troops and prosecute alleged violators of human rights, regardless of rank. Acehnese reaction had been tepid until he announced that he would allow a referendum in Aceh by July 2000*". Ujung kalimat tersebut lebih kurang berarti bahwa "dia akan membolehkan referendum pada tahun 2000". Namun kenyataannya, referendum tetap tidak dilak-sanakan, sampai dengan turunnya beliau dari jabatan Kepresidenan. Di lain kesempatan beliau pernah mengatakan sebagai berikut: "*if referendum, could be held in East Timor, one could be held in Aceh*" yang artinya lebih kurang: "jika referendum dapat dilaksanakan di Timtim, suatu waktu juga dapat dilaksanakan di Aceh". Padahal beliau tahu persis bahwa Presiden tidak mempunyai kekuasaan konstitusional sama sekali untuk melaksanakan referendum, dan untuk dapat melaksanakannya haruslah dengan persetujuan MPRRI.

Semangat dan demam panas referendum terus menggelora, me-rasuk kesegenap segmen dan kelompok masyarakat dan merayap ke seluruh daerah Aceh. Di Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan kabupaten-kabupaten lainnya dipantai Barat dibagian Tengah Aceh, mempunyai kesan yang sama, bahwa GAM mulai marak semenjak datangnya arus dan gelombang referendum dari Banda Aceh. Itu adalah pada sekitar bulan Nopember 1999, setelah atau bersamaan dengan Demonstrasi "Sejuta Ummat" di Banda Aceh. Hal ini antara lain diakui oleh T. Nadi yang adalah seorang Komandan Pasukan GAM di Aceh Barat, (Wawancara Penulis dengan T. Nadi pada tanggal 2 Juli 2006, di Meulaboh), yang mengataka bahwa GaM di sepanjang pantai Barat dan Selatan Aceh mulai marak, sejak munculnya isu dan kemudian menjadi gerakan massa "referendum". Walaupun sebelumnya telah ada dan menyebar benih-benihnya. Teuku Nadi juga membantah bahwa ideide Aceh Merdeka, adalah barang asing yang diimport

¹¹⁹² Richard Barber, *Aceh the Untold Story*, 2000.

dari dari pesisir utara/ timur Aceh. Beliau berkata selanjutnya "Saya ini adalah asli Aceh Barat, keturunan Ulee Balang di sini, saya masuk GAM dengan kesadaran saya sendiri. Saya mulai simpati dan kemudian mendukung ide Aceh Merdeka, karena menginginkan kebesaran dan kejayaan Aceh kembali sebagaimana yang dituliskan dalam buku-buku sejarah dan sebagaimana yang sering digambarkan oleh Wali Nanggrou Hasan Tiro".

Pada bulan Oktober 1999, terjadi demonstrasi besar di Tapaktuan yang menggiring atau "memaksa" DPRD Dati II Aceh Selatan, untuk menanda tangani dukungan terhadap referendum, demikian pula DPRD Dati II Aceh Timur. Pada waktu yang hampir bersamaan, terjadi konvoi atau arak-arakan besar yang diikuti oleh lebih kurang 10.000 orang dengan berbagai jenis kendaraan bermotor dari Meulaboh/perbatasan Aceh Barat menuju Singkil, dan membawa spanduk referendum, demikian pula dari perbatasan Aceh Timur menuju perbatasan Sumatra Utara, yang diikuti oleh sekitar 100.000 orang dengan berbagai jenis kendaraan bermotor.

Di Banda Aceh, pada tanggal 27 Oktober 1999, terjadi demon-strasi mahasiswa dan masyarakat sebanyak 300 orang menuju RRI dan mengumumkan mendukung referendum melalui RRI. Pada tanggal 28 Oktober 1999 terjadi pawai keliling kota yang diikuti oleh sekitar 5.000 orang mahasiswa dan masyarakat, dengan membawa spanduk dukungan kepada referendum, demikian pula di Lhokseumawe pada tanggal yang sama, dengan tema yang sama pula, dan diikuti oleh lebih kurang 1.000 orang.

Terjadi pula demonstrasi besar pada tanggal 2 Nopember 1999, yang diikuti oleh 20.000 massa di Meulaboh, yang selain memaksa para pejabat Pemerintah untuk menanda tangani dukungan kepada referendum, juga diakhiri dengan pembakaran beberapa kantor pemerintahan, seperti gedung DPRD, kantor Bupati dan kantor Bappeda, serta menisakan 21 orang luka-luka.

Dari ceritera di atas, terkesan bahwa referendum yang seyogianya sebagai alat demokrasi yang damai, dalam prakteknya telah berubah menjadi model lain dari tindak kekerasan, dan anargi, baik dalam bentuk pemaksaan, gangguan ketenangan, menimbulkan ke-takutan, dan bahkan pembakaran dan kekerasan yang mengakibatkan orang terluka. Apakah hal itu dapat disimpulkan bahwa referendum yang tadinya biasa-biasa saja, telah disusupi atau diprovokasi sehingga berubah menjadi brutal dan menakutkan, atau memang proses referendum itu sendiri yang mengharuskan demikian.

Sementara itu ada berbagai organisasi kemasyarakatan atau kelompok strategis masyarakat tertentu yang mendukung referen-dum, seperti Thaliban, suatu Organisasi para Santri dayah, misalnya, dalam Musyawarah Besar (MUBES) nya se Aceh, yang berlangsung di Banda Aceh tanggal 5-7 April 1999, mengambil 15 keputusan, antara lain:

- Memperjuangkan referendum secara damai.
- Mengajak Pemda untuk mendukung referendum.

Sementara itu Musayawarah ulama Dayah se Aceh, yang berlangsung di Kompleks Makam Syiah Kuala, Banda Aceh tanggal 13-14 September 1999, mengeluarkan rekomendasi dan pernyataan sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera melaksanakan referen-dum/jajak endapat, di bawah pengawasan masyarakat inter-nasional sesuai dengan permintaan mahasiswa/thaliban dan masyarakat Aceh lainnya.

2. Apabila Pemerintah pusat tidak menanggapi suara rakyat Aceh dimaksud, maka dikhawatirkan akan terjadi gejolak berkelanjutan yang jauh lebih besar dari gejolak yang terjadi saat ini.
3. Menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai, agar dapat men-ciptakan suasana yang kondusif dan menghentikan segala bentuk kekerasan, sehingga tercipta perasaan aman di kalangan masyarakat Aceh.

Perlu kiranya diketahui bahwa Musyawarah ulama Dayah tersebut, dipimpin oleh Presidium Sidang, yang terdiri dari: Tgk. H. Nuruzzahri H. Yahya, sebagai Ketua, dan Tgk. H. Syamaun Risyad, sebagai Sekretaris, serta tiga anggota Presidium Sidang yakni: Drs. Tgk. H. M. Daud Hasbi, Tgk. H Saifuddin Ilyas, dan Tgk. H. Abdul Manan.

Setelah menyimak proses lahirnya ide dan kemudian maraknya gerakan referendum, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Ide referendum muncul karena tindak kekerasan semakin merajalela di Aceh, dan para pelakunya tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan/atau tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat
2. Janji-janji Presiden dan atau pejabat tinggi RI lainnya untuk me-nindak tegas dan tuntas semua pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM, ternyata tidak dipenuhi.
3. Janji Presiden dan atau pejabat tinggi lainnya untuk memberikan kompensasi bagi para korban tindak kekerasan dan pelanggaran HAM, ternyata tidak sepenuhnya dipenuhi.
4. Ide referendum muncul, untuk menghindari cara-cara kekerasan, untuk mencapai tujuan Aceh Merdeka.
5. Gerakan referendum mendapat sambutan rakyat di Aceh, karena kampanye dan sosialisasinya tidak langsung dilakukan oleh GAM secara organisasi, tetapi oleh mahasiswa dan LSM, serta janjinya akan dilakukan secara damai, dengan pengawasan masyarakat internasional.
6. Referendum dinilai oleh masyarakat sebagai “jalan tengah” yang paling aman, antara tuntutan/perjuangan bersenjata untuk mer-deka dengan tuntutan untuk Negara Federasi dan atau untuk Propinsi Otonomi Khusus.

Namun orang-orang mulai reserve terhadap ide referendum ini ketika tokoh-tokoh pemerakarsanya, mulai mencampuradukkan per-juangannya tersebut yang seungguhnya idealistis, dengan beberapa aspek pragmatis lainnya yang bernuansa politis, seperti: menolak Kodam Iskandar Muda, menolak pelaksanaan Musyawarah Rakyat Aceh (MRA), menolak Pemilu di Aceh, padahal Pemilu adalah jelas-jelas pengakuan hak politik rakyat, menolak Otonomi Khusus untuk Aceh, dan mencurigai Pemerintah RI berikut segala produknya secara berlebihan.

Sementara itu, IFA (International Forum for Aceh), suatu LSM yang dipimpin oleh Jafar Siddik dan Suraiya IT, berbasis di New York, AS, telah mengadakan beberapa kali pertemuan yang pada dasarnya sangat mendukung ide referendum tersebut yang disebut-nya sebagai jalan yang paling aman selamat. Dalam konferensi yang dilakukannya pada tanggal 3 April 1999, di American University, Washington D. C. misalnya, yang bertemakan “ The Future Inte-gration of Indonesia; Focus on Aceh” telah menampilkan banyak pembicara yang umumnya membahas tentang ide-ide referendum, yang saat itu merupakan isu yang masih segar sedang berkembang di Aceh. Para pembicara yang tamoil antara lain: Dr. Husaini Hasan mewakili Aceh/Sumatra National Liberation Front, Radhi Darmansyah, yang berbicara a/n Forum Aksi Reformasi Mahasiswa Islam

Daerah Istimewa Aceh (FORMIDA), Ibrahim Abdullah, Hasballah Saad, Aguswandi, BR, Sekjen Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), T. Ibrahim Alfian, dari UGM, Yogyakarta, Sayed Mudhahar Ahmad.

Thaliban-Aceh.

Ingin mengangkat Harkat dan Martabat ulama Aceh

“Ulama adalah pewaris para nabi”

UU tentang Pemerintah Aceh (UUPA), antara lain menyebutkan pada Bab XIX tentang Majelis Permusyawaratan ulama (MPU), menyebutkan antara lain, sebagai berikut:

Ps 138, ayat (3): MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota serta DPRA dan DPRK.

Pasal 139, ayat (1): MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

Pasal 140, ayat (1): Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi, dan
- b. memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Sementara itu Hasan Tiro, menurut Kirsten¹¹⁹³, pernah mengatakan opada tahun 1977, bahwa *“everything in Aceh is judged by Islamic standard. Islam is an separable part of Acehnese identity. As far as my people is concerned Aceh and Islam have the sama meaning. If Aceh is a coin, Islam ios the side of that coinage. Aceh is a nation founded on Islam and lives by the law of Islam.”* Terjemahan besarnya adalah sebagai berikut: segala sesuatu di Aceh ditimbang/diukur dengan standar Islam. Islam tidak dapat dipisahkan dengan identitas orang Aceh. Sepanjang menyangkut kepentingan Rakyat, Aceh dan Islam adalah mempunyai arti yang sama. Jika Aceh sebagai suatu koin, maka Islam adalah sisi lain dari coin tersebut.

Kedua kutipan tersebut, sesungguhnya adalah sejalan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, di mana kalau memang Islam diakui sebagai jiwa dan semangat yang *build in* dalam setiap individu orang Aceh, maka peranan ulama adalah mutlak diperlukan, dan juga tidak terpisahkan dengan kehidupan baik individu maupun masyarakat Aceh. Dengan kata lain, jika ada pihak yang mendiskreditkan ulama, siapa pun dia dan dengan cara apa pun, berarti mengingkari hakikat orang Aceh yang tidak terlepas dari ulama dan Islam, sudah pastilah usahanya tersebut akan menemui kegagalan.

Lahirnya Thaliban sebagai organisasi para santri atau siswa/ mahasiswa dayah (pesantren), memang tidak terkait langsung de-ngan semakin meningkatnya perjuangan GAM untuk Aceh Merdeka, namun tidak terlepas dan bahkan lebih banyak berkaitan dengan adanya upaya pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan dan *mendown-gradekan* (merendahkan) para ulama di mata masyarakat. Secara khusus kelahiran Thaliban adalah juga terkait dengan per-juangan referendum yang digagasi oleh SIRA, dan kawan-kawannya, di mana Thaliban juga merupakan salah satu unsur pendukung

¹¹⁹³ Kirsten, *op.cit.*

utamanya. Lebih dari itu, menurut keterangan Tgk. Bulqaini, Ketua Pertama Thaliban, kelahiran Thaliban adalah juga untuk melurus-kan sekaligus menetralsir, derasnya upaya banyak pihak untuk memisahkan ulama, khususnya ulama dayah atau ulama dayah dari masyarakat dan dari usaha-usaha pembangunan Aceh, serambi Mekkah. Bulqaini lebih terpenggil lagi, setelah beliau dan teman-temannya melihat kenyataan, bahwa yang bergerak dan meramaikan panggung-panggung publik ketika itu adalah para pemuda yang umumnya sekuler dan walaupun ada yang berlatar belakang pendidikan Islam, umumnya mereka tidak berasal dari dayah. Padahal di Aceh, dayah juga mempunyai konstituen, yang baik jumlah maupun perannya cukup signifikan, bahkan siapa pun tidak dapat menafikan bahwa dayah adalah salah satu pemegang saham (stake holder) utama dari Bangsa dan Negara ini.

Untuk mengenal lebih jauh apa dan siapa Thaliban, dan bagai-mana hubungannya dengan institusi lainnya, berikut ini diturun-kan “Keputusan Mubes Thaliban se Aceh, tanggal 5 – 7 April 1999, sebagai berikut:

- Mempertahankan komitmen Kongres Mahasiwa, Thaliban dan Pemuda Aceh Serantau.
- Memperjuangkan Referendum secara damai.
- Mengajak PEMDA untuk mendukung Referredendum.
- Mengangkat harkat dan martabat para ulama.
- Menolak Agenda MRA apabila bertentangan dengan hasil Kongres Mahasiswa, Thaliban dan Pemuda Aceh Serantau dan hasil MUBES Thaliban SeAceh.
- Membentuk panitia *amar ma'ruf nahi munkar*.
- Memperjuangkan agar digelar pengadilan untuk para pelanggar HAM di Aceh semasa DOM hingga ke Pengadilan Internasional.
- Menolak permintaan maaf Presiden Republik Indonesia dan ABRI, sebelum mengadili pelanggar HAM di Aceh selama DOM.
- Menuntut pembebasan seluruh TAPOL dan NAPOL Aceh.
- Menolak pemebentukan KODAM Iskandar Muda dan meminta se-luruh pasukan ABRI Non-Organik baik legal maupun *illegal* ditarik dari Aceh.
- Memperjuangkan hasil MUBES Thaliban Aceh hingga mencapai sa-saran yang diharapkan.
- Membuat monumenmonumen di tempat yang menjadi Ekses DOM, seperti Kuburan Massal di Aceh.
- Menghimbau kepada seluruh Dayah yang ada di Aceh untuk mene-tapkan ... dan Qunud Nazilah, demi mencapai Aceh yang *baldatun thayyibatun warabbun ghafur*.
- Membentuk forum silaturahmi para Thaliban Aceh dengan seluruh komponen masyarakat.
- Melakukan unjuk rasa, apabila hak-hak Thaliban, Mahasiswa dan Rakyat dilanggar demi menjaga Harkat dan Martabat.

Dari dokumen tersebut, dapat diambil beberapa patisari maknanya, antara lain:

- Thaliban dekat dengan SIRA dan LSM lainnya penggagas Kongres Mahasiswa, Thaliban dan Pemuda Aceh Serantau. .
- Thaliban mendukung referendum damai.
- Thaliban menolak permintaan maaf Presiden Habibie, sebelum mengadili pelanggar HAM.
- Thaliban anti pelanggaran HAM dan anti DOM.
- Thaliban cinta damai dan memperjuangkan *amar ma'ruf nahi munkar*.
- Thaliban memperjuangkan terangkatnya kembali harkat dan martabat ulama di Aceh.

- Thaliban menolak dibentuknya Kodam Iskandar Muda.
- Thaliban menolak Musyawarah Rakyat Aceh (MRA).
- Thaliban ingin menegakkan harkat dan martabat rakyat Aceh.

Khusus dalam hal keberadaan dan peranan ulama, terutama ulama Dayah di Aceh, selama konflik atau selama adanya GAM di Aceh, telah sangat terpuruk. Keterpurukan tersebut jika dicermati ada dua penyebab utama, yakni:

Pertama: Penampilan (performance) para ulama di masa lalu, terutama di era Orde Baru), yang dinilai oleh “sementara kalangan” telah melewati batas-batas kewajaran kenetralannya sebagai pemim-pin ummat. Bahkan ada sebagian orang yang berkaliber ulama telah terkooptasi dengan pihak-pihak tertentu baik dalam arena “politik praktis”, maupun “bisnis praktis”, sehingga, ada berbagai sinisme atau cemoohan dialamatkan kepada para ulama, seperti: panggilan “Bung”, panggilan “abang”, bahkan panggilan “tauke” sekalipun. Ada pula sinisme lain dilontarkan kepada para ulama dalam bentuk pantun atau kata berkait, seperti: “*Ulama Jameun Pijuet-pijuet, gadooh gue khaluet dalam guha. ulama Jinou teumon-teumon, gadooh ek tron rinyeun Istand*”. Padahal sinisme atau dugaan atau tuduhan tersebut tidaklah seluruhnya benar, walaupun sebagiannya tidak salah.

Kedua: Sadar akan keberadaan dan peranan ulama di tengah-tengah masyarakat sebagai tiang pancang atau pilar utama. Lebih-lebih lagi ulama yang di tengah-tengah suasana konflik yang bagai-manapun, masih berani menyerukan *amar ma'ruf, nahi munkar*, dan menabuh genderang kembali ke jalan Allah. ulama seperti itu dinilai oleh “sementara pihak” sebagai penghalang bagi praktek-praktek pelanggaran hukum dan praktek mereka yang berlawanan dengan firman Allah dan sunnah Nabi. Oleh karena nya ulama seperti itu, harus dikucilkan/diisolir dari masyarakat, dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan murid-muridnya harus dieliminir, dengan macam-macam cara. Cara-cara tersebut dapat berupa, mengh-ilangkan keberadaan dan peranan ulama tersebut dan atau mendiskreditkan atau men-*down grade* kan mereka di mata masyarakat, dengan macam-macam sinisme dan atau cemoohan tersebut.

Kehadiran Thaliban baik sebagai murid atau santri dari ulama tersebut, maupun sebagai “ulama muda” sangatlah signifikan penga-ruhnya dan strategis keberadaan dan peranannya baik sebagai potensi bangsa maupun sebagai salah satu perangkat pembangunan Aceh, dan lebih-lebih lagi untuk dan dalam rangka mengembalikan kemuliaan dan kesucian misi serta harkat dan martabat para ulama sebagai tiang pancang dan pilar Utama masyarakat Aceh. ***



BAB 7

UPAYA DIALOG

UNTUK

PENYELESAIAN SECARA DAMAI

Langkah-Langkah Presiden B.J. Habibie

SETELAH diusahakan dengan berbagai cara, sejak awal mula keberadaannya, yang semula bernama Aceh Merdeka (AM), kemudian dilebeli sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GKP), lalu disebut sebagai Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT), kemudian di kalangan kepolisian disebut sebagai Gerakan Bersenjata Pengacau Keamanan (GBPK), dan akhirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kualifikasinya pun berubah-ubah dari semula gerombolan, atau pemberontak, kemudian sebagai pengacau keamanan, lalu terakhir semenjak Inpres No. 4 Tahun 2001, secara resmi disebut atau diakui sebagai “Gerakan Separatis Bersenjata”. Perlakuaannya pun dari pihak pemerintah, khususnya pihak aparat keamanan negara; juga berbeda-beda, sesuai dengan nama dan kualifikasi, namun hampir semuanya mengatakan bahwa, mereka adalah kelompok atau gerakan yang perlu ditumpas dan/atau ditindas, atau dibasmi sampai ke akar-akarnya, tidak satu pun mengaitkannya dengan aspek politik, sehingga perlu di tangani secara politis pula. Bahkan ketika itu, ada upaya untuk menafikan keberadaannya, sehingga tidak perlu disebut namanya sebagai suatu gerakan untuk menuntut kemerdekaan bagi Aceh, takut kalau disebut berarti mengakui keberadaannya.

Ada sementara petinggi ABRI yang mengumpamakan GAM, seperti jarum dalam rumput, sehingga untuk megambil atau menumpasnya, maka rumput di mana jarum tersebut berada dan di sekitarnya haruslah dibersihkan atau dimusnahkan semuanya (atau dalam bahasa Aceh: di-se’ek terlebih dahulu. Pendapat tersebut bermakna, untuk menumpas GAM, maka rakyat Aceh sebagai “rumput”nya haruslah dimusnahkan terlebih dahulu. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa metode ini sebagai *genocide*, atau pemus-nahan suku/etnis. Sementara petinggi ABRI lainnya meggunakan thesis Snouck Horgronje, bahwa setiap perlawanan orang Aceh harus ditundukkan dengan tindakan yang keras, atau dengan senjata jangan pernah mencari jalan untuk mendekatinya, sebelum mereka menyerah, tidak akan selesai urusannya. Pokoknya harus ditumpas dengan kekerasan, jangan kompromi sedikitpun. Ini pun apalagi kalau bukan “haus darah”.

Dengan menggunakan berbagai teori dan hipotesis, serta ber-dasarkan pengalaman perang di mana-mana, banyak Komandan baik di daerah maupun di pusat, yakin betul bahwa konflik di Aceh akan segera dapat diselesaikan dengan menumpasnya sampai habis, dalam tempo yang berbagai-bagai: ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang menyebutnya 6 bulan, dan ada pula yang mengestimasi dalam tempo satu tahun. Semuanya akan menggunakan kekuatan militer, baik TNI maupun polisi/Brimob.

Asumsi awalnya adalah, GAM tidak mempunyai senjata, yang mereka punyai hanya senjata peninggalan Jepang atau bekas Belanda yang telah digunakan selama dan oleh orang-orang DI/TII, selain rencong, parang/pedang, dan lembing tentunya. Selain itu, pengikut GAM diperkirakan tidak banyak, hanya ratusan orang, de-ngan logistik dan dukungan dana yang terbatas. Namun kenyataan-nya, sungguh mencengangkan semua pihak, terutama pihak yang rada arogan mengatakan konflik Aceh adalah masalah kecil dan segera dapat dituntaskan. Di tengah-tengah keheranan dan kegundahan itulah Presiden B. J. Habibie berkesimpulan, bahwa masalah Aceh tidak dapat diselesaikan dengan senjata, tetapi haruslah dengan pendekatan kultural/spiritual, dan sentuhan hati nurani serta perasaan (*empathy*). Agar betul-betul kena ke sasaran-nya, perlu dibuka dialog. Tegasnya penyelesaian Aceh haruslah dengan cara damai, mengingat Aceh bukan musuh bangsa Indonesia, orang Aceh adalah saudara kandung orang Indonesia lainnya. Tidaklah diterima akal sehat, kalau terjadi sengketa sesama saudara, harus diselesaikan dengan berperang, atau dengan memerangi. Itulah filosofi Pak Habibie dalam menyelesaikan masalah Aceh.

Mulailah dengan para pembantu dekatnya, Presiden RI Habibie, menyusun kerangka penyelesaian konflik Aceh yang kemudian disebutnya dengan: “penyelesaian secara komprehensif, damai, adil dan berwawasan ke depan”. Presiden Habibie kemudian meng-elaborasi pengertian dari komprehensif, damai, adil dan berwawasan ke depan tersebut, sebagai berikut:

- Komprehensif: mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbang-sa dan bernegara, yakni ipoleksosbudkumhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan pertahanan dan keamanan) atau tegasnya tidak hanya aspek keamanan saja.
- Damai, dengan cara-cara yang tidak kekerasan (non-violence), yakni melalui proses dialog, dan atau perundingan.
- Adil, haruslah obyektif (berdasarkan kenyataan yang sebenarnya), tidak menggunakan asumsi-asumsi yang menyamaratakan atau menganggap semua orang Aceh adalah GAM. Ada orang Aceh yang GAM dan merekalah yang menjadi sasaran operasi dan/atau penggarapan, dan ada pula yang tidak GAM, dan mereka haruslah didekati dengan cara yang berbeda, mereka harus diambil hatinya (*to win their hart*), diajak untuk berkerja sama, bukan disakiti apalagi dianiaya, walaupun dengan alasan shock therapy sekalipun.
- Berwawasan Ke depan: bukan berarti melupakan masa lalu, tetapi menjadi-kan masa lalu sebagai pengalaman dan pelajaran untuk melangkah kemasa depan yang penuh harapan dan tantangan. Pengalaman pahit dan keliru, tentulah tidak perlu diulangi dimasa depan, sedangkan pengalaman yang baik dan berguna, terus dikembangkan demi kabaikan dan kemaslahatan di masa depan.

Langkah pertama beliau setelah dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Presiden Soeharto, adalah mecabut status DOM bagi Aceh, dengan menugaskan Pangab Jenderal Wiranto untuk men-deklarasikannya baik di Masjid Baiturrahman, maupun di pendopo Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe, pada tanggal 7 Agustus 1998. Hal ini berarti

membebaskan Aceh dari operasi militer yang sangat mencekam, yang ketika itu terkenal dengan nama: “Operasi Jaring Merah”. DOM sebenarnya telah diberlakukan bagi Aceh sejak tahun 1989. Walaupun terjadi kontroversi dan polemik di masyarakat, apakah DOM perlu/harus dicabut atau tidak. Kalangan tertentu dalam ABRI yang tergolong “garis keras”, tentu saja tidak setuju dengan pencabutan DOM, namun, kearifan Presidenlah sebagai orang yang sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan menyadari eksese operasi militer yang sangat menyedihkan dan me-nyengsarakan rakyat Aceh, beliau akhirnya memutuskan mencabut DOM, serta sekaligus menarik semua pasukan non-organik dari Aceh. Langkah kedua, Presiden Habibie adalah membentuk Tim Penasihat Presiden tentang Aceh, yang kemudian lebih populer disebut sebagai TPPUA (Tim Penasehat Presiden Urusan Aceh), dengan Keppres. Langkah ketiga, beliau adalah mengadakan kunjungan silaturahmi ke Aceh dan bertemu serta berdialog dengan masyarakat Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, setelah menunaikan sholat Jum’at bersama. Langkah keempat, beliau membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh yang disingkat sebagai KIPTKA, atas usul dari TPPUA. Langkah kelima, Presiden Habibie adalah mulai merealisasikan janji-janji dan komitmen beliau di depan masyarakat dalam Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, namun hal itu tidak sempat beliau tuntaskan, keburu digantikan oleh Pre-siden Abdurrahman Wahid, yang terpilih dalam sidang paripurna MPRRI, tanggal 23 Oktober 1999. Demikian pula dengan langkah-langkah berikutnya berupa dialog dengan pihak GAM, walaupun telah direncanakan, namun tidak berkesempatan melaksanakannya, dan kemudian dilaksanakan oleh Gus Dur, dengan mengundang intermediasi dan di fasilitasi oleh Henry Dunant Center (HDC).

Namun demikian ada juga beberapa komitmen di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, yang sempat dilaksanakan sebelum beliau lengser, yakni memberikan amnesti kepada 40 orang Tapol/ Napol, memberikan beasiswa. Sedangkan penataan kuburan-kuburan korban DOM, ketika itu masih menunggu fatwa Majelis ulama dan kesediaan dan/atau izin keluarga korban. Sedangkan perpan-jangan landasan pacu Bandara Sultan Iskandar Muda, segera di-mulai pembangunannya.

Secara keseluruhan, skema, dan ikhtisar, penyelesaian konflik Aceh secara Damai adalah sebagai berikut:

Era Kepresidenan B. J. Habibie:

- Cabut DOM dan tarik Pasukan Non-Organik dari Aceh
- Bentuk Tim Penasehat Presiden Urusan Aceh.
- Bentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh.
- Pemberian Amnesti kepada sejumlah Tapol/Napol, yang terkait dengan GAM.

Era Kepresidenan K. H. Abdurrahman Wahid:

- Undang Henry Dunant Center (HDC), Genewa, untuk intermediasi dan fasilitasi dialog Pemerintah RI dengan Pimpinan GAM.
- Mulai dialog di Bavois, Genewa, Switzerland.
- *Joint of Understanding* tentang Jeda Kemanusiaan (*Humanitarian Pause*) ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2000, di Jenewa, dan bentuk perangkatnya di Aceh.

Era Kepresidenan Megawati Soekarnoputri:

- Bentuk *Desk Aceh* di Menko Polkam, dengan Panasehatnya terdiri dari Tokoh Masyarakat Aceh.

- Lakukan kembali dialog dengan mediasi HDC.
- *Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)* ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002, di Genewa.

Era Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono:

- Teruskan keberadaan *Desk Aceh*, tanpa Penasehat.
- Lakukan kembali dialog, dengan Mediasi Martti Ahtisaari, Mantan Presiden Finlandia.
- MoU ditandatangani antara Pemerintah RI dengan GAM, tanggal 15 Agustus 2005, di Helsinki.***



BAB 8

TIM PENASEHAT PRESIDEN UNTUK URUSAN ACEH (TPPUA) DAN KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN TINDAK KEKERASAN DI ACEH (KIPTKA)

Pembentukan TPPUA

DIBENTUKNYA tim ini adalah salah satu pertanda keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh secara tidak dengan kekerasan, dan dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat.

Berbagai upaya telah pernah dilakukan sebelumnya, termasuk operasi militer, yang makruf disebut sebagai DOM, namun belum membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Pengalaman juga membuktikan bahwa penyelesaian konflik Aceh secara kekerasan atau dengan cara militeristik, bukanlah cara yang tepat dan tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Korban telah banyak ber-jatuhan di bumi Aceh, dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang sipil yang tidak terlibat dalam gerakan bersenjata. Mereka adalah korban sia-sia. Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini Presiden Habibie telah mengubah paradigma, yakni dengan mencari jalan untuk menyelesaikan konflik Aceh yang berkepanjangan tersebut secara komprehensif, melalui jalan damai, dengan seadil-adilnya, bermartabat, dan berwawasan masa depan.

Setelah dua kali pertemuan, kemudian Presiden RI, B.J. Habibie, pada bulan Maret 1999, meminta agar Usman Hasan membantu beliau sebagai Ketua Tim Penasihat Presiden untuk penyelesaian konflik Aceh, dan sekaligus diminta pula untuk mengusulkan nama-nama anggota tim tersebut, di samping beliau sendiri telah mengantongi beberapa nama. Akhirnya dibentuklah Tim Penasihat Presiden untuk Aceh dengan Keppres No. 74/M tahun 1999 ter-tanggal 5 Maret 1999. Tim tersebut kemudian dalam perkem-bangannya sering disebut sebagai Tim Penasihat Presiden Urusan Aceh yang disingkat TPPUA, yang berkedudukan di Jakarta.

Keseluruhan susunan dan personalia TPPUA adalah sebagai berikut:

- Ketua: Ir. Usman Hasan, Msi. (mantan anggota DPRRI dan mantan Dubes RI untuk Mexico)
- 11 orang anggota: Prof. Dr. Ismail Sunny, SH. (LLM, ahli hukum tata negara di UI, dan mantan Dubes RI untuk Saudi Arabia); Mayjen TNI (Purn.) Abdurrahman Ramly (mantan Dirut PT Timah, mantan Dirut Pertamina, dan mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat); Letjen TNI (Purn.) Suryadi Soedirdja (mantan perwira di Rindam KDMA di Aceh, mantan Pangdam V DKI, dan mantan Gubernur DKI Jakarta); Letjen TNI (Purn.) Rivai Harahap (mantan Danrem Lilawangsa Aceh, mantan Pangdam I Iskandar Muda, dan Ketua Kwartir Pramuka Nasional); Drs. Kaoy Syah (aktivis, dosen Unsyiah, dan anggota DPRRI); Ir. Mustafa Abubakar (aktivis dan Ketua Taman Iskandar Muda (TIM) Jakarta); Prof. KH. Alie Yafie (Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)); Ibrahim Risyad (pengusaha Aceh yang sukses); Fachry Ali MA. (aktivis, peneliti, dan pengamat sosial budaya dan politik); Dr. Bachtiar Ali (aktivis, ahli komunikasi UI); dan Ir. Suryansyah (aktivis, anggota DPRRI).

Setelah beberapa kali mengadakan rapat intern, juga pertemuan dengan Presiden dan pihak-pihak lain, semakin dirasakan perlunya kehadiran dan keikutsertaan tokoh masyarakat dari Aceh dan Medan. Demikian diusulkan kepada Presiden RI, adanya penyempurnaan dari tim ahli tersebut, lahirlah Keppres No. 97/M/th 1999 tertanggal 24 Maret 1999. Tentang tambahan anggota Tim Penasehat Presiden Urusan Aceh, sebanyak 7 orang yakni: Muzakkir Walad (mantan Gubernur Daista Aceh); Prof. Dr. Abdullah Ali, MSc. (mantan Rektor Unsyiah), Prof. Dr. Al Yasa' Abu Bakkar, MA. (dosen IAIN Al Raniry, pengurus MUI Aceh); Hj. Nurdahri Ibrahim (anggota DPRRI dari Aceh, aktivis perempuan); Syamsul Kahar (aktivis, wartawan senior di Aceh); M. Saleh (aktivis, Ketua Badko HMI Aceh), yang kesemuanya berdomisili di Banda Aceh; dan Prof. Dr. HM. Jusuf Hanafiah MA, (aktivis, dokter spesialis kebidanan, dan tokoh masyarakat Aceh di Medan).

Dengan demikian keseluruhan anggota TPPUA, termasuk ke-tuanya menjadi 19 orang. Dalam beberapa kali pertemuan TPPUA dengan Presiden Habibie, terasa sekali keinginan beliau untuk menyelesaikan konflik Aceh secara dialogis dan damai, melalui kerangka penyelesaian yang komprehensif, adil, dan berwawasan ke depan. Tegasnya, tanpa kekerasan. Selain itu, sangat kental pula kekhawatiran beliau, bahwa jika konflik di Aceh berlarut-larut bukan tidak mungkin akan terjadi "balkanisasi" Indonesia, yang dimulai dari Aceh. Beliau juga terkesan sangat gundah akan pelanggaran HAM yang berlarut-larut di bumi Serambi Mekkah, dan bukan tidak mungkin pula, kata beliau, bila hal itu tidak dapat kita tanggulangi secara baik, akan mengundang perhatian, dan bahkan campur tangan masyarakat internasional, termasuk PBB.

Fungsi, Tugas, dan Program TPPUA

Dalam konsideran "menimbang" dari Keppres No. 74/M Tahun 1999, disebutkan: "bahwa untuk membantu menyelesaikan masa-lah-masalah yang timbul di Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam diktum "pertama" Keputusan Presiden ini sebagai Tim Penasehat untuk menanganai masalah tersebut, sedangkan dalam "memutuskan" pada diktum "Kedua" berbunyi: "Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penasehat menyampaikan saran pertimbangan kepada Presiden". Dengan dasar tersebut, disusun "Kerangka Acuan TPPUA" yang antara lain mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang, yakni:

- Mengumpulkan masukan dan informasi sebanyak-banyaknya tentang situasi dan kondisi objektif yang berkembang di Aceh.

- Merumuskan pokok-pokok pikiran tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh Presiden RI dalam menanggulangi permasalahan yang timbul di Aceh, secara komprehensif, adil, dan ber-orientasi ke masa depan.
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden RI, berkenaan dengan penanganan masalah Aceh.
- Sedangkan program TPPUA pada dasarnya terdiri dari pokok-pokok program dan rincian program.

Pokok-pokok program adalah sebagai berikut:

- Menampung informasi tentang gambaran keadaan (situasi dan kon-disi) yang sebenarnya di lapangan.
- Melakukan kunjungan kerja (*on the spot*) ke Aceh dan sumber-sumber informasi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Mengadakan pendekatan kepada perorangan dan kelompok stratis yang terkait dan dianggap perlu, dalam rangka mengondisikan, menenangkan suasana dan mengajak untuk menyelesaikan masalah Aceh secara komprehensif, adil, dan ber-orientasi masa depan.
- Menggelar diskusi/seminar dan bentuk-bentuk dialog lainnya, un-tuk mendapatkan masukan dan menguji analisa serta memantap-kan rumusan kesimpulan tentang situasi dan kondisi serta lang-kah-langkah yang perlu diambil (diantisipasi).
- Mengolah semua masukan/informasi/data dan fakta untuk dijadi-kan dasar bagi rumusan saran dan pertimbangan tim yang akan disampaikan kepada Presiden RI, dan bagi keperluan lainnya.
- Merumuskan saran dan pertimbangan Tim Penasihat ini untuk di-sampaikan kepada Presiden RI.
- Mengikuti dan memonitor pelaksanaan di lapangan dari kebijak-sanaan Presiden/Pemerintah, baik yang ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Mensosialisasikan kebijaksanaan pemerintah RI, sehubungan de-ngan penyelesaian masalah Aceh.

Rincian program terdiri dari beberapa kelompok sebagai berikut:

- Menampung dan mengumpulkan masukan/informasi.
- Kunjungan kerja.
- Pendekatan kepada perorangan/kelompok strategis.
- Diskusi, seminar, dan bentuk-bentuk dialog lainnya.
- Pengolahan masukan/informasi/data dan fakta.
- Sosialisasi kebijakan pemerintah/presiden.

Dalam rangka program tersebut, baik yang umum atau pokok-pokok program maupun rincian program, TPPUA telah melakukan kunjungan kerja secara berkelompok dan atau keseluruhan anggota ke Aceh dan Medan, sebanyak 3 kali, sedangkan kunjungan kerja secara perorangan telah pula dilakukan sebanyak lebih dari 10 kali, mencakup ke seluruh Aceh.

Selain itu, Presiden meminta agar TPPUA juga secara khusus memberikan masukan, saran, dan pertimbangan, tentang rencana kunjungan Presiden ke Aceh dalam waktu dekat. Mengingat kunjungan Presiden tersebut merupakan sesuatu yang sangat krusial, dan strategis bagi upaya penyelesaian konflik Aceh secara menyeluruh, maka TPPUA pun menempatkan tugas ini sebagai suatu prioritas utama.

Hasil-Hasil yang Dicapai oleh TPPUA

Selama keberadaannya TPPUA telah mengkaji dan merumuskan beberapa pokok pikiran, pendapat, dan saran yang sebagian telah disampaikan kepada Presiden RI, kepada instansi dan pejabat pemerintah terkait, serta kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan lainnya.

Pada pertemuan pertama Presiden RI dengan tim ini pada tanggal 12 Maret 1999, selain berisi agenda perkenalan anggota tim dengan Presiden, juga mendengarkan *briefing* dan arahan Presiden tentang esensi dan ruang lingkup, fungsi, dan tugas-tugas tim ini.

Saat itu Presiden menyampaikan kepada kami, bahwa beliau sedang mempertimbangkan baik-buruknya dan merencanakan wak-tu yang tepat untuk berkunjung ke Aceh. Dan hal itu menjadi tugas khusus dari tim ini untuk memberikan pertimbangan atau usul/ sarannya tentang rencana tersebut. Untuk itu tim mengadakan beberapa kali rapat, sambil mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang hal itu. Akhirnya dalam pertemuan ke-2 dengan Presiden pada tanggal 16 Maret 1999, TPPUA menyarankan kepada Presiden sebagai berikut:

1. Agar Presiden melakukan kunjungan ke Aceh secepat mungkin, kalau dapat dalam bulan Maret 1999.
2. Agar Presiden dalam pidatonya, menyatakan permintaan maaf pemerintah kepada Rakyat Aceh, atas perlakuan yang buruk dan kasar dari aparat keamanan.
3. Agar Presiden menginstruksikan untuk menindak tegas semua pelaku kekerasan dan kekejaman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Agar Presiden dalam pidatonya menyatakan bersedia membebaskan semua tahanan politik (tapol) dan atau narapidana politik (napol) yang terkait dengan GAM. Akan lebih baik lagi, jika pembebasan itu telah terjadi sebelum kunjungan Presiden ke Aceh.
5. Agar Presiden memberikan pengampunan (amnesti umum).
6. Agar Presiden menginstruksikan sekali lagi penarikan semua pa-sukan non-organik dari Aceh.
7. Agar Presiden mengkomandokan pemberian bantuan kepada semua korban kekerasan dan kekejaman, baik pada masa DOM maupun Pasca DOM.

Dalam pertemuan ke3 TPPUA dengan Presiden, pada tanggal 23 Maret 1999, selain mempertajam pokok-pokok pikiran dan saran-saran tim yang telah pernah disampaikan sebelumnya, juga membahas Rancangan Pointers Pidato Presiden di depan Masyarakat pada saat kunjungan ke Aceh, yang telah disampaikan oleh TPPUA melalui Dr. Jimly Assiddiqi, staf khusus Presiden. Selain itu ada suatu substansi yang amat penting dan sangat strategis serta juga mengandung bobot psikologis yang tinggi, dan juga dinilai perlu ada “ketertutupan”, disampaikan oleh TPPUA kepada Presiden, dan oleh karenanya TPPUA datang hanya dengan jumlah anggota yang terbatas, yakni hanya 6 orang yang dinilai senior, dan telah mendapat mandat dari keseluruhan anggota TPPUA dalam rapatnya tanggal 18 Maret 1999. Ke enam anggota senior TPPUA tersebut adalah: Usman Hasan, Ismail Sunny, Suryadi Soedirja, A. Rahman Ramly, Rivai Harahap, dan Ali Yafie. Demikian pula Presiden diharapkan cukup menerimanya sendiri saja, tanpa

didampingi oleh staf atau pembantu beliau. Substansi yang dinilai “berat” dan sarat dengan “ewuh pekewuh” serta sulit menyampaikannya tersebut adalah: “Agar keberadaan Presiden di Aceh membawa kesejukan, dan simpati masyarakat, serta agar diskusi dengan masyarakat berjalan lancar tanpa dibayangi oleh kekhawatiran adanya ungkapan perasaan anti pati kepada sesuatu ataupun kepada seseorang, jika mungkin tidak mengikut sertakan Bapak Wiranto dalam rombongan Presiden RI berkunjung ke Aceh”.

Alasan atau dasar TPPUA mengajukan saran tersebut adalah: Informasi dari berbagai sumber, terutama dari Aceh, bahwa rakyat Aceh masih mengandung trauma dan rasa benci serta bahkan dendam yang mendalam kepada operasi militer selama DOM, yang penuh dengan kekejaman dan kebrutalan, dan telah menelan banyak korban di Aceh. Rakyat Aceh beranggapan bahwa punca dari semua kezaliman dan malapetaka tersebut adalah Bapak Wiranto sebagai Pangab. Menurut informasi tersebut, rakyat Aceh sangat meng-hormati dan menjunjung tinggi Presiden Habibie. Mereka menaruh banyak harapan kepada Presiden Habibie, agar konflik Aceh dapat diselesaikan secara damai, adil dan bermartabat, dan mereka tidak menyenangi jika Presiden membawa serta bapak Wiranto dalam rombongannya ke Aceh. hal itu sangatlah sulit/krusial, dan sensitif jika dibicarakan secara terbuka. Namun, sekarang kondisi di Aceh adalah dalam proses damai menuju rekonsiliasi yang berkelanjutan, setelah ditandatanganinya MoU di Helsinki. Semua pihak telah saling bermaaf-maafan.

Bapak Presiden RI memberi tanggapan lebih kurang sebagai berikut:

Berkenaan dengan pokok-pokok pikiran dan saran TPPUA, termasuk proposal yang berjudul “Saran dan Pertimbangan Yang Perlu Mendapat Perhatian Berkenaan dengan Rencana Kunjungan Presiden RI ke Propinsi Daerah Istimewa Aceh” pada umumnya beliau menanggapinya secara positif, dan menyatakan akan ber-usaha atau mencari kemungkinan untuk memenuhinya.

Berkenaan dengan waktu kunjungan ke Aceh, beliau telah mene-tapkan tanggal 26 Maret 1999, dan itu adalah kunjungan pertama Presiden Habibie ke Aceh selama masa kepresidenannya.

Tentang pointer pidato Presiden, beliau menyatakan terima kasih atas masukan tersebut, nanti tentunya akan dielaborasi lebih lanjut oleh Mensekneg/Dr. Jimly Assiddiqi.

Namun demikian, substansi yang berkenaan dengan “orang” yakni “Bapak Wiranto”, reaksi Presiden berbeda dengan terhadap beberapa usul TPPUA lainnya. Tegasnya beliau akan mengikuti saran dan pertimbangan TPPUA, kecuali tentang satu hal yakni, “agar Pak Wiranto tidak ikut dalam rombongan Presiden”, beliau tidak dapat memenuhinya, dan bersikukuh akan tetap mengikut sertakan Wiranto dalam rombongan beliau ke Aceh pada tanggal 26 Maret 1999. dengan adanya saran kami tentang Wiranto tersebut, akhirnya, mengalihkan diskusi kami menjadi lebih fokus kepada “mengapa Wiranto harus ikut dalam rombongan Presiden, ke mana pun beliau pergi”. Presiden Habibie, menceritakan pandangan dan apa pesan khusus Presiden Soeharto kepada beliau berkenaan dengan Wiranto, dan betapa pentingnya Habibie sebagai Presiden, harus selalu dekat dan bahkan menyatu dengan Wiranto sebagai Pangab. Oleh karenanya tolonglah dipahami bagaimana urgensi keikut-sertaan Wiranto dalam rombongan Presiden ke Aceh nanti. Presiden juga meminta TPPUA untuk ikut mensosialisasikan bahwa DOM atau operasi militer di Aceh, bukanlah “proyeknya” Wiranto, tetapi itu adalah suatu keniscayaan yang harus ditempuh oleh pemerintahan sebagai kebijakan pada waktu itu, untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman berbagai anasir yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Dalam pidato Presiden dan diskusi dengan audiens yang hadir di Masjid Baiturrahman pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 1999 tersebut, ternyata tidak hanya hal-hal yang kami sarankan di atas yang disebut oleh beliau, tetapi berkembang mencakup berbagai substansi yang lebih luas yaitu:

1. Menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Aceh, khususnya para keluarga korban.
2. Menyatakan bahwa telah menginstruksikan kepada aparat ke-amanan untuk menghentikan semua tindak kekerasan dan pertumpahan darah;
3. Menyatakan akan mengusut tuntas dan mengambil tindakan hukum terhadap oknum-oknum baik kalangan ABRI, birokrasi, maupun masyarakat;
4. Memberitahukan bahwa pemerintah tengah mengembangkan se-buah kerangka penyelesaian masalah Aceh yang adil, komprehensif dan berorientasi ke depan;
5. Melanjutkan program pembebasan narapidana/tahanan yang ter-libat kasus politik;
6. Pemerintah akan memfasilitasi pemakaman kembali para korban operasi keamanan dan korban GPK di pemakaman umum, apabila keluarga menghendaki;
7. Memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran perkreditan usaha, modal kerja atau bantuan lainnya, kepada para janda, korban pemerkosaan, cacat, dan bentuk rehabilitasi ekonomi, maupun rehabilitasi sosial lainnya;
8. Merehabilitasi dan membangun kembali bangunan di desa-desa di bekas wilayah operasi militer, termasuk rehabilitasi mental-spiritual bagi semua eksekusi operasi keamanan;
9. Meningkatkan status madrasah swasta menjadi madrasah negeri, di beberapa Kabupaten, dan memberi bantuan guru yang me-madai untuk peningkatan kualitas pendidikan di madrasah tersebut;
10. Mendirikan madrasah aliyah negeri unggulan, sebagai wahana pembibitan ulama dan intelektual dengan koordinasikan Departemen Agama dan BPPT;
11. Perpanjangan landasan pacu bandara Sultan Iskandar Muda, sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan haji di tahun 2000;
12. Pengembangan Kapet Sabang, dengan potensi unggulan meliputi sektor perikanan, industri dan jasa, serta Pariwisata. Untuk mendukung hal itu, akan dibuka dan dikembangkan kembali Pelabuhan Sabang, yang pembangunan fisiknya akan dimulai tahun 2000;
13. Mempelajari kemungkinan untuk menghidupkan kembali Kereta Api Aceh.
14. Tengah dipilih lahan dan selanjutnya ditetapkan untuk praktek dan usaha bagi Universitas Syah Kuala, IAIN, dan dayah.

Selesai berpidato, Presiden menyediakan waktu untuk dialog dengan para audiens. Tak pelak lagi, terjadilah dialog yang hangat dan bahkan cenderung "panas", yang di sana-sini terselip kata-kata atau kalimat yang terkesan "kasar" atau kurang layak dari audiens. Namun, semuanya akhirnya dapat diatasi oleh Presiden yang cukup piawai dalam menghadapi suasana tegang dan keras seperti itu. Berubahlah *ending*-nya menjadi bersalam-salaman, dan bahkan berpelukan sebagaimana layaknya orang-orang Islam dan beriman.

Sementara berlangsungnya pertemuan di dalam masjid Raya Baiturrahman, di luar masjid, para mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran. Hal itu berawal dari berkumpulnya mahasiswa, mengadakan rapat akbar dan orasi di lapangan sekitar Tugu Darus-salam, Kampus Unsyiah. Mereka mengucapkan ikrar referendum yakni: "sekali referendum tetap referendum". Mereka juga menolak Kodam untuk Aceh. Kemudian sebagian dari mereka bergerak menuju Masjid Raya Baiturrahman, tempat acara

Silaturrehmi Presiden dengan masyarakat sedang berlangsung. Akibatnya terjadilah ben-trokan dengan aparat keamanan yang menghadang mereka di Jembatan Pante Pirak. Aparat keamanan terpaksa menggunakan gas air mata dan juga tembakan peluru karet. Menurut media masa yang terbit besoknya, memberitahukan bahwa ada sebanyak 112 orang mahasiswa yang terluka, 9 di antaranya harus dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh.

Usai urusan kunjungan Presiden Habibie ke Aceh, TPPUA kembali menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan kerangka acuan yang telah disepakati, antara lain:

1. Membuat *press release*, tentang tugas-tugas dan penyampaian pokok-pokok pikiran dan saran-saran kepada Presiden.
2. Membuat Catatan tentang kunjungan Presiden ke Aceh, dan harapan akan ada *follow upnya*.
3. Merumuskan hasil rapat-rapat TPUA tentang “evaluasi, saran dan pertimbangan tindak lanjut kunjungan Presiden RI ke Aceh, tanggal 26 Maret 1999”, dan menyampaikannya kepada Presiden, yakni berupa rincian pelaksanaan dari berbagai janji Presiden di Aceh.
4. Membuat rumusan dan menyampaikannya kepada Presiden, laporan dan masukan tentang Peristiwa Berdarah di Krung Geukueh, Kec. Dewantara, Aceh Utara.
5. Merumuskan hasil kunjungan kerja TPPUA ke Aceh dan menyampaikannya sebagai masukan kepada Presiden RI.
6. Merumuskan kerangka pemikiran tentang penyelesaian masalah Aceh secara komprehensif, adil, dan berwawasan ke depan”, yang berisi antara lain:
 - Keadaan: yakni berupa uraian tentang realitas yang ada dan hal-hal aktual di Aceh.
 - Saran dan Pertimbangan, berkenaan dengan: kepemimpinan di daerah, keamanan, amnesti umum, musyawarah rakyat Aceh, komisi independen pengusutan tindak kekerasan, undang-undang tentang Aceh sebagai daerah istimewa, komisi independen penyelesaian masalah Aceh secara komprehensif, adil, dan berwawasan ke depan, dan lain-lain.
7. Berkenaan dengan presiden baru, yakni Presiden Abdurahman Wahid, TPPUA membuat laporan yang komprehensif, tentang pelaksanaan tugas-tugas dan tantangan yang dihadapi; ter-tanggal 4 Nopember 1999.
8. Menyusun dan menyampaikan kepada Presiden RI “Saran dan Pertimbangan kepada Bapak Presiden RI ” tertanggal 17 Nopember 1999.
9. Merumuskan dan menyampaikan kepada Presiden RI: “Saran dan Pertimbangan kepada Bapak Presiden RI” tertanggal 15 Nopember 1999.
10. Merumuskan dan menyampaikan kepada Presiden RI: “Saran dan Pertimbangan Tim Penasehat Presiden Urusan Aceh (TPPUA) kepada Presiden RI”, hasil Rapat TPPUA tanggal 3 Februari 2000, tertanggal 7 Februari 2000.
11. Merumuskan dan menyampaikan kepada Presiden RI: “Evaluasi Akhir Tugas Tim Penasehat Presiden Urusan Aceh (TPPUA)”, tertanggal 28 Februari 2000.

Sebagai ringkasan dan rekapitulasi dari keberadaan dan kegiatan-kegiatan TPPUA, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

- Saran dan pertimbangan TPPUA kepada Presiden RI dipenuhi atau tidak agar Presiden meminta maaf kepada rakyat Aceh ----- ya.
- Agar diberikan kompensasi kepada korban konflik ----- ½ ya.
- Agar diadakan pengadilan untuk mengadili tindak kekerasan --- ½ ya.
- Agar ditarik pasukan non-organik dari Aceh ----- ya.

- Agar terhentinya pertumpahan darah di Aceh ----- $\frac{1}{2}$ ya.
- Agar mengembangkan kerangka penyelesaian Aceh secara kom-prehensif, adil, damai, dan berwawasan ke depan ----- ya.
- Agar tapol/napol terkait GAM dibebaskan dan diberi amnesti ----- ya.
- Agar desa-desa dan bangunan publik yang rusak karena kon-flik dibangun kembali ----- $\frac{1}{2}$ ya.
- Agar status Madrasah swasta di tingkatkan dan direhabilitasi --- $\frac{1}{2}$ ya.
- Agar dilakukan Pengembangan Kapet Sabang ----- tidak.
- Landasan Bandara Sultan Isk. Muda diperpanjang/ diup grade -----ya.
- Agar Kereta Api dibangun atau tidak tidak
 - Jadi: -Ya = 5 dari 12 = 40,16%. Artinya, dipenuhi sepenuhnya.
 - Setengah Ya = 5 dari 12 = 40,16%. Artinya, setengah dipenuhi.
 - Tidak = 2 dari 12 = 19,68%. Artinya, tidak dipenuhi sama sekali.

Terbentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA)

Komisi Independen ini dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie, dengan Keppres No. 88/Tahun 1999, tertanggal 30 Juli 1999, atas usulan dari Tim Penasehat Presiden Urusan Aceh (TPPUA). Usulan TPPUA tersebut langsung disampaikan kepada Presiden RI, dalam pertemuannya dengan beliau pada tanggal 19 Mei 1999, yang berbunyi sebagai berikut: “Agar Presiden membentuk Komite Independen Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM di Aceh”. Usulan TPPUA tersebut sejalan dengan rekomendasi Komnas HAM pada tanggal 22 Juni 1999, yang berbunyi antara lain: “agar pemerintah segera membentuk komisi independen yang sudah lama diusulkan oleh Komnas HAM”. Komisi tersebut bernama Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh yang untuk selanjutnya disebut dengan singkatan KIPTKA, atau sering pula disebut dengan Komisi Independen. Dibentuknya komisi ini adalah sebagai antisipasi terhadap cukup banyaknya tindak kekerasan di Aceh baik sebelum, pada saat, maupun setelah DOM. Hal tersebut sejalan dengan tekad Habibie untuk menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh. Sebab jika tidak, hal tersebut akan selalu menjadi, perhatian, sorotan dan bahkan suatu ketika dapat berupa campur tangan masyarakat internasional. Lebih dari itu diharapkan, dengan dibentuknya komisi ini akan dapat mengusut, berbagai bentuk kekerasan, pelanggaran hukum, dan dan pelanggaran HAM, yang telah sangat menyengsarakan dan menzalimi rakyat Aceh selama konflik. Keseluruhan anggota komisi ini adalah sebanyak 26 orang, terdiri dari unsur masyarakat/tokoh non-formal/pemuda, aktivis HAM atau Pengurus Komnas HAM, unsur perguruan tinggi, unsur ulama, unsur Depdagri/Polri/Jaksa/Polisi Militer, unsur ke-sehatan (dokter), dan sebagainya. Ketuanya adalah Amran Zamzami, SE.

Sebagai catatan: Humam Hamid, mengundurkan diri sebagai anggota KIPTKA pada tanggal 22 Agustus 1999. Sedangkan Hasballah Saad telah menyatakan tidak akan ikut dalam KIPTKA sejak dalam proses pembentukannya.

Susunan Organisasi Komisi Independen

Agar dapat melaksanakan program dan kegiatannya secara efektif dan tepat sasaran, maka komisi ini membentuk kepengurusan, baik pada level pimpinan maupun 4 buah tim kerja intern, yaitu tim asistensi, tim testimoni, tim verifikasi, dan tim pengusutan. Keseluruhan kepengurusan dan tim-tim kerja adalah sebagai berikut:

- Ketua: Amran Zamzami, SE. (unsur masyarakat); wakil ketua: Drs. Marwan Paris (unsur Polri); Dr. Muslim Ibrahim (cendekiawan/ ulama).
- Sekretaris: Dr. Rosita S. Noer, MA. (unsur masyarakat); wakil sekretaris: Dra. Naimah Hasan, MA. (unsur masyarakat dan anggota DPRD Aceh).
- Tim asistensi, koordinator: Nasruddin Hars (wartawan senior).
- Tim testimoni; koordinator: Ir. H. A. Gani Nurdin (aktivis HAM); dengan 6 orang anggota yakni: Tgk. M. Daud Zamzami (ulama); Drs. Koesparmono Irsan (Komnas HAM); Drs. Ghazi H. Y (unsur masyarakat/pemuda); Ir. Nurtini (aktivis HAM/Perempuan); Dra. Farida Hariani (aktivis HAM/Perempuan); dan Tgk Bulqaini (ulama muda/Thaliban).
- Tim verifikasi; koordinator: Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH. (DEA, Cendekiawan); dengan 6 orang anggota yakni: Ir. Al Qudri A. Gani (unsur pemuda); Mukhlis Muchtar, SH., (Advokat); Prof. Dr. Syafwan Idris, MA. (Rektor IAIN); Prof. Dr. Dayan Dawood, MA.

(Rektor Unsyiah); Drs. Ragam Santika, MM (Depdagri); dan Ir. Ibrahim Abdullah, MA. (unsur masyarakat).

- Tim pengusutan; koordinator: Dra. Fauluaro Zaluchu, SH., Msi (Polri); dengan 5 orang anggota, yakni: H. M. Salim, SH. (Komnas HAM); H. M. Daim (tokoh Masyarakat); Prof. Dr. A. Prayitno, Sp. Kj (Dokter/IDI); Didin Alidin (Puspom TNI); H.M.A. Abdurrahman, SH. (Kejaksaan Agung RI).

Program, Kegiatan, dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Semenjak terbentuknya, komisi ini telah melakukan berbagai program dan kegiatan dan mengingat cukup banyaknya tindak ke-kerasan, maka KIPTKA memprioritaskan 5 kasus, yang segera ditangani dalam waktu dekat, yakni:

- Kasus perkosaan terhadap Sumiati di Kab. Pidie, tanggal 16 Agus-tus 1996.
- Kasus Rumoh Geudong, berupa penculikan, penganiayaan, dan pem-bunuhan semena-mena, di Kab. Pidie, terutama selama DOM, antara tahun 1989-1998.
- Kasus pembunuhan dan penghilangan orang di Idi Cut atau Arakundo, Kab. Aceh Timur, tanggal 2-3 Februari 1999.
- Kasus penembakan di Simpang KKA/Cot Murong, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, pada tanggal 3 Mei 1999.
- Kasus penembakan dan pembunuhan Tengku Bantaqiah di Bautong Ateueh, Kab. Aceh Barat, pada tanggal 23 Juli 1999.

Untuk kelima kasus besar tersebut KIPTKA telah melakukan berbagai langkah dan upaya hukum, seperti verifikasi, dan testimony melalui/terhadap orang-orang yang diperkirakan mengetahui terjadinya kasus tersebut, para saksi mata dilokasi, serta para korban yang masih hidup dan keluarga korban yang telah meninggal dunia. Komisi ini menghadapi berbagai halangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas sucinya, baik di lapangan, maupun di kantorkantor pemerintahan, yang kesemuanya dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Barang bukti lapangan telah tidak lagi dan atau telah sengaja dihilangkan atau dikacaukan.
- Para saksi dan atau orang-orang yang ditanyai/diwawancarai, kurang berani mengungkap kejadian yang sebenarnya, karena takut tidak adanya jaminan keamanan baginya dan keluarganya, dan karena secara terang-terangan dan tersembunyi adanya tekanan dan bahkan ancaman.
- Dokumen, di kantorkantor, terutama yang berkenaan dengan operasi keamanan, dan perlakuan kejam dan kasar terhadap korban, sulit sekali diperoleh, bahkan hampir-hampir mustahil bisa diperdapat.
- Rakyat, saksi, dan korban, tidak dapat menyebutkan identitas para pelaku tindak kekerasan, karena pelaku umumnya tidak memakai indentitas yang jelas, atau karena identitasnya tidak dapat ditandai secara jelas akibat adanya penyamaran dan atau karena saksi tidak mempunyai kemampuan baca-tulis, serta kemampuan minim berbahasa Indonesia.
- Ada sebagian keluarga korban sudah pasrah atas kejadian masa lalu, karena dianggap itu adalah takdir Allah Swt., yang dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Dan oleh karenanya barang-kali, makanya tidak satu pun di antara keluarga Tgk. Bantaqiah

yang hadir ketika berlangsungnya pengadilan koneksitas mengadili para tersangka pembantaian terhadap Tengku Bantaqiah.

Namun, apa pun kesulitan yang dihadapi, Komisi Independen jalan terus demi kemaslahatan rakyat Aceh dan Indonesia, dan dengan prinsip-prinsip: a) kemandirian, b) kebenaran, c) keadilan, d) kemanusiaan, dan e) wawasan kebangsaan.

Mengusut Pembantaian Bantaqiah

Kejadiannya sendiri sangat mengerikan, menyedihkan, dan akan menyentuh hati sanubari siapa saja yang berakal sehat, dan ber-Tuhan. Jika kita adalah orang yang berkeluarga, cobalah kita mere-nung sejenak, bayangkan jika peristiwa tersebut menimpa keluarga-nya sendiri, termasuk keluarga pelaku pembantaian tersebut, bagaimana perasaan dan reaksi mereka.

Pembantaian tersebut sesungguhnya terjadi di dua, bahkan di tiga atau empat tempat, yakni: *Pertama*, di Dayah Babul Mukarramah yang dipimpin oleh Tengku Bantaqiah, di mana tertembak 31 orang dan tewas di tempat, yakni: para santri, dan Tengku Bantaqiah sendiri, berikut putranya. Yang *kedua*, adalah di dalam perjalanan menuju Takengon. Semula dikatakan dan diper-dengarkan kepada khalayak, bahwa semua korban luka-luka akan dibawa ke RSUD Takengon, dengan dua buah truk, untuk pengobatan. Namun, di tengah jalan, di Kilometer 7 dan 8, mereka dieksekusi, atas perintah Letkol. Sudjono, dengan mengatakan kepada bawahannya Letda. Trijoko Adiwiyono: “Dik, sekolahkan saja semua orang ini”. Walaupun agak berat hati untuk melaksanakannya, dan hal itu disadari oleh Letkol. Sudjono, sehingga dia merasa perlu mengulangi perintahnya dengan membentak: “Laksanakan perintah itu!”, seraya memegang pistol. Mereka yang tak berdaya, karena luka-luka tersebut, mulai ditembaki (atau lebih tepat: diberondong) dengan peluru dan mayatnya dibuang masuk jurang di pinggir jalan tersebut, baik di Km 7 dan Km 8, maupun di tempat-tempat berikutnya.

Di antara lima kasus besar tersebut di atas, kasus pembantaian terhadap Tgk. Bantaqiah dan para santrinya yang telah sampai ke pengadilan, itu pun kemudian macet, atau terhenti, atau tidak tuntas, mengingat aktor utamanya menghilang entah ke mana, yakni Letkol. Sudjono, Kasi. Intel Korem 011/Lilawangsa. Perihal, hilangnya Letkol. Sudjono, Amran Zamzami¹¹⁹⁴ dalam kapasitasnya sebagai Ketua KIPTKA menyatakan, telah menimbulkan berbagai spekulasi.

Pertama, kata beliau, hilangnya Sudjono, sebagai tokoh kunci dalam pembantaian, jelas akan memutuskan mata rantai yang sangat penting dari seluruh jaring komando operasi ini. Proses pengadilan koneksitas akan menghadapi permasalahan yang besar. Satu sisi, model peradilan ini merupakan eksperimen pertama, yang akan berupaya menjerat militer, tidak hanya bawahan, namun juga perwira tinggi. Hilangnya Sudjono dalam analisis ini menjadi bagian dari skenario besar untuk menggagalkan peradilan koneksitas secara sistematis. Namun, apakah konspirasi ini kemudian memiliki *link* hingga ke tingkat Mabes TNI, ataukah hanya sampai di tingkat Kodam? Masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Namun, ke-mungkinan ini semakin kuat, ketika dalam sebuah pertemuan antara pihak Tim Tetap Koneksitas dan Komisi Independen — yang melakukan tugas monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan peradilan koneksitas— disebutkan bahwa: Tidak hanya Sudjono yang hilang, tapi juga dokumen pribadinya baik yang ada di Makorem 011/Lilawangsa, maupun yang ada di Makodam I/Bukit Barisan. Orang awam pasti akan bertanya apakah sudah sedemikian hancurnya sistem di tubuh TNI?, sehingga untuk menjaga sebuah dokumen saja tidak bisa?

¹¹⁹⁴ Amran Zamzami, *Tragedi Anak Bangsa*, 2001.

Adakah kata lain yang lebih halus untuk mengatakan, ini sebuah rekayasa.

Amran, juga menambahkan bahwa terbongkarnya kasus Tgk. Bantaqiah ini sedikit banyak telah memperlihatkan keterlibatan Kodam, paling tidak, dalam komando khusus untuk melakukan tindakan-tindakan repressif. Membongkar kasus raibnya Letkol. Sudjono akan menjadi kunci bagi upaya pelibatan tokoh-tokoh lain-nya yang lebih tinggi, mulai dari tingkat Korem, hingga Kodam dan dapat membongkar posisi mereka menjadi tersangka. Spekulasi *kedua*, kata Amran Zamzami, timbul asumsi adanya keterlibatan militer hingga ke tingkat Mabes. Sedangkan spekulasi *ketiga*, adalah kemungkinan hilangnya Sudjono adalah karena inisitif dan upaya yang dilakukannya sendiri untuk lepas dari jeratan hukum yang bisa sangat berat.

Sepanjang pengamatan dan informasi, kasus pembantian Tgk. Bantaqiah, walaupun orang yang diduga pelaku utamanya “hilang”, adalah merupakan satu-satunya kasus besar yang sampai ke pengadilan, sedangkan ratusan bahkan ada yang mengatakan ribuan kasus lain, hilang tak tentu rimbanya, dan mengambang atau terhenti begitu saja, meninggalkan penderitaan dan kepedihan yang sangat mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Padahal katanya Indonesia adalah negara hukum dan negara Pancasila yang menghargai HAM (baca: Kemanusiaan yang adil dan beradab).

Di pengadilan koneksitas yang digelar, di Banda Aceh mulai tanggal 19 April 2000, yang dipimpin oleh hakim ketua: Ruslan Dahlan, SH.; dengan jaksa penuntut umum: Nuraini AS; dihadirkan tersangka sebanyak 25 orang; 24 orang di antaranya adalah anggota TNI, yang terdiri dari: 10 orang dari Yonif Linud 328, Kostrad Cilodong; 1 orang dari Yonif 113, Jaya Saka, Cunda; 1 orang dari Yonif 413, Mojolaban; 1 orang dari Yonif Lanud 305, Karawang; 8 orang dari Kiwal Kodam-I/BB, Medan; 2 orang dari Korem 011, Lilawangsa, Lhokseumawe; 1 orang sersan kepala, tidak jelas dari mana; 1 orang sipil bernama Taleo, alias Aman Suar.

Sedangkan Letkol. Sudjono, Kasi. Intel Korem 011, Lilawansa (pengawas operasi); dan Letkol. Heronimus Guru (komandan lapangan); serta Kol Syafnil Armen, Dan Rem 011 Lilawangsa, tidak hadir di pengadilan sebagai terdakwa. Padahal jelas, dalam kesaksiannya Syafnil Armen (Komandan Korem, mengakui bahwa dialah sebagai penanggung jawab umum operasi tersebut. Proses pengadilan cukup berbelit dan dilematis. Di satu pihak pengadilan adalah upaya hukum yang sangat mutlak diperlukan, di lain pihak, pengadilan tersebut dicurigai oleh masyarakat, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa serta LSM pembela HAM (sandiwara dan rakyat), apalagi dengan tidak hadirnya dan diberitakan meng-hilangnya Letkol. Sudjono, pelaku utama pembantian. Di samping itu, proses pengadilan tersebut, sering terkesan tidak berjalan normal, dan ragu-ragu. Mungkin jaksa atau hakimnya pun, sebagai manusia biasa, senantiasa dirundung kekuatiran dan ketakutan, jika tuntutan dan atau vonisnya, tidak memuaskan pihak-pihak tertentu, atau dirasakan merugikan dan mencemarkan nama baik pihak tertentu, jangan-jangan bisa “disekolahkan” juga, sebagai mana para korban pembantaian. Apakah hal itu terkait dengan adanya rumor, bahwa pengadilan koneksitas tersebut, sarat dengan tekanan dan atau intervensi aktif dari kalangan tertentu, *wallahu'alam bissawab*.

Penuntut umum, akhirnya berhasil sampai pada tahap mem-bacakan tuntutanannya pada tanggal 11 Mei 2000, dengan tuntutan sebagai berikut:

- Terdakwa 1, 2, 8, 9, dan 12, yakni Kapten Anton Yuliantoro. Letnan Dua Maychel Azmi, Prajurit Dua Yuliansyah, Prajurit Satu Herdiansyah, dan Letnan Dua Trijoko Adiwoyono, dituntut 8 tahun penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya.
- Terdakwa 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, yakni: Sersan Dua Hadi Pratoyo, Prajurit Satu Darsito, Prajurit Satu Biduan, Prajurit Satu Suratno,

Sersan Kepala Wandiman, Sersan Satu Joko Nugroho, Sersan Dua Suhartono, Sersan Dua Khaidir, Sersan Dua Mukri, Sersan Dua Muhd. Ibrahim Nasution, Sersan Dua Syaiful, Prajurit Kepala Frest Ronald Wacarole, Prajurit Kepala Toto Hendarto, Prajurit Satu Syaiful Fadli, Prajurit Satu Firmansyah, Sersan Kepala Harapenta Bangun, Prajurit Satu Indra Suryatma, dituntut hukuman penjara 7 tahun.

- Terdakwa 4 dan 10, yakni Prajurit Kepala Wahyono, dan Prajurit Dua Heriyanto, dituntut hukuman penjara 6 tahun, dan
- Terdakwa 11, yakni Taleo alias Aman Suar, dituntut, paling berat yakni 10 tahun penjara.

Pengadilan “sandiwara” atau “rekayasa” inipun mencapai puncaknya, dan telah dapat dikatakan berakhir setelah hakim ketua mengetuk palu vonisnya, atas nama keadilan. Jika dibanding antara tuntutan jaksa penuntut umum dengan Vonnis yang dijatuhkan oleh Hakim, terlihat ada beberapa perbedaan. Kondisi keseluruhannya adalah sebagai berikut:

Terdakwa Tuntutan Keputusan Hakim Penuntut Umum:

1. Kapt. Anton Yuliantoro 8 th, kurangi masa tahanan 8 th, 6 bulan
2. Letda Masychel Asmi 8 th, kurangi masa tahanan 8 th, 6 bulan
3. Sersan Dua Hadi Pratoyo 7 tahun 8 th, 6 bulan
4. Prajurit Kepala Wahyono 6 tahun 8 th, 6 bulan
5. Prajurit Satu Darsita 7 tahun 8 th, 6 bulan
6. Prajurit Satu Biduan 7 tahun 8 th, 6 bulan
7. Prajurit Satu Suratno 7 tahun 8 th, 6 bulan
8. Prajurit Dua Yuliansyah 8 th, kurangi masa tahanan 8 th, 6 bulan
9. Prajurit Satu Herliansyah 8 th, kurangi masa tahanan 8 th, 6 bulan
10. Prajurit Dua Heriyanto 8 th, kurangi masa tahanan 8 th, 6 bulan
11. Taleo alias Aman Suar 10 tahun 8 th, 6 bulan
12. Letda Trijoko Adwiyono 8 th kurangi masa tahanan 9 tahun
13. Sersan Kepala Wandiman 7 tahun 9 tahun
14. Sersan Satu Joko Nugroho 7 tahun 9 tahun
- 15; Sersan Dua Suhartono 7 tahun 9 tahun
16. Sersan Dua Khaidir 7 tahun 9 tahun
17. Sersan Dua Mukri 7 tahun 9 tahun
18. Sersan Dua Muhd. Ibrahim Nasution 7 tahun 9 tahun
19. Sersan Dua Syaiful 7 tahun 9 tahun
20. Prajurit Kepala Frest Ronald Wacarola 7 tahun 9 tahun
21. Prajurit Kepala Toto Hendarto 7 tahun 9 tahun
22. Prajurit Satu Syaiful Fadli 7 tahun 9 tahun
23. Perajurit Satu Firmansyah 7 tahun 9 tahun
24. Sersan Kepala Harapenta Bangun 7 tahun 9 tahun
25. Perajurit Satu Indra Suryatma 7 tahun 10 tahun

Jadi, ada sebanyak 10 orang TNI terdakwa dan seorang sipil dihukum 8 tahun, 6 bulan penjara, 13 orang dihukum 9 tahun penjara, dan satu orang dihukum 10 tahun penjara. Sedangkan tuntutan oleh jaksa penuntut umum adalah satu orang dituntut 6 tahun penjara, 6 orang dituntut 8 tahun potong tahanan, 17 orang dituntut 7 tahun penjara, dan satu orang sipil yakni Aman Suar dituntut 10 tahun penjara.

Selain menuai sinisme dan kekurangpercayaan masyarakat terhadap pengadilan koneksitas tersebut yang dikatakan sebagai “sandiwara”, pihak Angkatan Gerakan Aceh Merdeka” (AGAM) pun, menolaknya, dan menyebutnya sebagai “drama lelucon”, sebagai-

mana tertulis dari siaran pers AGAM yang berjudul “AGAM Menolak Sembarang Keputusan Sidang Koneksitas di Banda Aceh”. AGAM menyatakan dalam siaran pers tersebut yang ditandatangani oleh Ismail Sahputra, yang menyebut dirinya sebagai Ketua Biro Penerangan AGAM, antara lain:

- Apa pun keputusannya, AGAM akan tetap membawa perkara tersebut ke Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*) di Den Haag, Netherland.
- Dalam kesempatan ini saya memohon juga kepada semua yang telah menjadi korban tindak kekerasan TNI/Polri di Aceh sama ada dengan cara langsung atau tidak langsung contohnya yang korban atau keluarga korban, marilah kita sama-sama menulis laporan tersebut dan kita kirimkan kepada Ketua High Commisjoner for Human Rights, yaitu Nyonya Robinson di kantor pusat Amnesty International di London, Inggris.***



BAB 9

TEKANAN POLITIK DPR RI DAN MASYARAKAT

Agar Masalah Aceh Diselesaikan secara Damai dan Dialogis (*Wa Amruhum Syura Bainahum*)

BERLARUT-LARUTNYA penyelesaian masalah Aceh, selain telah semakin menyengsarakan rakyat di Aceh, relatif lumpuhnya roda pemerintahan, terhambatnya pembangunan di Aceh, menyedot banyak anggaran negara serta korban sia-sia berjatuhnya di mana-mana, juga telah semakin menarik perhatian dunia internasional. DPR RI, dalam rapat paripurna tanggal 18 Nopember 1999, membentuk Panitia Khusus (Pansus), dengan nama “Pansus tentang Permasalahan di Daerah Istimewa Aceh” yang diketuai oleh wakil ketua DPR RI, Soetardjo Soeryogoeritno, dengan 3 orang wakil ketua yakni: Aly Yahya (Fraksi Partai Golkar), Tgk. Nashiruddin Daud (Fraksi PPP), dan Teuku Syaiful Ahmad (Fraksi Reformasi/PAN), serta 50 orang anggota dari berbagai Fraksi di DPR RI. Masa kerjanya adalah semula s/d 2 Desember 1999, namun mengingat masih banyaknya hal-hal yang perlu dirampungkan, maka kemudian dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 25 Nopember, masa kerja Pansus tersebut diperpanjang menjadi tanggal 8 Desember 1999.

Sesuai dengan agenda yang telah disepakati, kegiatannya antara lain adalah: rapat-rapat intern, rapat kerja dengan pihak lain, kunjungan, dan dengar pendapat umum (*public hearing*). Ada beberapa dengar pendapat umum dengan berbagai pihak yang strategis, yang patut dicatat antara lain dengan:

1. Gubernur Aceh, Ketua DPRD Aceh, Kapolda Aceh.
2. Ketua Umum HUDA (Himpunan Ulama Daerah Aceh), suatu organisasi para ulama yang lebih didominasi oleh ulama NU (Nahdlatul Ulama), mahasiswa Aceh, LSM Aceh.
3. Taman Iskandar Muda (TIM), suatu organisasi masyarakat Aceh di Jakarta.
4. Prof. Ibrahim Hasan (mantan Gubernur Aceh); Jend. (Purn.) L.B. Murdani (mantan Menhankam); Jend. (Purn.) Try Sutrisno (mantan Pangab); dan Jend. (Purn.) Faisal Tanjung (mantan Pangab); Mayjen. (Purn.) Pramono (mantan Pangdam Bukit Barisan); Letjen. (Purn.) Syarwan Hamid (mantan Danrem Lilawangsa); Mayjen. Zakky Anwar Makarim (mantan Satgassus Korem Lilawangsa).

Setelah melakukan berbagai kegiatan tersebut, akhirnya Pansus ini mengeluarkan “Sikap DPR RI terhadap Permasalahan Aceh”, tertanggal 7 Desember 1999, yang diputuskan sebagai keputusan DPR RI dalam rapat paripurna tanggal 16 Desember 1999, adalah sebagai berikut: “Permasalahan Aceh bukan hanya permasalahan lokal, tetapi telah merupakan permasalahan bangsa dan pada dasarnya berkaitan dengan adanya ketidakadilan terhadap masyarakat Aceh dan pelanggaran HAM. Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada saat-saat ini berada pada kondisi yang amat mengkhawatirkan. Tuntutan sebagian masyarakat Aceh untuk referendum semakin merebak, eksodus masyarakat keluar dari Aceh semakin banyak dan memprihatinkan, tidak berfungsinya kantorkantor pemerintah daerah di beberapa kabupaten terutama di tingkat kecamatan dan desa, terjadi penyerangan terhadap aparat keamanan serta telah terjadi korban jiwa dan harta benda rakyat Aceh yang tidak perlu. Hal-hal ini apabila tidak segera tidak diatasi, akan semakin mengakibatkan hilangnya jaminan keamanan

masyarakat, timbulnya korban jiwa dan harta benda yang makin besar, bahkan dapat menjadi pemicu terjadinya disintegrasi negara dan bangsa Indonesia.

Upaya-upaya pemerintah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan Aceh dinilai terlalu lamban dan terkesan kurang terkoordinasi, yang dikhawatirkan tidak dapat menyelesaikan permasalahan Aceh dengan cepat dan dapat berakibat terjadinya situasi yang tidak menentu, sehingga perlu diatasi dengan cara-cara kekejaman yang dapat menambah lagi korban jiwa rakyat Aceh yang tidak perlu.

Untuk menyelesaikan permasalahan Aceh secara cepat dan tepat oleh pemerintah, DPR menyampaikan sikapnya sebagai berikut:

Mendesak pemerintah untuk secepatnya memproses peradilan-pelanggaran HAM melalui peradilan koneksitas, sesuai data yang direkomendasikan oleh Komnas HAM dan Komisi Independen Penggusutan Tindak Kekejaman di Aceh serta bukti-bukti lainnya baik yang terjadi selama maupun setelah pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM).

Mendesak pemerintah untuk segera mengintensifkan dialog dengan semua komponen masyarakat Aceh, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif Daerah Istimewa Aceh untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tentang langkah-langkah penyelesaian permasalahan Aceh secara menyeluruh yang dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Mendesak pemerintah agar mencegah diberlakukannya keadaan darurat sipil atau darurat militer di Aceh untuk memberikan kesempatan dan mendukung pelaksanaan dialog sebagai prioritas cara penyelesaian permasalahan Aceh. Di sisi lain perlu penegakan hukum dan penertiban terhadap sipil yang bersenjata sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mendesak pemerintah, khususnya kepada TNI dan Polri untuk meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat untuk menangkap provokator dan aktor intelektualnya guna mencegah terjadinya provokasi dan propaganda politik di berbagai lapisan masyarakat yang mengganggu penyelesaian permasalahan Aceh.

Mendesak pemerintah untuk melaksanakan Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN yang mengamanatkan pemberian otonomi khusus bagi Aceh dan secepatnya bersama DPR RI menyusun UU tentang otonomi khusus dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan UU No. 44 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan komitmen-komitmen pemerintah yang terdahulu antara lain sebagai berikut:

- a. menghidupkan kembali Pelabuhan Bebas (Freeport) Sabang.
- b. mempercepat pelaksanaan pembangunan lapangan terbang Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, dan Cot Ba'u, Sabang, pembangunan kembali Pelabuhan Ulee Lheu di Banda Aceh, dan Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe.
- c. pembangunan kembali kereta api Aceh.
- d. memberikan kompensasi material dan spiritual kepada korban-korban pelanggaran HAM di Aceh, termasuk kepada keluarga yang ditinggal/ahli warisnya.
- e. membangun kembali dan merehabilitasi fasilitas umum, seperti rumah-rumah ibadah, rumah sekolah, rumah sakit, pasar, dan fasilitas umum lainnya yang sudah rusak dan hancur.

Mendesak pemerintah untuk segera menanggulangi pengungsi di Aceh dan dari Aceh dan berusaha sesegera mungkin mengembalikan mereka ketempat tinggalnya masing-masing dengan memberikan jaminan keamanan yang diperlukan.

Keinginan referendum telah merupakan tuntutan yang ber-kembang di tengah-tengah masyarakat Aceh. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam oleh pemerintah, DPR RI, dan seluruh komponen masyarakat Aceh, mengingat referendum tidak diatur dalam peraturan perundangan yang ada.

Mengajak semua pihak di Aceh untuk dapat menahan diri guna menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelesaian permasalahan Aceh, serta bersama-sama mencegah terjadinya peng-rusakan terhadap aset negara dan milik masyarakat khususnya terhadap obyek-obyek vital di Aceh.

Pemerintah perlu menetapkan jadwal penyelesaian permasalahan di Aceh secara terinci sebagai pedoman pelaksanaan dan di-koordinasikan pelaksanaannya dengan baik, antara pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan Ketetapan MPR RI No. Tap IV/MPR/1999 sebagai-mana disebutkan pada butir 5 di atas.

Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah negara ke-satuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan ke-ragaman kehidupan sosial masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.

Menyelesaikan permasalahan di Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan daerah operasi militer, maupun pasca pemberlakuan daerah operasi militer.

Sebelumnya, pada tanggal 22 Juni 1999, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), telah pula membuat Pernyataan Komnas HAM tentang Pelanggaran HAM dan Gangguan Keamanan di Daerah Istimewa Aceh, yang berisi rekomendasi, antara lain sebagai berikut: "Menyarankan kepada pemerintah agar membuka dialog dengan GAM, seperti yang pernah dilekukanan dalam kasus DI/TII Dauh Beureueh"

Tidak lama setelah adanya 10 butir sikap DPR RI hasil Pansus DPR RI tentang Permasalahan di Daerah Istimewa Aceh, sebagai-mana rincian di atas, AM Fatwa, bersama-sama dengan beberapa anggota Forum Bersama (FORBES) Anggota DPR RI, dalam hal ini, anggota DPR RI asal Aceh, yakni: T. M. Nurlif, Mawardi Abdullah, Farhan Hamid, A.R. Rasyidi, dan Nurdahri Ibrahim mengeluarkan pula 10 butir rekomendasi, yaitu:

1. Melaksanakan secara serius Keputusan DPR RI tentang Aceh, seperti yang tercantum dalam 10 butir Pansus.
2. Memperpanjang jeda kemanusiaan dengan menambah institusi lain yang ada kaitannya.
3. Mengintensifkan dialog dengan berbagai komponen masyarakat Aceh, terutama mereka yang belum bergabung dengan GAM.
4. Menyalurkan bantuan financial melalui Komite Kemanusiaan Jeda Kemanusiaan, tidak menunggu pengajuan penda yang memang tidak berfungsi.
5. Pemerintah daerah bersama DPRD dan tokoh masyarakat me-nyusun proposal perdamaian yang dirancang secara sistematis, komprehensif, dengan ketentuan-ketentuan dan bahasan waktu yang mengikat.
6. Jika pemerintah pusat hendak menerjunkan tentara untuk me-nyelesaikan Aceh, hendaknya berasal dari kesatuan yang professional, misalnya Kodam III/Siliwangi, atau Kodam V/Brawijaya.

7. Kebijaksanaan apa pun yang akan ditempuh Pemerintah Pusat, sebelum diputuskan harus didialogkan terlebih dahulu dengan Pemda Aceh, beserta tokoh-tokoh masyarakatnya.
8. Dibentuk Korem Khusus yang dipimpin oleh seorang Brigjen TNI untuk mencegah dualisme komando dan bertanggung jawab langsung ke Mabes TNI.
9. Untuk menarik simpati masyarakat yang tengah dilanda musibah banjir, pemerintah agar secepatnya mengirim bantuan kema-nusiaan.
10. Sebelum berakhir masa persidangan ke-4 DPR RI pada awal Desember, pemerintah harus sudah mengajukan RUU Negeri Aceh Darussalam (NAD) ke DPR RI.

Sementara itu Taman Iskandar Muda (TIM), suatu organisasi masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya, dalam Rapat Kerja Khusus (Rakersus) di Cipayung, tanggal 7 Maret 1999, mereko-mendasikan untuk menghimbau pemerintah khususnya Presiden RI, agar secara sungguh-sungguh mencari jalan dan mengupayakan penyelesaian masalah Aceh secara damai melalui proses dialog, baik dengan pihak GAM maupun dengan masyarakat Aceh, termasuk para Alim ulamanya. Rekomendasi TIM tersebut ditandatangani oleh Ir. Mustafa Abubakar sebagai Ketua Umum TIM dan Said Mustafa sebagai Sektetaris Umum.

Sejalan dengan semangat damai dan dialogis tersebut, pada bulan Januari 2000 mulai menggelora wacana mengenai upaya baru penyelesaian masalah Aceh, sebagaimana dituliskan oleh Sulaiman.¹¹⁹⁵ Sulaiman juga mengatakan, bahwa upaya baru tersebut antara lain sebuah pertemuan awal untuk mempersiapkan Kongres Rakyat Aceh (KRA) yang waktu itu dikatakan akan digelar pada pertengahan Februari 2000. Kongres ini, kata beliau, diprakarsai oleh organisasi Masyarakat Aceh di Medan yakni "Aceh Sepakat" dan LSM Aceh di Jakarta, yakni FORKA (Forum Kepedulian untuk Aceh).

Kongres ini, kata Sulaiman, akan cukup representatif, karena mendapat dukungan banyak pihak, termasuk dari Dr. Husaini Hasan dari MP GAM dan dari Himpunan ulama Dayah Aceh (HUDA). Menurut Ketuaanya Ismail Hasan Metereuem, kongres ini mendapat restu dari Presiden RI K. H Abdurrahman Wahid. Sementara itu ada pula "Dialog Masa Depan Aceh" yang dilaksanakan oleh dua tokoh bukan Aceh yakni Muchtar Pakpahan, pimpinan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Hartati Murdaya, Ketua organisasi Ummat Budha -Walubi dan anggota MPR RI. Dialog ini juga menghasilkan antara lain: mendesak pemerintah agar melakukan dialog untuk penyelesaian secara damai masalah Aceh. Sedangkan dari Medan TPPUA menerima saran-saran berkenaan dengan "Usaha Pemulihan Keamanan di Aceh" yang berisi 22 butir usulan, tertanggal 8 Mei 1999, yang kemudian kami sampaikan kepada Presiden RI. Saran-saran tersebut berupa usulan dari Tim Perumus Pendapat "Aceh Sepakat" bersama "Ikatan Pemuda Pelajar dan mahasiswa Tanah Rencong (IPTR)", yang ditandatangani oleh oleh M. Nur Nikmat dan Sekretaris, Masdani, SH., yang pada prinsipnya agar segera dihentikan pertumpahan darah di Aceh, dan penyelesaian masalah Aceh agar ditempuh dengan cara-cara damai, dan dialog. ***



¹¹⁹⁵ Sulaiman AB, *Aceh Bakal Lepas*, 2005.

BAB 10

JEDA KEMANUSIAAN

Ikhtiar Damai Presiden Abdurrahman Wahid

KRYAI Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa sebagai Gus Dur, terpilih menjadi Presiden RI dalam sidang MPR RI, tanggal 23 Oktober 1999. Terpilihnya beliau menjadi Presiden RI, memang membawa beribu harapan, mengingat sikap dan manuver politik beliau sebelum menjadi presiden, seperti membuka selubung referendum, dan juga gebrakan awal beliau sebagai Presiden. Dalam kabinet beliau misalnya, harapan orang Aceh agar ada menteri dari suku Aceh, terpenuhi, dengan diangkatnya Hasballah Saad sebagai Menteri HAM. Di samping itu harapan masyarakat agar peranan militer semakin dikurangi pun, rasa-rasanya akan terpenuhi dengan diangkatnya Menteri Pertahanan dari kalangan sipil, yakni Dr. A.M. Mahfud, sedangkan dwifungsi ABRI kelihatannya akan segera pula diluruskan dan/atau ditinjau kembali (dirasionalkan), walaupun banyak pihak, terutama dari kalangan “militer garis keras” sangat menentangnya. Pangab yang secara tradisional dipegang oleh perwira Angkatan Darat, Gus Dur dengan mengambil segala resiko, menunjuk Jenderal A.S. Widodo (mantan Kepala Staf Angkatan Laut RI).

Dengan telah adanya seorang menteri yang putra Aceh, maka menjadi lebih intensif dan mudahlah bagi Presiden untuk berkonsultasi dan mendapatkan masukan tentang konflik Aceh dan merancang bagaimana menyelesaikan secara tanpa kekerasan yang lebih sesuai dengan aspirasi dan harapan orang Aceh. Tidak lama kemudian yaitu pada bulan 2000, Tim Penasihat Presiden Urusan Aceh (TPPUA) dibubarkan. Bukan hanya TPPUA saja yang dibu-barkan, semua tim yang pernah dibentuk oleh Presiden Habibie, juga ikut dibubarkan pula, yang tertuang dalam satu Keppres pembubaran, di mana keseluruhan personalianya berjumlah lebih dari 60 orang. Sementara itu, pada sekitar awal tahun 2000 (ketika itu TPPUA belum dibubarkan), terjadi beberapa kali diskusi serius di Hotel Arston, kawasan Senen, Jakarta Pusat, antara Usman Hasan, sebagai Ketua Tim Penasihat Presiden Urusan Aceh (TPPUA) dengan M. Nur Nikmat, Ramly Ridwan dan Ibrahim Abdullah, dan seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Johnson (Anderson?), yang katanya sebagai orang Henry Dunant Center (HDC) yang bermarkas besar di Jenewa, Swiss. Pembicaraan tersebut, berkisar tentang kemungkinan berperanya secara aktif HDC dalam proses dialog antara pemerintah RI dan pihak Pimpinan GAM menuju penyelesaian secara damai konflik Aceh.

Pembicaraan tersebut tidak berlanjut, dan belum sempat men-capai kesepakatan apa pun, baru sekedar wacana, dan melihat/ mencari kemungkinan-kemungkinannya.

Menurut Sulaiman AB, dalam bukunya “Aceh Bakal Lepas”, 2005, tiga bulan setelah peristiwa SU MPR (Sidang Umum Majelis Pejuang Referendum), yang diprakarsai oleh SIRA, menjelang kunjungannya ke AS menemui Presiden Bill Clinton, secara khusus, di Wisma Indonesia Presiden Gus Dur menawarkan diri untuk, berdialog dengan masyarakat Aceh. Waktu itu Presiden mengutus Menteri Negara Urusan HAM Hasballah Saad, guna menjajaki kemungkinan dialog dan mengetahui pasti apa sebenarnya keinginan rakyat Aceh. Berangkatlah Hasballah Saad, Meneg HAM bersama Meneg Otonomi Daerah dan Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah ke Aceh, pada tanggal 13 Nopember 1999.

Telah sering masyarakat mendengar celotehan yang bernada optimistik dan “PD” (percaya diri) dari Gus Dur, melalui media massa, yang antara lain mengatakan bahwa “orang Aceh sangat percaya kepadanya”, atau bahkan pernah pula beliau mengatakan “saya adalah nabinya orang Aceh”. Itu semua sesungguhnya adalah modal dasar bagi besarnya kemungkinan akan adanya upaya/ikhtiar penyelesaian masalah Aceh secara damai, selama kepresidenan Gus Dur.

Sementara itu itu, Gubernur Aceh, Syamsuddin Mahmud tidak tinggal diam, beliau mencari jalan untuk dapat menyelesaikan masalah Aceh secara damai yakni melalui dialog. Dalam rapat tanggal 6 Juli 1999, di Pendopo Gubernur Aceh, dibentuk tiga buah tim, yakni tim untuk menemui Hasan Tiro di Swedia, tim yang akan menemui Pangkima AGAM Abdullah Syafei, di pedalaman Pidie, Aceh, dan tim untuk menemui Presdien Habibie, serta Menhankam Wiranto, di Jakarta, demikian menurut Isa Sulaiman dalam bukunya “Aceh Merdeka”, (2000), hal 132. Kemudian Gubernur Aceh mem-prakarsi untuk mengirim, atau merestui tim pertama tersebut, yang dipimpin oleh M. Nur Nikmat, pergi ke Swedia/Stockholm, untuk menemui Hasan Tiro, yang sesungguhnya pernah menjadi teman sekolah beliau, di Normal School, Bireuen. M. Nur Nikmat adalah seorang tokoh pengusaha Aceh yang berdomisili di Medan, dan sangat peduli dengan Aceh. Bersama M. Nur Nikmat, ikut berangkat ke Swedia adalah: Prof. Dr. H.M. Jusuf Hanafiah, seorang tokoh masyarakat Aceh di Medan, yang kebetulan adalah senior dan bahkan dosennya dari Dr. Zaini Abdullah dan Dr. Husaini Hasan, serta almarhum Dr. Muchtar Yahya Hasbi dan almarhum Dr. Zubir Mahmud, yang kesemuanya adakah Petinggi GAM. Ikut pula bersama mereka, pergi ke Swedia, Dr. Abdullah Yahya, Asisten II, bidang pemerintahan kantor Gubernur, dan Ir. Ibrahim Abdullah (Utoh Him) yang juga mengaku kenal baik dengan Hasan Tiro, serta seorang Famili Hasan Tiro yang bernama Darul Kamal.

Mereka pergi ke Stockholm, segera setelah menghadiri seminar yang bertemakan “Fifty Four Years within Indonesia”, dilaksanakan oleh International Forum for Aceh (IFA), pada tanggal 24 Juli 1999, di Bangkok. Setelah mendapatkan “petunjuk” dari Dr Zaini Abdullah di Bangkok yang juga berada di sana untuk menghadiri Seminar yang sama, mereka berlima berangkat ke Stockholm dengan penuh keyakinan akan bertemu dengan Hasan Tiro, sahabat lamanya M. Nur Nikmat dan Utoh Him. Tetapi sayang, yang berhasil ditemui di sana hanyalah mantan orang dekatnya Hasan Tiro yang bernama Saiman dan beberapa lainnya. Walaupun tidak dapat diterima oleh Hasan Tiro, Wali Nanggrou Aceh Merdeka, karena alasan “sibuk”, mereka dengan leluasa dapat bertemu beberapa kali, sambil makan, dengan Dr. Husaini Hasan, yang sangat menghargai Prof. Dr. Jusuf Hanafiah sebagai “guru”nya di Fakultas Kedokteran USU, Medan.

Tim kedua yang menemui Abdullah Syafei, dipimpin oleh Dr. Ahmad Daudi (mantan Rektor IAIN Al Raniry, yang dengan ditemani oleh Banta Khairullah, berhasil menemui Panglima AGAM tersebut. Tegas sekali jawaban Abdullah Syafei, ketika Ahmad Daudi menghimbau beliau untuk meletakkan senjata, yakni GAM tidak akan menghentikan perjuangan dan tidak akan meletakkan senjata, sebelum tujuan akhirnya tercapai yakni “Aceh Merdeka”.

Perihal Seminar Bangkok sebagaimana disebutkan di atas, pelaksananya adalah IFA, bekerja sama dengan Asian Forum for Human Rights and Development (Forum-Asia) di YMCA, Sathon Tai, dan dihadiri oleh peserta dari Aceh, dan Indonesia lainnya, dari Malaysia, Thailand, dan beberpa NGOs internasional dan NGOs negara-negara tertentu seperti Australia, Belanda, Amerika Serikat, Hongkong, dan sebagainya.

Tidak lama kemudian, terdengar selentingan, bahwa Presiden Gus Dur dalam perjalanannya ke Eropa, sempat mampir di Markas Besar HDC di Jenewa, Swiss. Di sana

terjadi pembicaraan yang serius, untuk mencari kemungkinan berperannya HDC sebagai penengah (mediator) dan fasilitator dialog antara pemerintah RI (GoI) dengan pihak pimpinan GAM. Menurut informasi, Gus Dur sekaligus mengundang HDC untuk melakukan peran tersebut dan disetujui oleh HDC. Sejak saat itu, mulailah HDC menjalankan role nya sebagai penengah atau intermediasi dan fasilitator, antara RI dan GAM, maka terjadilah beberapa kali dialog.

Sebenarnya keikutsertaan atau campur tangan masyarakat internasional, dan bahkan PBB, telah lama menjadi wacana, yang mulanya dituntut oleh berbagai LSM dalam upaya kemungkinan dilakukannya dialog antara RI dan GAM, dan dalam hal tindakan hukum bagi para pelanggar HAM, serta juga dituntut oleh SIRA dan beberapa LSM lainnya dalam hal pelaksanaan referendum, jika telah disepakati. Sedangkan pemerintah Indonesia selalu mengatakan bahwa konflik Aceh adalah masalah dalam negeri, jadi tidak selayaknya di internasionalnya, apalagi dengan mengundang PBB.

Dialog pertama antara RI dengan Pimpinan GAM, terjadi pada tanggal 27 Januari 2000, di Chateau Savoie, disuatu rumah tua dan antik milik seorang Baron Swiss, dan cukup representative untuk pertemuan bertaraf internasional seperti itu.

Dalam dialog tersebut dan dialog-dialog berikutnya, delegasi Indonesia (Delri) dipimpin oleh Dubes. Dr. Hasan Wirayuda, yang saat itu masih bertugas sebagai Dubes/Watapri di Jenewa, dengan anggota delegasi terdiri dari: Sudjadnan Parnohadinigrat, Direktur Organisasi Internasional Deplu, Kolonel Harijadi. Atase Pertahanan Kedubes RI di Paris, Daud Yusuf, Staf Meneng HAM, Drs Juhardi, Staf Sekneg, Ramly Ridwan, SH., Staf Depdagri, yang adalah orang Aceh, Troesto Waloejosedjati, Pejabat BAKIN, I. Gusti A Wesaka Puja, Sekretaris PTRI Jenewa, seluruhnya sebanyak 8 orang.

Delegasi GAM, dipimpin oleh Malek Mahmud, dengan 10 orang anggota delegasi yaitu: Dr. Zaini Abdullah, Jamil Amin, Syarif Usman, Jusra, Zakaria Saman, Otto Syamsuddin, Nur Abdullah dan Hasbi Abdullah, Nurdin Abd Rahman, Ilyas M. Abed. Sedangkan Hasan Tiro hadir juga di dalam gedung tersebut, tetapi tidak ikut dalam dialog. Seluruhnya sebanyak 12 orang.

Dari pihak HDC sebagai fasilitator, hadir Martin Griffith, Dr. Lousa Chan Bough, dan Larry Hollingworth. Seluruhnya sebanyak 3 orang.

Dilihat dari segi jumlah anggota delegasi memang tidak berimbang di mana GAM sebanyak 12 orang sedang dari pihak Indonesia hanya 8 orang. Hal itu sempat dipersoalkan oleh GAM pada hari pertama pertemuan ronde ketiga tgl 14 April 2000, dengan mengatakan bahwa Indonesia tidak serius menghadapi dialog ini.

Keseluruhan pertemuan dialog berlangsung dalam 3 ronde, yaitu:

- Ronde pertama: 27-29 Januari 2000; pihak GAM belum bersedia tatap muka dengan pihak RI. Delri berdialog dengan HDC dan demikian juga GAM berdialog dengan HDC. HDC lah yang mengkomunikasikan hasil-hasil dialog tersebut kepada kedua pihak. Diplomasi semacam ini oleh Hasan Wirayuda pernah me-ngatakannya pada suatu ketika, sebagai "shuttle diplomacy".

Menurut Edward Aspinall dan Harold Crouch¹¹⁹⁶, Hasan Wirayuda bertemu dengan Hasan di Tiro pada tanggal 27 Januari 2000, dan Presiden Abdurrahman Wahid mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat HDC pada 30 Januari 2000.

- Ronde kedua: 24-27 Maret 2000; pihak GAM diwakili/dijurubicarai oleh Dr. Zaini Abdullah, bersedia tatap muka dengan Delri. Sepuluh hari menjelang pertemuan tersebut, terjadi sedikit kete-gangan, karena sepupunya Dr. Zaini, di Aceh diculik,

¹¹⁹⁶ Harold Crouch, *The Aceh Peace Process: Why It Failed*, 2003.

yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan RI. Namun, setelah kembali kerumahnya, maka pertemuannya berjalan lancar. Pertemuan ini, awalnya lebih banyak diisi dengan pemandangan umum masing-masing pihak, di mana pihak GAM dengan penuh retorika, lebih banyak mengungkap tentang Aceh sejak 1873. Mereka mengatakan bahwa Aceh adalah negara merdeka sejak awal, dan tidak pernah ditundukkan oleh kolonial Belanda, sehingga Belanda tidak berhak untuk menyerahkannya kepada Indonesia. Kemudian pembicaraan mulai menukik kepada substansi yang berupa Dasar-dasar dan Kerangka Dasar dari Jeda Kemanusiaan (*Humanitarian Pause*). Dalam pengantar atau pendahuluan dari draft Jeda Kemanusiaan, disebutkan antara lain: “Bahwa situasi di Aceh adalah cukup kritis, yang memerlukan tindakan segera Kalangan senior militer, polisi dan kalangan sipil di Aceh mengindikasikan bahwa ada jendela/celah kemungkinan untuk jeda kemanusiaan yang akan mengurangi kekerasan dan penderitaan manusia.

Maksud dari pertemuan di Jenewa pada tanggal 24 Maret 2000, antara perwakilan (Delegasi) pemerintah Indonesia dan GAM adalah untuk menyediakan forum bagi kedua pihak untuk mendiskusikan jalan-jalan yang praktis dari pengurangan ketegangan dan penderitaan di Aceh. Hasil-hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang ditandatangani untuk menciptakan suatu jeda kemanusiaan di Aceh.

Tujuan dari Perjanjian Kesepahaman untuk Jeda Kemanusiaan adalah berhentinya kekerasan agar memungkinkan terjadi/ terpeliharanya dan tidak terhalanginya akses (hubungan timbal-balik) di seluruh Aceh.

Adalah diharapkan, bahwa dengan semangat Jeda Kemanusiaan, para Penandatanganan akan setuju untuk adanya proses monitoring yang tidak memihak dan independen, dan secara bersama menunjuk Ombudsman yang akan memimpin proses ini.

Kerangka waktu dan rincian operasional akan disiskusikan selama pertemuan.¹¹⁹⁷

- Ronde ketiga: 14–17 April 2000; yang membahas materi dan kemudian menyepakati “Rencana Aksi Kemanusiaan untuk Jeda Kemanusiaan” (*Humanitarian Action Plan for the Humanitarian Pause*), dan membahas materi Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*).
- Puncak perundingan/dialog: tanggal 12 Mei 2000, penandatanganan-an, kesepakatan bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*).

Jadi, pada ronde ketiga (terakhir), kedua pihak sampai pada pembahasan dan kemudian pada hari terakhir tgl 17 April 2000, kedua pihak menandatangani apa yang disebut “Humanitarian Action Plan for the Humanitarian Pause in Aceh”, atau disebut juga sebagai “Rencana Aksi Kemanusiaan”, yang terdiri dari 5 subjudul, sebagai berikut:

- I. Mukaddimah.
- II. Prinsip-prinsip Manajemen yang disarankan untuk mencapai Kebutuhan Kemanusiaan (*Humanitarian Needs*).
- III. Situasi Kemanusiaan di Propinsi Aceh.
- IV. Rencana Aksi.
- V. Koordinasi.

¹¹⁹⁷ “Draft Outline Tuesday”, 21 Maret 2000, 1021, Jakarta.

Uraian singkatnya secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

I. Mukadimah

II. Prinsip-Prinsip Manajemen yang Disarankan untuk Mencapai Kebutuhan Kemanusiaan (Humanitarian Needs)

III. Situasi Kemanusiaan di Propinsi Aceh

1. Perpindahan Penduduk Internal atau Pengungsi (Internally Displaced Populations = IDPs).

- Jumlah IDPs, berfluktuasi antara 2. 000 dan 180. 000 orang pada tahun yang lalu.
- Jumlah saat ini adalah di bawah 2. 000 orang, walaupun daftar lokasi dan jumlahnya secara pasti tidak ada.
- Keluarga-keluarga memerlukan bantuan untuk merelokasi anggota keluarganya yang hilang.
- International Committee of the Red Cross (ICRC) bekerja sama dengan PMI dan NGO Forum for Human Rights di Aceh, telah memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga tersebut.

2. Kebutuhan Dasar dari IDPs dan Masyarakat yang Hidup di Wilayah Konflik.

- Kebutuhan Dasar yang sangat penting adalah Air Bersih, Pe-meliharaan Kesehatan, dan Perumahan bagi yang telah hancur/musnah rumahnya selama konflik.
- Penduduk yang mengungsi kadang-kadang harus dipaksa un-tuk mau direlokasi atau kembali kekampungnya, dan untuk itu perlu jaminan keamanan.
- Kesuksesan pelaksanaan JK sesungguhnya akan menghenti-kan terjadinya Pengungsian

3. Pendidikan.

- Lebih 200 gedung Sekolah telah hancur selama 2 tahun terakhir.
- Prioritasnya adalah; inventarisasi/penghitungan, reparasi ke-rusakan, dan cukupi kebutuhan dasar dari proses ajarmengajar.

4. Kompensasi Keuangan bagi Berbagai Kerusakan Harta Benda dan Fisik (Kecacatan).

- Semua yang telah hilang kehidupannya (mata pencahariannya) dan yang cacat tubuh, sebagai akibat langsung dari konflik, harus mendapat bantuan dan dukungan.
- Mereka harus didaftar, dan mekanisme untuk kompensasi per-lu dibuat oleh Joint Committee in Humantarian Action (JCHA).

IV. RENCANA AKSI

Selama waktu antara penandatanganan KB, tentang JK, dan mulainya JK.

1. Organisasi atau kelompok yang akan berpartisipasi dalam pe-nentuan dan penyaluran bantuan kemanusiaan adalah setahun *Humanitarian Pause*. HDC for Humanitarian Dialogue dapat di-undang untuk memfasilitasi lancarnya arus informasi kepada para peserta (participant).
2. Joint Committee on Humanitarian Action (Komisi Bersama untuk Aksi Kemanusiaan = KBAK) harus dibentuk dalam periode ini.
3. Organisasi yang telah melaksanakan program bantuan kemanusiaan haruslah didorong untuk meningkatkan aktivitasnya sesegera mungkin jika situasi memungkinkan, dan haruslah selalu sejalan dengan kegiatan assessment.

Selama Periode yang Disepakati dari JK

1. Penentuan Kebutuhan Kemanusiaan.

- a. kegiatan assessment akan dilaksanakan, jika adanya jaminan keamanan bagi para pelakunya selama H. P, dan diperhitungkan akan berlangsung selama 2-3 minggu.
- b. maksud dari assessment kebutuhan kemanusiaan adalah untuk menentukan prioritas dari kebutuhan dasar; bagi keperluan jangka menengah untuk rehabilitasi infrastruktur, seperti perumahan dan sekolah; wilayah yang rusak, masyarakat yang sangat peka; dan semua kapasitas lokal yang ada.
- c. hasil dari assessment adalah merupakan dokumen dengan rincian dari kebutuhan dasar yang sangat mendesak dalam berbagai sektor, ikhtisar dari proyek-proyek, institusi pelaksanaannya, dan dana yang dibutuhkan.

2. Pencarian Dana dan Mobilisasi Resources.

- a. sumber dana untuk membiayai bantuan kemanusiaan mencakup pemerintah, Badan-badan UN, NGOs internasional, dan pihak swasta, yang dapat/harus dimobilisasi.
- b. fundrising adalah salah satu fungsi dari KBAK, selain sebagai pelaksana program. Sebagai tambahan, HDC dapat berperan memfasilitasi fundrising.

3. Melaksanakan Progeram Bantuan Kemanusiaan.

- a. kebutuhan kemanusiaan dapat segera dilaksanakan segera setelah diketahuinya kebutuhan dan tersedianya sumber dana.
- b. assessment yang lebih rinci dan komprehensif dari kebutuhan dapat ditanggulangi selama JK.
- c. NGOs yang telah mempunyai budget dan program di Aceh, harus didorong untuk mempercepat kegiatannya selama JK.
- d. kesinambungan kegiatan kemanusiaan haruslah merupakan faktor dalam pengambilan keputusan tentang kelanjutan JK.

V. KORDINASI

- Struktur untuk koordisnasi bantuan kemanusiaan, terdiri 3 komponen:

1. Joint Committee on Humanitarian Action (=KBAK), berkedudukan di Aceh, akan dibentuk untuk Mengkoordinasikan Kegiatan dan Program Kemanusiaan.
2. Monitoring Team, berkedudukan di Aceh, akan meng assess pelaksanaan dari Rencana Aksi Kemanusiaan (Humanitarian Action Plan).
3. Joint Forum, berkedudukan di Switzerland, akan me review kemajuan dan masalah-masalah dalam pelaksanaannya, dengan partisipasi dari pemerintah Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka, dan difasilitasi oleh HDC.

KBAK adalah badan yang akan menjalankan/mengemban policy dari Joint Forum (Forum Bersama = FB) dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan. Tugas-tugasnya mencakup:

- a. needs assessment, menentukan prioritas, memobilisasi dana, dan merencanakan.
- b. penyaluran bantuan kemanusiaan.
- c. menjamin akses tanpa halangan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan, untuk mitu bekerja sama erat dengan Joint Committee in Security Modalities.

Keanggotaan komisi ini adalah maksimum 10 orang, terdiri dari 5 orang setiap Pihak dari JK Para anggota komisi ini memilih Ketuanya di antara mereka. Komisi akan difasilitasi oleh HDC.

- Tim Monitoring (Tim Pemantau), mempunyai tugas:

- a. meng assess pelaksanaan dari Aksi Kemanusiaan.
- b. melaporkan penemuannya kepada Forum Bersama (FB).

Keanggotaan Tim Pemantau adalah 5 orang yang mempunyai integritas tinggi, dan disepakati oleh kedua pihak.

- Joint Forum (FB) adalah organ tertinggi dari H. P. Dan mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan mengawasi policy dasar.
- b. mereview kemajuan dari HP, dan
- c. mencari dan mendapatkan kemungkinan dukungan bagi keberhasilan pelaksanaan HP.

FB berada di Switzerland, terdiri dari perwakilan GoI dan GAM. HDC untuk Humanitarian Dialogue bertindak sebagai fasilitator.

Rencana Aksi Kemanusiaan (Humanitarian Action Plan = RAK), dapat dilakukan/ditanggulangi bersama dengan mitra kerja dalam negeri dan pemerintah nasional, GAM, NGOs, Pelajar/Mahasiswa dan ulama; organisasi internasional seperti UNICEF, ICRC, Medecins sans Frontiers (MSF), dan OXFAM, dapat didorong untuk mening-katkan kegiatannya, dan dikoordinasikan dengan partisipasi lokal untuk Humanitarian Plan. Bantuan Kemanusiaan (BK) dapat juga diberikan di luar kerangka RAK. Keamanan bagi pekerja kemanusiaan dan aksesnya kepada penerima manfaat (*beneficiaries*) di Aceh akan menjadi urusan dari Komisi Bersama Modalitas Keamanan = KBMK (Joint Committee on Security Modalities).

Kemudian dialog dilanjutkan pada tanggal 12 Mei 2000, di Chateau, Bavois, Swiss. Pada pukul 12. 15 tanggal tersebut waktu Swiss ditandatangani "Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh" atau dengan terjemahan resmi menjadi "Kesepa-haman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh" atau di-singkat KBJK. Keseluruhan naskah tersebut terdiri dari 6 Pasal, yakni:

Pasal 1: Tujuan Jeda Kemanusiaan. (Objectives of the Humanitarian Pause).

Pasal 2: Bagian-bagian (Components).

- Aksi Kemanusiaan (AK) = Humanitarian Action (HA).
- Bantuan Keamanan (BK) = Security Modalities (SM)

Pasal 3: Susunan Organisasi (Organisational Structure), terdiri dari:

- Forum Bersama (FB) = Joint Forum (JF)
- Komite Bersama Aksi Kemanusiaan (KBAK) = Joint Committee on Humanitarian Action (JCHA).
- Komite Bersama Bantuan Keamanan (KBBK) = Joint Committee on Security Modalities (JCSM)
- Di setiap Komite tersebut ada tim Monitoring (TM) = Monitoring Team (MT)

Pasal 4: Kerangka Waktu (Time Frame).

Pasal 5: Transisi (Transition).

Pasal 6: Pemberitahuan Umum (Public Communication).

Dari kerangka rencana aksi kemanusiaan untuk jeda kema-nusiaan, dan dari teks kesepahaman bersama tentang jeda kema-nusiaan tersebut, dapat diringkaskan sebagai berikut:

Badan-badan, forum, atau komisi, yang perlu dibentuk:

1. Forum Bersama = KB (*Joint Forum*), merupakan badan tertinggi yang berkedudukan di Swiss
2. Komisi Bersama untuk Aksi Kemanusiaan = KBAK (*Joint Com-mittee on Humanitarian Action*), berkedudukan di Aceh.
3. Komisi Bersama untuk Modalitas Keamanan = KBMK (*Joint Committee on Security Modalities*), berkedudukan di Aceh.
4. Tim Monitoring = TM (*Monitoring Team*), untuk aksi kemanusiaan, berkedudukan di Aceh.
5. Tim Monitoring = TM (*Monitoring Team*), untuk modalitas keaman-an, berkedudukan di Aceh.

Program induk dari Jeda Kemanusiaan adalah: Rencana Aksi Jeda Kemanusiaan atau Rencana Aksi Kemanusiaan (RAJK atau RAK), atau *Humanitarian Action Plan for the Humanitarian Pause for Aceh*.

Bondan Gunawan, Kunjungan Abdullah Syafei

Menjelang perundingan atau dialog ronde ketiga, antara peme-rintah RI dengan Pimpinan GAM di Bavois, Jenewa, Pjs. Sekneg Bondan Gunawan, tanpa pengawasan menemui Panglima Perang GAM Tgk. Abdullah Syafe'i, di sebuah Desa di Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, pada pertengahan Maret 2000. Kunjungan tersebut walaupun tergolong pertemuan non-formal, adalah sangat beriktikad baik, dan berguna sebagai *lobby*, atau semacam "*second track diplomacy*" untuk memperlancar perundingan ronde ketiga yang me-rupakan ronde terakhir, untuk menyusun Rencana Aksi Kema-nusiaan untuk Jeda Kemanusiaan, yang akan diakhiri dengan pe-nandatanganan Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan (*Joint Understanding on Humanitarian Pause*). Saat itu, ada sedikit tanda-tanda bahwa perundingannya akan berjalan dengan alot, atau kurang lancar.

Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan antara Bondan dengan Tengku Abdullah Syafe'i. Yang kita ketahui adalah bahwa Rencana Aksi Kemanusiaan untuk Jeda Kemanusiaan, telah ditan-datangani pada tanggal 17 April 2000, dan Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*) pada tanggal 12 Mei 2000. Dan hampir tiga tahun kemudian, yakni pada tanggal 22 Februari 2003, Tgk. Abdullah Syafe'i, tewas tertembak, dalam suatu pengepungan oleh TNI, di hutan di sekitar Gunung Halimon. Apakah ada hubungan antara penandatanganan RAK dan KBJK (JUHP) dengan pertemuan antara Bondan dan Abdullah Syafe'i, dan bagaimana pula kaitannya dengan tertembaknya beliau, *wallhu 'alam bissawab*. Tuhanlah yang maka tahu, mungkin suatu ketika akan terungkap.

Ditandatanganinya Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan tersebut di Bavois, Swiss, disambut dengan penuh sukacita, gembira, haru dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT., di Aceh, dan juga oleh masyarakat Aceh di mana pun mereka berada, termasuk di Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malaysia, dan sebagainya. Macam-macam cara mengekspresikan rasa syukur tersebut, ada yang langsung sujud syukur, ada yang berdoa, baik di rumah, meunasah, dan masjid, atau di tempat-tempat kumpulan orang, atau ada pula dengan berdiam diri di rumah masing-masing, serta ada pula dengan berdemonstrasi dengan membawa spanduk dukungan kepada perdamaian. Walaupun ditanggapi positif dan diterima dengan gembira dan rasa

syukur oleh rakyat Aceh, namun ada pula beberapa orang dan pihak yang kurang senang meneri-manyanya atau bahkan menolaknya, dengan berbagai alasan ketatanegaraan, dan kelaziman berdiplomasi, seperti Amin Aryoso, Ketua Komisi II DPR RI, Laode Djeni Hasmar, wakil ketua Komisi II dan HM Thahir S., yang ketiganya menghimbau pemerintah untuk menunda penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut. Hampir sejalan dengan ketiga orang tersebut, wakil ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, mempersoalkan prosedur dialog dan penandatanganan Nota Kesepahaman, yang mengatakan, dia tidak setuju jika dimediasi oleh pihak asing, dan dilakukan di luar negeri, tetapi dia akan setuju jika mediatornya adalah pemerintah Indonesia. Sementara Siswono Yudohusodo, anggota MPR Fraksi Utusan Daerah, mencurigai bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan perangkap pihak asing terhadap Indonesia, yang akan meningkatkan legitimasi GAM di forum internasional.

Selain itu, 13 orang peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yakni: Ikrar Nusa Bhakti, Dewi Fortuna Anwar dan kawan-kawannya, membuat dan mengedarkan pernyataan, yang di-muat luas oleh media massa, antara lain menyatakan bahwa: perundingan dengan GAM yang dilakukan di luar negeri adalah tidak tepat, dan akan menimbulkan preseden hukum sebagai perundingan dengan pihak asing. Hal itu berarti memberikan pengakuan (*recognition*) secara langsung atau tidak langsung kepada keberadaan GAM sebagai aktor internasional dan bukan sebagai bagian dari masalah domestik. Padahal GAM bukanlah satu-satunya wakil (*representative*) masyarakat Aceh. Negosiasi tersebut, kata mereka, merupakan kelalaian dan keteledoran diplomasi (*diplomatic mis-conduct*) yang dapat berakibat fatal bagi masa depan penyelesaian Aceh, kecuali kalau memang ada rencana untuk memerdekakan Aceh.

Untuk meluruskan kesemua kontroversi, keraguan, kerancuan, dan bahkan ketidaksetujuan atau protes pihak-pihak tertentu, Pre-siden Gus Dur, mengklirkannya dengan mengatakan antara lain, sebagai berikut:

- Pemerintah Indonesia sama sekali tidak mengkompromikan kedaulatan Indonesia dalam melakukan persetujuan dengan GAM.
- Yang mengadakan persetujuan bukan lah pemerintah RI dan GAM dalam kedudukan yang sederajat
- Yang ditandatangani di Bavois, Swiss, pada tanggal 12 Mei 2000, bukanlah “Persetujuan Perdamaian”, tetapi “persetujuan untuk menghentikan tindak kekerasan”, yaitu sepenuhnya masalah ke-manusiaan dan agar pertentangan bersenjata dihentikan, dan bukan pengakuan GAM.
- Pembuatan persetujuan tersebut adalah hak dari pihak eksekutif, dan nanti akan dipertanggungjawabkan kepada MPR.

Berkenaan dengan mengapa pertemuannya di luar negeri, Menlu Alwi Shihab mengatakan, bahwa hal itu hanya masalah teknis belaka, mengingat Hasan Tiro, tidak mungkin datang ke Indonesia, maka kitalah Delri yang datang ke sana.

Sedangkan Sutradara Gintings, Ketua Fraksi KKI (Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia) di DPR RI dan Taufiqurrahman Saleh, Ketua Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) DPR RI, sejalan dengan Menteri Pertahanan RI Juwono Soedarsono, Hasan Wirayuda (Dubes di Watapri Jenewa), Menteri HAM Hasballah Saad, Menlu RI Alwi Shihab, wakil ketua DPR RI, AM. Fatwa, yang berpendapat antara lain sebagai berikut:

- Penandatanganan Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan adalah merupakan langkah besar dalam konteks upaya penyelesaian masalah Aceh. Kesepahaman itu

dilakukan masih dalam koridor integritas wilayah Indonesia serta tidak akan berujung menuju jajak pendapat, seperti pernah terjadi pada kasus Timor Timur.

- Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan, adalah cara yang ter-baik untuk meredakan ketegangan, dan menghentikan kekerasan, serta menghentikan pertumpahan darah di Aceh.

Kesepahaman tersebut akan/bisa menyelamatkan banyak nyawa, kata juru bicara GAM, Ismail Syahputra.

- Berdialog dengan GAM yang melahirkan Nota Kesepahaman ter-sebut, bukanlah berarti melegitimasi GAM sebagai gerakan separatis, atau menerima tujuan separatis, tetapi adalah meru-pakan cara diplomasi yang berwawasan luas, dalam rangka perdamaian yang efektif dan berjangka panjang.

Bersamaan dengan itu, dengan nada cukup tegas, Panglima TNI, Laksamana A. S. Widodo mendukung setiap upaya penyelesaian masalah Aceh, termasuk kesepakatan di Jenewa. Sementara itu, me-nurut Sulaiman AB, Panglima TNI mengatakan bahwa penan-datanganan nota kesepahaman tersebut memberikan kontribusi besar terhadap penyelesaian masalah Aceh. Beliau menyatakan bahwa untuk ini TNI mulai menarik personelnnya lebih banyak lagi. Sementara itu menurut sumber yang sama, Panglima Kostrad Letjen Agus Wirahadikusumah bahkan mengatakan semua pasukan TNI non-organik dari kesatuan Kostrad sudah ditarik.

Sementara itu, di pihak lain, menurut Sulaiman AB, Panglima Perang Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), komando pusat di Tiro, memerintahkan seluruh jajaran AGAM untuk menghentikan aktivitas militer sementara waktu. Dijelaskan pula bahwa sejak awal pekan penandatanganan, operasi mliter AGAM sebenarnya diperin-tahkan dihentikan, seluruh personel AGAM ditarik kebarak, kecuali kegiatan intelijen.

Kesepakatan Jeda Kemanusiaan tersebut mulai berlaku 3 ming-gu setelah saat penandatanganan, dan berlaku untuk selama 3 bulan kemudiannya. Berarti Kesepahaman Bersama Jeda Kemanu-siaan ini, mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2000, dan berakhir pada sekitar tanggal 2 September 2000. Kemudian dalam rapat Forum Bersama (Joint Forum) telah disepakati bahwa Jeda Kema-nusiaan diperpanjang selama 3 bulan ke depan, menjadi tanggal 15 Januari 2002.

Bekerjanya Kelembagaan dalam rangka Jeda Kemanusiaan, sebagai berikut:

Forum Bersama (joint Forum):

- Merupakan Forum/Badan tertinggi dalam rangka Jeda Kemanu-siaan.
- Berkedudukan di Jenewa.
- Anggota dari Indonesia adalah Dubes. Dr. Hasan Wirayuda.
- Anggota dari pihak GAM, adalah Dr. Zaini Abdullah.
- Anggota dari HDC
- Dalam rapat-rapatnya di Jenewa, dapat dihadiri oleh satu orang wakil dari setiap Komite, sebagai nara sumber, dan juga dapat mengundang wakil dari Tim Montoring, juga sebagai nara sumber.

Komite Bersama Aksi Kemanusiaan (KBAK):

- Merupakan Badan Pelaksana dari Rencana Aksi Jeda Kemanusiaan di bidang Aksi (bantuan) Kemanusiaan.
- Berkedudukan di Banda Aceh, Indonesia.

- Anggota dari pihak Indonesia, adalah 5 orang yakni: 1). Dra. Naimah Hasan, 2). T. Kamal S., 3). Yunus Ilyas, 4). Ridwan Husin, 5). Rusli Wahid.
- Anggota dari pihak GAM, adalah 5 orang yakni: 1). Ilyas Muhammad Abed, 2). Hasbi Abdullah, 3). Sofyan Inrahim Tiba, 4). T. Kamaruzzaman, 5). Cut Nurasikin.. . . .)

Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK):

- Merupakan Badan Pelaksana dari Rencana Aksi Jeda Kemanusiaan dibidang Modalitas Keamanan.
- Berkedudukan di Banda Aceh, Indonesia.
- Anggota dari pihak Indonesia, adalah 5 orang, yakni: 1). Kol. Pol. Drs. Ridwan Karim, 2). Kol CPM. Drs. Sulaiman AB, 3). Kol. Pol. Drs. Anwar Affan, 4). Kol. Pol. Drs. Rismawan, 5). Kol. Laut M. A. Madani, SE.
- Anggota dari pihak GAM adalah 5 orang, yakni: 1). Tgk. Nashiruddin bin Ahmed, 2). Muhammad Basir bin Sulaiman, 3). Zulfani bin Muhammada Rani, 4). Amni bin Ahmad Marzuki, 5). Muzakkir bin H. Mukhtaruddin.....)

Tim Monitoring Aksi Kemanusiaan (TMAK):

- Tim ini bertanggung jawab memonitor dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Aksi atau Bantuan Kemanusiaan, agar sesuai dengan Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan, dan agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu (3 tepat).
- Berkedudukan di Banda Aceh.
- Anggotanya dari pihak Indonesia adalah orang, yakni: 1). Prof. Dr. Yusni Sabi, Dr. Gade Isamil,
- Anggotanya dari pihak GAM adalah orang, yakni: 1).

Tim Monitoring Modalitas Keamanan (TMMK):

- Tim ini bertanggung jawab memonitor dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Modalitas Keamanan, agar sesuai dengan Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan, dan agar benar-benar memberikan rasa aman, tenang, dan tertib dalam masyarakat serta mencegah terjadinya kekerasan dan penderitaan rakyat.
- Berkedudukan di Banda Aceh.
- Anggotanya dari pihak Indonesia adalah. orang, yakni: 1). Muhammad Daim, 2).
- Anggotanya dari pihak GAM adakah. orang, yakni: 1). Nasrullah Dahlawi, 2)

Dalam melakukan program dan tugas-tugasnya, selain difasi-litasi dan dibiayai oleh Pemerintah RI, Badan-badan tersebut juga difasilitasi dan didanai oleh HDC, tentu saja berkat adanya bantuan banyak negara dan NGOs Internasional serta juga donatur dan LSM dalam negeri.

Perlu dicatat, bahwa selain melakukan tugas-tugas lapangan berkenaan dengan Aksi Kemanusiaan dan Modalitas Keamanan, kedua Komite ini baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, juga melakukan sosialisasi dari Jeda Kemanusiaan, baik melalui media massa, media lainnya, maupun langsung kepada masyarakat. Secara khusus pula kedua Komite ini, melakukan usaha-usaha untuk menangani masalah pengungsi (IDPs). Di samping itu komite-komite tersebut, dan bahkan bersama-sama dengan Tim Monitoring, juga menangani, jika ada tindakan-tindakan dari pihak tertentu yang bertentangan atau mengancam keberhasilan Nota Kesepahaman tentang Jeda Kemanusiaan.

Mengapa Jeda Kemanusiaan Ujung-Ujungnya Gagal?

Jawabnya secara singkat adalah: karena kedua pihak tidak mematuhi komitmen yang telah disepakati di Bavois. Penyebab utamanya adalah kerana kedua pihak bertahan dengan prinsip dan posisi masing-masing yang tidak mungkin dikompromikan, sehingga mustahil dapat dijembatani.

Untuk mengilustrasi pernyataan tersebut, berikut ini digambarkan beberapa kejadian yang dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan, dan atau tindakan yang mengakibatkan penderitaan rakyat, antara lain:¹¹⁹⁸

Dalam rentang waktu tiga bulan Jeda Kemanusiaan, hampir setiap minggu terjadi kontak senjata antara TNI dengan GAM, rusak-nya pos-pos militer, rumah penduduk maupun terbunuhnya beberapa orang dari kedua belah pihak, penduduk sipil sampai tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian tinggi untuk menghadirkan perdamaian di Aceh.

Pada tanggal 1 Juni 2000, pukul 15.00, waktu stempat, Tengku Don Zulfahri alias Habib Adam, yang disebut-sebut sebagai Sekjen MP-GAM tewas ditembak orang tak dikenal ketika makan siang di Restoran Al Hayat di Distrik Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia. Hasballah Saad, mengatakan bahwa pembunuhan tersebut disinyalir berhubungan dengan motif politik, sebab korban merupakan Sekjen MP GAM yang berseberangan paham dengan Wali Negara Aceh Merdeka Tengku Hasan Tiro.

Pada bulan Juni juga, terjadi pengibaran bendera-bendera GAM di Kabupaten Aceh Tengah. Sementara itu telah dilakukan operasi bendera GAM. Dalam operasi tersebut telah disita, 10 helai di Kecamatan Syamtalira Aron, 4 helai di Kecamatan Samudera, 8 helai di Kecamatan Syamtalira Bayu, 3 helai di Kecamatan Jambo Aye, 1 helai di Kecamatan Muara Batu dan 1 helai di Kecamatan Banda Sakti.

Pemaksaan Orang untuk Mengungsi masih Terus Terjadi

Suasana sekitar awal Juni sangat mencekam, sehingga Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert S. Gelbart, memerlukan untuk menyerukan agar warga AS yang bekerja dan menetap di Aceh supaya segera meninggalkan Aceh.

Secara umum tindak kekerasan masih terus terjadi dan bahkan meningkat, mungkin dikarenakan oleh antara lain, pihak GAM, atau yang menamakan dirinya GAM, atau orang tak dikenal, masih terus melakukan penculikan, perampasan, pemerasan, dan bahkan pembunuhan. Juga pengutipan pajak nanggrou, lalulalang atau berkeliaran dengan membawa senjata, juga masih terus terjadi. Sementara itu juga terjadi rekrutmen tenaga-tenaga muda di desa untuk dilatih menjadi tentera GAM. Hal yang terakhir inilah yang disebut oleh sementara kalangan bahwa: "selama Jeda Kemanusiaan, GAM melakukan konsolidasi kekuatan".

Penyebab lain dari masih terjadi tindak kekerasan adalah dari pihak aparat keamanan RI, yang masih saja melakukan operasi, seperti Operasi Cinta Meunasah, tidak dilakukannya penarikan pasukan non-organik, karena hal itu bukan dalam rangka Jeda Kemanusiaan, TNI dan atau Polri masih saja berkeliaran, patroli, dan razzia, dengan menyandang senjata, pemasangan block/penghalang dijalan raya, obyek-obyek vital masih dikawal oleh pasukan non-organik TNI dan atau Polri, dan hal itu bukan bagian dari tugas Jeda Kemanusiaan.

Walaupun banyak sekali alasan untuk mengatakan bahwa Jeda Kemanusiaan, masih jauh dari harapan, terutama harapan rakyat Aceh, bahkan ada yang mengatakan gagal, namun ketika menjelang berakhirnya tahapan pertama, dari Jeda Kemanusiaan

¹¹⁹⁸ Sebagian besar dikutip dari bukunya Sulaiman AB, *Aceh Bakal Lepas*, 2005.

tersebut, banyak sekali usulan agar dapat diperpanjang minimal untuk satu tahapan lagi, dan kemudian memasuki tahapan pembicaraan berikutnya untuk penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh.

Sementara itu Gubernur Aceh, Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud, diberhentikan oleh pemerintah, dan ditunjuk Ramli Ridwan, SH. sebagai Pejabat (Care Taker) Gubernur Aceh, dengan tugas khusus, mempersiapkan pemilihan Gubernur yang definitif, selain tugas-tugas umum lainnya.

Saran perpanjangan Jeda kemanusiaan tersebut, misalnya datang dari kalangan dalam Komite-komite Bersama dari Jeda Kemanusiaan, dari Pj. Gubernur Aceh, Ramli Ridwan, dari DPRD Aceh, yang disuarakan oleh Tgk. Muhammad Yus (Abu Yus) dan H. T. Bahrum Manyak, beberapa LSM dan mahasiswa, Meneg HAM Hasballah Saad, bahkan pihak GAM pun sesungguhnya menghen-daki diperpanjangnya Jeda Kemanusiaan.

Perlu kiranya diketahui bahwa selama Jeda Kemanusiaan tahap pertama, telah terjadi tiga kali rapat Forum Bersama (Joint Forum) di Jenewa Switzerland, yakni:

Rapat Forum Bersama (FB) Pertama, pada tanggal 23 – 24 Juni, 2000, yang menghasilkan Petunjuk No. 1 (Directive no. 1).

Forum Bersama (FB), memperhatikan Peraturan-peraturan Dasar (Ground Rules) dari Komite Bersama Aksi Kemanusiaan dan Komite Bersama Modalitas Keamanan, prosedur tetap dari Komite Bersama Modalitas Keamanan, dan laporan dari Tim Monitoring.

FB juga memperbaharui kembali komitmennya untuk menghargai dan menghormati sepenuhnya Kesepahaman Bersama untuk Jeda Kemanusiaan.

Dalam Petunjuk No. 1 yang dihasilkannya, antara lain mengan-dung:

Tentang Peraturan Dasar dari Komite Bersama Aksi Kemanusiaan (KBAK):

- FB mendorong partisipasi penuh dari masyarakat lokal dalam pelaksanaan program-program kemanusiaan, sebagaimana disebut dalam KBJK.
- FB sangat merekomendasikan bahwa barang-barang bantuan agar dikordinasikan oleh KBAK, bekerja sama dengan PMI misalnya:

Tentang Laporan Tim Monitoring dari Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK):

- FB mendesak mereka untuk menginventarisasi insiden-insiden yang terjadi.
- FB meminta Komite-komite Bersama dan Tim Monitoring meng-ambil langkah-langkah untuk menyelesaikan insiden-insiden dan laporkan hal tersebut kepada FB.
- FB mengulangi penegasannya tentang hakikat kemanusiaan dari Jeda Kemanusiaan dan mendesak semua pihak untuk membatasi diri dari aksi-aksi politik yang dapat merusak/mengganggu keber-hasilan penerapan Jeda Kemanusiaan.

Administrasi:

FB setuju agar UNDP (United Nations Development Programme) membentuk dua Trust Fund, yakni 1). Untuk Dukungan Logistik dan Administrasi, dan 2). Untuk Proyek-proyek Kemanusiaan.

- a. FB, setuju agar semua anggota Komite Bersama mendapat anggaran, biaya perjalanan, asuransi kecelakaan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- b. FB mendorong Komite Bersama untuk meneruskan komunikasi bersama, untuk itu penting didirikannya Media Centre.

Butir-butir yang disampaikan kepada FB oleh KBMK, adalah:

- Penarikan TNI/Polri non-organik dari proyek-proyek vital.

- Penarikan Pasukan TNI/Polri dan AGAM, ke barak.
- Pembawaan senjata api.
- Penghentian segala bentuk operasi.
- Penarikan Pasukan ABRI yang non-organik.
- Pemberian informasi tentang keberadaan/posisi.

Rapat Forum Bersama (FB) Kedua, tanggal 5-6 Agustus 2000 menghasilkan Petunjuk No. 2, yang isinya antar lain sebagai berikut:

Petunjuk Berkenaan dengan KBAK:

FB memberi perhatian dan menyetujui observasi-observasi dan rekomendasi-rekomendasi tentang masalah yang dihadapi oleh KBAK, berkenaan dengan kordinasi bantuan kemanusiaan.

FB merekomendasikan bahwa anggota KBAK memfokuskan diri pada langkah-langkah praktis, untuk menjamin cepatnya tersalur-kan bantuan, terutama untuk pengungsi (IDPs). Untuk itu FB meng-instruksikan KBAK, sebagai berikut:

- a. Kordinasikan dan salurkan semua bantuan kemanusiaan kepada yang membutuhkan.
- b. Pertahankan prinsip netralitas dari KBAK dalam distribusi dan kordinasi bantuan kemanusiaan.
- c. Pastikan tidak ada hambatan untuk mendapat bantuan kemanusiaan, yang dijamin dengan “stempel jaminan” (a Stemp of Guarantee) dari KBAK bagi mereka yang membutuhkan.
- d. Publikasikan secara bersma-sama kegiatan-kegiatan KBAK.
- e. Perluas keberadaan KBAK, dan sampaikan proposalnya kepada FB

3. FB menginstruksikan Tim Monitoring KBAK, untuk:

- a. Memperkuat kegiatan-kegiatannya dengan dukungan HDC.
- b. Laporkan semua halangan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan.
- c. Pastikan bahwa laporan yang disampaikan kepada KBAK dan FB adalah sistematis dan bertanggung jawab.

4. FB mendorong HDC untuk: memperkuat usaha-usahnya dalam mobilisasi dana untuk bantuan kemanusiaan.

5. FB mengutuk pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan jahat peracunan makanan dan rokok.

Petunjuk Berkenaan dengan KBMK

FB menginstruksikan KBMK untuk:

Menyelesaikan masalah pengungsi (IDPs).

Klarifikasi peraturan-peraturan dasar (*ground rules*), khususnya istilah-istilah yang terdapat pada paragraph 4 dari laporan modalitas keamanan tanggal 31 Juli 2000, yang menggunakan referensi insiden lapangan, dan melaporkannya kembali kepada FB pada atau sebelum tanggal 17 Agustus 2000.

Laporan tentang tindak lanjut rekomendasi laporan Tim Monitoring.

Ajukan proposal tentang bagaimana memperluas secara efektif keberadaan KBMK di lapangan.

Lakukan sosialisasi secara bersama-sama, terutama dalam hubungannya dengan media massa.

Konsultasi dengan HDC, dalam hal kebutuhan logistis dan administratif.

FB menginstruksikan Tim Monitoring dari KBMK untuk:

Meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengedepankan objek-tivitas, atas dasar fakta, dan laporan forensik.

Pahami bahwa laporan tersebut adalah untuk digunakan oleh anggota Komite Bersama, dan bukan untuk tujuan *judicial*.

Persiapkan, dengan dukungan HDC, menggunakan standar format laporan.

Selidiki penyebab terjadinya IDPs.

Hadirkan dua tanda tangan pada semua laporan dan sampaikan laporan tersebut kepada KBMK, KBAK dan FB

Laoran-laporan Tim Monitoring dapat didistribusikan kepada Pers, atas persetujuan FB.

Petunjuk-petunjuk dalam kaitannya dengan Jeda Kemanusiaan, pada umumnya.

FB mendorong Kedua Komite Bersama dan Tim Monitoring untuk bekerja dalam kerangka yang lumrah, terutama dalam kaitan-nya dengan IDPs.

Petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan kepada FB oleh KBMK.

FB mereview perkembangan dari 6 hal penting yang diajukan oleh KBMK dalam Rapat Pertama dari FB dan telah diputuskan bahwa 2 orang Ketua dari KBMK yang akan hadir dalam pertemuan FB ini akan membrief KBMK tentang hasil-hasil, atau hal yang telah dibahas dalam FB

Rapat Forum Bersama (FB) Ketiga, tanggal 23–24 September 2000.

Menghasilkan Pertunjuk No. 3, sebagai berikut:

A. Petunjuk berkenaan dengan KBAK.

1. FB menerima laporan KBAK, dan menghargai para anggotanya yang telah menunjukkan kemajuan sejak Rapat FB yang lalu.
2. FB mendesak KBAK untuk menerapkan “stempel jaminan” pada semua bantuan yang dikordinasikan melalui KBAK.

FB menerima dan mendorong aksi yang terintegrasi antara KBAK dan KBMK, terhadap masalah IDPs.

FB mendesak donors internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan, melalui Trust Fund UNDP, atau melalui badan lainnya, yang diakui.

FB mendesak KBAK dan Pejabat Gubernur untuk bekerja sama dalam rangka kordinasi dan pemberian bantuan kemanusiaan dari pemerintah RI.

FB mendorong KBAK untuk memperluas kegiatannya ke Kabupaten, khususnya dalam kordinasi dengan berbagai stake holder lainnya.

FB menyesalkan semua perlakuan buruk kepada pekerja kemanusiaan.

B. Petunjuk berkenaan dengan KBMK.

FB mengakui bahwa fungsi normal dari polisi adalah sangat penting untuk kesuksesan Jeda Kemanusiaan. Hal tersebut juga menjadi semangat Nota Kesepahaman, yang akan terus diemban oleh polisi Indonesia.

FB mengakui bahwa Nota Kesepahaman, dapat diamandemen sebagai hasil dari negosiasi antar kedua pihak.

FB menerima semua rekomendasi KBMK, berkenaan dengan prinsip-prinsip kepolisian.

FB setuju bahwa KBMK di Banda Aceh perlu diperkuat dengan menambah jumlah staf, maksimum sampai dengan 8 orang dari setiap pihak.

C. Petunjuk berkenaan dengan Tim Monitoring dari KBMK.

FB menerima format proposal yang diajukan dalam laporan Tim Monitoring untuk KBMK, berkenaan dengan fungsi dan status.

FB mengulangi lagi komitmennya untuk menjamin sekuriti dan keselamatan bagi anggota Tim Monitoring.

FB setuju terhadap rencana perluasan yang disebutkan dalam laporan Tim Monitoring yang diajukan kepada FB Kedua pihak setuju perluasan tersebut dimulai dari Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Pidie.

FB setuju perlu adanya training yang memadai bagi Tim Monitoring.

D. Perpanjangan dari Jeda Kemanusiaan..

1. Pihak-pihak dari FB menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan IDPs untuk keuntungan politik.
2. Pimpinan GAM menegaskan kembali ketidaksetujuannya terhadap pemerasan, oleh pihak mana pun.

Pimpinan GAM mencela setiap intimidasi dan menjadikan pejabat pemerintah sebagai korban, oleh siapa saja.

Pihak-pihak dari Kesepahaman Bersama ini, setuju untuk memperpanjang Jeda Kemanusiaan s/d 15 Januari 2001.

Selama phase kedua dari Jeda Kemanusiaan ini, pemerintah RI dan GAM, akan memasuki tahap penjajakan pembahasan untuk atau menuju solusi politik yang komprehensif dan tuntas.

Jeda Kemanusiaan Tahap II

Ir. Abdullah Puteh, dilantik sebagai Gubernur Aceh, menggantikan Ramli Ridwan, SH., pada tanggal 25 Nopember 2000;; karena jalan menuju Banda Aceh sedang dilanda banjir, maka pelan-tikannya dilakukan oleh Mendagri di Bandara Sultan Iskandar Muda.

Selama perpanjangan waktu tersebut, semua perangkat atau badan-bada Jeda Kemanusiaan masih berada sebagaimana semula dan menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya, secara biasa pula. Mereka umumnya berkantor dan berkegiatan di Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh, dan di tempat-tempat lain yang disepakati. Sementara di lapangan, di luar gedung-gedung itu, keadaan, terutama situasi keamanan semakin memburuk, rakyat semakin menderita akibat berbagai kekerasan dan gangguan keamanan, ketenangan dan ketertiban, yang kadang-kadang secara kasat mata dilakukan oleh orang-orang yang dikenal masyarakat. Karena perlakuan buruk tersebut bukan merupakan *policy*, dan bahkan kedua pihak sering mengutuknya, maka disebutlah pelakunya adalah "oknum" baik TNI atau Polri atau GAM. Jika pelakunya tidak dikenal atau terselubung disebutlah pelakunya sebagai "orang-orang tak dikenal" atau OTK, atau "diduga" dilakukan oleh aparat TNI, atau polisi, atau oleh orang-orang GAM. Namun, hampir dapat dipastikan bahwa semua malapetaka, penderitaan, dan kesengsaraan rakyat Aceh, ketika itu, bersumber dari, atau dilakukan oleh, orang-orang yang mempunyai dan membawa senjata, walaupun yang korban itu sendiri, selain rakyat, juga anggota TNI, Polri, dan juga anggota GAM.

Contoh kasus berikut akan menguatkan dan sekaligus mem-buktikan benarnya pernyataan tersebut, antara lain:

- Meninggalnya Rektor IAIN Al Raniry, Prof. Dr. Syafwan Idris, pada tanggal 16 September 2000, dua hari setelah berakhirnya Jeda Kemanusiaan tahap-I dan dinyatakan berlakunya Jeda Kemanusiaan tahap ke II. Beliau ditembak pukul 6.00 pagi di rumahnya oleh dua orang pemuda tak dikenal.
- Dua pekan setelah itu, hujan granat dan tembak-menembak terjadi di desa Pusong, Lhokseumawe, Aceh Utara. Bahkan instalasi militer, yaitu Pos Linud 100, diserang, yang mengakibatkan 6 orang luka-luka. Menurut Sulaiman AB, GAM mengaku bertanggung jawab atas penyerangan tersebut, dan wakil Panglima GAM Wilayah Pase, mengatakan bahwa serangan itu adalah sebagai pembalasan terhadap tindakan TNI dan Polri yang lebih dahulu menyisir rumah-rumah penduduk dengan modus mencari pasukan GAM.
- Penyerangan kemarkas Detasemen Artileri Peluru Kendali di Lhokseumawe.
- Kontak senjata di desa Ceurik, kecamatan Krueng Sabe, Aceh Barat.
- Pada bulan Oktober 2000, sekitar 6. 500 orang dipaksa untuk mengungsi dari 10 desa di Kabupaten Pidie, menyusul diculiknya Tengku Syafi'i Amin, pimpinan Dayah Mujjatul Mujahidin, yang sehari kemudian ditemui telah meninggal dunia sekitar 15 km dari rumahnya. Beliau diculik oleh orang-orang yang bersenjata pada tanggal 21 Oktober 2000.
- Bom rakitan meledak di depan Markas polisi Sektor Teunom, Aceh Selatan.
- Serangan terhadap konvoi Brimob di desa Lambadhok, di Jalan Malahayati, Banda Aceh, Aceh Besar.
- Kontak senjata di desa Cot Baroh, Cot Tunong, Simpang Raya, dan anoh Mirah, di Pidie., pada akhir Oktober 2000, dengan menyinggalkan 3 orang anggota Brimob tewas, berikut tewasnya 11 orang penduduk, termasuk anak beurmur 15 tahun, di mana dua di antaranya adalah anggota GAM. Total pengungsi di seluruh Aceh ketika itu masih cukup banyak, lebih dari 20. 000 an orang, secara silih berganti dengan rata-rata lamanya bertahan di tempat pengungsian adalah 1 tahun.
- Bentrokan yang tergolong besar juga terjadi ketika aparat ke-amanan menghadang massa dari berbagai Kabupaten seluruh Aceh, yang datang dan mengalir ke Banda Aceh untuk menghadiri rapat akbar yang disebut oleh SIRA pemerakarsanya sebagai "Sidang Rakyat untuk Kedamaian" yang singkatannya oleh Nasar, ketua SIRA disebut sebagai: "SIRA Rakan". Dalam bentrokan tersebut menurut Sulaiman AB, telah jatuh korban sebanyak 14 orang meninggal dunia, 9 di antaranya anggota GAM. Dan sejak saat itu kota Banda Aceh dinyatakan berstatus Siaga-I.
- Bentrokan lainnya yang relatif besar adalah dalam rangka Ulang Tahun GAM ke 24, tanggal 4 Desember 2000, yang di pusatkan di Wilayah Pase.
- Dan lain sebagainya.

Dengan gerakan SIRA-Rakan tersebut, gagasan referendum yang telah mulai redup, marak kembali, dan malahan semakin jelas warnanya yang menginginkan Aceh Merdeka, terpisah dari Indonesia, dan terang-terangan pula melebel Indonesia sebagai kolonial yang menjajah Aceh. Atas dasar itu pulalah akhirnya Nazar Ketua SIRA, ditahan oleh Polri, dengan tuduhan menyebarkan kebencian kepada pemerintah yang sah.

Semua institusi Jeda Kemanusiaan yang telah ada kelihatannya tidak mampu mengatasi masalah-masalah dan kemelut tersebut. Bahkan beberapa kali rapat Forum

Bersama (Joint Forum), yakni tanggal 16-17 Nopember, 2000, dan tanggal 4-6 Desember 2000, batal dilaksanakan, dikarenakan GAM tidak bersedia menghadirinya.

Betapapun sulit dan rawannya situasi lapangan, namun bantuan kemanusiaan, baik yang dikordinir oleh KBAK, maupun yang langsung oleh NGOs/LSM tertentu, terus berjalan, walaupun sekali-sekali mendapat hambatan/gangguan berupa larangan dari pihak-pihak tertentu. Ada beberapa NGOs Asing yang beroperasi di Aceh ketika itu antara lain: CIDA, Flower, Novib, Hivos, Oxfam GB, MSF, Save the Children, IRC, sedangkan LSM domestik antara lain PKBI, PMI, MiSPI, Cinta Ibu Serambi Mekah, dan beberapa Surat Kabar seperti Republika, Serambi Indonesia, Rakyat Medeka, dan sebagainya. Sementara itu ada beberapa negara yang juga membantu para korban konflik antar lain: Kuwait, Qatar, Jepang. Jenis-jenis bantuan kemanusiaan yang disalurkan umumnya berkisar sekitar: makanan, obat-obatan, pakaian, perumahan, sarana pendidikan, serta peternakan.

Dari berbagai keterangan dan catatan, dapat disimpulkan bahwa Jeda Kemanusiaan tahap kedua mulai tanggal 2 September 2000, dan berakhir tanggal 15 Januari 2001 atau selama 3 bulan lebih 13 hari. Usul perpanjangan Jeda Kemanusiaan ini, disuarakan oleh berbagai pihak bersamaan dengan penolakan mereka bagi diberlakukannya "darurat sipil" bagi Aceh, yang berawal dari usul Menteri Pertahanan, Muhamad. Mahfud, MD.

Keadaan, khususnya situasi keamanan, ketenangan dan keter-tiban masyarakat pada umumnya dan secara keseluruhan, semakin memburuk, Tindak kekerasan terjadi di mana-mana dengan tingkat eskalasi yang signifikan, penderitaan rakyat semakin menyedihkan dan mengenaskan.

Dalam masa Jeda Kemanusiaan tahapan kedua ini berkembang wacana berkenaan dengan tiga substansi utama yakni:

1. Pemberlakuan Syariat Islam, dalam rangka otonomi khusus bagi Aceh.
2. Dibentuknya suatu Badan yang akan menangani Permasalahan Konflik Aceh secara komprehensif, damai, adil, bermartabat, dan berwawasan ke depan.
3. Dilaksanakannya Musyawarah Rakyat Aceh di Aceh.

Ketiga substansi tersebut sesungguhnya bukanlah sesuatu yang terlalu baru, tetapi telah pernah diajukan oleh Tim Penasihat Presiden Urusan Aceh (TPPUA) kepada Presiden, pada sekitar bulan Februari 2000, jauh sebelum ditanda-tanganinya Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan. (ketiganya akan dibahas lebih lanjut).

Berkenaan dengan syariat Islam, juga disinggung oleh Presiden RI, KH. Abdurrahman Wahid, ketika berpidato di Banda Aceh, dalam kunjungannya kesana pada tanggal 19 Desember 2000, yang menjadi harapan baru bagi rakyat Aceh, bahkan ada yang menang-gapinya sebagai janji Presiden untuk memberlakukan syariat Islam di Aceh dalam waktu dekat.

Sementara itu perlu juga dicatat, bahwa Forum Konsultasi antara DPR RI, yang dipimpin oleh wakil ketua DPR RI, AM Fatwa dan pemerintah yang diwakili oleh Menko Polsoskam, menghasilkan beberapa kesimpulan, yang diumumkan pada tanggal 26 Nopember 2000, sebagai berikut:

1. Tingkatkan dialog untuk menyelesaikan masalah Aceh.
2. Tindak pelaku kekerasan khususnya dan lakukan penegakan hukum pada umumnya.
3. Tingkatkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
4. Bantu korban bencana alam banjir.

Di kalangan masyarakat, terdapat pula beberapa kegiatan me-nonjol. Masyarakat Aceh yang berdomisili di Jakarta, yang tergabung dalam LSM FORKA (Forum Kepedulian Aceh), yang diketuai oleh H. Ismail Hasan Metareum, dalam rapatnya tanggal 27 Nopember 2000, memutuskan untuk membuat surat kepada Presiden, yang isinya antara lain menolak status “darurat sipil” bagi Aceh. Selain itu FORKA juga membentuk dua buah Tim yam Tim, untuk membahas/mengkaji RUU NAD yang diketuai oleh Usman Hasan dengan anggota-anggotanya antara lain: Dr. Hasballah Saad, Prof. Dr. Said Zainal Abidin, dan Razali Abbas, dan tim untuk menyusun konsep “Penyelesaian Konflik Aceh Secara Komprehensif” yang diketuai oleh Dr. Hasballah Saad, dengan anggota-anggotanya: Usman Hasan, Dr. Bachtiar Ali, Drs. Kaoy Syah. ***



BAB 11

UPAYA MENYELAMATKAN

JEDA

KEMANUSIAAN DARI KEGAGALAN

Pertemuan Lanjutan Pemerintah RI dan GAM Jeda Kemanusiaan Tahap III?

Moratorium Satu Bulan

Di tengah-tengah kegundahan banyak kalangan, karena semakin memburuknya keadaan, muncul secercah harapan. Pertemuan antara pemerintah RI dan Pimpinan GAM sebagaimana diputuskan dalam rapat Forum Bersama (Joint Forum), tanggal 23-24 September 2000, akhirnya dapat dilaksanakan pada tanggal 6-9 Januari 2001, lebih kurang seminggu menjelang berakhirnya Jeda Kemanusiaan Tahap II. Lebih dari itu, pertemuan tersebut, yang tadinya direncanakan setelah tanggal 15 Januari 2001, (setelah berakhirnya Jeda Kemanusiaan Tahap II), disepakati untuk dimajukan menjadi tanggal 6-9 Januari 2001, suatu hal yang secara lahiriah menggembirakan.

Delegasi pemerintah Indonesia dalam pertemuan tersebut, kembali dipimpin oleh Dr. Hassan Wirayuda yang saat itu telah menjabat sebagai Dirjen Politik Deplu, dengan 6 orang anggota Delri terdiri dari: Laksda TNI Yoost F. Mengko (Asintel Kasum TNI), Susanto Sutoyo (Watapri Jenewa), Kol. CPM. Drs. Sulaiman AB, SH. (Sekretaris KBMK-RI), Kol. Pnb. Kuswanto (Athar di Paris), Dr. Desra Percaya (Pejabat Ditjen OI Deplu) dan I Gusti A. Wesaka Puja (Sekretaris I PTRI, Jenewa). Sedangkan delegasi GAM dipimpin oleh Malek Mahmud, dengan 6 orang anggota delegasi, yaitu: Dr. Zaini Abdullah, Zakaria M. Saman, Ir. H. Gani Nurdin, Nurdin, T. Kamaruzzaman, SH., Ilyas M. Abed, dan Sofyan Ibrahim Tiba, SH.

Hasan Tiro, menurut informasi, hadir digedung pertemuan tersebut, tetapi tidak ikut terlibat langsung dalam diskusi atau dialog. Dalam pertemuan tersebut, hadir 3 orang pakar berkaliber internasional, yakni: Prof. William Ury (Pakar Otonomi dari Harvard University, AS), Lord Avebury (pakar Hukum Internasional, dan anggota Senat Inggris), dan Hurst Hannum (pakar Conflict Resolution dari Fletcher University, AS), sebagai konsultan.

Pertemuan tersebut, tidak jelas inisiatif dari pihak mana, namun sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam rangka Jeda Kemanusiaan, masih tetap difasilitasi serta dimoderatori oleh HDC.

Pertemuan tersebut tidak menegaskan sama sekali apakah Jeda Kemanusiaan yang seharusnya berakhir pada tanggal 15 Januari 2001, akan diperpanjang atau tidak. Namun, disepakati oleh kedua pihak bahwa antara berakhirnya Jeda Kemanusiaan

tanggal 15 Januari 2001 s/d 15 Februari 2001, atau selama satu bulan, dinyatakan berlaku “moratorium”.

Dalam pertemuan itu membicarakan substansi baru yang disebut dengan: “*Provisional Understanding between the Government of the Republic of Indonesia, and the Leadership of the Free Aceh Movement*”. Memang dalam kesimpulan rapat Forum Bersama tanggal 23–24 September 2000, ada disebutkan bahwa; “selama Jeda kemanusiaan tahap Kedua, pihak pemerintah RI dan pihak GAM se-tuju untuk memasuki tahap peninjauan pembahasan guna mencapai solusi politik yang komprehensif dan tuntas”. (*During this second phase of the Humanitarian Pause the Government of the Republic of Indonesia, and the Free Aceh Movement agreed to enter into exploratory talks in order to arrive at a lasting and comprehensive political solution for Aceh.*). Apakah pernyataan yang terakhir ini sama artinya dengan topik pembicaraan dalam Pertemuan tersebut, juga tidak begitu jelas. Namun, isi atau kerangka materi dalam rangka topik pembahasan dalam pertemuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Kesepahaman sementara antara pemerintah Indonesia dan Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (*Provisional Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Leadership of the Free Aceh Movement*)

Bagian Pertama (Intro)

Wakil-wakil kedua pihak bertemu di Switzerland dari tanggal 6-9 Januari 2001, untuk peninjauan pembicaraan politik (*exploratory political talks*).

Ini adalah pertemuan pertama tentang isu-isu yang substantif yang telah disepakati dalam rapat forum bersama pada tanggal 23-24 September 2000.

Maksud dari pembicaraan peninjauan ini adalah untuk mencari (mendapatkan = *to seek*) formula bagi solusi konflik Aceh yang komprehensif dan tuntas.

Bagian Kedua

Kedua Pihak menyetujui Kesepahaman Sementara (*Provisional Understanding*), tentang hal-hal berikut:

- a. Suatu komitmen untuk hanya menggunakan cara-cara non-violent untuk mencapai tujuan politik, dan untuk mendapatkan solusi konflik secara damai dan demokratis.
- b. Menyepakati daftar dari elemen-elemen yang akan dicakup dalam formula untuk solusi, yaitu sebagai berikut:

Proses Demokrasi:

1. Konsultasi yang demokratis.
2. Pemilu yang bebas dan *fair* untuk membentuk pemerintahan Aceh.
3. Komisi pemilu independen dan diterima kedua pihak.
4. Registrasi pemilih, sesuai standar yang disepakati.
5. Proses pemilihan dimonitor oleh badan independent dan tidak memihak.
6. Pastikan pemilu dapat diikuti oleh calon non-partai, dan adanya partai lokal.
7. Kebebasan melakukan kampanye politik tanpa intimidasi.
8. Kebebasan menyatakan pendapat politik yang non-violent, termasuk kemerdekaan, otonomi, dan lainnya.
9. Kebebasan berkumpul, termasuk demonstrasi damai.
10. Adanya kondisi di mana GAM dan pendukung kemerdekaan dapat berpartisipasi penuh dalam proses politik.
11. Adanya kondisi di mana GAM akan menggunakan cara-cara untuk mencapai tujuan politiknya dengan secara demokratis.

12. Pertanggungjawaban dari badan-badan penegakan hukum kepada rakyat.
13. Menghargai ketentuan hukum, dan ciptakan sistem pengadilan yang berfungsi baik.

Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan:

1. Semua pihak menghargai HAM dan Hukum Kemanusiaan.
2. Investigasi transparan dari pelanggaran HAM yang lalu dan sekarang, sesuai proses hukum, dan bawa pelakunya ke pengadilan.
3. Bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
4. Identifikasi, pertanggungjawabkan, dan laporkan semua orang hilang, dengan menggunakan ahli forensik yang tidak memihak.
5. Bebaskan semua tahanan yang tidak dituduh melakukan tindakan kriminal.
6. Kompensasi kepada korban atau keluarganya dan memberikan rehabilitasi *posttraumatic, counseling*, dan perlakuan (*treatment*).
7. Akses yang bebas dan aman bagi semua pekerja kemanusiaan baik lokal maupun internasional, bagi yang membutuhkan.

Pembangunan Sosial Ekonomi:

1. Rekonstruksi bangunan terutama sekolah dan rumah yang rusak dan hancur selama konflik.
2. Jamin bagi pemerataan distribusi pendapatan dan sumber daya.
3. Pembangunan SDM, termasuk investasi yang menyerap tenaga kerja lokal, latih tenaga kerja lokal, terutama industri gas dan minyak.
4. Dorong investasi baru di Aceh yang damai dan stabil.
5. Pengaruh pembangunan terhadap lingkungan hidup, terutama penghutanan kembali, cadangan hutan, sanksi bagi penyebab polusi, dan peraturan yang ketat bagi limbah industri.

Pengaturan Keamanan:

1. Penghentian semua kekerasan, ancaman kekerasan, intimidasi dan pengrusakan harta benda.
 2. Penghentian setiap aksi penyerangan.
 3. Bangun dan perkuat Peraturan Dasar yang ada.
 4. Pengurangan pasukan non-organik TNI, dan Polri, dan pengurangan pasukan GAM
 5. Kerjasama antara TNI, Polri dan GAM untuk mengurangi element bersenjata yang tak teridentifikasi.
 6. Larangan penganiayaan atau penyerangan terhadap pasukan mana pun, atau anggotanya yang tidak membawa atau menggunakan senjata.
 7. Perluasan tim monitoring yang tidak memihak ke semua wilayah konflik dan lengkapi dengan peralatan dan logistik.
 8. Investigasi, tindakan disiplin dan tindakan hukum terhadap semua yang diduga terlibat kriminal dari anggota pasukan kedua pihak.
 9. Verifikasi semua komitmen oleh mekanisme monitoring yang tidak memihak.
 10. Pengaturan keamanan untuk proyek-proyek vital, termasuk di Kompleks Exxon-Mobil
- c. Mencapai dan memperdalam proses dialog untuk mendapatkan solusi konflik. Dalam hubungan ini kedua pihak telah sepakat untuk bertemu kembali pada tanggal 12-14 Februari 2001 di Switzerland untuk menyepakati pengaturan keamanan yang baru, dan juga tentang proses dari lanjutan dialog politik. Kedua pihak akan membentuk Dewan Bersama untuk Dialog Politik, yang akan bertemu secara reguler untuk

mencapai persetujuan ten-tang beberapa isu substantif yang mengarah kepada solusi dari konflik Aceh.

- d. Mencatat bahwa Jeda kemanusiaan untuk Aceh berakhir pada 15 Januari 2001, kedua pihak telah menetapkan moratorium selama satu bulan untuk menghentikan kekerasan, sejak tanggal 15 Hjanuri 2001. Selama moratoruim tersebut, kedua pihak akan menetapkan/membentuk mekanisme yang efektif untuk hal-hal berikut:
1. Pengaturan keamanan yang baru akan diformulasikan mela-lui konsultasi antara komandan-komandan terkait dari ke-dua pihak.
 2. Mekanisme akan diciptakan untuk konsultasi demokratis di Aceh tentang beberapa isu substantif. Kedua pihak akan menunjuk dalam jumlah yang sama anggota dari Komite Bersama (gabungan) yang dikembangkan dari struktur Komite Bersama yang telah ada (KBJK) Komite bersama ini akan mengorganisir beberapa fora untuk berbagai isu sub-stantif, dan mengundang berbagai perwakilan dan pimpinan dari Masyarakat Aceh untuk berpartisipasi.
 3. HDC akan terus memfasilitasi untuk semuanya tersebut di atas.
 4. Akhirnya kedua pihak sepakat, untuk memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi semua orang yang terlibat dalam Jeda Kemanusiaan.

Sementara itu, Taman Iskandar Muda, Jakarta di bawah pimpinan Ir. Mustafa Abubakar, mengorganisir suatu pertemuan basar yang disebut sebagai “Musyawarah Masyarakat Aceh”, di-singkat “MMA”, di Hotel Safari, Cipayung, pada tanggal 12-14 Januari 2001, yang akhirnya mengambil keputusan antara lain:

1. Menolak semua bentuk kekerasan, termasuk menolak pember-lakuan Darurat Sipil dan/atau Darurat Militer bagi Aceh.
2. Teruskan dan luaskan horison dialog, dan fokuskan dialog agar berlangsung di Aceh.
3. Himbau pemerintah agar segera membentuk Komnas PMA (Komisi Nasional Penyelesaian Masalah Aceh).

Kesemua hasil-hasil MMA tersebut, pada tanggal 7 Februari 2001, diserahkan oleh Forka, salah satu unsur peserta MMA, ke-pada Presiden RI, Gus Dur, di Bina Graha. Dalam pertemuan antara Forka dan Presiden RI tersebut, Presiden menyatakan beberapa hal penting, antara lain:

1. Kalau diadakan Sidang Istimewa MPR, maka Aceh akan lepas dari RI; Aceh akan memproklamirkan kemerdekaannya.
2. Presiden sudah menyetujui UU NAD.
3. Kalaupun nanti moratorium berakhir, dialog tetap akan terus dilaksanakan.
4. Simbolik-simbolik Aceh akan dikembalikan.
5. Gubernur Aceh sudah mempunyai program penyelesaian masalah Aceh, dan Presiden setuju dengan program tersebut, antara lain dalam hal pembangunan Sabang.
6. Gubernur Aceh minta ayat-ayat Al Quran kepada Presiden yang akan dipasang di pintu gerbang pendopo.
7. Presiden minta izin, akan menemui orang-orang GAM.

Rapat-Rapat Komandan Lapangan

Untuk menindaklanjuti apa yang telah disepakati dalam per-temuan kedua pihak pada tanggal 6-9 Januari 2001 di Swiss tersebut, di Aceh dilakukan beberapa kali rapat antara komandan lapangan, yang diikuti oleh komandan lapangan pihak RI dan komandan lapangan GAM. Rapat-rapat komandan lapangan terse-but pada dasarnya adalah untuk mencari jalan dan mekanisme yang tepat untuk menghentikan kekerasan di Aceh. Sebagaimana dike-tahui sesuai dengan Kesepahaman Sementara (*Provisonal Under-standing*) tersebut, selama satu bulan berlaku apa yang disebut sebagai “moratorium”, atau mungkin juga dapat disebut sebagai “gencatan senjata” (*cease fire*)

yakni dari tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2001. Rapat tersebut difasilitasi oleh HDC, dan mengambil tempat di Kantor HDC di Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh.

Dalam rapat komandan lapangan Pertama yang berlangsung pada tanggal 10 Februari 2001 misalnya, dihadiri oleh Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK). HDC dan Peserta yang mewakili polisi Aceh (RI) dan GAM, telah disepakati beberapa hal antara lain:

1. Kedua pihak setuju untuk menghentikan kekerasan yang mengakibatkan kematian rakyat Aceh, dan kerusakan harta bendanya.
2. Kespaktan ini akan efektif berlaku dari tanggal 10-20 Februari 2001.
3. Kedua pihak setuju, bahwa yang dimaksud dengan tindakan kekerasan adalah sebagai berikut: (a) penghadangan (*ambushes*), (b) penyerangan (*attacking*), (c) penembakan, kecuali untuk bela diri (*shooting, except for the purpose of self defense*), (d) penganiayaan (*torturing*), (e) pembunuhan (*murdering/killing*), (f) penculikan (*abducting*), (g) peledakan (*exploding*), (h) pembakaran (*burning*), (i) merampas harta rakyat (*robbing people's properties*), (j) memeras harta rakyat (*extorting people's properties*), (k) meng-ancam/mengintimidasi (*threatening/intimidating*), (l) meneror (*terrorizing*), (m) menyakiti (*harrasing*), (n) menangkap orang secara illegal (*arresting people illegally*).
4. Kedua pihak setuju pada mekanisme yang diterapkan untuk mengantisipasi dan menghentikan kekerasan di lapangan, seperti sosialisasi, koordinasi, komunikasi, dan klarifikasi dalam ber-bagai komandan lapangan.
5. Kedua pihak setuju untuk memelihara hukum dan ketertiban di Aceh, dan akan memberi hukuman bagi para pelaku kriminal, dan pelaku kekerasan lainnya. Tindakan itu berdasarkan pro-sedur legal dan dalam semangat pertemuan-pertemuan yang lalu di Jenewa, antara RI dan GAM.

Perjanjian ini membuktikan adanya goodwill dari pengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik Aceh yang akan menuju kepada perdamaian yang abadi.

Hadir dalam rapat komandan lapangan tersebut, dari pihak GAM: Tgk. Nashiruddin bin Ahmed, Tgk. Amni bin Ahmad Marzuki, Tgk. Sofyan Inrahim Tiba, (ketiganya anggota KBMK), dan Tgk. Amrin bin Abdul Wahab, dan Tgk. Saiful bin Mehammad Ali, (keduanya atas nama komandan lapangan GAM). Sedangkan dari pihak RI hadir, Kombes Pol. Drs. Ridhwan Karim, Kol. CPM. Sulaiman AB, Kol. CKH. Balukia, keiganya adalah anggota KBMK, dan Kombes Pol. Drs. Suyitno, dan Kombes Pol. Manahan Daulay, keduanya atas nama atau sebagai polisi Aceh/RI.

Selain itu rapat tersebut juga dihadiri oleh dua orang anggota Tim Monitoring Modalitas Keamanan, yakni, Muhammad Daim dari pihak Indonesia, dan Nasrullah Dahlawi dari pihak GAM

Dari pihak HDC, yang hadir dalam rapat tersebut adalah, Dominik Knill, Jean Pierre Werder, dan David Gorman.

Keputusan rapat tersebut ditandatangani oleh: Kombes Pol. Drs. Suyitno, dan Kombes Pol. Drs. Manahan Daulay, sebagai komandan lapangan Aceh/RI, dan oleh Tgk. Amri bin Abdul Wahab, dan Tgk. Saiful bin Muhammad Ali, sabagai komandan lapangan GAM, serta disaksikan oleh masing-masing Kombes Pol Drs Ridhwan Karim dari pihak Indonesia, dan Tgk. Nashiruddin bin Ahmed, dari pihak GAM.

Joint Council di Swiss, tanggal 15-16 Februari 2001, mendukung rapat komandan lapangan tersebut dan hasil-hasil nya, dan mengharapkan agar rapat yang akan datang dapat berlangsung pada tanggal 20 Februari 2001, di Banda Aceh, dengan memperluas pesertanya, baik secara horizontal maupun vertikal dari lingkup komandemen kedua pihak, dan mencakup keseluruhan Aceh.

Rapat komandan lapangan kedua berlangsung pada tanggal 22 Februari 2001, di Banda Aceh di tempat dan dengan format yang sama, dengan titik berat mengevaluasi

selama 10 hari setelah rapat komandan lapangan yang pertama. Evaluasi tersebut menyimpulkan antara lain bahwa: “penghentian kekerasan tidaklah maksimal dan masih terjadi beberapa insiden di lapangan”. Oleh karenanya hal-hal yang diputuskna dalam rapat pertama akan terus berlaku dan dievaluasi kembali pada tanggal 27 Febvruari 2001(seminggu kemudian).

Rapat komandan lapangan Ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2001 s/d 1 Maret 2001, juga berlangsung dengan format dan di tempat yang sama, mengevaluasi keadaan dan perkembangan moratorium atau *cease fire* atau *cessation of violence* di Aceh. Kesimpulannya adalah bahwa penghentian kekerasan, ternyata terhambat oleh berbagai halangan, sehingga hasilnya tidak optimal. Untum itu rapat ketiga tersebut, memutuskan antara lain: perlunya di tingkatkan komunikasi antara komandan-komandan Operasi, and mutuskann oula untuk bertemu kembali pada tanggal 15 Maret 2001.

Rapat komandan lapangan yang Keempat, berlangsung pada tanggal 15-18 Maret 2001, tempat dan dengan format yang sama, dengan agenda utama: evaluasi pelaksanaan penghentian kekerasan yang lalu dan langkah-langkah ke depan. Salah satu keputusan yang menonjol dalam rapat ke-IV ini adalah disepakatinya *peace zone* atau zona damai, yang sebagai pilot proyeknya ditetapkan Kabuoaten Aceh Utara dan Bireuen, untuk 13 hari, dimulai dari pukuil 00. 00 tanggal 22 Maret 2001 s/d dengan pukul 00. 00 tanggal 3 April 2001. zona damai tersebut berada di bawah penga-wasan (supersvisi) dari Tim Monitoring untuk Modalitas Keamanan, yang difasilitas oleh HDC.

Rapat Kemandan Lapangan Kelima, berlangsung tangal 31 Maret 2001, juga dengan agenda, format dan tempat yang sama. Dalam rapat ini dilakukan evaluasi meyeluruh, dan khususnya tentang performance dan kemajuan dari zona damai. Kesimpulannya adalah zone damai di Aceh Utara dan Bireuen, adalah tidak berhasil, mengingat tindakan kekerasan masih saja terus terjadi, malahan baik meningkat, baik jumlah maupun kualitasnya. Oleh karenanya disepakati pula untuk: tidak meneruskan zona damai.

Menghadapi suasana yang sedemikian, yang terkesan Jeda Kemnudiaan benar-benar sedang berada dipinggir jurang kegagalan, Presiden Gus Dur, pada tanggal 11 April 2001, menerbitkan Inpres No. 4 tahun 2001, tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh, untuk mendampingi pelaksanaan butir-butir yang telah disepkati dalam Jeda Kemanusiaan

Namun penampilan kedua pihak di lapangan yang masih jauh dari suasana jeda dari berbagai kekerasan, ternyata lebih dominan, maka hampir dapat disimpulkan bahwa “Jeda Kemanusiaan”, gagal untuk dilaksanakan secara baik dan menurut kesepakatan. Se-hingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Jeda Kemanusiaan berakhir pada bulan Juli 2001, bersamaan dengan dibekukan kegiatan-kegiatan dari bebebrapa Badan yang dibentuk dalam rangka.

Sementara upaya damai terus diupayakan dan diproses melalui bebagai institusi yang dibentuk dalam rangka Jeda Kemanusiaan, terjadi suatu kekerasan lagi yang cukup menonjol, yakni pengha-dangan oleh apkam RI terhadap massa yang berbondong menuju Banda Aceh untuk menghadiri hajatan SIRA yang mereka namakan sebagai Sidang Rakyat untuk Kedamaian Aceh atau SIRA Rakan, pada tanggal 10-11 Nopember 2000.***



BAB 12

TIGA INPRES UNTUK ACEH

SEBELUM terbitnya atau ditetapkannya Inpres no. 4 tanggal 11 April 2001, Presiden Gus Dur, berkunjung ke Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2000, untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Aceh, sebagai-mana juga telah pernah dilakukan oleh Presiden Habibie, pada bulan September 1999 yang lalu.

Ketiga Inpres tersebut, adalah suatu kesinambungan, walaupun diterbit-kan oleh Presiden yang berbeda, di mana satu di antaranya oleh Presiden Gus Dur, sedang yang dua lainnya oleh Presiden Megawati, sebagai berikut::

1. Inpres No. 4 tahun 2001, tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh, tertanggal 11 April 2001, di era Presiden Abdurrahman Wahid.
2. Inpres No. 7 tahun 2001, tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh, tertanggal 11 Oktober 2001, di era Presiden Megawati Soekarnoputri.
3. Inpres No. 1 tahun 2002, tentang peningkatan langkah komprehensif dalam rangka percepatan penyelesaian masalah Aceh, tertanggal 10 Februari 2002, di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Substansi yang dikandungnya, sebagaimana tertera pada judul dari ketiga Inpres tersebut, lebih kurang mirip, yakni, Presiden memberikan instruksi kepada Pejabat-pejabat terkait, untuk: mengambil langkah-langkah sesuai dengan bidang tugas pejabat yang bersangkutan dalam rangka menyelesaikan masalah Aceh secara komprehensif. Sedangkan pengertian komprehensif dalam kaitan ketiga Inpres ini adalah meliputi langkah-langkah di enam bidang, yaitu: politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ketertiban masyarakat, keamanan, dan infokom.

Dengan keluarnya Inpres No. 4 th 2001, Presiden Gus Dur atau pemerintah, tidak menyatakan secara terang-terangan bahwa Aceh berada dalam status “darurat sipil”. Namun, aspek atau bidang keamanan dan penegakan hukum sebagai bagian dari langkah-langkah komprehensif tersebut, tetap menempati posisi yang sentral, dan merupakan titik berat dan/ atau fokus dari upaya tersebut. Bidang keamanan dan penegakan hukum tersebut dalam prakteknya dibungkus dengan “Operasi Pemulihan Keamanan dan Penegakan Hukum (OKPH), atau sering pula disebut sebagai “Oplihkam”. Ada enam substansi yang dicakup dalam operasi OKPH tersebut, yakni:

- Tegaknya hukum,
- Pemulihan keamanan,
- Pemilihan ekonomi,
- Perundang-undangan baru tentang otonomi khusus,
- Promosi budaya Aceh, dan
- Pemilihan sosial,
- Otonomi khusus, termasuk pemberlakuan syariat Islam, mulai 1 Januari 2002.

Operasi yang seyogianya lebih berdimensi pembangunan baik ekonomi politik dan sosial budaya, yang ditujukan/dimaksudkan untuk mendampingi dan mendukung pelaksanaan dari Jeda Kemanusiaan. Namun, dalam penampilan praktisnya, terkesan seperti kurang bernuansa damai, atau tetap saja berbaa dan berwarna militeristik, dengan pendekatan security (*security approach*), seperti dengan ditangkapnya para juru

runding GAM pada bulan Juli 2001. Alasan pemerintah, khususnya apkam RI untuk memberlakukan status yang mirip darurat sipil tersebut bagi Aceh adalah, bahwa eskalasi gangguan keamanan meningkat secara signifikan. Hal yang sedemikian, disatu pihak akan dan sudah mengganggu proses damai yang sedang diupayakan oleh semua perangkat Jeda Kemanusiaan yang telah dibentuk, dan di lain pihak akan menghambat berputarnya roda pemerintahan, dan jalannya pembangunan, serta mengancam/mengganggu ketenangan dan keselamatan rakyat. Yang dibutuhkan rakyat sesungguhnya sederhana, yakni, agar mereka dapat hidup dan melakukan kegiatan ibadah, *hareukat* (mencari nafkah) dan pendidikan serta pengajian bagi putra-putrinya dengan aman, selamat, dan tenang tanpa gangguan.

Dalam konsideran dari Inpres no. 4 tersebut, tertera antara lain, bahwa:

- a. Permasalahan fundamental yang berkembang di Aceh, adalah terjadinya ketidakpuasan masyarakat dan adanya gerakan separatis bersenjata yang memerlukan penanganan secara bijak, cermat, menyeluruh, dan terpadu,
- b. Upaya pemerintah RI dalam menyelesaikan masalah Aceh melalui pendekatan persuasif dan dialog dengan gerakan separatis bersenjata di dalam dan luar negeri belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan,
- c. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Prov. Daista Aceh telah mengakibatkan keresahan yang luas dalam masyarakat dan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- d. Gangguan keamanan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan separatis bersenjata semakin meningkat sampai pada tahap tertentu yang penanganannya memerlukan upaya-upaya penanggulangan secara khusus,
- e. Penerbitan Inpres tersebut, didukung oleh hasil sidang kabinet tanggal 12 Maret 2001, dan pendapat DPR RI tanggal 28 Maret 2001, serta pendapat Dewan Pertimbangan Agung tanggal 30 Maret 2001.

Untuk setiap tahapan pelaksanaan langkah-langkah komprehensif, adalah selama 6 bulan, dan jika perlu dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian secara menyeluruh. Ini berarti tahapan pertama pelaksanaan Inpres ini adalah s/d 11 Oktober 2001. Persis pada tanggal tersebut dikeluarkan Inpres no. 7 tahun 2001, tertanggal 11 Oktober 2001, sebagai kelanjutan dari Inpres no 4, tetanggal 11 April 2001. Sedangkan jangka waktu untuk Inpres No. 7 tahun 2001 adalah 4 bulan.

Satu hari setelah keluarnya Inpres No. 4, tersebut, Gubernur Prov. Daista Aceh, dengan Surat Keputusannya No. 180. 05/089/2001, tertanggal 12 April 2001, telah membentuk Tim asistensi Pemerintah Daista Aceh di Jakarta, yang diketuai oleh Usman Hasan dengan 23 orang anggotanya yakni: Dr. Bachtiar Aly yang juga merangkap sebagai Sekretaris Tim, Sofian Effendi, Tamlicha Ali, Ir. Ibrahim Abdullah, MA., Prof. Dr. Nazaruddin Syasuddin, Drs. Said Umar Husin, Adnan Ganto, Nasruddin Hars, Amran Zamzami, SE, Pro. Dr T. Ibrahim Alfian, Prof. Dr. Teuku Yakob, Prof. Dr. Yunus Melalatoa, Dr. Sofyan Djalil, Ramli Ibrahim, SE, MM, Drs. T. Iskandar, Ir. Alauddin Cut, Ir. M. Nur Gaybita, Dr. Fajri Alihar, Ir, Bachtiar Yusuf, dan seorang anggota tidak tetap yang bergantung kebutuhan, sebagai nara sumber, yakni Ketua Taman Iskandar Muda (TIM), T. Safli Didoh. Dalam Saran dan Pertimbangan Tim asistensi ini, yang mencakup ke 6 bidang komprehensif tersbut, yang diajukan kepada Gubernur, kesemuanya difokuskan atau diarahkan kepada 3 pilar atau kunci Pembangunan Daerah dan Masyarakat Aceh secara damai, dan berkelanjutan, yakni: (1) Penyelesaian Konflik Aceh, (2) Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan (3) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Untuk memperkuat dan memperlancar, serta mengaskan pelaksanaan Inpres 4 th 2001 tersebut, Presiden Gus Dur, mengeluarkan "Maklumat pemerintah", tanpa nomor, tertanggal 4 Mei 2001 yang lebih berisi 4 seruan, yakni:

Pertama: Seluruh rakyat Aceh dihimbau agar tetap tenang dan waspada, bekerja dan beribadah sebagaimana mestinya, tidak terpengaruh oleh isu, firnah, hasutan dan adu

domba, serta pemutar balikan fakta atau kebenaran yang dilakukan oleh provokator. Percaya dan yakinlah bahwa pemerintah daerah maupun Pusat tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, serta aparat Polri dan TNI akan memberi perlindungan, pengayoman dan pengamanan secara professional dan sekuat tenaga, berkat dukungan, kerja sama dan kemanuggalan sejati dengan seluruh warga dan komponen masyarakat. Pemerintah RI sangat menyadari serta telah dan akan tetap mencatat dengan tinta emas dalam sejarah nasional, bahwa putra-putri terbaik Aceh telah berdiri di depan dan menjadi penjuror dalam perjuangan merebut, menegakkan dan mempertahankan NKRI, sehingga Aceh mendapat kehormatan sebagai modal perjuangan bangsa

Kedua: Kepada Tgk Hasan Muhammad Tiro, Pimpinan Gerakan Separatis Bersenjata Aceh yang selama ini menamakan diri sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan seluruh pimpinan lapangan, pemerintah Republik Indonesia menghimbau untuk bergabung kembali dengan rakyat Aceh, sebagai bagian tak terpisahkan dengan NKRI. Mari kita hentikan ketidakadilan, kezaliman, pertikaian, dan segala bentuk kekerasan lainnya ditanah rencong ini. Mari kita sadar bersama bahwa segala bentuk gerakan untuk memisahkan Aceh dari Republik Indonesia adalah merupakan kekeliruan besar terhadap, perjuangan, pengorbanan, kepahlawan para pendahulu Aceh, karena sesungguhnya gerakan tersebut tidak mendapat dukungan yang tulus ikhlas dari sebagian terbesar Rakyat Aceh. Tidak berlebihan kalau kita katakan, bahwa gerakan ini adalah upaya yang sia-sia, terutama karena tidak mendapat dukungan dan simpati dari dunia internasional. Lebih dari itu menutup ajaran agama Islam, upaya itu merupakan dosa besar, karena dilakukan dengan cara memutuskan tali silaturrahmi, menebar rasa permusuhan, intimidasi, fitnah, hasutan dan perbuatan munkar yang lainnya, sehingga sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat Aceh.

Ketiga: Kepada seluruh anggota, pengikut, dan simpatisan Gerakan Separatis Bersenjata Aceh atau GAM, pemerintah RI menghimbau pula untuk segera bergabung kembali bersama saudara-saudaranya dengan penuh keikhlasan dan saling memaafkan. pemerintah akan bertindak arif dan bijaksana memperlakukan saudara dengan sebaik-baiknya, tidak akan dituntut, bahkan akan direhabilitasi melalui langkah-langkah komprehensif dibidang politik, sosial budaya, ekonomi, penegakan hukum serta pemulihan keamanan dan ketertiban.

Keempat: Sedangkan kepada mereka yang tidak mengindahkan dan menyalahnyai Maklumat pemerintah ini, serta melakukan perlawanan baik langsung maupun tidak langsung, maka demi untuk melindungi, mengamankan, menyelamatkan dan menyejahterakan rakyat Aceh, serta menjaga keutuhan NKRI, pemerintah terpaksa akan segera mengambil langkah-langkah pemulihan keamanan sesuai dengan hukum yang berlaku, demi terwujudnya baldatun thoyyibatun warabbun ghafur, diwilayah seranmbi Mekah ini dan di seluruh tanah air.

Dengan disebutnya pada butir ke4, "pemerintah terpaksa akan segera mengambil langkah-langkah pemulihan keamanan sesuai dengan hukum yang berkaku", menjadi semakin mudahlah diduga bahwa "sebentar lagi" akan digelar suatu operasi keamanan. Operasi itulah yang kemudian bernama OPHK, atau oplihkam, sebagaimana telah diulas di atas.

Inpres no. 7 th 2001, tertanggal 11 Oktober 2001, konsiderannya persis sama dengan Inpres No. 4 tahun 2001 pendahulunya, kecuali dalam hal penyebutan Daerah Istimewa Aceh digantikan dengan Nanggrou Aceh Darussalam, dan sebagaimana dikatakan di atas, merupakan kelanjutan (dan mungkin juga peningkatan) dari operasi sebelumnya. Saat itu Undang-Undang Nanggrou Aceh Darussalam (UU NAD) sudah atau baru saja disahkan oleh DPR RI.

Rincian dari instruksinya juga hampir mirip.

Demikian pula, ditetapkannya Inpres No. 1 tahun 2002, tertanggal 10 Februari 2002, adalah sebagai akibat semakin memburuknya kondisi dan situasi, walaupun

Inpres 7, tanggal 11 Oktober 2001 telah berakhir masa berlakunya. Judul dari Inpres No. 1 tahun 2002 adalah “Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh”. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan pemulihan keamanan dan juga penegekan hukum dalam rangka Inpres no. 1 th 2002 ini, disebut sebagai “operasi terpadu”. Jadi Inpres No 1 tahun 2002, tidak saja sebagai kelanjutan dari inpres-inpres sebelumnya tetapi juga merupakan peningkatan dari Inpres No. 4 tahun 2001 dan Inpres No. 7 tahun 2001.

Usaha lain yang menyertainya selain hal-hal yang berkenaan dengan pembangunan daerah dan masyarakat, juga yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejak berelakunya Inpres no. 7 th 2001, yang diteruskan dengan Inpres no. 1 th 2002, dilaksanakan pula apa yang disebut sebagai “operasi terpadu”, sebagai pengganti oplihkam, sebelumnya.

Perlu dicatat, bahwa dalam konsideran Inpres No. 4 th 2001 tersebut, disebutkan secara terang, bahwa di Aceh ada “gerakan separatis bersenjata”. Menurut catatan, ini adalah baru pertama kali secara tertulis, apalagi dalam dokumen resmi yang berkualifikasi hukum positif, bahwa gerakan separatis diakui ada di Aceh. Sebelumnya pemerintah atau apkam RI lebih senang menggunakan istilah, GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), atau GPLHT (Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro, atau gerakan-gerakan pengacau atau pengganggu keamanan lainnya. Bahkan dalam Inpres No. 1 tahun 2002, secara terang-terangan pula menyebutkan dalam konsiderannya, bahwa “gerakan separatis bersenjata” menamakan dirinya “Gerakan Aceh Merdeka”. Ini tentunya dapat dianggap sebagai pengakuan resmi dari pemerintah bahwa gerakan yang ada di Aceh tersebut, adalah gerakan yang hendak memisahkan diri dari RI (separatis). Jadi dia adalah tergolong entity atau makhluk politik, bukan kriminal, atau teroris, paling tidak untuk saat ini. ***



BAB 13

KEMBALI KE MEJA PERUNDINGAN

Upaya Damai Presiden Megawati Soekarnoputri

MEGAWATI menggantikan Gus Dur sebagai Presiden RI, sejak bulan Juli 2001, setelah beliau terpilih dalam sidang MPR RI. Beliau meneruskan upaya damai melalui dialog dengan pimpinan GAM. Bagi Megawati, penyelesaian masalah Aceh secara damai melalui dialog, bukanlah semata-mata karena hendak meneruskan kebijakan Presiden sebelumnya. Tetapi memang telah menjadi tekad beliau (mungkin juga telah menjadi sikap partai beliau, PDIP) semenjak sebelum menjadi Presiden. Hal itu terkesankan dari pidato beliau ketika berkunjung ke Aceh sebagai Ketua Umum PDI, (dalam rangka kampanye untuk Presiden RI), beberapa waktu sebelumnya sebagai berikut: “Saudara-saudaraku di Aceh, bersabarlah; bila kelak Cut Nyak memimpin negeri ini, tidak akan saya biarkan setetes pun darah rakyat menyentok bumi tanah rencong”

Dalam pidato Presiden Megawati tersebut, beliau juga menyebutkan antara lain:

1. Jasa-jasa Rakyat Aceh yang cukup besar dalam menghadapi kolonial Belanda, Jepang, dan sekutu, serta dalam mempertahankan kemerdekaan RI, oleh karenanya, Aceh diberi status oleh Presiden RI yang pertama, sebagai daerah modal; perlu dihargai sewajarnya dan proporsional.
2. Salah satu cara penghargaan tersebut, adalah dengan membangun Aceh agar mampu mengejar ketertinggalannya di segala bidang, agar Aceh lebih sejahtera dari sekarang.
3. Oleh karenanya pula, rakyat Aceh sendiri, haruslah bertekad untuk membangun dirinya sendiri dan jangan terbelenggu oleh kepehitan masa lalu, mari menatap ke depan yang lebih cerah.
4. Di hadapan kita selain banyak harapan yang akan diraih, juga tidak kurang tantangan, yang harus dihadapi dengan penuh semangat kejuangan, heroisme dan patriotisme yang tinggi, yang saya yakin dipunyai oleh rakyat Aceh.
5. Konflik Aceh yang berkelanjutan, hanya dapat diselesaikan oleh rakyat Aceh sendiri, secara damai dan dengan berunding, terutama yang menyangkut aspek keamanan dan penegakan hukum.

Dengan tekad seperti itulah, setelah terpilih menjadi Presiden, beliau meneruskan upaya damai dan dialog, yang telah dilakukan oleh pendahulu beliau. di lain pihak, semakin disadari bahwa masalahnya sangat kompleks dan serba dimensi, baik yang menyangkut aspek pemerintahan, dan pembangunan, lebih-lebih lagi aspek keamanan dan penegakan hukum. Dimaklumi pula, bahwa kondisi dan situasi keamanan dan ketertiban serta aspek hukum di tengah-tengah masyarakat, relatif memburuk. Dengan

kesadaran yang demikianlah dan dihadapkan dengan keinginan untuk membangun Aceh secara proporsional, terutama dengan mendayagunakan sumber daya di daerah, maka Presiden menerbitkan Inpres No. 7 th 2001 tertanggal 12 Oktober 2001, dan kemudian Inpres No. 1, th 2002, tertanggal 10 Februari 2002, yang sesungguhnya merupakan kelanjutan dan peningkatan serta percepatan dari langkah-langkah komprehensif berdasarkan Inpres no. 4 tanggal 12 April 2001, di masa Presiden Gus Dur. Dengan berdasarkan kedua Inpres tersebut dilaksanakan apa yang disebut sebagai Operasi Terpadu, sebagai peningkatan operasi Oplihkam sebelumnya, sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh.

Namun, sebelum memasuki arena perundingan, ada beberapa kejadian yang patut disimak perkembangannya.

Kodam Iskandar Muda

Wacana pembentukan Kodam Iskandar Muda, sudah mulai bergulir sejak awal tahun 2002, namun isu tersebut timbul tenggelam. Dulu jauh sebelumnya, Aceh telah pernah mempunyai Komando Angkatan Darat sendiri terpisah dengan daerah lainnya, yakni ketika pada tanggal 22 Desember 1956, dibentuk KDMA (Komando Daerah Militer Aceh), dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts-358/12/1956, tanggal 27 Desember 1956, dengan Komandanya yang pertama adalah Mayor Syamaun Gaharu. KDMA kemudian berubah menjadi Kodam-I (Komando Daerah Militer-I) Iskandar Muda. Sebelumnya Aceh adalah bagian dari Teritorium I Bukit Barisan (TT-I/BB), yakni sebagai Resimen -I, TT-I/BB, yang komandannya yang terakhir adalah juga Syamaun Gaharu. Dibentuknya KDMA, sesungguhnya berlatar belakang kejuangan dan kesetiaan kepada RI, dan sebagai akibat dari membelotnya (atau memberontaknya) Panglima Kodam-I Bukit Barisan, Kol. Maluddin Simbolon, dengan Dewan Gajahnya. Setelah mengalami pergantian sebanyak 6 Panglima dengan satu *care taker* Panglima, kemudian dengan alasan efisiensi dan penghematan, Kodam-I Iskandar Muda, kembali dilebur dan digabung ke dalam Kodam II Bukit Barisan yang berkedudukan di Medan, yang kemudian menjadi Kodam-I Bukit Barisan. Aceh kembali menciut sebagai resimen dari Kodam Bukit Barisan tersebut, yakni Resimen Lilawangsa berkedudukan di Lhokseumawe dan Resimen Teuku Umar berkedudukan di Banda Aceh.

Degan alasan yang dikemukakan oleh Pangab Jendral Benny Murdani ketika itu, bahwa untuk efisien dan penghematan, maka memang yang terkena penciptaan ini bukanlah hanya Kodam di Aceh saja, beberapa Kodam lainnya juga kena. Sejak saat itulah semua urusan dengan Kodam, semua haruslah berurusan ke Medan, tidak lagi di Banda Aceh, sementara di Aceh hanya urusan tingkat dua Korem/Danrem. Seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh, terbagi habis menjadi teritorial binaan kedua Korem tersebut. Apakah menjadi tertegunnya pembentukan Kodam tersebut, karena adanya berbagai protes atau ketidaksetujuan sebagian masyarakat yang disuarakan oleh LSM-LSM tertentu, atau karena memang persiapannya belum matang, tidak ada yang tahu persis duduk perkaranya.

Gubernur NAD dan juga DPRD, bersepakat untuk mengusulkan atas nama rakyat Aceh, agar Kodam Iskandar Muda segera dibentuk. Sering pula di kalangan tertentu mengembalikannya dengan persyaratan tambahan, yakni, "kalau dapat Kodam Iskandar Muda tersebut dipimpin oleh perwira TNI putra Aceh". Bagi yang menantangnya, mangemukakan argumentasi, antara lain:

- Bukan waktunya lagi saat ini mengandalkan cara-cara militeristik untuk menyelesaikan masalah Aceh.
- Berbagai data dan fakta bahwa pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM, selalu meningkat secara berbanding lurus (linier), dengan bertambahnya atau semakin berperannya militer di Aceh. Oleh karenanya mereka keberatan.

- Kodam selalu berkonotasi pasukan militer, dan militer selalu terkait dengan kekerasan, dan rakyat sudah sangat trauma menghadapi kekejaman dan kekerasan. Sedangkan pihak yang dapat memahami dan juga yang mendukungnya, mengemukakan pertimbangan pula, antara lain:
- Dengan adanya Kodam, akan lebih memudahkan putra-putri Aceh yang berminat, dan memenuhi persyaratan, untuk menjadi perwira, bintara dan bahkan tamtama ABRI. Alasan tersebut diilustrasikan dengan bukti-bukti, bahwa ketika ada Kodam di Aceh, relatif lebih banyak putra daerah Aceh dapat masuk dan diterima sebagai peserta didik dan latih di berbagai jenis dan jenjang lembaga pendidikan dan latihan ABRI.
- Dengan adanya Kodam, akan dapat merekrut personil TNI organik yang lebih banyak, dan akan terbuka bagi pemuda/ pemudi Aceh untuk memanfaatkannya, sebagai lapangan kerja. Demikian pula segala urusan ketenteraan, termasuk berkenaan dengan pensiun, veteran, Angkatan '45, dan sebagainya, dapat diurus/diselesaikan di Kodam Aceh, tidak perlu ke Kodam daerah lainnya.
- Proses penyelesaian damai dan/atau melalui dialog, jika suatu ketika harus melibatkan atau terlibat orang-orang militer selain orang-orang sipil atau masyarakat lainnya, diperkirakan akan lebih mudah jika hal itu dilakukan oleh putra-putri Aceh sendiri, dengan menggunakan nilai-nilai kultural yang sama.

Akhirnya dibentuklah Kodam tersebut dengan nama Kodam Iskandar Muda, sering disingkat dengan Kodam IM, pada tanggal 5 Februari 2002, dengan wilayah kerjanya melingkupi seluruh Provinsi NAD, dan diangkat pulalah Birgjen Djali Yusuf, seorang putra Aceh sebagai Panglimanya. Tidak lama kemudian beliau pun dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jendral TNI.

UU tentang Otonomi Khusus NAD

Persisnya bernama UU No. 18 Tahun 2001, tentang otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggrou Aceh Darussalam, yang secara populer disebut UU Nanggrou Aceh Darussalam, disingkat sebagai: UU NAD. Isi UU NAD ini sesungguhnya menampung isi UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, ditambah dengan unsur-unsur yang dikandung berbagai UU lainnya, baik yang berkenaan dengan Aceh, maupun berhubungan dengan Otonomi Daerah atau pemerintahan Daerah.

UU NAD tersebut terdiri dari 14 Bab dan 34 Pasal, yang sesungguhnya adalah yang telah menjadi wacana di tengah-tengah masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra. Pihak GAM, sejak semula menolak UU ini, bersama dengan mereka menolak status otonomi khusus bagi Aceh. Hal itu dapat dipahami, karena yang mereka perjuangkan adalah Kemerdekaan bagi Aceh dan bukan otonomi khusus. Kecuali soal otonomi khusus, isinya sesungguhnya sejalan dengan hal-hal yang sering dikeluhkan masyarakat. Untuk mengetahui secara umum isinya, dapat dilihat dari kerangkanya sebagai berikut:

BAB I: Ketentuan Umum, berisi 1 Pasal, dengan 14 butir.

BAB II: Susunan dan Kedudukan Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam, berisi 1 Pasal, dengan 6 butir.

BAB III: Kewenangan Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam, berisi 1 Pasal dengan 2 butir.

BAB IV: Keuangan Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam, berisi 4 Pasal, dengan 17 butir.

BAB V: Lambang termasuk Alam di Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam, berisi 1 Pasal, dengan 3 butir.

BAB VI: Lembaga Legislatif Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam, berisi 1 Pasal, dengan 8 butir.

BAB VII: Wali Nanggrou dan Tuha Nanggrou sebagai Penyelenggara Adat, Budaya, Pemersatu Masyarakat, berisi 1 pasal, dengan 3 butir.

BAB VIII: Badan Eksekutif Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam, berisi 4 Pasal, dengan 21 butir.

BAB IX: Pemilih dan Hak Pemilih, berisi 4 Pasal, dengan 6 butir.

BAB X: Kepolisian Daerah Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam, berisi 3 Pasal, dengan 13 butir.

BAB XI: Kejaksaan Provinsi Nanggrou Nanggrou Aceh Darussalam, berisi 1 Pasal dengan 3 butir.

BAB XII: Mahkamah Syariah Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam, berisi 2 Pasal, dengan 6 butir.

BAB XIII: Ketentuan Peralihan, berisi 4 Pasal, dengan 4 butir.

BAB XIV: Ketentuan Penutup, berisi 4 Pasal, dengan 4 butir.

Beberapa ketentuan yang diaturnya, yang bernuansa krusial, dan atau yang ramai dibicarakan masyarakat antara lain adalah:

1. Yang disebut dengan pemerintah pusat adalah Perangkat NKRI yang terdiri dari Presiden dan para Menteri.
2. Provinsi NAD adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang diberi otonomi khusus, dalam kerangka NKRI.
3. Waki Nanggrou dan Tuha Nanggrou adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya dan pemersatu masyarakat, di Provinsi NAD.
4. Mahkamah Syari'ah Provinsi NAD, adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi NAD yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.
5. Qabun Provinsi NAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan UU di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
6. Lambang daerah termasuk alam atau panji kemegahan adalah lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi NAD.
7. Lambang daerah yang di dalamnya termasuk alam, bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diperlakukan sebagai bendera kedaulatan di Provinsi NAD.
8. Bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Bagian dari penerimaan PBB, sebesar 90%,
 - Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. sebesar 80%,
 - Pajak penghasilan orang pribadi, sebesar 20%,
 - Penerimaan sumber daya alam sektor kehutanan, sebesar 80%,
 - Penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan umum, sebesar 80%,
 - Penerimaan sumber daya alam sektor Perikanan, sebesar 80%,
 - Penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan minyak Bumi, sebesar 15%,
 - Penerimaan sumber daya alam sektor Pertambangan Gas, sebesar 30%.
9. Provinsi NAD dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya
10. Pinjaman dari luar negeri untuk Provinsi NAD harus mendapat persetujuan DPRD Provinsi NAD dan pemerintah dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Lahirnya UU NAD tersebut disambut gembira, oleh rakyat Aceh pada umumnya, walaupun ada juga yang menyambutnya dengan dingin, terutama berkenaan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang syariat Islam. Namun, di tengah-tengah kontroversi di kalangan tertentu tersebut, muncul "Seruan Bersama" dari 11 instansi pemerintah tingkat Provinsi NAD, yakni Gubernur, Ketua DPRD, Majelis Permusyawaratan ulama, Kepala Kepolisian Daerah, Dan Kolak OPS Polri, Pang Kolak OPS TNI, Kepala Kejaksaan

Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, Lembaga Adat dan Kebudayaan, Rektor Universitas Syiah Kuala, dan Rektor IAIN Ar Raniry, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Segenap lapisan masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar daerah, kami mengajak untuk sama-sama membangun Aceh masa depan dalam suasana Islami, aman dan damai.
2. Kepada saudara-saudara kami yang selama ini memperjuangkan keadilan dengan cara-cara kekerasan, kami mengajak untuk sama-sama bersyukur dengan telah disahkannya Undang-Undang Nanggrou Aceh Darussalam sebagai salah satu media atau alat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat.
3. Bagi saudara-saudara kami yang telah dengan sadar ingin kembali bersama-sama membangun Nanggrou Aceh Darussalam akan diperlakukan dengan baik, manusiawi, bebas dari tuntutan hukum dan dijamin keamanannya dan akan direhabilitasi nama baiknya, sehingga tetap memperoleh hak-hak sebagai warga negara.
4. Kepada saudara-saudara kami tersebut di atas yang memenuhi seruan ini, agar segera melaporkan kepada:
 - a. Geusyhik, imam desa, imum mukim, atau camat, danramil, atau kapolsek, atau bupati, dandim, atau kapolres, atau ulama dayah, Ketua MPU, atau gubernur, kapolda, danrem 011/Lilawangsa dan danrem 012/Teuku Umar
5. Kepada segenap aparat sipil, TNI/Polri, Ormas, dan Orpol, supaya dapat bertindak secara arif dan bijaksana, edukatif persuasif serta menerima dengan ikhlas saudara-saudara kita dengan menghilangkan rasa dendam, saling tolong-menolong. Dan memupuk uchuwah Islamiyah, untuk mewujudkan masyarakat adil, dan makmur Baldatun Thaibatun Warabbun Ghafur.

Seruan Bersama tersebut ditandatangani oleh Ir. Abdullah Puteh, Msi., sebagai Gubernur Prov. NAD, Dr. Tgk. Muhammad Yus, sebagai Ketua DPRDF Prov. NAD, Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan ulama (MPU), Brigjen Pol. Drs Ramli Darwis, Kapolda Pov. NAD, Brigjen Pol. Drs. Herman, SS, sebagai Dan Kolak Ops Polri, Brigjen Inf. Zamroni, Pang Kolak Ops TNI, Sunaryo RL, SH., Kajati. NAD, H. Suryanto, SH., a/n Ketua Pengadilan Tinggi, Prov. NAD, Prof. T. Syamsuddin, MS, Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Prov. NAD, Prof. Dr. Dayan Dawood, MA., Rektor Unsyiah, dan Dr. Rusydi Ali Muhammad, SH., Rektor IAIN Ar Raniry.

Rencana Pelaksanaan KRA yang Gagal di Aceh

Berawal dari keputusan rapat Forum Kepedulian Aceh (FORKA) suatu LSM masyarakat Aceh di Jakarta, yang diketuai oleh H. Ismail Hasan Metareum (mantan wakil ketua DPR RI, dan mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (P3), untuk pada waktu yang tepat akan melaksanakan Kongres Rakyat Aceh, disingkat KRA, di Aceh. Jakarta hanya penggagasnya saja, sedangkan panitianya diharapkan akan lebih banyak terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Aceh. Ditambah dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan Aceh di beberapa kota, di seluruh Indonesia. dalam rapat para penggagas yang dilangsung di Banda Aceh, terpilih H. Ismail Hasan Metareum sebagai Ketua Penasihat Panitia, dan Tgk. H. Syamaun Risyad dari Lhokseumawe sebagai Ketua Umum Panitia, ketua Harian Panitia, Prof. Dr. Abdullah Ali, dengan wakil ketua antara lain Drs. Djamaluddin. Keputusan lainnya yang dicapai adalah, bahwa dalam kepanitiaannya, akan terlibat secara signifikan, para aktivis di Aceh, termasuk aktivis dan pejuang referendum dari SIRA. Namun, dalam perjalanan dan persiapan-persiapannya, rencana KRA ini sangat banyak mengalami hambatan, bahkan pihak GAM secara terang-terangan menyatakan menolak KRA. Walaupun sebaliknya GAM dari faksi MP GAM yang disuarakan oleh Sekjen Don Zulfahry sangat mendukung dilaksanakannya KRA.

Rencana pelaksanaan hajad besar ini sudah dilaporkan oleh Ketua Penasihat Panitia kepada wakil Presiden RI, dan mendapat sambutan serta dukungan beliau. Demikian pula beberapa pejabat lain di tingkat nasional dan bahkan di tingkat daerah juga mendukungnya. Namun, yang menentang KRA tersebut semakin mengeras, sedangkan di lain pihak banyak personil panitia ragu-rahu bahkan setengah hati dalam kegiatan-kegiatan persiapannya. Demikian kerasnya tantangan terhadap KRA, sampai-sampai rumah Ketua Umum Panitia, Tgk. Syamuan Risyad, bahkan dua buah rumah sekaligus, dibakar habis oleh orang tak dikenal, yang diikuti dengan ancaman terhadap diri dan keluarga beliau, agar beliau segera membatalkan pelaksanaan KRA tersebut. Selain itu Kantor sekretariat Panitia KRA di Banda Aceh pun mendapat teror berupa lemparan granat yang memporak-porandakan ruangan dan apa saja yang ada dalam ruangan tersebut. Tadinya direncanakan KRA tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2000. Dengan alasan bahwa Jeda Kemanusiaan telah ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2000, di Bavois, Swiss, dan kita perlu memberi waktu yang cukup untuk kedua pihak (Pem RI dan GAM) melaksanakan kesepahaman tersebut, maka KRA, akhirnya pada tanggal 4 Juni 2000, dinyatakan dibatalkan, dan walaupun ada embel-embel “untuk sementara waktu”, dan panitianya pun akan segera pula dibubarkan.

Rencana KMPPMA yang Gagal di Medan

Sementara itu timbul pula gagasan untuk melaksanakan Kongres mahasiswa, pemuda, pelajar dan masyarakat Aceh, yang kedua (KMPPMA-II), yang dipraksai oleh M. Nur Nikmat, bersama, salah seorang penggagas dan pelaksana KMPPMA-I pada tanggal 15-19 September 1956 di Medan, bersama Prof. Dr. H. M Jusuf Hanafiah SPOG, dan Prof. H. T. Syamsul Bahri, SH.. KMPPMA-I, dilaksanakan oleh masyarakat Aceh Medan, untuk mengantisipasi dan mencari solusi yang terbaik dari Peristiwa DI/TII yang meletus sejak 21 September 1953. Temanya cukup menggugah dan mengigit yakni: “jangan ada lagi orang mati terbunuh di Aceh”. Pendukung utama dari gagasan ini adalah masyarakat Aceh yang ada di Jakarta, utamanya Bustanul Arifin yang sering disapa dengan Pak Bus. Selain itu rencana ini juga didukung oleh para pejabat dan masyarakat cinta damai di Aceh serta masyarakat di kota-kota lainnya di Indonesia. di mana pun mereka berada. Dengan spontan Pak Bus memberikan uang panjar untuk persiapan panitia di Medan. Ketua Umum panitia adalah M. Nur Nikmat, dengan Sekretaris Umum, Bustami Usman, dibantu oleh para pengurus Aceh Sepakat dan IPTR. Diharapkan oleh Pak Bus, agar sebanyak mungkin mengikut sertakan tokoh masyarakat di Aceh, termasuk ulama dan mahasiswa, baik sebagai panitia, maupun sebagai pesertanya nanti. Perhelatan tersebut semula direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 31 Maret 2000, di Hotel Emerald, Medan, kemudian berubah menjadi tanggal 31 April s/d 4 Mai, 2000 di Komplek Asrama Haji, Medan.

Tadinya ada wacana, untuk menyatukan saja pelaksanaan KMPPMA-II tersebut dengan KRA (Kongres Rakyat Aceh) di Banda Aceh, atau di Aceh. Namun, karena pertimbangan, jika dilaksanakan di Medan, para peserta akan lebih tenang dan lebih berani untuk datang menghadirinya, serta lebih bebas pula dalam beriyur pikiran dan ideide ketimbang di Aceh, yang siapa saja akan selalu berada dalam bayang-bayang pihak-pihak tertentu, maka akhirnya diputuskan tetap dilaksanakan di Medan. Para pemerakarsa dalam mempersiapkan pelaksanaan fisiknya dan juga materinya, serta *set up* mekanismenya, sangat dipengaruhi oleh suksesnyan KMPPMA-I, 44 tahun yang lalu. Malahan ada yang berpendapat, dan hal itu dituliskan dalam salah satu penjelasan Steering Committe (SC KMPPMA-II), bahwa KMPPMA-II dan KRA sesungguhnya tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan. Hasil-hasil dari KMPPMA-II nantinya akan menjadi masukan utama bagi dan bermuara ke dalam KRA. KRA itulah yang dapat dianaloginya dengan “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MUKRA)” di Blang Padang, Banda Aceh, ketika penyelesaian DI/TII, mencapai puncaknya, dan di sanalah terjadi apa sering disebut dengan Rekonsiliasi Akbar, antara semua pihak. Selain itu M. Nur Nikmat dan teman-teman panitia lainnya, juga membayangkan bahwa keputusan-

keputusan, dari KMPPMA-II tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penyelesaian tuntas konflik yang berkepanjangan tersebut, katakanlah semacam, “Konsepsi Prinsipil Bijaksana”nya model tahun 1956, di mana pencetusnya adalah Syamaun Gaharu.

Sayang, nasib yang dialami oleh KRA di Banda Aceh kembali dialami juga oleh KMPPMA-II, di Medan, tetapi bukan karena adanya ancaman, ataupun penolakan pihak-pihak tertentu dari kalangan masyarakat atau LSM Aceh, tetapi lebih menyangkut ke persoalan birokrasi pemerintahan. Pertama-tama Gubernur Sumut, dalam hal ini Kadit Sospol, dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2000, tidak memberi izin atau tidak dapat merekomendasi pelaksanaan KMPPMA-II ini di Medan, bahkan menyarankan walaupun tetap dilaksanakan, agar pelaksanaannya di luar Provinsi Sumut. Jawaban tertulis dari Kadit Sospol, yang bernama Drs. H. M. Nasir tersebut, dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2000, yang katanya sesuai dengan keputusan rapat Muspida, tgl 25 Maret 2000, yang menyatakan bahwa KMPPMA, “belum dapat direkomendir” sungguh menyakitkan. Seolah-olah Masyarakat Aceh di Medan dan Sumut benar-benar sebagai orang yang menumpang di rumah orang lain, atau warga kelas dua, yang tidak mempunyai hak yang sama dengan warga Sumut lainnya. Sungguh sangat diskriminatif, dan benar-benar melanggar hak demokrasi atau hak untuk berkumpul dan berbicara sebagai warganegara Indonesia di bumi Indonesia sendiri, yang dijamin oleh UUD tahun 1945, setelah 4 kali perubahan. Walaupun dalam suratnya yang kedua, tertanggal 19 April, 2000 Kadit Sospol yang sama a/n Gubernur Sumut, menyatakan antara lain: bahwa pada dasarnya Pemda Sumatra Utara, tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Kongres dimaksud, tanpa menyebut-nyebut keputusan rapat Muspida. Namun, mengingat Izin tersebut sangat terlambat diterima oleh Panitia, sedangkan pelaksanaannya membutuhkan persiapan yang matang, maka KMPPMA-II dibatalkan pelaksanaannya oleh Panitia.

Memasuki Arena Perundingan

Pada tanggal 2-3 Februari, 2002, *HDC for Humanitarian Dialogue*, menjadi tuan rumah dari pertemuan yang sangat konstruktif antara perwakilan pemerintah Indonesia dan pimpinan GAM. Kedua pihak sepakat untuk pertemuan berikutnya untuk membahas substansi-substansi berikut ini sejauh diperlukan dan jika dimungkinkan. Untuk itu kedua pihak setuju untuk bertemu lagi dalam waktu dekat, untuk mengevaluasi hal-hal yang telah disepakati sebelumnya. dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa point (substansi), yang menurut terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

1. Setuju menggunakan UU NAD sebagai titik berangkat untuk diskusi lebih lanjut, (*agreeing to use the NAD law as starting point for discussion*), kedua pihak setuju adanya periode untuk membangun kepercayaan, untuk mana mereka akan menghentikan permusuhan dan kemudian bergerak maju ke arah pemilihan umum yang demokratis di Aceh pada tahun 2004.
2. Menerima keinginan rakyat Aceh untuk mengatur dirinya sendiri secara damai.
3. Menyayangkan hilangnya nyawa di Aceh dan mengingatkan kebutuhan agar semua pihak menghormati HAM dan hukum kemanusiaan, sepanjang waktu.
4. Mempertimbangkan Kesepahaman Sementara tgl 9 Januari 2001 antara pemerintah RI dan GAM.
5. Kedua pihak setuju adanya periode untuk membangun kepercayaan dalam bentuk tahapan berikut:
 - a. penghentian permusuhan dan semua tindak kekerasan pada tahun 2002.
 - b. *all inclusive* dialog politik yang transparan untuk Aceh pada tahun 2002-2003.
 - c. pemerintah Aceh yang dipilih secara demokratis melalui pemilu pada Mei 2004.

d. *mereview* semua proses tersebut oleh kedua pihak.

Kedua pihak setuju terhadap langkah-langkah berikut ini:

- a. Untuk bertemu dalam 30-45 hari untuk menyepakati langkah-langkah konkrit untuk menjamin penghentian permusuhan yang efektif dan menyeluruh.
- b. Untuk bertemu 30 hari kemudian untuk mendiskusikan *all-inclusive* dialog politik yang transparan untuk Aceh

Sesuai kesepakatan rapat tanggal 2-3 Februari 2002, maka pada tanggal 10 Mei 2002 diadakan pertemuan lanjutan antara pihak perwakilan pemerintah RI dengan perwakilan Pimpinan GAM. bertempat di Swiss, dan akhirnya menyepakati suatu "Pernyataan Bersama (Joint Statement)", yang teks lengkapnya sebagai berikut:

Joint Statement

By

The Government of the Republic of Indonesia

and

The Free Aceh Movement

Recognizing that progress has been made in previous understandings, but also recognizing the difficulties experienced in implementing these understandings, the parties have agreed to the Points for Further Consultations set in their 2-3 February 2002 meeting, and further agree:

- on the basis of the acceptance of the NAD Law as a starting point, as discussed on 2-3 February 2002, to a democratic all-inclusive dialogue, involving all elements of Acehnese society that will be facilitated by HDC in Aceh. This process will seek to revive elements of the NAD Law through the expression of the views of the Acehnese people in a free and safe manner. This will lead to the election of a democratic government in Aceh, Indonesia.*
- to enable this process to take place both parties agree to work with all speed in an agreement on cessation of hostilities with an adequate mechanism for accountability of the parties to such an agreement.*

This will also provide the opportunity and environment for much needed socio-economic and humanitarian assistance to the people of Aceh.

Both parties agree to a process of periodic review of the implementation of these understandings.

Done in Switzerland, on 10 May 2002

For the Government of the Republic of Indonesia, Free Aceh Movement,

Amb. Mr. S. Wiryono Dr. Zaini Abdullah

Sebagaimana tertera di atas, dalam diskusi untuk tahap ini, pimpinan delegasi Indonesia adalah Duta Besar Wiryono, seorang diplomat karir kawakan, yang telah malang melintang dan kenyang dengan pengalaman berunding di mana-mana. Sedangkan dari pihak GAM tetap penandatangan kesepakatannya adalah Dr. Zaini Abdullah, yang konon ceriteranya, masih mempunyai hubungan keluarga dengan Hasan Tiro.

Jika dibedah "Joint Statement", berikut dengan "Point for Further Consultations" tersebut, dengan mudah ditemui, ada 4 substansi yang selain baru juga menonjol dan

sangat strategis posisinya, dalam rangka penyelesaian masalah Aceh secara damai, melalui proses dialogis, sebagaimana diungkapkan oleh Wiryono¹¹⁹⁹, yaitu:

The acceptance of NAD Law as a starting point atau penerimaan UU tentang NAD (atau otonomi khusus NAD), sebagai titik berangkat.

Cessation of Hostilities atau penghentian permusuhan,

All Inclusive Dialogue atau dialog dengan semua Kelompok Strategis Masyarakat.

Democratic Election, atau pemilu yang demokratis untuk memilih pemerintah Aceh.

Baru, karena: UU tentang otonomi khusus, adalah suatu status bagi Aceh yang baru ditetapkan oleh DPR RI bersama pemerintah, sebagai peningkatan dari status sebelumnya, baik yang ditetapkan dengan UU No. 22 tahun 1999, tentang pemerintahan Daerah, maupun UU No. 44 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Jadi otonomi khusus, dengan sebutan baru bagi Aceh sebagai Nanggrou Aceh Druslam, adalah lebih dari otonomi biasa yang diberlakukan untuk Provinsi-provinsi Indonesia lainnya, dan juga lebih dari sekedar adanya keistimewaan Aceh di bidang-bidang:

- penyelenggaraan kehidupan beragama,
- penyelenggaraan kehidupan adat,
- penyelenggaraan pendidikan, dan
- peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Baru, karena: Penghentian Permusuhan, adalah sesuatu yang lebih dari penghentian kekerasan (*cessation of violence*), yang sering disebut-sebut selama ini. Dia tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya fisik dan berkenaan dengan hal-hal materialistik, tetapi juga menyangkut, hati nurani, perasaan, sikap, dan suasana batin yang mendalam, yang kesemuanya merupakan ramuan utama dari penumbuhan kepercayaan (*confidence building*).

Baru, karena: *all inclusive dialogue*, adalah pelibatan secara aktif dan positif semua unsur masyarakat, melalui keikutsertaan semua kelompok strategis masyarakat, dalam dialog untuk memikirkan dan menentukan masa depan Aceh, tidak hanya tergantung kepada pemerintah RI dan GAM saja. Aceh tidak hanya milik pemerintah RI dan GAM, tetapi milik seluruh rakyat Aceh; laki-perempuan, tua-muda, besar-kecil, dan tinggi-rendah pangkat/statusnya.

Baru, karena Pemilu yang Demokratis, adalah pemilu yang menjadi idaman dan dambaan seluruh rakyat, apalagi mengingat berbagai gunjingan, seolah-oleh pemilu-pemilu yang lalu, terutama di Era Orde Baru, sepertinya atau dituduh sebagai kurang demokratis.

Tetapi sayang, sesuatu yang mulanya bagus, yang diawali oleh niat yang suci, agak sulit dan tersendat untuk meneruskannya, disebabkan beberapa faktor, antara lain:¹²⁰⁰

- Berbeda dan bahkan bertentangnya panafsiran (interpretasi), antara pihak-pihak yang berunding yakni perwakilan pemerintah RI dan perwakilan Pimpinan GAM, tentang beberapa substansi penting, terutama tentang: "*acceptance of NAD Law as starting point*". GAM sesungguhnya, atau ternyata tidak menerima UU tentang otonomi khusus NAD tersebut, walaupun sebagai starting point sekalipun.
- Adanya berbagai pernyataan yang tergolong "Hawkish Statement" dengan menggunakan istilah Wiryono. Statement itu biasanya dilontarkan kalangan militer dari kubu "garis keras", dan masyarakatpun tahu siapa mereka, karena sering dikutip oleh media massa. Mereka sesungguhnya tidak setuju dengan cara damai atau dialog untuk menyelesaikan masalah Aceh.

¹¹⁹⁹ Wiryono, dalam makalahnya.

¹²⁰⁰ Wiryono, *ibid*.

- GAM melakukan serangan membabi buta (*indiscriminate attack*), dan masih saja melakukan pemerasan kepada masyarakat, serta kekerasan lainnya.
- Aparat keamanan RI, masih melakukan kekerasan, baik dalam bentuk *sweeping*, penyetapan, pemasangan *block*/penghalang di jalan, maupun pemerasan atau pungli.

Karena kejadian-kejadian atau perkembangan negatif yang sedemikian maka menurut Wiryono, dialog beralih dari tadinya *discreet and quiet diplomacy* menjadi *megaphone diplomacy*, dan perundingan menjadi terhenti (untuk sementara), masing-masing memerlukan waktu dan kemauan politik untuk menghidupkan kembali proses perundingan.

Perundingan/dialog pun terhenti untuk beberapa lama.

Kemudian Menko Polkam Susilo Bambang Yudoyono, yang lazim disapa dengan SBY, berusaha menghancurkan kebekuan es (*breaking the ice*) tersebut, dan mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali proses Jenewa. Langkah awal beliau adalah mengadakan pertemuan konsultatif dengan HDC dan Anthony Zinni, seorang Jenderal Amerika Serikat, di Singapura, pada tanggal 4 Agustus 2002, yang lalu diikuti dengan kunjungan HDC dan Zinni ke Jakarta dan Aceh, pada tanggal 5-7 Agustus 2002. Jadi pemerintah telah menunjukkan komitmennya dan juga kemauannya untuk meneruskan dialog, sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah Aceh, secara damai, bukan dengan kekerasan. Dari serangkaian kegiatan tersebut, termasuk sidang Kabinet pemerintah RI kemudian menyatakan sikapnya pada tanggal 19 Agustus 2002, antara lain: dialog dengan GAM dapat dilanjutkan dengan prasyarat GAM menerima UU No. 18 th 2001, tentang Nanggrou Aceh Darussalam (NAD), atau yang sering disebut dengan UU NAD (*NAD Law*), dan diberi waktu kepada GAM sampai dengan setelah bulan Ramadhan serta dialog yang akan datang haruslah mengacu kepada Joint Statement tanggal 10 Mei 2002.

Pada tanggal 30 Agustus 2002, ada pertemuan antara Delri yang dipimpin oleh Wiryono dengan Pangab dan KaPolri serta para petinggi TNI dan Polri, di Golf House, Cilangkap, membahas draft "Cessation of Hostilities" yang dipersiapkan oleh Timnya Wiryono. Kesepakatan Cilangkap tersebut, kemudian dibawa oleh Delri untuk dibicarakan dalam pertemuan antara Delri dan HDC di Paris pada tanggal 4 September 2002.

Dalam pertemuan Paris tersebut, dikaji berbagai substansi dan kemudian menyepakati beberapa hal, antara lain:

- Terasa adanya peluang (*window of opportunity*) untuk melanjutkan dialog antara perwakilan pemerintah RI dengan perwakilan pimpinan GAM.
- Mempersilahkan HDC mempelajari draft awal dari *Cessation of Hostilities*, dan konsep tersebut akan selalu dikonsultasi dengan berbagai pihak di dalam negeri, terutama dengan pihak TNI/Polri. Bersamaan dengan itu, naskah tersebut akan dibicarakan dengan beberapa orang bijak yang berkaliber dunia dan berpengalaman dalam negosiasi/dialog internasional, serta paham dengan resolusi konflik, mereka disebut sebagai: *wisemen*.

Sejak pertemuan dengan HDC tersebut, disepakati untuk selalu meminta advis 5 orang *Wisemen*, yakni: (1) Anthony Zinni, (Jendral Mirinir dari Amerika Serikat), (2) Dubes Soderberg (mantan diplomat Swedia), (3) Surin Pitsuwan (mantan Menlu Kerajaan Thailand), (4) Dubes Budimir Loncar (mantan Dubes Yugoslavia untuk Indonesia), dan (5) Lord Avebury (mantan anggota Senat Inggris).

Dialognya sendiri berlangsung secara tidak langsung (*indirect negotiation*), di mana HDC melakukan apa yang disebut dengan *shuttle diplomacy*, antara Jakarta-Jenewa-Stockholm. Para *wisemen* tersebut, dapat menghadiri pertemuan antara pihak-pihak dengan HDC, atas undangan HDC.

Konsep *Cessation of Hostolities*, kemudian oleh HDC dibicarakan dengan pihak GAM, di Stockholm, bersama *wisemen* tentunya, kemudian dibawa lagi ke Jakarta, juga

dibicarakan di Singapura oleh Menko Polkam dengan HDC dan *wisemen*, didiskusikan di Lido, Jawa Barat, dibawa lagi ke Jakarta. Itu semua terjadi sekitar bulan Oktober-November 2002.***



BAB 14

DESK ACEH DI KANTOR MENKO POLKAM

TIDAK jelas dalam status sebagai apa, enam orang, sebut saja sebagai “Tim Enam”, sejak akhir tahun 2000 sering berkumpul, duduk, berdiskusi. Sebagai warga masyarakat Aceh, walaupun tidak mempunyai status formal apa pun, mereka sungguh-sungguh terpenggil, untuk memikirkan, mem-bicarakan, mendiskusikan di antara mereka, dan mencari jalan yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan konflik Aceh yang sudah berkelang tahun tersebut. Merekapun sering bertemu dengan berbagai pihak termasuk pejabat pemerintah, terutama yang paling sering di temuinya adalah Menko Polkam, Susilo Bambang Yudoyono, Menko Kesra Jusuf Kalla.

Desk Aceh di dibentuk, dengan Keputusan Menko Polkam No. Kep. 02/Menko/Polkam/1/2002. Dorongan dan motivasi pembentukan *Desk Aceh* selain yang formal dikemukakan, adalah juga untuk mendukung pelaksanaan (dan peningkatan) langkah-langkah komprehensif dan sekaligus menjamin kekomprehensifan dalam pelaksanaannya di lapangan, dalam rangka penyelesaian masalah Aceh, sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1 tahun 2002. Enam orang tersebut yang mungkin dianggap oleh Menko Polkan, dapat me-wakili sebagian aspirasi masyarakat Aceh di luar Aceh, sering diajak berdis-kusi dan bertukar fikiran oleh beliau baik di kantor maupun di tempat-tempat lainnya, seperti di Hotel Sheraton Bandara pada tanggal 8 Januari 2001 untuk mematangkan tentang Komans PMA, dan kemudian di Hotel Novotel, Bogor pada tanggal 12 Januari 2001, untuk mendiskusikan tentang struktur organisasi dari Komnas PMA, bahkan pernah bertemu di Singapura, dan sebagainya.

Keenam orang tersebut, memang sudah mempunyai banyak pengalaman dan atau keterlibatan dalam mengikuti atau mengamati, menggumuli masalah-masalah yang berkenaan dengan konflik Aceh sejak awal, sebagaimana terlihat dalam catatan tentang identitas mereka secara singkat, sebagai berikut:

1. Nasruddin Hars (wartawan senior, mantan anggota DPR RI, Penasihat Taman Iskandar Muda (TIM), pengurus FORKA (mantan anggota Komisi Independen (KIPTKA), anggota Tim asistensi Pemda Aceh di Jakarta).
2. Dr. Hasballah Saad (penasihat TIM, pengurus FORKA (mantan Sekretaris Koshamda, pengurus Komnas HAM (mantan menteri HAM).
3. Amran Zamzami, SE, (penasihat TIM, mantan Ketua Koshamda, mantan Ketua KIPTKA, pengurus FORKA, anggota Tim Asistensai Pemda Aceh di Jakarta).
4. Drs. Kaoy Syah (mantan anggota TPPUA, mantan anggota DPR RI, pengurus FORKA, pengambil inisiatif utama dari RUU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh di DPR RI yang kemudian menjadi UU No. 44 tahun 1999).
5. Dr. Bachtiar Ali (pakar komunikasi di UI, mantan anggota DPR RI, mantan anggota TPPUA, anggota Tim asistensi Pemda Aceh di Jakarta), dan
6. Ir. Usman Hasan (mantan Ketua TPPUA, Ketua Tim asistensi Pemda Aceh di Jakarta, penasihat TIM, pengurus FORKA, mantan anggota DPR RI, mantan Dubes RI untuk Mexico).

Enam orang ini pernah mengusulkan kepada Presiden RI agar dibentuk suatu badan yang bernama Komisi Nasional Penyelesaian Masalah Aceh, disingkat Komnas PMA, dalam pertemuan dengan Menko Polkam tanggal 4 Desember 2000, sebagaimana juga diusulkan oleh Tim asistensi Gubernur NAD di Jakarta.

Komnas PMA dalam ide dan usulan tertulis yang disampaikan oleh “Tim Enam” kepada Menko Polkam, adalah suatu Badan atau Komisi, dibentuk oleh Presiden (dengan Keppres), yang anggotanya terdiri dari Unsur-unsur pemerintah dan masyarakat dari berbagai kelompok strategis. Komisi ini diharapkan dapat dipimpin oleh seorang pejabat setingkat menteri. Jika akan dipimpin oleh menteri yang telah ada dalam kabinet saat itu, tentulah menteri yang berkualifikasi Menko dan paling banyak menangani masalah Aceh, dengan menunjuk seorang ketua harian. Beliau adalah Menko Polkam, atau Menko Kesra.

Respon Menko Polkam, ketika diusulkan dibentuknya Komnas PMA, sungguh sangat positif, dan beliau berjanji akan segera melaporkan hal tersebut kepada Presiden RI, yang ketika itu adalah Ibu Megawati. Jika Presiden menyetujuinya, segera pula Menko Polkam akan membentuk Komnas PMA tersebut. Beliau sempat tampil memberikan wawancara di TV, menyatakan akan segera dibentuk Komnas PMA, yang akan menangani “penyelesaian masalah Aceh secara komprehensif, damai, adil, bermartabat dan berwawasan ke depan”. Kepada Tim Enam, Menko Polkam, juga menyebut hari dan tanggal akan dibentuknya Komnas PMA tersebut, jika telah disetujui Presiden. Namun, sayang beribu kali sayang hari yang ditunggu-tunggu tersebut tidak kunjung tiba. Harinya sih tiba, tetapi pengumuman dibentuknya Komnas PMAnya tidak pernah ada. Orang tentunya menduga, hal itu tidak terjadi, karena belum atau tidak mendapat persetujuan dari Presiden. Karena hal itu di luar jangkauan orang awam untuk mengeceknya, ya percaya sajalah kepada informasi yang ada, dan terimalah kenyataan yang tidak mengesankan tersebut. Akhirnya yang dibentuk adalah justru “*Desk Aceh*”, yang isinya atau anggota-anggotanya adalah seluruhnya para pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer.

Semua anggota Tim Enam, yakni: Nasruddin Hars, Hasballah Saad, Amran Zamzami, Kaoy Syah, Bachtiar Ali, dan Usman Hasan, diberi tugas oleh Menko Polkam menjadi Penasihat dari *Desk Aceh* tersebut, dengan Surat Tugas No: ST-29/Menko/Polkam/2/2002 tertanggal 28 Februari 2002, untuk:

- Berperan aktif sebagai anggota Tim Penasihat/Konsultasi pada desk Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam, dalam rangka Penyelesaian Masalah Aceh,
- Menghadiri rapat-rapat koordinasi Desk di lingkungan Kantor Menko Polkam,
- Memantau perkembangan keadaan di lapangan, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan menyampaikan hasil pemantauan kepada Ketua Desk/Forum rapat Desk.
- Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Menko Polkam dan Sesmenko Polkam,
- Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Surat tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dalam konsideran dari Surat Tugas tersebut antar lain disebutkan” “bahwa untuk lebih mendorong keberhasilan implementasi Instruksi Presiden No. 1 tahun 2002, tentang Peningkatan Langkah Komprehensif Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh, perlu peran/pelibatan masyarakat Aceh, antara lain tokoh-tokoh yang namanya tercantum dalam Surat Tugas ini”

Di setiap rapat *Desk Aceh* enam orang tersebut sebagai Penasehat *Desk Aceh* selalu diundang.

Penasihat *Desk Aceh*, dalam memenuhi fungsi dan melaksanakan tugas-tugasnya, selalu bekerja sama erat dengan Taman Iskandar Muda (TIM), suatu Organisasi masyarakat Aceh di Jabotabek, beberapa Lembaga Swadaya masyarakat Aceh antara lain Koshamda, dan FORKA, serta Organisasi mahasiswa Aceh Jakarta (IMAPA), demikian pula dengan Tim asistensi Gubernur Aceh di Jakarta, dengan para anggota DPR RI asal Aceh, maupun dengan pihak lainnya termasuk dengan berbagai perorangan, seperti Bustanil Arifin, Tri Sutrisno, Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MA., dan T. Hadi Taib,

keduanya mantan Gubernur Aceh, Adnan Ganto, Suryadi Soedirdja, Ibrahim Risyad, Surya Paloh, dan sebagainya.

Perlu diketahui bahwa Penasihat *Desk Aceh*, pernah mengambil inisiatif dalam rangka “tugas khususnya” untuk melobby dan kemudian mengorganisir/memfasilitasi beberapa tokoh nasional yang dianggap sebagai *wisemen* domestik, untuk memberikan perhatian lebih serius dan memberikan pikiran atau ide-ide kepada pemerintah tentang penyelesaian masalah Aceh secara Damai. Mereka terdiri dari: Bapak-bapak Ali Alatas, SH. (mantan Menlu RI, Dr. Nurcholis Madjid, Pakar dalam banyak aspek, sehingga ada sementara pihak yang memberinya gelar sebagai “guru bangsa”, KH. Ali Yafie, tokoh ulama, mantan fungsionaris di NU, dan di MUI, Prof. Syafe'i Ma'arif, Ketua Umum Muhammadiyah, tokoh ulama, dan Suryadi Soedirdja (mantan Mendagri, Mantan Menko Polkam, Mantan Gubernur DKI, dan Mantan Pangdam Jaya. Mereka pun sering bertemu, dan akhirnya menyampaikan usul, saran dan pertimbangan kepada pemerintah melalui Menkom Polkam dan juga langsung kepada Presiden RI, tentang “Penyelesaian Masalah Aceh secara Damai”.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa di Jakarta ada Tim asistensi Gubernur Aceh, di Jakarta, berposisi sebagai salah satu partner kerjasama dari Penasihat *Desk Aceh*. Tim ini, awal mulanya dibentuk oleh Pj. Gubernur NAD, Ramli Ridwan, SH dengan menunjuk Ir. Usman Hasan sebagai Ketua Tim asistensi Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Aceh di Jakarta, dengan Sk Gubernur, No 180. 05/13901/2000, tertanggal 29 Juli 2000, sekaligus menugaskan Ketua tim untuk menyusun personalia anggotanya, kemudian diteruskan oleh Gubernur Abdullah Puteh, dengan Keputusan Gubernur, No. 180. 05/ 089/2001, tentang Pembentukan Tim asistensi Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Aceh di Jakarta, tertanggal 12 April 2001, dengan menambah jumlah anggotanya menjadi 24 orang yakni: 3 orang Penasehat, yaitu: H. Bustanil Arifin, H. Ismail Hasan Metareuem, SH., H.T. Hadi Taib, SH. Ketua Tim tersebut adalah: Ir. Usman Hasan, Sekretaris: Dr. Bachtiar Ali, dan Anggota-anggota: Sofian Effendi, Tamlika Ali, Dr. Ibrahim Abdullah, Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, Drs. Said Umar Husin, Adnan Ganto, Nasruddin Hars, Amran Zamzami, SE, Prof. Dr. Ibrahim Alfian, MA., Prof. Dr. Teuku Yakob, Pro. Dr. Yunus Melletoa, Dr. Sofyan Djalil, MA., Drs. Asyek Ali, Drs. Ramli Ibrahim, Drs. T. Iskandar, Ir. Aluddin Cut, Ir. Nur Gaybita, Dr. Fajri Alihar, Ir. Bachtiar Yusuf. Sedangkan T. Safli Didoh, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Taman Iskandar Muda (TIM), selalu diundang dan hadir dalam rapat-rapat Tim asistensi ini. Kemudian dengan komposisi dan jumlah anggota yang sama, diteruskan oleh Gubernur Pj. Gubernur, Ir. Awar Abubakar. Tim inilah kelak menjadi cikal-bakal Tim-23 yang dibentuk oleh Taman Iskandar Muda (TIM), untuk memberikan pemikiran, dan saran-saran tindak lanjut dari penyelesaian masalah Aceh secara Damai, Adil, Bermartabat dan Komprehensif serta berwawasan ke depan, sebagai kelanjutan dari tugas-tugas sebelumnya, atas nama TPPUA (Tim Penasehat Presiden Urusan Aceh), yang telah dibubarkan oleh Presiden Gus Dur.

Di masa Pj. Gubernur Dr. Mustafa Abubakar, Tim asistensi mengalami perubahan, dengan mengangkat Prof. Dr. Bachtiar Ali (mantan Dubes RI untuk Mesir, dan ahli Komunikasi, sebagai Ketuanya dan Dr. Fajri Alihar sebagai Sekretarisnya, sedangkan anggota-anggotanya sedikit dicitkan.

Sesuai dengan Kerangka Acuan, yang dibuat berdasarkan Surat Tugas No. ST-29/Menko/Polkam/2/2002, penasehat *Desk Aceh*, merinci tugas-tugasnya menjadi: *Pertama*, tugas-tugas yang bersifat teknis yang berkaitan langsung dengan *Desk Aceh*, termasuk menginventarisasi aspirasi masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan Inpres No. 1 tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah-langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh, dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Inpres No. 1 tahun 2002 tersebut. *Kedua*, melakukan tugas-tugas khusus, yang bersifat non-formal, tetapi setahu Menko Polkam, seperti berkenaan dengan “*second track diplomacy*”, atau melakukan kontak-kontak tidak formal, *me-lobby* para “*wisemen domestik*”,

sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya dalam rangka memperlancar perundingan/dialog yang resmi. Untuk itu beberapa orang anggota Penasehat *Desk Aceh*, sering bertemu dengan Ketua Delri Wiryono, dan juga bertemu dengan beberapa orang tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diperkirakan ada pengaruhnya bagi memperlancar dialog.***



BAB 15

PENGHENTIAN PERMUSUHAN (*CESSATION OF HOSTILITIES*)

Perundingan Nyaris Macet

Jalan Berliku Menuju COHA

BETAPAPUN besarnya hasrat kedua pihak untuk berdamai atau melakukan dialog damai, paling tidak sebagaimana yang selalu dicerminkan dalam pernyataan-pernyataan resmi, yang juga didukung oleh masyarakat internasional, namun tiba pada pembahasan materi yang dinegosiasikan, selalu saja buntu atau terhambat oleh kukuhnya posisi masing-masing. Substansi yang paling sering krusial, adalah yang berkenaan dengan tujuan akhir dari masing-masing pihak. Misalnya, GAM tetap menginginkan “Aceh Merdeka”, Aceh yang lepas dari Republik Indonesia (*independent*). Sedangkan Indonesia tetap mempertahankan Aceh sebagai bagian integral dari NKRI, atau mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Materi lainnya yang sering tampil sebagai pengganjal, adalah berkenaan dengan senjata GAM, dan kondisi serta posisi apkam RI. Mau diapakan senjata GAM, diletakkankah (*laying down*), diserahkan (*hand over*), dikantongkankah (*cantonment*), digudangkankah (*storing*) atau dihancurkan (*destroying*). Sedangkan kondisi dan posisi militer atau apkam RI, mau diapakan; apakah apkam non-organik ditarik semua keluar Aceh, apakah cukup mereka tidak boleh keluar barakkah, atau tidak boleh melakukan operasikah, atau boleh keluar barak tetapi tidak boleh membawa atau memegang senjata, dan sebagainya. Substansi seperti di atas, dan tentunya ada beberapa lagi yang lain, tidak saja tampil kontroversi/krusial dan akhirnya menunjukkan gejala *deadlock*, pada perundingan kali ini saja, tetapi telah menunjukkan gejalanya dan bahkan membuktikan dirinya, pada perundingan-perundingan yang lalu. Cuma saja, agar tidak dikatakan gagal atau *deadlock*, para juru runding (*negotiators*) pada saat berunding untuk Jeda Kemanusiaan misalnya, mereka cukup arif mencari jalan untuk menghindari dari substansi tersebut, agar tidak serta merta *head on*, lalu perundingannya stop seketika (*sudden dead*), dengan kata lain gagal. Dengan pengalaman seperti itu, bahkan diperkirakan, walaupun beberapa materi krusial tersebut lolos kali ini, dengan cara-cara menghindari atau membungkusnya dengan kata dan/atau kalimat yang euphemistik, yang serba kabur dan multi interpretasi, tentunya substansi tersebut akan tampil lagi dalam perundingan-perundingan, atau tahapan perundingan berikutnya.

Beberapa “materi berat” itulah yang hampir-hampir membuat perundingan Jenewa untuk menuju ke *Cessation of Hostilities* tersebut menjadi terhenti total. Kejadian itu adalah pada sekitar bulan Mei 2002. Sehingga semua pihak, termasuk HDC dan masyarakat internasional mencari akal dan jalan, agar jangan sampai perundingan

yang sedang berjalan tersebut, benar-benar terhenti. Jika terjadi hal yang sedemikian biasanya, saling tuding dan salah menyalahkan satu dengan lainnya pun terjadi, dan kalau keadaannya sudah dianggap cukup gawat, maka pihak ketiga, tidak lagi cukup hanya HDC, tetapi pihak-pihak lain yang konsen dan simpati (atau kasihan) kepada Indonesia ikut turun tangan, seperti terjadinya dua kali pertemuan Tokyo.

Pertemuan Tokyo

Jepang, tanpa diundang oleh Indonesia (atau mungkin juga orang awam tidak tahu), turun tangan, bersama USA, Uni Eropa, Bank Dunia, dan HDC. Seperti dikatakan oleh Edward Aspinall dan Harold Crouch, mereka membujuk kedua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Baru pada tahapan persiapan untuk pertemuan yang direncanakan pada tanggal 17 Mei 2002, di Tokyo, tiba-tiba karena situasi dalam negeri semakin memburuk, maka para juru runding dari pihak GAM ditangkap oleh polisi Indonesia. GAM pun mengancam, jika para juru runding tersebut tidak dilepaskan, mereka tidak akan datang ke Tokyo. Dan memang benar, karena tidak datangnya pihak GAM, maka dianggaplah pertemuan Tokyo yang pertama tersebut gagal. Namun, setelah kemudian juru runding tersebut dibebaskan, dan pembicaraan dengan sistem *shuttle diplomacy* diteruskan, sehingga menghasilkan draft COHA yang hampir-hampir disepakati bersama, maka akhirnya pertemuan Tokyo kembali dilaksanakan dengan sponsor yang sama, pada tanggal 3 Desember 2002. Sebagian dari Delri, yang dipimpin oleh Menko Polkam SBY, menghadiri pertemuan tersebut, dan dari sanalah beliau meneruskan perjalanan menghadiri pertemuan, dan akhirnya penandatanganan COHA di Jenewa pada tanggal 9 Desember 2002.

Dalam Pertemuan Tokyo-II tersebut, yang menggunakan thema "*Preparatory Conference on Peace and Reconstruction in Aceh*", semua peserta yakni Jepang, USA, Uni Eropa, Bank Dunia, dan HDC, serta peserta lainnya, menyatakan dukungan kuatnya kepada penyelesaian secara damai konflik Aceh. Pertemuan tersebut selain dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah, yang terdiri dari Rombongan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Mankom Polkam SBY, dan rombongan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Gubernur NAD, Abdullah Puteh, juga berpartisipasi aktif tokoh-tokoh yang dapat dianggap mewakili masyarakat sipil seperti: Iman Sujak, Humam Hamid, Syarifah Rahmatillah, Prof. Dr. Iskandar, Dr. Najamuddin. Oleh karenanya mereka menghimbau pemerintah Indonesia dan GAM untuk meneruskan dialog yang sedang berlangsung, dengan harapan akan dapat diakhiri dengan Persetujuan Penghentian Permusuhan (COHA) pada tanggal 9 Desember 2002. dalam pertemuan tersebut, pemerintah RI menggambarkan kemajuan dari dialog, dan rencana pemerintah untuk rekonstruksi Aceh.

Sementara itu Perwakilan masyarakat sipil berbicara mengenai harapannya untuk perdamaian, rekonsiliasi dan tegaknya hukum.

Sedangkan World Bank dan Asian Development Bank dan beberapa organisasi dalam lingkup PBB (UN), secara bersama menyampaikan penilaian awal (*preliminary assesment*) dari kondisi saat ini di Aceh dan persyaratan pokok untuk restorasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya pertemuan tersebut juga, menggaris bawahi beberapa hal antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dukungan bagi Dialog yang sedang berjalan.

- Semua delegasi memberikan dukungan kuatnya kepada dialog yang sedang berjalan antara Pemerintah RI dan GAM, yang difasilitasi oleh Centre for Humanitarian Dialogue. Para delegasi menyatakan harapannya bahwa dialog tersebut dan kerangka COHA akan menciptakan basis untuk mengakhiri konflik.
- Delegasi mencatat bahwa penghentian permusuhan, adalah langkah yang harus ditempuh, tetapi tidak akan berkelanjutan tanpa aksi-aksi yang konkrit, menuju

pemilihan yang bebas dan demokratis, yang akan memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya pada tahun 2004. Delegasi mendesak kedua pihak dari persetujuan ini untuk tetap komit kepada pelaksanaan secara penuh dan cepat.

- Delegasi akan bergerak sesuai dengan pernyataan dari perwakilan masyarakat sipil yang menyatakan pentingnya menyelesaikan COHA dan memulihkan keamanan untuk rakyat Aceh.

Dukungan kepada Proses Monitoring

- Suksesnya COHA akan tergantung komitmen bersama kedua pihak, untuk perdamaian dan pembangunan beberapa langkah pembentukan kepercayaan (*to peace and the development of a series of confidence building measures*). Kuncinya adalah proses monitoring tripartite, di mana perwakilan Pemerintah RI, GAM dan Centre for Humanitarian Dialogue akan mengawasinya agar tetap sejalan dengan agreement.
- Delegasi mendiskusikan bagaimana proses monitoring dibiayai, dan beberapa donors telah menyatakan kemitmennya untuk memberikan dukungan pendanaan, bersama dengan Pemerintah RI. Anggaran Biaya secara detail untuk pelaksanaan monitoring, saat ini sedang dipersiapkan, dan para delegasi menyatakan harapannya agar finalisasi pendanaan tersebut dapat selesai dalam beberapa minggu ke depan. Para delegasi menyambut baik komitmen dari pemerintah Thailand, dan Phillipina untuk ikut dalam program monitoring ini.

Dukungan kepada Rekonstruksi dan Pembangunan di Aceh.

- Badan-badan internasional menyampaikan penilaian awal dari situasi sosial dan keuangan di Aceh, dan jenis-jenis dukungan, yang akan dibutuhkan untuk memulihkan pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, membangun kepercayaan, dan menjamin perdamaian yang berkelanjutan. Tambahan bagi usaha monitoring, itu akan mencakup bantuan kemanusiaan jangka pendek, mendukung demobilisasi dari pasukan GAM (*combatants*), investasi community-driven yang cepat menghasilkan, meningkatkan kesehatan, fasilitas pendidikan, pengadaan infrastruktur yang berjangka lebih panjang.
- Sementara janji-janji (*pledges*) yang spesifik dibutuhkan, para delegasi dalam pertemuan tersebut menyatakan komitmennya yang jelas, untuk memberikan bantuan sosial dan rekonstruksi fisik, dan untuk membangun institusi yang dibutuhkan untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Aceh.
- Segera setelah penandatanganan COHA, misi dari multiagency akan mengunjungi Aceh, untuk membuat penilaian awal (*preliminary assesment*) terhadap berbagai kebutuhan. Beberapa donors sudah mempunyai dana pembangunan yang diperuntukkan proyek-proyek, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, yang sudah ditunda atau dibekukan karena konflik (kekerasan). Kesemuanya itu dapat dimulai lagi dengan segera.

Juga rekonstruksi yang berdasarkan komunitas (*community based*) dan program rekoveri para korban kekerasan, dapat diperluas.

- Para peserta mencatat bahwa UU NAD (UU no 18 tahun 2001) tentang otonomi khusus untuk NAD, telah memberikan sumber dana baru yang signifikan bagi pemerintah Provinsi dalam bentuk bagi hasil (*revenue sharing*). Pemerintah RI mendesak bahwa dasar-dasar untuk damai dan rekonstruksi yang berjangka panjang adalah membutuhkan penggunaan uang (dana) yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), baik yang berasal dari pemerintah Indonesia atau pun dari donors, dan pembentukan (*reestablishment*) kembali pelayanan

pemerintahan lokal yang cepat kepada rakyat Aceh. Para peserta mengumandangkan penekanan-penekanan tersebut, mencatat penggunaan dana secara efektif adalah lebih penting dari pada besarnya dana tersebut. Para delegasi juga menekankan pentingnya keterlibatan yang kuat dari masyarakat sipil, dan komunitas local. Ini akan membantu membangun keyakinan dan kepercayaan, dan juga akan meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Para delegasi mencatat bahwa pembangunan haruslah dilak-sanakan dalam kondisi untuk memberikan kegunaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari lingkungan dan sumber daya alam

- Para delegasi menyatakan pandangannya bahwa sistem hukum yang efektif, tegaknya hukum, dan penghormatan pada HAM, adalah hal yang kritis untuk menyukseskan pembangunan. Para delegasi mencatat bahwa sistem hukum yang dipercaya dan profesional terutama sangat penting dalam situasi pascakonflik, dalam rangka untuk menumbuhkan sistem pemerintahan yang dapat dipercaya. Donors akan memberikan dukungan untuk reformasi hukum dan pemerintahan.

Langkah-Langkah Berikutnya

Para peserta setuju untuk adanya suatu proses kordinasi antar donors bilateral dan multilateral dan Pemerintah RI. dalam hal ini CGI akan memainkan peranan sentral. Hal ini akan membantu untuk menjamin bahwa bantuan benar-benar jatuhnya kepada rakyat Aceh secepat mungkin. Para Peserta komit untuk melakukan pertemuan berikutnya dalam waktu dekat setelah penandatanganan-an COHA untuk memulai proses ini.

Pertemuan dengan Tokoh/Masyarakat Sipil

Dengan mengundang beberapa orang perwakilan masyarakat sipil Aceh, ke Jenewa, GAM tentunya mengharapkan adanya pandangan yang realistis dari masyarakat sipil Aceh. Hal itu diperlukan agar GAM dapat mengetahui persis bagaimana keadaan lapangan menurut versi masyarakat sipil, untuk kemudian dapat menentukan sikap tentang langkah apa sebaiknya, yang perlu diambil untuk masa depan Aceh, terutama dalam menghadapi dialog tentang COHA dengan PEMRI. Hampir semua mereka menyatakan mendukung diteruskannya dialog untuk melahirkan kerangka tentang penghentian permusuhan, karena rakyat di Aceh sudah sangat menderita. Para tokoh ulama atau masyarakat sipil yang diundang dan hadir adalah: Daniel Juned, Isa Sulaiman, Alyasa Abubakar, Hakim Nyak Pa, Muslim Ibrahim, Imam Suja. Sedangkan Tgk. Ibrahim Bardan ikut diundang, tetapi beliau berhalangan untuk hadir. Ikut berangkat ke Jenewa bersama mereka, adalah Tgk. Muhammad Usman dan Ilyas Muhammad Abed.

Pertemuan tersebut berlangsung tanggal 29-30 Oktober 2002, di kantor HDC, Jenewa, Switzerland. Mereka diundang oleh HDC. Satu hari setelah pertemuan tersebut usai, pada tanggal 31 Oktober, pihak GAM/ASNLF mengeluarkan Press Release, yang isinya antara lain:

- Bahwa pertemuan tersebut sangat konstruktif dan beberapa proposal yang berguna telah diterima oleh ASNLF untuk mempercepat proses dialog.
- Berdasarkan input tersebut dan juga dari berbagai elemen Aceh lainnya di seluruh dunia, kami dapat menyimpulkan bahwa sekarang adalah saatnya yang tepat untuk menandatangani perjanjian dengan PEMRI.
- Draft dokumen telah dipertukarkan, dan sebagian besar isinya (butir-butirnya) telah disepakati. di samping itu demi terciptanyua dasar-dasar yang bagus bagi perjanjian, ada beberapa isu lagi yang memerlukan pelicinan (*ironed out*).
- Kami yakin itu semua akan segera dapat diselesaikan, dengan mediasi dari HDC.
- Selama bulan Ramadhan yang akan datang, ASNLF akan menghentikan semua aksi militer, kecuali untuk maksud pertahanan diri.

- Kami juga percaya bahwa penandatanganan perjanjian dengan PEMRI akan berlangsung segera setelah Idul Fitri.

GAM di Swedia, telah mendengar sendiri harapan para ulama dan masyarakat sipil yang mereka ajak bicara, yang dengan tegas dan lugas menganjurkan dan sangat mengharapkan agar segera ditandatanganinya COHA tersebut, karena rakyat di Aceh sudah sangat mendambakan kedamaian dan ketenangan. Namun, pihak GAM, mungkin atas dasar pertimbangan tertentu, tetap saja mengatakan bahwa kemungkinan penandatanganan COHA tersebut baru akan dilakukan setelah Idul Fitri, yang berarti lebih sebulan kemudian.

Persiapan Penandatanganan Cessation of Hostilities Agreement (COHA)

Pertemuan di Lido, Jawa Barat, antara Delri dengan HDC, sesungguhnya merupakan finalisasi dari draft COHA, dan telah siap untuk ditandatangani, yang semula direncanakan pada tanggal 31 Oktober 2002. Pengertian sudah final adalah, bahwa naskah COHA tersebut telah di konsensuskan oleh Menko Polkam baik secara internal PEMRI, maupun eksternal dengan HDC, dengan menerima masukan dari *wisemen* internasional, serta telah menampung pendapat dan saran dari GAM. Begitu optimisnya HDC, sampaisampai salah seorang pimpinannya sempat mengatakan bahwa tanggal 31 Oktober tersebut, hanyalah merupakan Upacara Penandatanganan saja (*just the signing ceremony*). Namun, ternyata, GAM minta waktu, karena mereka akan mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil masyarakat sipil Aceh lebih dahulu, dan setelah itu barulah penandatanganan dilakukan. Sikap GAM yang sedemikian, membuat pihak PEMRI, mecurigai seolah-olah GAM mengulur-ngulur waktu, walaupun diakui esensi dan strategisnya mendengarkan pendapat masyarakat sipil di Aceh, tetapi pertanyaanya mengapa tidak dilakukan jauh hari sebelumnya.

Proses perundingan berada dalam keadaan “in a limbo”, demikian Wiryono menyebutnya. Walaupun HDC pada tanggal 27 Oktober 2002 menyatakan bahwa kedua pihak berada dalam posisi yang sangat dekat untuk mencapai persetujuan untuk menghentikan konflik. Walaupun perundingan terhenti beberapa waktu sejak tanggal 19 Agustus 2002 hingga 27 Nopember 2002, namun pembicaraan –pembicaraan substantif terus berlangsung antara Pemerintah RI dengan HDC.

Dua pasal yang menjadi keberatan pihak GAM pun dibahas kembali yakni pasal 3. b. tentang “Fungsi polisi”, dan pasal 4 mengenai “establishment of Peace Zones”. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba juga, GAM memberitahukan melalui HDC, bahwa mereka akan hadir di Jenewa pada tanggal 9 Desember 2002. Pemerintah RI pun setuju dengan tanggal tersebut, walaupun dengan penuh *reserve*, mengingat GAM belum dengan tegas menyatakan akan menandatangani COHA, tetapi masih menggunakan kalimat diplomatis “*with the view to signing the agreement*”.

Delripun dipersiapkan, yang keseluruhannya dipimpin oleh Menko Polkam SBY, disertai oleh Sesmenko, Sudi Silalahi, dengan Kepala Perunding, atau yang menandatangani COHA, Wiryono, dengan anggota Delegasi yakni Amin Rianom, dari kantor Menko Polkam, Umar Halim, dari *Desk Aceh*, M. Luthfi, dari Mabes TNI, Adang Darajatun dari Mabes Polri, dan Amran Zamzami, SE, dari unsur masyarakat/Penasihat *Desk Aceh*. Selain itu Delri juga dilengkapi dengan Penasehat Delegasi yang terdiri dari Abdullah Puteh, Gubernur NAD, Abu Yus Ketua DPRD NAD, Farhan Hamid anggota DPR RI, Tarmizi Karim Bupati Aceh Utara, Nasruddin Hars, dan Usman Hasan, keduanya Penasehat *Desk Aceh*, dan Adnan Ganto, unsur masyarakat. Kemudian bergabung Dr. Bachtiar Ali, Dubes RI di Kairo.

Dari keseluruhannya termasuk penasihat Delri tersebut, 9 orang di antaranya adalah putra Aceh. Sejak tiba di Hotel Intercontinental, Jenewa pada pukul 8. 00 pagi, 9 orang tersebut, sering berkumpul dan berdiskusi di kamar *suit room*nya Adnan Ganto, untuk terus menerus mengikuti perkembangan saat-saat terakhir perundingan. Penghubung kearena perundingan adalah Amran Zamzami, karena hanya beliau lah di

antara 9 orang tersebut yang menjadi anggota juru runding. Sangat terasa suasana ketegangan pada tanggal 8 Desember 2002, satu hari menjelang penandatanganan. Kelihatan jelas Pimpinan HDC bersama Anthony Zinni, disatu pihak dan Wiryono dengan timnya juga bersama atau tanpa HDC di lain pihak, mondar-mandir di lobby hotel dan kadang-kadang keluar hotel, dengan wajah yang serius. Walaupun di siang hari itu (tanggal 8 Desember 2002), Menko Polkam bersama rombongan termasuk para penasehat delegasi dan bersama Dubes RI di PBB Jenewa, dan stafnya, meninggalkan hotel untuk makan siang disuatu restoran di Montreaux, pinggir danau di Jenewa yang cukup luas dan bersih, namun atmosfir ketegangan tetap menyelimuti Ketua dan anggota rombongan.

Pengepungan Cot Trieng

Sore harinya sekembalinya dari Montreaux, datang berita dari Aceh yang mengatakan bahwa orang-orang GAM sedang dikepung oleh aparat Keamanan RI di Paya Cot Trieng, suatu lokasi yang terpencil, di Kecamatan Nisam, kabupaten Aceh Utara. Lokasi pengepungan adalah suatu rawa di desa tersebut. Menurut laporan resmi, orang-orang GAM sudah benar-benar terkepung dilokasi tersebut, tinggal satu langkah lagi apkam RI segera dapat menangkapnya. Sesuai dengan pengakuannya sendiri melalui media massa Sofyan Daud, jurubicara militer TNA, ada di antara orang-orang GAM yang terkepung tersebut.. Walaupun ada selentingan yang mengatakan bahwa orang-orang GAM sebenarnya sudah tidak ada lagi di lokasi Paya Cot Trieng tersebut, mereka sudah sempat keluar dari kepungan, entah bagaimana caranya, tidak ada yang tahu. Namun, resminya pengepungan tetap dilakukan dengan asumsi orang-orang GAM masih ada di dalamnya.

Bersamaan dengan itu GAM yang juga mendapat berita yang sama, segera bereaksi, dengan menyatakan sikap, bahwa mereka akan menunda menandatangani COHA, sampai pengepungan tersebut dibubarkan, dan pasukan apkam ditarik dari lokasi pengepungan tersebut. Dengan dijadikannya soal pengepungan ini sebagai persyaratan untuk mau atau tidak mau menandatangani COHA, membuktikan bahwa di lokasi tersebut memang benar masih ada orang GAM, dan terbantahlah selentingan yang mengatakan bahwa di sana sudah tidak ada lagi orang-orang GAM. Menurut media masa, alasan GAM berada di Paya tersebut, adalah untuk melindungi masyarakat, sedangkan alasan TNI untuk mengepung Paya tersebut juga untuk melindungi masyarakat, dari ancaman GAM di Paya tersebut.

Para penasehat delegasi terutama yang 9 orang tersebut, yang tentunya sangat konsen dan berkeinginan keras agar COHA tersebut segera ditandatangani, segera mengadakan rapat kilat dikamar Adnan Ganto, yang mengambil kesimpulan memohon dengan hormat kepada Menko Polkam untuk memerintahkan jajaran apkam di Tanah Air segera membubarkan pengepungan, dan pasukan apkam yang ada dilokasi tersebut ditarik, agar penandatanganan COHA dapat berjalan lancar sebagaimana harapan seluruh rakyat Aceh, dan juga rakyat Indonesia. Walaupun kami tahu hal itu cukup berat untuk memenuhinya terutama di kalangan apkam RI, namun ke 9 orang tersebut lebih percaya dan menaruh harapan pada Menko Polkam SBY, yang dikenalnya adalah sosok yang sangat mencintai Aceh dan mencintai jalan damai bagi penyelesaian masalah Aceh. Karena itulah ke9 orang ini sepakat dan dengan penuh keyakinan, mengutus Adnan Ganto untuk menemui SBY di kamarnya, yang juga sebagai kantornya sementara. Setelah Adnan Ganto mengemukakan duduk persoalannya dan kesimpulan serta permohonan kami ber 9, ternyata mendapat respons yang sangat positif dari Menko Polkam SBY yang antara lain mengatakan “kalau itu memang dirasakan baik oleh masyarakat Aceh, ya bismillah, saya akan perintahkan Pangab untuk membubarkan pengepungan tersebut, dan menarik Pasukan dari lokasi itu. “... *Alhamdulillah*, selamatlah COHA, dari ancaman untuk batal yang kesekian kalinya. Ketika Adnan Ganto melaporkan kembali hasil pertemuannya dengan Menko Polkam

SBY, kesembilan orang tersebut menjadi sangat lega dan bersyukur ke hadirat Allah SWT., serta merekapun berdoa bersama, yang dipimpin oleh Abu Yus, Ketua DPRD NAD.

Dengan ditariknyanya pasukan yang mengepung lokasi tersebut, maka menurunlah ketegangan, dan GAM pun menyatakan bersedia menandatangani COHA yang telah di fine tuning di saat-saat terakhir. Acara penandatanganannya adalah besok hari, tanggal 9 Desember 2002, pukul 10. 00 pagi di gedung markas besar HDC, dengan pemandangan yang indah, di tepi danau, di Jenewa. Hadir seluruh Delri, di bawah Pimpinan Menko Polkam Susilo Bambang Yudoyono, dihadiri lengkap oleh semua anggota Delri, dan delegasi GAM dipimpin oleh Malik Mahmud, dengan anggota delegasinya antara lain: Dr. Zaini Abdullah, Bachtiar Abdullah, Zakaria Saman, Sofyan Ibrahim Tiba, Yusra, dan lainnya, yang juga diperkuat oleh beberapa orang tokoh muda seperti Al Kausar, yang kebetulan adalah putranya Abu Yus.

Dari teks COHA (Lihat Lampiran), dapat dikerangkakan sebagai berikut:

Mukadimah

Pasal 1: Tujuan dari Penghentian Permusuhan dan Segala Tindakan Kekerasan (Objectives of the Cessation of Hostilities and All Acts of Violence).

Pasal 2: Komitmen Kedua Pihak untuk Menghentikan Permusuhan dan Segala Bentuk Kekerasan (Commitment by Both Sides to Cease Hostilities and All Acts of Violence).

Pasal 3: Komisi Bersama atas Keamanan (Joint Security Committee).

Pasal 4: Pembentukan Zona Damai (Establishment of Peace Zones).

Pasal 5: Jangka Waktu (Time Frames).

Pasal 6: Dialog Antar Semua Pihak (All Inclusive Dialogue).

Pasal 7: Informasi dan Komunikasi Bagi masyarakat Umum (Public Information and Communications)

Pasal 8: Dewan Bersama (Joint Council).

Pasal 9: Amandemen atau Mengakhiri Perjanjian (Amendment or Termination)

Sementara itu dalam rangka Pasal 3 butir b), ada penjelasan tambahan yakni sebagai berikut: “dengan perjanjian ini GAM setuju untuk meletakkan senjata pada tempat yang telah ditentukan, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal, 3, b) tersebut. Tempat-tempat ini akan ditentukan oleh GAM, dan lokasinya dikomunikasikan dengan HDC”

Penandatanganannya berlangsung pada tanggal 9 Desember 2002, sekitar pukul 10. 00 pagi, sebagaimana rencana terakhir (setelah mengalami perubahan untuk kesekian kalinya). Semua Delri setelah sarapan pagi di Hotel, langsung menuju kesana, yakni Gedung Markas Besar HDC, di tepi danau Jenewa yang indah dan asri. Udara cukup sejuk, dan segar sekali, dengan cuaca yang cerah. Di lobby gedung tersebut sebelum upacara dimulai, para delegasi baik dari GOI maupun GAM berbaur, sambil menikmati kopi dan teh panas berikut *snack* ringan, yang disediakan oleh HDC. Silaturahmi tersebut untuk sebagian orang adalah perkenalan pertama kali satu sama lain, sedangkan bagi yang lainnya. adalah pertemuan kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Suasananya cukup santai, selain bersalam-salaman, juga saling sapa kesana sini, seraya diramaikan oleh saling foto, bagi yang membawa kamera.

Ketika *dicalling* oleh sekretariat, untuk memasuki ruangan dalam di mana tempat upacara penandatanganan, dan diberitahu bahwa upacaranya segera akan dimulai, suasana pun berubah menjadi serius, dan bahkan terasa kaku, sambil masing-masing dengan sedikit berdesarkan memasuki ruangan.

Suasana ketika masing pihak yakni: Zaini Abdullah yang disaksikan /didampingi oleh Malik Mahmud di belakangnya, dan Wiryono yang disaksi-kan/didampingi oleh Susilo Bambang Yudoyono, di belakangnya serta semua hadirin, memegang pena untuk segera menorehkannya ke kertas dokumen COHA, terlihat wajah masing-masing tegang dengan raut muka yang susah menggambarkannya. Apakah senang, sedih, terharu,

mungkin campur baur. Pak Wiryono, ketika ditanyai, mengatakan sangat terharu, bahwa kerja keras beliau selama sekian bulan, telah membuahkan hasil, yakni penandatanganan itu. Sedangkan Zaini, beliau bahkan meneteskan air, sambil sayup-sayup terdengar mengatakan, bahwa beliau “harus” (terpaksa?) menandatangani dokumen tersebut, demi untuk menghentikan pertumpahan darah di Aceh dan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang Aceh. Karena itu semua, soal perasaan, dan soal hati, yang tak terungkap jelas, entah benar entah tidak. Hanya Allah dan yang bersangkutanlah yang paling tahu. Namun, yang benar dan telah menjadi kenyataan adalah: dokumen COHA telah ditandatangani oleh kedua pihak, dan tentunya mengikat pula kedua pihak untuk melaksanakannya segera, demi Aceh dan demi Indonesia tercinta.***



BAB 16

DARURAT MILITER DAN DARURAT SIPIL UNTUK ACEH

WALAUPUN belum begitu jelas bagaimana rinciannya, belum pula pasti bagaimana pelaksanaannya, namun penandatanganan COHA itu sendiri, disambut dengan penuh rasa syukur, dan sukaria baik oleh rakyat di Aceh maupun masyarakat Aceh di mana pun dia berada, termasuk oleh masyarakat lainnya yang tidak mencintai, apalagi mengharapkan kekerasan dan permusuhan. Di mana-mana rakyat melakukan sujud syukur, kenduri sambil berdoa, semoga penghentian permusuhan yang sudah ditandatangani kedua pihak tersebut betul-betul menjadi anak tangga awal menuju damai yang sejati dan hakiki di tanah rencong, bumi Serambi Mekkah. Beribu harapan tertumpu pada COHA, sebagian muncul dan diekspresikan dengan berbagai gaya dan cara, walaupun sebenarnya mereka sudah pernah didera oleh kekecewaan “gagalnya” Jeda Kemanusiaan. Harapan selalu ada, katanya dengan penuh optimistis.

Kenyataannya, pada mulanya memang demikian, sejak penandatanganan COHA, dan selama sekitar 3 bulan setelahnya, kondisi di Aceh relatif tenang, jarang sekali terjadi bentrokan fisik dan/atau kekerasan, baik oleh apkam RI maupun oleh GAM. Sementara itu *follow up* dari COHA, terus tahap demi tahap direalisasikan, diawali dengan pembentukan berbagai badan atau institusi yang diamanatkan oleh COHA. Masing-masing pihak mengambil posisi dalam rangka mengantisipasi COHA. Pihak RI, misalnya lebih sibuk dengan rencana dan persiapan badan atau institusi COHA, dan juga mempersiapkan personil dan anggarannya. Sementara GAM di lain pihak, kelihatan dan terasa lebih serius dan intensif melakukan sosialisasi, pertama di kalangan pengikutnya, sebagai pertanggungjawaban; kedua, kepada masyarakat, tentunya untuk mendapatkan dukungan terhadap sikap dan posisi mereka. Terjadilah di mana-mana ceramah/ceramah yang dilaksanakan oleh orang-orang GAM. Dengan dalih melaksanakan sosialisai, mereka menjelaskan tentang apa sesungguhnya COHA, dan mau ke mana setelah penanda tanganan COHA. Jika sedang berhadapan dengan kalangan GAM sendiri, tentunya mereka jelaskan pula, sebagai pertanggungjawaban kepada jemaah-nya, bahwa mengapa menandatangani COHA, dan bagaimana mengaitkan COHA dengan cita-cita mereka semula yakni “Aceh Merdeka”. Harus diakui dan sangat disayangkan “hampir tidak ada sosialisasi yang terencana (kebuali insidental) dari pihak pemerintah Indonesia”. Satu-satunya yang diketahui ada adalah, safari yang dilakukan oleh Wiryono dan Amran Zamzami, sebagai mantan juru runding yang berkeliling Aceh, melakukan pertemuan dengan para pejabat pemerintahan dan masyarakat di seluruh Aceh, dengan biaya sendiri (tidak direncanakan dan tidak dibiayai oleh pemerintah). Mereka menjelaskan segala sesuatu tentang kerangka dan bahkan rincian dari COHA tersebut, dan apa yang harus dilaksanakan setelahnya.

Itulah barangkali yang dapat dikatakan sebagai sosialisasi dari pihak Indonesia (atau pihak non-GAM). Akibat kurangnya sosialisasi tersebut, masyarakat menjadi serba kurang jelas, dan apabila mendapatkann informasi dari pihak lain, yang belum tentu semuanya beriktikad untuk melaksanakan COHA dengan baik, tentunya mereka menjadi bingung.

Awalnya biasa saja, adem ayem, namun ketika mulai melangkah ke tahapan menyentuh persenjataan GAM dan dikaitkan dengan demobilisasi, dan atau relokasi, dan atau refungsionalisasi, dari TNI/Polri, muncullah masalah. Walaupun mulanya dapat ditangani kasus demi kasus, namun kerancuan tersebut merembet terus dan akhirnya merata menjadi masalah antara Pemerintah RI dan GAM di mana-mana. Kekerasan pun tak terhindar dan tak terbendung, kembali terjadi lagi, semakin lama semakin meningkat. Akhirnya pemerintah melihat gejala tersebut telah menjurus kepada kegagalan COHA. Dengan ketetapan hati, dan katanya “dengan berat hati”, akhirnya pemerintah memberlakukan status DARURAT MILITER, untuk seluruh Aceh semenjak tengah malam tanggal 19 Mei 2003, kurang dari 8 bulan setelah penandatanganan COHA, s/ 19 Nopember 2002. Status darurat militer ini berlaku selama 6 bulan, dan setelah itu dievaluasi menyeluruh. Ternyata setelah dievaluasi tersebut selama 6 bulan tahapan pertama, ternyata keadaannya belum membaik, maka Darurat Militer diputuskan oleh pemerintah untuk diperpanjang untuk tahapan kedua yang berlaku dari tanggal 19 Nopember s/d 19 Mei 2004.

Sayang, beribu kali sayang. Bangunan yang telah dibangun dan telah ditata serta sedang ditata rapi, kiranya diterpa air pasang, karena letaknya memang di pinggir pantai dan bahan bangunannya juga hanya pasir pantai laut.

Pemberlakuan status darurat militer untuk Aceh, ditetapkan dengan Keppres No. 28/2003 untuk tahapan pertama, dan kemudian diperpanjang dengan darurat militer tahapan kedua yang ditetapkan dengan Keppres no. 97/2003, yang kedua-duanya merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan, utamanya UU No. 23/Prp/1959, tentang keadaan bahaya dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sejak ditetapkan status Darurat Militer tersebut, tidak kurang dari 26. 000 pasukan di tempatkan di Aceh. Penguasa Darurat Militer di tingkat pusat adalah Presiden sendiri, sedangkan di tingkat Aceh PDMD (Penguasa Darurat Militer Daerah)nya adalah Pangdam Iskandar Muda Mayjen. Djali Yusuf. Perkiraan resmi ketika itu adalah bahwa “musuh” yang akan dihadapi yakni pasukan GAM adalah seanyak 5.325 orang dengan kekuatan senjata sebanyak 2.000 pucuk. Dengan memakai rumus 10:1 untuk menghadapi gerilya, maka seharusnya dipersiapkan pasukan yang perlu dipersiapkan adalah sebanyak sekitar 50.000-60.000, lengkap dengan persenjataan dan logistiknya.

Melalui berbagai operasi militer yang intensif dan merata, maka kembalilah terjadi pertumpahan darah di bumi Aceh, sama sakali tidak benar seperti yang dikatakan oleh Megawati sebelum beliau menjadi Presiden. Kembali yang disesalkan dan disedihkan adalah jatuhnya korban di pihak penduduk sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka tak berdosa dan tak tahu apa-apa. Padahal dengan meningkatkan profesionalisme apkam sedikit saja, korban-korban sia-sia tersebut tentu dapat dihindari, apalagi dengan mengingat persenjataan GAM tidaklah secanggih yang dipunyai oleh Pasukan Keamanan RI

Setelah dua tahapan darurat militer yang berakhir tanggal 19 Mei 2004, dan sejak tanggal tersebut pula status Aceh ‘diturunkan” menjadi darurat sipil yang berlaku s/d tanggal 19 Nopember 2004 (6 bulan), dengan Keppres no. 43/2004. Sebagai Penguasa Darurat Sipil adalah Gubernur NAD, yang dibantu oleh Kapolda dan Pangdam IM serta Kajati NAD. dalam Kepres tersebut juga disebutkan dibentuknya tim asistensi dari pemerintah pusat yang akan membeantu/memberikan aistensi kepada pemerintah daerah NAD, dan melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan PDSD (Penguasa Darurat Sipil Daerah). Sedangkan operasinya bernama “operasi terpadu”, yakni

pemulihan keamanan dan ketertiban diramu secara integral dengan langkah-langkah komprehensif di berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat. Turunnya status Aceh dari Darurat Militer menjadi Darurat Sipil, disambut positif oleh banyak kalangan, baik di dalam maupun pihak-pihak internasional.

Ringkasannya adalah sebagai berikut:

1. Darurat Militer I dari tanggal 19 Mei 2003 s/d 19 Nopember 2003, ditetapkan dengan Keppres 28/2003.
2. Darurat Militer II, dari tanggal 19 Nopember 2003 s/d 19 Mei 2004, ditetapkan dengan Keppres no. 97/2003.
3. Darurat Sipil, dari 19 Mei 2004 s/d 19 Nopember 2004, ditetapkan dengan Keppres 43/2004.

Penculikan dan Penyenderaan Wartawan RCTI dan Keluarga TNI

Aksi-aksi dan juga berbagai kegiatan lainnya, membuktikan kesungguhan pemerintah (Indonesia) tetap *committed* pada proses perundingan untuk menyelesaikan masalah Aceh. Dalam berbagai pertemuan, selalu pihak Pemerintah RI selalu mendesak agar HDC dapat memperoleh komitmen dan pengakuan dari GAM atas "joint statemet", tanggal 10 Mei 2002. Di samping itu dalam setiap pertemuan juga membahas bagaimana agar kedua pihak menghentikan tindak kekerasan terhadap penduduk sipil. Demikian pula jika ada pertemuan antara GAM dengan HDC, namun suasana lapangan selalu berbeda, bahkan bertentangan dengan penampilan, sikap dan pernyataan pimpinannya dimeja perundingan, atau di depan pers. Salah satu di antaranya adalah diculiknya dan ditahannya dua orang wartawan RCTI yakni Elsa Siregar, reporter senior, dan Fery Santoro, kameramen RCTI, sejak hari Minggu, tanggal 29 Juni 2003. Sebelumnya telah pernah ditahan pula dan kemudian berhasil dinegosiasikan untuk dibebaskan wartawan berkebangsaan AS, William Nessen. Ersya dan Fery, bersama dua orang istri TNI Angkatan Udara RI, bernama Safrida dan Soraya, serta sopir bernama Rachmatsyah, dihadang di dalam perjalanan dari Langsa menuju Lhokseumawe, dan dengan mata tertutup dibawa ke hutan di wilayah GAM yang dipimpin oleh Ishak Daud.

Mulanya mereka dituduh sebagai mata-mata dari RI, namun kemudian setelah tidak terbukti, mereka masih tetap ditahan, untuk meningkatkan posisi *bargaining* mereka dengan mengundang campur tangan Palang Merah Internasional (ICRC) dan PMI. Setelah beberapa kali berpindah tempat, selama sekitar satu tahun di hutan belantara Aceh Timur, berbagai pengalaman dan juga pengetahuan didapatkan oleh kedua wartawan tersebut. Ersya Siregar dalam suatu penyerapan oleh TNI, pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2003 tertembak peluru nyasar dalam pertempuran atau baku tembak tersebut. *Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un*. Itu berarti persis setelah mereka diculik selama 6 bulan, sejak 29 Juni 2003. Sementara Fery, berhasil menyelamatkan diri melalui parit-parit, rawa, dan semak belukar, bersama seorang tahanan GAM lainnya, dan akhirnya ditangkap kembali oleh GAM.

Sedangkan Safrida dan Soraya, keduanya istri personil AURI, demikian pula Rachmatsyah sang sopir, dalam suatu penyerapan lainnya, berhasil lolos diselamatkan oleh operasi apkam RI.

Beberapa kali Fery dijanjikan akan dibebaskan tetapi nyatanya tidak juga. Terakhir akan dipertemukan dengan Sekjen PMI, akhirnya karena adanya penyerbuan TNI yang menewaskan Tgk. Mansyur, jubah GAM Aceh Timur, menjadi gagal atau ditunda kembali.

Sementara di Banda Aceh, dan di Aceh Timur/Langsa, menurut keterangan Alfian, terjadi kegiatan-kegiatan yang sangat serius dan intensip, serta kondisinya sangat mencekam, dalam rangka mengupayakan agar Fery dapat dibebaskan. Alfian yang memang telah kenal lama dengan Ishak Daud, sangat diharapkan bantuan oleh Yahya, Kodam I. M, agar dapat membantu pembebasan Fery. Yahya kenal baik dengan Alfian. Alfian, seorang pengusaha, yang ketika itu sedang berada di Medan, ditelepon oleh

Yahya, agar dapat datang di Banda Aceh untuk ikut membantu pembebasan Fery. Alfian pun mendapat telepon dari teman baiknya Yahya, bergegas pergi ke Banda Aceh. Setelah dipertemukan dengan Panglima yang ketika itu Mayjen. Endang Suwarya, diaturlah beberapa teknis pelaksanaannya, bersama orang PMI. Kemudian mereka berangkat ke Langsa bergabung dengan tim yang telah terlebih dahulu berada di sana baik dari kalangan PMI, yang dipimpin oleh Mar'i Muhammad, ICRC, Aparat Keamanan, dipimpin sendiri oleh Pangdam IM/Dan Rem/Dandim, maupun dari kalangan *RCTI*, dipimpin oleh Imam Wahyudi Wapemred *RCTI*. Ditentukan Alfian bersama ICRC berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Ishak Daud melalui pembicaraan per telepon dengan Alfian. Setelah menempuh jalan yang sangat berbelit dan jauhnya sekitar 70 km, dengan dipandu oleh telepon Ishak Daud, akhirnya sampailah mereka di suatu tempat, untuk berunding. Katanya (kata orang-orang GAM) yang menemui mereka, sebentar lagi Fery akan dijemput dibawa ke tempat tersebut. Tetapi, setelah ditunggu sekian lama, Fery tak kunjung muncul. Setelah ngorol atau bernegosiasi semalam suntuk dengan Ishak Daud, akhirnya Alfian mendapat janji dari Isahak Daud bahwa besok Fery sudah dapat dibawa "turun". Alasan Ishak Daud tidak segera memberikan Fery, katanya kepada Alfian, bukan saya tidak percaya sama Anda, Alfian, tetapi masalahnya Fery sedang dikelilingi oleh pasukan Keamanan RI yang sedang beroperasi di sekitar lokasi tersebut, jadi sulit untuk mengeluarkannya. Sisa malam itu dihabiskan di tempat tersebut bersama kerumunan nyamuk yang lumayan banyaknya, ditambah lagi dengan susahnyanya bukan main kalau hendak buang hajat besar. Alfian menginap di tempat Ishak Daud tersebut bersama 6 orang wartawan, yakni Imam Wahyudi dari *RCTI*, Munir dari *RCTI*, Nezar Patria dari *Tempo*, serta Solahuddin, Nany dan Arifin. Selain itu ikut bersama mereka menginap di tempat tersebut, orang-orang ICRC, Alamsyah, SH., pengacara, dan seorang dokter dari PMI, serta seorang penterjemah. Keesokan harinya sekira pukul 7.00 pagi Alfian dipanggil oleh Ishak Daud, dengan perintah agar Alfian pergi ke suatu tempat, hanya dengan dokter, yang lainnya harus berhenti di suatu tempat di perjalanan (tidak sampai kelokasi tersebut). dalam keadaan perut kosong, karena belum sarapan, Alfian pun dan rombongan berangkat kelokasi tersebut. Kemudian perjalanan berubah arah menuju Idi Cut dengan dipandu oleh seorang GAM, dan dilokasi tersebutlah Alfian bertemu dengan Fery. dalam perjalanan tersebut rombongan Alfian tiga kali dihadang oleh operasi apkam RI di perjalanan. Akhirnya, menurut pengakuan Alfian, dengan menelepon Pangdam IM, rombongan Alfian menjadi lancar di perjalanan menuju Idi Cut. Dari tempat itu kembali ke tempat Ishak Daud. Dan setelah negosiasi kembali akhirnya diperbolehkan Fery dibawa "turun" ke Langsa dengan catatan 6 wartawan yang menyertai Alfian harus tinggal di tempat Ishak Daud, sampai besok pagi Fery kembali dibawa "naik" untuk kenduri pelepasan, dan penyerahan resmi dari GAM kepada ICRC dan PMI. Sesuai janji besok pagi Fery kembali dibawa oleh Alfian "naik" ke tempat Ishak Daud. Setelah upacara pelepasan dengan kenduri potong lembu, Fery pun diserahkan secara resmi oleh Ishak Daud a/n GAM kepada ICRC dan PMI. Fery, setelah itu, langsung dibawa turun ke Langsa. *Alhamdulillah*, Fery akhirnya bebas dari cengkeraman GAM, dan kembali kepada keluarganya di Jakarta, dengan selamat.

Tidak banyak yang mengetahui siapa yang paling berperan dalam pembebasan Fery, jangan-jangan Fery sendiri pun tidak tahu. Buktinya dia tidak menuliskan sama sekali dalam bukunya¹²⁰¹. Tidak pula banyak yang tahu siapa sebenarnya Alfian, yang berperan besar dalam pembebasan Fery. Dia adalah seorang warga negara Indonesia, yang sudah cukup lama berdomisili dan berbisnis di Aceh. Orang tuanya pun dan hampir semua saudaranya sudah lama tinggal dan berbisnis di Aceh. Dia berteman baik dengan Yahya (sekarang Mayjen. TNI, mantan Kastaf Kodam IM, dan melalui Yahya, dia diperkenalkan dengan Pandam IM, dan tentunya banyak personil apkam RI lainnya. Dia mengenal baik Ishak Daud, semenjak yang bersangkutan belum menjadi GAM.

¹²⁰¹ Fery Santoro, *Antara Hidup dan Mati*.

Perlu diketahui, Alfian, bertindak, dan bersedia membantu pembebasan Fery, semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan, dan juga karena dasar pertemanan pribadi dengan Yahya dan Ishak Daud.

Kisah tentang pembebasan Fery Santoro ini, dibuat atas dasar wawancara penulis dengan Alfian, pada tanggal 1 Agustus 2006, di Banda Aceh.

Dalam wawancara tersebut ada beberapa nama yang tidak persis dapat diingat lagi oleh Alfian, demikian juga dengan nama tempat/lokasi dan waktu. Keseluruhan wawancara tersebut, dituliskan oleh penulis dalam bentuk garis besar, tidak sedetail yang diuraikan oleh Alfian.

Gagalnya COHA

Cessation of Hostilities Agreement (COHA), yang sesungguhnya telah memberikan “road map” bagi upaya damai yang berikutnya dan sesungguhnya, sedang berada tepi jurang kegagalan

Banyak hal diatur dalam CoHA, namun intinya adalah, bagaimana menghentikan permusuhan dan semua tindak kekerasan di Aceh. Hal itu sangat terkait dengan bagaimana mengimplementasikan pengaturan-pengaturan berkenaan dengan: penggudangan senjata (*cantonment of weapons*) GAM, menghentikan operasi militer, dan sejalan dengan itu membentuk zona damai (*peace zones*), serta mengubah mandat dan peranan apkam RI dan pasukan GAM dari yang bersifat menyerang menjadi bertahan, dan secara khusus mengubah peran Polri, serta relokasi posisi dari pasukan baik apkam RI maupun GAM. Tetapi, ternyata substansi inilah yang sangat krusial pula di lapangan. Karena selain secara normatif memang sulit dalam pelaksanaannya, juga karena yang satu, selalu dan sangat tergantung atau dikaitkan dengan yang lain.

Telah ditentukan/disepakati adanya batas waktu untuk melakukan penggudangan senjata oleh GAM. Namun, ternyata GAM gagal untuk memenuhi deadline bulan Februari untuk mengantongkan senjata, yang kemudian diikuti oleh penolakan oleh TNI untuk merelokasikan pasukannya, yang kemudian diikuti dengan penyerangan terhadap kantorkantor JSC di luar Banda Aceh yang diduga dilakukn oleh orang yang diinspirasi oleh TNI, sebagaimana dikatakan oleh Kirsten E Schulze, dalam bukunya¹²⁰², “*The first signs of trouble came when GAM failed to meet the February deadline of the cantonment of its arms, -- followed by the TNI’s refusal to relocate and then the paralyzing of the JSC through the TNI-inspired systematic attacks on all its offices outside of Banda Aceh*”.

Walaupun kasus-kasus itulah yang muncul dipermukaan, namun yang lebih prinsipil adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Malik Mahmud pada tanggal 22 Februari 2002, yakni: “*The negotiations are within the framework of NKRI. But we have different interpretations of what that means. Our aim is still independent. We don’t talk about autonomy. For us it is decolonization proses*”.¹²⁰³

Berbagai upaya ditempuh untuk menyelamatkan COHA, termasuk diadakannya pertemuan Tokyo, tanggal 18 Mei 2003. Namun, sekali lagi, itu pun tidak membuahkan hasil, mengingat GAM tetap tidak dapat menerima otonomi khusus, sebagaimana diatur dalam UU tentang NAD yang berarti juga GAM tidak dapat menerima bahwa Aceh berada dalam NKRI. Sementara itu kekerasan di lapangan, semakin meningkat, yang ditandai antara lain, penculikan 2 orang krew RCTI, berikut dua orang istri anggota TNI-AU, dan berbagai kekerasan lainnya.

Akhirnya pada tanggal 18 Mei 2003, sejak tengah malam pemerintah memberlakukan status Darurat Militer untuk Aceh, dengan mengeluarkan Keppres No. 28 tahun 2003.

¹²⁰² Kirsten E Schulze, *The Free Aceh Movement: Anatomy of a Separatist Organization*, hal 45.

¹²⁰³ Kirsten, *ibid*.

Melihat kenyataan yang sedemikian, tidak salah rasanya kalau Kirsten Schulze mengatakan bahwa “*Overall, then, the peace process saw more failures than achievements*”. Posisi kedua pihak tetap saja sama, tidak beranjak seinci pun, yakni: GAM tetap menuntut merdeka dari Indonesia, sedangkan Pemerintah RI tetap mempertahankan NKRI termasuk Aceh di dalamnya.***



BAB 17

MERINTIS JALAN MENUJU HELSINKI **Usaha Damai Presiden SBY dan Wapres JK**

Sentuhan Tangan Dingin Presiden Martti Ahtisaari

“**GAGALNYA**” COHA, dapat dipersamakan dengan gagalnya HDC, sedangkan sebabnya tentulah bermacam-macam. Ada yang mengatakan salah GAM, ada yang mengatakan salahnya aparat keamanan RI, ada pula yang mengatakan kurang piawainya HDC, tidak kurang pula yang menuding karena tidak adanya sosialisasi, dan sebagainya. Sementara itu banyak pula yang menggunakan logika sederhana, dengan berkesimpulan, bahwa kedua pihak kurang serius, karena sesungguhnya mereka belum merasa perlu untuk ber-dialog untuk damai, “kedua-duanya masih senang berperang”. Cuma sayang-nya yang korban paling banyak, bukanlah orang-orang yang memegang senjata, tetapi rakyat yang tak bersenjata, bahkan perempuan dan anak-anak.

Kemungkinan untuk mendapatkan atau menempuh modus baru perundingan atau penyelesaian konflik Aceh secara damai mulai terlihat lagi, dari kedekatan hubungan dua makhluk Tuhan yang peduli terhadap Aceh. Keduanya adalah Dr. Farid Husain, seorang Bugis, pejabat teras Departemen Kesehatan RI yang ketika itu sedang di BKO kan di kantor Menko Kesra, sebagai Deputy-II Menko Kesra, dan Juha Christensen, seorang Finlandia, *executive consultant* dari SCS Consulting LTD, beralamat *Haarikkakatu 3, 15300 LAHTI, Finland*. Mereka berdua adalah sahabat lama, semenjak Juha bertugas di Sulawesi Selatan, selain tentunya ada hubungan bisnis yang seirus. Tetapi, yang paling penting adalah keduanya sangat peduli Aceh, dan ingin sekali membantu Yusuf Kalla, yang telah beralih dari Menko Kesra menjadi wakil Presiden RI. Dengan terpilihnya Jusuf Kalla menjadi wakil Presiden RI mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pemilu putaran kedua pada bulan September 2004, upaya peyajakan untuk menghidupkan kembali dialog dan usaha damai untuk menyelesaikan masalah Aceh pun kembali serius dilakukan. SBY dan JK memang sejak semula ketika beliau masih sama-sama sebagai Menko, telah menunjukkan iktikatnya dan bahkan berupaya secara konkrit, dengan sungguh-sungguh agar konflik Aceh tidak diselesaikan dengan laras senapan, tetapi melalui proses damai dengan langkah-langkah dialog. Kedua pimpinan puncak Negara RI yang langsung dipilih rakyat tersebut, masing-masing mempunyai *track record* yang cukup bagus dalam upaya damai menyelesaikan konflik. Antara lain SBY dengan kesuksesan beliau menghantarkan GAM dan Pemerintah RI ke meja perundingan dan menandatangani COHA, walaupun kemudian

gagal, sedangkan JK, sukses dalam menyelesaikan konflik horizontal di Poso dan Maluku. Merekapun menjajaki kemungkinan untuk menghidupkan kembali proses dialog antara pemerintah RI dengan Pimpinan GAM, yang sudah terhenti sejak COHA dianggap gagal. Maka semenjak Desember 2004/Januari 2005, Yuha dan Farid pun mulai bersurat menyurat, dan juga bertemu langsung untuk membahas perihal tersebut. Tidak persis diketahui apakah kegiatan Dr. Farid tersebut seizin atau mendapat mandat dari atau paling sedikit setahu Jusuf Kalla yang waktu itu sebagai wakil Presiden RI, atau tidak, *wallahu a'lam*, tetapi yang jelas Dr Farid bebas bergerak untuk melakukan peninjauan tersebut bersama Juha.

Mantan Presiden Finland, Martti Ahtisaari, yang konon ceriteranya adalah juga dikenal baik dari Juha, berhasil diajak oleh Juha dan Dr. Farid untuk ikut, memberikan jasa baiknya, membantu “mempengaruhi” pimpinan GAM di Stockholm agar bersedia berdialog kembali dalam rangka mencari penyelesaian konflik Aceh secara damai.. Marti dalam hal ini menyandang kapasitas sebagai Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative. Mungkin semacam “menggantikan fungsi dan peran HDC”. Terjadilah beberapa kali pertemuan antara Martti Ahtisaari dengan pimpinan GAM, dan dalam pertemuan tanggal 8 Januari 2005 di Helsinki, dicapailah kesamaan pendapat antara lain berkenaan:

1. Perlunya pertemuan dan dialog kembali antara PEMRI dan GAM.
2. PEMRI, mengindikasikan ketidak setujuannya bahwa pertemuan dan dialog berikutnya difasilitasi oleh HDC.
3. GAM mengindikasikan akan memenuhi undangan untuk pertemuan berikutnya di Helsinki.
4. Masyarakat internasional sangat setuju jika dilakukan pertemuan dan dialog, dan bukan dengan cara-cara lainnya apalagi dengan kekerasan bersenjata.
5. Atmosfir baru antara kedua pihak dapat diciptakan melalui Helsinki Rounds untuk memungkinkan memulai kembali diskusi dan dialog tentang langkah-langkah berikutnya.
6. PEMRI hanya akan memberikan otonomi khusus, sesuai UU no. 18, tahun 2001. GAM dapat mempertimbangkan untuk menerimanya sebagai dasar untuk memulai pembicaraan.
7. Bencana alam gempa bumi dan tsunami telah meluluh lantakkan dan mengubah situasi dan kondisi di Aceh, baik masyarakatnya maupun harta bedanya, dan komunitas dunia manaruh simpati kepada Indonesia dan Aceh.
Membangun kembali Aceh akan memakan waktu paling cepat 10 tahun. GAM tentulah dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan ini. Aspek kemanusiaan haruslah menjadi prioritas utama.
8. Adalah sangat mendesak untuk melakukan pembicaraan/ perundingan, sedangkan waktu berjalan terus.
9. Kantor Martti Ahtisaari siap untuk melaksanakan “ronde pertama pembicaraan non-formal, tertutup dan rahasia” di Helsinki pada tanggal 28-30 Januari 2005.

Terlepas dari adanya latar belakang lain untuk mengajak kedua pihak berunding kembali, kelihatan sekali benang merahnya yang digunakan oleh Marti untuk memotivasi pihak GAM, adalah: pertama; adanya bencana alam gempa bumi dan tsunami yang dahsyat yang telah memporak porandakan Aceh dan penduduknya; dan kedua; dukungan masyarakat internasional untuk proses dialog menuju damai.

Kedua faktor tersebut, memang sangat dominan. pasca bencana alam, adalah upaya sungguh-sungguh untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana seyogianya

semua potensi bangsa dan potensi Aceh, berperan aktif terlibat di dalamnya, termasuk unsur pemerintah RI and GAM tentunya. Jika pada saat yang diperlukan oleh rakyat agar semua pihak berbuat nyata tersebut, kedua pihak masih berperang, tentulah akan sangat menyakitkan hati rakyat, dan menurunkan kredibilitas mereka di mata rakyat, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kedua pihak. Demikian pula dukungan masyarakat internasional, terutama dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi, mereka telah menunjukkan begitu besar simpati dan empatinya, dengan berbagai macam bantuan nyata, baik dalam bentuk uang maupun *in-kind*. Tentulah mereka akan sangat kecewa, jika pada saat-saat seperti itu, kita sendiri di Aceh masih berperang memperebutkan sesuatu yang “saat ini” bukan menjadi kebutuhan utama rakyat. Karena kebutuhan utama rakyat saat ini adalah: rumah, tempat tinggal, toko, sekolah, tempat ibadat dan harta benda lainnya, biaya hidup, modal usaha, biaya sekolah, yang telah hancur lebur dan berantakan karena gempa bumi dan tsunami. Bahkan bagi rakyat barangkali, saat kritis seperti tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini, adalah ajang penilaian, siapa yang berbuat bagus, banyak, benar dan tepat dalam memenuhi kebutuhan rakyat saat ini, bukan kebutuhan besok.

Secara jeli sekali Martti Ahtisaari menjadikan dua hal ini sebagai motivasi untuk mengajak pihak GAM dan juga pemerintah RI untuk kembali ke meja perundingan.

Soal adanya selentingan yang mengatakan GAM “harus” (jadi: terpaksa) kembali ke meja perundingan karena tidak mendapat dukungan masyarakat internasional, dan tidak satu negara pun di dunia mendukung GAM dan Aceh Merdeka bahkan semuanya mendukung integritas wilayah Indonesia, diperkirakan bukanlah sebagai faktor utama yang membuat GAM mau berunding kembali. Hal itu dapat dibuktikan dari pengalaman yang lalu, ketika Dubes AS. Gilbert, suatu ketika mengatakan “tidak satupun negara di dunia mendukung perjuangan GAM untuk Aceh Merdeka, toh GAM tetap saja meneruskan perjuangannya untuk mencapai “Aceh Merdeka”. Jadi kembali benarnya tesis Marti yang mengedepankan soal gempa bumi dan tsunami, serta dukungan masyarakat internasional berkenaan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, untuk memotivisir pihak-pihak, terutama GAM untuk kembali berunding di Helsinki

Dan motivasi itu ternyata berhasil, karena pada tanggal 27-30 Januari 2005, terjadilah apa yang disebut sebagai ronde pertama dari “*informal, closed, and confidential meeting*” di Helsinki, sebagaimana disebutkan di atas.

Pertama-tama, pada tanggal 27 Januari 2005, pukul 14. 00, selama 2 jam, Ketua dan fasilitator dari pertemuan tersebut yakni Martti Ahtisaari bertemu dengan delegasi Indonesia yang terdiri dari menteri Hukum dan Perundang-undang serta HAM, Dr. Hamid Awaluddin, menteri Informasi dan Komunikasi, Dr. Sofyan Djalil, dan Dr, Farid Husain. Delri didampingi oleh Dubes RI untuk Finland, Iris Indira Murti. Sedangkan delegasi GAM terdiri dari Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah, satu orang dari GAM New York, dan satu orang dari GAM Malaysia

Pertemuan atau diskusi ronde pertama antara PEMRI dengan GAM, berlangsung tanggal 28-29 Januari 2005 pukul 10. 00, dan itu adalah hari Jum’at, dan Sabtu

Pertemuan ronde kedua terjadi pada tanggal 21-23 Februari 2005, lebih banyak waktu dihabiskan untuk membahas self government; apa, mengapa dan bagaimana. Disatu pihak ada yang mensyaratkan, sebagai prasyarat utama untuk bersediannya pihak PEMRI untuk bertemu dan berdialog kembali adalah apabila GAM mengesampingkan tuntutanannya semula untuk independence (merdeka), sedangkan di lain pihak Jubir GAM Bachtiar Abdullah dalam *statementnya* mengatakan “*GAM has not given up its claim for independence for Aceh*”

Mungkin munculnya modus *self government*, adalah sesuatu yang sedikit di bawah *independent*, dan berada sedikit di atas otonomi khusus.

Sedangkan hari Minggu, adalah hari cadangan, jika diperlukan dapat saja dipakai.

Pertemuan ronde ketiga pada tanggal 12 April 2005, membahas hal-hal yang berkaliber simbolik, seperti bendera, lambang, hymne, di samping melanjutkan substansi yang sebelumnya telah pernah dibicarakan, seperti otonomi khusus/*self government*, partai politik lokal, pemilu lokal, *disarmament procedures*, *amnesty*, *monitoring*, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, dialog langsung membahas draft MoU, dan pada pertemuan ronde keempat, pembahasan terakhir draft Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Namun, sebelum penanda-tanganan MoU, pihak GAM meminta waktu dan kesempatan untuk dapat bertemu dengan perwakilan masyarakat sipil dari Aceh.

Pertemuan GAM dengan Perwakilan masyarakat Sipil

Ada dua kali pertemuan antara GAM dan perwakilan masyarakat sipil Aceh, sebelum ditandatanganinya MoU Helsinki, yakni, pertama: pada tanggal 23-24 Mei 2005 di Saltsjbaden, dan kedua pada tanggal 9-10 Juli 2005 di Lidingo, kedua-duanya di negara Sweden.

Menjelang perundingan ronde keIV, telah disepakati (atau PEMRI setuju) agar GAM mendengarkan pendapat dari masyarakat sipil. Untuk itu atas bantuan Yayasan Olof Palme International Center mereka sebanyak 16 orang dianggap tokoh masyarakat Aceh baik yang berdomisili di Aceh, di Jakarta maupun di tempat-tempat lainnya.

Untuk diketahui, Olof Palme International Center, adalah suatu NGO, Swedia.

Mereka yang menamakan dirinya sebagai perwakilan dari masyarakat sipil Aceh (*the representatives of the Aceh Civil Society*), mengeluarkan suatu "Position Statement of the Aceh Civil Society at the Conclusion of the GAM-Acheh Civil Society Meeting of 23 and 24 May 2005" yang isinya sebagai berikut:

1. Mendukung solusi yang damai, adil dan diakui bersama dari konflik di Aceh, sesuai dengan keputusan DPR RI (Tap-Tap MPR RI), aspirasi rakyat Aceh, dan keinginan dari masyarakat internasional.
2. Tidak setuju dengan pendapat yang sering dikemukakan, dan sikap dari sementara politisi Indonesia tertentu yang bermaksud untuk membatasi intensitas dialog untuk menyelesaikan konflik Aceh, yang bertentangan dengan keputusan MPR RI, aspirasi rakyat Aceh, dan keinginan masyarakat internasional.
3. Meminta agar GAM dapat konsisten dengan posisi tradisionalnya untuk tetap memilih jalan dialog dalam meja perundingan dengan PEMRI, dalam mendapatkan solusi konflik Aceh.
4. Mendukung keterlibatan langsung dari masyarakat internasional, baik berupa tenaga maupun dana dalam proyek-proyek rekonstruksi Aceh pasca-tsunami, dengan keikutsertaan rakyat Aceh, baik yang ada di Aceh, maupun di luar Aceh.
5. Mendesak GAM dan PEMRI untuk menyepakati mengakhiri permusuhan di Aceh pada negosiasi mereka ronde ke -IV di Helsinki.
6. Menghimbau masyarakat internasional baik pemerintahnya, maupun NGOs atau lembaga donor lainnya, untuk membuat gencatan senjata (suasana tenang), sebagai suatu prakondisi bagi upaya membiayai rekonstruksi, rehabilitasi dan recovery di Aceh, dalam rangka memelihara efektifitasnya, dan optimalisasi.

7. Meminta PEMRI untuk membebaskan secepatnya dan tanpa syarat, tahanan dan narapidana yang terkait dengan konflik Aceh.
8. Mendesak PEMRI dan GAM untuk menjamin kebebasan berbicara, bagi penduduk sipil di Aceh.

Saltsjobaden, Sweden, 24 May, 2001.

Sebagaimana tertulis di naskah statemen di atas bahwa pertemuan GAM dengan masyarakat sipil tersebut berlangsung di Swedia, yakni dikota Saltsjobaden.

GAM melalui juru bicaranya Bachtiar Abdullah, menyambut baik hasil pertemuan GAM dengan masyarakat sipil tersebut, dalam statemennya atas nama GAM mengatakan antara lain:

- GAM menerima dan mendukung harapan dari perwakilan masyarakat sipil Aceh untuk melakukan negosiasi untuk solusi politik untuk mengakhiri konflik Aceh, dan mengharapkan agar PEMRI dapat merespek harapan tersebut.
- GAM merasa terdorong oleh dukungan masyarakat sipil untuk melakukan/ikut dalam proses damai Helsinki.
- GAM menghimbau PEMRI untuk menunjukkan iktikad baik dengan meneruskan proses negosiasi menuju terciptanya solusi politik, melalui proses damai Helsinki, untuk segera menginstruksikan angkatan bersenjata untuk menghentikan permusuhan, dan untuk menghormati hak-hak demokrasi rakyat Aceh, untuk hidup dalam kedamaian dan bermartabat.

Statemen tersebut di keluarkan di Stockholm, Sweden pada tanggal 24 May 2005

Setelah menjalani proses informal meeting tersebut, dengan berbagai referensi, termasuk hasil-pertemuan GAM dengan masyarakat sipil; pada tanggal 23-24 Mei 2005, rupa-rupanya GAM masih merasa memerlukan “amunisi” tambahan, berupa masukan dari masyarakat sipil sekali lagi. Oleh karenanya maka pada tanggal 9-10 Juli 2005, diadakanlah pertemuan kedua antara GAM dan beberapa orang perwakilan masyarakat sipil, Aceh, di Lidingo, Sweden. Pertemuan kedua inipun disponsori/dibiayai oleh Olof Palme International Center.

Untuk pertemuan yang kedua inipun juru bicara GAM Bachtiar Abdullah, antara mengatakan pada tanggal 10 Juli 2005, sebagai berikut:

- GAM merasa terdorong oleh dukungan yang diberikan oleh masyarakat sipil untuk proses damai di Helsinki.
- Kedua pihak (GAM dan perwakilan masyarakat sipil), percaya bahwa hanyalah dengan jalan *Agreement* melalui perundingan, untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan berkelanjutan di Aceh yang akan memberikan rakyat Aceh hak dan kapasitas untuk menentukan masalahnya sendiri dalam konteks negara Republik Indonesia.

Selanjutnya statemen Bachtiar Abdullah lebih kurang sama dengan ketika menanggapi hasil pertemuan GAM dengan masyarakat sipil yang pertama, tanggal 23-24 Mei 2005.

Di samping itu ada pula pertemuan antara pimpinan GAM, dengan tokoh sipil tertentu baik dari Aceh, maupun dari kota-kota lainnya di Indonesia, dan berlangsung di Kuala Lumpur, yang juga disponsori oleh Yayasan Olof Palme. Pertemuan tersebut antara lain di hadiri oleh T. Safli Didoh, Ketua TIM, Dr. Said Zainal Abidin, Ghazali Abbas, Fauzi Usman, dan Dr. Buchari Kasem, keduanya dari Aceh Sepakat, Medan, T. Kamal Arif dan Dr. T. Zulkarnaen, keduanya dari Bandung, M. Saleh, dari Banda Aceh

Dalam berbagai pertemaun pimpinan GAM dengan perwakilan masyarakat sipil tersebut, dari pihak GAM kelihatan sangat berperannya seseorang bernama Damien Kingsbury, seorang Akademiciant bidang Politik dari Australia, yang menjadi penasehat GAM dalam perundingan Helisinki tersebut.

Kemudian pada tanggal 12 Juli 2006, Bachtiar Abdullah, kembali mengeluarkan pernyataannya yang kali ini, untuk menanggapi hasil-hasil yang dicapai dalam perundingan PEMRI ddan GAM di Helsinki, yang lebih banyak berbicara tentang demokrasi di Aceh. Bachtiar antara lain mengatakan:

- Untuk mencapai perdamaian, GAM telah setuju dengan konsep *self government*, dalam negara Republik Indonesia, dan hal itu telah disampaikan dalam perundingan Helsinki ronde kedua.
- Tetapi secara tegas menolak status quo dari otonomi khusus, yang telah memproduksi banyak tumpah darah.
- GAM tidak lagi meng klaim kemerdekaan dalam perundingan di Helsinki, tetapi GAM tidak dapat menerima status otonomi khusus. *Self government* adalah usul kompromi yang ditawarkan GAM.
- GAM mengharapkan adanya jalan tengah sebagai kompromi dari pihak Indonesia.***



BAB 18

MOU HELSINKI

SATU hari sebelum Pertemuan Helsinki IV, ada pertemuan di Stockholm antara Pimpinan GAM dengan 16 orang mewakili masyarakat sipil baik dari Aceh, Jakarta, Bandung maupun dari tempat-tempat lainnya. Kehadiran mereka di pertemuan tersebut diundang dan dibiayai oleh Yayasan Olof Palme.

Sementara itu saat itu masih ada beberapa substansi yang belum dapat dituntaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, antara lain:

- Berkenaan dengan partisipasi politik orang-orang GAM, yang berkaitan dengan kemungkinan dibentuknya Partai Lokal.
- Soal kemungkinan dilaksanakannya pemilu ulang,
- Berkenaan dengan teknis dan prosedur peletakan senjata. Dan perlakuan terhadap senjata-senjata yang diletakkan.
- Perlakuan terhadap orang-orang GAM, setelah pemberian amnesty,

Pihak GAM tidak membicarakan lagi “independent”, tetapi mereka juga tidak menyebut-nyebut sama sekali “otonomi khusus”

Sofyan Djalil pernah mengatakan dalam pertemuan dengan Taman Iskandar Muda (TIM) di kantornya, tanggal 15 Juni 2005, bahwa beda pertemuan yang lalu dengan yang sekarang (pertemuan Helsinki), adalah kalau dulu, “mencari perbedaan, tetapi yang sekarang mencari persamaan”. Beliau selanjutnya mengatakan, bahwa perundingan kali ini benar-benar untuk mencari solusi untuk selama-lamanya, sekali disepakati, maka untuk selama-lamanya tidak akan ada pemberontakan lagi di Aceh. Sungguh suatu pernyataan dan mungkin juga mengandung harapan yang mulia. Edward Aspinall¹²⁰⁴, mengatakan bahwa persetujuan itu menjadi mungkin setelah GAM mengumumkan pada bulan Februari 2005, bahwa “*it was willing to set aside its goal of independence and accept a solution based on “self government“ for Aceh within the Indonesian state*”.

Akhirnya, dengan menggunakan formula “*nothing is agreed until every-thing is agreed*”, Marti dengan sentuhan dinginnya, berhasil menggiring kedua pihak untuk merampungkan pertemuan ronde keempat. Akhirnya pada ronde kelima, tanggal 15 Agustus 2005, di Helsinki, ibukota Finlandia, ditanda-tanganilah, Naskah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM, yang teks lengkapnya adalah sebagaimana terlampir.

Sebelum masuk keisinya, kita ikuti sejenak bunyi intronya, sebagai berikut: “Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

¹²⁰⁴ Edward Aspinall.

Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keber-hasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.

Nota kesepahaman ini merinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Untuk maksud ini pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:”

Intro, yang mungkin dapat disebut sebagai mukadimah tersebut, mengan-dung beberapa essensi, antara lain:

1. Adanya tekad untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Adanya tekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat berjalan secara demokratis, dan adil dalam dan dengan konstitusi NKRI.
3. Adanya tekad untuk membangun kembali Aceh pasca Tsunami.
4. Adanya tekad untuk membangun rasa saling percaya.

Dengan keempat tekad dan semangat itulah, kedua pihak mengikatkan diri pada berbagai komitmen yang tertuang dalam batang tubuh dari MoU tersebut, yaitu secara garis besarnya berupa:

1. Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, terdiri pula dari 4 subtopik yaitu:
 - 1.1. Undang -undang tentang Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.
 1. 2. Partisipasi Politik.
 1. 3. Ekonomi.
 1. 4. Peraturan Perundang-undangan.
2. Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari: 3 butir.
3. Amnesti dan Reintegrasi ke dalam masyarakat., yang terdiri dari 2 sub-topik, yaitu:
 3. 1. Amnesti, dan
 3. 2. Reintegrasi ke dalam masyarakat.
4. Pengaturan Keamanan, yang terdiri dari: 12 butir.
5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh, yang terdiri dari: 15 butir.
6. Penyelesaian Perselisihan, hanya 1 butir, dengan 3 sub-butir.

Keenam topik itu tersebut, ada yang dilaksanakan langsung, ada yang pelaksanaannya berbentuk pengadaan Badan-badan tertentu, ada pula dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Walaupun akhirnya ditandatangani oleh kedua pihak, namun tidak berarti tanpa masalah, bahkan dapat dikatakan cukup banyak substansi yang dapat dianggap pada mulanya sebagai krusial, namun akhirnya dapat disepakati untuk ditandatangani; apakah puas atau tidak, wallahu ‘alam.

Ada proverb Aceh yang mungkin cocok untuk situasi seperti ini, yakni.

Bah pih tameh sulang saling,

Asai puteng ji lop lam para

Menurut catatan dari para pengamat, ada beberapa materi dianggap dan memang berat dalam pembahasannya, antara lain:

- Yang berkenaan dengan beberapa istilah yang di telinga orang Indonesia tidak lazim seperti: Pemerintah Aceh, Kepala pemerintah Aceh, legislatif Aceh yang tidak terang-terang menyebut DPRD Aceh,
- Yang berkenaan dengan: bahwa semua Persetujuan Internasional, Keputusan DPR RI, haruslah dikonsultasi dan atau mendapat persetujuan legislatif Aceh, sedangkan untuk kebijakan Administratif pemerintah Indonesia berkenaan dengan Aceh, dan berkenaan dengan pengangkatan Kepala Kepolisian, dan Kepala Kejaksaan Tinggi, yang harus dikonsultasikan dan persetujuan Kepala pemerintah Aceh.
- Yang berkenaan dengan partai politik lokal, dan pemilihan lokal
- Yang berkenaan dengan hak Aceh untuk memperoleh dana melalui hutang luar negeri, dan berhak pula menentukan tingkat suku bunga, yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Yang berkenaan dengan porsi (prosentase) Aceh dari semua cadangan hidro-karbon, dan sumber daya alam lainnya.
- Yang berkenaan dengan hubungan luar negeri, di mana Aceh dapat mempunyai akses langsung tanpa hambatan dengan negara-negara asing.
- Berkenaan dengan akan adanya auditor luar untuk melakukan verifikasi.
- Tentang dicantumkannya Konvenan Internasional PBB sebagai dasar hukum bagi hukum Aceh, terutama yang berkenaan dengan Hak-hak Sipil, Hak Politik, Sosial-Budaya, dan Ekonomi, padahal UUD 1945, cukup lengkap memuat tentang HAM.
- Tentang dekomisioning semua senjata GAM, yang terkait dengan relokasi TNI dan Polri yang non-organik.
- dan sebagainya.

Namun penentuannya adalah, semangat dan suasana batin yang telah tumbuh dan menjadi milik bersama selama perundingan, yakni kedua pihak memang sudah menginginkan untuk menghentikan permusuhan dan ingin damai sekarang juga, dan janganlah dipersoalkan entah karena apa, atau didorong oleh apa dan siapa. Selain itu secara manusiawi juga, bertikai dan berperang selama 30 tahun, memang melelahkan, jadi, "sama-sama sudah capek berperang". Maka mereka pun berjabat tangan, dengan tatap muka dan senyum. Beda dengan jabat tangan-jabat tangan sebelumnya. Entah di mana bedanya, merekalah yang tahu, selain Allah SWT.

Pat Ujeuen nyang Han Pirang, Pat Prang nyang Han Reuda

Segera setelah penandatanganan MoU tersebut, kedua pihak memberikan kata-kata akhirnya (*statement/speech/remark*), yang masing-masing oleh Dr. Hamid Awaludin, menteri Hukum & HAM RI, atas nama Delegasi Republik Indonesia, dan Malik Mahmud a/n Delegasi The State of Aceh, antara lain beliau mengatakan, sebagai berikut:

Dr. Hamid Awaludin: *"From today, the distinctive line between "they" and "we" must be deleted. We have only one clear line; "we", so, together, lets tailor our past differences to become a suitable outfit. History does not happen, but is made. We are here to try to make history, a history of peace. Peace should not be perceived as only the absence of violence. Peace means living together, supporting, and understanding each other. Peace means law is upheld, order is preserved, justice and fairness is served, and prosperity is achievable. This peace accord that we are doing today is all about"*.

Sementara Malik Mahmud mengatakan antara lain: *"What we hope we have achieved with the signing of this peace Agreement, is the beginning of a process that will bring justice to the people of Aceh. Justice means that the people have a voice and that they are*

*listened to and their wishes are followed. This means the creation of political system that encourage freedom of speech, many opinion, and the ability to fully participate in and be represented by that process. Genuine democracy does not restrain the creation of political parties. Genuine democracy does not bow in the face of violence and injustice”.****



BAB 19

PASCA MOU HELSINKI

AMM di Aceh

TERANG sekali pesannya dalam MoU Helsinki, bahwa AMM (*Aceh Monitoring Mission*), harus dibentuk di Aceh. Pada angka 5, sub-angka 5.1., MoU disebutkan, bahwa Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.

Tugas AMM menurut MoU adalah:

1. Memantau demobilisasi GAM dan *decommissioning* persenjataan GAM, relokasi TNI dan polisi non-organik, reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam

masyarakat, situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini, proses perubahan peraturan perundang-undangan.

2. Memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan.
3. Menyelidiki dan memutuskan pengadilan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.
4. Membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak.

Ancang-ancang ke arah pembentukan AMM dan penempatan tenaga monitor yang terdiri dari tenaga dari negara-negara EU dan negara anggota ASEAN yang ikut dalam program ini, telah dimulai sejak MoU belum ditandatangani. Pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2005 (sebelum MoU ditanda-tangani) para perancang dari EU dan ASEAN bertemu di Jakarta, untuk mengklarifikasi tentang tugas-tugas dalam hubungan mandat bersama yang diterima dari MoU (kelak setelah ditandatangani). Disitu disepakati bahwa EU akan menjadi Pimpinan (Ketua Misi = *Head of Mission*), dan ASEAN akan menjadi Deputy Utama (Principle Deputy) dari Ketua Misi.

Kesepakatan lainnya adalah akan ada (dideploy) sebanyak 220 monitor atau lebih, di mana 120 orang di antaranya dari EU, yang berarti dari ASEAN ada sebanyak 100 orang. Mereka akan berkerja dalam tim yang campuran. Juga diidentifikasi, bahwa negara-negara ASEAN yang ikut dalam misi monitoring ini adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Phillipines, Singapura, dan Thailand. Sementara Javier Solana menyatakan bahwa “*the EU now envisages, together with five ASEAN states, the deployment of a monitoring mission in Aceh, on 15 September*”.¹²⁰⁵ Jadi AMM mulai bertugas di Aceh sejak 15 September 2005, satu bulan setelah penandatanganan MoU, pada tanggal 15 Agustus 2005. Di samping AMM, ada pula Initial Monitoring Present (IMP), dideploy pada hari yang sama, sebanyak 50 orang dari EU dan dari ASEAN, yang bertugas untuk memberikan kontribusinya dalam rangka membangun kepercayaan di antara penduduk Aceh, pada tahapan awal dari implementasi MoU tersebut.

Ketua misi adalah Pieter Feith, dari Belanda/EU, dengan wakil Utamanya, seorang Jenderal dari Thailand, yakni Nipat Thonglek, dengan dua orang wakilnya yakni Jakko Oksanen dari Finlandia dan Renata Tardioli dari Italy.

Kepala Staf adalah seorang dari EU yakni Justin Davies, dengan wakilnya dari Phillipina, yakni Jaji Haroun Al Rasyid. Semua unit dalam AMM, ketuanya adalah dari EU dan wakilnya dari ASEAN.

AMM juga mempunyai kantor di 11 Kabupaten/Kota, yakni: Banda Aceh, Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa, Lamno, Meulaboh, Blang Pidie, Tapaktuan, Tekengon, dan Kutacane. Enam di antaranya dipimpin oleh ASEAN.

Sebagaimana dapat disaksikan di berbagai Media TV, dan dibaca dimedia cetak, AMM telah melakukan tugasnya dengan baik, memonitor, dan bahkan ikut terlibat langsung, dalam pemotongan Senjata GAM, sebanyak sekitar 840 pucuk atau lebih, demikian pula dengan sukses pula memonitor berjalannya dengan lancar relokasi TNI dan polisi non-organik dari Aceh. Kesuksesan itu semua, tidak berarti, bahwa AMM tidak menghadapi masalah. Berbagai sengketa telah terjadi pula di lapangan, yang membutuhkan campur tangan, atau keputusan dari AMM, namun berkat “tangan dingin” pimpinan AMM dan stafnya, berbagai sengketa itu pun dapat diselesaikan satu demi satu. Kini tantangan berikutnya adalah, panggilan misi ini untuk meneruskan monitoringnya dalam rangka reintegrasi, dan bantuan reintegrasi, yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh BRA.

¹²⁰⁵ Pierre-Antoine Braud dan Giovanni Grevi.

Mandat dari AMM, adalah 6 bulan, jadi sebenarnya telah berakhir sampai dengan tanggal 15 Maret 2006 atas kesepakatan bersama telah diperpanjang selama 3 bulan lagi. menjadi s/d tanggal. 15 Juni 2006.

Selain AMM asing, ada pula yang disebut dengan Perwakilan pemerintah Republik Indonesia untuk AMM di Prov. NAD. Susunan organisasinya adalah terdiri atas wakil Senior yang dijabat oleh Dr. Sofyan Djalil, menteri Kom Info, Pelaksanan Harian, Mayjen. TNI Bambang Darmono, seorang Deputy, yang pernah dijabat oleh Hidayat Nyakman, Dirut Pupuk Iskandar Muda (PIM), serta seorang Sekretaris, dan beberapa orang anggota, yang mewakili berbagai instansi pemerintah seperti, Pemda, Depdagri, Polhukam, Mabes TNI, BIN, BAIS, Polri/Polda, Depsos, Dephan. Selain itu ada pula Perwakilan GAM untuk AMM, yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf, dengan beberapa orang anggota.

Tugas utama dari Perwakilan RI di AMM ini adalah:

1. Memberikan semua dukungan bagi pelaksanaan mandat AMM.
2. Bertanggung jawab atas keamanan semua personel AMM di Indonesia.
3. Menyediakan tempat-tempat pengumpulan senjata dan mendukung tim-tim pengumpul senjata bergerak (mobile team).
4. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan medis darurat dan perawatan di rumah sakit bagi personel AMM.

Tugas tugasnya yang berkaitan dengan demobilisasi GAM dan decommissioning persenjataannya, demikian pula yang berkaitan dengan relokasi TNI dan Polri Bawah Kendali Operasi (non-organik) serta proses perubahan Perundang-undangan, telah dapat dianggap selesai. Dengan demikian tinggallah tugas yang berkenaan dengan Reintegrasi setiap anggota GAM ke dalam masyarakat dan memantau kejadian pelanggaran terhadap HAM, sosialisasi MoU, dan yang berkaitan dengan perselisihan (disputes), serta menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak terkait, yang masih dikerjakan sampai saat ini, baik sendiri, maupun bersama pihak lainnya..

Ada suatu forum yang secara reguler mengadakan pertemuan atau rapat bersama yang disebut COSA, singkatan dari Commission on Security Arrangement. COSA juga dipimpin oleh Ketua AMM. Rapat-rapat COSA, dihadiri oleh Pimpinan AMM dan Pimpinan Perwakilan baik PEMRI, maupun GAM dalam AMM, dan dapat pula dihadiri atas dasar undangan, oleh Pimpinan BRA (Badan Reintegrasi-Damai Aceh), Gubernur NAD dan pihak-pihak lainnya yang diundang atau dirasa perlu.

Forum ini, pada dasarnya berfungsi sebagai wadah koordinasi dan konsultasi, serta saling mempertukar informasi, dalam rangka mendukung dan memperlancar tugas-tugas AMM dan tugas-tugas lainnya yang ada kaitannya dengan pelaksanaan MoU Helsinki.

Dr. Yusni Sabi, ketua harian Badan Pelaksana Badan Reintegrasi-Damai Aceh (Bapel BRA), yang juga Rektor IAIN Ar Raniry, megatakan bahwa AMM, sebenarnya adalah sebagai simbol dukungan dunia, terutama Uni Eropa, terhadap perdamaian di Aceh. Yang penting dukungan dan kepercayaan internasional itu dijaga. Jika AMM diperpanjang misinya akan lebih baik, tetapi keberadaan mereka harus dievaluasi secara berkala. Sedangkan Rufriadi, koordinator Aceh Judicial Monitoring, mengatakan misi AMM perlu diperpanjang, sampai dengan terbentuknya Partai Politik Lokal. Fase politik juga rawan, jadi tetap perlu dikawal. Kalaupun tidak diperpanjang, kehadiran pemantau asing tetap dibutuhkan, katanya.

Sementara itu Humam Hamid berpendapat, bahwa dibutuhkan adanya pihak ketiga untuk memantau jalannya Pilkada. Saat kritis selama proses *decommissioning* dan

penarikan pasukan TNI saja ada pihak ketiga, kenapa sekarang pada masa lebih tenang tak kita libatkan pihak ketiga. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan keberadaan pihak ketiga, karena selama ini juga tidak ada intervensi yang mengkhawatirkan, lanjut Humam.

Bantuan Reintegrasi-Damai

MoU Helsinki memuat prinsip-prinsip dasar bagi terciptanya suasana damai yang berkelanjutan. Banyak substansi yang dikandung yang harus segera diimplementasikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat, maupun pemerintah Provinsi Aceh, bersama dengan masyarakat, salah satu di antaranya adalah berkenaan dengan reintegrasi.

Reintegrasi, pada dasarnya bermaksud: pertama: mengembalikan orang-orang GAM dan masyarakat korban konflik secara fisik kepada tempat tinggal dan kepada kehidupan yang semula dan normal; kedua: mengembalikan hak-hak sipil mereka, baik hak politik, hak ekonomi, hak sosial-budaya, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan dalam kehidupan yang normal. Termasuk bagi mereka yang selama konflik telah meninggalkan kewarganegaraannya Indonesia, apabila berkeinginan dapat direhabilitasi kembali kewarganegaraannya tersebut. Untuk itu, memerlukan dana yang cukup, yang akan diperuntukan bagi jaminan hidup, modal dan aset usaha, dan pekerjaan yang layak. MoU memberikan pesan yang jelas, bahwa urusan dana adalah urusan pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan dalam MoU juga disebut secara eksplisit perlunya diberikan tanah pertanian yang pantas, baik bagi orang-orang GAM maupun bagi korban konflik lainnya. Mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Ini adalah pekerjaan besar, oleh karenanya perlu direncanakan secara baik dan cermat, dan perlu pula ditangani secara tersendiri oleh suatu Badan yang khusus dibentuk untuk itu.

Gubernur Provinsi NAD telah membentuk Badan Reintegrasi-Damai Aceh, yang terdiri dari Forum Bersama Pendukung Perdamaian Aceh, disingkat Forbes, Badan Pelaksana Reintegrasi-Damai Aceh, disingkat Bapel BRA, dan Badan Pengawas Reintegrasi-Damai Aceh, dengan SK Gubernur NAD No. 330/032/2006, tertanggal 11 Februari 2006, yang kemudian direvisi dengan SK Gubernur NAD No. 330/106/2006, tertanggal 13 April 2006. Sebekumnya telah ada Inpres No. 15 tahun 2005, yang antara lain menginstruksikan kepada Gubernur NAD agar merencanakan dan melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM ke dalam masyarakat mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan pekerjaan. Ada pula Direktif Menko Polkam no. Dir-67/Menko/Polhukam/12/ 2005, yang memberikan direksi kepada Gubernur NAD tentang hal yang sama dengan Instruksi Presiden tersebut. Di samping BRA, telah dibentuk pula Tim Sosialisasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki, pada bulan Nopember 2005, yang kemudian dengan terbentuknya GRA, tugas-tugas sosialisasi menjadi bagian atau terintegrasi ke dalam tugas-tugas BRA.

Tugas utama dari BRA adalah membantu orang-orang, baik mantan pasukan GAM, GAM lainnya, maupun para korban konflik, agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, menjalani kehidupan dan usaha secara normal, demi masa depannya yang lebih baik, dan sejahtera. Dengan kondisi yang sedemikian barulah dapat diharapkan akan terjadi perdamaian yang berkelanjutan dan/atau rekonsiliasi yang tuntas. Dengan demikian pula semua orang dan semua pihak akan menjadikan masa lalu yang pahit, sebagai pengalaman untuk tidak terulang kembali. Diharapkan tumbuh pula semangat dan harapan serta tekad untuk meraih masa depan yang lebih baik, dan lebih sejahtera.

Setelah memulai kerja, BRA mengalami berbagai kesulitan, antara lain, berkenaan dengan jumlah dan kualifikasi penerima bantuan reintegrasi (beneficiaries), tentang jumlah korban konflik yang terus bertambah, tentang nama-nama mantan pasukan GAM yang menerima bantuan yang masih sulit didapat, kecuali ketua kelompoknya, berkenaan kucuran dana yang tidak selancar yang diharapkan oleh beneficiaries, walaupun proposalnya telah disetujui, tentang untuk rumah yang hancur/rusak yang dinilai terlalu kecil, tentang kerugian harta benda lainnya akibat konflik, tentang kebutuhan riil mereka di lapangan (need assessment), dan sebagainya. Untuk sementara BRA telah menyepakati, para penerima manfaat atau bantuan, sebagai kelompok sasaran (target group) adalah sebagai berikut: mantan Pasukan GAM, GAM non-pasukan, dan masyarakat korban konflik yang terdiri pula dari: orang yang meninggal dunia atau hilang, ahli waris dari yang meninggal atau hilang, rumah yang terbakar/hancur, harta benda yang rusak/ hancur/hilang, orang yang mengungsi, orang cacat atau hilang anggota tubuh, sakit mental, sakit fisik, hilang mata pencaharian.

Saat ini telah dibentuk BRA di Kabupaten/Kota, dan semua proposal dari calon penerima bantuan, dapat disampaikan ke kantor BRA di Kabupaten/Kota tersebut, untuk diverifikasi, dan selanjutnya bila telah disetujui akan disalurkan pula bantuannya. Proposal tersebut dibuat dan kemudian dilaksanakan berdasar kesepakatan masyarakat dan /atau kelompok penerima bantuan di desa yang bersangkutan (*community based project*).

Saat ini, setelah terjadi perampingan struktur dan personalia, BRA dipimpin oleh Prof Dr. Yusni Sabi, Rektor IAIN Al Raniry, sebagai ketua harian, dibantu oleh Prof. Dr. Hasan Suud, sebagai Deputy bidang Kesejahteraan Rakyat, Dr. Islahuddin, sebagai Deputy bidang Ekonomi, sementara sekretaris adalah Dr. Hanif Asmara, yang juga Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD. Sebelumnya organisasi BRA terkesan gemuk, di mana ketua hariannya adalah Ir. Usman Hasan, dengan Hidayat Nyakman, MA sebagai wakil ketua harian, Sulaiman AB, sebagai Deputy Polkam, Dr. Islahuddin sebagai Deputy

BAB 20

UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

PERLUNYA Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, kemudian disingkat dengan UUPA adalah kesepakatan yang pertama, tertulis dalam MoU Helsinki. Ketika itu, diamanatkan harus telah dapat selesai pada 31 Maret 2006. Walaupun kenyataannya baru tanggal 12 Juli 2006, Ketua DPRRI baru mengetokkan palu rapat paripurna, yang berarti terlambat sekitar 2 bulan 11 hari. Apalah artinya waktu kurang dari 3 bulan tersebut, dibandingkan dengan lamanya rakyat Aceh menunggu, untuk sampai kepada adanya UU yang merinci tentang berbagai hak Aceh dan rakyat Aceh untuk mengatur dirinya sendiri dalam NKRI, dan hak untuk menerima dan menikmati hasil-hasil dari sumber daya alam yang ada diwilayah dan di perut bumi Aceh, serta untuk dengan bebas pula mengadakan hubungan ke seantero dunia demi kemaslahatan Aceh dan rakyat Aceh. Walaupun lahirnya UUPA ini telah mengundang banyak protes dari kalangan yang mengatas-namakan rakyat, hanya karena kehendaknya tidak semuanya tertampung, namun rakyat Aceh secara keseluruhan dan

pada umumnya, merasa lega, walaupun UUPA tidak lah 100% sempurna, sebagaimana layaknya pekerjaan manusia. Tetapi paling tidak, mereka berharap, ini adalah tonggak atau pilar lainnya untuk menuju kepada reintegrasi dan kemudian rekonsiliasi secara tuntas.

Ada banyak komentar tentang hal itu. “Kemajuan” atau tepatnya perubahan yang maha besar telah terjadi menjelang dan dalam pembicaraan awal dalam rangka perundingan di Helsinki, yakni sebagaimana dikatakan oleh Edward Espinall antara lain: GAM mengumumkan pada bulan Februari bahwa mereka akan mengesampingkan tujuannya untuk merdeka, dan menerima penyelesaian atas dasar *self government* untuk Aceh dalam negara Indonesia, dan sikap itulah menurut Espinall yang memungkian perjanjian dilaksanakan. (*An agreement became possible, after GAM announced in February that it was willing to set aside its goal of independent and accept a solution based on self government for Aceh within the Indonesian state*). Jika kita napak tilas kepada berbagai pernyataan dan sikap pimpinan GAM sebelumnya, ini adalah perubahan besar, dan oleh karena nya dapat pula dianggap sebagai pengorbanan. Memang tidak semua pengorbanan perlu disesali, ada pengorbanan dalam Islam yang sangat positif, dan mulia dimata Allah SWT. Oleh karenanya maka MoU Helsinki sangat menghargai sikap GAM yang sangat bernuansa kehendak untuk damai tersebut. Karena itu pulalah maka MoU Helsinki, teksnya seperti itu.

Namun banyak pesan-pesan MoU Helsinki yang perlu ditindaklanjuti, salah satunya adalah UUPA. Wajarlah jika pihak GAM, atau simpatisan GAM, berkehendak pula agar seluruhnya isi MoU Helsinki yang telah mereka setujui tersebut, ditransfer masuk kedalam UUPA.

Namun itulah demokrasi, sebagaimana yang juga diperjuangkan dengan gigih oleh GAM, tidak ada yang puas 100%, yang berarti tidak ada yang tidak puas 100%. Para pihak dalam UUPA tersebut, bukan hanya pemerintah RI dan GAM, sebagaimana dalam MoU Helsinki, tetapi karena dia telah memasuki domain legislatif, maka di sana multi pihak berhadapan dan berperan. Kita tentunya tidak ada yang melarang untuk menyatakan keinginan kita, tetapi yang lebih strategis adalah, ketepatan memilih waktu dan tempat, tidak mungkin dilakukan oleh semua orang; hanya orang-orang bijak (*wise*) sajalah yang mampu melakukan itu. Semoga kekurangan UUPA, akan dapat disempurnakan di masa yang akan datang pada waktu dan tempat yang lebih tepat dan lebih *favourable*.

Berikut ini, dipaparkan secara umum/menyeluruh struktur dan isi pokok dari UUPA, yang terdiri dari 40 Bab, dengan 273 pasal, yakni:

1. Ketentuan Umum, terdiri atas 1 pasal (pasal 1) dengan 24 butir.
2. Pembagian Daerah Aceh dan Kawasan Khusus, terdiri atas 4 pasal (pasal 2-pasal 5). Dalam pasal 3, ditegaskan tentang batas-batas daerah Aceh, yakni: sebelah utara dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Provinsi Sumut, sebelah timur dengan Selat Malaka, dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia.
3. Kawasan Perkotaan, terdiri atas 1 pasal, yakni pasal 6, dengan 7 butir.
4. Kewenangan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, terdiri atas 4 pasal, yakni pasal 7-pasal 10. Dalam pasal 8 ditegaskan antara lain bahwa:
 - Rencana persetujuan internasional yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh pemerintah pusat,
 - Rencana pembentukan UU oleh DPRRI yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh,
 - Keduanya dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh.

- Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh pemerintah pusat.
 - Dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan gubernur.
5. Urusan Pemerintahan, terdiri atas 19 pasal, yakni pasal 11 s/d pasal 19.
- Dalam pasal 16, ditegaskan bahwa: Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Asas serta bentuk dan susunan penyelenggara pemerintahan, terdiri atas 2 pasal, yakni pasal 20 dan pasal 21, antara disebutkan bahwa “penyelenggara Pemerintahan Aceh adalah pemerintah dan DPRA”
7. DPRA dan DPRK, terdiri atas 17 pasal, yakni dari pasal 22 s/d pasal 38.
8. pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, terdiri atas 17 pasal, yakni dari pasal 39 s/d pasal 55. Dalam pasal 39, disebutkan dengan tegas, bahwa: “Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala pemerintah Aceh, dan dibantu oleh seorang wakil gubernur”.
9. Penyelenggara Pemilihan, terdiri atas 9 pasal, yakni dari pasal 56 s/d pasal 64.
10. Pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, terdiri dari 10 pasal, yakni dari pasal 65 s/d pasal 74. pasal 67, menyebutkan bahwa “pasang calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, ayat (1), diajukan oleh:
- partai politik atau gabungan partai politik,
 - partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal,
 - gabungan partai politik dan partai politik lokal, dan/atau,
 - perseorangan.
- Dalam pasal lain disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon gubernur/wakil gubernur, bupati/ wakil bupati, walikota/wakil walikota, adalah “tidak sedang berstatus sebagai pejabat gubernur/Bupati/Walikota”.
11. Partai Politik Lokal, terdiri atas 21 pasal, yakni dari pasal 75 s/d pasal 95.
- Dari beberapa pasal dan/atau ayat yang dikandungnya, menjadi jelaslah bahwa Partai Politik Lokal (parpol lokal) adalah sebagai berikut:
- Dapat dibentuk/didirikan, dengan akte Notaris, oleh sekurang-kurangnya 50 orang WNI penduduk Aceh, yang telah berusia 21 tahun, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.
 - Dapat mempunyai nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak sama dengan nama, lambang dan tanda gambar parpol atau parpol lokal lainnya.
 - Asasnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
 - Parpol lokal berkewajiban antara lain: mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain, mempertahankan keutuhan NKRI.

- Dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD Negara RI tahun 1945, atau peraturan perundang-undangan lain, dan juga dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
 - Keanggotaannya dapat merangkap salah satu partai politik.
 - Untuk dapat ikut dalam pemilu anggota DPRA, parpol lokal harus sudah memiliki pengurus lengkap di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di Aceh, dan untuk dapat ikut dalam pemilu anggota DPRK, harus memiliki pengurus di 2/3 dari jumlah kecamatan, dalam kabupaten/kota yang bersangkutan, serta mempunyai anggota sebanyak 1/ 1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol lokal tersebut.
 - Parpol lokal, gabungan parpol lokal atau gabungan parpol dan parpol lokal dapat mendaftarkan pasangan calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, atau calon walikota/wakil walikota, apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRA, atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRA di daerah yang bersangkutan
12. Lembaga Wali Nanggrou, terdiri dari 2 pasal, yakni dari pasal 96 dan pasal 97. Pada prinsipnya Wali Nanggrou (WN) adalah kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, dan bukan lembaga politik dan lembaga pemerintahan, serta berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam, maupun luar negeri.
 13. Lembaga Adat, terdiri atas 2 pasal, yakni pasal 98 dan pasal 99.
 14. Perangkat Daerah Aceh dan kabupaten/kota, terdiri atas 14 pasal, yakni pasal 100 s/d pasal 113.
 15. Mukim dan Gampong, terdiri dari 4 pasal, yakni pasal 114 s/d pasal 117.
 16. Kepegawaian, terdiri dari 7 pasal, yakni dari pasal 118 s/d pasal 124.
 17. Syariat Islam dan Pelaksanaannya. Terdiri atas 3 pasal, yaitu pasal 125 s/d pasal 127. Syariat Islam, pada prinsipnya berlaku atau ditaati oleh pemeluk agama Islam di Aceh, namun semua orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam.
 18. Mahkamah Syar'iyah, terdiri dari 10 pasal, yaitu pasal 128 s/d pasal 137.
Mahkamah Syar'iyah, adalah pelaksana dari peradilan agama Islam di Aceh sebagai subsistem dari peradilan nasional, dan merupakan pengadilan bagi setiap orang Islam yang berada di Aceh. Apabila terjadi perbuatan jinayah oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya bukan beragama Islam, maka pelaku yang bukan Islam tersebut dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum dinayah.
 19. Majelis Permusyawaratan Ulama, terdiri dari 3 pasal, yaitu, pasal 138 s/d pasal 140. Tugas majelis ini (MPU) adalah: pertama memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, dan yang kedua, memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
 20. Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang, terdiri dari 10 pasal, yaitu: pasal 141 s/d pasal 150. Yang agak menonjol dan patut dicatat dalam hubungan dengan pasal-pasal ini adalah yang berkenaan dengan taman nasional, dan kawasan lindung, serta Ekosistem Leuser, di mana pemerintah pusat menugaskan pemerintah Aceh untuk mengelolanya dalam bentuk: melindungi, mengamankan, melestarikan dan memulihkan fungsinya, serta memanfaatkannya secara lestari.

21. Komunikasi dan Informatika, terdiri dari 3 pasal, yaitu: pasal 151 s/d pasal 153.
22. Perekonomian, terdiri dari 22 pasal, yakni: pasal 154 s/d pasal 173. Hal-hal yang menonjol dalam rangka ini antara adalah:
- adanya keharusan investor dibidang pertambangan, baik meneral, batubara, panas bumi, kehutanan, dan sebagainya untuk menyediakan dana untuk reklamasi dan rehabilitasi, dan sekaligus kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi tersebut.
 - adanya keharusan bagi investor pertambangan tersebut, untuk menyediakan dana bagi pembangunan masyarakat paling sedikit sebesar 1% dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.
 - pemerintah pusat dan pemerintah Aceh akan melakukan pengelolaan bersama sumberdaya alam minyak dan gas bumi di Aceh, baik dilaut maupun didarat.
 - pemerintah Aceh berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut disekitar Aceh.
 - penegasan kembali tentang tekad untuk membangun kembali Sabang, sebagai pelabuhan bebas dan/atau Kawasan perdagangan bebas, dan akan menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional
23. Tenaga kerja, terdiri dari 4 pasal, yakni: pasal 174, s/d pasal 177.
24. Keuangan, terdiri dari 24 pasal, yakni: pasal 178 s/d pasal 201.
- Hal-hal yang perlu dicatat dalam rangka keuangan ini, adalah bagian dari Aceh dari berbagai usaha exploitasi dan explorasi SDA yang ada di Aceh, antara lain:
- a) Dana bagi hasil:
- bagian dari penerimaan PBB: 90%,
 - bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB, sebesar 80%).
 - bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), sebesar 20%
- b) Dana bagi hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumberdaya alam lainnya, yaitu:
- bagian dari Kehutanan, sebesar 80%.
 - bagian dari Perikanan, sebesar 80%.
 - bagian dari Pertambangan Umum, sebesar 80%
 - bagian dari Panas Bumi, sebesar 80%, UU NAD tidak menyebutnya.
 - bagian dari Minyak Bumi, sebesar 15 %.
 - bagian dari Gas Bumi, sebesar 30%.
- c) Tambahan Penerimaan bagi Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus:
- Dari Pertambangan Minyak Bumi, sebesar 55 %,
 - Dari Pertambangan Gas Bumi, sebesar 40 %
- Kesimpulannya adalah, bagian yang diterima Aceh dari berbagai sumber penghasilan tersebut, menurut UUPA ini, adalah sama dengan apa yang telah pernah diatur dalam UU NAD (UU No. 18 tahun 2001).
25. Tentara Nasional Indonesia, terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 202 dan pasal 203. TNI mempunyai tugas pokok dan tugas lainnya. Yang terkelompok sebagai “tugas lain”, adalah: penanggulangan bencana alam, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, serta tugas kemanusiaan yang dilakukan setelah berkonsultasi dengan gubernur.

Juga ditegaskan bahwa prajurit TNI yang bertugas di Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, menghormati budaya, dan adat istiadat Aceh.

26. Kepolisian, terdiri dari 4 pasal, yakni: pasal 204 s/d pasal 207. Di bagian ini disebutkan bahwa pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara RI, dengan persetujuan gubernur, persis sebagaimana pernah diatur dalam UU NAD.
27. Kejaksaan, terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 208 s/d pasal 210. Isinya juga hampir mirip dengan UU NAD
28. Kependudukan, terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 211 dan pasal 212. Yang menarik dalam bagian adalah adanya rumusan tentang: “orang Aceh”, yakni setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang berada di Aceh, maupun diluar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh
29. Pertanahan, terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 213 dan pasal 214.
30. Pendidikan, terdiri dari 6 pasal, yaitu: pasal 215 s/d pasal 220. Ada beberapa, pengaturan yang patut dicatat, antara lain: bahwa setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan di bagian lain ditegaskan bahwa: penduduk Aceh yang beursia 7 tahun sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.
31. Kebudayaan, terdiri dari 2 pasal, yakni: pasal 221 an pasal 222.
32. Sosial, terdiri dari satu pasal, yakni pasal 223.
33. Kesehatan, terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 224 s/d pasal 226.
34. Hak Asasi Manusia, terdiri dari 5 pasal, yaitu: pasal 227 s/d pasal 231. Sesuatu yang relatif baru, dicantumkan dalam UUPA ini, adalah tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, yang disebutkan akan dibentuk dengan diundangkannya UUPA ini. Padahal telah diketahui umum bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di tingkat nasional belum kunjung dibentuk sampai hari ini. Pengadilan HAM juga disebutkan akan dibentuk di Aceh.
35. Qanun, Peraturan gubernur dan Peraturan bupati/walikota, terdiri dari 14 pasal, yakni pasal 232 s/d pasal 245.
36. Bendera, lambang, dan himne, terdiri dari 3 pasal, yaitu: pasal 246 s/d pasal 248. Sebagaimana telah pernah dirumuskan dalam UU NAD, dalam UUPA juga disebutkan bahwa: bendera daerah sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. Sementara itu ditegaskan pula bahwa bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam NKRI.
37. Pembinaan, Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan, terdiri dari 2 pasal, yaitu: pasal 249 dan pasal 250. .
38. Ketentuan Lain-lain, terdiri dari satu pasal dengan 4 butir. Nama Aceh yang telah pernah dikukuhkan dengan UU NAD sebagai “Nanggrou Aceh Darussalam”, maka dengan UUPA ini akan ada kemungkinannya untuk berubah dan akan ditentukan nanti oleh DPRA, setelah pemilu tahun 2009.
39. Ketentuan Peralihan, terdiri dari 17 pasal, yaitu: pasal 252 s/d pasal 268.
40. Ketentuan penutup, terdiri dari 5 pasal, yaitu: pasal 269 s/d pasal 273. ***



BAB 21

REKONSILIASI ACEH

REKONSILIASI, menurut Dr. Yen Lay Hwee, *Senior Research Fellow*, dari Singapore Institute of International Affairs, adalah suatu proses yang harus terjadi, ketika diplomasi preventif te-lah gagal, terjadilah konflik, sehingga adanya manajemen konflik serta resolusi konflik. Mengkonsolidasikan perdamaian yang berkelanjutan, demikian pula mengonstruksikan masyarakat dan negara adalah suatu tugas yang menjanjikan dan kompleks menghadapi semua masyarakat pasca konflik. Be-runding untuk suatu perjanjian damai adalah hanya langkah pertama. Rekonstruksi adalah langkah penting yang harus dan membutuhkan untuk diambil jika kita memang mau menuju kepada damai yang tuntas. Tantangan dari rekonsiliasi di an-tara kelompok yang berbeda pendapat dalam masyarakat yang dari muncul adalah luar biasa (cukup menentukan). Ada tiga tipe rekonsiliasi kata beliau, yakni: (1) rekonsiliasi parsial, (2) rekonsiliasi substansial, dan (3) rekonsiliasi penuh. Beliau juga mengingatkan bahwa semua konflik dapat dikelola, tetapi tidak semua dapat direkonsiliasikan.

Jadi jelaslah sesuai dengan pendapat tersebut, bahwa rekonsiliasi adalah bukanlah suatu kejadian, tetapi suatu proses, artinya, adalah sesuatu yang harus diupayakan, oleh karena-nya perlu adanya daya upaya untuk itu, dia tidak akan terjadi dengan sendirinya.

Suatu *roundtable* Asia-Eropa yang berlangsung di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 20-21 Oktober 2003, menyatukan pendapat yang mengtakan bahwa rekonsiliasi penuh baru dapat terjadi, jika adanya persyaratan yang mereka sebut sebagai *core element* yakni:

1. Pengakuan yang jujur dari kekejaman dan penglukaan (*injury*) yang telah dilakukan dan telah diidentifikasi oleh pihak lain.
2. Permintaan maaf yang jujur dan oenyelasan dari perlakuan yang mengaki-batkan orang luka (*injury*),
3. Kesiapan untuk memohon maaf dari seseorang yang terlibat dalam melaku-kan tindakan yang mengakibtaklan orang lain luka.
4. Kesiapan dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menghilangkan/mengha-puskan kemarahan (dendam) dan sakit hati, yang disebabkan oleh konflik dan penglukaan.
5. Adanya komitmen dari penyerang tidak akan mengalami perlakuan yang elukai.

Rekonsiliasi adalah masalah hati, dia tidak bisa diukur dengan meng-ulang-ulang kata-kata “maaf”, atau dengan mekanisme dan frekuensi jabat tangan, atau lebarnya senyum se-mata, dia soal keikhlasan, kejujuran, dan kehangatan dalam merajut kembali kehidupan persaudaraan yang hakiki. Ada suatu dorongan dari dalam, dari lubuk hati yang paling dalam, untuk rela memaafkan pihak lain, betapapun dia telah sangat menyakiti kita. Hal itu tidak bisa disuruh-suruh atau direka-yasa oleh pihak lain, tidak juga, karena merupakan keharusan setelah menerima bantuan reintegrasi. Kalau demikian halnya, perkataan maaf dapat saja diucapkan ribuan kali, jabatan tangan dapat dilakukan ribuan kali, dan di setiap ber-temu, demikian pula senyuman, namun rekonsiliasi belum tentu terjadi. Disinilah letak strategisnya fungsi dan peranan sosialisasi, baik terhadap MoU Helsinki, terhadap esensi re-integrasi dan bantuan reitegrasi, dan, bahkan yang terpenting lagi terhadap UUPA yang baru saja disyahkan oleh DPRRI tanggal 11 Juni 2006 yang lalu.

Ada juga yang mengatakan bahwa rekonsiliasi, sesungguhnya adalah haruslah didasari oleh *to forgive, but not to forget*. Rekonsiliasi, memang berbeda dengan rekonstruksi yang lebih terkesan bernuansa perbaikan kembali kerusakan/kecacatan fisik. Kalaupun ada yang dikaitkan dengan rekonstruksi, maka perlu ada ketegasan bahwa rekonsiliasi, adalah mencakup atau bahkan lebih berbobot rekonstruksi mental, spiritual, sosial dan *psychologis*, tidak hanya fisik.

Simon Fisher mengatakan bahwa rekonsiliasi adalah menyangkut memu-lihkan hubungan. Oleh karenanya maka untuk menuju kepada rekonsiliasi, diperlukan kehadiran faktor-faktor antara lain pengakuan atau pengung-kan kebenaran, memfasilitasi untuk pemulihan atau rehabilitasi hak-hak dan status, pemberian ampun/maaf, penumbuhan kepercayaan, adanya ban-tuan untuk rehabilitasi fisik/material, yang kesemuanya akan terakumulasi pada terperbaikinya hubungan, maka dengan demikian keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakatpun akan terjadi. Jadi satu-satunya faktor yang tidak boleh ada dalam proses rekonsiliasi adalah curiga. Curiga akan berujung kepada tidak percaya. Dan akan berujung pula pada kurang dekatnya hubungan atau selalu *reserve*, yang akhirnya akan mengakibatkan, hubungan menjadi jaga jarak, dan semakin memburuk, walaupun dicoba tutup-tutupi dengan bermuka manis dan tegur sapa yang sopan, namun hubungan tidak akan pernah harmonis. dan rekonsiliasipun tidak terjadi. Rekonsiliasi tidak dapat dipaksakan, karena dia adalah persoalan hati dan batin, tetapi dapat dan harus dipupuk dan dipelihara, sekali dia telah berkecambah. Modal utama rekonsiliasi adalah kejujuran, keikhlasan, dan kemauan, serta bukan sola kemampuan, pihak-pihak yang tadinya berkonflik. Kalau mau dan diniatkan, pastilah bisa, kalau be-lum mau, beribu alasan dapat dikemukakan. “Di mana ada Kemauan, disitu ada Jalan”.

Rekonsiliasi juga akan terjadi pada posisi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, jangan ada yang merasa, bahwa dia lebih penting dan lebih tinggi poisi tawarnya dari yang lain. Untuk itu penting adanya faktor saling menghargai, yang ber-makna secara filosofis, menempatkan orang lain lebih tinggi dan lebih penting dari kita. Tetapi sebaliknya, itu sebenarrnya memberikan pengakuan dan menunjukkan lebih menghormati orang lain, sama saja artinya dengan memberikan piutang kepada orang. Dan bagi yang sedikit saja mempunyai etika tata pergaulan dan sopan santun, tentulah hutang tersebut akan dia bayar secara sewajarnya. Jangan pula berassumsi bahwa penghormatan dan penghargaan kepada kita adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut untuk berbuat demikian, atau karean dia takut, tetapi itu adalah sebagai sesuatu yang harus diimbangi dengan sepantasnya. Kalau tidak penghormatan dan penghargaan tersebut hanya kita terima sekali itu saja, dan hubunganpun menjadi tidak harmonis lagi pada waktu lain ... rekonsiliasi hakiki pun tidak akan terjadi.***



BAB 22

KESIMPULAN:

Aceh Menuju Perdamaian yang Hakiki

KINI Aceh telah damai. Orang bisa bebas bergerak dan lalu-lalang ber-keliaran di jalan raya dengan mudah dan berpergian kemana saja. Dari Banda Aceh ke Singkil, melalui Calang, Meulaboh, Jeram, Blang Pidie dan Tapak Tuan, demikian pula melalui Sigli, Bireuen, Takengon, Bener Meriah, Blangkejeren terus ke Kutacane. Demikian pula dari Banda Aceh ke Lhokseumawe dan Langsa, terus ke Langkat Tamiang, dan Bukit Kubu. Apalagi kalau naik pesawat dan atau ferry ke Sabang atau ke Simeulu, dengan mudah dapat ditempuh tanpa ada gangguan keamanan berarti diperjalanan. Sedangkan perjalanan ke pedalaman pun juga telah mudah ditempuh tanpa banyak setopan atau hadangan di perjalanan, baik yang resmi maupun tidak resmi. Kalau dulu seseorang akan mikir berpuluh kali, untuk pergi ke Simpang Keramat atau ke Tiro, atau ke Keude Geureubak, apalagi ke Geumpang dan Beutong Ateueh, tembus ke Aceh Barat, atau untuk pergi ke Lokop, namun saat ini dengan mudah dapat dilakukannya, kapan saja dia menghendaki.

Semenjak dideklarasikannya ASNLF (Aceh Merdeka), Hasan Tiro hanya berada di Aceh selama 2 tahun 7 bulan, yakni dari tibanya di desa pantai Pasi Lhok, Pidie, tanggal 30 Oktober 1976, sampai dengan beliau berangkat kembali meninggalkan Aceh, pergi keluar negeri tanggal 29 Maret 1979 subuh. Walaupun mungkin telah ada persiapan sebelumnya, namun kontak langsung hanya dapat terjadi selama beliau berada di Aceh, yang hanya kurang dari tahun tersebut. Hanya orang-orang yang luar biasa sajalah yang mampu memotivasi, dan menggembeleng orang-orang untuk menjadi pengikut setianya dan kemudian mau berontak, dalam waktu sesingkat itu, selama 31 bulan. Sedangkan beliau sendiri diterpa berbagai berita miring, terutama terkait dengan performansinya semasa DI/TII dan dalam hubungannya dengan Abu Beureueh. Sementara pengikut setianya, terdiri dari berbagai level ditinjau dari tingkat pendidikan, ada yang buta huruf, ada yang hanya tammat SR, sekolah menengah, lulusan atau sedang mengaji di pesantren atau mahasiswa di Universitas Umum maupun Universitas Agama, dan bahkan ada yang Dokter, serta lulusan Akademi dan S-1 lainnya. Tentulah Hasan Tiro mempunyai resep khusus untuk itu,----- patut dipelajari.

Mungkin benar Snouck yang mengadvikan kepada gubernur Jendral Belanda ketika itu, agar dalam menghadapi orang Aceh perlu dengan kekerasan, atau tekan terus tanpa ampun sampai mereka menyerah. Namun kekerasan selama konflik selalu

menuai bertambahnya jemaah GAM, dan berkurangnya simpati terhadap TNI/Polri. . . .
. Snouck)

Walaupun orang Aceh tidak semuanya pendendam, namun mereka tergolong makhluk Tuhan yang mempunyai memori yang cukup bagus, baik terhadap pihak yang baik kepadanya, maupun terhadap pihak yang menyakiti, apalagi yang menganaiya dan menzaliminya. Walaupun ingatan itu bukan untuk keperluan mengungkapkan secara terbuka, karena mereka tahu, itu mengandung resiko yang besar, dan rumit urusannya, tetapi paling tidak, untuk diingat-ingat saja. Suatu waktu ingatan itu akan berguna baginya sebagai dasar dalam menentukan sikap. Secara visual yang juga terkait dengan fakta dilapangan, bahwa kalau ada suatu desa dan atau kecamatan yang pernah dikejami dan dizalimi oleh Apkam RI, langsung saja desa tersebut berubah warna dari tadinya putih atau kuning, menjadi merah, atau menjadi daerah basis GAM. Dengan kata lain kekuatan inti GAM adalah orang-orang atau keluarga dari orang yang pernah dikejami/ dianiaya dan/atau dizalimi oleh Apkam RI. Oleh karenanya selama DOM banyak sekali menambah pengikut dan simpatisan GAM, demikian pula selama Darurat Militer, walaupun secara fisik orang GAM yang resmi, telah lari menghindari dari operasi keamanan.

Orang Aceh yang secara sosiologis, sangat bangga dengan kejayaan, dan kelebihan-kelebihannya, dan pada gilirannya hal tersebut dianggap sebagai harkat dan martabat orang Aceh. Oleh karenanya mereka mudah terpancing emosinya dan menjadi nekad, ketika ada pihak lain yang kurang menghargai dan tidak membalas/merespons sesuai kelebihan dan atau jasa yang diberikan. Kalau pihak lain tersebut dinilai secara faktual lebih kuat dari orang Aceh, maka berontaklah mereka, melawan kekuatan tersebut, sebut saja pemerintah pusat. Tetapi jika pihak lain tersebut lebih lemah dari orang Aceh, maka dia akan ditindas, dengan dalih menegakkan harkat dan martabat.

Ada suasana mendua dalam perjuangan Hasan Tiro untuk mencapai Aceh Merdeka, yakni: ideologis, yang dikaitkan dengan sejarah, bahwa Aceh dicaplok secara tidak syah oleh Indonesia, karena kesalahan Belanda. Kelanjutannya adalah, istilahnya lebih dipertajam lagi dengan mengatakan bahwa Aceh dijajah oleh Indonesia/Jawa. Tetapi dilain pihak berontaknya Hasan Tiro dan kemudain menuntut pisah dengan Indonesia, adalah juga sarat dengan aspek-aspek yang praktis-pragmatis, seperti, soal keadilan, diskriminasi, ketertinggalan dalam pembangunan, kemudian soal pelanggaran HAM, yang rasa-rasanya tidak cukup syarat untuk suatu pemberontakan atau separatisme.

Dasar ideologis yang berintikan nasionalisme lebih menonjol dari pada ideologis yang berintikan spritual, yakni Islam. Oleh karenanya kaum ulama tidak serta merta menyambut baik dan mendukung secara serempak terhadap GAM, tidak sebagaimana dukungan mereka kepada DI/TII. Ulama, walaupun telah dicoba diskreditkan dengan bermacam cara, namun tetap saja berdiri tegak, sebagai pilar utama masyarakat Aceh. Oleh karenanya untuk proses menuju rekonsiliasi yang hakikipun, peranan ulama sangat menentukan.

Walaupun ulama agak ragu memberikan dukungan unblock kepada GAM, namun setelah jangka waktu yang cukup lama, akhirnya tataran konstituen GAM, dinilai lebih luas dan lebih merata ketimbang DI/TII. Kalau DI/TII, tidak didukung oleh sebagian besar Uleibalang, dan ulama Perti, maka GAM lebih mampu untuk melintasi batas sub-kultur atau kelompok masyarakat tersebut. Ulama Perti, walaupun bukan pendukung GAM, namun tidak secara terang-terangan (mungkin tidak berani) menyatakan memusuhi gerakan tersebut, sebagaimana terhadap DI/TII, walaupun keduanya menurut dalil-dalil Islam, sebagaimana dikatakan oleh Abu Adnan Bakongan, yang

diperkuat oleh Buya Zamzami Syam di Singkil, adalah bughat (pemberontak terhadap pemerintah yang syah).

Isu referendum, dari tadinya sebagai arus pinggiran dari perjuangan kemerdekaan Aceh, lama kelamaan menggeser masuk ketengah, bahkan menjadi arus deras, dari perjuangan kemerdekaan secara damai. Orang-orang di Pantai Barat/Selatan Aceh, mulanya tergugah dan lebih tertarik dengan isu referendum yang damai, ketimbang GAM sebagai suatu perjuangan bersenjata. Walaupun akhirnya mereka sadar juga bahwa referendum dan GAM lebih kurang merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Meredam dan kemudian menyelesaikan secara tuntas konflik Aceh, sangat tergantung pada pemerintah Indonesia, walaupun MoU ditanda tangani bersama. Salah dalam memulai dan menangani di masa-masa reintegrasi, dan rekonsiliasi ini, akan berakibat kesenjangan yang lebih lebar, dan kesalahan yang lebih banyak lagi di masa yang akan datang:

“Ube bleuet irang, ube blang irot”, begitu kata orang-orang bijak.

Dengan diketoknya palu Ketua DPRRI pada tanggal 11 Juni 2006, yang menandai bahwa UU tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), menjadi tambah satu lagi komitmen Helsinki terpenuhi, walaupun sedikit lambat dari yang diharapkan (dari 31 Maret 2006 menjadi 11 Juni 2006).

Dengan adanya UUPA tersebut, bukan hanya bermakna bertambahnya khsanah peraturan perundang-undang kita, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana melaksanakannya agar pihak yang mendukung dengan penuh harap, tidak kecewa, dan pihak yang kurang mendukung jangan menjadi apatis, bahkan menjadi tumbuh keyakinan, bahwa kehendak dan aspirasinya akan dapat tertampung dalam pelaksanaan UUPA ini, walaupun dalam rumusannya tidak secara ekplisit terumuskan. Pada UU ini juga terkait soal harkat dan martabat orang Aceh. Jangan sampai, menjadi benar kata-kata orang pesimis dan sinis, “nah lihat kita kan ditipu lagi untuk kesekian kalinya”. Kini tinggal mengisi dan merealisasikan ketentuan UU tersebut, dan melengkapi dengan berbagai derivat bawaannya. Ini pun berlaku kata maja lainnya yakni: “jika salah memulai, akan salah mengakhiri”

Pada UU tersebut terletak harapan dan hari depan orang Aceh, jika dilaksanakan secara benar dan tepat. Oleh karenanya, untuk selanjutnya adalah tergantung sikap, iktikad, tekad dari pelaksana UU tersebut, yang merupakan masalah lainnya yang juga krusial.

Suasana damai hanya dapat tercipta kalau pihak yang berkonflik bersedia melakukannya. Ditandatanganinya MoU Helsinki adalah kerana kemauan kedua pihak. Kedua pihak sangat mampu untuk tidak berdamai, sangat mampu untuk berperang terus. Banyak bukti sejarah untuk membenarkan tesis itu, namun dilain pihak, kedua pihak sangat mampu pula untuk berdamai, untuk menghentikan peperangan. Yang menjadi masalah selama ini adalah, soal “kemauan”. MoU, telah ditandatangani dengan kemauan, kini pertanyaannya, bagaimana dengan pelaksanaannya. Maukah para pihak secara ikhlas, jujur serta dengan sepenuh hati melaksanakannya, atau setengah hati.

Sementara itu, jangan pula dilupakan, masih ada sekelompok orang atau orang-orang secara perorangan yang tidak menginginkan damai di Aceh. Alasannya bermacam-macam, antara lain, pertama, kalau damai, orang-orang Aceh dan Daerah Aceh akan melejit maju, meroket tak terkejar, dan dia akan mampu menyalip siapa saja; orang Aceh memang mempunyai kemampuan yang tinggi. Daerah Aceh mempunyai potensi *advantage* baik yang *competative*, maupun yang *comparative*, yang selalu siap didayagunakan. Kedua, kalau damai, hilanglah kesempatan orang-orang tertentu, yang

bisnisnya hanya berkembang jika ada konflik. Dan ketiga ada saja orang atau kelompok orang yang menginginkan agar selalu ada daerah di Indonesia ini yang berkualifikasi, “*trouble spot*” atau “*restive area*”, dengan tujuan untuk selalu menguji ketahanan dan pertahanan, serta kewaspadaan, baik ideologi, politik, maupun fisik, bahkan sebagai tempat latihan, dan sebagainya. Sungguh buruk dan tragis nasib Aceh, jika kehendak orang-orang kategori ketiga ini terpenuhi. ***



DAFTAR PUSTAKA

Peristiwa Cumbok di Aceh

- Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* Jakarta: LP3S, 1996.
- Ahmad, Zakaria, *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520-1675*, (Monara, Medan, t.t.).
- Alfian, Ibrahim T., *Perang Di Jalan Allah: Perang Aceh : 1873-1912*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987).
- _____, (ed.), *Perang Kolonial Belanda di Aceh*, (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 1997).
- _____, "Banda Aceh Sebagai Pusat Awal Perang di Jalan Allah", dalam *Kota Banda Aceh Hampir 1000 Tahun*, (Banda Aceh: Pemerintah Kotamadya Tingkat II Banda Aceh, 1988).
- _____, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999).
- _____, "Cendikiawan dan Ulama dalam Masyarakat Aceh: Sebuah pengamatan Permulaan", dalam Al-Fian (ed) *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3S, 1977).
- _____, *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Sinar Harapan, 1987. Wahyu Saputra. "Bangsa Aceh Tidak Bisa Ditipu Lagi", *Ar-Raniry Post*, 39/1/Th 2001.
- Alfian. "Arus Nilai Baru Masyarakat Aceh Dalam Konsep Pembangunan Berwawasan Nusantara," dalam Syarif Harris (ed) *Wawasan nasional dan Terobosan Pembangunan*. Banda Aceh: Pemda, 1991.
- Ali, A. Mukti. *An Introduction to Government of Aceh s Sultanate*. Yogyakarta: Nida, 1970.
- Amin, H.T.M. *Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh*, (Banda Aceh, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh & Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Aceh, 1976).
- Amin, S.M., *Kenang-kenangan dari Masa Lampau*, Pradya Paramita, (Jakarta, 1978).
- _____, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Soeroengan, Djakarta, t.t.).
- Amiruddin, M. Hasbi, *Pengajaran Sejarah Islam dalam Lingkungan Dayah di Aceh*. (Banda Aceh: Balai Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2001).
- _____, *Ulama Dayah: Studi Tentang Kualitas Alumni Masa Silam dan Masa Kontemporer*. Banda Aceh: Balai Penelitian IAIN Ar-Raniry Darussalam, 1999.
- _____, *Ulama Institution in Southeast Asia*. Montreal: Muslim Research Institute, 1993.
- _____. *The Response of the Ulama Dayah to the Modernization of Islamic Law In Aceh*. Montreal: Institute of Islamic Studies, McGill University, 1994.

- Azra, Azyumardi. *The Transmission of Islamic Reform to Indonesia: Networks of Middle East and Malay Indonesia Ulama in Seventeenth and Eighteenth Centuries*. New York: Columbia University, Dissertasi, 1992.
- Beschrijving van Het Zelfbestuurd Landschap Bagok en Boengeng, J.G. Van Exel, *Afdeeling oostkust van Atjeh, Atjeh en Onderhoorigheden*, (Arsip Nasional, Atjeh Serie 6, No. Reel Film II, 1935).
- Chaidar, Al. *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta: Madani Press, 1999.
- Daudy, Ahmad. *Allah dan Manusia Dalam Konsepsi Syaikh Nuruddin Ar-Raniry*. Jakarta: C.V Rajawali, 1983.
- Dick, Gerald. "The Story of Garuda Indonesia," *Garuda* (Juli 1993).
- Djajadiningrat, Husein, *Kesultanan Aceh: Suatu Pembahasan Tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-bahan Yang terdapat Dalam Karya Melayu, Teuku Hamid (ter.)* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1983).
- El-Ibrahimi, M. Nur. *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*, (Media Dakwah, Jakarta, 2001).
- Fik. "Aceh Takkan Dendam: Pasukan tambahan 4000 personil, Faisal Tanjung di Protes". *Serambi Indonesia* (10 Agustus, 1998).
- Gobee, E. dan Andrianse. *Nasihat-nasihat C.S. Hurgronje Semasa Kpegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. Sukarsi (ter). (Jakarta: INIS, 1991).
- Hasjmy, A., *Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- _____, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamaddun Bangsa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- _____, "Kerjasama Ulama-Umara Salah Satu Ciri Khas Aceh", *Sinar Darussalam*, Edisi 168/169, (Banda Aceh, t.t.).
- _____, *Sumbangan Kesusastraan Aceh dalam Pembinaan Kesusastraan Indonesia*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1977).
- Hurgronje, C. Snouck, *De Atjehers*, Deel I, (E.J. Brill, Leiden, 1893).
- _____. "Een Mekkaansh Gezantschap Naar Atjeh in 1683", *BKI* 65, (1993).
- _____, *The Acehnese*. A.W.S. O'Sullivan, Leiden Brill, 1906.
- Ibrahim, Muhammad, dkk. *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1991).
- Ibrahim, Nur El. *Tgk Muhammad Daud Beureueh*. Jakarta: Gunung Agung, 1990.
- Insider, *Atjeh Sepintas Lalu*, (Jakarta, Archapada, 1950).
- Iskandar, Teuku. *De Hikayat Atjeh* ('S-Gravenhage: N.V. De Nederlandshe Boeken Steendrukkerji, V.H.L. Smits, 1959).
- Ismail, Muhammad Gade. *Pasai Dalam Perjalanan Sejarah: Abad ke-13 Sampai dengan Abad ke-16*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993.
- Ismuha. "Peranan Ulama Dalam Program KB di Aceh" Banda Aceh: Sinar Darussalam, 1978.
- Jacobi, A.K. *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998).
- Jarahdam I. *Dua Windu Kodam I Iskandar Muda*. Banda Aceh: Kodam I/Iskandar Muda, 1972.
- Jihad, Abu. "Bicara Aceh Jangan Lupa Sejarahnya" dalam Tgk Lamkaruna Putra. *Perjalanan Panjang Aceh Menuju Islam Kaffah*. Jakarta: Titian Ilmu Insani, 2001.
- Jongejans, J. *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*, (Hollandia Drukkerij NV. Baarn, 1939).
- Karepesina, Ja'cuba, *Mitos, Kewibawaan, dan Perilaku Budaya*, (Jakarta, PT Pustaka Grafika Kita, 1988).
- Kreemer, J. *Atjeh : Algemeen Samenvattend Overzicht van Land en Volk van Atjeh en*

- Onderhoorigheden*, (Leiden, N.V. Boekhandel en Drukkerij Voorheen E.J. Brill, 1923).
- Langen, K.F.H. Van *Susunan Pemerintahan Semasa Kesultanan*, Alih Bahasa : Aboe Bakar, (Pusat Informasi dan Dokumentasi Aceh, Banda Aceh, 2002).
- Lekkerkerker, C. *Land en Volk van Sumatera*, N.V. Boekhandel en Drukkerij Voorheen (E.J. Brill, Leiden, 1916).
- Loeb, Edwin M. *Sumatra Its History and People*, (Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1972).
- Macdonald, D. B. "Ulama," dalam M. Th. Houtma, *First Encyclopedia of Islam 1913-1936*. Leiden: E. J. Brill, 1987.
- McDonald, Hamis. *Suharto's Indonesia*. Honolulu: The University Press of Hawaii, 1981.
- Morris, Eric "Aceh Social Revolution and the Islamic Vision" dalam Andrew R. Kahin (ed.) *Regional Dynamic of the Indonesian Revolution* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985).
- Morris, Eric Eugene, "Aceh : Social Revolution and The Islamic Vision", dalam Audrey R. Kahin (ed.), *Regional Dynamic of the Indonesian Revolution: Unity from Diversity*, (Honolulu : University of Hawaii Press, 1985).
- Para Pelaku Sejarah, *Kisah Perjuangan Mempertahankan Daerah Modal Republik Indonesia Dari Serangan Belanda*, (Penerbit Beuna, Banda Aceh, 1990).
- Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh, *Revolusi Desember '45*, (Kutaraja, , t.t.).
- Piekaar, A.J. *Aceh dan Peperangan Dengan Jepang*, Alih Bahasa: Aboebakar, (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 1977).
- Polim, Teuku Muhammad Ali Panglima, *Sumbangsih Aceh Bagi Republik, Penyunting: Teuku Mohammad Isa*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996).
- Ram dan Bas. "Dom Dicabut: Pangab Minta Maaf Kepada Masyarakat Aceh" *Serambi Indonesia*. (8 Agustus 1998) Taufik Abdullah. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* Jakarta: LP3S, 1996.
- Reid, Anthony, *The Blood of the People : Revolution and the End of Traditional Rule in Notherm Sumatra*, (Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1979).
- _____, *The Contest for North Sumatra: Aceh. The Netherlands and Britain 1985-1989*. Kuala Lumpur: Oxford University Press. 1969.
- Rimba, Teuku Abdullah Ujung. "Prasaran Pada Musyawarah Alim Ulama Se-Daerah Istimewa Atjeh", Tgl 17-18, Desember 1965.
- Rosidi, Ajib. *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah: Sebuah Biografi*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1966.
- Saleh, Hasan, *Mengapa Aceh Bergolak*, (PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992).
- Saletore, "Ulama", dalam Sartono Kartodirdo (ed.), *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta, LP3ES, 1983).
- Shiddieqi, Nourouzzaman. "The Role of Ulama' During the Japanese Occupation of Indonesia 1942-1945," MA Thesis, McGill University, Montreal 1975.
- Siegel, James T., *The Rope of God*, (Berkeley, University of California Press, 1978).
- Sufi, Rusdi, *Gerakan Nasionalisme di Aceh 1900-1942*, (Banda Aceh : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998).
- Syamaun Gaharu, "Revolusi Sosial di Awal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Aceh", *Waspada*, 9 Januari 1985.
- _____, "Membangun Manusia Yang Utuh dan Integralistik" dalam Syarief Harries. *Aceh Wawasan Nasional dan Terobosan Pembangunan*. Banda Aceh: 1991.
- Syamsuddin, Nazaruddin, *Revolusi di Serambi Mekah Perjuangan Kemerdekaan dan Perjuangan Politik di Aceh 1945-1949*, (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1999).
- _____, *The Course of The National Revolution in Aceh, 1945-1949*, Tesis, (Monash University, 1974).
- _____. *Intergrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramadia, 1989.
- Tim Penyusun, *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda

Aceh, 1984).
Veer, Paul Van 't, *Perang Aceh Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*, Terjemahan :
Grafitipers, (PT Grafiti Pers, Jakarta, 1979).
Yakkub, Ismail. *Tgk. Tjihik Di Tiro*. Jakarta: Bulan Bintang. 1952.

Darul Islam di Aceh

Alers, Henri J. . *Om een Rode of Groene Merdeka*, Eindhoven: EJ Brill, 1956.
Alfian, T. Ibrahim, (*et.al*), *Perang Kolonial Belanda di Aceh (Colonial War in Aceh)*, (Banda Aceh: PDIA, 1995).
Alfian, T. Ibrahim, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh: PDIA, 1999).
Ali, Fachry, "Daud Beureueh dan Hipotesa Meminjam Tenaga Luar", *Panjimas*, 1 April 1986.
Ali, Fachry, "The Revolt of Nation-State Builders: A Study of Achenese Darul Islam and West Sumatran PRRI", *Unpublished thesis*, (Melbourne: Monash University, 1985).
Ali, Fachry, *Golongan agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi Islam di Indonesia*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
Ali, Fachry, *Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1986).
Amelz, *Rimajat Singkat Atjeh Bangoen dari Tidoernja jang Njenjak Beberapa Poeloeh Tahoen Jang Laloe*, (Pidie, naskah ketikan, t.t.).
Amin, S. M. 1978. *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*. Jakarta: Pradnya Paramita.
Amin, S.M., *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 301.
Amin, SM, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soeroengan, 1956).
Anderson, Benedict R. O'Gorman, *Imagined Communities*, (London: Verso, 1983).
Anwar, Dewi Fortuna, "Indonesia's Relations with China and Japan: Images, Perceptions, and Realities," dalam *Contemporary Southeast Asia* (Singapore), 12, No. 3, December 1990.
Athailah, Abdullah Faridan, A Murad Em Djies, Budiman Sulaiman, Sulaiman Sanusi, A Wahab Ismail, *Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984).
Atjeh, Tgk. Abdullah Arif, *Sja'ir Kerukunan Ra'jat Atjeh*, (Kutaradja: Penerbit dan Pustaka Darussalam, 1962).
Beureueh, Teungku M. Daud, "Dakwah", naskah ketik tak diterbitkan, 1961.
Beureueh, Teungku M. Daud, *Sang Saka: Kenangan Berlangsungnya Konferensi Daerah jg Kedoea*, (Koetaradja: Badan Penerangan Markas Daerah "Pesindo" Atjeh, 1946
Boland, B.J., *The Struggle of Islam In Modern Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, Verhandelingen KITLV, 1971).
Boland, B.J., *Pergumulan Islam dalam Indonesia Modern*, (terj.), (Jakarta: Grafiti, 1981).
Burham, J., "Dispatch from a forgotten front", *National Review* 25 Maret 1961.
Chaidar, Al , *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo*, (Jakarta: Darul Falah, 2000)
Compton, Boyd R., *Kemelut Demokrasi Liberal*, (terj.), (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001).
Compton, Boyd R., *Surat-Surat Rahasia Boyd R. Compton*, (Jakarta: LP3ES, 1995)
Dalimunthe, A. Hakim, *Gerak-gerik Partai Politik*, (Langsa: Gelora, 1951).
Dengel, Holk H., *Darul Islam dan Kartosuwirjo: Angan-Angan yang gagal*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan), 1996.

- Dengel, Holk Harald , *Darul Islam: Kartosuwirjo's Kampf um Einen Islamischen Staat in Indonesia*, Heidelberg: Heidelberg Universiaet, 1990.
- Dijk, C. van , *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993).
- Dijk, C. van , *Revolution Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*; B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Indonesia: 1945-1970*
- Dijk, C. van, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993), hlm. 263.
- el-Ibrahimi, M. Noer, *Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1981).
- Feith, Herbert dan Daniel Lev, "The End of Indonesian rebellion", dalam *Pacific Affairs*, 36, No. 1, 1963.
- Feith, Herbert, *The Decline and Fall the Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1973).
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Massachusetts: University of California Press, 1983).
- Feith, Herbert, *The Indonesia Election of 1955*, (Ithaca, New York: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, Interim Report Series, 1971).
- Geertz, Clifford, "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States", dalam buku Claire Holt (ed.), *The Interpretation of Culture*, (New York: Basic Books, Inc., 1973).
- Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian*, (terj.), (Jakarta: Bhratara, 1974).
- Gelanggang, A.H., *Rahasia Pemberontakan Aceh dan Kegagalan Politik Mr. SM Amin*, (Banda Aceh: Pustaka Murni Hati, 1956).
- Haidar, M. Ali, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Harahap, Zainabun , *Operasi-Operasi Militer Menumpas Kahar Muzakkar*, (Jakarta, 1965)
- Hardi, Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa depannya, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993).
- Hardi, *Api Nasionalisme: Cuplikan Pengalaman*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983)
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latarbelakang Politik dan Masa depannya*, (Jakarta: Citra Panca Serangkai, 1993).
- Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992).
- Hasjmy, Ali, *Almanak Umum 1959*, (Banda Aceh: Atjeh Press Service, 1959).
- Ibrahimi, M. Nur. 2001. *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Da'wah.
- Insider (S.M. Amin), *Atjeh Sepintas Lalu*, (Jakarta: Fa Archapada, 1950).
- Insider. 1957. *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*. Jakarta: N.V. Soeroengan.
- Jakoeb, Tgk. Isma'il, *Soesoenan Indonesia Merdeka*, (Koetaradja: Semangat Merdeka, 1945).
- Jan, Abdul Murat Mat, "Pemberontakan Darul Islam Aceh 1953-1959", dalam *Akademika* No. 9, 1976.
- JarahDam-I, *Dua Windhu Kodam I/Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, 1972).
- Kartosowirjo, S.M. (nama pena: Karma Yoga), *Pedoman Dharma Bakti, jilid I*.
- Kartosowirjo, S.M. (nama pena: Karma Yoga), *Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid II*, Nota Rahasia 22.10.1950.
- Kartosowirjo, SM, *Manifesto Politik Negara Islam Indonesia*, (Garut: naskah tak diterbitkan, 1950).
- Kartosowirjo, SM, *Sikap Hidjrah PSII*, (Malangbong, Batavia-C: Madjlis Tahkim Partai Sjarikat islam Indonesia, 1936).

- Keterangan Thaib Adamy*, Sekretaris Komite PKI Daerah Atjeh, 30 Januari 1957.
- Kosasih, A., *Teguh Tenang Menempuh Gelombang*, (Bandung: Sumur Bandung, 1962).
- Mattaliu, Bahar, *Kahar Muzakkar dengan Petualangannya*, (Jakarta: Delegasi 1965).
- Meuraxa, Dada, *Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Medan: Pustaka Sedar, 1956).
- Mossman, J., *Rebel in Paradise: Indonesia's Civil War*, (London: Jonathan Cape, 1961), hlm. 228.
- Mugni, S.A., *Hasan Bandung, Pemikiran Islam Radikal*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).
- Mujahidain, Daamurasysyi, *Menelusuri Langkah-langkah Jihad SM Kartosoewirjo*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 1998).
- Nasution, A.H., *Tjataan-tjataan Sekitar Politik Militer Indonesia*, Jakarta Pembimbing, 1955, hlm. 91.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (terj. Sylvia Tiwon), Jakarta: Grafiti Press, 1995.
- Natsir, Mohammad, *Capita Selecta*, Jilid II, (Bandung & The Hague: W. Van Hoeve, 1945).
- Nieuwenhuijze, Van, "The Dar-ul-Islam Movement in Western Java till 1949," dalam *Aspects Penumpasan Pemberontakan DI-TII/SMK di Jawa Barat*, (Bandung: Dinas Sejarah TNI-Angkatan Darat, 1974).
- Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo*, (Jakarta: Aryaguna, 1964).
- Pluvier, J.M., (1953:84), sebagaimana dikutip oleh C. van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993).
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1993).
- Polem, T.M. Ali Panglima, *Sumbangsih Aceh Bagi Republik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 72-73.
- Puar, Yusuf Abdullah, dkk., *Muhammad Natsir 70 tahun: Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1978).
- Reid, Anthony, "The Birth of Republic in Sumatra" dalam *Indonesia*, 12, (Oktober 1971).
- Reid, Anthony dan Shiraishi Saya, "Rural Unrest in Sumatra, 1942: A Japanese Report", dalam *Indonesia* 21 (April 1976), hlm. 115-133.
- Reid, Anthony dan Shiraishi Saya, "Rural Unrest in Sumatra, 1942: A Japanese Report", dalam *Indonesia* 21 (April 1976).
- Reid, Anthony, "The Birth of Republic in Sumatra" dalam *Indonesia*, 12, (Oktober 1971).
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern* (terj.), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).
- Saifuddin, Achmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 89.
- Sajoeti, M.I., *Ummat Islam Menghadapi Pemilihan Umum*, (Bandung: Jajasan Djaja, 1953).
- Saleh, Hasan, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992).
- Siegel, James T., *The Rope of God*, (Los Angeles: California University Press, 1969).
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *The Republican Revolt, The Case of Achehnese Darul Islam*, (Singapore: ISEAS), 1985.
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1990)
- Soebagio I.N., *K.H. Masjkur: Sebuah Biografi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982).
- Soekarno, "Negara Nasional dan Cita-cita Islam", naskah ceramah di hadapan civitas akademika Universitas Indonesia, 1953.

- Sulaiman, M. Isa, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).
- Syamsuddin, Nazaruddin. 1990. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Pustaka utama Grafiti.
- The, Anna Marie, *Darah Tersimbah di Djawa Barat: Gerakan Operasi Militer V*, (Jakarta: Lembaga Sedjarah Hankam, 1968).
- Tiro, Hasan Mohammad, *The Political Future of the Indonesian Archipelago*, (Medan: Sumatera Berdaulat, 1965).
- Tiro, Hasan Muhammad, *Neo-Colonialism in Indonesia (How a New Colonialism has been established under the cover of the cry of "anti-colonialism"*, Naskah Pidato pada Sidang Umum XVI PBB Oleh Wakil Republik Federasi Indonesia di PBB, (New York: 1961).
- Tiro, Mohammad Hasan, *The Political Future of The Indonesian Archipelago: A Manifest by Dr. Teungku Hasam Muhammad di Tiro*, (Medan: Sumatera Berdaulat, 1965).
- Wertheim, W.F., *Indonesian Society in Transition*, (The Hague: W. van Hoeve, 1969).

Dokumentasi dan Peraturan Perundangan

- Album Peristiwa Pemberontakan DI-TII di Indonesia*, (Jakarta: Dinas Sejarah TNI-AD, 1981), hlm. 242-243.
- Bagian Dokumentasi, *Sekitar Peristiwa Daud Beureu'eh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.).
- Dekrit Presiden*, 5 Juli 1959. Bahan Penataran P-4 bagi mahasiswa, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988).
- Disjarah TNI, *Album Peristiwa DI-TII*, (Jakarta: Dinas Sejarah TNI, 1981).
- Keputusan KSAD No. 264/4/1960 Tanggal 15 April 1959 Tentang Penampungan eks DI/TII.
- Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia no. 22.
- Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia no. 21.
- Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia no. 1/Miss8-1959.
- Komando Daerah Militer VI Siliwangi, Team pemeriksa *Berita Atjara Interogasi I*, 16 Juni 1962.
- Pengumuman Pemerintah 20 November 1955.
- Peraturan Wakil Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah no. 8 1949.
- Persetujuan Bersama Kutaraja*, 1 Oktober 1959 A.n. Dewan Revolusi (Gerakan Revolusioner Islam Aceh), Kodam Aceh Iskandar Muda dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- Persoalan-Persoalan Politik di Atjeh*, Laporan Ms. Mohd. Suhud kepada Gubernur Sumatera Utara, (Medan, 1953).
- Sekitar Peristiwa Daud Beureu'eh*, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.).
- Soekarno, *Djangan Tinggalkan Toleransi*, Pidato P.M.J. Presiden Republik Indonesia dalam malam resepsi penutupan Muktamar ke 7, Partai Masjumi tgl. 27 Desember 1954 di Surabaya: Djawatan Penerangan RI, Propinsi Djawa Timur, t.t.
- Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia*, 5 Oktober 1953.
- Sumatera Utara, *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953).
- Undang-undang No.2/1949.

Media Massa [Surat Kabar dan Majalah]

- Asia Newsletter* Vol.VIII.n.37,10 Oktober 1953, Sekitar t.t. I:493)

Duta Masyarakat, tanggal 20-11-1962, tanggal 28-12-1962, tanggal 29-12-1962, tanggal 31-12-1962.
Duta Masyarakat, 20-5-1959, 21-5-1959.
Kiblat XVIII, No. 24, 1981.
Merdeka, 26.5.1950.
Pikiran Rakyat, 14 Februari 1956.
Pikiran Rakyat, 15 Februari 1956.
Pikiran Rakyat, 4 Februari 1956.
Pikiran Rakyat, tanggal 4-11-1953.
Time, 16 Februari 1953.
Time, 5 Februari 1953.

Wawancara

Wawancara dengan Abdul Fatah Wirananggapati, Sumedang, 9 Oktober 1987.
Wawancara dengan Sayed Mudhahar Ahmad, Jakarta, 14 Maret 1998.
Wawancara dengan Abdul Fatah Wirananggapati, Sumedang, 1 November 1991.
Wawancara dengan Gaos Taufik, Jakarta, 7 Agustus 2001.
Wawancara dengan Teungku Shaleh, Leupung, Cot Jeumpa, 14 Juni 2006.
Wawancara dengan Ishak Ibrahim, Banda Aceh, 24 Juli 2006.
Wawancara dengan Tgk. Saleh, Pulot, Leupung, Aceh Besar, 27 Juni 2006.
Wawancara dengan Tgk. Ibrahim A. Rahman, Banda Aceh, 28 Juni 2006.

Peristiwa PKI di Aceh

Abubakar, Sayed, *Wawancara*, Banda Aceh, tanggal 8 Juli 2006
Al Habsyi, Said Umar, "Hanya sekali PKI lancarkan Aksinya di Banda Aceh", dalam harian *Waspada* Medan, tanggal 22 September 1986.
Amelz, *Riwayat Singkat Atjeh Bangoen Sesoedah Tidoer Njenjak Beberapa Poeloeh Tahoen Laloe*, (Pidie, naskah ketikan, t.t.).
Ardhana, I Ketut, *Dimensi-dimensi Konflik di Tingkat Lokal*, Lokakarya Kerjasama LIPI, DIKNAS, MSI, 2005.
Bowen, Craig, *From Ashes The Rise and Fall of the PKI, A Short History of The Indonesian Communist Party*, Militant International Publication.
Ebesnstein, William, *Isme-Isme yang Mengguncang Dunia*, Narasi, Jakarta, 2006.
Hasjmy, A., *Peranan Islam Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
Hasjmy, Ali, *Perang Gerilya dan Pergerakan Politik di Aceh Untuk Merebut Kemerdekaan Kembali*, (Banda Aceh: Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1980).
Ibrahim, A.R, *Awal Kehancuran PKI di Aceh*, Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh, Tanggal 30 September 1993.
Jiuping, "9 Komentor Mengenai Partai Komunis", PT. Sinar Era Baru, Jakarta, 2005.
Kasdi, Aminuddin, *PKI/BTI Membakar Jawa dan Madura Dengan Aksi-aksi Sepihak (1963 - 1965) dan Selogan Revolusi Belum Selesai*, Kerjasama LIPI, DIKNAS, MSI, Jakarta, 2005.
Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia no. 1/Miss8 1959)
KH, Ramadhan dan Hamid Djabbar, *Sjamaun Gaharu Cuplikan Perjuangan di Daerah*

- Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Langenberg, Michael van dkk, *Gestapu: Matinya Para Jenderal dan Peran CIA*, editor Sutoro, Cermin, Yogyakarta, 1999.
- Liong, Liem Soei, It's the Military, Stupid! Dalam Freek Colombijn dan Thomas Lindblad (ed) et.al., *Roots of Violence In Indonesia* (Leiden: KITLV, 2002).
- Lukman, M.H., *ABC Revolusi Indonesia*, 1957.
- McDonald, Hamis, dalam *Suharto's Indonesia* (Blackburn, Victoria: Fontana Books, 1980), hal. 109.
- Mediakrasi.com.
- Memorandum Intelejen CIA, "Indonesian Army Attitudes toward Communism" Directorate of Intelligence, *Office Current Intelligence*, 22 November 1965, case #88-119, Doc. 119, butir 1.
- Moertopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1974.
- Ponomban, Fendry, Periset dari Off Stream Komunitas Media dan Dolumenter Jakarta.
- Rifky Pradana, *Syair Perang*, (typescript, t.t.).
- Sugiarso Suroyo, *Siapa Yang Menabur Angin, Akan Menuai Badai*, Jakarta, 1988..
- Sulaiman, M. Isa, (et.al), *Aceh dan Belanda: Kumpulan Bibliografis*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan, 2003).
- Sulistiyono, Singgih Tri, *Peran Angkatan Darat dalam G 30 S 1965*, Lokakarya Kerjasama LIPI, DIKNAS, MSI, Jakarta, 2005.
- Toer, Pramody Ananta, dalam pengantar buku tesis dokter dari Greng Poulgrain, pengajar di University of New England, Asutralia, *The Genesis of Malaysia Konfrontasi Brunai and Indonesia, 1945-1965*.
- Wahid, Salahudin, *Memecahkan Teka-Teki Sejarah G 30 S*, dalam buku Aminuddin Kasdi, *G. 30. S. PKI/ 1965 Bedah Cesar Dewan Revolusi Indonesia*, Java Pustaka, Jakarta, 2005.
- Wertheim, W.F., "Sejarah Tahun 1965 yang Tersembunyi", *Arah*, No.1/ tahun 1990.

Surat Kabar dan Majalah

DM 18-3-1959

DM 23-3-1959

DM 25-5-1959

DM 6-8-1959

DM 7-8-1959

DM 25-8-1959

DM 28-5-1959

DM 25-11-1959

DM 26-11-1959

DM 27-11-1959

DM 1-12-1959

DM 7-8-1959

Kompas, 6 Juli 1965

Kompas, 10 Agustus 1965

Kompas, 12 Oktober 1965

Kompas, 13 Oktober 1965

Kompas, 15 Oktober 1965

Kompas, 14 Oktober 1965
Kompas , 20 Oktober 1965
Kompas , 21 Oktober 1965
Kompas, 21 Oktober 1965
Kompas, 16 Oktober 1965
Kompas, 20 Oktober 1965
Kompas, 18 Oktober 1965
Kompas, 19 Oktober 1965
Kompas, 11 Oktober 1965
Kompas, 23 Oktober 1965
Kompas, 23 Oktober 1965
Kompas, 26 Oktober 1965
Kompas, 27 Oktober 1965
Kompas, 28 Oktober 1965
Kompas, 29 Oktober 1965
Kompas, 8 Oktober 1965
Kompas, 6 Oktober 1965
Kompas, 7 Oktober 1965
Kompas, 30 Oktober 1965
Kompas, 3 November 1965
Kompas, 4 November 1965
Kompas, 4 November 1965
Kompas, 4 November 1965
Kompas, 6 November 1965
Kompas, 6 November 1965
Kompas, 6 November 1965
Kompas, 8 November 1965
Kompas, 8 November 1965
Kompas, 8 November 1965
Kompas , 10 November 1965
Kompas, 12 November 1965
Kompas, 13 November 1965
Kompas, 16 November 1965
Kompas, 17 November 1965
Kompas, 23 November 1965
Kompas, 26 November 1965
Kompas, 29 November 1965
Kompas, 4 Desember 1965
Kompas, 9 Desember 1965
Kompas, 16 Desember 1965
Kompas , 3 Januari 1966
Kompas, 13 Januari 1966
Kompas, 22 Januari 1966
Kompas, 10 Februari 1966
Kompas, 12 Februari 1966
Kompas, 18 Februari 1966
Kompas, 19 Februari 1966

Kompas, 3 Februari 1966
Kompas, 9 Maret 1966
Kompas, 19 Maret 1966
Kompas, 12 April 1966
Kompas, 2 Mei 1966
Kompas, 9 Juni 1966
Kompas, 7 Juli 1966
Kompas, 17 Desember 1966
Kompas, 11 Oktober 1966
Kompas, 19 Oktober 1966
Kompas, 6 Oktober 1966
Kompas, 7 Oktober 1966
Kompas, 7 Oktober 1966
Kompas, 4 November 1966
Kompas, 16 Januari 1967
Kompas, 20 Maret 1967
Kompas, 14 April 1967
Kompas, 27 April 1967
Kompas, 29 April 1967
Kompas, 6 Mei 1967
Kompas, 15 Juni 1967
Kompas, 14 Agustus 1967
Kompas, 6 September 1967
Kompas, 9 Oktober 1967
Kompas, 5 Oktober 1967
Kompas, 2 Agustus 1969
Kompas, 3 Oktober 1969
Kompas, 14 Februari 1970
Kompas, 22 Juli 1970
Kompas, 11 Agustus 1970
Kompas, 31 Agustus 1971
Kompas, 16 Desember 1971
Kompas, 7 Oktober 1972
Kompas, 22 Juni 1972
Kompas, 9 Mei 1972
Kompas, 30 Maret 1973
Kompas, 12 November 1973
Mail Rapporten No. 829X/26
Mail Rapporten No. 872X/26
Mail Rapporten No. 899X/26
Mail Rapporten No. 938X/26
Mail Rapporten No. n687 Geh/1931
Pikiran Rakyat, 23 Juni 2005
Serambi Indonesia, 4 Oktober 2000
Serambi Indonesia, 4 Oktober 2000
Sinar Harapan, 27 November 1965
Sinar Harapan, 3 Maret 1969

Situs Internet

www.agbardsley.com

www.pir.org/kadane.com

Damai Di Serambi Mekah

- Al Chaidar. 1999. *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. (Jakarta: Madani Press).
- Alfian, T. Ibrahim. *Aceh dalam Lintasan Sejarah*.
- Antoine Braud, Pierre and Geovanni Gravi. 2005. *The EU Mission in Aceh: Implementing Peace*. occasional paper, International Security Studies, Desember 2005.
- Aspinal, Edward, dan Harold Crough. 2003. *The Aceh Peace Process. Why it Failed*.
- Barber, Richard. 2000. *Aceh: The Untold Story*.
- Crouch, Harold. 2003. *The Aceh Peace Process: Why It Failed*.
- Weda, Fikar F., dan S. Satya Dharma. 1999. *Aceh Menggugat*.
- Taib Adami, *Aceh Mendakwa..*
- Habibie, B.J.
- HDC. Naskah *Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)*.
- HDC. Naskah *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*.
- Jihad, Abu. 2000. *Hasan Tiro dan Pergolakan Aceh*. (Jakarta: Titian Ilmu Insani).
- Kartikasari. 2000. *Mengelola Konflik*, British Council.
- Kontras Aceh.
- Noer, Deliar. *Mewujudkan Otonomi Daerah*.
- Reid, Anthony. 2005. *Asal Mula Konflik Aceh*.
- Said, Muhammad. 1981. *Aceh Sepanjang Abad*. (Jakarta: Bina Cipta).
- Saleh, Hasan. 1992. *Mengapa Aceh Bergolak*.
- Schulze, Kirsten E. 2004. *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization*.
- Schulze, Kirsten E. 2003. makalah. "The Struggle for an Independent Aceh: The Ideology, Capacity, dan Strategy of GAM".
- Siegel, James T. 1972. *The Rope of God*. (Massachuset: California University Press).
- Skocpol, Theda.
- Sulaiman, AB. 2005. *Aceh Bakal Lepas*.
- Sulaiman, Isa. 2000. *Aceh Merdeka*.
- Syamsuddin, Nazaruddin. 1999. *Revolusi di Serambi Makkah*.
- Tippe, Syarifuddin. 2000. *Aceh di Persimpangan Jalan*.
- Tiro, Hasan. 1958. *Demokrasi untuk Indonesia*.
- Tiro, Hasan. 1977. *The Price of Freedom: The Unfinished Diary*.
- Yahya, Ali, *Laporan Pansus DPR RI kepada Rapat Paripurna DPRRI*.
- Zamzami, Amran. 2001. *Tragedi Anak Bangsa: Pembantaiaan Tengku Bantaqiyah di Beutong Ateuh, Aceh Selatan*.

Media Massa

- International Herald Tribune.
- Kantor Berita 68H.
- Media Indonesia,
- NDC Handelsblad
- Radio Netherland Wereldemroep
- Serambi Indonesia.

Wawancara

- Abu Adnan, Bakongan,
- Buya Zamzami Syam, Singkil,
- Dailmy,
- Makmur, Mantan Bupati Singkil,
- Marzuki Mahmud, Medan.
- M.Nur Nikmat, Medan,
- Nasir, mantan Guru di Tapak Tuan,
- Said, Biro Pemerintahan Kab. Aceh Barat.
- Said Mustafa, Jeram, Kab, Nagan Raya,
- Sofianis, Bup.Aceh Barat,
- Tengku Bulqaini,
- Tengku Usman Lanpoih Awe,
- T. Nadi, Pasukan GAM, Meulaboh. .***



INDEKS

Peristiwa Cumbok di Aceh

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| A.H. Nasution, 4, 5 | Abdullah Arief Atjeh, 2 |
| A.K. A. Gani Mutiara, | Abdullah, Ahmad, 27 |
| Jacobi, 41 | Abdurrahman, 55, 65 |
| Abdul Gaffar, 20 | Abidin, Teuku Zainal, 27 |
| Abdul Hadi Arifin, 11 | Abubakar Majid, 79 |
| Abdul Manaf, 79 | adagium, 26 |

Adam, Teungku Ahmad, 35
 Agustin de Blaulieu, 12
 Ahmad bin Zaini Dahlan, 21
 Ali Hasjmy, 4, 44
 Amelz, 40
 Amerika Serikat, 25
 Amir Husin al-Mudjahid, 4
 Anthony Reid, 50
 anti fasisme, 31
 anti human, 29
 aqidah, 27
 Arief, Teuku Njak, 35
 ashobiyah, 27
 Asia Selatan, 25
 Asia Tenggara, 25
 Asia Timur Raya, 32
 Ayah Daud Tangse, 65
 Azis, Tuanku Abdul, 32
 Azwar, Teuku Hamid, 34
 B.J. Boland, 2
 Bakar, Said Abu, 26
 Bakhtiar, 60
 Bakongan, 35
 Banzai, 29
 Basyah, Teuku Ali, 27
 bathiniyah, 33
 Bayu, 30
 Belanda, 25
 Belgia, 25
 Beureu'eh, Teungku Muhammad Daud, 27
 BKPA, 32
 Blang Bintang, 34, 35
 Blang Kejeren, 26, 30
 Blang Peutek, 30
 bushido, 32
 C. Deykerhoff, 15
 C. Lekkerkerker, 53
 C. van Dijk, 3
 Chokan, 35
 Christian Snouck Hurgronje, 15, 17, 20
 Cot Plieng, 30
 Dai Nippon, 27, 29, 32
 Daud Hasan, 65
 De Britto, 11
 de facto, 28
 Denys Lombard, 12, 13
 devide of rule, 32
 Dewan Rakyat, 27
 Dipenogoro, 14
 Eric Eugene Morris, 41
 Eropa, 25
 Fadhlullah Jamil, 11, 12
 fasisme kebangsaan, 24
 Fujiwara, 27
 Fujiwara Kikan, 26
 Gayo, 30
 Gelanggang Labu, 35
 Gosenson, Kolonel, 26
 Gunco T. Chik M. Daud Syah, 56
 Gunseibu, 34
 Gunung Setan, 30
 Gyu Gun, 28, 33
 H. Subagijo A.N, 17
 H.C. Zentgraaff, 16
 Habib Abdurrahman Ad-Dhahir, 21
 Hamid Azwar, 74, 75, 76, 77
 Hamka, 32
 harakiri, 34
 Hasan Aly, 4
 Hatta, 39
 Hawaii, 25
 Heiho, 27, 28, 33
 Hikayat Prang Sabi, 30
 Hindia Belanda, 25
 Hinomaru, 29
 Hiroshima, 33
 Hitler, Adolf, 25
 HM. Rasjidi, 17
 Husin Yusuf, 63, 73, 75, 77
 ideologis, 24
 Ilahi, 25
 Inggris, 25
 invasi Jerman, 25
 Ise-Ise, 30
 Islam, 27
 Ismail Yacob, 63
 Italia, 25
 Iwaichi, Jenderal Fujiwara, 26
 J. Kreemer, 43, 44
 J.H.R. Kohler, 13
 Ja'cuba Karepesina, 42
 Jalaluddin Atharusani, 44
 James T. Siegel, 42
 Jepang, 25
 Jerman, 24, 25
 jihad, 31
 Johan Syah, 44
 Juli, 35
 Kabu, Teungku Di Blang, 31
 Kai Gun, 28
 kaphe, 25
 kapitalisme, 25
 Kasan Ali, 83
 Kempetei, 29
 khalwat, 31
 Konferensi Islam, 32
 krisis politik, 24
 Kuala Selangor, 27
 Kumbang, Teungku Chik Di Meunasah, 31
 Kuta Cane, 30
 Kutaraja, 26
 lahiriyah, 33
 Lam Lhom, 35
 Lampu'uk, 35
 Langkat, 27
 Langsa, 27, 35
 Leman, Pawang, 35
 Lhok Nga, 34, 35
 Lhokseumawe, 30
 Lohman, 20, 21

M. Gousmia, 77
M. Isa Sulaiman, 1, 2
M. Nur El Ibrahimy, 49, 54
M. Saleh Umar, 68
M. Yacob Siregar, 68
M. Yunus Nasution, 68
Mahmud, Tuanku, 27
MAIBKATRA, 32
MAIBKRATA, 32
Majuj, 30
Makayima, Letnan, 26
Malaya, 26, 27, 30
Malaysia, 26
Manyak, Teuku, 35
Marlina M. Dahlan, 3
Masabuchi, 27
Masubuchi, 31
Medan, 27, 32
Meulaboh, 35
militerisme Jepang, 25
Mohammad Nur, 4
Muhammad bin Abdul Wahab, 21
Muhammad Husen, 83
Muhammad Juned Afandi, 65
Muhammad Tahir Geureugok, 65
MUI, 32
Musailamah al-Kaddzab, 21
muslimin, 27
Nagasaki, 33
Nakashima, 32
Nan Yo, 25
Napoleon Bonaparte, 14
nashrullah, 26
nasionalisme religius, 24
nasionalisme sekuler, 24
Nathar Zainuddin, 67, 68, 69
Nazaruddin Syamsuddin, 67, 69
Neh, Nyak, 35
Nippon Seisin, 28
Nurdin Sufi, 77, 79
Nuruddin Ar-Raniry, 44
Nusantara, 33
Nyak Hasan, 64, 65
Nyak Ishak, 65
Nyak Neh, 27
Nyak Umar, 83, 84
Pangkalan Susu, 27
Panglima Tibang, 26
parang cikok, 31
Paul Van 't Veer, 50, 51
Pearl Harbour, 25
Perang Asia Timur Raya, 27
Perang Dunia II, 33
Perang Rusja-Jepun, 26
Pidie, 30
Plieng, Teungku Abdul Jalil Cot, 30
POESA, 26
Polisi, 27
Pulau Sembilan, 27
Raden Abu Bakar, 20
Rahman, Cut Lem, 35
Raja Uma, Muhammad Tahir, 64
Ratu Belanda, 25
Redelong, 26
Residen, 32
Rikit Ghaib, 30
Rimba Gayo, 26
romusha, 29
Rusdi Sufi, 53
S.M. Amin, 6, 8
Sab Cut, 79
Said Umar, 65
Saletore, 42
Sang Merah Putih, 29
Sarwono Sastro Sutarjo, 67
saudara tua, 26, 32, 33
Sawamura, Mayor Jenderal, 27
Sayid al- Mukammal, 12
Sayid Ali Al Sagaf, 35
Selat Malaka, 26
Sendenhan, 32
Shafiatuddin, 44
Shinto, 29
Shucokan, 32
Sigli, 35
Singapura, 25, 32
Siti Hawa Saleh, 11, 12
Sjammaun Gaharu, 3, 7, 8, 60
Sjehk Min Jeureulla, 2
Soekarno, 39
sosialisme nasional, 24
Spiering M, 2
Suhardjo Harjowardojo, 4
Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Qahhar, 12
Sultan Iskandar Muda, 12, 13
Sultan Mahmud Syah II, 14
Sultan Mughayat Syah, 11
Sultan Muzaffar Syah, 43
Sultan Riayat Syah, 12
Sultan Shalahuddin, 12
Sultan Zainul Abidin, 12
Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah, 45
Sumatera, 26, 30
Suncho, 30
syahid, 30
Syamsuddin As-Sumatrani, 44
Syiah Kuala, 44, 45
Syonanto, 25
syuhada, 28
T. Daod Tjoembok, 40
T. Daud, 79
T. Ibrahim Alfian, 51, 52, 54
T. Laksamana Oemar Andjong, 40
T.H. Zainal Abidin, 64
Takengon, 26
Tambo, 30
Teluk Nibung, 27
Tengku Abdul Jalil Amin, 4
Tengku Muhammad Abduh, 4
Tengku Usman Peureula, 4

Tenno Heika, 27, 29
 Teuku Laksaman Umar, 66
 Teuku Abdul Hamid, 66
 Teuku Abdullah, 60
 Teuku Ahmad Danu, 59
 Teuku Ali Basyah, 74, 77
 Teuku Banta Ahmad, 66
 Teuku Chik Meureudu, 66
 Teuku Chik Muhammad Johan Alamsyah, 59
 Teuku Chik Peusangan, 57, 58, 59
 Teuku Cut Hasan, 66
 Teuku Daud Syah, 77
 Teuku Hamid Azwar, 60
 Teuku Hasan, 66
 Teuku Husein, 66
 Teuku Husin Trumon, 77
 Teuku Lambait, 77
 Teuku Mohammad Daudsjah, 3
 Teuku Mohammad Hasan, 3
 Teuku Muda Dalam, 66
 Teuku Muhammad, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66
 Teuku Muhammad Syah, 63
 Teuku Muhammad Ali, 60, 61, 64, 66
 Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, 60, 61, 64
 Teuku Muhammad Amin, 83
 Teuku Muhammad Daud, 57, 58, 66
 Teuku Muhammad Daud Cumbok, 58
 Teuku Muhammad Daud Syah, 59, 82
 Teuku Muhammad Hasan, 88
 Teuku Nek Meuraxa, 52
 Teuku Nya' Arif, 3, 56, 60
 Teuku Pakeh Sulaiman, 66
 Teuku Panglima Polim Muhammad Ali, 3, 7
 Teuku Pocut Umar, 66
 Teuku Radja Said, 66
 Teuku Sulaiman Aziz, 77
 Teuku Sulung, 66

Teuku Teungoh Hanafiah, 77
 Teuku Tjut Hasan, 56, 58
 Teuku Usman Krueng Raya, 77
 Teuku Yusuf, 77
 Teungku Abdul Jalil, 30, 31, 32
 Teungku Abdul Wahab Seulimeum, 83, 84
 Teungku Ahmad Abdullah, 64
 Teungku Amir Husin Al Mujahid, 73, 74, 75, 76, 78, 79
 Teungku Chik di Tiro, 16
 Teungku Chik Ma'at di Tiro, 16
 Teungku Haji Mustafa Ali, 83
 Teungku Hasan Matang Geulumpang Dua, 65
 Teungku Hasbi Ash-Shiddiqy, 77
 Teungku Itam Peureulak, 83
 Teungku Muhammad Daud Beureueh, 63
 Teungku Syekh Ibrahim, 77
 Teungku Ulee Tutue, 16
 Tgk. Abdoel Hamid, 24
 Tokubetsu, 33
 Tokubetsu Kaisatsutay, 28
 Tokyo, 25
 Toyo, Jenderal, 29
 Trumon, 30
 Tuanku Mahmud, 59, 66, 88
 uleebalang, 27
 upacara Seikeire, 29
 Usman Basyah, 26
 van Swieten, 30
 Van Swieten, 14, 51, 52
 Van Tiel, 13
 Volksraad, 27
 Wan Hussein Azmi, 12
 World War II, 26
 Xarim M.S., 23, 67-70
 Yajuj, 30
 Zainal Baharuddin, 67
 Zakaria Ahmad, 39, 41, 44, 45

Darul Islam di Aceh

A. Hasjmy, 3, 27
 A. Karim AS, 30
 A. Latief, 39
 A.H. Nasution, 38, 40
 A.K Gani, 116
 A.K. Pringgogido, 107
 A.R Ibrahim, 34
 Abdul Gani Usman, 28
 Abdul Murat Mat Jan, 27, 30
 Abdurahcman Suriomihardjo, 69
 Adolf Baars, 106
 Ahmad Yani, 38, 40, 42
 Ahmadiyah Qadian, 15
 Ali Hasjmy, 20
 Ali Moertopo, 73
 Ali Murtopo, 43, 102

Alimin Prawirodirdjo, 107
 Allen Pope, 49
 Amelz, 14, 15, 21, 22, 23
 Aminuddin Kasdi, 13, 14
 Amir Husin al Mudjahid, 26, 28
 Amir Mahmud, 45, 46
 Amir Sjarifudin, 53, 116, 119
 Amir Syarifudin, 53
 Amsterdam, 4
 Andi Rivai, 45
 Atjeh Tram, 14, 18
 Atjeh-Moorden, 15
 Baiturrahman, 18
 Banda Aceh, 15, 18, 19, 20
 Banua, 3
 Barisan Tani Indonesia (BTI), 31

Basuki Rahmat, 45
 Batee Iliak, 16
 Benedict R. Anderson, 38
 Besitang, 14
 Bireun, 14, 18
 Bob Hasan, 47
 Bob Sunario, 43
 Boedi Oetomo, 4, 106
 Bolshevik, 2
 Bronbeek Arnhem, 16
 Bungkus, 39
 Cakrabirawa, 39, 41, 42, 43
 Central Sarekat Islam, 6
 Chiang Kai Sek, 48
 Chris Hilton, 55
 CIA, 1, 2, 38, 39, 41, 54
 Cina, 1, 2, 8
 CSIS, 59
 Cumbok, 30, 31
 D.I Pandjaitan, 38
 D.M.G Koch, 4
 D.N. Aidit, 52, 120
 Darsono, 5, 107, 110
 Darurat Militer, 26
 Das Kapital, 2
 Dayah Ummul Ayman, 18
 De Volharding, 4
 Dekker, 4
 Diponegoro, 6
 Djahuruf, 39
 Djuanda, 27, 28, 29
 DN Aidit, 70
 Domine Iz Thenu, 16
 Dul Arief, 39
 E. Ridwan, 68
 E. Van Caspel, 58
 Engels, 2
 Faqeh Abdul Ghani, 18
 Freddy Supit, 104
 G.H Bousquet, 117
 GAM, 25, 26
 Gatot Subroto, 29
 Gatot Sukirno, 40
 Gayo, 15
 Gerakan Revolusioner Islam Indonesia, 28
 Gerindo, 116
 Gerwani, 66, 68, 71
 Gilchrist, 51
 H.J.C Princen, 58, 62
 Haagsche Courant, 58
 Hadji Misbach, 21
 Haji Hasanuddin, 28
 Haji Merah, 6
 Haji Misbach, 5, 6
 Harjono MT, 46, 47, 48
 Haryono, 38, 39
 Hasan Aly, 27
 Hasan Saleh, 27, 28
 Hasjmy, 27, 28, 29, 30
 Hatta, 112-122
 Hendricus Josephus Fransiscus Marie
 Sneevliet, 4, 106
 Henk Kolb, 58
 Henk Sneevliet, 107
 Het vrije woord (Kata yang bebas), 6
 Hidayat Wiryanjaya, 43
 Hindia Belanda, 4
 Hitler, 55
 Hoesin Gelar Mangaraja Tagor, 21
 HOS Tjokroaminoto, 20, 21
 I Ketut Ardhana, 13
 Imam Bardjo, 48
 Imuem Gam, 21
 Indie Werbaar (pertahanan Hindia), 5
 Indische Partij, 5
 Indische Sociaal Democratische Vereeniging
 (ISDV), 4
 Indische Sociaal-Democratische Vereeniging
 (ISDV), 107
 Indonesia Raya, 62
 Indonesische Vereeniging, 108
 Ishak Amin, 27
 Ishak Juarsa, 35
 Iskandar Zulkarnaen, 19
 J.A. Bransteder, H.W, 4
 Jakarta, 27-35
 Jaya, 3
 Jean Dubois, 115
 Jepang, 3, 5
 Jerman Barat, 2
 Jiuping, 2, 9
 Julu Rayeu, 19
 K.P.M. (Koningkelijke Pakkat Vaar
 Maataschappij), 22
 Kamaluddin, 68
 Karl Marx, 2, 107
 kaum terpilih, 8
 Keputusan Pemerintah (Keppres) Nomor 28
 Tahun 2003, 26
 Kuala Simpang, 14
 Kuba, 1
 Kuntoadji, 67
 Kutaradja, 14, 15, 21
 Kyai Maja, 6
 Langsa, 14, 19, 20
 Latief, 46, 47
 Lenin, 4, 6
 Lhok Sukon, 14
 Lhokseumawe, 14
 Liem Siu Liong, 47
 Liem Soei Liong, 61
 Lingga, 3
 M Hatta, 112
 M. Hanafiah, 15
 M. Insja, 27
 M. Isa Sulaiman, 15
 M. Yasin, 34, 104, 105
 M.H Thamrin, 116
 M.H.Lukman, 10
 Madiun, 1, 4

Madiun Affairs, 58
Magusig O, 69
Mail Rapporten, 15
Maludin Simbolon, 27
Manifesto Komunis, 2
Mao Zedong, 2, 9
Marechausse, 14
Marsose, 16
Mas Marco, 5
Mashuri, 42
Medan, 18, 19
Minangkabau, 15
Mojokerto, 4
Muhammad Samadikin, 34
Mujahidin, 14
Mukidjan, 39
Musso, 117, 118, 119, 120
NAD, 26
Nathar Zainudin, 31
Noor Majid, 35
Nyoto, 52
Orde Baru, 1, 3, 8
Orde Lama, 101
Organisasi Buruh seluruh Indonesia (SOBSI), 31
P. Bergsma, 4
Paat, 39
Palak Bangkarun, 68
Panton Labu, 14
Partai Komunis Indonesia (PKI), 4
Pasopati, 39, 40
Pedir, 3
Penelitian Khusus (Litsus), 62
Perhimpunan Indonesia (PI), 112
Perlak, 3, 14
Perserikatan Komunis, 4
Piere Tendean, 38
Pikiran Rakyat, 18
Pocut Meuligoe, 16
Poelo Pandjoe, 23
POLRI, 14
Pramono, 106
Pranoto Reksosamodra, 47
Pranoto Reksosamudro, 44
PRRI, 25, 26, 28
PRRI/Permesta, 26
Rahmad Ali, 15
Ratu Adil, 6
Rifky Pradana, 16
RIS, 25
Romo Wignyosumarto, 58
Rosihan Anwar, 102, 120
Ruth McVey, 109
Ruth T. Mc Vey, 38
Ryacudu, 45
S. Parman, 38, 46, 47, 48
Said Umar Al Habsyi, 35
Salahudin Wahid, 38
Salim-Moeis, 107
Samalanga, 14, 15, 16, 17, 21, 22
Santoso, 42
Sarekat Islam (SI), 5, 20
Sartono Kartodirdjo, 107
Sarwo Edhie Wibowo, 42
Satar, 39
Sayed Abubakar, 35
Semaoen, 4-7, 106, 107, 111, 113
Semarang, 4
Semarang Handelsvereniging, 4
Semarangse Handelsvereniging, 106
Semaun, 109, 110, 111, 112, 113, 118
Sentot, 6
Seulawah, 14
Seulimeum, 14
Si Gombar, 18
Sigli, 14, 19
Sinar Djawa, 6
Singgih Tri Sulistiyono, 14
Sjahrir, 116, 120
Sjamaun Gaharu, 26, 31
Sjammaun Gaharu, 26, 27, 28, 30
Sneevliet, 4
Soebandrio, 46, 54
Soedjono Hoemardani, 59
Soeharto, 1, 39, 42-50, 54, 102, 103, 104
Soejono, 40
Soekarno, 37-44, 48-53, 121, 123
Soemarsono, 53
Soemitro Djojohadikusumo, 48, 50
Soenarjo, 47
Soepardjo, 46
Soeprapto, 40, 46, 47, 48
Soerabajaasch Handelsblad, 4, 106
Soerono, 39
Soetojo, 39, 46, 48
Soewardi Poespojo, 102
Solihin, 45
Staatspoor (SS), 4
Stalin, 55, 69
Subiadinata Jusuf, 67
Sudarto, 42
Sugiarso Suroyo, 44
Sugih Arto, 101
Sukardjo, 39
Sukarno, 26, 114, 116
Sulaiman, 39
Sumijarsi, 66
Suprajogi, 29
Suprpto, 38
Surjopranoto, 6
Sutikno, 47
Sutojo Siswomihardjo, 38
Sutomo, 116
Syam, 39
Syam Kamaruzzaman, 53
Syiah Kuala, 35
T. Ahmad Aree, 23
T. Bentara Pineueng, 23
T. Hamzah, 29
T. Moeda Dalam, 23

T. Pakeh Mahmoed, 23
T. Tjhik Peusangan, 23
T.M. Amin, 28
T.R. Idris, 28
Tan Malaka, 107-118
Tedjo Suwarno, 60
T. Darwis Djeunieb, 56
Teuku Hamzah, 27
Teuku Raja Bujang, 21
Teuku Tjhik Moehammad Ali Basjah, 21, 22
Teuku Umar, 16
Teungku Nuruzzahry, 18
Tgk. Abdoel Hamid, 21-23
Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri, 23
Tgk. Hadji Abdoellah Oedjong Rimba,

22

Tgk. Haji Malem, 21
Tgk. Hoesin Poelo Pandjoe, 23
Tgk. M. Amin, 23
Tgk. M. Daud Beureueh, 23
Tgk. Sjech Abdoel Hamid, 22
Tgk. Sjech Ibrahim, 23
Tgk. Yan Garot, 23
Thaib Adamy, 11, 13, 30-34

Damai di Serambi Mekah

Abdullah Ali, MSc., Prof. Dr., 80, 145
Abdullah Putehm Ir., 120, 144, 156, 160, 164
Abdullah Syafei, 21, 102, 110
Abdurrahman Ramly, Mayjen, 80
ABRI, 47, 48, 54, 58, 73, 75, 77, 85, 101, 117, 141
Abu Jihad, 6, 13, 14, 17-19, 25, 28, 38, 45
Aceh Besar, 3
Acheh, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 71, 94, 181, 188
Adnan Bakongan, Abu, 7
Agus Wirahadikusumah, 112
aktivis IFA, 57
Al Yasa' Abubakkar, MA., Prof. Dr., 80
Alamsyah, SH., 173
Ali Hasjimi, 59
Ali Hasyim, Drs. H., 57
Ali Irsyad, Tgk. H. M., 59
Ali Sastroamidjojo, 26
Ali Yafie, 83, 155
Alie Yafie, Prof. KH., 80
Alue Nireh, 53, 55
Amerika Serikat, 40, 103, 150
Amin Mahmud, Tgk. H. M., 60
Amin Nafi, 50
Amin Rais, 67
Amir Ishak, SH., 5, 18, 20, 27, 29, 31, 32
Amran Zamzami, 57, 58, 88, 91, 135, 154-156,
164, 165, 170
Anthony Reid, 2
Aramiah, 46
Aron, 45, 115

The New York magazine, 62
The Washington Post, 70
Thee Kian Seng, 47
Tik Liong, 47, 48
TNI, 14
Trier, 2
Ud. Dewanto, 49
Umar Wirahadikusumah, 43, 44, 45
Umar Wirahadikusumah, 42
Uni Soviet, 1, 2, 7, 8
Untung, 41-46, 54
Utomo Ramelan, 46, 54
van der Heijden, 17
Van der Plas, 46-54
Vereeniging voor Spoor -en
Traamwegpersoneel (VSTP), 4
Volksraad, 6
Voltaire, 55
W.F. Wertheim, 72
Weltevreden, 108
Widodo, 59
William Ebenstein, 8
Yogyakarta, 29
Zelfbestuurder, 21

Arun, 8
Asian, 103, 161
Asmara Nababan, SH., 59
Asnawi Ali, Ir., 5, 18-20, 27
ASNLF, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 19, 21, 30, 163
Australia, 40, 103, 183
Avebury, Lord, 125, 151
Ayah Sabi, 18, 27, 31, 32
Bachtiar Ali, Dr., 80, 123, 154, 155, 156, 164
Badaruzzaman, SH., H., 60
Bambang Wijayanto, SH., 59
Banda Aceh, 17, 31, 46, 60, 63-69, 77, 80, 86, 92,
94, 97, 113, 114, 119-122, 129, 131, 132, 133,
140-146, 172, 174, 183, 190
Bandung, 37, 42, 110, 183
Bangkok, 28, 103
Bantaqiah, Tgk., 54, 56, 89, 90, 91
Batalion Kuala Simpang, 41
Batei Iliiek, 31, 50
Bechtel Inc., 32
Bengkulu, 2
Benny Murdani, Pangab Jend., 141
Besitang, 53
Beureunuen, 53
Beutong Ateueh, 56
Bill Clinton, Presiden, 102
Bireuen, 3, 31, 46, 47, 102, 131, 190
Bireun, 57
Blang Bladeh, 60
Blang Meurandeh, 56

Bom Atom, 1
 Bondan Gunawan, 110
 Borneo, 2
 Bukit Cokan, 14
 Bukit Hagu, 46
 Bukit Sentang, 54
 Bukit Tengkorak, 53
 Bustanil Arifin, 59, 155, 156
 Celebes, 2
 Chalidin, 24
 Chik Ditiro, Tgk., 3
 Christine Hakim, 57
 Christmas, 14
 Columbia University, 26
 Commonwealth, 8
 Cot Kruet, 55
 Cumbok, 24
 Dailami, 5, 17, 29
 Darul Kamal, Tgk., 18, 27, 103
 Daud Beureueh, Tgk., 3-5, 8, 18, 25, 27, 28
 Daud Husen, 19, 27, 39
 Daud Jenggot, 41
 Daud Paneuk, 13, 37, 38, 39, 40
 Daud Zamzami, Tgk. H., 60, 89
 Dayan Dawood, Prof. Dr., 59, 89, 144
 Debra H. Yatim, 57
 Deli Serdang, 46, 57
 Den Haag, 40, 94
 Denmark, 40
Desk Aceh, 9, 78, 153, 155, 156, 164
divide et impera, 4
 DI/TII, 21, 26, 27, 29, 30, 37, 76, 98, 145, 146
 Djafar Hatta, Drs., 60
 Djafar Siddik, 57
 DOM, 9, 23, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 73, 77, 78, 79, 83, 84, 88, 89, 208
 Donal Stayer, 45
 Duek Pakat Inong Aceh, 60
 Dutch, 14, 15
 Dutch East Indies, 15
 East-West Center, 21
 Edouard Laboulaye, 7
 Edward Aspinal, 160
 Elsa Siregar, 171
 Eros Djarot, 57
 Fachry Ali, 57, 80
 Fadli Ali, 60
 Faisal, 66, 96
 Fajran Zein, 57, 59
 Fauzi Hasbi Geudong, 18
 Federasi, 70
 Fikar F. Weda, 49, 57
 Filipina, 28
 Finlandia, 10, 78, 177, 186, 190
 Forum Peduli HAM, 59
 GAM cantoi., 24
 GASIDA, 4
 Gempa, 10
 George Parucome, 45
 geusyhik, 22
 Ghazali Abbas Adan, 57, 60
 GPK, 6
 GPLHT, 6
 GSBA, 6
 Gunung Halimon, 17, 110
 Gunung Malem, 55
 Guru Raman, 40
 Gus Dur, Presiden, 9, 67, 68, 77, 101, 102, 103, 111, 129, 131, 133, 135, 140, 156
 Habib Abd ar Rahman, 3
 Habibie, Presiden, 8, 54, 64, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 88, 101, 102, 133
 Hakim Garuda Nusantara, SH., 59
 Halaban, 53
 HAM, 9, 48, 49, 51, 55-61, 64, 70, 73, 80, 88, 89, 92, 96-104, 112, 116, 127, 141, 147, 154, 162, 180, 187, 188, 191, 201, 209
 Hanan Adami, 50
 hari Natal, 16
 Hari Sabarno, Letjen, 57
 Harold Crouch, 160
 Harper's Magazine, 14
 Harun Ali, 26
 Harvard, 125
 Hasan Krueng Kale, Tgk., 3
 Hasan Mohd.di Tiro, Tgk., 18
 Hasan Saleh, 37
 Hasan Tiro, 1, 2, 5, 7, 8, 37
 Hasballah Saad, 31, 32, 57, 71, 88, 101, 102, 112, 115, 116, 123, 154, 155
 Hasbi Abdullah, 5, 47, 104, 113
 Hassan Wirayuda, Dr., 125
 Hatta, 1
 HDC, 9, 77, 78, 102-118, 126, 129-131, 147-151, 160, 163-167, 171, 177, 178
 Helsinki, 10, 84, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 193, 195, 196, 209
 Hindia Belanda, 2
 Hiroshima, 1
 Hotel Meutia, 56
 Humam Hamid, Dr., 59, 88, 160, 192
 Hurst Hannum, 126
 Husaini Hasan, Dr., 5, 8, 18, 27, 29, 39, 40, 71, 99, 102
 Iboih, 31, 32
 Ibrahim Abdullah, 71, 89, 102, 103, 135, 156
 Ibrahim Alfian, 2, 4, 5, 71, 135, 156
 Ibrahim Bardan, Tgk. H., 59
 Ibrahim Hasan, 48, 96, 155
 Ibrahim Husen, MA., Prof. Dr., 60

Ibrahim Risyad, 80, 155
 Idi Rayeuk, 46, 47
 Idris Ahmad, Tgk., 27, 31, 41
 Ilyas Abed, 24
 Ilyas Cot Plieng, 18
 Ilyas Leube, 18, 20, 27, 32, 39
 Ilyas Nurdin, 5
 Imam Wahyudi, 172
 Imum Hamzah, 50
 Inggris, 8, 16, 17, 31, 94, 126, 151
 Insyafuddin, ulama, 60
 IPTR, 17, 28-32, 99, 145
 Ishak Daud, 47, 172, 173, 174
 Iskandar, 50, 56, 57, 66, 67, 71, 73, 78, 80, 85, 87, 95, 97, 99, 111, 129, 135, 140, 141, 154-156, 170, 185, 191
 Ismail Bardan, SH., 59
 Ismail Hasan Metareuem, SH., H., 58, 144
 Ismail Sahputra, 94
 Ismail Sunny, SH., Prof. Dr., 58, 80, 83
 Ismail Yakub, Drs. Tgk., 60
 Jakarta, 14, 16, 33, 37, 42, 48, 51, 58, 59, 63, 65-67, 79, 80, 95, 99, 102, 105, 110, 123, 129, 135, 144, 145, 150, 151, 154-156, 173, 181, 185, 189
 Jambo Aye, 53, 54, 115
 Javanese, 14, 15, 16, 38
 Jawa, 2, 16, 17, 23, 27, 29, 38, 46, 56, 151, 164
 Jeda Kemanusiaan, 9, 78, 105, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 125, 126, 131, 132, 134, 145, 159
 Jenewa, 9, 103, 104, 105, 110, 112, 113, 116, 125, 130, 150, 151, 160, 163, 164, 165, 166, 167
 Jepang, 1, 2, 3, 5
 Jeunieb, 38, 41, 57
 Jim Siegel, Prof., 49
 Jimly Assiddiqi, Dr., 83, 84
 Johan, T., 60
 Joint Understanding on Humanitarian Pause, 9, 105, 109, 110
 Julok, 46
 Jurang Cot Panglima, 54
 Jusuf Hanafiah, Prof. Dr. H.M., 80, 102, 103, 145
 Kaoy Syah, Drs., 80, 123, 154,
 Kelantan, 8
 Kirsten E. Schulze, 21
 Komnas HAM, 88, 89, 96, 98
 Kopassus, 22, 45, 47, 48
 Korem Lilawangsa, 59, 96
 Korem Teuku Umar, 59
 Krueng Geukueh, 55, 97
 Krueng Guci, 50
 Krueng Pase, 46
 Krueng Tuan, 46, 47
 Kuala Lumpur, 39, 50, 115, 183
 Kuala Tari, 13
 Kuta Makmur, 46, 47
 Kutaraja, 3
 Labuhan Haji, 7
 Langkahan, 39
 Langsa, 46, 50, 60, 172, 190
 Lhok Nibong, 54
 Lhok Nilam, 18, 19
 Lhok Sukon, 27, 31, 46, 54
 Lhokseumawe, 46, 47, 53, 55, 60, 69, 77, 92, 97, 120, 121, 140, 144, 172, 190
 Linggadiansyah, Ir., 50
 LNG, 8, 45, 47
 Lybia, 23, 41, 42, 43
 M. Saleh, 80, 183
 M-16, 47
 Malay, 15
 Malaysia, 8, 13, 23, 28, 37, 39, 40, 41, 42, 50, 103, 110, 115, 180, 190
 Malik bin Mahmud, 18
 Malik Mahmud, 8, 19, 21, 27, 166, 167, 174, 180, 188
 Maluku, 2, 10
 Mansur, Dr., 4
 Martti Ahtisaari, 78, 177, 178, 179, 180
 Martti Ahtisaari, Presiden Finlandia, 10
 Marzuki Djoened, SH., 57
 Matang Keusijuek, 50
 Matori Abdul Djilil, 67
 Mawardi Abdullah, SE., 57, 98
 Medan, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 57, 59, 80, 82, 92, 99, 102, 103, 110, 140, 141, 145, 146, 172, 183
 Medan Area, 4
 Megawati, 9, 78, 133, 139, 154, 171
 Mesjid Baitul Rahman, 9
 Metareuem, 37
 Meulaboh, 3
 Mexico, 80, 154
 Mobil Oil, 8, 22, 53
 moratorium, 126, 128, 129, 131
 MoU Helsinki, 1, 10, 181, 189, 191, 192, 195, 196, 204, 210
 MP GAM, 8, 29, 99, 115, 145
 Muara Batu, 47, 115
 Muchtar Azis, Dr., 57, 67
 Muchtar Hasbi, Dr., 18
 Muchtar Yahya Hasbi, 5
 Muda Wali, Tgk. H., 7
 Muhammad Daud Husen, 13
 mukim, 22
 Mulkan, 47
 Munir, SH., 59, 173
 Munzir, 5
 Musanna, 50
 Mustafa Abubakar, Ir., 58, 63, 80, 99, 129, 156
 Mustafa Jalil, 40
 Muzakkir Manaf, 21, 41

Muzakkir Walad, 80
 Nadi, T., 68
 Nagasaki, 1
 nanggrou, 21, 56, 115
 Nasar, 121
 Nashiruddin Daud, Tgk., 57, 95
 Nederlands Indie, 2
 Negara Islam Aceh, 17, 19
 New York, 14, 26, 40, 57, 65, 71, 180
 Nezar Patria, 173
 NKRI, 64, 84, 135, 136, 143, 159, 174, 175, 186
 NLFAS, 6
 Norwegia, 21
 Nur Gaybita, Ir. H., 57, 135, 156
 Nur Mahmudi Ismail, 67
 Nur Nikmat, M., 59, 99, 102, 103, 145, 146
 Nurcholis Madjid, 155
 Nurdahri Ibrahim, Hji., 80, 98
 Nurdin Abdurrahman, 5
 Nurdin AR, 47
 Nusa Tenggara, 2
 Operasi Cinta Damai, 55
 Operasi Cinta Meunasah, 55, 115
 Operasi Jaring Merah, 48, 49, 55, 77
 Operasi Nanggala, 45, 47
 Operasi Sadar Rencong, 55
 Operasi Satgas Wibawa 1999, 55
 Otto Syamsuddin, 60, 104
 Padang, 146
 panglima nanggrou, 21
 Panglima Pase, 47
 Pantan Labu, 39, 59
 Papua, 2, 43
 Pasi Lhok, 13
 Pearl Harbour, 1
 Pesantren Darussalam, 7
 Peudada, 46, 47, 55
 Peukan Baro, 46
 Peureulak, 41, 47, 53, 55
 Pidie, 13, 17, 19, 22, 24, 25, 31, 37, 46, 50, 53, 56,
 89, 102, 110, 119, 121, 190
 Pintu Rimba, 46
 PPRM, 55
 Pramono, Pangdam Mayjen., 59, 96
 PT Gruti, 46
 Pulau Tiga, 41
 Pulau Weh, 2
 Pusong, 120
 Radhi Darmansyah, 60, 71
 Radhy Darmansyah, 66
 Rambung Lup, 46
 Ramly Ganie, Drs. H., 57
 Rasyid Mahmud, 18
 Referendum, 9, 64, 65, 66, 70, 72, 102
 Reformasi, 60, 65, 66, 67, 71, 95
 Richard Barber, 7, 8, 68
 Rivai Harahap, Letjen, 80, 83
 Robert, 45, 46, 47, 115
 Robert S. Gelbart, 20
 Sabang, 2, 4
 sagou, 22, 52
 Said Mustafa, H., 57, 99
 Said Umar Husin, Drs. H., 57, 135, 156
 Said Zainal Abidin, Dr., 57, 123
 Said, T. M., 50, 57, 99, 123, 135, 156, 183
 Saiman, 38, 40, 103
 Salim, SH., M., 58, 89
 Satya Dharma, 49
 Sayed Mudhahar Ahmad, SH., Drs., 57, 71
 SBY, 9, 10, 150, 160, 164, 166, 177, 178
 Sekutu, 1, 2, 4, 5
self-government, 10, 183, 186
 Seulawah-01, 4
 Seureuke, 53, 54
 sibak rukok treuk, 40
 Sibolangit, 57
 Sigli, 60, 190
 Simpang KKA, 55, 89
 Simpang Ulim, 46, 53
 Singapura, 40, 41, 42, 150, 151, 153, 190
 Singkil, 7
 SIRA, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 102, 103, 121, 132,
 145
 Siswono Yudohusodo, 111
 Snouck Horgronje, 76
 Soeharto, Presiden, 59, 77, 84
 Soekarno, 1, 3
 Sofian Efendi, Kol., 59
 Sofian Efendi, Mayor, 47
 SOMAKA, 60
 Stockholm, 39
 Stavanger, 21, 22
 Stockholm, 8, 151, 178, 182, 185
 Subic, 28
 Sudaryanto, Mayjen, 60
 Sudjono, Letkol., 90, 91, 92
 Sukamakmur, 53
 Sumatra, 2, 4, 5, 8
 Sungai Arakundou, 54

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Drs. ANWAR DAUD, M.Hum lahir di Meunasah Reueng-Reueng, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Aceh, pada 25 April 1964. Jalur pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah: (1) MIN Panton Labu, Aceh Utara; (2) 4 tahun di PGA Pase, Panton Labu, Aceh Utara; (3) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Panton Labu, Aceh Utara; (4) Sarjana (S1) di Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, dengan judul skripsi: *Islam di Andalusia: Studi tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan*; (5) meraih gelar Magister Humaniora (S2) di Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan program studi sejarah. Judul tesisnya adalah: *Banda Aceh: Dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial*; (6) Sedang gelar doktoralnya (S3) diperoleh di universitas yang sama. Kini beliau menjabat sebagai dosen tetap di Jurusan Sejarah, Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan pangkat lektor. Selain menjabat sebagai asisten dekan Bidang Administrasi Umum (PDU) Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry untuk periode 2004-2008.

Penelitian yang pernah dilakukannya adalah: (1) *Transformasi Nelayan Tradisional: Studi Kasus di Kecamatan Susoh dan Sawang Aceh Selatan*; (2) *Peralihan Sistem Suksesi pada Masa Muawiyah Bin Abi Sufyan*; (3) *Konsistensi Pesantren Salafiah dalam Menghadapi Perubahan Sosial: Studi Kasus pada Pesantren Condromowo, Ponorogo, Magetan, Jawa Timur*; (4) "Abu Abdullah Umar Lam U Sosok Ulama-Sastrawan Aceh", dalam buku *Imam Masjid Raya Baiturrahman dalam Lintasan Sejarah*; (5) "Teungku Muhammad Saleh (Abu Lambhuk)" dalam buku: *Imam Masjid Raya Baiturrahman Dalam Lintasan Sejarah*; (6) *Kuta Dalam Daruddunia: Sebuah Rekonstruksi Historis tentang Struktur Istana Kesultanan Aceh Darussalam*; (7) "Metodologi Sejarah", dalam *Jurnal Adabiya*; (8) "Eks-planasi dalam Studi Sejarah", dalam *Jurnal Adabiya*; (9) *Metode Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*; (10) *Melacak Akar Keterlibatan ABRI dalam Politik dan Ekonomi Indonesia*; (11) *Banda Aceh: Dari Ibu Kota Kerajaan Aceh Darussalam Sampai*

Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Aceh; (12) Teori Defusi Kebudayaan Franz-Boas; (13) Kesenian Tradisional Subetnik Aceh: Kodifikasi dan Inventarisasi Pasca-Tsunami; (14) Aceh Tanah Rencong: Bagian Perlawanan Rakyat Aceh Terhadap Kolonial Belanda; (15) Peristiwa Cumbok di Aceh.

Pelatihan yang pernah dilaluinya adalah: (1) Studi Purna Ulama (SPU) IAIN Ar-Raniry Banda Aceh; (2) Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala; (3) Pelatihan Bahasa Asing (Arab dan Inggris) pada Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Ar-Raniry; (4) Pelatihan Penelitian Tenaga Edukatif IAIN Ar-Raniry Banda Aceh; (5) Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Kualitatif di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; (6) Pelatihan Pembibitan Calon Peneliti Sosial Keagamaan; (7) BALITBANG Depertemen Agama di Jakarta.***

Drs. HUSAINI HUSDA, M.Pd lahir di Meugat Meh, Aceh pada 25 April 1964. Selain menjabat sebagai Ketua Jurusan Adab Sejarah dan Kebudayaan (ASK), lulusan Magister Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini juga merupakan lektor pada Fakultas/Jurusan Adab IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Ia sejak awal menekuni bidang sejarah, khusus-nya sejarah kebudayaan Islam.

Dan sampai sekarang masih banyak terlibat pada penelitian-penelitian ilmiah menyangkut bidangnya, yaitu sejarah budaya. Penelitian yang pernah ditekuninya di antaranya: (1) *Pelaksanaan Fungsi LKMD di Desa Miskin Parah: Studi Kasus di Kecamatan Meurah Mulia Aceh Utara*; (2) *Perang Cumbok di Aceh: Suatu Tinjauan terhadap Konflik Sosial*; (3) *Penelitian tentang Hasil Pemilu 1997*; (4) *Ketahanan Adat dan Budaya Nagan, Subkultur Religius*; (5) *Pemantauan tentang Pemilu Tahun 1999*; (6) *Kehidupan Keagamaan Anak Ulama: Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Aceh Barat*; (7) *Fathu Mekkah: Arti dan Pengaruhnya terhadap Konsolidasi Umat Islam*; (8) *Pemecatan Khalid bin Walid pada Masa Khalifah Umar bin Khaththab*; (9) *Syekh Siti Jenar: Sosok Walisongo yang Kontroversial*; (10) *Pendidikan Bernuansa Islami; Studi Kasus di SMU Se-Provinsi NAD*; (11) *Kreativitas Guru dalam Pena-naman Nilai Moral pada Pembelajaran SKI: Studi Kasus di MTsN Rukoh Banda Aceh*; (12) *Polemik Tokoh Tasawuf di Ke-sultanan Aceh Darussalam 1607-1641*; (13) *Pendidikan Ber-nuansa Islami di SMU Se-Kabupaten Nagan Raya: Aplikasi Qanun No. 23 Tahun 2002*; (14) *Strategi Pembelajaran ke Arah Profesional di Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry*; (15) *Format Pendidikan Antikorupsi di 15 UIN/IAIN Se-Indonesia.*

Selain itu, beberapa publikasi dari hasil penelitiannya di antaranya: (1) “Kiprah Ulama dalam Sejarah Percaturan Politik di Aceh” [*Adabiya*, No. 1, 1999]; (2) “Perang Cumbok: Klimaks Konflik Ulama-Uleebalang di Aceh” [*Adabiya*, No. 3, 2000]; (3) “Peranan PDRI dalam Menyelamatkan Kemerdekaan Republik Indonesia” [*Adabiya*, No. 8, 2003]; (4) “Peranan Walisongo dalam Proses Islamisasi di Indonesia Abad XV” [*Adabiya*, No. 9, 2003]; (5) “Gerakan Politik Umat Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru” [*Adabiya*, No. 13, 2005].

Buku *Peristiwa Cumbok di Aceh* yang ada di tangan pem-baca ini merupakan buku keempat selain tiga buku yang sudah diterbitkan sebelumnya, yaitu: *Metode Penelitian Sejarah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004); *Doktrin Islam dan Studi Kawasan: Potret Keberagaman Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005); *Konflik Aceh dari Masa ke Masa*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006). ***

Drs. Mawardi Umar, M. Hum. lahir di Teupin Bayu (Aceh Utara) pada 28 Maret 1968. Sejak masa pendidikan dasar sampai universitas (Strata-1), ia tuntaskan di Aceh sampai tahun 1992. Pada 2002 ia berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang

pasca sarjana (program master) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengambil Program Studi Sejarah. Belum lagi lulus menyelesaikan S-2, sejak 2003 ia sudah diangkat menjadi dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala, sampai saat ini.

Sebagai seorang mahasiswa sekaligus seorang dosen, laki-laki beristrikan **Furaida, S. Pd.** dan bapak berputra dua [**Rizki Wahidi** (7 Tahun) dan **Risna Isnanda** (4 Tahun)] ini banyak mengikuti berbagai pelatihan ilmiah seraya terlibat dan malang-melintang di beberapa penelitian yang dibiayai sendiri maupun dibiayai sponsor, diantaranya bertema “*Universitas Syiah Kuala : Suatu Kajian tentang Latar Belakang, Perkembangan dan Dampak terhadap Masyarakat*”, “*Pendidikan Barat dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Keagamaan di Aceh, 1900-1942*”, “*Kelompok Shamadiyah Pantan Labu Aceh Utara*”, “*Kaji Tindak Program IDT di Dua Desa Tertinggal Parah di Aceh Utara*”, “*Menyadap Getah untuk Onderneming : Dinamika Sosial Ekonomi Buruh Perkebunan Karet di Aceh Timur, 1907-1939*”, “*Peranan Pranata Lokal Masyarakat Aceh dalam Resolusi Konflik*”.

Di sela-sela kesibukannya, ia sekali-sekali menulis di jurnal/bulletin ilmiah antara lain *Mon Mata* dan *Warta Unsyiah* berjudul “Profil Kelompok Shamadiyah Pantan Labu” dan “Dari Kol. M. Yasin sampai Prof. Dr. Abdi A. Wahab, M. Sc.: 44 Tahun Universitas Syiah Kuala.”

Di samping itu, pada 2005 ia pernah menjadi pemakalah pada Seminar bertajuk “Getah dan Revolusi,” yang diadakan di Padang Sumatera Barat yang disponsori oleh Nederlands Indische voor Oorlog Documentatie.

Al Chaidar, SIP., lahir di Lhokseumawe, Aceh, 22 November 1969. Putra ke-4 pasangan **Abdurrahman Puteh** dan **Dawiyah** ini menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 1996 dengan skripsi berjudul *Diskursus Politik Islam Dalam Gerakan Darul Islam dan Moro National Liberation Front* dengan predikat memuaskan. Pengalamannya antara lain menjadi Redaksi Pelaksana dari Jurnal mahasiswa Ilmu Politik dan Sosial FISIP UI (1992-1994); Ketua Lingkaran Studi *Creative Minority* (LSCM) 1989-1993; Anggota *Indonesia Student Association for International Studies* (ISAFIS) 1990; Anggota editor pada Jurnal mahasiswa yang dikeluarkan oleh Jaringan Kekerabatan Antropologi se Indonesia; Anggota dari forum diskusi Majelis Sinergi Kalam (Masika) di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI); Peneliti pada *Studi Evaluasi P3DT* yang diadakan oleh Lembaga Pengkajian Pembangunan Nasional (LPPN) 1998; Melakukan penelitian mengenai *Jemaah Tabligh dan Depolitisasi Umat Islam di Aceh* dengan beasiswa dari The Toyota Foundation melalui Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS) 1998.

Semasa mahasiswa, penulis aktif di berbagai kegiatan di kampus. Dalam lingkup dunia akademis internasional, menjadi pembicara dengan paper berjudul *Indonesia and Japan: From a bitter past toward a better prospect* pada *The Third International Student Association of Japan* 1992; Melakukan studi awal mengenai masyarakat dan budaya Jepang (Tokyo, Kyoto, Osaka, Okayama, Kobe, Hiroshima dan Kyushu) 1992; Melakukan studi komparatif ke Malaysia dan Singapura dalam bentuk rangkaian diskusi mengenai isu-isu Politik dan Hak Asasi Manusia dengan mahasiswa di *University of Malaya* dan *National University of Singapore* 1992; Melakukan kunjungan balasan ke *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS) di Singapura dan membuat rencana penelitian mengenai Islam Nusantara 1992; Direktur proyek pada program diplomasi mahasiswa ke berbagai universitas di Inggris (*University of London*, *SOAS*, *London School of Economics and Political Science*), Jerman (*Hamburg University*) dan Ceko-slovakia (*Universitas Karlovi*).

Sejak remaja, penulis sudah aktif menulis di berbagai media massa maupun jurnal ilmiah; selain itu penterjemah buku karangan Jack Sowards yang berjudul *Hara-kiri, A Japanese Ritual Suicide* (*Hara-kiri, Bunuh diri Ala Jepang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994); Tim penulis buku *Beras, Koperasi dan Politik Orde Baru: 70 tahun Bustanil Arifin* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1995); Ko-editor buku *Pancaran Rahmat dari Arun* (Jakarta: PT Arun LNG, 1998); salah seorang penulis buku *Kematian Lady Diana*

Mengguncang Aqidah Umat Islam (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1997), *Reformasi Prematur: Jawaban Islam terhadap Reformasi Total* (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1998), *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status DOM di Aceh 1989-1998* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front* (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1999), buku *Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam vs Partai-partai Sekuler* (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1999), *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosoewirjo: Data dan Fakta Sejarah Darul Islam* (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1999). *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh* (Jakarta, Madani Press, 1999), *Mewujudkan Negara Islam Federasi atau Dis-Integrasi* (Jakarta, Madani Press, 2000), *Sepak Terjang KW9 Abu Toto Menyelewengkan NKA-NII Pasca S. M. Kartosoewirjo* (Jakarta, Madani Press, 2000), menjadi Ketua Umum Panitia Aksi Sejuta Ummat untuk Maluku-Halmahera, Monas, 7 Januari 2000.



